



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 2

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Pariwisata;
20. Dinas Perkebunan;
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

22. Dinas Kehutanan;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
30. Badan Kepegawaian Daerah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
33. Badan Penghubung Provinsi;
34. Inspektorat Daerah;
35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

RENJA TAHUN 2026
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunnya yaitu rencana Strategis (Renstra PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai yang setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Renja PD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan Rencana Kerja PD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Untuk itu perlu disusun Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029. Sehingga diharapkan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Pengertian Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD Tahun, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Renja PD Tahun 2026 disusun melalui 5 (lima) tahapan, yakni :

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir dan
6. Penetapan

Kelima tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara ke seluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
3. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Tahap berikutnya adalah Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Tahap berikutnya adalah Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematis.

Tahap berikutnya adalah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima.

Tahap berikutnya Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Tahapan berikutnya Penetapan Renja Perangkat Daerah, Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika, rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 – 2029;
29. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, terhadap Renstra Satuan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029, sehingga ada keterkaitan dan kesinambungan dari segi program dan kegiatannya.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah untuk melaksanakan amanat Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah telah mengikuti aturan yang berlaku yaitu sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematikanya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

Bab V : Penutup

Berisikan uraian penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKDIKUD TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2024-2026

Instansi Pemerintah diharapkan dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalannya secara lebih luas dan mendalam, maka diharapkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja unit organisasi secara ke seluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat; dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya

Sebagaimana telah diuraikan di atas dari sasaran yang ada dengan indikator kinerjanya, semuanya telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Begitu juga dengan pencapaian kinerja kegiatan tahun 2024 berjumlah sebanyak 56 kegiatan dan 9 program semuanya juga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, walaupun ada target program dan kegiatan yang belum maksimal adalah hal yang masih wajar.

Pembahasan Sasaran dalam analisis pencapaian kinerja lebih diarahkan pada sasaran utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur terutama pada target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 selanjutnya dituangkan dalam Renstra PD Tahun 2025-2029 serta renja PD Tahun 2026.

Pada umumnya realisasi capaian kinerja utama pada tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang baik. Untuk lebih jelasnya maka diuraikan sebagai berikut:

2.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU).

Untuk pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi *core area/business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja diperoleh capaian indikator kinerja terhadap sasaran selama Tahun 2024 cukup baik, tercermin pada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi.

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2025- 2029 adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini ;

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
1.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	90 Indeks	90 Indeks	100 %	91,5 Indeks	91,5 Indeks	100%
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100%	-	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	-	80,6 %	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		Dokuman Perencanaan	-	100 %	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Pengadaan Peralatan TIK	-	0 Paket	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	239 Dokumen	239 Dokumen	239 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	239 Dokumen	239 Dokumen	239 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	239 Dokumen	239 Dokumen	239 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	10 Dokumen	239 Dokumen	239 Dokumen	239 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perubahan DPA-SKPD								
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	239 Dokumen	239 Dokumen	239 Dokumen	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	239 Dokumen	239 Dokumen	239 Dokumen	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
1.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	-	12 Bulan	-	-	-	-		
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7551 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	100%	8868 Orang/ Bulan	8868 Orang/ Bulan	100%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pelaksanaan Tugas ASN								
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	8 Laporan	8 Laporan	100%
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	25 Dokumen	50%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul	243 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	243 Laporan	243 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		anan/Semestera n SKPD								
1.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	-	100	100	100	100 %	100 %	100%
		Laporan Data Aset	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	-	-	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	243 Laporan	12 Laporan	12	12	100	243 Laporan	243 Laporan	100%
1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	243 Dokumen	-	-	-	-	243 Dokumen	243 Dokumen	100%
1.01.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.05		Jumlah SDM Aparatur yang	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	memiliki sertifikat kompetensi								
		Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kerja Pegawai	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	-	220 Paket	220 Paket	100%	210 Paket	210 Paket	100%
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	50 Orang	1000 Orang	1000 Orang	100%	732 Orang	732 Orang	100%
1.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5000 Orang	5000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	100%	5000 Orang	5000 Orang	100%
1.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	12 Bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	-	12 Paket	12 Paket	0 Paket	0%	-	-	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		an Bangunan Kantor yang Disediakan								
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	500 Paket	500 Paket	370 Paket	74%	8 Paket	8 Paket	100%
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket	12 Paket	0 Paket	0%	-	-	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	-	-	-	-	500 Dokumen	500 Dokumen	100%
1.01.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	11 Unit	75 Unit	108 Unit	40 Unit	37,04%	11 Unit	11 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		atau Lapangan yang Disediakan								
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	10 Paket	10 Paket	6 Paket	60%	1 Paket	1 Paket	100%
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	5 Unit	20 Unit	29 Unit	145%	36 Unit	36 Unit	100%
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	15 Unit	7 Unit	46,67%	8 Unit	8 Unit	100%
1.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10 Laporan	83,33%	2 Laporan	2 Laporan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10 Laporan	83,33%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	8 Laporan	8 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%
1.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	12 Bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	75 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	-	39 Unit	36 Unit	92,31%	56 Unit	56 Unit	100%
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2 Unit	2 Unit	4 Unit	200%	2 Unit	2 Unit	100%
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	-	-	-
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Ditingkatkan Pelayanannya Berbasis Industri	21 Unit Kerja	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	-	-	-	-	14 Unit Kerja	14 Unit Kerja	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	-	-	100 %	81,5 %	81,5 %	-	-	100%
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	-	100 %	53,57 %	53,57 %	-	-	100%
		Indeks Inklusivitas	70%	-	88,48 %	66,17%	74,79%	-	-	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		SMA, SMK dan Pendidikan Khusus								
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	73,74%	-	87,49 %	75,12%	85,86%	-	-	100%
		Indeks Kebhinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,56%	-	94,87 %	73,11%	77,07%	-	-	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,77%	-	67,69 %	78,52%	116,00%	-	-	100%
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	81,23%	-	60,34 %	69,22%	114,72%	-	-	100%
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	85,10%	-	79 %	81,63%	103,33%	-	-	100%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92,82%	-	94 %	88,2%	93,83%	-	-	100%
		Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	-	86,3 %	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.01	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	Angka Kelulusan SMA	100%	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	100 %	99,1%	99,1%	63,08%	63,08%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	100 %	72,61 %	72,61 %	65,43%	65,43%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMA	86,13%	-	89,98 %	73,05%	81,18%	73,88%	73,88%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	81%	-	99,27 %	72,88%	73,42%	77,90%	77,90%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA	67,18%	-	85,51 %	61,58%	72,01%	83,64%	83,64%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	83,64%	-	73,27 %	77,3%	105,50%	77.90%	77.90%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	74,46%	-	58,88 %	63,83%	108,41%	65.43%	65.43%	100%
		Jumlah Laporan Kegiatan		30 Laporan	-	-	-			100%
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	4 Unit	4 Unit	1 Unit	25%	3 Unit	3 Unit	100%
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	16 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	8 Ruang	4 Ruang	17 Ruang	425%	5 Ruang	5 Ruang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	-	10 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	-	17 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	-	12 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	-	6 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	-	0 Sekolah	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	11 Ruang	7 Ruang	14 Ruang	200%	3 Ruang	3 Ruang	100%
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	0 Sekolah	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	46 Unit	10 Unit	90 Unit	900%	37 Unit	37 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	6 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	11 Ruang	17 Ruang	10 Ruang	58,82%	2 Ruang	2 Ruang	100%
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	4 Ruang	8 Ruang	200%	2 Ruang	2 Ruang	100%
1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Sekolah	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0 Sekolah	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	2 Sekolah	2 Ruang	1 Ruang	50%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0 Sekolah	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Sekolah	4 Ruang	1 Ruang	25%	1 Ruang	1 Ruang	100%
1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	-	0 Sekolah	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Akan Direhabilitasi	-	38 Sekolah	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	-	0 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	6 Unit	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang Telah Di Rehabilitasi								
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	13 Paket	19 Paket	70 Paket	138 Paket	197,14%	4 Paket	4 Paket	100%
1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	3 Paket	-	50 Paket	76 Paket	152%	34228 Paket	34228 Paket	100%
1.01.02.1.01.40	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	3 Unit	-	15 Unit	2 Unit	13,33%	-	-	-
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	-	100 Paket	122 Paket	122%	8 Paket	8 Paket	100%
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta didik	76871 Peserta didik	76871 Peserta didik	36703 Pesertadidik	47,75%	20000 Peserta didik	20000 Peserta didik	100%
1.01.02.1.01.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	23 Paket	219 Paket	545 Paket	248,86%	-	-	-
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan ANBK	-	210 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan	-	233 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Ujian Satuan Pendidikan								
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		233 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	4200 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	6004 Peserta Didik	120,08%	5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	200 Orang	-	3800 Orang	5924 Orang	155,89%	160 Orang	160 Orang	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	450 Orang	1000 Orang	500 Orang	500 Orang	100%	660 Orang	660 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kompetensi dan Kualifikasi								
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	232 Satuan Pendidikan	145 Satuan Pendidikan	145 Satuan Pendidikan	100%	145 Satuan Pendidikan	145 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	83045 Satuan Pendidikan	229 Satuan Pendidikan	145 Satuan Pendidikan	145 Satuan Pendidikan	100%	145 Satuan Pendidikan	145 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2273 Orang	2000 Orang	235 Orang	2273 Orang	967,23%	2273 Orang	2273 Orang	100%
1.01.02.1.01.57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	500 Orang	95 Orang	19%	-	-	-
1.01.02.1.01.58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	-	100 Konten Digital	0 Konten Digital	0%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.01.59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	-	300 Orang	0 Orang	0%	-	-	-
1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	-	10 Dokumen	8 Dokumen	80%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
1.01.02.1.01.61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	-	100 Dokumen	0 Dokumen	0%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
1.01.02.1.01.63	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	-	-	-	-	22 Komunitas	22 Komunitas	100%
1.01.02.1.01.65	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	3 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kekerasan, dan intoleransi								
1.01.02.1.01.66	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	20000 Buku	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.67	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	-	8 Unit	0 Unit	0%	2 Unit	2 Unit	100%
1.01.02.1.01.68	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Unit	-	8 Unit	17 Unit	212,50%	8 Unit	8 Unit	100%
1.01.02.1.01.69	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.02.1.01.70	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	-	45 Ruang	64 Ruang	142,22%	20 Ruang	20 Ruang	100%
1.01.02.1.01.71	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	-	3 Ruang	3 Ruang	100%	2 Ruang	2 Ruang	100%
1.01.02.1.01.72	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	-	100 Ruang	76 Ruang	76%	20 Ruang	20 Ruang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.01.73	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	1 Unit	-	4 Unit	1 Unit	25%	2 Unit	2 Unit	100%
1.01.02.1.01.75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, da-tau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, da-tau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	600 Orang	-	-	-	-	443 Orang	443 Orang	100%
1.01.02.1.01.78	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	244 Satuan Pendidikan	-	235 Satuan Pendidikan	237 Satuan Pendidikan	100%	236 Satuan Pendidikan	236 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.02	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	Angka Kelulusan SMK	100%	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	100 %	99,1%	99,1%	-	-	-
		APM SMA/SMK	100%	-	100 %	72,61 %	72,61 %	61%	61%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMK	84.25 %	-	82,1 %	70,09%	85,37%	62,44%	62,44%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	77.46 %	-	71,48 %	70,09%	98,06%	71,29%	71,29%	100%
		Indeks Inklusivitas SMK	63.75 %	-	59,91 %	58,66%	97,91%	73,68%	73,68%	100%
		Jumlah siswa yang	25000 Orang	-	25000 orang	23129 orang	92,52%	25000 orang	25000 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		tersertifikasi oleh Lembaga Profesi								
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	78.54 %	-	69,31 %	72,38%	104,43%	73.68%	73.68%	100%
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	70.38 %	-	56,66 %	60,24%	106,32%	62.44%	62.44%	100%
		Jumlah Laporan Kegiatan	-	20 Laporan	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	14 Sekolah	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	-	-	-	-	20 Ruang	20 Ruang	100%
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	8 Ruang	14 Sekolah	33 Ruang	32 Ruang	96,97%	13 Ruang	13 Ruang	100%
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	54 Ruang	20 Ruang	1 Ruang	52 Ruang	5,200.00 %	18 Ruang	18 Ruang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	10 Ruang	1 Ruang	13 Ruang	1,300.00 %	22 Ruang	22 Ruang	100%
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	6 Ruang	1 Ruang	5 Ruang	500%	6 Ruang	6 Ruang	100%
1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	100%
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	42 Ruang	43 Unit	70 Unit	162,79%	47 Unit	47 Unit	100%
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	0 Ruang	-	-	-	21 Ruang	21 Ruang	100%
1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	-	1 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	0 Ruang	0%	10 Ruang	10 Ruang	100%
1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	-	9 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	30 Paket	33 Paket	44 Paket	44 Paket	100%	30 Paket	30 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	-	1 Paket	0 Paket	0%	29963 Paket	29963 Paket	100%
1.01.02.1.02.32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Unit	-	19 Unit	0 Unit	0%	7 Unit	7 Unit	100%
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	30 Paket	97 Paket	150 Paket	149 Paket	99,33%	27 Paket	27 Paket	100%
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	78,456 Peserta didik	100 Peserta didik	0 Pesertadidik	0%	17968 Peserta didik	17968 Peserta didik	100%
1.01.02.1.02.38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	100%
1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	-	221 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan	-	0 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Melaksanakan Rekomendasi								
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	25000 Peserta Didik	23129 Peserta Didik	92,52%	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	200 Orang	-	3100 Orang	3601 Orang	116,16%	240 Orang	240 Orang	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650 Orang	1200 Orang	1000 Orang	600 Orang	60%	807 Orang	807 Orang	100%
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan	217 Satuan Pendidikan	-	120 Satuan Pendidikan	127 Satuan Pendidikan	105,83%	120 Satuan Pendidikan	120 Satuan Pendidikan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen								
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	83701 Satuan Pendidikan	221 Satuan Pendidikan	87 Satuan Pendidikan	87 Satuan Pendidikan	100%	87 Satuan Pendidikan	87 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2172 Orang	2200 Orang	221 Orang	2375 Orang	1074,66%	2172 Orang	2172 Orang	100%
1.01.02.1.02.50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	400 Orang	150 Orang	37,50%	-	-	-
1.01.02.1.02.51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	-	80 Konten Digital	60 Konten Digital	75%	-	-	-
1.01.02.1.02.52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang	-	-	100 Orang	240 Orang	240%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		pendidikan yang dilaksanakan								
1.01.02.1.02.53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	-	87 Dokumen	1 Dokumen	1,15%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.01.02.1.02.54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	-	100 Dokumen	1 Dokumen	1%	1000 Orang	1000 Orang	100%
1.01.02.1.02.56	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	100 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.02.57	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.02.59	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.02.60	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	25000 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.02.61	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	4400 Buku	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.02.62	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Unit	-	27 Unit	24 Unit	88,89%	35 Unit	35 Unit	100%
1.01.02.1.02.63	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	-	0 Ruang	0 Ruang	0%	22 Ruang	22 Ruang	100%
1.01.02.1.02.64	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	-	17 Ruang	16 Ruang	94,12%	84 Ruang	84 Ruang	100%
1.01.02.1.02.69	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang	-	4 Ruang	4 Ruang	100%	117 Ruang	117 Ruang	100%
1.01.02.1.02.72	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	218 Satuan Pendidikan	-	219 Satuan Pendidikan	217 Satuan Pendidikan	99,09%	217 Satuan Pendidikan	217 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03.73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, da-tau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, da-	250 Orang	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	tau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan								
1.01.02.1.03	PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	Angka Kelulusan SLB	100%	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		APK SLB	100%	-	100 %	79,25 %	79,25 %	71%	71%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	84,89%	-	81,73 %	80,54%	98,54%	71,40%	71,40%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	82,92%	-	80,29 %	76,5%	95,28%	73,07%	73,07%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	87,33%	-	82,62 %	75,43%	91,30%	73,46%	73,46%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	80%	-	77,21 %	72,46%	93,85%	74,80%	74,80%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	76%	-	73,68 %	77 %	104,51%	74,94%	74,94%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	79,56%	-	72,39 %	73,14%	101,04%	75,53%	75,53%	100%
		Indeks Inklusivitas SDLB	70,25%	-	67,87 %	69,54%	102,46%	76,63%	76,63%	100%
		Indeks Inklusivitas SMALB	77%	-	77,36 %	71,08%	91,88%	77,80%	77,80%	100%
		Indeks Inklusivitas SMPLB	74,49%	-	68,74 %	70 %	101,83%	79,00%	79,00%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional,	78,54%	-	66,96 %	80,09%	119,61%	81,04%	81,04%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	67,44%	-	65,12 %	81,95%	125,84%	81,38%	81,38%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	84,66%	-	72,56 %	80,88%	111,47%	81,69%	81,69%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	71,40%	-	69,61 %	74,93%	107,64%	82,45%	82,45%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional,	64,74%	-	58,49 %	72,57%	124,07%	73.07%	73.07%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan	87,72%	-	64,54 %	74,55%	115,51%	74.80%	74.80%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Asesmen Nasional,								
		Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa		86,47 %	-	-	-	-	-	
1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah		11 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.07	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	4 Unit	13 Unit	8 Unit	61,54%	7 Unit	7 Unit	100%
1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	-	3 Unit	5 Unit	2 Unit	40%	0 Unit	0 Unit	100%
1.01.02.1.03.14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	-	-	-	-	-	4 Ruang	4 Ruang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang Telah Dibangun								
1.01.02.1.03.15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	4 Ruang	4 Ruang	100%
1.01.02.1.03.16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	4 Ruang	4 Ruang	100%
1.01.02.1.03.17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	5 Ruang	5 Ruang	100%
1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	-	0 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	-	0 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	-	0 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang	-	0 Ruang	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Telah Direhabilitasi								
1.01.02.1.03.23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	-	10 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	-	10 Sekolah	15 Ruang	0 Ruang	0%	-	-	-
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	640 Paket	-	15 Paket	4 Paket	26,67%	2 Paket	2 Paket	100%
1.01.02.1.03.36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	40 Paket	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	610 Paket	-	10 Paket	1 Paket	10%	813 Paket	813 Paket	100%
1.01.02.1.03.39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	12 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	9 Paket	10 Paket	5 Paket	1 Paket	20%	4 Paket	4 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	0 Peserta Didik	2581 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0%	395 Peserta Didik	395 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	-	100 Paket	3 Paket	3%	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	1200 Orang	1000 Peserta Didik	1300 Peserta Didik	130%	200 Orang	200 Orang	100%
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	180 Orang	-	240 Orang	403 Orang	167,92%	200 Orang	200 Orang	100%
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi,	150 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	200 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi								
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35 Satuan Pendidikan	-	10 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	340%	119 Satuan Pendidikan	119 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	3458 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	100%	11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	250 Orang	-	34 Orang	184 Orang	541,18%	200 Orang	200 Orang	100%
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	-	300 Orang	50 Orang	196 Orang	392%	-	-	-
1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan	140 Orang	-	50 Konten Digital	196 Konten Digital	392%	130 Orang	130 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
1.01.02.1.03.57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	-	-	-	-	3 Konten Digital	3 Konten Digital	100%
1.01.02.1.03.58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	65 Orang	-	80 Orang	183 Orang	228,75%	65 Orang	65 Orang	100%
1.01.02.1.03.59	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	22 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	-	11 Dokumen	3 Dokumen	27,27%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.01.02.1.03.65	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki	70 Orang	-	-	-	-	70 Orang	70 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		sertifikasi kompetensi								
1.01.02.1.03.66	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.01.02.1.03.67	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.69	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	-	17 Unit	9 Unit	52,94%	4 Unit	4 Unit	100%
1.01.02.1.03.70	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	95 Ruang	-	36 Ruang	20 Ruang	55,56%	20 Ruang	20 Ruang	100%
1.01.02.1.03.71	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	35 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03.73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, da-tau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, da-tau Magang/PKL untuk	150 Orang	-	-	-	-	195 Orang	195 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan								
1.01.02.1.03.74	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.77	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.79	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	51 Ruang	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.81	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	22 Komunitas	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.83	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1260 Buku	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.84	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak	23 Ruang	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun								
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	86 %	90 %	90 %	100 %	95 %	95 %	100%
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	25 Orang	70 Orang	219 Orang	18 Orang	8,22%	22 Orang	22 Orang	100%
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	-	120 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Dual Track	-	20 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Satuan Pendidikan	-	20 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pelaksana IKM Mandiri								
1.01.03.1.01.06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	6 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.01.03.1.01.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	86 %	90 %	90 %	100 %	-	-	100%
1.01.03.1.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Meningkatnya Kompetensi Guru Pendidikan Khusus Dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan Khusus Kepada Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus (Abk)	-	378 GURU	-	-	-	-	-	-
1.01.03.1.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan	2 Dokumen	-	12 Dokumen	2 Dokumen	16,67%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Khusus yang Tersusun								
		Meningkatnya Kompetensi Kepala Sekolah SLB dan SMA/SMK Penyelenggara Pendidikan Inklusi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Khusus Di Provinsi Kalimantan Timur	-	54 GURU	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Kompetensi Guru SLB dan SMA/SMK Penyelenggara Pendidikan Inklusi Dalam Memberikan Layanan Pendidikan Khusus Di Provinsi Kalimantan Timur	-	54 GURU	-	-	-	-	-	-
1.01.03.1.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	8 Buku	-	-	-	-	420 Buku	420 Buku	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.03.1.02.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	280 Orang	-	70 Orang	260 Orang	371,43%	240 Orang	240 Orang	100%
1.01.03.1.02.05	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	4 Buku	-	-	-	-	12 Buku	12 Buku	100%
1.01.03.1.02.06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	5 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.01.03.1.02.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100 %	99,4 %	100 %	99,69 %	99,69 %	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.04.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	-	100 %	99,69 %	99,69 %	100 %	100 %	100%
		Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	-	99,4 %	-	-	-	-	-	-
1.01.04.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	500 Dokumen	-	25 Dokumen	12 Dokumen	48%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.04.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan	550 Laporan	10 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pendidikan Khusus								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			-						
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	88 %	88 %	86 %	86 %	100 %	-	-	100%
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	70%	-	60 %	60 %	100 %	-	-	100%
		Jumlah Pelestari yang diapresiasi	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kesenian tradisional yang dilestarikan	80%	60 %	-	-	-	-	-	-
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	-	10 Dokumen	-	-	-	-	-	100%
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	-	5 Objek	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Siswa/Guru/Masyarakat yang mengikuti Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	-	280 Orang	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Objek Pemajuan	-	0 Objek	50 Objek	50 Objek	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan								
2.22.02.1.01.10	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	20 Objek	-	-	-	-	-	-	-
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	80 %	-	70 %	70 %	100 %	75 %	75 %	100%
		Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian tradisional	-	70 %	-	-	-	-	-	-
2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan.	100 Sertifikat	10 Orang	66	66	100	105 Sertifikat	105 Sertifikat	100%
		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	-	0 Sertifikat	116 Sertifikat	11 Sertifikat	9,48%	-	-	-
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Lembaga Kesenian yang di tingkatkan Kapasitasnya	68 %	-	65 %	65 %	100 %	71 %	71 %	100%
		Persentase Kesenian		70 %	66 %	66 %	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tradisional yang dikembangkan								
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan	75 %	-	70 %	70 %	100 %	70%	70%	100%
		Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian tradisional	80%	70 %	-	-	-	75%	75%	100%
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	200 Orang	500 Orang	400 Orang	400 Orang	100%	400 Orang	400 Orang	100%
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	0 Sertifikat	50 Sertifikat	50 Sertifikat	100%	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100%
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	35 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100%	10 Lembaga	10 Lembaga	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	80 %	80 %	77 %	77 %	100 %	78,5 %	78,5 %	100%
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	85 %	-	75 %	75 %	100 %	80 %	80 %	100%
		Presentase jumlah sejarah lokal yang dibina	-	70 %	-	-	-	-	-	-
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Data/Dokumen yang dapat diakses masyarakat	-	20 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	10 Dokumen	0 Dokumen	100 Dokumen	58 Dokumen	58%	100 Dokumen	100 Dokumen	100%
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	65%	65 %	-	-	-	63,5	63,5	100%
		Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan			62 %	62 %	100 %			
		Persentase Pelestarian Cagar Budaya	-	-				37%	37%	100%
		Jumlah pelestarian	40 OPK	-				OPK	OPK	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Objek Pemajuan Kebudayaan								
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	80 %	70 %	70 %	70 %	100 %	75 %	75 %	100%
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	5 Objek	5 Objek	12 Objek	13 Objek	108,33%	5 Objek	5 Objek	100%
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	65 %	70 %	55 %	55 %	100 %	60 %	60 %	100%
2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya		140 Orang						
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	12 Objek	0 Objek	40 Objek	10 Objek	25%	40 Objek	40 Objek	100%
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	-	150 Orang	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Di tingkatkan Kapasitasnya	200 Orang	0 Orang	220 Orang	135 Orang	61,36%	140 Orang	140 Orang	100%
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	50 %	65 %	47 %	47 %	100 %	66 %	66 %	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	53 %	-	47 %	47 %	100 %	50 %	50 %	100%
		Persentase Pengelolaan Museum Provinsi	-	70 %	-	-	-	-	-	-
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	4 Museum	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.2.22.0.00.01.0005	Dinas Pendidikan Wilayah I									
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		80,6 %	-	-	-			
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	90 Indeks	90 Indeks	100%	91,50 Indeks	91,50 Indeks	100%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		keuangan tepat waktu								
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kerja Pegawai	-	0 Bulan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	-	-	-	2 Paket	2 Paket	100%
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
1.01.01.1.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	-	-	-	-	7 Paket	7 Paket	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1 Laporan	227 Laporan	227 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan	-	34 Unit	85 Unit	85 Unit	-	100 %	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	130 Laporan	130 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	-	10 Unit	15 Unit	15 Unit	100 %	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya								
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	-	-	-	-	15 Unit	15 Unit	100%
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	-	-	-	-	80 Unit	80 Unit	100%
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100%
1.01.02.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	-	-	100 %	81,5 %	81,5 %	-	-	100%
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	-	100 %	53,57 %	53,57 %	-	-	100%
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan	70%	-	88,48 %	66,17%	74,79%	-	-	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pendidikan Khusus								
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	73,74%	-	87,49 %	75,12%	85,86%	-	-	100%
		Indeks Kebhinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,56%	-	94,87 %	73,11%	77,07%	-	-	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,77%	-	67,69 %	78,52%	116,00%	-	-	100%
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	81,23%	-	60,34 %	69,22%	114,72%	-	-	100%
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	85,10%	-	79 %	81,63%	103,33%	-	-	100%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92,82%	-	94 %	88,2%	93,83%	-	-	100%
		Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	-	86,3 %	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		APK SMA/SMK	100%	-	100 %	99,1%	99,1%	63,08%	63,08%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	100 %	72,61 %	72,61 %	65,43%	65,43%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMA	86,13%	-	89,98 %	73,05%	81,18%	73,88%	73,88%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	81%	-	99,27 %	72,88%	73,42%	77,90%	77,90%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA	67,18%	-	85,51 %	61,58%	72,01%	83,64%	83,64%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	83,64%	-	73,27 %	77,3%	105,50%	77.90%	77.90%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	74,46%	-	58,88 %	63,83%	108,41%	65.43%	65.43%	100%
1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13856 Peserta didik	-	-	-	-	13856 Peserta didik	13856 Peserta didik	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomb	3840 Peserta Didik	-	192 Peserta Didik	192 Peserta Didik	100%	3840 Peserta Didik	3840 Peserta Didik	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		a Akademik dan Non Akademik								
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	340 Orang	-	200 Orang	200 Orang	100%	340 Orang	340 Orang	100%
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	100 %	99,1%	99,1%	-	-	-
		APM SMA/SMK	100%	-	100 %	72,61 %	72,61 %	61%	61%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMK	84.25 %	-	82,1 %	70,09%	85,37%	62,44%	62,44%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	77.46 %	-	71,48 %	70,09%	98,06%	71,29%	71,29%	100%
		Indeks Inklusivitas SMK	63.75 %	-	59,91 %	58,66%	97,91%	73,68%	73,68%	100%
		Jumlah siswa yang	25000 Orang	-	25000 orang	23129 orang	92,52%	25000 orang	25000 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		tersertifikasi oleh Lembaga Profesi								
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	78.54 %	-	69,31 %	72,38%	104,43%	73.68%	73.68%	100%
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	70.38 %	-	56,66 %	60,24%	106,32%	62.44%	62.44%	100%
		Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	100 %	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12956 Peserta didik	-	-	-	-	12956 Peserta didik	12956 Peserta didik	100%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	4960 Peserta Didik	250 Peserta Didik	258 Peserta Didik	258 Peserta Didik	100%	4960 Peserta Didik	4960 Peserta Didik	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik								
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	340 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	340 Orang	340 Orang	100%
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB	100%	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		APK SLB	100%	-	100 %	79,25 %	79,25 %	71%	71%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	84,89%	-	81,73 %	80,54%	98,54%	71,40%	71,40%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	82,92%	-	80,29 %	76,5%	95,28%	73,07%	73,07%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMPLE	87,33%	-	82,62 %	75,43%	91,30%	73,46%	73,46%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	80%	-	77,21 %	72,46%	93,85%	74,80%	74,80%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	76%	-	73,68 %	77 %	104,51%	74,94%	74,94%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	79,56%	-	72,39 %	73,14%	101,04%	75,53%	75,53%	100%
		Indeks Inklusivitas SDLB	70,25%	-	67,87 %	69,54%	102,46%	76,63%	76,63%	100%
		Indeks Inklusivitas SMALB	77%	-	77,36 %	71,08%	91,88%	77,80%	77,80%	100%
		Indeks Inklusivitas SMPLB	74,49%	-	68,74 %	70 %	101,83%	79,00%	79,00%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional,	78,54%	-	66,96 %	80,09%	119,61%	81,04%	81,04%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	67,44%	-	65,12 %	81,95%	125,84%	81,38%	81,38%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	84,66%	-	72,56 %	80,88%	111,47%	81,69%	81,69%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	71,40%	-	69,61 %	74,93%	107,64%	82,45%	82,45%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional,	64,74%	-	58,49 %	72,57%	124,07%	73.07%	73.07%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional,	87,72%	-	64,54 %	74,55%	115,51%	74.80%	74.80%	100%
		Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	-	86,47 %	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.03.42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	527 Peserta Didik	-	18 Peserta Didik	18 Peserta Didik	100%	527 Peserta Didik	527 Peserta Didik	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	20 Peserta Didik	-	-	-	80 Peserta Didik	80 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	-	-	-	-	60 Orang	60 Orang	100%
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	100%
1.01.2.22.0.00.01.0006	Dinas Pendidikan Wilayah II									
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	-	80,6 %	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	90 Indeks	90 Indeks	100%	93 Indeks	93 Indeks	100%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	-				100 %	100 %	100%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kerja Pegawai	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	30 Paket	-	-	-	3 Paket	3 Paket	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	-	-	-	-	7 Paket	7 Paket	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	-	-	-	-	18 Unit	18 Unit	100%
1.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran pendukung Kantor tersedia	-	1 set	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	-				14 Unit	14 Unit	100%
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	-				19 Unit	19 Unit	100%
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
1.01.02.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	-	-	100 %	81,5 %	81,5 %	-	-	100%
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	-	100 %	53,57 %	53,57 %	-	-	100%
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	70%	-	88,48 %	66,17%	74,79%	-	-	100%
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	73,74%	-	87,49 %	75,12%	85,86%	-	-	100%
		Indeks Kebhinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,56%	-	94,87 %	73,11%	77,07%	-	-	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,77%	-	67,69 %	78,52%	116,00%	-	-	100%
		Rata-rata Numerasi SMA,	81,23%	-	60,34 %	69,22%	114,72%	-	-	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		SMK dan Pendidikan Khusus								
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	85,10%	-	79 %	81,63%	103,33%	-	-	100%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92,82%	-	94 %	88,2%	93,83%	-	-	100%
		Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	-	86,3 %	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	100 %	99,1%	99,1%	63,08%	63,08%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	100 %	72,61 %	72,61 %	65,43%	65,43%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMA	86,13%	-	89,98 %	73,05%	81,18%	73,88%	73,88%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	81%	-	99,27 %	72,88%	73,42%	77,90%	77,90%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA	67,18%	-	85,51 %	61,58%	72,01%	83,64%	83,64%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	83,64%	-	73,27 %	77,3%	105,50%	77.90%	77.90%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan	74,46%	-	58,88 %	63,83%	108,41%	65.43%	65.43%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Asesmen Nasional								
1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	700 Peserta didik	-	300 Peserta didik	300 Peserta didik	100%	700 Peserta didik	700 Peserta didik	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	900 Peserta Didik	150 Peserta Didik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	100%	900 Peserta Didik	900 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	225 Orang	25 Orang	-	-	-	225 Orang	225 Orang	100%
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah Sekolah Menengah Atas	5 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Manajemen Sekolah Menengah Atas	yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen								
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	-	100 %	-	-	-	-	-	-
		Angka Kelulusan SMK	100%	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	100 %	99,1%	99,1%	-	-	-
		APM SMA/SMK	100%	-	100 %	72,61 %	72,61 %	61%	61%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMK	84.25 %	-	82,1 %	70,09%	85,37%	62,44%	62,44%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	77.46 %	-	71,48 %	70,09%	98,06%	71,29%	71,29%	100%
		Indeks Inklusivitas SMK	63.75 %	-	59,91 %	58,66%	97,91%	73,68%	73,68%	100%
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	-	25000 orang	23129 orang	92,52%	25000 orang	25000 orang	100%
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	78.54 %	-	69,31 %	72,38%	104,43%	73.68%	73.68%	100%
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	70.38 %	-	56,66 %	60,24%	106,32%	62.44%	62.44%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	700 Peserta didik	-	-	-	-	700 Peserta didik	700 Peserta didik	100%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	800 Peserta Didik	50 Peserta Didik	300 Peserta Didik	300 Peserta Didi	100%	800 Peserta Didik	800 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	150 Orang	250 Orang	250 Orang	100%	200 Orang	200 Orang	100%
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang	25 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen								
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	-	86,47 %	-	-	-	-	-	-
		Angka Kelulusan SLB	100%	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		APK SLB	100%	-	100 %	79,25 %	79,25 %	71%	71%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	84,89%	-	81,73 %	80,54%	98,54%	71,40%	71,40%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	82,92%	-	80,29 %	76,5%	95,28%	73,07%	73,07%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMP LB	87,33%	-	82,62 %	75,43%	91,30%	73,46%	73,46%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	80%	-	77,21 %	72,46%	93,85%	74,80%	74,80%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	76%	-	73,68 %	77 %	104,51%	74,94%	74,94%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMP LB	79,56%	-	72,39 %	73,14%	101,04%	75,53%	75,53%	100%
		Indeks Inklusivitas SDLB	70,25%	-	67,87 %	69,54%	102,46%	76,63%	76,63%	100%
		Indeks Inklusivitas SMALB	77%	-	77,36 %	71,08%	91,88%	77,80%	77,80%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Indeks Inklusivitas SMPLB	74,49%	-	68,74 %	70 %	101,83%	79,00%	79,00%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional,	78,54%	-	66,96 %	80,09%	119,61%	81,04%	81,04%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	67,44%	-	65,12 %	81,95%	125,84%	81,38%	81,38%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	84,66%	-	72,56 %	80,88%	111,47%	81,69%	81,69%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	71,40%	-	69,61 %	74,93%	107,64%	82,45%	82,45%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional,	64,74%	-	58,49 %	72,57%	124,07%	73.07%	73.07%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi	87,72%	-	64,54 %	74,55%	115,51%	74.80%	74.80%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional,								
1.01.02.1.03.42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	700 Peserta Didik	-	-	-	-	700 Peserta Didik	700 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	50 Peserta Didik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	100%	80 Peserta Didik	80 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	33 Orang	0 Orang	-	-	-	33 Orang	33 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	100%
1.01.2.22.0.00.01.0007	Dinas Pendidikan Wilayah III									
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		80,6 %						
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	90 Indeks	90 Indeks	100%	93 Indeks	93 Indeks	100%
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	-	12 Bulan						
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	30 Paket	24 Paket	44 Paket	183,33%	2 Paket	2 Paket	100%
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	230 Orang	-	150 Orang	114 Orang	76%	230 Orang	230 Orang	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	-	12 Bulan				-	-	-
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	-	-	-	-	6 Paket	6 Paket	100%
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	30 Paket	11 Paket	11 Paket	100%	-	-	-
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54 Unit	-	-	-	-	54 Unit	54 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100 %	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya								
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	-	-	-	-	34 Unit	34 Unit	100%
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	-	-	-
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	-	-	100 %	81,5 %	81,5 %	-	-	100%
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	-	100 %	53,57 %	53,57 %	-	-	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	70%	-	88,48 %	66,17%	74,79%	-	-	100%
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	73,74%	-	87,49 %	75,12%	85,86%	-	-	100%
		Indeks Kebhinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,56%	-	94,87 %	73,11%	77,07%	-	-	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,77%	-	67,69 %	78,52%	116,00%	-	-	100%
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	81,23%	-	60,34 %	69,22%	114,72%	-	-	100%
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	85,10%	-	79 %	81,63%	103,33%	-	-	100%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92,82%	-	94 %	88,2%	93,83%	-	-	100%
		Persentase Angka Partisipasi	-	86,3 %	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Murni SMA/SMK								
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	100 %	99,1%	99,1%	63,08%	63,08%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	100 %	72,61 %	72,61 %	65,43%	65,43%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMA	86,13%	-	89,98 %	73,05%	81,18%	73,88%	73,88%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	81%	-	99,27 %	72,88%	73,42%	77,90%	77,90%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA	67,18%	-	85,51 %	61,58%	72,01%	83,64%	83,64%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	83,64%	-	73,27 %	77,3%	105,50%	77.90%	77.90%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	74,46%	-	58,88 %	63,83%	108,41%	65.43%	65.43%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	74,46%	-	-	-	-	74,46%	74,46%	100%
1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	35 Unit	-	-	-	-	35 Unit	35 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15000 Peserta didik	-	-	-	-	15000 Peserta didik	15000 Peserta didik	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	400 Peserta Didik	500 Peserta Didik	1680 Peserta Didik	336%	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	180 Orang	400 Orang	280 Orang	70%	300 Orang	300 Orang	100%
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35 Satuan Pendidikan	-	34 Satuan Pendidikan	54 Satuan Pendidikan	158,82%	35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	-	100 %	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Angka Kelulusan SMK	100%	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	100 %	99,1%	99,1%	-	-	-
		APM SMA/SMK	100%	-	100 %	72,61 %	72,61 %	61%	61%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMK	84.25 %	-	82,1 %	70,09%	85,37%	62,44%	62,44%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	77.46 %	-	71,48 %	70,09%	98,06%	71,29%	71,29%	100%
		Indeks Inklusivitas SMK	63.75 %	-	59,91 %	58,66%	97,91%	73,68%	73,68%	100%
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	-	25000 orang	23129 orang	92,52%	25000 orang	25000 orang	100%
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	78.54 %	-	69,31 %	72,38%	104,43%	73.68%	73.68%	100%
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	70.38 %	-	56,66 %	60,24%	106,32%	62.44%	62.44%	100%
1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	17 Unit	-	-	-	-	17 Unit	17 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8765 Peserta didik	-	-	-	-	8765 Peserta didik	8765 Peserta didik	100%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	250 Peserta Didik	300 Peserta Didik	865 Peserta Didik	288,33%	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	616 Orang	100 Orang	300 Orang	650 Orang	216,67 %	616 Orang	616 Orang	100%
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	17 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	97,14%	17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan		86,47 %						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pendidikan Luar Biasa								
		Angka Kelulusan SLB	100%	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		APK SLB	100%	-	100 %	79,25 %	79,25 %	71%	71%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	84,89%	-	81,73 %	80,54%	98,54%	71,40%	71,40%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	82,92%	-	80,29 %	76,5%	95,28%	73,07%	73,07%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	87,33%	-	82,62 %	75,43%	91,30%	73,46%	73,46%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	80%	-	77,21 %	72,46%	93,85%	74,80%	74,80%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	76%	-	73,68 %	77 %	104,51%	74,94%	74,94%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	79,56%	-	72,39 %	73,14%	101,04%	75,53%	75,53%	100%
		Indeks Inklusivitas SDLB	70,25%	-	67,87 %	69,54%	102,46%	76,63%	76,63%	100%
		Indeks Inklusivitas SMALB	77%	-	77,36 %	71,08%	91,88%	77,80%	77,80%	100%
		Indeks Inklusivitas SMPLB	74,49%	-	68,74 %	70 %	101,83%	79,00%	79,00%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan	78,54%	-	66,96 %	80,09%	119,61%	81,04%	81,04%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Asesmen Nasional,								
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	67,44%	-	65,12 %	81,95%	125,84%	81,38%	81,38%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	84,66%	-	72,56 %	80,88%	111,47%	81,69%	81,69%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	71,40%	-	69,61 %	74,93%	107,64%	82,45%	82,45%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional,	64,74%	-	58,49 %	72,57%	124,07%	73.07%	73.07%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional,	87,72%	-	64,54 %	74,55%	115,51%	74.80%	74.80%	100%
1.01.02.1.03.42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang Dilaksanakan Pemeliharaan								
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	207 Peserta Didik	-	-	-	-	207 Peserta Didik	207 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	150 Peserta Didik	200 Peserta Didik	50 Peserta Didik	25%	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	-	300 Orang	50 Orang	16,67%	100 Orang	100 Orang	100%
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kelembagaan dan Manajemen								
1.01.2.22.0.00.01.0008	Dinas Pendidikan Wilayah IV									
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	-	80,6 %	-	-	-	-	-	-
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	90 Indeks	90 Indeks	100%	93 Indeks	93 Indeks	100%
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Triwulanan/Semestera n SKPD	esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD								
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan						
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	14 Paket	-	-	-	3 Paket	3 Paket	100%
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	-	12 Bulan						
		Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	7 Paket	-				7 Paket	7 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kantor yang Disediakan								
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	25 Paket	12 Paket	0 Paket	0%	-	-	-
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	12 Bulan						
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-				5 Unit	5 Unit	100%
1.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	-	-	-
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	-	-	-
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	-	-	-
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Sarana Dan	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Prasarana Pendukung Pelayanan								
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	-	-	-
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	-				8 Unit	8 Unit	100%
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	-				50 Unit	50 Unit	100%
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit						
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	-	-	100 %	81,5 %	81,5 %	-	-	100%
		Angka Partisipasi	100%	-	100 %	53,57 %	53,57 %	-	-	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Sekolah Pendidikan Khusus								
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	70%	-	88,48 %	66,17%	74,79%	-	-	100%
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	73,74%	-	87,49 %	75,12%	85,86%	-	-	100%
		Indeks Kebhinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,56%	-	94,87 %	73,11%	77,07%	-	-	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,77%	-	67,69 %	78,52%	116,00%	-	-	100%
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	81,23%	-	60,34 %	69,22%	114,72%	-	-	100%
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	85,10%	-	79 %	81,63%	103,33%	-	-	100%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92,82%	-	94 %	88,2%	93,83%	-	-	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	-	86,3 %	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	100 %	99,1%	99,1%	63,08%	63,08%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	100 %	72,61 %	72,61 %	65,43%	65,43%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMA	86,13%	-	89,98 %	73,05%	81,18%	73,88%	73,88%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	81%	-	99,27 %	72,88%	73,42%	77,90%	77,90%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA	67,18%	-	85,51 %	61,58%	72,01%	83,64%	83,64%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	83,64%	-	73,27 %	77,3%	105,50%	77.90%	77.90%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	74,46%	-	58,88 %	63,83%	108,41%	65.43%	65.43%	100%
1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	127367 Peserta didik	-	-	-	-	127367 Peserta didik	127367 Peserta didik	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik								
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1428 Peserta Didik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	250 Peserta Didik	500%	1428 Peserta Didik	1428 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	327 Orang	100 Orang	100 Orang	300 Orang	300%	327 Orang	327 Orang	100%
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5452 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	5452 Satuan Pendidikan	5452 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %						
		Angka Kelulusan SMK	100%	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	100 %	99,1%	99,1%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		APM SMA/SMK	100%	-	100 %	72,61 %	72,61 %	61%	61%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMK	84.25 %	-	82,1 %	70,09%	85,37%	62,44%	62,44%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	77.46 %	-	71,48 %	70,09%	98,06%	71,29%	71,29%	100%
		Indeks Inklusivitas SMK	63.75 %	-	59,91 %	58,66%	97,91%	73,68%	73,68%	100%
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	-	25000 orang	23129 orang	92,52%	25000 orang	25000 orang	100%
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	78.54 %	-	69,31 %	72,38%	104,43%	73.68%	73.68%	100%
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	70.38 %	-	56,66 %	60,24%	106,32%	62.44%	62.44%	100%
1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya	2548 Peserta didik	-	-	-	-	2548 Peserta didik	2548 Peserta didik	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Personil Peserta Didik								
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	593 Peserta Didik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	200 Peserta Didik	400%	593 Peserta Didik	593 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	102 Orang	100 Orang	100 Orang	250 Orang	250%	102 Orang	102 Orang	100%
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2548 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	2548 Satuan Pendidikan	2548 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB	100%	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
		APK SLB	100%	-	100 %	79,25 %	79,25 %	71%	71%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	84,89%	-	81,73 %	80,54%	98,54%	71,40%	71,40%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	82,92%	-	80,29 %	76,5%	95,28%	73,07%	73,07%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	87,33%	-	82,62 %	75,43%	91,30%	73,46%	73,46%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	80%	-	77,21 %	72,46%	93,85%	74,80%	74,80%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	76%	-	73,68 %	77 %	104,51%	74,94%	74,94%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	79,56%	-	72,39 %	73,14%	101,04%	75,53%	75,53%	100%
		Indeks Inklusivitas SDLB	70,25%	-	67,87 %	69,54%	102,46%	76,63%	76,63%	100%
		Indeks Inklusivitas SMALB	77%	-	77,36 %	71,08%	91,88%	77,80%	77,80%	100%
		Indeks Inklusivitas SMPLB	74,49%	-	68,74 %	70 %	101,83%	79,00%	79,00%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional,	78,54%	-	66,96 %	80,09%	119,61%	81,04%	81,04%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	67,44%	-	65,12 %	81,95%	125,84%	81,38%	81,38%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	84,66%	-	72,56 %	80,88%	111,47%	81,69%	81,69%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	71,40%	-	69,61 %	74,93%	107,64%	82,45%	82,45%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional,	64,74%	-	58,49 %	72,57%	124,07%	73.07%	73.07%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional,	87,72%	-	64,54 %	74,55%	115,51%	74.80%	74.80%	100%
1.01.02.1.03.42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya	500 Peserta Didik	-	-	-	-	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Personil Peserta Didik								
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	36 Peserta Didik	-	-	-	-	36 Peserta Didik	36 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	-	-	-	-	30 Orang	30 Orang	100%
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	166 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	166 Satuan Pendidikan	166 Satuan Pendidikan	100%
1.01.2.22.0.00.01.0009	Dinas Pendidikan Wilayah V			-	-	-	-			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			-	-	-	-			
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	-	-	-	93 Indeks	93 Indeks	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		80,6 %						
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan						
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		anan/Semestera n SKPD								
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Peningkatan Kualtias Pelayanan dan Kerja Pegawai		12 Bulan						
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	50 Paket	-	-	-	3 Paket	3 Paket	100%
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0 Orang						
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	12 Bulan	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	0 Paket	-	-	-	8 Paket	8 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan						
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan						
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	100%
1.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	-	12 Bulan						
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0 Laporan						
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	-	10 Unit	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya								
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	-	-	-	-	8 Unit	8 Unit	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		86,3 %						
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	-	-	-	-	1	1	100%
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	70,44%	-	-	-	-	70,44%	70,44%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	85,10%	-	-	-	-	85,10%	85,10%	100%
		Indeks Kebhinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,77%	-	-	-	-	78,77%	78,77%	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,56%	-	-	-	-	78,56%	78,56%	100%
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	73,74%	-	-	-	-	73,74%	73,74%	100%
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	81,23%	-	-	-	-	81,23%	81,23%	100%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92,82%	-	-	-	-	92,82%	92,82%	100%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMA	86,13%	-	-	-	-	86,13%	86,13%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	80,90%	-	-	-	-	80,90%	80,90%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Indeks Inklusivitas SMA	67,18%	-	-	-	-	67,18%	67,18%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	83,64%	-	-	-	-	83,64%	83,64%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	74,46%	-	-	-	-	74,46%	74,46%	100%
		Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	-	100 %	-	-	-	-	-	-
1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	8 Unit	-	-	-	-	8 Unit	8 Unit	100%
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6059 Peserta didik	-	-	-	-	6059 Peserta didik	6059 Peserta didik	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	725 Peserta Didik	200 Peserta Didik	-	-	-	725 Peserta Didik	725 Peserta Didik	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	102 Orang	100 Orang	-	-	-	102 Orang	102 Orang	100%
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	-	-	-	19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	-	100 %	-	-	-	-	-	-
		Angka Kelulusan SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMK	84,25%	-	-	-	-	84,25%	84,25%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	77,46%	-	-	-	-	77,46%	77,46%	100%
		Indeks Inklusivitas SMK	63,75%	-	-	-	-	63,75%	63,75%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	-	-	-	-	25000 Orang	25000 Orang	100%
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	78,54%	-	-	-	-	78,54%	78,54%	100%
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	79,38%	-	-	-	-	79,38%	79,38%	100%
1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100%
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3193 Peserta didik	-	-	-	-	3193 Peserta didik	3193 Peserta didik	100%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	348 Peserta Didik	200 Peserta Didik	-	-	-	348 Peserta Didik	348 Peserta Didik	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	102 Orang	100 Orang	-	-	-	102 Orang	102 Orang	100%
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	-	-	-	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Khusus	Angka Kelulusan SLB	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SLB	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	84,89%	-	-	-	-	84,89%	84,89%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	82,92%	-	-	-	-	82,92%	82,92%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	87,33%	-	-	-	-	87,33%	87,33%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	79,77%	-	-	-	-	79,77%	79,77%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	76,17%	-	-	-	-	76,17%	76,17%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	79,56%	-	-	-	-	79,56%	79,56%	100%
		Indeks Inklusivitas SDLB	70,25%	-	-	-	-	70,25%	70,25%	100%
		Indeks Inklusivitas SMALB	76,50%	-	-	-	-	76,50%	76,50%	100%
		Indeks Inklusivitas SMPLB	74,49%	-	-	-	-	74,49%	74,49%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional,	78,54%	-	-	-	-	78,54%	78,54%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	67,44%	-	-	-	-	67,44%	67,44%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	84,66%	-	-	-	-	84,66%	84,66%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan	71,40%	-	-	-	-	71,40%	71,40%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Asesmen Nasional								
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional,	64,74%	-	-	-	-	64,74%	64,74%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional,	87,72%	-	-	-	-	87,72%	87,72%	100%
1.01.02.1.03.42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	102 Peserta Didik	-	-	-	-	102 Peserta Didik	102 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Peserta Didik	-	-	-	-	40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan	40 Orang	-	-	-	-	40 Orang	40 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi								
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100%
1.01.2.22.0.00.01.0010	Dinas Pendidikan Wilayah VI			-	-	-	-			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			-	-	-	-			
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	-	-	-	93 Indeks	93 Indeks	100%
		Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		80,6 %						
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan						
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	5 Paket	-	-	-	-	5 Paket	5 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Beserta Atribut Kelengkapan								
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	-	-	-	-	17 Paket	17 Paket	100%
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	18 Paket	-	-	-	3 Paket	3 Paket	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12 Laporan	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-				12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	-	-	-	-	-	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan						
		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	-	-	-	7 Unit	7 Unit	100%
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit					36 Unit	36 Unit	100%
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0 Unit				3 Unit	3 Unit	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		86,3 %						
		Angka Partisipasi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Sekolah SMA/SMK								
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	100%
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	70,44%	-	-	-	-	70,44%	70,44%	100%
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	85,10%	-	-	-	-	73,74%	73,74%	100%
		Indeks Kebhinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,77%	-	-	-	-	78,56%	78,56%	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,56%	-	-	-	-	78,77%	78,77%	100%
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	73,74%	-	-	-	-	81,23%	81,23%	100%
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	81,23%	-	-	-	-	85,10%	85,10%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92,82%	-	-	-	-	92,82%	92,82%	100%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %						
		Angka Kelulusan SMA	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Indeks Iklim Keamanan SMA	86,13%	-	-	-	-	86,13%	86,13%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	80,90%	-	-	-	-	80,90%	80,90%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA	67,18%	-	-	-	-	67,18%	67,18%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	83,64%	-	-	-	-	83,64%	83,64%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	74,46%	-	-	-	-	74,46%	74,46%	100%
1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	-				15 Unit	15 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta didik	-				5000 Peserta didik	5000 Peserta didik	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1604 Peserta Didik	-	-	-	-	1604 Peserta Didik	1604 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	-	-	-	-	100 Orang	100 Orang	100%
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	21 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	-	-	-	21 Satuan Pendidikan	21 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%
		APM SMA/SMK	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMK	84,25%	-	-	-	-	84,25%	84,25%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	77,46%	-	-	-	-	77,46%	77,46%	100%
		Indeks Inklusivitas SMK	63,75%	-	-	-	-	63,75%	63,75%	100%
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	-	-	-	-	25000 Orang	25000 Orang	100%
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	78,54%	-	-	-	-	78,54%	78,54%	100%
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	79,38%	-	-	-	-	79,38%	79,38%	100%
1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	8 Unit	-	-	-	-	8 Unit	8 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3000 Peserta didik	-	-	-	-	3000 Peserta didik	3000 Peserta didik	100%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1652 Peserta Didik	-	-	-	-	1652 Peserta Didik	1652 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	-	-	-	-	100 Orang	100 Orang	100%
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB	100%					100,00%	100,00%	100%
		APK SLB	100%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	84,89%	-	-	-	-	84,89%	84,89%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	82,92%	-	-	-	-	82,92%	82,92%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	82,92%	-	-	-	-	82,92%	82,92%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	80%	-	-	-	-	79,77%	79,77%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	76,17%	-	-	-	-	76,17%	76,17%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	80%	-	-	-	-	79,56%	79,56%	100%
		Indeks Inklusivitas SDLB	70,25%	-	-	-	-	70,25%	70,25%	100%
		Indeks Inklusivitas SMALB	76,50%	-	-	-	-	76,50%	76,50%	100%
		Indeks Inklusivitas SMPLB	77%	-	-	-	-	76,50%	76,50%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional,	78,54%	-	-	-	-	78,54%	78,54%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan	67,44%	-	-	-	-	67,44%	67,44%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Asesmen Nasional								
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	84,66%	-	-	-	-	84,66%	84,66%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	71,40%	-	-	-	-	71,40%	71,40%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional,	64,74%	-	-	-	-	64,74%	64,74%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional,	87,72%	-	-	-	-	87,72%	87,72%	100%
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional,	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.03.42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	-	-	-	-	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	-	-	-	-	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	100%
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang	1 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen								
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD Taman Budaya									
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		80,6 %						
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-				93 Indeks	93 Indeks	100%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan						
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	9 Dokumen	9 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan						
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3 Paket	-	-	-	7 Paket	7 Paket	100%
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3 Paket	-	-	-	8 Paket	8 Paket	100%
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8 Paket	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	12 Bulan	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan	3 Unit	84 Unit	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Mesin Lainnya yang Disediakan								
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-				1 Unit	1 Unit	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	12 Bulan	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
		Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan						
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		10 Unit						
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12 Unit	-	-	-	-	12 Unit	12 Unit	100%
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	-				49 Unit	49 Unit	100%
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	8 Unit	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	88 %	88 %	-	-	-	88 %	88 %	100%
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	70%	-	-	-	-	70,00%	70,00%	100%
		Jumlah Pelestari yang diapresiasi	80%	-				80,00%	80,00%	100%
		Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan		60 %						
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	-	40 Objek	-	-	-	-	-	-
2.22.02.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	3 Unit	-				3 Unit	3 Unit	100%
2.22.02.1.01.13	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan	6 Kegiatan	-				6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan								
2.22.002.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	80 %	-	-	-	-	80 %	80 %	100%
		Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian tradisional		70 %						
2.22.002.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	12 Objek	-	-	-	10 Objek	10 Objek	100%
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	68 %	-				68 %	68 %	100%
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya	75 %	-				75,00%	75,00%	100%
		Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	80%	-				80,00%	80,00%	100%
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian	440 Orang	-				440 Orang	440 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Manusia Kesenian Tradisional	Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)								
1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan									
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	-	-	-	93 Indeks	93 Indeks	100%
		Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		80,6 %						
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan						
		Jumlah ASN yang mendapatkan layanan	100 %	-	-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		administrasi keuangan tepat waktu								
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	12 Bulan	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	30 Paket	-	-	-	2 Paket	2 Paket	100%
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	-				33 Orang	33 Orang	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	12 Bulan	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8 Paket	-	-	-	4 Paket	4 Paket	100%
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	130 Paket	-	-	-	2 Paket	2 Paket	100%
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan						
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan						
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan		12 Bulan						
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	-	10 Unit	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dan Dibayarkan Pajaknya								
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	11 Unit					11 Unit	11 Unit	100%
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	10 Unit	-	-	-	44 Unit	44 Unit	100%
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK		86,3 %						
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	100%
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan	70,44%	-	-	-	-	70,44%	70,44%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pendidikan Khusus								
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	85,10%	-	-	-	-	73,74%	73,74%	100%
		Indeks Kebhinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,77%	-	-	-	-	78,56%	78,56%	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,56%	-	-	-	-	78,77%	78,77%	100%
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	73,74%	-	-	-	-	81,23%	81,23%	100%
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	81,23%	-	-	-	-	85,10%	85,10%	100%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92,82%	-	-	-	-	92,82%	92,82%	100%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan		100 %						
		Angka Kelulusan SMA	100%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		APM SMA/SMK	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMA	86%	-	-	-	-	86,13%	86,13%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	80,90%	-	-	-	-	80,90%	80,90%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA	67,18%	-	-	-	-	67,18%	67,18%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	83,64%	-	-	-	-	83,64%	83,64%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	74,46%	-	-	-	-	74,46%	74,46%	100%
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	-				2 Paket	2 Paket	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	576 Peserta Didik	-				576 Peserta Didik	576 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	-	1000 Orang	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Fasilitasi Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi								
1.01.02.1.01.57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	186 Orang	-				186 Orang	186 Orang	100%
1.01.02.1.01.58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	-				50 Konten Digital	50 Konten Digital	100%
1.01.02.1.01.59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang	-				180 Orang	180 Orang	100%
1.01.02.1.01.64	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	-				2 Paket	2 Paket	100%
1.01.02.1.02		Angka Kelulusan SMK	100%	-				-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK SMA/SMK	100%	-				-	-	-
		APM SMA/SMK	100%	-				-	-	-
		Indeks Iklim Keamanan SMK	84.25 %	-				-	-	-
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	77.46 %	-				-	-	-
		Indeks Inklusivitas SMK	63.75 %	-				-	-	-
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 orang	-				-	-	-
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	78.54 %	-				-	-	-
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	70.38 %	-				-	-	-
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	-				-	-	-
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomb	348 Peserta Didik	-				-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		a Akademik dan Non Akademik								
1.01.02.1.02.50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	186 Orang	-				-	-	-
1.01.02.1.02.51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	-				-	-	-
1.01.02.1.02.52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang	-				-	-	-
1.01.02.1.02.58	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	-				-	-	-
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa		86,47 %						
		Angka Kelulusan SLB	100%	-				100,00%	100,00%	100%
		APK SLB	100%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	84,89%	-	-	-	-	84,89%	84,89%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	82,92%	-	-	-	-	82,92%	82,92%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	87,33%	-	-	-	-	87,33%	87,33%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	80%	-	-	-	-	79,77%	79,77%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	76,17%	-	-	-	-	76,17%	76,17%	100%
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	80%	-	-	-	-	79,56%	79,56%	100%
		Indeks Inklusivitas SDLB	70,25%	-	-	-	-	70,25%	70,25%	100%
		Indeks Inklusivitas SMALB	76,50%	-	-	-	-	76,50%	76,50%	100%
		Indeks Inklusivitas SMPLB	74%	-	-	-	-	74,49%	74,49%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional,	78,54%	-	-	-	-	78,54%	78,54%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan	67,44%	-	-	-	-	67,44%	67,44%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Asesmen Nasional								
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	84,66%	-	-	-	-	84,66%	84,66%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	71,40%	-	-	-	-	71,40%	71,40%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional,	64,74%	-	-	-	-	64,74%	64,74%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional,	87,72%	-	-	-	-	87,72%	87,72%	100%
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional,	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	-				0 Paket	0 Paket	100%
1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	-	239 Satuan Pendidikan				-	-	-
1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	57 Orang	-				57 Orang	57 Orang	100%
1.01.02.1.03.57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	22 Konten Digital	-				22 Konten Digital	22 Konten Digital	100%
1.01.02.1.03.58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	55 Orang	-				55 Orang	55 Orang	100%
1.01.02.1.03.63	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	-				2 Paket	2 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.2.22.0.00.01.0004	UPTD Museum Negeri Mulawarman									
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks					93 Indeks	93 Indeks	100%
		Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan		80,6 %						
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai		12 Bulan						
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		sertifikat kompetensi								
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai		12 Bulan						
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	100 Paket	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		12 Bulan						
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	-				6 Paket	6 Paket	100%
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	7 Paket	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	90 Paket	-	-	-	2 Paket	2 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12 Laporan	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	10 Unit	-	-	-	15 Unit	15 Unit	100%
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100%
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	-	-	-	93 Indeks	93 Indeks	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
2.22.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
2.22.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	-	-	-	-	28 Paket	28 Paket	100%
2.22.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	50 %	65 %	-	-	-	50 %	50 %	100%
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	53 %	-	-	-	-	53 %	53 %	100%
		Meningkatnya Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	40 Unit	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Di tingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	50 Orang	-	-	-	5 Orang	5 Orang	100%
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	5 Unit	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	2 Unit				1 Unit	1 Unit	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, 2025

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
RENSTRA 2024-2026												
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	SPM	IKU	100%	-	-	-	71,99%	-	-	-	Berdasarkan RPD
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	SPM	IKU	100%	-	-	-	67,55 %	-	-	-	Berdasarkan RPD
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	SPM	IKU	100%	-	-	-	93,83 %	-	-	-	Berdasarkan RPD
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan		IKU	91,5%	-	-	-	83,78%	-	-	-	Berdasarkan RPD
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		IKU	78,2%	-	-	-	79,90%	-	-	-	Berdasarkan RPD
6	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan		IKU	62%	-	-	-	77%	-	-	-	Berdasarkan RPD
7	Persentase pelestarian Cagar Budaya		IKU	36 OPK	-	-	-	54 OPK	-	-	-	Berdasarkan RPD
8	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	SPM	IKK	100%	-	-	-	81.84	-	-	-	Berdasarkan RPD
9	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	SPM	IKK	100%	-	-	-	53.75	-	-	-	Berdasarkan RPD
10	Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	SPM	IKK	88,48	-	-	-	58,32	-	-	-	Berdasarkan RPD
11	Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	SPM	IKK	87,49	-	-	-	71,02	-	-	-	Berdasarkan RPD
12	Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	SPM	IKK	94,87	-	-	-	71,84	-	-	-	Berdasarkan RPD
13	Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	SPM	IKK	67,69	-	-	-	73,37	-	-	-	Berdasarkan RPD
14	Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	SPM	IKK	60,34	-	-	-	66,53	-	-	-	Berdasarkan RPD
15	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	SPM	IKK	79,00	-	-	-	81,63	-	-	-	Berdasarkan RPD

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
16	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	SPM	IKK	94,00	-	-	-	88,2	-	-	-	Berdasarkan RPD
17	Persentase satuan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal		IKK	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	Berdasarkan RPD
18	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)		IKK	100,00	-	-	-	99,69	-	-	-	Berdasarkan RPD
20	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan		IKK	86,00	-	-	-	86,00	-	-	-	Berdasarkan RPD
21	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		IKK	66,00	-	-	-	66,00	-	-	-	Berdasarkan RPD
22	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina		IKK	77,00	-	-	-	77,00	-	-	-	Berdasarkan RPD
23	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan		IKK	62,00	-	-	-	62,00	-	-	-	Berdasarkan RPD
24	Persentase Pengelolaan Permuseuman		IKK	47,00	-	-	-	47,00	-	-	-	Berdasarkan RPD
25	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		IKK	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-	Berdasarkan RPD
26	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti		IKK	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	Berdasarkan RPD
RENSTRA 2025-2029												
27	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca			-	-	44,23%	44,95%	43,53%	-	44,23%	44,95%	
28	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi			-	-	58,05%	58,77%	57,83%	-	58,05%	58,77%	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
29	Harapan Lama Sekolah			-	-	14,18 - 14,26	14,26 - 14,33	14,03	-	14,18 - 14,26	14,26 - 14,33	
30	Rata-Rata Lama Sekolah			-	-	10,35 - 10,53	10,53 - 10,70	10,02	-	10,35 - 10,53	10,53 - 10,70	
31	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)			-	-	59,36- 59,42	59,92- 60,00	57,56	-	59,36- 59,42	59,92- 60,00	
32	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	SPM		-	-	80	81	78,12	-	80	81	
33	Nilai Dimensi Warisan Budaya			-	-	45,27 - 46,35	46,35- 47,63	44,19	-	45,27 - 46,35	46,35- 47,63	
34	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah			-	-	86	86,5	83,78%	-	86	86,5	
35	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			-	-	74,50	75	73,50	-	74,50	75	
36	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	SPM	IKK	-	-	82.57	82.93	81.84	-	82.57	82.93	
37	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	SPM	IKK	-	-	71.34	72.43	53.75	-	71.34	72.43	
38	Kemampuan literasi SMA	SPM	IKK	-	-	78.50	79.10	77,3	-	78.50	79.10	
39	Kemampuan numerasi SMA	SPM	IKK	-	-	67.03	68.63	63,83	-	67.03	68.63	
40	Indeks iklim keamanan SMA	SPM	IKK	-	-	84.84	86.04	73,05	-	84.84	86.04	
41	Indeks iklim kebhinnekaan SMA	SPM	IKK	-	-	74.88	75.88	72,88	-	74.88	75.88	
42	Indeks iklim inklusivitas SMA	SPM	IKK	-	-	64.58	66.08	61,58	-	64.58	66.08	
43	Kemampuan Literasi SMK	SPM	IKK	-	-	74.98	76.28	72,38	-	74.98	76.28	
44	Kemapuan Numerasi SMK	SPM	IKK	-	-	64,64	68.63	60,24	-	64,64	68.63	
45	Tingkat penyerapan lulusan SMK	SPM	IKK	-	-	82,71	83,25	88,2	-	82,71	83,25	
46	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	SPM	IKK	-	-	90,18	91,17	81,63	-	90,18	91,17	
47	Indeks iklim keamanan SMK	SPM	IKK	-	-	72,49	73,69	70,09	-	72,49	73,69	
48	Indeks iklim kebhinnekaan SMK	SPM	IKK	-	-	72,69	73,99	70,09	-	72,69	73,99	
49	Indeks iklim inklusivitas SMK	SPM	IKK	-	-	63,26	65,56	58,66	-	63,26	65,56	
50	Kemampuan literasi SDLB	SPM	IKK	-	-	83,29	84,89	80,09	-	83,29	84,89	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
51	Kemampuan numerasi SDLB	SPM	IKK	-	-	76,13	76,73	74,93	-	76,13	76,73	
52	Indeks iklim keamanan SDLB	SPM	IKK	-	-	81,54	79,03	80,54	-	81,54	79,03	
53	Indeks iklim kebinekaan SDLB	SPM	IKK	-	-	74,46	75,46	72,46	-	74,46	75,46	
54	Indeks iklim inklusivitas SDLB	SPM	IKK	-	-	72,14	73,44	69,45	-	72,14	73,44	
55	Kemampuan literasi SMPLB	SPM	IKK	-	-	81,88	82,38	80,88	-	81,88	82,38	
56	Kemampuan numerasi SMPLB	SPM	IKK	-	-	75,05	75,30	74,55	-	75,05	75,30	
57	Indeks iklim keamanan SMPLB	SPM	IKK	-	-	77,83	79,03	75,43	-	77,83	79,03	
58	Indeks iklim kebinekaan SMPLB	SPM	IKK	-	-	76,74	78,54	73,14	-	76,74	78,54	
59	Indeks iklim inklusivitas SMPLB	SPM	IKK	-	-	72,80	74,20	70	-	72,80	74,20	
60	Kemampuan literasi SMALB	SPM	IKK	-	-	82,95	83,45	81,95	-	82,95	83,45	
61	Kemampuan numerasi SMALB	SPM	IKK	-	-	73,57	74,07	72,57	-	73,57	74,07	
62	Indeks iklim keamanan SMALB	SPM	IKK	-	-	79,10	80,40	76,5	-	79,10	80,40	
63	Indeks iklim kebinekaan SMALB	SPM	IKK	-	-	81,00	83,00	77	-	81,00	83,00	
64	Indeks iklim inklusivitas SMALB	SPM	IKK	-	-	74,28	75,88	71,08	-	74,28	75,88	
65	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan		IKK	-	-	58%	62%	45%	-	58%	62%	
66	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan		IKK	-	-	50%	54%	29%	-	50%	54%	
67	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan		IKK	-	-	31%	33%	50%	-	31%	33%	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2024	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8=7/6*100)
1	Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah	Presentase Capaian SPM Pendidikan	Persentase	100%	78,12%	78,12%
		Presentase Capaian Pelayanan Dasar	Persentase	100%	72,84%	72,84%
		Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	Persentase	100%	72,97%	72,97%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	Persentase	91,5%	83,78%	91,56%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase	78,2%	79,90%	102,17%
3	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase pelestarian Cagar Budaya	Persentase	62%	77%	116,67%
		Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	36 OPK	54 OPK	161,76%

Sumber: Laporan Kinerja tahun 2024

2.2.1 Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	%	100%	78,12%	78,12%
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	%	100%	72,84%	72,84%
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	%	100%	72,97%	72,97%

Sumber: Laporan Kinerja tahun 2024

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 (5-4/4*100%))
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	%	71,99 %	78,12%	0
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	%	67,55 %	72,84%	0
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	%	93,83 %	72,97%	0

Sumber: Laporan Kinerja tahun 2024

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	%	100	78,12%	78,12%
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	%	100	72,84%	72,84%
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	%	100	72,97%	72,97%

Sumber : Laporan Kinerja tahun 2024

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian pada sasaran Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah dengan beberapa indikator didalam Presentase Capaian SPM Pendidikan, Presentase Capaian Pelayanan Dasar dan Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar dari tahun ketahun belum mengalami adanya kenaikan, berikut beberapa faktor pendorong dan penghambatnya serta uapaya perbaikanya kedepan untuk peningkatan kinerjanya di tahun – tahun berikutnya.

Adapun beberapa faktor pendorong untuk mencapai target yang telah ditentukan antara lain, Strategi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan usia Harapan Lama Sekolah pada setiap tahunnya yaitu selalu koordinasi dengan dinas-dinas terkait pada provinsi maupun kab/kota guna untuk mencapai target pada setiap tahunnya dengan cara berkolaborasi dalam hal Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Pendidikan diantaranya dengan cara berikut :

- Komitmen pemerintah provinsi Kaltim dalam penganggaran dan pelaksanaan SPM;
- Pendataan anak yang tidak bersekolah dan putus bersekolah;
- Pemerataan Pelayanan Pendidikan Negeri dan Swasta;
- Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan;
- Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Penyediaan serta pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- Pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun;
- Pemberian Beasiswa untuk masyarakat;
- Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan khususnya pada lulusan Sekolah Menengah tentang Perguruan Tinggi.

Adapun beberapa faktor penghambat untuk mencapai target yang telah ditentukan antara lain :

- Akses jalan / infrastruktur yang menuju tempat Satuan Pendidikan kurang memadai khususnya pada daerah terdepan, terpencil dan terisolir (3T), yaitu pada daerah kecamatan kelay, kabupaten Berau pada sekolah SMKN 4 Berau dan pada kecamatan Bongan, kabupaten Kutai Barat pada sekolah SMAN 1 Bongan dan SMKN 1 Bongan dan masih banyak sekolah yang bukan daerah 3T yang membutuhkan akses jalan yang baik untuk menuju kesekolahan.
- Masih kurangnya Satuan Pendidikan yang sesuai dengan standar nasional.
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses;
 - d. Standar Penilaian Pendidikan;
 - e. Standar Tenaga Pendidikan;
 - f. Standara Sarana Prasarana;
 - g. Standa Pengelolaan; dan

h. Standar Pembiayaan.

- Kesadaran masyarakat terutama daerah 3T tentang pentingnya Pendidikan untuk anak-anak mereka .
- Kebanyakan lulusan sekolah menengah lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dari pada untuk melanjutkan ke perguruan tinggi
- Masih adanya anak tidak sekolah ataupun anak yang lulus tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dikarekan bebera faktor dibawah ini:
 - a. Tidak mau bersekolah;
 - b. Tidak ada biaya;
 - c. Sekolah yang jauh dari rumah;
 - d. Sudah cukup dengan Pendidikan yang dimiliki saat ini;
 - e. Menikah/ mengurus rumah tangga;
 - f. Mengalami kekerasan / perundungan / trauma disekolah;
 - g. Bekerja;
 - h. Pengaruh lingkungan;
 - i. Beranggapan sekolah tidak penting;
 - j. Tidak memiliki seragam sekolah;
 - k. Tidak memiliki akte kelahiran;
 - l. Masalah Kesehatan / peyandang disabilitas; dan
 - m. Alasan lainnya.

Data anak tidak sekolah saat ini sebanyak 57.740 orang yang sudah terdata, status data yang telah terverifikasi 11,651 orang dan yang belum terverifikasi berjumlah 46,089 orang yang bersumber dari <https://Pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/>. Kendala dalam mengatasi data anak tidak sekolah ini lumayan rumit dikarenakan data yang terus bertambah setiap tahunnya dan pada laman web data tersebut tidak bisa menyatakan bahwa siswa tersebut telah bersekolah kembali.

Saran dan upaya yang akan dilakukan ditahun depan yaitu:

- Melakukan penganggaran terkait Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal meliputi Pemenuhan pelayanan Dasar Serta Pemenuhan Mutu pelayanan dasar Pendidikan
- Melakukan koordinasi dan perencanaan kolaboratif antar perangkat daerah agar tetap dapat maksimal memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal pada seluruh daerah pada provinsi Kalimantan timur terutama pada daerah terdepan, terpencil dan terisolir (3T).
- Meningkatkan Promosi Pendidikan kepada masyarakat

- Memperluas jangkauan wilayah terutama daerah 3T untuk pemberian beasiswa agar setiap warga yang di nilai rentan miskin dan berprestasi mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa
- Pemenuhan Ruang Kelas Baru dan membangun Unit sekolah baru untuk menampung daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya melebihi dari ruang kelas dan sekolah yang tersedia
- Pemberian bantuan keuangan untuk penduduk yang bersekolah di Pendidikan non formal.
- Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan terutama pada satuan pendidikan yang teridentifikasi mengalami kerusakan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	78,12%	87,60 %	79,80%
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	67,55 %	85,07%	76,31%
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	93,83 %	87,25%	90,54%

Sumber : Laporan Kinerja tahun 2024

Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini cukup besar, namun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya, baik dari segi biaya operasional yang tidak optimal maupun perencanaan yang kurang matang. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.

2.2.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Layanan Publik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	%	91,5%	83,78%	91,56%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	78,2%	79,90%	102,17%

Sumber : Laporan Kinerja tahun 2024

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Sat.	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 (5-4/4*100%))
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	%	89,51 %	83,78%	(-6,40)
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	78,60%	79,90%	+1,65

Sumber : Laporan Kinerja tahun 2024

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	%	93,50%	83,78%	89,60%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	80,10%	79,90%	99,75%

Sumber : Laporan Kinerja tahun 2024

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan ditahun 2024 telah mengalami penurunan sebesar (-6,40) dari tahun sebelumnya. Meskipun ditahun ini juga tidak tercapai targetnya dengan target 91,5% realisasi sebesar 83,78%.

Kemudian pada progres pencapaian target terakhir periode renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih bisa dikatakan cukup jauh melihat dari progres ditahun 2024, untuk target diakhir periode renstra sendiri masih di angka 93,50 dan capaian di tahun ini 83,78%. Progres kemajuanya masih di angka 89,60%.

Pada capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditahun 2024 telah mengalami kenaikan sebesar 1,65

dari tahun sebelumnya. ditahun ini juga telah tercapai targetnya dengan target 78,2% realisasi sebesar 79,90%.

Kemudian pada progres pencapaian target terakhir periode renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih bisa dikatakan cukup dekat melihat dari progres ditahun 2024, untuk target diakhir periode renstra sendiri masih di angka 80,10 dan capaian di tahun ini 79,90%. Progres kemajuanya masih di angka 99,75%.

Faktor pendorong peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja sangat terkait dengan aspek-aspek yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan kinerja. Beberapa faktor pendorong utama untuk mencapai hal tersebut antara lain:

- **Peningkatan Kualitas Layanan Publik**

Pelayanan yang Cepat dan Efisien: Meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam memberikan layanan sangat penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Pelayanan yang responsif dan tanpa hambatan administratif dapat meningkatkan IKM.

Kualitas Layanan yang Profesional dan Ramah: Pegawai atau petugas pelayanan yang terlatih, profesional, dan ramah dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat. Kepuasan yang tinggi dalam interaksi langsung dengan petugas meningkatkan penilaian IKM.

Inovasi dalam Pelayanan: Mengadopsi teknologi dan metode pelayanan modern (seperti layanan online atau berbasis aplikasi) akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, yang meningkatkan efisiensi dan kepuasan mereka.

- **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Membuka informasi tentang kebijakan, prosedur, dan alokasi anggaran secara terbuka kepada publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi ini berperan penting dalam peningkatan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja yang Jelas dan Terbuka: Pemerintah yang memberikan laporan berkala mengenai kinerja mereka, pencapaian program, serta penggunaan anggaran dengan jelas akan membantu masyarakat menilai kinerja secara objektif dan meningkatkan kepuasan mereka.

Pelaporan Hasil yang Akurat: Memastikan laporan kinerja yang disampaikan kepada masyarakat mencerminkan kondisi nyata dan akurat dapat memperkuat persepsi positif terhadap kinerja lembaga atau instansi pemerintah.

- **Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur**

Pelatihan dan Pengembangan SDM: Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada pegawai negeri dan aparat publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan. Karyawan yang terampil dan berpengetahuan akan lebih siap memberikan pelayanan yang memuaskan.

Peningkatan Profesionalisme: Meningkatkan etika kerja dan profesionalisme aparat pemerintah akan memperlihatkan kinerja yang lebih baik dan efisien, yang berujung pada peningkatan akuntabilitas dan kepuasan masyarakat.

- **Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja**

Sistem Pengawasan yang Efektif: Pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program sangat penting untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan dengan benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan yang ketat akan membantu memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga.

Evaluasi Kinerja secara Berkala: Melakukan evaluasi secara rutin terhadap pencapaian kinerja lembaga atau instansi pemerintah dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai area yang perlu diperbaiki. Evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan perbaikan terus-menerus dalam kinerja.

Penilaian Mandiri dan Umpan Balik dari Masyarakat: Mengadakan survei atau forum untuk mendengarkan umpan balik dari masyarakat secara langsung akan memberikan masukan penting yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja layanan publik.

- **Peningkatan Aksesibilitas dan Ketersediaan Layanan**

Penyediaan Layanan yang Merata: Mengusahakan agar layanan yang diberikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi lokasi, waktu, dan cara, akan meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini termasuk akses bagi kelompok marginal dan daerah terpencil.

Fasilitas yang Memadai: Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di setiap titik layanan akan meningkatkan

kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan, yang pada gilirannya meningkatkan IKM.

Faktor penghambat peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat berasal dari berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas layanan publik dan interaksi antara pemerintah atau penyedia layanan dengan masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor penghambat utama yang dapat mempengaruhi capaian IKM Sumber Daya yang Terbatas

- **Kekurangan Tenaga Kerja yang Cukup:**

Kekurangan tenaga kerja yang terlatih dan memadai di sektor publik dapat mengakibatkan layanan menjadi tidak optimal. Jika jumlah petugas tidak mencukupi untuk menangani permintaan layanan yang tinggi, hal ini dapat menurunkan kepuasan masyarakat.

Fasilitas dan Infrastruktur yang Tidak Memadai: Kekurangan infrastruktur atau fasilitas yang diperlukan untuk memberikan layanan yang berkualitas, seperti kantor yang tidak memadai, sistem komputer yang lambat, atau layanan berbasis teknologi yang tidak berjalan lancar, dapat mengganggu kualitas pelayanan.

- **Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi**

Pengawasan yang Lemah: Kurangnya pengawasan yang efektif terhadap layanan yang diberikan bisa menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan. Tanpa pengawasan yang baik, layanan publik bisa menjadi tidak efisien, tidak adil, atau bahkan menyimpang dari standar yang ditetapkan.

Tidak Ada Evaluasi Kinerja: Tanpa evaluasi atau penilaian yang rutin terhadap kinerja layanan publik, sulit untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan sudah memenuhi harapan masyarakat atau tidak. Hal ini bisa menghambat upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja, beberapa saran dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau organisasi terkait adalah sebagai berikut:

- **Peningkatan Pelayanan Publik**

Pelatihan SDM: Melakukan pelatihan berkelanjutan kepada pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dalam hal keterampilan komunikasi maupun pemahaman tugas dan tanggung jawab.

Peningkatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik. Misalnya, penggunaan aplikasi digital untuk mempermudah pengajuan permohonan atau layanan.

Pengurangan Waktu Tunggu: Mempercepat proses pelayanan dan mengurangi waktu tunggu bagi masyarakat yang membutuhkan layanan.

- **Transparansi dan Keterbukaan Informasi**

Laporan Kinerja yang Terbuka: Meningkatkan transparansi dengan menyediakan laporan kinerja yang mudah diakses oleh masyarakat, baik secara online maupun offline.

Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam penilaian terhadap kinerja pemerintah melalui survey atau forum diskusi agar mereka merasa dihargai dan menjadi bagian dari proses perbaikan.

- **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi kekurangan dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat.

Penyusunan Indikator Kinerja yang Jelas: Menyusun indikator kinerja yang jelas dan terukur agar dapat memantau dan mengukur efektivitas program atau kebijakan yang dilaksanakan.

Sistem Pengawasan yang Lebih Baik: Mengoptimalkan pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan program-program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- **Penguatan Responsivitas Terhadap Keluhan Masyarakat**

Sistem Pengaduan yang Efektif: Membangun sistem pengaduan yang mudah diakses dan memiliki jalur komunikasi yang jelas, serta memastikan tindak lanjut terhadap setiap keluhan yang diterima.

Tindak Lanjut Cepat: Menyusun sistem agar setiap keluhan atau masukan dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti dalam waktu yang cepat dan efektif.

- **Penyusunan Rencana Strategis yang Berdasarkan Data**

Analisis Data: Menggunakan data dan informasi yang valid untuk merumuskan kebijakan dan program pelayanan publik. Hal ini

akan membuat keputusan yang diambil lebih objektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan Risiko: Menyusun dan memantau manajemen risiko dalam pelaksanaan kebijakan dan program agar dapat menghindari terjadinya kesalahan atau kegagalan dalam layanan publik.

- **Pemberian Penghargaan dan Sanksi**

Penghargaan bagi Kinerja Terbaik: Memberikan penghargaan kepada unit atau individu yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelayanan publik. Ini dapat menjadi motivasi bagi pegawai lain untuk meningkatkan kinerjanya.

Sanksi bagi Pelanggaran: Menerapkan sanksi tegas bagi pihak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, sehingga memastikan adanya akuntabilitas.

- **Meningkatkan Partisipasi Publik**

Survei dan Umpan Balik: Melakukan survei secara rutin kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka dan mendapatkan umpan balik yang berguna dalam perbaikan layanan.

Forum Dialog: Menyelenggarakan forum atau pertemuan rutin antara pemerintah dan masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu pelayanan publik dan mendengarkan langsung masukan dari Masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	91,56h%	96,95%	94,26%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	102,17%	86,87%	94,52%

Sumber : Laporan Kinerja tahun 2024

Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini cukup besar, namun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya, baik dari segi biaya operasional yang tidak optimal maupun perencanaan yang

kurang matang. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.

2.2.3 Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase pelestarian Cagar Budaya	%	62%	77%	101,94
2	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	36 OPK	54 OPK	93,72

Sumber : Laporan Kinerja tahun 2024

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 (5-4/4*100%))
1	Persentase pelestarian Cagar Budaya	%	59,92%	77%	28,5
2	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	32 OPK	54 OPK	68,75

Sumber : Laporan Kinerja tahun 2024

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase pelestarian Cagar Budaya	%	65%	77%	118,46
2	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	42 OPK	54 OPK	128,57

Sumber : Laporan Kinerja tahun 2024

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada capaian Persentase pelestarian Cagar Budaya ditahun 2024 telah mengalami kenaikan sebesar 28,5 dari tahun sebelumnya.

Ditahun ini juga telah tercapai targetnya dengan target 62% dan realisasi sebesar 77%.

Kemudian pada progres pencapaian target terakhir periode renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mencapai target yang telah mencapai target periode renstra bisa kita lihat dari tabel diatas progres pada tahun 2024 sudah lebih dari target yang ingin dicapai , untuk target diakhir periode renstra sendiri masih di angka 65% dan capaian di tahun ini 77% Progres kemajuanya sudah di angka 118,46%.

Untuk tahun berikutnya akan dilakukan kajian ulang untuk penetapan target diatas untuk pembaruan RPJMD dan Renstra periode berikutnya, agar kesesuaian perencanaan targetnya bisa menjadi relevan dengan realisasi yang akan dicapai.

Pada capaian Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan ditahun 2024 telah mengalami kenaikan sebesar 68,75 dari tahun sebelumnya. Ditahun ini juga telah tercapai targetnya dengan target 32 OPK dan realisasi sebesar 54 OPK.

Kemudian pada progres pencapaian target terakhir periode renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mencapai target yang telah mencapai target periode renstra bisa kita lihat dari tabel diatas progres pada tahun 2024 sudah lebih dari target yang ingin dicapai , untuk target diakhir periode renstra sendiri masih di angka 42 OPK dan capaian di tahun ini 54 OPK Progres kemajuanya sudah di angka 128,57%.

Untuk tahun berikutnya akan dilakukan kajian ulang untuk penetapan target diatas untuk pembaruan RPJMD dan Renstra periode berikutnya, agar kesesuaian perencanaan targetnya bisa menjadi relevan dengan realisasi yang akan dicapai.

Faktor pendorong dan penghambat dalam capaian persentase pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sangat berhubungan dengan kebijakan, sumber daya, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya. Berikut ini adalah beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam upaya tersebut:

Faktor Pendorong Pelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan:

- **Kesadaran Masyarakat:** Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya cagar budaya dan kebudayaan sebagai bagian dari identitas bangsa dapat menjadi pendorong utama. Kampanye

yang efektif mengenai pelestarian ini akan lebih membuat masyarakat peduli.

- **Dukungan Pemerintah:** Pemerintah yang aktif memberikan dukungan melalui kebijakan, anggaran, dan peraturan yang mendukung pelestarian budaya. Program-program pemajuan kebudayaan juga perlu disosialisasikan dan didanai dengan baik.
- **Partisipasi Komunitas Lokal:** Keterlibatan langsung masyarakat dalam pelestarian cagar budaya atau pemajuan kebudayaan akan memperkuat keberlanjutannya. Masyarakat setempat biasanya lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan situs atau objek kebudayaan.
- **Pendidikan dan Sosialisasi:** Upaya pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya pelestarian budaya di sekolah-sekolah maupun masyarakat umum, serta pemanfaatan teknologi dalam penyebaran informasi.
- **Kerja Sama Antar Lembaga:** Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dapat mempercepat upaya pelestarian cagar budaya dan kebudayaan.

Faktor Penghambat Pelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan:

- **Kurangnya Dana:** Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pelestarian cagar budaya sering kali menjadi hambatan. Banyak situs budaya yang membutuhkan biaya besar untuk pemeliharaan dan konservasi yang tidak tersedia.
- **Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran:** Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami pentingnya pelestarian cagar budaya, sehingga mereka tidak memprioritaskan upaya pelestarian. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan tentang warisan budaya.
- **Eksplorasi dan Perusakan:** Aktivitas yang merusak cagar budaya, seperti pembangunan di sekitar situs bersejarah atau eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian situs budaya, menjadi salah satu tantangan utama.
- **Pengaruh Urbanisasi dan Modernisasi:** Perkembangan kota yang pesat sering kali mengancam keberadaan cagar budaya. Proses urbanisasi sering kali mengabaikan keberadaan situs-situs budaya yang memerlukan perlindungan.
- **Birokrasi yang Lambat:** Proses yang panjang dan birokratis dalam perizinan untuk proyek-proyek pelestarian atau pemajuan kebudayaan dapat memperlambat implementasi kebijakan atau program.

- **Kurangnya Infrastruktur yang Mendukung:** Beberapa cagar budaya tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk menarik wisatawan atau mendukung pelestarian secara berkelanjutan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pelestarian Cagar Budaya	101,94	90,07%	96,01%
2	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	93,72	93,89%	93,81%

Sumber : Laporan Kinerja tahun 2024

Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini cukup besar, namun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya, baik dari segi biaya operasional yang tidak optimal maupun perencanaan yang kurang matang. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.

2.3 CAPAIAN KINERJA LAINNYA HARAPAN LAMA SEKOLAH, RATA – RATA LAMA SEKOLAH DAN SUTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

2.3.1 Capaian Kinerja Harapana Lama Sekolah Serta Analisis Terhadap Capaian Nasional Tahun 2024

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tidak akan lepas dari upaya peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, yang dalam hal ini keberhasilan capaiannya dapat diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Melalui Indikator ini diharapkan akan memberikan gambaran hasil dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan akses dan mutu dari pelayanan Pendidikan, memperluas cakupan penerima layanan Wajib belajar 12 Tahun, memenuhi ketersediaan tenaga Pendidikan dan kependidikan serta memenuhi semua Sarana dan Prasarana di setiap Satuan Pendidikan.

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu, dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Tingkat Harapan Lama Sekolah di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan yaitu sejak tahun 2022 dengan angka 13,84 Tahun menjadi 14,02 Tahun pada 2023 naik 0,18 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan timur naik 0,01 dari 14,02 menjadi 14,03, berdasarkan sumber data capaian berasal dari rilis Badan Pusat Statistik Indonesia.

Capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2024 yaitu 14,03 tahun, telah melampaui target tahunan yang telah ditentukan yaitu 14,03 tahun atau dengan persentase capaian 100,57 %. Jika dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian Nasional tahun 2024 perbedaannya cukup signifikan di angka 0,82 tahun, jadi Harapan lama sekolah pada Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai diatas rata-rata Nasional.

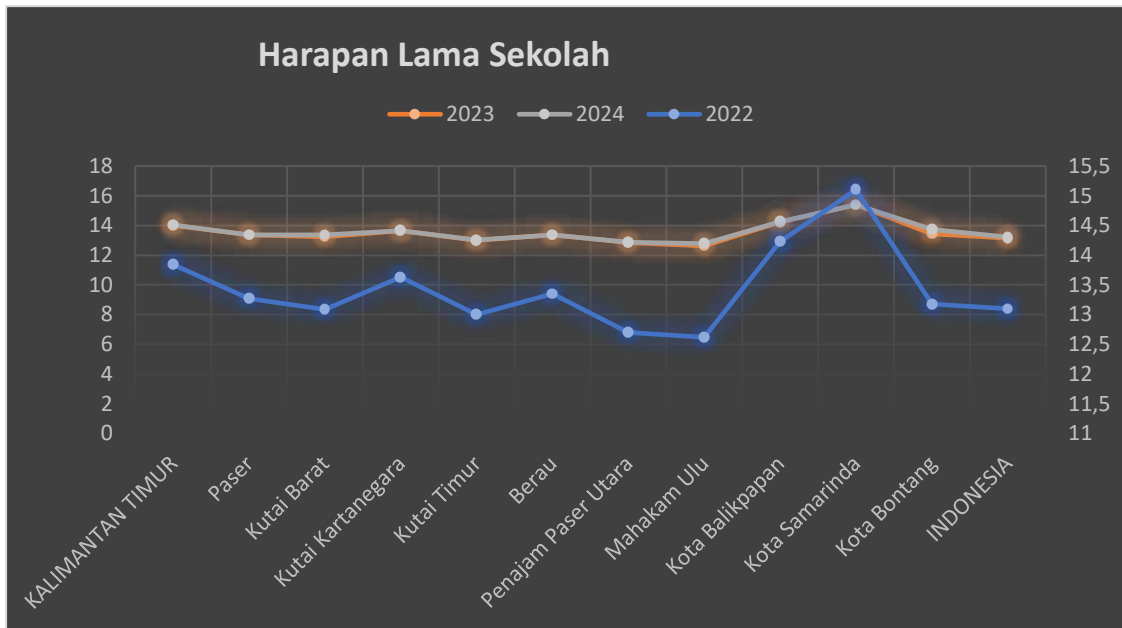
Pencapaian pada Harapan Lama Sekolah dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dari setiap kab/kota maupun provinsi selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, bahkan diantara provinsi dan capaian nasional provinsi Kaltim berada diatas dari capaian nasional. Data capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Data Capaian HLS pada Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN TIMUR	13,84	14,02	14,03
Paser	13,27	13,37	13,38
Kutai Barat	13,09	13,25	13,36
Kutai Kartanegara	13,63	13,64	13,65
Kutai Timur	13	13,01	13,02
Berau	13,35	13,36	13,37
Penajam Paser Utara	12,7	12,86	12,87
Mahakam Ulu	12,62	12,63	12,78
Kota Balikpapan	14,23	14,24	14,25
Kota Samarinda	15,1	15,39	15,4
Kota Bontang	13,18	13,43	13,73
INDONESIA	13,1	13,15	13,21

Sumber : Laporan Kinerja tahun 2024

Gambar 2.1 Diagram Garis Data capaian HLS pada Provinsi Kalimantan Timur



Tetapi pada tabel dan gambar diatas bisa kita lihat bahwa capaian Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 hingga tahun 2024 hanya naik dengan rata-rata angka 0,1 pada setiap provinsi dan kab/kota, hanya kota bontang yang naik secara signifikan dengan kenaikan di angka 0,30 tahun.

2.3.2 Capaian Kinerja Rata - Rata Lama Sekolah Serta Analisis Terhadap Capaian Nasional Tahun 2024

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tidak akan lepas dari upaya peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, yang dalam hal ini keberhasilan capaiannya dapat diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Melalui Indikator ini diharapkan akan memberikan gambaran hasil dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan akses dan mutu dari pelayanan Pendidikan, memperluas cakupan penerima layanan Wajib belajar 12 Tahun, memenuhi ketersediaan tenaga Pendidikan dan kependidikan serta memenuhi semua Sarana dan Prasarana di setiap Satuan Pendidikan. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. RLS tidak termasuk tahun yang diulang. RLS

digunakan untuk menggambarkan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh masyarakat di suatu wilayah. RLS juga digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tingkat Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan yaitu sejak tahun 2022 dengan angka 9,92 Tahun menjadi 9,99 Tahun pada 2023 naik 0,07 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan timur naik 0,03 dari 9,99 menjadi 10,02 berdasarkan sumber data capaian berasal dari rilis Badan Pusat Statistik Indonesia.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah tahun 2024 yaitu 10,02 tahun, belum tercapai dari target tahunan yang telah ditentukan yaitu 10,10 tahun atau dengan persentase capaian 99,92 %. Jika dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian Nasional tahun 2024 perbedaannya cukup signifikan di angka 1,17 tahun, jadi Rata-rata Lama Sekolah pada Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai diatas rata-rata Nasional

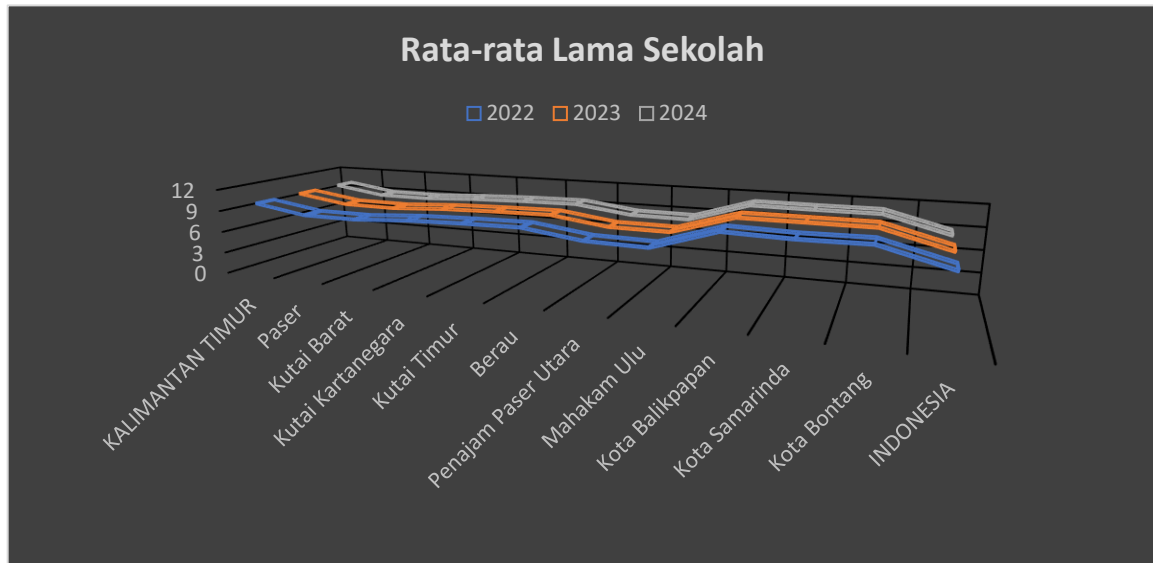
Pencapaian pada Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dari setiap kab/kota maupun provinsi selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, bahkan diantara provinsi dan capaian nasional provinsi Kaltim berada diatas dari capaian nasional. Data capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Data capaian RLS pada Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN TIMUR	9,92	9,99	10,02
Paser	8,8	8,91	8,92
Kutai Barat	8,78	8,85	8,89
Kutai Kartanegara	9,24	9,26	9,27
Kutai Timur	9,44	9,45	9,47
Berau	9,54	9,56	9,57
Penajam Paser Utara	8,51	8,53	8,57
Mahakam Ulu	8,36	8,49	8,5
Kota Balikpapan	10,92	10,93	10,99
Kota Samarinda	10,71	10,93	10,95
Kota Bontang	10,81	10,92	10,97
INDONESIA	8,69	8,77	8,85

Sumber : Laporan Kinerja tahun 2024

Gambar 2. 2 Diagram Data Capaian RLS pada Provinsi Kalimantan Timur



Tetapi pada tabel dan gambar diatas bisa kita lihat bahwa capaian Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 hingga tahun 2024 hanya naik dengan rata-rata angka 0,3 pada setiap provinsi dan kab/kota, hanya Kota Bontang yang naik secara signifikan dengan kenaikan di angka 0,06 tahun.

1. Faktor Pendorong Sampai dengan Tahun 2024

Strategi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan usia Harapan Lama Sekolah pada setiap tahunnya yaitu selalu koordinasi dengan dinas-dinas terkait pada provinsi maupun kab/kota guna untuk mencapai target pada setiap tahunnya dengan cara berkolaborasi dalam hal Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Pendidikan diantaranya dengan cara berikut :

- Komitmen pemerintah provinsi Kaltim dalam penganggaran dan pelaksanaan SPM;
- Pendataan anak yang tidak bersekolah dan putus bersekolah;
- Pemerataan Pelayanan Pendidikan Negeri dan Swasta;
- Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan;
- Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Penyediaan serta pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- Pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun;
- Pemberian Beasiswa untuk masyarakat; dan

- Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan khususnya pada lulusan Sekolah Menengah tentang Perguruan Tinggi.

2. Faktor Penghambat Sampai Dengan Tahun 2024

- Akses jalan/infrastruktur yang menuju tempat Satuan Pendidikan kurang memadai khususnya pada daerah terdepan, terpencil dan terisolir (3T), yaitu pada daerah kecamatan kelay, kabupaten Berau pada sekolah SMKN 4 Berau dan pada kecamatan Bongan, kabupaten Kutai Barat pada sekolah SMAN 1 Bongan dan SMKN 1 Bongan dan masih banyak sekolah yang bukan daerah 3T yang membutuhkan akses jalan yang baik untuk menuju kesekolahan.
- Masih kurangnya Satuan Pendidikan yang sesuai dengan standar nasional:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses;
 - d. Standar Penilaian Pendidikan;
 - e. Standar Tenaga Pendidikan;
 - f. Standara Sarana Prasarana;
 - g. Standa Pengelolaan;
 - h. Standar Pembiayaan;
- Kesadaran masyarakat terutama daerah 3T tentang pentingnya Pendidikan untuk anak-anak mereka .
- Kebanyakan lulusan sekolah menengah lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dari pada untuk melanjutkan ke perguruan tinggi
- Masih adanya anak tidak sekolah ataupun anak yang lulus tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dikarekan bebera faktor dibawah ini:
 - a. Tidak mau bersekolah;
 - b. Tidak ada biaya;
 - c. Sekolah yang jauh dari rumah;
 - d. Sudah cukup dengan Pendidikan yang dimiliki saat ini;
 - e. Menikah/ mengurus rumah tangga;
 - f. Mengalami kekerasan / perundungan / trauma disekolah;
 - g. Bekerja;
 - h. Pengaruh lingkungan;
 - i. Beranggapan sekolah tidak penting;
 - j. Tidak memiliki seragam sekolah;
 - k. Tidak memiliki akte kelahiran;
 - l. Masalah Kesehatan / peyandang disabilitas; dan

m. Alasan lainnya.

Data anak tidak sekolah (ATS) terdiri dari 3 kategori yaitu, drop out (DO), lulus tidak melanjutkan (LTM), dan belum pernah bersekolah (BPB) saat ini sebanyak 57.740 yang sudah terdata, status data yang telah terverifikasi 11,651 dan yang belum terverifikasi berjumlah 46,089 yang bersumber dari <https://Pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/>. Kendala dalam mengatasi data anak tidak sekolah ini lumayan rumit dikarenakan data yang terus bertambah setiap tahunnya dan pada laman web data tersebut tidak bisa menyatakan bahwa siswa tersebut telah bersekolah kembali.

2.3.3 Aspek Keuangan

Secara rinci alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari berbagai sumber dari APBN dan APBD. Pada tahun 2023 Anggaran Pendidikan baik alokasi maupun realisasi adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6 Program APBD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No.	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	DISDIKBUD	3.821.490.519.646,00	3.717.437.292.096,67	91,02%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.808.110.649.775,00	1.713.499.615.237,05	94,77%
2	Program Pengelolaan Pendidikan	1.962.469.351.021,00	1.720.886.456.613,00	87,69%
3	Program Pengembangan Kurikulum	8.256.292.400,00	7.689.655.915,00	93,14
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	16.185.551.800,00	11.967.492.400,00	73,94
5	Program Pengembangan Kebudayaan	9.571.194.460,00	8.788.101.829,00	91,82
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	7.466.015.921,00	6.588.890.550,00	88,25
7	Program Pembinaan Sejarah	503.145.710,00	421.898.952,00	83,85
8	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	3.500.891.859,00	3.116.731.798,00	89,03
9	Program Pengelolaan Permuseuman	5.427.426.700,00	5.266.496.739,00	97,03

Sumber : Laporan Kinerja tahun 2024

2.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 43 Tahun 2023 PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selain Tugas Pokok tersebut di atas terdapat fungsi yang melekat pada PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan, Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah luar biasa; Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum; Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi; Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsinya yang telah dijalankan ada beberapa permasalahan yang telah diselesaikan selama lima tahun, tetapi masih ada sejumlah permasalahan yang perlu ditindak lanjuti untuk tiga tahun mendatang.

Selain tugas pokok dan fungsi yang tertuang melalui Peraturan Gubernur masih ada tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintah Daerah”, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi antara lain adalah :

1. Pengelolaan Pendidikan Menengah;
2. Pengelolaan Pendidikan Khusus;
3. Penetapan Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus;
4. Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
5. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan

7. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Akses pendidikan yang belum optimal dan merata	Masih adanya anak tidak sekolah	- permasalahan ekonomi keluarga yang kerap kali menjadi penyebab sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan - biaya pendidikan yang belum sepenuhnya gratis - belum tersedianya fasilitas dan sarana prasarana pendidikan untuk kemudahan akses terhadap pendidikan, terutama pada daerah 3T - rendahnya partisipasi penyandang disabilitas terhadap pendidikan - kurangnya daya tampung sekolah terhadap lulusan jenjang SMP
2.	Belum optimalnya mutu layanan dasar pendidikan	Masih rendahnya satuan pendidikan yang mencapai literasi dan numerasi	- Penugasan guru sebagai kepala sekolah atau pendamping satuan pendidikan belum sepenuhnya memenuhi

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			persyaratan yang ditetapkan, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dan manajemen sekolah. - Pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal dalam melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang berdampak pada peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran. - Pendidik dan tenaga kependidikan belum maksimal dalam melakukan kegiatan refleksi dan perbaikan pembelajaran, sehingga inovasi dan evaluasi pembelajaran kurang terimplementasi secara optimal. - Kualitas pembelajaran di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal metode pengajaran, hasil belajar siswa, dan pemanfaatan teknologi. - Ketersediaan buku teks dan non-teks yang berkualitas untuk mendukung proses belajar mengajar masih belum mencukupi di beberapa satuan pendidikan. - Peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat praktik untuk mendukung pembelajaran literasi dan numerasi belum memadai di sejumlah sekolah.

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			- Kondisi lingkungan sekolah, baik fisik maupun sosial, belum sepenuhnya mendukung terciptanya suasana belajar yang nyaman, aman, dan kondusif bagi siswa.
3.		Kualitas pendidikan vokasi pada SMK yang belum sepenuhnya selaras dengan DUDI	- belum optimalnya pelaksanaan tracer study SMK (penelusuran lulusan) - Implementasi program Link and Match antara SMK dan dunia kerja belum optimal - Kurikulum pembelajaran di SMK belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja - Kepemimpinan kepala SMK belum optimal dalam mengelola SMK sebagai pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja - Kurangnya pendataan yang komprehensif terkait kemitraan antara SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) menghambat evaluasi dan pengembangan program link and match yang efektif - belum optimalnya pelatihan dan pendampingan bagi guru SMK dalam pengelolaan dan implementasi pembelajaran di Teaching Factory (TeFa) - Sarana dan prasarana pembelajaran di SMK belum sepenuhnya sesuai dengan standar dan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			teknologi yang digunakan di dunia kerja - Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK belum efektif dalam menjembatani lulusan dengan peluang kerja yang relevan - Komite Sekolah belum berperan aktif dalam mengembangkan kerjasama antara SMK dan dunia kerja - kurangnya pelibatan praktisi dunia kerja yang mengajar di SMK - Program sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dan standar industri - Pembinaan talenta kompetensi keahlian peserta didik - Keahlian guru dan tenaga kependidikan SMK selaras dengan dunia kerja
4.		Belum terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan	- adanya pergerakan data PTK yang disebabkan berbagai macam faktor (pensiun, dll) - masih adanya satuan pendidikan yang kekurangan atau bahkan ketidakselarasan baground guru dalam mengajar mata pelajaran - belum optimalnya perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan - belum berjalannya penataan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
5.		Belum optimalnya pengembangan kurikulum muatan lokal yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal	- Belum optimalnya pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal pada satuan pendidikan Jenjang sekolah menengah. - Belum optimalnya pemilihan Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan Kearifan Lokal daerah setempat. - Belum adanya regulasi penyesuaian/Sinkronisasi data Dapodik dengan Kurikulum Muatan Lokal. - Kurangnya Guru Mata Pelajaran sesuai dengan Kurikulum Muatan Lokal yang sudah ditetapkan) meliputi: Sumber Daya Alam (SDA), Seni Budaya, Bahasa Daerah: Berau, Dayak, Paser, dan Kutai. - Belum adanya Program Studi Bahasa Daerah di Perguruan Tinggi yang mencetak Guru yang memiliki kualifikasi Mata Pelajaran Bahasa Daerah yang ada di Kalimantan Timur. - Belum adanya regulasi dalam Dapodik yang mengakomodir penghitungan Jam Mata Pelajaran untuk guru yang mengampu Mata Pelajaran Muatan Lokal.
6.	Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah	Masih terdapat Objek Pemajuan Kebudayaan yang belum ter inventaris sehingga potensi hilangnya sangat tinggi	- Belum adanya turunan dari Perda Cagar Budaya, - kurangnya sumber daya manusia bidang kebudayaan yang kompeten, - Kurangnya dana / pembiayaan dalam pelestarian warisan budaya dan kurangnya

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			data dan kajian karya budaya. - Upaya pelestarian warisan budaya di Kalimantan Timur belum maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran, dukungan, dan partisipasi.

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur 2025 - 2029 **“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”**. Visi dan Misi Gubernur adalah gambaran umum yang ingin di capai pemerintah Daerah melalui beberapa sasaran. Untuk melaksanakan rencana strategis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memacu pada beberapa Misi Gubernur yaitu Misi 1 (satu) dan 5 (Lima) yaitu: **“Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera.” dan “Misi 5 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal.”**

Untuk mewujudkan Misi 1 dan 5 Gubernur diperlukan langkah-langkah strategis, yaitu perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci yang perlu di tempuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur agar rencana pembangunan jangka menengah khususnya bidang pendidikan dapat tercapai.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah di tetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025-2029 perlunya adanya indikator Kinerja Utama, Indikator kinerja Kunci serta program yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 yaitu: **“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”**. Serta untuk mewujudkan Misi 1 dan 5 itu maka dalam RPJMD telah ditetapkan indikator Tujuan dan sasaran yang harus dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah;
2. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah; dan
3. Meningkatnya indeks Pembangunan kebudayaan.

Sedangkan untuk mencapai Visi dan Misi diperlukan indikator agar arah kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan dan sasaran. Adapun Tujuan yang telah tertuang dalam RPJMD adalah Meningkatkan pemerataan taraf pendidikan masyarakat.

Adapun indikator sasaran dalam RPJMD Kalimantan Timur di bidang sumber daya manusia yang akan di capai dalam tiga tahun mendatang adalah sedangkan indikatornya adalah:

1. Rata-rata lama sekolah dari capaian tahun 2024 adalah 10,02 tahun dengan target pada akhir periode RPJMD sebesar 10,90 - 11,19 tahun pada tahun 2030;
2. Harapan Lama Sekolah dari capaian tahun 2024 adalah 14,03 tahun dengan target pada akhir periode RPJMD sebesar 14,42 - 14,55 tahun pada tahun 2030.

2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Renja 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, terdapat perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarnya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Hasil dari analisis kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, ada beberapa sub kegiatan yang ditambah ke dalam rancangan renja 2025 dikarenakan lebih mengutamakan pada kegiatan-kegiatan yang prioritas untuk tahun 2025 yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan serta hasil dari Analisa permasalahan Rapor Pendidikan.

Berikut ini akan diuraikan review terhadap rancangan awal renja RKPD tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			2.999.924.448.240,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			2.999.924.448.240,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.995.830.653.543,00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.995.830.653.543,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2.995.830.653.543,00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2.995.830.653.543,00		
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	1.706.869.199.158,00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	1.706.869.199.158,00		
							Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks			
	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.426.879.862,00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.426.879.862,00		
	1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	513.898.635,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	513.898.635,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	10 Dokumen	96.906.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	10 Dokumen	96.906.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			an, Semua Kel/Desa			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokume n	0,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokume n	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokume n	78.196.920, 00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokume n	78.196.920,0 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokume n	0,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokume n	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	10 Laporan	34.373.120, 00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	10 Laporan	34.373.120,0 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	118.904.160 ,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	118.904.160, 00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.577.120.4 39.834,00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.577.120.43 9.834,00		
	1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7551 Orang/ Bulan	1.574.253.8 71.276,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7551 Orang/ Bulan	1.574.253.87 1.276,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	1.694.040.0 00,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	1.694.040.00 0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	4 Dokume n	459.771.604 ,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	4 Dokume n	459.771.604, 00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	202.179.653 ,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	202.179.653, 00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
	1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokume n	0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokume n	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD	6 Laporan	510.577.301 ,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Se mesteran SKPD	6 Laporan	510.577.301, 00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terdata	90 %	1.282.669.1 14,00			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terdata	90 %	1.282.669.11 4,00		
	1	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokume n	869.678.431 ,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokume n	869.678.431, 00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	6 Laporan	412.990.683 ,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	6 Laporan	412.990.683, 00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Daerah pada SKPD						Daerah pada SKPD				
	1	01	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tepat Waktu	100 %	291.966.440,00			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tepat Waktu	100 %	291.966.440,00		
	1	01	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	243 Dokumen	120.346.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	243 Dokumen	120.346.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	171.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	171.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengembangkan Kompetensi	0 %	0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengembangkan Kompetensi	0 %	0		
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	0 Orang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	0 Orang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Perundang- Undangan			an, Semua Kel/Desa			Perundang- Undangan			Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	4.828.745.5 27,00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor	1 Laporan	4.828.745.52 7,00		
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.064.237.8 45,00	Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.064.237.84 5,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	97.931.458, 00	Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan	8 Paket	97.931.458,0 0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.666.576.2 24,00	Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.666.576.22 4,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokume n	0	Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokume n	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100 %	104.278.567 ,00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100 %	104.278.567, 00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0	Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	104.278.567 ,00	Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	104.278.567, 00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	108.513.848 .440,00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	108.513.848. 440,00		
	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000, 00	Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,0 0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	12.393.350. 403,00	Kota Samarind a, Semua		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	12.393.350.4 03,00	Kota Samarinda, Semua	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kecamat an, Semua Kel/Desa			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	395.820.640 ,00	Kota Samarind a, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap a n Kantor yang Disediakan	8 Laporan	395.820.640, 00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	95.714.677. 397,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	95.714.677.3 97,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dilakukan	100 %	1.816.974.2 00,00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pemeliharaa a n Barang Milik Daerah yang Dilakukan	100 %	1.816.974.20 0,00		
	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	118.495.000 ,00	Kota Samarind a, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	118.495.000, 00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56 Unit	1.260.295.0 00,00	Kota Samarind a, Semua Kecamatan,		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	56 Unit	1.260.295.00 0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Semua Kel/Desa		Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	417.088.200 ,00	Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	417.088.200, 00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	21.096.000, 00	Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	21.096.000,0 0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	5 Unit	3.557.457.1 34,00	Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	5 Unit	3.557.457.13 4,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 %	7.925.940.0 40,00			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 %	7.925.940.04 0,00		
	1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	7.925.940.0 40,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	7.925.940.04 0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16- 18 Tahun yang Berpartisipasi dalam	82,57	1.783.617.4 41.350,00			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipa	82,57	1.783.617.44 1.350,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Pendidikan Menengah (APS)						si dalam Pendidikan Menengah (APS)					
						Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	71,34					Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	71,34				
						Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	82,71					Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	82,71				
						Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	90,18					Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	90,18				
						persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	80,21%					persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	80,21%				
						persentase satuan pendidikan yang mencapai	70,95%					persentase satuan pendidikan yang	70,95%				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi						mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi				
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ruang Kelas SMA dalam Kondisi Baik	98,82%	578.613.381.504,00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ruang Kelas SMA dalam Kondisi Baik	98,82%	578.613.381.504,00		
							Persentase SMA/MA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100					Persentase SMA/MA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100			
							Persentase Siswa SMA/MA Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100					Persentase Siswa SMA/MA Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100			
							Indeks Iklim Keamanan SMA	84,84					Indeks Iklim Keamanan SMA	84,84			
							Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	74,88					Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	74,88			
							Indeks Inklusivitas SMA	64,58					Indeks Inklusivitas SMA	64,58			
							Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	78,5					Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	78,5			
							Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan	67,03					Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan	67,03			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Asesmen Nasional						Berdasarkan Asesmen Nasional				
								</									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa						Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1.074.365.0 00,00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1.074.365.00 0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa							
	1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	635.850.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	635.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	42.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	0 Ruang	0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Guru/Kepala Sekolah/TU	Direhabilitasi Sedang/Berat			an, Semua Kel/Desa			yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	96.111.900.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	96.111.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0040	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	42.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	6.646.572.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	6.646.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13943 Peserta Didik	116.966.767.496,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya	13943 Peserta Didik	116.966.767.496,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													Personil Peserta Didik				
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	686.206.500,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	686.206.500,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	700 Orang	49.841.020.000,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	700 Orang	49.841.020.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	584.920.000,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	584.920.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	245 Satuan Pendidik an	155.018.972 .984,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	245 Satuan Pendidik an	155.018.972. 984,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	0 Orang	0	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasny a dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	0 Orang	0	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokume n	488.436.488 ,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan , Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokume n	488.436.488, 00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokume n	64.144.000, 00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakana n	2 Dokume n	64.144.000,0 0	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	22 Komunit as	431.104.156 ,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	22 Komunit as	431.104.156, 00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	66.723.000,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	66.723.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	24.460.200,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	24.460.200,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Unit	48.099.128.000,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/bera t	5 Unit	48.099.128.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	0	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/bera t	0 Unit	0	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	46.333.715.300,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	46.333.715.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	0 Unit	0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	1.047.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	1.047.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggara kan Proses Belajar	238 Satuan Pendidik an	682.690.180 ,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelengga rakan Proses Belajar	238 Satuan Pendidik an	682.690.180, 00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ruang Kelas SMK Dalam Kondisi Baik	97,94%	1.131.738.2 98.690,00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ruang Kelas SMK Dalam Kondisi Baik	97,94%	1.131.738.29 8.690,00		
							Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100%					Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100%			
							Persentase Siswa SMK Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100%					Persentase Siswa SMK Penerima Bantuan Perlengkap an Sekolah	100%			
							Indeks Iklim Keamanan SMK	72,49					Indeks Iklim Keamanan SMK	72,49			
							Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	72,69					Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	72,69			
							Indeks Inklusivitas SMK	63,26					Indeks Inklusivitas SMK	63,26			
							Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	74,98					Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	74,98			
							Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	64,64					Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	64,64			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Jumlah SMK yang bermitra dengan DUDI	95					Jumlah SMK yang bermitra dengan DUDI	95			
							Persentase peserta didik yang tersertifikasi P1	100%					Persentase peserta didik yang tersertifikasi P1	100%			
	1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	194.510.366.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	194.510.366.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa							
	1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	8 Ruang	3.084.683.0 00,00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	8 Ruang	3.084.683.00 0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser,			Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa							
		1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00		Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratori um yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab.	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa					Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa							
	1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaa n Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa					Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab.		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	14.513.445. 000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara,		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	14.513.445.0 00,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua						Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa							
	1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamat an,	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitas i	0 Ruang	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa					Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua		Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratoriu m yang Telah	0 Ruang	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Direhabilitasi			Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa							
	1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	10.000.000, 00	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab.		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	10.000.000,0 0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan						Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa							
										Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartaneg ara,						Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa					Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1	01	02	1.02	0032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	8 Unit	3.000.000,0 0	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamat		Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	8 Unit	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										an, Semua Kel/Desa Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat						Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa							
	1	01	02	1.02	0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	18 Paket	36.219.595. 932,00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	18 Paket	36.219.595.9 32,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan,		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kel/Desa Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa						Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	83352 Peserta didik	126.086.823.023,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	83352 Peserta didik	126.086.823.023,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1.572.988.500,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1.572.988.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	550 Orang	41.637.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	550 Orang	41.637.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	569.200.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	569.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah Sekolah	185	35.400.000,00	Semua Kota/Kab		Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah Sekolah	185	35.400.000,00	Semua Kota/Kab,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	218 Satuan Pendidikan	150.464.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	218 Satuan Pendidikan	150.464.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.02	0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	100 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	100 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	283.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	283.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	25000 Orang	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	25000 Orang	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	4400 Buku	602.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	4400 Buku	602.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa							
	1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	0,00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitas i sedang/bera t	0 Unit	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa					Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	996.493.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kutai	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	996.493.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 Ruang	15.857.580. 000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara,		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 Ruang	15.857.580.0 00,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua					Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa							
	1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang	0	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamat an,	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitas i sedang/bera t	0 Ruang	0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa					Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggara	218 Satuan Pendidik an	178.326.140 ,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an,		Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelengga	218 Satuan Pendidik an	178.326.140, 00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							kan Proses Belajar			Semua Kel/Desa			rakan Proses Belajar				
	1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	1.039.250.000,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakana n	100 Orang	1.039.250.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	98,58%	73.265.761.156,00		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	98,58%	73.265.761.156,00			
					Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah		100%	Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah				100%					
					Persentase Siswa SLB Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah		100%	Persentase Siswa SLB Penerima Bantuan Perlengkapana Sekolah				100%					
					Indeks Iklim Keamanan SDLB		81,54	Indeks Iklim Keamanan SDLB				81,54					
					Indeks Iklim Keamanan SMPLB		77,83	Indeks Iklim Keamanan SMPLB				77,83					
					Indeks Iklim Keamanan SMALB		79,10	Indeks Iklim Keamanan SMALB				79,10					
					Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB		74,46	Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB				74,46					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	76,74					Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	76,74				
						Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	81,00					Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	81,00				
						Indeks Inklusivitas SDLB	72,14					Indeks Inklusivitas SDLB	72,14				
						Indeks Inklusivitas SMPLB	72,80					Indeks Inklusivitas SMPLB	72,80				
						Indeks Inklusivitas SMALB	74,28					Indeks Inklusivitas SMALB	74,28				
						Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional.	83,29					Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional.	83,29				
						Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	81,88					Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	81,88				
						Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	82,95					Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	82,95				
						Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional	76,13					Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional	76,13				
						Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan	75,05					Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan	75,05				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Asesmen Nasional.						Asesmen Nasional.				
							Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional.	73,57					Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional.	73,57			
	1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	
	1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	
	1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	
	1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0036	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	0 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah	0 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kecamat an, Semua Kel/Desa			Tangga yang Tersedia			Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	2.284.200.0 00,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkap an Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	2.284.200.00 0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0039	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	2 Unit	1.000.000,0 0	Kab. Kutai Kartaneg ara, Tenggaro ng, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Mencimai Kota Balikpap an, Balikpap an Selatan, Sepingga n Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala Kota Samarind a, Samarind a Utara, Sempaja Selatan Kab. Penajam Paser Utara,		Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	2 Unit	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Mencimai Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Penajam, Gunung Seteleng							
	1	01	02	1.03	0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	1.911.808.0 46,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	1.911.808.04 6,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	3.747.570.0 00,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	3.747.570.00 0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik	1125 Peserta Didik	2.643.261.5 97,00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/L omba Akademik dan Non Akademik	1125 Peserta Didik	2.643.261.59 7,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	210 Orang	4.862.580.0 00,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidika n yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	210 Orang	4.862.580.00 0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golon gan, Pemberian Promosi,	100 Orang	99.600.000, 00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidika n yang Mendapatka n Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Gol ongan, Pemberian Promosi,	100 Orang	99.600.000,0 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				
	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	36 Satuan Pendidik an	165.864.834 ,00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksana n Pembinaan Kelembagaa n dan Manajemen	36 Satuan Pendidik an	165.864.834, 00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	36 Satuan Pendidik an	11.511.570. 000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	36 Satuan Pendidik an	11.511.570.0 00,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	0 Orang	0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasny a dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	0	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 Konten Digital	0	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangk an	0 Konten Digital	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanaka n	0 Orang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokume n	271.800.000 ,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan , Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokume n	271.800.000, 00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	4 Dokume n	268.933.578 ,00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang	4 Dokume n	268.933.578, 00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							yang dilaksanakan						dilaksanakan				
	1	01	02	1.03	0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	36 Orang	114.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	36 Orang	114.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	109.964.834,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	109.964.834,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Long Melaham		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Long Melaham	
	1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	1.596.790.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Unit	1.596.790.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												Sedang/Berat					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelengga kan Proses Belajar	36 Satuan Pendidik an	130.200.000 ,00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelengga rakan Proses Belajar	36 Satuan Pendidik an	130.200.000, 00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	207.554.289 ,00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksana n	50 Orang	207.554.289, 00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0	Kab. Mahaka m Ulu, Long Bagun, Long Melaham		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Gur u/Pejaga Sekolah yang Telah Direhabilitas i Sedang/Bera t	0 Unit	0	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Long Melaham	
	1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1.000.000,0 0	Kab. Kutai Kartaneg ara, Tenggaro ng, Panji Kab. Mahaka m Ulu, Long Bagun, Long Melaham		Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaa n Sekolah yang Telah Direhabilitas i sedang/bera t	1 Ruang	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Long Melaham	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	5 Ruang	1.000.000,0 0	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitas i sedang berat	5 Ruang	1.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunit as	2.400.000,0 0	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunit as	2.400.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1260 Buku	321.300.000 ,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1260 Buku	321.300.000, 00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.050.000,0 0	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuha n Khusus yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.050.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Mengembangk an Kurikulum Muatan Lokal	52%	1.334.256.7 68,00			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Mengembangk an Kurikulum Muatan Lokal	52%	1.334.256.76 8,00		
	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah SMA/SMK yang Mengembangk an Kurikulum Muatan Lokal	238 Satuan Pendidik an	287.839.308 ,00			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah SMA/SMK yang Mengembangk an Kurikulum Muatan Lokal	238 Satuan Pendidik an	287.839.308, 00		
	1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Jumlah Penyusun Kurikulum	20 Orang	216.205.308 ,00	Semua Kota/ Kab , Semua		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan	Jumlah Penyusun Kurikulum	20 Orang	216.205.308, 00	Semua Kota/ Kab, Semua	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya			Kecamatan, Semua Kel/Desa		Lokal Pendidikan Menengah	Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya			Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	03	1.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	71.634.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	71.634.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	03	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	35 Satuan Pendidikan	1.046.417.460,00			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	35 Satuan Pendidikan	1.046.417.460,00		
	1	01	03	1.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	21.600.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	21.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	03	1.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan	400 Buku	21.600.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal	400 Buku	21.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Khusus yang Tersedia			Semua Kel/Desa		Pendidikan Khusus yang Tersedia			Semua Kel/Desa		
	1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	40 Orang	327.205.820,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	40 Orang	327.205.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	03	1.02	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	1 Buku	21.600.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	1 Buku	21.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	03	1.02	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	1 Dokumen	327.205.820,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	1 Dokumen	327.205.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	03	1.02	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	327.205.820,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	327.205.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Distribusi Guru Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	0,6 52,22%	841.215.040,00			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Distribusi Guru	0,6	841.215.040,00		
													Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	52,22%			
	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan	Persentase kebutuhan	50%	841.215.040,00			Pemindahan Pendidik dan Tenaga	Persentase kebutuhan	50%	841.215.040,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	pendidik dan tenaga kependidikan yang dipenuhi					Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	pendidik dan tenaga kependidikan yang dipenuhi				
	1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	500 Dokumen	513.115.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	500 Dokumen	513.115.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Laporan	328.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Laporan	328.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
5	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	7,5%	200.000.000,00			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	7,5%	200.000.000,00		Rekomendasi Dari Bappeda
	1	01	06	01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan lintas daerah	2 Kegiatan	200.000.000,00			Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan lintas	2 Kegiatan	200.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKP				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	yang terlaksana					dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	daerah yang terlaksana				
	1	01	06	1.01	0012	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	1 Buku	200.000.000 ,00			Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusik an	1 Buku	200.000.000, 00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.097.994.6 97,00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.097.994.69 7,00		
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			4.097.994.6 97,00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			4.097.994.69 7,00		
6	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	58 %	127.000.000 ,00			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	58 %	127.000.000, 00		
	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	100%	118.000.000 ,00			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangk an dan Dimanfaatka n	100%	118.000.000, 00		
	2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, dan Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	50 Orang	9.000.000,0 0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an,		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia,	50 Orang	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Pranata Kebudayaan			Semua Kel/Desa			Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				
	2	22	02	1.01	0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	11 Objek	109.000.000 ,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pelindungan Objek Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	11 Objek	109.000.000, 00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah event Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan	9.000.000,0 0			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah event Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan	9.000.000,00		
	2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembag a yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	100 Sertifikat	9.000.000,0 0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lemb aga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	100 Sertifika t	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
7	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	50 %	1.861.355.4 50,00			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukk an seni	50 %	1.861.355.45 0,00		
	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina	112 Kesenian	1.861.355.4 50,00			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina	112 Kesenia n	1.861.355.45 0,00		
	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan	Jumlah Sumber Daya	200 Orang	9.000.000,0 0	Semua Kota/Kab		Peningkatan Pendidikan dan	Jumlah Sumber	200 Orang	9.000.000,00	Semua Kota/Kab,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Di tingkatkan Kompetensinya)			, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Di tingkatkan Kompetensin ya)			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	152 Orang	9.000.000,0 0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	152 Orang	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Di tingkatkan Kapasitasnya	553 Lembaga	1.843.355.4 50,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Di tingkatkan Kapasitasny a	553 Lembag a	1.843.355.45 0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
8	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal	30 %	8.400.000,0 0			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal	30 %	8.400.000,00		
	2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal	939 Orang	8.400.000,0 0			Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal	939 Orang	8.400.000,00		
	2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data	Jumlah Dokumen Data dan Informasi	250 Dokume n	8.400.000,0 0	Semua Kota/Kab , Semua		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap	Jumlah Dokumen Data dan	250 Dokume n	8.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						dan Informasi Sejarah	Sejarah yang dapat diakses Masyarakat			Kecamat an, Semua Kel/Desa		Data dan Informasi Sejarah	Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat			Kecamatan, Semua Kel/Desa	
9	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	50 %	2.092.239.2 47,00			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	50 %	2.092.239.24 7,00		
	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan terhadap total yang terdaftar	24 Cagar Budaya	1.773.463.0 67,00			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan terhadap total yang terdaftar	24 Cagar Budaya	1.773.463.06 7,00		
	2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	1.773.463.0 67,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	1.773.463.06 7,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	46%	318.776.180 ,00			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatka n	46%	318.776.180, 00		
	2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	9.000.000,0 0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangk an	2 Objek	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	44 Objek	300.776.180 ,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatka n	44 Objek	300.776.180, 00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Di	70 Orang	9.000.000,0 0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an,		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang	70 Orang	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							tingkatkan Kapasitasnya			Semua Kel/Desa			Dibina dan Di tingkatkan Kapasitasnya			Semua Kel/Desa	
10	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan pengunjung museum	15 %	9.000.000,0 0			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan pengunjung museum	15 %	9.000.000,00		
	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pengunjung Museum	89423 Orang	9.000.000,0 0			Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pengunjung Museum	89423 Orang	9.000.000,00		
	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	9.000.000,0 0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
						UPTD Taman Budaya			9.508.164.1 53,00			UPTD Taman Budaya			9.508.164.15 3,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.508.164.1 53,00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.508.164.15 3,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			9.508.164.1 53,00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			9.508.164.15 3,00		
11	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	5.551.055.3 83,00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	5.551.055.38 3,00		
							Indeks Kualitas Layanan Keseekretariat an	92 Indeks					Indeks Kualitas Layanan Keseekretariat an	92 Indeks			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	190.440.000 ,00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	190.440.000, 00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokume n	190.440.000 ,00	Kota Samarind a, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokume n	190.440.000, 00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Belanja	4 Dokume n	522.265.083 ,00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Belanja	4 Dokume n	522.265.083, 00		
	1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	63.799.797, 00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	63.799.797,0 0	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	80.236.416, 00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	9 Paket	80.236.416,0 0	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.957.870,0 0	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.957.870,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	368.271.000 ,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	368.271.000, 00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100 %	1.247.830.0 00,00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100 %	1.247.830.00 0,00		
	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/ Desa		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	
	1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.247.830.0 00,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/ Desa		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.247.830.00 0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	3.120.116.1 00,00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	3.120.116.10 0,00		
	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.756.800,0 0	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/ Desa		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.756.800,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	
	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291.999.300 ,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/ Desa		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291.999.300, 00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	2.820.360.0 00,00	Semua Kota/ Kab , Semua		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	2.820.360.00 0,00	Semua Kota/ Kab, Semua	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kecamat an, Semua Kel/Desa		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	70 %	470.404.200 ,00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaa n	70 %	470.404.200, 00		
	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	306.900.000 ,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	306.900.000, 00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	163.504.200 ,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	163.504.200, 00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.957.108.770,00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.957.108.770,00		
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.957.108.770,00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.957.108.770,00		
11	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan pengunjung seni pertunjukan	5 %	3.717.534.720,00			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan pengunjung seni pertunjukan	5 %	3.717.534.720,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (Seni) yang Dilindungi, Dikembangkan , dan Dimanfaatkan	40 %	2.103.000.0 00,00			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (Seni) yang Dilindungi, Dikembangk an, dan Dimanfaatka n	40 %	2.103.000.00 0,00		
	2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	3 Unit	103.000.000 ,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	3 Unit	103.000.000, 00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	22	02	1.01	0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegia tan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	6 Kegiatan	2.000.000.0 00,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Ke giatan Pengembang an dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	6 Kegiatan	2.000.000.00 0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	100 %	1.614.534.7 20,00			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembang an dan Pemanfaatan	100 %	1.614.534.72 0,00		
	2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan	10 Objek	1.614.534.7 20,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembang	10 Objek	1.614.534.72 0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							dan Pemanfaatan						an dan Pemanfaatan				
12	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Sanggar Seni yang Dibina	53,13%	239.574.050 ,00			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Sanggar Seni yang Dibina	53,13%	239.574.050, 00		
	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Seniman dan Sanggar Seni yang Dibina	55 Seniman	239.574.050 ,00			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Seniman dan Sanggar Seni yang Dibina	55 Senima n	239.574.050, 00		
	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Di tingkatkan Kompetensinya)	275 Orang	239.574.050 ,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Di tingkatkan Kompetensin ya)	275 Orang	239.574.050, 00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
						UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN			17.814.745. 986,00			UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan			17.814.745.9 86,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.814.745. 986,00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.814.745.9 86,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			17.814.745. 986,00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			17.814.745.9 86,00		
13	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	3.197.994.9 75,00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang	100 %	3.197.994.97 5,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													Ditindaklanjuti				
							Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariat an	92 Indeks			
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	91.200.000,00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	91.200.000,00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	91.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	91.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	0		
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	
	1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	0,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	621.709.895 ,00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor	12 Laporan	621.709.895, 00		
	1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.434.437,0 0	Kota Samarind a, Samarind a Kota, Sungai Pinang Luar		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.434.437,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	96.409.337, 00	Kota Samarind a, Samarind a Kota, Sungai Pinang Luar		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	2 Paket	96.409.337,0 0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	
	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.634.121, 00	Kota Samarind a, Samarind a Kota, Sungai Pinang Luar		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	1 Paket	43.634.121,0 0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	476.232.000 ,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	476.232.000, 00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100 %	89.840.011, 00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100 %	89.840.011,0 0		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	89.840.011,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	89.840.011,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	2.162.896.069,00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	2.162.896.069,00		
	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.580.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.580.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	
	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	893.516.069,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	893.516.069,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.261.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.261.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	232.349.000,00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	232.349.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	73.557.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	73.557.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	54.490.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	54.490.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	
	1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1 Unit	104.302.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	104.302.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	
14	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	80,21%	16.200.000,00			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional	80,21%	16.200.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							Untuk Literasi Membaca				
							Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	70,95%					Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	70,95%			
							Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	198 Satuan Pendidik an	8.100.0000, 00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	198 Satuan Pendidik an	8.100.0000,0 0		
													Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi	171 Satuan Pendidik an			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.01	0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	171 Satuan Pendidik an	6.908.004.6 62,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	0 Paket	0	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik	576 Peserta Didik	648.039.030 ,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/L omba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	186 Orang	922.866.000 ,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500 Orang	2.700.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan	50 Konten Digital	464.611.700 ,00	Semua Kota/ Kab , Semua		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk	80 Konten Digital	2.700.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							yang telah dikembangkan			Kecamat an, Semua Kel/Desa			pendidikan yang telah dikembangk an			Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang	913.212.000 ,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanaka n	250 Orang	2.700.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0064	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	23.057.628. 000,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca Jumlah SMK	149 Satuan Pendidik an	5.400.000,0 0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca Jumlah SMK	149 Satuan Pendidik an	5.400.000,00			
							Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	132 Satuan Pendidik an				Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	132 Satuan Pendidik an				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.02	0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik	348 Peserta Didik	3.153.771.3 24,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/L omba Akademik dan Non Akademik	348 Peserta Didik	3.153.771.32 4,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500 Orang	1.800.000,0 0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pembinaa n Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500 Orang	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	1.800.000,0 0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangk an	80 Konten Digital	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	1.800.000,0 0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanaka n	250 Orang	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0058	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat		Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur	0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										an, Semua Kel/Desa			TIK yang tersedia			Semua Kel/Desa	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah SLB Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	35 Satuan Pendidik an	2.700.000,0 0				Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah SLB Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	35 Satuan Pendidik an	2.700.000,00		
						Jumlah SLB Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	33 Satuan Pendidik an						Jumlah SLB Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	33 Satuan Pendidik an			
	1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang	900.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang	900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	20 Konten Digital	900.000,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangk an	20 Konten Digital	900.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200orang	900.000,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanaka n	200orang	900.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0063	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	0,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
						UPTD Museum Negeri Mulawarman			10.943.061. 415,00			UPTD Museum Negeri Mulawarman			10.943.061.4 15,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.943.061. 415,00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.943.061.4 15,00		
	2	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			10.943.061. 415,00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			10.943.061.4 15,00		
15	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	9.926.398.5 97,00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanj uti	100 %	9.926.398.59 7,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	92 Indeks					Indeks Kualitas Layanan Keseekretariat an	92 Indeks			
	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	154.560.000 ,00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	154.560.000, 00		
	2	22	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	154.560.000 ,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Tenggaro ng, Panji		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	154.560.000, 00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	
	2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50%	28.331.492, 00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50%	28.331.492,0 0		
	2	22	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	28.331.492, 00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Tenggaro ng, Panji		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	28.331.492,0 0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	
	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.280.918.1 23,00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.280.918.12 3,00		
	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.379.302, 00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Tenggaro ng, Panji		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.379.302,0 0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.529.934,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.529.934,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	
	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.121.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.121.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	
	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.162.887.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.162.887.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	3.133.970.800,00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	3.133.970.800,00		
	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.770.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.770.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	
	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.050.120.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.050.120.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	
	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan	1 Laporan	48.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	1 Laporan	48.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			ara, Tenggarong, Panji		Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Tenggarong, Panji	
	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.021.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.021.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	
	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	371.287.000,00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	371.287.000,00		
	2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	171.287.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	171.287.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	
	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	
	2	22	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi					Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi					
17	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan pengunjung museum Mulawarman	10 %	5.973.994.0 00,00			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan pengunjung museum Mulawarman	10 %	5.973.994.00 0,00		
	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pengunjung Museum Mulawarman	65.877 Orang	5.973.994.0 00,00			Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pengunjung Museum Mulawarman	65.877 Orang	5.973.994.00 0,00		
	2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan , dan Pemanfaatan	1 Unit	587.080.000 ,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Tenggaro ng, Panji		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembang an, dan Pemanfaatan	1 Unit	587.080.000, 00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	
	2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseum	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseum yang Di tingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	23.794.000, 00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseum	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseum n yang Di tingkatkan Mutu dan Kapasitasny a	5 Orang	23.794.000,0 0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	962.920.000 ,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Tenggaro ng, Panji		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	962.920.000, 00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	
	2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	250.000.000 ,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Tenggaro ng, Panji		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	250.000.000, 00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	
	2	22	06	1.01	0005		Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	4.150.200.0 00,00			Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum	1 Unit	4.150.200.00 0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Museum yang Direvitalisasi						yang Direvitalisasi				
						Dinas Pendidikan Wilayah I			90.482.590. 700,00			Dinas Pendidikan Wilayah I			90.482.590.7 00,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			90.482.590. 700,00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			90.482.590.7 00,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			90.482.590. 700,00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			90.482.590.7 00,00		
18	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	22.585.740. 700,00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	22.585.740.7 00,00		
							Indeks Kualitas Layanan Keseekretariat an	92 Indeks					Indeks Kualitas Layanan Keseekretariat an	92 Indeks			
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	223.800.000 ,00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	223.800.000, 00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	223.800.000 ,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	223.800.000, 00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan	0 Laporan	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	0 Laporan	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0%				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0%			
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket	1 Dokumen	897.415.700,00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket	1 Dokumen	897.415.700,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Peralatan dan Perlengkap an Kantor				
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	127.765.700 ,00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	5 Paket	127.765.700, 00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	769.650.000 ,00	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	769.650.000, 00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pegguna Layanan	1 Laporan	21.268.980. 000,00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pegguna Layanan	1 Laporan	21.268.980.0 00,00		
	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	182.220.000 ,00	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	182.220.000, 00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.086.760. 000,00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara,		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.086.760.0 00,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa							
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	195.545.000 ,00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaa n	100%	195.545.000, 00		
	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	140.825.000 ,00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	140.825.000, 00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	54.720.000, 00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	54.720.000,0 0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0 Unit	0	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	0 Unit	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
19	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16- 18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara	78,61%	67.896.850. 000,00		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipa si dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara	78,61%	67.896.850.0 00,00			
							Persentase Anak Usia 4- 18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara	39,17%				Persentase Anak Usia 4- 18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipa si dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara	39,17%				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Persentase satuan pendidikan wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas I)	87,27%					Persentase satuan pendidikan wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas I)	87,27%			
							Persentase satuan pendidikan wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas I)	82,12%					Persentase satuan pendidikan wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas I)	82,12%			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas I)	36 Satuan Pendidik an	31.169.880. 000,00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas I)	36 Satuan Pendidik an	31.169.880.0 00,00		
							Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas I)	34 Satuan Pendidik an					Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas I)	34 Satuan Pendidik an			
							Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I)	100%					Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I)	100%			
	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima	13329 Peserta didik	31.169.880. 000,00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang	13329 Peserta didik	31.169.880.0 00,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Biaya Personil Peserta Didik			an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa			Menerima Biaya Personil Peserta Didik			Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas I)	35 Satuan Pendidik an	35.344.900. 000,00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas I)	35 Satuan Pendidik an	35.344.900.0 00,00		
							Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas I)	32 Satuan Pendidik an					Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas I)	32 Satuan Pendidik an			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I)	100%					Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I)	100%			
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		12784 Peserta Didik	35.344.900. 000,00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12784 Peserta Didik	35.344.900.0 00,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/L omba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										an, Semua Kel/Desa							
	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golon gan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidika n yang Mendapatka n Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Gol ongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksana n Pembinaan Kelembagaa n dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi	7 Satuan Pendidik an	1.382.070.0 00,00			Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional	7 Satuan Pendidik an	1.382.070.00 0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Membaca (Wilayah Cabang Dinas I)		1.382.070.0 00,00	Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an,	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas I)		1.382.070.00 0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
							Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas I)	7 Satuan Pendidik an				Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas I)	7 Satuan Pendidik an				
							Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I)	100%				Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I)	100%				
							Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	527 Peserta Didik				Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	527 Peserta Didik				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kel/Desa							
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
						Dinas Pendidikan Wilayah II			68.330.928. 923,00			Dinas Pendidikan Wilayah II			68.330.928.9 23,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			68.330.928. 923,00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			68.330.928.9 23,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN			68.330.928. 923,00			URUSAN PEMERINTAHAN			68.330.928.9 23,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						BIDANG PENDIDIKAN						BIDANG PENDIDIKAN					
20	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	24.059.704. 923,00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	24.059.704.9 23,00		
							Indeks Kualitas Layanan Keseekretariat an	92 Indeks					Indeks Kualitas Layanan Keseekretariat an	92 Indeks			
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	217.440.000 ,00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	217.440.000, 00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	217.440.000 ,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	217.440.000, 00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 %	0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 %	0		
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kota Bontang, Semua Kecamat		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	0 Paket	0	Kota Bontang, Semua Kecamatan,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa			Beserta Atribut Kelengkapan			Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	414.587.638 ,00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor	1 Laporan	414.587.638, 00		
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	99.998.996, 00	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	5 Paket	99.998.996,0 0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	314.588.642 ,00	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an,		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	314.588.642, 00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kel/Desa							
	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	9.960.627,0 0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	9.960.627,00		
	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9.960.627,0 0	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9.960.627,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	23.254.906. 658,00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	23.254.906.6 58,00		
	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.043.858, 00	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.043.858,0 0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kecamat an, Semua Kel/Desa						Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.199.862. 800,00	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.199.862.8 00,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	162.810.000 ,00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaa n	100%	162.810.000, 00		
	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	149.980.000 ,00	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	149.980.000, 00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	12.830.000, 00	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	12.830.000,0 0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
21	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Timur dan Bontang	70,50%	44.271.224.000,00		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Timur dan Bontang	70,50%	44.271.224.000,00			
							Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Timur dan Bontang	41,02%				Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Timur dan Bontang	41,02%				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Timur dan Bontang yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas II)	81,98%				persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Timur dan Bontang yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas II)	81,98%				
							persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Timur dan Bontang yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas II)	67,16%				persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Timur dan Bontang yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas II)	67,16%				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas II)	31 Satuan Pendidik an	21.532.354.000,00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas II)	31 Satuan Pendidik an	21.532.354.000,00			
						Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas II)	26 Satuan Pendidik an	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas II)		26 Satuan Pendidik an							
						Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah II)	100%	Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah II)		100%							
	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	19937 Peserta didik	21.227.164.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya	19937 Peserta didik	21.227.164.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur,		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Personil Peserta Didik			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik	600 Peserta Didik	297.000.000 ,00	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/L omba Akademik dan Non Akademik	600 Peserta Didik	297.000.000, 00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golon gan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	8.190.000,0 0	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidika n yang Mendapatka n Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Gol ongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	8.190.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaa n dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa						Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas II)	27 Satuan Pendidik an	22.041.040. 0 00,00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas II)	27 Satuan Pendidik an	22.041.040.0 00,00		
							Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas II)	15 Satuan Pendidik an					Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas II)	15 Satuan Pendidik an			
							Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah II)	100%					Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah II)	100%			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12146 Peserta didik	21.735.850.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12146 Peserta didik	21.735.850.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	297.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	297.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	8.190.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	8.190.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksana n Pembinaan Kelembagaa n dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas II)	10 Satuan Pendidik an	697.830.000 ,00		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas II)	10 Satuan Pendidik an	697.830.000, 00			
						Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas II)	9 Satuan Pendidik an					Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas II)	9 Satuan Pendidik an				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah II)	100%					Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah II)	100%			
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	276 Peserta Didik	656.640.000 ,00	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	276 Peserta Didik	656.640.000, 00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik	370 Peserta Didik	33.000.000, 00	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/L omba Akademik dan Non Akademik	370 Peserta Didik	33.000.000,0 0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	30 Orang	8.190.000,0 0	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab.		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidika n yang Mendapatka n Fasilitasi Kenaikan	30 Orang	8.190.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Pangkat/Golon gan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa			Pangkat/Gol ongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaa n dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
						Dinas Pendidikan Wilayah III			85.045.948. 901,00			Dinas Pendidikan Wilayah III			85.045.948.9 01,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			85.045.948. 901,00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			85.045.948.9 01,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			85.045.948. 901,00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			85.045.948.9 01,00		
22	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	27.310.556. 901,00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanj uti	100 %	27.310.556.9 01,00		
							Indeks Kualitas Layanan Kesekretariata n	92 Indeks					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariat an	92 Indeks			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	180.120.000 ,00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	180.120.000, 00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	180.120.000 ,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	180.120.000, 00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0%	0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0%	0		
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai	0 Orang	0	Kab. Kutai		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai	0 Orang	0	Kab. Kutai Kartanegara,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	286.372.001 ,00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor	1 Laporan	286.372.001, 00		
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	55.172.001, 00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	60 Paket	55.172.001,0 0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	231.200.000 ,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	231.200.000, 00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	754.697.500 ,00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	754.697.500, 00		
	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an,		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kel/Desa							
	1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	754.697.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	754.697.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	25.947.926.400,00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	25.947.926.400,00		
	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149.366.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149.366.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.798.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.798.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	141.441.000,00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	141.441.000,00		
	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	10 Unit	118.381.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	118.381.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			an, Semua Kel/Desa		Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	23.060.000, 00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	23.060.000,0 0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
23	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16- 18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Kartanegara	78,84%	57.735.392. 000,00			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipa si dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Kartanegara	78,84%	57.735.392.0 00,00		
							Persentase Anak Usia 4- 18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Kartanegara	17,23%					Persentase Anak Usia 4- 18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipa si dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Kartanegara	17,23%			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas III)	69,39%					persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas III)	69,39%			
							persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas III)	62,24%					persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas III)	62,24%			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)	41 Satuan Pendidik an	36.608.252. 0 00,00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)	41 Satuan Pendidik an	36.608.252.0 00,00		
							Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III)	35 Satuan Pendidik an					Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III)	35 Satuan Pendidik an			
							Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III)	100%					Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III)	100%			
	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15450 Peserta didik	36.051.752. 000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan an,		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya	15450 Peserta didik	36.051.752.0 00,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Semua Kel/Desa			Personil Peserta Didik				
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/L omba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golon gan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidika n yang Mendapatka n Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Gol ongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	56 Satuan Pendidik an	556.500.000 ,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaa n dan Manajemen	56 Satuan Pendidik an	556.500.000, 00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)	24 Satuan Pendidikan	20.624.130.000,00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)	24 Satuan Pendidikan	20.624.130.000,00		
							Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III)	23 Satuan Pendidikan					Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III)	23 Satuan Pendidikan			
							Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III)	100%					Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III)	100%			
	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima	7834 Peserta didik	20.333.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima	7834 Peserta didik	20.333.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Biaya Personil Peserta Didik			Semua Kel/Desa			Biaya Personil Peserta Didik				
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	54 Satuan Pendidik an	290.850.000 ,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	54 Satuan Pendidik an	290.850.000, 00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)	3 Satuan Pendidik an	503.010.000,00		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)	3 Satuan Pendidik an	503.010.000,00			
							Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III)	3 Satuan Pendidik an				Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III)	3 Satuan Pendidik an				
							Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III)	100%				Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III)	100%				
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima	218 Peserta Didik	503.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima	218 Peserta Didik	503.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Biaya Personil Peserta Didik			Kecamat an, Semua Kel/Desa		Biaya Personil Peserta Didik			Semua Kel/Desa		
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
						Dinas Pendidikan Wilayah IV			36.103.872.552,00			Dinas Pendidikan Wilayah IV			36.103.872.552,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.103.872.552,00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.103.872.552,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			36.103.872.552,00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			36.103.872.552,00		
24	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	18.591.513.752,00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang	100 %	18.591.513.752,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						DAERAH PROVINSI							Ditindaklanjuti				
							Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariat an	92 Indeks			
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	129.540.000 ,00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	129.540.000, 00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	118.560.000 ,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	118.560.000, 00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.980.000, 00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.980.000,0 0	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	6.480.000,0 0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatka n Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	6.480.000,00		
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokume n	6.480.000,0 0	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokume n	6.480.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	798.840.000 ,00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan	1 Laporan	798.840.000, 00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													Perlengkapan Kantor				
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	165.466.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	165.466.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	633.374.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	633.374.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	0%	0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	0%	0		
	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	17.519.973. 752,00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	17.519.973.7 52,00		
	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87.093.752. 00	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87.093.752,0 0	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17.432.880. 000,00	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17.432.880.0 00,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100 %	136.680.000 ,00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaa n	100 %	136.680.000, 00		
	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	102.340.000 ,00	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	102.340.000, 00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	34.340.000, 00	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	34.340.000,0 0	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
25	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16- 18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu	63,08%	17.512.358. 800,00			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipa si dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu	63,08%	17.512.358.8 00,00		
							Persentase Anak Usia 4- 18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu	11,82%					Persentase Anak Usia 4- 18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipa si dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu	11,82%			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas IV)	58,93%					persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas IV)	58,93%			
							persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas IV)	39,28%					persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas IV)	39,28%			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV)	19 Satuan Pendidik an	10.685.990. 000,00				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV)	19 Satuan Pendidik an	10.685.990.0 00,00		
						Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV)	16 Satuan Pendidik an						Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV)	16 Satuan Pendidik an			
						Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)	100%						Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)	100%			
	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5452 Peserta didik	10.506.290. 000,00	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya	5452 Peserta didik	10.506.290.0 00,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa			Personil Peserta Didik			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik	659 Peserta Didik	159.000.000 ,00	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/L omba Akademik dan Non Akademik	659 Peserta Didik	159.000.000, 00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golon gan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	273 Orang	20.700.000, 00	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidika n yang Mendapatka n Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Gol ongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	273 Orang	20.700.000,0 0	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV)	10 Satuan Pendidik an	6.438.206.6 00,00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV)	10 Satuan Pendidik an	6.438.206.60 0,00		
							Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV)	7 Satuan Pendidik an					Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV)	7 Satuan Pendidik an			
							Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)	100%					Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)	100%			
	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima	2548 Peserta didik	6.344.520.0 00,00	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima	2548 Peserta didik	6.344.520.00 0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Biaya Personil Peserta Didik			Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Biaya Personil Peserta Didik			Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	137 Peserta Didik	80.186.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	137 Peserta Didik	80.186.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	14 Orang	13.500.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	14 Orang	13.500.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV)	1 Satuan Pendidik an	388.162.200,00			Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV)	1 Satuan Pendidik an	388.162.200,00		
							Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV)	1 Satuan Pendidik an					Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV)	1 Satuan Pendidik an			
							Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)	100%					Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)	100%			
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima	166 Peserta Didik	377.120.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima	166 Peserta Didik	377.120.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Biaya Personil Peserta Didik			an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Biaya Personil Peserta Didik			Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta Didik	6.542.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta Didik	6.542.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4 Orang	4.500.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4 Orang	4.500.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
						Dinas Pendidikan Wilayah V			38.524.071.644,00			Dinas Pendidikan Wilayah V			38.524.071.644,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG			38.524.071.644,00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG			38.524.071.644,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			38.524.071. 644,00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		38.524.071.6 44,00			
26	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	15.254.466. 644,00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	15.254.466.6 44,00		
							Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariat an	92 Indeks			
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	202.320.000 ,00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	202.320.000, 00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	202.320.000 ,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	202.320.000, 00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0%	0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatka n Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0%	0		
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokume n	0	Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokume n	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	825.107.136 ,00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor	1 Laporan	825.107.136, 00		
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	108.307.136 ,00	Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	8 Paket	108.307.136, 00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	716.800.000 ,00	Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	716.800.000, 00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													Konsultasi SKPD				
	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100 %	222.000.000 ,00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100 %	222.000.000, 00		
	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	222.000.000 ,00	Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	222.000.000, 00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pegguna Layanan	1 Laporan	13.845.361. 508,00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pegguna Layanan	1 Laporan	13.845.361.5 08,00		
	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.601.508 ,00	Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.601.508, 00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.715.760. 000,00	Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.715.760.0 00,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100 %	159.678.000 ,00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaa n	100 %	159.678.000, 00		
	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	134.998.000 ,00	Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	134.998.000, 00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	24.680.000, 00	Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	24.680.000,0 0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
27	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16- 18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Paser	72,30%	23.269.605. 000,00			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipa si dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Paser	72,30%	23.269.605.0 00,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Persentase Anak Usia 4- 18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Paser	27,00%					Persentase Anak Usia 4- 18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipa si dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Paser	27,00%			
							persentase satuan pendidikan wilayah Paser yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas V)	70,00%					persentase satuan pendidikan wilayah Paser yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas V)	70,00%			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							persentase satuan pendidikan wilayah Paser yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas V)	60,00%					persentase satuan pendidikan wilayah Paser yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas V)	60,00%			
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V)	14 Satuan Pendidikan	14.187.730.000,00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V)	14 Satuan Pendidikan	14.187.730.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V)	11 Satuan Pendidikan					Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V)	11 Satuan Pendidikan			
							Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V)	100%					Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V)	100%			
	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6059 Peserta Didik	14.036.720.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6059 Peserta Didik	14.036.720.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	773 Peserta Didik	114.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	773 Peserta Didik	114.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	248 Orang	37.010.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	248 Orang	37.010.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			Semua Kel/Desa		Sekolah Menengah Atas	Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				
	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V)	6 Satuan Pendidikan	8.791.665.01,00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V)	6 Satuan Pendidikan	8.791.665.001,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V)	6 Satuan Pendidikan				Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V)	6 Satuan Pendidikan				
							Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V)					100%					
	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4000 Peserta Didik	8.653.030.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4000 Peserta Didik	8.653.030.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	330 Peserta Didik	101.625.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	330 Peserta Didik	101.625.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	255 Orang	37.010.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	255 Orang	37.010.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			an, Semua Kel/Desa		Sekolah Menengah Kejuruan	n yang Mendapatka n Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanaka n Pembinaan Kelembagaa n dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V)	1 Satuan Pendidik an	290.210.000 ,00			Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V)	1 Satuan Pendidik an	290.210.000, 00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKP				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V)	1 Satuan Pendidikan					Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V)	1 Satuan Pendidikan			
							Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V)	100%					Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V)	100%			
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	102 Peserta Didik	265.200.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	102 Peserta Didik	265.200.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Peserta Didik	18.050.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Peserta Didik	18.050.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	40 Orang	6.960.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	40 Orang	6.960.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
						Pendidikan Khusus	Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			Semua Kel/Desa			Mendapatk n Fasilitas Kenaikan Pangkat/Gol ongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					
	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanaka n Pembinaan Kelembagaa n dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
						Dinas Pendidikan Wilayah VI			39.554.590.885,00			Dinas Pendidikan Wilayah VI			39.554.590.885,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.554.590.885,00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.554.590.885,00			
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.554.590.885,00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.554.590.885,00			
28	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	15.807.430.885,00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	15.807.430.885,00			
							Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariat an	92 Indeks				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	114.480.000 ,00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	114.480.000, 00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	114.480.000 ,00	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	114.480.000, 00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD	0 Laporan	0	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	0 Laporan	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 %	11.923.307, 00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatka n Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 %	11.923.307,0 0		
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	11.923.307, 00	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	11.923.307,0 0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	0 Dokume n	0	Kab. Berau, Semua Kecamat an,		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan	0 Dokume n	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Informasi Kepegawaian			Semua Kel/Desa			Sistem Informasi Kepegawaian				
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	605.023.878 ,00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor	100%	605.023.878, 00		
	1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	93.743.488, 00	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	17 Paket	93.743.488,0 0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	30.130.390, 00	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	30.130.390,0 0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	481.150.000 ,00	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	481.150.000, 00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan	100%	14.911.599. 700,00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut	100%	14.911.599.7 00,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Pemerintahan Daerah	Pengguna Layanan						Keluhan Pengguna Layanan				
	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	6.848.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	6.848.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.991.700,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.991.700,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.819.760.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.819.760.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	164.404.000,00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	164.404.000,00		
	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	125.384.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	125.384.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	36 Unit	39.020.000,00	Kab. Berau, Semua		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	36 Unit	39.020.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							yang Dipelihara			Kecamat an, Semua Kel/Desa			Lainnya yang Dipelihara			Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0 Unit	0	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	0 Unit	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
29	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16- 18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Berau	76,88%	23.747.160. 000,00			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipa si dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Berau	76,88%	23.747.160.0 00,00		
							Persentase Anak Usia 4- 18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Berau	54,95%					Persentase Anak Usia 4- 18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipa si dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Berau	54,95%			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							persentase satuan pendidikan wilayah Berau yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas VI)	86,11%					persentase satuan pendidikan wilayah Berau yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas VI)	86,11%			
							persentase satuan pendidikan wilayah Berau yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas VI)	63,89%					persentase satuan pendidikan wilayah Berau yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas VI)	63,89%			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI)	20 Satuan Pendidik an	15.477.060. 000,00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI)	20 Satuan Pendidik an	15.477.060.0 00,00		
							Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI)	15 Satuan Pendidik an					Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI)	15 Satuan Pendidik an			
							Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI)	100%					Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI)	100%			
	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta Didik	15.348.060. 000,00	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya	5000 Peserta Didik	15.348.060.0 00,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													Personil Peserta Didik				
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik	1604 Peserta Didik	129.000.000 ,00	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/L omba Akademik dan Non Akademik	1604 Peserta Didik	129.000.000, 00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golon gan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidika n yang Mendapatka n Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Gol ongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaa n dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI)	14 Satuan Pendidikan	7.587.780.000,00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI)	14 Satuan Pendidikan	7.587.780.000,00		
							Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI)	9 Satuan Pendidikan					Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI)	9 Satuan Pendidikan			
							Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI)	100%					Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI)	100%			
	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima	3000 Peserta Didik	7.469.280.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima	3000 Peserta Didik	7.469.280.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Biaya Personil Peserta Didik						Biaya Personil Peserta Didik				
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1652 Peserta Didik	118.500.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1652 Peserta Didik	118.500.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaa n dan Manajemen	0 Satuan Pendidik an	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI)	3 Satuan Pendidik an	682.320.000 ,00		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI)	3 Satuan Pendidik an	682.320.000, 00			
							Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI)	3 Satuan Pendidik an				Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI)	3 Satuan Pendidik an				
							Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI)	100%				Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI)	100%				
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima	500 Peserta Didik	628.320.000 ,00		Kab. Berau, Semua Kecamatan, an,	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima	500 Peserta Didik	628.320.000, 00		Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Biaya Personil Peserta Didik			Semua Kel/Desa		Biaya Personil Peserta Didik					
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	54.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaa n dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
JUMLAH									3.425.601.303.696,00						3.425.601.303.696,00		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, 2025

2.6 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota telah menghasilkan beberapa kesepakatan tentang rencana pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2026.

Dalam kesepakatan tersebut ada beberapa usulan yang akan dipertimbangkan dikarenakan terdapat usulan yang memang sesuai dengan isu-isu strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang pendidikan, sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan daerah Provinsi antara lain:

1. Pendidikan Menengah, dan
2. Pendidikan Khusus.

Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SMK Muhammadiyah Sangkulirang	JL. DMG Setia No 06 Rt 20 Kec. Sangkulirang Kab. Kutim., Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	2.686.470.000,00	Hibah
2	Hibah Kepada SMA/SMK/SLB Swasta (YAYASAN PENDIDIKAN AN NAHL BALIKPAPAN)		Angka Partisipasi Sekolah	199.250.000,00	Hibah
3	YAYASAN BUDI LUHUR MANDIRI (YBLM) JL. PERMAI RAYA RT. 20 DUSUN PINANG RAYA DESA SANGATTA UTARA KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	YAYASAN BUDI LUHUR MANDIRI (SMA PLUS BUDI LUHUR MANDIRI), Jl. Permai Raya RT. 20 Dusun Pinang Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	250.000.000,00	Hibah
4	YAYASAN NURUL HIKMAH (YANURAH) - SMK ISLAM NURUL HIKMAH SANGATTA UTARA JL. YOS SUDARSO III GG. RAHMAT RT.001 RW. 001 KELURAHAN TELUK LINGGA KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	YAYASAN NURUL HIKMAH (YANURAH) - SMK ISLAM NURUL HIKMAH SANGATTA UTARA, Jl. Yos Sudarso III Gg. Rahmat RT.001 RW.001 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	244.899.000,00	Hibah
5	YAYASAN AL IHSAN KONGBENG JL. PEMUDA RT.006 RW.002 DESA MARGA MULYO KECAMATAN KOMBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	YAYASAN AL IHSAN KONGBENG, Jl. Pemuda RT. 006 RW. 002 Desa Marga Mulyo Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	400.000.000,00	Hibah
6	Hibah Pembangunan Masjid Muhammadiyah Kab. Berau	JL. JENDERAL SUDIRMAN, Bugis, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau Prov.	Angka Partisipasi Sekolah	400.000.000,00	Hibah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur			
7	Hibah Kepada SMA/SMK/SLB Swasta	Jl. Batu Indah RT. 41 No. 08, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75119, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	1.800.000.000,00	Hibah
8	Hibah Kepada SMA/SMK/SLB Swasta	Jalan Perjuangan No.72 RT.06, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	400.000.000,00	Hibah
9	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA Semenisasi Halaman Sekolah SMA Negeri 1 Muara Pahu Panjang : 60m Lebar : 60m Jumlah : 3.600 M3 Jl Bina Kampung RT 02 Kp. Muara Baroh Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat	Jl Bina Kampung RT 02 Kp. Muara Baroh Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat Kode Pos : 75774, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	400.000.000,00	
10	Pengadaan Mebel SMA Pengajuan Meubelair Sekolah SMA Negeri 1 Muara Pahu	Jl. Bina Kampung Kp. Muara Baroh RT II Kec Muara Pahu, Kutai Barat Kodepos : 75774, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	400.000.000,00	
11	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA Kegiatan Rehabilitas Laboratorium Biologi Prasarana SMA, SMA Negeri 1 Muara Pahu	Jl Bina Kampung RT 02 Kp Muara Baroh Kec Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Kodepos 75774, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	400.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
12	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA Rehabilitas Perpustakaan Prasarana SMA Negeri 1 Muara Pahu Jl Bina Kampung, Kampung Muara Baroh RT II Kec Muara Pahu	Jl Bina Kampung, Kampung Muara Baroh RT II Kec Muara Pahu Kode Pos 75774, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	400.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMK (SMKN1 Bengalon Dalam Rangka Memenuhi Standar Dalam Pembelajaran Dan Kenyamanan Siswa Smkn1 Bengalon Memohon Bantuan Rehab Lantai Workshop (TAB Dan TKR)., Jl. Sulawesi RT.15, Sepaso Barat, Bengalon, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur)	Jl. Sulawesi RT.15, Sepaso Barat, Bengalon, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	400.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
14	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA (SMA NEGERI 1 BENGALON MENGAJUKAN REHAB PEMBANGUNAN RUANG GURU DIKARENAKAN, SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI KURANG MEMADAI UNTUK GURU DAN SISWA, JL.POROS SIMP. EMPAT DESA SEPASO, KEC.BENGALON, KAB.KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur)	JL.POROS SIMP. EMPAT DESA SEPASO, KEC.BENGALON, KAB.KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	1.000.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
15	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA (SMAN 1 BENGALON Mengajukan Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) Yang Bertujuan Memenuhi Kebutuhan Ruang Belajar, Meningkatkan Daya Tampung Dan Mendukung Proses Pembelajaran, Jl. Poros Simp. Empat Bengalon Desa Sepaso, Kec. Bengalon, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur)	Jl. Poros Simp. Empat Bengalon Desa Sepaso, Kec. Bengalon, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	800.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
16	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA (SMA NEGERI 1 BENGALON MENGAJUKAN REHAB LABORATORIUM FISIKA DAN KIMIA DIKARENAKAN, PRASARANA BELUM	JL.POROS SIMP.EMPAT BENGALON DESA SEPASO, KEC.SANGATTA UTARA, KAB.KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	310.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	MENCUKUPI UNTUK MENGAKORDIR KEGIATAN BELAJAR SISWA-SISWI, JL.POROS SIMP.EMPAT BENGALON DESA SEPASO, KEC.SANGATTA UTARA, KAB.KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur)				
17	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA (SMAN 1 RANTAU PULUNG Masih Mempunyai Masalah Yaitu Kurangnya Lahan Parkir Yang Memadai Demi Kenyaman Siswa , Jl. Pendidikan No.01 Desa Mukti Jaya, Kec. Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur)	Jl. Pendidikan No.01 Desa Mukti Jaya, Kec. Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	362.919.600,00	Pokok Pikiran DPRD
18	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA (SMA NEGERI 2 SANGATTA UTARA MENGAJUKAN REHAB PENGECORAN JALAN DAN PARIT DIAKRENAKAN, KONDISI INFRATRUKTUR JALAN DAN PARIT DISEKOLAH MEMERLUKAN PERHATIAN DAN PERBAIKAN SEGERA, JL.SOEKARNO HATTA KM 2,5 SANGATTA UTARA, KEC.SANGATTA UTARA, KAB.KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur)	JL.SOEKARNO HATTA KM 2,5 SANGATTA UTARA, KEC.SANGATTA UTARA, KAB.KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	350.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
19	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA (SMAN 1 BENGALON Membutuhkan Adanya Tempat Parkir Siswa Untuk Menjadikan Sekolah Layak Huni, Jl. Poros Simpang Empat, Desa Sepaso, Kec. Bengalon, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur)	Jl. Poros Simpang Empat, Desa Sepaso, Kec. Bengalon, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	129.135.000,00	Pokok Pikiran DPRD

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMK (SMKN 1 RANTAU PULUNG Belum Mempunyai Kantin Yang Bersih Rapi Dan Nyaman Bagi Siswa Sehingga Memohon Bantuan Kantinn Sehat Yang Bertujuan Menyediakan Makanan Sehat Dan Menerapkan Ilmu Kesehatan Gizi Dan Pola Hidup Bersih, Jl Pendidikan No 01 Rt 05, Desa Margomulyo, Kec. Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur)	Jl Pendidikan No 01 Rt 05, Desa Margomulyo, Kec. Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	523.865.000,00	Pokok Pikiran DPRD
21	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA (SMAN 2 SANGATTA UTARA Memerlukan Adanya Pemeliharaan Bangunan Yaitu Cat Bangunan Yg Sudah Mulai Memudar Dan Terkupas,Jl.Soekarno Hatta KM 2,5 SANGATTA UTARA, KEL.SANGGATA UTARA, KAB.KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur)	Jl.Soekarno Hatta KM 2,5 SANGATTA UTARA, KEL.SANGGATA UTARA, KAB.KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	175.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
22	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA (SMAN 2 SANGATTA UTARA Memerlukan Adanya Pemeliharaan Bangunan Yaitu Cat Bangunan Boarding School Yg Sudah Memudar Dan Terkelupas, Jl.Soekarno Hatta KM 2,5 SANGATTA UTARA, KEL.SANGATTA UTARA, KAB. KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur)	Jl.Soekarno Hatta KM 2,5 SANGATTA UTARA, KEL.SANGATTA UTARA, KAB. KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	200.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMK (SMK NEGERI 2 SAGATTA UTARA MENGAJUKAN REHAB PEMBANGUNAN WORKSHOP TEKNIK ALAT BERAT DIKARENAKAN, KURANGNYA SARANA DAN PRASARANAN YANG DIMILIKI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BELAJAR SISWA, Jl.PADAT KARYA RT. 32 SANGATTA UTARA, KEC.SANGATTA UTARA, KAB.KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur)	Jl.PADAT KARYA RT. 32 SANGATTA UTARA, KEC.SANGATTA UTARA, KAB.KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	200.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
24	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMK	Jl. Ahrnad Yani, RT.04 Desa Mandu Ps, Kec. Sangkulirang, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	1.900.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
25	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA	Jalan Pendidikan RT 08 Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	1.000.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
26	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA	Jalan SMA Bangun No. 01 RT. 01 Sei Bebanir Bangun, Kec. Sambaliung Berau Kalimantan Timur 77371, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	1.900.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
27	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMK	Jl. Ahmad Yani, RT.04 Desa Mandu Ps. Kecamatan Sangkulirang, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	400.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
28	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SLB	Jalan Guru Besar Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	1.000.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
29	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA	Jl. A. Wahab Syahrani, Teluk Lingga Sangatta Utara , Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	300.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Smk	Jln. Sulawesi Desa Sepaso Barat, Kec. Bengalon, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	250.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
31	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Smk	Jln. Sulawesi, Desa Sepaso Barat, Kec. Bengalon, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	1.900.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
32	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	JL. Bengkirai RT. 002, Desa Batu Timbau Ulu, Kecamatan Batu Ampar, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	2.000.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
33	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA	Jl. Poros Bontang-Sangatta KM.17 Kec. Teluk Pandan, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	250.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
34	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	SMKN 1 MUARA WAHAU JL. POROS MUARA WAHAU - SANGATTA DESA KARYA BAKTI KEC. MUARA WAHAU, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	1.150.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
35	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA	JL. LAIS RT.05 DESA WANASARI KECAMATAN MUARA WAHAU, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	1.000.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
36	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA	JL PEMBANGUNAN RT. 10 DESA SUMBER SARI KEC. LONG MESANGAT, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	900.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
37	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA	JL. PEMBANGUNAN RT. 10 DESA SUMBER SARI KEC. LONG MESANGAT, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	400.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
38	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA	JL. PEMBANGUNAN DESA SUMBER SARI KEC. LONG MESANGAT, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	400.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA	JL. MULAWARMAN RT. 05 DESA MUARA WAHAU KEC. MUARA WAHAU, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	1.500.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
40	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	Jl. Poros Bontang-Sangatta KM.17 Kec. Teluk Pandan, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	1.654.240.000,00	Pokok Pikiran DPRD
41	Permohonan Bantuan Pengecoran Halaman Parkir SMA N 8 Bpp	Jalan AMD. Gunung Empat RT 14 Kel. Margo Mulyo, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	1.245.760.000,00	Pokok Pikiran DPRD
42	Permohonan Bantuan Alat Praktik SMK N 2 Balikpapan	Jl. Soekarno - Hatta Gn . Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	775.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
43	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA	SMA N 2 Tenggarong Seberang, Jl. Raya Teluk Dalam No. 1, Kel. Manunggal Jaya, Kec. Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	825.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
44	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA (SMAN 1 Bontang Memerlukan Adanya Pemeliharaan Bangunan Yaitu Cat Bangunan Yg Sudah Kusam Serta Berlumut,Jl. D.I Panjaitan GG. Piano 11 No.59, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur)	Jl. D.I Panjaitan GG. Piano 11 No.59, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	500.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
45	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA (SMAN 1 RANTAU PULUNG Masih Memiliki Akses Jalan Yang Masih Tanah Belum Adanya Semenisasi Sehingga Becek Saat Hujan Dan Air Menggenang Saat Hujan, Jl. Pendidikan No.01	Jl. Pendidikan No.01 Desa Mukti Jaya, Kec. Rantau Pulung, Kab. Kutim, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	500.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Desa Mukti Jaya, Kec. Rantau Pulung, Kab. Kutim, Provinsi Kalimantan Timur)				
46	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMK (SMKN 1 RANTAU PULUNG Memohon Bantuan Semenisasi Sarana Jalan Sekolah Karena Becek Saat Hujan, Jl. Pendidikan No.1, Desa Margo Mulyo, Rantau Pulung, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur)	Jl. Pendidikan No.1, Desa Margo Mulyo, Rantau Pulung, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	500.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
47	Pembangunan Lapangan Basket SMK Negeri 4 Bontang		Angka Partisipasi Sekolah	150.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
48	Pembangunan Lapangan Basket SMA Negeri 1 Bontang	Jl. DI Panjaitan GG Piano 11 No. 59 Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	300.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
49	Pembangunan Lapangan Basket SMK Negeri 1 Bontang	Jl. Cipto Mangunkusumo No. 2, Gn. Elai, Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	250.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
50	Pembangunan Lapangan Basket SMA Negeri 2 Bontang	Jl. HM. Ardans Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	250.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
51	Pembangunan Lapangan Basket SMA Negeri 3 Bontang	Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	250.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
52	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMK	SMK NEGERI 1 KONGBENG, Jln. Hamengkubuwono Desa Marga Mulya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai	Angka Partisipasi Sekolah	325.113.696,00	Pokok Pikiran DPRD

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Timur Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur			
53	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA	SMA NEGERI 1 SANGATTA UTARA, Jl. A. Wahab Syahrani, Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kode Pos 75611 Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	340.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
54	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA	SMA NEGERI 1 BENGALON, Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	300.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
55	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA Berupa Rehab Lapangan Parkir Di SMA Negeri 2 Muara Kaman	Jl. Reformasi No.62 Desa Benua Puhun Kec.Muara Kaman, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	390.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
56	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA Berupa Rehabilitasi Lahan Parkir Dan Lapangan Olahraga Di SMA Negeri 1 Anggana	Jl.Mesjid RT.6 Anggana Kec.Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	500.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
57	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA Berupa Rehabilitasi Lahan Parkir Di SMA Negeri 2 Muara Badak	Jl.Poros Muara Badak - Marangkayu RT.1 No.1 Desa Tanjung Limau Kec.Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	500.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD
58	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA Berupa Rehabilitasi Lapangan Parkir SMA Negeri 1 Kembang Janggut	Jl.Drs.H.Riduansyah Kembang Janggut Kec.Kembang Janggut,, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	400.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
59	Pengadaan Mebel SMA Di SMA Negeri 1 Samboja Berupa Meubelair	Jl.Gunung Pasir RT.5,Kel.Kampung Lama Kec.Samboja, Provinsi Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah	200.000.000,00	Pokok Pikiran DPRD

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Tabel 2.10 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Berdasarkan Hasil Rakortekrenabang Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kode Usulan SIPD	Kab/Kota	Kamus Usulan	Uraian Permasalahan	Volume	Satuan	Lokasi	Catatan Dinas Disdikbud
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2529955	Mahakan Ulu	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMA	Belum adanya Sarana Prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar dan keagamaan di SMA Negeri 1 Long Pahangai			Long Pahangai, Provinsi Kalimantan Timur	Tidak TerAkomodir dikarenakan Kemampuan Keuangan Dinas tidak ada
2	2528581	Kutai Barat	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Bongan	4	Unit	SMAN 1 Bongan, Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur	Tidak TerAkomodir dikarenakan Kemampuan Keuangan Dinas tidak ada
3		Kutai Barat	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMA	Pembangunan Aula SMAN 1 Muara Lawa	1	Unit	SMAN 1 Muara Lawa, Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur	Tidak TerAkomodir dikarenakan Kemampuan Keuangan Dinas tidak ada tetapi telah dianggarkan Penambahan Ruang Kelas Baru
4		Kutai Barat	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMA	Pembangunan Utilitas SMAN 1 Long Iram	1	paket	SMAN 1 Long Iram, Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur	Tidak TerAkomodir dikarenakan Kemampuan Keuangan Dinas tidak ada tetapi telah dianggarkan Penambahan Ruang Kelas Baru

No.	Kode Usulan SIPD	Kab/Kota	Kamus Usulan	Uraian Permasalahan	Volume	Satuan	Lokasi	Catatan Dinas Disdikbud
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5		Kutai Barat	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMA	Pembangunan Utilitas SLB Pembina Kutai Barat	1	paket	SLBN Pembina Barong Tongkok Kutai Barat	Tidak TerAkomodir dikarenakan Kemampuan Keuangan Dinas tidak ada
6	2529597	Penajam Paser Utara	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA	Belum Tersedianya Bangunan Sekolah SMA 8 PPU (BL). Pembangunan SMA 8 PPU.	35	Ruang/ Paket	Jl. Coastall Road Km 1,5 Nipah-nipah Penajam Paser Utara	Terakomodir Perencanaan
7		Bontang	Rehabilitasi Bangunan Gedung SMA Negeri 1 Kota Bontang	Bagunan/Gedung sekolah, Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Bontang mengalami rusak sedang/berat	1	paket	Kota Bontang	Terakomodir Dari POKIR
8	2528681	Balikpapan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA	Masih kurangnya fasilitas pendidikan di kawasan Balikpapan Selatan	1	unit	Jln Belibis Raya No 01 Kelurahan Gn Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	Diakomodir
9	2529719	Balikpapan	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SLB.	Perlunya rehab sarana dan prasarana di SLB Negeri Balikpapan dan Pembangunan Asrama	1	paket	SLB Negeri Balikpapan	Akomodir Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SLBN Balikpapan
10		KUKAR	Pembangunan USB (Unit	Masih Banyak Lulusan SMP Kelurahan Loa Tebu belum dapat	1	Unit	SMAN 4 Tenggarong,	Diakomodir

No.	Kode Usulan SIPD	Kab/Kota	Kamus Usulan	Uraian Permasalahan	Volume	Satuan	Lokasi	Catatan Dinas Disdikbud
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Sekolah Baru) SMA	melanjutkan ke jenjang SMA di sekitar Domisili			Kelurahan Loa Tebu	
11	2528480	Paser	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMA	Tidak ada rehabilitasi prasarana fisik sekolah yg mengalami banyak kerusakan, dan kurang memadai yg menghambat penunjang kelancaran proses pembelajaran yg nyaman baik oleh siswa maupun tenaga pendidik SMAN 1 Long Ikis	1,000	M2	Jalan Negara Km 85 Desa Atang Pait, Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur 76282	Tidak TerAkomodir dikarenakan Kemampuan Keuangan Dinas tidak ada
12	2528468	Paser	Pengadaan Mebel SMA	Saat ini SMAN 1 Long Kali masih menggunakan meja, kursi siswa dan guru dari bahan kayu yang sudah termakan usia menyebabkan banyaknya kursi dan meja siswa yang lapuk dan dimakan rayap. Meubelair yang rusak dapat mengganggu kenyamanan belajar siswa dan guru	2	Ruangan	Jalan Raya KM 68 RT 004 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser	Tidak TerAkomodir dikarenakan Kemampuan Keuangan Dinas tidak ada

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Tabel 2.11 Saran dan Masukan Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

No.	Nama	Instansi	Saran dan Masukan
(1)	(2)	(3)	(4)
1		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berau	1. Dari Paparan yang disampaikan, Gratispol adalah kewenangan di SLTA dan Universitas, sehinga Kewenagan Kab/Kot hampir tidak tersentuh, masukan kami agar mengikutsertakan Sekolah kewenangan kab/kota 2. untuk beasiswa, alternatif yang disampaikan keleluasaan Bankeu sehingga beban kab/kota berkurang dengan bankeu yang di berikan Pemerintah Provinsi 3. kebijakan hibah, bantuan untuk rumah ibadah dan lainnya agar menjadi perhatian biro kesra agar
2		Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris	1. Kita harus mengubah mindset masyarakat, agar pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya tanggung jawab satu pihak saja, saya usul, bagaimana kalau ada sekolah orang tua (parenting) agar mengenalkan pendidikan karakter terhadap keluarga, agar mengerti cara mendidik anak dan menanamkan pentingnya pendidikan 2. Pendidikan karakter menjadi permasalahan 3. Bagaimana sekolah atau PT punya link and match dengan DUDI agar 4. Transformasi digital ,tetapi tidak meninggalkan ke tradisonalan, atau budaya, dengan mempertahankan kan budaya baik dan mengambil budaya baru yang baik 5. Mempersempit ruang perbedaan pendidikan kota dan desa, masih ada GAP yang tinggi antar kota dan desa 6. Pendidikan yang mengakomodasi budaya dan tradisi lokal, mengingat identitas sebuah negara adalah budaya dan tradisi
3		Badan Akreditasi Nasional-PAUD	1. Akreditasi belum menyentuh pada paparan dari narasumber 2. Kami masih terbatas kuota tahun ini 12 sekolah saja dari yang biasanya puluhan sampai ratusan sekolah pada tahun tahun sebelumnya, mengingat akreditasi berpengaruh kepada pendanaan, kualitas, dan lainnya, agar menjadi perhatian, dan kami ingin melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan penambahan kuota akreditasi

No.	Nama	Instansi	Saran dan Masukan
(1)	(2)	(3)	(4)
			sekolah
4		Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	1. Perlu kita bersama sama menjaga kualitas sekolah kita 2. ada 22% SMA di Kaltim yang unggul (A), SLB 2% Unggul (A), dan SMK 24% Unggul (A) silahkan Disdikbud berkolaborasi dan menyiapkan program program peningkatan kualitas sekolah dan akreditasi 3. validasi data sangat penting, mohon untuk benar benar meverifikasi dan validasi
5		Badan Pusat Statistik	1. Ketika kita menaikan target Rata rata lama sekolah, maka kita akan menurunkan DO, kalau saya lihat blm ada program menyentuh pengurangan DO 2. pelatihan terhadap teknologi baru agar diperhatikan, sebagai contoh kendaraan listrik yang masih sedikit bengkel yang ada di samarinda
6		Balai Penjaminan Mutu Pendidikan	1. Jika dilihat raport pendidikan Kaltim makin baik, tetapi pada level PAUD 65,53 masih rendah, DASMEN 80,83 sudah baik, masih ada Sosial Budaya yang terjadi dalam faktor anak bersekolah 2. APS anak Disabilitas, perlu strategi tertentu agar dapat meningkatkan APS, contoh inklusi, perlu penguatan program program yang menyentuh anak anak disabilitas. 3. perlu strategi peningkatan
7	Suprpto	Bidang Pendidikan Khusus	1. Angka partisipasi sekolah bidang SLB, menjadi kendala guru SLB sangat kekurangan 2. terkait sekolah SLB ada beberapa Kab/Kot yang belum punya slb swasta, perlu mengingatkan kembali keseriusan dalam mengawal anak anak disabilitas
8		Dewan Pendidikan	1. Saran alangkah baiknya SMK ditambah waktu belajar 1 tahun lagi, untuk mendapat pelatihan peningkatan skil untuk bekerja 2. kita harus berhitung jumlah guru pensiun

No.	Nama	Instansi	Saran dan Masukan
(1)	(2)	(3)	(4)
			3. untuk baju gratis, apakah termasuk dengan baju selain putih abu abu 4. untuk insentif, apakah guru paud, TK, dan PAUD mendapat insentif juga
9		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Disnaker kami siap berkolaborasi 2. kita harus kerjasama untuk pelatihan anak anak SMK dengan memaksimalkan BLKI di dua Kota (Balikpapan dan Bontang) untuk kedepan SMK dan SMA

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam urusan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghadirkan berbagai program prioritas untuk mendorong akses dan mutu pendidikan, diantaranya **“Wajib Belajar 13 Tahun”**. Wajib Belajar bukan sekadar program, melainkan komitmen bersama lintas waktu dan lintas sektor. Pemerintah Daerah berperan sebagai penggerak dan mitra strategis yang menjembatani kolaborasi, dan membangun sinergi dalam menjawab tantangan pendidikan di wilayahnya. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki Visi yaitu **“Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dalam rangka terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebhinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif”** dan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian, pemajuan, dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan
3. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

Berikut adalah rancangan Tujuan dan Sasaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tujuan 1: Perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Tujuan 2: Penguatan mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Tujuan 3: Penguatan dan pelestarian kebudayaan, kesastraan, serta pengarusutamaan dalam pendidikan	Tujuan 4: Peningkatan mutu layanan pendidikan vokasi	Tujuan 5: Penguatan sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
Sasaran Strategis 1: Meningkatkan akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua	Sasaran Strategis 2: Meningkatkan hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Kesenian	Sasaran Strategis 4: Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan vokasi	Sasaran Strategis 5: Meningkatkan tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Geraplat yang Pemilih Mengikuti PAUD (RPJMN-PP) 2. Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun 3. Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun 4. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/Kelempat (RPJMN-KP)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1. Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD 2. Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional (RPJMN-KP) a. Literasi Membaca b. Numerasi 3. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks nilai keimanan sosial, dan indeks aktivitas dan ketahanan pada kategori baik (RPJMN-PP)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (RPJMN-KP) 2. Persentase petualang yang mahir berbahasa Indonesia minimal level Sesejana (Indikator)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1. Persentase lulusan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kemudian dalam urusan kebudayaan, kebudayaan masuk pada Prioritas Nasional ke-8 yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur dengan Sasaran yaitu Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju dan Indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas). Secara lebih spesifik pada bidang kebudayaan, pemerintah pusat telah menentukan beberapa kegiatan prioritas sebagai berikut:

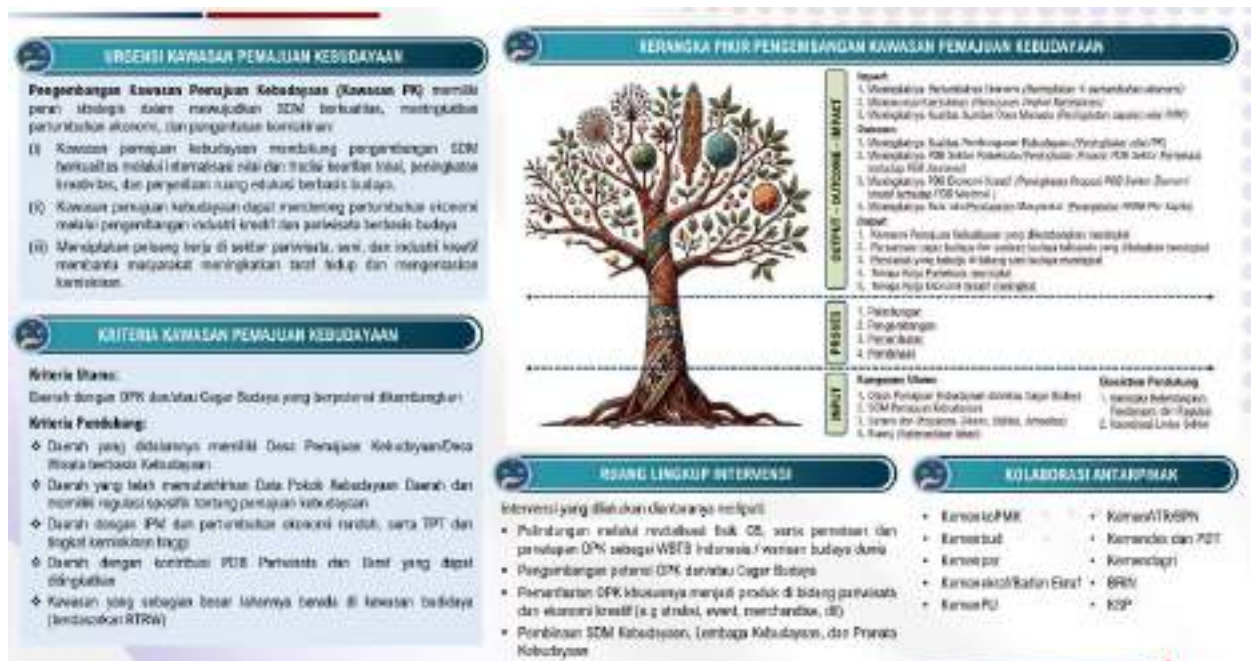
PP 2. Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa

Indikator: Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

KP	Penguatan karakter dan jati diri bangsa
KP	Pelindungan dan pelestarian warisan budaya
KP	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
KP	Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat
KP	Pengembangan bahasa dan sastra Indonesia
KP	Transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan
KP	Pengembangan diplomasi kebudayaan

Gambar 3.2 Kegiatan Prioritas dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa

Selain itu pemerintah pusat telah memberikan Gambaran tentang pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Panduan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan arah strategis yang berfokus pada peningkatan tingkat intelektualitas serta pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan. Strategi ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memperluas akses dan mutu pendidikan yang merata, mendorong literasi dan numerasi, serta membentuk ekosistem pembelajaran sepanjang hayat yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya ditandai oleh capaian akademik, tetapi juga oleh kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pendidik, peningkatan sarana prasarana pendidikan, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi fokus utama dalam pengembangan mutu pendidikan.

Disisi lain, pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat identitas nasional, memperluas ruang ekspresi seni dan budaya, serta melestarikan warisan budaya daerah. Sinergi antara pendidikan dan kebudayaan menjadi kunci dalam menanamkan nilai-nilai luhur, memperkuat karakter bangsa, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

Melalui strategi yang terukur, kolaboratif, dan berbasis data, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta memiliki kesadaran dan kebanggaan terhadap warisan budaya bangsa. Dengan demikian, visi pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai fondasi kemajuan daerah dapat tercapai secara optimal

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur 2025 - 2029 “ Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas “. Visi dan Misi Gubernur adalah gambaran umum yang ingin dicapai pemerintah Daerah melalui beberapa sasaran. Untuk melaksanakan rencana strategis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memacu pada beberapa Misi Gubernur yaitu Misi 1 (satu) dan 5 (Lima) yaitu: “Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera.” dan “Misi 5 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal.”

Untuk mewujudkan Misi 1 dan 5 Gubernur diperlukan langkah-langkah strategis, yaitu perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci yang perlu ditempuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur agar rencana pembangunan jangka menengah khususnya bidang pendidikan dapat tercapai.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025-2029 perlunya adanya indikator

Kinerja Utama, Indikator kinerja Kunci serta program yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 yaitu: “**Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.**” Serta untuk mewujudkan Misi 1 dan 5 itu maka dalam RPJMD telah ditetapkan indikator Tujuan dan sasaran yang harus dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah
2. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah
3. Meningkatnya Skor Literasi/Numerasi
4. Meningkatnya indeks Pembangunan kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berperan dalam mendukung misi ke 1 dan 5, tujuan “**Meningkatnya Tingkat Intelegktualitas dan Pendidikan Masyarakat Serta Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan**” dan sasaran “**Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Dasar Pendidikan, Meningkatnya Kelestarian dan Keberagaman Budaya, Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**” dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran RPJMD yang Relevan: 1. Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat 2. Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	Meningkatnya Tingkat Intelegktualitas dan Pendidikan Masyarakat Serta Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan		Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca
			Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat

Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
3. Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan			nasional untuk numerasi
			Harapan Lama Sekolah
			Rata-Rata Lama Sekolah
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
		Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan
		Meningkatnya Kelestarian dan Keberagaman Budaya	Nilai Dimensi Warisan Budaya
		Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, 2025

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 3.1.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- 3.1.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- 3.1.4 Rencana program dan kegiatan.

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			2.999.924.448.240,00					3.742.549.649.772,50
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.995.830.653.543,00					3.707.849.649.772,50
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2.995.830.653.543,00					3.707.849.649.772,50
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	1.706.869.199.158,00				-	1.977.929.686.235,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks						
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yangditetapkan tepat waktu	100 %	1.426.879.862,00				-	244.355.015.235,00
1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	513.898.635,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			6.000.000.000,00
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	96.906.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.500.000.000,00
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	78.196.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			350.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	34.373.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			700.000.000,00
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	118.904.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			700.000.000,00
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.577.120.439.834,00				-	1.575.407.147.518,00
1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7551 Orang/Bulan	1.574.253.871.276,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD			1.513.474.675.701,00
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.694.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			2.235.480.000,00
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	459.771.604,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			570.678.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	202.179.653,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			429.498.000,00	
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			58.162.490,00	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	Rp510.577.301,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			58.638.653.327,00	
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terdata	90 %	1.282.669.114,00			-	1.808.747.344,00	
1	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	869.678.431,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			857.671.900,00	
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	412.990.683,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			951.075.444,00	
1	01	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tepat Waktu	100 %	Rp291.966.440,00			-	1.213.452.202,00	
1	01	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	243 Dokumen	Rp120.346.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			507.164.704,00
1	01	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	243 Dokumen	Rp120.346.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			706.287.498,00
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengembangkan Kompetensi	0 %	0				-	7.823.823.000,00
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			1.098.636.000,00
1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			396.000.000,00
1	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	0 Orang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			6.329.187.000,00
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	4.828.745.527,00				-	9.063.837.075,00
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.064.237.845,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			1.398.071.955,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kel/Desa				
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	97.931.458,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			350.148.012,00
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Rp2.666.576.224,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			4.921.906.228,00
1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			2.393.710.880,00
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100 %	104.278.567,00				-	17.109.385.161,00
1	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			4.367.398.200,00
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			48.652.065,00
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	104.278.567,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI DAERAH			3.149.522.596,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			9.543.812.300,00
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	108.513.848.440,00				-	124.943.588.448,00
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			128.964.000,00
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.393.350.403,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			7.602.157.475,00
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	395.820.640,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			435.403.599,00
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	95.714.677.397,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			116.777.063.374,00
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dilakukan	100 %	1.816.974.200,00				-	7.440.249.187,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	118.495.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			142.436.797,00
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	1.260.295.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			1.235.577.200,00
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	417.088.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			280.205.090,00
1	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	21.096.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			91.850.000,00
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.557.457.134,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			5.690.180.100,00
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 %	7.925.940.040,00				-	13.000.000.000,00
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	7.925.940.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN BAGI HASIL			13.000.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kel/Desa	PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	82,57	1.783.617.441.350,00				-	1.709.558.559.307,50
						Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	71,34						
						Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	82,71						
						Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	90,18						
						persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	80,21%						
						persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	70,95%						
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ruang Kelas SMA dalam Kondisi Baik	98,82%	578.613.381.504,00				-	820.922.240.728,90
						Persentase SMA/MA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100						
						Persentase Siswa SMA/ MA Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100						
						Indeks Iklim Keamanan SMA	84,84						
						Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	74,88						
						Indeks Inklusivitas SMA	64,58						
						Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	78,5						
						Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	67,03						
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	52.653.946.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)		59.001.302.505,60	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1.074.365.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- AFIRMASI-SMA		11.761.048.950,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
									Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA			2.498.013.735,00		
1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah										
						Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			22.504.704.600,00		
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	635.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA			67.050.313.127,70		
1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			5.948.757.150,00
1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			2.661.763.650,00
1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			338.114.700,00
1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah								
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	13 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			43.864.276.186,50
1	01	02	1.01	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	96.111.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00
1	01	02	1.01	0040	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah								
						Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH			0,00
1	01	02	1.01	0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	6.646.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	PAJAK DAERAH			27.468.959.294,70

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13943 Peserta Didik	116.966.767.496,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			252.740.423.242,00
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	686.206.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			13.648.572.696,00
1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	700 Orang	49.841.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			1.300.000.000,00
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	584.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			5.300.000.000,00
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			947.619.716,40
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	245 Satuan Pendidikan	155.018.972.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA			142.012.444.000,00
1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam	0 Orang	0	Semua Kota/Kab,	PAJAK DAERAH			29.000.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	488.436.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			8.242.808.680,00
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	64.144.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			2.994.942.892,00
1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	22 Komunitas	431.104.156,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			2.172.923.199,00
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	66.723.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			4.000.000.000,00
1	01	02	1.01	0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik								
						Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	24.460.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			2.593.229.960,00
1	01	02	1.01	0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								
						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			1.668.410.730,00
1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Unit	48.099.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			5.607.138.075,00
1	01	02	1.01	0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah								
						Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			105.000.000,00
1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium								
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			36.947.750.070,00
1	01	02	1.01	0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium								
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			218.371.650,00
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	46.333.715.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			52.872.757.350,00
1	01	02	1.01	0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								
						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			523.265.148,00
1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	1.047.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	PAJAK DAERAH			6.000.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	238 Satuan Pendidikan	682.690.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			8.929.329.421,00
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ruang Kelas SMK Dalam Kondisi Baik	97,94%	1.131.738.298.690,00				-	935.918.024.300,00
						Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100%						
						Persentase Siswa SMK Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100%						
						Indeks Iklim Keamanan SMK	72,49						
						Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	72,69						
						Indeks Inklusivitas SMK	63,26						
						Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	74,98						
						Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	64,64						
						Jumlah SMK yang bermitra dengan DUDI	95						
Persentase peserta didik yang tersertifikasi P1	100%												
1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)								
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	194.510.366.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua	PAJAK DAERAH			355.362.302.900,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK- BIDANG PENDIDIKAN- PENUGASAN- SMK		2.500.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa								
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	8 Ruang	3.084.683.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK			5.063.703.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- PENUGASAN- SMK		181.552.800,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- PENUGASAN- SMK			4.788.455.100,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
									Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	14.225.333.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- PENUGASAN- SMK			212.312.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
						Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium								
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- PENUGASAN- SMK			0,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah								
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	10.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- PENUGASAN- SMK			1.700.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
1	01	02	1.02	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik										
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	84.137.400.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-			2.220.000.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	PENUGASAN- SMK			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah								
						Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	8 Unit	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- PENUGASAN- SMK		0,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	18 Paket	36.219.595.932,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- PENUGASAN- SMK		70.000.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan								
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	83352 Peserta didik	126.086.823.023,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			22.000.000.000,00	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1.572.988.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			9.000.000.000,00	
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	550 Orang	41.637.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			1.700.000.000,00	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian	300 Orang	569.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	PAJAK DAERAH			5.200.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
						Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			Semua Kel/Desa					
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan									
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	185 Satuan Pendidikan	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			3.000.000.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan									
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	218 Satuan Pendidikan	150.464.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOS REGULER			150.285.510.000,00	
1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan									
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			27.500.000.000,00	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			2.000.000.000,00	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			2.000.000.000,00	
1	01	02	1.02	0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK									
						Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	100 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			3.000.000.000,00	
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	283.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			3.000.000.000,00
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			2.000.000.000,00
1	01	02	1.02	0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik								
						Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	25000 Orang	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			24.000.000.000,00
1	01	02	1.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik								
						Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	4400 Buku	602.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua	PAJAK DAERAH			800.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- PENUGASAN- SMK			2.000.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik								
					Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	996.493.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Bontang,					

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 Ruang	15.857.580.000,00	Kota Bontang,	PAJAK DAERAH, DANA BAGI			19.804.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua	HASIL (DBH), DAK FISIK- BIDANG PENDIDIKAN- PENUGASAN- SMK			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah								
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang	0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN- PENUGASAN- SMK		2.500.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik								
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	218 Satuan Pendidikan	178.326.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH				0,00
1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	1.039.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)				2.000.000.000,00
1	01	02	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	98,58%	73.265.761.156,00						114.794.112.671,00
					Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100%							
					Persentase Siswa SLB Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100%							
					Indeks Iklim Keamanan SDLB	81,54							
					Indeks Iklim Keamanan SMPLB	77,83							
					Indeks Iklim Keamanan SMALB	79,10							
					Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	74,46							
					Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	76,74							
					Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	81,00							
					Indeks Inklusivitas SDLB	72,14							
Indeks Inklusivitas SMPLB	72,80												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Indeks Inklusivitas SMALB	74,28						
						Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional.	83,29						
						Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	81,88						
						Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	82,95						
						Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional	76,13						
						Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional.	75,05						
						Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional.	73,57						
1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)			2.154.600.000,00	
1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	DANA BAGI HASIL (DBH)			721.385.197,00	
1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	DANA BAGI HASIL (DBH)			634.175.484,00	
1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah								
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab,	DANA BAGI HASIL (DBH)			937.631.440,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.03	0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah								
						Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	0 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			9.052.582.911,00
1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	2.284.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			523.842.768,00
1	01	02	1.03	0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah								
						Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	2 Unit	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Mencimai Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan Kab. Penajam Paser Utara, Penajam,	DANA BAGI HASIL (DBH)			8.332.654.519,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Gunung Seteleng				
1	01	02	1.03	0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	1.911.808.046,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)				1.539.000.000,00
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus								
					Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	3.747.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)				894.135.475,00
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1125 Peserta Didik	2.643.261.597,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)				7.545.350.000,00
1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus								
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	210 Orang	4.862.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH				1.750.000.000,00
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus								
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	99.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH				1.200.000.000,00
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus								
					Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	36 Satuan Pendidikan	165.864.834,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)				650.096.618,00
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	36 Satuan Pendidikan	11.511.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER			13.629.720.000,00
1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus								
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			3.600.000.000,00
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.303.010.000,00
1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 Konten Digital	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			493.165.200,00
1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda,	DANA BAGI HASIL (DBH)			393.254.334,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	271.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			561.837.056,00
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	268.933.578,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			1.166.260.000,00
1	01	02	1.03	0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik								
						Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	36 Orang	114.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			600.793.600,00
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	109.964.834,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			387.313.300,00
1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Long Melaham	DANA BAGI HASIL (DBH)			164.950.946,00
1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	1.596.790.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			711.093.263,00
1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Ruang	6.440.308.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Mencimai Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Paser, Tanah Grogot, Tapis Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	DANA BAGI HASIL (DBH)			36.645.362.109,00
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik								
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	36 Satuan Pendidikan	130.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			622.774.900,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	207.554.289,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.373.900.000,00
1	01	02	1.03	0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								
						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Long Melaham	DANA BAGI HASIL (DBH)			164.950.946,00
1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah								
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Long Melaham	DANA BAGI HASIL (DBH)			302.462.068,00
1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah								
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	5 Ruang	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			8.030.776.962,00
1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	2.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			319.440.000,00
1	01	02	1.03	0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik								
						Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1260 Buku	321.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			500.618.100,00
1	01	02	1.03	0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			7.886.975.475,00
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	52%	1.334.256.768,00				-	18.412.857.409,00
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah SMA/SMK yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	238 Satuan Pendidikan	287.839.308,00				-	13.981.640.069,00
1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah								
						Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	20 Orang	216.205.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.674.800.279,00
1	01	03	1.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah								
						Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	71.634.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			12.306.839.790,00
1	01	03	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah								
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	0 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			0,00
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	35 Satuan Pendidikan	1.046.417.460,00				-	4.431.217.340,00
1	01	03	1.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus								
						Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	21.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			996.971.640,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	03	1.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus								
						Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	400 Buku	21.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			337.329.300,00
1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus								
						Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	40 Orang	327.205.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.216.446.560,00
1	01	03	1.02	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus								
						Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	1 Buku	21.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00
1	01	03	1.02	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus								
						Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	1 Buku	21.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			940.234.920,00
1	01	03	1.02	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus								
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	327.205.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			940.234.920,00
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	indeks Distribusi Guru	0,6 Indeks	841.215.040,00				-	15.700.000.000,00
						Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	52,52 %						
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang dipenuhi	50%	841.215.040,00				-	15.700.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus								
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	500 Dokumen	513.115.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			7.300.000.000,00
1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Laporan	328.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			8.400.000.000,00
5	1	01	06		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	7,5%	200.000.000,00					200.000.000,00
1	01	06	01		Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan lintas daerah yang terlaksana	2 Kegiatan	200.000.000,00					200.000.000,00
1	01	06	1.01	0012	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah								
						Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	1 Buku	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			200.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.037.313.012,00					34.700.000.000,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			8.037.313.012,00					34.700.000.000,00
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	58 %	127.000.000,00				-	10.000.000.000,00
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	100%	792.572.990,00				-	3.500.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan								
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			9.000.000,00
2	22	02	1.01	0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan								
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	11 Objek	109.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.500.000.000,00
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah event Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan	9.000.000,00				-	6.500.000.000,00
2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan								
						Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	100 Sertifikat	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			6.500.000.000,00
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	50 %	1.861.355.450,00				-	12.500.000.000,00
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina	112 Kesenian	1.861.355.450,00				-	12.500.000.000,00
2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional								
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	200 Orang	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			3.500.000.000,00
2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	152 Orang	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			2.500.000.000,00
2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional								
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	553 Lembaga	1.843.355.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			6.500.000.000,00
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal	30 %	8.400.000,00				-	850.000.000,00
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal	939 Orang	8.400.000,00				-	850.000.000,00
2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah								
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	250 Dokumen	8.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			850.000.000,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	50 %	2.092.239.247,00				-	7.850.000.000,00
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan terhadap total yang terdaftar	24 Cagar Budaya	1.773.463.067,00				-	2.000.000.000,00
2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya								
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	1.773.463.067,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			2.000.000.000,00
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	46%	318.776.180,00				-	5.850.000.000,00
2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya								
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	9.000.000,00	Semua Kota/Kab,	DANA BAGI HASIL (DBH)			9.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya								
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	44 Objek	300.776.180,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			5.000.000.000,00
2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya								
						Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	70 Orang	9.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			850.000.000,00
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan pengunjung museum	15 %	9.000.000,00				-	3.500.000.000,00
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pengunjung Museum	89423 Orang	9.000.000,00				-	3.500.000.000,00
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum								
						Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	9.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.500.000.000,00
					UPTD Taman Budaya			9.508.164.153,00					12.503.960.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.508.164.153,00					7.603.960.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			9.508.164.153,00					7.603.960.000,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	5.551.055.383,00				-	7.603.960.000,00
						Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	92 Indeks						
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	190.440.000,00				-	192.600.000,00
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	190.440.000,00	Kota Samarinda, Semua	PAJAK DAERAH			192.600.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Belanja	4 Dokumen	522.265.083,00				-	1.559.000.000,00
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	63.799.797,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			64.000.000,00
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	80.236.416,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			85.000.000,00
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.957.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			10.000.000,00
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	368.271.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			1.400.000.000,00
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100 %	1.247.830.000,00				-	2.200.000.000,00
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	147.181.836,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan.	DANA BAGI HASIL (DBH)			700.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kel/Desa				
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.247.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.500.000.000,00
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	3.120.116.100,00				-	3.132.360.000,00
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.756.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			12.000.000,00
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291.999.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			300.000.000,00
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.820.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			2.820.360.000,00
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	70 %	470.404.200,00				-	520.000.000,00
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	306.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)			350.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kel/Desa				
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	163.504.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			170.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.957.108.770,00					4.900.000.000,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.957.108.770,00					4.900.000.000,00
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan pengunjung seni pertunjukan	5 %	3.717.534.720,00				-	4.100.000.000,00
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (Seni) yang Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan	40 %	2.103.000.000,00				-	2.300.000.000,00
2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	3 Unit	103.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			300.000.000,00
2	22	02	1.01	0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan								
						Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	6 Kegiatan	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			2.000.000.000,00
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	100 %	1.614.534.720,00				-	1.800.000.000,00
2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1.614.534.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.800.000.000,00
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Sanggar Seni yang Dibina	53,13%	239.574.050,00				-	800.000.000,00
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Seniman dan Sanggar Seni yang Dibina	55 Seniman	239.574.050,00				-	800.000.000,00
2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional								
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	275 Orang	239.574.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			800.000.000,00
					UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan			17.814.745.986,00	17.814.745.986,00				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.814.745.986,00	17.814.745.986,00				
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			17.814.745.986,00	17.814.745.986,00				
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	3.197.994.975,00				-	5.562.162.938,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		92 Indeks							
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	91.200.000,00				-	110.880.000,00
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	91.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PAJAK DAERAH			110.880.000,00
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	0 %	0				-	68.094.803,00
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PAJAK DAERAH			68.094.803,00
1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			0,00
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	621.709.895,00				-	2.442.576.671,00
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.434.437,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PAJAK DAERAH			15.791.584,00
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	96.409.337,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PAJAK DAERAH			258.469.510,00
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.634.121,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PAJAK DAERAH			49.787.577,00
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	476.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			2.118.528.000,00
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100 %	258.806.395,00				-	258.806.395,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	89.840.011,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PAJAK DAERAH			258.806.395,00
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	2.162.896.069,00				-	2.413.156.069,00
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.580.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PAJAK DAERAH			11.000.000,00
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	893.516.069,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PAJAK DAERAH			893.516.069,00
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.261.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PAJAK DAERAH			1.508.640.000,00
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	232.349.000,00				-	268.649.000,00
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	73.557.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PAJAK DAERAH			73.557.000,00
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	54.490.000,00	Kota Samarinda, Samarinda	PAJAK DAERAH			54.490.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kota, Sungai Pinang Luar				
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	104.302.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PAJAK DAERAH			140.602.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	80,21%	16.200.000,00				-	12.252.583.048,00
						Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	70,95%						
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	198 Satuan Pendidikan	16.200.000,00				-	6.498.055.524,00
						Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	171 Satuan Pendidikan						
1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			202.752.200,00
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.233.571.324,00
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500 Orang	2.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.537.972.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	2.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			995.520.000,00	
1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	2.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			528.240.000,00	
1	01	02	1.01	0064	Penyediaan infrastruktur TIK								
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			0,00	
1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	149 Satuan Pendidikan	5.400.000,00				-	5.656.495.524,00	
					Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	132 Satuan Pendidikan							
1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			202.752.200,00	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.153.771.324,00	
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi	348 Peserta Didik	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.157.092.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			741.600.000,00
1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			401.280.000,00
1	01	02	1.02	0058	Penyediaan infrastruktur TIK								
						Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			0,00
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah SLB Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	35 Satuan Pendidikan	2.700.000,00				-	98.032.000,00
						Jumlah SLB Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	33 Satuan Pendidikan						
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang	900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			62.512.000,00
1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	20 Konten Digital	900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			16.080.000,00
1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			19.440.000,00
1	01	02	1.03	0063	Penyediaan infrastruktur TIK								
						Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			0,00
					UPTD Museum Negeri Mulawarman			10.943.061.415,00					10.512.147.527,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.943.061.415,00					8.478.816.035,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			10.943.061.415,00					8.478.816.035,00
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	9.926.398.597,00				-	8.478.816.035,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks						
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	154.560.000,00				-	170.000.000,00
2	22	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	154.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)			170.000.000,00
2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50%	28.331.492,00				-	28.331.492,00
2	22	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	28.331.492,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)			28.331.492,00
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.280.918.123,00					1.280.918.123,00
2	22	01	1.06	0001	Penvediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.379.302,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000,00
2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.529.934,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)			600.000.000,00
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.121.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)			17.270.000,00
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.162.887.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			1.400.000.000,00
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	3.133.970.800,00				-	2.943.895.035,00
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.770.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)			17.000.000,00
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.050.120.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PAJAK DAERAH			848.655.035,00
2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	48.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)			200.000.000,00
2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.021.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PAJAK DAERAH			1.878.240.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	371.287.000,00				-	3.467.651.000,00
2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	171.287.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)			217.651.000,00
2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)			250.000.000,00
2	22	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.000.000.000,00
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan pengunjung museum Mulawarman	10 %	5.973.994.000,00				-	1.835.000.000,00
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pengunjung Museum Mulawarman	65.877 Orang	5.973.994.000,00				-	1.835.000.000,00
2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu								
						Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	587.080.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)			587.216.000,00
2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman								
						Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	23.794.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			35.000.000,00
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum								
						Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	962.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)			962.784.000,00
2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)			250.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Tenggarong, Panji				
2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	4.150.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)			4.150.200.000,00
					Dinas Pendidikan Wilayah I			90.482.590.700,00					78.616.733.692,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			90.482.590.700,00					78.616.733.692,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			90.482.590.700,00					78.616.733.692,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	22.585.740.700,00				-	23.183.181.940,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks						
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	223.800.000,00				-	341.940.000,00
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	223.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			204.040.000,00
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			137.900.000,00
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	0%	0				-	162.461.000,00
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kota Balikpapan, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)			54.925.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			107.536.000,00
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Dokumen	897.415.700,00				-	1.199.288.240,00
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	127.765.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			372.888.240,00
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	769.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			826.400.000,00
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	21.268.980.000,00				-	21.263.269.700,00
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	182.220.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			215.949.700,00
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.086.760.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			21.047.320.000,00
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	195.545.000,00				-	216.223.000,00
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	140.825.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			148.431.000,00
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	54.720.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			67.792.000,00
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara	78,61%	67.896.850.000,00				-	55.433.551.752,00
						Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	39,17%						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Khusus (APS) Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara							
						Persentase satuan pendidikan wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas I)	87,27%						
						Persentase satuan pendidikan wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas I)	82,12%						
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas I)	36 Satuan Pendidikan	31.169.880.000,00				-	18.524.791.832,00
				Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas I)		34 Satuan Pendidikan							
				Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I)		100							
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13329 Peserta didik	31.169.880.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			15.108.979.000,00
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kota Balikpapan, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)			2.195.096.976,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.220.715.856,00
1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas I)	35 Satuan Pendidikan	35.344.900.000,00					-	35.521.602.144,00
					Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas I)	32 Satuan Pendidikan							
					Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I)	100							
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan								
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12784 Peserta didik	35.344.900.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan.	DANA BAGI HASIL (DBH)			16.251.654.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			2.615.070.288,00
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.303.223.856,00
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan								
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			15.351.654.000,00
1	01	02	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas I)	7 Satuan Pendidikan	1.382.070.000,00					-	1.387.157.776,00
					Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi	7 Satuan Pendidikan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas I)							
						Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I)	100%						
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus								
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	527 Peserta Didik	1.382.070.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			861.064.000,00
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			252.423.424,00
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			273.670.352,00
					Dinas Pendidikan Wilayah II								46.639.946.304,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								46.639.946.304,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			68.330.928.923,00					46.639.946.304,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	24.059.704.923,00				-	19.235.241.859,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks						
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	217.440.000,00				-	188.892.000,00
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	217.440.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			188.892.000,00
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 %	0				-	72.695.700,00
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			72.695.700,00
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	414.587.638,00				-	671.297.561,00
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	99.998.996,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)			92.226.761,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	314.588.642,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			579.070.800,00
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	9.960.627,00				-	811.243.494,00
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9.960.627,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			261.243.494,00
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			550.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	23.254.906.658,00				-	17.323.245.404,00
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.043.858,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			60.549.390,00
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.199.862.800,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			17.262.696.014,00
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	162.810.000,00				-	167.867.700,00
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	149.980.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua	PAJAK DAERAH			153.754.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	12.830.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			14.113.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Timur dan Bontang	70,50%	44.271.224.000,00				-	27.404.704.445,00
						Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Timur dan Bontang	41,02%						
						persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Timur dan Bontang yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas II)	81,98%						
						persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Timur dan Bontang yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas II)	67,16%						
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas II)	31 Satuan Pendidikan	21.532.354.000,00				-	13.832.074.273,00
						Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional	26 Satuan Pendidikan						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas II)							
						Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah II)	100%						
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	19937 Peserta didik	21.227.164.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	600 Peserta Didik	297.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.344.608.161,00
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	8.190.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			835.669.903,00
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	Kota Bontang, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)			11.651.796.209,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas II)	27 Satuan Pendidikan	22.041.040.0 00,00				-	12.844.449.480,00
						Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas II)	15 Satuan Pendidikan						
						Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah II)	100%						
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan								
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12146 Peserta didik	21.735.850.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	297.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.164.906.289,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	8.190.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			740.821.102,00
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan								
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			10.938.722.089,00
1	01	02	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas II)	10 Satuan Pendidikan	697.830.000,00					-	728.180.692,00
					Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas II)	9 Satuan Pendidikan							
					Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah II)	100%							
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus								
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	276 Peserta Didik	656.640.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	370 Peserta Didik	33.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			101.847.188,00
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	8.190.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			101.674.001,00
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus								
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			524.659.503,00
					Dinas Pendidikan Wilayah III			85.045.948.901,00					124.523.744.382,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			85.045.948.901,00					124.523.744.382,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			85.045.948.901,00					124.523.744.382,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	27.310.556.901,00				-	30.384.213.000,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks						
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	180.120.000,00				-	345.000.000,00
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	180.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			220.000.000,00
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			125.000.000,00
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 %	0				-	875.000.000,00
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			55.000.000,00
1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			820.000.000,00
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	286.372.001,00				-	710.000.000,00
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	55.172.001,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			175.000.000,00
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	231.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			535.000.000,00
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	754.697.500,00				-	750.000.000,00
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			200.000.000,00
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	754.697.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			550.000.000,00
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	25.947.926.400,00				-	27.580.000.000,00
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149.366.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			80.000.000,00
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.798.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			27.500.000.000,00
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	141.441.000,00				-	124.213.000,00
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	118.381.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			100.000.000,00
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	23.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			24.213.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Kartanegara	78,84%	57.735.392.000,00				-	94.139.531.382,00
						Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Kartanegara	17,23%						
						persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas III)	69,39%						
						persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat	62,24%						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas III)							
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)	41 Satuan Pendidikan	36.608.252.0 00,00				-	62.482.556.934,00
						Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III)	35 Satuan Pendidikan						
						Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III)	100%						
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15450 Peserta didik	36.051.752.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			60.000.000.000,00
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.327.556.934,00
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.155.000.000,00
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	56 Satuan Pendidikan	556.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				556.500.000,00
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional	24 Satuan Pendidikan	20.624.130.000,00				-	30.641.964.448,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Menengah Kejuruan	Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)							
				Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III)		23 Satuan Pendidikan							
				Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III)		100%							
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan								
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7834 Peserta didik	20.333.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			28.500.000.000,00	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			986.908.598,00	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.155.055.850,00	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan								
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	54 Satuan Pendidikan	290.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			290.850.000,00	
1	01	02	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)	3 Satuan Pendidikan	503.010.000,00				-	1.015.010.000,00	
					Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat	3 Satuan Pendidikan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III)							
						Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III)	100%						
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus								
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	218 Peserta Didik	503.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			710.010.000,00
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			130.000.000,00
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			175.000.000,00
					Dinas Pendidikan Wilayah IV			36.103.872.552,00					33.780.514.936,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.103.872.552,00					33.780.514.936,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			36.103.872.552,00					33.780.514.936,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	18.591.513.752,00				-	19.203.780.717,00
						Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	92 Indeks						
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	129.540.000,00				-	155.093.400,00
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	118.560.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			124.488.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.980.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			30.605.400,00
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	6.480.000,00				-	103.938.450,00
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			67.401.600,00
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	6.480.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			36.536.850,00
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	798.840.000,00				-	1.321.072.708,00
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	165.466.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			105.172.708,00
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	633.374.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.215.900.000,00
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	0%	0				-	704.932.159,00
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			704.932.159,00
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	17.519.973.752,00				-	16.742.607.000,00
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87.093.752,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			91.455.000,00
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17.432.880.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			16.651.152.000,00
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100 %	136.680.000,00				-	176.137.000,00
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	102.340.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			107.457.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	34.340.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			68.680.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu	63,08%	17.512.358.800,00				-	14.576.734.219,00
						Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu	11,82%						
						persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas IV)	58,93%						
						persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas IV)	39,28%						
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV)	19 Satuan Pendidikan	10.685.990.000,00				-	9.477.267.015,00
						Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV)	16 Satuan Pendidikan						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)	100%						
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5452 Peserta didik	10.506.290.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			7.057.213.000,00
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	659 Peserta Didik	159.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.423.278.515,00
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	273 Orang	20.700.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			996.775.500,00
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV)	10 Satuan Pendidikan	6.438.206.600,00				-	4.629.229.945,00
				Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional		7 Satuan Pendidikan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV)							
						Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)	100%						
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan								
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2548 Peserta didik	6.344.520.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.496.747.800,00
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	137 Peserta Didik	80.186.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			612.732.145,00
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	14 Orang	13.500.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			519.750.000,00
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV)	1 Satuan Pendidikan	388.162.200,00				-	470.237.259,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV)	1 Satuan Pendidikan						
						Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)	100%						
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus								
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	166 Peserta Didik	377.120.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			304.880.000,00
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta Didik	6.542.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			75.466.759,00
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4 Orang	4.500.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			89.890.500,00
					Dinas Pendidikan Wilayah V			38.524.071.644,00					39.613.131.644,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			38.524.071.644,00					39.613.131.644,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			38.524.071.644,00					39.613.131.644,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	15.254.466.644,00				-	14.171.453.565,00
						Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	92 Indeks						
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	202.320.000,00				-	334.656.000,00
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	202.320.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			215.838.000,00
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			118.818.000,00
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	0 %	0				-	199.359.300,00
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			59.446.800,00
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			139.912.500,00
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	825.107.136,00				-	1.278.140.043,00
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	108.307.136,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)			142.073.643,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kel/Desa				
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	716.800.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			1.136.066.400,00
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100 %	222.000.000,00				-	636.244.763,00
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			386.244.763,00
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	222.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			250.000.000,00
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	13.845.361.508,00				-	11.537.893.584,00
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.601.508,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			60.805.584,00
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.715.760.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			11.477.088.000,00
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100 %	159.678.000,00				-	185.159.875,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	134.998.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			145.159.875,00
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	24.680.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			40.000.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Paser	72,30%	23.269.605.000,00				-	25.441.678.079,00
						Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Paser	27,00%						
						persentase satuan pendidikan wilayah Paser yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas V)	70,00%						
						persentase satuan pendidikan wilayah Paser yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas V)	60,00%						
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V)	14 Satuan Pendidikan	14.187.730.000,00				-	15.460.213.601,00
						Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V)	11 Satuan Pendidikan						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V)	100%						
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6059 Peserta didik	14.036.720.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			6.700.000.000,00
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	773 Peserta Didik	114.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.000.000.000,00
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	248 Orang	37.010.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			558.810.000,00
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			7.201.403.601,00
1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V)	6 Satuan Pendidikan	8.791.665.001,00				-	9.448.772.428,00
						Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V)	6 Satuan Pendidikan						
						Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V)	100%						
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan								
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4000 Peserta Didik	8.653.030.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			4.003.064.100,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	330 Peserta Didik	101.625.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)				774.127.078,00
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	255 Orang	37.010.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)				481.320.000,00
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan								
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)				4.190.261.250,00
1	01	02	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V)	1 Satuan Pendidikan	290.210.000,00					-	532.692.050,00
					Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V)	1 Satuan Pendidikan							
					Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V)	100%							
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus								
					Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	102 Peserta Didik	265.200.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)				200.000.000,00
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Peserta Didik	18.050.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)				41.397.669,00
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus								
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	40 Orang	6.960.000,00	Kab. Paser, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)				32.529.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus								
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			258.765.381,00
					Dinas Pendidikan Wilayah VI			39.554.590.885,00				32.990.981.102,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.554.590.885,00					32.990.981.102,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.554.590.885,00					32.990.981.102,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	15.807.430.885,00				-	17.244.307.376,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks						
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	114.480.000,00				-	368.045.748,00
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	114.480.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			124.488.000,00
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			243.557.748,00
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 %	11.923.307,00				-	217.318.248,00
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	11.923.307,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			65.085.300,00
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			152.232.948,00
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	605.023.878,00				-	1.802.963.255,00
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			54.789.210,00
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	93.743.488,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			352.948.348,00
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	30.130.390,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			28.125.697,00
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	481.150.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			1.367.100.000,00
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	100%	14.911.599.700,00				-	13.556.333.700,00
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	6.848.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			21.008.400,00
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.991.700,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan,	PAJAK DAERAH			89.361.300,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Semua Kel/Desa				
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.819.760.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			13.445.964.000,00
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	164.404.000,00				-	1.299.646.425,00
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	125.384.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			133.067.025,00
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	39.020.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			39.767.700,00
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.126.811.700,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Berau	76,88%	23.747.160.000,00				-	15.746.673.726,00
						Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Berau	54,95%						
						persentase satuan pendidikan wilayah Berau yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk	86,11%						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Literasi Membaca (Cabang Dinas VI)							
						persentase satuan pendidikan wilayah Berau yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas VI)	63,89%						
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI)	20 Satuan Pendidikan	15.477.060.000,00				-	9.413.504.961,00
						Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI)	15 Satuan Pendidikan						
						Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI)	100%						
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta Didik	15.348.060.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1604 Peserta Didik	129.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.043.341.152,00
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			638.702.148,00
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas								
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			7.731.461.661,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI)	14 Satuan Pendidikan	7.587.780.000,00				-	5.266.553.061,00
						Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI)	9 Satuan Pendidikan						
						Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI)	100%						
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan								
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3000 Peserta Didik	7.469.280.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1652 Peserta Didik	118.500.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			796.066.152,00
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			616.652.148,00
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan								
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.853.834.761,00
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI)	3 Satuan Pendidikan	682.320.000,00				-	1.066.615.704,00
						Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat	3 Satuan Pendidikan						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI)							
						Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI)	100%						
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus								
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	628.320.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			0,00
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			401.570.043,00
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			288.273.111,00
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus								
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)			376.772.550,00
J U M L A H								3.425.601.303.696,00					4.244.510.298.836,50

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, 2025

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PRIORITAS

1. Pengelolaan Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan proses atau aktivitas Pendidikan di unit organisasi yang dikelola. Ketercapaian tujuan Pendidikan di setiap unit Pendidikan tidak terlepas dari kajian teori dan penerapan pengelolaan Pendidikan. Jika pengelolaan Pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik, sistematis, efektif dan efisien, maka seluruh komponen sumber daya yang ada dalam unit organisasi tersebut dapat digerakkan Bersama untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Tentu, keberhasilan di setiap unit organisasi Pendidikan ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan Pendidikan secara nasional. Pengelolaan Pendidikan itu merupakan salah satu Program Kegiatan Prioritas Disdikbud Provinsi Kaltim yang meliputi :
 - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - c. Pengelolaan Pendidikan Khusus
2. Didalam Program Pengelolaan Pendidikan yang didalamnya memuat Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, kejuruan dan Pengelolaan Pendidikan Khusus, salah satu sub kegiatannya adalah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Khusus yang mencakup salah satu Program Prioritas Gubernur dan Prgoram prioritas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan itu sendiri yaitu Peningkatan Dana Bantuan Operasional Daerah. pada dasarnya dana ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat agar anak-anak usia sekolah dapat tetap bersekolah dan mengenyam pendidikan, adapun target pemberian peningkatan bantuan BOSDA ini mencakup siswa/siswi negeri maupun swasta pada jenjang SMA/MA/SMK/SLB"
3. Kemudian untuk menjalankan salah satu program prioritas Gubernur gratispool dinas pendidikan juga menyeleggarakan pengadaan perlengkapan sekolah gratis untuk seluruh siswa/i yang ada dikalimantan timur yaitu beberapa keperluan sekolah berupa baju serta perlengkapan sekolah lainnya. Program ini ditargetkan untuk siswa SMA/MA/SMK/SLB. Kami juga menjalankan program prioritas Gubernur yaitu penambahan insentif untuk seluruh guru yang berada di jenjang SMA/MA/SMK/SLB swasta. Ditargetkan pada

tahun ini Guru pada jenjang SMA/MA/SMK/SLB swasta mendapatkan insentif tambahan sebesar 500.000.

4. Tidak hanya menjalankan program prioritas Gubernur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mempunyai program prioritas lainnya seperti pembangunan unit sekolah baru dan beberapa diantaranya pembangunan lanjutan yang meliputi beberapa daerah yaitu kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, Paser dan Samarinda. Kemudian Tidak hanya pembangunan sekolah baru kami juga melakukan penambahan ruang kelas baru dimana untuk mengatasi masalah utama yaitu untuk mengurangi angka anak putus sekolah di daerah Kalimantan timur.
5. Program Pengelolaan cagar budaya benda dan tak benda. Merupakan program prioritas yang diantaranya mengelola Bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Seseorang bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka, sehingga membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Dalam program untuk peningkatan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya benda dan tak benda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan timur menjalankan program prioritas Gubernur yaitu peningkatan pemanfaatan cagar budaya yang ditargetkan tahun ini sebanyak 2 cagar budaya yang dimanfaatkan.

Tidak hanya program prioritas saja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kalimantan timur juga menjalankan beberapa program, kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya serta program, kegiatan penunjang yang akan menunjang seluruh kegiatan yang akan dijalankan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berikut program-program yang sesuai tugas pokok dan fungsinya dan penunjang :

1. Program Pengembangan kurikulum adalah Kurikulum muatan lokal (mulok) adalah kurikulum yang berisikan materi tentang potensi dan keunikan lokal suatu daerah untuk mengembangkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan siswa yang disesuaikan dengan konteks daerah tempat mereka tinggal. Materi mulok dapat berupa bahasa daerah, seni dan budaya, keterampilan lokal, atau isu lingkungan dan sosial di daerah tersebut, dengan tujuan melestarikan budaya dan membangun keunggulan lokal.
 - a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah.
 - b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus.

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru disatuan pendidikan, pada program ini melakukan analisis formasi pendidik dan tenaga kependidikan dan melakukan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil analisis formasi menggunakan aplikasi dari Kemendikdasmen, Menyusun laporan hasil pemetaan, penataan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Program Bahasa dan Sastra adalah program studi yang mempelajari dan mendalami bahasa dan sastra Indonesia, membekali mahasiswa dengan pengetahuan mendalam tentang teori bahasa, sastra, dan budaya, serta keterampilan menulis, menganalisis, dan mengajarkan bahasa. Program ini bisa berupa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang bertujuan melahirkan pendidik yang kompeten, atau Sastra Indonesia, yang lebih fokus pada kajian mendalam terhadap karya sastra dan bahasa Indonesia. Lulusannya dapat bekerja sebagai guru, peneliti, penulis, editor, wartawan, dan praktisi di berbagai bidang lain.
4. Program pengembangan kebudayaan di Indonesia berfokus pada perlindungan, pengembangan, dan pembinaan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional, sesuai dengan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 2025-2045. Beberapa contoh program meliputi Dana Indonesiana untuk pendanaan kegiatan budaya, revitalisasi kawasan budaya dan museum, repatriasi artefak bersejarah, perlindungan bahasa daerah, dan penguatan industri budaya.
5. Program pengembangan kesenian meliputi kegiatan seperti penyelenggaraan pelatihan dan lokakarya, pembentukan dan dukungan terhadap kelompok seni, promosi kesenian melalui festival dan pameran, kolaborasi budaya, serta program apresiasi untuk seniman dan kelompok seni. Tujuannya adalah untuk melestarikan seni tradisional, menumbuhkan apresiasi budaya pada masyarakat, mengembangkan kreativitas, dan bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pariwisata budaya.
6. Program pembinaan sejarah adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan, melindungi, dan mengembangkan sejarah serta peninggalan cagar budaya, yang mencakup pendataan, inventarisasi, pemugaran situs, penguatan lembaga sejarah lokal, serta edukasi dan publikasi untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sejarah.
7. Program pengembangan museum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM, infrastruktur, dan program publiknya guna

meningkatkan fungsi museum sebagai pusat kebudayaan dan belajar bagi masyarakat. Ini mencakup kegiatan seperti pelatihan staf, pengembangan konten pameran dan program edukasi, pemanfaatan teknologi digital, serta kerja sama dengan berbagai lembaga dan masyarakat untuk pelestarian koleksi dan peningkatan pelayanan

8. Program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah rangkaian kegiatan dan anggaran yang berfungsi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintahan daerah, meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa, serta peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur dan pelayanan publik

4.2 TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis 2024 – 2026. Adapun Program dan Kegiatan Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			2.999.924.448.240,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.995.830.653.543,00
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2.995.830.653.543,00
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	1.706.869.199.158,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	
1	1	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	1.426.879.862,00
1	1	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	513.898.635,00
1	1	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	96.906.800,00
1	1	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0
1	1	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	78.196.920,00
1	1	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0
1	1	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	34.373.120,00
1	1	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	118.904.160,00
1	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	1.577.120.439.834,00
1	1	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7551 Orang/ Bulan	1.574.253.871.276,00
1	1	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.694.040.000,00
1	1	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	459.771.604,00
1	1	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	202.179.653,00
1	1	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0
1	1	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	Rp510.577.301,00
1	1	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terdata	90%	1.282.669.114,00
1	1	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	869.678.431,00
1	1	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	412.990.683,00
1	1	1	01.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tepat Waktu	100%	Rp291.966.440,00
1	1	1	01.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			
						Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	243 Dokumen	Rp120.346.440,00
1	1	1	01.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	243 Dokumen	Rp120.346.440,00
1	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengembangkan Kompetensi	0%	0
1	1	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0
1	1	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0
1	1	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0
1	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	4.828.745.527,00
1	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.064.237.845,00
1	1	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	97.931.458,00
1	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Rp2.666.576.224,00
1	1	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0
1	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	104.278.567,00
1	1	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0
1	1	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0
1	1	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	104.278.567,00
1	1	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0
1	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	108.513.848.440,00
1	1	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00
1	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.393.350.403,00
1	1	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	395.820.640,00
1	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	95.714.677.397,00
1	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dilakukan	100%	1.816.974.200,00
1	1	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	118.495.000,00
1	1	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	1.260.295.000,00
1	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	417.088.200,00
1	1	1	01.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	21.096.000,00
1	1	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.557.457.134,00
1	1	1	01.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	7.925.940.040,00
1	1	1	01.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	7.925.940.040,00
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	82,57	1.783.617.441.350,00
						Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	71,34	
						Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	82,71	
						Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	90,18	
						persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	80,21%	
						persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	70,95%	
1	1	2	01.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ruang Kelas SMA dalam Kondisi Baik	98,82%	578.613.381.504,00
						Persentase SMA/MA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Persentase Siswa SMA/ MA Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100	
						Indeks Iklim Keamanan SMA	84,84	
						Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	74,88	
						Indeks Inklusivitas SMA	64,58	
						Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	78,5	
						Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	67,03	
1	1	2	01.01	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	52.653.946.000,00
1	1	2	01.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1.074.365.000,00
1	1	2	01.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0
1	1	2	01.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah			
						Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0
1	1	2	01.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	635.850.000,00
1	1	2	01.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	42.000.000,00
1	1	2	01.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0
1	1	2	01.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0
1	1	2	01.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah			
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	13 Paket	0
1	1	2	01.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	96.111.900.000,00
1	1	2	01.01	40	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah			
						Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	42.000.000,00
1	1	2	01.01	41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	6.646.572.000,00
1	1	2	01.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13943 Peserta Didik	116.966.767.496,00
1	1	2	01.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	686.206.500,00
1	1	2	01.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	700 Orang	49.841.020.000,00
1	1	2	01.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	584.920.000,00
1	1	2	01.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0
1	1	2	01.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	245 Satuan Pendidikan	155.018.972.984,00
1	1	2	01.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	0 Orang	0
1	1	2	01.01	60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	488.436.488,00
1	1	2	01.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	64.144.000,00
1	1	2	01.01	63	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	22 Komunitas	431.104.156,00
1	1	2	01.01	65	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	66.723.000,00
1	1	2	01.01	66	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	24.460.200,00
1	1	2	01.01	67	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0
1	1	2	01.01	68	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Unit	48.099.128.000,00
1	1	2	01.01	69	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah			
						Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	0
1	1	2	01.01	70	Pembangunan Ruang Laboratorium			
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0
1	1	2	01.01	71	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium			
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0
1	1	2	01.01	72	Pembangunan Ruang Kelas Baru			
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	46.333.715.300,00
1	1	2	01.01	73	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			
						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	0 Unit	0
1	1	2	01.01	75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	1.047.000.000,00
1	1	2	01.01	78	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	238 Satuan Pendidikan	682.690.180,00
1	1	2	01.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ruang Kelas SMK Dalam Kondisi Baik	97,94%	1.131.738.298.690,00
						Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100%	
						Persentase Siswa SMK Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100%	
						Indeks Iklim Keamanan SMK	72,49	
						Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	72,69	
						Indeks Inklusivitas SMK	63,26	
						Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	74,98	
						Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	64,64	
						Jumlah SMK yang bermitra dengan DUDI	95	
						Persentase peserta didik yang tersertifikasi P1	100%	
1	1	2	01.02	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	194.510.366.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	2	01.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0
1	1	2	01.02	4	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	8 Ruang	3.084.683.000,00
1	1	2	01.02	6	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0
1	1	2	01.02	7	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0
1	1	2	01.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	14.225.333.000,00
1	1	2	01.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0
1	1	2	01.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0
1	1	2	01.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	10.000.000,00
1	1	2	01.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	84.137.400.000,00
1	1	2	01.02	32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	8 Unit	3.000.000,00
1	1	2	01.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	18 Paket	36.219.595.932,00
1	1	2	01.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	83352 Peserta didik	126.086.823.023,00
1	1	2	01.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1.572.988.500,00
1	1	2	01.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	550 Orang	41.637.000.000,00
1	1	2	01.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan,	300 Orang	569.200.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
1	1	2	01.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	185 Satuan Pendidikan	35.400.000,00
1	1	2	01.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	218 Satuan Pendidikan	150.464.070.000,00
1	1	2	01.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0 Orang	0
1	1	2	01.02	53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	35.400.000,00
1	1	2	01.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	35.400.000,00
1	1	2	01.02	56	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK			
						Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	100 Orang	500.000.000,00
1	1	2	01.02	57	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	283.000.000,00
1	1	2	01.02	59	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	35.400.000,00
1	1	2	01.02	60	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik			
						Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	25000 Orang	35.400.000,00
1	1	2	01.02	61	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			
						Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	4400 Buku	602.800.000,00
1	1	2	01.02	62	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	0
1	1	2	01.02	63	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik			
						Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	996.493.400,00
1	1	2	01.02	64	Pembangunan Ruang Kelas Baru			
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 Ruang	15.857.580.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	2	01.02	69	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah			
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang	0
1	1	2	01.02	72	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik			
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	218 Satuan Pendidikan	178.326.140,00
1	1	2	01.02	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	1.039.250.000,00
1	1	2	01.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus		Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	98,58%	73.265.761.156,00
						Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah	100%	
						Persentase Siswa SLB Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	100%	
						Indeks Iklim Keamanan SDLB	81,54	
						Indeks Iklim Keamanan SMPLB	77,83	
						Indeks Iklim Keamanan SMALB	79,1	
						Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	74,46	
						Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	76,74	
						Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	81	
						Indeks Inklusivitas SDLB	72,14	
						Indeks Inklusivitas SMPLB	72,8	
						Indeks Inklusivitas SMALB	74,28	
						Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional.	83,29	
						Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	81,88	
						Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	82,95	
						Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional	76,13	
						Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional.	75,05	
						Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional.	73,57	
1	1	2	01.03	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1.000.000,00
1	1	2	01.03	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	2	01.03	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0
1	1	2	01.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	1.000.000,00
1	1	2	01.03	36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	0 Paket	0
1	1	2	01.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	2.284.200.000,00
1	1	2	01.03	39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	2 Unit	1.000.000,00
1	1	2	01.03	40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	1.911.808.046,00
1	1	2	01.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	3.747.570.000,00
1	1	2	01.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1125 Peserta Didik	2.643.261.597,00
1	1	2	01.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	210 Orang	4.862.580.000,00
1	1	2	01.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	99.600.000,00
1	1	2	01.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	36 Satuan Pendidikan	165.864.834,00
1	1	2	01.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	36 Satuan Pendidikan	11.511.570.000,00
1	1	2	01.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	0 Orang	0
1	1	2	01.03	56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	0
1	1	2	01.03	57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 Konten Digital	0
1	1	2	01.03	58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0
1	1	2	01.03	59	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	271.800.000,00
1	1	2	01.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	268.933.578,00
1	1	2	01.03	65	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	36 Orang	114.000.000,00
1	1	2	01.03	66	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	109.964.834,00
1	1	2	01.03	67	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1.000.000,00
1	1	2	01.03	69	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	1.596.790.400,00
1	1	2	01.03	70	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Ruang	6.440.308.000,00
1	1	2	01.03	71	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	36 Satuan Pendidikan	130.200.000,00
1	1	2	01.03	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	207.554.289,00
1	1	2	01.03	74	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0
1	1	2	01.03	77	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1.000.000,00
1	1	2	01.03	79	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah			
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	5 Ruang	1.000.000,00
1	1	2	01.03	81	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	2.400.000,00
1	1	2	01.03	83	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			
						Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1260 Buku	321.300.000,00
1	1	2	01.03	84	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			
						Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.050.000,00
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	52%	1.334.256.768,00
1	1	3	01.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah SMA/SMK yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	238 Satuan Pendidikan	287.839.308,00
1	1	3	01.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			
						Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	20 Orang	216.205.308,00
1	1	3	01.01	6	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah			
						Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	71.634.000,00
1	1	3	01.01	7	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah			
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	0 Dokumen	0
1	1	3	01.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	35 Satuan Pendidikan	1.046.417.460,00
1	1	3	01.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus			
						Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	21.600.000,00
1	1	3	01.02	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus			
						Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	400 Buku	21.600.000,00
1	1	3	01.02	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus			
						Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	40 Orang	327.205.820,00
1	1	3	01.02	5	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus			
						Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	1 Buku	21.600.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	3	01.02	6	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	1 Buku	21.600.000,00
1	1	3	01.02	7	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	327.205.820,00
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	indeks Distribusi Guru	0,6 Indeks	841.215.040,00
						Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	52,52%	
1	1	4	01.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang dipenuhi	50%	841.215.040,00
1	1	4	01.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	500 Dokumen	513.115.040,00
1	1	4	01.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Laporan	328.100.000,00
5	1	1	6		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	7,5%	200.000.000,00
1	1	6	1		Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan lintas daerah yang terlaksana	2 Kegiatan	200.000.000,00
1	1	6	01.01	12	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	1 Buku	200.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.037.313.012,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			8.037.313.012,00
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	58%	127.000.000,00
2	22	2	01.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	100%	792.572.990,00
2	22	2	01.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	9.000.000,00
2	22	2	01.01	10	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	11 Objek	109.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
2	22	2	01.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah event Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan	9.000.000,00
2	22	2	01.02	3	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			
						Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	100 Sertifikat	9.000.000,00
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	50%	1.861.355.450,00
2	22	3	01.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina	112 Kesenian	1.861.355.450,00
2	22	3	01.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	200 Orang	9.000.000,00
2	22	3	01.01	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	152 Orang	9.000.000,00
2	22	3	01.01	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	553 Lembaga	1.843.355.450,00
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal	30%	8.400.000,00
2	22	4	01.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal	939 Orang	8.400.000,00
2	22	4	01.01	3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	250 Dokumen	8.400.000,00
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	50%	2.092.239.247,00
2	22	5	01.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan terhadap total yang terdaftar	24 Cagar Budaya	1.773.463.067,00
2	22	5	01.01	2	Penetapan Cagar Budaya			
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	1.773.463.067,00
2	22	5	01.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	46%	318.776.180,00
2	22	5	01.02	2	Pengembangan Cagar Budaya			
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	9.000.000,00
2	22	5	01.02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya			
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	44 Objek	300.776.180,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
2	22	5	01.02	4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya			
						Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	70 Orang	9.000.000,00
2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan pengunjung museum	15%	9.000.000,00
2	22	6	01.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pengunjung Museum	89423 Orang	9.000.000,00
2	22	6	01.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			
						Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	9.000.000,00
					UPTD Taman Budaya			9.508.164.153,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.508.164.153,00
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			9.508.164.153,00
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	5.551.055.383,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	
1	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	190.440.000,00
1	1	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	190.440.000,00
1	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Belanja	4 Dokumen	522.265.083,00
1	1	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	63.799.797,00
1	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	80.236.416,00
1	1	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.957.870,00
1	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	368.271.000,00
1	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	1.247.830.000,00
					Urusan Pemerintah Daerah			
1	1	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	147.181.836,00
1	1	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.247.830.000,00
1	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	3.120.116.100,00
1	1	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.756.800,00
1	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291.999.300,00
1	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.820.360.000,00
1	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	70%	470.404.200,00
1	1	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	306.900.000,00
1	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	163.504.200,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.957.108.770,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.957.108.770,00
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan pengunjung seni pertunjukan	5%	3.717.534.720,00
2	22	2	01.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (Seni) yang Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan	40%	2.103.000.000,00
2	22	2	01.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	3 Unit	103.000.000,00
2	22	2	01.01	13	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
						Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	6 Kegiatan	2.000.000.000,00
2	22	2	01.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	100%	1.614.534.720,00
2	22	2	01.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1.614.534.720,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Sanggar Seni yang Dibina	53,13%	239.574.050,00
2	22	3	01.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Seniman dan Sanggar Seni yang Dibina	55 Seniman	239.574.050,00
2	22	3	01.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	275 Orang	239.574.050,00
					UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan			17.814.745.986,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.814.745.986,00
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			17.814.745.986,00
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	3.197.994.975,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	
1	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	91.200.000,00
1	1	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	91.200.000,00
1	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	0%	0
1	1	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0
1	1	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0
1	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	621.709.895,00
1	1	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.434.437,00
1	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	96.409.337,00
1	1	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.634.121,00
1	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	476.232.000,00
1	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	258.806.395,00
1	1	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	89.840.011,00
1	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	2.162.896.069,00
1	1	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.580.000,00
1	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	893.516.069,00
1	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.261.800.000,00
1	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	232.349.000,00
1	1	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	73.557.000,00
1	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	54.490.000,00
1	1	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	104.302.000,00
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	80,21%	16.200.000,00
						Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	70,95%	
1	1	2	01.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	198 Satuan Pendidikan	16.200.000,00
						Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	171 Satuan Pendidikan	
1	1	2	01.01	41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0
1	1	2	01.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0
1	1	2	01.01	57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500 Orang	2.700.000,00
1	1	2	01.01	58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	2.700.000,00
1	1	2	01.01	59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	2.700.000,00
1	1	2	01.01	64	Penyediaan infrastruktur TIK			
						Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0
1	1	2	01.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	149 Satuan Pendidikan	5.400.000,00
						Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	132 Satuan Pendidikan	
1	1	2	01.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0
1	1	2	01.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0
1	1	2	01.02	50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	348 Peserta Didik	1.800.000,00
1	1	2	01.02	51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	1.800.000,00
1	1	2	01.02	52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	1.800.000,00
1	1	2	01.02	58	Penyediaan infrastruktur TIK			
						Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	2	01.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah SLB Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	35 Satuan Pendidikan	2.700.000,00
						Jumlah SLB Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	33 Satuan Pendidikan	
1	1	2	01.03	56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang	900.000,00
1	1	2	01.03	57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	20 Konten Digital	900.000,00
1	1	2	01.03	58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	900.000,00
1	1	2	01.03	63	Penyediaan infrastruktur TIK			
						Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0
					UPTD Museum Negeri Mulawarman			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	9.926.398.597,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	
2	22	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	154.560.000,00
2	22	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	154.560.000,00
2	22	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50%	28.331.492,00
2	22	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	28.331.492,00
2	22	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	1.280.918.123,00
2	22	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.379.302,00
2	22	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.529.934,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
2	22	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.121.300,00
2	22	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.162.887.587,00
2	22	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	3.133.970.800,00
2	22	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.770.000,00
2	22	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.050.120.800,00
2	22	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	48.040.000,00
2	22	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.021.040.000,00
2	22	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	371.287.000,00
2	22	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	171.287.000,00
2	22	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00
2	22	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00
2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan pengunjung museum Mulawarman	10%	5.973.994.000,00
2	22	6	01.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pengunjung Museum Mulawarman	65.877 Orang	5.973.994.000,00
2	22	6	01.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			
						Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	587.080.000,00
2	22	6	01.01	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman			
						Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	23.794.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
2	22	6	01.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			
						Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	962.920.000,00
2	22	6	01.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	250.000.000,00
2	22	6	01.01	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	4.150.200.000,00
					Dinas Pendidikan Wilayah I			90.482.590.700,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			90.482.590.700,00
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			90.482.590.700,00
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	22.585.740.700,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	
1	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	223.800.000,00
1	1	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	223.800.000,00
1	1	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0
1	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	0%	0
1	1	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0
1	1	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0
1	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Dokumen	897.415.700,00
1	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	127.765.700,00
1	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	769.650.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	21.268.980.000,00
1	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	182.220.000,00
1	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.086.760.000,00
1	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	195.545.000,00
1	1	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	140.825.000,00
1	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	54.720.000,00
1	1	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara	78,61%	67.896.850.000,00
						Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara	39,17%	
						Persentase satuan pendidikan wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas I)	87,27%	
						Persentase satuan pendidikan wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas I)	82,12%	
1	1	2	01.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas I)	36 Satuan Pendidikan	31.169.880.000,00
						Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas I)	34 Satuan Pendidikan	
						Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I)	100	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	2	01.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13329 Peserta didik	31.169.880.000,00
1	1	2	01.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0
1	1	2	01.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0
1	1	2	01.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas I)	35 Satuan Pendidikan	35.344.900.000,00
						Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas I)	32 Satuan Pendidikan	
						Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I)	100	
1	1	2	01.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12784 Peserta didik	35.344.900.000,00
1	1	2	01.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0
1	1	2	01.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0
1	1	2	01.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0
1	1	2	01.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas I)	7 Satuan Pendidikan	1.382.070.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas I)	7 Satuan Pendidikan	
						Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I)	100%	
1	1	2	01.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	527 Peserta Didik	1.382.070.000,00
1	1	2	01.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0
1	1	2	01.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0
					Dinas Pendidikan Wilayah II			68.330.928.923,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			68.330.928.923,00
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			68.330.928.923,00
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	24.059.704.923,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	
1	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	217.440.000,00
1	1	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	217.440.000,00
1	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0%	0
1	1	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0
1	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	414.587.638,00
1	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	99.998.996,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	314.588.642,00
1	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	9.960.627,00
1	1	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9.960.627,00
1	1	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0
1	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	23.254.906.658,00
1	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.043.858,00
1	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.199.862.800,00
1	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	162.810.000,00
1	1	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	149.980.000,00
1	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	12.830.000,00
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Timur dan Bontang	70,50%	44.271.224.000,00
						Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Timur dan Bontang	41,02%	
						persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Timur dan Bontang yang mencapai standar kompetensi minimum	81,98%	

[illegible]

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12146 Peserta didik		
1	1	2	01.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	297.000.000,00	
1	1	2	01.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	8.190.000,00	
1	1	2	01.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	
1	1	2	01.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas II)	10 Satuan Pendidikan	697.830.000,00	
						Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas II)	9 Satuan Pendidikan		
						Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah II)	100%		
1	1	2	01.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus				
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	276 Peserta Didik	656.640.000,00	
1	1	2	01.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	370 Peserta Didik	33.000.000,00	
1	1	2	01.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	8.190.000,00	
1	1	2	01.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0	
					Dinas Pendidikan Wilayah III				85.045.948.901,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				85.045.948.901,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			85.045.948.901,00
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	27.310.556.901,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	
1	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	180.120.000,00
1	1	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	180.120.000,00
1	1	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0
1	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0%	0
1	1	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0
1	1	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0
1	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	286.372.001,00
1	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	55.172.001,00
1	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	231.200.000,00
1	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	754.697.500,00
1	1	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0
1	1	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	754.697.500,00
1	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	25.947.926.400,00
1	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149.366.400,00
1	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.798.560.000,00
1	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	141.441.000,00
1	1	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	118.381.000,00
1	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	23.060.000,00
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Kartanegara	78,84%	57.735.392.000,00
						Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Kartanegara	17,23%	
						persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas III)	69,39%	
						persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas III)	62,24%	
1	1	2	01.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)	41 Satuan Pendidikan	36.608.252.0 00,00
						Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III)	35 Satuan Pendidikan	
						Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III)	100%	
1	1	2	01.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15450 Peserta didik	36.051.752.000,00
1	1	2	01.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	2	01.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0
1	1	2	01.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	56 Satuan Pendidikan	556.500.000,00
1	1	2	01.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)	24 Satuan Pendidikan	20.624.130.000,00
						Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III)	23 Satuan Pendidikan	
						Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III)	100%	
1	1	2	01.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7834 Peserta didik	20.333.280.000,00
1	1	2	01.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0
1	1	2	01.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0
1	1	2	01.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	54 Satuan Pendidikan	290.850.000,00
1	1	2	01.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus		Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)	3 Satuan Pendidikan	503.010.000,00
						Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III)	3 Satuan Pendidikan	
						Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III)	100%	
1	1	2	01.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	218 Peserta Didik	503.010.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	2	01.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0
1	1	2	01.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0
					Dinas Pendidikan Wilayah IV			36.103.872.552,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.103.872.552,00
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			36.103.872.552,00
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	18.591.513.752,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	
1	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	129.540.000,00
1	1	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	118.560.000,00
1	1	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.980.000,00
1	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	6.480.000,00
1	1	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0
1	1	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	6.480.000,00
1	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	798.840.000,00
1	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	165.466.000,00
1	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	633.374.000,00
1	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	0%	0
1	1	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0
1	1	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0
1	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	17.519.973.752,00
1	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87.093.752,00
1	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17.432.880.000,00
1	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	136.680.000,00
1	1	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	102.340.000,00
1	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	34.340.000,00
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu	63,08%	17.512.358.800,00
						Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu	11,82%	
						persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas IV)	58,93%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas IV)	39,28%	
1	1	2	01.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV)	19 Satuan Pendidikan	10.685.990.000,00
						Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV)	16 Satuan Pendidikan	
						Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)	100%	
1	1	2	01.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5452 Peserta didik	10.506.290.000,00
1	1	2	01.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	659 Peserta Didik	159.000.000,00
1	1	2	01.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	273 Orang	20.700.000,00
1	1	2	01.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV)	10 Satuan Pendidikan	6.438.206.600,00
						Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV)	7 Satuan Pendidikan	
						Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)	100%	
1	1	2	01.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2548 Peserta didik	6.344.520.000,00
1	1	2	01.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	137 Peserta Didik	80.186.600,00
1	1	2	01.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	14 Orang	13.500.000,00
1	1	2	01.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV)	1 Satuan Pendidikan	388.162.200,00
						Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV)	1 Satuan Pendidikan	
						Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)	100%	
1	1	2	01.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	166 Peserta Didik	377.120.000,00
1	1	2	01.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta Didik	6.542.200,00
1	1	2	01.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4 Orang	4.500.000,00
					Dinas Pendidikan Wilayah V			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	15.254.466.644,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	
1	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	202.320.000,00
1	1	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	202.320.000,00
1	1	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	0%	0
1	1	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0
1	1	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0
1	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	825.107.136,00
1	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	108.307.136,00
1	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	716.800.000,00
1	1	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	222.000.000,00
1	1	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0
1	1	1	01.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	222.000.000,00
1	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	13.845.361.508,00
1	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.601.508,00
1	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.715.760.000,00
1	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	159.678.000,00
1	1	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	134.998.000,00
1	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	24.680.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Paser	72,30%	23.269.605.000,00
						Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Paser	27,00%	
						persentase satuan pendidikan wilayah Paser yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas V)	70,00%	
						persentase satuan pendidikan wilayah Paser yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas V)	60,00%	
1	1	2	01.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V)	14 Satuan Pendidikan	14.187.730.000,00
						Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V)	11 Satuan Pendidikan	
						Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V)	100%	
1	1	2	01.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6059 Peserta didik	14.036.720.000,00
1	1	2	01.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	773 Peserta Didik	114.000.000,00
1	1	2	01.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	248 Orang	37.010.000,00
1	1	2	01.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0
1	1	2	01.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V)	6 Satuan Pendidikan	8.791.665.001,00
						Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V)	6 Satuan Pendidikan	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
						Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V)	100%	
1	1	2	01.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4000 Peserta Didik	8.653.030.000,00
1	1	2	01.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	330 Peserta Didik	101.625.000,00
1	1	2	01.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	255 Orang	37.010.000,00
1	1	2	01.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0
1	1	2	01.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V)		1 Satuan Pendidikan	290.210.000,00
					Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V)		1 Satuan Pendidikan	
					Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V)		100%	
1	1	2	01.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	102 Peserta Didik	265.200.000,00
1	1	2	01.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Peserta Didik	18.050.000,00
1	1	2	01.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	6.960.000,00
1	1	2	01.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0
					Dinas Pendidikan Wilayah VI			39.554.590.885,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.554.590.885,00
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.554.590.885,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	15.807.430.885,00
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	
1	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	114.480.000,00
1	1	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	114.480.000,00
1	1	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	0
1	1	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	11.923.307,00
1	1	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	11.923.307,00
1	1	1	01.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0
1	1	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	605.023.878,00
1	1	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0
1	1	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	93.743.488,00
1	1	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	30.130.390,00
1	1	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	481.150.000,00
1	1	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	100%	14.911.599.700,00
1	1	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	6.848.000,00
1	1	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.991.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.819.760.000,00
1	1	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	164.404.000,00
1	1	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	125.384.000,00
1	1	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	39.020.000,00
1	1	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Berau	76,88%	23.747.160.000,00
						Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Berau	54,95%	
						persentase satuan pendidikan wilayah Berau yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas VI)	86,11%	
						persentase satuan pendidikan wilayah Berau yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas VI)	63,89%	
1	1	2	01.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI)	20 Satuan Pendidikan	15.477.060.000,00
						Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI)	15 Satuan Pendidikan	
						Persentase SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI)	100%	
1	1	2	01.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta Didik	15.348.060.000,00
1	1	2	01.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1604 Peserta Didik	129.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	2	01.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0
1	1	2	01.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0
1	1	2	01.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI)	14 Satuan Pendidikan	7.587.780.000,00
						Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI)	9 Satuan Pendidikan	
						Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI)	100%	
1	1	2	01.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3000 Peserta Didik	7.469.280.000,00
1	1	2	01.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1652 Peserta Didik	118.500.000,00
1	1	2	01.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0
1	1	2	01.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0
1	1	2	01.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus		Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI)	3 Satuan Pendidikan	682.320.000,00
						Jumlah Pendidikan Khusus Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI)	3 Satuan Pendidikan	
						Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI)	100%	
1	1	2	01.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	628.320.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	2	01.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	54.000.000,00
1	1	2	01.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0
1	1	2	01.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0
J U M L A H							3.425.601.303.696,00	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja ini memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun anggaran dalam pelaksanaan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Tahun 2026.

Renja disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini sekaligus juga merupakan rambu-rambu yang ditetapkan untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kerja ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

RENJA TAHUN 2026 DINAS KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis, data capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 serta berorientasi pada capaian target indikator kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sesuai tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024- 2026.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan bidang kesehatan tahun 2026 difokuskan pada pencapaian indikator kerja utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Kerja Perangkat Daerah, meliputi:

- a) Persiapan penyusunan;
- b) Penyusunan rancangan awal;
- c) Penyusunan rancangan;
- d) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e) Perumusan rancangan akhir;
- f) Penetapan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2026 ini didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi agar bisa sinkron dengan peraturan di tingkat Pusat maupun daerah. Adapun landasan hukum untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 11 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- 16 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 17 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi.
- 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenkratur perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
- 21 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 22 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 43 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian

Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

23 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026;

24 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 26 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai berikut :

a) Maksud

sebagai kerangka acuan dalam penyusunan perencanaan dan menjalankan program dan kegiatan bidang kesehatan tahun 2026.

b) Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rancangan awal Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 adalah sebagai acuan untuk:

- 1) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- 2) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKPJ);
- 3) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- 4) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari V (lima) BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Prov Kaltim Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Uraian garis besar tentang pertimangan rumusan, dan rekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan, serta penjelasan pendanaan dan kesesuaian dengan RKPD.

Tabel rencana program, kegiatan, sub kegiatan dilengkapi dengan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

- A. Catatan Penting
- B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- C. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Prov Kaltim Tahun 2024

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pengukuran kinerja pada sasaran tahun 2024 telah dilakukan dengan hasil bahwa sebagian besar indikator sudah dapat mencapai target yang diharapkan, bahkan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran	Indikator	Target 2024	Capaian 2024	Tingkat Capaian (%)
Meningkatnya status Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kematian Ibu	63	74	-117
	Jumlah Kematian Bayi	547	589	-107
	Persentase Balita Stunting	12,83	22.2	-183

Sasaran	Indikator	Target 2024	Capaian 2024	Tingkat Capaian (%)
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	80	96.30	120,37
Meningkatnya Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Persentase pengobatan HIV dengan anti retroviral (ARV)	100	104	104
	Jumlah temuan kasus TBC/Case Detection Rate (CDR)	100	95,85	95,85
	Persentase Penderita Hipertensi mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	93,85	93,85
	Persentase penderita DM mendapat pelayanan kesehatan	100	102	102
Meningkatnya kinerja pelayanan organisasi perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	71.53	73.20	102
				101.93

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja untuk sasaran Renstra Dinas Kesehatan rata-rata berada di angka 101,93 %. Masih ada beberapa capaian indikator yang masih di bawah 100 % seperti Persentase Penderita Hipertensi, TB dan masih tingginya jumlah kematian Ibu dan bayi serta jumlah Balita Stunting, yang disebabkan Beberapa faktor :

- Kematian Ibu masih didominasi oleh Pendarahan dan Hipertensi, hal ini disebabkan oleh kurangnya screening factor resiko pada ANC yang pertama (K1)
- Masih perlunya dukungan lintas program maupun lintas sektor termasuk Organisasi Profesi dalam upaya penurunan AKI dan AKB
- Keterlibatan Masyarakat sangat Penting dalam membantu pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil, Ibu Nifas, maupun Bayi Baru Lahir Tidak semua Pemerintah Daerah konsen/focus menjadikan indikator AKI dan AKB sebagai Indikator Utama
- Masih tingginya kasus missing case/underreporting, lost to follow up penyakit menular khususnya penyakit TBC dan HIV
- Belum optimalnya jejaring kerja program di daerah
- Belum maksimalnya perhatian pemerintah daerah serta keterlibatan sektor terkait & masyarakat dalam upaya penanggulangan program P2PM (TBC, Malaria, HIV)
- Masih perlunya dukungan lintas sektor terkait dalam upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- Perlunya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengawasan minum obat (upaya kuratif) bagi pasien/ keluarga.
- Alat Kesehatan (TCM dan Mikroskopis) untuk pemeriksaan penyakit menular masih ada yang rusak sehingga mempengaruhi hasil/diagnosis pemeriksaan.
- Masih kurangnya penyediaan EKG di setiap FKTP untuk skrining peny jantung dan penyiapan pengadaan pemeriksaan profil lipid untuk deteksi stroke (mendukung operasional layanan)
- Belum banyak inovasi terkait program PTM, dan prosedur pemeriksaan yang bagi masyarakat masih dianggap kurang nyaman
- Keterbatasan sapsras dan dukungan anggaran untuk program penanggulangan gangguan indera di FKTP
- Kurangnya kerjasama dan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan gangguan indera
- Keterbatasan sapsras dan dukungan anggaran untuk program

penanggulangan gangguan indera di FKTP

- Akses Fasyankes masih sulit dijangkau oleh Masyarakat
- Belum maksimalnya dukungan dari sektor swasta dalam penanganan balita Stunting

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d
Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan											
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90	indeks	86.91	80	80	100	80	indeks	246	61,5
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		%					100	%	100	%
1.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100	%	90.47	100	100	100	100	%	290	2.90
1.02.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dok	7	7	7	100	7	dok	21	3.86
1.02.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	dok	2	2	2	100	100	dok	104	26
1.02.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	dok	8	8	8	100	8	dok	26	3.25

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	%	100	100	100	100	100	%	300	3
1.02.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190	org/bln	1	187	187	100	190	org/bln	380	2.1
1.02.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	dok	1	1	1	100	1	dok	1	1
1.02.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	lap	1	1	1	100	1	lap	1	1
1.02.001.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	dok	1	1	1	100	1	dok	3	3
1.02.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	lap	12	12	12	100	12	lap	12	9

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.001.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dok	1	1	1	100	1	dok	1	1
1.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	%	100	100	100	100	100	%	300	25
1.02.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	pkt	2	2	2	100	2	pkt	6	1,5
1.02.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	org	80	80	80	100	80	org	240	6
1.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bln	12	12	12	100	12	bln	36	9
1.02.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	pkt	1	1	1	100	1	pkt	3	0,75
1.02.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	pkt	5	5	5	100	5	pkt	15	3,75
1.02.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	pkt	3	3	3	100	3	pkt	9	2,5

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dok	12	12	12	100	12	dok	36	9
1.02.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lap	12	12	12	100	12	lap	36	9
1.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	unit	0	0	0	100	100	%	0	0
1.02.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	unit	0	0	0	100	0	unit	0	0
1.02.001.1.07.009	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	pkt	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.001.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit								
1.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bln	12	12	12	100	12	bln	36	9

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	lap	1	1	1	100	1	lap	3	0,75
1.02.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	lap	12	12	12	100	1	lap	36	9
1.02.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	lap	1	1	1	100	1	lap	3	0.75
1.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90	%	1	1	1	100	90	%	92	23
1.02.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38	unit	12	25	25	100	38	unit	75	18,75
1.02.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	12	1	1	100	10	unit	23	5,75
1.02.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90	unit	12	1	1	100	90	unit	103	28,25

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						(N-2)/2024						
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kematian Ibu	10.8	angka	100	100	100	100	10.8	angka	210,8	52,5
1.02.002.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	10	%	80	85	71.82	84	10	%	161.82	40,25
1.02.002.1.01.006	Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000	0	unit	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.002.1.01.006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	3	layanan	14	1	1	100	3	layanan	18	6

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.002.1.01.004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	unit	0	0	0	1	1	unit	1	0,25
1.02.002.1.01.008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan		unit								
1.02.002.1.01.009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit		unit								
1.02.002.1.01.010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan		unit								
1.02.002.1.01.017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang TerpeliharaSesuai Standar	1	unit	100	25	20	80	1	unit	121	30,25
1.02.002.1.01.020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk	1	unit	100	25	20	80	1	unit	121	30,25

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas										
1.02.002.1.01.021	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	dok	10	2	2	100	2	dok	14	3,5
1.02.002.1.01.022	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	1	pkt	10	10	10	100	1	pkt	21	5,25
1.02.002.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100	%	12	2	2	100	100	%	114	28,5
1.02.002.1.02.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	40898	org	100	40898	40898	100	40898	org	81896	20,47

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						(N-2)/2024						
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.002.1.02.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225	org	100	185	185	100	225	org	510	127,7
1.02.002.1.02.003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	dok	10	2	2	100	1	dok	13	3,25
1.02.002.1.02.006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	dok	10	1	1	100	1	dok	12	3
1.02.002.1.02.007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	dok	10	1	1	100	1	dok	12	3
1.02.002.1.02.008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	dok	10	1	1	100	1	dok	12	3
1.02.002.1.02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5	dok	10	1	1	100	5	dok	16	4

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						(N-2)/2024						
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.002.1.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	dok	10	2	2	100	2	dok	14	3,5
1.02.002.1.02.012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	dok	10	1	1	100	1	dok	12	3
1.02.002.1.02.013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	dok	9	1	1	100	1	dok	11	2,75
1.02.002.1.02.016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	dok	73712	1	1	100	1	dok	73714	18,43
1.02.002.1.02.017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	dok	1	1	1	100	1	dok	3	75
1.02.002.1.02.018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	dok	1	1	1	100	1	dok	3	75

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.002.1.02.019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1	dok	100	2	1	50	1	dok	102	2,55
1.02.002.1.02.021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	2	dok	60	8	8	100	2	dok	70	35
1.02.002.1.02.023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia. Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3	unit	100	5	5	100	3	unit	108	36
1.02.002.1.02.025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10	pkt	40	12	12	100	10	pkt	62	6.2
1.02.002.1.02.027	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			6	1	1	100			7	#DIV/0!
1.02.002.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan	90	%	1	100	100	100	90	%	191	2.12

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.002.1.03.001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	dok	1	3	3	100	1	dok	5	5
1.02.002.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	60	%	70	1	1	100	60	%	131	2.18
1.02.002.1.04.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	unit	70	1	1	100	1	unit	72	72
1.02.002.1.04.002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		unit								
1.02.002.1.04.003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		unit								
1.02.003	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35	%	67.02	50	70	140	35	%	172.02	4.91

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.003.1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK Provinsi dan Kab/Kota		org								
1.02.003.1.001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		kako								
1.02.003.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	2	kab	415	200	200	100	2	kab	617	308.5
1.02.003.1.02.001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	600	org	118	400	400	100	600	org	1118	1.86
1.02.003.1.02.002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dok	0	1	1	100	1	dok	2	2
1.02.004	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	100	%	100	94	98.15	104	100	%	298.15	3.0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.004.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	100	%	36	100	100	100	100	%	236	2.36
1.02.004.1.01.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	55	sarana	40	30	30	100	55	sarana	125	2.27
1.02.004.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100	%	100	100	100	100	100	%	300	3
1.02.004.1.02.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3	sarana	2	2	2	100	3	sarana	7	2.33
1.02.005	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang di berdayakan	60	%	3	4	6	150	60	%	69	1.15
		Jumlah Kab/Kota yang Melakukan PHBS			3	3	6	200			9	#DIV/0!

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.005.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang di Fasilitas Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	60	%	100	100	100	100	60	%	260	4.33
1.02.005.1.01.001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	dok	10	1	1	100	1	dok	12	12.00
1.02.005.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitas dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daera	60	%	3	100	100	100	60	%	163	2.72
1.02.005.1.02.001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	dok	3	1	1	100	1	dok	5	5

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.005.1.02.002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		dok								
1.02.005.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	60	%	2	100	100	100	60	%	162	2.7
1.02.005.1.03.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	dok	2	1	1	100	1	dok	4	4
1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Balai Latihan Kesehatan											
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	0	indeks	0	100	98	98	0	0	98	#DIV/0!
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	0	%	77.21	100	85	85	0	0	162.21	#DIV/0!
		Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	0	0	0	85	85	100	0	0	85	#DIV/0!

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	%	12	100	94	94	100	%	206	2.06
1.02.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	dok	12	12	12	100	0	0	24	#DIV/0!
1.02.001.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dok								
1.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	%	106	80	80	100	100	%	286	2.86
1.02.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	pkt	106	2	2	100	3	pkt	111	37
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
1.02.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	112	org	5	103	65	63	112	org	182	1.63
1.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bln	12	12	12	100	12	bln	36	3

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	10	pkt	14	9	5	56	10	pkt	29	2.9
1.02.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	10	pkt	15	20	20	100	10	pkt	45	4.5
1.02.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	3	pkt	10	3	3	100	3	pkt	16	5.3
1.02.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1	pkt	67.02	40	40	100	1	pkt	108.02	108.0
1.02.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	1	pkt	2	7	7	100	1	pkt	10	10
1.02.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lap	3	63	63	100	12	lap	78	6.5
1.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1	1	1	100	100	%	102	1.02
1.02.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit								
1.02.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2	pkt	4	2	2	100	2	pkt	8	4

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						(N-2)/2024						
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit								
1.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bln	12	12	12	100	12	bln	36	3
1.02.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	lap	700	125	125	100	12	lap	837	69.75
1.02.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Disediakan	12	lap	12	12	12	100	12	lap	36	3
1.02.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	lap	1	12	12	100	12	lap	25	2.08
1.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	98	%	12	12	12	100	98	%	122	1.24
1.02.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	14	unit	1	14	11	79	14	unit	26	1.86
1.02.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	220	unit	70	215	198	92	220	unit	488	2.22

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24	unit	1	2	2	100	24	unit	27	1.125
1.02.001.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan Bapelkes		%								
1.02.001.1.10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		unit								
1.02.003	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35	%	0	100	98	98	35	%	133	3.8
1.02.003.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan Dilaksanakan dalam Waktu 1 Tahun	95	%	2	5	4	80	95	%	101	1.06
1.02.003.1.02.001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	90	org	118	120	60	50	90	org	268	2.98
1.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim											
1.02.001		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	98	72.34	74	0	0	72.34	#DIV/0!

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	98	87.62	89	0	0	87.62	#DIV/0!
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	98	95.18	97	0	0	95.18	#DIV/0!
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	0	97	98	79.53	81	0	0	176.53	#DIV/0!
		Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	0	0	0	85	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Pelaksanaan Pembayaran Pajak dan Bea Kendaraan RS. Mata Prov Kaltim	0	0	97	98	96.4	98	0	0	193.4	#DIV/0!
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	98	99.16	101	0	0	99.16	#DIV/0!
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	97	98	98.78	101	0	0	195.78	48,75
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RS. Mata Prov Kaltim	0	0	97	98	57.57	59	0	0	154.57	38,5
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	98	99.48	102	0	0	99.48	24,75
1.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi RS	100	%	12	12	12	100	100	%	124	1.24

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi RS	0	0	12	12	12	100	0	0	24	6
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0
1.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	98	%	34	376	376	100	98	%	508	127
1.02.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	390	org	35	376	376	100	390	org	801	200
1.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerang kantor	0	0	5	5	5	100	0	0	10	2,5
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0	0	0	8	8	100	0	0	8	2
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	0	0	19	19	100	0	0	19	4,75
1.02.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	jenis	12	5	5	100	7	jenis	24	6

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24	jenis	14	19	19	100	24	jenis	57	14,25
1.02.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	3	3	0	0	0	0	3	0,75
1.02.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	lap	1	8	8	100	36	lap	45	11,25
1.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel Yang Diadakan	100	%	0	2	2	100	100	%	102	25,5
1.02.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	jenis	0	2	2	100	5	jenis	7	1.4
1.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	100	%	12	12	12	100	100	%	124	1.24
1.02.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	bln	12	4	4	100	12	bln	28	2.33
1.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	0	88	11	11	100	0	0	99	24,75

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	15	4	4	100	5	unit	24	4.8
1.02.001.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	150	jenis	118	131	131	100	150	jenis	399	2.66
1.02.001.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Pelayanan dan Penunjang BLUD	98	%	12	12	12	100	98	%	122	1.24
1.02.001.1.10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	3	unit	12	1	1	100	3	unit	16	5.33
1.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Indikator mutu pelayanan rumah sakit Mata	98	%	100	100	100	100	98	%	298	3.04
1.02.002.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	98	%	13	2	77	3850	98	%	188	1.92
1.02.002.1.01.015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	2	unit	15	77	77	100	2	unit	94	47

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Laboratorium Kesehatan											
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	0	0	0	85	85	100	0	0	85	21,25
1.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	bln	1	4	4	100	12	bln	17	1.4
1.02.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik yang Disediakan	12	bln	12	12	12	100	12	bln	36	3
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	12	0	12	#DIV/0!	0	0	24	6
1.02.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	bln	0	12	12	100	24	bln	36	9
1.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	0	0	12	12	12	100	0	0	24	6
1.02.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	12	3	3	100	0	0	15	3,75
1.02.001.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	100	%	12	12	12	100	100	%	124	1.24

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.001.1.10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit	12	1	1	100	1	unit	14	14
1.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Indikator mutu pelayanan Laboratorium Kesehatan	10.8	angka	0	100	98	98	10.8	angka	108.8	10.1
1.02.002.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan Sesuai Standar	12	bln	62	1	1	100	12	bln	75	6.25
1.02.002.1.01.015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	8	unit	62	15	66	440	8	unit	136	17
1.02.0.00.0.00.01.0007	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI											
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	0	0	69.94	85	95.02	112	0	0	164.96	41
1.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	%	12	100	100	100	100	%	212	2.12
1.02.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	dok	12	43	43	100	72	dok	127	1.76

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tercapainya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100	%	58	100	89.62	90	100	%	247.62	61,75
1.02.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	org	58	311	215	69	100	org	373	3.73
1.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Rumah Sakit	100	%	74.65	100	97.15	97	100	%	271.8	2.718
1.02.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	pkt	24	19	19	100	30	pkt	73	2.4
1.02.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	pkt	7	19	19	100	2	pkt	28	14
1.02.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JumlahPaket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	pkt	12	7	7	100	4	pkt	23	5.75
1.02.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	pkt	12	4	4	100	5	pkt	21	4.2
1.02.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	lap	12	426	313	73	250	lap	575	2.3

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/ 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	0	0	97.18	100	100	100	0	0	197.18	49,25
		Tercapainya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	dok	0	100	100	100	12	dok	112	9.3
		Tersedianya Mebel	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1.02.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	3	5	5	100	0	0	8	0
1.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	12	100	94.81	95	0	0	106.81	26,5
1.02.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	lap	12	12	12	100	72	lap	96	1.33
1.02.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29	lap	12	22	22	100	29	lap	63	2.17
1.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah secara rutin/berkala	100	%	84.82	100	100	100	100	%	284.82	2.85

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0,25
1.02.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	8	9	9	100	8	unit	25	3
1.02.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	unit	12	92	92	100	100	unit	204	2.04
1.02.001.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tercapainya Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD	80	%	12	100	48.36	48	80	%	140.36	35
1.02.001.1.10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25	unit	12	1	1	100	25	unit	38	9,5
1.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai rata-rata kepatuhan terhadap Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	0	0	0	95	95	100	0	0	95	9,5
		Nilai Rata-rata Kepatuhan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit	0	0	0	100	97.71	98	0	0	97.71	24,25

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.002.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tercapainya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	90	%	70.84	100	98.4	98	90	%	259.24	2.9
1.02.002.1.01.001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1.02.002.1.01.010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	200	unit	23	263	252	96	200	unit	475	2.4
1.02.002.1.01.014	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	0	0	10	54	54	100	0	0	64	16
1.02.002.1.01.017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara	150	unit	12	104	237	228	150	unit	399	99,75

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0
1.02.002.1.01.018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	0	0	12	250	249	100	0	0	261	65,25
1.02.002.1.01.022	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	4	pkt	12	2	2	100	4	pkt	18	4.5
1.02.002.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tercapainya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100	%	12	100	78.55	79	100	%	190.55	1.9
1.02.002.1.02.022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	75	dok	12	68	53	78	75	dok	140	1.9
1.02.002.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tercapainya Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	95	%	92.71	100	100	100	95	%	287.71	3.0
1.02.002.1.03.003	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	0	0	1	4	4	100	0	0	5	1,25

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						(N-2)/2024						
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.003	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	80	%	82.85	90	88.88	99	80	%	251.73	3.1
1.02.003.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	100	%	10	90	88.88	99	100	%	198.88	2.0
1.02.003.1.01.001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	23	org	10	18	16	89	23	org	49	2.1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Rata-rata Tingkat capaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sudah memenuhi target yang ditentukan, tetapi ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang ditentukan. Pencapaian indikator kinerja tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

Realisasi Indikator Kinerja yang belum mencapai target (< 100%) sebanyak 7 indikator kinerja terdiri dari indikator:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kesehatan) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dari target 12 Laporan hanya tercapai 1 Laporan (8,3%)
2. Sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) : Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan capaian kinerja dari target 2 Dokumen hanya tercapai 1 Dokumen (50 %)
3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (UPTD Balai Pelatihan Kesehatan) : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dari target 103 Orang hanya tercapai 65 Orang (63 %)
4. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Balai Pelatihan Kesehatan) : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan dari target 9 Paket hanya tercapai 5 Paket (56 %)
5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Balai Pelatihan Kesehatan) : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya dari target 14 Unit hanya tercapai 11 Unit (79 %)
6. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (UPTD Balai Pelatihan Kesehatan) : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat dari target 120 Orang hanya tercapai 60 Orang (50 %)

7. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (UPTD RSUD Korpri) :
Tercapainya Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD dari target 100 % hanya tercapai 48,36 % (48,36 %)
8. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit (UPTD RSUD Korpri) :
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit dari target 68 Dokumen hanya tercapai 53 Dokumen (78 %)

Realisasi Indikator Kinerja yang belum mencapai target (> 100%) sebanyak 7 indikator kinerja terdiri dari indikator:

1. Program PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (Dinas Kesehatan) : Persentase Kab/Kota yang memiliki $\geq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga Kesehatan dari target 50 % tercapai 70 % dengan Tingkat capaian kinerja (140 %)
2. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (UPTD Rumah Sakit Mata) : Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan dari target 2 item tercapai 77 Item dengan Tingkat capaian kinerja (3850 %)
3. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan) : Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara dari target 15 Unit tercapai 66 Unit dengan Tingkat capaian kinerja (440 %)
4. Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD RSUD Korpri) : Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan dari target 85 % tercapai 95,02 % dengan Tingkat capaian kinerja (111 %)
5. Sub kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPTD RSUD Korpri) : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara dari target 104 Unit tercapai 237 Unit dengan Tingkat capaian kinerja (227 %)

Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, serta melebihi target indikator kinerja :

1. Adanya keterbatasan waktu dalam proses pelaksanaan kegiatan
2. Terdapat Bimtek dan pelatihan untuk pegawai yang diikuti tidak ada dana kontribusi dari Institusi pelaksana kegiatan
3. Penentuan target indikator kinerja yang masih belum memperhatikan data atau kondisi lapangan
4. Terkait BLUD RSUD Korpri untuk Jasa pelayanan belum dibayarkan karena menunggu regulasi remunerasi, hasil konsultasi ke BPKP disarankan untuk berkoordinasi dengan biro hukum, sudah bersurat ke BPKAD terkait pergub Remun pada tanggal 21 Agustus 2023.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab di atas antara lain :

1. Memperbaiki penentuan target indikator kinerja pada saat Menyusun Rancangan awal RENJA Dinas Kesehatan

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD			Realisasi Renstra OPD		Proyeksi	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
				(tahun N-1)	(tahun N)	(tahun N+1)	(tahun N-2)	(tahun N-1)	(tahun N)	(tahun N+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	-	-	80	90	100	80	80	90	100
2	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	-	-	100	100	100	0	0	100	100
3	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	-	-	10	15	20	0	0	15	20
4	Persentase terlaksana nya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	-	-	100	100	100	0	0	100	100

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD			Realisasi Renstra OPD		Proyeksi	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
				(tahun N-1)	(tahun N)	(tahun N+1)	(tahun N-2)	(tahun N-1)	(tahun N)	(tahun N+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	✓	✓	2,096,543	2,096,543	2,096,543	833578	40998	290.000	290.000
6	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	✓	✓	185	200	225	75	1278	1500	1500
7	Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi	-	✓	100	100	100	100	100	100	100
8	Rasio Daya tampung RS Rujukan	-	✓	1,78	1,79	1,8	1,8	1,8	1,79	1,8

Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar dan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar merupakan indikator Standar pelayanan minimal provinsi Kalimantan timur, indikator tersebut wajib harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi Kalimantan timur.

Capaian indikator Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar pada tahun 2024 adalah 409.980 jiwa sedang pada tahun 2023 adalah 833.578 jiwa dengan persentase capaian 2 tahun tersebut adalah 100 %. Untuk indikator Jumlah Penduduk yang Mendapatkan

Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada tahun 2024 adalah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		2024	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Meningkatnya Status Kesehatan & Gizi Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	80	168	75	73	70	83
		Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	533	702	509	540	484	606
		Prevalensi Balita Stunting	%	26,5	22,8	26	23,9	25,5	22,9
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	70	91,09	75	91,09	80	94,30
3	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Persentase Pengobatan HIV dengan Anti Retroviral (ARV)	%	100	90,77	100	84,10	100	104
		TBC/Case Detection Rate (CDR) Persentase Temuan kasus	%	100	88,35	100	83,92	100	95,85
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	%	100	64,39	100	88,59	100	93,38
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapat layanan sesuai standar	%	100	80,76	100	100	100	102
4	Meningkatnya kinerja pelayanan organisasi perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	Nilai	70,33	70,33	70,50	70,73	70,65	73,20

185 Jiwa dan semua kasus KLB mendapat layanan Kesehatan sesuai dengan standar.

Indikator indeks kualitas layanan kesekretariatan dan persentase keluhan

pengguna layanan yang ditindaklanjuti merupakan tolak ukur untuk mencapai tujuan provinsi Kalimantan timur yaitu Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Skor Kepuasan Masyarakat terhadap urusan bidang Kesehatan dari tahun ke tahun.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Kesehatan adalah :

- a) Akses dan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat dengan indikator jumlah Puskesmas yang terakreditasi kategori minimal Utama sebanyak 156 Puskesmas yang terdiri dari 31 Puskesmas terakreditasi Utama dan 125 Puskesmas terakreditasi Paripurna. Secara keseluruhan dari 188 Puskesmas di Provinsi Kalimantan Timur yang sudah terakreditasi mencapai 184 Puskesmas (97,87%). Untuk Rumah Sakit sebanyak 59 RS yang sudah terakreditasi sebanyak 49 RS (83,05%) Secara keseluruhan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terakreditasi mencapai 94,3%. Hal ini berdampak kepada semakin baiknya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat
- b) Provinsi Kalimantan Timur sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan jumlah cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur sudah mencapai 102,71% yang didalamnya sudah mencakup penduduk miskin dan tidak mampu yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur juga berkontribusi dalam mendukung capaian UHC dengan alokasi anggaran Rp. 73.010.670.924 untuk mengcover 109.254 masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi peserta BPJS Kesehatan sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi Kalimantan Timur di 10 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

- c) Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan yang tersedia dalam memberikan pelayanan kesehatan di Fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas di Kabupaten/Kota menunjukkan sudah 70% Yaitu : Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda dan Bontang sudah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan (Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Kefarmasian, Perawat, Bidan, Nutrisi, Sanitarian, Promosi Kesehatan, dan ALTM) diatas 45%
- d) Ketersediaan obat esensial sudah memenuhi 98,15% sesuai standar yaitu indikator 40 item obat esensial yang tersedia di puskesmas terdiri dari obat program nasional dan obat kesehatan pelayanan dasar, ketersediaan obat menggunakan anggaran masing - masing daerah dan anggaran provinsi sebagai buffer stok.
- e) Pelaksanaan Imunisasi Dasar Lengkap dengan pemberian imunisasi yang diberikan kepada bayi usia nol sampai sebelas bulan sebagai upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. dan Promosi Kesehatan kepada masyarakat melalui 5 saluran media.
- f) Dukungan dari Lintas Program dan Lintas Sektor terkait dalam Program Kesehatan.

Dalam pencapaian target kinerja juga dihadapkan pada beberapa permasalahan/kendala antara lain :

- a) Keterbatasan SDM pada Dinas Kesehatan, sehingga kegiatan pembinaan dan pendampingan tidak semuanya dapat dilaksanakan
- b) Kebijakan Provinsi yang tidak bisa membiayai transport dan akomodasi peserta Kab/Kota sehingga kab/kota mengalami kesulitan untuk dapat hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi akibat keterbatasan dana pada Kabupaten/Kota
- c) Keterlambatan Kabupaten/Kota dalam proses pengiriman laporan data Kesehatan
- d) Kurangnya tenaga elektromedis dan alat penunjang kalibrasi alat kesehatan menyebabkan kurang maksimalnya pemeliharaan unit alat kesehatan di fasilitas Kesehatan
- e) Belum tertib administrasi dalam proses perijinan PBF baik terkait penggantian atau perubahan PJ atau Pimpinan serta alamat dan denah

- f) Masih terbatasnya pelaku usaha dalam meningkatkan produksi obat tradisional karena terkendala anggaran dan pemasarannya
- g) Tenaga Kestrad yang ada di PKM masih kerja rangkap dan Tenaga Kestrad yang terlatih masih 30 %
- h) Penyesuaian jadwal dengan lintas program/sektor/OP dan kabupaten/kota tidak sinkron serta kabupaten yang menjadi lokasi kegiatan tidak ada penyedia e-catalog

Dalam upaya mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi dilakukan beberapa upaya alternatif solusi yaitu :

- a) Melakukan kerja optimal dengan memanfaatkan ketersediaan SDM yang ada
- b) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKT yang sudah disusun
- c) Kesepakatan pengiriman laporan dan akan melakukan feedback setiap bulannya ke Kab/Kota.
- d) Adanya surat edaran ke Kab/Kota terkait kebijakan baru yang ada di Provinsi sebagai dasar Kab/Kota Advokasi ke pemerintah daerah terkait
- e) Mengoptimalkan upaya terintegrasi dengan lintas program maupun lintas sektor dengan sektor terkait lainnya, melalui upaya pertemuan lintas sektor terkait.

Tabel 2.2 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2024

DINAS KESEHATAN				
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,048,587,000.00	894,330,400.00	85.29
1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	184,466,000.00	174,160,000.00	94.41
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	547,247,800.00	389,079,839.00	71.10
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66,296,835,462.00	62,908,880,948.00	102.15
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	581,760,000.00	563,520,000.00	141.23
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16,800,000.00	12,295,800.00	73.19
1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	18,000,000.00	0.00	0.00
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	49,200,000.00	45,577,400.00	92.64

1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	149,620,000.00	147,583,220.00	98.64
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	319,866,000.00	249,300,000.00	77.94
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	314,875,000.00	300,120,180.00	95.31
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000.00	27,708,600.00	69.27
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,944,158,800.00	1,845,435,675.00	184.58
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64,044,950.00	42,515,527.00	66.38
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29,988,000.00	19,741,000.00	65.83
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,607,241,052.00	2,848,356,474.00	78.96
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00		0.00
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000.00	14,440,000.00	72.20
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,709,998,550.00	827,608,129.00	48.40
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,603,959,048.00	3,313,449,906.00	55.12
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	324,732,000.00	183,103,732.00	56.39
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,305,302,920.00	918,898,500.00	459.45
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	424,990,000.00	231,717,500.00	54.52
1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	131,112,000.00	26,906,600.00	20.52
1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	394,200,000.00	291,690,000.00	74.00
1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1,098,236,000.00	989,251,055.00	90.08
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	6,741,090,894.00	5,893,295,185.00	106.52
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	17,764,000.00	12,659,100.00	71.26
1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	294,962,989.00	104,436,940.00	35.41
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	2,693,154,000.00	2,323,397,122.00	86.27
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8,598,837,265.00	8,461,026,088.00	98.40
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	721,330,000.00	518,683,656.00	71.91
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,760,300,144.00	1,464,114,536.00	83.17
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	4,647,830,144.00	1,783,064,252.00	56.64
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	750,000,000.00	638,781,816.00	85.17
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	750,000,000.00	361,935,779.00	48.26
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7,265,927,240.00	5,464,446,190.00	75.21
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1,950,782,458.00	1,235,186,316.00	63.32
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1,950,782,458.00	1,181,148,428.00	60.55

1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1,044,230,000.00	908,739,150.00	87.02
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1,921,438,500.00	1,755,865,135.00	84.65
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23,307,256,656.00	17,847,230,480.00	90.29
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	550,524,000.00	351,395,770.00	63.83
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	769,670,000.00	648,495,071.00	84.26
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	66,308,742,867.00	64,902,471,600.00	92.01
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	859,946,000.00	608,339,971.00	70.74
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	13,491,129,000.00	11,505,559,500.00	89.84
1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	537,448,000.00	431,986,444.00	80.38
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	599,106,000.00	387,536,300.00	64.69
1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	99,868,000.00	80,530,000.00	80.64
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	821,681,515.00	611,740,400.00	44.40
1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	796,450,000.00	538,629,013.00	67.63
1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	357,330,000.00	112,795,171.00	31.57
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1,000,600,000.00	743,771,779.00	113.54
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15,500,000.00	15,500,000.00	100.00
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,338,313,500.00	1,998,804,150.00	85.48
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	496,521,000.00	178,235,879.00	35.90
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	489,572,735.00	306,169,729.00	62.54
1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	244,732,000.00	209,106,320.00	85.44
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	249,174,000.00	140,150,000.00	56.25
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2,625,530,000.00	2,592,863,160.00	512.90
1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	395,774,000.00	360,004,000.00	90.96
1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	555,786,000.00	368,800,167.00	66.36

BAPELKES

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	148,920,000.00	118,680,000.00	79.69
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	185,472,000.00	174,275,000.00	93.96
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	790,040,000.00	615,491,070.00	77.91

1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54,505,100.00	50,764,500.00	93.14
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,899,855,697.00	2,488,317,680.00	85.82
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	259,452,464.00	226,057,000.00	87.13
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	154,427,353.00	142,398,345.00	92.21
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	721,887,500.00	668,487,828.00	92.60
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,254,297,100.00	1,088,000,000.00	86.74
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	70,241,655.00	70,029,000.00	99.70
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,780,000.00	12,000,000.00	81.19
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	950,690,400.00	809,748,399.00	92.31
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,717,985,560.00	3,139,328,003.00	84.44
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49,580,000.00	42,283,300.00	85.28
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186,538,630.00	149,003,200.00	79.88
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,092,190,835.00	1,066,527,950.00	91.47
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,489,147,700.00	2,200,900,054.00	88.42

RSUD AMS II

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	148,560,000.00	148,560,000.00	100.00
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	427,191,235.00	409,946,799.00	95.96
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,568,800,000.00	1,044,106,297.00	69.20
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52,942,261.00	48,978,700.00	92.51
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	622,239,254.00	545,321,398.00	106.37
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	414,530,361.00	371,785,910.00	89.69
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	223,784,966.00	136,144,200.00	60.84
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	504,768,246.00	283,045,850.00	46.07
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	848,200,000.00	582,686,919.00	68.70
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,200,000,000.00	1,998,000,000.00	62.44
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	983,898,812.00	859,674,980.00	87.37
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47,734,562.00	39,990,750.00	83.78
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,443,456,200.00	839,397,555.00	58.15
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14,334,295,227.00	9,510,687,760.00	62.45
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	388,294,000.00	304,642,378.00	78.46

1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	251,966,432.00	193,705,067.00	76.88
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,818,454,629.00	2,247,744,039.00	71.70
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	17,911,328,673.00	15,669,625,791.00	87.48
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	377,305,260.00	233,984,704.00	73.22
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	132,714,999.00	99,125,000.00	74.69
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3,652,787,758.00	1,457,072,469.00	39.89
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1,299,356,000.00	926,132,181.00	71.28
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	729,721,520.00	469,546,460.00	59.63
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	899,750,000.00	805,719,400.00	89.55

RS MATA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	268,340,000.00	135,000,000.00	50.31%
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,248,420,000.00	1,236,497,848.00	99.05%
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98,788,150.00	97,305,300.00	98.50%
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,799,347,517.00	3,934,997,729.00	81.99%
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,421,138,000.00	1,390,378,488.00	97.84%
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,711,509,000.00	1,465,209,000.00	85.61%
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	568,126,006.00	428,315,000.00	75.39%
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,279,894,550.00	1,011,567,776.00	79.04%
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8,699,679,936.00	8,435,407,719.00	96.96%
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	353,700,450.00	327,870,197.00	92.70%
1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0.00		0.00%
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,469,939,000.00	3,259,224,551.00	93.93%
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	11,000,000,000.00	10,176,309,797.80	92.51
1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	488,310,000.00	378,783,000.00	77.57%
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	4,631,974,537.00	4,440,329,356.00	95.86%
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	269,277,120.00	268,580,000.00	99.74%

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	962,417,000.00	491,261,627.00	51.04
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,614,763,497.00	3,083,678,961.00	85.31
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5,672,341,000.00	5,628,447,795.00	99.23
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	8,399,122,543.00	7,606,992,935.00	90.57
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	57,904,711,458.00	33,065,048,104.00	57.10
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	589,840,600.00	348,495,515.00	59.08

Dari tabel diatas tergambar bahwa serapan anggaran cukup baik, namun ada beberapa kegiatan yang capaian realisasi keuangan masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kendala terkait pelaksanaan kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Dinas Kesehatan pagu anggaran sebesar Rp. 242.244.305.947,- dengan realisasi Rp. 214.312.565.082 (88,47 %) .
- 2) UPTD Balai Pelatihan Kesehatan pagu anggaran sebesar Rp. 19.723.467.954,- dengan realisasi Rp. 17.023.367.731 (86,31 %)
- 3) UPTD Rumah Sakit Mata pagu anggaran Rp. 40.308.444.266,- dengan realisasi Rp. 36.985.775.761,80,- (91,76 %)
- 4) UPTD Laboratorium Kesehatan pagu anggaran Rp. 77.143.196.098 dengan realisasi Rp. 50.223.924.937 (65,10 %)
- 5) UPTD RSUD Korpri pagu anggaran Rp. 54.181.830.395,- dengan realisasi Rp. 40.031.344.007 (73,88 %) yang Dimana masih dibawah 80 % disebabkan oleh beberapa hal yaitu :
 - Pengadaan obat terkendala SHS dengan range harga terlalu tinggi
 - Pendidikan dan pelatihan terkendala menyesuaikan jadwal pelaksanaan pelatihan dari penyelenggara dan kekhawatiran beberapa tenaga medis (dokter spesialis honorarium harian akan tidak terbayar jika mengikuti pelatihan).
 - Rapat Koordinasi perjadin luar daerah kurang terserap karena terkait dengan pengajuan diklat

- Belanja BLUD terkendala dengan pembayaran Jasa Pelayanan yang belum ada regulasi untuk RSUD KORPRI
- Untuk Laboratorium dan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya ketidaksesuaian spesifikasi barang yang mau dibeli, keterbatasan waktu sehingga pengadaan tidak bisa dilaksanakan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan kesehatan pada periode 2025-2026 adalah Pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. Sasaran pokok pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020-2024 adalah: 1) Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu 2) Meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan 3) Menurunnya kematian maternal dan neonatal 4) Meningkatnya status gizi balita 5) Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 6) Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor 7) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko 8) Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 9) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan 10) Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar 11) Meningkatnya pembiayaan Kesehatan 12) Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah 13) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan 14) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Berdasarkan 14 sasaran pokok tersebut yang perlu kerja keras dilakukan saat ini adalah: 1) Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan 2) Kepesertaan jaminan sosial kesehatan (JKN) 3) Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan 4) Percepatan penurunan stunting 5) Promosi pembudayaan hidup sehat 6) Mendorong regulasi pemerintah pusat dan daerah 7) Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM serta penguatan sistem surveilans 8) Peningkatan ketahanan kesehatan nasional 9) Menjamin kecukupan obat esensial, termasuk vaksin 10) Pemenuhan tenaga kesehatan 11) Mendorong peningkatan pembiayaan Kesehatan.

Dari analisis situasi dan kecenderungan di atas serta memperhatikan

perkembangan dan tantangan yang terkini, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas.
- b. Masih tingginya jumlah kematian ibu, bayi dan balita.
- c. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
- d. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
- e. Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar.
- f. Penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata di wilayah tertentu

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Setelah melalui pembahasan yang intensif untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang optimal, maka Rencana Kerja Dinas Kesehatan dengan pagu indikatif sejumlah Rp. **669.570.602.000,00** (Enam ratus enam puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua ribu rupiah). Data selengkapnya review terhadap rancangan akhir RKPD 2026 terkait target program/kegiatan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 setelah RKPD 2026 ditetapkan pagu indikatif menjadi Rp. **669.570.602.000,00** (Enam ratus enam puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua ribu rupiah).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan, terlebih dahulu telah dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan OPD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Provinsi. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan hasil analisis kebutuhan PD.

Usulan awal PD kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Forum PD dan Forum Musrenbang, baik musrenbang kab/kota dan Provinsi. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif Wilayah Provinsi dan Pagu Indikatif Sektoral.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada RPJMN 2020-2024, pembangunan bidang kesehatan menjadi bagian dari agenda pembangunan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing” dalam rangka terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pengertian sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Kebijakan pembangunan manusia secara umum diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Arah kebijakan kesehatan nasional tersebut di atas kemudian dirincikan menjadi lima strategi kesehatan nasional yaitu:

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
5. Penguatan Sistem Kesehatan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2026 memiliki tujuan yaitu : **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”** Untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, diambil beberapa sasaran untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, diantaranya adalah :

- Sasaran** :
1. Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Provinsi dan Kab/Kota
 2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar.

3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi dan kebijakan. Strategi digunakan untuk mencapai pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur dan kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target/Sasaran	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	<u>Tujuan :</u> Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,89	74,93
			Prevalensi Stunting	11	10
		1. Meningkatnya status gizi dan kesehatan ibu dan anak	1.1. Jumlah Kematian Ibu	54	46
			1.2. Jumlah Kematian Bayi	470	404
			1.3. Persentase Balita Wasting	6,8	6
			1.4. Persentase Balita Underweight	14,1	12

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/	Target/Sasaran	
			Sasaran	2025	2026
1	2	3	4	5	6
		2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Fasilitas Kesehatan	87,5	88
		3. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	3.1. Persentase Keberhasilan Pengobatan Tuberculose (TBC)/ Success Rate (SR)	90	95
			3.2. Persentase penderita Diabetes Mellitus/DM yang terkendali	50	70
			3.3. Indeks Pencapaian SPM Kesehatan	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target/Sasaran	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
2	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	4.1. Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	71,93	72,23
-	-	-	4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	87,5	88

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2026 serta Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2030, dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Bidang dan UOBK/UPTD yang ada pada struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Program dan Kegiatan Pembangunan Kesehatan Tahun 2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis.

3.1. Pagu Indikatif Dinas Kesehatan Tahun 2026

Secara garis besar, belanja pemerintah daerah dialokasikan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Kode	Organisasi	PAGU 2026 (Rp)
1.02.01	Dinas Kesehatan	Rp. 669.570.602.000
1.02.01.01	Dinas Kesehatan	Rp. 624.494.284.279
1.02.01.02	UPTD Balai Latihan Kesehatan	Rp. 6.024.295.994
1.02.01.02	UPTD Rumah Sakit Mata	Rp. 17.039.132.600
1.02.01.03	UPTD Laboratorium Kesehatan	Rp. 9.062.764.527
1.02.01.04	UPTD Rumah Sakit Daerah KORPRI	Rp. 12.950.124.600

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						624.494.284.279,00							316.539.079.978,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						624.494.284.279,00							316.539.079.978,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						624.494.284.279,00							316.539.079.978,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	-			90 Indeks 100 %	102.344.727.594,00						-	116.848.317.637,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas Kesehatan)	-			100 %	1.148.751.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Kabupaten/Kota	-	1.878.247.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

-604-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	156.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai Dinas Kesehatan		171.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				80 Orang	140.168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai Dinas Kesehatan		302.324.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	14.834.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai Dinas Kesehatan		31.996.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.675.709.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai Dinas Kesehatan		3.401.294.600,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.370.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai Dinas Kesehatan		1.550.695.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.590.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai Dinas Kesehatan		3.066.019.361,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	559.587.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai Dinas Kesehatan		1.206.953.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				90 Unit	210.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai Dinas Kesehatan		453.727.406,00	DINAS KESEHATAN

-624-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)</i>				1 Dokumen	433.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	2. Memban gun Sektor Kesehatan	Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur		1.423.294.312,00	DINAS KESEHATAN
		[Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau]	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	100	96	98	100	481.331.880.251,00	-	-	-	-	-	-	192.427.374.341,00	-
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	231.767.669.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	2. Memban gun Sektor Kesehatan	Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur		73.799.903.929,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat]	Angka Kesakitan	7.32	8.42	8.24	8.05	481.331.880.251,00	-	-	-	-	-	-	192.427.374.341,00	-

-638-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</i>	-			100 %	180.870.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	-	573.877.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM</i>				1 Dokumen	180.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur		573.877.700,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN							6.024.295.994,00						10.660.015.831,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.024.295.994,00							10.660.015.831,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						6.024.295.994,00							10.660.015.831,00	

-641-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	58.532.598,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai UPTD Balai Latihan Kesehatan		199.846.488,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				54 Orang	190.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai UPTD Balai Latihan Kesehatan		309.210.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN

-644-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	68.444.682,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai UPTD Balai Latihan Kesehatan		157.865.488,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	424.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai UPTD Balai Latihan Kesehatan		827.250.600,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN

-646-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.110.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai UPTD Balai Latihan Kesehatan		1.241.377.830,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	897.120.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai UPTD Balai Latihan Kesehatan		2.062.500.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN

-648-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				230 Unit	204.842.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai UPTD Balai Latihan Kesehatan		225.329.797,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				24 Unit	164.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai UPTD Balai Latihan Kesehatan		337.686.800,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN

-649-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di Balai Latihan Kesehatan</i>	-			90 %	1.347.590.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawa Bapelkes, Nakes dan ASN	-	1.500.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1.347.590.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawa Bapelkes, Nakes dan ASN		1.500.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi</i>	-			80 % 60 % 0,0073 Rasio	706.600.000,00						-	2.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.281.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	-		1.445.268.000,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.241.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	-		4.794.108.000,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				3 Unit Kerja	6.459.756.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai RS.Mata dan Masyarakat		7.700.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Prevalensi Obesitas > 18 tahun Persentase lanjut usia yang mandiri Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase kabupaten/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai standar Angka Kesakitan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	-			88 % 23,4 % 95,1 % 2 kab/Kota 80 % 100 % 8,05 % 91,75 % 85 % 2 % 0 kab/Kota 12 %	2.349.244.765,00						-	10.184.917.907,00	
		-	-	-	-	-	-	2.349.244.765,00	-	-	-	-	-	-	10.184.917.907,00	-

-662-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				146 Unit	259.476.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur		397.345.736,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				4 Unit	260.303.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur		610.393.520,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM

-664-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggung disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur		5.500.000,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN						9.062.764.527,00							11.775.053.786,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.062.764.527,00							11.775.053.786,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						9.062.764.527,00							11.775.053.786,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks) Persentase Keluhan Pegguna Layanan yang Ditindaklanjuti</i>	-			90 Indeks 100 %	8.616.533.200,00						-	11.217.610.570,00	
		[Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	100 75	100 80	100 90	8.616.533.200,00	-	-	-	-	-	-	11.217.610.570,00	-

-671-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	917.031,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit AMS II		236.780.561,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	139.166.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit AMS II		1.031.439.200,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.277.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	-		1.444.010.700,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.873.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	-		7.655.256.400,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

-677-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	-			100 %	252.775.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit AMS II	-	644.455.435,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	252.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit AMS II		644.455.435,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

-678-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan (RSUD AMS II)	-			88 %	2.309.740.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	-	-	6.710.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.309.740.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	-		6.710.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

-681-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1.042.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur		110.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				10 Paket	1.738.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Membangun Sektor Kesehatan	Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur		1.778.901.124,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

-685-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>				10 Orang	139.166.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Memban gun Sektor Kesehatan	Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur		765.416.685,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	X	NON URUSAN						142.344.800,00							433.577.540,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						142.344.800,00							433.577.540,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD AMS II)</i>	-			100 % 90 Indeks	142.344.800,00						-	433.577.540,00	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)</i>	-			100 %	142.344.800,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Memban gun Sektor Kesehatan	-	-	433.577.540,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

-686-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	142.344.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	2. Memban gun Sektor Kesehatan	-		433.577.540,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	J U M L A H							669.570.602.000,00							392.814.013.924,00	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu:

A. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang.

B. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholder), tetap harus dikedepankan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya

yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrument pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan anggaran tahun 2026.

RENJA TAHUN 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN
PERUMAHAN RAKYAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Renja 2026 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman Kepala Dinas dalam menyusun program dan kegiatan yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (RKA-APBD). Penyusunan Renja 2026 juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan program strategis Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Dalam dokumen Rancangan Renja Tahun 2026 ini, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-PERA) Provinsi Kalimantan Timur melakukan perumusan rencana kerja dan anggaran tahun 2026, memuat arah kebijakan pelaksanaan kegiatan dibidang infrastruktur pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Tahun 2026 juga menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Rancangan akhir Renja tahun 2026 difokuskan pada pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas antar daerah. Renja tahun 2026 merupakan terjemahan lebih rinci dari

pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mengantisipasi perkembangan global masa depan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur mengacu kepada perundang-undangan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11).

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan acuan, arahan dan pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung program kerja Kepala Perangkat Daerah dan melihat Keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renja SKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 adalah :

1. Sebagai pedoman dan pengarah penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dasar bidang ke-PU-an di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan prasarana sarana

pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat yang berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;

3. Memberikan gambaran umum tentang kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur;
4. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur ; serta
6. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen rancangan akhir Renja tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

Menjelaskan tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan, Capaian Target Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SERTA RENCANA
KERJADAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang penjelasan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan Tahun Berjalan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKATDAERAH**

Berisikan uraian rencana kerja program, kegiatan dan pendanaan tahun berjalan

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERRANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur tahun sebelumnya.

Sehingga hasil review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur (masih menggunakan hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 Triwulan II Bulan Juni Tahun 2025) dan pencapaian target Renstra Tahun pertama (Tahun 2025), maka rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renstra dan renja dan pencapaian renstra s/d tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 2.1, berikut ini

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Evidence	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat
1.03.1.04.5.05.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat									3,251,650,613,469.00		0.00	0
1.03.1.04.0.00.01.0003	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II						45.98	SR		70,562,412,159.00	23,735,316,101.00	33.64	SR
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks		74.60	38.00	50.94	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	12,227,335,909.00	1,860,177,765.00	15.2	SR
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%		100.00	50.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link			1	SR
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%		100.00	50.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	433,880,000.00	177,349,025.00	40.88	SR
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1.00	1.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	393,000,000.00	160,110,000.00	35.41	SR
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1.00	1.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	13,242,000.00	8,046,950.00	60.77	R
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		1.00	1.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	6,436,000.00	4,875,950.00	75.76	S
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		12.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	13,722,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	7,480,000.00	4,316,125.00	57.7	R
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	%		100.00	50.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	8,012,048,187.00	102,281,286.00	1.28	SR
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	6,294,000.00	1,499,700.00	23.83	SR
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	7,992,772,187.00	93,989,836.00	1.18	SR
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	12,982,000.00	6,791,750.00	52.32	R
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%		100.00	50.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	346,956,000.00	13,255,450.00	3.82	SR
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	3,400,000.00	3,399,700.00	22.25	SR
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	17,756,000.00	9,855,750.00	55.51	R
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		33.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	214,800,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		14.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	111,000,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%		100.00	50.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	982,050,482.00	725,316,557.00	73.86	S
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1.00	1.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	12,261,532.00	12,260,000.00	99.99	ST
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		9.00	5.00	55.56	R	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	406,964,911.00	401,335,900.00	98.62	ST
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		3.00	1.00	33.33	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	347,183,591.00	187,892,075.00	65.23	R
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2.00	1.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	37,258,000.00	14,848,000.00	39.85	SR
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1,477.00	739.00	50.03	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	11,520,600.00	4,800,000.00	41.66	SR
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	138,622,000.00	91,030,582.00	15.98	SR
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	13,594,648.00	13,150,000.00	96.73	ST
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	14,645,200.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%		100.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	0.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		3.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	0.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		14.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	0.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100.00	50.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	312,982,200.00	130,255,183.00	41.62	SR
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/12e_d8qopSxwursEjOmSigYsMSg15FpQJ?usp=drive_link	11,500,000.00	8,300,000.00	72.17	S
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12.00	6.00							

1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	910,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	910,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	%	100.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	2,600,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	780,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	910,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	910,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	348,806,986.00	86,621,000.00	24.83	SR
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaiain Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	126,246,986.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	780,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	780,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	31.00	9.00	29	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	221,000,000.00	86,621,000.00	27.85	SR
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	2,979,450,140.00	122,869,000.00	4.12	SR
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	53,167,021.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	16,349,780.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4.00	3.00	75	S	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	161,503,091.00	110,538,000.00	68.44	S
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	2,483,506,397.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	20,659,760.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	18,682,091.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	206,282,000.00	12,331,000.00	2.47	SR
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	18,780,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	520,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	462,504,744.00	2,720,000.00	0.59	SR
1.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	0.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	44.00	1.00	2	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	462,504,744.00	2,720,000.00	0.59	SR
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	337,949,800.00	92,822,602.00	27.47	SR
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	18,008,000.00	1,000,000.00	5.55	SR
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	319,941,800.00	91,822,602.00	28.7	SR
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	550,027,300.00	201,632,973.00	36.66	SR
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11.00	6.00	55	R	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	165,533,000.00	37,348,733.00	22.56	SR
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	86.00	26.00	30.23	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	73,028,700.00	22,003,312.00	30.13	SR
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	311,465,600.00	142,280,928.00	45.68	SR
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	%	71.11	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	139,523,600.00	30,015,807.00	21.51	SR
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Dokumen	3.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	139,523,600.00	30,015,807.00	21.51	SR
1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	BangunanKonstruksi	3.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/104sa16jut05RyRcBz-A8-CuqWske2knf	139,523,600.00	30,015,807.00	7.04	SR
1.03.1.04.5.05.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat					19.53	SR		3,040,646,867,304.00	352,617,731,094.00	11.6	SR
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	74.60	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	138,913,856,313.00	56,201,266,638.00	40.46	SR
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100.00	78.73	78.73	T	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR				
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	%	84.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	783,904,413.00	22,652,622.00	2.89	SR
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2.00	1.00	50	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	408,115,687.00	20,082,622.00	3.21	SR
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4.00	2.00	50	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	81,539,698.00	2,060,000.00	1.03	SR
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	40,619,795.00	510,000.00	1.02	SR
1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4.00	2.00	50	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	90,629,542.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20.00	10.00	50	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	162,999,691.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	104,347,471,156.00	35,321,641,232.00	33.85	SR
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	11,648.00	5,824.00	50	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	102,713,207,531.00	34,956,846,227.00	39.18	SR
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6.00	2.00	33.33	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	1,573,320,000.00	348,330,000.00	22.14	SR
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.00	1.00	100	ST	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	6,046,340.00	3,628,500.00	6.13	SR
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1.00	1.00	100	ST	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	23,376,505.00	11,540,505.00	27.56	SR
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	11,136,710.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	20,384,070.00	1,296,000.00	3.33	SR
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	%	100.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	756,660,381.00	730,676,798.00	96.57	ST
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	6,525,525.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4.00	4.00	100	ST	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	743,609,331.00	730,676,798.00	86.03	T
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	6,525,525.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	232,889,440.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaiain Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.00	0.00	0	SR		0.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	11,264,720.00	0.00	0	SR

1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1.00	0.00	0	SR		12,764,720.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30.00	0.00	0	SR		180,000,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200.00	0.00	0	SR		28,860,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	4,583,568,999.00	2,217,375,430.00	48.38	SR
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	0.00	0	SR		99,999,948.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14.00	6.00	42.86	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	3,006,168,295.00	1,890,842,000.00	62.9	R
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3.00	0.00	0	SR		99,212,620.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00	1.00	20	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	213,016,476.00	4,900,000.00	2.19	SR
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00	1.00	20	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	221,911,900.00	3,480,000.00	1.57	SR
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	6.00	50	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	892,500,000.00	318,153,430.00	18.54	SR
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1.00	0.00	0	SR		33,800,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1.00	0.00	0	SR		16,959,760.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	64,869,420.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1.00	0.00	0	SR		0.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1.00	0.00	0	SR		64,869,420.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	22,232,965,039.00	15,637,462,694.00	70.33	S
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	6.00	50	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	89,637,600.00	19,785,000.00	22.07	SR
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	6.00	50	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	2,896,413,500.00	1,125,099,974.00	38.84	SR
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1.00	1.00	100	ST	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	19,246,913,939.00	14,492,577,720.00	44.26	SR
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	5,911,527,465.00	2,271,457,862.00	38.42	SR
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31.00	20.00	64.52	R	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	1,484,167,500.00	411,633,874.00	27.74	SR
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4.00	3.00	75	S	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	786,601,000.00	211,662,490.00	26.91	SR
1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	3,640,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3.00	3.00	100	ST	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	588,992,000.00	467,213,620.00	79.32	T
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4.00	3.00	75	S	https://bit.ly/DATA_EVDOREN_2025_DPUPR	3,048,126,965.00	1,180,947,878.00	38.74	SR
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	10,285.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	187,171,879,113.00	3,448,176,826.00	1.84	SR
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	lt/detik	875.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz				
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	147.00	2.50	1.7	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz				
		Panjang pantai kritis yang ditangani **	Km	0.52	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz				
		Infrastruktur Air Baku yang ditangani	Unit	11.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	170,467,610,793.00	3,448,176,826.00	2.02	SR
		Panjang segmen sungai yang ditangani	meter	3,129.00	500.00	16	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz				
		Pantai Kritis yang ditangani **	Lokasi	5.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz				
1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	150,939,640.00	0.00	0	SR
1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	3.13	0.50	15.98	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	50,417,809,500.00	3,295,806,400.00	9.33	SR
1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	141,891,640.00	0.00	0	SR
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	6.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	2,242,642,587.00	152,370,426.00	3.55	SR
1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	0.52	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	17,615,449,614.00	0.00	0	SR
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	12.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	1,213,795,440.00	0.00	0	SR
1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	3.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	7,104,859,500.00	0.00	0	SR
1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	0.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	9,646,745.00	0.00	0	SR
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	2.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	9,129,114,902.00	0.00	0	SR
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	8.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	7,600,900,000.00	0.00	0	SR
1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Unit	8.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	74,840,561,225.00	0.00	0	SR
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	meter	3,236.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	16,704,268,320.00	0.00	0	SR
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	3.06	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	11,032,978,320.00	0.00	0	SR
1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM	0.18	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	2,214,690,000.00	0.00	0	SR
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	10.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	3,456,600,000.00	0.00	0	SR
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	83.40	0.00	0	SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	9,607,002,600.00	45,700,000.00	0.48	SR
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	unit	5.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	9,607,002,600.00	45,700,000.00	0.48	SR
1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota	10.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	274,834,600.00	0.00	0	SR
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	4.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	9,127,990,000.00	0.00	0	SR
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	liter/detik	70.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	20,000,000.00	0.00	0	SR
1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota	5.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	184,178,000.00	45,700,000.00	20.49	SR
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	%	25.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	1,367,423,900.00	45,700,000.00	3.34	SR
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	1,367,423,900.00	45,700,000.00	3.34	SR
1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	25.00	0.00	0	SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	207,083,900.00	45,700,000.00	12.94	SR

1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	1.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	1,160,340,000.00	0.00	0 SR
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	%	42.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	1,994,704,300.00	105,700,000.00	5.3 SR
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	Dokumen	2.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	1,994,704,300.00	105,700,000.00	5.3 SR
1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	25.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	207,083,900.00	45,700,000.00	12.94 SR
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	2.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	1,438,720,000.00	0.00	0 SR
1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	kabupaten/kota	2.00	2.00	100 ST	https://bit.ly/Evdoren2025CK	348,900,400.00	60,000,000.00	10.47 SR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	%	13.91	0.00	0 SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	17,865,028,396.00	0.00	0 SR
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	meter	924.00	0.00	0 SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	17,865,028,396.00	0.00	0 SR
1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	SistemDrainasePerkotaan	5.00	0.00	0 SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	16,294,828,396.00	0.00	0 SR
1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	5.00	0.00	0 SR	https://drive.google.com/drive/folders/10KizTWkaVjyW4qMym34dnunujyN1sScz	1,570,200,000.00	0.00	0 SR
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	%	75.00	55.03	73.37 S	https://bit.ly/Evdoren2025CK	31,660,066,400.00	0.00	0 SR
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur	Kawasan	2.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	31,660,066,400.00	0.00	0 SR
1.03.07.1.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit	2.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	31,660,066,400.00	0.00	0 SR
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	%	83.58	11.69	13.99 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	543,534,584,402.00	24,216,958,120.00	4.46 SR
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	unit	9.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	543,534,584,402.00	24,216,958,120.00	4.46 SR
1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang	50.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	33,897,268.00	0.00	0 SR
1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	RumahNegara	5.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	20,000,000.00	0.00	0 SR
1.03.08.1.01.0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	BangunanGedungNegara	25.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	20,000,000.00	0.00	0 SR
1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	BangunanGedung	9.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	517,014,912,636.00	23,572,422,000.00	4.45 SR
1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	Lisensi	10.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	55,003,500.00	0.00	0 SR
1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Kabupaten/Kota	2.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	226,147,200.00	45,700,000.00	20.21 SR
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	10.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	26,164,623,798.00	598,836,120.00	2.95 SR
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase jumlah kawasan yang ditata	%	66.67	18.89	28.33 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	5,608,161,992.00	428,762,906.00	7.65 SR
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	1.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	5,608,161,992.00	428,762,906.00	7.65 SR
1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	1.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	2,003,280,000.00	121,595,040.00	3.37 SR
1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	1,782,700,000.00	0.00	0 SR
1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Dokumen	2.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	1,791,507,792.00	307,167,866.00	10.26 SR
1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	kabupaten/kota	10.00	0.00	0 SR	https://bit.ly/Evdoren2025CK	30,674,200.00	0.00	0 SR
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru	ruas	2.00	0.00	0 SR	https://shorturl.at/IBLSN	1,964,827,358,876.00	267,435,608,157.00	13.61 SR
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rasio Kementapan Jalan Provinsi	%	86.23	15.42	18 SR	https://shorturl.at/IBLSN	1,964,827,358,876.00	267,435,608,157.00	13.61 SR
1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun	Km	43.50	0.10	0 SR	https://shorturl.at/IBLSN	57,913,748,854.00	3,168,049,209.00	5.07 SR
		Panjang jalan dengan kondisi mantap	Km	792.61	15.42	2 SR	https://shorturl.at/IBLSN			
		Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	KM	88.29	18.95	21.46 SR	https://shorturl.at/IBLSN			
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	88.29	15.42	17.47 SR	https://shorturl.at/IBLSN	1,032,230,537,400.00	194,343,568,283.00	18.38 SR
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	6.00	0.00	0 SR	https://shorturl.at/IBLSN	135,841,090,770.00	32,234,337,652.00	12.06 SR
1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	10.00	3.53	35.25 SR	https://shorturl.at/IBLSN	72,462,610,770.00	19,566,234,229.00	26.84 SR
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	45.00	34.00	75.56 S	https://shorturl.at/IBLSN	50,138,674,939.00	1,925,105,903.00	4.99 SR
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	23.07	0.00	0.02 SR	https://shorturl.at/IBLSN	611,650,675,686.00	15,892,868,071.00	1.99 SR
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	KM	938.85	0.00	0 SR	https://shorturl.at/IBLSN	2,972,368,756.00	9,807,233.00	0.32 SR
1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	1.00	0.72	71.79 S	https://shorturl.at/IBLSN	1,617,651,701.00	295,637,577.00	17.42 SR
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	60.13	0.00	0 SR		9,471,211,674.00	355,680,776.00	3.76 SR
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	orang	1,000.00	392.00	39 SR	https://drive.google.com/drive/folders/1YKYqW9ENfg4cnkF1Wr4F1FcjBLYfq9uX	7,724,181,480.00	85,084,539.00	1.1 SR
1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Orang	120.00	48.00	40 SR	https://drive.google.com/drive/folders/1YKYqW9ENfg4cnkF1Wr4F1FcjBLYfq9uX	779,849,340.00	0.00	0 SR
1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen	1.00	1.00	100 ST	https://drive.google.com/drive/folders/1YKYqW9ENfg4cnkF1Wr4F1FcjBLYfq9uX	2,788,000.00	0.00	0 SR
1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang	1,000.00	392.00	39.2 SR	https://drive.google.com/drive/folders/1YKYqW9ENfg4cnkF1Wr4F1FcjBLYfq9uX	1,563,845,016.00	37,721,148.00	1.04 SR
1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	11.00	0.00	0 SR		1,673,147,120.00	10,990,000.00	0.51 SR
1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen	1.00	0.00	0 SR		5,432,000.00	0.00	0 SR
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang	1,000.00	381.00	38.1 SR	https://drive.google.com/drive/folders/1YKYqW9ENfg4cnkF1Wr4F1FcjBLYfq9uX	3,626,650,004.00	36,373,391.00	0.94 SR
1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatthannya	Orang	1,000.00	422.00	42.2 SR	https://drive.google.com/drive/folders/1YKYqW9ENfg4cnkF1Wr4F1FcjBLYfq9uX	53,400,000.00	0.00	0 SR
1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Lembaga	10.00	0.00	0 SR		19,070,000.00	0.00	0 SR
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPIJAK) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	Layanan	1.00	1.00	100 ST	https://drive.google.com/drive/folders/1YKYqW9ENfg4cnkF1Wr4F1FcjBLYfq9uX	235,152,128.00	14,982,500.00	6.37 SR

1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	LayananInformasi	1.00	1.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1YKYqW9ENfG4cnkF1Wr4F1FcjBLYfq9uX	41,026,000.00	9,810,000.00	14.26	SR
1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	PerangkatPendukung	1.00	1.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1YKYqW9ENfG4cnkF1Wr4F1FcjBLYfq9uX	138,108,416.00	5,172,500.00	3.75	SR
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infomrasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen	1.00	1.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1YKYqW9ENfG4cnkF1Wr4F1FcjBLYfq9uX	28,809,040.00	0.00	0	SR
1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	60.00	0.00	0	SR		27,208,672.00	0.00	0	SR
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Dokumen	3.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1YKYqW9ENfG4cnkF1Wr4F1FcjBLYfq9uX	1,511,878,066.00	255,613,737.00	16.91	SR
1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	PaketPekerjaan	200.00	50.00	25	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1YKYqW9ENfG4cnkF1Wr4F1FcjBLYfq9uX	242,075,368.00	104,565,334.00	20.87	SR
1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	BangunanKonstruksi	50.00	60.00	120	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1YKYqW9ENfG4cnkF1Wr4F1FcjBLYfq9uX	80,957,010.00	19,700,400.00	10.19	SR
1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	11.00	11.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1YKYqW9ENfG4cnkF1Wr4F1FcjBLYfq9uX	908,247,168.00	128,588,003.00	6.77	SR
1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	BadanUsaha	100.00	50.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1YKYqW9ENfG4cnkF1Wr4F1FcjBLYfq9uX	105,301,010.00	0.00	0	SR
1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	Dokumen	1.00	0.00	0	SR		175,297,510.00	2,760,000.00	0.96	SR
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	83.90	83.34	99.33	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	7,912,948,343.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	%	13.35	13.25	99	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	1,554,381,284.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen	3.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	1,418,860,784.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	50.00	81.00	162	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	135,520,500.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	%	27.88	27.68	99	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	2,567,054,123.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Laporan	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	189,439,790.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang	80.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	94,744,510.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	104,820,320.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	2.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	733,389,213.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	BeritaAcara	3.00	1.00	33.33	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	155,538,210.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	1,289,122,080.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	%	26.73	26.53	99	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1DxM4o-vk4WOPZ5-0fmGuVIOHnWsbilSe7usp=share_link	1,953,990,028.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	6.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1DxM4o-vk4WOPZ5-0fmGuVIOHnWsbilSe7usp=share_link	64,059,542.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1DxM4o-vk4WOPZ5-0fmGuVIOHnWsbilSe7usp=share_link	281,684,465.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	6.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1DxM4o-vk4WOPZ5-0fmGuVIOHnWsbilSe7usp=share_link	59,659,830.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	4.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1DxM4o-vk4WOPZ5-0fmGuVIOHnWsbilSe7usp=share_link	318,946,675.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	2.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1DxM4o-vk4WOPZ5-0fmGuVIOHnWsbilSe7usp=share_link	1,229,639,516.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	%	15.94	15.86	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	1,837,522,908.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	2.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	532,619,119.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus	3.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	214,869,853.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINIAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	101,528,035.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.04.0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	131,991,833.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	2.00	1.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	651,986,137.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.04.0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	BeritaAcara	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	87,938,598.00	0.00	0	SR
1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1kv1WcQ2qZYkAuowexidiz-WtPUA0qEY7usp=share_link	116,589,333.00	0.00	0	SR
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan	%	47.89	0.00	0	SR		356,240,000.00	46,200,000.00	12.97	SR
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen	2.00	0.00	0	SR		336,240,000.00	46,200,000.00	13.74	SR
1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1.00	0.00	0	SR		336,240,000.00	46,200,000.00	13.74	SR
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit	100.00	0.00	0	SR		10,000,000.00	0.00	0	SR
1.04.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	UnitRumah	0.00	0.00	0	SR		10,000,000.00	0.00	0	SR
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	1.00	0.00	0	SR		10,000,000.00	0.00	0	SR
1.04.02.1.04.0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1.00	0.00	0	SR		10,000,000.00	0.00	0	SR
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	156.59	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1EOA8vU69qYMuRkWd3bqDc5r4beBp5wLw7usp=drive_link	86,492,682,995.00	266,275,871.00	0.31	SR
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	4.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1EOA8vU69qYMuRkWd3bqDc5r4beBp5wLw7usp=drive_link	761,824,880.00	55,380,358.00	7.27	SR
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	4.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1EOA8vU69qYMuRkWd3bqDc5r4beBp5wLw7usp=drive_link	761,824,880.00	55,380,358.00	7.27	SR
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	Ha	48.58	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1EOA8vU69qYMuRkWd3bqDc5r4beBp5wLw7usp=drive_link	85,730,858,115.00	210,895,513.00	0.25	SR
1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	3.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1EOA8vU69qYMuRkWd3bqDc5r4beBp5wLw7usp=drive_link	1,153,858,000.00	73,908,684.00	6.41	SR

1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	UnitRumah	1.000.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1EOA8vU69qYMuRkWd3bqDc5r4beBp5wLw?usp=drive_link	27,988,030,000.00	43,436,625.00	0.16	SR
1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	Ha	89.66	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1EOA8vU69qYMuRkWd3bqDc5r4beBp5wLw?usp=drive_link	56,588,970,115.00	93,550,204.00	0.17	SR
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan PSU Permukiman	%	52.57	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1EOA8vU69qYMuRkWd3bqDc5r4beBp5wLw?usp=drive_link	33,863,718,000.00	21,701,800.00	0.06	SR
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	6.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1EOA8vU69qYMuRkWd3bqDc5r4beBp5wLw?usp=drive_link	33,863,718,000.00	21,701,800.00	0.06	SR
1.04.05.1.01.0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	9.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1EOA8vU69qYMuRkWd3bqDc5r4beBp5wLw?usp=drive_link	33,863,718,000.00	21,701,800.00	0.06	SR
1.03.1.04.5.05.01.0002	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I					41.35	SR		55,990,505,303.00	22,152,404,960.00	39.56	SR
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100.00	50.00	50	SR	-	4,675,346,483.00	2,796,917,474.00	59.82	R
		Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	indeks	74.60	41.03	55	R	-				
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100.00	50.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	331,486,000.00	96,802,050.00	29.2	SR
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	323,880,000.00	92,070,000.00	28.43	SR
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	7,606,000.00	4,732,050.00	62.21	R
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	%	100.00	50.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	28,304,588.00	20,219,750.00	71.44	S
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	6,460,000.00	2,127,500.00	32.93	SR
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	1.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	16,299,088.00	15,817,500.00	97.05	ST
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	5,545,500.00	2,274,750.00	41.02	SR
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100.00	50.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	144,064,000.00	36,832,016.00	25.57	SR
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.00	0.00	0	SR		0.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	6,064,000.00	2,935,500.00	43.55	SR
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10.00	1.00	10	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	69,000,000.00	3,473,416.00	2.32	SR
1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10.00	2.00	20	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	69,000,000.00	30,423,100.00	20.28	SR
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100.00	50.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	863,308,005.00	542,396,256.00	62.83	R
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3.00	2.00	66.67	S	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	129,893,789.00	10,867,000.00	8.37	SR
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7.00	5.00	71.43	S	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	444,104,884.00	377,797,570.00	85.07	T
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2.00	1.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	46,060,360.00	13,174,900.00	28.6	SR
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	9,696,000.00	4,000,000.00	41.25	SR
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	184,800,000.00	116,376,786.00	20.89	SR
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	45,100,972.00	20,180,000.00	44.74	SR
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1.00	0.00	0	SR		3,652,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	778,681,790.00	767,532,000.00	98.57	ST
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5.00	0.00	0	SR		0.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	39.00	39.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	778,681,790.00	767,532,000.00	98.57	ST
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	50.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	495,836,400.00	166,240,211.00	33.53	SR
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	17,954,000.00	6,129,000.00	34.14	SR
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	477,882,400.00	160,111,211.00	33.5	SR
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100.00	50.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	2,033,665,700.00	1,166,895,191.00	57.38	R
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26.00	12.00	46.15	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	165,682,800.00	80,762,780.00	48.75	SR
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	19.00	9.00	47.37	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	935,139,000.00	453,391,070.00	48.48	SR
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	67.00	7.00	10.45	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	79,680,000.00	8,602,900.00	10.8	SR
1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1.00	1.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	6,409,900.00	676,000.00	10.55	SR
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4.00	4.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	846,754,000.00	623,462,441.00	73.63	S
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	10,285.00	0.00	0	SR		8,000,009,100.00	3,524,962,065.00	44.06	SR
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	lt/detik	875.00	0.00	0	SR					
		Pengurangan luas engangan banjir perkotaan	Ha	147.00	0.00	0	SR					
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah	Panjang segmen sungai yang ditangani	meter	3,129.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	2,500,012,400.00	791,522,352.00	31.66	SR
1.03.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	2.00	1.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	500,001,000.00	0.00	0	SR
1.03.02.1.01.0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	KM	1.20	0.41	34.52	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	1,499,996,300.00	292,868,172.00	19.52	SR
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM	0.18	0.18	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	500,015,100.00	498,654,180.00	99.73	ST
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	meter	3,236.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	5,499,996,700.00	2,733,439,713.00	49.7	SR
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	5.78	4.57	79	T	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	5,499,996,700.00	2,733,439,713.00	49.7	SR
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	%	83.58	41.79	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	653,065,900.00	175,392,698.00	26.86	SR
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsui	unit	1.00	1.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	653,065,900.00	175,392,698.00	26.86	SR
1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	BangunanGedung	2.00	2.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	653,065,900.00	175,392,698.00	26.86	SR
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	%	86.23	47.43	55	R	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	42,662,083,820.00	15,655,132,723.00	36.7	SR
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	Km	792.61	396.31	50	SR	-	42,662,083,820.00	15,655,132,723.00	36.7	SR
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	6.00	5.00	83.33	T	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	1,502,948,790.00	348,374,939.00	23.18	SR
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	8.50	2.55	30	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	7,998,835,910.00	1,074,509,876.00	13.43	SR
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	30.00	15.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1rWY44y6UpqXMz3CGsM7eNwkgewONcEIT	33,160,299,120.00	14,232,247,908.00	32.97	SR
1.03.1.04.5.05.01.0004	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III					46.65	SR		79,522,286,133.00	9,341,071,427.00	11.75	SR
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VIX1vSbx9DP?usp=sharing	2,791,097,703.00	774,430,675.00	27.75	SR
		Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	%	72.20	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VIX1vSbx9DP?usp=sharing				
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100.00	50.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VIX1vSbx9DP?usp=sharing	356,449,500.00	114,244,236.00	32.05	SR
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1.00	0.50	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VIX1vSbx9DP?usp=sharing	327,240,000.00	105,150,000.00	32.13	SR

1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.00	0.50	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	4,820,760.00	1,629,156.00	33.79	SR
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1.00	0.50	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	10,407,600.00	3,905,700.00	37.53	SR
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1.00	0.50	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	8,910,380.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1.00	0.50	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	5,070,760.00	3,559,380.00	70.19	S
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	%	100.00	50.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	207,878,760.00	2,850,360.00	1.37	SR
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	0.50	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	4,820,760.00	2,850,360.00	59.13	R
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	0.50	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	198,033,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1.00	0.50	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	5,025,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100.00	97.16	97	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	198,387,120.00	148,265,717.00	74.74	S
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.00	1.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	38,487,120.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1.00	0.50	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	4,950,000.00	2,770,000.00	55.96	R
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1.00	0.50	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	4,950,000.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5.00	5.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	75,000,000.00	72,516,588.00	96.69	ST
1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5.00	5.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	75,000,000.00	72,979,132.00	60.82	R
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100.00	37.04	37	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	321,324,887.00	49,762,296.00	15.49	SR
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3.00	1.00	33.33	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	31,112,030.00	1,000,000.00	3.21	SR
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2.00	2.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	63,434,016.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2.00	1.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	14,742,756.00	862,000.00	5.85	SR
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2.00	1.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	50,277,490.00	1,929,150.00	3.84	SR
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3.00	1.00	33.33	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	56,603,794.00	4,400,000.00	7.77	SR
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1.00	0.50	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	3,878,400.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	88,918,000.00	38,914,646.00	6.8	SR
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1.00	0.50	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	7,758,570.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1.00	0.50	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	4,599,831.00	2,656,500.00	57.75	R
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	42,098,908.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2.00	2.00	100	ST	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	42,098,908.00	0.00	0	SR
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	39.47	39	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	292,522,540.00	64,005,973.00	21.88	SR
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	32,502,000.00	927,000.00	2.85	SR
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	226,269,000.00	61,680,723.00	27.26	SR
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1.00	0.50	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	33,751,540.00	1,398,250.00	4.14	SR
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100.00	35.86	36	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	1,372,435,988.00	395,302,093.00	28.8	SR
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	47.00	4.00	8.51	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	70,900,000.00	10,724,096.00	15.13	SR
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	16.00	4.80	30	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	693,601,800.00	198,274,250.00	28.59	SR
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	66.00	7.00	10.61	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	63,480,676.00	10,714,587.00	16.88	SR
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12.00	6.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	533,754,812.00	175,589,160.00	32.9	SR
1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6.00	3.00	50	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	10,698,700.00	0.00	0	SR
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	10,285.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	6,999,997,100.00	2,999,882,892.00	42.86	SR
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	meter	3,236.00	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	6,999,997,100.00	2,999,882,892.00	42.86	SR
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	2.22	1.22	54.95	R	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	2,333,456,700.00	0.00	0	SR
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	87.00	62.64	72	S	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	4,666,540,400.00	2,999,882,892.00	64.28	R
1.03.10	PROGRAM PENYELANGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	%	86.23	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	69,731,191,330.00	5,566,757,860.00	7.98	SR
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	km	792.63	0.00	0	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	69,731,191,330.00	5,566,757,860.00	7.98	SR
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	20.00	5.00	25	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	1,999,996,320.00	0.00	0	SR
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	1.90	0.54	28.42	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	3,410,440,000.00	0.00	0	SR
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	74.00	22.62	30.57	SR	https://drive.google.com/drive/folders/1otObhGPH3YT4W9LTDKHm6VtX1vSbx9DP?usp=sharing	64,320,755,010.00	5,566,757,860.00	8.65	SR

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat tahun 2025 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat tahun 2025. Sebagaimana tabel 2.1 tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik dengan capaian realisasi sebesar 500 meter (dari target 3.129 meter),
 - b. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, SubKegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi dengan indikator Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat (1.000 orang) dengan tingkat capaian realisasi sebesar 392 Orang
 - c. Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan Indikator Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap target 792.61 kilometer realisasi 15.42 kilometer
 - d. Program Penataan Bangunan Gedung, Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai (9 Unit) Realisasi 0 Unit
 - e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang selesai di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan

Kawasan Strategis Lainnya (1 unit) Realisasi 0 unit

- f. Program Kawasan Permukiman, Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) target (1.000 Unit Rumah)realisasi 0 unit rumah
 - g. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukimantarget 6 lokasi realisasi 0 lokasi
2. Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
- a. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran dan Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
- a. Program Pengelolaan Sumber daya Air, Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
 - c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah I, Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I
 - d. Progam Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah II, Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II dan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah II
4. Persandingan Program maupun Kegiatan antara Renstra dengan Renja Tahun 2026 sudah sesuai, untuk persandingan program dan kegiatan antara renstra dan renja 2026 sd level kegiatan
5. Ada beberapa kegiatan yang muncul diluar dari Renja DinasPekerjaan

Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat tahun 2026 dikarenakan kegiatan tersebut masih dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, juga mengingat kegiatan- kegiatan tersebut sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan Masyarakat

6. Faktor Penyebab Terpenuhinya maupun Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan
 - Sumber Daya Manusia yang mampu dan terampil
 - Koordinasi yang baik antar stakeholder
 - Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja dilapangan
7. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan
 - Terlambatnya pengesahan anggaran murni dan anggaran perubahan perangkat daerah
 - Proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat
 - Masalah sosial budaya yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan (seperti pembebasan tanah, dll)
 - Kurang tersedianya alokasi dana untuk pembangunan secaramaksimal
 - Peraturan yang membatasai kewenangan daerah
8. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
9. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dan mengalami perubahan menjadi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh manajemen dengan struktur organisasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 23 Tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Bina Marga;

2. Seksi Jalan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
 2. Seksi Tata Bangunan Lingkungan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Bina Konstruksi membawahkan :
1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Informasi Jasa Konstruksi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Penataan Ruang membawahkan :
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Bidang Perumahan dan Permukiman membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.



Dalam pelaksanaan kegiatannya, Dinas PUPR PERA Prov. Kaltim melaksanakan 2 Urusan Wajib, yaitu : Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Wajin Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Air Minum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota. Selain itu Pemerintah Provinsi juga memiliki peran dalam mengkoordinasikan target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak dan akses air minum aman (perpipaan dan non perpipaan). Dari Target RPJMN 2020 2024 untuk pemenuhan akses air minum layak di Kalimantan Timur sebesar 100 persen, kontribusi Kalimantan Timur dalam pemenuhan air minum layak pada akhir periode RPJMN 2020-2024 hanya mampu menembus angka 83,71 persen dari angka capaian Nasional 92,64 persen.

Walaupun belum memenuhi target secara cakupan menunjukkan pencapaian layanan akses air minum layak di Kalimantan Timur dapat dikatakan baik, namun dari aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku perlu untuk terus mendapatkan perhatian. Ditambah lagi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian selanjutnya adalah perubahan indikator kinerja dari air minum layak menjadi air siap minum perpipaan.

Agregat dari pencapaian akses air minum layak 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur telah memiliki capaian di atas 50 persen kecuali Kabupaten Kutai Barat, yang di tahun 2024 layanan aksesnya sempat bagus kemudian menurun kembali mencapai 43,21 persen karena kondisi topografi daerah yang berbukit, tingginya biaya operasional, serta masalah jaringan distribusi seperti kebocoran jaringan, kurangnya jaringan distribusi pada IPA yang Idle Capacity, dan pompa-pompa yang perlu diremajakan sehingga menyebabkan capaian layanan menurun. Sedangkan di Kabupaten PPU dan Mahulu, peningkatan akses air minum layak dipengaruhi oleh terbangunnya

beberapa unit air baku dan peningkatan kualitas infrastruktur air minum (seperti pembangunan IPA, revitalisasi IPA, perluasan jaringan) baik dari pusat dan daerahnya sendiri. Kemudian, faktor jumlah penduduk yang relatif sedikit, dampaknya akan sangat signifikan memengaruhi kenaikan akses capaian tersebut.

Capaian layanan air minum layak melalui sistem perpipaan telah diterima oleh 73,03 persen dari jumlah penduduk Kaltim. Nilai ini adalah angka layanan baik sistem perpipaan PDAM maupun non-PDAM.

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Berkaitan dengan penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur sanitasi terutama air limbah skala provinsi, sesuai dengan SPM yang ditetapkan. Hingga tahun 2024, akses sanitasi layak sudah mencapai 84,23 persen, namun pada level aman baru mencapai 4,88 persen atau masih berada dibawah capaian Nasional sebesar 10,21 persen (2023). Masih rendah/kurangnya akses sanitasi aman terutama disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air limbah, khususnya tempat pembuangan tinja. Selain itu penyediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) belum secara masif dilaksanakan.

3) Jalan Dalam Kondisi Mantap

Berdasarkan data tahun 2024, masih terdapat kondisi jalan tidak mantap (dalam kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat), baik ruas jalan yang merupakan kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kondisi ini membutuhkan perhatian untuk dilakukan peningkatan, sedangkan kondisi yang sudah mantap harus terus dilakukan pemeliharaan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, presentase jalan dalam kondisi

mantap hanya mencapai 69,77 persen, sementara pada tahun 2024 telah mencapai 82,21 persen. Faktor pendorong meningkatnya capaian jalan mantap adalah terus dilakukannya perbaikan serta pemeliharaan jalan provinsi oleh Bidang Bina Marga dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPR & PERA. Selain untuk meningkatkan kemantapan jalan, - 162 - penanganan jalan diprioritaskan untuk mendukung kawasan - kawasan perekonomian Kalimantan Timur, seperti ruas jalan Batas Kutim - Talisayan dan ruas jalan Talisayan - Tanjung Redeb yang mendukung pengembangan sektor perkebunan, pertanian dan pariwisata. Serta ruas jalan Simp, 3 Kota Bangun - Kota Bangun dan ruas jalan Simp, 3 Sebulu - Muara Kaman yang mendukung pengembangan sektor pertanian. Sebagai upaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi, pemerintah merencanakan pembangunan ruas jalan baru strategis di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti pembangunan ruas jalan Sp, 4 Outer Ring Road IV - Bandara APT, Pranoto, ruas jalan Jembatan Mahulu - Jalan Jakarta (Samarinda), ruas jalan Akses Jembatan Sei, Nibung (Kutim), dan pembangunan ruas jalan daerah perbatasan Tering - Ujoh Bilang (Kubar - Mahulu).

Sampai saat ini rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kalimantan Timur mencapai 107,07 km/1,000 km² dan masih di bawah rasio panjang jalan secara nasional, yaitu 291,02 km/1,000 km²,

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Penyebaran penduduk yang tidak merata;
- b. Penyediaan lahan pembangunan jalan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
- c. Pembangunan jalan di perbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
- d. Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
- e. Kelas jalan arteri tidak mampu mengakomodir tonase kendaraan yang melintas, terutama pada pusat-pusat ekonomi pertanian

dalam arti luas, pertambangan dan penggalian, dan industri.

4) Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Pengelolaan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan keberadaan air, ketersediaannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup, serta pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 (lima) dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku untuk air minum pada tahun 2024 sebesar 11,01 m³/detik, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 8,17 m³/detik. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, kebutuhan air baku akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2045 diperkirakan kebutuhan air baku untuk air minum adalah 23,9 m³/detik. Secara khusus, pada tahun 2024, masih terdapat defisit air baku di Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Bontang. Kondisi ini terjadi dikarenakan belum selesainya pembangunan Bendungan Marangkayu, pemanfaatan eks lubang tambang (void) Indominco, Bendung Sungai Bontang, dan belum terkoneksi pipa transmisi air baku dari Bendungan Sepaku Semoi untuk Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Daerah irigasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Kriteria pembagian tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbagi ke dalam tiga tingkat kewenangan, yaitu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah

daerah kabupaten/kota

Daerah Irigasi Permukaan (DI) yang berada di Kabupaten Berau (DI Biatan, DI Labanan, DI Merancang, DI Semurut) Kabupaten Kutai Timur (DI Kaliorang, DI Selangkau) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (DI Marangkayu, DI Sungai Buluh). Secara data tabular maupun kondisi eksisting luasan fungsional areal daerah irigasi masih sangat jauh pemanfaatannya dibandingkan luas baku yang tersedia, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian semua stakeholder terkait, khususnya pihak terkait pertanian dan tanaman pangan.

Pada dimensi pengendalian daya rusak air, prioritas penanganannya adalah pengurangan luas genangan banjir, Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Timur. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan. Kinerja penurunan luas genangan banjir ini terutama dikarenakan adanya kolaborasi yang efektif antar stakeholders, baik yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur pengendali banjir maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Namun penurunan luas genangan masih fokus pada 3 (tiga) kota utama dan Kota Sangatta yang masuk dalam wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan kota lainnya belum menjadi prioritas, kedepannya ini perlu menjadi perhatian.

5) Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan, serta penetapan rencana struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah, dan kawasan strategis. Selain itu, RTRW juga mencakup arahan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Keberhasilan pencapaian penyelenggaraan penataan ruang dinilai melalui skoring penyelenggaraan penataan ruang. Terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi dilakukan melalui Perda Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), melainkan menjadi bagian dari substansi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perubahan ini terutama berpengaruh pada peningkatan kinerja pada aspek pelaksanaan penataan ruang di Kalimantan Timur.

Capaian kinerja skoring penyelenggaraan penataan ruang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan oleh berbagai upaya yang dilakukan pada Aspek Pembinaan Penataan Ruang, Aspek Pengaturan Penataan Ruang, dan Aspek Pelaksanaan Penataan Ruang

2. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penanganan kawasan kumuh merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang dianggap tidak layak huni. Berdasarkan Permen PU No. 14/PRT/Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat 7 aspek dan 16 variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kekumuhan suatu wilayah. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, dan jalan lingkungan.

Luas kawasan kumuh di Kalimantan Timur tahun 2024 seluas 2.398,8 Ha yang terbagi dalam beberapa kewenangan, yakni kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk penanganan areal kumuh untuk luasan di atas 15 Ha, Pemerintah Provinsi dengan luasan 10-15 Ha, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota menangani areal di bawah 10 Ha.

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPR Tahun 2024

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (N- 2) 2023	Tahun (N-1) 2024	Tahun (N) 2025	Tahun (N+1) 2026	Tahun (N-2) 2023	Tahun (N-1) 2024	Tahun (N) 2025	Tahun (N+1) 2026	
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prioritas (Indeks)				7.42	8.08	8.85		7,68			
2	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung (Indeks)				3.59	5.04	6.72		4,85			
3	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi				53.03	76.87	100		55,49			
4	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman Pendukung				3	4.93	7.37		3,61			
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				65	67	71		70,2			
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah				82.20	82.44	82.70		85,14			

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Pada tahun 2026, arah pelayanan DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam rangka peningkatan dan pemerataan hasil pembangunan sarana prasarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat, membutuhkan perhatian yang serius dan harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur serta harus pula dikondisikan sesuai realisasi pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini dengan tetap berdasar kepada prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis daerah, permasalahan pelayanan dinas, juga potensi, peluang dan tantangan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan deskripsi kondisi fisik wilayah, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Dalam hal ini, tugas pembangunan jaringan infrastruktur untuk mendukung pengembangan sektor unggulan daerah merupakan tanggung jawab DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, seberapa besar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, sangat bergantung pada keberhasilan DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memajukan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil capaian Program Prioritas atas kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur masih belum bisa berjalan secara optimal. Permasalahan yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan Aspek Ekonomi Wilayah, antara lain belum optimalnya Pemerataan dan Pengembangan Infrastruktur. Kurangnya aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, investasi, dan mobilitas penduduk. Infrastruktur pendukung ekonomi seperti pelabuhan, bandara, dan pusat logistik juga perlu dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama.

Selain permasalahan prioritas Pembangunan sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat pula berbagai permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah yang cukup menghambat capaian Renja pada tahun 2024. Berbagai permasalahan tersebut berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan urusan pemerintahan pilihan.

Tabel 2.3.1

Pemetaan Permasalahan DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur

Sub Urusan	Permasalahan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Basis data belum sepenuhnya dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis
	Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pembangunan infratraktur dasar pada daerah remote dan daerah pertumbuhan ekonomi baru
	Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan pelayanan infrstruktur dasar dan pertumbuhan ekonomi baru
	Belum optimalnya implementasi sistem monitoring dan evaluasi untuk pengawasaan pembangunan infrastruktur dasar
	Proses pembangunan/penataan bangunan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun anggaran
	Implementasi program SPAM air minum belum optimal karena faktor sebaran geografis proses pengelolaan jalan
	Belum tersedianya masterplan jaringan jalan
	Belum tersedianya Masterplan jaringan irigasi yang sesuai kewenangan dan berbasis kebutuhan belum tersedia.
	Data kebutuhan tenaga konstruksi bersertifikasi ahli belum

	tersedia
	Kompleksitas Status tenurial masih tinggi sehingga menghambat proses pembangunan fasilitas publik
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum idealnya rasio ketersediaan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja pada pemberian layanan fasilitas dasar air baku bahkan pada daerah remote ada yang belum terlayani. Kendala tenurial lahan yang akan dibebaskan dan digunakan dalam pembangunan sapras layanan air baku. Pemerintah Daerah belum memiliki regulasi mengenai besaran jumlah kawasan permukiman

Tantangan dan Peluang

Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa Tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata.

Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

1. Potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Kalimantan Timur yang berpengaruh terhadap permintaan komoditi ekspor;
2. Isu geopolitik dunia akan berdampak pada perekonomian global dan perekonomian nasional;
3. Ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan perdagangan Amerika Serikat, gangguan rantai pasok, kerawanan pangan dan tantangan kesehatan masyarakat yang dikhawatirkan memicu stagflasi perekonomian dunia;
4. Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global dimana Indonesia untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan ramah lingkungan;
5. Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah berkaitan dengan ekspor bahan mentah (terutama komoditas batubara);
6. Mulai digalakkannya implementasi energi baru terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi menurun;
7. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang melambat akibat masih belum inklusifnya sektor-sektor unggulan.

Tantangan terhadap kinerja pelayanan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah adalah:

1. Adanya tenaga yang tidak sesuai dengan bidangnya sehingga peningkatan kualitas kegiatan menjadi lemah, khususnya pada kegiatan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di

lapangan sehingga yang dapat dilihat adalah kinerja output.

2. Kurangnya jumlah tenaga pendukung yang bersifat tetap sehingga pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidang dalam hal peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan menjadi kurang berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena masing-masing tenaga sudah over load.
3. Bantuan tenaga tidak tetap (honorar) pada masing-masing bidang kurang efektif karena tenaga tidak tetap bersifat sementara, padahal dalam penyelenggaraan pembangunan diharapkan dapat dilakukan dengan proses yang meningkat efektivitasnya.
4. Peningkatan pembangunan dibutuhkan daya dukung sumber daya manusia yang handal dan sesuai dengan kompetensi sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkualitas dan efektif, misal kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sistem informasi manajemen sebagai salah satu perangkat untuk dokumentasi (data base) dan pemantauan.

Peluang

Ekonomi Kaltim Tahun 2024 dan 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Berlanjutnya proyek strategis nasional pembangunan Ibu Kota Nusantara, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan sentimen bisnis di daerah serta mempercepat realisasi investasi, terutama dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana IKN Nusantara;
2. Tumbuhnya minat investasi di sektor hilirisasi produk turunan batubara dan komoditas kelapa sawit bernilai tambah tinggi seperti biodiesel dan minyak goreng;
3. Beroperasinya kilang minyak Balikpapan/Refinery Development Master Plan Refinery Unit V (RDMP RU V Pertamina);
4. Meningkatnya kinerja industri pengolahan seperti industri pengolahan

produk kelapa sawit seperti biodiesel, minyak goreng, dan produk turunan lainnya;

5. Masih terjaganya ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya didorong oleh optimisme target produksi yang tetap tinggi serta masih solidnya permintaan batu bara, terutama dari luar negeri;
6. Realisasi investasi baru korporasi di Kaltim dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi;
7. Optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus;
8. Perluasan kesempatan kerja sebagai dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Timur diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal

Isu Strategis

Isu strategis disusun berdasarkan analisis kondisi capaian pembangunan dan berdampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk pencapaian pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 disusun berdasarkan analisis terhadap potensi daerah, permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu regional, dan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025- 2029, maka isu strategis pembangunan daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM);
2. Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan;
3. Transformasi ekonomi berbasis industrialisasi yang inklusif;
4. Pemerataan pembangunan wilayah;
5. Infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi;
6. Peluang pembangunan superhub ekonomi dan mitra IKN;
7. Kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK);
8. Kemandirian pangan;
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan penahapan pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah “Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Tema RKPD Tahun 2026 merupakan upaya awal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilaksanakan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sektor ekonomi diarahkan pada penguatan sektor industri berbasis komoditas unggulan, penyiapan kawasan industri, dan pengembangan hilirisasi industri sebagai fondasi ekonomi inklusif. Pembangunan infrastruktur dasar ditingkatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat serta pelayanan publik. Selain itu, transformasi tata kelola pemerintahan diperkuat dengan digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas ASN, serta penguatan efektivitas kelembagaan. Pengembangan budaya dan kearifan local turut diperkuat guna meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat, sementara pembangunan berwawasan lingkungan ditekankan pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tema pembangunan tahun 2026 selanjutnya digambarkan melalui prioritas pembangunan sebagai wujud implementasi langsung dari misi pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan mencerminkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai keberhasilan kinerja tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Membangun sektor pendidikan;
2. Membangun sektor kesehatan;
3. Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
4. Membangun infrastruktur konektivitas.

Untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, maka disusun arah kebijakan dan strategi mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Adapun arah kebijakan tahun 2026 sebagai berikut.

Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik Dan Kesehatan

1. Membangun jalan akses wilayah perbatasan;
2. Meningkatkan kondisi jalan mantap di seluruh wilayah Kalimantan Timur;
3. Mengembangkan konektivitas antar wilayah pusat pertumbuhan;
4. Mendukung pembangunan bandara perbatasan;
5. Mendukung pembangunan pelabuhan internasional;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dermaga Sungai Mahakam;
7. Meningkatkan kualitas layanan transportasi yang mengutamakan keselamatan;
8. Membangun bendungan untuk mendukung irigasi pertanian dan pemenuhan air baku;
9. Membangun bendali dan normalisasi sungai untuk pengendalian banjir;
10. Membangun infrastruktur sistem penyediaan air minum berskala regional;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan dan inklusif;
12. Memperluas akses hunian layak melalui penyediaan pembiayaan administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
13. Mengembangkan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan yang andal;
14. Mengembangkan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet di setiap desa;
15. Membangun rumah sakit umum daerah provinsi.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2026

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila di tunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/ kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah di antaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, program kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan.

Berikut review terhadap RPD Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut Lampiran Tabel 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 :

TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

MUSRENBANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026						
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II			90,784,460,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			90,784,460,000.00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			90,784,460,000.00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13,917,974,053.00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	579,020,000.00	
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	503,040,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	17,980,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	36,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	6,028,232,428.00	
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	5,998,232,428.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	18,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1,116,298,250.00	
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	489,860,250.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				

RANHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026						
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II			71,500,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			71,500,000,000.00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			71,500,000,000.00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5,128,975,757.00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	474,485,480.00	
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	437,880,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	14,188,240.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	6,629,740.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	15,787,500.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	335,301,300.00	
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7,005,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	316,378,300.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11,918,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	472,893,000.00	
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	240,450,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3,336,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				

			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	12 Dokumen	15,282,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	12 Dokumen	17,756,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	33 Orang	248,400,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	23 Orang	345,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</i>	100 %	1,613,735,040.00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	12,261,532.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	11 Paket	484,057,669.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	334,879,191.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	37,258,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	13,200,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	704,184,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	13,594,648.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	14,300,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i>	100 %	492,610,000.00	
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	492,610,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	1,877,376,200.00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	1 Dokumen	11,907,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	15 Orang	96,600,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	15 Orang	120,600,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</i>	100 %	1,080,298,323.00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	21,013,604.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	351,519,009.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	355,632,993.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	39,116,677.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	15,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	280,188,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	9,539,040.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	8,289,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	1,168,109,604.00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	413,429,604.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	742,680,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i>	100 %	1,597,888,050.00	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	301,482,200.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1,563,894,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i>	100 %	2,210,702,135.00	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	37 Unit	337,872,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>	43 Unit	1,200,861,735.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	139 Unit	49,520,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	8 Unit	17,344,400.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	5 Unit	605,104,000.00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			8,499,996,200.00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Infrastruktur Air Baku yang ditangani</i>	1 Unit	1,249,999,700.00	
	1.03.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung				
			<i>Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara</i>	1 Unit	1,249,999,700.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam
		[Meningkatkan layanan infrastruktur sumber daya air]	-	-	8,499,996,200.00	-
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik</i>	5387,17 Meter	7,249,996,500.00	
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>	30 KM	7,249,996,500.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			7,999,914,000.00	
		[Meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan]	-	-	7,999,914,000.00	-

			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	34 Unit	223,772,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>	32 Unit	989,443,300.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	139 Unit	49,520,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	5 Unit	335,152,750.00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			6,000,000,000.00	
		[Meningkatkan layanan infrastruktur sumber daya air]	-	-	6,000,000,000.00	-
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Infrastruktur Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhabilitasi Pada wilayah Kerja UPTD II</i>	1 Unit	1,000,000,000.00	
	1.03.02.1.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi</i>	1 Unit	1,000,000,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik pada Wilayah Kerja UPTD II</i>	7500 Meter	5,000,000,000.00	
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>	25 KM	5,000,000,000.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			5,000,000,000.00	
		[Meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan]	-	-	5,000,000,000.00	-
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	<i>Panjang Drainase Primer yang Berfungsi Baik pada Wilayah Kerja UPTD II</i>	20000 Meter	5,000,000,000.00	
	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		

	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	944 Meter	7,999,914,000.00	
	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Sistem Drainase Perkotaan	7,999,914,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			60,366,575,747.00	
		-	-	-	60,366,575,747.00	-
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	859,71 Km	60,366,575,747.00	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6 KM	29,975,761,600.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan				
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	18 KM	17,820,762,647.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan				
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20000 Meter	12,570,051,500.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI			6,293,993,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6,293,993,000.00	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

		OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Sistem Drainase Perkotaan	5,000,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			55,371,024,243.00	
		-	-	-	55,371,024,243.00	-
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan yang direhabilitasi dan dipelihara tetap dalam kondisi mantap pada wilayah kerja UPTD II	22 Km	55,371,024,243.00	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	10 KM	32,371,024,243.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan				
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	12 KM	13,000,000,000.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10

		OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	8	9	10
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			6,293,993,000.00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5,618,696,200.00	
		[Meningkatkan kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Laboratorium Konstruksi)]	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	5,618,696,200.00	-
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	220,840,000.00	
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	120,840,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	30,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	65,000,000.00	
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar

			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	22000 Meter	10,000,000,000.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa
		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI			6,100,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6,100,000,000.00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			6,100,000,000.00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5,801,816,000.00	
		[Meningkatkan kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Laboratorium Konstruksi)]	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	5,801,816,000.00	-
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	147,494,570.00	
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	106,440,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2,980,534.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2,866,242.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	11,168,507.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	24,039,287.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	8,281,740.00	
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2,448,580.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2,916,580.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		

	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	317,856,200.00	
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	227,856,200.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	40,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1,715,000,000.00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	200,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	130,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,100,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				

				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,916,580.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	612,579,162.00	
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	331,476,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6,307,277.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4,795,885.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	270,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	2,260,302,331.00	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49,976,441.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	185,855,515.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	1,318,031,833.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	60,316,340.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	132,056,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	95,851,754.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	402,304,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Karang Anyar
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
		-	-	-	5,618,696,200.00	-
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	600,000,000.00	
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	100,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
		[Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Laboratorium Konstruksi)]	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	5,618,696,200.00	-
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	500,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	855,883,600.00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	390,123,600.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	440,760,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
		-	-	-	5,618,696,200.00	-
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1,844,116,400.00	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	225,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
		[Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Laboratorium Konstruksi)]	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	5,618,696,200.00	-
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	100,000,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				

1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	7,256,712.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8,653,736.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	733,147,950.00	
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	62 Unit	733,147,950.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	810,145,142.00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23,060,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	418,805,142.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	368,280,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
		-	-	-	5,801,816,000.00	-
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1,229,865,105.00	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	163,950,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
		[Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Laboratorium Konstruksi)]	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	5,801,816,000.00	-
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	229,220,000.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	836,695,105.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
2.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			298,184,000.00	
		[Meningkatnya Kualitas Pengujian Standar Mutu Konstruksi]	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi	63.34	298,184,000.00	-

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,519,116,400.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
2.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			675,296,800.00	
		[Meningkatnya Kualitas Pengujian Standar Mutu Konstruksi]	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi	63.34	675,296,800.00	-
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	675,296,800.00	
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				
			Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	3 Bangunan Konstruksi	675,296,800.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT			4,293,955,282,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4,293,955,282,000.00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			4,061,955,282,000.00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			156,097,442,475.00	
		-	-	-	156,097,442,475.00	-
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	85 %	1,650,000,000.00	
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	550,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	200,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	200,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	200,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	500,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	2 Dokumen	298,184,000.00	
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	110 Bangunan Konstruksi	298,184,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT			2,733,792,915,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2,733,792,915,000.00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			2,599,931,005,418.00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			142,333,766,461.00	
		-	-	-	142,333,766,461.00	-
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	100 %	849,800,000.00	
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	339,368,538.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	75,131,532.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	63,152,008.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	104,609,451.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				

	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	124,378,809,470.00	
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11648 Orang/ Bulan	121,960,121,470.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	2,018,688,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	300,000,000.00	
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1,250,000,000.00	
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	800,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	267,538,471.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	123,117,558,874.00	
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11648 Orang/ Bulan	121,960,121,470.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	1,097,160,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5,554,200.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	24,155,940.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	9,965,684.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20,601,580.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	779,131,259.00	
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7,459,925.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	764,368,814.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7,302,520.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	712,078,830.00	
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	596,165,350.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	100,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	100,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	150,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	2,200,000,000.00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	100,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	500,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	250,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	300,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	200,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	700,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	600,000,000.00	

	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	9,973,960.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10,716,720.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	42,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	53,222,800.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	3,780,857,814.00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	93,439,336.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	2,159,742,442.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	93,313,280.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	261,841,036.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	199,283,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	883,600,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	23,961,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	65,677,720.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10

	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	500,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	21,318,633,005.00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	3,050,400,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	18,168,233,005.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i>	100 %	4,400,000,000.00	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	30 Unit	500,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	4 Unit	1,000,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	1 Unit	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	300,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit	2,500,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i>	100 %	129,088,002.00	
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	39,877,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	89,211,002.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	8,978,129,955.00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	56,837,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	3,012,452,955.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	5,908,840,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i>	100 %	3,987,121,727.00	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	30 Unit	1,565,472,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	7 Unit	676,681,720.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	1 Unit	26,894,007.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	1,277,990,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	440,084,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			162,894,336,008.00	
		[Meningkatkan layanan infrastruktur sumber daya air]	Kapasitas air baku untuk air bersih Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Persentase Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	11.42 11676 16.08 35.99	162,894,336,008.00	-
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		

2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			163,134,859,292.00	
		[Meningkatkan layanan infrastruktur sumber daya air]	Kapasitas air baku untuk air bersih Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Persentase Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	11.42 11676 16.08 35.99	163,134,859,292.00	-
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **	1 Unit 7669,29 Meter 6 Lokasi	119,794,932,307.00	
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga	277,289,700.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai				
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	7.31 KM	36,146,110,000.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	349,956,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	4,816,011,671.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	6,597,339,050.00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Suka Rahmat
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				

				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	1 Unit 16935 Meter 6 Lokasi	113,055,122,293.00	
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai				
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	16,3 KM	51,795,045,158.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	367,292,540.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	7 Lembaga	3,634,757,793.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		-	-	-	162,894,336,008.00	-
	1.03.02.1.01.0094	Peningkatan Tanggul Sungai				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik</i>	5387,17undefined	43,339,926,985.00	
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>	3.25 KM	31,709,440,985.00	Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa				
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi</i>	2.48 KM	10,225,302,000.00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i>	2 Dokumen	1,405,184,000.00	Kab. Kutai Timur, Kalioreang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			525,202,566,600.00	
		[Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum]	Persentase Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	8.62	525,202,566,600.00	-
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	<i>Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani</i>	3 Unit	525,202,566,600.00	
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10

			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>	8 Dokumen	4,866,362,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku				
			<i>Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun</i>	1 Unit	5,948,712,204.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Kanaan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.01.0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun</i>	1,15 KM	37,305,752,838.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi</i>	12 Dokumen	468,811,810.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik</i>	52699 meter	49,839,213,715.00	
	1.03.02.1.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun</i>	1,07 KM	3,836,512,340.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa				

			Jumlah Kabupaten/ Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	7 Kabupaten/ Kota	317,167,300.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota yang dibangun	225 Liter/ Detik	502,748,282,300.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		-	-	-	525,202,566,600.00	-
	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota yang dioptimalisasi	1 Unit	153,450,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		[Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum]	Persentase Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	8.62	525,202,566,600.00	-
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Kabupaten/ Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	7 Kabupaten/ Kota	288,457,000.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota yang disusun	9 Dokumen	21,242,210,000.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.03.1.01.0026	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
			Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	453,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			1,404,763,740.00	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	12,29 KM	3,853,342,150.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3,82 KM	13,654,875,400.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	7,03 KM	2,204,752,140.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4,89 KM	17,608,593,550.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10

		OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	8	9	10
		[Meningkatkan Layanan Persampahan Regional]	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional	0.40	1,404,763,740.00	-
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	2 Dokumen	1,404,763,740.00	
	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	25 Orang	244,653,740.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	1,160,110,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			3,822,198,640.00	
		[Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah]	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	7.00 88.23	3,822,198,640.00	-
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	1 Dokumen	3,822,198,640.00	
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	2,366,760,000.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10

			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	24,66 KM	7,577,271,135.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	6 Dokumen	1,103,867,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			118,224,260,800.00	
		[Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum	8.62	118,224,260,800.00	-
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Minum Regional	34.90 %	118,224,260,800.00	
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupate n/Kota	289,782,220.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
NO	KODE			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		

			<i>Jumlah Kabupaten/ Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	2 kabupaten/ kota	123,937,000.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota				
			<i>Jumlah Kabupaten/ Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	3 Kabupaten/ Kota	922,327,900.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.05.1.01.0023	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				
			<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan/ atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	25 Orang	409,173,740.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			35,815,804,375.00	
		[Meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan]	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	12.16	35,815,804,375.00	-
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	944 Meter	35,815,804,375.00	
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>	5 Sistem Drainase Perkotaan	33,065,804,375.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				
			<i>Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan</i>	5 Dokumen	2,750,000,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
7.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			40,040,543,100.00	
		[Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Permukiman]	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	89.88	40,040,543,100.00	-
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	<i>Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur</i>	2 Kawasan	40,040,543,100.00	

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota yang dibangun</i>	250 Liter/Detik	88,441,478,000.00	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang diooperasikan dan dipelihara</i>	1 Unit	22,210,249,490.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Kabupaten/ Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>	7 Kabupaten/ Kota	278,841,090.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota yang disusun</i>	3 Dokumen	6,652,910,000.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.03.1.01.0026	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10

	1.03.07.1.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi				
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi</i>	2 Unit	40,040,543,100.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			151,374,494,400.00	
		[Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung]	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	77.59	151,374,494,400.00	-
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	<i>Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai</i>	6 Unit	151,374,494,400.00	
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				
			<i>Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat</i>	25 Orang	35,446,940.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				
			<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan</i>	2 Bangunan Gedung	146,022,254,800.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang</i>	10 Lisensi	102,655,760.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		-	-	-	151,374,494,400.00	-
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota				
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara</i>	1 Kabupaten/ Kota	230,359,900.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		[Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung]	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	77.59	151,374,494,400.00	-
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</i>	2 Dokumen	4,883,777,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		-	-	-	151,374,494,400.00	-
	1.03.08.1.01.0021	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				
			<i>Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif</i>	5 Orang	100,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
9.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			26,300,663,118.00	

			<i>Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	1 Lembaga	351,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			1,351,410,000.00	
		[Meningkatnya Layanan Persampahan Regional]	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional	0.40	1,351,410,000.00	-
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	<i>Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional</i>	5.70 %	1,351,410,000.00	
	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan</i>	30 Orang	200,500,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun</i>	1 Dokumen	1,150,910,000.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			3,073,294,900.00	
		[Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah]	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	7.00 88.23	3,073,294,900.00	-
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	<i>Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Limbah Domestik Regional</i>	12.10 %	3,073,294,900.00	
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>	2 Dokumen	1,795,406,000.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2 Kawasan	26,300,663,118.00	
	1.03.09.1.01.0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
			Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	530,670,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
		[Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata]	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	20.98	26,300,663,118.00	-
	1.03.09.1.01.0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota				
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	3 kabupaten/ kota	5,708,626,918.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		-	-	-	26,300,663,118.00	-
	1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
			Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan	20,061,366,200.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
10.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			2,913,706,946,260.00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	67,8 Km 859,71 Km	2,913,706,946,260.00	
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan				
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	120.47 KM	1,548,706,946,260.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				

1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Kabupaten/ Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 kabupaten/ kota	65,661,090.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Kabupaten/ Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10 Kabupate n/Kota	848,229,980.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.05.1.01.0023	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan/ atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	30 Orang	363,997,830.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			35,020,228,975.00	
		[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	12.16	35,020,228,975.00	-
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase Primer yang Berfungsi Baik	563,49 Meter	35,020,228,975.00	
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				

			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	30 Dokumen	25,600,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	895.09 KM	2,900,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan				
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1,500,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar				
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	8 KM	60,000,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi				
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	126 KM	50,000,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan				
			Panjang jembatan yang dibangun	50 Meter	80,500,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan				
			Panjang Jalan yang Dibangun	24.30 KM	1,144,500,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
11.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			25,055,000,000.00	
		[Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi]	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	51.68	25,055,000,000.00	-
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1500 Orang	15,955,000,000.00	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				
			Jumlah Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	120 Orang	1,600,000,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				
			Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	250,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	6 Sistem Drainase Perkotaan	31,814,507,975.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	6 Dokumen	3,205,721,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
7.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			48,002,963,500.00	
		[Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman]	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	89.88	48,002,963,500.00	-
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	45.45 %	48,002,963,500.00	
	1.03.07.1.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi				
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	2 Unit	44,822,128,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.07.1.01.0039	Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/ sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	50 Rumah Tangga	3,180,835,500.00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			794,229,456,840.00	
		[Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung]	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	77.59	794,229,456,840.00	-
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang dilaksanakan	30 %	794,229,456,840.00	
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih</i>	1500 Orang	6,000,000,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	10 Lembaga	1,500,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				
			<i>Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan</i>	1 Dokumen	200,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10

1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat</i>	30 Orang	87,721,900.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				
			<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan</i>	46 Bangunan Gedung	770,957,717,180.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang</i>	30 Lisensi	281,468,350.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</i>	49 Dokumen	22,902,549,410.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
9.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			822,760,000.00	
		-	-	-	822,760,000.00	-

			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi</i>	1500 Orang	6,000,000,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya</i>	1500 Orang	200,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi				
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya</i>	10 Lembaga	205,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	<i>Jumlah layanan yang disediakan</i>	1 Layanan	1,250,000,000.00	
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan</i>	1 Layanan Informasi	250,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				
			<i>Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan</i>	1 Perangkat Pendukung	450,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan</i>	1 Dokumen	350,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI				
			<i>Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	60 Orang	200,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Yang Dilaksanakan</i>	8.57 %	822,760,000.00	
	1.03.09.1.01.0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinst dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	735,167,500.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		[Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata]	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	20.98	822,760,000.00	-
	1.03.09.1.01.0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan</i>	10 kabupate n/kota	87,592,500.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
10.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			1,273,274,533,385.00	
		-	-	-	1,273,274,533,385.00	-
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	<i>Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi</i>	3 Dokumen	7,850,000,000.00	
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				
			<i>Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan</i>	175 Paket Pekerjaan	1,300,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				
			<i>Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk</i>	20 Bangunan Konstruksi	650,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk</i>	11 Lembaga	3,400,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha</i>	100 Badan Usaha	850,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi				
			<i>Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun</i>	1 Dokumen	1,650,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
12.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			20,000,000,000.00	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	79.04 84.94	20,000,000,000.00	-

1	2	3	4	8	9	10
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	<i>Panjang Jalan Prioritas Provinsi yang telah dibangun Panjang jalan yang direkonstruksi menjadi mantap</i>	36,3 Km 843,46 Km	1,273,274,533,385.00	
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan				
			<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>	62,40 KM	530,158,685,453.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>	18 Dokumen	31,938,217,684.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya</i>	938,85 KM	2,989,624,375.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	13.52 %	4,400,000,000.00	
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ Pergub selain RTRW Provinsi	3 Dokumen	3,100,000,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi				
			Jumlah Perda RTRW Provinsi	1 Dokumen	500,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		-	-	-	20,000,000,000.00	-
	1.03.12.1.01.0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi	1 Dokumen	400,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	79.04 84.94	20,000,000,000.00	-
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang				
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	400,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	28.22 %	6,850,000,000.00	
	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				

	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan				
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	4,040,524,375.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	3,5 KM	20,202,701,450.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi				
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	65,90 KM	48,322,577,522.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Panjang jembatan yang dibangun	50 Meter	105,807,862,800.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan				

			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat</i>	1 Laporan	500,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang				
			<i>Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</i>	25 Orang	350,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/ Kota				
			<i>Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/ Kota</i>	1 Dokumen	500,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/ Kota				
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/ Kota</i>	1 Laporan	500,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.12.1.02.0010	Penyusunan Peta Dasar				
			<i>Jumlah data SHP Peta Dasar</i>	1 Peta	1,500,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/ Kota				
			<i>Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/ Kota</i>	3 Berita Acara	500,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		-	-	-	20,000,000,000.00	-
	1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi</i>	2 Dokumen	3,000,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		[Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	79.04 84.94	20,000,000,000.00	-
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	<i>Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</i>	27.06 %	4,400,000,000.00	
	1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha				

			<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>	24.30 KM	529,814,339,726.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
11.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			3,972,400,000.00	
		[Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi]	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	51.68	3,972,400,000.00	-
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	<i>Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat</i>	500 Orang	2,748,187,938.00	
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				
			<i>Jumlah Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan</i>	48 Orang	184,465,546.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan</i>	1 Dokumen	36,800,466.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10

			<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>	18 Layanan	600,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				
			<i>Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang</i>	3 Laporan	1,800,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>	6 Layanan	350,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				
			<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>	4 Dokumen	1,150,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>	2 Dokumen	500,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	<i>Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</i>	16.14 %	4,350,000,000.00	
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	1 Dokumen	1,400,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang				
			<i>Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang</i>	1 Kasus	800,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat				
			<i>Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat</i>	1 Dokumen	500,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR				
NO	KODE			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		

			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih</i>	500 Orang	1,055,279,720.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	11 Lembaga	243,280,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				
			<i>Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan</i>	3 Dokumen	27,800,466.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi</i>	500 Orang	1,131,561,232.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnannya</i>	400 Orang	45,400,042.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi				

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	1,000,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		-	-	-	20,000,000,000.00	-
	1.03.12.1.04.0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang				
			Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	1 Berita Acara	350,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	79.04 84.94	20,000,000,000.00	-
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	300,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			232,000,000,000.00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			30,558,145,000.00	
		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah]	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100	30,558,145,000.00	-
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	2,004,360,000.00	
	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	1,984,400,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	19,960,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		-	-	-	30,558,145,000.00	-
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100 Orang	453,560,000.00	
	1.04.02.1.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan				
			Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	2 Dokumen	93,980,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.04.02.1.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	100 orang	93,980,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	23,600,466.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	237,799,838.00	
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	21,846,838.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	123,537,650.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				
			Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	32,028,800.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	60,386,550.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	2 Dokumen	986,412,224.00	
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10

	1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan</i>	100 Orang	132,800,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.04.02.1.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan				
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan</i>	100 Orang	132,800,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah]	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100	30,558,145,000.00	-
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	<i>Terbangunnya dan terehabilitasinya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</i>	100 Unit Rumah	28,090,245,000.00	
	1.04.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				
			<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi</i>	100 Unit Rumah	28,090,245,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		-	-	-	30,558,145,000.00	-
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan</i>	1 Laporan	9,980,000.00	
	1.04.02.1.04.0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				
			<i>Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi</i>	2 Dokumen	9,980,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			152,267,732,500.00	
		[Meningkatkan kualitas kawasan permukiman]	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha	31.43	152,267,732,500.00	-
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	4 Laporan	1,717,974,160.00	
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman</i>	4 Laporan	1,717,974,160.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

			<i>Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan</i>	200 Paket Pekerjaan	315,364,830.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota				
			<i>Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk</i>	100 Bangunan Konstruksi	74,400,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk</i>	11 Lembaga	462,047,260.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota				
			<i>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha</i>	100 Badan Usaha	87,400,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun</i>	1 Dokumen	47,200,134.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
12.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			16,731,594,549.00	
		[Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	79.04 84.94	16,731,594,549.00	-
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	<i>Persentase Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</i>	16.21 %	1,551,300,000.00	
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ Pergub selain RTRW Provinsi</i>	1 Dokumen	1,352,000,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman</i>	4 Laporan	1,717,974,160.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	<i>Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani</i>	47,16 Ha	150,549,758,340.00	
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				
			<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki</i>	1000 Unit Rumah	27,743,662,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</i>	19 Laporan	6,257,500,000.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				
			<i>Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar</i>	69,55 Ha	116,548,596,340.00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			49,174,122,500.00	
		[Meningkatkan penyediaan PSU permukiman]	Persentase Permukiman yang Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	32.83	49,174,122,500.00	-
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	<i>Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman</i>	7 Lokasi	49,174,122,500.00	
	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				
			<i>Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan</i>	11 Lokasi	49,174,122,500.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I			76,500,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			76,500,000,000.00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			76,500,000,000.00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6,053,568,000.00	
		[Meningkatkan kinerja layanan kesekretariatan (UPTD I)]	Persentase Keluhan layanan pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	6,053,568,000.00	-
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi</i>	100 Orang	199,300,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</i>	22.62 %	5,577,713,820.00	
	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat</i>	1 Laporan	311,300,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang				
			<i>Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</i>	80 Orang	197,800,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				
			<i>Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/ Kota</i>	1 Dokumen	203,100,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.02.0007	Penyusunan RTRW Provinsi				
			<i>Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi</i>	1 Dokumen	3,328,500,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota				
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/ Kota</i>	1 Laporan	428,200,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.02.0010	Penyusunan Peta Dasar				
			<i>Jumlah data SHP Peta Dasar</i>	1 Peta	790,300,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota				
			<i>Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/ Kota</i>	3 Berita Acara	318,513,820.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</i>	26.35 %	5,609,676,434.00	
	1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha				

1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	442,520,000.00	
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	437,520,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	5,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	20,000,000.00	
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	383,245,527.00	
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	22,977,500.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	227,268,027.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	128,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1,044,188,473.00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,197,473.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan	292,364,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Laporan	1,722,290,389.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha				
			Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan	320,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	2,785,022,045.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	490,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	19.76 %	3,992,904,295.00	
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 Dokumen	1,232,477,817.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang				
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	4 Kasus	796,350,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat				
			Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	480,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.04.0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR				
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	250,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR				
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	943,848,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	290,228,478.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			133,861,909,582.00	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			20,970,000,000.00	

1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	161,277,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	34,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	9,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	21 Laporan	804,114,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	5,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	5,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i>	100 %	932,000,000.00	
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	8 Unit	400,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		-	-	-	6,053,568,000.00	-
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	21 Paket	420,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		[Meningkatkan kinerja layanan kesekretariatan (UPTD I)]	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	6,053,568,000.00	-
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	33 Unit	112,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	1,844,960,000.00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	10,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	475,332,400.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1,359,627,600.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah]	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100	20,970,000,000.00	-
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana dan/ atau Relokasi Program Provinsi yang terdata untuk memperoleh rumah layak huni</i>	2 Dokumen	200,000,000.00	
	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi</i>	1 Dokumen	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				
			<i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi</i>	1 Dokumen	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	<i>Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan/ atau masyarakat yang terkena relokasi program provinsi yang dibangun dan direhab</i>	4 Unit Rumah	400,000,000.00	
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi</i>	2 Unit Rumah	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun</i>	1 Unit Rumah	150,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi				
			<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi</i>	1 Unit Rumah	150,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		[Tersedianya rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah]	Jumlah Penerima Manfaat Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	2000	20,970,000,000.00	-
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana dan/ atau Relokasi Program Provinsi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan</i>	2 Laporan	20,370,000,000.00	
	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan				
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan</i>	2 Laporan	20,370,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1,386,654,000.00	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	158,902,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	17 Unit	629,132,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	85,120,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	5,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	508,500,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			7,500,000,000.00	
		-	-	-	7,500,000,000.00	-
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditanganiPanjang segmen sungai yang ditangani	1 Unit7669,29Meter	2,500,000,000.00	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.02.1.01.0099	Rehabilitasi Kanal Banjir				
			Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	1,2 KM	1,500,000,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				

2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			52,397,023,278.00	
		[Meningkatkan kualitas kawasan permukiman]	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha	31.43	52,397,023,278.00	-
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan	908,866,300.00	
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan	908,866,300.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Keunenangan Provinsi	419,19 Ha	51,488,156,978.00	
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	516 Unit Rumah	19,756,426,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	13 Laporan	3,584,796,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,50 KM	500,000,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.01.0134	Rehabilitasi Embung				
			Jumlah Embung yang Direhabilitasi	2 Unit	500,000,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		[Meningkatkan layanan infrastruktur sumber daya air (UPTD I)]	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	35.99	7,500,000,000.00	-
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	5387,17 Meter	5,000,000,000.00	
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.04528 KM	5,000,000,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
3.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			550,000,000.00	
		-	-	-	550,000,000.00	-
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	1 Unit	550,000,000.00	
	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	550,000,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			62,396,432,000.00	
		[Meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas jalan yang aman dan nyaman (UPTD I)]	Tingkat Kemantapan Jalan	89.84	62,396,432,000.00	-
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	859,71 undefined	62,396,432,000.00	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan				
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	7 KM	10,000,000,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Unit Rumah	200,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	16,41 Ha	27,946,934,978.00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			60,494,886,304.00	
		[Meningkatkan penyediaan PSU permukiman]	Persentase Permukiman yang Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	32.83	60,494,886,304.00	-
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	30 Lokasi	60,494,886,304.00	
	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				
			Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	10 Lokasi	13,318,779,276.00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	20 Lokasi	47,176,107,028.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I			54,000,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			54,000,000,000.00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			54,000,000,000.00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5,459,420,603.00	

1	2	3	4	8	9	10
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	20 KM	50,396,432,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan				
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	300 Meter	2,000,000,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III			89,750,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			89,750,000,000.00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			89,750,000,000.00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6,503,000,000.00	
		[Meningkatkan kinerja layanan kesekretariatan (UPTD III)]	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	6,503,000,000.00	-
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	468,990,000.00	
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	468,990,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	87,330,000.00	
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	87,330,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	945,993,008.00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	34,429,600.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	61,776,500.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	48,441,908.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

		[Meningkatkan kinerja layanan kesekretariatan (UPTD I)]	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	5,459,420,603.00	-
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	430,518,934.00	
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	410,520,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4,999,495.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5,000,107.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4,999,512.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4,999,820.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	19,900,575.00	
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5,000,263.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9,900,800.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10

		OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	59,298,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	47,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	727,800,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	14,200,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,515,400,600.00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,319,200.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	226,689,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,385,200.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,284,007,200.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1,485,286,392.00	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	76,300,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	26 Unit	802,947,300.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4,999,512.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	183,219,402.00	
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	61,614,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4,999,993.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5,005,409.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	55,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	55,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	599,055,024.00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	33,297,725.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	108,042,678.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	30,488,181.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	81,947,085.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		

	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	65 Unit	64,475,100.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	24 Unit	499,299,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit	42,264,992.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			7,000,000,000.00	
		[Meningkatkan layanan infrastruktur sumber daya air]	-	-	7,000,000,000.00	-
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik</i>	5387,17 Meter	7,000,000,000.00	
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		1,3 KM	2,000,000,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	32 KM	5,000,000,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			76,247,000,000.00	
		-	-	-	76,247,000,000.00	-
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	<i>Panjang jalan dengan kondisi mantap</i>	859,71 Km	76,247,000,000.00	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>	1,8 KM	15,000,000,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan				
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin</i>	66 KM	59,247,000,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan				
			<i>Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	496,5 Meter	2,000,000,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		J U M L A H			4,557,283,735,000.00	

				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	39,113,855.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	9,900,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	284,394,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	7,675,500.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	4,196,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i>	100 %	7,434,602.00	
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	7,434,602.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	1,843,652,870.00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	10,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	471,172,870.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1,362,480,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i>	100 %	2,375,639,196.00	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	22 Unit	500,917,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>	17 Unit	686,300,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	83,221,081.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	5,483,515.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1,099,717,600.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			6,540,600,300.00	
		[Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air (UPTD II)]	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	35.99	6,540,600,300.00	-
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik pada Wilayah Kerja UPTD I	12997 Meter	6,540,600,300.00	
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	764,389,200.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	4.5 KM	2,588,669,100.00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 KM	3,187,542,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			41,999,979,097.00	
		[Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas jalan yang aman dan nyaman (UPTD II)]	Tingkat Kemantapan Jalan	89.84	41,999,979,097.00	-
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan yang direhabilitasi dan dipelihara tetap dalam kondisi mantap pada wilayah kerja UPTD I	29 Km	41,999,979,097.00	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	13 KM	13,705,044,195.09	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan				
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	15 KM	25,294,940,665.91	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	300 Meter	2,999,994,236.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III			66,500,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			66,500,000,000.00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			66,500,000,000.00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			4,546,751,260.00	

		[Meningkatkan kinerja layanan kesekretariatan (UPTD III)]	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	4,546,751,260.00	-
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	281,553,860.00	
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	236,520,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	9,240,140.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	12,912,140.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	9,688,940.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	13,192,640.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	231,835,530.00	
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14,952,140.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	207,125,600.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9,757,790.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	211,769,280.00	
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	122,702,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	9,673,640.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5,473,640.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	36,960,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	4 Orang	36,960,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</i>	100 %	688,614,229.00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	36,704,240.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	87,572,583.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	3 Paket	24,147,230.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	67,080,121.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	59,793,845.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	6,051,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	385,200,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	16,524,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	5,541,210.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	1,533,648,061.00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	43,192,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	234,757,817.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	34,938,244.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,220,760,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1,599,330,300.00	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	67,000,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan				
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	16 Unit	892,120,300.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	62,630,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	577,580,000.00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			7,000,000,000.00	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
		[Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air]	-	-	7,000,000,000.00	-
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik pada Wilayah Kerja UPTD III	85300 Meter	7,000,000,000.00	
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3,5 KM	2,000,000,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	81,8 KM	5,000,000,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			54,953,248,740.00	
		-	-	-	54,953,248,740.00	-
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan yang direhabilitasi dan dipelihara tetap dalam kondisi mantap pada wilayah kerja UPTD III	55,95 Km	54,953,248,740.00	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.25 KM	3,719,270,200.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan				
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	55.7 KM	49,233,978,540.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	496,5 Meter	2,000,000,000.00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	J U M L A H	2,931,892,915,000.00	
--	-------------	----------------------	--

Sebagaimana tabel diatas, terdapat perbedaan pagu indikatif antara Rancangan dengan Rancangan Akhir. Penyesuaian pagu ini telah mengikuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur berikut :

2.4.1 Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
000.7.2.4/14291/Bapp-ll, Tanggal 28 Mei 2025 dengan pagu indikatif
Rp. 4.361.603.238,00

2.4.2 Surat Gubernur Kalimantan Timur, Nomor :
000.7.2.4/15046/Bapp-ll/2025 Tanggal 7 Juli 2025 dengan pagu
indikatif Rp. 2.839.515.446,00

2.4.3 Serta disempurnakan kembali dengan Surat Gubernur Kalimantan
Timur, Nomor : 000.7.2.4/15594/Bapp-ll/2025 Tanggal 7 Agustus
2025 dengan pagu indikatif Rp. 2.921.092.915,00

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program/kegiatan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur disampaikan secara tertulis dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan pemerintah provinsi, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dibahas/telaah pada forum-forum SKPD maupun Musrenbang.

BERITA ACARA

BASIL KESEPAKATAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ruang Rapat Poldas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2025 – 2029, khususnya perangkat daerah yang mengampu Sasaran 3 RPJMD: Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas, yang dihadiri oleh perangkat daerah dan para pihak yang memiliki keterkaitan dengan sasaran tersebut, sebagaimana tercantum pada daftar hadir peserta dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pengantar Dari Pimpinan Rapat (Kepala Bappeda Prov. Kaltim)
2. Pemaparan materi :
 - Penyampaian Output Utama Dinas PUPR & PERA dalam Mendorong Pemenuhan SPM, Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Aksesibilitas Wilayah dan Ketahanan Pangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR & PERA Prov. Kaltim
 - Penyampaian Output Utama Dinas Perhubungan dalam rangka Peningkatan Rasio Konektivitas Provinsi dan Keselamatan Transportasi yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim
 - Penyampaian Output Utama Dinas ESDM dalam rangka Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang handal yang disampaikan oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Kaltim
 - Penyampaian Output Utama Diskominfo dalam rangka Peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Digital yang merata diseluruh Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Kepala Diskominfo Prov. Kaltim
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum lintas perangkat daerah terhadap sasaran Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas sebagaimana terlampir pada Lampiran III, maka:

Seluruh peserta Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

MENYEPA.KATI

- KESATU Indikasi Program Prioritas, dan Output Utama Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA Indikasi Program Perangkat Daerah dan Output Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA Saran, masukkan dan koreksi Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara 1m.
- KEEMPAT Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dijadikan sebagai bahan penyempurnaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 22 April 2025

Pimpinan Sidang
Forum Lintas Perangkat Daerah

Yusliando

Unsur peserta Forum,

Tim Transisi Kaltim Sukses Menuju

Genra:/Emas,


Sunomo Jabir

Tim Evaluator RPD dan RKPD,


Harry Setya Nugraha

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Prov. Kaltim,

Surasa

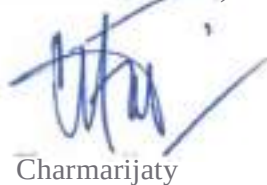
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Prov. Kaltim,


Hadi Suwito

Dinas Kesehatan Prov. Kaltim,

Agus Budianto

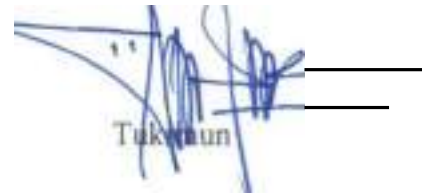
Ikatan Ahli Perencana (IAPI) Kaltim,


Charmarijaty

Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia
(HPJI) Kaltim,

Ari Sasmoko Adi

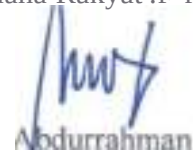
Dekan Fakultas Teknik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,


Tukhaun

Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan
Kaltim, antan II,


Iskandar

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
dan Perumahan Rakyat :f>rov. Kaltim,


Abdurrahman

Dinas Perhubungan Prov. Kaltim,

kti

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.
Kaltim,


Bambang Kukilo

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
(INKINDO),

Fernando Kalimau

Real Estat Indonesia (REI) Kaltim,



Bambang N Ariadhi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Samarinda ,



Hendra Kusuma

BAPPERIDA Kota Samarinda,



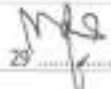
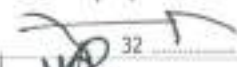
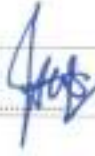
Wahyuni Nadjar

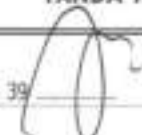
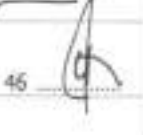
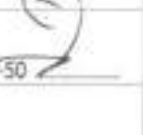
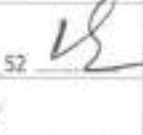
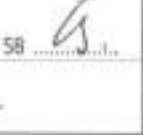


**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

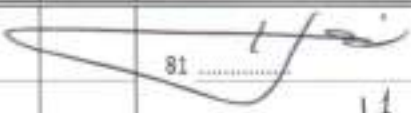
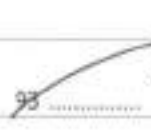
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara :

NO	N A M A	INSTANSI / JABATAN	GENDER (L/P)	TANDA TANGAN
1	Yusliando	Kepala BAPPEDA Prov. KALTIM		1
2		Kepala Dinas PUPR dan PERA Prov. KALTIM		2
3		Kepala Dinas Perhubungan Prov. KALTIM		3
4	Hadi Surob	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. KALTIM		4
5		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. KALTIM		5
6		Kepala Dinas Pariwisata Prov. KALTIM		6
7		Kepala Dinas Kesehatan Prov. KALTIM		7
8		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. KALTIM		8
9		Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. KALTIM		9
10		Tim Evaluator RPD dan RKPD Prov. Kaltim		10
11	EL. Nana	DESOM / KABID		11
12	ABDURRAHMAN	DPR PERA		12
13	Muh Sri	DESOM		13
14	Andhika A.R	Dishub		14
15	Tri Kari Wani	PT. PUN (Kasus)		15
16	Agus Budianto	Dinkes		16
17	Arinia	Dinkes		17

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	GENDER (L/P)	TANDA TANGAN
18	SIPRA PRANANTO S	KABID PERKIM PU		18 
19	Fernando kali mau	DPP INCIKOR Kaltim		19 
20	MASRUKE SW	PESOM I Kaltim		20 
21	Wahyuni	ESDM / KPI		21 
22	Wahid AP	ESDM / KPI		22 
23	Elisa Datz	ESDM		23 
24	Sutomo Jabir	Tim Transisi		24 
25	Dedy Samudra	Tim Transisi		25 
26	Denny YS	DPUR SMD		26 
27	Taman	Staf BWS KIV		27 
28	Sari Paulan	Kecamatan PAIC Bakulung		28 
29	Fransisca Mariani	Tim transisi		29 
30	MZ. Ikhwan	DPUR SDA KALTIM		30 
31	Aditya Arge	Staf PDA		31 
32	Ari Sasmala Aki	HPJI		32 
33	V. Hari V	PBB / Kelokatan		33 
34	Rudy Syaviti	DisKOMINFO		34 
35	Hangah Windi P	"		35 
36	Harry R. N	evaluator RPD		36 
37	HMT Mardie	Kalimas SMD		37 
38	Ayatullah L	Kabid Agribi Mamea		38 

NO		INSTANSI / JABATAN	GENDER (L/P)	TANDA TANGAN
39	Nurani Citra	DPUPR	P	39 
40	Isio Firman	DPUPR		40 
41	Jidiq Prananto S.	DPUPR Perwan / Kabid		41 
42	Feny Yuzanda	" / JF		42 
43	Andanu M.	" / JAF		43 
44	Yuki Subakti	Dishub / sekretaris		44 
45	Endang Sukherla	Dishub / Kabid PKA		45 
46	M. Agus Katchura	Dishub / ARA		46 
47	Resty D.S	DPUPR / JFPR		47 
48	RIZKI S	DPUPR / CK		48 
49	ROYAN HS	Dishub / PKA		49 
50	Jaka	-- / WPTD		50 
51	Wen Shalein	Dishub / pelayan		51 
52	Charmarizaty	Ketua IAP Kaltim		52
53	Firmanda	DPUPR / ke.		53
54	DAUFID	DISHUB KOTA		54
55	Alpinu	PUPR PERA PROV		55
56	TEI INORA.	Dishub kota		56
57	Feny . f	Dinas PUPR Kaltim		57
58	Iskandar	DPUPR Kaltim II		58
59	Radjim	"		59

NO		INSTANSI / JABATAN	GENDER (L/P)	TANDA TANGAN
60	Kuchendo Sri W.	ICN SAND.	L	60
61	Wahyuni N	Bapperida SAND / Iskrad	P	61
62	Farida A.	Bapperida Smr / Perencana	P	62
63	Abdullah	ESDM		63
64	Syahrul Guntah	ETAM	L	64
65	Suzana	DSDH	L	65
66	Muhammad	Dekan FT. Unlag Sub	L	66
67	VIVA	Prodi Spk UNTAS	L	67
68	Fajar	Humas Bapperida	L	68
69	Abdul Rahman	UPTD. Disturb	L	69
70	Tubagus Sula	UPTD Terminal Kial	L	70
71	A.B. Rijasti Sura	UPTD Terminal Disturb	L	71
72	Yuli Supriyati	DISHUB		72
73	Rahmat H	DISHUB	L	73
74	Yusuf	BAPPERIDA	L	74
75	SEKIDANG N.A	REK - KALTIM.		75
76	Maryadi I	DISHUB	L	76
77	Irvan	DISHUB	L	77
78	Wagati R	DISHUB	P	78
79	Cindy Francisca	DISHUB	P	79
80	Dewi Asmah	DPUPA	P	80

NO		INSTANSI / JABATAN	GENDER (L/P)	TANDA TANGAN
81	HEMDEI NISMA	PPUR BM		81 
82	HARIAH	PPUR / BM		82 
83	Heru Santosa	DISHUB		83 
84	M. Yuni Hadi Sutopo	"		84 
85	Dias S.N	Bappeda		85 
86	Agum Dharma Y	Bappeda		86 
87	ALESSWARNA	Bapp		87 
88	Ibrahim	— / staf		88 
89	SP4 HASRUSI	Bapp / IW		89 
90	FRYKA	"		90 
91	Mirna	Bappeda		91 
92	Saur Parsaoran	Bappeda / sekretaris		92 
93	Luki Bakht	Bappeda		93 
94	Gloria Christina	Bappeda		94 
95	Selly Melianawati	Bappeda		95 
96	Irwansyah	— II —		96 
97	Rudi Hertamasi	— II —		97 
98	Dedy Pudo Wardana	Bappeda		98 
99	Nabilla Fauziah 2	Magang IW		99 
100	Tri Suci Agustina	Magang IW		100 
101	Helva Anggraini	"		101 

Zoho Forms

22/04/2025, 15:48

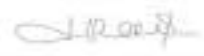
Presensi Peserta Online Forum Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renja 2026 Dan Renstra Perangkat Daerah 2025 - 2029 Report

Form Presensi Peserta Online Forum Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renja 2026 Dan Renstra Perangkat Daerah 2025 - 2029

Nama	Instansi	Jabatan	No. Hp	Tanda Tangan	Added Time	Referrer Name
WIDJANARKO	DPW ALFI/ALFA KALTIMYAKA	SEKRETARIS	085349807166		22-Apr-2025 14:00:30	
Pyananda	BPRN Kallim	Staf	081253222659		22-Apr-2025 13:42:13	
Rian Samian	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	Staf	0895700657596		22-Apr-2025 13:35:16	
Neneang Chiemela Shanti, ST, M.Si	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Sekretaris	081350016793		22-Apr-2025 13:12:38	https://forms.zohoinfraadawebapp.m/PresensiPesertaLintasPerangkatDaerah/formperMD1vgj3SHU659/DaerahZIMPrREY
Gilang Rizky Ramadhan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Staf	081350016793		22-Apr-2025 13:11:16	
Asih Mulyani	Dispersim	Kasubdag Program dan Keuangan	082148958508		22-Apr-2025 12:42:44	
Maryo Iuri Pratama	Institut Teknologi Kalimantan	Kepala Pusat Smart City	081256166864		22-Apr-2025 12:06:14	
Hendra Hedyanto	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang	JF Penata Kota Perumahan dan Muza	081252009696		22-Apr-2025 11:24:43	
SYAHRI, S.Kom	BAPPEDA KUTAI TIMUR	PENELAIAH TEKNIS KEBIJAKAN	085248176777		22-Apr-2025 11:22:50	
Agung Santoso	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang	Sekretaris	08125511305		22-Apr-2025 11:17:56	
Rahmah Rahmah	Diskominfo Kota Balikpapan	Kepala Bidang E-Government	081245001255		22-Apr-2025 11:13:50	
Leni Hardianti	Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	Penelaah Teknis Kebijakan	081250908562		22-Apr-2025 11:09:35	
Tri Hari Lukito	PT PLN (Persero) UD Kalimantan	Manager Perencanaan	082154147605		22-Apr-2025 11:07:57	

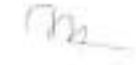
Zoho Forms

Yudi Apidiantara	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	Sekretaris	08125378338		22-Apr-2025 10:48:06
Rahmad Sukman	Dpu-upkd drainase	Ka upkd	187512271997031003		22-Apr-2025 10:48:34
aji ahmad karnani	dinas kominfo kab kutai timur	Kasubdag keuangan	085322226060		22-Apr-2025 10:48:17
Dorny Stephens	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kutai Barat	Penelaah Teknis Kebijakan	085830682712		22-Apr-2025 10:33:17
Sumra	Dishub PPU	Sekdis	08124175588		22-Apr-2025 10:27:16
Muhamad Haris, ST	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara	Pembina Jasa Konstruksi	082151795789		22-Apr-2025 10:21:19
Dian Anggrainy Yuliana	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Tata Kelola Penyehatan Lingkungan	081251338149		22-Apr-2025 10:17:44
WAHASUNA AQLA RR	DPUPR KUTAI TIMUR	KEPALA BIDANG	081346326452		22-Apr-2025 10:08:06
Sgt Adikurni	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	Staf Bidang Aplikasi Informatika	081347251596		22-Apr-2025 10:06:01
awaluddin	Bapeltbang Kab. PPU	Ahli Pertama Perencana	081346669406		22-Apr-2025 10:04:49
Achmad Zakki M	Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan	Analisis Perencanaan	-		22-Apr-2025 10:04:09
Muhammad Ali Ichwan	Bappeda Litbang Kota Balikpapan	Kabid Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	081323712186		22-Apr-2025 10:03:56
Ferry Yudha Mangiwa	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	082155088033		22-Apr-2025 10:03:02
Wati Dhita MalindaAnnisa	DPUPRPERA	TIM PENYUSUN RENSTRA	088651495194		22-Apr-2025 10:02:47
Amri Rifi Fauzi	BWS Kalimantan V Tanjung Selor	Pengekelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	085720244281		22-Apr-2025 10:00:28
Muji	Bapperida Bontang	Perencana	081258919658		22-Apr-2025 09:54:48

Zoho Forms					22/04/25, 15:46
mergetiya	Bappeda Litbang	peneliti teknik kebijakan	08125555422		22-Apr-2025 09:50:40
Doddy S. Muddeni	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang	Penata Ruang Ahli Madya	085347458589		22-Apr-2025 09:46:09
nur aini wartana	dinas pekerjaan umum	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli muda	085347002245		22-Apr-2025 09:43:06
Hj. Rizah Awaiza, ST, MT	Disperkim Kab. Berau	Sekretaris Disperkim Berau	08125379271		22-Apr-2025 09:43:39
Nurfaiz	DPU Kota Balikpapan	Kepala Bidang PLP	081360396332		22-Apr-2025 09:37:03
Dewi Istanawati	Pemerintah Kota Balikpapan	Kepala Bidang Gedung Pemerintah	081342221121		22-Apr-2025 09:23:41
Irena Febriani Dewi	Bappeda Litbang Kota Balikpapan	Perencana Ahli Muda	08544263396		22-Apr-2025 09:23:03
Andi Hasanuddin Akmal, S.Pi, M.Si	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang	Sekretaris	085391264927		22-Apr-2025 09:20:24
Rachmatullah	Bappedalitbang Paser	Perencana Ahli Muda			22-Apr-2025 09:17:24
Agus Taswanro	Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	Perencana Ahli Muda	081346663013		22-Apr-2025 09:11:31
Restu Irawan, ST	Bappeda Kutai Kartanegara	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	082225747773		22-Apr-2025 09:08:14
ROMADHON	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kutai Barat	Penata Kelola Jalan dan Jembatan	081350855493		22-Apr-2025 09:07:52
Riduansyah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	Peneliti Teknik Kebijakan Dinas PRP Kota SBR	08134717267		22-Apr-2025 09:06:35
Nurhakim	PLN UP2K Karim	Manajer	08125418362		22-Apr-2025 09:06:03
Sri Kusriani	Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi	08128389487		22-Apr-2025 09:05:56
H. Muchlis, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng. APSC Eng.	Fakultas Teknik Universitas Mulawarman	Wakil Dekan Bidang Rancangan dan Umum	081336030081		22-Apr-2025 09:05:35

Zoho Forms

22/04/25, 15:48

BOSY IKDIYANTIE	BAPPEDALITBANG KAB. PASER	KABID INFRASWIL	085246040300		22-Apr-2025 09:04:38	
Fachreza	Bappeda Kab Kutai Timur	Perencana Ahli Muda	081256068058		22-Apr-2025 09:04:32	https://forms.zohoinfrassdawitbappm/PresensiPesertamLintasPerangka-hankyou/formporMD7vq3bHJ6BifDxKhZMPmRIEY
Agung Setio Wibowo	Bappeda Kab Kutai Timur	Perencana Ahli Muda	08115811054		22-Apr-2025 09:03:41	https://forms.zohoinfrassdawitbappm/PresensiPesertamLintasPerangka-hankyou/formporMD7vq3bHJ6BifDxKhZMPmRIEY
MOHAMAD GOBEL,SH,CPFF	DPW ALFI/ILFA KALTIMTARA	KETUA	081244200300		22-Apr-2025 09:03:13	
Muhammad Hanafi Muslim	Bappeda Kab Kutai Timur	Perencana Ahli Muda	081347450027		22-Apr-2025 09:02:38	https://forms.zohoinfrassdawitbappm/PresensiPesertamLintasPerangka-hankyou/formporMD7vq3bHJ6BifDxKhZMPmRIEY
Awaluddin	Bapelitbang Kab. PPU	Ahli Pertama Perencana	081346689408		22-Apr-2025 09:02:17	
li. Herwin Sutarno, ST	Dinas PUPR Bidang Bina Marga Kab. Kutai Barat	Penelaah Teknis Kebijakan	081347839075		22-Apr-2025 09:02:11	
Anang Wahmanito	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau	Jabfing Teknik Penyelesaian Lingkungan Muda	082255194234		22-Apr-2025 09:01:48	
Sugiyono	Bappeda Kab Kutai Timur	Kabid Infraswil	081348046880		22-Apr-2025 09:01:30	

LAMPIRAN II

PROGRAM PRIORITAS DAN OUTPUT UTAMA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 – 2029

Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses

Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKTATOR PRIORITAS	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir Tahun		OUTPUT UTAMA	KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ruas jalan baru yang dibangun (Ruas)	2	2	419,000,000,000	5	995,000,000,000	5	995,000,000,000	5	1,017,000,000,000	5	645,000,000,000	5	4,071,000,000,000	1. Pembangunan Jalan Tering - Ujoh Bilang 2. Pembangunan Jalan Long Bagun Seberang - Long Boh (Batas Kaltara) 3. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Nibung - Simp. KM. 46 4. Pembangunan Waterfront and Riverside Road (Selili - Jembatan Mahkota II) 5. Pembangunan Jalan Sumbu IKN / Sotek - Bongan	
		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi (%)	83.77	90.77	1,132,000,000,000	100.00	1,140,000,000,000	100.00	500,000,000,000	100.00	500,000,000,000	100.00	500,000,000,000	100	3,772,000,000,000	1. Rekonstruksi Jalan Simp. 4 Kaliorang - Bts. Berau 2. Rekonstruksi Jalan Bts. Kutim - Talisayan 3. Rekonstruksi Talisayan - Tanjung Redeb 4. Rekonstruksi Muara Badak - Bts. Bontang 5. Rekonstruksi Jalan Lainnya Menuju Kemantapan 100%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Daerah Irigasi Kewenangan provinsi yang terlayani jaringan irigasi (Ha)	1,822	135	61,896,420,383	130	84,070,115,305	161	68,418,667,459	176	76,420,083,039	176	88,485,680,469	2,6	379,290,966,655	-DI Biatan -DI Marangkayu -DI Labanan -DI Merancang -DI Kaliorang -DI Selangkau -DI Rantau Pulung -DI Bengalon -DIR Sebulu -DIR Tabalar Muara -DIR Rantau Pangan -DIR Sukan Tengah -DIR Tanjung Perengat -DIR Urutang -DIR Sei Kuran -DIR Suliliran -DIR Laburan Lama -DIR Padang Pangrapat -DIR Riwang -DIR Tanjung Aru -DIR Tanjung Harapan -DIR Resak -DIR Datah Bilang	
		Panjang pantai kritis yang ditangani (Km)	0.52	1.41	42,612,742,500	1.31	32,641,004,500	1.14	138,288,254,500	1.49	108,897,442,500	1.49	31,897,442,500	7	354,336,886,500	-Pantai Manggar -Pantai Lamaru -Pantai Bontang -Pantai Mako Brimob -Pantai Tanjung Jumlai -Pantai Saloloang -Pantai Teluk Sulaiman -Pantai Maratua -Pantai Kenyamukan -Pantai Sekerat -Pantai Manubar -Pantai Kaniungan Besar	
		Kapasitas air baku untuk air bersih (Lt/dt)	875	260	159,700,000,000	60	156,200,000,000	60	121,200,000,000	60	91,500,000,000	60	91,500,000,000	1,375	620,100,000,000	-Pemb. Sumur Dalam 10 Kab/Kota -Pembangunan Unit Air Baku 10 Kab/Kota -Pembangunan Bendung Sungai Sangatta	

		Penanganan luas genangan banjir perkotaan (Ha)	147	315,25	62,241,977,680	626,83	305,341,977,680	620,91	309,241,977,680	582,89	301,441,977,680	571,37	70,741,977,680	2971	1,049,009,888,400	-Sungai Karang Mumus -Sungai Karang Asam Besar -Sungai Karang Asam Kecil -Sungai Bontang -Sungai Guntung -Sungai Tumbit -Sungai Makroman -Sungai Sambutan -Sungai Loa Janan -Sungai Tenggaraong -Sungai Marangkayu -Sungai Mangkujenang -Sungai Bukuan -Sungai Ampal -Sungai Sangatta -Sungai di Teluk Pandan -Sungai Kenyamukan -Sungai Loa Haur -Sungai Labangka -Sungai Kandilo -Sungai Sesulu -Sungai Mahakam (Kubar) -Sungai Mahakam (Mahulu)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Minum Regional (%)	23.40	36.50	111.854.029.600,00	48.70	309,230,920,000	73.40	1,055,789,727,000	90.30	945,729,630,000	100	691,971,540,000	100	3,114,575,846,600	1. SPAM REGIONAL LONG KALI 2. SPAM REGIONAL MAHAKAM 3. SPAM REGIONAL MARANGKAYU	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Limbah Domestik Regional (%)	10.20	15.60	4,115,938,640	24.50	61,586,847,900	38.90	21,586,847,900	67.80	201,986,847,900	90.00	201,486,847,900	90.00	490,763,330,240	1. SPALD REGIONAL SAMARINDA-KUKAR	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani (%)	13.50	30.00	1,055,496,147,200	50.56	1,209,769,504,026	71.75	999,625,027,200	87.41	172,978,197,200	100	75,555,299,200	100	3,513,424,174,826	1. RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM (MAJOR) 2. GEDUNG KOMPLEK PERKANTORAN KALTIM EX TEMINDUNG (MAJOR) 3. GEDUNG KESWAN-KESMAVET KALTIM 4. KANTOR DINAS KESEHATAN KALTIM 5. KANTOR DINAS PERKEBUNAN KALTIM 6. KANTOR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KALTIM (EX BARISTAN) 7. KANTOR DINAS ESDM KALTIM 8. KANTOR BPBD KALTIM 9. GREEN BUILDING DINAS PUPR-PERA KALTIM 10. KANTOR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KALTIM 11. KANTOR DINAS KEHUTANAN KALTIM 12. KANTOR BPSDM KALTIM 13. KANTOR UPTD BPPSDM PERTANIAN KALTIM 14. KANTOR BIRO UMUM - GEDUNG PKK KALTIM	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Kesiapan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan/atau Terkena Relokasi Program Pemerintah (%)	25.00	32.30	4,470,000,000	50.85	9,070,000,000	69.40	9,070,000,000	87.85	9,070,000,000	100	6,700,000,000	100	38,380,000,000	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan/atau terkena relokasi program Provinsi 150 unit	
7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN*	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani (%)	21.55	39.42	217,984,934,878	50.84	243,485,904,200	65.78	232,336,591,800	84.57	229,686,935,600	100	186,990,373,600	100	1,110,484,740,078	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 10.000 Unit 2. Penuntasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi 401,88 Ha	

8	PROGRAM PENINGKATAN PRASANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Permukiman (%)	73.58	20	65,500,000,000	40	65,500,000,000	60	65,500,000,000	80	65,500,000,000	100	65,500,000,000	100	327,500,000,000	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman 75 Lokasi	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)	175	155	10.692.384.016	145	71.140.823.870	135	71.120.000.000	125	79.105.000.000	115	85.980.000.000	115	318.038.207.886	1. Sosialisasi dan Evaluasi RAK LLAJ Prov. Kaltim 2. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perengkapan Jalan (LPJU, Rambu, RPPI, Marka, Paku Marka, Pagar Pengaman, Deliniator, CCTV)	
		Jumlah distribusi penumpang melalui terminal tipe b (Orang)	365.326	435.000	2.163.977.800	450.000	68.814.000.000	470.000	15.714.000.000	485.000	15.182.000.000	500.000	4.682.000.000	500.000	106.555.977.800	1. Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe B Paser 2. Pengadaan Pagar dan Penutupan Tebing Terminal Tipe B Bontang 3. Revitalisasi Terminal Tipe B Sungai Kunjang 4. Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Pagar Terminal Tipe B Sangatta	
10	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah distribusi penumpang melalui pelabuhan kewenangan provinsi (Orang)	100.365	118.000	24.003.567.595	127.000	31.400.000.000	136.000	31.400.000.000	145.000	26.400.000.000	154.000	26.400.000.000	154.000	139.603.567.595	1. Rehabilitasi Dermaga Tering, Kutai Barat; 2. DED Dermaga Speed depan Ktr Gubernur 3. Kajian Pengelolaan Alur Sungai di Kalimantan Timur (Mahakam dan Segah) 4. Pembangunan Dermaga Speedboat di Depan kantor Gubernur	
		Jumlah distribusi barang melalui pelabuhan kewenangan provinsi (Kg)	19.312	23.400		25.400		27.400		29.500		31.500		31.500		5. Rehabilitasi Dermaga Melak, Kab. Kutai Barat 6. Pembangunan Dermaga Pariwisata Kutai Kartanegara (Depan Museum) 7. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pengumpan Regional Mantaritip, Berau	
11	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA*	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	80%	85%	14.513.954.399	87%	15.965.349.389	89%	17.561.884.823	91%	19.318.073.305	93%	21.249.880.635	93%		- Penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik, - Terbangunnya jaringan intra (jaringan tertutup) antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	
12	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	96.17	97.06	105.000.000.000	97.48	120.000.000.000	97.88	125.000.000.000	98.26	130.000.000.000	98.63	135.000.000.000	98.63		- Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik di : 1. Kabupaten Kutai Barat 2. Kabupaten Mahakam Ulu 3. Kabupaten Kutai Timur 4. Kabupaten Kutai Kartanegara 5. Kabupaten Berau 6. Kabupaten Paser 7. Kabupaten Penajam 8. Kota Bontang 9. Kota Samarinda	
13	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (Unit)	5.147	5,767	29.756.000.000	6,077	29.756.000.000	6,387	29.756.000.000	6,697	29.756.000.000	7,007	29.756.000.000	7,007		1. Pembangunan PLTS SHS/Apdal 2. Pembangunan PLTS Atap (Rooftop) 3. Pembangunan PLTS Atap (Rooftop) 4. Pembangunan PJUTS 5. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	
		Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	12.14	15.73	1.850.056.000	19.06	1.160.000.000	22.39	1.220.000.000	25.72	1.250.000.000	29,05	1.250.000.000	29,05		Pembangunan Biogas 17 M3 sebanyak 14 unit Kab. Paser, Kab. Kukar, Berau, Kubar, Kutim	

LAMPIRAN III

PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 – 2029

Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses
 Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas
 Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	INDIKTATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir Tahun		OUTPUT UTAMA	KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ruas jalan baru yang dibangun (Ruas)	2	2	419,000,000,000	5	995,000,000,000	5	995,000,000,000	5	1,017,000,000,000	5	645,000,000,000	5	4,071,000,000,000	1. Pembangunan Jalan Tering - Ujoh Bilang 2. Pembangunan Jalan Long Bagun Seberang - Long Boh (Batas Kaltara) 3. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Nibung - Simp. KM. 46 4. Pembangunan Waterfront and Riverside Road (Selili - Jembatan Mahkota II) 5. Pembangunan Jalan Sumbu IKN / Sotek - Bongan	
		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi (%)	83.77	90.77	1,132,000,000,000	100.00	1,140,000,000,000	100.00	500,000,000,000	100.00	500,000,000,000	100.00	500,000,000,000	100	3,772,000,000,000	1. Rekonstruksi Jalan Simp. 4 Kaliorang - Bts. Berau 2. Rekonstruksi Jalan Bts. Kutim - Talisayan 3. Rekonstruksi Talisayan - Tanjung Redeb 4. Rekonstruksi Muara Badak - Bts. Bontang 5. Rekonstruksi Jalan Lainnya Menuju Kemantapan 100%	
2		Daerah Irigasi Kewenangan provinsi yang terlayani jaringan irigasi (Ha)	1,822	135	61,896,420,383	130	84,070,115,305	161	68,418,667,459	176	76,420,083,039	176	88,485,680,469	2,6	379,290,966,655	-Di Biatan -Di Marangkayu -Di Labanan -Di Merancang -Di Kaliorang -Di Selangkau -Di Rantau Pulung -Di Bengalon -DiR Sebulu -DiR Tabalar Muara -DiR Rantau Pangan -DiR Sukan Tengah -DiR Tanjung Perengat -DiR Urutung -DiR Sei Kuran -DiR Suliliran -DiR Laburan Lama -DiR Padang Pangrapat -DiR Riwang -DiR Tanjung Aru -DiR Tanjung Harapan -DiR Resak -DiR Datah Bilang	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Panjang pantai kritis yang ditangani (Km)	0.52	1.41	42,612,742,500	1.31	32,641,004,500	1.14	138,288,254,500	1.49	108,897,442,500	1.49	31,897,442,500	7	354,336,886,500	-Pantai Manggar -Pantai Lamaru -Pantai Bontang -Pantai Mako Brimob -Pantai Tanjung Jumiai -Pantai Saloloang -Pantai Teluk Sulaiman -Pantai Maratua -Pantai Kenyamukan -Pantai Sekerat -Pantai Manubar -Pantai Kaniungan Besar	
		Kapasitas air baku untuk air bersih (Lt/dt)	875	260	159,700,000,000	60	156,200,000,000	60	121,200,000,000	60	91,500,000,000	60	91,500,000,000	1,375	620,100,000,000	-Pemb. Sumur Dalam 10 Kab/Kota -Pembangunan Unit Air Baku 10 Kab/Kota -Pembangunan Bendung Sungai Sangatta	

		Penanganan luas genangan banjir perkotaan (Ha)	147	131	62,241,977,680	169	305,341,977,680	170	309,241,977,680	149	301,441,977,680	137	70,741,977,680	903	1,049,009,888,400	-Sungai Karang Mumus -Sungai Karang Asam Besar -Sungai Karang Asam Kecil -Sungai Bontang -Sungai Guntung -Sungai Tumbit -Sungai Makroman -Sungai Sambutan -Sungai Loa Janan -Sungai Tenggarong -Sungai Marangkayu -Sungai Mangkujenang -Sungai Bukuan -Sungai Ampal -Sungai Sangatta -Sungai di Teluk Pandan -Sungai Kenyamukan -Sungai Loa Haur -Sungai Labangka -Sungai Kandilo -Sungai Sesulu -Sungai Mahakam (Kubar) -Sungai Mahakam (Mahulu)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani (%)	10.8	22.13	19,800,000,000	33.45	19,250,000,000	44.75	20,350,000,000	56.96	19,800,000,000	68.38	19,800,000,000	68.38	99,000,000,000	Pembangunan & Peningkatan Kapasitas Drainase Utama 10 Kab/Kota	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Minum Regional (%)	23.40	36.50	111,854,029,600	48.70	309,230,920,000	73.40	1,055,789,727,000	90.30	945,729,630,000	100	691,971,540,000	100	3,114,575,846,600	1. SPAM REGIONAL LONG KALI 2. SPAM REGIONAL MAHAKAM 3. SPAM REGIONAL MARANGKAYU	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Limbah Domestik Regional (%)	10.20	15.60	4,115,938,640	24.50	61,586,847,900	38.90	21,586,847,900	67.80	201,986,847,900	90.00	201,486,847,900	90.00	490,763,330,240	1. SPALD REGIONAL SAMARINDA-KUKAR	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani (%)	13.50	30.00	1,055,496,147,200	50.56	1,209,769,504,026	71.75	999,625,027,200	87.41	172,978,197,200	100	75,555,299,200	100	3,513,424,174,826	1. RSID ATMA HUSADA MAHAKAM (MAJOR) 2. GEDUNG KOMPLEK PERKANTORAN KALTIM EX TEMINDUNG (MAJOR) 3. GEDUNG KESWAN-KESMAVET KALTIM 4. KANTOR DINAS KESEHATAN KALTIM 5. KANTOR DINAS PERKEBUNAN KALTIM 6. KANTOR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KALTIM (EX BARISTAN) 7. KANTOR DINAS ESDM KALTIM 8. KANTOR BPBD KALTIM 9. GREEN BUILDING DINAS PUPR-PERA KALTIM 10. KANTOR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KALTIM 11. KANTOR DINAS KEHUTANAN KALTIM 12. KANTOR BPSDM KALTIM 13. KANTOR UPTD BPSPDM PERTANIAN KALTIM 14. KANTOR BIRO UMUM - GEDUNG PKK KALTIM	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional (%)	5.40	9.20	1,403,853,740.00	15.50	1,559,200,000.00	31.30	20,400,000,000.00	67.60	52,790,000,000.00	90.00	67,790,000,000.00	90.00	143,943,053,740.00	1. TPA REGIONAL SAMARINDA-KUKAR (LOA JANAN ATAU TENGARONG SEBERANG)	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi (%)	31.82	45.45	70,000,000,000.00	59.09	55,000,000,000.00	72.73	35,000,000,000.00	86.36	20,000,000,000.00	100.00	15,000,000,000.00	100.00	195,000,000,000.00	1. SPAM DAN SPALD DI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (SAMARINDA, BALIKPAPAN, KUKAR, KUTIM, PPU)	
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan yang Dilaksanakan (%)	20.29	24.57	1,377,540,000.00	43.43	11,100,000,000.00	62.29	21,500,000,000.00	81.14	21,500,000,000.00	100.00	11,100,000,000.00	100.00	66,577,540,000.00	1. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN KALTIM-KALTARA	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	83.9	84.94	26,400,000,000	85.92	21,000,000,000	87.52	22,400,000,000	88.17	25,000,000,000	88.5	25,350,000,000	88.5	25,350,000,000	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang bersertifikat	45.00	55.02	18,742,000,000.00	61.68	19,762,000,000.00	68.91	20,477,000,000.00	76.68	21,467,000,000.00	85.02	25,356,000,000.00	347.31	105,804,000,000.00	Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Kualifikasi Ahli Jenjang 7 - 9	
12	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Kesiapan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan/atau Terkena Relokasi Program Pemerintah (%)	25.00	32.30	4,470,000,000	50.85	9,070,000,000	69.40	9,070,000,000	87.85	9,070,000,000	100	6,700,000,000	100	38,380,000,000	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan/atau terkena relokasi program Provinsi 150 unit	
13	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN*	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani (%)	21.55	39.42	217,984,934,878	50.84	243,485,904,200	65.78	232,336,591,800	84.57	229,686,935,600	100	186,990,373,600	100	1,110,484,740,078	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 10.000 Unit 2. Penuntasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi 401,88 Ha	

-785-																	
14	PROGRAM PENINGKATAN PRASANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Permukiman (%)	73.58	20	65,500,000,000	40	65,500,000,000	60	65,500,000,000	80	65,500,000,000	100	65,500,000,000	100	327,500,000,000	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman 75 Lokasi	
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72.2	77	62,977,001,745	78.5	137,240,843,250	80	137,840,843,250	81.5	138,090,843,250	83	138,440,843,250	83	614,590,374,745		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100	100	22,629,426,080	100	9,841,382,400	100	10,224,412,400	100	10,544,412,400	100	10,784,412,400	100	64,024,045,680		
UPTD PIPU WILAYAH I																	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi (%)			37,008,000,000.00		37,008,000,000.00		37,008,000,000.00		37,008,000,000.00		37,008,000,000.00		185,040,000,000.00		
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Daerah Irigasi Kewenangan provinsi yang terlayani jaringan irigasi (Ha)			5,699,996,700.00		5,699,996,700.00		5,699,996,700.00		5,699,996,700.00		5,699,996,700.00		28,499,983,500.00		
		Kapasitas air baku untuk air bersih (Lt/dt)			700,000,000.00		700,000,000.00		700,000,000.00		700,000,000.00		700,000,000.00		3,500,000,000.00		
		Penanganan luas genangan banjir perkotaan (Ha)			1,100,015,100.00		1,100,015,100.00		1,100,015,100.00		1,100,015,100.00		1,100,015,100.00		5,500,075,500.00		
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani (%)			1,990,000,000.00		1,990,000,000.00		1,990,000,000.00		1,990,000,000.00		1,990,000,000.00		9,950,000,000.00		
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72.2	77	3,009,379,527	78.5	5,403,000,000	80	2,503,000,000	81.5	5,832,610,000	83	2,503,000,000	83	19,250,989,527		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100	100	3,044,188,473	100	2,151,120,000	100	2,151,120,000	100	2,151,120,000	100	2,151,120,000	100	11,648,668,473		
UPTD PIPU WILAYAH II																	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi (%)			70,796,000,000.00		84,955,200,000.00		101,946,240,000.00		112,140,863,900.00		123,354,950,100.00		493,193,254,000.00		
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Daerah Irigasi Kewenangan provinsi yang terlayani jaringan irigasi (Ha)			5,000,000,000.00		6,000,000,000.00		7,200,000,000.00		7,920,000,000.00		8,712,000,000.00		34,832,000,000.00		
		Kapasitas air baku untuk air bersih (Lt/dt)			500,000,000.00		900,000,000.00		1,080,000,000.00		1,188,000,000.00		1,306,800,000.00		4,974,800,000.00		
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani (%)			6,000,000,000.00		7,200,000,000.00		8,640,000,000.00		9,504,000,000.00		10,454,400,000.00		41,798,400,000.00		
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72.2	77	4,226,993,255	78.5	13,587,959,255	80	3,716,560,000	81.5	3,534,660,000	83	3,740,894,900	83	53,360,329,727		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100	100	4,261,466,745	100	4,046,971,345	100	4,132,874,600	100	4,287,874,600	100	4,367,874,600	100	22,763,812,572		
UPTD PIPU WILAYAH III																	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi (%)			69,731,191,330.00		69,731,191,330.00		69,731,191,330.00		69,731,191,330.00		69,731,191,330.00		348,655,956,650.00		
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Daerah Irigasi Kewenangan provinsi yang terlayani jaringan irigasi (Ha)			6,999,997,100.00		6,999,997,100.00		6,999,997,100.00		6,999,997,100.00		6,999,997,100.00		34,999,985,500.00		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72.2	77	2,278,213,392.00	78.5	2,202,103,392	80	3,012,464,824	81.5	3,012,464,824	83	3,012,464,824	83	3,012,464,824		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100	100	1,232,779,408.00	100	1,016,889,408	100	1,096,991,427	100	1,096,991,427	100	1,096,991,427	100	1,096,991,427		
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI																	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				475,296,800.00		675,296,800.00		875,296,800.00		1,075,296,800.00		1,275,296,800.00		4,376,484,000.00		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72.2	77	1,678,696,200	78.5	3,175,840,000	80	3,315,840,000	81.5	4,050,840,000	83	4,195,840,000		16,417,056,200		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100	100	3,995,000,000	100	4,265,000,000	100	4,890,000,000	100	5,015,000,000	100	5,130,000,000		23,295,000,000		

LAMPIRAN III

PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 – 2029

Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses
Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas
Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM	INDIKTATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Akhir Tahun		OUTPUT UTAMA	KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030							
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatian (Indeks)	70	76	29.023.782.060	78.3	28.955.705.538	78.7	29.205.705.538	79.07	28.955.705.538	79.44	29.055.705.538	79.44	145.196.604.212				
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	4.901.966.380	100	6.625.606.025	100	5.583.995.825	100	5.780.890.825	100	6.052.475.825	100	28.944.934.880				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)	175	155	10.692.384.016	145	71.140.823.870	135	71.120.000.000	125	79.105.000.000	115	85.980.000.000	115	318.038.207.886	1. Sosialisasi dan Evaluasi RAK LLAJ Prov. Kaltim 2. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan (LPJU, Rambu, RPPJ, Marka, Paku Marka, Pagar Pengaman, Deliniator, CCTV) 3. Forum LLAJ; 4. Penegakan Hukum ODOL; 5. Rampcheck Angkutan AKDP; 6. Penyediaan Layanan Sarana Angkutan Umum Massal; 7. Penyediaan Layanan Angkutan Perintis.			
		Jumlah distribusi penumpang melalui terminal tipe b (Orang)	365.326	435.000	2.163.977.800	450.000	68.814.000.000	470.000	15.714.000.000	485.000	15.182.000.000	500.000	4.682.000.000	500.000	106.555.977.800	1. Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe B Paser 2. Pengadaan Pagar dan Penurapan Tebing Terminal Tipe B Bontang 3. Revitalisasi Terminal Tipe B Sungai Kunjang 4. Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Pagar Terminal Tipe B Sangatta 5. Rehabilitasi Terminal Tipe B Berau			
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah distribusi penumpang melalui pelabuhan kewenangan provinsi (Orang)	100.365	118.000	24.003.567.595	127.000	31.400.000.000	136.000	31.400.000.000	145.000	26.400.000.000	154.000	26.400.000.000	154.000	139.603.567.595	1. Rehabilitasi Dermaga Tering, Kutai Barat; 2. DED Dermaga Speed depan Ktr Gubernur 3. Kajian Pengelolaan Alur Sungai di Kalimantan Timur (Mahakam dan Segah) 4. Pembangunan Dermaga Speedboat di Depan kantor Gubernur 5. Rehabilitasi Dermaga Melak, Kab. Kutai Barat 6. Pembangunan Dermaga Pariwisata Kutai Kartanegara (Depan Museum) 7. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pengumpan Regional Mantaritip, Berau			
		Jumlah distribusi barang melalui pelabuhan kewenangan provinsi (Kg)	19.312	23.400		25.400		27.400		29.500		31.500		31.500					

4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (%)	40	55	1.350.000.000	65	1.250.000.000	75	1.450.000.000	85	1.450.000.000	95	1.450.000.000	95	6.950.000.000	1. Study FS Jaringan Kereta Api Rute Samarinda - Tenggarong 2. Study Kelayakan KPBU Jaringan Kereta Api Rute Samarinda - Tenggarong 3. Study SID Jaringan Kereta Api Rute Samarinda - Tenggarong 4. Study LARAP Jaringan Kereta Api Rute Samarinda - Tenggarong 5. Study AMDAL Jaringan Kereta Api Rute Samarinda - Tenggarong	
---	------------------------------------	--	----	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	--	--

Perangkat Daerah : UPTD Terminal

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian (Indeks)	70	76		78.3		78.7		79.07		79.44		79.44	0		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		100	0		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)													0		
		Jumlah distribusi penumpang melalui terminal tipe b (Orang)	365.326	435.000	2.163.977.800	450.000	68.814.000.000	470.000	15.714.000.000	485.000	15.182.000.000	500.000	4.682.000.000	500.000	106.555.977.800	1. Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe B Paser 2. Pengadaan Pagar dan Penurapan Tebing Terminal Tipe B Bontang 3. Revitalisasi Terminal Tipe B Sungai Kunjang 4. Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Pagar Terminal Tipe B Sangatta 5. Rehabilitasi Terminal Tipe B Berau	

LAMPIRAN III

PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 – 2029

Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses
Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas
Perangkat Daerah : Diskominfo

NO	PROGRAM	INDIKTATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir Tahun		OUTPUT UTAMA	KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Kualitas Layanan Kesekretariatan	95.35	100	45.789.975.064	100	50.368.972.570	100	55.405.869.827	100	60.946.456.810	100	67.041.102.491	100	67.041.102.491	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti														Penanganan keluhan pengguna layanan	
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	60%	65%	22.275.000.000	67,5	24.502.500.000	70,00%	26.952.750.000	72,5	29.648.025.000	75,00%	32.612.827.500	75,00%	32.612.827.500	- Laporan Tingkat Kepuasan: Hasil penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik, yang dapat diukur dalam skala tertentu, seperti sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas, - Peningkatan Kualitas Layanan: Penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan, termasuk kecepatan, ketepatan, dan kemudahan akses, - Dikeluarkan Rekomendasi: Saran dan rekomendasi dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan, - Laporan Survei Kepuasan Masyarakat: Dokumen yang berisi hasil survei kepuasan masyarakat, termasuk tingkat kepuasan, kualitas layanan, dan rekomendasi	
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	80%	85%	14.513.954.399	87%	15.965.349.389	89%	17.561.884.823	91	19.318.073.305	93%	21.249.880.635	93%	21.249.880.635	1. PERATURAN DAERAH / PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DIGITAL DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2. DOKUMEN MANAJEMEN STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 3. DOKUMEN ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 4. DOKUMEN PETA RENCANA PEMERINTAH DIGITAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 5. DOKUMEN MASTERPLAN SMART PROVINCE 6. PENINGKATAN LITERASI DAN KOMPETENSI DIGITAL BAGI PIMPINAN, ASN MAUPUN MASYARAKAT 7. PENGEMBANGAN SUPERAPP SEBAGAI PORTAL LAYANAN PUBLIK SE-PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	

4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,64	2,75	4.581.694.637	2,8	5.039.864.101	2,85	5.543.850.511	2,9	6.098.235.562	3	6.708.059.118	3	6.708.059.118	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait Data/Statistik Sektoral, 2. Pengembangan Portal Satu Data Dan Jaringan Informasi Geospasial dalam mendukung Data dan Informasi pada Portal SuperApp Kalimantan Timur, 3. Penyediaan Data yang Akurat, Valid, Serta Berkualitas di Portal Satu Data maupun Jaringan Informasi Geospasial Indonesia	
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat 3	Tingkat 3	2.090.000.000	Tingkat 3	2.299.000.000	Tingkat 3	2.528.900.000	Tingkat 3	2.781.790.000	Tingkat 3	3.059.969.000	Tingkat 3	3.059.969.000	1. Pengamanan Data: Mengamankan data dari akses tidak sah, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, atau penghancuran 2. Pengamanan Sistem: Mengamankan sistem informasi dari serangan cyber dan ancaman lainnya.	

LAMPIRAN III

PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 – 2029

Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses
Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas
Perangkat Daerah : Dinas ESDM

NO	PROGRAM	INDIKTATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Akhir Tahun		OUTPUT UTAMA	KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	100	36.050.000.000	100	37,131,500,000	100	38,245,445,000	100	39,392,808,000	100	40,574,591,000			Gaji Pokok dan Tunjangan, Operasional kantor, Belanja Telpn, Belanja Listrik, Belanja Air, Belanja Internet, Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perizinan Kendaraan Bermotor, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor, Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan Operasional, Belanja Bimtek dan Penyertaan, Belanja Jasa Publikasi Melalui Pameran, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Luar Negeri, Rehabilitasi Gedung Kantor, Rehabilitasi Halaman/Parkir Gedung Kantor	
		Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100							
2	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	12,14	97.06	105.000.000.000	97.48	120.000.000.000	97.88	125.000.000.000	98.26	130.000.000.000	98.63	135.000.000.000			- Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik di : 1. Kabupaten Kutai Barat 2. Kabupaten Mahakam Ulu 3. Kabupaten Kutai Timur 4. Kabupaten Kutai Kartanegara 5. Kabupaten Berau 6. Kabupaten Paser 7. Kabupaten Penajam 8. Kota Bontang 9. Kota Samarinda - Penyusunan DED pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik di : 1. Kabupaten Kutai Barat 2. Kabupaten Kutai Timur 3. Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Kabupaten Berau 5. Kabupaten Paser 6. Kabupaten Mahakam Ulu 7. Kota Bontang 8. Kota Samarinda	

3	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (Unit)	5,147	5,767	29.756.000.000	6,077	29.756.000.000	6,387	29.756.000.000	6,697	29.756.000.000	7,007	29.756.000.000			1. Pembangunan PLTS SHS/Apdal 2. Pembangunan PLTS Atap (Rooftop) 3. Pembangunan PLTS Atap (Rooftop) 4. Pembangunan PJUTS 5. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	
		2. Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	12,14	15.73	2,088,423,140	19.06	2,091,223,140	22.39	1,702,090,880	25.72	1,702,090,880	29,05	1,702,090,880			Pembangunan Biogas 17 M3 sebayak 14 unit Kab. Paser, Kab. Kukar, Berau, Kutim	
		Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT (SBM)*	6.994.832,59	9,388,542.39	1,850,056,000	11,754,895.56	1,160,000,000	14,268,436.98	1,220,000,000	16,936,345.38	1,250,000,000	19,766,114.34	1,250,000,000			1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota 3. Perencanaan kegiatan konservasi energi	
4	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1. Jumlah Volume Pengambilan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	12,939,254,38	12,939,254.38	6,375,000,000	12,939,254.38	12,939,254.38	12,939,254.38	12,939,254.38	12,939,254.38	12,939,254.38	12,939,254.38	12,939,254.38			Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kertas, Belanja Alat/Bahan Komputer, Belanja Makan dan Minum Rapat, Belanja Jasa Tenaga Laboratorium, Belanja Jasa Konsultan dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	
		2. Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (KM2)	2.307	3,798.25		4,488.25											
5	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Ha)	n/a	20	5,000,000,000	20	5,250,000,000	20	5,500,000,000	40	5,750,000,000	40	6,000,000,000			Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kertas, Belanja Alat/Bahan Komputer, Belanja Makan dan Minum Rapat, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	
		2. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR (Rekomendasi)	n/a	4		4		4		8		8					

Lampiran IV

**SARAN DAN MASUKAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029**

No	Nama	Instansi	Saran & Masukan
SKPD Kabupaten/Kota			
1	Yuni	Bapperida Kota Samarinda	- Untuk pembangunan Riverside Waterfront Road di samarinda, pemkot mendukung hal tersebut serta perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut mengenai dampak sosial - Seluruh usulan rakortekbang dalam SIPD yang berkaitan dengan infrastruktur diharapkan diakomodir - Untuk pekerjaan pengendalian banjir, SPAM di Kota Samarinda diharapkan dapat menjadi prioritas provinsi - Berkaitan dengan infrastruktur perhubungan, diperlukan lokasi spesifik pekerjaannya - Prioritas terkait penanganan kawasan kumuh, SK Tahun 2021 (kewenangan provinsi msh 10 Ha)
2	Hotmarulitua Manalu	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	- Apresiasi terhadap rencana pekerjaan pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi - Terkait pembangunan dermaga speedboat untuk dikoordinasikan kembali agar tidak mematikan sarana transportasi sungai yang lain - Perbaiki istilah perintis dalam pekerjaan penyediaan pelayanan angkutan perintis, kata perintis di tujukan untuk daerah 3TP
3	Sunra	Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara	- Prioritas pembangunan terminal tipe B, diperlukan percepatan dalam pembangunannya dan saat ini dalam tahap proses hibah
4	Restu Irawan	Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	- Prioritas penanganan ruas jalan SP. 3 kota bangun- kota bangun yang saat ini dalam kondisi rusak - Prioritas Rehabilitasi Daerah Irigasi sebulu dan samboja - Prioritas penanganan kawasan kumuh, normalisasi sungai, dan pengadaan LPJU untuk kawasan permukiman

No	Nama	Instansi	Saran & Masukan
			- Saran untuk pemkot samarinda mengenai pelebaran jalan alternatif akses menuju Tenggarong (Simp. M. Said)
5	M. Ali Ichwani	Bappeda Litbang Kota Balikpapan	- Fokus terhadap pembangunan kewilayahan, salah satunya adalah pembangunan metropolitan Balikpapan dan Samarinda - Pendekatan project yang dipaparkan merupakan kewenangan Provinsi yang berkaitan dengan SPM Kabupaten/Kota - Prioritas penanganan kawasan kumuh - Prioritas pemabngunan jalan di wilayah Balikpapan yaitu jalan akses kawasan industri kariangau dan pembangun jembatan muara rapak - Prioritas pembangunan pelabuhan penyeberangan kewenangan provinsi yang ada di balikpapan
6	Awaluddin	Bappelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara	- Prioritas pengadaan PJU jalan sotek – bongan - Prioritas pembangunan SPAM Regional Long Kali dan Intake di sungai Long Kali
8	Syahril	Bappeda Kabupaten Kutai Timur	- Prioritas penanganan jalan di ruas karangan – batu lepoq - Solar Cell komunal telah di bangun, namun belum ada perawatan hingga saat ini
9	Rachmatullah	Bappedalitbang Kabupaten Paser	- Dukungan provinsi terkait dengan progres serta percepatan pembangunan Bendungan Lambakan dan Bendungan Telake - Dukungan Provinsi terhadap pembangunan terminal tipe A - Prioritas Pengendalian banjir berupa normalisasi sungai kandilo (muara paser) - Progres dan perkembangan MoU untuk SPAM Regional di Paser - Progres dan dukungan terkait pembangunan Bandara Tanah Grogot
10		Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat	- Percepatan pembangunan Dermaga Melak dan Tering - Progress dan perkembangan mengenai DED Terminal tipe B kubar - Dukungan Provinsi untuk pengadaan PJU di ruas jalan nasional
11	Agung Santoso	Dinas PUPR Kota Bontang	- Percepatan Pembangunan SPAM Regional marangkayu

No	Nama	Instansi	Saran & Masukan
			- Sharing informasi mengenai Pembangunan Bendali Suka Rahmat kepada pemkot
ASOSIASI			
12	Charmarijaty	IAP	- Mengusulkan integrasi output agar dapat mendukung capaian, serta penajaman dari program/ didekatkan dengan basis analisis data spasial - Diharapkan arah kebijakan masing – masing Perangkat Daerah sejalan dengan RPJMD
13	Fernando	INKINDO	- ESDM dan PUPR agar dapat berkolaborasi dalam hal pengembangan listrik dari gas kompos - Untuk pembangunan dermaga speedboat, agar dapat mempedomani masterplan sungai mahakam. - Perlu koordinasi Pemerintah Provinsi Kaltim dengan Pemerintah Pusat untuk penanganan Stunting
14	Ari Sasmoko Adi	HPJI	- Keterlambatan pembangunan dalam skala prioritas penanganan masalah terkait jalan - Perlu perhatian terkait dampak lingkungan dalam setiap pembangunan infrastruktur, seperti dampak terhadap satwa liar - Dinas PPUPR PERA perlu meningkatkan kualitas jalan - Untuk masalah kemacetan lalu lintas agar dilakukan penanganan untuk mengatasi masalah tersebut
15	Bambang N.A	REI	- Di setiap pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur di Kalimantan Timur jangan hanya bertumpu kepada APBD Prov. Kaltim
16	Rajiman	Balai Pelaksanaan Penyedia Perumahan Kalimantan II	- Prioritas pembangunan rumah untuk rakyat (kolaborasi pusat,prov dan kab/kota) - Apresiasi gratis biaya administrasi kepemilikan rumah (prioritas di ASTA CITA) - Perbaikan basis data di kab/kota dan prov terkait perumahan dan kawasan kumuh (koordinasi dan kolaborasi dengan balai)
17	Iskandar	Balai Pelaksanaan Penyedia Perumahan Kalimantan II	- Info mengenai elevasi sungai mahakam serta dampaknya terhadap permukiman - Peningkatan elevasi jalan yang mengakibatkan banjir - Diharapkan disetiap pekerjaan normalisasi sungai dapat berjalan dengan optimal

No	Nama	Instansi	Saran & Masukan
			- Pembangunan pintu air untuk mengatasi kenaikan air pada saat musim hujan
SKPD PROV. KALTIM			
18	Agus Budianto	Dinas Kesehatan Prov. Kaltim	- Dalam rangka penurunan angka kematian dan angka kesakitan perlu dukungan khusus untuk akses jalan menuju daerah terpencil - Prioritas akses layanan telekomunikasi dan akses sinyal untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil
19	Surasa	Dinas Pendidikan Prov. Kaltim	- Dukungan pembangunan akses jalan dan listrik kewenangan provinsi untuk sarana pendidikan
- AKADEMISI			
20	Tukimun	Dekan Teknik Untag	- Keterpaduan isu mengenai bandara VVIP menjadi umum, jangan sampai satu sarana infrastruktur mematikan infrastruktur lainnya - Keterpaduan antara moda perhubungan - Prioritas akses layanan internet dan PLTS untuk di daerah terpencil - Melibatkan akademisi dalam setiap proses pembangunan Prov. Kaltim - Koordinasi antara DPUPR & PERA dan Dishub mengenai penentuan kelas jalan terutama ruas jalan provinsi - Ex tambang menjadi program prioritas
21	Hary S.N	Unmul, Tim Evaluator RPD	- Apresiasi terhadap rencana pembangunan kedepan, segala macam permasalahan infrastruktur yang tertuang didalam dokumen evaluasi secara langsung maupun tidak langsung terjawab oleh rencana pembangunan infrastruktur kedepan - permasalahan yang terdapat dalam dokumen evaluasi khususnya disektor infrastruktur diharapkan tertuang didalam dokumen renstra skpd teknis sektor infrastruktur - Perlunya inovasi dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pengembangan pembangunan daerah
TIM TRANSISI			
22	Sutomo Jabir	Tim Transisi	- Fokus penanganan pembangunan jalan jangan hanya di ruas jalan provinsi namun seluruh ruas jalan yang ada di kalimantan timur. Dinas PUPR & PERA Kaltim

No	Nama	Instansi	Saran & Masukan
			diharapkan terus berkoordinasi dengan BBJN dan seluruh kab/kota dalam rangka penanganan ruas jalan di kaltim - Koordinasi antara SKPD provinsi dalam rangka pembangunan atau pemenuhan infrastruktur untuk menunjang perekonomian dan sosial - Progam-program unggulan yang ada dalam dokumen hendaknya diperjelas program-program unggulan pak gubernur terutama untuk Kesehatan
23	Fransiska Maryani	Tim Transisi	- Kedepan disetiap pembangunan jalan harus dengan pembangunan drainase jalan - Alokasi untuk pemeliharaan jalan tetap menjadi prioritas untuk menangani kerusakan jalan bersifat minor - Prioritas Pembangunan jaringan EBT maupun bio gas - Perhatian dalam hal pengelolaan kompos sampah
24	Dedy Samuel	Tim Transisi	- Dukungan terhadap terwujudnya Kaltim Sukses bukan hanya di daerah perkotaan namun hal tersebut juga untuk daerah pendalaman dan perbatasan - Pembangunan Jalan Long Bagun dan Sei Boh jangan sampai terdapat tumpang tindih pekerjaan antara pemerintah prov kaltim dan pemerintah pusat. - Dukungan terhadap pengadaan jembatan timbang untuk mengurangi ODOL - Dishub perlu menyelesaikan permasalahan tidak layak nya kualitas sarana dan prasarana transportasi - Prioritas pembangunan infrastruktur listrik untuk daerah pendalaman dan perbatasan - Prioritas pembangunan jaringan internet gratis di setiap desa dan daerah blankspot

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

1. Telaah terhadap kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2026 difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menjadi tahun awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan dimaksud mendorong pertumbuhan yang merata dan tidak menimbulkan ketimpangan dan disparitas antar daerah.

Pelaksanaan beberapa proyek infrastruktur nasional diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, kinerja industri diharapkan terus meningkat seiring dengan percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri sawit, penguatan industri dasar, antara lain industri kimia dasar, serta pengembangan industri teknologi menengah tinggi. Pengembangan dan operasionalisasi infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan tol, dan bandara yang telah dibangun juga diharapkan akan memberikan dorongan kinerja ekonomi Wilayah Kalimantan Timur.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran merupakan sasaran rencana kerja yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan yang pada sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Dalam perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran menjadi komitmen

bersama seluruh bidang di DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur agar layanan infrastruktur yang diberikan dapat benar-benar memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. Agar menjadi lebih spesifik maka **tujuan** diterjemahkan ke dalam berbagai **sasaran**.

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Renja Dinas PUPRPRTahun 2026. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, dan selaras dengan tujuan dan sasaran Renja dalam mencapai tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2026 diselaraskan dengan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

“Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”

Tabel 3.2.1**Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
KATA KUNCI VISI : KALTIM SUKSES			
Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,90	4,30
Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	7,20
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	18,26	19,05-19,83
	Tingkat Inflasi (%)	1,47	2,00±1
	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	3,37	3,40-3,45
Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,78	3,95-4,24
	Indeks Gini (indeks)	0,321	0,310-0,318
Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (indeks)	7,89	8,01-8,13
Sasaran 4: Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indonesia Blue Economy Index (indeks)	29,07*	32,92-38,81
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)	63,04*	63,84
	Indeks Ketahanan Pangan	78,61	79,69-80,47

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	76,63	80,52
	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	75,55	55,05
	Indeks Risiko Bencana (indeks)	136,11	127,17-131,64
KATA KUNCI VISI : GENERASI EMAS			
Tujuan 2 : Terbangunnya Generasi Emas	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56*	0,60
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	74,94	75,04
	Prevalensi Stunting (%)	22,2	18,4
Sasaran 6 : Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,03	14,18-14,26
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,02	10,35-10,53
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,11*	14,50-15,19
Sasaran 7 : Meningkatnya Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	PDRB Per-Kapita (juta Rp)	212,18	259,55
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,14	4,54-5,07

Tabel. 3.2.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PUPR PERA Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline Tahun 2024	TARGET 2026
Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dalam Mendukung Pengembangan Wilayah, Meningkatkan Perekonomian, serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan, yang Diselenggarakan melalui Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas, dan Profesional	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (Indeks)	5.23	6.27
	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Indeks)	5.77	6.40
	Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan melalui Peningkatan Kualitas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman (Indeks)	1.53	4.42
	Meningkatnya akuntabilitas, integritas, profesionalisme pemerintahan perangkat daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Poin)	67.00	71.00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	82.44	82.70

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Peningkatan fungsipelayanan jalan	Pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
		Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan air minum	Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum (SPAM)
		Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan persampahan	Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana persampahan
		Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah	Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana air limbah
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar	Perencanaan, pembangunan, pengawasan serta rehabilitasi/renovasi gedung sesuai standar
			Penataan bangunan dan lingkungan gedung sesuai standar
		Peningkatan rumah layak huni	Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni
		Peningkatan kualitas kawasan permukiman	Peningkatan layanan kualitas kawasan permukiman
		Peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Peningkatan kualitas layanan PSU
		Peningkatan layanan kawasan permukiman	Peningkatan kualitas layanan Kawasan permukiman

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Perencanaan program dan kegiatan di DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Program dengan demikian merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan tugas dan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini adalah kegiatan yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2026 Rencana Program ke-PU-an yang akan dilaksanakan adalah menangani 2 (dua) Urusan, 31 (tiga puluh satu) Program, 67 (enam puluh tujuh) Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 5 (lima) Sub Unit Organisasi, yaitu :

- Dinas PUPR-PERA, Rp. 2.733.792.915.000
- UPTD PIPU Wilayah I, Rp. 54.000.000.000
- UPTD PIPU Wilayah II, Rp. 71.500.000.000
- UPTD PIPU Wilayah III, Rp. 66.500.000.000
- UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Rp. 6.100.000.000

Total Rencana Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.921.892.915.000

Adapun Rincian rencana program dan kegiatan yang tertuang pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

URUSAN : PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
 - Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
 - Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku

- Pembangunan Unit Air Baku
 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
 - Normalisasi/Restorasi Sungai
 - Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
 - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
 - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
 - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan

- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
- Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
- Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota
- Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
- Penyediaan Lahan Untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1. Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan Regional
 - Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
 - Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
 - Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi

6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
 - Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
 - Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi

8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
 - Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
 - Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi
 - Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Untuk Kepentingan Strategis Provinsi
 - Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
 - Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
 - Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi
 - Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya
 - Penyelenggaraan Penertiban dan Perpanjangan Lisensi Arsitek

9. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah

Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
- Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
- Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
 - Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - Sistem Informasi Penataan Ruang
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

11. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan

Jembatan

- Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- Pengelolaan Leger Jalan
- Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- Pembangunan Jalan
- Pelebaran Jalan Menuju Standar
- Rekonstruksi Jalan
- Pembangunan Jembatan
- Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

12. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 - Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 - Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
 - Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 - Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
 - Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
 - Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 - Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
 - Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat dilaksanakan dengan Skema KPDBU

- Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
- 3. Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai PeraturanPerundang-Undangan
 - Pengawasan dan Evaluasi Tetib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa KonstruksiPada APBD Provinsi
 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota

URUSAN : PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

13. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau RelokasiProgram Provinsi
 - Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

14. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Penyusunan Rencana Tapak Site (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15

(Lima Belas) Ha

- Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

15. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
 - Penyediaan PSU di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

URUSAN : PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUB UNIT ORGANISASI : UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Alat Besar
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
 - Rehabilitasi Kanal Banjir
 - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Pembuangan Irigasi
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder

pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

3. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan

SUB UNIT ORGANISASI : UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Alat Besar
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi

- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan

**SUB UNIT ORGANISASI : UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM WILAYAH III**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Meubel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi
- Rehabilitasi Jalan
 - Pemeliharaan Rutin Jalan
 - Pemeliharaan Rutin Jembatan

SUB UNIT ORGANISASI : UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan bahan Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1. Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi

Program Unggulan

Pelaksanaan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 merupakan wujud nyata dari inovasi daerah yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan sekaligus menjadi janji politik yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Terdapat 2 (dua) program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yaitu program unggulan Gratispol dan Jospol. Kedua program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, dan sektor infrastruktur. Pelaksanaan program unggulan dimaksud juga menjadi bagian penting dari upaya pelaksanaan Trisula Pembangunan Daerah yakni penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berikut Program Unggulan yang dilaksanakan pada Tahun 2026.

A. Program Unggulan Gratispol (Gaspol 6)

Yaitu Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah, yang membuka kesempatan bagi setiap penduduk untuk dapat memiliki rumahnya sendiri. Kegiatan unggulan ini memiliki semangat untuk mengurangi backlog¹ kepemilikan rumah dan mendukung program 3 juta rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Kelompok sasaran dari kegiatan unggulan ini diutamakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)². Kegiatan unggulan ini juga menyasar kepada segmen anak muda dan pengusaha pemula yang hendak memiliki rumah. Instrumen utama yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah (seperti biaya provisi, biaya notaris, biaya akta jual beli, biaya appraisal, biaya balik nama sertifikat, dll). Secara bertahap kegiatan unggulan ini rencana juga akan dikembangkan pada instrumen down payment (DP) 0% dengan angsuran kredit yang sangat rendah. Pemerintah akan

memberikan dukungan berupa pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, sehingga biaya penyediaan rumah menjadi lebih murah.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah adalah Program Pengembangan Perumahan.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2026
1.	Tersedianya rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan segmen anak muda/ pengusaha pemula	Jumlah penerima manfaat gratis biaya administrasi kepemilikan rumah	2.000 orang

B. Program Unggulan Jospol (Jospol 1, Jospol 6 dan Jospol 7

No.	Indikasi Kegiatan	Keterangan
1.	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Veteriner	Jospol-1
2.	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Kutai Barat	Jospol-6
3.	Pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II (Pembangunan Parkir dan pekerjaan fisik)	Jospol-6
4.	Pembangunan Jalan Tering - Ujoh Bilang	Jospol-7
5.	Pembangunan Jalan Long Bagun Seberang - Long Boh (Batas Kaltara)	Jospol-7
6.	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Nibung - Simp. KM. 46	Jospol-7
7.	Pembangunan Waterfront and Riverside Road (Selili - Jembatan Mahkota II)	Jospol-7
8.	Pembangunan Jalan Sumbu IKN / Sotek -Bongan	Jospol-7
9.	Pembangunan Gedung Terminal Bandara Ujoh Bilang	Jospol-7
10.	Kegiatan peningkatan/rahabilitasi ruas jalan Provinsi	Jospol-7

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Uraian Garis Besar Tentang Pertimbangan Rumusan dan Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Serta Penjelasan Pendanaan dan Kesesuaian Dengan RKPD

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka pencapaian visi dan misi yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum. Pembangunan wilayah di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur pada dasarnya merupakan upaya untuk pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan Arah kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan penentuan pilihan program kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang. Lebih lanjut, isi dan substansi dari Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

Pendanaan Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sesuai Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebesar **Rp. 2.921.092.915.000** mencakup 2 (dua) Urusan, 31 (tiga puluh satu) Program, 67 (enam puluh tujuh) Kegiatan Sub Kegiatan pada 5 Sub Unit Organisasi , UPTD PIPU Wilayah I, UPTD PIPU Wilayah II, UPTD PIPU Wilayah III dan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi. Penyusunan pendanaan , perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program yaitu dengan menetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut maka dialokasikan pagu

dana dimana, pagu dana dan target merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

823

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II						71.500.000.000,00							90.012.505.900,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						71.500.000.000,00							90.012.505.900,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						71.500.000.000,00							90.012.505.900,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				100%	5.128.975.757,00						-	13.396.019.653,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	-			100 %	474.485.480,00			-	4. Memban gun Infratruktur Konektivita s	ASN	-	567.020.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	437.880.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratruktur Konektivita s	ASN		503.040.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	14.188.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratruktur Konektivita s	ASN		17.980.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	6.629.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratruktur Konektivita s	ASN		10.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

-824-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	15.787.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		36.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan</i>	-			100 %	335.301.300,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah	-	6.028.232.428,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	7.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		12.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	316.378.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		5.998.232.428,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	11.918.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		18.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</i>	-			100 %	472.893.000,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN	-	1.116.298.250,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	240.450.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		489.860.250,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

-825-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	3.336.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		15.282.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	11.907.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		17.756.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				15 Orang	96.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		248.400.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				15 Orang	120.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		345.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</i>	-			100 %	1.080.298.323,00			-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN	-	1.613.735.040,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	21.013.604,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		12.261.532,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	351.519.009,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		484.057.669,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

-826-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	355.632.993,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		334.879.191,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	39.116.677,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		37.258.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	15.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		13.200.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	280.188.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		704.184.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	9.539.040,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		13.594.648,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	8.289.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		14.300.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	1.168.109.604,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah	-	1.877.376.200,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

-827-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		12.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	413.429.604,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		301.482.200,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	742.680.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		1.563.894.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i>	-			100 %	1.597.888.050,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah	-	2.193.357.735,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				34 Unit	223.772.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		337.872.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>				32 Unit	989.443.300,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		1.200.861.735,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				139 Unit	49.520.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		49.520.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

-828-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	335.152.750,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		605.104.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir				11,42%	6.000.000.000,00						-	8.249.996.500,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhabilitasi Pada wilayah Kerja UPTD II	-			1 Unit	1.000.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Masyarakat	-	1.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.02.1.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Masyarakat		1.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

-829-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik pada Wilayah Kerja UPTDII</i>	-			7500 Meter	5.000.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	7.249.996.500,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				25 KM	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		7.249.996.500,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
3.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase primer dalam kondisi baik				12,16%	5.000.000.000,00						-	7.999.914.000,00	

-830-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	<i>Panjang Drainase Primer yang Berfungsi Baik pada Wilayah Kerja UPTDII</i>	-			20000 Meter	5.000.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	7.999.914.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>				9 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		7.999.914.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
4.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan				89,84%	55.371.024.243,00						-	60.366.575.747,00	

-831-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	<i>Panjang jalan yang direhabilitasi dan dipelihara tetap dalam kondisi mantap pada wilayah kerja UPTD II</i>	-			22 Km	55.371.024.243,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirousah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	60.366.575.747,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				10 KM	32.371.024.243,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirousah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		29.975.761.600,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														

-832-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin</i>				12 KM	13.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		17.820.762.647,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			<i>Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				22000 Meter	10.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		12.570.051.500,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI						6.100.000.000,00							6.193.993.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.100.000.000,00							6.193.993.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						6.100.000.000,00							6.193.993.000,00	

-833-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				1	5.801.816.000,00						-	5.518.696.200,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	-			100 %	147.494.570,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN	-	220.840.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	106.440.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		120.840.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2.980.534,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2.866.242,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	11.168.507,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		30.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	24.039.287,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		20.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

-834-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	-			100 %	8.281.740,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah	-	65.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.448.580,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.916.580,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		20.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.916.580,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		20.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-			100 %	612.579.162,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN	-	317.856.200,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	331.476.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		227.856.200,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	6.307.277,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

-835-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	4.795.885,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	270.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	-	ASN		40.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</i>	-			100 %	2.260.302.331,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah	-	1.715.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	49.976.441,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		50.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	185.855.515,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		40.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				8 Paket	1.318.031.833,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		200.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	60.316.340,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		50.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

-836-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	132.056.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		100.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				2 Paket	95.851.754,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		130.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	402.304.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		1.100.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	7.256.712,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		20.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	8.653.736,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i>	-			100 %	733.147.950,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah	-	500.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				62 Unit	733.147.950,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		500.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

-837-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	810.145.142,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah	-	855.883.600,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	23.060.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	418.805.142,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		390.123.600,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	368.280.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		440.760.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i>	-			100 %	1.229.865.105,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah	-	1.844.116.400,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				14 Unit	163.950.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		225.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	229.220.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		100.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

-838-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	836.695.105,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		1.519.116.400,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
2.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi				63,34%	298.184.000,00						-	675.296.800,00	
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	<i>Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi</i>	-			2 Dokumen	298.184.000,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	675.296.800,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk</i>				110 Bangunan Konstruksi	298.184.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		675.296.800,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT						2.733.792.915.000,00							1.243.884.112.058,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.733.792.915.000,00							1.243.884.112.058,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2.599.931.005.418,00							1.223.607.686.058,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindakanjuti				77 100%	142.333.766.461,00						-	156.097.442.475,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu</i>	-			100 %	849.800.000,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah	-	1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	339.368.538,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

-839-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	75.131.532,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	63.152.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	104.609.451,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	267.538.471,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	-			100 %	123.117.558.874,00			-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN	-	124.378.809.470,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11648 Orang/ Bulan	121.960.121.470,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		121.960.121.470,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	1.097.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		2.018.688.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

-840-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	5.554.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	24.155.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	9.965.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	20.601.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan</i>	-			100 %	779.131.259,00			-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah	-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	7.459.925,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	764.368.814,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

-841-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	7.302.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</i>	-			100 %	712.078.830,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN	-	1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	596.165.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	9.973.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	10.716.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				100 Orang	53.222.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

-842-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</i>	-			100 %	3.780.857.814,00			-	4. Memban gun Infratruktur Konektivita s	Perangkat Daerah	-	2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	93.439.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratruktur Konektivita s	Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				11 Paket	2.159.742.442,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratruktur Konektivita s	Perangkat Daerah		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	93.313.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratruktur Konektivita s	Perangkat Daerah		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	261.841.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratruktur Konektivita s	Perangkat Daerah		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	199.283.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratruktur Konektivita s	Perangkat Daerah		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	883.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratruktur Konektivita s	Perangkat Daerah		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

-843-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	23.961.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	65.677.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i>	-			100 %	129.088.002,00			-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah	-	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	39.877.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	89.211.002,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	8.978.129.955,00			-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah	-	21.318.633.005,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	56.837.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	3.012.452.955,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		3.050.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

-844-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	5.908.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		18.168.233.005,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i>	-			100 %	3.987.121.727,00			-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah	-	4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				30 Unit	1.565.472.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				7 Unit	676.681.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				1 Unit	26.894.007,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	1.277.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	440.084.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kapasitas air baku untuk air bersih Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir Persentase luas layanan irigasi multikomoditas				12115 Liter/detik 14,50% 17,62% 37,12%	162.894.336.008,00						-	141.757.569.592,00	

-845-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	-			1 Unit 16935 Meter 6 Lokasi	113.055.122.293,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	98.417.642.607,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				16,3 KM	51.795.045.158,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		36.146.110.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														

-846-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi</i>				4 Dokumen	367.292.540,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		349.956.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan</i>				7 Lembaga	3.634.757.793,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		4.816.011.671,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0094	Peningkatan Tanggul Sungai														

-847-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan</i>				0,63 KM	2.001.296.430,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														

-848-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				12 Dokumen	6.667.091.520,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		6.597.339.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														

-849-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				8 Dokumen	4.866.362.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		2.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku														
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				1 Unit	5.948.712.204,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Kanaan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		14.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai														

-850-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun</i>				1,15 KM	37.305.752.838,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		32.949.230.886,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi</i>				12 Dokumen	468.811.810,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		758.995.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

-851-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik</i>	-			52699 meter	49.839.213.715,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	43.339.926.985,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun</i>				1,07 KM	3.836.512.340,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa														

-852-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun</i>				12,29 KM	3.853.342.150,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>				3,82 KM	13.654.875.400,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa														

-853-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan</i>				7,03 KM	2.204.752.140,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				4,89 KM	17.608.593.550,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		31.709.440.985,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa														

-854-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi</i>				24,66 KM	7.577.271.135,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		10.225.302.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i>				6 Dokumen	1.103.867.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		1.405.184.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota				8,62%	118.224.260.800,00						-	125.717.600.773,00	

-855-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Minum Regional</i>	-			34,90 %	118.224.260.800,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	125.717.600.773,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota														

-856-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				10 Kabupate n/Kota	289.782.220,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														

-857-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				250 Liter/Detik	88.441.478.000,00	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		96.723.080.773,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara				1 Unit	22.210.249.490,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														

-858-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>				7 Kabupaten/ Kota	278.841.090,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		364.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun</i>				3 Dokumen	6.652.910.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		3.430.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.1.01.0026	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

-859-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				1 Lembaga	351.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional				0,40%	1.351.410.000,00						-	1.279.237.600,00	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	<i>Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional</i>	-			5,70 %	1.351.410.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	1.279.237.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan														

-860-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan</i>				30 Orang	200.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun</i>				1 Dokumen	1.150.910.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		1.029.237.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak				7,00%	3.073.294.900,00						-	3.172.911.243,00	

-861-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	<i>Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Limbah Domestik Regional</i>	-			12,10 %	3.073.294.900,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	3.172.911.243,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>				2 Dokumen	1.795.406.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		1.586.063.343,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota														

-862-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				2 kabupaten/kota	65.661.090,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota														

-863-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				10 Kabupaten/Kota	848.229.980,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		922.327.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.1.01.0023	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

-864-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>				30 Orang	363.997.830,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirousah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		414.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik				12,16%	35.020.228.975,00						-	35.815.804.375,00	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	<i>Panjang Drainase Primer yang Berfungsi Baik</i>	-			563,49 Meter	35.020.228.975,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirousah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	35.815.804.375,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														

-865-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>				6 Sistem Drainase Perkotaan	31.814.507.975,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		33.065.804.375,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan</i>				6 Dokumen	3.205.721.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		2.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
7.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGA NPERMUKIMAN	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik				89,88%	48.002.963.500,00						-	3.000.000.000,00	

-866-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	<i>Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi</i>	-			45,45 %	48.002.963.500,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.07.1.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi</i>				2 Unit	44.822.128.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.07.1.01.0039	Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi														

-867-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.</i>				50 Rumah Tangga	3.180.835.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
8.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik				79,08%	794.229.456.840,00						-	720.512.120.000,00	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	<i>Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang dilaksanakan</i>	-			30 %	794.229.456.840,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	720.512.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat														

-868-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat</i>				30 Orang	87.721.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan</i>				46 Bangunan Gedung	770.957.717.180,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		705.812.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek														

-869-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang</i>				30 Lisensi	281.468.350,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</i>				49 Dokumen	22.902.549.410,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		14.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
9.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan				20.98%	822.760.000,00						-	0,00	

-870-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Yang Dilaksanakan</i>	-			8,57 %	822.760.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.09.1.01.0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	735.167.500,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.09.1.01.0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota														

-871-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				10 kabupate n/kota	87.592.500,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
10.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan				89,84%	1.273.274.533.385,00						-	0,00	

-872-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	<i>Panjang Jalan Prioritas Provinsi yang telah dibangun Panjang jalan yang direkonstruksi menjadi mantap</i>	-			36,3 Km 843,46 Km	1.273.274.533.385,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>				62,40 KM	530.158.685.453,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

-873-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>				18 Dokumen	31.938.217.684,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

-874-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>				938,85 KM	2.989.624.375,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan														
			<i>Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola</i>				1 Dokumen	4.040.524.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar														

-875-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar</i>				3,5 KM	20.202.701.450,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi														
			<i>Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi</i>				65,90 KM	48.322.577.522,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan														

-876-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang jembatan yang dibangun				50 Meter	105.807.862.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				24.30 KM	529.814.339.726,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), PKB	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
11.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				51,68%	3.972.400.000,00						-	25.155.000.000,00	

-877-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	<i>Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat</i>	-			500 Orang	2.748.187.938,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat	-	15.955.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi														
			<i>Jumlah Instruktur/Asesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan</i>				48 Orang	184.465.546,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														

-878-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				1 Dokumen	36.800.466,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														

-879-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				500 Orang	1.055.279.720,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														

-880-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				11 Lembaga	243.280.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			<i>Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan</i>				3 Dokumen	27.800.466,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														

-881-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				500 Orang	1.131.561.232,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														

-882-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya</i>				400 Orang	45.400.042,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya</i>				1 Lembaga	23.600.466,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		205.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

-883-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	<i>Jumlah layanan yang disediakan</i>	-			1 Layanan	237.799.838,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat	-	1.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			<i>Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan</i>				1 Layanan Informasi	21.846.838,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														

-884-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan</i>				1 Perangkat Pendukung	123.537.650,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan</i>				1 Dokumen	32.028.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI														

-885-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				60 Orang	60.386.550,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	<i>Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi</i>	-			2 Dokumen	986.412.224,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat	-	7.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														

-886-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan</i>				200 Paket Pekerjaan	315.364.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk</i>				100 Bangunan Konstruksi	74.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														

-887-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk</i>				11 Lembaga	462.047.260,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		3.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha</i>				100 Badan Usaha	87.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi														

-888-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun</i>				1 Dokumen	47.200.134,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	Masyarakat		1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
12.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang				79,04% 84,94%	16.731.594.549,00						-	11.100.000.000,00	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	<i>Persentase Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</i>	-			16,21 %	1.551.300.000,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi</i>				1 Dokumen	1.352.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang														
			<i>Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi</i>				100 Orang	199.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

-889-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</i>	-			22,62 %	5.577.713.820,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	2.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat</i>				1 Laporan	311.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang														
			<i>Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</i>				80 Orang	197.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	203.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0007	Penyusunan RTRW Provinsi														
			<i>Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi</i>				1 Dokumen	3.328.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	428.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0010	Penyusunan Peta Dasar														
			<i>Jumlah data SHP Peta Dasar</i>				1 Peta	790.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota														

-890-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota</i>				3 Berita Acara	318.513.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</i>	-			26,35 %	5.609.676.434,00			-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Masyarakat	-	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha														
			<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>				1 Layanan	292.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Masyarakat		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			<i>Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang</i>				2 Laporan	1.722.290.389,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Masyarakat		1.510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha														
			<i>Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>				1 Layanan	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Masyarakat		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>				2 Dokumen	2.785.022.045,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Masyarakat		320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>				2 Dokumen	490.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Masyarakat		510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	<i>Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</i>	-			19,76 %	3.992.904.295,00			-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Masyarakat	-	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

-891-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1 7
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>				3 Dokumen	1.232.477.817,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		1.380.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang														
			<i>Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatanRuang</i>				4 Kasus	796.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		740.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
			<i>Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan PelaksanaanPenataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat</i>				1 Dokumen	480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		460.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.04.0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR														
			<i>Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif</i>				1 Kasus	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		640.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR														
			<i>Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil PenilaianPerwujudan RTR</i>				1 Dokumen	943.848.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		460.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			<i>Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan KesesuaianKegiatan Pemanfaatan Ruang</i>				1 Dokumen	290.228.478,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						133.861.909.582,00							20.276.426.000,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Jumlah Penerima Manfaat Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah				100% 100% 2000 orang	20.970.000.000,00						-	970.000.000,00	

-892-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1 7
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Provinsi yang terdata untuk memperoleh rumah layak huni</i>	-			2 Dokumen	200.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi														

-893-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	<i>Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan/atau masyarakat yang terkena relokasi program provinsi yang dibangun dan direhab</i>	-			4 Unit Rumah	400.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														

-894-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi</i>				2 Unit Rumah	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun</i>				1 Unit Rumah	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi														

-895-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi</i>				1 Unit Rumah	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Provinsi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan</i>	-			2 Laporan	20.370.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	370.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan														

-896-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan</i>				2 Laporan	20.370.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		370.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya luasan kawasan kumuh 10-15 Ha				31,43%	52.397.023.278,00						-	19.306.426.000,00	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman</i>	-			2 Laporan	908.866.300,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														

-897-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman</i>				2 Laporan	908.866.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	<i>Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi</i>	-			419,19 Ha	51.488.156.978,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	19.306.426.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														

-898-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				516 Unit Rumah	19.756.426.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		19.306.426.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														

-899-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				13 Laporan	3.584.796.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														

-900-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Unit Rumah	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar				16,41 Ha	27.946.934.978,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				33,27%	60.494.886.304,00						-	0,00	

-901-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	<i>Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman</i>	-			30 Lokasi	60.494.886.304,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman														
			<i>Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan</i>				10 Lokasi	13.318.779.276,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman														

-902-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum</i>				20 Lokasi	47.176.107.028,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I						54.000.000.000,00							77.607.767.920,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						54.000.000.000,00							77.607.767.920,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						54.000.000.000,00							77.607.767.920,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				100%	5.459.420.603,00						-	5.387.335.920,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu</i>	-			100 %	430.518.934,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN	-	302.480.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	410.520.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		282.480.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

-903-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4 Dokumen	4.999.495,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	5.000.107,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	4.999.512,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	4.999.820,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan</i>	-			100 %	19.900.575,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah	-	20.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

-904-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.263,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	9.900.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		10.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

-905-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	4.999.512,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</i>	-			100 %	183.219.402,00			-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN	-	388.245.527,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	61.614.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		22.977.500,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				4 Dokumen	4.999.993,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	5.005.409,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

-906-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	55.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		227.268.027,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	55.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		128.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</i>	-			100 %	599.055.024,00			-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah	-	1.120.788.473,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	33.297.725,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		25.197.473,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	108.042.678,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		48.200.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	30.488.181,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		28.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	81.947.085,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		161.277.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

-907-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	39.113.855,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		34.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	9.900.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		10.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	284.394.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		804.114.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	7.675.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	4.196.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i>	-			100 %	7.434.602,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah	-	112.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	7.434.602,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		112.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I

-908-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	1.843.652.870,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah	-	1.999.999.920,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		10.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	471.172.870,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		180.808.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.362.480.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		1.809.191.920,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i>	-			100 %	2.375.639.196,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah	-	1.443.822.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				22 Unit	500.917.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		158.902.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>				17 Unit	686.300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		686.300.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

-909-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	83.221.081,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		85.120.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				1 Unit	5.483.515,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	1.099.717.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		508.500.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas				35,22%	6.540.600.300,00						-	9.824.000.000,00	
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik pada Wilayah Kerja UPTDI</i>	-			12997 Meter	6.540.600.300,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	9.824.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														

-910-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				1 KM	764.389.200,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		5.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				4.5 KM	2.588.669.100,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		2.177.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														

-911-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				3 KM	3.187.542.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Masyarakat		2.647.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan				89,84%	41.999.979.097,00						-	62.396.432.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	<i>Panjang jalan yang direhabilitasi dan dipelihara tetap dalam kondisi mantap pada wilayah kerja UPTD I</i>	-			29 Km	41.999.979.097,00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Masyarakat	-	62.396.432.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														

-912-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				13 KM	13.705.044.195,09	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		10.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin</i>				15 KM	25.294.940.665,91	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		50.396.432.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

-913-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				300 Meter	2.999.994.236,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		2.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III						66.500.000.000,00							78.554.386.715,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						66.500.000.000,00							78.554.386.715,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						66.500.000.000,00							78.554.386.715,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				100%	4.546.751.260,00						-	6.896.946.715,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu</i>	-			100 %	281.553.860,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN	-	505.901.980,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				4 Dokumen	236.520.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		468.990.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

-914-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	9.240.140,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		9.240.140,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	12.912.140,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		12.912.140,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	9.688.940,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		9.688.940,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	13.192.640,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	ASN		5.070.760,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan</i>	-			100 %	231.835.530,00			-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah	-	207.878.760,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	14.952.140,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		4.820.760,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	207.125.600,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		198.033.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

-915-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	9.757.790,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		5.025.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</i>	-			100 %	211.769.280,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN	-	210.717.120,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	122.702.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		38.487.120,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	9.673.640,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		4.950.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	5.473.640,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		4.950.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	36.960.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		75.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				4 Orang	36.960.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	ASN		87.330.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

-916-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</i>	-			100 %	688.614.229,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah	-	1.014.026.855,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	36.704.240,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		34.429.600,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	87.572.583,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		63.434.016,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	24.147.230,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		61.776.500,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	67.080.121,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		48.441.908,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	59.793.845,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		59.298.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	6.051.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		47.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

-917-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	385.200.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		727.800.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	16.524.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		14.200.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	5.541.210,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		4.599.831,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	1.533.648.061,00			-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah	-	3.515.400.600,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	43.192.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		3.319.200,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	234.757.817,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Membangun Infratraktur Konektivitas	Perangkat Daerah		226.689.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

-918-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	34.938.244,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		1.385.200,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.220.760.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		3.284.007.200,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i>	-			100 %	1.599.330.300,00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah	-	1.443.021.400,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	67.000.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		76.300.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>				16 Unit	892.120.300,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		802.947.300,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				66 Unit	62.630.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		64.475.100,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	577.580.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PAJAK DAERAH	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Perangkat Daerah		499.299.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas				35,22%	7.000.000.000,00						-	7.000.000.000,00	

-919-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik pada Wilayah Kerja UPTD III</i>	-			85300 Meter	7.000.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	7.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				3,5 KM	2.000.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		2.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

-920-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				81,8 KM	5.000.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		5.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan				89,84%	54.953.248.740,00						-	64.657.440.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	<i>Panjang jalan yang direhabilitasi dan dipelihara tetap dalam kondisi mantap pada wilayah kerja UPTD III</i>	-			55,95 Km	54.953.248.740,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat	-	64.657.440.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														

-921-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				0.25 KM	3.719.270.200,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		3.410.440.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin</i>				55.7 KM	49.233.978.540,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		59.247.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

-922-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				496,5 Meter	2.000.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s	Masyarakat		2.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	J U M L A H							2.931.892.915.000,00							1.496.252.765.593,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan dan target tahun 2026.

Berdasarkan tema RKPD provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 :

**“Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta
Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai Fondasi Kaltim Sukses
Menuju Generasi Emas”**

Penyusunan Rancangan Renja tahun 2026, dilakukan melalui berbagai tahapan dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, memuat program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Merupakan rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

RENJA TAHUN 2026 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir dan;
- f. Penetapan.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan RKPD 2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah dan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan itash alive dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rancangan RENJA Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

I.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

I.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

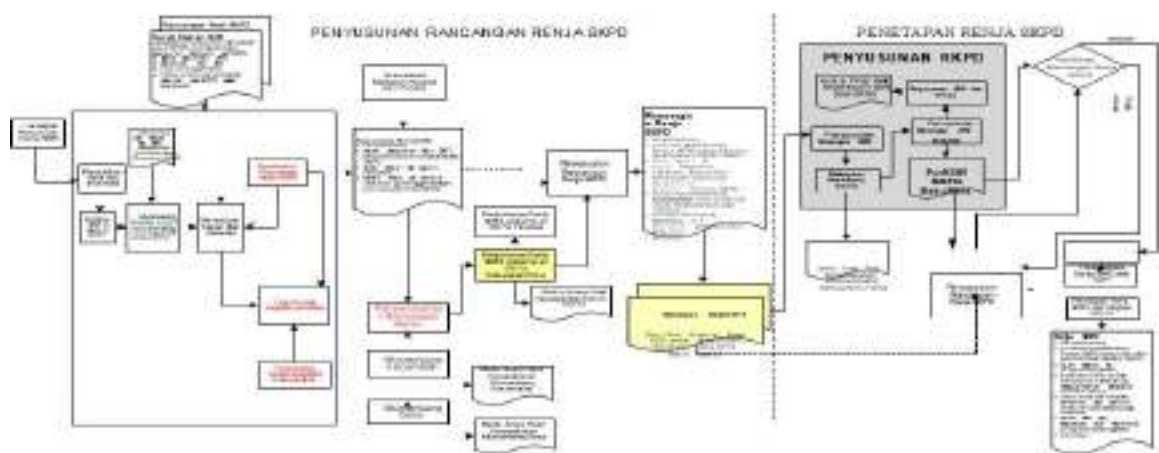
Rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. Urusan Pemerintahan wajib yang Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar mengacu pada SPM Trantibumlinmas sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan;
- d. Peningkatan Nilai Akuntabilitas Satpol PP

Penyusunan Rancangan Renja dimulai dengan melakukan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Rencana Kerja PD



I.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

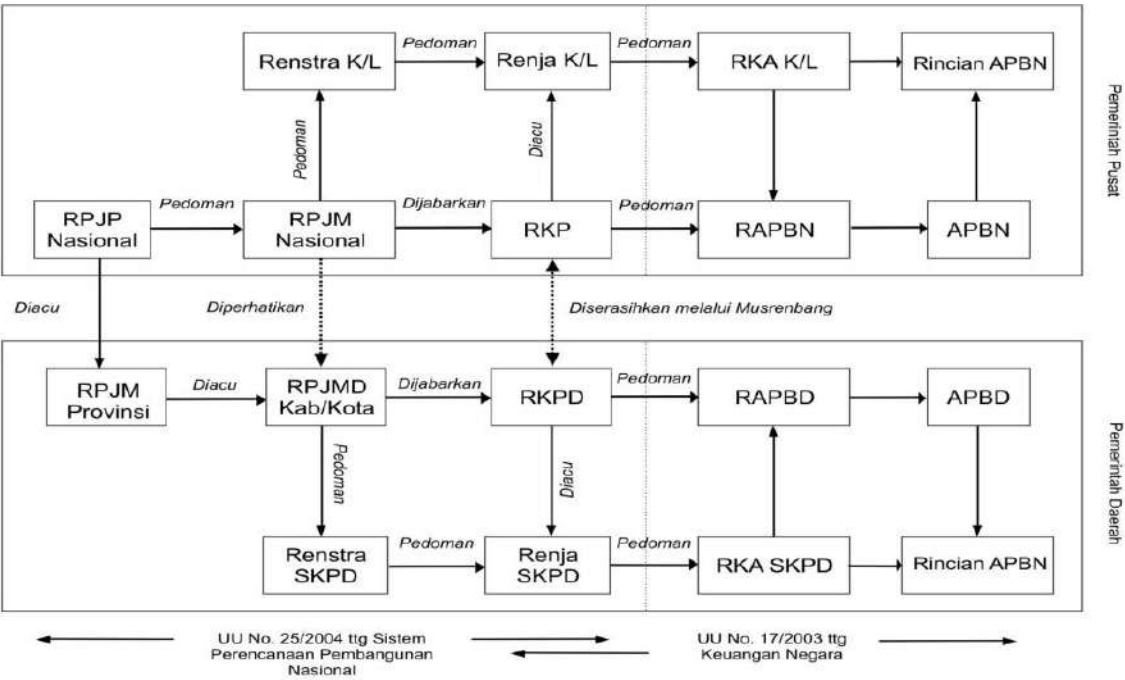
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Renstra Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Pada lingkup pemerintahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Gambaran tentang hubungan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 meliputi:

- Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.
- Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
- Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Ketentuan Tentang Penilaian SAKIP
- Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

l.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- o. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata kerja Perangkat Daerah.

Berikut akan disampaikan Susunan, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

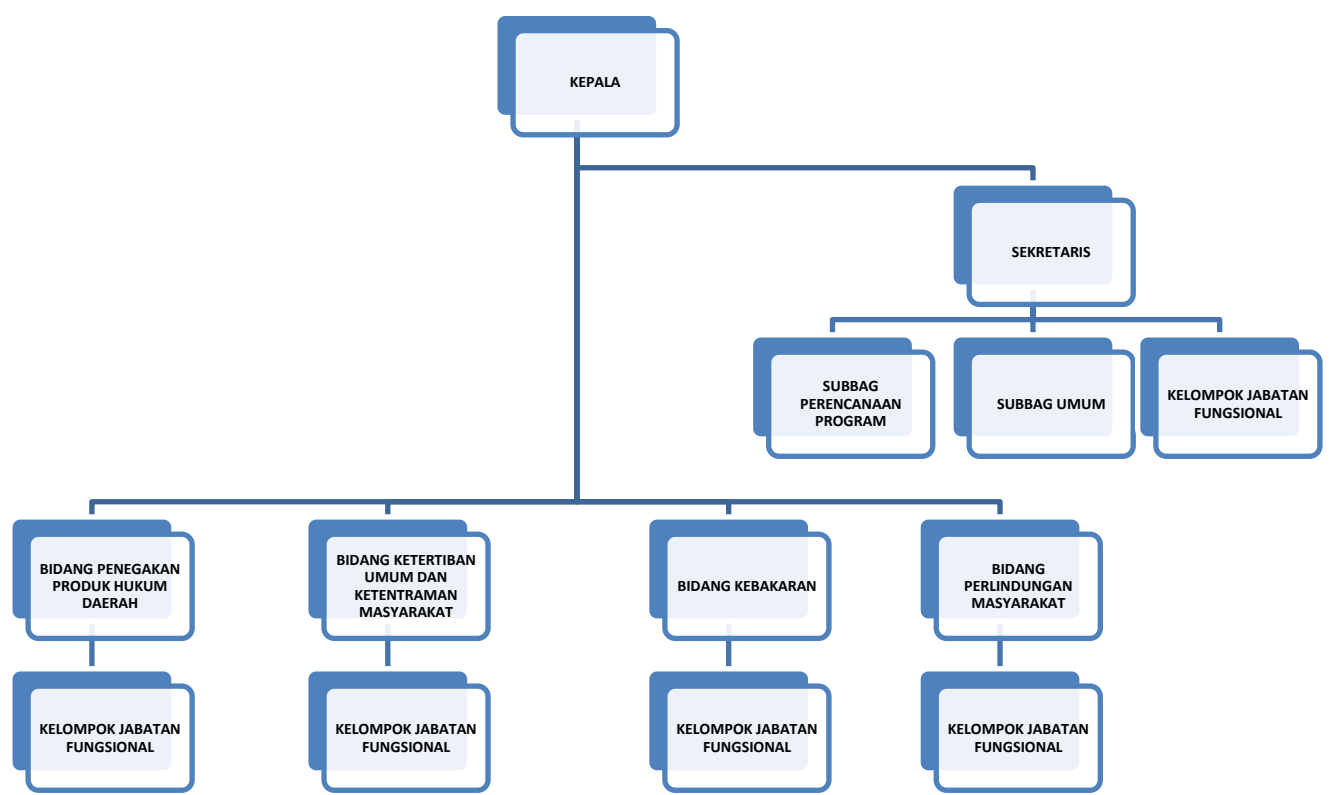
Susunan Organisasi Satuan terdiri atas :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretariat, membawahkan;
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahkan Kelompok Jabatan fungsional;
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan Kelompok Jabatan fungsional;
5. Bidang Kebakaran membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS FUNGSI
DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

Bagan 1.3

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Uraian Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah
- b. Perencanaan, Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penegakan produk hukum daerah;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kebakaran;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Adapun yang menjadi tugas pokok dari pejabat struktural pada bagan struktur organisasi, sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

a) Tugas Pokok :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan

kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

b) Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian, kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 4) Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang penegakan produk hukum daerah;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 7) Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang kebakaran;
- 8) Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat;
- 9) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 10) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya

2. Sekretaris.

a) Tugas Pokok.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

b) Fungsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris berfungsi :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring evaluasi, dan pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
- 4) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkaitan dengan tugasnya.

- Kepala Sub Bagian Perencanaan Program.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

- Kepala Sub Bagian Umum.

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

3. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

a) Tugas Pokok.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, serta pengembangan teknis bidang penegakan produk hukum daerah.

b) Fungsi.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah berfungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan produk hukum daerah;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi, perencanaan program bidang penegakan produk hukum daerah;
- 3) Penyiapan bahan bimbingan, pengendalian, kebijakan dan pengaturan teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, kebijakan dan pengaturan teknis penyelidikan dan penyidikan;
- 5) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang penegakan produk hukum daerah;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

a) Tugas Pokok.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian serta pengembangan teknis bidang ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat.

b) Fungsi.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berfungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis operasional dan pengendalian;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengamanan dan pengawalan protokoler;
- 5) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan operasional dan pengendalian serta pengamanan dan pengawalan protokoler dan;
- 7) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Kepala Bidang Kebakaran.

a) Tugas Pokok.

Kepala Bidang Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, serta pengembangan teknis bidang kebakaran.

b) Fungsi.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kebakaran berfungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perlindungan bencana kebakaran;

- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang kebakaran;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pencegahan dan pengendalian;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pelatihan dan pembinaan;
- 5) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang kebakaran;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian serta pelatihan dan pembinaan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

a) Tugas Pokok.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian teknis bidang perlindungan masyarakat

b) Fungsi.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat berfungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi, perencanaan program bidang perlindungan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bina potensi masyarakat;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis satuan perlindungan masyarakat;

- 5) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang perlindungan masyarakat;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bina potensi masyarakat serta satuan perlindungan masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkaitan dengan tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Saat ini sudah terbentuk Kelompok Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang mewadahi JFT Pol.PP Ahli dan JFT Pol.PP Terampil;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki Tim Penilai Angka Kredit JFT Pol.PP berdasarkan SK Gubernur .

1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.

Peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

1.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur pengampu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan tempat permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri telah membuat Petunjuk Teknis Pemenuhan SPM yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten Kota. Serta Dalam upaya Penerapan dan Peningkatan capaian mutu pelayanan Dasar dan Capaian penerima layanan dasar terhadap target dan indikator Kinerja Pencapaian SPM dituangkan kembali kedalam Peraturan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 1.4
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

TARGET CAPAIAN KINERJA (SPM) URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				Satuan Kerja / Lembaga Penanggung Jawab	
	Indikator	Komponen		Nilai		
1	2	3		4		5
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pencapaian penerima Layanan dasar	Jumlah yang harus dilayani		80	%	Satpol PP Prov.Kaltim
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar	1.	Standar Sarana Prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara	20	%	
		2.	Standar Operasional prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara			
		3.	Standar Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan Satlinmas yang telah mengikuti peningkatan Kapasitas SDM			
		4.	Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat Penegakan hukum Pelanggaran perda dan perkara terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum,perumahan pemukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal			
		5.				

		6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil		
		7.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan		

I.2.4 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan upaya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Kunci	Rumus Perhitungan
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\Sigma = \frac{\text{Jumlah Pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$
2	Persentase Perda dan perkada yang ditegakan	$\Sigma = \frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$

I.2.5 Ketentuan Indikator Lainnya terkait Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur tidak masuk dalam program yang tercantum dalam MDG's

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau

acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah untuk memberikan gambaran keselarasan, konsistensi Rencana Strategis 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur, mulai dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator serta target yang telah ditetapkan tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- a. Terwujudnya capaian tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi Perencanaan Tahunan sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Sebagai pedoman, panduan dan arahan Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Indikator dan target selama kurun waktu satu tahunan.
- d. Menjadi tolak ukur keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja impact dan outcome dalam Renstra Perangkat Daerah.
- e. Sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN S.D 31 AGUSTUS 2025

Proses penyusunan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sesuai dengan diamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Startegis (Renstra) 2025-2029.

Rancangan Renja ini juga tidak lepas dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu yang mengacu pada hasil laporan kinerja/realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur ditunjang dengan Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dengan ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah itu sendiri adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk evaluasi perencanaan periode 1 tahun. Evaluasi pelaksanaan rencana yang dimaksud disini adalah evaluasi usulan program dan kegiatan Tahun 2025 didasarkan pada hasil penetapan APBD tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun Evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari hasil penetapan APBD dalam DPA Murni Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan mengacu pada pagu indikatif pada RKPD Tahun 2025 yang bisa dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini, serta dengan penjelasannya sebagai berikut:

TABEL 2.1.1 EVALUASI CAPAIAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALTIM TAHUN 2022

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi keuangan	%
1	2		3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		18,961,171,393	18,769,206,697	98.99
1	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280,469,414	279,540,100	98.99
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	254,254,414	253,504,100	99.67
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,215,000	26,036,000	99.32
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,398,349,959	12,281,652,743	99.06
	1	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	12,127,989,959	12,011.292,743	99.04
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270,360,000	270,360,000	100
	3	Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	297,000,000	293,393,520	98.79
	1	Peningkatan Saranadan Prasarana Disiplin Pegawai	249,600,000	246,629,420	98.81
	2	Koordinasi danPelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiana	47,400,000	46,764,100	98.66
	4	Administrasi Umum Perangkat daerah	712,895,000	702,357,484	98.52
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	5,100,000	5,070,000	99.41
	2	Penyediaan bahanLogistik Kantor	231,257,600	231,109,500	99.94
	3	Penyediaan barangCetakan dan Penggandaan	42,837,400	32,793,000	76.55
	4	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	433,700,000	433,384,984	99.93

	5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	351,035,100	326,311,000	92.96
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	351,035,100	326,311,000	92.96
	6	Kegiatan Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	4,397,356,904	4,372,865,688	99.94
	1	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173,141,000	169,801,908	98.07
	2	Penyediaan jasa Pelayanan Umum dan kantor	4,224,215,904	4,203,063,780	99.50
	7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524,065,016	513,086,162	97.91
	1	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	286,264,016	279,598,000	97.67
	2	Penyediaan jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	208,551,000	204,238,162	97.93
	3	PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainnya	29,250,000	29,250,000	100
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1,324,959,257	1,303,224,308	98.36
	8	Penanganan GangguanKetentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	902,971,257	896,730,809	99.31
	1	PencegahanGangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan Patroli, pengamanan dan pengawalan	418,494,000	418,343,691	99.96
	2	Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum berdasarkan Perda danperkada melalui Penerbitan dan Penanganan unjuk rasa dan kerusakan Massa	5,400,000	5,400,000	100
	3	Koordinasi penyelenggaraan Perlindunganmasyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban umum	114,600,000	114,555,314	99.96
	4	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi pamong Praja dan Satuan perlindunganmasyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	179,140,700	175,936,000	98.21

	5		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat -947-	1,041,000	655,000	64.60
	9		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	255.249.800	252,911,000	99.08
		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	94.821.800	94,303,900	99.45
		2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	60,370,000	60,008,400	99.40
		3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Dearah dan Peraturan Gubernur	100,058,000	98,598,700	98.54
	10		Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	166,738,200	153,582,499	92.11
		1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	47,292,000	40,327,557	85.27
		2	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	119,446,200	113,254,942	94.82
3			Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	264,202,000	245,839,775	93.05
	11		Penyelenggaraan Pemetaan rawan Bencana Kebakaran	264,202,000	245,839,775	93.05
		1	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah rawan Kebakaran dan peta rawan kebakaran	102,058,000	94,714,190	92.80
		2	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	86,988,000	83,181,795	95.62
		3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1,008,000	1,005,000	99.70
		4	Penyelenggaraankerjasama dan koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Non Kebakaran	74,148,000	66,938,790	90.28
			JUMLAH ANGGARAN	20,550,332,650	20,318,270,780	98.87

TABEL 2.1.2 EVALUASI CAPAIAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALTIM TAHUN 2023

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi keuangan	%
1	2		3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		24.857.604.704	23.407.289.224	99.90
1	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	780.935.280	768.729.849	99.99
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	284.776.000	279.144.820	100
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	496.159.280	489.585.029	100
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.212.099.930	12.991.607.633	100
	1	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	13.853.719.930	12.633.227.633	100
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	358.380.000	358.380.000	100
	3	Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	605.383.100	566.862.000	96.46
	1	Peningkatan Saranadan Prasarana Disiplin Pegawai	502.358.100	493.822.000	100
	2	Koordinasi danPelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiana	21.650.000	180.050.000	100
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.456.204.450	1.374.270.037	99.87
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	10.842.400	10.842.000	100
	2	Penyediaan bahanLogistik Kantor	125.810.472	118.915.549	99.99
	3	Penyediaan barangCetakan dan Penggandaan	32.887.000	29.125.000	100

	4	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	-949-	1.286.664.578	1.215.387.488	99.86
	5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		807.108.300	779.675.000	100
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		807.108.300	779.675.000	100
	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.920.879.844	5.864.188.747	100
	1	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		269.296.484	212.605.387	99.99
	2	Penyediaan jasa Pelayanan Umum dan kantor		5.651.583.360	5.651.583.360	100
	7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.074.993.800	1.061.955.958	100
	1	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		26.831.000	26.000.000	100
	2	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan		408.762.000	406.411.458	100
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		29.860.000	29.667.500	100
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			30.471.499.400	30.187.273.620	98.36
	8	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		29.362.335.200	29.099.537.166	99.31
	1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan Patroli, pengamanan dan pengawalan		2.210.978.000	2.137.552.522	99.96
	2	Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum berdasarkan Perda dan perkara melalui Penerbitan dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan Massa		259.200.000	258.422.044	99.96
	3	Koordinasi penyelenggaraan Perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban umum		26.097.733.400	25.921.250.998	99.32
	4	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi pamong Praja dan Satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia		752.405.600	750.707.282	99.77

	5	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat -950-		42.018.200	31.604.320	75.21
	9	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		833.288.150	771.303.801	99.06
		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	236.793.100	195.936.387	98.41
		2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	239.984.500	232.877.683	99.52
		3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Dearah dan Peraturan Gubernur	356.510.550	353.604.731	99.18
	10	Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		275.876.050	262.351.653	95.06
		1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	120.050.000	117.932.788	98.23
		2	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	155.826.050	144.318.865	92.61
3	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran			343.050.000	299.143.642	87.20
	11	Penyelenggaraan Pemetaan rawan Bencana Kebakaran		343.050.000	299.143.642	87.20
		1	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah rawan Kebakaran dan peta rawan kebakaran	112.200.000	99.467.519	88.65
		2	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	96.000.000	83.054.767	86.51
		3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	57.550.000	45.579.586	79.19
		4	Penyelenggara kerjasama dan koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Non Kebakaran	77.300.000	71.041.770	91.90
			JUMLAH ANGGARAN	55.672.154.104	53.893.706.486	96.80

TABEL 2.1.3 EVALUASI CAPAIAN RENJA TRIWULAN 4 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALTIM TAHUN 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Keu %	Fisik %	Sisa Dana
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	34.496.507.352	32.339.257.976	93,75	96,56	2.157.249.376
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.801.234.765	3.467.259.943	91,21	97,55	333.974.822
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.884.076.565	2.591.177.421	89,84	96,77	292.899.144
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	229.085.560	171.796.205	74,99	80,12	57.289.355
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	37.691.070	0	0,00	0,00	37.691.070
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.257.209.600	1.086.359.303	86,41	99,21	170.850.297
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	837.555.035	810.718.632	96,80	100,00	26.836.403
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	522.535.300	522.303.281	99,96	100,00	232.019
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	865.908.200	825.746.964	95,36	100,00	40.161.236
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	355.837.100	331.075.500	93,04	100,00	24.761.600
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	143.094.500	141.770.873	99,07	100,00	1.323.627
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	215.710.550	211.871.710	98,22	100,00	3.838.840
1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	151.266.050	141.028.881	93,23	100,00	10.237.169
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	51.250.000	50.335.558	98,22	100,00	914.442
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	51.250.000	50.335.558	98,22	100,00	914.442

1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	991.549.656	843.796.791	85,10	99,89	147.752.865
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	991.549.656	843.796.791	85,10	99,89	147.752.865
1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	144.202.400	103.888.276	72,04	99,26	40.314.124
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	153.057.000	128.730.700	84,11	100,00	24.326.300
1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	639.710.256	571.579.415	89,35	100,00	68.130.841
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	54.580.000	39.598.400	72,55	100,00	14.981.600
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.440.318.924	28.028.201.242	94,36	96,32	-587.882.318
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	986.510.181	831.418.307	84,28	100,00	155.091.874
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	162.247.156	147.960.250	91,19	100,00	14.286.906
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.965.000	12.465.000	96,14	100,00	500.000
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.965.000	12.835.000	99,00	100,00	130.000
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.424.000	49.330.000	84,43	100,00	9.094.000
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	739.909.025	608.828.057	82,28	100,00	131.080.968
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.294.550.380	15.771.875.816	96,79	98,54	522.674.564
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.651.178.280	15.253.471.305	97,46	98,48	397.706.975
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	379.440.000	274.380.000	72,31	100,00	105.060.000
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	196.980.000	181.645.611	92,22	100,00	15.334.389
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	66.952.100	62.378.900	93,17	100,00	4.573.200
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.011.092.500	976.853.566	96,61	98,80	34.238.934
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	928.533.400	916.950.000	98,75	100,00	11.583.400
1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	17.391.100	16.784.964	96,51	98,66	606.136

1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.168.000	43.118.602	66,17	81,71	22.049.398
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	974.141.067	921.049.008	94,55	96,62	53.092.059
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.842.400	10.814.677	99,74	100,00	27.723
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.456.667	146.775.300	83,65	88,94	28.681.367
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.887.000	18.230.000	55,43	59,33	14.657.000
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	754.955.000	745.229.031	98,71	99,98	9.725.969
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.877.595.250	1.803.150.000	96,04	100,00	-1.787.150.000
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.000.000	1.449.300.000	95,21	100,00	-1.433.300.000
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	353.850.000	99,57	100,00	-353.850.000
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.583.479.296	7.204.212.205	95,00	95,25	379.267.091
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	539.029.000	229.994.285	42,67	45,41	309.034.715
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.044.450.296	6.974.217.920	99,00	99,07	70.232.376
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.545.500	519.642.340	53,22	54,05	54.903.160
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.015.000	1.126.650	2,17	2,45	50.888.350
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	418.762.000	416.379.100	99,43	100,00	2.382.900
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.810.000	40.231.590	98,58	100,00	578.410
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.958.500	61.905.000	13,32	14,38	1.053.500

TABEL 2.1.4 EVALUASI CAPAIAN RENJA S.D 31 AGUSTUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALTIM TAHUN 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Keu %	Fisik %	Sisa Dana
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	42.599.495.945	18.278.882.894	42,90	43,59	24.324.935,051
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.961.576.744	1.212.321.255	61,80	62,39	749.255.489
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.473.369.723	839.314.593	56,97	57,70	634.055.130
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	308.062.652	114.704.495	37,23	38,33	193.358.157
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	123.165.590	76.076.934	61,77	61,81	47.088.656
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	700.000	0	0		700.000
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	530.070.350	259.885.754	49,03	49,64	270.184.596
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	511.371.131	388.647.410	76,00	76,81	122.723.721
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	439.607.021	325.594.200	74,12	74,19	113.762.821
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	241.219.540	204.391.400	84,73	84,79	36.828.140
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	61.583.375	47.214.400	76,67	76,71	14.368.975
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	66.659.000	50.674.800	76,02	76,10	15.984.200
1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	70.145.106	23.563.600	33,59	33,70	46.581.506
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	48.600.000	47.162.462	97,04	97,73	1.437.538
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	48.600.000	47.162.462	97,04	97,73	1.437.538

1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	384.751.230	185.001.816	48,08	50,13	199.749.414
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	384.751.230	185.001.816	48,08	50,13	199.749.414
1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	123.834.802	54.553.535	44,05	44,25	69.281.267
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	123.191.750	61.546.701	49,96	55,81	61.645.049
1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	83.145.000	46.736.180	56,21	56,61	36.408.820
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	54.579.678	22.165.400	40,61	40,81	32.414.278
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.253.167.971	16.881.559.823	41,93	42,61	23.375.930.148
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	648.460.374	363.360.220	56,03	57,63	285.100.154
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	291.482.696	176.991.500	60,72	64,01	11.491.196
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.874.570	3.657.500	94,40	100	217.070
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.424.570	3.657.500	43,41	45,99	4.767.070
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.640.848	13.163.100	23,24	23,77	43.477.748
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	288.037.690	165.890.620	57,59	57,61	122.147.070
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.408.643.808	12.767.838.659	37,11	37,78	21.640.805.149
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.844.898.568	12.464.176.374	36,83	37,50	21.380.722.194
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	348.950.000	170.100.000	48,75	48,80	178.850.000
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	146.905.140	99.812.285	67,94	71,05	47.092.855
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	67.890.100	33.750.000	49,71	49,96	34.140.100
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	391.035.700	6.450.000	1,65	1,67	384.585.700

1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	339.383.700	0	0		339.383.700
1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.660.000	0	0		15.660.000
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.992.000	6.450.000	17,92	18,16	29.542.000
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	757.871.829	414.018.251	54,63	55,61	343.853.578
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.875.742	10.875.742	100	100	0
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	254.269.390	83.225.106	32,73	34,38	171.044.284
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.192.697	9.995.000	39,67	43,41	15.197.697
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467.534.000	309.992.403	66,29	66,78	157.611.597
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	4.322.000
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	4.322.000
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.476.319.260	3.004.691.596	86,43	87,01	471.627.644
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.625.340	140.361.979	53,65	54,00	121.263.361
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.214.693.920	2.864.329.617	89,10	89,70	350.364.303
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.837.000	325.201.097	56,97	57,10	246.635.903
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.136.000	22.635.000	97,83	98,00	501.000
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	420.557.000	280.568.800	66,71	66,87	139.988.200
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.860.000	21.997.297	73,67	73,72	7.862.703

1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.284.000	0	0	0	97.284.000
-------------------	--	------------	---	---	---	------------

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian keseluruhan rencana kerja Satpol PP Prov. Kaltim pada tahun 2022 dan s.d 31 Agustus 2025 hampir semua memenuhi target. namun terdapat sub kegiatan yang belum mencapai target realisasi. Adapun faktor - faktor penyebab dapat diuraikan di bawah ini:

➤ Faktor Penghambat

Secara umum faktor penghambat pencapaian realisasi anggaran s.d triwulan II 2025 sebagai berikut :

1. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan perubahan pada rincian belanja
2. Perubahan jadwal kegiatan dan penyesuaian lokasi kegiatan
3. Pergeseran Anggaran yang masuk kedalam perubahan belum bisa dilaksanakan
4. Minimnya anggaran di dalam pelaksanaan kebutuhan teknis SPM

➤ Faktor Pendorong

Secara umum faktor pendorong pencapaian realisasi anggaran s.d triwulan II 2025 sebagai berikut :

1. Komitmen merealisasikan anggaran di triwulan berikutnya
2. Menyusun penyesuaian jadwal kegiatan
3. Penambahan anggaran pada Renja Perubahan untuk pencapaian target SPM

i. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan :

Pada triwulan ke-4 Tahun 2024 Dari 11 Kegiatan yang menjadi mandat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan telah *memenuhi target yakni mencapai 93,75%*

Namun ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi capaian target, adapun faktor-faktor penyebab dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya kelebihan perhitungan pada kegiatan Administrasi keuangan daerah sehingga menyebabkan silpa anggaran pada penyediaan gaji dan tunjangan
2. Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga harus menyesuaikan kembali
3. Kurangnya Peningkatan Kapasitas SDM pelaksana, sehingga perlu melakukan penyesuaian peningkatan kapasitas SDM

ii. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Dengan tercapainya program pada Triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2024 maka implikasi yang timbul adalah realisasi capaian kinerja tersebut sebagai dasar perencanaan kegiatan tahun depan.

iii. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

1. Melaksanakan rencana kerja agar tercapainya realisasi output kegiatan dan anggaran sesuai target;
2. Perencanaan anggaran diharapkan lebih lebih efisien dan efektif.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian Perangkat Daerah dan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai Tugas untuk Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, serta Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat, Sebagian isu-isu penting dalam penyelenggaran Tupoksi adalah :

- a. Program dan Kegiatan terkait SPM Trantibumlinmas yang sangat bervariasi di setiap Daerah sehingga mempersulit evaluasi capaian SPM baik di tingkat Provinsi maupun Nasional;
- b. Alokasi anggaran untuk SPM terkait Trantibumlinmas, Perumahan rakyat, dan sosial yang cenderung minim dengan kisaran di bawah 2% (dua persen) dari total belanja dibandingkan dengan Pendidikan, Kesehatan dan PUPR dengan kisaran di atas 9% (sembilan persen) dari total belanja (TA 2023) yang menyebabkan target SPM pada bidang pelayanan dasar tersebut sulit untuk dicapai;
- c. Tim Penerapan SPM Daerah Provinsi (Pasal 16 Permendagri 100 Tahun 2018) belum optimal dalam mengawal dan mengintegrasikan penerapan SPM pada dokumen perencanaan dan penganggaran;
- d. Regulasi SPM Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, meliputi :
 - (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
 - (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 - (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerpan Standar Pelayanan Minimal.
 - (5) Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya;

- (6) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib dalam Pelayanan Dasar di Bidang Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dituntut untuk siap dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Target Pemenuhan SPM Urusan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

1. Pemenuhan mutu pelayanan dasar peningkatan sarana prasarana Satpol PP
 - a. Penyediaan seragam dinas harian, lapangan, taktikal, PDU, olah raga satgas tertentu dan seragam PPNS (Program Sekretariat, Sub Kegiatan Subbag umum)
 - b. Penyediaan perlengkapan Patroli, Deteksi Dini, Cegah Dini, Pengamanan, Sosialisasi/Edukasi Trantibum, Pengawasan, Pembinaan, Penyuluhan, Pengawalan Dan Pengendalian Massa yang terdiri dari, biaya makan minum, biaya perjalanan dinas, honorarium Tim Satgas Trantibumlinmas Terpadu (Unsur Lintas OPD, Satpol PP Kab/Kota, TNI, POLRI dan Kejaksaan Tinggi), biaya Pembuatan Peta rawan Trantibum dan pembuatan aplikasi Sistem Pelaporan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (SITIBUM) (Program Trantibum Sub Keg. Bidang Trantibumas).
 - c. Penyediaan pemeliharaan kendaraan operasional, Penyediaan bahan bakar operasional dan lapangan, pemeliharaan peralatan

satpol PP, dan penyediaan pemeliharaan gedung kantor Satpol PP (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Umum).

- d. Pengadaan Kendaraan Operasional Bidang PPHD, Bidang Trantib, Bidang Linmas, Bidang Kebakaran dan Sekretariat (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Umum).
- e. Pengadaan Meubelair dan Peralatan Elektronik Perkantoran (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Umum)
- f. Penyediaan/pengadaan Sarpras Satgas Linmas/Linmas Kab/Kota, (Program Trantibumas Sub Kegiatan Bidang Linmas).

2. Pemenuhan mutu pelayanan dasar peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP

- a. Pelaksanaan kegiatan peningkatan Kapasitas untuk Bantuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Polda Kalimantan Timur (SPN Polda Kaltim) atau Kodam Mulawarman (Korem ASN) (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Umum).
- b. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Diklat Dasar Pol.PP untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana) bekerjasama dengan BPSDM Kemendagri (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Umum).
- c. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi kemampuan teknis tertentu dalam bentuk Bimtek, Workshop, Outbond dan Bimbingan Mental untuk Satpol PP dan Banpol PP bekerjasama dengan pihak profesional (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Umum).
- d. Pelaksanaan Jambore Satpol PP dan Linmas meliputi penilaian poskamling terbaik, Inovasi penanganan gangguan trantibum, Pengelolaan Satgas Linmas Kab/Kota Terbaik, (Program Trantibumas Sub Kegiatan Bidang Linmas).
- e. Pengelolaan SIMPOLPP terbaik dan teraktif (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Umum).
- f. Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas melalui pelatihan mitigasi bencana, pengamanan lingkungan, deteksi dini dan pembentukan Satgas Linmas Kab/Kota, (Program Trantibumas Sub Kegiatan Bidang Linmas).
- g. Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS meliputi kegiatan Rapat Teknis PPNS Se-Kaltim, Pelatihan Kegiatan Yustisi dan Non Yustisi bekerjasama sama dengan POLRI / BPSDM Kemendagri /Kemenkum HAM (Program Trantibumas Sub Kegiatan Bidang PPHD).

- h. Peningkatan Kapasitas Aparatur Damkar/Relawan Pemadam Kebakaran Non Pemerintah (LSM atau Kelompok Masyarakat) meliputi kegiatan Pelatihan Penanganan kebakaran kecil, sedang dan berat bekerjasama dengan PMK Pemerintah Kota (Program Bidang Kebakaran Sub Kegiatan Bidang Kebakaran)
 - i. Penyusunan Informasi Daerah Rawan kebakaran melalui Peta Rawan Kebakaran yang sudah teranggarkan di Tahun 2024 (Program Bidang Kebakaran Sub Kegiatan Bidang Kebakaran).
 - j. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah untuk menjaring dan memberikan masukan kepada Renstra, Rencana kerja Satpol PP Prov.Kaltim Tahun 2025. (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Perencanaan Program).
 - k. Pelaksanaan Rakor Program dan Kegiatan dengan mengundang Ditjen Pol PP dan Linmas guna mengetahui isu-isu strategis untuk dituangkan kedalam program dan kegiatan Satpol PP Prov.Kaltim ditahun mendatang. (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Perencanaan Program).
 - l. Pelaksanaan Sosialisasi PPID dengan mengundang Diskominfo dan Komisi Penyiaran terkait publikasi kegiatan Satpol PP Prov.Kaltim. (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Perencanaan Program).
 - m. Pelaksanaan Evaluasi /Fasilitasi Penguatan SAKIP, guna mendorong nilai SAKIP Satpol PP Prov.Kaltim menjadi lebih baik. (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Perencanaan Program).).
 - n. Pelaksanaan Rapat Fasilitasi Penguatan Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas yang diemban Satpol PP melibatkan Satpol PP Kab/Kota dan OPD terkait (Program Sekretariat Sub Kegiatan Subbag Perencanaan Program).
3. Pemenuhan mutu pelayanan dasar biaya pengobatan dan biaya ganti kerugian materil terdampak penegakan Perda / Perkada Kalimantan Timur
- a) Penyediaan biaya pengobatan ringan, sedang dan berat bagi warga atau petugas meliputi biaya belanja obat P3K, biaya belanja vitamin, biaya belanja masker, hand sanitizer dan sabun cuci tangan. (Program Bidang Trantibumas Sub Kegiatan Bidang Trantibum)

- b) Penyediaan biaya ganti rugi materil ringan ,sedang dan berat terdiri dari biaya semen,pasir, cat dan jasa tukang / Kayu, plywood, paku dan Jasa Tukang Progam Bidang Trantibumas Sub Kegiatan Bidang Trantibum)

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah :

1. Belum Optimalnya pelayanan Trantibumlinmas sesuai pemenuhan SPM
2. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi
3. Belum terinventarisi data Perda dan Perkada yang ditegakkan yang memuat sanksi
4. Kurangnya Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP yang berpengaruh kepada kualitas kinerja.
5. Kualitas kompetensi PNS belum merata.
6. Sarana dan Prasarana minimal yang harus ditingkatkan.
7. Pagu anggaran yang belum selaras dengan penerapan SPM.

Tantangan kedepan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah adalah dalam hal penegakan Perda dan Perkada yang tujuan akhirnya adalah ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rencana kedepan, memastikan program dan kegiatan yang telah disusun benar-benar terlaksana dan dapat bermanfaat baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat guna mewujudkan layanan SPM Satpol PP yang berkualitas.

Belum sepenuhnya terakomodir pada program, kegiatan dan sub kegiatan secara komprehensif pada rancangan akhir RPD sebagai berikut:

- a. Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Tramtibumlinmas Sub Urusan Trantibum;
 - Pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi;
 - Pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

umum Daerah kab/kota.

Berkaitan Pembuatan Peta rawan Trantibum dan pembuatan aplikasi Sistem Pelaporan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (SITIBUM) (Program Trantibum Sub Keg.Bidang Trantibumas).

b. Mutu Pelayanan Dasar

- Ditetapkan dengan Standar Teknis, dan sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Standar jumlah & kualitas barang/jasa;
- 2) Standar jumlah & kualitas personil/SDM, dan
- 3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Berkaitan dengan pemenuhan Sarpras dan Peningkatan SDM Satpol PP

c. Penerima Pelayanan Dasar

- Warga Negara dengan ketentuan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap:
 - 1) Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi; dan
 - 2) Pelanggaran Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota.
 - 3). Berkaitan Pendataan warga yang berada radius 50 M pada saat melakukan penegakan Perda dan Perkada.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TAHUN 2024-2026 PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

NO	INDIKATOR	REALISASI CAPAIAN Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	4	5	6	4	5	6	100	100	100
2	Persentase perda dan Perkada yang ditegakkan	4	5	6	4	5	6	100	100	100

Berdasarkan Tabel 2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 100 % sebagai berikut :

1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan merupakan jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk yang dapat diselesaikan
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan merupakan jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan
3. Indikator Kinerja Kunci pada Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan merupakan Indikator Kinerja Kunci yang sesuai dengan pelaksanaan Capaian SPM Trantibumlinmas

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan yang bersumber dari internal:

2.3.1 Belum optimalnya pemahaman terkait SPM Trantibumlinmas

2.3.2 Penyajian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan belum terdokumentasikan dengan baik dan belum berbentuk digitalisasi;

- 2.3.3 Pemahaman tentang penanganan gangguan trantibum lintas Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi belum optimal;
- 2.3.4 Tampilan website perlu ditingkatkan lagi dengan menggunakan jasa konsultan bidang IT untuk mendukung penyampaian informasi penyelenggaraan Tusi Satpol PP antara lain:
 - a. Layanan Pengaduan Gangguan Trantibum belum dibuatkan tempat atau portal di website yang tersedia;
 - b. Layanan aplikasi Sistem Pelaporan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (SITIBUM)
 - c. Layanan Satu Data Satpol PP Prov.Kaltim
 - d. Layanan Data Warga terdampak Radius 50 M akibat Penegakan Perda dan Perkada
- 2.3.5 Belum optimalnya inventarisir Perda dan Perkada yang ditegakan, yang memuat sanksi, dan yang masih berlaku.
- 2.3.6 Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP Prov. Kaltim.
- 2.3.7 Belum Optimalnya Peran PPNS dalam Penegakan Perda dan Perkada (Jumlah, Peningkatan Kapasitas SDM, Sertifikasi keahlian khusus)

Hambatan bersumber dari eksternal

- 1. Belum adanya Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman antar OPD Pemangku Perda dan Perkada;
- 2. Belum adanya Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman antar instansi Penegak Hukum, Satpol PP Kab/Kota.
- 3. Belum ada pembentukan Tim Penegakan Perda dan Perkada Bersama OPD Provinsi pemangku Perda dan Perkada dan Satpol PP Kab/Kota

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Kalimantan Timur Yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Telaah terhadap rencana awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra perangkat daerah,

yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja RKPD pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Reviu terhadap rencana Kerja Satpol PP provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.4
Rancangan Awal RKPD
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Kerja RKPD						Hasil Analisis kebutuhan				
No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	41.333.122.932	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	41.333.122.932
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang ditindak lanjuti	100 %				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang ditindak lanjuti	100 %	
Jumlah					41.333.122.932					41.333.122.932
2	Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Prov. Kaltim	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100 %	862.541.928	Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Prov. Kaltim	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100 %	2.507.594.358
			Persentase Cakupan Pelindungan Masyarakat	100 %	855.052.002			Persentase Cakupan Pelindungan Masyarakat	100 %	
			Persentase perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	668.384.085			Persentase perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	
			Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	121.616.343				100 %	121.616.343
Jumlah					2.507.594.358	Jumlah				
3	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prov. Kaltim	Cakupan penyebaran Informasi dan edukasi Rawan Kebakaran	100 %	771.431.710	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prov. Kaltim	Cakupan penyebaran Informasi dan edukasi Rawan Kebakaran	100 %	771.431.710
Jumlah					771.431.710	Jumlah				

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan di dalam Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Tabel 2.5
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Pelayanan ke Masyarakat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prov.Kaltim	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase Cakupan Pelindungan Masyarakat	100%	SPM
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov.Kaltim	Jumlah Satlinmas Yang Terlatih dan Dikukuhkan Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum Dalam Kab/Kota Yang Ditangan	200 orang 4 Kasus	Peningkatan kapasitas Satlinmas/Linmas, Penanganan Pengaduan Trantibum
	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prov.Kaltim	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan	Pemberian layanan kepada warga yang terdampak akibat penegakan perda dan perkada radius 0-50 M
	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Prov.Kaltim	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	200 orang	Peningkatan kapasitas Satlinmas/Linmas
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Prov.Kaltim	Jumlah SDM Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 orang	Peningkatan kapasitas Satlinmas/Linmas

Pada tahun 2024 Satpol PP Provinsi Kaltim telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah /Renja Tahun 2025. Adapun Hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 lebih diarahkan kepada pelaksanaan pada Standar Pelayanan Minimal.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Gajah Mada Nomor 88 Samarinda, Kalimantan Timur 75111
Pos-el satpolpp@kalimprov.go.id; Laman <https://satpolpp.kalimprov.go.id>

**HASIL KESEPAKATAN RAPAT PERENCANAAN PROGRAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LINTAS PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA**

PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025-2029

Pada hari **Selasa**, Tanggal **24** Bulan **Juni** Tahun **2025** telah diselenggarakan Rapat Perencanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

- a. Pemaparan materi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Prov. Kaltim Tahun 2025-2029 disampaikan oleh :
 1. Sekretariat : Plh.Sekretaris Satpol PP Prov. Kaltim (Abdul Muis, S.Pd, M.Si);
 2. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Masyarakat : Kepala Bidang Tibumtranmas (Edwin Noviansyah Rachim, SE., M.Si.);
 3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah : Kepala Bidang PPHD (Abdul Muis, S.Pd, M.Si);
 4. Bidang Pelindungan Masyarakat : (Tri Aguswindarto, S.I.Kom); dan
 5. Bidang Kebakaran : (Abdul Muis, S.Pd, M.Si)

dan arahan dari Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Bappeda Prov.Kaltim (Mispoyo, S.Pd, M.Pd)

- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Rapat Perencanaan Program terhadap materi yang dipaparkan oleh Plh. Sekretaris, masing-masing Bidang dan peserta diskusi, maka pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juni 2025

Jam : 08.30 s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Belayan Hotel Gran Senyur Balikpapan

Rapat Perencanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

MENYEPAKATI

- KESATU : Penyusunan Rancangan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 disarankan Oleh Bappeda Prov.Kaltim untuk memasukkan Pagu Anggaran 2025-2030;
- KEDUA : Mengusulkan tambahan pagu anggaran pada RKPD 2026 yang termuat dalam Rancangan Renstra 2025-2029, atas arahan Bappeda Prov.Kaltim;
- KETIGA : Penetapan target pada Rancangan Renstra 2025-2029, harus memperhatikan kembali ketersediaan/penetapan anggaran pada Rancangan Renstra 2025-2029;
- KEEMPAT : Mewujudkan penurunan jumlah kejadian kebakaran, dan menindaklanjuti berkaitan dengan kerja sama pencegahan, penanggulangan terhadap aset, bangunan industri lainnya yang berakhir Tahun 2027;
- KELIMA : Memperhatikan kembali penetapan target, tujuan, sasaran, indikator kinerja guna menunjang nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur;
- KEENAM : Menyelaraskan kembali cascading sasaran, tujuan, indikator kinerja RPJMD 2025-2029 terhadap penyusunan Rancangan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029;
- KETUJUH : Penyusunan Rancangan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 memperhatikan kembali keselarasan dengan Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) untuk periode 2025-2029.

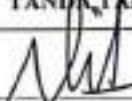
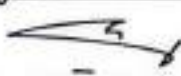
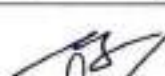
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Timur,

Munawwar, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196711291998031003

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN RAPAT PERENCANAAN
PROGRAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 300.1/189/Satpol.PP-I.II/2025
TANGGAL : 24 Juni 2025

Mewakili Peserta Rapat Perencanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025 (Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-
2029)

NO	NAMA	JABATAN/INSANSI	TANDA TANGAN
1	MUSPOKO	Kabid PPM Bayubera	
2	Edwin Novianingrum K.B.P. MONTANAN		
3	H. A. MURIS	Kabid PVHD	
4	H. Fatah Hidayat	Kasatpol PP Kutin	
5	HB Aginda Ali	Korlat PPL PP PPU	
6	A.M. DUCU	Kasubag. Pol Kutubera	
7	Fredrick .AH	Staf Mahkamah Ulu	
8	PERISYENTO	Kasub. progr	
9	Siti Hamidah.	Kasubag. Perenc. dan Keuangan.	
10	Iwan. febrayns	PLT. kabubang kutubera	
11	Adi fakrozan	Karubang perencana- n keuangan Satpol ppa	
12			
13			

Dari usulan-usulan yang masuk, maka direncanakan pada Tahun 2026 ada 3 program 11 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan, namun penyusunan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah tetap menyesuaikan dengan pagu indikatif pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis, dan telah disusun dalam dokumen Renstra 2025-2029, dengan menyesuaikan Tujuan dan sasaran RPJMD Prov.Kaltim 2025-2029, sebagai berikut :

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Direktorat Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yaitu “**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Satpol PP sesuai Standar**” yang menjadi telaahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dan sejalan dengan RPJMD. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur arah kebijakannya telah sesuai pula dengan arah kebijakan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 yaitu pada ***Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan dengan Sasaran Meningkatkan Ketenteraman, ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat.***

Tabel 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tahun 2025,
Tujuan, Sasaran , Strategi dan Kebijakan.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan profesionalisme Pemerintahan	1. Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Serta Pelindungan masyarakat	1. Optimalisasi Pelaksanaan terhadap ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	1. Peningkatan Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan penyuluhan, patroli pengamanan dan pengawalan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Penyusunan SOP Ketenteraman dan Ketertiban umum 3. Peningkatan kapasitas Anggota Satpol PP 4. Melaksanakan pemenuhan layanan sarpras
		2. Optimalisasi Penegakan Perda dan Perkada	1. Pembentukan Tim Penegakan Perda dan Perkada bersama Perangkat Daerah terkait. 2. Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada bersama perangkat daerah 3. Peningkatan Kapasitas PPNS 4. Penyusunan SOP Penegakan Perda dan perkada
		3. Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Satpol PP dan Satlinmas	1. Melaksanakan Bimtek/Pelatihan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat)
	2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemetaan rawan Bencana Kebakaran	5. Peningkatan Penyelenggaraan penanganan dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran	1. Melakukan kajian Penyusunan RISPKP

			2. Meningkatkan anggaran dan sarana prasarana serta peningkatan SDM baik dari segi kualitas dan kuantitas dalam pencegahan kebakaran, penanganan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran
	2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat daerah	1. Upaya memenuhi kriteria Indikator Kinerja yang baik (SMART) dan mengacu pada renstra 2. Meningkatkan Indeks kepuasan Pengguna Layanan	1. Melakukan Kegiatan Evaluasi SAKIP Satpol PP setiap tahunnya 2. Melakukan Monitoring terhadap capaian target kinerja 3. Melakukan penilaian melalui SKM guna mengetahui mutu layanan Indeks Kepuasan pengguna Layanan

3.2. Tujuan dan Sasaran

Adapun Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

- ***Tujuan***

Dalam mendukung terwujudnya penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Tujuan Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat

- ***Sasaran***

Adapun Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan bencana Kebakaran
3. Meningkatkannya Akuntabilitas Perangkat Daerah

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nonomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dijabarkan menjadi

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun rincian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai berikut :

a. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Program pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

b. Kegiatan

1. **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**
2. **Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**
3. **Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**
4. **Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**
5. **Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran**
6. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
7. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**
8. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
9. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
10. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
11. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
12. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

c. Sub Kegiatan :

1. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
2. Penyediaan Layanan dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja.
6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Sertadalam mendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum.
7. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
8. Penyusunan SOP Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dalam Mendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum.
9. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
10. Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum.
11. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
12. Penyusunan Kajian rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP).
13. Pembinaan dan pengawasan Penguatan kapasitas penyelenggaraan Urusan kebakaran di Kabupaten/Kota
14. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
15. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
16. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
17. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

18. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
19. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
20. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
21. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD
22. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
23. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
24. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
25. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
26. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
27. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
28. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
29. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
30. Pengadaan Mebel
31. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya.
32. Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan
33. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
34. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
35. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
36. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
37. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
38. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maka program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, perlu didukung dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Satpol PP Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Table 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						44.612.149.000,00							44.946.222.644,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						44.612.149.000,00							44.946.222.644,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						44.612.149.000,00							44.946.222.644,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	-			90 Indeks	41.333.122.932,00						-	41.538.172.075,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Panganggaran Yang Ditetapkan Tepat Waktu	-			100 Persen	689.543.174,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN	-	717.070.358,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	303.221.574,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN		318.215.758,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	569.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	ASN		570.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	3.321.164,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	ASN		4.321.164,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	6.562.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	ASN		7.562.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	284.549.390,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN		294.549.390,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.192.697,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN		20.192.697,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	478.534.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN		488.534.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	558.316.416,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN		568.316.416,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	-			100 Persen	632.635.329,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN	-	673.635.329,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	23.136.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN		33.136.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	332.927.329,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN		343.927.329,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	32.910.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN		42.910.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	243.662.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		253.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase Cakupan Pelindungan Masyarakat	-			100. % 100 %	2.507.594.358,00						-	2.606.618.859,00	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum Dalam Kab/Kota Yang Ditangani Jumlah Satlinmas Yang Terlatih dan Dikukuhkan	-			4 Kasus 200 Orang	1.717.593.930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat, Badan Hukum Lainnya, Anggota Satlinmas Yang ada di Kecamatan/Kelurahan, Satgas Linmas, ASN	-	1.786.618.431,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP				5 Laporan	268.010.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat, Badan Hukum Lainnya, ASN		278.010.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Polisi Pamong Praja Yang Memiliki Kualitas PPNS	-			1 Orang	121.616.343,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	PPNS	-	131.616.343,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	121.616.343,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	PPNS		131.616.343,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	-			100 %	771.431.710,00						-	801.431.710,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	-			1 Dokumen	616.852.032,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Aparatur Damkar, ASN	-	636.852.032,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				5 Dokumen	360.872.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Aparatur Damkar, ASN		370.872.230,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen	255.979.802,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Aparatur Damkar, ASN		265.979.802,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

-997-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	<i>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	-			1 Laporan	154.579.678,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Damkar, ASN	-	164.579.678,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02.0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	154.579.678,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Damkar, ASN		164.579.678,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H							44.612.149.000,00							44.946.222.644,00	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu dokumen perencanaan yang bersifat taktis dan strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen tahunan sebagai dasar pelaksanaan dalam pembahasan APBD setiap tahunnya. Selain itu juga Dokumen Renja juga sebagai pedoman dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Lingkup Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur meliputi Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Kebakaran, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sekretariat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur. Dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini pula diharapkan sebagai dasar didalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaporan atas capaian kinerja tahunan.

Akhirnya dengan terselesaikannya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja, maka telah ditetapkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Kaltim, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas serta mendorong pencapaian tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

**RENJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode pertama (Satu), yang mana merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada RKPD, yang akan memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran dan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya. Dengan muatan renja seperti; program-program, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan perkiraan maju atau kebutuhan dana untuk tahun berikut.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
20. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu khususnya pada penanggulangan bencana di wilayah Kalimantan Timur guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah, maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, meliputi :

A. Maksud

- a. Menjabarkan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2025 – 2029;
- b. Mengoptimalkan tugas dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

B. Tujuan

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur khususnya BPBD Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Memberikan arah kebijakan dan strategi bagi seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Renstra PD tahun 2025 – 2029 yang dimanifestasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan;
- e. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh aparatur jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penyesuaian pendanaan pagu indikatif;
- f. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi Pembangunan baik antar dinas/instansi terkait, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Memberikan dasar dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h. Menciptakan iklim Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good Governance) dan dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas (Performance Accountability Report);
- i. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga usaha dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- j. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Kepala Badan (Kaban)/ Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Kalimantan Timur berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja :

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Capaian Renja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Berjalan)

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	22.106.416.375	0	86,60	86,60	39,81	7.129.655.940	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	47	32,25
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	80 %		100	100	100	40,00		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 %	1.244.381.231	100	100	100	50,00	82.974.700	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	6,67
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	324.549.164	...	6	6	3	21.093.500	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	6,5
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	63.830.000	...	1	1	1	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	0
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	67.359.671	...	1	1	0	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Reali sa si 20 22	Reali sa si 20 23	Reali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		Perubahan RKA-SKPD											
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.620.000	...	1	1	1	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya tindak lanjut untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan selanjutnya	100	0
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.539.671	...	1	1	0	0	Dilaksanakan di triwulan 3	Dalam upaya tindak lanjut untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan selanjutnya	0	0
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	555.745.000	...	6	6	3	49.600.000	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan selanjutnya	37,5	8,92
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	225.737.725	...	3	3	1	12.281.200	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	33,33	5,44

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Reali sa si 20 22	Reali sa si 20 23	Reali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	17.547.494.555	100	100	100	42,86	4.750.013.132	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	42,86	27,07
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/Bulan	16.953.815.985	...	49	49	33	4.632.023.132	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	34,02	27,32
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	378.360.000	...	12	12	6	116.240.000	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	50	30,72
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	83.559.710	...	12	12	6	750.000	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	50	0,9
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	85.360.000	...	12	12	6	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	50	0
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	5.607.944	...	12	12	6	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	50	0
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 Laporan	21.253.944	...	12	12	6	1.000.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	4,71

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Reali sa si 20 22	Reali sa si 20 23	Reali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		KeuanganBulanan /Triwulanan/Seme steran SKPD											
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	19.536.972	...	12	12	2	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	0
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	9.340.000	100	100	100	66,67	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	66,67	37,13
1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480.000	...	1	1	1	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	100	97,71
1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.400.000	...	1	1	0	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	0	30,36
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	460.000	...	1	1	1	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	100	97,61
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	15.233.027	100	100	80	47,78	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	47,78	0
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Dokumen	20.780	...	4	0	0	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	0	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	480.000	...	2	4	4	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	100	0
1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18 Orang	480.000	...	18	2	0	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	0	0
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	10.408.247	...	25	18	25	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	138,89	0
1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	3.844.000	...	...	25	0	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	0
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.135.320.789	100	100	100	58,16	353.011.967	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	58	31,09
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.848.563	...	1	1	1,00	1.458.650	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	100	51,21
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	134.297.165	...	10	10	8,00	120.521.000	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	100	89,74

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	171.752.951	...	22	22	10	51.360.367	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	71,43	29,9
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	30.527.470	...	7	7	6	405.000	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	85,71	1,33
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143 Laporan	730.192.000	...	145	145	0	179.266.950	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	24,55
1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	5.218.640	...	6	6	3	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	50	0
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	0	100	100	100	0	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	0
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	...	5	5	0	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	0
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	1.566.593.700	...	100	100	66,67	1.687.665.944	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	66,67	26,80

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Reali sa si 20 22	Reali sa si 20 23	Reali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.590.000	...	1	1	1	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	100	0
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	429.017.700	...	12	12	6	140.654.958	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	32,79
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.055.735.232	...	12	12	6	1.547.010.986	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	136,18
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	588.021.073	...	100	100	64,02	252.522.197	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	64,02	42,94
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	469.000.100	...	44	44	10	224.102.197	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	22,73	47,78
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	66.822.500	...	173	173	44	25.490.000	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	100	38,15

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Reali sa si 20 22	Reali sa si 20 23	Reali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP				K	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2.933.333	...	2	2	2	2.930.000	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	100	99,89
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	49.265.140	...	1	1	1	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	33,33	0
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	35.774.409.625	100	100	100	50	389.009.653	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	1,08
		Persentase Pemulihan Pasca Bencana	100 %		100	100	100	50		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	
		Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %		100	100	100	50		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	100 %	116.854.975	...	100	100	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima	40 Orang	116.854.975	...	20	20	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan 3 bulan juli 2025	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Re ali sa si 20 22	Re ali sa si 20 23	Re ali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota											
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	21.221.742.415	...	100	38,46	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategisKabupaten /Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	364.368.100	...	2	2	2	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan danmendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana	12 Dokumen	20.192.377.391	...	13	13	3	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyesaian di triwulan selanjutnya	25	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Reali sa si 20 22	Reali sa si 20 23	Reali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		kesiapsiagaan terhadap bencana											
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	165.312.074	...	30	30	0	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yangmeningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	30 Orang	178.100.000	...	20	20	0	0	Dilaksanakan di triwulan 2 bulan Juni 2025	Dalam upaya penyesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaanmeng etahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian	1000 Orang	184.918.700	...	400	400	200	15.678.884	Kegiatan dilaksanakan di triwulan 2 tanggal 26-27 April 2025	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	20	7,94

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Reali sa si 20 22	Reali sa si 20 23	Reali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		operasi penanganan darurat bencana											
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diridan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Keluarga	136.666.150	...	60	60	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.008.757.330	...	100	100	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	68.400.000	...	12	12	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	418.298.000	...	10	10	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan	800 Orang	522.059.330	...	800	800	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		Evakuasi Korban Bencana											
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	13.427.054.905	...	100	100	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	103.342.790	...	60	60	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana (R3P) yang Disusun	7 Dokumen	13.010.980.795	...	6	6	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	2.289.470	...	1	1	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	182.200.000	...	...	1	1	153.923.880	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	84,48

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Reali sa si 20 22	Reali sa si 20 23	Reali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	2 Dokumen	781.000	...	2	2	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan(pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	42.152.000	...	2	2	0	0	Kegiatan dilaksanakan di bulan Agustus 2025 Triwulan 3	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	231.011.350	...	10	10	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
GRAND TOTAL				57,731,734,000					3,869,436,079			15,87	6.70

Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026, baru dalam terhadap pelaksanaan kegiatan pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan, sehingga target yang ditetapkan akan dapat terealisasi pada pertengahan tahun kegiatan atau menjelang akhir anggaran. Kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan rincian pelaksanaan dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Program Penanggulangan Bencana, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi BPBD Provinsi Kalimantan Timur, dimana proses ataupun tahapan pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. Upaya – upaya yang sekarang menjadi perhatian diantaranya adalah dengan meningkatkan evaluasi atas capaian kegiatan secara berkala setiap triwulan atas progres pelaksanaan kegiatan dan tentunya dari hasil evaluasi tersebut dapat menghasilkan beberapa kebijakan penyelesaian serta menjadi bahan pertimbangan atas penentuan target kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Di samping evaluasi capaian kinerja tersebut, BPBD Provinsi Kalimantan Timur juga telah membangun komitmen internal bersama yang harus dipedomani dan dipatuhi setiap proses pelaksana kegiatan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta Rencana Aksi Kegiatan (RAK) termasuk dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pertanggung jawaban keuangan

3.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana Provinsi

Capaian Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan pada arah atau tema pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2019 – 2023 dan RPD 2024 – 2026 Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelenggaraan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan standar teknis pelayanan dan standar pelayanan minimal yang diberikan, dalam hal ini BPBD Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya dan langkah-langkah yang mengarah pada Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana.

Program yang dilaksanakan dari tahun 2019-2024 telah dijabarkan pada kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 4 kegiatan yaitu; Layanan Informasi Rawan Kebencanaan, Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Layanan Penyelamatan dan Evakuasi serta Layanan Penataan Sistem Dasar, dimana kegiatan layanan tersebut memfokuskan pada Indikator yang telah dirumuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 2.2

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024 Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
RENSTRA 2019 - 2023																
1	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana		N/A	85	85	85		N/A	98.04	100	100		N/A	115.3	117.6	117.6
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		N/A	80	80	80		N/A	78.37	80.46	82.89		N/A	97.96	100.6	103.6
RENSTRA 2024 - 2026																
1	Indeks Ketahanan Daerah	0.633	0.733	0.833			0.53					83.73				
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	70.01	71	72			70.7					101				

BAB II

HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

5.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Capaian Renja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Berjalan)

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Reali sa si 20 22	Reali sa si 20 23	Reali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	22.106.416.375	0	86,60	86,60	39,81	7.129.655.940	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	47	32,25
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	80 %		100	100	100	40,00		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 %	1.244.381.231	100	100	100	50,00	82.974.700	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	6,67
1.05.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	324.549.164	...	6	6	3	21.093.500	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	6,5
1.05.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	63.830.000	...	1	1	1	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	0
1.05.01.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	67.359.671	...	1	1	0	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
			K	RP				K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		Perubahan RKA-SKPD											
1.05.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.620.000	...	1	1	1	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya tindak lanjut untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan selanjutnya	100	0
1.05.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.539.671	...	1	1	0	0	Dilaksanakan di triwulan 3	Dalam upaya tindak lanjut untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan selanjutnya	0	0
1.05.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	555.745.000	...	6	6	3	49.600.000	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan selanjutnya	37,5	8,92
1.05.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	225.737.725	...	3	3	1	12.281.200	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	33,33	5,44

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
			K	RP				K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	17.547.494.555	100	100	100	42,86	4.750.013.132	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	42,86	27,07
1.05.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/Bulan	16.953.815.985	...	49	49	33	4.632.023.132	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	34,02	27,32
1.05.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	378.360.000	...	12	12	6	116.240.000	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	50	30,72
1.05.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	83.559.710	...	12	12	6	750.000	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	50	0,9
1.05.01.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	85.360.000	...	12	12	6	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	50	0
1.05.01.1.02.006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	5.607.944	...	12	12	6	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	50	0
1.05.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 Laporan	21.253.944	...	12	12	6	1.000.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	4,71

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Re ali sa si 20 22	Re ali sa si 20 23	Re ali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		KeuanganBulanan /Triwulanan/Seme steran SKPD											
1.05.01.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	19.536.972	...	12	12	2	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	0
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	9.340.000	100	100	100	66,67	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	66,67	37,13
1.05.01.1.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480.000	...	1	1	1	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	100	97,71
1.05.01.1.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.400.000	...	1	1	0	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	0	30,36
1.05.01.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	460.000	...	1	1	1	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	100	97,61
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	15.233.027	100	100	80	47,78	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	47,78	0
1.05.01.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Dokumen	20.780	...	4	0	0	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	0	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
			K	RP				K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	480.000	...	2	4	4	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	100	0
1.05.01.1.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18 Orang	480.000	...	18	2	0	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	0	0
1.05.01.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	10.408.247	...	25	18	25	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya tindak lanjut	138,89	0
1.05.01.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	3.844.000	...	...	25	0	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	0
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.135.320.789	100	100	100	58,16	353.011.967	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	58	31,09
1.05.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.848.563	...	1	1	1,00	1.458.650	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	100	51,21
1.05.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	134.297.165	...	10	10	8,00	120.521.000	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	100	89,74

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	171.752.951	...	22	22	10	51.360.367	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	71,43	29,9
1.05.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	30.527.470	...	7	7	6	405.000	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	85,71	1,33
1.05.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143 Laporan	730.192.000	...	145	145	0	179.266.950	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	24,55
1.05.01.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	5.218.640	...	6	6	3	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	50	0
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	0	100	100	100	0	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	0
1.05.01.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	...	5	5	0	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	0
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	1.566.593.700	...	100	100	66,67	1.687.665.944	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	66,67	26,80

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
			K	RP				K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.590.000	...	1	1	1	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	100	0
1.05.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	429.017.700	...	12	12	6	140.654.958	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	32,79
1.05.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.055.735.232	...	12	12	6	1.547.010.986	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	136,18
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	588.021.073	...	100	100	64,02	252.522.197	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	64,02	42,94
1.05.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	469.000.100	...	44	44	10	224.102.197	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	22,73	47,78
1.05.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	66.822.500	...	173	173	44	25.490.000	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	100	38,15

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
			K	RP				K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.09.008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2.933.333	...	2	2	2	2.930.000	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	100	99,89
1.05.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	49.265.140	...	1	1	1	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	33,33	0
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	35.774.409.625	100	100	100	50	389.009.653	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	1,08
		Persentase Pemulihan Pasca Bencana	100 %		100	100	100	50		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	
		Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %		100	100	100	50		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	50	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	100 %	116.854.975	...	100	100	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.01.002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima	40 Orang	116.854.975	...	20	20	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan 3 bulan juli 2025	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
			K	RP				K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota											
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	21.221.742.415	...	100	38,46	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten / Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	364.368.100	...	2	2	2	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan danmendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana	12 Dokumen	20.192.377.391	...	13	13	3	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	25	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
			K	RP				K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		kesiapsiagaan terhadap bencana											
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	165.312.074	...	30	30	0	0	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	30 Orang	178.100.000	...	20	20	0	0	Dilaksanakan di triwulan 2 bulan Juni 2025	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian	1000 Orang	184.918.700	...	400	400	200	15.678.884	Kegiatan dilaksanakan di triwulan 2 tanggal 26-27 April 2025	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	20	7,94

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Re ali sa si 20 22	Re ali sa si 20 23	Re ali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan II				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		operasi penanganan darurat bencana											
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diridan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Keluarga	136.666.150	...	60	60	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.008.757.330	...	100	100	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.03.002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	68.400.000	...	12	12	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.03.003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	418.298.000	...	10	10	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.03.004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan	800 Orang	522.059.330	...	800	800	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
			K	RP				K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		Evakuasi Korban Bencana											
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	13.427.054.905	...	100	100	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	103.342.790	...	60	60	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana (R3P) yang Disusun	7 Dokumen	13.010.980.795	...	6	6	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	2.289.470	...	1	1	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	182.200.000	...	...	1	1	153.923.880	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	84,48

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
			K	RP				K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalikan	2 Dokumen	781.000	...	2	2	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan(pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	42.152.000	...	2	2	0	0	Kegiatan dilaksanakan di bulan Agustus 2025 Triwulan 3	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	231.011.350	...	10	10	0	0	Adanya efisiensi anggaran	Dalam upaya penyelesaian di triwulan selanjutnya	0	0
GRAND TOTAL				57,731,734,000					3,869,436,079			15,87	6.70

Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026, baru dalam terhadap pelaksanaan kegiatan pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan, sehingga target yang ditetapkan akan dapat terealisasi pada pertengahan tahun kegiatan atau menjelang akhir anggaran. Kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan rincian pelaksanaan dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Program Penanggulangan Bencana, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi BPBD Provinsi Kalimantan Timur, dimana proses ataupun tahapan pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. Upaya – upaya yang sekarang menjadi perhatian diantaranya adalah dengan meningkatkan evaluasi atas capaian kegiatan secara berkala setiap triwulan atas progres pelaksanaan kegiatan dan tentunya dari hasil evaluasi tersebut dapat menghasilkan beberapa kebijakan penyelesaian serta menjadi bahan pertimbangan atas penentuan target kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Di samping evaluasi capaian kinerja tersebut, BPBD Provinsi Kalimantan Timur juga telah membangun komitmen internal bersama yang harus dipedomani dan dipatuhi setiap proses pelaksana kegiatan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta Rencana Aksi Kegiatan (RAK) termasuk dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pertanggung jawaban keuangan

5.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana Provinsi

Capaian Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan pada arah atau tema pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2019 – 2023 dan RPD 2024 – 2026 Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelenggaraan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan standar teknis pelayanan dan standar pelayanan minimal yang diberikan, dalam hal ini BPBD Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya dan langkah-langkah yang mengarah pada Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana.

Program yang dilaksanakan dari tahun 2019-2024 telah dijabarkan pada kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 4 kegiatan yaitu; Layanan Informasi Rawan Kebencanaan, Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Layanan Penyelamatan dan Evakuasi serta Layanan Penataan Sistem Dasar, dimana kegiatan layanan tersebut memfokuskan pada Indikator yang telah dirumuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 2.2

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024 Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
RENSTRA 2019 - 2023																
1	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana		N/A	85	85	85		N/A	98.04	100	100		N/A	115.3	117.6	117.6
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		N/A	80	80	80		N/A	78.37	80.46	82.89		N/A	97.96	100.6	103.6
RENSTRA 2024 - 2026																
1	Indeks Ketahanan Daerah	0.633	0.733	0.833			0.53					83.73				
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	70.01	71	72			70.7					101				

Berdasarkan Rencana Strategis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2019 sampai tahun 2024 terdapat perbedaan indikator dan target capaian IKU, dimana perubahan tersebut merupakan reviu kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah. Capaian Kinerja yang ditetapkan pada masing-masing priode tersebut secara rata rata mencapai target yang ditetapkan. Jika dilihat capaian kinerja pada Priode renstra 2024-2026 pada sasaran Indeks Ketahanan Daerah yang mencapaian 0.43 indeks dari target yang ditetapkan sebesar 0.63 indeks, belum mencapai 100 % (83,73%). Bila diukur capaian kinerja berdasarkan target tujuan strategis, BPBD Provinsi Kaltim ditahun 2024 telah tercapai (Target IRB 2024 : 144,47; Realisasi IRB 2024 : 136,11), namun sasaran strategis yang merupakan arah kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut pada saat menetapkan target tidak tercapai, hal ini disebabkan oleh adanya ketidaktepatan pada saat melakukan analisa rumusan pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang mengakibatkan penetapan besaran target sasaran tidak berbanding lurus atau kurang tepat dalam menetapkan angka konversi dengan besaran target tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024 Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -				Rasio Capaian Tahun Ke -			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	3	2	2	2	1	2	2	2	33.3	100	100	100
2	Persentase penanganan pra bencana	10	10	10	10	7	10	10	10	70	100	100	100
3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100

Berdasarkan capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) bahwa diakhir tahun 2024, persentase capaian IKK Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 100 %, sebagai berikut :

- a. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal adalah berupa dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar memahami tingkat kerentanan (*vulnerability*), ancaman (*hazard*), dan kapasitas (*capacity*) suatu wilayah terhadap bencana dalam menentukan langkah-langkah pengurangan risiko yang diimplementasikan dengan efektif melalui Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
- b. Persentase Penanganan Pra Bencana yang memfasilitasi penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengacu pada Permendagri 59 tahun 2021 dan terfasilitasi di 10 Kabupaten/Kota.
- c. Persentase penanganan tanggap darurat juga sudah terfasilitasi dengan penanganan bencana terhadap wilayah yang terdampak bencana.

Tabel 2.4
Target Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2019-2024 Provinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	100	100	

Dalam menetapkan dan mengukur Indikator Kinerja Kunci (IKK) berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur masuk

kedalam Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum seta Perlindungan Masyarakat.

5.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menentukan isu strategis yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 2025 - 2029 antara lain adalah :

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Belum padunya Dokumen Pengurangan Risiko Bencana kedalam kebijakan pembangunan daerah
 - Belum optimalnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dalam membangun sistem peringatan dini multi ancaman, pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan, pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas, serta pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.
 - Belum optimalnya penguatan mitigasi Struktural maupun dan Non Struktural serta Adaptasi Perubahan Iklim melalui Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan, penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana, Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi, peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - Belum terpadunya penanganan bencana melalui sistem kaji cepat, dalam pengumpulan informasi kejadian bencana dan analisis Informasi sebagai rekomendasi untuk menentukan kebijakan penanganan bencana.

- Belum optimalnya mekanisme pada tingkat daerah terkait implementasi penetapan status darurat dan atau bahaya.
- Belum optimalnya sistem penyelamatan dan evakuasi, korban bencana terhadap kualitas dan kuantitas personil penanganan, perkuatan peralatan operasional perjenis bencana, serta jalur evakuasi.
- Lemahnya manajemen pengelolaan logistik serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana perkluster kebutuhan.
- Lemahnya kelembagaan pengendalian operasional, pengelolaan informasi, rencana operasional dan desiminasi informasi dalam penanggulangan bencana.

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Belum optimalnya mekanisme pada tingkat daerah terkait implementasi penanganan pasca bencana.
- Belum tersedianya data aset pada daerah terdampak bencana dan kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap produk domestik bruto
- Belum optimalnya penyelenggaraan pasca bencana melalui pola kemitraan antar stakeholder terkait.
- Belum terukurnya pemulihan pasca bencana berdasarkan pada rekomendasi/kesepakatan yang tertuang dalam dokumen rahabilitasi dan rekonstruksi.

Dari uraian analisa faktor-faktor tersebut diatas dan berdasarkan atas kendala internal pada masing-masing bidang yang dihadapi, maka isu-isu strategis secara kolektif yang menjadi faktor penghambat bagi BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana, sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Pengurangan Risiko Bencana terhadap Penguatan Regulasi, Perencanaan, Pencegahan, Pengurangan Risiko, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Mitigasi, Peringatan Dini dan kesiapsiagaan

2. Belum Optimalnya penyelenggaraan Kedaruratan dan logistik dalam Pengurangan Risiko Bencana terhadap penguatan regulasi, sistem kaji cepat, mekanisme penetapan status darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar serta penguatan pusat pendalian operasi penanggulangan bencana.

Belum Optimalnya penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pengurangan Risiko Bencana terhadap Penguatan Regulasi, data base aset dan kerugian, perkuatan kerjasama, serta monitoring dan evaluasi pemulihan pasca bencana.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026 mengacu pada RPJMD Tahun 2025 - 2029 Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Telaah terhadap Rencana Kerja awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Review terhadap Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Lampiran Tabel 2.4

Tabel 2.4
BPBD Provinsi Kalimantan Timur

N o.	Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Definitif (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretari atan	85 Indek s	21.828.141.887	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretari atan	85	18.635.096.028
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yg ditindaklan juti	80 %	1.000.000.000			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yg ditindaklan juti	80 %	3.153.806751

N o.	Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Definitif (Rp.)
JUMLAH					21.788.902.779					21.889.702.799
2	Program Penanggula ngan Bencana	Prov. Kalti m	Presentase Penangana n Pra Bencana	100 %	4.668.858.113	Program Penanggula ngan Bencana	Prov. Kalti m	Persentas e Penangan an Pra Bencana	100 %	2.550.000.000
			Presentase Penanganan Pra Bencana					Persentas e Penangan an Tanggap Darurat	100 %	1.328.996.221
			Persentase Penangana n Tanggap Darurat					Persentas e Penangan an Pemuliha n Pascaben cana	100 %	1.000.000.000
JUMLAH					4.668.858.113					4.778.196.221
PAGU ANGGARAN					27.497.000.000					26.667.899.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 – 2029, yang kemudian akan dipaparkan melalui forum perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama Perangkat Daerah lain yaitu khususnya ditekankan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan yang langsung ke masyarakat, pada tabel 2.5

Tabel 2.5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Pelayanan ke Masyarakat

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar Volume	Keterangan
I	Program Penanggulangan Bencana				
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Pelayanan Penanganan Bencana	100 %	
			Persentase Pelayanan pencegahan dan	100 %	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar Volume	Keterangan
			kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
	penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Provinsi Kaltim	jumlah kawasan yg ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	2 kawasan	Penguatan Destana, SPAB, RSAB
	gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	600 Orang	Warga dan Aparatur yang terlibat dalam kesiapsiagaan
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah peralatan diri bagi individu warga negara, keluarga dan petugas	60 Keluarga	APD bagi Relawan
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	Penanganan bencana bagi masyarakat terdampak bencana
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	12 Laporan	Pencarian, Pertolongan dan evakuasi masyarakat korban bencana
	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah Logistik dan Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	Penyediaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana
3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	
	pelatihan keluarga tanggap bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah keluarga yg mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	60 keluarga	Keluarga yang mendapatkan edukasi tanggap bencana

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Ditingkat nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Sekretariat Utama dan bersama-sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melaksanakan amanat Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2020-2024 menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan iklim serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal selanjutnya, pasal 3 disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi; asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara prinsip-prinsip penanggulangan bencana mencakup prinsip cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; non-diskriminatif; dan non-proletisi.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini, sesuai ketentuan Pasal 6, meliputi pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana

dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah dimana kewenangan pemerintah daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku SKPD yang bergerak di bidang kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berpedoman kepadanya.

Dalam situasi normal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan.

Dalam situasi darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi komando, koordinasi dan sekaligus pelaksana kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini BPBD dapat mengatur instansi-instansi sektoral dalam operasi tanggap darurat dalam situasi tanggap darurat bencana.

Dalam situasi pascabencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali menjalankan fungsinya dalam hal koordinasi dan pelaksana kegiatan-kegiatan pemulihan, sementara fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab instansi-instansi sektoral tetap dilaksanakan oleh sektor masing-masing. Pelaksanaan penanggulangan bencana di pusat maupun daerah akan memerlukan koordinasi dengan semua sektor dan unsur masyarakat. Pembagian peran di antara para pemangku kepentingan

pengurangan risiko bencana juga akan menjadi hal yang diatur melalui Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam Sasaran Prioritas Gubernur yaitu pada **Sasaran 4** “Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan” sebagai Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana

Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah

Maka sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026
Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana	127,17 – 131,64
Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,55

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026
Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana	127,17 – 131,64
Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah	Nilai LKjIP (Nilai)	73,45

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran strategis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan beberapa program utama (prioritas) untuk dilaksanakan pada periode Ranwal Renstra 2025 – 2029. Adapun rencana program utama yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tujuan dan sasarnya berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Untuk mencapai program, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kegiatan tindakan atau aktivitas yang berkaitan dengan tujuan, sasaran, dan program pada Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah
8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun
2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur			26.667.899.000		25.168.975.984
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN	Nilai AKIP (Nilai)	70.07					21.889.702.779		21.522.616.660
Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah	Nilai LKjIP (Nilai)	70.07					21.889.702.779		21.522.616.660
			1.05.01.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	80%		80%	18.492.976.263
					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks		85 Indeks	3.029.640.397
			1.05.01.1.01	Perencanaan. Penganggaran. dan	Persentase Dokumen Perencanaan dan	100%	799.999.706		799.999.984

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu				
			1.05.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	164.944.166	6 Dokumen	164.944.444
			1.05.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.907.200	1 Dokumen	25.907.200
			1.05.01.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.907.200	1 Dokumen	25.907.200
			1.05.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	2.757.200	1 Dokumen	2.757.200

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
					Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				
			1.05.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.757.200	1 Dokumen	2.757.200
			1.05.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	261.742.100	4 Laporan	261.742.100

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
			1.05.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	315.984.640	3 Laporan	315.984.640
			1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	17.760.536.279	100%	17.652.976.279
			1.05.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Org/Bln	17.332.176.279	90 Org/Bln	17.332.176.279
			1.05.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	295.800.000	4 Dokumen	295.800.000
			1.05.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	38.382.888	4 Dokumen	5.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
			1.05.01.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	67.200.000	12 Dokumen	5.000.000
			1.05.01.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.251.060	1 Dokumen	5.000.000
			1.05.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	20.561.760	4 Laporan	5.000.000
			1.05.01.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	4 Dokumen	2.164.292	4 Dokumen	5.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Realisasi Anggaran	Prognosis Realisasi Anggaran				
			1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	53.560.950	100%	15.000.000
			1.05.01.1.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.660.100	1 Dokumen	5.000.000
			1.05.01.1.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	44.660.100	1 Dokumen	5.000.000
			1.05.01.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.240.750	1 Laporan	5.000.000
			1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	121.538.993	100%	25.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
			1.05.01.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	96.934.493	1 Paket	5.000.000
			1.05.01.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.932.200	4 Dokumen	5.000.000
			1.05.01.1.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6.136.200	1 Dokumen	5.000.000
			1.05.01.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.136.100	2 Orang	5.000.000
			1.05.01.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	2.400.000	30 Orang	5.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Perundang-Undangan	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
			1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100%	615.626.702	100%	341.460.348
			1.05.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik. Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	25.630.428	7 Paket	5.000.000
			1.05.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	95.246.505	7 Paket	5.000.000
			1.05.01.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	50.478.274	7 Paket	5.000.000
			1.05.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	40.357.395	6 Paket	5.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
			1.05.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	390.000.000	4 Laporan	316.460.348
			1.05.01.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	13.914.100	2 Dokumen	5.000.000
			1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	18.665.378	100%	93.665.378
			1.05.01.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	18.665.378	1 Paket	18.665.378
			1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa	Persentase Kelancaran	100%	1.805.427.400	100%	1.805.427.400

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Urusan Kantor				
			1.05.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.698.524	1 Laporan	10.698.524
			1.05.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	429.008.876	12 Laporan	429.008.876
			1.05.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.365.720.000	12 Laporan	1.365.720.000
			1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100%	714.347.371	100%	789.087.271

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
			1.05.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan n. Biaya Pemeliharaan n. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit	580.042.098	44 Unit	580.042.098
			1.05.01.1.09.006	Pemeliharaan n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	114.941.220	173 Unit	114.941.220
			1.05.01.1.09.008	Pemeliharaan n Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	19.103.953	4 Unit	19.103.953
			1.05.01.1.09.010	Pemeliharaan n/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1 Unit	260.100	1 Unit	75.000.000
Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	127.17 – 131.64					4.778.196.221		3.646.359.324

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0.55					4.778.196.221		3.646.359.324
			01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pasca Bencana	0.016 Indeks	1.000.000.000	0.017 Indeks	679.271.865
					Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	0.034 Indeks	1.328.996.221	0.035 Indeks	886.589.831
					Indeks Pra Bencana	0.077 Indeks	2.550.000.000	0.079 Indeks	2.080.497.628
			1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	558.398.220	100%	250.000.000
			1.05.03.1.01.003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dokumen	386.592.200	1 Dokumen	150.000.000
			1.05.03.1.01.004	Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Ko	60 Orang	171.806.020	60 Orang	100.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
					ta yang menerima sosialisasi. komunikasi. informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				
			1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Penanganan Bencana	100 %	1.284.746.720	100 %	1.554.589.831
					Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %		100 %	
			1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis	2 Kawasan	247.501.860	2 Kawasan	100.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
					Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				
			1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	600 Orang	423.322.020	600 Orang	200.000.000
			1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang	30 Orang	95.504.800	30 Orang	100.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Cepat (TRC) Bencana	memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				
			1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Keluarga	227.407.910	60 Keluarga	400.000.000
			1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan	12 Dokumen	174.846.240	12 Dokumen	144.589.831

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
					mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				
			1.05.03.1.02.030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	20 Orang	116.163.890	20 Orang	200.000.000
			1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	957.845.181	100%	642.000.000
			1.05.03.1.03.025	Pencarian. Pertolongan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian. Pertolongan	12 Laporan	34.252.800	12 Laporan	42.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Korban Bencana	dan Evakuasi Korban Bencana				
			1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	686.661.901	800 Orang	400.000.000
			1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	236.930.480	12 Laporan	200.000.000
			1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Fasilitator Perhitungan Pasca Bencana	100%	1.977.206.100	100%	1.209.769.493
					Persentase Layanan Pasca Bencana	100%		100%	
					Persentase Legislasi. Kelembagaan. dan Pembinaan	100%		100%	

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
					Penanggulangan Bencana				
			1.05.03.1.04.006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	79.601.870	60 Keluarga	100.000.000
			1.05.03.1.04.007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	331.036.020	1 Dokumen	215.000.000
			1.05.03.1.04.008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	0	1 Laporan	100.000.000
			1.05.03.1.04.011	Koordinasi Penanganan	Jumlah laporan	12 Laporan	250.416.977	12 Laporan	175.000.000

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Pascabencana Provinsi	pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan. pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD. non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan. pemantauan. evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi				
			1.05.03.1.04.0012	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat. dunia usaha dan Lembaga	18 Lembaga	208.393.491	18 Lembaga	139.271.865

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				Pascabencana Provinsi	non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi				
			1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	130 Orang	210.153.512	130 Orang	150.000.000
			1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggara	1 Dokumen	664.372.000	1 Dokumen	180.497.628

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju n + 1	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7		
				gan Bencana Daerah	an Penanggulangan Bencana di Daerah				
			1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	138.858.110	1 Dokumen	50.000.000
			1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	10 Kab/Kota	94.374.120	10 Kab/Kota	50.000.000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BPBD) Tahun 2026 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029, sebagai tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029, yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana.

Kedepannya, BPBD Provinsi Kalimantan Timur masih perlu menyesuaikan / perbaikan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai masukan dan pertimbangan untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026.

RENJA TAHUN 2026 DINAS SOSIAL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai Dokumen Rencana Tahunan, RENJA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahunan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari Visi, Misi dan Program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan Program dan Kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026;
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program / Kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA dalam mendukung Penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan Dokumen Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berpedoman pada Resntra Perangkat Daerah, hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil RENJA perangkat daerah tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial Sesuai dengan Rencana Strategi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Sosial;
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
4. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pemberdayaan Sosial;
5. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
6. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Bantuan dan Jaminan Sosial;
7. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peran yang strategis dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial dengan visi **”TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL”**

Nilai-nilai inti yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah **Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial** artinya kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

1.2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur didalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 – 2018 Provinsi Kalimantan Timur;

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 59).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan Program / Kegiatan tahun 2025, dan mensikronkan serta mensinergikan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2026 dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

2. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA DINAS SOSIAL PROV. KALIMANTAN TIMUR

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra;

- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
- 2.4. Review Terhadap RENJA SKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat.

3. BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Sosial
Prov Kaltim

5. BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Capaian Renstra (2024 – 2026)

Capaian kinerja pembangunan tahun 2025 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan baik dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2025 sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

1. Dari 5 program/ kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat terdapat capaian/realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
 - a. Program Pemberdayaan Sosial;
 - b. Program Rehabilitasi Sosial;
 - c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
 - d. Program Penanganan Bencana;
 - e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi dan telah direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi;
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti;
 - d. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
 - e. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;

- f. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAKA di dalam panti;
 - g. Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
 - h. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal;
 - i. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;
 - j. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi;
 - k. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi dari target yang telah direncanakan adalah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi;
4. Faktor pendukung terpenuhinya target kinerja disebabkan adanya kebijakan keselarasan dan penyerasian program/kegiatan antara pusat dan Provinsi serta Kabupaten/Kota se - Kalimantan Timur.
5. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan adalah :
- a. Provinsi Kalimantan Timur memiliki sebaran penduduk yang belum merata serta aksesibilitas ke lokasi sasaran PMKS belum memadai;
6. Faktor-faktor penyebab target melebihi dari target yang telah direncanakan adalah :
- a. Provinsi Kalimantan Timur yang sangat luas dan rawan terjadinya bencana di setiap Kabupaten dan Kota;
 - b. Realisasi kinerja melebihi target dikarenakan tidak bisanya memprediksi bencana yang terjadi di Kalimantan Timur dalam satu tahun dan berapa jumlah pemberian bantuan kepada korban bencana seperti banjir, kebakaran, longsor dan lain lain.

7. Implikasi yang timbul dari capaian program Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah meningkatnya fungsi sosial dan peranan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dimasyarakat yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penurunan tingkat pengangguran terbuka. Selain itu sumber Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat digali serta didayagunakan secara maksimal untuk menjadi mitra dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
8. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan dengan melakukan revisi atau pergeseran anggaran kegiatan.

Tabel 1 (T-C.29). Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kinerja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	11 = (10/4)	12
DINAS										
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	100%	64%	64%	64%	100%	64%	100%	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	75 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	100	15 Dok	100	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100	4 Lembaga	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Di Pulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	4 ORANG	-	-	-	-	1 ORANG	100	
1.06.03.1.01	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</i>	<i>Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>4 Orang</i>	-	-	-	-	<i>1 Orang</i>	<i>100</i>	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DIDALAM PANTI (%)	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	100%	5.80%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	430 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100	80 Orang	100	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	45.272 Orang	28 Orang	7.700 Orang	7.700 Orang	99	6.110 Orang	98	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	JUMLAH KELUARGA MISKIN YANG MEMILIKI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)	15.562 ORG	11.026 Orang	11.026 ORG	11.026 ORG	100%	11.026 ORG	100%	
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	90 Orang	18 Orang	18 Orang	18 Orang	100	16 Orang	95	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	55.040 Orang	11.008 Orang	13.542 Orang	13.542 Orang	100	11.008 Orang	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	89.350 Orang	17.870 Orang	17.870 Orang	17.870 Orang	100	17870 Orang	100	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI YANG DIKELOLA DENGAN BAIK	1 LOKASI	1 LOKASI	1 LOKASI	1 LOKASI	100%	1 LOKASI	100%	
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100	1 Lokasi	100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	INDEKS KUALITAS LAYANAN KESEKRETARIATAN (DINAS SOSIAL)	86%	84%	84%	84%	100%	86%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PRESENTASE KELUHAN PENGGUNA YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	25 Laporan	5 Laporan	5 Lap	5 Lap	100	5 Lap	100	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	30 Laporan	6 Laporan	6 Lap	6 Lap	100	6 Lap	100	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	3 Lap	100	3 Lap	100	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	20 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	100	4 Keg	100	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
		DASARNYA DI DALAM PANTI (%)								
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	630 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang	100	130 Orang	100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INDEKS KUALITAS LAYANAN KESEKRETARIATAN (UPTD PMKS LANJUT USIA)	86%	84%	84%	84%	100%	86%	100%	
		PRESENTASE KELUHAN PENGGUNA YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	100	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	100	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
		KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI (%)								
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	400 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	100	80 Orang	100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INDEKS KUALITAS LAYANAN KESEKRETARIATAN (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	86%	84%	84%	84%	100%	86%	100%	
		PRESENTASE KELUHAN PENGGUNA YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	100	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	100	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	500 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100	100 Orang	100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INDEKS KUALITAS LAYANAN KESEKRETARIATAN (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	86%	84%	84%	84%	100%	86%	100%	
		PRESENTASE KELUHAN PENGGUNA YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	100	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	100	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	100	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	525 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	100	105 Orang	100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INDEKS KUALITAS LAYANAN KESEKRETARIATAN (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	86%	84%	84%	84%	100%	86%	100%	
		PRESENTASE KELUHAN PENGGUNA YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	100	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	100	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	100	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSRTS)	335 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100	60 Orang	100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	86%	84%	84%	84%	100%	86%	100%	
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	100	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	100	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	100	1Lap	100	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Lap	2 Lap	100	2 Lap	100	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	3Lap	100	3 Lap	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi

Kalimantan Timur

Adapun Jenis Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan program-program pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial meliputi:

A. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas Terlantar dalam Panti dengan sasaran Program terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti dengan sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Telantar di dalam Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti dengan sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti dengan Sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dengan Sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

B. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Sosial Lainnya dan Pengentasan PMKS:

1. Penyediaan Saran dan Prasarana Panti Sosial Pemerintah, meliputi:
 - a. Jumlah prasarana, sarana dan mobilitas Dinas Sosial yang dilakukan perawatan;
 - b. Jumlah panti sosial Pemerintah yang memenuhi Standar Operasional;
 - c. Jumlah panti sosial Pemerintah yang direnovasi / dilakukan perawatan;

2. Penyediaan prasarana dan sarana panti sosial Non Pemerintah yang mendapat fasilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial;
3. Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial bagi Fakir Miskin meliputi :
 - a. Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang menerima bimbingan mental, sosial, pelatihan keterampilan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - b. Jumlah komunitas adat terpencil yang diberdayakan melalui pemukiman;
 - c. Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang ditangani.
4. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah keterlantaran, ketunaan sosial dan kecacatan.
 - a. Jumlah anak jalanan yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - b. Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang mendapatkan bantuan pendampingan;
 - c. Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - d. Jumlah Eks narapidana yang mendapatkan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan;
 - e. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bimbingan mental, keterampilan dan bantuan stimulan;
 - f. Jumlah orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan;
 - g. Jumlah orang terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial.
5. Bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut usia, anak terlantar, cacat ganda/permanen dan korban bencana.
 - a. Korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan sosial;
 - b. Korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan makanan siap saji;
 - c. Korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan evakuasi;

- d. Korban bencana alam/sosial yang memperoleh tempat penampungan sementara/shelter;
- e. Korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan Bahan Bangunan Rumah;
- f. Jumlah satuan penanggulangan bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana;
- g. jumlah Lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial;
- h. Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sosial;
- i. Jumlah anak balita terlantar yang mendapatkan bantuan sosial;
- j. Jumlah Penyandang cacat yang mendapatkan bantuan sosial.

Adapun Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan penyuluhan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan penyuluhan sosial;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta pemberdayaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, peran keluarga dan penyuluhan sosial;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
- e. Penyiapan bahan-bahan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis peran keluarga dan penyuluhan sosial;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial.

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas-nya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kesejahteraan anak;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis rehabilitasi tuna sosial dan korban napza;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis penanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman penanggulangan bencana alam dan sosial;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis jaminan kesejahteraan sosial;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan sumber dana sosial;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan fakir miskin di perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir dan pulau terluar dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta produktifitasnya secara sosial, kelembagaan dan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan fakir miskin
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penanganan fakir miskin;

- c. Memverifikasi dan memvalidasi data calon penerima bantuan program penanganan fakir miskin di perkotaan, pedesaan serta daerah pesisir dan pulau terluar.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebanyak 5 (lima) unit yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 92 tahun 2016 masing-masing sebagai berikut:

a. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan.

- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Kesejahteraan Sosial;
- Fungsi UPTD PSA Anak Harapan adalah penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak terlantar;
- Daya tampung 100 anak.

b. UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma.

- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pelayanan kesejahteraan sosial anak dalam pola perlindungan dan penyantunan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- Fungsi PS Perlindungan Anak Dharma penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak.
- Daya tampung 80 anak.

c. UPTD Panti Sosial Bina Remaja.

- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pelayanan kesejahteraan sosial remaja terlantar;
- Fungsi PS Bina Remaja penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan remaja terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan remaja terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan remaja terlantar;
- Daya tampung sebanyak 105 orang.

d. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri.

- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- Fungsi Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- Daya tampung 126 orang.

e. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pelayanan kesejahteraan sosial wanita korban trafficking atau wanita rawan sosial ekonomi;
- Daya tampung 60 orang.

- f. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama
- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas dan eks orang dengan gangguan jiwa (ODGJ);
 - Daya tampung 80 orang.

Tabel 2 (T-C.30). Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

[illegible]

No	INDIKATOR KINERJA	SPM Provinsi	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	
7.	Rehabilitasi Sosial Anak dan Anak Balita Terlantar Dalam Panti (UPTD PSAAD)	SPM	IKK	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	
8.	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Dalam Panti (UPTD PSAAH)	SPM	IKK	80 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	
9.	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Dalam Panti (UPTD PSBR)	SPM	IKK	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	
10.	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis (UPTD PSRTS)	SPM	IKK	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	
11	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di dalam Panti (UPTD PSRPD)	SPM	IKK	50 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	50 Orang	80 Orang	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta dapat menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat.

Untuk mencapai sinergi yang baik antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Sosial Kabupaten / Kota maka upaya yang dilakukan adalah Dinas Sosial Prov. Kaltim selalu mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Sinronisasi terkait Visi, Misi, Program dan Kegiatan dengan Dinas Sosial Kab/Kota guna mencapai Sinergitas Perencanaan Program dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial dalam Menunjang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Valid dan Berkualitas

Isu-isu Strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan

lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat maka akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu Strategis terkait pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Sosial yang terintegrasi dan Berbasis Data;
2. Peningkatan kualitas data untuk ketepatan sasaran penerima bantuan;
3. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Kewenangan Provinsi;
4. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan;
5. Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial;
6. Kejadian Bencana yang disebabkan karena ketidakpastian iklim, Perubahan Kondisi Alam dan Sosial Masyarakat;

2.3.1 Visi dan Misi Kemensos RI

Visi yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong”**

dengan misi : **“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”**

dengan tujuan : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.

2.3.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemensos RI

Adapun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya good governance Kementerian Sosial dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi;
 - b. Opini BPK Atas Laporan Keuangan.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang professional dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan yang Tersertifikasi;
 - b. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Terakreditasi;
 - c. Persentase Partisipasi PSKS Perorangan dan Lembaga Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3. Berkontribusi dalam menurunkan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Sosial dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase Penurunan Penduduk Miskin;
 - b. Persentase Penurunan Penduduk Rentan.

2.3.3. Program Prioritas Kementerian Sosial

Adapun Program Prioritas Kementerian Sosial di Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut :

1. Program penanggulangan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH);
2. Program Sembako;
3. Serta program-program lainnya yang menjadi program Kementerian Sosial RI.

2.3.4. Indeks Kesejahteraan Sosial

Kementerian sosial sebagai leading sector dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, untuk mengukur peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan perlu disusun Ikesos yang dapat menggambarkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan berdaya serta berjalannya peranan sosial. Hasil perhitungan Ikesos diharapkan dapat diterjemahkan oleh Kemensos dan Pemerintah Daerah untuk menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan dan rencana strategis.

Adapun maksud dan tujuan dari pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) :

A. Maksud

- Merepresentasikan mandat Undang-undang dalam urusan sosial, seperti Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Keberdayaan Sosial dan Pengembangan sosial;
- Mengungkit posisi kesejahteraan sosial di Indonesia di mata Dunia;
- Membantu dalam mengukur keberhasilan dari prioritas nasional dan program priotas.

B. Tujuan

- Pemantauan Kondisi Sosial
Mengembangkan alat ukur yang mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat kesejahteraan sosial masyarakat pada berbagai wilayah dan kelompok sosial.
- Perumusan Kebijakan Berbasis Data;
Menyediakan data yang akurat dan relevan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan sosial yang tepat sasaran, efisien, dan efektif.
- Evaluasi dan Monitoring Pembangunan;
Memberikan kerangka evaluasi yang jelas untuk mengukur dampak dari program dan kebijakan yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial.

- Mendorong Partisipasi stakeholder;
Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan melalui pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kesejahteraan mereka.

Berdasarkan instruksi Mendagri no 2/2025: ikesos sudah dijadikan indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Ikesos merupakan upaya pengukuran kinerja urusan sosial dan Ikesos bisa menggambarkan bagaimana masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat pembangunan kesejahteraan sosial.

Ketika demokrasi merupakan prasyarat menuju sejahtera, maka ikesos bisa menggambarkan bagaimana masyarakat miskin dan rentan mendapatkan akses dan pelayanan yg sama sesuai kebutuhannya, oleh sebab itu maka sangat diperlukan penyusunan perhitungan Ikesos oleh Daerah sebagai dasar acuan penyusunan Rencana Pembangunan dan Rencana Strategis Daerah.

2.4. Penelaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur untuk bidang kesejahteraan sosial tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. (T.C.31). Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
Dinas Sosial					116,212,843,783	Dinas Sosial					98,689,629,672	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10 Kab/ Kota	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	64%	3,477,099,025	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10 Kab/ Kota	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	64%	1,111,439,025	
a.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Kab/ kota	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dok	219,627,489	a.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Kab/ kota	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dok	105,800,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Kab / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dok	219,627,489		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Kab / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dok	105,800,000	
b.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Smd	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 Lembaga	3,257,471,536	b.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Smd	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 Lembaga	1,005,639,025	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Smd	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	132,397,540		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Smd	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	73,463,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Keluarga Kewenangan Provinsi						Keluarga Kewenangan Provinsi					
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	925,073,996		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	831,104,599	
	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang	2,200,000,000		Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang	101,071,426	
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	10 Kab/ kota	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Di Pulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	129,570,000	2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	10 Kab/ kota	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Di Pulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	5,360,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
a.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	10 Kab/ Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	129,570,000	a.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	10 Kab/ Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	5,360,000	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	10 Kab / Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kotai	1 Orang	129,570,000		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	10 Kab / Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kotai	1 Orang	5,360,000	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10 Kab/ Kota	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	5.80%	21,257,456,000	1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10 Kab/ Kota	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	5.80%	14,839,145,388	
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	10 Kab/ Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	80 Orang	5,757,456,000	b	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	10 Kab/ Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	80 Orang	2,886,858,241	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan	80 Orang	1,901,369,380		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan	80 Orang	1,939,087,460	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi						Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	425,828,672		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	314,419,318	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	16 Orang	31,627,710		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	16 Orang	31,594,932	
	Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	14,063,970		Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	13,608,160	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	27,058,020		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	27,054,248	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	14,400,000		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	14,400,000	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	139,700,000		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	102,641,792	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	8,500,000		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	8,500,000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	42,000,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	42,000,000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Orang	16,800,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Orang	16,800,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	10 Kab/Kota	42,000,000		Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	10 Kab/Kota	42,000,000	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	20 Orang	42,000,000		Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	20 Orang	42,000,000	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	3,400,000		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	3,400,000	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	2 Orang	8,227,630		Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	2 Orang	9,192,498	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Smd	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	16 Orang	148,383,008		Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Smd	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	16 Orang	258,659,982	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	5 Dok	2,892,097,610		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	5 Dok	21,499,851	
a	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	10 Kab / Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	6.110 Orang	15,500,000,000	a	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	10 Kab / Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	6.110 Orang	11,952,287,147	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab / Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	467,989,700		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab / Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	100,083,360	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	1,073,307,880		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	679,641,680	
	Pemulangan ke Daerah Asal	10 Kab / Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	150 Orang	687,642,030		Pemulangan ke Daerah Asal	10 Kab / Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	150 Orang	386,820,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal						Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	2 Dok	967,954,960		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	2 Dok	289,125,807	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10 Kab/ Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	5770 Orang	11,936,898,095		Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10 Kab/ Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	5770 Orang	10,407,350,000	
	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	10 Kab/ Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	100 Orang	366,207,335		Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	10 Kab/ Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	100 Orang	89,266,300	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10 Kab/ Kota	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	11.026 Orang	14,150,500,000	2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10 Kab/ Kota	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	11.026 Orang	10,855,500,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
a	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	10 Kab/ Kota	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	166,694,619	a	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	10 Kab/ Kota	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	103,499,822	
	Pengangkatan Anak Antar WNI	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	140,824,619		Pengangkatan Anak Antar WNI	Smd	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	15 Orang	94,629,822	
	Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	25,870,000		Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Smd	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	3 Orang	8,870,000	
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab/ Kota	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	11.008 Orang	13,983,805,381	b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab/ Kota	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	11.008 Orang	10,752,000,178	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Kab / Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4500 Orang	12,253,310,855		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Kab / Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4500 Orang	8,083,479,280	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10 Kab / Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1410 Orang	918,000,000		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10 Kab / Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1410 Orang	2,345,500,000	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab / Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab/Kota	812,494,526		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab / Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab/Kota	323,020,898	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	10 Kab / Kota	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	100%	12,134,860,016	3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	10 Kab / Kota	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	100%	8,160,727,610	
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.870 Orang	12,134,860,016	a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.870 Orang	8,160,727,610	
	Penyediaan Permakanan	10 Kab / Kota	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan	12500 Orang	6,946,007,690		Penyediaan Permakanan	10 Kab / Kota	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan	12500 Orang	5,748,375,960	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	500 Orang	602,790,018		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	500 Orang	345,049,750	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100 Orang	735,462,500		Pelayanan Dukungan Psikososial	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100 Orang	302,585,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Sandang	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	550 Orang	971,740,500		Penyediaan Sandang	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	550 Orang	545,091,600	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10 Kab / Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	750 Orang	1,098,071,985		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10 Kab / Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	750 Orang	777,374,500	
	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	10 Kab / Kota	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	1,154,521,136		Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	10 Kab / Kota	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	257,610,368	
	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	10 Kab / Kota	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	400 Orang	626,266,187		Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	10 Kab / Kota	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	400 Orang	184,640,432	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Smd	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	202,400,975	5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Smd	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	343,447,485	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
a.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	202,400,975	a.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	343,447,485	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dok	32,903,000		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dok	32,903,000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	24,537,975		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	165,584,485	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	144,960,000		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	144,960,000	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	86%	64,860,957,767	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	86%	63,374,010,164	
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100					Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100		

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Smd	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	5 Laporan	1,591,398,500	a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Smd	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	5 Laporan	500,035,235	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dok	558,725,000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dok	281,332,235	
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	267,700,000		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	55,490,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	17,700,000		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	13,490,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Smd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	575,975,500		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Smd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	85,834,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	171,298,000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	171,298,000	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	56,902,832,708	b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	56,409,386,920	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	342 Orang	55,803,227,130		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	342 Orang	55,703,227,130	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	604,240,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	506,159,790	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok	178,354,060		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok	95,991,099	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Smd	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dok	11,553,100		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Smd	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dok	6,046,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Smd	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Lap	220,007,625		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Smd	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Lap	93,602,459	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Smd	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	85,450,793		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Smd	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	4,360,442	
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	3 Laporan	12,925,358	c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	3 Laporan	12,925,358	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	4,122,020		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	4,122,020	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	4,346,318		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	4,346,318	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	4,457,020		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	4,457,020	
d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	2 Kegiatan	440,078,580	d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	2 Kegiatan	83,284,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Smd	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	174,959,580		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Smd	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	62,481,000	
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Smd	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja p	3 Dok	265,119,000		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Smd	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja P	3 Dok	20,803,000	
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	2,515,566,224	e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1,542,569,054	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	54,193,080		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	54,193,080	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	242,119,213		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	152,187,654	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	330,873,880		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	159,425,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	2 Lap	1,379,916,141		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	2 Lap	960,785,320	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	139,147,980		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	87,688,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	369,315,930		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	128,290,000	
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	85,144,475	f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	16,059,267	
	Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	78,604,768		Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	9,519,560	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	61 Unit	6,539,707		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	61 Unit	6,539,707	
g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	2,104,893,422	g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4,134,597,530	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap	46,534,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap	46,534,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	589,938,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	841,848,800	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	5,994,730		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	5,994,730	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1,462,426,692		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	3,240,220,000	
i.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	1,208,118,500	i.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	675,152,800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3 Unit	130,809,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3 Unit	89,103,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17 Unit	556,673,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17 Unit	179,560,400	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	250 Unit	249,798,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	250 Unit	206,562,000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Smd	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	14,040,000		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Smd	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	14,040,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	208,398,500		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	160,719,400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	48,400,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	25,168,000	
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI					7,723,658,000	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI					6,723,864,146	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	86%	2,332,983,369	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	86%	1,450,551,146	
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%					Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%		
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	76,680,000	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	76,680,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	76,680,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	76,680,000	
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	58,368,000	b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	54,768,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	58,368,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54,768,000	
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	831,420,793	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	200,559,734	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	45,059,100		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	14,794,113	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	175,655,333		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	28,056,691	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	49,061,360		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	28,701,950	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	2 Lap	561,645,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	2 Lap	129,006,980	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	404,092,988	d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	35,446,512	
	Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	119,457,452		Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	30,771,050	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	284,635,536		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	4,675,462	
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	664,651,188	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	872,063,500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	4,300,888		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	3,950,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	292,113,500		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	292,113,500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	368,236,800		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	576,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	297,770,400	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	211,033,400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	180,543,900		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	139,347,250	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	87,226,500		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	51,686,150	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20,000,000	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Smd	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	5,390,674,631	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Smd	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	5,273,313,000	
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	130 Orang	5,390,674,631	a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	130 Orang	5,273,313,000	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi	130 Orang	2,786,994,000		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi	130 Orang	3,512,4s24,458	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Minimal Kewenangan Provinsi						Minimal Kewenangan Provinsi			
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 Orang	1,317,498,485		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 Orang	901,841,170	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	130 Orang	595,192,028		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	130 Orang	279,201,572	
	Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	130 Orang	144,752,058		Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	130 Orang	6,235,690	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	130 Orang	105,276,100		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	130 Orang	105,324,798	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang	153,300,000		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang	181,479,389	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	130 Orang	28,986,585		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	130 Orang	32,822,196	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	84,000,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	84,000,000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	44,460,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	42,000,000	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	23 Orang	107,095,375		Pemulasaraan	Smd	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	23 Orang	105,713,727	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	1,700,000		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	850,000	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	21,420,000		Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	21,420,000	
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA					5,698,227,471	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA					5,092,388,636	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	86%	2,390,222,471	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	86%	1,784,333,319	
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%					Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%		
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	79,720,000	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	79,720,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	79,720,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	79,720,000	
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	15,630,500	b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	35,088,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15,630,500		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35,088,000	
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	705,085,575	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	394,124,532	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	17,804,342		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	10,078,523	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	490,609,383		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	305,732,844	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6,258,850		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,353,165	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	190,413,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	74,960,000	
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Laporan	209,933,081	d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Laporan	20,157,149	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	209,933,081		Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	20,157,149	
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1,043,667,915	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	998,190,320	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	3,593,915		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	2,614,320	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	373,254,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	350,936,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	666,820,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	644,640,000	
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	336,185,400	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	257,053,318	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	184,809,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	180,398,750	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	60,376,400		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	35,854,568	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	91,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	40,800,000	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Smd	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	3,308,005,000	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Smd	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	3,308,055,317	
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	3,308,005,000	a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	3,308,055,317	
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	3,600,000		Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	2,022,734	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan p	80 Orang	717,567,728		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan P	80 Orang	622,910,482	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan P	80 Orang	52,000,000		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Pr	80 Orang	136,285,956	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	12,344,044		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	10,686,200	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	106,955,159		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	146,341,545	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	114,856,154		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	72,032,480	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	369,012,670		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	281,404,920	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	7 Orang	31,200,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	7 Orang	42,000,000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	23,400,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	42,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1,823,978,000		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1,846,608,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dok	13,600,000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dok	42,000,000	
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	80 Orang	11,700,000		Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	80 Orang	21,100,000	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	6,991,245		Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	663,000	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Orang	8,400,000		Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Orang	8,400,000	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Orang	4,000,000		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Orang	16,800,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	8,400,000		Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	16,800,000	
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN					6,768,527,746	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN					6,102,976,539	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	86%	2,218,880,865	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	86%	1,756,671,539	
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%					Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%		
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	76,680,000	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	76,680,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	76,680,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	76,680,000	
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Terlaksananya Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	68,175,000	b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Terlaksananya Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	44,988,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	68,175,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	44,988,000	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Orang	775,750,565	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Orang	334,143,329	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22,405,983		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,003,039	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	434,895,832		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58,381,470	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36,052,750		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,645,820	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	282,396,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	242,113,000	
d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	4 Laporan	1,036,506,800	d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	4 Laporan	1,086,748,710	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Lap	9,556,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Lap	9,280,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Daya Air dan Listrik yangDisediakan						Daya Air dan Listrik yangDisediakan			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	185,156,800		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	166,810,800	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	103,074,000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	101,497,910	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	738,720,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	809,160,000	
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	261,768,500	e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	214,111,500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	203,350,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	193,230,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	19,420,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	12,530,000	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38,998,500		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8,351,500	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Smd	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	4,549,646,881	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Smd	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	4,346,305,000	
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	4,549,646,881	a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	4,346,305,000	
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	7,200,000		Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	7,200,000	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	1,131,386,900		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	852,635,200	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	269,489,943		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	260,642,214	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	30,178,000		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	30,178,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	107,844,358		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	102,730,020	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	45,853,724		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	45,853,724	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	376,392,368		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	389,116,760	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	42,000,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	42,000,000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang	79,800,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang	75,600,000	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	2,336,776,488		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	2,400,728,082	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dok	84,000,000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dok	84,000,000	
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	46 Orang	13,350,000		Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	46 Orang	13,350,000	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	2,675,100		Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	2,771,000	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Orang	8,400,000		Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Orang	8,400,000	
	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	2 Orang	4,200,000		Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	2 Orang	4,200,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	1,700,000		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	18,500,000	
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	6 Orang	8,400,000		Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	6 Orang	8,400,000	
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA					6,550,977,000	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA					6,006,916,502	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	86%	2,223,540,000	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	86%	1,679,479,502	
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%					Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%		

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	84,840,000	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	84,840,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	84,840,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	84,840,000	
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	32,856,000	b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	14,688,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	32,856,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	14,688,000	
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	658,656,682	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	348,070,602	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39,397,306		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36,154,875	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	228,264,600		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88,789,109	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16,778,776		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17,566,618	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	374,216,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	205,560,000	
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	70,186,000	d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	520,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	70,186,000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	520,000	
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan		971,467,908	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan		971,360,900	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	9,877,600		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	10,440,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Lap	216,763,708		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Lap	216,320,900	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	744,826,600		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	744,600,000	
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	405,533,410	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	260,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	97,840,790		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	136,952,560	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	70,064,620		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	66,518,508	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	138,908,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	31,236,400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	98,720,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,292,532	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Smd	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	100%	4,327,437,000	1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Smd	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	100%	4,327,437,000	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	105 Orang	4,327,437,000	a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	105 Orang	4,327,437,000	
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	105 Orang	35,900,000		Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	105 Orang	34,944,101	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang	702,557,184		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang	783,880,395	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	105 Orang	200,102,000		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	105 Orang	201,989,318	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	105 Orang	46,700,000		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	105 Orang	50,396,000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	603,094,277		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	568,118,170	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	105 Orang	884,761,769		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	105 Orang	898,361,605	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	4,780,000		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	12,479,000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	46,320,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	21,112,200	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang	21,000,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang	33,768,300	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	34,180,000		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	1,598,307,890	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dok	1,578,141,599		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dok	14,848,300	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	24 Orang	15,100,000		Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	24 Orang	28,808,300	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	30,016,000		Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	3,533,249	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	105 Orang	4,113,815		Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	105 Orang	16,464,400	
	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	45 Orang	16,980,000		Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	45 Orang	51,660,000	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	99,000,000		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	4,424,400	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	45 Orang	4,690,356		Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	45 Orang	4,341,372	
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL					4,427,330,000	UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL					3,810,945,505	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSRTS)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	86%	1,925,315,327	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSRTS)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	86%	1,308,951,505	
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%					Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%		
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	69,960,000	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	67,560,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	69,960,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	67,560,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	67,479,800	b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	36,853,858	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	67,479,800		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	36,853,858	
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	605,193,227	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	255,492,901	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	5,808,547		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	4,968,131	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	334,190,568		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88,246,791	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,208,192		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,952,543	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	261,985,920		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	159,325,436	
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan	990,356,800	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan	699,030,400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	106,676,800		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	124,950,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	883,680,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	574,080,000	
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	192,325,500	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	250,014,346	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1 Unit	80,114,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1 Unit	83,540,350	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Dinas Operasional Atau Lapangan		Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				Dinas Operasional Atau Lapangan		Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	69,212,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	72,922,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	42,999,500		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	93,551,996	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSRTS)	Smd	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	2,502,014,673	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSRTS)	Smd	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	2,501,994,000	
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Smd	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	60 Orang	2,502,014,673	a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Smd	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	60 Orang	2,501,994,000	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	1,062,089,775		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	1,149,930,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	323,931,259		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	291,323,853	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	213,312,594		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	190,825,945	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	10,434,068		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	22,314,779	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	123,922,727		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	125,784,826	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	37,710,650		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	49,500,000	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan	60 Orang	197,975,170		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan	60 Orang	176,422,348	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi						Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi			
	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	25,824,615		Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	6,800,000	
	Pemulangan ke Daerah Asal	Smd	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	45 Orang	111,800,000		Pemulangan ke Daerah Asal	Smd	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	45 Orang	53,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dok	12,900,000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dok	14,160,000	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	10 Orang	47,950,000		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	10 Orang	5,950,000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	112,250,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	52,250,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	25,800,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	26,880,000	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	60 Orang	192,000,000		Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	60 Orang	332,256,000	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	1 Orang	4,113,815		Pemulasaraan	Smd	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	1 Orang	4,596,249	
JUMLAH DINAS DAN UPTD					147,381,564,000	JUMLAH DINAS DAN UPTD					126,426,721,000	

Terkait Tabel 3. (T.C.31). pada tabel diatas diketahui terjadi perubahan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan pada Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini menjelaskan program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh melalui :

- Rapat Koordinasi Bidang Sosial;
- Rapat Forum Lintas SKPD;
- Rapat Forum Konsultasi Publik.

Dari kegiatan tersebut maka diperoleh usulan dan masukan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur, Instansi terkait, Mitra Sosial dan Masyarakat. Selanjutnya usulan tersebut di verifikasi bersama BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur serta unsur-unsur terkait lainnya. Program dan kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 adalah tindaklanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari :

1. Sekretariat,

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial,

Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, fakir miskin serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan penyuluhan sosial.

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia.

4. Bidang Penanganan Fakir Miskin,

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis penanganan fakir miskin perkotaan, perdesaan dan terluar pesisir.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis pe-nanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial.

Isu-isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat maka akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu Strategis terkait pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pemenuhan pelayanan dasar dalam panti dan terlebih lagi bagi pelayanan luar panti masih tergolong minim;
2. Dengan terus menurunnya Perekonomian Daerah sebagai dampak krisis Ekonomi Global yang mengakibatkan terciptanya PMKS-PMKS baru. Sehingga dipandang perlu perhatian Pemerintah Daerah untuk memberdayakan keterampilan berusaha bagi para PMKS melalui pemberian bantuan KUBE dan bantuan UEP secara maksimal dan terpadu;
3. Program Keluarga Harapan masih menjadi model penanganan PMKS kedepan dengan terus menambah jenis Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan jumlah KPM;

4. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya Penyandang Disabilitas melalui pemenuhan pelayanan dasar dalam panti masih terkendala dengan belum adanya fasilitas panti yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
5. Penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) akan tetap menjadi fokus penanganan PMKS kedepan;
6. Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial mendapat perhatian yang serius dan menjadi komitmen Kepala Daerah dengan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) bersinergi dengan Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Tabel 4 (T-C.32). Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10 Kab/Kota	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	64%	
a.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Kab / Kota	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dok	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Kab / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dok	
b.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Smd	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 Lembaga	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	
	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang	
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	10 Kab / Kota	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Di Pulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	
a.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	10 Kab / Kota	Terlaksanannya Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	10 Kab / Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10 Kab/Kota	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	5.80%	
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	80 Orang	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	16 Orang	
	Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Orang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	10 Kab/Kota	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	20 Orang	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	2 Orang	
	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Smd	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	16 Orang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	5 Dok	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
a	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	10 Kab / Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	6.110 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab / Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	
	Pemulangan ke Daerah Asal	10 Kab / Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	150 Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	2 Dok	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	5770 Orang	
	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	10 Kab / Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	100 Orang	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10 Kab / Kota	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	11.026 Orang	
a	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	10 Kab / Kota	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	
	Pengangkatan Anak Antar WNI	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	
	Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab / Kota	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	11.008 Orang	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Kab / Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4500 Orang	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10 Kab / Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1410 Orang	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab / Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab/Kota	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	10 Kab / Kota	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	100%	
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.870 Orang	
	Penyediaan Permakanan	10 Kab / Kota	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	12500 Orang	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	500 Orang	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Penyediaan Sandang	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	550 Orang	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10 Kab / Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	750 Orang	
	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	10 Kab / Kota	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	
	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	10 Kab / Kota	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	400 Orang	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1 Lokasi	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	
a.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dok	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI					
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Smd	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	130 Orang	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130 Orang	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 Orang	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	130 Orang	
	Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	130 Orang	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	130 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	23 Orang	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	
	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA					
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Smd	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	7 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dok	
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	80 Orang	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Orang	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Orang	
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN					
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Smd	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dok	
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	46 Orang	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Orang	
	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	2 Orang	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	6 Orang	
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA					

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Smd	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	100%	
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	105 Orang	
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dok	
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	24 Orang	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	45 Orang	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	45 Orang	
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL					
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSRTS)	Smd	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Smd	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	60 Orang	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Pemulangan ke Daerah Asal	Smd	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	45 Orang	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dok	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	10 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	60 Orang	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	1 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warganegara; (2) Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Berbagai agenda prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk menuju Indonesia yang lebih baik.

Seiring dengan agenda prioritas tersebut, maka pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), untuk meningkatkan kesejahteraan sosial setinggi-tingginya yang ditandai dengan derajat keberfungsian sosial mereka baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, kelompok, organisasi sosial, dan masyarakat.

Guna mencapai tujuan tersebut diatas pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menerapkan beberapa kebijakan diantaranya meningkatkan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok usaha bersama secara terpadu, pemberdayaan penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya dengan memberikan bantuan stimulan, meningkatkan kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial serta meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran program kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan) serta sebagai panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan di tiap perangkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas;

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Program Prioritas

Menyelaraskan dengan sasaran dan tujuan RKPD Pada Tahun Anggaran 2026 dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Kalimantan Timur maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki strategi utama yaitu Peningkatan Keberdayaan Ekonomi

Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial guna untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Program Prioritas pada tabel berikut :

Tabel 1 Program Prioritas RENJA
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	5.80%	14,839,145,388
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	11.026 Orang	10,855,500,000
3	Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	8,160,727,610
JUMLAH				33,855,372,998

3.3.2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun anggaran 2026 Dinas Sosial merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 6 (Enam) program utama dan 1 (satu) program penunjang lainnya dan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan Utama

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi;
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi;

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi;
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi.

2. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

- a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti dengan sub kegiatan :
 - Permakanan;
 - Penyediaan Sandang;
 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses;
 - Penyediaan Alat Bantu;
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti;
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas;
 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar;
 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas;
 - Pemulasaraan;
 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar.

b. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Permakanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses;
- Penyediaan Alat Bantu;
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- Pemulasaraan;
- Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar;
- Akses ke Layanan Kesehatan Dasar.

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti dengan sub kegiatan :

- Pengasuhan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses;
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- Penyediaan Permakanan;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
- Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi;
- Pemulasaraan;
- Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar;
- Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
- Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar;
- Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti.

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Permakanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses;
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
- Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar;
- Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- Pemulangan ke Daerah Asal;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti;
- Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis;
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis;
- Pemulasaraan.

e. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Makanan;
- Penyediaan Sandang;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
- Pemulangan ke Daerah Asal;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA;
- Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya;

- Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- a. Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal dengan sub kegiatan :
 - Pengangkatan Anak Antar WNI
 - Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga.

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Permakanan;
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
 - Pelayanan Dukungan Psikososial;
 - Penyediaan Sandang;
 - Penyediaan Tempat Penampungan;
 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda;
 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah.

6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dengan sub kegiatan :
 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi;
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi;
 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

B. Program dan Kegiatan Penunjang.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan RPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.3.2 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.

- Program-program yang mengarah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat akan dipadukan dengan RKPD Kaltim 2024-2026 yang sudah ditetapkan. Program yang sudah ditandai sebagai SGDs disepakati menjadi Rencana Aksi Daerah SDGs. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian pembangunan berkelanjutan mengamanatkan agar daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs;

Tabel 1 (T-C 33). Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Dinas Sosial					98,689,629,672				102,719,382,212
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	10 Kab/ Kota	64%	1,111,439,025			64%	1,120,639,025
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Kab/ Kota	15 Dok	105,800,000			15 Dok	115,000,000
1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Kab / Kota	15 Dok	105,800,000	APBD		15 Dok	115,000,000
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Smd	4 Lembaga	1,005,639,025			4 Lembaga	1,005,639,025
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Smd	10 Keluarga	73,463,000	APBD		10 Keluarga	73,463,000
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Smd	30 Lembaga	831,104,599	APBD		30 Lembaga	831,104,599

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Smd	100 Orang	101,071,426	APBD		100 Orang	101,071,426
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Di Pulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	10 Kab/ Kota	1 Orang	5,360,000			2 Orang	15,000,000
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	10 Kab/ Kota	1 Orang	5,360,000			2 Orang	15,000,000
1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kotai	10 Kab / Kota	1 Orang	5,360,000	APBD		1 Orang	15,000,000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	10 Kab/ Kota	5.80%	14,839,145,388			5.80%	15,900,057,928
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	Smd	80 Orang	2,886,858,241			80 Orang	2,947,770,781

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	1,939,087,460	APBD		80 Orang	2,000,000,000
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	314,419,318	APBD		80 Orang	314,419,318
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	16 Orang	31,594,932	APBD		16 Orang	31,594,932
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	13,608,160	APBD		80 Orang	13,608,160
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	27,054,248	APBD		80 Orang	27,054,248
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	14,400,000	APBD		80 Orang	14,400,000
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	102,641,792	APBD		80 Orang	102,641,792
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	8,500,000	APBD		80 Orang	8,500,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	10 Orang	42,000,000	APBD		10 Orang	42,000,000
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	2 Orang	16,800,000	APBD		2 Orang	16,800,000
1.06.04.1.01.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	Smd	10 Kab/Kota	42,000,000	APBD		10 Kab/Kota	42,000,000
1.06.04.1.01.0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	20 Orang	42,000,000	APBD		20 Orang	42,000,000
1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Smd	10 Orang	3,400,000	APBD		10 Orang	3,400,000
1.06.04.1.01.0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Smd	2 Orang	9,192,498	APBD		2 Orang	9,192,498
1.06.04.1.01.0020	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Smd	16 Orang	258,659,982	APBD		16 Orang	258,659,982
1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	5 Dok	21,499,851	APBD		5 Dok	21,499,851

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar								
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	10 Kab/ Kota	6.110 Orang	11,952,287,147			6.110 Orang	12,952,287,147
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	50 Orang	100,083,360	APBD		50 Orang	100,083,360
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	40 Orang	679,641,680	APBD		40 Orang	679,641,680
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Kab / Kota	150 Orang	386,820,000	APBD		150 Orang	386,820,000
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Smd	2 Dok	289,125,807	APBD		2 Dok	289,125,807
1.06.04.1.05.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	5770 Orang	10,407,350,000	APBD		5770 Orang	11,407,350,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.05.0017	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	10 Kab / Kota	100 Orang	89,266,300	APBD		100 Orang	89,266,300
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	10 Kab / Kota	11.026 Orang	10,855,500,000			11.026 Orang	11,355,500,000
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Smd	18 Orang	103,499,822	-		18 Orang	103,499,822
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak Antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Smd	15 Orang	94,629,822	APBD		15 Orang	94,629,822
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Smd	3 Orang	8,870,000	APBD		3 Orang	8,870,000
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	11.008 Orang	10,752,000,178			11.008 Orang	11,252,000,178
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	4500 Orang	8,083,479,280	APBD		4500 Orang	8,583,479,280
1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	1410 Orang	2,345,500,000	APBD		1410 Orang	2,345,500,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab / Kota	10 Kab/Kota	323,020,898	APBD		10 Kab/Kota	323,020,898
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	10 Kab / Kota	100%	8,160,727,610			100%	8,460,727,610
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	10 Kab / Kota	17.870 Orang	8,160,727,610			17.870 Orang	8,460,727,610
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	12500 Orang	5,748,375,960	APBD		10 Kab / Kota	6,048,375,960
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	500 Orang	345,049,750	APBD		10 Kab / Kota	345,049,750
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	100 Orang	302,585,000	APBD		10 Kab / Kota	302,585,000
1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	550 Orang	545,091,600	APBD		10 Kab / Kota	545,091,600
1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	750 Orang	777,374,500	APBD		10 Kab / Kota	777,374,500

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.06.1.01.0015	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Kab / Kota	40 Orang	257,610,368	APBD		10 Kab / Kota	257,610,368
1.06.06.1.01.0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	10 Kab / Kota	400 Orang	184,640,432	APBD		10 Kab / Kota	184,640,432
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	Smd	1 Lokasi	343,447,485			1 Lokasi	343,447,485
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	1 Lokasi	343,447,485			1 Lokasi	343,447,485
1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	1 Dok	32,903,000	APBD		1 Dok	32,903,000
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	1 Makam	165,584,485	APBD		1 Makam	165,584,485
1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	1 Laporan	144,960,000	APBD		1 Laporan	144,960,000
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	Smd	86%	63,374,010,164			86%	65,524,010,164
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	Smd	5 Laporan	500,035,235			5 Laporan	600,035,235

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Smd	7 Dok	281,332,235	APBD		7 Dok	381,332,235
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Smd	2 Dok	55,490,000	APBD		2 Dok	55,490,000
1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Smd	2 Dok	13,490,000	APBD		2 Dok	13,490,000
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Smd	5 Lap	85,834,000	APBD		5 Lap	85,834,000
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Smd	2 Lap	63,889,000	APBD		2 Lap	63,889,000
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	Smd	6 Laporan	56,409,386,920			6 Laporan	58,459,386,920
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	Smd	342 Orang	55,703,227,130	APBD		342 Orang	57,703,227,130
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	2 Dok	506,159,790	APBD		2 Dok	556,159,790
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Smd	2 Dok	95,991,099	APBD		2 Dok	95,991,099

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Smd	2 Dok	6,046,000	APBD		2 Dok	6,046,000
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Smd	4 Lap	93,602,459	APBD		4 Lap	93,602,459
1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Smd	2 Dok	4,360,442	APBD		2 Dok	4,360,442
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Smd	3 Laporan	12,925,358			3 Laporan	12,925,358
1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	1 Dok	4,122,020	APBD		1 Dok	4,122,020
1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	1 Dok	4,346,318	APBD		1 Dok	4,346,318
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Smd	1 Lap	4,457,020	APBD		1 Lap	4,457,020
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	2 Kegiatan	83,284,000			2 Kegiatan	83,284,000
1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Smd	2 Dok	62,481,000	APBD		2 Dok	62,481,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Smd	3 Dok	20,803,000	APBD		3 Dok	20,803,000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	Smd	6 Laporan	1,542,569,054			6 Laporan	1,542,569,054
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Smd	1 Paket	54,193,080	APBD		1 Paket	54,193,080
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Smd	1 Paket	152,187,654	APBD		1 Paket	152,187,654
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Smd	1 Paket	159,425,000	APBD		1 Paket	159,425,000
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Smd	2 Lap	960,785,320	APBD		2 Lap	960,785,320
1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Smd	1 Dok	87,688,000	APBD		1 Dok	87,688,000
1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Smd	1 Dok	128,290,000	APBD		1 Dok	128,290,000
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Smd	2 Laporan	16,059,267			2 Laporan	16,059,267
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Smd	1 Paket	9,519,560	APBD		1 Paket	9,519,560
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Smd	61 Unit	6,539,707	APBD		61 Unit	6,539,707

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	4 Laporan	4,134,597,530			4 Laporan	4,134,597,530
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Smd	1 Lap	46,534,000	APBD		1 Lap	46,534,000
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Smd	1 Lap	841,848,800	APBD		1 Lap	841,848,800
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	5,994,730	APBD		1 Lap	5,994,730
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	3,240,220,000	APBD		1 Lap	3,240,220,000
1.06.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	6 Laporan	675,152,800			6 Laporan	675,152,800
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Smd	3 Unit	89,103,000	APBD		3 Unit	89,103,000
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Smd	17 Unit	179,560,400	APBD		17 Unit	179,560,400
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Smd	250 Unit	206,562,000	APBD		250 Unit	206,562,000
1.06.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Smd	1 Unit	14,040,000	APBD		1 Unit	14,040,000
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Smd	2 Unit	160,719,400	APBD		2 Unit	160,719,400

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Smd	1 Unit	25,168,000	APBD		1 Unit	25,168,000
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI					6,723,864,146				6,953,864,146
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	Smd	86%	1,450,551,146			86%	1,450,551,146
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Smd	1 Laporan	76,680,000			1 Laporan	76,680,000
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	1 Dok	76,680,000	APBD		1 Dok	76,680,000
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	1 Kegiatan	54,768,000			1 Kegiatan	54,768,000
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	54,768,000	APBD		1 Paket	54,768,000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Smd	1 Laporan	200,559,734			1 Laporan	200,559,734
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	Smd	1 Paket	14,794,113	APBD		1 Paket	14,794,113
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	4 Paket	28,056,691	APBD		4 Paket	28,056,691

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Smd	3 Paket	28,701,950	APBD		3 Paket	28,701,950
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	2 Lap	129,006,980	APBD		2 Lap	129,006,980
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	2 Laporan	35,446,512			2 Laporan	35,446,512
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Smd	7 Paket	30,771,050	APBD		7 Paket	30,771,050
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	2 Lap	4,675,462	APBD		2 Lap	4,675,462
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	3 Laporan	872,063,500			3 Laporan	872,063,500
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	1 Lap	3,950,000	APBD		1 Lap	3,950,000
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	1 Lap	292,113,500	APBD		1 Lap	292,113,500
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	2 Lap	576,000,000	APBD		2 Lap	576,000,000
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Smd	3 Laporan	211,033,400			3 Laporan	211,033,400

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Smd	8 Unit	139,347,250	APBD		8 Unit	139,347,250
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Smd	204 Unit	51,686,150	APBD		204 Unit	51,686,150
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Smd	1 Unit	20,000,000	APBD		1 Unit	20,000,000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Smd	100%	5,273,313,000			100%	5,503,313,000
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	Smd	130 Orang	5,273,313,000			130 Orang	5,503,313,000
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	130 Orang	3,512,424,458	APBD		130 Orang	3,712,424,458
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Smd	130 Orang	901,841,170	APBD		130 Orang	901,841,170
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	130 Orang	279,201,572	APBD		130 Orang	279,201,572

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Smd	130 Orang	6,235,690	APBD		130 Orang	6,235,690
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Smd	130 Orang	105,324,798	APBD		130 Orang	105,324,798
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	130 Orang	181,479,389	APBD		130 Orang	181,479,389
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	130 Orang	32,822,196	APBD		130 Orang	32,822,196
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	20 Orang	84,000,000	APBD		20 Orang	84,000,000
1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	5 Orang	42,000,000	APBD		5 Orang	42,000,000
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Smd	23 Orang	105,713,727	APBD		23 Orang	105,713,727

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	5 Orang	850,000	APBD		5 Orang	850,000
1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Smd	126 Orang	21,420,000	APBD		126 Orang	51,420,000
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA					5,092,388,636				5,292,388,636
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	Smd	86%	1,784,333,319			86%	1,784,333,319
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Smd	1 Laporan	79,720,000			1 Laporan	79,720,000
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	1 Dok	79,720,000	APBD		1 Dok	79,720,000
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	1 Kegiatan	35,088,000			1 Kegiatan	35,088,000
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	35,088,000	APBD		1 Paket	35,088,000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Smd	4 Laporan	394,124,532			4 Laporan	394,124,532

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	Smd	1 Paket	10,078,523	APBD		1 Paket	10,078,523
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	5 Paket	305,732,844	APBD		5 Paket	305,732,844
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Smd	1 Paket	3,353,165	APBD		1 Paket	3,353,165
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	1 Lap	74,960,000	APBD		1 Lap	74,960,000
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Smd	1 Laporan	20,157,149			1 Laporan	20,157,149
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Smd	1 Paket	20,157,149	APBD		1 Paket	20,157,149
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	1 Laporan	998,190,320			1 Laporan	998,190,320
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	Smd	1 Lap	2,614,320	APBD		1 Lap	2,614,320
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	1 Lap	350,936,000	APBD		1 Lap	350,936,000
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	644,640,000	APBD		1 Lap	644,640,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Smd	3 Laporan	257,053,318			3 Laporan	257,053,318
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Smd	7 Unit	180,398,750	APBD		7 Unit	180,398,750
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Smd	38 Unit	35,854,568	APBD		38 Unit	35,854,568
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Smd	6 Unit	40,800,000	APBD		6 Unit	40,800,000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Smd	100%	3,308,055,317			100%	3,508,055,317
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	Smd	80 Orang	3,308,055,317			80 Orang	3,508,055,317
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	2,022,734	APBD		80 Orang	2,022,734
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	622,910,482	APBD		80 Orang	622,910,482

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	136,285,956	APBD		80 Orang	136,285,956
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	10,686,200	APBD		80 Orang	10,686,200
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	146,341,545	APBD		80 Orang	146,341,545
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	72,032,480	APBD		80 Orang	72,032,480
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	281,404,920	APBD		80 Orang	281,404,920
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	7 Orang	42,000,000	APBD		7 Orang	42,000,000
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	5 Orang	42,000,000	APBD		5 Orang	42,000,000
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	1,846,608,000	APBD		80 Orang	2,046,608,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	1 Dok	42,000,000	APBD		1 Dok	42,000,000
1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Smd	80 Orang	21,100,000	APBD		80 Orang	21,100,000
1.06.04.1.02.0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	Smd	1 Orang	663,000	APBD		1 Orang	663,000
1.06.04.1.02.0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	2 Orang	8,400,000	APBD			8,400,000
1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	1 Orang	16,800,000	APBD			16,800,000
1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Smd	2 Orang	16,800,000	APBD			16,800,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN					6,102,976,539				6,702,976,539
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	Smd	86%	1,756,671,539			86%	1,756,671,539
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		100				100	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Smd	1 Laporan	76,680,000			1 Laporan	76,680,000
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	1 Dok	76,680,000	APBD		1 Dok	76,680,000
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	1 Kegiatan	44,988,000			1 Kegiatan	44,988,000
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	44,988,000	APBD		1 Paket	44,988,000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Smd	4 Laporan	334,143,329			4 Laporan	334,143,329
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Paket	13,003,039	APBD		1 Paket	13,003,039

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Paket	58,381,470	APBD		1 Paket	58,381,470
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Smd	1 Paket	20,645,820	APBD		1 Paket	20,645,820
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	1 Lap	242,113,000	APBD		1 Lap	242,113,000
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Smd	4 Laporan	1,086,748,710			4 Laporan	1,086,748,710
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	1 Lap	9,280,000	APBD		1 Lap	9,280,000
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	166,810,800	APBD		1 Lap	166,810,800
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	101,497,910	APBD		1 Lap	101,497,910
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	809,160,000	APBD		1 Lap	809,160,000
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Smd	3 Laporan	214,111,500			3 Laporan	214,111,500

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Smd	9 Unit	193,230,000	APBD		9 Unit	193,230,000
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Smd	23 Unit	12,530,000	APBD		23 Unit	12,530,000
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Smd	1 Unit	8,351,500	APBD		1 Unit	8,351,500
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Smd	100%	4,346,305,000			100%	4,946,305,000
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSAAH)	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	Smd	100 Orang	4,346,305,000			100 Orang	4,946,305,000
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	7,200,000	APBD		100 Orang	7,200,000
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	852,635,200	APBD		100 Orang	852,635,200
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	260,642,214	APBD		100 Orang	260,642,214
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	30,178,000	APBD		100 Orang	30,178,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	102,730,020	APBD		100 Orang	102,730,020
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	45,853,724	APBD		100 Orang	45,853,724
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	389,116,760	APBD		100 Orang	389,116,760
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	15 Orang	42,000,000	APBD		15 Orang	42,000,000
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	25 Orang	75,600,000	APBD		25 Orang	75,600,000
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	2,400,728,082	APBD		100 Orang	3,000,728,082
1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	1 Dok	84,000,000	APBD		1 Dok	84,000,000
1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Smd	46 Orang	13,350,000	APBD		46 Orang	13,350,000
1.06.04.1.02.0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	Smd	1 Orang	2,771,000	APBD		1 Orang	2,771,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	2 Orang	8,400,000	APBD		2 Orang	8,400,000
1.06.04.1.02.0021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	Smd	2 Orang	4,200,000	APBD		2 Orang	4,200,000
1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	10 Orang	18,500,000	APBD		10 Orang	18,500,000
1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Smd	6 Orang	8,400,000	APBD		6 Orang	8,400,000
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA					6,006,916,502				6,506,916,502
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	Smd	86%	1,679,479,502			86%	1,679,479,502
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		100%				100%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Smd	1 Laporan	84,840,000			1 Laporan	84,840,000
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	1 Dok	84,840,000	APBD		1 Dok	84,840,000
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	1 Kegiatan	14,688,000			1 Kegiatan	14,688,000
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	14,688,000	APBD		1 Paket	14,688,000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Smd	4 Laporan	348,070,602			4 Laporan	348,070,602
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Paket	36,154,875	APBD		1 Paket	36,154,875
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Paket	88,789,109	APBD		1 Paket	88,789,109
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Smd	1 Paket	17,566,618	APBD		1 Paket	17,566,618
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	1 Lap	205,560,000	APBD		1 Lap	205,560,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Smd	1 Laporan	520,000			1 Laporan	520,000
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Smd	1 Unit	520,000	APBD		1 Unit	520,000
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Smd	3 Laporan	971,360,900			3 Laporan	971,360,900
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	1 Lap	10,440,000	APBD		1 Lap	10,440,000
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	1 Lap	216,320,900	APBD		1 Lap	216,320,900
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	744,600,000	APBD		1 Lap	744,600,000
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Smd	4 Laporan	260,000,000			4 Laporan	260,000,000
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Smd	6 Unit	136,952,560	APBD		6 Unit	136,952,560
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Smd	50 Unit	66,518,508	APBD		50 Unit	66,518,508
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Smd	3 Unit	31,236,400	APBD		3 Unit	31,236,400

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Smd	1 Unit	25,292,532	APBD		1 Unit	25,292,532
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	Smd	100%	4,327,437,000			100%	4,827,437,000
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	Smd	105 Orang	4,327,437,000			105 Orang	4,827,437,000
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	34,944,101	APBD		105 Orang	34,944,101
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	783,880,395	APBD		105 Orang	783,880,395
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	201,989,318	APBD		105 Orang	201,989,318
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	50,396,000	APBD		105 Orang	50,396,000
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	568,118,170	APBD		105 Orang	568,118,170
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	898,361,605	APBD		105 Orang	898,361,605
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan	Smd	40 Orang	12,479,000	APBD		40 Orang	12,479,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi							
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	15 Orang	21,112,200	APBD		15 Orang	21,112,200
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	33,768,300	APBD		105 Orang	33,768,300
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	1,598,307,890	APBD		105 Orang	2,098,307,890
1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	1 Dok	14,848,300	APBD		1 Dok	14,848,300
1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Smd	24 Orang	28,808,300	APBD		24 Orang	28,808,300
1.06.04.1.02.0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	Smd	1 Orang	3,533,249	APBD		1 Orang	3,533,249
1.06.04.1.02.0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	16,464,400	APBD		105 Orang	16,464,400

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	Smd	45 Orang	51,660,000	APBD		45 Orang	51,660,000
1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	10 Orang	4,424,400	APBD		10 Orang	4,424,400
1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Smd	45 Orang	4,341,372	APBD		45 Orang	4,341,372
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL					3,810,945,505				4,410,945,505
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSRTS)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	Smd	86%	1,308,951,505			86%	1,308,951,505
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Smd	1 Laporan	67,560,000			1 Laporan	67,560,000
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	1 Dok	67,560,000	APBD		1 Dok	67,560,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	1 Kegiatan	36,853,858			1 Kegiatan	36,853,858
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	36,853,858	APBD		1 Paket	36,853,858
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Smd	4 Laporan	255,492,901			4 Laporan	255,492,901
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	Smd	1 Paket	4,968,131	APBD		1 Paket	4,968,131
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Paket	88,246,791	APBD		1 Paket	88,246,791
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Smd	1 Paket	2,952,543	APBD		1 Paket	2,952,543
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	1 Lap	159,325,436	APBD		1 Lap	159,325,436
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Smd	2 Laporan	699,030,400			2 Laporan	699,030,400
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	1 Lap	124,950,400	APBD		1 Lap	124,950,400

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	574,080,000	APBD		1 Lap	574,080,000
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Smd	3 Laporan	250,014,346			3 Laporan	250,014,346
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Smd	1 Unit	83,540,350	APBD		1 Unit	83,540,350
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Smd	20 Unit	72,922,000	APBD		20 Unit	72,922,000
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Smd	1 Unit	93,551,996	APBD		1 Unit	93,551,996
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSRTS)	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Smd	100%	2,501,994,000			100%	3,101,994,000
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	Smd	60 Orang	2,501,994,000			60 Orang	3,101,994,000
1.06.04.1.02.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	1,149,930,000	APBD		60 Orang	1,749,930,000
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya	Smd	60 Orang	291,323,853	APBD		60 Orang	291,323,853

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi							
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	190,825,945	APBD		60 Orang	190,825,945
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	22,314,779	APBD		60 Orang	22,314,779
1.06.04.1.02.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	125,784,826	APBD		60 Orang	125,784,826
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	49,500,000	APBD		60 Orang	49,500,000
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	176,422,348	APBD		60 Orang	176,422,348
1.06.04.1.02.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	6,800,000	APBD		60 Orang	6,800,000
1.06.04.1.02.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Smd	45 Orang	53,000,000	APBD		45 Orang	53,000,000
1.06.04.1.02.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Smd	1 Dok	14,160,000	APBD		1 Dok	14,160,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Smd	10 Orang	5,950,000	APBD		10 Orang	5,950,000
1.06.04.1.02.0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	52,250,000	APBD		60 Orang	52,250,000
1.06.04.1.02.0015	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	26,880,000	APBD		60 Orang	26,880,000
1.06.04.1.02.0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	Smd	60 Orang	332,256,000	APBD		60 Orang	332,256,000
1.06.04.1.02.0017	Pemulasaraan	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	Smd	1 Orang	4,596,249	APBD		1 Orang	4,596,249
JUMLAH ANGGARAN DINAS DAN UPTD					126,426,721,000				132,586,473,540

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penanganan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui usaha bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, oleh karena itu Rencana Kerja yang disusun dalam laporan Renja ini harus mengkordinir peran serta pihak-pihak tersebut dalam Penanganan Pembangunan Kesejahteraan Sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Adapun rencana kerja yang disusun antara lain terdiri dari 7 Program dan 52 kegiatan dan 225 Sub Kegiatan yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan UPTD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan untuk tahun 2026 seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
Dinas Sosial							98,689,629,672							102,719,382,212	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	%	%	5.40%	5.80%	14,839,145,388						5.80%	15,900,057,928	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	32.392 Orang	7.720 Orang	7.720 Orang	6.110 Orang	11,952,287,147						6.110 Orang	12,952,287,147	
1.06.04.1.05.005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	100,083,360	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	50 Orang	100,083,360	Dinas Sosial
1.06.04.1.05.007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				40 Orang	679,641,680	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	40 Orang	679,641,680	Dinas Sosial
1.06.04.1.05.010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS				150 Orang	386,820,000	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	150 Orang	386,820,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
		Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal													
1.06.04.1.05.0 011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				2 Dok	289,125,807	Smd	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	2 Dok	289,125,807	Dinas Sosial
1.06.04.1.05.0 015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi				5770 Orang	10,407,350,000	Smd	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	5770 Orang	11,407,350,000	
1.06.04.1.05.0 017	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah				100 Orang	89,266,300	Smd	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	100 Orang	89,266,300	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan,	410 Orang	304 Orang	50 Orang	80 Orang	2,886,858,241						80 Orang	2,947,770,781	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
		rehabilitasi serta bantuan sosial													
1.06.04.1.01.0 001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				80 Orang	1,939,087,460	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	80 Orang	2,000,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0 002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	314,419,318	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	80 Orang	314,419,318	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0 003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				16 Orang	31,594,932	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	16 Orang	31,594,932	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0 004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				80 Orang	13,608,160	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	80 Orang	13,608,160	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0 005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				80 Orang	27,054,248	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	80 Orang	27,054,248	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0 006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				80 Orang	14,400,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	80 Orang	14,400,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
		Kewenangan Provinsi													
1.06.04.1.01.0 007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				80 Orang	102,641,792	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	80 Orang	102,641,792	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0 009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				80 Orang	8,500,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	80 Orang	8,500,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0 010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Orang	42,000,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	10 Orang	42,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0 011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				2 Orang	16,800,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	2 Orang	16,800,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0 015	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang				10 Kab/Ko ta	42,000,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	10 Kab/Ko ta	42,000,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
		Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.													
1.06.04.1.01.0 016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi				20 Orang	42,000,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	20 Orang	42,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0 017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				10 Orang	3,400,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	10 Orang	3,400,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0 019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				2 Orang	9,192,498	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	2 Orang	9,192,498	
1.06.04.1.01.0 020	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi				16 Orang	258,659,982	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	16 Orang	258,659,982	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				5 Dok	21,499,851	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	5 Dok	21,499,851	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	55.130 Orang	1255 Orang	12.500 Orang	11.026 Orang	10,855,500,000						11.026 Orang	11,355,500,000	
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	-	-	18 Orang	18 Orang	103,499,822						18 Orang	103,499,822	
1.06.05.1.01.001	Pengangkatan Anak Antar WNI	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi				15 Orang	94,629,822	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Anak	15 Orang	94,629,822	Dinas Sosial
1.06.05.1.01.002	Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi				3 Orang	8,870,000	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Anak	3 Orang	8,870,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	55.040 Orang	1255 Orang	12.500 Orang	11.008 Orang	10,752,000,178						11.008 Orang	11,252,000,178	
1.06.05.1.02.001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				4500 Orang	8,083,479,280	10 Kab / Kota	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			UEP	4500 Orang	8,583,479,280	Dinas Sosial
1.06.05.1.02.002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				1410 Orang	2,345,500,000	10 Kab / Kota	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			BST	1410 Orang	2,345,500,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.05.1.02.003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				10 Kab/Kota	323,020,898	10 Kab / Kota	Hasil Pengelolaan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			BST	10 Kab/Kota	323,020,898	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	100%	100%	100%	100%	8,160,727,610						100%	8,460,727,610	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	82.240 Orang	2205 Orang	17.870 Orang	17.870 Orang	8,160,727,610						17.870 Orang	8,460,727,610	
1.06.06.1.01.001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				12500 Orang	5,748,375,960	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			Korban Bencana	12500 Orang	6,048,375,960	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.06.1.01.004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				500 Orang	345,049,750	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			Korban Bencana	500 Orang	345,049,750	Dinas Sosial
1.06.06.1.01.005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				100 Orang	302,585,000	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			Korban Bencana	100 Orang	302,585,000	Dinas Sosial
1.06.06.1.01.011	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				550 Orang	545,091,600	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			Korban Bencana	550 Orang	545,091,600	Dinas Sosial
1.06.06.1.01.013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				750 Orang	777,374,500		Pajak Daerah			Korban Bencana	750 Orang	777,374,500	
1.06.06.1.01.015	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya				40 Orang	257,610,368		Pajak Daerah			Korban Bencana	40 Orang	257,610,368	
1.06.06.1.01.018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada				400 Orang	184,640,432	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			Korban Bencana	400 Orang	184,640,432	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
		lokasi rawan bencana													
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	4 Lemba ga	4 Lemba ga	36%	64%	1,111,439,025						64%	1,120,639,025	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	225 Rekom	-	15 Rekom	15 Rekom	105,800,000						15 Rekom	115,000,000	
1.06.02.1.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				15 Dok	105,800,000	10 Kab / Kota	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Undian Gratis Berhadiah	15 Dok	115,000,000	Dinas Sosial
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 Lemba ga	4 Lemba ga	4 Lemba ga	4 Lemba ga	1,005,639,025						4 Lemba ga	1,005,639,025	
1.06.02.1.02.003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				10 Keluarg a	73,463,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Lembaga/P SKS	10 Keluarg a	73,463,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.02.1.02.004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				30 Lembag a	831,104,599	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Lembaga/P SKS	30 Lembag a	831,104,599	Dinas Sosial
1.06.02.1.02.011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				100 Orang	101,071,426	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Lembaga/P SKS	100 Orang	101,071,426	Dinas Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	343,447,485						1 Lokasi	343,447,485	
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	343,447,485						1 Lokasi	343,447,485	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.07.1.01.001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Dok	32,903,000	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Taman Makam Pahlwan	1 Dok	32,903,000	Dinas Sosial
1.06.07.1.01.002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Makam	165,584,485	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Taman Makam Pahlwan	1 Makam	165,584,485	Dinas Sosial
1.06.07.1.01.003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Laporan	144,960,000	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Taman Makam Pahlwan	1 Laporan	144,960,000	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	90%	90%	82%	82%	63,374,010,164						82%	65,524,010,164	
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			100%	100%							100%		
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	25 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	500,035,235						5 Lap	600,035,235	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				7 Dok	281,332,235	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			ASN di Lingkungan Dinsos	7 Dok	381,332,235	Dinas Sosial
1.06.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan RPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dok	55,490,000	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	55,490,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dok	13,490,000	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	13,490,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Lap	85,834,000	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			ASN di Lingkungan Dinsos	5 Lap	85,834,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Lap	63,889,000	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			ASN di Lingkungan Dinsos	2 Lap	63,889,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	10 Lapora n	2 Lapora n	6 Lap	6 Lap	56,409,386,920						6 Lap	58,459,386,920	
1.06.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				342 Orang	55,703,227,130	Smd	Dana Alokasi Umum (DAU)			ASN di Lingkungan Dinsos	342 Orang	57,703,227,130	Dinas Sosial
1.06.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dok	506,159,790	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	556,159,790	Dinas Sosial
1.06.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD				2 Dok	95,991,099	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	95,991,099	Dinas Sosial
1.06.01.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dok	6,046,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	6,046,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD				4 Lap	93,602,459	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	4 Lap	93,602,459	Dinas Sosial
1.06.01.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dok	4,360,442	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	4,360,442	Dinas Sosial
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	3 Lap	3 Lap	12,925,358						3 Lap	12,925,358	
1.06.01.1.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dok	4,122,020	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Dok	4,122,020	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penangu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dok	4,346,318	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Dok	4,346,318	Dinas Sosial
1.06.01.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Lap	4,457,020	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	4,457,020	Dinas Sosial
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	10 Keg	2 Keg	4 Keg	4 Keg	83,284,000						4 Keg	83,284,000	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dok	62,481,000	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	62,481,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.05.005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dok	20,803,000	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	3 Dok	20,803,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	20 Lapora n	4 Lapora n	6 Lap	6 Lap	1,542,569,054						6 Lap	1,542,569,054	
1.06.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				1 Paket	54,193,080	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	54,193,080	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				1 Paket	152,187,654	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	152,187,654	Dinas Sosial
1.06.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				1 Paket	159,425,000	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	159,425,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)				2 Lap	960,785,320	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Lap	960,785,320	Dinas Sosial
1.06.01.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dok	87,688,000	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Dok	87,688,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dok	128,290,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Dok	128,290,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15 Lapora n	3 Lapora n	3 Lap	3 Lap	16,059,267						3 Lap	16,059,267	
1.06.01.1.07.0 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)				1 Paket	9,519,560	Smd	Hasil Pengelolan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	9,519,560	Dinas Sosial
1.06.01.1.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				61 Unit	6,539,707	Smd	Hasil Pengelolan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	61 Unit	6,539,707	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Lapora n	2 Lapora n	3 Lap	3 Lap	4,134,597,530						3 Lap	4,134,597,530	
1.06.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				1 Lap	46,534,000	Smd	Dana Alokasi Umum (DAU)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	46,534,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				1 Lap	841,848,800	Smd	Dana Alokasi Umum (DAU)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	841,848,800	Dinas Sosial
1.06.01.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Lap	5,994,730	Smd	Dana Alokasi Umum (DAU)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	5,994,730	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	3,240,220,000	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	3,240,220,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Laporan	4 Laporan	6 Lap	6 Lap	675,152,800						6 Lap	675,152,800	
1.06.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)				3 Unit	89,103,000	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	3 Unit	89,103,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daerah				
1.06.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				9 Unit	179,560,400	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	9 Unit	179,560,400	Dinas Sosial
1.06.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				200 Unit	206,562,000	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	200 Unit	206,562,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.09.008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				8 Unit	14,040,000	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	8 Unit	14,040,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				1 Unit	160,719,400	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	160,719,400	Dinas Sosial
1.06.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				1 Unit	25,168,000	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	25,168,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI							6,723,864,146							6,953,864,146	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	90%	90%	82%	82%	1,450,551,146						82%	1,450,551,146	
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			100%	100%							100%		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	76,680,000						1 Lap	76,680,000	
1.06.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	76,680,000	Smd	Dana Bagi Hasil			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Dok	76,680,000	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiat an	54,768,000						1 Kegiat an	54,768,000	
1.06.01.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	54,768,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	54,768,000	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	200,559,734						4 Laporan	200,559,734	
1.06.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan				1 Paket	14,794,113	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	14,794,113	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	28,056,691	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	4 Paket	28,056,691	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	28,701,950	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	3 Paket	28,701,950	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Lap	129,006,980	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Lap	129,006,980	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Lapora n	3 Lapora n	2 Lap	2 Lap	35,446,512						2 Lap	35,446,512	
1.06.01.1.07.0 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Paket	30,771,050	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	7 Paket	30,771,050	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Lap	4,675,462	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Lap	4,675,462	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Lapora n	2 Lapora n	2 Lap	2 Lap	872,063,500						2 Lap	872,063,500	
1.06.01.1.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap	3,950,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	3,950,000	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap	292,113,500	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	292,113,500	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Lap	576,000,000	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Lap	576,000,000	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	15 Lapora n	3 Lapora n	3 Lap	3 Lap	211,033,400						3 Lap	211,033,400	
1.06.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	139,347,250	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	8 Unit	139,347,250	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				204 Unit	51,686,150	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	290 Unit	51,686,150	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	20,000,000	Smd	Hasil Pengelolaan an			Sarana dan Prasarana Kantor	7 Unit	20,000,000	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
	dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi							Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	550 Orang	110 Orang	100%	100%	5,273,313,000						100%	5,503,313,000	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	646 Orang	110 Orang	110 Orang	130 Orang	5,273,313,000						130 Orang	5,503,313,000	
1.06.04.1.03.001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				130 Orang	3,512,424,458	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	130 Orang	3,712,424,458	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				130 Orang	901,841,170	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	130 Orang	901,841,170	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				130 Orang	279,201,572	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	130 Orang	279,201,572	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.04.1.03.004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				130 Orang	6,235,690	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	130 Orang	6,235,690	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				130 Orang	105,324,798	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	130 Orang	105,324,798	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				130 Orang	181,479,389	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	130 Orang	181,479,389	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				130 Orang	32,822,196	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	130 Orang	32,822,196	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				20 Orang	84,000,000	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	20 Orang	84,000,000	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.04.1.03.0 011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				5 Orang	42,000,000	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	5 Orang	42,000,000	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.0 012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				23 Orang	105,713,727	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	23 Orang	105,713,727	
1.06.04.1.03.0 015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				5 Orang	850,000	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	5 Orang	850,000	
1.06.04.1.03.0 016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				126 Orang	21,420,000	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	126 Orang	51,420,000	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA						5,092,388,636							5,292,388,636		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	90%	90%	82%	82%	1,784,333,319						82%	1,784,333,319	
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			100%	100%							100%		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	79,720,000						1 Lap	79,720,000	
1.06.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	79,720,000	Smd	Dana Bagi Hasil			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Dok	79,720,000	UPTD PSPAD
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Keg	1 Keg	35,088,000						1 Keg	35,088,000	
1.06.01.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	35,088,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	35,088,000	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	394,124,532						4 Laporan	394,124,532	
1.06.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan				1 Paket	10,078,523	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	10,078,523	UPTD PSPAD
1.06.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	305,732,844	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	5 Paket	305,732,844	UPTD PSPAD
1.06.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,353,165	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	3,353,165	UPTD PSPAD
1.06.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	74,960,000	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	74,960,000	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	10 Lapora n	3 Lapora n	2 Lap	2 Lap	20,157,149						2 Lap	20,157,149	
1.06.01.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	20,157,149	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	20,157,149	UPTD PSPAD
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Lapora n	2 Lapora n	2 Lap	2 Lap	998,190,320						2 Lap	998,190,320	
1.06.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan				1 Lap	2,614,320	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	2,614,320	UPTD PSPAD
1.06.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap	350,936,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	350,936,000	UPTD PSPAD
1.06.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	644,640,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	644,640,000	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	15 Lapora n	3 Lapora n	3 Lap	3 Lap	257,053,318						3 Lap	257,053,318	
1.06.01.1.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	180,398,750	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	7 Unit	180,398,750	UPTD PSPAD
1.06.01.1.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	35,854,568	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	38 Unit	35,854,568	UPTD PSPAD
1.06.01.1.09.0 009	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				6 Unit	40,800,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	6 Unit	40,800,000	UPTD PSPAD
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	400 Orang	80 Orang	100%	100%	3,308,055,317						100%	3,508,055,317	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	400 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	3,308,055,317						80 Orang	3,508,055,317	
1.06.04.1.02.001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				80 Orang	2,022,734	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	2,022,734	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	622,910,482	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	622,910,482	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				80 Orang	136,285,956	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	136,285,956	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				80 Orang	10,686,200	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	10,686,200	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.04.1.02.006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				80 Orang	146,341,545	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	146,341,545	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				80 Orang	72,032,480	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	72,032,480	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				80 Orang	281,404,920	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	281,404,920	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				7 Orang	42,000,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	42,000,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				5 Orang	42,000,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	42,000,000	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				80 Orang	1,846,608,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	2,046,608,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dok	42,000,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	42,000,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis				80 Orang	21,100,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	21,100,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi				1 Orang	663,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	20 Dok	663,000	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.04.1.02.0 020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				2 Orang	8,400,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	8,400,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.0 022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				1 Orang	16,800,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	16,800,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.0 023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				2 Orang	16,800,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	20 Dok	16,800,000	UPTD PSPAD
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN							6,102,976,539							6,702,976,539	
1.06.04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	90%	90%	82%	82%	1,756,671,539						82%	1,756,671,539	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			100%	100%							100%		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	76,680,000						1 Lap	76,680,000	
1.06.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	76,680,000	Smd	Dana Bagi Hasil			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Dok	76,680,000	UPTD PSAAH
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Keg	1 Keg	44,988,000						1 Keg	44,988,000	
1.06.01.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	44,988,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	44,988,000	UPTD PSAAH
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	20 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	334,143,329						4 Lapora n	334,143,329	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13,003,039	Smd	Hasil Pengelolan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	13,003,039	UPTD PSAAH
1.06.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	58,381,470	Smd	Hasil Pengelolan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	58,381,470	UPTD PSAAH
1.06.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,645,820	Smd	Hasil Pengelolan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	20,645,820	UPTD PSAAH
1.06.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	242,113,000	Smd	Hasil Pengelolan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	242,113,000	UPTD PSAAH
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	10 Lapora n	2 Lapora n	4 Lap	4 Lap	1,086,748,710						4 Lap	1,086,748,710	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan				1 Lap	9,280,000	Smd	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	9,280,000	UPTD PSAAH
1.06.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	166,810,800	Smd	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	166,810,800	UPTD PSAAH
1.06.01.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Lap	101,497,910	Smd	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	101,497,910	UPTD PSAAH
1.06.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayananan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	809,160,000	Smd	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	809,160,000	UPTD PSAAH
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	3 Lap	214,111,500						3 Lap	214,111,500	
1.06.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	193,230,000	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	9 Unit	193,230,000	UPTD PSAAH

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	12,530,000	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	23 Unit	12,530,000	UPTD PSAAH
1.06.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8,351,500	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	8,351,500	UPTD PSAAH
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	500 Orang	80 Orang	100%	100%	4,346,305,000						100%	4,946,305,000	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSAAH)	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	500 Orang	80 Orang	80 Orang	100 Orang	4,346,305,000						100 Orang	4,946,305,000	
1.06.04.1.02.001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				100 Orang	7,200,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	7,200,000	UPTD PSAAH

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.04.1.02.0 003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	852,635,200	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	852,635,200	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0 004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				100 Orang	260,642,214	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	260,642,214	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0 005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	30,178,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	30,178,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0 006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	102,730,020	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	102,730,020	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0 007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				100 Orang	45,853,724	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	45,853,724	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0 009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				100 Orang	389,116,760	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	389,116,760	UPTD PSAAH

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				15 Orang	42,000,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	15 Orang	42,000,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				25 Orang	75,600,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	25 Orang	75,600,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	2,400,728,082	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	3,000,728,082	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dok	84,000,000		Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	1 Dok	84,000,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis				46 Orang	13,350,000		Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	46 Orang	13,350,000	UPTD PSAAH

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.04.1.02.0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi				1 Orang	2,771,000		Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	1 Orang	2,771,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				2 Orang	8,400,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	2 Orang	8,400,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi				2 Orang	4,200,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	2 Orang	4,200,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				10 Orang	18,500,000		Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	10 Orang	18,500,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				6 Orang	8,400,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	6 Orang	8,400,000	UPTD PSAAH

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA							6,006,916,502							6,506,916,502	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	90%	90%	82%	82%	1,679,479,502						82%	1,679,479,502	
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			100%	100%							100%		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	84,840,000						1 Lap	84,840,000	
1.06.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	84,840,000	Smd	Dana Bagi Hasil			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Dok	84,840,000	UPTD PSBR
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Keg	1 Keg	14,688,000						1 Keg	14,688,000	
1.06.01.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	14,688,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	14,688,000	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	20 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	348,070,602						4 Lapora n	348,070,602	
1.06.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	36,154,875	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	36,154,875	UPTD PSBR
1.06.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	88,789,109	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	88,789,109	UPTD PSBR
1.06.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17,566,618	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	17,566,618	UPTD PSBR
1.06.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	205,560,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	205,560,000	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Lapora n	1 Lapora n	1 Lap	1 Lap	520,000						1 Lap	520,000	
1.06.01.1.07.0 009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	520,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	520,000	UPTD PSBR
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	15 Lapora n	3 Lapora n	3 Lap	3 Lap	971,360,900						3 Lap	971,360,900	
1.06.01.1.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan				1 Lap	10,440,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	10,440,000	UPTD PSBR
1.06.01.1.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap	216,320,900	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	216,320,900	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	744,600,000	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	744,600,000	UPTD PSBR
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	20 Lapora n	4 Lapora n	4 Lap	4 Lap	260,000,000						4 Lap	260,000,000	
1.06.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	136,952,560	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	6 Unit	136,952,560	UPTD PSBR
1.06.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	66,518,508	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	50 Unit	66,518,508	UPTD PSBR
1.06.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi				3 Unit	31,236,400	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	3 Unit	31,236,400	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penangu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,292,532	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	25,292,532	UPTD PSBR
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	525 Orang	75 Orang	100%	100%	4,327,437,000						100%	4,827,437,000	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	525 Orang	75 Orang	105 Orang	85 Orang	4,327,437,000						85 Orang	4,827,437,000	
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				105 Orang	34,944,101	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	34,944,101	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				105 Orang	783,880,395	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	783,880,395	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				105 Orang	201,989,318	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	201,989,318	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.04.1.02.005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				105 Orang	50,396,000	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	50,396,000	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				105 Orang	568,118,170	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	568,118,170	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				105 Orang	898,361,605	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	898,361,605	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				40 Orang	12,479,000	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	40 Orang	12,479,000	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				15 Orang	21,112,200	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	15 Orang	21,112,200	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				105 Orang	33,768,300	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	33,768,300	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				105 Orang	1,598,307,890	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	2,098,307,890	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dok	14,848,300	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	1 Dok	14,848,300	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis				24 Orang	28,808,300	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	24 Orang	28,808,300	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi				1 Orang	3,533,249		Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	1 Orang	3,533,249	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian n RKPD Tahun 2023	Capaian n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.04.1.02.0 020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				105 Orang	16,464,400		Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	16,464,400	
1.06.04.1.02.0 021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi				45 Orang	51,660,000	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	45 Orang	51,660,000	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.0 022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				10 Orang	4,424,400		Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	10 Orang	4,424,400	
1.06.04.1.02.0 023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				45 Orang	4,341,372	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	45 Orang	4,341,372	UPTD PSBR
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL							3,810,945,505							4,410,945,505	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSRTS)	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	90%	90%	82%	82%	1,308,951,505						82%	1,308,951,505	
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			100%	100%							100%		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	67,560,000						1 Lap	67,560,000	
1.06.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	67,560,000	Smd	Dana Bagi Hasil			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Dok	67,560,000	UPTD PSRTS
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	36,853,858						1 Keg	36,853,858	
1.06.01.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	36,853,858	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	36,853,858	UPTD PSRTS
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	255,492,901						4 Laporan	255,492,901	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
		akuntabilitas daerah													
1.06.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan				1 Paket	4,968,131	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	4,968,131	UPTD PSRTS
1.06.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	88,246,791	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	88,246,791	UPTD PSRTS
1.06.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,952,543	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	2,952,543	UPTD PSRTS
1.06.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	159,325,436	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	159,325,436	UPTD PSRTS

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penangu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	10 Laporan	2 Laporan	2 Lap	2 Lap	699,030,400						2 Lap	699,030,400	
1.06.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap	124,950,400	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Lap	124,950,400	UPTD PSRTS
1.06.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	574,080,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	574,080,000	UPTD PSRTS
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	3 Lap	250,014,346						3 Lap	250,014,346	
1.06.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	83,540,350	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	83,540,350	UPTD PSRTS

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	72,922,000	Smd	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	20 Unit	72,922,000	UPTD PSRTS
1.06.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi				1 Unit	93,551,996	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	93,551,996	UPTD PSRTS
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSRTS)	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	300 Orang	35 Orang	100%	100%	2,501,994,000						100%	3,101,994,000	
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	300 Orang	35 Orang	35 Orang	60 Orang	2,501,994,000						60 Orang	3,101,994,000	
1.06.04.1.02.001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				60 Orang	1,149,930,000	Smd	Pajak Daerah			Gelandanga n dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	1,749,930,000	UPTD PSRTS

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.04.1.02.002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				60 Orang	291,323,853	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	291,323,853	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				60 Orang	190,825,945	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	190,825,945	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				60 Orang	22,314,779	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	22,314,779	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				60 Orang	125,784,826	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	125,784,826	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				60 Orang	49,500,000	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	49,500,000	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				60 Orang	176,422,348	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	176,422,348	UPTD PSRTS

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangk t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.04.1.02.009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				60 Orang	6,800,000		Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	6,800,000	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				45 Orang	53,000,000		Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	45 Orang	53,000,000	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				1 Dok	14,160,000		Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	1 Dok	14,160,000	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi				10 Orang	5,950,000	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	10 Orang	5,950,000	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				60 Orang	52,250,000		Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	52,250,000	UPTD PSRTS

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daer ah				
1.06.04.1.02.0 015	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				60 Orang	26,880,000		Pajak Daerah			Gelandanga n dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	26,880,000	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.0 016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan				60 Orang	332,256,000		Pajak Daerah			Gelandanga n dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	332,256,000	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.0 017	Pemulasaraan	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi				1 Orang	4,596,249		Pajak Daerah			Gelandanga n dan Pengemis di Dalam Panti	1 Orang	4,596,249	UPTD PSRTS
JUMLAH ANGGARAN DINAS DAN UPTD TAHUN 2026							126,426,721,000		ANGGARAN TAHUN 2027				132,586,473,540		

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dalam menunjang tercapainya Sasaran Pembangunan yang dioperasikan melalui Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir Rencana Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026

Dengan adanya Rancangan Akhir Renja Dinas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

RENJA TAHUN 2026
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

Bab I. Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Azas dan Tujuannya adalah : 1). Pembangunan diselenggarakan berdasarkan Demokrasi, dengan Prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan Lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional; 2). Perencanaan Pembangunan disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan; 3). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Azas Umum Penyelenggaraan Negara; dan 4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : a). mendukung Koordinasi antar pelaku Pembangunan; b). menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi baik antar Daerah, antar Ruang, antar Waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c). menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara **Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengawasan**; d). mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat; dan e). menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara Efisien, Efektif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.

Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat 4 (empat) tahapan Perencanaan meliputi : a). Penyusunan Rencana; b). Penetapan Rencana; c). Pengendalian pelaksanaan Rencana; dan d). Evaluasi pelaksanaan Rencana. Dalam rangka Penyusunan Rencana Perangkat Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Renstra-PD dan mengacu pada RPD Tahun 2024-2026 yang disampaikan pada Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 sebagai bahan masukan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menjadi Pedoman penyusunan RAPBD dan RAPBN TA. 2026.

Berdasarkan Azas, Tujuan dan Tahapan Perencanaan Pembangunan tersebut di atas Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2026, mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, memperhatikan usulan Bidang Teknis Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, memperhatikan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Arah Kebijakan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan pada Forum Konsultasi Publik 2025 serta arahan Rakortekrenbang Nasional 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 131, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5050);
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 12/MEN/IV/2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Program Bidang Ketenagakerjaan dan Ketramigrasian.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Otonom Baru.

13. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
16. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang RKPD Tahun 2026.
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor / / / DTKT-I/2025 tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud.

Mensinergikan Perencanaan Program sebagaimana Rencana Program yang akan dituangkan dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026 maupun RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Tahun 2024-2026, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat yang terangkum dalam hasil Musrenbang baik tingkat Kabupaten/Kota, Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur Tahun 2025.

2. Tujuan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, adalah sebagai Pedoman dan bahan penyusunan Program Kegiatan yang Konsisten, Implementatif dan bisa menjadi Tolak Ukur penilaian Kinerja yang pendanaannya melalui Alokasi APBD dan APBN Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD

1. Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2024 dan Otonom Baru.

Maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar Substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan Capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

Bab ini berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan terdiri dari : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan, penjelasan rumusan Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah Pelaksanaan, rencana tindak lanjut Perangkat Daerah.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur menangani urusan wajib Ketenagakerjaan dan urusan pilihan Ketransmigrasian. Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2024 - 2029 terdiri dari 7 (tujuh) Program yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Pengawasan Ketenagakerjaan, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 (dua) UPTD yaitu : UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Balikpapan, dan UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Bontang.

Adapun capaian (Realisasi) Tahun 2024 hingga triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan yaitu :
 - Dinas:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan target 59 orang dan realisasi kinerja sebanyak 136 orang, sehingga persentase realisasi fisik sebesar 91,97% dan realisasi keuangan sebesar 88,48%.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan target 10 LPK dan realisasi kinerja sebanyak 8 LPK, sehingga persentase realisasi fisik sebesar 93,27% dan realisasi keuangan sebesar 89,78%.
 - c. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah dengan target dan realisasi kinerja sebanyak 20 Perusahaan,

sehingga persentase realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,82%.

- UPTD. BLKI Balikpapan

a. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan target 1.040 orang dan realisasi kinerja sebanyak 624 orang, sehingga persentase realisasi fisik sebesar 94,73% dan realisasi keuangan sebesar 84,20%.

b. UPTD. BLKI Bontang

Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan target 512 orang dan realisasi kinerja sebanyak 176 orang, sehingga persentase realisasi fisik sebesar 94,65% dan realisasi keuangan sebesar 86,71%.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja melalui kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik sebesar 91,16% yaitu pencaker yang ditempatkan dari target tercapai sebanyak 180 orang dan realisasi keuangan sebesar 90,89%.

b. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 68,16% dengan target dan output kinerja sebanyak 15 LPTKS.

c. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan realisasi fisik sebesar 83,17% dan realisasi keuangan sebesar 79,67% dengan target 2 (dua) aplikasi dan realisasi 1 (satu) aplikasi.

d. Kegiatan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan realisasi fisik sebesar 56,05% dengan realisasi kinerjanya 13 TKA yang diterbitkan notifikasinya dari target yang ditetapkan 20 TKA dan realisasi keuangan sebesar 47,38%.

3. Program Hubungan Industrial melalui kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik sebesar 99,96% dan realisasi keuangan 96,46% dengan realisasi kinerja 104 SK yang diterbitkan dari target yang ditetapkan sebanyak 100 SK.
 - b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi dengan realisasi fisik sebesar 92,53% dan realisasi keuangan sebesar 89,03% dengan target dan realisasi kinerja tercapai sebanyak 40 (empat puluh) perusahaan.
 - c. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dengan realisasi fisik sebesar 87,34% dan realisasi keuangan 83,84% dengan target dan realisasi kinerja tercapai sebanyak 10 (empat puluh) SK yang diterbitkan.
4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan melalui kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan target kinerja 3.800 perusahaan dengan realisasi fisik sebesar 87,85% atau 3.651 perusahaan dan realisasi keuangan sebesar 84,36% .
5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi melalui kegiatan yaitu :
 - a. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi dengan realisasi fisik sebesar 65,25% dan realisasi keuangan sebesar 59,50%dengan target dan realisasi kinerja tercapai sebanyak 1 (satu) dokumen.
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi melalui kegiatan yaitu:

a. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan realisasi fisik sebesar 71,44% dan realisasi keuangan sebesar 64,44% dengan target dan realisasi kinerja tercapai sebanyak 1 (satu) dokumen.

7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui kegiatan yaitu:

a. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Provinsi dengan realisasi fisik sebesar 81,58% dan realisasi keuangan sebesar 74,59% dengan target dan realisasi kinerja tercapai sebanyak 1 (satu) dokumen.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1	Mewujudkan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang berkualitas	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi	85%	85,02%	100,02%
2	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	75%	79,64%	87,85%
3	Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial (%)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya penerapan norma ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Kasus dan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan	100%	100%	100%
5	Mewujudkan Transmigrasi Sejahtera	Jumlah Transmigran Mandiri (Kimtrans)	1 Kimtrans	1 Kimtrans	100%

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangk at Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KETENAGAKERJAAN									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i>	86 Indeks	85,02	83	83,07	103,68	82 Indeks		
		<i>Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti</i>	100 Persen	100 Persen	100 Persen			100 Persen		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi</i>	10 dokumen	10	10	10	100	10		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 dokumen	3	3	3	100	3		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar</i>	2 dokumen	2	2	2	100	2		

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5 laporan	5	5	5	100	5		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan</i>	1 Laporan	1	1	1	100	1		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	190 Orang	142	142	142	100	229 orang /12 bulan		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 dokumen	1	1	1	100	1		
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang di Verifikasi</i>	1 Dokumen	1	1	1	100	1		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan</i>	1 Dokumen	1	1	1	100	1		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun</i>	1 Laporan	1	1	1	100	1		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Tersedianya Laporan Keuangan</i>	1 Laporan	1	1	1	100	1	1	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian</i>	12 bulan	12	12	12	100	1		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	190 paket	142	142	142	100	142		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi</i>	1 dokumen	1	1	1	100	1		

		<i>Kepegawaian</i>								
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	15 orang	15	0	0	0	0		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis</i>	20 pegawai	5	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	1	1	1	100	1		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	5	5	5	100	5		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	20 paket	63	63	63	100	63		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Jenis Bahan Logistik yang diadakan</i>	15 jenis	15	15	15	100	15		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Item Penggandaan dan Barang Cetak</i>	12 paket	12	12	12	100	12		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 laporan	12	12	12	100	12		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1 Dokumen	1	1	1	100	1		

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	2 unit	2	2	2	100	2		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	1	1	1	100	1		
	Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	1	1	1	100	1		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Dokumen	1	1	1	100	1		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12	12	12	100	12		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12	12	12	100	12		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1	1	1	100	1		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12	12	12	1001	12		

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Dokumen	1	1	1	100	1		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	2	Unit	2	2	2	100	2		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara berkala</i>	16	Unit	16	16	16	100	16		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	2	Unit	2	2	2	100	2		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1	Unit	1	1	1	100	1		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2	Unit	2	2	2	100	2		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1	Unit	1	1	1	100	1		
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kab/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	75	%	75	75	75	100	75		

	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah</i>	7 dokumen	7	7	7	100	1		
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)</i>	1 dokumen	7	7	7	100	1		
	Fasilitasi Penyusunan rencana Tenaga Kerja Mikro	<i>Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro</i>	30 orang	30	30	30	100	30		
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</i>	65 %	75,63	75,63	75,63	100	75,63		
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	<i>Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan yang Bekerja</i>	59 orang	59	59	59	100	59		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	<i>Jumlah Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi</i>	352 orang	423	455	455	100	59		
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	<i>Instruktur yang Tersertifikasi</i>	10 Lembaga	15	15	15	100	15		
	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	<i>Jumlah LPK yang terAkreditasi</i>	10 Laporan	10	10	10	100	10		

	Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	<i>Jumlah LPK yang terAkreditasi</i>	10 LPK	10	10	10	100	10		
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	<i>Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang Ditingkatkan Produktivitasnya</i>	1 Laporan	1	1	1	100	1		
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	<i>Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>	20 Perusahaan	20	20	20	100	20		
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</i>	1 Laporan	1	1	1	100	1		
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>	1 Dokumen	1	1	1	100	1		
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan</i>	27,10 %	27,10	27,10	27.10	100	27.10		
	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pencari kerja yang ditempatkan</i>	180 orang	180	180	180	100	180		
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	<i>Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/ atau Ditingkatkan Kompetensinya</i>	240 orang	240	240	240	100	240		
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>	180 orang	180	180	180	100	180		

	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permbinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL</i>	10.000 orang	10.000	10.000	10.000	100	10.000		
	Perluasan Kesempatan Kerja	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan melalui Program Perluasan Ksempatan Kerja</i>	160 orang	160	160	160	100	160		
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin</i>	15 LPTKS	15	15	15	100	15		
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	<i>Jumlah LPTKS yang terinventarisasi</i>	15 Lembaga	15	15	15	100	15		
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	<i>Jumlah LPTKS yang diawasi</i>	20 Lembaga	20	5	9	180	15		
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Aplikasi Pasar Kerja Online</i>	1 Aplikasi	1	1	1	100	2		
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar kerja Online</i>	1 Dokumen	1	1	1	100	1		
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam pasar kerja melalui Sistem Online (KarirHub)</i>	50.000 orang	50.000	50.000	50.000	100	50.000		
	Job Fair/Bursa Kerja	<i>Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair</i>	220 orang	220	220	220	100	220		
	Pengesahan RPTKA	<i>Jumlah TKA yang</i>	20 orang	20	20	20	100	20		

	Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>diterbitkan Notifikasinya</i>								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya</i>	40 orang	40	40	40	100	40		
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial</i>	65 %	65	65	65	100	65		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Data Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</i>	100 Laporan	100	100	100	100	100		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online</i>	40 Perusahaan	40	40	40	100	40		
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan	<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan</i>	40 Perusahaan	40	40	40	100	40		

	Industrial	<i>Terdaftar di WLKP Online</i>								
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<i>Jumlah Data dan informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek</i>	1 Laporan	1	1	1	100	1		
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pembinaan dalam Rangka Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</i>	40 Perusahaan	40	40	40	100	40		
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	1 Perkara	1	1	1	100	1		
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>	10 perkara	10	10	10	100	10		

	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10	10	10	100	10		
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>	4 Lembaga	7	7	7	100	7		
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)	<i>Jumlah SK Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota</i>	10 SK	10	10	10	100	10		
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	<i>Jumlah penetapan UMP</i>	1 SK	1	1	1	100	1		
	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	<i>Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan</i>	10 SK	10	10	9	100	9		
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</i>	10.000 orang	10.000	10.000	10.000	100	10.000		
6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	<i>Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak -</i>	17,64 Persen	17,64	17,64	17,64	100	17,64		

		<i>hak dasarnya</i>								
	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Dilindungi Hak-hak Dasarnya</i>	3.800 Perusahaan	3.800	3.651	3.651	96	3.800		
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)</i>	320 Perusahaan	320	266	266	96	320		
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	<i>Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan</i>	1 kasus	1	1	1	100	1		
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3</i>	520 Perusahaan	520	260	260	50	260		
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	<i>Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</i>	1 Dokumen	1	1	1	100	1		
7	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase Luas Pembangunan di Kawasan Transmigrasi</i>	70 %	1	1	1	100	1		
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi</i>	1 Dokumen	1	1	1	100	1		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu)</i>	1 Dokumen	1	1	1	100	1		

	Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>								
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Pemukiman</i>	1 Dokumen	1	1	1	100	1		
	Pemidahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	<i>Jumlah Transmigran yang Ditempatkan</i>	5 KK	5	0	0	0	0		
	Pelatihan Transmigrasi	<i>Jumlah Calom Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan</i>	40 Orang	40	40	40	100	40		
	Pelayanan Kesehatan Transmigran	<i>Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran</i>	10 KK	10	10	10	100	10		
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	<i>Jumlah Lokasi Transmigran yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi</i>	1 lokasi	1	1	1	100	1		
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan</i>	100 %	1	1	1	100	1		
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitas, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan</i>	1 Kimtrans	1	1	1	100	1		

	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	<i>Jumlah KK Transmigran yang Dibina</i>	60 KK	60	60	60	100	60		
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	<i>Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan</i>	1 Pemukiman	1	1	1	100	1		
	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i>	86 %	82	82	82	100	82		
		<i>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindak lanjuti</i>	100 %	100	100	100	100	10		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan</i>	1 laporan	1	1	1	100	1		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	1	1	1	100	1		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	12 Bulan	1	1	1	100	1		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi</i>	1 Dokumen	1	1	1	100	1		

		Kepegawaian								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	24 paket	24	24	24	0	24		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</i>	12 Bulan	12	12	12	100	1		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 paket	12	12	12	100	1		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	6	6	6	100	6		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.</i>	3 paket	3	3	3	100	3		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan</i>	12 Paket	12	12	12	100	12		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	12	12	12	100	12		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12	12	12	100	12		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	12 Bulan	12	12	Bulan	12	1		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Jasa Surat Menyurat</i>	100 Dokumen	57	12	Bulan	12	12		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Bulan Jasa tagihan Listrik, Telepon dan Air PDAM</i>	12 Bulan	12	12	Bulan	12	12		
	Pemeliharaan Barang	<i>Pemeliharaan</i>	12 Bulan	12	12	Bulan	12	1		

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gedung dan Bangunan Kantor								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Mobil Jabatan yang dipelihara secara berkala</i>	5 Unit	0	4	4	100	1		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara berkala</i>	4 Unit	4	0	0	0	2		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung yang dipelihara</i>	5 Unit	0	0	0	0	1		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1	12	12	100	1		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)</i>	85 %	67.19	85	77.68	91.38	75		
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	<i>Jumlah Diklat yang dilaksanakan</i>	128 Orang	128	1.120	1.120	111.11	1.040		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	128 Orang	128	1120	1120	111.11	1040		

	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	<i>Jumlah Instruktur yang di latih</i>	10 Orang	10	0	0	0	0		
	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i>	83 %	80.36	83	94.37	113.70	82		
		<i>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindak lanjuti</i>	100 %	100	100	100	100	10		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Administrasi</i>	12 Bulan	12	1	1	100	1		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Laporan Administrasi</i>	12 Bulan	12	12	12	100	1		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan</i>	12 Bulan	12	12	12	100	1		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan</i>	31 Stel	31	12	12	100	30		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat</i>	12 Bulan	12	12	12	100	1		

		Daerah								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Komponen Peralatan Listrik</i>	4 Jenis	4	7	4	57.14	12		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor</i>	4 Unit	4	4	0	0	6		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Bahan Logistik yang diadakan</i>	17 Jenis	17	2	2	100	12		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	5 Jenis	5	9	9	100	12		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Bulan tagihan Listrik, Telepon dan Air PDAM</i>	12 Bulan	12	12	12	100	1		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12	3	3	100	12		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	12 Bulan	12	12	12	100	1		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	3 Unit	3	1	1	100	1		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang dipeihara</i>	12 Bulan	12	1	1	100	2		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA	<i>Persentase Lulusan Pelatihan yang</i>	85 %	31.25	85	29.55	34.76	75		

	DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>ditempatkan (BLKI Bontang)</i>								
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	<i>Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi</i>	48 Orang	48	176	176	100	512		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	<i>Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi</i>	48 Orang	48	176	176	100	512		
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	<i>Jumlah MoU Kerjasama Lembaga Pemerintah dan Swasta dengan UPTD.BLKI Bontang</i>	5 Dokumen	5	0	0	0	20		
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	<i>Jumlah Sarana/ Peralatan/Mesin Penunjang Kegiatan Pelatihan</i>	6 Jenis	6	0	0	0	10		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Berdasarkan Renstra dan Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2029 target dan capaian kinerja yang telah ada akan dicapai sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
PROVINSI KALTIM

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	- (PP RI No. 2 Tahun 2018)	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	52	53	54	55	68,43	-	98,55	100	
2	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	-	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	100	100	100	100	100	-	100	100	
3	Persentase Menurunnya Jumlah Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan	-	Persentase perusahaan yang menerapkan Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	10	10	10	10	-	-	10	-	
4	(Renstra Perubahan) Persentase Penyelesaian Kasus dan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan	-	Persentase perusahaan yang dibina dan diawasi	-	100	-	-	150	-	-	-	
5	Tersusunnya Kawasan Transmigran	-	Jumlah satuan permukiman transmigran yang difasilitasi pembangunannya	1	1	1	1	100	-	100	100	

Pada Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah untuk indikator Persentase Penempatan Tenaga Kerja tercapai sebesar 98,55% dari target yang telah telah ditetapkan, sedangkan Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial realisasi capaian adalah

sebesar 100% dan indikator dirubah menjadi Persentase Penyelesaian Kasus dan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan pada RENSTRA Perubahan dikarenakan untuk pelanggaran norma dan penyelesaian kasus diharapkan pertumbuhannya negatif bukan positif, sedangkan untuk Tersusunnya Kawasan Transmigran juga tercapai sebesar 100%.

2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

2.3.1 Koordinasi dan Sinergi Program/Kegiatan

Program/Kegiatan Kemnaker RI (Sumber dana APBN), yaitu :

a. Bidang Ketenagakerjaan :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja:
dengan Kegiatan :
 - a. Kegiatan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP)
 - b. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK)
 - c. Pelatihan pemagangan dalam negeri
 - d. Penilaian Kinerja Perusahaan (Sidhakarya)
 - e. Kegiatan perpanjangan ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing tahun 2026
2. Program Hubungan Industrial dengan Kegiatan :
 - a) Tata Kelola Kelembagaan (Perusahaan) dan Kerjasama Hubungan Industrial.
 - b) Peningkatan Penerapan Pengupahan.
 - c) Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - e) Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Program Pengawasan Ketenagakerjaan.
Dengan kegiatan :

- a) Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
- b) Peningkatan Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- c) Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d) Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan.

b. Bidang Ketransmigrasian

1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Dengan Kegiatan :

- a) Fasilitasi Penempatan Transmigrasi;
- b) Pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi;
- c) Penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi;
- d) Partisipasi masyarakat.

2. Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

Dengan kegiatan :

- a) Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi;
- b) Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi;
- c) Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan Transmigrasi;
- d) Penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD:

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur pada dasarnya sudah bersinergi dengan Program/Kegiatan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perbatasan, Transmigrasi dan daerah

Tertinggal RI juga dengan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur saat ini adalah tidak memadainya sumber daya aparatur utamanya yakni makin berkurangnya tenaga fungsional ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Pengantar Kerja, Instruktur Pelatihan, Mediator, Pegawai Pengawas maupun Pegawai Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Transmigrasi. Di sisi lain kebutuhan akan tenaga fungsional ini sangat mendesak untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten/Kota karena fungsi pegawai teknis ini tidak dapat tergantikan oleh PNS biasa.

Ditinjau dari teknis mempermasalahkan sebagai berikut :

a. Ketenagakerjaan :

1. Permasalahan :

- Masih Tingginya tingkat pengangguran;
- Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial;

2. Hambatan :

- Cakupan Lokasi pengawasan yang tersebar hingga ke daerah yang sulit dijangkau karena geografis Kaltim yang cukup luas;
- Akses jalan menuju lokasi perusahaan yang sangat jauh di dari kota dan kurang baiknya infrastruktur jalan yang memakan waktu.
- Kurangnya tenaga fungsional, baik pengawas, mediator, dan pengantar kerja.
- Kurangnya Kerjasama perusahaan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh bidang.
- Masih sedikit perusahaan yang mau bekerjasama dalam penempatan tenaga kerja baik dalam hal kegiatan

pemagangan ataupun penemooatan melalui kegiatan bursa kerja.

b. Ketransmigrasian :

1. Permasalahan :

- Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena terbatasnya aksesibilitas;
- Rendahnya kualitas SDM, terutama di pedesaan;
- Kurangnya keterkaitan antara kawasan perdesaan sebagai hinterland dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi;
- Kurang seimbangnya tingkat kepadatan penduduk antara wilayah satu dengan yang lain.

2. Hambatan :

- Kewenangan penempatan transmigran yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat
- Konflik fungsi lahan/kepemilikan lahan;
- Regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih;
- Kurangnya tenaga fungsional penggerak swadaya.

Kinerja pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Kalimantan Timur diukur melalui Angkatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan, Tenaga Kerja, SP/SB, Jumlah Anggota SP/SB, Pekerja/buruh, Perjanjian Kerja Bersama, LKS Tripartit, LKS Bipartit, Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan, Penurunan Kasus Kecelakaan Kerja, Peningkatan Kepesertaan Jamsostek, Penempatan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigran Mandiri.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi melalui Program/Kegiatan baik dengan Kementerian Tenaga Kerja RI dan Kementerian Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI maupun dengan Kabupaten/Kota. Sinergi program/kegiatan dengan 2 (dua) Kementerian tersebut melalui Program/Kegiatan APBN

(dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) sedangkan dengan kabupaten/kota dengan menggunakan pola *sharing*, yaitu *sharing* program/kegiatan, target dan disamping itu juga dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Provinsi Kaltim untuk *sharing* terkait khususnya penciptaan wirausaha baru.

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian visi, misi Kepala Daerah

Kekurangan SDM dan tenaga fungsional ini bisa berdampak pada tidak tercapainya kinerja Perangkat Daerah seperti yang telah ditargetkan, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya angka penurunan pengangguran dan angka penempatan tenaga kerja menjadi tidak optimal.

Di samping hal tersebut permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan program-program sektoral untuk dapat fokus pada pengurangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja, antara lain perluasan kesempatan kerja sektoral belum didukung tingkat kompetensi tenaga kerja yang tersedia mengingat kompetensi tenaga kerja yang tersedia banyak yang belum bersesuaian dengan kebutuhan kompetensi kesempatan kerja. Faktor tambahan lainnya adalah jumlah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan juga berkontribusi memberi tambahan angka penganggur di Kalimantan Timur.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD :

Terkait dengan telah dibangunnya Kilang Minyak yang ada di Kota Balikpapan yang menciptakan peluang kerja maka Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur harus mampu menciptakan tenaga kerja lokal yang kompeten serta mampu bersaing dengan orang – orang yang ada diluar Provinsi Kalimantan Timur.

Di sisi lain dengan latar belakang percepatan pembangunan, pemerintah pusat menerbitkan PP baru mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) karena penggunaan TKA diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan nasional melalui tenaga ahli teknologi dan tenaga ahli khusus lainnya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan diatur lebih lanjut dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dimana berdasarkan peraturan tersebut dimungkinkan Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain untuk jabatan yang sama pada sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama yang artinya kemungkinan besar satu TKA bisa bekerja di lebih dari satu perusahaan kontraktor kerja sama yang bergerak di sektor migas. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya peluang kerja bagi tenaga kerja kita. Definisi Tenaga Kerja Asing (TKA) sendiri menurut PP 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Akhirnya dengan adanya regulasi baru ini menciptakan persaingan di pasar kerja bagi tenaga kerja asing dengan pencari kerja lokal. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Disnakertrans Prov. Kaltim akan melakukan Pelatihan Bersertifikasi guna memberikan kesempatan bagi masyarakat Kalimantan Timur dalam bersaing mendapatkan pekerjaan.

2.3.5 Rekomendasi :

1. Dalam hasil Forum Konsultasi Publik RPD Prov. Kaltim Tahun 2024-2026, pada tanggal 16 Februari 2023 disampaikan oleh Ibu Dra. Sri Wahyuni, M.PP selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa Isu Strategis pembangunan di daerah

Kalimantan Timur seperti, peningkatan daya saing sumber daya manusia, percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Sehingga bisa disimpulkan sebagian calon tenaga kerja yang akan terserap di tahun 2025 sebagian besar adalah yang memiliki keahlian di bidang infrastruktur dan pertanian. Perkiraan masih terus membaiknya perekonomian Kaltim terutama komponen ekspor karena permintaan batubara & migas pada pasar internasional terus terjaga, sehingga mendorong pertumbuhan DBH sebesar 8,94% tahun 2024 - 2026. Sehingga jumlah tenaga kerja yang besar masih disumbang oleh sektor batubara, walaupun sektor transportasi juga mengikuti dalam hal penyumbang investasi terbesar setelahnya. Selain daripada itu Sektor Pekerja Hijau juga sudah mulai mendapatkan perhatian, dalam artian bahwa Kalimantan Timur siap untuk berperan lebih besar lagi kedepannya terhadap perbaikan iklim dunia melalui proyeksi kebutuhan tenaga kerja hijau untuk tahun 2025 – 2029.

2. Adapun Tema Musrenbang RKPD Kaltim 2025 yang disampaikan oleh Ibu Dra. Sri Wahyuni, M.PP. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan pada Pra Musrenbang (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim di Pendopo Odah Etam Samarinda, Senin, 5 Mei 2025 yaitu Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing. Melalui RKPD 2025 diharapkan perencanaan yang disusun bisa memberikan landasan untuk menempatkan alokasi sumber-

sumber daya dalam rangka memberikan peluang investasi sebagai dasar untuk menuju transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

3. Untuk pengembangan komoditas unggulan di wilayah Kalimantan Timur berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam lampiran RPJMN 2020-2024 Perpres nomor 18 tahun 2020 Industri manufaktur juga masih mendominasi peluang usaha dan investasi seperti industri batubara dan pengilangan migas, industri kayu, barang dari kayu atau gabus, pertambangan batubara dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Selain itu untuk pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama akan diarahkan ke Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus, salah satunya yang terdapat di Provinsi kaltim yaitu KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Pemerintah Pusat akan memberikan perhatian khusus pada Destinasi Potensial Derawan (Wisata Lokal Kepulauan Derawan yang berada di kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur).
4. Merujuk materi Sosialisasi Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara, terdapat proyek yang masuk prioritas yang diharapkan selesai pada tahun 2025 untuk ditawarkan ke pihak swasta. Proyek investasi prioritas itu berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, meliputi :
 - Rumah Sakit Internasional;
 - Fasilitas Pendidikan Terpadu;
 - Kawasan Perkantoran dan Jasa (BUMN);
 - *Mixed-Use*, Komersial Niaga;
 - Fasilitas Hunian.

Disnakertrans Prov Kaltim akan berusaha optimal agar bisa turut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja untuk tenaga kerja lokal di sektor investasi prioritas di atas tersebut melalui program Pelatihan berbasis kompetensi didasarkan dengan keperluan pada dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.

2.4 Review Terhadap RKPD 2025 :

Rancangan awal RPD tahun 2024-2026 menetapkan pada Tujuan 1 (satu) yakni Mewujudkan SDM Berdaya Saing; adapun yang dimaksud adalah SDM yang memiliki IPM tinggi dan terus meningkat serta tidak ada kabupaten/kota dengan IPM tertinggal (dibawah rata-rata nasional). Selain itu, menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai dampak diserapnya tenaga kerja lulusan SMK/ sederajat keatas juga menjadi ukuran keberhasilan peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Perwujudan daya saing SDM dilakukan dengan pemerataan taraf pendidikan, pemerataan kesehatan, peningkatan usia harapan hidup, dan pemberdayaan gender.

Kemudian pada Sasaran 3 yang terkait ketenagakerjaan yakni “Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja” dengan 2 (dua) strategi perluasan kesempatan kerja dan peningkatan mutu dan daya saing tenaga konstruksi.” Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan nantinya yakni peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan vokasi, berbasis kerjasama industri, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja, penyelenggaraan dan pelatihan tenaga ahli konstruksi.

Tabel T-C.31
Review Terhadap RKPD Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja				59.177.373.414						
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	10 Kabupaten/ Kota	Persentase Kabupaten Kota yang difasilitasi menyusun rencana tenaga kerja	70 Persen	714.609.170						
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Di fasilitasi	9 Dokumen	714.609.170						
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (DINAS)		Persentase Lulus Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	66,50 Persen	451.446.262						
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	61 orang	349.753.224						
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan perusahaan menengah yang ditingkatkan produktivitasnya	1 laporan	101.693.038						
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pengukuran produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	1 laporan	0,00						

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja yang Ditempat kan	27,60 Persen	415.818.693						
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	360 org	112.249.693						
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	17 Lembaga	42.550.000						
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Provinsi Kaltim	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2 event	208.300.000						
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Lintas kabupaten kota dalam satu provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 orang	52.718.715						
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan lintas kabupaten/kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	72 %	400.661.576						
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Perusahaan Lintas kabupaten kota dalam satu provinsi	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerj Bersama (PKB) yan diterbitkan	110 SK	95.200.142						

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Perusahaan Lintas kabupaten kota dalam satu provinsi	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pembinaan dalam Rangka Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	60 Perusahaan	144.232.213						
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Provinsi , Kabupaten/Kota	Jumlah SK Penetapan Upah Minimum Provinsi, Kab/Kota	10 SK	161.226.221						
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi	18,23 %	461.268.650						
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Perusahaan di seluruh kabupaten/kota	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	4.060 Perusahaan	461.268.650						
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah rencana kawasan transmigrasi (RKT) lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	1 kawasan transmigrasi	54.200.000						
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 dokumen	54.200.000						
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase transmigran yang ditingkatkan ketrampilannya berdasarkan penempatan di dalam kawasan	100 %	58.761.474						

Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan Pembinaan, Bantuan, Fasilitasi, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	1 Dokumen	58.761.474						
UPTD BLKI BPP										
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang ditempatkan (BLKI Bpp)	76,50 %	3.046.850.575						
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	85 %	3.046.850.575						
UPTD BLKI BONTANG										
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Lulus Pelatihan Kerja yang ditempatkan (BLKI Bontang)	77 %	1.851.339.928						
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	85 %	1.851.339.928						

Pada Program Perencanaan Tenaga Kerja, terdapat kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah bersama dengan Kabupaten/ Kota yang ada di Kalimantan Timur serta Pelatihan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro untuk perusahaan yang kegiatan ini bertujuan untuk dapat memperoyeksikan kebutuhan Tenaga Kerja di Daerah maupun di Perusahaan sehingga manfaat yang diharapkan adalah kegiatan ini mampu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Pelatihan yang dibutuhkan bagi para pencari kerja maupun pekerja yang memerlukan peningkatan skill.

Pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdapat kegiatan Pelatihan kerja untuk para pencari kerja serta pekerja yang memerlukan peningkatan *skill*, sehingga diharapkan setelah mengikuti Pelatihan kerja, masyarakat pencari kerja atau yang ditingkatkan *skill* nya langsung terserap di pasar kerja dan menyumbangkan produktivitas yang lebih tinggi lagi. Terdapat Program Penempatan Tenaga Kerja juga yang ikut menyokong terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan mempertemukan antara perusahaan dengan para pencari kerja.

Program Hubungan Industrial dan Program Pengawasan Tenaga Kerja juga menyokong Hubungan antara Pekerja dengan Pemberi Kerja sehingga tercapai Hubungan Industrial yang baik serta sesuai dengan Norma Ketenagakerjaan.

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi serta Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah program penunangan pada urusan ketransmigrasian dimana Kementrian Transmigrasi merupakan Kementrian yang berperan penuh terhadap pemenuhan warga transmigrasi di wilayah transmigran, dengan tujuan pemerataan persebaran penduduk dari Jawa sehingga tercipta peningkatan produktivitas tenaga kerja pada akhirnya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan program kegiatan tahun 2025 usulan-usulan yang masuk terdiri dari :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

Provinsi Kalimantan Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Terlampir	Terlampir	Terlampir	Terlampir	
2					

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025 – 2025 terdapat visi Presiden Republik Indonesia yaitu Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. Adapun prioritas nasional yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah prioritas nomor 3 yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi serta prioritas nomor 6 yaitu membangun desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020, RPJPN menempatkan SDM sebagai modal utama Pembangunan Nasional untuk menuju Pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Gambaran Umum tersebut merupakan kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini, terlihat dari perkembangan peningkatan jumlah penduduk Indonesia Usia Produktif yang merupakan tantangan Strategis Bangsa. Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2022 sebanyak 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang dibanding Agustus 2021, ini merupakan Potensi yang dapat mengoptimalkan kinerja Perekonomian Indonesia.

Program-program di bidang Transmigrasi juga memiliki peran penting dalam percepatan Pembangunan Daerah, karena Transmigrasi pada hakikatnya merupakan Pembangunan Daerah, karena Transmigrasi pada hakikatnya merupakan Pembangunan Daerah atau bagian Integral dari Pembangunan

Daerah, melalui Pembangunan Permukiman dan awasan Transmigrasi. Hal ini sesuai dengan Amanat UU No. 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian bahwa tujuan Transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Transmigran dan Masyarakat sekitar, meningkatkan pemerataan Pembangunan Daerah dan menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

3.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional.

Presiden RI menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, yaitu 'Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'. RKP 2024 menekankan pada sejumlah Fokus yaitu yang Pertama pengentasan Kemiskinan dan penghapusan Kemiskinan ekstrem. Kedua, peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Kemudian, Revitalisasi Industri dan penguatan Riset Terapan. Keempat adalah penguatan Daya Saing Usaha dan terakhir, Pembangunan rendah Karbon serta Transisi Energi.

Pemerintah Pusat menargetkan Angka TPT ada di antara 3,6 - 4,3%. Untuk arah Kebijakan dan Strategi di Bidang Ketenagakerjaan ke depannya akan difokuskan pada :

1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi, seperti pemenuhan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang salah satunya berasal dari Kalimantan Timur (Kawasan Industri Batubara);
2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dengan Strategi peningkatan Nilai tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di sektor Riil dan Industrialisasi.

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui berbagai Program Prioritas yang terdiri dari Prioritas Nasional, Prioritas bidang dan Prioritas Kemnaker RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, serta Kontrak Kinerja Menteri melalui 6 (enam) Program Teknis dan 3 (tiga) Program Pendukung (*generic*). Berikut adalah 6 (enam) Program Teknis dan 3 (tiga) Program Pendukung, yaitu :

A. Bidang Ketenagakerjaan

a. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP);

Indikator Kinerja Utama dari Program ini adalah angka peserta Pelatihan yang Kompeten, yang diukur melalui :

- 1) Persentase Peningkatan Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi;
- 2) Presentase peningkatan lulusan pelatihan berbasis kompetensi;
- 3) Presentase peningkatan Perusahaan penyelenggara Pemagangan yang terverifikasi;
- 4) Presentase peningkatan Lulusan Pemagangan;
- 5) Presentase peningkatan LSP berlisensi;
- 6) Presentase peningkatan Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi;
- 7) Presentase peningkatan Lembaga Pelayanan Produktivitas;
- 8) Presentase peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (nasional, sektoral, daerah).

b. Program Penempatan dan perluasan Kesempatan kerja (PPKK);

Indikator Kinerja Utama dari Program ini adalah jumlah Fasilitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, yang diukur melalui :

- 1) Presentase peningkatan jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi untuk mengisi Lowongan Pekerjaan :
- 2) Presentase peningkatan Rasio Tenaga Kerja pendamping dengan TKA untuk Jabatan tertentu;
- 3) Presentase peningkatan Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui sistem Antar Kerja;
- 4) Presentase peningkatan Penempatan TKI pada pengguna berbadan Hukum;

- 5) Presentase penanganan pengangguran dan setengah penganggur melalui sistem Padat Karya;
- 6) Presentase peningkatan Wirausahawan baru per tahun;
- 7) Presentase peningkatan calon Wirausahawan yang mengikuti Inkubasi Bisnis;

c. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Indikator Kinerja Utama dari Program ini adalah meningkatnya Syarat-syarat Kerja dan menguatnya kelembagaan Hubungan Industrial, yang diukur dari :

- 1) Meningkatnya persentase LKS Bipartit yang berfungsi secara Efektif;
- 2) Persentase peningkatan Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan (PP);
- 3) Persentase peningkatan Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- 4) Meningkatnya jumlah Perusahaan yang menerapkan Sistem Pengupahan berbasis Struktur dan Skala Upah serta Produktivitas;
- 5) Meningkatnya persentase Tenaga Kerja penerima Upah yang menjadi persentase BPJS ketenagakerjaan;
- 6) Meningkatnya persentase Tenaga Kerja bukan penerima upah yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- 7) Meningkatnya persentase Perusahaan yang memiliki tingkat kerawanan Hubungan Industrial Label Hijau;
- 8) Meningkatnya persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial oleh Mediator.

d. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja Utama dari Program ini adalah jumlah Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang diukur dari :

- 1) Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan;
- 2) Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA).

B. Bidang Ketransmigrasian

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Indikator Kinerja Utama dari Program ini adalah jumlah permukiman Transmigrasi yang dibangun dan Transmigran yang ditempatkan di Kawasan Transmigrasi, yang diukur dari :

- 1) Penduduk yang tertata Terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi;
- 2) Infrastruktur Kawasan yang dibangun;
- 3) Lahan yang Tersedia;
- 4) Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- 5) Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- 6) Pelayanan Teknis dan Administratif.

b. Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

Indikator Kinerja Utama dari Program ini adalah jumlah Permukiman Transmigrasi (Kimtrans) yang Mandiri dan Kawasan Transmigrasi yang Berkembang, yang diukur dari :

- 1) Jumlah Kimtrans dan Kawasan yang dikembangkan Sarana dan Prasarananya;

- 2) Jumlah luasan lahan yang Produktif dan Produktivitas lahan di Kimtrans dan Kawasan;
- 3) Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapat layanan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Kimtrans yang berfungsi;
- 4) Jumlah Kimtrans yang Mandiri dan Kawasan yang berwawasan Lingkungan;
- 5) Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Masyarakat dan Kawasan yang dapat diimplementasikan;
- 6) Jumlah pelayanan Teknis dan Administratif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Isu-isu Penting

a. Bidang ketenagakerjaan :

Sasaran Program Kegiatan bidang Ketenagakerjaan untuk peningkatan Kesempatan Kerja, peningkatan Kompetensi dan Produktivitas sebagai upaya mengurangi Pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, meliputi :

1. Mendorong terciptanya Kesempatan Kerja yang baik (*decent work*), yaitu Lapangan Kerja Produktif serta adanya perlindungan dan Jaminan Sosial yang memadai;
2. Mendorong terciptanya Kesempatan Kerja seluas-luasnya dan merata dalam Sektor-sektor Pembangunan;
3. Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong Kesempatan Kerja;
4. Menyempurnakan Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan dan melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan Pokok (utama), sesuai Hukum Internasional;
5. Mengembangkan Jaminan Sosial dan pemberdayaan Pekerja;
6. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas;
7. Menciptakan Kesempatan Kerja melalui Program-program Pemerintah;
8. Menyempurnakan kebijakan Migrasi dan Pembangunan;

9. Mengembangkan kebijakan pendukung Pasar Kerja melalui Informasi Pasar Kerja.

Fokus **Prioritas Ketenagakerjaan dalam bidang Ekonomi** diarahkan **untuk meningkatkan Daya Saing Ketenagakerjaan**, yang meliputi :

- 1) Peningkatan Fasilitasi dan Perlindungan untuk mendukung Mobilitas Tenaga Kerja.

Fokus Prioritas ini dilakukan dengan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Kegiatan :

- a) Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja;
- b) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja.

- 2) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas.

Fokus prioritas ini dilakukan dengan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, melalui Kegiatan :

- a) Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan;
- b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas;
- c) Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan;
- d) Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri;
- e) Peningkatan dan Pengembangan Produktivitas;
- f) Pengembangan dan Penyelenggaraan Pelatihan.

b. Bidang ketransmigrasian :

Untuk mengatasi kesenjangan Pembangunan antar wilayah Kota dan Desa, Sumber Daya Masyarakat, kepadatan Penduduk dll, diarahkan untuk :

1. Pelaksanaan persebaran Penduduk;
2. Koordinasi dan Integrasi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Strategis;

3. Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Pusat Pertumbuhan;
4. Peningkatan Daya Tarik Desa;
5. Membangun keterkaitan antara Kota dan Desa;
6. Percepatan Pembangunan Kawasan Tertinggal;
7. Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Fokus **Prioritas Pembangunan Ketransmigrasian dalam bidang Wilayah dan Tata Ruang** diarahkan untuk mendukung 2 Fokus Prioritas, yaitu :

1) Pembangunan Pedesaan

Arah kebijakan Pembangunan Pedesaan adalah memperkuat Kemandirian Desa dalam Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan; meningkatkan Ketahanan Desa sebagai Wilayah Produksi; serta meningkatkan Daya Tarik Pedesaan melalui peningkatan Kesempatan Kerja, kesempatan Berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan.

Arah Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 2 Program yaitu :

- a) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, meliputi Kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Penyediaan Tanah Transmigrasi;
 - (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi;
 - (3) Pembangunan Pemukiman di Kawasan Transmigrasi;
 - (4) Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi;
 - (5) Pengembangan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi.
- b) Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi, meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi;

- (2) Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi;
- (3) Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi;
- (4) Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi;
- (5) Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi.

2) Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah.

Adapun Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan nantinya pada RPD 2024-2026 yakni Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, berbasis Kerjasama Industri, Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi. Diharapkan Arah Kebijakan tersebut juga mampu meningkatkan Keterkaitan Ekonomi antara Desa - Kota atau antara wilayah Pusat Pertumbuhan dengan Wilayah Produksi (hulu-hilir).

Arah Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, meliputi Kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi;
- b) Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi;
- c) Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi;
- d) Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi;

3.2.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2024-2026

- a. Meningkatnya Capaian Kinerja Ketenagakerjaan;
- b. Meningkatnya Transmigran penempatan yang Berkualitas dan Mandiri;

- c. Mewujudkan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas;
- d. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-Faktor Penting Penetapan Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas :

Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan paragraf 1, pasal 3 mempunyai Tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi :

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Paragraf 1, Pasal 4 Kepala Dinas menyelenggarakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian kebijakan Teknis di bidang Pengembangan Tenaga Kerja;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan Tenaga Kerja;
- f. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- g. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di bidang Transmigrasi;
- h. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- 1. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Pembina Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. Pelaksana Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Provinsi bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur **yaitu :**

a. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

- 1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan;
- 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur;
- 3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- 5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
- 6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- 7. Pembinaan Ketenagakerjaan.

b. Urusan Pilihan Transmigrasi

- 1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan;
- 2. Pembinaan SDM Aparatur;
- 3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan;

4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
5. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi.

3.3.2 Program dan Kegiatan

- a. Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Renja SKPD memuat :
 - Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing tinggi; menciptakan Lapangan Kerja yang seluas-luasnya dan mendorong Usaha-usaha Produktif;
 - Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Pembangunan Ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk dalam Agenda SDGs yang ke 8, yakni mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Tenaga Kerja penuh dan Produktif dan Pekerjaan yang Layak bagi semua
 - **Amanat** yang dituangkan pada Undang-undang Desa terkait Pembangunan di Desa adalah perlunya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa sekaligus meningkatkan Kualitas Hidup Manusia. Penanggulangan Kemiskinan melalui pemenuhan Kebutuhan Dasar, pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa, pengembangan Potensi Sektor Ekonomi Lokal, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan tak luput menjadi Tujuan yang harus diimplementasikan dalam Pembangunan Desa.
 - Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, dan pengembangan Daerah terisolir, yaitu : Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, pengarahan dan Fasilitasi perpindahan Transmigrasi.
- b. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur, terlihat Program/Kegiatan untuk mengakomodir seluruh Aspirasi Masyarakat yang terkait dengan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, dengan 5 Program Ketenagakerjaan dan 3 Program Ketransmigrasian, yang terdiri sebagai berikut :

- Program Ketenagakerjaan sebagai berikut :
 1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 3. Program Penempatan Tenaga Kerja
 4. Program Hubungan Industrial
 5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
- Program Ketransmigrasian sebagai berikut :
 1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 3. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program/kegiatan baik Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, lokasi kegiatannya tersebar di Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Usulan dan Kebutuhan di Kabupaten/Kota.

3.3.3 Rumusan Program Yang Tidak Sesuai Dengan Rancangan Awal RKPD Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026

Provinsi Kalimantan Timur

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				59.177.373.414	APBD			73.515.973.800
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				59.177.373.414	APBD			73.515.973.800
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Samarinda	100 persen 84 indeks	57.367.690.281			-	61.678.140.900
1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Samarinda	10 dokumen	632.416.440			-	3.000.000.000
1.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	10 dokumen	182.292.640			-	2.000.000.000
1.1.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	2 laporan	71.743.800			-	200.000.000
1.1.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	5 laporan	378.380.000			-	800.000.000

1.1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Samarinda	1 dokumen	52.503.313.141			-	52.275.000.000
1.1,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	229 Orang/ Bulan	51.737.189.941			-	52.000.000.000
1.1,02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	1 dokumen	551.760.000			-	0,00
1.1,02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	1 laporan	27.360.000			-	30.000.000
1.1,02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	1 laporan	163.363.200			-	220.000.000
1.1,02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	1 Dokumen	23.640.000			-	25.000.000
2.07.01.1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	1 dokumen	2.000.000			-	320.000.000
1.1.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Samarinda	1 dokumen	2.000.000			-	320.000.000
1.1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	1 dokumen	923.111.456			-	1.497.000.000
1.1,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	5 paket	20.000.920			-	37.000.000
1.1,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Samarinda	15 paket	150.199.616			-	60.000.000
1.1,06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	12 paket	61.110.920			-	100.000.000

1.1,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	12 laporan	691.800.000			-	1.300.000.000
1.1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	1 dokumen	2.879.157.000			-	3.691.140.900
1.1,07.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 laporan	6.784.000			-	8.500.000
1.1,07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	12 laporan	543.741.000			-	482.640.900
1.1,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 laporan	2.328.632.000			-	3.200.000.000
1.1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	1 dokumen	427.692.244			-	895.000.000
1.1,09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	2 unit	42.195.000			-	75.000.000
1.1,09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	16 unit	254.919.000			-	270.000.000
1.1,09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	4 unit	110.428.244			-	250.000.000
1.1,09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	1 unit	20.150.000			-	300.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Samarinda	100 persen	180.060.000			-	1,350,000,000
2.1.01.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja yang difasilitasi	10 Kab/Kota	9 Dokumen	180.060.000			-	1,350,000,000

2.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Makro	10 Kab/Kota	8 Dokumen	149.460.000			-	850,000,000
2.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	10 Kab/Kota	40 Orang	30.600.000			-	500,000,000
2.07.03.1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	9 Kab/ Kota	67 persen	364.968.456			-	3.086.803.000
3. 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan yang Bekerja	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar,Berau , Ppu, Paser,	61 orang	100.868.418			-	2.847.000.000
3. 1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (Jumlah Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pemagangan) pada Tahun n	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar,Berau , Ppu, Paser,	400 orang	0,00			-	2.700.000.000
3. 1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Bpp, Smd, Bontang, Kutim, Kubar, Kukar,Berau ,Ppu, Paser,	25 Lembaga	100.868.418			-	147.000.000
3. 1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Bpp, Smd, Bontang, Kukar, Kutim, Ppu	1 Laporan	111.289.038			-	127.080.000
3. 1.03.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Bpp, Smd, Bontang,Kuka r, Kutim, Ppu	25 perusahaan	111.289.038			-	127.080.000
3. 1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		1 laporan	152.811.000			-	112.723.000
3. 1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah		1 dokumen	152.811.000			-	112.723.800

2.07.05	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan		28,10 persen	385.248.983			-	2.005.000.000
2.07.05.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan		360 orang	165.300.268			-	1.400.000.000
5.1.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Samarinda	330 orang	26.444.990			-	200.000.000
5.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Samarinda	360 orang	25.844.990			-	200.000.000
5.1.01.04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Samarinda	14.000 orang	10.075.000			-	200.000.000
4.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Samarinda	200 orang	102.935.288			-	800.000.000
5.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser	17 Lembaga	11.080.000			-	250.000.000
5.1.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Samarinda	17 Lembaga	11.080.000			-	250.000.000
5.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser	2 Event	156.360.000			-	255.000.000
5.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi Yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Samarinda	1 dokumen	0,00			-	55.000.000

5.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Samarinda	60.000 orang	156.360.000			-	200.000.000
5.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	Samarinda	40 orang	52.508.715			-	100.000.000
5.1.05.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Samarinda	40 orang	52.508.715			-	100.000.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak – hak pekerja dan dialog sosial		80 Persen	400.662.534			-	2.346.029.000
2.07.07.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	Samarinda	110 Surat Keputusan	772.073.940			-	405.607.500
7.1.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Samarinda	50 Perusahaan	450.915.960			-	148.968.900
7.1.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Samarinda	60 Perusahaan	29.804.071			-	148.968.900
7.1.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Samarinda	1 Laporan	34.800.000			-	119.648.700

7.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang Dilakukan Pembinaan dalam Ragka Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		60 Perusahaan	109.366.213			-	1.052.186.000
7.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Samarinda	1 Perkara	60.754.213			-	498.469.000
7.1.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Samarinda	10 Perkara	8.400.000			-	169.449.500
7.1.02.003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Samarinda	25 asosiasi dan Serikat Pekerja	8.400.000			-	169.449.500
7.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Samarinda	10 Lembaga	31.812.000			-	265.129.900
7.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah SK Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	10 Surat Keputusan	196.888.179			-	888.236.400
7.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP		1 SK	99.846.108			-	638.236.400

7.1.03.03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah Penetapan UMK	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	10 SK	75.638.000			-	100.000.000
7.1.03.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	12.000 orang	21.404.071			-	150.000.000
2.07.08	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak – hak dasarnya	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	19,41 persen	478.743.160			-	3.050.000.000
8.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa dan diawasi	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	4060 perusahaan	478.743.160			-	3.050.000.000
8.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	339 perusahaan	188.614.120			-	1.500.000.000
8.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	1 kasus	97.744.920			-	650.000.000

8.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Bpp, Smd, Bontang, Kutim , Kubar, Kukar, Berau , Ppu, Paser, Mahulu	547 perusahaan	192.384.120			-	900.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				112.695.762				950.000.000
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase luas Pembangunan di Kawasan Transmigrasi	Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kab. Paser	1 Kawasan Transmigrasi	54.000.000			-	500.000.000
4.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kab. Paser	1 Dokumen	54.000.000			-	500.000.000
4.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kab. Paser	1 Laporan	31.560.000			-	200.000.000
4.1.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Paser	1 Dokumen	9.360.000			-	200.000.000
4.1.01.18	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Paser	3 Lokasi	13.080.000			-	100.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	Kab. Paser	100 Persen	58.695.762			-	450.000.000

6.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitas, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	Kab. Paser	1 Dokumen	58.695.762			-	450.000.000
6.1.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Paser Tanjung Harapan Keladen	60 Kepala Keluarga	45.615.762			-	250.000.000
6.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Di kembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Paser	1 Satuan Permukaan	13.080.000			-	200.000.000
JUMLAH (DINAS)					59.290.069.176				74.465.973.800

UPTD BLKI BALIKPAPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6.741.505.647	APBD			27.118.464.500
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Bpp	86% 100 Persen	3.783.203.040			-	4.428.464.500
1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Bpp	1 Dokumen	200.995.810			-	100.000.000
1.1.02.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bpp	12 Dokumen	90.000.000			-	50.000.000
1.1.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bpp	1 Laporan	110.995.810			-	50.000.000
1.1.05	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaiaan	Bpp	1 Dokumen	437.088.000			-	180.000.000
1.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Bpp	24 paket	22.848.000			-	30.000.000
1.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bpp Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	414.240.000			-	150.000.000
1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum	Bpp	1 Dokumen	791.336.610			-	1.482.425.900

1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bpp	12 Paket	5.395.184			-	8.556.500
1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bpp	6 Paket	466.836.708			-	588.869.400
1.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bpp	3 Paket	36.154.104			-	20.000.000
1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bpp	12 Paket	72.544.914			-	70.000.000
1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bpp	12 Paket	19.245.700			-	195.000.000
1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danbKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	12 laporan	191.610.000			-	600.000.000
1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpp	1 Dokumen	119.631.000			-	70.000.000
1.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bpp	1 Unit	119.631.000			-	70.000.000
1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	1 Dokumen	1.728.140.500			-	1.991.038.600
1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpp	12 Laporan	7.480.000			-	9.000.000
1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bpp	12 Laporan	435.820.500			-	690.641.500

1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bpp	1 Laporan	1.284.840.000			-	1.291.397.100
1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	1 Dokumen	625.642.120			-	675.000.000
1.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bpp	2 unit	76.822.120			-	75.000.000
1.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Bpp	1 unit	400.000.000			-	300.000.000
1.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Bpp	1 unit	148.820.000			-	300.000.000
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)	Bpp	77 Persen	2.958.302.607			-	22.690.000.000
3.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	Bpp	85%	2.958.302.607			-	22.690.000.000
3.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Bpp	1040 orang	2.582.129.311			-	21.500.000.000
3.1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Bpp	25 lembaga	376.173.296			-	270.000.000
3.1.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Bpp	5 Unit	0,00			-	770.000.000

3. 1.01.04	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam Rangka Optimilisasi Kapasitas Instruktur dan Peningktan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Prouktivits pada tahun n	Bpp	25 Kesepakatan	0,00			-	150.000.000
JUMLAH UPTD BLKI BALIKPAPAN					6.741.505.647				27.118.464.500

UPTD BLKI Bont ng

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan dasar				30.180.605.177	APBD			19.228.796.150
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				30.180.605.177				19.228.796.150
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanju	Btg	86% 100 Persen	2.337.035.177			-	5.163.981.100
1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Btg	1 Dokumen	85.440.000			-	124.294.000
1.1.02.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Btg	12 Dokumen	85.440.000			-	124.294.000
1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Btg	1 Dokumen	19.560.000			-	81.800.000
1.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan	Btg	20 Paket	19.560.000			-	81.800.000

1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Btg	1 Dokumen	445.162.052			-	880.019.100
1.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Btg	12 Paket	6.210.784			-	99.274.100
1.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Btg	6 Paket	10.020.480			-	59.745.000
1.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Btg	12 Paket	16.052.788			-	50.000.000
1.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Btg	12 Paket	11.118.000			-	21.000.000
1.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Btg	12 Laporan	401.760.000			-	650.000.000
1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Bontang)	Btg	1 Dokumen	1.558.139.125			-	2.926.868.000
1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Btg	12 laporan	7.592.000			-	23.000.000
1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Btg	12 Laporan	433.724.915			-	550.000.000
1.1.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Btg	1 Laporan	11.416.384			-	553.868.850
1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Btg	12 Laporan	1.105.405.826			-	1.800.000.000

1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Btg	1 Dokumen	228.734.000			-	1.151.000.000
1.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Btg	1 unit	39.010.000			-	31.000.000
1.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Btg	1 unit	62.160.000			-	200.000.000
1.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Btg	1 unit	99.190.000			-	420.000.000
1.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Pra sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Btg	1 unit	28.374.000			-	500.000.000
3.1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang)	Btg	77 Persen	27.843.570.000			-	14.064.815.050
3. 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	Btg	85%	27.843.570.000			-	14.064.815.050
3. 1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Btg	832 orang	1.746.162.200			-	12.777.314.800
3. 1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Btg	25 Kesepakatan	95.690.000			-	239.367.500

JUMLAH UPTD. BLKI BONTANG					30.180.605.177				19.228.796.150
TOTAL DINAS dan UPTD-UPTD					96.212.180.000				120.813.234.450

TOTAL PAGU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN UPTD TAHUN 2026

1	DINAS	59.290.069.176
2	BLK BALIKPAPAN	6.741.505.647
3	BLK BONTANG	30.180.605.177
JUMLAH		96.212.180.000

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di atas, maka disimpulkan bahwa jumlah Program yang akan dilaksanakan sejumlah **13 Program, 36 Kegiatan, dan 158 Sub Kegiatan** untuk keseluruhan Dinas beserta UPTD di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk pelaksanaan Lokasi kegiatan Unit Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, tersebar di Kota Samarinda, akan tetapi untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja tersebar di 10 Kabupaten/Kota yaitu Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu (untuk kegiatan pengelolaan Informasi Tenaga Kerja).

Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi berlokus di Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, kemudian untuk Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dipusatkan pada Perencanaan Kawasan di Embalut, Anggana Kutai Kartanegara dan di Maratua, Berau, Sedangkan untuk pelaksanaan Sub-sub Kegiatan di Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi sebagian besar dilaksanakan di Kabupaten Paser.

Adapun di UPTD. BLKI Balikpapan persebaran Kegiatan merata di seluruh Kecamatan dan Kelurahan Balikpapan, sedangkan UPTD BLKI Bontang fokus pelaksanaan di seputar Kota Bontang, Bontang Selatan dan Bontang Lestari.

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur mengajukan Rencana Anggaran APBD Provinsi Tahun 2026 sebesar Rp. 85.768.440.000,-

Adapun **Program Prioritas** Tahun anggaran 2026 :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja sebesar Rp.714.609.170,- melalui kegiatan :
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan total Pagu di Tahun 2026 Rp. 5.349.636.765,-
Pagu Program ini di Dinas sebesar Rp.451.446.262,- melalui kegiatan :
 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
 - Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi

UPTD. BLKI Balikpapan sebesar Rp.3.046.850.575,- melalui kegiatan :
– Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

UPTD. BLKI Bontang sebesar Rp.1.851.339.928,- melalui kegiatan :
– Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
3. Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp.415.818.693,- melalui kegiatan :
 - Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4. Program Hubungan Industrial sebesar Rp.400.661.576,- melalui kegiatan :
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota

- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)
5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan sebesar Rp.461.268.650,- melalui kegiatan :
- Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp.54.200.000,- melalui kegiatan :
- Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp. 58.761.474,- melalui kegiatan :
- Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan

BAB V . PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian.

1. Penyediaan Peralatan Pelatihan bagi BLKI yang akan terus ditingkatkan.
2. *Urgensi* penambahan Pegawai Fungsional Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Mediator, Pengantar Kerja, Petugas Antar Kerja Instruktur Pelatihan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Pengerak Swadaya Masyarakat)
3. Program Pemagangan dalam Negeri yang masih harus terus dikembangkan.
4. Penyediaan Tenaga Kerja bersertifikasi perlu terus ditingkatkan kapasitasnya guna memenuhi kebutuhan Tenaga Kerja yang besar terkait Investasi besar yang akan diserap Kalimantan Timur.
5. Kesadaran Perusahaan atau pemberi Kerja akan pentingnya Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) masih perlu ditingkatkan sehingga bisa mewujudkan Perusahaan yang memiliki Tata Kelola Kerja Perusahaan yang Layak. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kegiatan pengawasan Ketenagakerjaan ke Perusahaan yang semakin insentif dan menjangkau perusahaan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kegiatan Pembinaan-pembinaan Ketenagakerjaan kepada perusahaan, pekerja, Serikat Pekerja/Buruh, serta Asosiasi Pengusaha.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Program kegiatannya berdasarkan Landasan Hukum Urusan Konkuren Ketenagakerjaan dan Urusan pilihan Ketransmigrasian yang merupakan tugas pembantuan Pusat / Kementerian.
2. Bertahap dengan Skala Prioritas sehubungan dengan keterbatasan Anggaran baik dukungan APBN maupun APBD.

3. Pola sharing, baik sharing Penganggaran (APBN, APBD Kabupaten/Kota) maupun *sharing* Program dan Kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Kerjasama dengan pihak Swasta dengan pola kemitraan dan/atau penanaman investasi skala Nasional.
5. Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, dan dukungan Masyarakat pada Pembangunan Daerah.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan secara berkelanjutan setiap Tahun Anggaran berdasarkan RKPD/RPD Provinsi Kalimantan Timur, RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur serta melakukan Review terhadap pelaksanaan Kegiatan.
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan didasari dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi lainnya, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan Perusahaan besar Swasta di Wilayah Kalimantan Timur, dan pihak terkait lainnya.
3. Dukungan Program dan Kegiatan dari Sektoral baik SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dan Kementerian terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pihak-pihak Swasta yang terkait.
4. Dukungan Anggaran Pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian melalui APBN Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan, serta APBD Kabupaten/Kota, dan Dana PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
5. Dukungan Investor Nasional dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui program CSR.

6. Program dan Kegiatan didukung atas aspirasi Masyarakat dan melibatkan Masyarakat secara kelompok dan/atau keterwakilan.

RENJA TAHUN 2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD), dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, yang mana salah satu tahapannya adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai bentuk penjabaran RKPD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026, sesuai dengan RKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk atas amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur berdiri pada tahun 2023, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia dan pemantauan kinerja berorientasikan pelayanan publik. Dalam rencana kerja ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai di masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen, unsur pimpinan dan staf, dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan dan cita-cita luhur dalam pelayanan publik, rencana tersebut dituangkan dalam tujuan, sasaran dan pengukuran kinerja (outcome dan output), yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara jelas dan praktis serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu yang ditentukan.

Secara umum Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah kebijakan pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam satu tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya-Renja PD) disusun dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renja Disdukcapil sebagai dokumen perencanaan yang berorientasi pada target kinerja dalam kurun waktu satu tahun.

Penyusunan Renja Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur, merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu, Renja Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan dan akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Proses penyusunan Renja Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renja, penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renja, hingga penetapan Renja. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja Disdukcapil Tahun 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan :

- 1) Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur;
- 2) Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*;

- 3) Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Disdukcapil Provinsi Kaltim juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Tindaklanjut dari Amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita -3- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Disdukcapil Provinsi Kaltim dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, juga menjabarkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang

diamanatkan kepada Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renja Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjabarkan tujuan dan strategi Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, teratur dan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.
2. Menyusun proyeksi kebutuhan Disdukcapil Provinsi Kaltim dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas, agar dapat menjawab tuntutan terhadap sistem birokrasi dan pelayanan yang berkualitas, terutama pada era demokrasi dan informasi global ini.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai arah dan tujuan dengan cara menyusun rencana kegiatan dan program secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur untuk memahami serta menilai arah kebijakan dan program- program operasional tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berisikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat secara ringkas makna penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan ringkasan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang terhitung sejak tanggal 02 Mei 2025 bertepatan telah dilantiknya Pejabat Administrator dan Pengawas maka sehubungan dengan terpenuhinya Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka secara resmi Disdukcapil terbentuk sebagai Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk menetapkan rencana kerja maka perlu dilakukan telaahan dan pengolahan hasil analisis pelaksanaan renja urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun sebelumnya pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta menetapkan target dan indikator proposional ke depan. Selain itu diperlukan identifikasi dalam capaian realisasi target kinerja pada renstra DKP3A dan hambatan serta permasalahan yang terjadi.

Disdukcapil yang tahun sebelumnya merupakan Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan pada DKP3A Provinsi Kaltim mendapatkan alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2.810.624.000,- yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur yang terealisasi sebesar Rp. 2.691.295.872 atau 95,75% secara rinci dijelaskan pada tabel 2.1 realisasi tahun anggaran 2024 berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
BIDANG FASYAMINDUK		2,810,624,000	2,691,295,872	119,328,128
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp1.859.900.000,00	Rp1.814.809.483,00	Rp45.090.517,00
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Rp1.560.500.000,00	Rp1.532.414.499,00	Rp28.085.501,00
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp1.512.200.000,00	Rp1.490.659.499,00	Rp21.540.501,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp34.320.000,00	Rp34.320.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp7.488.000,00	Rp7.488.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp26.000.000,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp91.072.000,00	Rp85.177.000,00	Rp5.895.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp27.200.000,00	Rp25.800.000,00	Rp1.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp21.300.000,00	Rp7.100.000,00	Rp14.200.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp184.800.000,00	Rp184.754.499,00	Rp45.501,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Rp1.120.020.000,00	Rp1.120.020.000,00	Rp0,00
2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp48.300.000,00	Rp41.755.000,00	Rp6.545.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp267.000,00	Rp0,00	Rp267.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp9.653.000,00	Rp9.653.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.880.000,00	Rp2.880.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp6.100.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp29.400.000,00	Rp29.222.000,00	Rp178.000,00
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Rp299.400.000,00	Rp282.394.984,00	Rp17.005.016,00
2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Rp167.400.000,00	Rp153.539.583,00	Rp13.860.417,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp506.000,00	Rp0,00	Rp506.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp428.000,00	Rp0,00	Rp428.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.866.000,00	Rp2.680.000,00	Rp7.186.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp156.600.000,00	Rp150.859.583,00	Rp5.740.417,00
2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Rp132.000.000,00	Rp128.855.401,00	Rp3.144.599,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp3.380.000,00	Rp3.380.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp15.600.000,00	Rp15.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp18.120.000,00	Rp18.000.000,00	Rp120.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp7.800.000,00	Rp6.600.000,00	Rp1.200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp6.100.000,00	Rp4.650.000,00	Rp1.450.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp81.000.000,00	Rp80.625.401,00	Rp374.599,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp426.278.000,00	Rp399.812.727,00	Rp26.465.273,00
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Rp226.700.000,00	Rp206.983.770,00	Rp19.716.230,00
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Rp182.600.000,00	Rp170.580.770,00	Rp12.019.230,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp2.008.000,00	Rp624.000,00	Rp1.384.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp11.892.000,00	Rp3.964.000,00	Rp7.928.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp33.700.000,00	Rp33.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp135.000.000,00	Rp132.292.770,00	Rp2.707.230,00
2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Rp44.100.000,00	Rp36.403.000,00	Rp7.697.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp267.000,00	Rp0,00	Rp267.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp9.653.000,00	Rp9.653.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.880.000,00	Rp2.400.000,00	Rp480.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp6.100.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp25.200.000,00	Rp24.350.000,00	Rp850.000,00
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp199.578.000,00	Rp192.828.957,00	Rp6.749.043,00

2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Rp91.460.000,00	Rp86.119.057,00	Rp5.340.943,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.300.000,00	Rp2.150.000,00	Rp2.150.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp87.000.000,00	Rp83.809.057,00	Rp3.190.943,00
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Rp108.118.000,00	Rp106.709.900,00	Rp1.408.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp630.000,00	Rp624.000,00	Rp6.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp14.040.000,00	Rp14.040.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp16.548.000,00	Rp16.548.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp7.800.000,00	Rp7.300.000,00	Rp500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp6.100.000,00	Rp5.350.000,00	Rp750.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp63.000.000,00	Rp62.847.900,00	Rp152.100,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp524.446.000,00	Rp476.673.662,00	Rp47.772.338,00
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp344.100.000,00	Rp304.877.267,00	Rp39.222.733,00
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp150.000.000,00	Rp140.450.662,00	Rp9.549.338,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp36.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp8.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp114.000.000,00	Rp112.450.662,00	Rp1.549.338,00
2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp44.100.000,00	Rp23.103.000,00	Rp20.997.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp267.000,00	Rp0,00	Rp267.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp9.653.000,00	Rp9.653.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.880.000,00	Rp2.400.000,00	Rp480.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp6.100.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp25.200.000,00	Rp11.050.000,00	Rp14.150.000,00
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp150.000.000,00	Rp141.323.605,00	Rp8.676.395,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp15.790.000,00	Rp15.715.000,00	Rp75.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp14.300.000,00	Rp14.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp17.210.000,00	Rp17.100.000,00	Rp110.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp7.800.000,00	Rp6.400.000,00	Rp1.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp47.500.000,00	Rp41.900.000,00	Rp5.600.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp47.400.000,00	Rp45.908.605,00	Rp1.491.395,00
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp180.346.000,00	Rp171.796.395,00	Rp8.549.605,00
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp48.346.000,00	Rp47.782.275,00	Rp563.725,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp126.000,00	Rp0,00	Rp126.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.020.000,00	Rp4.020.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp43.200.000,00	Rp42.762.275,00	Rp437.725,00

2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Rp132.000.000,00	Rp124.014.120,00	Rp7.985.880,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp708.000,00	Rp699.300,00	Rp8.700,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp16.380.000,00	Rp16.380.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp19.012.000,00	Rp18.888.000,00	Rp124.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp7.800.000,00	Rp7.400.000,00	Rp400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp7.100.000,00	Rp0,00	Rp7.100.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp81.000.000,00	Rp80.646.820,00	Rp353.180,00

Realisasi Bidang Fasilitasi Pelayanan Adminduk DKP3A per 31 Desember 2024

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Sebagian besar realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan sudah mencapai realisasi yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan dan hanya menyisakan sisa anggaran dengan persentase sisa sebesar 4,25%.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di tahun 2024 secara keseluruhan terlaksana atau terealisasi dengan baik dapat dilihat dari realisasi keuangan sebesar 95,75%, hal ini didukung oleh anggaran, sumber daya dan manajerial penjadwalan kegiatan yang baik.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan secara keseluruhan program dan kegiatan di tahun 2024 terlaksana sesuai dengan target. Secara umum program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran juga adanya dukungan sarana dan prasarana lainnya. Secara rinci faktor pendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang memadai.
2. Adanya sinergitas antara Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dalam menyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
3. Adanya regulasi dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan administrasi kependudukan.
4. Kecepatan dan ketepatan dalam melakukan koordinasi antar pemerintah dan/atau non pemerintah sehingga memberi kemudahan dalam penyediaan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan,
5. Kerjasama kemitraan dengan lembaga baik pemerintah dan non pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

1. Besaran pengalokasian anggaran yang fluktuatif sehingga terdapat perbedaan jumlah yang sudah ditetapkan dalam renstra.
2. Tuntutan kebijakan yang selalu menyesuaikan isu yang berkembang dan kejadian luar biasa yang tidak terduga.
3. Peran lintas sektor mendukung terlaksananya capaian program dan kegiatan seringkali tidak dapat diduga.
4. Terbatasnya personil SDM
5. Kurangnya pemahaman pemerintah, swasta dan masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan

2.1.3 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi pelayanan publik dan peran serta kemitraan dalam memberikan kontribusi meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Selain itu potensi adanya data kependudukan dimanfaatkan untuk semua keperluan.

2.1.3 Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

- Melakukan pengusulan perubahan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sebagai preventif pada tahun berjalan agar target anggaran dan kinerja dapat tetap tercapai sesuai yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan sinergitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan
- Meningkatkan komitmen pencapaian target dan kinerja
- Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas sumber daya melalui program dan kegiatan
- Menetapkan Standar Operasional dalam tahapan perencanaan sehingga proses perencanaan dapat terakomodir dengan baik

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	BIDANG FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	-	-	70%	70%	100%	80%	80%	100%
		Persentase Kepemilikan KTP-el	99,7%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	75%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	9%	-	-	-	-	-	-	-
		Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk	-	6 Kebijakan	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

		Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota Se-Kaltim	-	1 Kebijakan	-	-	-	-	-	-
	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan pendafataran kependudukan	Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapan	-	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran Penduduk	jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan pendaftaran penduduk	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	-	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	jumlah laporan hasil bimbingan teknis pendaftaran penduduk	-	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	-	-	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		Kebijakan terkait pencatatan sipil	-	3 Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah kebijakan teknis di bidang catatan sipil yang telah ditetapkan	-	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 laporan	6 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan Sipil	jumlah dokumen Pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	-	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Publikasi data kependudukan skala provinsi	-	-	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
		Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan	-	5 Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah data kependudukan	-	3 dokumen	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	-	-	-	-	-	28%	28%	100%
		Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi yang Ditindaklanjuti	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	6 dokumen	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	-	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen PIAK Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diawasi sesuai Ketentuan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-	-	40 orang	40 orang	100%	60 orang	60 orang	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lain yang Tersusun	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil Provinsi Kaltim

Penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah bagian dari urusan wajib non pelayanan dasar. Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan perwujudan/implementasi Visi dan Misi Kepala Daerah yakni **Visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”** dan **Misi 4 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Berintegritas”**.

Dasar hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 26 ayat 3, yang menyebutkan bahwa “Hal-hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur oleh Undang-Undang”;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amanat penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Daerah, tercantum dengan jelas di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang

menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Daerah, dalam hal ini Gubernur, dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, adalah :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. Penyajian data kependudukan skala Provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang membidangi urusan dalam negeri; dan
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Disamping itu, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, secara jelas dibunyikan didalam Pasal 54 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sebagai berikut :

“Data Kependudukan yang dipergunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan yang berasal dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri”.

Pemanfaatan Data tersebut antara lain untuk :

1. Pelayanan publik
2. Perencanaan pembangunan
3. Alokasi anggaran
4. Pembangunan demokrasi
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, jelas bahwa kehadiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di level Provinsi sangat diperlukan, untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kalimantan Timur. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur, melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari kewajiban untuk menyusun RENJA, sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur adalah Perangkat Daerah yang termasuk ke dalam ranah Aspek Pelayanan Umum Wajib Non Pelayanan Dasar yang menangani urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Pelayanan	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Lapor PAK (Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pelayanan Terpadu		-	70%	80%	-	-	70%	80%	-	
	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk	Lapor PAK (Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pelayanan Terpadu		6 Kebijakan	- Kebijakan	-	-	-	-	-	-	
	Persentase Kepemilikan KTP-el	Lapor PAK (Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pelayanan Terpadu Kependudukan)		-	-	-	99,7%	-	-	-	99,7%	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Lapor PAK (Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pelayanan Terpadu KERJASAMA KALTIM KARINDANGAN (KARTU IDENTITAS ANAK DAPAT POTONGAN)		-	-	-	75%	-	-	-	75%	
2.	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Lapor PAK (Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pelayanan Terpadu	IKK	-	-	-	9%	-	-	-	9%	
	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Lapor PAK (Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pelayanan Terpadu		-	-	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	

	Kebijakan terkait pencatatan sipil	Lapor PAK (Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pelayanan Terpadu		6 Kebijakan	-	-	-	6 Kebijakan	-	-	-	
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Lapor PAK (Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pelayanan Terpadu		-	-	-	100%	-	-	-	100%	
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Lapor PAK (Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pelayanan Terpadu		-	-	-	100%	-	-	-	100%	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Lapor PAK (Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pelayanan Terpadu		-	-	-	100%	-	-	-	100%	
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Lapor PAK (Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pelayanan Terpadu		-	-	-	100%	-	-	-	100%	
3.	Publikasi data kependudukan skala provinsi	PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN KEPADA LEMBAGA PENGGUNA PROVINSI		-	2 kali	2 kali	-	-	2 kali	2 kali	-	
	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan	PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN KEPADA LEMBAGA PENGGUNA PROVINSI		5 Kebijakan	5 Kebijakan	-	-	5	5	-	-	
	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN KEPADA LEMBAGA PENGGUNA PROVINSI	IKK	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	3 Dok	3 Dok	100%	
4.	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	PROFIL PERKEMBANGAN PENDUDUK, Penyusunan		-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Kaltim

Dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, identifikasi isu strategis dilaksanakan guna mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang dihadapi organisasi, dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu untuk merumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur. Adapun identifikasi isu-isu strategis tersebut melalui dilakukan dari inventarisasi usulan kabupaten/kota baik pada pelaksanaan musrenbang, rakortekrenbang dan Forum Perangkat Daerah lintas OPD di Provinsi Kalimantan Timur. Sampai saat ini permasalahan yang timbul adalah masih kurangnya kesadaran dan/atau pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan belum optimalnya pelaksanaan pelayanan adminduk, serta belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya organisasi / lembaga penyedia data dalam menyajikan data kependudukan terpilah menurut spesifik urusan.
2. Belum optimalnya penyediaan jaringan yang memadai untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan.
3. Kurang optimalnya pemanfaatan database kependudukan/profil kependudukan oleh stakeholder terkait untuk semua keperluan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Arah Kebijakan dan Strategi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah pelaksanaan pelayanan terpadu jemput bola adminduk untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan optimalisasi data kependudukan diolah dan dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan yang bersifat strategis untuk pelaksanaan program pemerintah.

Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Pengampu
	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prov. Kaltim			9,817,190,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prov. Kaltim			9,817,190,000	SEKRETARIAT
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	2,576,574,686			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	2,576,574,686	SEKRETARIAT
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 Persen	7,240,615,314			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 Persen	7,240,615,314	SEKRETARIAT
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan	5 Dokumen	67,595,600	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan	5 Dokumen	67,595,600	SEKRETARIAT
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15,586,200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15,586,200	SEKRETARIAT
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,586,200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,586,200	SEKRETARIAT
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,586,200	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,586,200	SEKRETARIAT
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10,123,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10,123,500	SEKRETARIAT
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,713,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,713,500	SEKRETARIAT
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	6 Dokumen	5,630,405,843	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	6 Dokumen	5,630,405,843	SEKRETARIAT
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	5,520,004,443	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	5,520,004,443	SEKRETARIAT
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	69,960,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	69,960,000	SEKRETARIAT
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,723,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,723,500	SEKRETARIAT
1.2.4	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	21,073,500	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	21,073,500	SEKRETARIAT
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6,295,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6,295,000	SEKRETARIAT
1.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6,349,400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6,349,400	SEKRETARIAT
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	3 Dokumen	39,988,400	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	3 Dokumen	39,988,400	SEKRETARIAT
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6,227,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6,227,000	SEKRETARIAT
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	22,664,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	22,664,000	SEKRETARIAT
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11,097,400	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11,097,400	SEKRETARIAT
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Dokumen	125,273,109	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Dokumen	125,273,109	SEKRETARIAT

1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	6,559,645	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	6,559,645	SEKRETARIAT
1.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 Paket	22,333,720	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 Paket	22,333,720	SEKRETARIAT
1.4.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	11,251,782	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	11,251,782	SEKRETARIAT
1.4.4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10,328,981	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10,328,981	SEKRETARIAT
1.4.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	74,798,981	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	74,798,981	SEKRETARIAT
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Terpenuhi	9 Dokumen	1,484,936,362	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Terpenuhi	9 Dokumen	1,484,936,362	SEKRETARIAT
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,285,439	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,285,439	SEKRETARIAT
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	56,472,795	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	56,472,795	SEKRETARIAT
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	15,809,419	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	15,809,419	SEKRETARIAT
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	7,728,144	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	7,728,144	SEKRETARIAT
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	18,590,350	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	18,590,350	SEKRETARIAT
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	55,376,720	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	55,376,720	SEKRETARIAT
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,307,678,495	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,307,678,495	SEKRETARIAT
1.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,497,500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,497,500	SEKRETARIAT
1.5.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2,497,500	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2,497,500	SEKRETARIAT
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Paket	681,472,686	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Paket	681,472,686	SEKRETARIAT
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	250,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	250,000,000	SEKRETARIAT
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	250,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	250,000,000	SEKRETARIAT
1.6.3	Pengadaan Mebel	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	27,959,127	Pengadaan Mebel	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	27,959,127	SEKRETARIAT
1.6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	76,756,809	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	76,756,809	SEKRETARIAT
1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	76,756,750	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	76,756,750	SEKRETARIAT
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	1,352,956,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	1,352,956,000	SEKRETARIAT
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	710,696,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	710,696,000	SEKRETARIAT
1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,000,000	SEKRETARIAT
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	640,260,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	640,260,000	SEKRETARIAT
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berfungsi dengan Baik	4 Paket	434,562,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berfungsi dengan Baik	4 Paket	434,562,000	SEKRETARIAT
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43,560,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43,560,000	SEKRETARIAT
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan			

1.8.2	Lapangan	Prov. Kaltim	Pajak dan Perizinannya	4 Unit	66,272,000	Lapangan	Prov. Kaltim	Pajak dan Perizinannya	4 Unit	66,272,000	SEKRETARIAT
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	81,730,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	81,730,000	SEKRETARIAT
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	243,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	243,000,000	SEKRETARIAT
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prov. Kaltim			2,077,610,000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prov. Kaltim			2,077,610,000	BIDANG FASYAMINDUK
			Persentase Kepemilikan KTP-el	99.7 Persen	600,000,000			Persentase Kepemilikan KTP-el	99.7 Persen	600,000,000	BIDANG FASYAMINDUK
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	75 Persen	600,000,000			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	75 Persen	600,000,000	BIDANG FASYAMINDUK
			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	9 Persen	877,610,000			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	9 Persen	877,610,000	BIDANG FASYAMINDUK
2.1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen	356,700,000	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen	356,700,000	BIDANG FASYAMINDUK
2.1.1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kab/Kota dalam Satu Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	118,900,000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kab/Kota dalam Satu Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	118,900,000	BIDANG FASYAMINDUK
2.1.2	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1 Dokumen	118,900,000	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1 Dokumen	118,900,000	BIDANG FASYAMINDUK
2.1.3	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	118,900,000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	118,900,000	BIDANG FASYAMINDUK
2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	Prov. Kaltim	Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	2 Dokumen	1,620,910,000	Penyelenggaraan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	Prov. Kaltim	Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	2 Dokumen	1,620,910,000	BIDANG FASYAMINDUK
2.2.1	Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1,520,910,000	Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1,520,910,000	BIDANG FASYAMINDUK
2.2.2	Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	100,000,000	Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	100,000,000	BIDANG FASYAMINDUK
2.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diawasi Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	100,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diawasi Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	100,000,000	BIDANG FASYAMINDUK
2.3.1	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	100,000,000	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	100,000,000	BIDANG FASYAMINDUK
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prov. Kaltim			105,200,000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prov. Kaltim			105,200,000	BIDANG FASYAMINDUK
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100 Persen	26,300,000			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100 Persen	26,300,000	BIDANG FASYAMINDUK
			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100 Persen	26,300,000			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100 Persen	26,300,000	BIDANG FASYAMINDUK
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100 Persen	26,300,000			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100 Persen	26,300,000	BIDANG FASYAMINDUK
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100 Persen	26,300,000			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100 Persen	26,300,000	BIDANG FASYAMINDUK

3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	53,050,000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	53,050,000	BIDANG FASYAMINDUK
3.1.1	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1 Dokumen	53,050,000	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1 Dokumen	53,050,000	BIDANG FASYAMINDUK
3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	2 Dokumen	37,150,000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	2 Dokumen	37,150,000	BIDANG FASYAMINDUK
3.2.1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	22,150,000	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	22,150,000	BIDANG FASYAMINDUK
3.2.2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Teknis Pencatatan Sipil	1 Laporan	15,000,000	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Teknis Pencatatan Sipil	1 Laporan	15,000,000	BIDANG FASYAMINDUK
3.3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang Diberikan Konsultasi	1 Dokumen	15,000,000	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang Diberikan Konsultasi	1 Dokumen	15,000,000	BIDANG FASYAMINDUK
3.3.1	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	15,000,000	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	15,000,000	BIDANG FASYAMINDUK
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prov. Kaltim	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100 Persen	380,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prov. Kaltim	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100 Persen	380,000,000	BIDANG PIAK
4.1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi yang Ditindaklanjuti	3 Dokumen	230,000,000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi yang Ditindaklanjuti	3 Dokumen	230,000,000	BIDANG PIAK
4.1.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	100,000,000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	100,000,000	BIDANG PIAK
4.1.2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	65,000,000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	65,000,000	BIDANG PIAK
4.1.3	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1 Dokumen	65,000,000	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1 Dokumen	65,000,000	BIDANG PIAK
4.2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen PIAK Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diawasi sesuai Ketentuan	2 Dokumen	150,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen PIAK Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diawasi sesuai Ketentuan	2 Dokumen	150,000,000	BIDANG PIAK
4.2.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	75,000,000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	75,000,000	BIDANG PIAK
4.2.2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	25 Orang	75,000,000	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	25 Orang	75,000,000	BIDANG PIAK
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prov. Kaltim	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	1 Dokumen	120,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prov. Kaltim	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	1 Dokumen	120,000,000	BIDANG PIAK
5.1	Penyediaan Profil Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	3 Dokumen	120,000,000	Penyediaan Profil Kependudukan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	3 Dokumen	120,000,000	BIDANG PIAK
5.1.1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lain yang Tersusun	3 Dokumen	120,000,000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lain yang Tersusun	3 Dokumen	120,000,000	BIDANG PIAK
JUMLAH									12.500.000.000		DISDUKCAPIL

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelayanan Dokumen Kependudukan Luar Domisili masih belum Optimal di Provinsi Kalimantan Timur dengan terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka bentuk kesungguhan Pemerintah dalam mendekatkan diri kepada masyarakat dalam hal optimalisasi pelayanan prima dalam bentuk melakukan pelayanan perekaman dan percetakan KTP-EL luar domisili, aktivasi Identitas Kependudukan Digital yang mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Kalimantan Timur “KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS” Tahun 2025-2029 dan pelaksanaan Program Gratis Pol.

Sesuai arahan Sekretaris Daerah pada Rapat RKPD Perubahan bahwa belanja SKPD harus berkualitas dan menunjang kinerja serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Maka untuk memberikan kelancaran pelayanan perekaman dan percetakan KTP-EL luar domisili, aktivasi Identitas Kependudukan Digital yang dilakukan Provinsi dibutuhkan kendaraan mobil lapangan pelayanan adminduk keliling. Mobil layanan keliling akan digunakan untuk kegiatan pelayanan terpadu jemput bola bekerja sama dengan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur dalam hal melakukan pelayanan terpadu jemput bola ke Rutan/Lapas, SLB, SLTA, SMK atau Perguruan Tinggi, tempat keramaian (Gor Kadri Oening Sempaja). Bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan layanan Gratis Pol adalah kepemilikan KTP-EL Kalimantan Timur.

Berdasarkan beberapa fakta dan data diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kaltim memerlukan Mobil Layanan Adminduk Keliling untuk menunjang kinerja dan mendukung Program Gratis Pol Gubernur Kalimantan Timur. Berdasarkan pokok permasalahan, pra anggapan, fakta dan data yang berpengaruh, maka dalam hal program dan kegiatan kepada masyarakat kaitan pelayanan administrasi kependudukan Disdukcapil Provinsi Kaltim sebagai pembina urusan administrasi kependudukan dengan adanya mobil layanan adminduk dapat meningkatkan aspek pelayanan umum non pelayanan dasar kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan efektif dan efisien.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 urusan
adminduk dan capil

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan pembahasan
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK/Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan/Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk (Fasilitas Penyediaan Sarana Pengadaan Dokumen Kependudukan) (Alat Rekam KTP Elektronik)	Kabupaten Kutai Kartanegara	- Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk - Persentase Kepemilikan KTP-el	44 Unit	Diproses lebih lanjut mengadakan alat rekam pada 44 kelurahan di Kab. Kukar
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK/Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan/Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk (Fasilitasi Penyediaan Sarana Pengadaan Dokumen Kependudukan) (Alat Rekam KTP Elektronik)	Seluruh Kecamatan & Kelurahan di Kabupate Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur	- Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk - Persentase Kepemilikan KTP-el	1 Paket	Diproses lebih lanjut

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2025- 2029. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dengan tetap berpedoman pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024. Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim pada Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kaltim periode pembangunan tahun 2025-2029, dimana acuan tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui capaian pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
2. Memberikan gambaran keuangan masa lalu dan kemampuan pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Memberikan gambaran rumusan permasalahan dan isu strategis untuk dipecahkan dalam 5 (lima) tahun ke depan.
4. Memberikan Gambaran kebijakan dalam lima tahun ke depan.
5. Memberikan Gambaran rekomendasi kinerja, kerja maupun program bagi calon kepala daerah.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kaltim 2025-2045, yaitu **Kaltim Sejahtera 2045 : Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang maju, Adil dan Berkelanjutan**. Visi Pembangunan Provinsi Kaltim tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Kalimantan Timur. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat KALTIM yang Sejahtera

dengan memperhatikan posisi Provinsi Kaltim sebagai superhub ekonomi IKN dan mitra IKN.

Dari visi RPJPD Provinsi Kaltim tahun 2025-2045 serta tema Pembangunan untuk Kalimantan Timur yang terdapat dalam dokumen Teknokratik RPJMN, maka dirumuskan arahan visi Kalimantan Timur periode 2025-2029 yaitu “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kaltim memiliki pokok-pokok visi yang menjadi harapan pembangunan untuk dicapai dalam periode jangka Panjang antara lain :

1. Pusat Ekonomi Kawasan Timur

Kalimantan Timur sebagai *Leader* dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia melalui pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan potensi lokal. Sebagai pusat ekonomi, Provinsi Kaltim mengupayakan untuk menjadi pusat kegiatan bisnis, investasi, dan inovasi yang menghubungkan berbagai sektor perekonomian. Fokus utama yang dapat mendukung pencapaian pokok visi ini adalah mengoptimalkan sumber daya alam yang melimpah, memperkuat jaringan distribusi, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti kawasan industri, pusat perdagangan, dan fasilitas logistik. Selain itu, pengembangan pusat ekonomi di Provinsi Kaltim melibatkan kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan Pusat Ekonomi Kawasan Timur tidak hanya akan meningkatkan daya saing regional dan menarik investasi, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah, dan pengembangan kapasitas lokal yang berkelanjutan.

2. Mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN)

Kalimantan Timur berupaya mendorong peran krusial Provinsi Kaltim dalam menciptakan pusat pemerintahan yang modern,

berkelanjutan, dan sejahtera. Dalam kapasitas ini, tidak hanya menyediakan dukungan logistik dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan IKN, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung utama antara IKN dan kawasan timur Indonesia, memperkuat konektivitas regional dan memperluas peluang ekonomi. Kolaborasi ini mencakup pengembangan infrastruktur transportasi, energi, dan teknologi yang mendukung integrasi IKN dengan pusat-pusat ekonomi lainnya, serta mempromosikan investasi yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti teknologi hijau, pariwisata, dan industri kreatif. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mendukung keberhasilan IKN sebagai model kota masa depan yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. Maju

Kata Maju merujuk pada pencapaian kemajuan dalam dua dimensi utama sumber daya manusia (SDM) dan pemerintahan. Dalam aspek sumber daya manusia, kemajuan berarti pengembangan kapasitas individu melalui pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan komunitas untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal. Sementara itu, kemajuan dalam pemerintahan mencakup upaya untuk menciptakan sistem administrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel, di mana kebijakan dan layanan publik dirancang dan diimplementasikan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, keadilan, dan integritas. Dengan mengintegrasikan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat struktur pemerintahan, Provinsi Kaltim dapat mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi, di mana kemakmuran sosial dan ekonomi dapat terwujud secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pengembangan kapasitas manusia dan reformasi pemerintahan yang inovatif menciptakan fondasi untuk pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing, dan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari proses pembangunan.

yang sedang berlangsung.

4. Sejahtera

Kata Sejahtera merujuk pada kondisi di mana masyarakat menikmati keseimbangan yang harmonis antara kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan kualitas hidup yang tinggi. Kesejahteraan sosial berarti menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, serta kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan menciptakan sebuah masyarakat yang aman, adil, dan harmonis, di mana setiap orang memiliki peluang untuk berkembang dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Dengan menciptakan sistem sosial yang responsif dan adil, diharapkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang penuh makna, di mana kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari keseimbangan emosional, sosial, dan spiritual.

5. Berkelanjutan

Kata Berkelanjutan bermakna pada prinsip-prinsip dan praktik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan dalam aspek lingkungan berarti mengintegrasikan strategi yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian sumber daya alam, dan perlindungan ekosistem. Ini mencakup penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan efisiensi energi, serta metode pengelolaan yang minim dampak negatif terhadap lingkungan, seperti konservasi air, pengurangan limbah, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Pendekatan ini juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, edukasi tentang praktik lingkungan yang baik, dan upaya kolaboratif untuk menciptakan solusi yang inovatif dan inklusif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip

berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang sehat dan memiliki resiliensi, mendukung keberlanjutan sumber daya alam, mengurangi jejak karbon, dan menjaga kualitas hidup bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada penciptaan kebijakan yang mendukung tanggung jawab lingkungan dan mempromosikan kesadaran serta tindakan kolektif untuk masa depan yang lebih hijau dan harmonis.

Tujuan jangka panjang Provinsi Kaltim ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis jangka menengah Provinsi Kaltim dan Disdukcapil Provinsi Kaltim. Sasaran merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan.

Melalui Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029. Dasar Hukum dibuatnya Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ini adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, yang mana berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Urusan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029

TUJUAN	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		
INDIKATOR	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	IKK
Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	IKK
Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur, telah dilakukan telaahan terhadap Renstra Kemeterian Dalam Negeri dan dihasilkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Telaahan Permasalahan Pelayanan adminduk dan capil berdasarkan
Sasaran Renstra K/L

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Pemanfaatan Database kependudukan	Belum semua PD memanfaatkan data kependudukan	Tersedianya database kependudukan
		Kualitas pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat belum optimal	<i>Updating</i> data bersih menunggu dari pusat yang tidak dapat selalu <i>real time</i>	Tersedianya sarana prasarana aplikasi SIAK dan <i>Hardware</i> yang memadai

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Provinsi Kaltim

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan wajib non pelayanan dasar bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Efektif dan Efisien”

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, yaitu melalui manajemen birokrasi yang profesional, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN Berahlak
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, melalui peningkatan persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil se-Kaltim
3. Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan, melalui tersusunnya Buku Data Agregat Kependudukan Per Semester dan Buku Profil Perkembangan Kependudukan dan kerjasama pemanfaatan data

kependudukan yang digunakan untuk semua kepentingan.

Rincian Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Provinsi Kaltim sesuai dengan Renstra 2025-2029 adalah :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disdukcapil Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja / Sasaran pada Tahun ke-						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Indikator > Tujuan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai	N/A	81	81.5	82	82.5	83	83.5	
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	N/A	81	82	84	88.5	89	90	
	Memajukan Reformasi Birokrasi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Kepemilikan KTP-el	%	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9	99.95	99.96	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	67	70	75	80	85	90	95	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	5.6	7	9	11	13	15	17	
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Akta Perorangan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan Pengelompokan Profil Kependudukan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	

3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di Kalimantan Timur, maka dirumuskanlah sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meningkatnya fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya disusunlah strategi dan kebijakan dimana kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan kedalam program yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana program, kegiatan, dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur untuk periode selama 5 (lima) tahun, akan disajikan didalam Tabel T-C.33 tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 berikut ini :

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027

No	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Prov. Kaltim		9,402,769,033	APBD			12,054,857,200
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		82 Indeks	7,069,506,137			84 Indeks	9,007,357,200
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		100 Persen	2,333,262,896			100 Persen	3,047,500,000
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan	Prov. Kaltim	5 Dokumen	91,460,046	APBD		5 Dokumen	129,000,000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	1 Dokumen	23,972,920	APBD		1 Dokumen	27,500,000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kaltim	1 Dokumen	23,625,100	APBD		1 Dokumen	30,000,000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prov. Kaltim	1 Dokumen	23,625,100	APBD		1 Dokumen	27,500,000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	1 Laporan	9,823,427	APBD		1 Laporan	22,000,000
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	1 Laporan	10,413,499	APBD		1 Laporan	22,000,000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Prov. Kaltim	6 Dokumen	5,636,506,434	APBD		6 Dokumen	7,157,857,200
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	20 Orang/Bulan	5,517,704,307	APBD		20 Orang/Bulan	7,000,000,000
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kaltim	1 Dokumen	69,960,000	APBD		1 Dokumen	74,857,200
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kaltim	1 Laporan	6,723,477	APBD		1 Laporan	10,500,000
1.2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Prov. Kaltim	1 Dokumen	29,473,442	APBD		1 Dokumen	35,000,000

1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	1 Laporan	6,295,404	APBD		1 Laporan	27,500,000
1.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kaltim	1 Dokumen	6,349,804	APBD		1 Dokumen	10,000,000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	Prov. Kaltim	3 Dokumen	48,388,647	APBD		3 Dokumen	46,000,000
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kaltim	1 Dokumen	6,227,404	APBD		1 Dokumen	10,000,000
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kaltim	1 Dokumen	22,664,000	APBD		1 Dokumen	11,000,000
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Kaltim	1 Laporan	19,497,243	APBD		1 Laporan	25,000,000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	5 Dokumen	164,219,109	APBD		5 Dokumen	230,000,000
1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prov. Kaltim	1 Unit	6,559,645	APBD		1 Unit	10,000,000
1.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Prov. Kaltim	1 Paket	22,333,720	APBD		1 Paket	55,000,000
1.4.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prov. Kaltim	1 Dokumen	11,251,782	APBD		1 Dokumen	15,000,000
1.4.4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Prov. Kaltim	1 Dokumen	18,698,981	APBD		1 Dokumen	25,000,000
1.4.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prov. Kaltim	20 Orang	105,374,981	APBD		20 Orang	125,000,000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Terpenuhi	Prov. Kaltim	8 Dokumen	1,268,780,594	APBD		8 Dokumen	1,619,500,000
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 Paket	18,285,439	APBD		1 Paket	20,000,000
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	32 Paket	53,949,600	APBD		32 Paket	65,000,000
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Prov. Kaltim	1 Paket	30,000,339	APBD		1 Paket	5,000,000
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Prov. Kaltim	1 Paket	7,728,144	APBD		1 Paket	165,000,000
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Prov. Kaltim	1 Paket	18,590,350	APBD		1 Paket	22,000,000

1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kaltim	1 Laporan	61,380,168	APBD		1 Laporan	65,000,000
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	1 Laporan	1,073,588,954	APBD		1 Laporan	1,250,000,000
1.5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Kaltim	1 Dokumen	5,257,600	APBD		1 Dokumen	27,500,000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Kaltim	3 Paket	605,996,203	APBD		3 Paket	700,000,000
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 Paket	228,377,626	APBD		1 Paket	250,000,000
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prov. Kaltim	30 Unit	377,618,577	APBD		30 Unit	450,000,000
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Kaltim	3 Dokumen	1,152,856,000	APBD		3 Dokumen	1,652,500,000
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltim	1 Laporan	2,000,000	APBD		1 Laporan	2,500,000
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 Laporan	710,696,000	APBD		1 Laporan	550,000,000
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 Laporan	440,160,000	APBD		1 Laporan	1,100,000,000
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berfungsi dengan Baik	Prov. Kaltim	4 Paket	434,562,000	APBD		4 Paket	520,000,000
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Prov. Kaltim	1 Unit	43,560,000	APBD		1 Unit	55,000,000
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prov. Kaltim	5 Unit	76,015,000	APBD		5 Unit	75,000,000
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prov. Kaltim	40 Unit	38,720,000	APBD		40 Unit	90,000,000
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Kaltim	1 Unit	276,267,000	APBD		1 Unit	300,000,000
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Prov. Kaltim		1,310,181,017	APBD			2,180,000,000
		Persentase Kepemilikan KTP-el		99.7 Persen	436,727,006			99.8 Persen	726,666,667

		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		75 Persen	436,727,005			80 Persen	726,666,666
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital		9 Persen	436,727,006			11 Persen	726,666,667
2.1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	1 Dokumen	319,490,936	APBD		1 Dokumen	380,000,000
2.1.1	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Prov. Kaltim	1 Dokumen	319,490,936	APBD		1 Dokumen	380,000,000
2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	Prov. Kaltim	1 Dokumen	990,690,081	APBD		1 Dokumen	1,800,000,000
2.2.1	Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	1 Laporan	990,690,081	APBD		1 Laporan	1,800,000,000
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Prov. Kaltim		264,948,685	APBD			350,000,000
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan		100 Persen	66,237,172			100 Persen	87,500,000
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan		100 Persen	66,237,171			100 Persen	87,500,000
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan		100 Persen	66,237,171			100 Persen	87,500,000
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan		100 Persen	66,237,171			100 Persen	87,500,000
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	2 Dokumen	161,802,280	APBD		2 Dokumen	225,000,000
3.1.1	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Prov. Kaltim	1 Dokumen	99,850,000	APBD		1 Dokumen	150,000,000
3.1.2	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	1 Laporan	61,952,280	APBD		1 Laporan	75,000,000
3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Prov. Kaltim	1 Dokumen	103,146,405	APBD		1 Dokumen	125,000,000
3.2.1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	1 Laporan	103,146,405	APBD		1 Laporan	125,000,000
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Prov. Kaltim	100 Persen	297,235,073	APBD		100 Persen	425,000,000

4.1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi yang Ditindaklanjuti	Prov. Kaltim	1 Dokumen	170,261,296	APBD		1 Dokumen	250,000,000
4.1.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	1 Laporan	170,261,296	APBD		1 Laporan	250,000,000
4.2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen PIAK Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diawasi sesuai Ketentuan	Prov. Kaltim	1 Dokumen	126,973,777	APBD		1 Dokumen	175,000,000
4.2.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	1 Laporan	126,973,777	APBD		1 Laporan	175,000,000
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Prov. Kaltim	1 Dokumen	109,421,192	APBD		1 Dokumen	135,000,000
5.1	Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	Prov. Kaltim	3 Dokumen	109,421,192	APBD		3 Dokumen	135,000,000
5.1.1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lain yang Tersusun	Prov. Kaltim	3 Dokumen	109,421,192	APBD		3 Dokumen	135,000,000
			JUMLAH		11,384,555,000		JUMLAH		15,144,857,200

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDUKCAPIL PROVINSI KALTIM

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027

No	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Prov. Kaltim		9,402,769,033	APBD			12,054,857,200
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		82 Indeks	7,069,506,137			84 Indeks	9,007,357,200
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		100 Persen	2,333,262,896			100 Persen	3,047,500,000
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan	Prov. Kaltim	5 Dokumen	91,460,046	APBD		5 Dokumen	129,000,000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	1 Dokumen	23,972,920	APBD		1 Dokumen	27,500,000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kaltim	1 Dokumen	23,625,100	APBD		1 Dokumen	30,000,000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prov. Kaltim	1 Dokumen	23,625,100	APBD		1 Dokumen	27,500,000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	1 Laporan	9,823,427	APBD		1 Laporan	22,000,000
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	1 Laporan	10,413,499	APBD		1 Laporan	22,000,000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Prov. Kaltim	6 Dokumen	5,636,506,434	APBD		6 Dokumen	7,157,857,200
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	20 Orang/Bulan	5,517,704,307	APBD		20 Orang/Bulan	7,000,000,000
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kaltim	1 Dokumen	69,960,000	APBD		1 Dokumen	74,857,200
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kaltim	1 Laporan	6,723,477	APBD		1 Laporan	10,500,000
1.2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Prov. Kaltim	1 Dokumen	29,473,442	APBD		1 Dokumen	35,000,000

1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	1 Laporan	6,295,404	APBD		1 Laporan	27,500,000
1.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kaltim	1 Dokumen	6,349,804	APBD		1 Dokumen	10,000,000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	Prov. Kaltim	3 Dokumen	48,388,647	APBD		3 Dokumen	46,000,000
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kaltim	1 Dokumen	6,227,404	APBD		1 Dokumen	10,000,000
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kaltim	1 Dokumen	22,664,000	APBD		1 Dokumen	11,000,000
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Kaltim	1 Laporan	19,497,243	APBD		1 Laporan	25,000,000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	5 Dokumen	164,219,109	APBD		5 Dokumen	230,000,000
1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prov. Kaltim	1 Unit	6,559,645	APBD		1 Unit	10,000,000
1.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Prov. Kaltim	1 Paket	22,333,720	APBD		1 Paket	55,000,000
1.4.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prov. Kaltim	1 Dokumen	11,251,782	APBD		1 Dokumen	15,000,000
1.4.4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Prov. Kaltim	1 Dokumen	18,698,981	APBD		1 Dokumen	25,000,000
1.4.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prov. Kaltim	20 Orang	105,374,981	APBD		20 Orang	125,000,000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Terpenuhi	Prov. Kaltim	8 Dokumen	1,268,780,594	APBD		8 Dokumen	1,619,500,000
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 Paket	18,285,439	APBD		1 Paket	20,000,000
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	32 Paket	53,949,600	APBD		32 Paket	65,000,000
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Prov. Kaltim	1 Paket	30,000,339	APBD		1 Paket	5,000,000
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Prov. Kaltim	1 Paket	7,728,144	APBD		1 Paket	165,000,000

1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Prov. Kaltim	1 Paket	18,590,350	APBD		1 Paket	22,000,000
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kaltim	1 Laporan	61,380,168	APBD		1 Laporan	65,000,000
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	1 Laporan	1,073,588,954	APBD		1 Laporan	1,250,000,000
1.5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Kaltim	1 Dokumen	5,257,600	APBD		1 Dokumen	27,500,000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov. Kaltim	3 Paket	605,996,203	APBD		3 Paket	700,000,000
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 Paket	228,377,626	APBD		1 Paket	250,000,000
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prov. Kaltim	30 Unit	377,618,577	APBD		30 Unit	450,000,000
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Kaltim	3 Dokumen	1,152,856,000	APBD		3 Dokumen	1,652,500,000
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltim	1 Laporan	2,000,000	APBD		1 Laporan	2,500,000
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 Laporan	710,696,000	APBD		1 Laporan	550,000,000
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	1 Laporan	440,160,000	APBD		1 Laporan	1,100,000,000
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berfungsi dengan Baik	Prov. Kaltim	4 Paket	434,562,000	APBD		4 Paket	520,000,000
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Prov. Kaltim	1 Unit	43,560,000	APBD		1 Unit	55,000,000
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prov. Kaltim	5 Unit	76,015,000	APBD		5 Unit	75,000,000
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prov. Kaltim	40 Unit	38,720,000	APBD		40 Unit	90,000,000
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Kaltim	1 Unit	276,267,000	APBD		1 Unit	300,000,000
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Prov. Kaltim		1,310,181,017	APBD			2,180,000,000

		Persentase Kepemilikan KTP-el		99.7 Persen	436,727,006			99.8 Persen	726,666,667
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		75 Persen	436,727,005			80 Persen	726,666,666
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital		9 Persen	436,727,006			11 Persen	726,666,667
2.1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	1 Dokumen	319,490,936	APBD		1 Dokumen	380,000,000
2.1.1	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Prov. Kaltim	1 Dokumen	319,490,936	APBD		1 Dokumen	380,000,000
2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	Prov. Kaltim	1 Dokumen	990,690,081	APBD		1 Dokumen	1,800,000,000
2.2.1	Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Prov. Kaltim	1 Laporan	990,690,081	APBD		1 Laporan	1,800,000,000
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Prov. Kaltim		264,948,685	APBD			350,000,000
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan		100 Persen	66,237,172			100 Persen	87,500,000
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan		100 Persen	66,237,171			100 Persen	87,500,000
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan		100 Persen	66,237,171			100 Persen	87,500,000
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan		100 Persen	66,237,171			100 Persen	87,500,000
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	2 Dokumen	161,802,280	APBD		2 Dokumen	225,000,000
3.1.1	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Prov. Kaltim	1 Dokumen	99,850,000	APBD		1 Dokumen	150,000,000
3.1.2	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	1 Laporan	61,952,280	APBD		1 Laporan	75,000,000
3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Prov. Kaltim	1 Dokumen	103,146,405	APBD		1 Dokumen	125,000,000
3.2.1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Prov. Kaltim	1 Laporan	103,146,405	APBD		1 Laporan	125,000,000

4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Prov. Kaltim	100 Persen	297,235,073	APBD		100 Persen	425,000,000
4.1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi yang Ditindaklanjuti	Prov. Kaltim	1 Dokumen	170,261,296	APBD		1 Dokumen	250,000,000
4.1.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	1 Laporan	170,261,296	APBD		1 Laporan	250,000,000
4.2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen PIAK Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diawasi sesuai Ketentuan	Prov. Kaltim	1 Dokumen	126,973,777	APBD		1 Dokumen	175,000,000
4.2.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prov. Kaltim	1 Laporan	126,973,777	APBD		1 Laporan	175,000,000
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Prov. Kaltim	1 Dokumen	109,421,192	APBD		1 Dokumen	135,000,000
5.1	Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	Prov. Kaltim	3 Dokumen	109,421,192	APBD		3 Dokumen	135,000,000
5.1.1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lain yang Tersusun	Prov. Kaltim	3 Dokumen	109,421,192	APBD		3 Dokumen	135,000,000
			JUMLAH		11,384,555,000		JUMLAH		15,144,857,200

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan salah satu tahapan dari perencanaan, yang ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki makna strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan Daerah, melalui penjabaran perencanaan pembangunan tahunan Daerah mulai Tahun 2026.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 menjabarkan rencana sasaran daerah dalam rangka mencapai sasaran program. Dengan demikian, Renja menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBD.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isu strategis bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan terkini.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur ini tentunya mengacu kepada RKPD tahun 2026, dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi pelaksanaan program pembangunan, sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai

pada tahun mendatang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur, akan terus mendukung sepenuhnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 dengan meningkatkan Pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pada akhirnya kami berharap Renja 2026 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi seluruh pengambil kebijakan di lingkungan Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur, dalam upaya meningkatkan pelayanan mencapai **Pelayanan Prima**, Semoga apa yang telah direncanakan mendapatkan ridho dan kemudahan dari Allah SWT dalam implementasinya serta memberi kemaslahatan bagi masyarakat Kalimantan Timur.

**RENJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Akhir Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang akan telah ditetapkan untuk tiga tahun RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024-2026. Berkenaan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dilakukan beberapa perubahan dalam tujuan dan sasaran ke depannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan. Pada level pemerintah daerah disusun Perencanaan Jangka Panjang (RPJPD), Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) maupun Perencanaan Tahunan (RKPD) dan untuk level perangkat daerah disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) serta Rencana kerja-Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Secara hierarki penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rancanga RKPD yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD tersebut. Renja Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja Perangkat Daerah akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah/Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Rencana Kerja (Renja) Akhir Dinas DP3A Provinsi Kaltim Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) pada DP3A Provinsi Kaltim yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD. Dengan

adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 5 Rancangan Kerja Tahun 2025-2026 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menuntut pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian terjadi perubahan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari Dinas Kependudukan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (DKP3A) berubah menjadi Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) dengan mandat 2 urusan yaitu pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya Rancangan Renja Ak h i r Dinas DP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja DP3A Tahun 2026 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
18. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja A k h i r DP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah untuk merumuskan rencana kerja DP3A Provinsi Kalimantan Timur (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja A k h i r DP3A Provinsi Kaltim Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dan evaluasi program kegiatan dalam penyusunan rencana anggaran DP3A Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Akhir DP3A Provinsi Kaltim Tahun 2026 terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

- 1.2 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
- 2.4 Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5 Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Masyarakat
- 2.7 Program dan kegiatan

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Akhir DP3A Provinsi Kaltim Tahun 2026 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF). Untuk Dana APBD sebesar Rp, **40.077.474.996,00**- di dalamnya termasuk DAK-NF sebesar Rp **505.690.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **36.894.635.174,00,-** atau 92,06%. Secara rinci tertuang dalam table berikut :

Tabel 2.1

Realisasi anggaran dan fisik DKP3A Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.08.2.14.2.12.01.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				40.077.474.996,00	36.894.635.174,00	92,06
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks	82,00	90,00	23.657.029.172,00	22.120.618.109,00	93,81
		%	100,00	100,00			
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	%	70,50	75,50	595.025.900,00	571.826.706,00	96,10
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	3,00	137.400.000,00	131.858.000,00	95,97
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	2,00	2,00	111.063.900,00	101.727.138,00	91,59
2.08.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	2,00	2,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00

2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dokumen	1,00	2,00	14.980.000,00	14.980.000,00	100,00
2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1,00	2,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3,00	3,00	134.582.000,00	126.580.701,00	94,05
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	171.200.000,00	170.880.867,00	99,81
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	94,00	92,06	12.648.110.396,00	12.244.979.465,00	96,81
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	50,00	38,00	12.548.110.396,00	12.145.081.431,00	96,79
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00	45.000.000,00	44.960.034,00	99,91
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16,00	16,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,00	2,00	20.000.000,00	19.938.000,00	99,69
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	80,00	80,00	997.723.056,00	885.027.229,00	88,70
2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3,00	3,00	181.206.000,00	174.840.000,00	96,49
2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75,00	75,00	611.554.000,00	534.361.999,00	87,38
2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10,00	10,00	204.963.056,00	175.825.230,00	85,78
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	unit	111,00	111,00	3.392.660.016,00	3.264.714.220,00	96,23
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1,00	1,00	15.000.000,00	14.995.000,00	99,97
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	6,00	6,00	223.000.000,00	222.935.524,00	99,97

2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	2,00	2,00	148.179.016,00	148.178.000,00	100,00
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	96,00	96,00	15.609.000,00	11.760.000,00	75,34
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	1,00	300.000.000,00	257.688.000,00	85,90
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3,00	3,00	2.470.430.000,00	2.400.872.956,00	97,18
2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	1,00	220.442.000,00	208.284.740,00	94,49
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	32,00	32,00	1.205.007.164,00	1.071.155.000,00	88,89
2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1,00	1,00	342.000.000,00	287.700.000,00	84,12
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	30,00	30,00	863.007.164,00	783.455.000,00	90,78
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenisjasa	4,00	4,00	3.890.445.940,00	3.591.911.039,00	92,33
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	1,00	21.086.000,00	20.530.000,00	97,36
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1,00	1,00	608.884.000,00	371.717.039,00	61,05
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1,00	1,00	91.410.000,00	91.398.600,00	99,99
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1,00	1,00	3.169.065.940,00	3.108.265.400,00	98,08
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	86,00	86,00	928.056.700,00	491.004.450,00	52,91
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	1,00	1,00	26.767.500,00	22.557.900,00	84,27
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	24,00	33,00	262.560.000,00	262.262.550,00	99,89
2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1,00	1,00	638.729.200,00	206.184.000,00	32,28

2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	orang	400,00	400,00	4.250.481.300,00	3.788.160.637,00	89,12
2.08.02.1.01	<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah</i>	lembaga	10,00	10,00	1.244.373.000,00	1.151.047.848,00	92,50
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Laporan	1,00	3,00	462.600.000,00	431.158.717,00	93,20
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	178.257.000,00	157.581.062,00	88,40
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Orang	130,00	130,00	603.516.000,00	562.308.069,00	93,17
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	lembaga	1,00	1,00	791.514.000,00	736.263.364,00	93,02
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Orang	430,00	430,00	433.257.000,00	404.364.663,00	93,33
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Lembaga	10,00	10,00	358.257.000,00	331.898.701,00	92,64
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	orang	400,00	400,00	2.214.594.300,00	1.900.849.425,00	85,83
2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Lembaga	1,00	1,00	170.400.000,00	150.246.436,00	88,17
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Orang	300,00	300,00	1.787.737.300,00	1.535.797.372,00	85,91
2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Unit	1,00	0,00	256.457.000,00	214.805.617,00	83,76
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	%	90,00	100,00	1.981.341.360,00	1.641.277.746,00	82,84

2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak	Lembaga	10,00	9,00	1.378.937.600,00	1.075.596.241,00	78,00
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	3,00	3,00	772.137.600,00	501.922.319,00	65,00
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	10,00	10,00	606.800.000,00	573.673.922,00	94,54
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	75,00	103,00	602.403.760,00	565.681.505,00	93,90
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	30,00	98,00	112.360.000,00	103.723.085,00	92,31
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	40,00	50,00	490.043.760,00	461.958.420,00	94,27
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA	%	75,00	100,00	957.365.000,00	845.963.848,00	88,36
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam	data	20,00	102,00	957.365.000,00	845.963.848,00	88,36
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dokumen	2,00	2,00	462.565.000,00	398.640.980,00	86,18
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	2,00	2,00	494.800.000,00	447.322.868,00	90,40
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	%	90,00	90,00	1.960.840.000,00	1.758.944.445,00	89,70
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia	lembaga	10,00	10,00	1.130.890.000,00	952.060.789,00	84,19

2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	490.200.000,00	358.114.318,00	73,05
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	30,00	30,00	640.690.000,00	593.946.471,00	92,70
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	lembaga	10,00	10,00	829.950.000,00	806.883.656,00	97,22
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	1,00	1,00	659.750.000,00	647.288.861,00	98,11
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	1,00	1,00	170.200.000,00	159.594.795,00	93,77
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	%	4,07	11,28	1.726.536.164,00	1.511.663.804,00	87,55
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	lembaga	1,00	1,00	566.095.064,00	466.349.970,00	82,38
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	566.095.064,00	466.349.970,00	82,38
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	laporan	75,00	75,00	299.066.000,00	278.550.800,00	93,14
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Orang	30,00	67,00	36.701.076,00	30.526.000,00	83,17
2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Orang	30,00	134,00	262.364.924,00	248.024.800,00	94,53
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	Dokumen	1,00	1,00	861.375.100,00	766.763.034,00	89,02

2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak	Dokumen	1,00	1,00	861.375.100,00	766.763.034,00	89,02
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	%	70,00	88,23	1.859.900.000,00	1.814.809.483,00	97,58
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Dokumen	1,00	1,00	1.560.500.000,00	1.532.414.499,00	98,20
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1,00	1,00	1.512.200.000,00	1.490.659.499,00	98,58
2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1,00	1,00	48.300.000,00	41.755.000,00	86,45
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran	Dokumen	1,00	1,00	299.400.000,00	282.394.984,00	94,32
2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1,00	1,00	167.400.000,00	153.539.583,00	91,72
2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1,00	1,00	132.000.000,00	128.855.401,00	97,62
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	%	100,00	99,00	426.278.000,00	399.812.727,00	93,79
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Dokumen	2,00	2,00	226.700.000,00	206.983.770,00	91,30
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	1,00	182.600.000,00	170.580.770,00	93,42
2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	1,00	44.100.000,00	36.403.000,00	82,55
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dokumen	2,00	2,00	199.578.000,00	192.828.957,00	96,62

2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	1,00	91.460.000,00	86.119.057,00	94,16
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	1,00	108.118.000,00	106.709.900,00	98,70
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	kali	2,00	2,00	524.446.000,00	476.673.662,00	90,89
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	%	27,00	100,00	344.100.000,00	304.877.267,00	88,60
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1,00	1,00	150.000.000,00	140.450.662,00	93,63
2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1,00	1,00	44.100.000,00	23.103.000,00	52,39
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1,00	3,00	150.000.000,00	141.323.605,00	94,22
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	180.346.000,00	171.796.395,00	95,26
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1,00	1,00	48.346.000,00	47.782.275,00	98,83
2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	50,00	60,00	132.000.000,00	124.014.120,00	93,95
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	%	2,10	2,18	373.190.000,00	344.906.060,00	92,42
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	sektor	5,00	5,00	373.190.000,00	344.906.060,00	92,42

2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	1,00	1,00	185.890.000,00	185.627.200,00	99,86
2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Laporan	1,00	1,00	187.300.000,00	159.278.860,00	85,04
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	%	67,98	66,30	1.154.400.000,00	1.091.875.832,00	94,58
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	%	0,76	0,76	1.154.400.000,00	1.091.875.832,00	94,58
2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1,00	1,00	78.000.000,00	76.682.180,00	98,31
2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Daerah	1,00	1,00	137.400.000,00	131.753.750,00	95,89
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Daerah	1,00	1,00	939.000.000,00	883.439.902,00	94,08
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	%	63,46	64,54	1.205.668.000,00	1.099.928.821,00	91,23
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain ProgramPembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	organisasi	4,00	4,00	987.010.000,00	893.279.559,00	90,50
2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1,00	1,00	793.810.000,00	707.479.382,00	89,12
2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Organisasi	1,00	1,00	193.200.000,00	185.800.177,00	96,17

2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga	%	30,00	30,00	218.658.000,00	206.649.262,00	94,51
2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Laporan	1,00	1,00	218.658.000,00	206.649.262,00	94,51

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak terpenuhinya Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan dikarenakan tidak dapat memenuhi pengisian persyaratan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Upaya sosialisasi telah dilakukan) serta belum adanya keseragaman layanan dan program dalam pemberdayaan perempuan, yang menyebabkan kesenjangan kualitas dan kinerja LPLPP dalam menjawab kebutuhan masyarakat

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan DP3A Provinsi Kalimantan timur secara keseluruhan di tahun 2024 terlaksana atau terealisasi dengan cukup baik dapat dilihat dari realisasi keuangan sebesar 92,06 %, hal ini didukung oleh anggaran dan sumber daya yang memadai.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan secara keseluruhan program dan kegiatan pada DKP3A provinsi Kalimantan timur di tahun

2024 terlaksana sesuai dengan target kegiatan. DP3A telah berupaya untuk terus menjalankan aktifitas program/kegiatan khususnya terkait pelayanan masyarakat dan program prioritas.

Secara umum program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran juga adanya dukungan sarana dan prasarana lainnya. Secara rinci faktor pendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang memadai.
2. Adanya kebijakan PUG Kalimantan Timur sebagai pedoman Pelaksanaan dalam Terwujudnya Pembangunan yang setara dan berkeadilan.
3. Adanya regulasi dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui melalui satgas perlindungan perempuan dan anak.
4. Dua Urusan dalam Institusi DP3A Provinsi Kalimantan Timur memberi kemudahan dalam penyediaan dan pemanfaatan data, baik data administrasi kependudukan, data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, data Keluarga Berencana sebagai bahan informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Kemitraan dengan lembaga pemerhati anak (PATBM, PUSPAGA, PUSPA, Kampung KB, dll)

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- Dukungan anggaran yang tidak sesuai dengan penetapan Renstra Perangkat daerah
- Kurang Maksimalnya operasional rutinitas DP3A Provinsi Kalimantan Timur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta laporan kinerja dan laporan keuangan

sesuai dengan peraturan yang ada.

- Masih Belum tersedianya Data pilah Gender secara baik pada setiap Perangkat Daerah
- Perangkat daerah belum menuangkan PPRG menjadi dasar dalam pencapaian kinerja Program Kegiatan.
- Belum terbentuknya sistem informasi data gender dan anak (data pilah) yang aktif.
- Pelaksanaan Program kegiatan Pendidikan Politik perempuan bersifat temporer.
- Sifat Tugas kewenangan DP3A Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan keberhasilan program pendapatan perempuan tidak secara langsung, namun di tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya (Dinas Tenaga Kerja, Disperindakop, Perbankan, dll).
- Terbatasnya jumlah ADB (Administrator Data Base) dalam pengendalian administrasi kependudukan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak dapat tergalidan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

- Melakukan perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan
- Meningkatkan Koordinasi dengan Pemangku kepentingan

- Meningkatkan komitmen antar unit kerja
- Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas sumberdaya melalui program dan kegiatan
- Konsisten dalam kualitas target dan indikator kinerja

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
s/d Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target progra m dan kegiata n Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas pelayanan kesekretariatan	91, 2 indeks	90%	82 indeks	90 indeks	109,76	91 indeks	84 indeks	100 %
		Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti	87%	-	100 %	100 %	100	85 %	100 %	100 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,50 %	100 %	70,50 %	75,50%	107	71 %	71 %	100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	6 dokumen	6 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA -SKPD	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	19 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	-	-	-	-	23 laporan	23 laporan	100 %

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Berita Acara hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	-	-	-	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95,00 %	92 %	94,00 %	92,06 %	98	94,50	94,50	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 orang/bulan	44 orang	50 orang/bulan	38 orang/bulan	76	71 orang/bulan	71 orang/bulan	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 laporan	1 laporan	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah lapoan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan	16 Laporan	4 laporan	16 dokumen	16 dokumen	100	18 laporan	18 laporan	100 %

		koordinasi penyusunan laporan keuangan bulnan/triwulan/s emestrear SKPD								
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelapon dan analis prognosis realiasi anggaran	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	Koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	-	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95%	-	-	-	-	-	-	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	86 Orang	100%	80 orang	80 orang	100	-	-	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	-	-	-	-	-	-	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas pegawai	-	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	-	-	-
		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	-	-	-	3 paket	3 paket	100 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	-	75 Orang	10 Orang	10 Orang	100	-	-	-
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	10 orang	10 orang	100 %
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumah orang yang mengikuti sosialisas	-	-	75 orang	75 orang	-	-	-	-
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	78 orang	78 orang	100 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	117 unit	100%	111 unit	111 unit	100	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	-	4 paket	1 paket	1 paket	100	-	-	-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100 %
					27					

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	-	6 paket	1446-paket	6 paket	100	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	-	-	-	-	6 paket	6 paket	100 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	-	2 paket	2 paket	2 paket	100	-	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	-	-	-	-	2 paket	2 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	-	84 dokumen	96 dokumen	96 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-		96 dokumen	96 dokumen	100 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen rapat koordinasi daerah SKPD	-	1 laporan	3 laporan	3 laporan	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	-	-	-	-	3 laporan	3 laporan	100 %
	Penatausahaan arsip dinasmis pda SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinasmis pda SKPD	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusn pemerintah daerah	-	20% -1450-	32 unit	32 unit	100	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	-	25 unit	30 unit	30 unit	100	-	-	-
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yan disediakan	-	-	-	--	-	30 unit	30 unit	100 %
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasionalatau lapangan yang disediakan	-	-	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah jenis jasa penunjang urusan	4 jenis jasa	100%	4 jenis jasa	4 jenis jasa	100	-	-	-

	Pemerintahan Daerah	pemerintah daerah								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa surat menyurat yang tersedia	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	-	12 bulan	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	88 unit	100%	86 unit	86 unit	100	-	-	-

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan yang tersedia	-	15 paket	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	-	-	-	-	24 unit	24 unit	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 unit	-	-	-	-	60 unit	60 unit	100 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	-	1 tahun	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang g Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100 %

	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirusahaan	-	-	400 orang	400 orang	100	-	-	-
		Proporsi perempuan dalam kepemimpinan dan manajemen	45,92 %	-	-	-	-	45,11 %	35%	100 %
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	50,20 – 51,26 %					49,65 – 50,83 %	49,65 – 50,83 %	
		Implementasi kelembagaan PUG	-	1 kebijakan	-		-	-	-	-
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan	10 Lembaga	-	10 Lembaga		100	-	-	-
		Penguatan lembaga PUG	-	1 kebijakan	-		-	-	-	-

		Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan	10 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	-	31 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-
	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %

	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	-	-	130 orang	130 orang	100	30 orang	30 orang	100 %
	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provins	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provins	1 kebijakan	-	-	-	-	-	-	-
	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provins	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	37 lembaga	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah	1 lembaga	-	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pengembangan SDM Perempuan bidang politik dan hukum	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas LPLPP	1 lembaga	-	-	-	-	-	-	-

	pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	5 lembaga	-	-	-	-	-	-	-
	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provins	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	260 orang	-	-	-	-	-	-	-
	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provins	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya	100 orang	-	-	-	-	-	-	-

	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	-	-	430 orang	430 orang	100	200 orang	200 orang	100 %
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	-	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	100	1 lembaga	1 lembaga	100 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirasusahaan	300 orang	-	400 orang	400 orang	100	-	-	-

		Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	200 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 lembaga	-	-	-	-	-	-	-

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	-	10 lembaga	-	-		-	-	-
		Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 lembaga	-	1 lembaga	1 lembaga	100	1 lembaga	1 lembaga	100 %
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pada LPLPP Tingkat Provinsi	-	-	300 orang	300 orang	100	100 orang	100 orang	100 %

		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	100 orang	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	-	-	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100 %-
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	-	-	90	100	111	-	-	-
		Kebijakan Perlindungan Perempuan	-	2 Kebijakan	-	-	-			-

		Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio 47.00		47,67	-	-	47,67 %	100 %	100 %
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	-	-	10 lembaga	9 lembaga		-	-	-
		jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	-	1 dokumen	-	-		-	-	-
		Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	10 lembaga	-	-	-		-	-	-
	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegaha	1 dokumen	-	-	-		-	-	-
	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provins	300 orang	-	-	-		-	-	-

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	-	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	100	20 perangkat daerah	20 perangkat daerah	100 %
		Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah Provinsi dan lintas Daerah Kab/Kota	-	10 layanan	-	-	-	-	-	-

	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	-	-	75 %	103 %	137	-	-	-
		jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	-	99 orang	30 orang	98 orang	326	40 orang	40 orang	100 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	-	40 orang	50 oang	125	50 layanan	50 layanan	100 %

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada unit penyedia layanan	-	15 orang	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	15 orang	-	-	-	60 orang	60 orang	-
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat kabupaten/kota layak anak	-	-	90 %	90 %	100	-	-	-
		Penguatan Pemenuhan Hak Anak	-	-	3 Kebijakan	3 Kebijakan	100	-	-	-
		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,5 indeks	-	60,47 %	-	-	61 ,5indeks	61 indeks	100 %
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan pelembagaan PHA	10 lembaga	-	10 lembaga	10 lembaga	100	-	-	-

		Penguatan pelembagaan PHA	-	-	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	100	-	-	-
	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	Jumlah kebijakan penyelenggar aan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	1 kebijakan	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak	300 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 lembaga	-	-	-	-	-	-	-

	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dunia usaha kewenangan provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	-	35 perangkat daerah	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	100	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	100 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	-	10 lembaga	10 lembaga	100	-	-	-

		Jumlah dokumen penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 kegiatan	-	-	-	-	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %

	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provins	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
		Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-

		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	88 %	-	-	-	-	82	82	100 %-
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-
		Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	1 lembaga	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provins	300 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provins	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	100 lembaga							

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan provinsi	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat provinsi	-	-	-	-	-	1 kebijakan	1 kebijakan	100 %
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	-	-	30 orang	67 orang	223	40 orang	40 orang	100 %

	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	-	-	30 orang	134 orang	446	50 layanan	50 layanan	100 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	1 lembaga	-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah	-	-	75%	75%	100	-	-	-

		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 data	-	20 data	120 data-	510	-	-	-
		Capaian Data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah	-	75%	-	-	-	-	-	-
	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan	20 lembaga							
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender Provinsi yang Tersedia	-	3 dokumen	-	-	-	-	-	-

		Jumlah Dokumen Data anak Provinsi yang Tersedia		1 dokumen		-	-	-	-	-
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	-	1 dokumen	-	-	-	6 dokumen	6 dokumen	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berprespektif gender dan hak anak sesuai standar	12 Lemabaga							
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provins	Jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan dalam peningkatan kualitas keluarga	2 lembaga							
	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 lemabaga							

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kebijakan tentang pengendalian penduduk		1 Kebijakan	-	-	--	-	-	-
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17,78 %	-	-	-	-	2,16 %	2,16 %	100 %
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,12 %					18,37 %	18,37 %	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	-	5 sektor	5 sektor	100	-	-	-
		kebijakan tentang pengendalian penduduk	-	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100 %

	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	-	3 laporan	3 laporan	3 laporan	-	-	-	-
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, NonFormal dan Informal pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/S SK dan Pojok Kependudukan/P JK	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100 %
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern	69 %	68,42	67,98	66,30	97.53	-	-	-
		Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	80%	-	-	-	-	-	-

		Persentase Kebutuhan Ber KB yang Terpenuhi (nmet Need) Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR	79,09 % 69 %	-	-	-	68,42 % 21 %	68,42 % 21 %	68,42 % 21 %	100 %
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	0,95 %	0,76%	0,76	0,76%	100	-	-	-
		Peningkatan jumlah peserta KB	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-

	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-
	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 daerah	1 daerah	-	-	-	1 daerah	1 daerah	100 %

	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 daerah	1 daerah	-	-	-	1 daerah	1 daerah	100 %
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	persentase kampung KB mandiri	5,10 %							
	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	4 organisasi							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	79,50	-	-	-	100	-	-	-
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-

		ketahanan dan kesejahteraan keluarga								
		Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 organisasi	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	1 laporan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang mengikuti pengembangan kelompok PIK -R di kampung KB	3 organisasi	1 organisasi	-	-	-	2 organisasi	2 organisasi	100 %

	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	persentase organisasi Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga	50 %	40 %	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi dan promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	Jumlah laporan hasil Sosialisasi dan promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11)

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas pelayanan kesekretariatan	90,79 %	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti	100 %	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis laporan							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	88 unit							

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit							
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensi	100 %							-
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan UPTD PPA	43 orang	-	-	-	-	-	-	-
	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	-	-	-	-	-	-	-
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 orang	-	-	-	-	-	-	-

	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	-	-	-	-	-	-	-
	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	-	-	-	-	-	-	-
	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	10 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	-	-	-	-	-	-	-
	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	-	-	-	-	-	-	-

	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensi	100 %	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak Korban Kekerasan yang memerlukan Perlindungan Khusus	43 orang	-	-	-	-	-	-	-
	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	-	-	-	-	-	-	-
	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	-	-	-	-	-	-	-

	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	-	-	-	-	-	-	-
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	8 orang							
	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	-	-	-				
	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&		3 orang	-						
	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	-	-	-				

	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 orang	-	-	-	-	-	-	-
	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		10 orang .	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator NSPK, SPM dan IKK dan Indikator Kinerja lainnya. Analisis kinerja yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan DP3A Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dan tertuang dalam Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2026. Analisis kinerja pelayanan dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel T-C.30

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra PD (%)		Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas pelayanan kesekretariatan		90%	84 indeks	91,2 indeks	95%	90%	82 indeks	84 indeks	
		Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti		100%	100%	87%	100%	100%	100%	100 %	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		76,00%	71 %	76,50 %	70,50%	76,00%	70,50 %	71,50 %	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah		3 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA -SKPD		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	2 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD		2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen forum perangkat daerah		1 dokumen	23 Laporan	3 laporan	1 dokumen	1 dokumen	3 Laporan	3 laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah		1 dokumen	1 Laporan	1 laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 laporan	
	Pelaksanaan forum PD berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah berita acara forum PD berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		-	2 berita acara	2 berita acaar	-	-	-	2 berita acaar	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	2 bulan	94,00 %	95,00 %	12 bulan	2 bulan	94,00 %	95,00 %	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 orang	1 tahun	71 orang/bulan	60 orang/bulan	1 tahun	1 tahun	50 orang/bulan	45 orang/bulan	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		-	2 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhirtahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akg=hir tahun		1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	12 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah lapoan keuagamm bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulnan/triwulan/semestrean SKPD		3 dokumen	16 Laporan	18 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	16 Laporan	18 dokumen	
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelapon dan analisis prognosis realiasi anggaran	-	-	2 dokumen	2 dokumen	-	-	2 dokumen	2 dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		80%	82 Orang	86 orang	80%	80%	80 Orang	86 orang	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas pegawai		4 Paket	3 Paket	3 paket	4 Paket	4 Paket	3 Paket	3 paket	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimtek		44 Orang	10 orang	12 orang	44 Orang	44 Orang	85 orang	12 orang	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumah orang yang mengikuti sosialisas		-	78 orang	85 orang	-	-	85 orang	85 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	100%	100%	113 unit	117 unit	100%	100%	111 unit	117 unit	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	4 paket	5 kompone n	1 paket	1 paket	5 kompone n	5 kompone n	1 paket	1 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 paket	6 item	6 paket	10 paket	6 item	6 item	6 paket	10 paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		26 item	2 paket	2 paket	26 item	26 item	2 paket	2 paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	84 dokume n	300 eksempl ar	96 dokumen	96 dokumen	300 eksempl ar	300 eksempl ar	96 dokumen	96 dokumen	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi		75 orang	1 laporan	1 laporan	75 orang	75 orang	1 laporan	1 laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen rapat koordinasi daerah SKPD		1 dokumen	3 laporan	3 laporan	1 dokumen	1 dokumen	3 laporan	3 laporan	
	Penatausahaan arsip dinasmis pda SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinasmis pda SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		90%	33 unit	34 unit	82%	90%	32 unit	34 unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin		5 unit	30 unit	30 unit	5 unit	5 unit	30 unit	30 unit	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasionalatau lapangan yang disediakan		.-	1 unit	9 unit	.-	.-	1 unit	9 unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah		62%	4 jenis jasa	4 jenis jasa	62%	62%	4 jenis jasa	4 jenis jasa	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa surat menyurat yang tersedia		600 eksemplar	1 laporan	1 laporan	800 eksemplar	600 eksemplar	1 laporan	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	1 laporan	1 tahun	1 laporan	1 laporan	1 tahun	1 tahun	1 laporan	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		12 bulan	1 laporan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	1 laporan	4 unit	1 laporan	1 laporan	4 unit	4 unit	1 laporan	1 laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	12 unit	87 unit	88 unit	11 unit	12 unit	86 unit	88 unit	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan yang tersedia		15 unit	24 unit	26 unit	15 unit	15 unit	1 unit	26 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara		-	60 unit	60 unit	-	-	24 unit	60 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	1 tahun	6 ruang	1 unit	1 unit	6 ruang	6 ruang	1 unit	1 unit	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirusahaan		1 Kebijakan	300 orang	-	1 Kebijakan	1 Kebijakan	400 orang	300 orang	
		Proporsi perempuan dalam kepemimpinan dan manajemen		-	-	45,92 %	-	-	-	-	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		-	-	50,20 - 51,2	-	-	-	-	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga PUG kewenangan provinsi		400 orang	10 Lembaga	10 lembaga	400 orang	400 orang	10 Lembaga	10 lembaga	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggara PUG tingkat provinsi		1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	jumlah SDM tingkat provinsi yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggara PUG	-	-	1 Dokumen	1 dokumen	-	-	1 Dokumen	1 dokumen	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi		130 Orang	30 orang	35 orang	130 Orang	130 Orang	-	35 orang	

	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provins	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provins				1 kebijakan					
	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan				37 lemabaga					
	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah				1 lembaga					
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pengembangan SDM Perempuan bidang politik dan hukum		-	-		-	-	-		
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Menuju LPLPP		1 Lembag a	1 Lembaga	1 lembaga	1 Lembag a	1 Lembag a	1 Lembaga	1 lembaga	
		Pengembangan SDM Perempuan Bidang Politik dan hukum		-	-		-	-	-		
	pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan				5 lemaga					
	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				260 orang					

	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				100 orang					
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		430 Peserta	300 orango	450 orang	190 Peserta	430 Peserta	450 orang	450 orang	
		Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dan bidang politik hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi		-	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		-	2 lembaga	-	-	-	2 lembaga	-	-
		Jumlah organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi kepada organisasi masyarakat di kab/kota	-	2 lembaga	-	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	-	2 lembaga	-

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirasusahaan		400 Orang	300 Orang	300 orang	400 Orang	400 Orang	300 Orang	300 orang	-
		Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan		-	-	-	-	-	-	-	-
	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				1 Laporan					
	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimte				200 Orng					
	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				1 Lembaga					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia		-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				47 Ratio					
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		23,46 %	24,96 %		23,46 %	23,46 %	23,24 %	24,96 %	-
		Kebijakan Perlindungan Perempuan		-	-	-	-	-	-	-	-
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan				10 lembaga					
		Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	-	10 lembaga	10 lembaga		10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	-
		jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				1 Dokumen					

	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				300 Orang					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		3 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	-
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		10 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	
		Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah Provinsi dan lintas Daerah Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	-	75%	50 layanan	50 %	75%	75%	80%	50 %	-
		jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan		-	-	-	-	-	-	-	-

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat		30 orang	300 Orang	50 orang	30 orang	30 orang	40 Orang	50 orang	-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Melaksanakan penguatan dan pengembangan bagi SDM lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi		-	60 orang	-	-	-	-	-	-
		peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada unit penyedia layanan	15 orang	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		-	60 orang	-	-	-	-	-	-
		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA				61,5 indeks					
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat kabupaten/kota layak anak		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	-
		Penguatan Pemenuhan Hak Anak		-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan pelembagaan PHA		10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	-
		Penguatan pelembagaan PHA	1 Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-

	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi				1 kebijakan					
	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				30 orang					
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				1 klaporan					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi		-	3 perangkat daerah	30 perangkat daerah	-	-	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	-
	Advokasi sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dunia usaha kewenangan provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi		30 perangkat daerah	3 perangkat daerah	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	-	30 perangkat daerah	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	30 organisasi perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	-	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	-
		Jumlah dokumen penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak		-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				2 kebijakan					
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi				1 dokumen					
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-
		Jumlah dokumen KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-

	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-
		Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)				64 indeks					
		Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak		4,07 %	3,88%	3,88 %	4,07 %	4,07 %	3,88%	3,88 %	-
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak		-	-	-	-	-	-	-	-
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan				1 lembaga					
		Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan		1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	-
		dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provins	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				300 orang					

	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provins	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				100 lembaga					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak		1 dokumen	1 dokumen	1 lembaga					
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus		75 layanan	50 layanan	80 layanan	75 layanan	75 layanan	80 layanan	80 layanan	-
		jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		-	-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi		30 orang	30 orang	50 orang	30 orang	30 orang	40 orang	50 orang	-
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi		30 orang	50 layanan	-	30 orang	30 orang	50 orang	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 %					
		Persentase Capaian Data Gender dan anak		75%	80%	80%	75%	75%	80%	80%	-
		Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah		-	-	-	-	-	-	-	-

	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia		20 data	20 data	20 data	20 data	20 data	20 data	20 data	
		Capaian Data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah		-	-	-	-	-	-	-	-
	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA				1 Dokumen					
	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan ana	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak				20 Lembaga					
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender Provinsi yang Tersedia		-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Data anak Provinsi yang Tersedia	1 dokume n	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia	--	2 dokumen	4 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		2 dokumen	6 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-

	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berprespektif gender dan hak anak sesuai standar				12 lembaga					
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provins	Jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan dalam peningkatan kualitas keluarga				2 Lembaga					
	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				1 Lembaga					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR				17,78 %s					
				2,10%	60 %	60%	2,10%	2,10%	55 %	60%	-

		Kebijakan tentang pengendalian penduduk		-1506-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		5 sektor	5 sektor	5 sektor	5 sektor	5 sektor	5 sektor	5 sektor	-
		kebijakan tentang pengendalian penduduk		-	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK		1 laporan	3 laporan	3 laporan					
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)		1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
		Jumlah dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi		-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	3 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, NonFormal dan Informal pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK		1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	-
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi (meet need) Angka prevalensi Angka prevalensi kontrasepsi modern				79,09 % 69 %					-
		Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		-	-	-	-	-	-	-	-

	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	-	-1507- 0,76 %	0,76 %	0,95 %	0,76 %	0,76 %	0,76 %	0,76 %	-
		Peningkatan jumlah peserta KB	1 dokume n	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi		-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	-
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja		1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	-
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	persentase kampung KB mandiri				5,10 %					

	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		-1508		4 rganisasi					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga				79,50 %					
		Peningkatan SDM ketahanan dan kesejahteraan keluarga		-	-	-	-	-	-	-	-
		Indeks pembangunan keluarga (IBANGGA)		63,64 indeks	65,54 indeks	65,54 indeks	63,64 indeks	63,64 indeks	65,54 indeks	65,54 indeks	-
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan perempuan		4 organisasi	4 organisasi	4 organisasi	4 organisasi	4 organisasi	4 organisasi	4 organisasi	-
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
	Fasilitasi pengembangan kelompok PIK -R di kampung KB	Jumlah PIK-R yang mengikuti pengembangan kelompok PIK -R di kampung KB		1 organisasi	12 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	-
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	persentase organisasi Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga	-	30%	40%	50%	30%	30%	40%	50%	-

	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota		-1509-		1 Laporan					
	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				1 Laporan					
	UPTD PPA										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				100 % 90,79 indeks					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran				95 %					
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	umlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 dokumen					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah				4 jenis jasa					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 laporan					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik				88 unit					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 unit					
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				100 %					
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan UPTD PPA				43 orang					

	Kabupaten/Kota										
	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 orang					
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				8 orang					
	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30 orang					
	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3 orang					
	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10 orang					
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30 orang					
	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30 orang					
	layanan kesehatan yang	Jumlah Korban yang mendapatkan				3 orang					

	tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				100 orang					
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak Korban Kekerasan yang memerlukan Perlindungan Khusus				43 orang					
	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30 orang					
	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 orang					
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30 orang					
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				8 orang					
	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 orang					
	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS,	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan				3 orang					

	Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 orang					
	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10 orang					

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi
1	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Ratio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (sesuai pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)	Simfoni PPPA	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan : $\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$
		Ratio kekerasan terhadap anak (Per 10.000 penduduk anak)	Rasio			Rasio Kekerasan Terhadap Anak : $\frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi Provinsi dan didampingi}}{\text{Jumlah penduduk anak}} \times 10.000$
2	Meningkatnya Pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak	DP3A	
3	Meningkatnya partisipasi dan Kapasitas perempuan dalam bidang sosial budaya, politik, hukum dan ekonomi	Persentase UMKM Perempuan	%	Peran perempuan dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan penggerak kuat dalam perdagangan inklusif, sehingga banyak program pembelajaran digital dari pemerintah yang diberikan kepada perempuan selaku penggerak UMKM.	BPS	$\frac{\text{Jumlah penggerak umkm wanita prov.kaltim}}{\text{jumlah penggerak umkm prov.kaltim}} \times 100\%$
4	Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	ukuran untuk menilai pembangunan keluarga, yang berfokus pada tiga dimensi utama: ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. iBangga juga merupakan bagian dari program Bangga Kencana, yang merupakan program	BKKBN	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi
				pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Indonesia,		
5	Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	DP3A	Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut : $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsur yang tersaji}} \times \text{Nilai Penimbang}$

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas PPPA merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam melakukan penyusunan dan pelaksana kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berikut Target dan realisasi Sasaran Strategis pada DP3A Provinsi Kaltim Tahun 2024 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk	%	23,46	47,67
2	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan	Lemba PEKKA	2	3
		Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	400	400
3	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,53	1,93
4	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat	%	75	100
5	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100
6	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%		71,90

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat daerah

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih belum terpenuhinya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak serta belum setaranya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, permasalahan ini yang lebih dikenal dengan sebutan 3 M yaitu (1) akhiri kesenjangan Ekonomi, Politik dan

pengambilan keputusan perempuan, (2) akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan (3) akhiri perdagangan orang.

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahannya adalah masih rendahnya minat akseptor KB metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan KB yang responsif gender, tingginya angka perkawinan usia anak dan masih banyaknya usia remaja (sekolah) yang belum mendapatkan fasilitasi pengembangan kualitas diri melalui wadah/forum PIK R dan BKR.

2.3.2 Dampak terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/intenasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program untuk bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan indikator penunjang keberhasilannya yaitu indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG).
2. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan indikator penunjang keberhasilannya yaitu proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, proporsi keterwakilan perempuan sebagai pengambil kebijakan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DP3A Provinsi Kalimantan Timur pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Kurangnya Pemahaman dan komitmen para pengambil

kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan urusan dalam tahapan pembangunan

- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan angka kemiskinan perempuan yang cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender
- Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan
- Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak
- Belum terintegrasi sistem data gender dan anak antar kabupaten kota
- Meningkatnya kualitas kesehatan perempuan yang ditandai dengan tingginya Angka Harapan Hidup perlu disertai dengan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi dan sosial

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DP3A Provinsi Kalimantan Timur pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Pengalaman bekerjasama dengan lembaga internasional cukup besar
- Beberapa kebijakan strategis dari Kementrian KPPPA turut memperkuat pencapaian kinerja DP3A Provinsi Kalimantan timur
- Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk

meningkatkan kesetaraan gender di daerah

- Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
- Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030)
- Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak
- Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak
- Menguatnya dukungan swasta dalam percepatan pencapaian hak-hak anak
- Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk memperkuat jaringan kelembagaan dalam mengatasi permasalahan kesenjangan gender dan pemenuhan hak-hak anak

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - Hasil Evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai pedoman.

- Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- Kurangnya pengembangan kompetensi ASN disebabkan oleh terbatasnya diklat yang tersedia, diklat yang ada hanya pada kegiatan teknis tertentu.
- Adanya Mutasi Pegawai pada bidang teknis menghambat proses pelayanan.
- Belum optimalnya penggunaan SOP dalam pelayanan internal sehingga berpengaruh terhadap layanan publik.
- Dalam capaian kinerja belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen Perencanaan dan Penganggaran.

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki.
- Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
- Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
- Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan.
- Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya diserahkan kepada suami/anak laki-lakinya.
- Kurangnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.

c. Permasalahan Perlindungan Hak Perempuan:

- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat

dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.

- ✓ Perhitungan Data Korban Kekerasan sering terjadi tidak optimal karena terdapat kasus yang tidak dilaporkan, masyarakat masih enggan melaporkan karena menanggung aib keluarga, atau karena tidak mengetahui lembaga layanan.
- ✓ Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas
- ✓ Belum tersedianya data perempuan tenaga kerja korban kekerasan
- ✓ Belum optimalnya pencatatan laporan data kekerasan melalui aplikasi simfoni dikarenakan mutasi pegawai/tenaga teknis.
- Perempuan sangat rentan terhadap pornografi dan kekerasan.
- Belum maksimalnya fungsi dan peran gugus tugas PTPPO serta belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD, instansi vertikal, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dll.
- Belum optimalnya peran lembaga pemerhati perempuan dalam pemenuhan perlindungan hak perempuan.

d. Permasalahan Perlindungan Anak:

- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
- Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak.
- Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
- Angka anak Putus sekolah yang cukup tinggi.

- Belum sepenuhnya sistem perlindungan di provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan baik.
- e. Permasalahan Tumbuh Kembang Anak:
- Belum semua anak memiliki akte kelahiran.
 - Masih tingginya anak yang belum memiliki kartu identitas anak.
 - Kurangnya pengetahuan / informasi tentang pengasuhan dan pembinaan keluarga yang aman. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anak korban kekerasan.
 - Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
 - Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
 - Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota Layak Anak.
- f. Permasalahan Sistem Informasi Gender dan Anak.
- Data dan informasi yang ada tidak terpilah dan tidak terbaru
 - Belum terbangunnya jaringan sistem informasi data gender dan anak
 - Masih kurangnya partisipasi OPD dalam menyediakan data gender dan anak.
 - Kurangnya tersedianya kelembagaan sistem informasi gender dan anak
 - Belum semua wilayah Kalimantan Timur dengan mudah mengakses internet untuk penggunaan aplikasi Simfoni PPPA.
- g. Permasalahan Pengendalian Penduduk dan KB
- Banyaknya penduduk yang migrasi ke Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan taraf hidup terbatas oleh

kompetensi rawan menjadi kelompok marjinal.

- Adanya dampak Demografi penduduk berupa terbatasnya Pengembangan kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesempatan kerja terutama bagi perempuan.
- Kurangnya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga
- Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB
- Tingginya angka perceraian di karenakan pendewasaan usia pernikahan pertama belum optimal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender difokuskan pada:

- Mengoptimalkan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan;
- Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
- Meningkatkan kualitas SDM aparatur perlindungan anak dan perempuan

Analisa Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) dari berbagai kegiatan yang terdapat dalam rincian kegiatan APBD secara umum berhasil diselesaikan , tetapi program dan kegiatan terlaksana sepenuhnya dengan beberapa hal yang menjadi hambatan realiasisasi anggaran sebagaimana tersebut diatas. Nilai rata-rata pencapaian realisasi fisik 95%. Sedangkan Analisa pencapaian sasaran strategis dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai sasaran

- Meningkatnya kualitas hidup perempuan sasaran
- Meningkatnya implementasi PUG dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi
- Meningkatnya Kualitas Hidup keluarga
- Meningkatnya implementasi Kabupaten/ Kota menuju layak anak
- Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate dengan sasaran

2.4.1 Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Perencanaan yang baik membutuhkan perhatian yang jeli terhadap perkembangan yang terus berubah. Akibatnya, penyesuaian rencana kerja patut dilakukan guna memastikan visi dan misi organisasi tercapai. Karena itu, DKP3A melakukan berbagai perbaikan perencanaan melalui peninjauan kembali rencana awal yang telah dibuat.

2.4.2 Alasan Perbandingan tersebut dilaksanakan

Selanjutnya kesenjangan kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi tolok ukur kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pagu pada setiap program/ kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhannya, sehingga Perangkat Daerah dapat menjalankan program dan kegiatannya dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien

2.4.3 Temuan dan catatan penting jika terdapat perbedaan dengan rancangan RKPD seperti rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD termasuk perbedaan besaran anggaran dan kinerja. Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan timur pada tahun 2025 tidak terdapat temuan atau catatan penting terhadap rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan DPA

Rancangan Awal Renstra				Hasil Analisis Kebutuhan			
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikaif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
DP3A PROV. KALTIM			17.721.892.000	DP3A PROV. KALTIM			23.847.191.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			22.520.769.305
[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 indeks	11.909.944.729	[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 indeks	17.777.376.393
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	
[KEGIATAN] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,50%	430.000.000	[KEGIATAN] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,50%	430.000.000
[SUB KEGIATAN] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	60.000.000	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	60.000.000
[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	7.500.000	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	7.500.000
[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	7.500.000	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	7.500.000

[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	136.000.000	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	136.000.000
[SUB KEGIATAN] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	219.000.000	[SUB KEGIATAN] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	219.000.000
[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95%	8.764.656.956	[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95%	14.568.985.411
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	8.764.656.956	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	14.342.145.411
(SUB KEGIATAN)(Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	117.120.000,00	(SUB KEGIATAN)(Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	128.840.000
[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	20.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	20.000.000,00
[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	16blaporan	30.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	16blaporan	30.000.000,00
[SUB KEGIATAN] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	50.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	50.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik		16.250.518,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik		16.250.527,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	16.250.518,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	16.250.527,00

[KEGIATAN] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	86 orang	48.000.000,00	[KEGIATAN] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	86 orang	48.000.000,00
Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 paket	48.000.000,00	Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 paket	48.000.000,00
[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	117 unit	579.803.825,00	[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	117 unit	579.803.825,00
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	10.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	10.000.000,00
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	60.026.600,00	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	60.026.600,00
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	25.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	25.000.000,00
[SUB KEGIATAN] Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 laporan	2.612.085.937	[SUB KEGIATAN] Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 laporan	40.000.000,00
[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	40.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	409.777.225
[SUB KEGIATAN] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	35.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	35.000.000,00
[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	1.613.012.817,00	[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	1.676.116.017,00
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000,00
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	334.316.800,00	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	397.420.000,00

[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	10.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	10.000.000,00
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	1.258.696.017,00	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	1.258.696.017,00
[KEGIATAN] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	88 unit	458.220.613,00	[KEGIATAN] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	88 unit	458.220.613,00
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	55.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	55.000.000,00
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	191.220.613,00	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	191.220.613,00
[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80 unit	67.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80 unit	67.000.000,00
[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	145.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	145.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
[PROGRAM] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	35 % 51,20 - 51,26 %	1.072.180.012	[PROGRAM] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	35 % 51,20 - 51,26 %	1.072.180.012

[KEGIATAN] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan	10 lembaga	286.478.704,00	[KEGIATAN] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan	10 lembaga	286.478.704,00
[SUB KEGIATAN] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	43.367.918,00	43.367.918,00	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	43.367.918,00	43.367.918,00
[SUB KEGIATAN] Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	37 Lembaga	193.842.646,00	[SUB KEGIATAN] Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	37 Lembaga	193.842.646,00
[SUB KEGIATAN] dvokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah	1 lembaga	49.268.140,00	[SUB KEGIATAN] dvokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah	1 lembaga	49.268.140,00
[KEGIATAN] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas LPLPP	1 lembaga	405.709.606,00	[KEGIATAN] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas LPLPP	1 lembaga	405.709.606,00
[SUB KEGIATAN] pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provins	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	5 lembaga	160.661.480,00	[SUB KEGIATAN] pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provins	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	5 lembaga	160.661.480,00
[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	260 orang	93.265.510,00	[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	260 orang	93.265.510,00
peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 orang	151.782.616,00	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 orang	151.782.616,00

[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang	397.937.862,00	[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang	379.991.702,00
[SUB KEGIATAN monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan	43.761.200,00	[SUB KEGIATAN monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan	43.761.200,00
[SUB KEGIATAN] Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	200 orang	101.478.850,00	[SUB KEGIATAN] Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	200 orang	101.478.850,00
[SUB KEGIATAN] Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 lembaga	234.751.652,00	[SUB KEGIATAN] Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 lembaga	234.751.652,00
[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio 47	818.400.000,00	[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio 47	818.400.000,00
[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	10 lembaga	818.400.000,00	[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	10 lembaga	818.400.000,00
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi		300.000.000,00
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi		518.400.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	149.326.798,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	149.326.789,00

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 data	149.326.798,00	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 data	149.326.798,00
Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PP	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 dokumen	149.326.798,00	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PP	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 dokumen	79.326.789,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,5 indeks	830.515.814,00	[PROGRAM] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,5 indeks	757.869.026,00
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	10 lembaga	480.419.499,00	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	10 lembaga	407.772.711,00
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	1 kebijakan	60.945.320,00	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	1 kebijakan	60.945.320,00
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	30 orang	149.255.429,00	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	30 orang	149.255.429,00
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 lembaga	72.646.788,00	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 lembaga	197.571.962,00
[SUB KEGIATAN] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 laporan	197.571.962,00	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 laporan	197.571.962

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	350.096.315,00	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	144.037.102,00
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 kegiatan	144.037.102,00	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 kegiatan	197.571.962
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	206.059.213,00	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	144.037.102,00
[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	84%	1.000.000.000,00	[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	84%	350.096.315,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		400.000.000,00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		144.037.102,00
[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provins	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	400.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provins	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	206.059.213,00
[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	1 lembaga	1.000.000.000,00	[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	1 lembaga	1.000.000.000,00
[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	300 orang	600.000.000,00	[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	300 orang	600.000.000,00
[SUB KEGIATAN] Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provins	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi Prov. Kaltim	1 lembaga	400.000,00	[SUB KEGIATAN] Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provins	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi Prov. Kaltim	1 lembaga	400.000.000,00

[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	1 dokumen	600.000,00	[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	1 dokumen	200.000.000,00
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provins	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen	600.000,00	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provins	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen	400.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	2,14%	300.000.000,00	[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	2,14%	872.970.297,00
					Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)		
[KEGIATAN] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	300.000.000,00	[KEGIATAN] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	872.970.297,00
[SUB KEGIATAN] Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informa	2 dokumen	100.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informa	2 dokumen	872.970.297,00
[SUB KEGIATAN] Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 laporan	100.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 laporan	872.970.297,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	20%	872.970.297,00	[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR	20%	395.776.032.00

					Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (Mcpr		
[KEGIATAN] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	0,95%	378.427.353,00	[KEGIATAN] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	0,95%	295.776.032,00
[SUB KEGIATAN] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Loka	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	69%	125.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Loka	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	69%	95.776.032,00
Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	0.95%	125.000.000,00	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	0.95%	100.000.000,00
[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 daerah	125.750.000,00	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 daerah	100.000.000,00
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan		Persentase kampung KB mandiri	100.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	79,50%	127.677.353,00	[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	79,50%	378..427.353,00

[KEGIATAN] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 organisasi	125.000.000,00	[KEGIATAN] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 organisasi	125.000.000,00
[SUB KEGIATAN] Fasilitas Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	4 organisasi	125.000.000,00	[SUB KEGIATAN] Fasilitas Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	4 organisasi	125.000.000,00
[KEGIATAN] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	3 organisasi	253.427.353,00	[KEGIATAN] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	3 organisasi	253.427.353,00
[SUB KEGIATAN] Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Masyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	50%	125.750.000,00	[SUB KEGIATAN] Fasilitas kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	50%	125.750.000,00
Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	3 laporan	127.677.353,00	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	3 laporan	127.677.353,00
				UTPTD			1.326.421.695,00

				PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		394.419.345,00
				[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			52.560.000,00
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		52.560.000,00
				Penyediaan JAsa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis JAsa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		257.867.345.00
				)Penyediaan JAsa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JAsa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		257.867.345,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan Baik		83.992.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		83.992.000
				[PROGRAM] PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		466.436.420,00
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot			466.436.420,00
				[SUB KEGIATAN] layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		16.025.000,00
				Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		40.800.000,00

				Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		164.650.000,00
				[SUB KEGIATAN] layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		17.500.000,00
				layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		50.617.567,00
				[SUB KEGIATAN] Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		108.570.000,00
				[SUB KEGIATAN] layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas		47.122.028,00

				layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		21.151.825,00
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		465.565.930,00
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			465.565.930,00
				Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		155.050.000,00
				] layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		15.000.000,00
				Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		108.570.000,00
				] layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		60.600.000,00

			layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		11.182.000,00
			layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		16.320.975,00
			layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		47.448.132,00
			layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot		51.394.823,00

sulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Proses pengusulan oleh pemangku kepentingan (Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)

DP3A Provinsi Kalimantan Timur membangun Partisipasi masyarakat dalam urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui penerbitan rekomendasi hasil telaahan program dan kegiatan masyarakat, meliputi :

1. Badan kerja sama organisasi wanita (BKOW) Provi. Kaltim
2. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Cabang Kalimantan Timur
3. Dharma Wanita Persatuan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

2.5.1 Kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota memiliki kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DP3A Provinsi Kalimantan Timur .Adapun yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya diantaranya adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, hal ini sejalan dan sesuai dengan usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dan Perlindungan Khusus Anak, Perlindungan Perempuan

Pelaksanaan Rakortekrenbang 2024 mencerminkan komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang efektif dan efisien, serta dalam memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai tujuan bersama. Pada pelaksanaan Rakortekbang yang telah berlangsung di Tahun 2025 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim

untuk Kabupaten Kota yang telah membuat Kamus Usulan khususnya pada Kota Samarinda dan Kabupaten Berau yaitu peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi perempuan Kepala Keluarga (Peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran aktif, peningkatan SDM dan ekonomi kreatif bagi perempuan), hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang dimiliki perempuan menjadi isu penting di masyarakat, terutama dalam menghadapi tekanan hidup yang datang dari ketidakseimbangan antara kebutuhan sehari-hari dan rendahnya tingkat keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki, Hal ini selaras dengan visi misi Gubernur dalam meningkatkan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

**Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur**

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91,2 indeks	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	
[KEGIATAN] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,50%	
[SUB KEGIATAN] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	
[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	
[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	
[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	
[SUB KEGIATAN] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	
[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase realisasi anggaran	95%	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	
(SUB KEGIATAN) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	
[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	
[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	16blaporan	
[SUB KEGIATAN] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	
[KEGIATAN] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	86 orang	
Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 paket	
[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	117 unit	
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	
[SUB KEGIATAN] Fasilitas Kunjungan Tamu	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 laporan	
[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	
[SUB KEGIATAN] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	
[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	
[KEGIATAN] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	88 unit	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltim	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	
[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	
[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80 unit	
[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Prov. Kaltim			
[PROGRAM] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prov. Kaltim	Presentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	35 % 51,20 - 51,26 %	
[KEGIATAN] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan	10 lembaga	
[SUB KEGIATAN] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	43.367.918,00	
[SUB KEGIATAN] Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	37 Lembaga	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
[SUB KEGIATAN] dvokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 lembaga	
[KEGIATAN] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas LPLPP	1 lembaga	
[SUB KEGIATAN] pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provins	Prov. Kaltim	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	5 lembaga	
[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	260 orang	
peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 orang	
[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang	
[SUB KEGIATAN] monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provins	Prov. Kaltim	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan	
[SUB KEGIATAN] Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	200 orang	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
[SUB KEGIATAN] Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 lembaga	
[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prov. Kaltim	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio 47	
[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	10 lembaga	
	Prov. Kaltim	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 dokumen	
	Prov. Kaltim	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provins	300 orang	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prov. Kaltim	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 data	
Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PP	Prov. Kaltim	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 dokumen	
[PROGRAM] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prov. Kaltim	1ndeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,5 indeks	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelebagaan PHA	10 lembaga	
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	1 kebijakan	
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	30 orang	
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	Prov. Kaltim	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 lembaga	
[SUB KEGIATAN] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 laporan	
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	Prov. Kaltim	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 kegiatan	
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	84%	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Prov. Kaltim	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		
[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Prov. Kaltim	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	
[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prov. Kaltim	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	61,5 indeks	
[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	300 orang	
[SUB KEGIATAN] Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provins	Prov. Kaltim	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi Prov. Kaltim	300 orang	
[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	300 orang	
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provins	Prov. Kaltim	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen	
[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prov. Kaltim	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17,78	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
	Prov. Kaltim	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR	2,12	
[KEGIATAN] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Prov. Kaltim	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	
[SUB KEGIATAN] Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informa	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informa	2 dokumen	
[SUB KEGIATAN] Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Prov. Kaltim	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 laporan	
[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prov. Kaltim	PProporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	79%	
	Prov. Kaltim	Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (Mcpr	69%	
[KEGIATAN] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prov. Kaltim	Ratio akseptor KB	0,95%	
[SUB KEGIATAN] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Loka	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	69%	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Prov. Kaltim	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	0.95%	
[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	1 daerah	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan	Prov. Kaltim	Persentase kampung KB mandiri		
[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prov. Kaltim	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	79,50%	
[KEGIATAN] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prov. Kaltim	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 organisasi	
[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Prov. Kaltim	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	4 organisasi	
[KEGIATAN] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prov. Kaltim	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	3 organisasi	
[SUB KEGIATAN] Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	50%	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	3 laporan	
UTPTD	Prov. Kaltim			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH	Prov. Kaltim	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	
	Prov. Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90,79 indeks	
[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase realisasi anggaran	95%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Jenis JAse Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis jasa	
)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan JAse Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Prov. Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan Baik	88 unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 unit	
[PROGRAM] PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prov. Kaltim	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan UPTD PPA	43 orrang	
[SUB KEGIATAN] layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 orang	
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	
[SUB KEGIATAN] layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	
layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang	
[SUB KEGIATAN] Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	
[SUB KEGIATAN] layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas	2 orang	
layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prov. Kaltim	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak Korban Kekerasan yang memerlukan Perlindungan Khusus	43 orang	
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	
] layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	
] layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 orang	
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2 orang	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	
layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	
layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Prov. Kaltim	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	10 orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. Selanjutnya, pelaksanaan program pembangunan melalui program-program prioritas Kalimantan Timur tahun 2026 juga dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran pada Prioritas Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD Tahun 2024-2026 dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, telah diusulkan pada prioritas nasional 3 yaitu :

“Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing” dan untuk mendukung program prioritas tersebut maka diusulkan program DP3A Provinsi Kalimantan Timur yaitu **“Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan”** pada Indikator **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 16 sampai 64 tahun.

Selain itu dilakukan beberapa telaahan kebijakan nasional terkait dengan capaian kinerja Kementerian sebagai kebijakan nasional, meliputi:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Penelaahan ini dilaksanakan melalui penyelarasan
RPJMD Provinsi Kaltim

3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun 2025-20230 meliputi:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta ketahanan dan kesejahteraan keluargaMeningkatkan Daya Saing Perempuan
2. Meningkatkan Akuntabilitas, Integritas dan Profesionalisme PemerintahanMeningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun Sasaran yang ditetapkan meliputi :

1. Meningkatnya Daya Saing Perempuan dalam Pembangunan
2. Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
3. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anakMeningkatnya ketersediaan data gender dan anak
4. Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel

Tujuan dan Sasaran DP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2030

No.	KINERJA UTAMA		INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA						
	TUJUAN	SASARAN		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4							
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,45	87,47	87,48	87,50	87,51	87,60	87,65
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,4441	0,426	0,414	0,402	0,390	0,378	0,366
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	-	66,09 - 68,15	68,15- 70,20	70,20- 71,49	71,49- 72,86	72,86- 74,2	74,22- 75,59
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPBK)	74,32	77,46	78,33	78,89	79,45	79,96	80,52
	Meningkatnya partisipasi dan Kapasitas perempuan dalam bidang sosial budaya, politik, hukum dan ekonomi		Persentase UMKM Perempuan	32,43%	32,93%	33,35%	33,74%	34,08%	34,35%	34,57%
			Ratio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 anak	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45
			Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan per 100.000 perempuan	47,67	47,50	47,00	46,50	46,00	45,50	45,00
	Meningkatnya Pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga		'Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,5 indeks	67,2 Indeks	68,9 Indeks	79,6 Indeks	72,3 indeks	74,00 indeks	76,00 indeks
			Persentase layanan perlindungan perempuan dan anak secara cepat akurat dan komprehensif							
	Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,88	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

Dengan memperhatikan Visi Gubernur Kalimantan Timur ***“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas “*** dan Misi Pembangunan Gubernur Kalimantan Timur ***meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan”*** maka disusunlah program dan kegiatan pada DP3A Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada tujuan pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Kegiatan-kegiatan yang terkait pencapaian kesetaraan gender dan pengurangan kesenjangan secara konkrit terlihat pada kegiatan :

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

1.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Untuk Program Internal seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan hanya terfokus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur sedangkan untuk Program Eksternal lokasi tempat pelaksanaan kegiatan tersebar di Provinsi dan Kabupaten Kota.

1.3.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

Secara umum Rancangan RKPD telah sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Kesesuaian tersebut dilihat dalam uraian program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target dan pagu indikatif yang mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan timur

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					22.520.769.305				5.263.776.032
	[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		91,2 indeks 87 %	17.777.376.393			91,4 indeks 88 %	3.463.000.000
	[KEGIATAN] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		76,50 %	430.000.000			76,50%	728.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	4 dokumen	60.000.000	APBD		3 dokumen	120.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kaltim	2 dokumen	7.500.000	APBD		3 dokumen	15.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prov. Kaltim	2 dokumen	7.500.000	APBD		2 dokumen	15.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	1 laporan	136.000.000	APBD		1 dokumen	140.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	1 laporan	219.000.000	APBD		1 dokumen	438.000.000,00
	[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasii anggaran	Prov. Kaltim	95%	14.568.985.411	APBD		1 dokumen	200.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	60 orang/bulan	14.342.145.411	APBD		3 laporan	0
	(SUB KEGIATAN)(Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kaltim	1Dokumen	128.840.000	APBD		1 laporan	0

	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kaltim	1 laporan	20.000.000,00	APBD		-	40.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	16blaporan	30.000.000,00	APBD		95%	60.000.000,00
	Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kaltim	2 dokumen	50.000.000,00	APBD		45 orang/bula n	100.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	Prov. Kaltim	1 dokumen	16.250.527,00	APBD		1 dokumen	10.000.000,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Kaltim	4 laporan	16.250.527,00	APBD		12 dokumen	10.000.000,00

	[KEGIATAN] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Prov. Kaltim	86 orang	48.000.000,00	APBD		1 laporan	60.000.000,00	
	Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Kaltim	3 paket	48.000.000,00	APBD		18 laporan	60.000.000,00	
	[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	Prov. Kaltim	117 unit	579.803.825,00	APBD		2 dokumen	835.000.000,00	
	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JumlahPaket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ban	Prov. Kaltim	3 paket	10.000.000,00	APBD		86 Orang	15.000.000,00	
	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	5 paket	60.026.600,00	APBD		3 paket	80.000.000,00	
	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prov. Kaltim	3 paket	25.000.000,00	APBD		85 orang	75.000.000,00	
	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kaltim	3 laporan	40.000.000,00	APBD		12 orang	60.000.000,00	
	[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	4 laporan	409.777.225	APBD		117 unit	550.000.000,00	
	[SUB KEGIATAN] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Kaltim	2 dokumen	35.000.000,00	APBD		1 paket	55.000.000,00	
	[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Prov. Kaltim	4 jenis jasa	1.676.116.017,00	APBD		6 paket	1.130.000.000,00	
	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltim	1 laporan	10.000.000,00	APBD		2 paket	15.000.000,00 D	

	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov. Kaltim	4 laporan	397.420.000,00	APBD		96 dokumen	-
	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	2 laporan	10.000.000,00	APBD		1 laporan	15.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	2 laporan	1.258.696.017,00	APBD		3 laporan	1.100.000.000,00
	[KEGIATAN] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	Prov. Kaltim	88 unit	458.220.613,00	APBD		1 laporan	500.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Prov. Kaltim	1 unit	55.000.000,00	APBD		1 laporan	60.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prov. Kaltim	31 unit	191.220.613,00	APBD		1 laporan	220.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Prov. Kaltim	80 unit	67.000.000,00	APBD		88 unit	70.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Kaltim	3 unit	145.000.000,00	APBD		1 unit	150.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	[PROGRAM] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Prov. Kaltim	35 % 51,20 - 51,26 %	1.072.180.012	APBD		60 unit	320.000.000,00

	[KEGIATAN] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan	Prov. Kaltim	10 lembaga - 1565-	286.478.704,00	APBD		1 unit	-		
	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Prov. Kaltim	43.367.918,00	43.367.918,00	APBD			-		
	[SUB KEGIATAN] Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Prov. Kaltim	37 Lembaga	193.842.646,00	APBD		300 orang	-		
	[SUB KEGIATAN] dvokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah	Prov. Kaltim	1 lembaga	49.268.140,00	APBD		10 lembaga	-		
	[KEGIATAN] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas LPLPP	Prov. Kaltim	1 lembaga	405.709.606,00	APBD		1 laporan	-		
	[SUB KEGIATAN] pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provins	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Prov. Kaltim	5 lembaga	160.661.480,00	APBD		1 dokumen	-		
	[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Prov. Kaltim	260 orang	93.265.510,00	APBD		35 orang	-		
	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Prov. Kaltim	100 orang	151.782.616,00	APBD			-		

	[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	Prov. Kaltim	300 orang	379.991702,00	APBD		450 orang	-	
	[SUB KEGIATAN monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provins	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Prov. Kaltim	1 laporan	43.761.200,00	APBD		2 lembaga	200.000.000	
	[SUB KEGIATAN] Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Prov. Kaltim	200 orang	101.478.850,00	APBD		300 orang	-	
	[SUB KEGIATAN] Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Prov. Kaltim	1 lembaga	234.751.652,00	APBD		1 lembaga	120.000.000	
	[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Prov. Kaltim	Rasio 47	818.400.000,00	APBD		300 orang	-	
	[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Prov. Kaltim	10 lembaga	818.400.000,00	APBD		1 unit	-	
	[SUB KEGIATAN] Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provins	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	1 dokumen	300.000.000,00	APBD		24.96%	-	

	[SUB KEGIATAN] Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provins	Prov. Kaltim	300 orang	1567-	518.400.000,0	APBD		10 lembaga	-
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Prov. Kaltim	100 %		149.326.789,00	APBD		3 dokumen	-
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Prov . Kalti m	20 data		149.326.798,00	APBD		10 Perangkat Daerah	-
	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PP	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Prov. Kaltim	1 dokumen		79.326.789.00	APBD		85%	-
	Advokasi dan Penguatan jejaring Lintas sector dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah Stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak		20 lembaga		70.000.000.00	APBD			
	[PROGRAM] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prov . Kalti m	61,5 indeks		757.869.026.00	APBD		40 orang	-
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	Prov . Kalti m	10 lembaga		407.772.711,00	APBD		60 layanan	-

	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	Prov. Kaltim	1 kebijakan	60.945.320,00	APBD		10 lembaga	-	
	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	Prov. Kaltim	30 orang	149.255.429,00	APBD		60 Orang	-	
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	1 laporan	197.571.962,00	APBD		1 Laporan	-	
	[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	Prov. Kaltim	10 lembaga	350.096.315,00	APBD		30 perangkat daerah	-	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Prov. Kaltim	2 kegiatan	144.037.102,00	APBD		1 Dokumen	-	

	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provins	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Prov. Kaltim	1 dokumen	206.059.213,00	APBD		10 Lembaga	-	
	[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Prov. Kaltim	84 %	1.000.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	-	
	[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	Prov. Kaltim	1 lembaga	600.000.000,00	APBD		1 kegiatan	-	
	[SUB KEGIATAN] Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provins	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	300 orang	400.000.000,00	APBD		3.88%	-	
	[SUB KEGIATAN] Advokasi dan Sosialisasi pencegahan KIA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA tingkat provinsi , masyarakat serta Kab/Kota	Prov. Kaltim	100 Lembaga	200.000.000,00	APBD		3.88%	-	
	[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	Prov. Kaltim	1 lembaga	400.000.000,00	APBD		1 Lembaga	-	

	[SUB KEGIATAN] Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provins	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Prov. Kaltim	1 dokumen	400.000.000,00	APBD		1 dokumen	-
	[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Prov. Kaltim	17,20 % 2,14 %	872.970.297,00	APBD		1 Dokumen	1.395.776.032.00
	[KEGIATAN] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Prov. Kaltim	5 sektor	98.766.912,00	APBD		85 Layanan	275.000.000
	[SUB KEGIATAN] Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Prov. Kaltim	3 laporan	98.766.912,00	APBD		50 orang	275.000.000
	[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR	Prov. Kaltim	20 % 69 %	395.776.032.00	APBD		1 dokumen	740.776.032
	[KEGIATAN] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	Prov. Kaltim	0.95%	295.776.032,00	APBD		1 dokumen	640.776.032
	[SUB KEGIATAN] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Loka	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Prov. Kaltim	1 dokumen	95.776.032,00	APBD		80%	95.776.032

	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Prov. Kaltim	-1571- 1 daerah	100.000.000,00	APBD		20 data	175.000.000
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Prov. Kaltim	1 daerah	100.000.000,00	APBD		2 dokumen	370.000.000
	[SUB KEGIATAN] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan	Persentase kampung KB mandiri	Prov. Kaltim	1 daerah	100.000.000,00	APBD		2 dokumen	100.000.000
	[SUB KEGIATAN] Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembagunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Prov. Kaltim	4 Organisasi	100.000.000,00	APBD		2 dokumen	100.000.000
	[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Prov. Kaltim	79,50 %	378..427.353,00	APBD		2 dokumen	380.000.000
	[KEGIATAN] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Prov. Kaltim	4 organisasi	125.000.000,00	APBD			2.450.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Prov. Kaltim	3 organisasi	125.000.000,00	APBD		80 %	130.000.000,00
	[KEGIATAN] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	Prov. Kaltim	50%	253.427.353,00	APBD		1 dokumen	250.000.000,00

	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota	JJumlah Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	-1572- 1 Laporan	125.750.000,00	APBD		1 laporan	125.000.000,00
	[SUB KEGIATAN] Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Prov. Kaltim	1 laporan	127.677.353,00	APBD		1 laporan	125.000.000,00
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		Prov. Kaltim		1.326.421.695,00	APBD		1 Dokumen	1.191.503.530
	[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	Prov. Kaltim	100 %	394.419.345,00	APBD		1 laporan	494.030
	[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	(SUB KEGIATAN) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kaltim	1Dokumen	52.560.000,00	APBD		1 laporan	-
	[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			257.867.345.00				
	(SUB KEGIATAN)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Prov. Kaltim	1Dokumen	257.867.345,00	APBD		1 laporan	-

	[KEGIATAN] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan Baik							
	(SUB KEGIATAN) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Prov. Kaltim	1 Unit	83.992.000	APBD		1 laporan	494.030.00-
	[PROGRAM] PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Prov. Kaltim	100 %	466.436.420,00	APBD		65,54 indeks	562.809.500,00
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot				466.436.420,00	APBD		4 organisasi	562.809.500,00
	[SUB KEGIATAN] layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	2 orang	16.025.000,00	APBD		1 dokumen	50.600.000,00
	[SUB KEGIATAN] Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	8 orang	40.800.000,00	APBD		1 organisasi	50.600.000,00
	[SUB KEGIATAN] Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	30 orang	164.650.000,00	APBD		40%	208.609.500,00
	[SUB KEGIATAN] layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltim	3 orang	17.500.000,00	APBD		1 laporan	50.600.000,00

	[SUB KEGIATAN] layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		-1574- 10 Orang	50.617.567,00				50.600.000,00	
	[SUB KEGIATAN] Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 Orang	108.570.000,00				50.600.000,00	
	[SUB KEGIATAN] layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas		2 orang	47.122.028,00				50.600.000,00	
	[SUB KEGIATAN] layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		3 orang	21.151.825,00				50.600.000,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang		100 %	465.565.930,00				628.200.000,00	
		Mendapatkan Layanan Komprehensif								
	[KEGIATAN] Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				465.565.930,00				628.200.000,00	
	[SUB KEGIATAN] Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 orang	155.050.000,00				274.000.000,00	
	[SUB KEGIATAN] layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2 orang	15.000.000,00				50.600.000,00	
	[SUB KEGIATAN] Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 Orang	108.570.000,00				50.600.000,00	

	[SUB KEGIATAN] layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		-1575- 8 orang	60.600.000,00				50.600.000,00	
	[SUB KEGIATAN] layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas		2 Orang	11.182.000,00				50.600.000,00	
	[SUB KEGIATAN] layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		3 Orang	16.320.975,00				50.600.000,00	
	[SUB KEGIATAN] layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2 Orang	47.448.132,00				50.600.000,00	
	[SUB KEGIATAN] layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		10 Orang	51.394.823,00				50.600.000,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel TC-27. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan meliputi

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.4 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.5.6 Penatausahaan Arsip Dinastis pada SKPD
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- 2.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provins
- 2.1.1 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
 - 2.1.2 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
 - 2.1.3 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi
- 2.2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provins
- 2.2.1 pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provins
 - 2.2.2 sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provins
 - 2.2.3 peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
- 2.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- 2.3.1 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi
 - 2.3.2 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provins
 - 2.3.3. Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- 3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
 - 3.1.2 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- 4.1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - 4.1.1 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- 5.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
 - 5.1.1 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA
 - 5.1.2 Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak

6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- 6.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - 6.1.1 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - 6.1.2 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - 6.1.3 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
- 6.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - 6.2.1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
 - 6.2.2 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi

7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- 7.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 7.1.1 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi
 - 7.1.2 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi

7.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

7.2.1 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi

8. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

8.1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

8.1.1 Advokasi dan Sosialisasi GDPK

9. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

9.1 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

9.1.1 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana

9.1.2 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja

9.2 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

9.2.1 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana

10. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

10.1 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

10.1.1 Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB

10.2 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

10.2.1 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

10.2.2 Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- 2.1 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.2 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.3 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.4 layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.5 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.6 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.7 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.8 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- 3.1 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
 - 3.1.1 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.2 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.3 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.4 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.5 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.6 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.7 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.8 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan rencana kerja tahun 2026 memuat indikator kinerja outcome/output masing-masing Program/kegiatan, serta perkiraan maju tahun anggaran 2027 pada DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			22.520.769.305,00		5.263.776.032,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.520.769.305,00		5.263.776.032,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			21.647.799.008,00		3.868.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	91,2 indeks 87 %	17.777.376.393,00	-	3.463.000.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,50 %	430.000.000,00	-	728.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					

	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	60.000.000,00		120.000.000,00
--	--	-----------	---------------	--	----------------

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	7.500.000,00		15.000.000,00
--	---	-----------	--------------	--	---------------

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	7.500.000,00		15.000.000,00
--	---	-----------	--------------	--	---------------

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	136.000.000,00		140.000.000,00
--	---	-----------	----------------	--	----------------

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	219.000.000,00		438.000.000,00
--	---	-----------	----------------	--	----------------

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase realisasi anggaran</i>	95 %	14.568.985.411,00	-	200.000.000,00
--	--------------------------------------	------	-------------------	---	----------------

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	60 Orang/ Bulan	14.342.145.411,00		0,00
--	--	-----------------	-------------------	--	------

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	126.840.000,00		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	20.000.000,00		40.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					
	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	16 Laporan	30.000.000,00		60.000.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	2 Dokumen	50.000.000,00		100.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</i>	95 %	16.250.527,00	-	10.000.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	16.250.527,00		10.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	86 orang	48.000.000,00	-	60.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	48.000.000,00		60.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	117 unit	579.803.825,00	-	835.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00		15.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	60.026.600,00		80.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	25.000.000,00		75.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu					
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	40.000.000,00		60.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	409.777.225,00		550.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					

	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	35.000.000,00		55.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	1.676.116.017,00	-	1.130.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00		15.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	397.420.000,00		0,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	10.000.000,00		15.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.258.696.017,00		1.100.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	88 unit	458.220.613,00	-	500.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	55.000.000,00		60.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	191.220.613,00		220.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	67.000.000,00		70.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	145.000.000,00		150.000.000,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Proporsi perempuan dalam kepemimpinan dan manajemen Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	45,92 % 50,20 - 51,26 %	1.072.180.012,00	-	320.000.000,00
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan	10 Lembaga	286.478.704,00	-	0,00
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi					
	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	43.367.918,00		0,00
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi					
	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	37 Lembaga	193.842.646,00		0,00
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi					

	<i>Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)</i>	1 Lembaga	49.268.140,00		0,00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas LPLPP</i>	1 Lembaga	405.709.606,00	-	0,00
pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi					
	<i>jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan</i>	5 Lembaga	160.661.480,00		0,00
sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi					
	<i>jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi</i>	260 Orang	93.265.510,00		0,00
peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi					
	<i>jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan</i>	100 Orang	151.782.616,00		0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan</i>	300 Orang	379.991.702,00	-	320.000.000,00
monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi					

	-1588-				
	<i>jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi</i>	1 laporan	43.761.200,00		200.000.000,00
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi					
	<i>jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek</i>	200 Orang	101.478.850,00		0,00
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi					
	<i>Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)</i>	1 Lembaga	234.751.652,00		120.000.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</i>	Rasio 47.00	818.400.000,00	-	0,00
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan</i>	10 lembaga	818.400.000,00	-	0,00
Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi					
	<i>Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi</i>	1 Dokumen	300.000.000,00		0,00
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi					
	<i>Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi</i>	300 orang	518.400.000,00		0,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	<i>Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berprespektif gender dan hak anak sesuai standar</i>	12 lembaga	72.646.788,00	-	85.000.000,00

-1589-					
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan dalam peningkatan kualitas keluarga</i>	2 lembaga	72.646.788,00	-	85.000.000,00
Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota</i>	1 Lembaga	72.646.788,00		85.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	<i>Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan</i>	% 100	149.326.789,00	-	0,00
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</i>	20 data	149.326.789,00	-	0,00
Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA					
	<i>Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA</i>	1 Dokumen	79.326.789,00		0,00
Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak					
	<i>Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak</i>	20 Lembaga	70.000.000,00		0,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<i>Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</i>	61,5 indeks	757.869.026,00	-	0,00

-1590-					
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA</i>	10 lembaga	407.772.711,00	-	0,00
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi					
	<i>Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi</i>	1 Kebijakan	60.945.320,00		0,00
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					
	<i>jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</i>	30 Orang	149.255.429,00		0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi					
	<i>jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</i>	1 Laporan	197.571.962,00		0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	<i>jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak</i>	10 lembaga	350.096.315,00	-	0,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak					
	<i>Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak</i>	2 Kegiatan	144.037.102,00		0,00
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi					
	<i>jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi</i>	1 Dokumen	206.059.213,00		0,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</i>	84 %	1.000.000.000,00	-	0,00

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan</i>	1 lembaga	600.000.000,00	-	0,00
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi					
	<i>Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi</i>	300 Orang	400.000.000,00		0,00
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi					
	<i>Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota</i>	100 Lembaga	200.000.000,00		0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan</i>	1 lembaga	400.000.000,00	-	0,00
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi					
	<i>Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi</i>	1 Dokumen	400.000.000,00		0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			872.970.297,00		1.395.776.032,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	% 17,78 % 2,12	98.766.912,00	-	275.000.000,00

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan</i>	5 sektor	98.766.912,00	-	275.000.000,00
Advokasi dan Sosialisasi GDPK					
	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK</i>	3 Laporan	98.766.912,00		275.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	<i>Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi (meet need) Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)</i>	79,09 % 69 %	395.776.032,00	-	740.776.032,00
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Ratio akseptor KB</i>	0,95 %	295.776.032,00	-	640.776.032,00
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal					
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal</i>	1 Dokumen	95.776.032,00		95.776.032,00
Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana					
	<i>Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)</i>	1 Daerah	100.000.000,00		175.000.000,00

Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja

	<i>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja</i>	1 Daerah	100.000.000,00		370.000.000,00
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>persentase kampung KB mandiri</i>	5,10 %	100.000.000,00	-	100.000.000,00

Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana

	<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)</i>	4 Organisasi	100.000.000,00		100.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	<i>Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga</i>	% 79,50	378.427.353,00	-	380.000.000,00
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</i>	4 organisasi	125.000.000,00	-	130.000.000,00

Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB

	<i>Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB</i>	3 Organisasi	125.000.000,00		130.000.000,00
--	---	--------------	----------------	--	----------------

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	50 %	253.427.353,00	-	250.000.000,00
Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota					
	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	125.750.000,00		125.000.000,00
Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga					
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Laporan	127.677.353,00		125.000.000,00
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			1.326.421.695,00		1.191.503.530,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.326.421.695,00		1.191.503.530,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1.326.421.695,00		1.191.503.530,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 90,79 indeks	394.419.345,00	-	494.030,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	95 %	52.560.000,00	-	0,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	52.560.000,00		0,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	4 Jenis Jasa	257.867.345,00	-	0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	257.867.345,00		0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</i>	88 Unit	83.992.000,00	-	494.030,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	1 Unit	83.992.000,00		494.030,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</i>	100 %	466.436.420,00	-	562.809.500,00
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan UPTD PPA</i>	43 Orang	466.436.420,00	-	562.809.500,00
layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 orang	16.025.000,00		50.600.000,00
layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	8 Orang	40.800.000,00		50.600.000,00

Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	30 orang	164.650.000,00		208.609.500,00
--	--	----------	----------------	--	----------------

layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Orang	17.500.000,00		50.600.000,00
--	--	---------	---------------	--	---------------

layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	50.617.567,00		50.600.000,00
--	---	----------	---------------	--	---------------

Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	30 Orang	108.570.000,00		50.600.000,00
--	---	----------	----------------	--	---------------

layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Orang	47.122.028,00		50.600.000,00
--	--	---------	---------------	--	---------------

layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

	<i>Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Orang	21.151.825,00		50.600.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</i>	100 %	465.565.930,00	-	628.200.000,00
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak Korban Kekerasan yang memerlukan Perlindungan Khusus</i>	43 Orang	465.565.930,00	-	628.200.000,00
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	30 Orang	155.050.000,00		274.000.000,00
layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Orang	15.000.000,00		50.600.000,00
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	30 Orang	108.570.000,00		50.600.000,00
layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					

	-1598-				
	<i>Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	8 Orang	60.600.000,00		50.600.000,00
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Orang	11.182.000,00		50.600.000,00
layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&					
	<i>Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Orang	16.320.975,00		50.600.000,00
layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Orang	47.448.132,00		50.600.000,00
layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	51.394.823,00		50.600.000,00
			23.847.191.000,00		6.455.279.562,00

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Akhir DP3A Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 berfungsi sebagai Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

- a. DP3A Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 serta diselaraskan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 -2026
- b. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024 dan tahun 2023
- c. Harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seluruh bidang teknis
- d. Penyusunan Renja sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

- e. Penyusunan Rancangan Renja Akhir Tahun 2026 ini, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya

**RENJA TAHUN 2026
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya pembangunan sektor pangan dan pertanian yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Renja ini menjadi dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara yuridis, penyusunan dokumen Renja mengacu pada sejumlah regulasi penting. **Pertama**, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah, serta partisipasi seluruh unsur pembangunan dalam penyusunannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana kerja sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang bersifat terpadu dan berjenjang. **Kedua**, penyusunan Renja juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, sektor pangan dan pertanian merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, sehingga memerlukan perencanaan yang sistematis melalui penyusunan dokumen Renja perangkat daerah. **Ketiga**, landasan teknis penyusunan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur secara rinci tentang tata cara perencanaan,

pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Permendagri ini mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian, serta kebutuhan pendanaan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dengan demikian, penyusunan Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2026 tidak hanya merupakan kebutuhan teknokratis dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian, tetapi juga merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan pangan dan urusan pertanian.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA PD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Bab XII Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah untuk memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026. Sedangkan tujuan yang dicapai dari penyusunan Rancangan Akhir Renja ini adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026;
4. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka Sistematika penulisan Rancangan Akhir Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 terdiri dari:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan.

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Bab V. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan evaluasi melalui penilaian terhadap pencapaian target dari program atau kegiatan yang telah direncanakan.

Evaluasi Renja Tahun 2024 menilai pelaksanaan Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang dibandingkan dengan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 telah dilakukan secara optimal dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Renja Tahun 2024 melaksanakan 8 program, 48 Kegiatan, dan 137 Sub Kegiatan. Gambaran hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 tersaji dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Dinas Pangan TPH Kaltim Tahun 2024
dan Pencapaian RENSTRA Dinas Pangan TPH Kaltim s/d Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Skor)	97,80	-	97,60	97,64	100,04	97,75	97,75	100
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Skor)	86,70	-	86,30	89,06	103,20	86,50	86,50	100
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12	-	12	12	100	12	12	100
2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	-	1	1	100	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Propinsi (Kegiatan)	6	-	1	1	100	5	5	100
2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Propinsi (Dokumen)	1	-	1	1	100	1	1	100
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wil Propinsi (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	-	1	1	100	1	1	100
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	96,61	-	88,83	64,71	72,85	92,07	92,07	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Propinsi yang Terpelihara (Ton)	120	-	300	-	-	50	50	100
2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Propinsi (Ton)	100	-	100	41,38	41,38	100	100	100
2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Propinsi (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3	-	3	3	100	3	3	100
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	1	-	2	2	100	2	2	100
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan	4	-	4	2	50,00	2	2	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)								
2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah Rawan Pangan (%)	0	-	0	0	100	0	0	100
		Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan pangannya (Kec)	1	-	1	1	100	1	1	100
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Laporan FSVA	1	-	1	1	100	1	1	100
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang	2	-	2	2	100	1	1	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Dimutakhirkan (Dokumen)								
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan yang Ditangani (Kecamatan)	10	-	10	10	100	10	10	100
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1	-	1	1	100	1	1	100
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Propinsi (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Propinsi (Dokumen)	1	-	1	1	100	1	1	100
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan	87,00	-	85,00	85,77	100,91	86,00	86,00	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		mutu dan keamanan pangan								
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar (Dokumen)	20	-	16	13	81,25	18	18	100
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	13	-	11	8	72,73	12	12	100
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Dokumen)	6	-	4	2	50,00	4	4	100
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	-	1	1	100	1	1	100
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu	1	-	1	1	100	1	1	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)								
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tuimbuhan (Dokumen)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas layanan Keseekretariatan	83,40	-	82,00	90,37	110,21	82,70	82,70	100
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	-	100	100	100	100	100	100
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90,00	-	90	90	100	90,00	90,00	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	-	5	5	100	5	5	100
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2	-	2	2	100	2	2	100
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2	-	2	2	100	2	2	100
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	-	4	4	100	4	4	100
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	-	4	4	100	5	5	100
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	91,40	-	91,25	91,25	100	91,27	91,27	100
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	179	-	200	239	119,5	352	352	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	-	12	12	100	12	12	100
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	-	12	12	100	12	12	100
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	3	-	3	3	100	3	3	100
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semester SKPD	18	-	4	4	100	18	18	100
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	-	4	4	100	4	4	100
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	48,00	-	45,50	45,50	100	45,70	45,70	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85,00	-	85,00	50,00	58,82	85,00	85,00	100
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan	20	-	10	5	50,00	5	5	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Fungs yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	90,00	-	90,00	90,00	100	90,00	90,00	100
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15	-	16	16	100	15	15	100
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	35	-	30	30	100	3	3	100
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	18	-	14	14	100	4	4	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197	-	1	1	100	12	12	100
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6	-	4	4	100	4	4	100
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	90	-	90	90	100	90	90	100
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	-	4	4	100	3	3	100
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70	-	80	80	100	60	60	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	90	-	90	90	100	90	90	100
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90,00	-	90,00	90,00	100	90,00	90,00	100
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17	-	16	10	62,50	2	2	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya								
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	-	57	57	100	52	52	100
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	73	-	72	72	100	106	106	100
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang Dipelihara	2	-	2	2	100	2	2	100
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	-	1	1	100	4	4	100
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13	-	3	3	100	2	2	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	35,90	-	35,50	34,00	95,77	35,70	35,70	100
		Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	44,84	-	39,29	39,29	100	41,57	41,57	100
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Ha)	9.250	-	12.645	13.164	104,10	9.000	9.000	100
		Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura (Ha)	860	-	839,00	857,26	102,18	840	840	100
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2	-	2	2	100	2	2	100
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2	-	2	2	100	2	2	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Peredaran Sarana Petanian (Dokumen)								
3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	41,81	-	41,39	41,39	100	41,76	41,76	100
		Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	52,00	-	34,00	34,00	100	43,00	43,00	100
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan (Unit)	7	-	6	6	100	7	7	100
		Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura (Unit)	3	-	2	2	100	3	3	100
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Perencanaan Pengembangan Prasarana,	2	-	2	2	100	2	2	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)								
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	2	-	2	2	100	1	1	100
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	2	-	2	2	100	1	1	100
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	-	2	2	100	2	2	100
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian (Ha)	350	-	4	4	100	-	-	-
3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan	Peta kawasan, Lahan dan Lahan cadangan Pertanian	1	-	1	1	100	1	1	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Pangan Berkelanjutan di Tingkat (Dokumen)								
3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Prasarana Hasil Pengolahan Tanaman Pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3	-	1	1	100	1	1	100
	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA									
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas layanan Keseekretariatan	82,80	-	81,50	83,25	102,15	82,00	82,00	100
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	-	100	100	100	100	100	100
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100	-	100	100	100	100	100	100
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	-	12	12	100	12	12	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100	-	100	100	100	100	100	100
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya (Paket)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	-	15	18	120	13	13	100
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100	-	100	100	100	100	100	100
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	12	-	12	12	100	5	5	100
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	12	-	12	12	100	12	12	100
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	-	12	12	100	2	2	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	-	12	12	100	12	12	100
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100	-	100	100,00	100,00	100	100	100
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	-	3	10	333,33	3	3	100
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	-	3	8	266,67	167	167	100
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	-	100	100	100	100	100	100
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	-	1	1	100	-	-	-
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100	-	100	100	100	100	100	100
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	-	6	6	100	7	7	100
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	-	12	12	100	47	47	100
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	-	2	2	100	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)	12	-	12	12	100	4	4	100
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan benih Sumber Tanaman Pangan	13,07	-	11,55	36,31	314,37	11,95	11,95	100
		Persentase Pemenuhan benih Sumber dan Sebar Hortikultura	66,67	-	30,33	48,00	158,26	50,00	50,00	100
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas lahan yang Menggunakan Benih Bersertifikat (Ha)	985	-	935	2.710	290	960	960	100
3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak (Batang)	21.500	-	20.000	58.000	290	50.000	50.000	100
3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	22	-	18	59	328	25	25	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN									
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	82,80	-	81,50	83,29	102,20	82,00	82,00	100
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	-	100	100	100	100	100	100
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90,00	-	90,00	94,00	104,44	90	90	100
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yng berfungsi dengan baik	90,00	-	90,00	90,00	100	90	90	100
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	1	-	1	1	100	1	1	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kantor yang disediakan (Paket)								
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	90,00	-	90,00	90,00	100	90,00	90,00	100
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Laninya (Unit)	-	-	6	6	100	-	-	-
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	-	5	5	100	2	2	100
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	95,00	-	95,00	95,00	100	95,00	95,00	100
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya	1	-	1	1	100	1	1	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)								
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90,00	-	90,00	80,00	88,89	90,00	90,00	100
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	-	9	9	100	29,00	29,00	100
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	1	-	1	1	100	1	1	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	80,00	-	77	77,04	100,05	80,00	80,00	100
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang mengikuti Pelatihan	330	-	270	270	100	300	300	100
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	20	-	17	20	117,65	20	20	100
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	330	-	270	270	100	300	300	100
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluh Pertanian (Laporan)	9	-	7	7	100	9	9	100
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	3	-	3	3	100	2	2	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	12	-	6	6	100	9	9	100
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang meningkat kapasitasnya (Unit)	13	-	9	5	55,56	11	11	100
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	6	-	4	4	100	5	5	100
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Unit)	1	-	1	1	100	1	1	100
	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA									
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,80	-	81,50	81,58	100,10	82,00	82,00	100
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	-	100	100	100	100	100	100
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	91,4	-	91,25	100	109,59	91,27	91,27	100
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1	-	1	1	100	1	1	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)								
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85,00	-	85,00	140,00	164,71	85,00	85,00	100
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungs yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	27	-	20	28	140,00	37	37	100
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yng berfungsi dengan baik	90,00	-	90,00	100	111,11	90,00	90,00	100
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	60	-	50	40	80,00	4	4	100
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	12	-	12	12	100	12	12	100
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan (Paket)	12	-	12	12	100	12	12	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	-	7	7	100	12	12	100
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	-	1	1	100	-	-	-
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	90,00	-	90,00	100	111,11	90,00	90,00	100
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	34	-	32	32	100	30	30	100
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang tepat waktu	90,00	-	90,00	100	111,11	90	90	100
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya	1	-	1	1	100	1	1	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)								
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90,00	-	90,00	100	111,11	90,00	90,00	100
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	-	13	13	100	13	13	100
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	-	35	35	100	39	39	100
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	12	-	12	12	100	12	12	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi	99,00	-	98,00	99,00	101,02	98,00	98,00	100
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi / Rekomendasi (Sertifikat)	217	-	195	195	100	215	215	100
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	95	-	90	90	100	95	95	100
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah,waktu, tempat, dan harga (Laporan)	120	-	90	95	105,56	120	120	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah varietas daerah yang di Identifikasi	3	-	3	3	100	3	3	100
3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Varietas Unggul Baru / VUB)	3	-	3	3	100	3	3	100
	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA									
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,80	-	81,50	83,25	102,15	82,00	82,00	100
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	-	100	100	100	100	100	100
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	88,00	-	88,00	88,00	100	88	88	100
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	-	1	1	100	1	1	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	83,00	-	83,80	84,50	100,84	83,00	83,00	100
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya (Paket)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungs yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	-	10	32	320,00	3	3	100
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yng berfungsi dengan baik	83,55	-	81,05	81,05	100	82,35	82,35	100
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	5	-	7	7	100	7	7	100
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan (Paket)	12	-	15	15	100	2	2	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	17	-	12	12	100	2	2	100
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	-	4	4	100	4	4	100
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	84,00	-	80,00	80,00	100	83,50	83,50	100
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	-	32	32	100	29	29	100
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	89,07	-	88,80	88,80	100	88,95	88,95	100
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya	1	-	1	1	100	1	1	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)								
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	88,75	-	88,50	88,50	100	88,60	88,60	100
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	-	4	3	75	5	5	100
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	12	-	12	12	100	2	2	100
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	40,00	-	32,00	37,30	116,56	36,00	36,00	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi (Kios)	50	-	40	56	140	45	45	100
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	50	-	3	3	100	3	3	100
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Pengembangan Teknologi	11	-	7	7	100	11	11	100
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (Laporan)	11	-	3	3	100	3	3	100
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Luas Serangan OPT	76,00	-	75,80	79,51	104,89	75,90	75,90	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan dan Pengendalian OPT dan DPI (Ha)	15.260	-	15.050	15.788	104,90	15.155	15.155	100
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	15.200	-	15.000	15.713	104,75	15.100,00	15.100,00	100
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani yang Ditangani (Ha)	60	-	50	75	150,00	55	55	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pada Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 secara umum berjalan dan tercapai dengan cukup baik. Dari 8 program yang dijalankan, 7 program diantaranya telah memenuhi bahkan melampaui target kinerja dan hanya terdapat 1 program yang tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun gambaran capaian pelaksanaan program pada Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja

- 1) Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan 2 indikator kinerja yaitu Persentase Daerah Rawan Pangan (%), dan Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan pangannya. Kedua indikator memenuhi target kinerja sebesar 0% daerah rawan pangan dan 1 kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan pangannya. Capaian nol persen daerah rawan pangan dan peningkatan status ketahanan pangan di salah satu kecamatan di Kaltim merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, ditopang oleh sistem pemantauan yang aktif, respons kebijakan yang cepat, serta program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

b. Realisasi program yang melebihi target kinerja

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan 2 indikator kinerja yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Skor), dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Skor). Dengan target kinerja Skor PPH Ketersediaan sebesar 97,60 dan target Skor PPH Konsumsi sebesar 86,30 telah melampaui target kinerja sebesar 100,04%

dengan capaian 97,64 (Skor PPH Ketersediaan) dan sebesar 103,20% dengan capaian 89,06 (Skor PPH Konsumsi).

Keberhasilan dalam melampaui target kinerja pada Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi pada tahun 2024, tidak lepas dari perpaduan antara kebijakan strategis, peningkatan produksi dan distribusi pangan beragam, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

- 2) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan indikator kinerja Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan sebesar 85%. Mampu dicapai bahkan melampaui target dengan capaian sebesar 85,77% atau 100,91%. Mengandung arti bahwa dari sekian pangan segar asal tumbuhan yang dipantau atau diuji, sebanyak 85,77% dinyatakan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sesuai regulasi, bebas dari cemaran biologis, kimia, dan fisik yang berisiko bagi kesehatan konsumen (misalnya residu pestisida, logam berat, atau mikroba patogen).

- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dinas dan UPTD)

Secara keseluruhan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di Dinas dan UPTD, dengan 2 indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas layanan Kesekretariatan, dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti mampu melampaui target kinerja yang ditetapkan dengan capaian >100%. Hal ini tidak lepas dari upaya dan kerja dari perencanaan dan penganggaran yang tepat dan terukur, kinerja administratif dan manajerial yang efektif, kapasitas dan kompetensi SDM, dukungan teknologi informasi dan digitalisasi, koordinasi internal dan eksternal yang baik,

monitoring dan evaluasi secara berkala, dan dukungan regulasi dan kepatuhan administratif.

- 4) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (UPTD BBI TPH), dengan 2 indikator kinerja yaitu : Persentase Pemenuhan benih Sumber Tanaman Pangan (11,55%), dan Persentase Pemenuhan benih Sumber dan Sebar Hortikultura (30,33%). Kedua indikator ini melampaui target sebesar 36,31% atau tercapai 314,37% untuk Pemenuhan benih Sumber Tanaman Pangan, dan sebesar 58,00% atau tercapai 158,26% untuk Pemenuhan benih Sumber dan Sebar Hortikultura.

Besarnya capaian target kinerja tersebut disebabkan oleh besarnya kemampuan UPTD BBI TPH Kaltim dalam memproduksi benih sumber pertahunnya sebanyak 60-70 Ton/Tahun yang berbanding dengan kebutuhan benih 25 Kg per hektar dan luas tanam mencapai 92.000 Hektar sehingga menghasilkan capaian pemenuhan benih sumber dan sebar mencapai 2-3 kali lipat.

- 5) Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator kinerja Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya mendapatkan realisasi kinerja sebesar 77,04% dari target 77% atau melampaui target sebesar 100,05% yang didukung melalui pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
- Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian;
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (UPTD PSBTPH) dengan indikator kinerja Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tersertifikasi mendapatkan realisasi kinerja sebesar 99,00% dari target

98,00% atau melampaui target sebesar 101,02% yang didukung melalui pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman; dan
- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi.

7) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (UPTD PTPH) dengan indikator kinerja Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk mendapatkan realisasi kinerja sebesar 37,30% dari target 32,00% atau melampaui target sebesar 116,56% yang didukung melalui pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian; dan
- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi.

8) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (UPTD PTPH) dengan indikator kinerja Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Luas Serangan OPT mendapatkan realisasi kinerja sebesar 79,51% dari target 75,80% atau melampaui target sebesar 104,89% yang didukung melalui pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi.

c. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas) dengan 2 indikator kinerja yaitu : Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan 35,50%, dan Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura 39,29%. Tidak tercapainya kinerja program ini disebabkan karena tidak tercapainya indikator kinerja pada Tingkat Pemenuhan Sarana

Pertanian Tanaman Pangan, yang hanya mampu mencapai kinerja sebesar 34,00% dari target 35,50% atau hanya mencapai 95,77%. Sedangkan indikator kinerja Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura mampu mencapai target kinerja sebesar 39,29% atau 100%. Pencapaian indikator kinerja pada program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian ini sangat dipengaruhi oleh besarnya komponen sarana pertanian (benih, pupuk, dan Alsintan) yang diadakan dibandingkan dengan tingkat kebutuhan per hektar tanaman, dan rasio pemanfaatan Alsintan per hektar tanaman. Semakin besar sarana pertanian yang diadakan dan mampu memenuhi tingkat kebutuhan per hektar tanaman dan memenuhi rasio pemanfaatan Alsintan maka target indikator kinerja akan tercapai.

Tidak tercapainya target program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target indikator Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan sebesar 35,50%, hanya mampu terealisasi sebesar 34,00% atau 95,77%. Dapat menimbulkan implikasi pada penurunan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil kedepan yaitu dengan menyusun perencanaan dan penganggaran penyediaan sarana pertanian (benih, pupuk, pestisida, dan Alsintan) tanaman pangan dengan lebih proporsional dengan memperhatikan aspek kewenangan daerah didalamnya, sehingga penyediaan sarana pertanian akan dapat memberikan berdampak langsung kepada petani/kelompok tani, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi dan produktivitas serta meningkatkan pendapatan petani.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LPE Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)								
	Tanaman Pangan	0,70	0,80	0,94	2,49	1,49	1,64	1,80	
	Tanaman Hortikultura	1,29	1,72	1,88	2,01	1,72	1,88	1,99	
2	Indeks Ketahanan Pangan	77,85	77,95	78,06	78,61	77,95	-	-	
3	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)								
	Padi	239.505	239.580	239.680	249.643	262.125	275.232	288.993	
	Jagung	74.186	74.686	75.686	9.305	9.770	10.259	10.772	
	Tanaman Hortikultura	351.782	387.840	407.232	439.628	466.006	493.966	523.604	
4	NTP Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)								
	NTP Tanaman Pangan	93,00	93,06	93,12	102,94	103,29	103,44	103,60	
	NTP Hortikultura	112,75	113,00	113,25	113,63	113,83	114,03	114,23	
5	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) – (Dinas)	82,00	82,70	83,40	82,58	82,70	82,80	83,60	
6	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti – (Dinas)	100	100	100	100	100	100	100	
7	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) – (UPTD BBI)	81,50	82,00	82,80	83,25	82,00	82,80	83,60	
8	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti – (UPTD BBI)	100	100	100	100	100	100	100	
9	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) – (UPTD BPPSDMP)	81,50	82,00	82,80	83,29	82,00	82,80	83,60	
10	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti – (UPTD BPPSDMP)	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan – (UPTD PSBTPH)	81,50	82,00	82,80	81,58	82,00	82,80	83,60	
12	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti – (UPTD PSBTPH)	100	100	100	100	100	100	100	
13	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan – (UPTD PTPH)	81,50	82,00	82,80	82,20	82,00	82,80	83,60	
14	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti – (UPTD PTPH)	100	100	100	100	100	100	100	
15	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Skor)	97,60	97,75	97,80	97,70	97,75	97,80	97,85	
16	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Skor)	86,30	86,50	86,70	89,10	89,51	89,95	90,40	
17	Persentase Daerah Rawan Pangan (%)	0	0	0	0	0	-	-	
18	Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan pangannya (Kec)	1	1	1	1	1	-	-	
19	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	85,00	86,00	87,00	78,20	86,00	87,00	87,00	
20	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	35,50	35,70	35,90	34,00	-	-	-	
21	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	39,29	41,57	48,84	39,29	-	-	-	
22	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	41,39	41,76	41,81	41,39	-	-	-	
23	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	34,00	43,00	52,00	34,00	-	-	-	
24	Persentase Pemenuhan benih Sumber Tanaman Pangan	11,55	11,95	13,07	36,31	11,95	100,00	100,00	
25	Persentase Pemenuhan benih Sumber dan Sebar Hortikultura	30,33	50,00	66,67	48,00	50,00	53,00	55,00	
26	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	77,00	80,00	80,00	77,04	77,50	78,00	78,50	
27	Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi	98,00	98,00	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00	
28	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	32,00	36,00	40,00	37,30	45,00	50,00	55,00	
29	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Luas Serangan OPT	75,80	75,90	76,00	79,51	90,00	90,00	90,00	

Dari tabel 2.2 diatas, tergambar capaian kinerja tahun 2024 dari Indikator kinerja yang sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama yaitu LPE Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan target 0,70% (LPE TP) dan 1,29% (LPE Hortikultura), perekonomian subsektor tanaman pangan tumbuh sebesar 2,49% dan subsektor hortikultura tumbuh sebesar 2,01%.
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Skor) dengan target 97,60 Skor, terealisasi 97,70 Skor atau 100,10%.
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Skor) dengan target 86,30 Skor, terealisasi 89,10 Skor atau 103,24%.
4. Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dengan target 35,50%, terealisasi 34% atau 95,77%.
5. Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura dengan target 39,29%, teralisasi 39,29% atau 100%.
6. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dengan target 41,39%, terealisasi 41,39% atau 100%.
7. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura dengan target 34%, terealisasi 34% atau 100%.
8. Persentase Pemenuhan benih Sumber Tanaman Pangan dengan target 11,55%, terealisasi 36,31% atau 314,37%.
9. Persentase Pemenuhan benih Sumber dan Sebar Hortikultura dengan target 30,33%, terealisasi 48% atau 158,26%.
10. Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya dengan target 77%, terealisasi 77,04% atau 100,06%.
11. Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi dengan target 98%, terealisasi 99% atau 101,02%.

12. Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk dengan target 32%, terealisasi 37,30% atau 116,56%.
13. Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Luas Serangan OPT dengan target 75,80%, terealisasi 79,51% atau 104,89%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, khususnya pada Bab XII Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas yaitu : *“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, tanaman pangan, dan hortikultura yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan”*. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pangan dan bidang pertanian sesuai dengan Renstra yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Perencanaan, pengorganisasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura.
4. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang konsumsi dan keamanan pangan.
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang produksi tanaman pangan.
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang produksi hortikultura.
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
10. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah.
11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
12. Pelaksanaan fungsi&tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut yakni dalam penyelenggaraan urusan pangan dan urusan pertanian di Kalimantan Timur, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tentunya melakukan sinergi dengan stakeholders terkait. Sinergi dan koordinasi terus dilakukan baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu dengan perangkat daerah yang menangani urusan pangan dan urusan pertanian di kabupaten/kota di Kaltim maupun dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian RI dan lembaga/instansi vertikal lainnya dalam hal koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi perencanaan dan penganggaran melalui APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kab/Kota. Selain itu, sinergi kegiatan juga dilakukan dengan unsur-unsur lain seperti petani, BUMD dan swasta.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berkaitan dengan isu-isu penting pelaksanaan pembangunan pangan dan pertanian antara lain:

1. Permasalahan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah

Ketahanan dan kemandirian pangan masih menghadapi tantangan yang saling terkait, ditandai dengan cukup tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah akibat belum optimalnya produksi pangan lokal. Di sisi lain, tingkat diversifikasi konsumsi pangan masyarakat masih rendah, dengan pola konsumsi yang cenderung bertumpu pada jenis pangan tertentu sehingga berisiko terhadap ketahanan gizi dan kerentanan pasokan. Permasalahan ini ditambah dengan belum optimalnya pengawasan terhadap keamanan pangan, baik di sisi produksi maupun distribusi, yang dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, tingginya angka kehilangan dan pemborosan pangan (*food loss* dan *food waste*) sepanjang rantai pasok turut menjadi faktor inefisiensi yang menghambat pencapaian sistem pangan yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan.

2. Produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang belum optimal

Belum optimalnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana pertanian serta inovasi teknologi yang dimiliki oleh petani, belum optimalnya penggunaan benih bersertifikat, masih tingginya kehilangan hasil, luas kepemilikan lahan yang sempit dan tersebar, hingga dampak perubahan iklim dan pengendalian OPT yang belum optimal.

3. Tingkat kesejahteraan petani masih rendah

Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani dikarenakan kurangnya nilai tambah bagi petani, pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi, dan kapasitas kelembagaan petani masih perlu ditingkatkan.

Meskipun terdapat berbagai permasalahan, hambatan, serta isu-isu strategis dalam pelayanan perangkat daerah sebagaimana disebutkan diatas, namun secara umum hal tersebut tidak berdampak atau berpengaruh signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Beban pencapaian misi Kepala Daerah tidak hanya ditanggung oleh satu perangkat daerah saja, melainkan merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor/perangkat daerah. Jika suatu dinas menghadapi kendala, perangkat daerah lain dengan fungsi yang relevan tetap dapat menjaga kesinambungan program strategis, sehingga stabilitas dan kesinambungan pencapaian visi-misi tetap terjaga.

Disamping permasalahan dan hambatan yang dihadapi, juga terdapat peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dalam pembangunan pertanian. Adapun peluang dalam pembangunan pertanian di Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan Pemerintah

Pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan berbagai kebijakan strategis dalam rangka mendorong pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing. Berbagai kebijakan dimaksud meliputi : bantuan sarana dan prasarana pertanian, program *food estate*, pembinaan korporasi petani, peningkatan akses dan ketersediaan pangan lokal di daerah, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lain sebagainya. Di Kalimantan Timur, dukungan kebijakan ini diharapkan dapat membuka peluang besar untuk mempercepat proses transformasi pertanian, terutama dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah.

2. Permintaan pasar terhadap produk pertanian terus meningkat

Meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, berkembangnya industri olahan pangan, serta bertambahnya sektor perhotelan, restoran, dan katering memberikan peluang strategis bagi Kalimantan Timur untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian.

3. Perkembangan teknologi pertanian

Perkembangan teknologi di sektor pertanian telah menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usahatani. Pemanfaatan teknologi di bidang pertanian tidak hanya menjawab tantangan produksi, tetapi juga mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim, efisiensi penggunaan sumber daya, serta penguatan daya saing produk lokal di pasar regional dan nasional.

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan sehat dan ramah lingkungan.

Produk pertanian sehat dan ramah lingkungan kini semakin diminati oleh konsumen, terutama di wilayah perkotaan, kalangan menengah atas, serta kelompok masyarakat yang sadar gizi dan kesehatan. Tren ini membuka peluang strategis bagi pengembangan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan di Kalimantan Timur.

5. Keberadaan IKN Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur membawa transformasi besar dalam tata ruang, struktur ekonomi, dan kebutuhan infrastruktur di wilayah sekitarnya. Sebagai proyek strategis nasional, keberadaan IKN bukan hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga magnet pertumbuhan baru yang mendorong berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor pertanian. Kehadiran IKN merupakan peluang strategis untuk mempercepat pembangunan sektor pertanian, menjadikannya lebih modern,

berdaya saing, dan terintegrasi dengan sistem logistik dan pasar perkotaan yang semakin berkembang.

Disamping adanya peluang-peluang diatas, juga terdapat beberapa tantangan di dalam pembangunan pertanian antara lain:

1. Ketergantungan Pangan dari luar daerah

Tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar provinsi, baik untuk komoditas pangan pokok seperti beras, maupun komoditas hortikultura seperti cabai, bawang, sayur mayur, dan buah-buahan. Data distribusi dan logistik pangan menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan konsumsi pangan di Kaltim masih dipasok dari provinsi lain seperti Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan Kalimantan Selatan.

2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang semakin nyata dirasakan di tingkat lokal, termasuk di Kalimantan Timur. Sektor pertanian adalah salah satu sektor paling rentan terhadap dampak perubahan iklim karena sangat bergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan sumber daya alam. Di tengah upaya Kaltim untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan, perubahan iklim menjadi hambatan serius yang dapat mengancam produktivitas, keberlanjutan usaha tani, dan kesejahteraan petani.

3. SDM Petani

Sumber daya manusia petani merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan pertanian. Namun, di Kalimantan Timur, kualitas dan struktur SDM pertanian saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, yang dapat menghambat pencapaian tujuan kemandirian dan daya saing sektor pertanian daerah. Struktur petani di Kaltim sebagian besar berada pada usia tua (>45 tahun) dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga

menyebabkan terbatasnya inovasi ditingkat lapangan dan berdampak pada terbatasnya kemampuan dalam memahami teknologi baru, manajemen usaha tani, hingga akses informasi pasar dan pembiayaan.

4. Minimnya Pemanfaatan Teknologi Pertanian

Di Kalimantan Timur, tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi pertanian di kalangan petani masih tergolong rendah. Minimnya adopsi teknologi pertanian seperti irigasi presisi, mekanisasi pertanian, dan digitalisasi layanan masih rendah di kalangan petani. Hal ini menjadi tantangan serius dalam upaya transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim maupun dinamika pasar.

Mengacu pada permasalahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, perlu disusun formulasi isu-isu penting/strategis sehingga menjadi dasar perumusan program dan kegiatan prioritas di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2026. Adapun formulasi isu-isu penting/strategis dimaksud sebagai berikut:

1. Ketergantungan terhadap pasokan pangan luar daerah;
2. Diversifikasi Konsumsi pangan masih rendah;
3. Pengawasan keamanan pangan belum optimal;
4. Mendukung pengendalian inflasi;
5. Mendukung penurunan angka stunting;
6. *Food loss* dan *food waste* masih tinggi;
7. Ketersediaan benih unggul bersertifikat masih kurang;
8. Akses infrastruktur pertanian masih kurang;
9. Penanganan serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang belum optimal;
10. Penguatan data Tanaman Pangan dan Hortikultura berbasis geospasial belum optimal;

11. Akses petani terhadap teknologi dan informasi masih terbatas;
12. Akses pemasaran hasil produksi masih terbatas;
13. Biaya produksi tinggi; dan
14. Kelembagaan petani yang belum optimal.

Berdasarkan isu-isu penting/strategis diatas, disusun rekomendasi dan catatan penting sebagai dasar perumusan program dan kegiatan tahun 2026 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura antara lain:

1. Peningkatan produksi komoditas pangan utama melalui perluasan areal tanam, intensifikasi lahan, dan integrasi kawasan.
2. Penguatan edukasi masyarakat tentang konsumsi pangan lokal beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
3. Penguatan sistem pengawasan pangan segar asal tumbuhan melalui koordinasi lintas sektor.
4. Stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis melalui peningkatan produksi dan distribusi.
5. Sinkronisasi program pangan dengan intervensi gizi berimbang.
6. Upaya pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan melalui edukasi dan perbaikan rantai pasok.
7. Optimalisasi produksi dan distribusi benih unggul melalui penangkar lokal dan kerjasama dengan BPSB.
8. Sinkronisasi pembangunan infrastruktur pertanian dengan dinas teknis terkait.
9. Peningkatan sistem peringatan dini dan adaptasi iklim berbasis lokasi.
10. Penguatan sistem informasi berbasis spasial untuk perencanaan dan evaluasi program.
11. Perluasan layanan penyuluhan dan adopsi teknologi digital pertanian.

12. Upaya membangun konektivitas pemasaran melalui kerja sama kemitraan dan digitalisasi pasar.
13. Penurunan biaya produksi dengan efisiensi dan dukungan subsidi input produksi.
14. Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui pelatihan manajemen dan pembentukan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kalimantan Timur Tahun 2026 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.02						Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	100 %	134.168.270	
2.09.02.1.01						Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Cakupan infrastruktur kemandirian pangan yang disediakan	100 %	134.168.270	
2.09.02.1.01.0003						Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Berau, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1 Unit	47.803.706	
2.09.02.1.01.0004						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kutim, Kab.	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	86.364.564	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
							Paser, Kota Balikpapan				
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan (PPH) Harapan Konsumsi Skor Pola Pangan (PPH) Harapan Ketersediaan	89,95 Skor 97,80 Skor	2.657.574.914	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan (PPH) Harapan Konsumsi Skor Pola Pangan (PPH) Harapan Ketersediaan	89,95 Skor 97,80 Skor	1.153.173.018	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	855.269.812	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	738.509.993	
2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	260.644.528						
2.09.03.1.01.0006						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab.	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen	92.432.433	Kesepakatan Rakortekr enbang Nasional

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
							Kutim, Kab. Paser, Kota Balikpapan				
2.09.03.1.01.0007	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	161.334.349						
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1 Laporan	80.554.318	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1 Laporan	305.751.260	
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab.	Informasi harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	171.876.626	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab.	Informasi harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	126.338.744	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Paser, Kota Balikpapan					Paser, Kota Balikpapan				
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Balikpapan	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	62.391.804	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Balikpapan	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	77.428.920	
2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	118.468.187	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	136.558.636	
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	96,61 %	125.386.500	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	96,61 %	114.780.450	
2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab.	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	125.386.500	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab.	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	114.780.450	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Paser, Kota Balikpapan					Paser, Kota Balikpapan				
2.09.03.1.04	Promosi pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi		Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	1.676.918.602	Promosi pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi		Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	299.882.575	
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Dokumen	617.992.200	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	164.391.466	
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman B2SA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2 Laporan	814.608.311	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman B2SA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	106.158.699	
2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	3 Laporan	244.318.091	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	29.332.410	
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	1,90 %	1.705.909.112	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	1,90 %	1.288.973.544	
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi		FSVA	1 Laporan	118.073.891	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi		FSVA	1 Laporan	123.820.494	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimuktahirkan	2 Dokumen	118.073.891	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimuktahirkan	2 Dokumen	123.820.494	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Wilayah Rawan Pangan yang Ditangani	10 Kec	1.587.835.221	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Wilayah Rawan yang Dltangani	10 Kec	1.165.153.050	
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	915.290.986	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	770.654.004	
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	549.014.315	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	254.360.860	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab. Paser, Kota Balikpapan					Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab. Paser, Kota Balikpapan				
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	123.529.920	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	140.138.186	
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	87 %	768.410.032	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	87 %	1.199.914.795	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota		Jumlah Registrasi, Sertifikasi dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	20 Dokumen	768.410.032	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota		Jumlah Registrasi, Sertifikasi dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	23 Dokumen	1.199.914.795	
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	13 Sertifikat	94.192.413	Sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	13 Sertifikat	72.289.155	

Kode	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar	6 Dokumen	49.253.324	Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar	6 Dokumen	58.016.199	
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kab/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	54.173.137	Rekomendasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kab/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	34.324.110	
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	349.195.236	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	305.489.409	
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	174.312.320	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	445.732.950	
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	47.283.602	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	2 Dokumen	284.062.972	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	70.161.732.673	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	64.624.554.993	

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,80 Indeks				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,80 Indeks		
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90 %	985.913.511	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90 %	106.114.196	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	603.916.371	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	52.481.396	
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.575.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.518.000	
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	9.199.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.130.000	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	46.998.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20.212.800	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	319.223.940	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	29.772.000	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	91,40 %	62.286.808.630	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	91,40 %	62.083.995.468	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	325 Orang/ Bulan	61.569.053.630	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	325 Orang/ Bulan	61.692.790.268	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	462.480.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	359.760.000	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	216.697.600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21.962.000	
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bahan dokumen tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	5.239.600	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bahan dokumen tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	1.314.000	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	18 Laporan	20.258.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	18 Laporan	4.493.200	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD			
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	13.079.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3.676.000	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	48 %	56.559.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	48 %	4.963.900	
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	3.613.200	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.819.300	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.473.200	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.325.300	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	47.473.200	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.819.300	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	274.749.040	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	7.408.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	159.075.000						
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.387.020	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.604.000	
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	13.887.020	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.604.000	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	92.400.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	4.200.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.044.593.337	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	390.218.247	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	20.340.790	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5.014.460	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	1 Paket	90.501.397	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.448.383	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	29.147.240	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	16.945.404	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	18 Dokumen	3.878.400						
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	828.402.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	317.300.000	
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	72.323.510	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	9.510.000	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan BMD	90 %	3.067.095.401	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan BMD	90 %	34.188.410	
3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	523.750.000						
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	13 Unit	1.922.191.520						

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Semua Kel/Desa	Lapangan yang Disediakan								
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	558.232.589	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	17.082.688	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	62.921.292	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	17.105.722	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	1.601.198.254	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	1.581.475.850	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000						
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	454.681.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	462.047.776	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.136.517.054	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.119.428.074	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	844.814.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	416.190.922	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	135.108.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	140.176.000	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	228.188.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	180.608.000	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	121.840.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	39.182.000	
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	21.078.900	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	25.524.922	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung	Kota Samarinda, Semua	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	268.600.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung	Kota Samarinda, Semua	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	24.200.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13 Unit	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	6.500.000	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Produksi Tanaman Pangan (Ton) Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	347.814,02 Ton 493.966,02 Ton	11.513.145.115	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Produksi Tanaman Pangan (Ton) Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	347.814,02 Ton 493.966,02 Ton	3.089.013.932	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah Luas Lahan Yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan Jumlah Luas Lahan Yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura	9.250 Ha 860 Ha	11.513.145.115	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah Luas Lahan Yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan Jumlah Luas Lahan Yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura	9.250 Ha 860 Ha	3.089.013.932	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	9.457.298.923	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	2.089.657.622	Kesepakatan Rakortekr enbang Nasional
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Tanaman Pangan)	4 Dokumen	1.089.177.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Tanaman Pangan)	2 Dokumen	583.601.165	Kesepakatan Rakortekr enbang Nasional

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	3 laporan	65.497.353	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	3 laporan	65.755.260	
3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	1 laporan	799.179.067	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	1 laporan	150.000.000	
3.27.02.1.01.0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	1 laporan	101.991.972	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	1 laporan	199.999.885	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	16.415,06 Ha	2.286.851.076	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	16.415,06 Ha	710.930.925	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Tanaman Pangan Jumlah Fasilitasi Hortikultura yang diberikan	220 Unit 3 Unit	2.286.851.076	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Tanaman Pangan Jumlah Fasilitasi Hortikultura yang diberikan	220 Unit 3 Unit	710.930.925	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	605.340.475	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	104.830.445	Kesepakatan Rakortekrenbang Nasional
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	41.780.760	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	8.916.080	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	41.780.760	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	8.916.080	
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. PPU, Kab. Mahulu Ulu, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab. Paser, Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	492.507.622						
3.27.03.1.01.0013						Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	350 Ha	88.272.040	Kesepakan Rakortekr enbang Nasional

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.03.1.01.0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3 Unit	105.783.099						
3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditingkat Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi (Tanaman Pangan)	2 Dokumen	999.658.360	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditingkat Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi (Tanaman Pangan)	1 Dokumen	499.996.280	
	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 82,80 Indeks	4.369.225.574	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 82,80 Indeks	1.927.245.217	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	91,40 %	90.600.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	91,40 %	90.600.000	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	90.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	90.600.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	311.236.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	124.440.000	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	74.236.000						
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	237.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	124.440.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	185.654.332	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	243.568.534	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.508.942	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.511.999	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	38.827.390	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	29.680.832	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.518.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.125.703	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	196.250.000	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	90 %	2.522.642.066	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	90 %	278.521.521	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	2.378.833.367	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.851.654	
3.27.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	73.824.694	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	262.669.867	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 Unit	69.984.005						
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	799.281.280	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	833.271.162	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.500.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	217.380.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	252.612.300	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	577.401.280	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	577.158.862	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	459.811.896	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	356.844.000	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	50.130.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	87.358.000	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	32.322.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	28.670.000	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	377.359.896	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	240.816.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi	100 %	1.120.314.425	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi (%)	100 %	4.607.835.066	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan sertifikat Kompetensi/ Rekomendasi	217 Sertifikat Kompetensi/ Rekomendasi	1.059.884.425	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan sertifikat Kompetensi/ Rekomendasi	245 Sertifikat Kompetensi/ Rekomendasi	455.134.521	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah Sertifikat Benih	100 Sertifikat	563.685.219	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah Sertifikat Benih	125 Sertifikat	109.300.419	
3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	60 Laporan	263.609.604	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	60 Laporan	121.505.985	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	60 Laporan	232.589.602	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	60 Laporan	224.328.117	
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai	3 Varietas	60.430.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai	3 Varietas	4.152.700.545	
3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kota Samarinda, Semua Kec., Semua Kel/Desa Kab. Kutim, Semua Kec. Semua Kel/Desa	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	60.430.000	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kota Samarinda, Semua Kec., Semua Kel/Desa Kab. Kutim, Semua Kec. Semua Kel/Desa	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	6 Varietas Unggul Baru (VUB)	4.152.700.545	Jospol 1 - Lab. DNA
	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura					UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura					
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 82,80 Indeks	4.235.066.221	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83,60 Indeks	2.553.444.477	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	88%	88.560.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	88%	78.960.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Dokumen	88.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Dokumen	78.960.000	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	83 %	202.710.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	83 %	14.040.000	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	172.710.000						
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	14.040.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83,55	524.265.878	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83,55	141.647.462	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.989.250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.351.650	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.347.824	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.237.830	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.920.908	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.777.984	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.499.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	248.508.696	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	89.299.998	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	84 %	668.952.637	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	84 %	729.845.000	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	668.952.637						
3.27.01.1.07.0010						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	729.845.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	89.07 %	1.420.346.626	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	89.07 %	1.407.437.782	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000						
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	320.084.292	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	325.907.492	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.097.262.334	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.081.530.290	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	88.75 %	1.330.231.080	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	88.75 %	181.514.233	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	113.303.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	84.970.000	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	64.098.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	34.035.819	
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Samarinda, Samarinda Utara,	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	14.468.180	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Samarinda, Samarinda Utara,	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	11.308.414	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Sempaja Timur					Sempaja Timur				
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	1.138.361.900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	51.200.000	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	50 %	708.421.088	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk (%)	50 %	446.361.965	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi	50 Kios	291.860.537	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi	50 Kios	59.400.000	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	50 Laporan	291.860.537	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	50 Laporan	59.400.000	
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi	11 Laporan	416.560.551	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi	11 Laporan	386.961.965	
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	11 Laporan	416.560.551	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	11 Laporan	386.961.965	

Kode	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani (%)	90 %	1.550.356.983	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani	90 %	104.380.200	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI	15.260 Ha	1.550.356.983	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI	15.260 Ha	104.380.200	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15.200 Ha	1.444.139.728	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15.200 Ha	65.189.400	
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	60 Ha	106.217.255	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	60 Ha	39.190.800	
	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura					UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura					

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 82,80 Indeks	3.901.704.993	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 82,80 Indeks	3.525.765.330	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	100 %	105.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	100 %	105.960.000	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	105.960.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	105.960.000	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	417.470.900	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	150.480.000	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kukar, Kab. Kubar, Kab. Kutim, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	192.470.900						
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kota Bontang, Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	15 Orang	225.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kota Bontang, Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	20 Orang	150.480.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	311.993.223	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	269.346.512	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.960.042	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.927.909	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.036.131	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.666.587	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.397.050	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.103.656	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	261.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	234.648.360	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	dan Konsultasi SKPD			dan Konsultasi SKPD	Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	dan Konsultasi SKPD			
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	100 %	1.025.844.358	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	100 %	971.837.627	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	147.081.930	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	66.131.524	
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	878.762.428	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	905.706.103	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	1.281.305.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	1.481.045.811	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	382.545.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	344.045.811	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	893.760.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.134.000.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	759.131.412	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	547.095.380	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	191.050.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	167.662.400	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	228.080.812	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	169.432.980	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	340.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	210.000.000	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	100 % 53 %	1.914.001.294	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	100 % 55 %	1.857.984.286	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat	985 Ha	1.914.001.294	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat	985 Ha	1.857.984.286	
3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	20.000 Batang	1.278.650.871	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	50.000 Batang	1.230.192.610	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	18 Ton	635.350.423	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara,	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	22 Ton	627.791.676	Kesepakatan Rakortekr enbang Nasional

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
							Loa Janan, Batuah				
	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 82,80 Indeks	3.828.593.825	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 82,80 Indeks	1.958.710.392	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	90 %	93.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	90 %	71.760.000	
3.27.01.1.03.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	93.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	71.760.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	153.741.946	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	129.468.866	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.856.016	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.413.528	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.408.054	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	22.685.834	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.943.060	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.969.500	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	105.534.816	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	91.400.004	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	90 %	732.156.520	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	90 %	252.863.450	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	64.839.520	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.951.200	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	667.317.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	249.912.250	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	1.182.664.704	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	1.023.750.128	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	265.847.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	197.594.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	906.817.204	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	826.156.128	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	1.667.030.655	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	480.867.948	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	101.921.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	97.563.200	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	42.741.155	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	23.650.000	
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	106.560.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	3.681.448	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.415.808.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	355.973.300	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian		Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	78 %	2.414.333.675	Program Penyuluhan Pertanian		Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	78 %	2.657.487.590	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan	330 Orang	1.878.946.178	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan	330 Orang	265.977.392	
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Unit	602.640.588	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	30 Unit	167.939.694	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	300 Orang	1.276.305.590	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	30 Orang	98.037.698	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian	9 Laporan	535.387.497	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian	9 Laporan	2.391.510.198	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	330.507.441	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	2.293.834.802	Penas KTNA 2026
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	9 Kelompok	204.880.056	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	6 Kelompok	97.675.396	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan terhadap Rancangan RKPD 2026 pada Tabel 2.3 diatas, terdapat beberapa penyesuaian terhadap program, kegiatan, sub kegiatan meliputi indikator kinerja, target capaian, dan kebutuhan dana dari sebesar Rp.113.135.641.000,00 menjadi Rp.91.839.944.000,00. Adapun detil hasil analisis kebutuhan sebagai berikut:

1. Penambahan Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi, serta 2 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik. Penambahan program, kegiatan dan 2 sub kegiatan diatas dalam rangka kebutuhan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan.
2. Penambahan Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Penambahan sub kegiatan dimaksud untuk mengakomodir Kesepakatan Rakortekrenbang Nasional Tahun 2026.
3. Penambahan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian. Penambahan sub kegiatan dimaksud untuk mengakomodir Kesepakatan Rakortekrenbang Nasional Tahun 2026.

4. Penambahan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target 1 Unit pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di UPTD PTPH. Penambahan sub kegiatan dimaksud untuk mendukung capaian kinerja UPTD PTPH.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di Bidang Pangan dan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dilakukan mengacu pada mekanisme perencanaan sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat disampaikan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pangan dan urusan pertanian di kabupaten/kota untuk diverifikasi, direkapitulasi dan rekomendasikan kepada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian dibahas melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Usulan-usulan tersebut kemudian diseleksi sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan pada Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur. Setelah mendapat pagu dana indikatif, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tetap berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan pangan dan pertanian di kabupaten/kota untuk mengalokasikan usulan tersebut.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 yang telah disesuaikan dengan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan urusan provinsi tersaji dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur**

Perangkat Daerah : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Teluk Muda RT.02 Kecamatan Kenohan Kab. Kutai Kartanegara Kaltim	Jumlah Benih Jumlah Kapur	2.600 Batang 21 Zak	Benih Pisang Dolomite

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan diatas berwujud permohonan bantuan sarana pertanian meliputi penyediaan benih dan kapur/dolomite Hortikultura. Usulan telah berkesesuaian dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu pada peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, selain mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta keterkaitannya dengan target kinerja dalam Renstra, juga dilakukan penelaahan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional tahun 2026 sebagaimana yang termaktub di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua pelaksanaan agenda pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berkenaan dengan hal tersebut, pembangunan Nasional tahun 2026 diarahkan pada tema **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**, dengan fokus pembangunan nasional terjabar dalam 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) dan 320 program kerja.

Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional sebagai berikut:

- Prioritas 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- Prioritas 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui **swasembada pangan**, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

- Prioritas 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Prioritas 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
- Prioritas 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Prioritas 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Prioritas 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
- Prioritas 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Relevansi Asta Cita prioritas 2 diatas dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu pada : (1). Peningkatan produksi pangan lokal untuk mendukung **swasembada pangan nasional**, (2). Pengembangan **pertanian ramah lingkungan (ekonomi hijau)**, (3). Revitalisasi infrastruktur irigasi, embung, dan sistem pengairan pertanian, dan (4). Mendorong **ketahanan pangan berbasis lokal**.

Adapun arah kebijakan tahun 2026 berdasarkan RKPD Kaltim Tahun 2026 mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan sektor ekonomi pada penguatan sektor industri berbasis komoditas unggulan, penyiapan kawasan industri, dan pengembangan hilirisasi industri sebagai fondasi ekonomi inklusif. Adapun tema pembangunan tahun 2026 yaitu : *Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.*

Terhadap tema pembangunan tahun 2026 diatas, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mendukung pada aspek Ekonomi Produktif dan Inklusif melalui penguatan/peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian hortikultura berbasis kawasan guna mendukung pengembangan hilirisasi industri sebagai fondasi ekonomi inklusif.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, tanaman pangan, dan hortikultura yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan, dengan fungsi meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan produksi dan distribusi, pengelolaan cadangan dan stabilisasi harga pangan, peningkatan konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan mutu benih, serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi diatas, maka dukungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi Kaltim Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Mendukung swasembada dan kedaulatan pangan nasional;
2. Mendukung program Makan Gizi Gratis (MBG) melalui program pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT), pembinaan pelaku usaha pangan, serta penguatan kapasitas laboratorium dan petugas pengawas mutu;
3. Memperkuat ketahanan dan cadangan pangan;
4. Mendukung ekonomi hijau dan inklusif (pertanian ramah lingkungan);
5. Menumbuhkan kelembagaan petani dan kewirausahaan pertanian;
6. Mengembangkan komoditas unggulan daerah;
7. Mendukung pembangunan infrastruktur pertanian;
8. Peningkatan kualitas SDM pertanian;
9. Mendorong hilirisasi dan daya saing produk pangan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renja tahun 2026 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur didasarkan atas rumusan isu-isu penting yang muncul dari pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, khususnya pada Bab XII Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Isu-isu strategis tersebut meliputi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah, peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura,

penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan, serta pemberdayaan petani dan pelaku usaha pangan berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Isu-isu ini mencerminkan fokus utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, tanaman pangan, dan hortikultura.

Tujuan dan sasaran yang dirumuskan dari isu-isu tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, sehingga seluruh program dan kegiatan yang dirancang memiliki kesesuaian dengan mandat organisasi serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Dengan pendekatan ini, diharapkan perencanaan pembangunan sektor pangan, tanaman pangan, dan hortikultura dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan daerah. Adapun kinerja utama Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Barat Tahun 2026 disajikan pada pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2026
A.	<u>Tujuan :</u> Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada	LPE Subsektor Tanaman Pangan (%)	1,64
		LPE Subsektor Hortikultura (%)	1,88
		Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita terhadap Produksi Bersih Pangan (%)	70
		Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas	27,58

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2026
		Rumah Kaca dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	
1.	<u>Sasaran 1 :</u> Meningkatnya Daya Saing dan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produktivitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	4,95
		Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ton/Ha)	18,86
		NTP Tanaman Pangan (%)	103,44
		NTP Tanaman Hortikultura (%)	114,03
2.	<u>Sasaran 2 :</u> Tercukupinya Kebutuhan Pangan Secara Kuantitas dan Kualitas	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	5,79
3.	<u>Sasaran 3 :</u> Meningkatnya Upaya Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Emisi GRK sub sektor tanaman pangan dan hortikultura (Ton CO2e)	260.295,74
4.	<u>Sasaran 4 :</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75,52
		Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90,46

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis yang bersumber dari kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sektor pangan dan pertanian.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam perumusan program dan kegiatan di dalam Renja Dinas Pangan,

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 meliputi:

1. Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kaltim Tahun 2025-2029 dan RKPD Kaltim Tahun 2026.
2. Pencapaian program nasional (Swasembada Pangan dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis).
3. Ketahanan dan cadangan pangan.
4. Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Penyediaan benih bermutu Tanaman Pangan dan Hortikultura.
6. Pengawasan peredaran benih dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.
7. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
8. Peningkatan kualitas SDM pertanian.

Lebih lanjut di dalam pelaksanaan Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 akan melaksanakan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029 yaitu **program unggulan Jospol 1 - Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern**, dengan 4 (empat) kegiatan unggulan yang tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikasi Kegiatan Unggulan Jospol 1
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

No.	Kegiatan Unggulan	Lokasi Indikasi	Pagu Indikatif 2026-2029 (Rp.)	Pagu 2026 (Rp.)
1.	Pengembangan Kawasan Tanaman Pisang	1. Kutai Timur 2. Kutai Kartanegara 3. Paser	4.000.000.000	800.000.000

2.	Pembangunan Workshop Produksi Pupuk Organik Pertanian	Samarinda	9.300.000.000	1.000.000.000
3.	Pendirian Laboratorium DNA pemuliaan Tanaman	Samarinda	5.100.000.000	4.000.000.000
4.	Pendirian Laboratorium Keamanan Pangan (mendukung generasi emas)	Samarinda	13.500.000.000	1.000.000.000

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja, maka langkah selanjutnya yaitu menuangkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang terdiri dari 9 program, 48 Kegiatan, dan 132 Sub Kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp.91.839.944.000,00 sebagaimana yang tersaji pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027**

Perangkat Daerah : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				72.200.729.477				77.540.913.850
2	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				3.776.229.627				2.330.650.747
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				3.776.229.627				2.330.650.747
2.09.02	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		100 %	134.168.270			-	-
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan infrastruktur kemandirian pangan yang disediakan		100 %	134.168.270			-	-
2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Berau, Kab. Paser, Kota Balikpapan	1 Unit	47.803.706	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.02.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	1 Laporan	86.364.564	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan (PPH) Harapan Konsumsi Skor Pola Pangan (PPH) Harapan Ketersediaan		89,95 Skor 97,80 Skor	1.153.173.018			90,40 Skor 97,85 Skor	1.668.919.397
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan		12 Laporan	738.509.993			12 Laporan	92.000.000
2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara,	1 Dokumen	92.432.433	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Dokumen	92.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan						
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	1 Laporan	305.751.260	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam	1 Laporan	126.338.744	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan						
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Balikpapan	1 Dokumen	77.428.920	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser,	1 Dokumen	136.558.636	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kota Balikpapan						
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia		96,61 %	114.780.450			-	-
2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	1 Laporan	114.780.450	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
2.09.03.1.04	Promosi pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi	Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		3 Media	299.882.575			3 Media	1.576.919.397
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	Jumlah promosi Penganekaragaman	Semua Kota/Kab, Semua	1 Dokumen	164.391.466	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Dokumen	617.992.566

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kecamatan, Semua Kel/Desa						
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman B2SA	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	106.158.699	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Laporan	714.608.300
2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	29.332.410	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Laporan	244.318.531
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		1,90 %	1.288.973.544			-	-
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	FSVA		1 Laporan	123.820.494			-	-
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimuktahirkan	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab.	2 Dokumen	123.820.494	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan						
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan yang Ditangani		10 Kec	1.165.153.050			-	-
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	770.654.004	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara,	1 Laporan	254.360.860	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan						
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	1 Dokumen	140.138.186	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan		87 %	1.199.914.795			87 %	661.731.350
2.09.05.1.01	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Registrasi, Sertifikasi dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar		23 Dokumen	1.199.914.795			23 Dokumen	661.731.350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Sertifikat	72.289.155	Dana Bagi Hasil (DBH)		13 Sertifikat	68.329.444
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	58.016.199	Dana Bagi Hasil (DBH)		6 Dokumen	44.898.130
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kab/kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	34.324.110	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Dokumen	47.352.631
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	305.489.409	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Dokumen	309.909.568
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	445.732.950	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Dokumen	154.352.415

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan	2 Dokumen	284.062.972	Dana Bagi Hasil (DBH)		2 Dokumen	36.889.162
3	Urusan Pemerintahan Pilihan				68.424.499.850				75.210.263.103
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				68.424.499.850				75.210.263.103
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		100 % 82,80 Indeks	64.624.554.993			100 % 83,60 Indeks	67.587.387.374
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		90 %	106.114.196			90 %	994.421.511
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	52.481.396	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Dokumen	577.624.371
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Kota Samarinda, Semua	2 Dokumen	1.518.000	Kota Samarinda, Semua		2 Dokumen	6.575.700

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan, Semua Kel/Desa			Kecamatan, Semua Kel/Desa			
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.130.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen	9.199.500
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	20.212.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Laporan	46.998.000
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	29.772.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Laporan	354.023.940
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		91,40 %	62.083.995.468			91,50 %	62.304.807.561
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325 Orang/ Bulan	61.692.790.268	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		325 Orang/ Bulan	61.569.051.861

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	359.760.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	462.480.000
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	21.962.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	234.697.600
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan dokumen tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1.314.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Dokumen	5.239.600
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	4.493.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		18 Laporan	20.258.900
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Realisasi Anggaran	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	4 Dokumen	3.676.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,		4 Dokumen	13.079.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa			Semua Kel/Desa			
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik		48 %	4.963.900			49 %	56.559.600
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.819.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	3.613.200
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.325.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	5.473.200
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.819.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	47.473.200
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		85 %	7.408.000			86 %	115.674.040
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	1.604.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,		1 Dokumen	9.387.020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa			Semua Kel/Desa			
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.604.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	13.887.020
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	4.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		20 Orang	92.400.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik		90 %	390.218.247			90 %	1.072.412.627
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Paket	5.014.460	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		15 Paket	20.340.790
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	41.448.383	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Paket	97.190.087

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Paket	16.945.404	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		35 Paket	27.264.240
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	317.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Laporan	855.294.000
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	9.510.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6 Dokumen	72.323.510
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD		90 %	34.188.410			90 %	621.153.881
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	17.082.688	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6 Unit	558.232.589

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	17.105.722	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Unit	62.921.292
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		90 %	1.581.475.850			90 %	1.593.928.254
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	462.047.776	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	457.411.200
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.119.428.074	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	1.136.517.054
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		90 %	416.190.922			90 %	828.429.900
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	140.176.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		17 Unit	135.108.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Unit	180.608.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		28 Unit	235.803.000
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42 Unit	39.182.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		50 Unit	121.840.000
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	25.524.922	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Unit	21.078.900
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	24.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Unit	268.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	6.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Unit	46.000.000
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Tanaman Pangan (Ton) Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)		347.814,02 Ton 493.966,02 Ton	3.089.013.932			351.918,23 Ton 523.603,98 Ton	6.214.078.515
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan Yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan Jumlah Luas Lahan Yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura		9.250 Ha 860 Ha	3.089.013.932			9.250 Ha 860 Ha	6.214.078.515
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2.089.657.622	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Laporan	4.740.566.615
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Tanaman Pangan)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	583.601.165	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen	458.835.480

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 laporan	65.755.260	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	65.497.353
3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 laporan	799.179.067
3.27.02.1.01.0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	199.999.885	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 laporan	150.000.000
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)		16.415,06 Ha	710.930.925			21.415,06 Ha	1.408.797.214
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Pangan Jumlah Fasilitasi Hortikultura yang diberikan		220 Unit 3 Unit	710.930.925			220 Unit 3 Unit	1.408.797.214
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	104.830.445	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,		1 Dokumen	237.215.495

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa			Semua Kel/Desa			
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.916.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	41.780.760
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.916.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	41.780.760
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser,	350 Ha	88.272.040	Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab.		350 Ha	88.361.839

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan			Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan			
3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi (Tanaman Pangan)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	499.996.280	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	999.658.360
	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura				6.535.080.283				-
3	Urusan Pemerintahan Pilihan				6.535.080.283				-
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				6.535.080.283				-
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		100 % 82,80 Indeks	1.927.245.217			100 % 83,60 Indeks	-
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		91,40 %	90.600.000			-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	90.600.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		85 %	124.440.000			-	-
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Orang	124.440.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		90 %	243.568.534			-	-
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	5.511.999	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	12 Paket	29.680.832	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	12.125.703	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	12 Laporan	196.250.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD		90 %	278.521.521			-	-
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	15.851.654	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	262.669.867	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		90 %	833.271.162			-	-
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.500.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	252.612.300	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	577.158.862	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		90 %	356.844.000			-	-
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	87.358.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 Unit	28.670.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	12 Unit	240.816.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi (%)		100 %	4.607.835.066			-	-
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan sertifikat Kompetensi/Rekomendasi		245 Sertifikat Kompetensi/ Rekomendasi	455.134.521			-	-
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser,	125 Sertifikat	109.300.419	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kota Balikpapan						
3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	60 Laporan	121.505.985	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	60 Laporan	224.328.117	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai		3 Varietas	4.152.700.545			-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	Kota Samarinda, Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Varietas Unggul Baru (VUB)	4.152.700.545	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				3.104.186.642				88.560.000
3	Urusan Pemerintahan Pilihan				3.104.186.642				88.560.000
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				3.104.186.642				88.560.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		100 % 83,60 Indeks	2.553.444.477				88.560.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran		88%	78.960.000			88 %	88.560.000
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	1 Dokumen	78.960.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Dokumen	88.560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		83 %	14.040.000			-	-
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	14.040.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		83,55	141.647.462			-	-
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	1 Paket	6.351.650	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	1 Paket	38.237.830	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara,	2 Paket	5.777.984	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sempaja Timur						
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	1 Dokumen	1.980.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	89.299.998	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD		84 %	729.845.000			-	-
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	729.845.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		89.07 %	1.407.437.782			-	-
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	1 Laporan	325.907.492	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	2 Laporan	1.081.530.290	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		88.75 %	181.514.233			-	-
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	5 Unit	84.970.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	55 Unit	34.035.819	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	3 Unit	11.308.414	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda, Samarinda Utara,	3 Unit	51.200.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sempaja Timur						
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk		50 %	446.361.965			-	-
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi		50 Kios	59.400.000			-	-
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	59.400.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi		11 Laporan	386.961.965			-	-
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	386.961.965	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani		90 %	104.380.200			-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI		15.260 Ha	104.380.200			-	-
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.200 Ha	65.189.400	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Ha	39.190.800	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura				5.383.749.616				5.638.761.207
3	Urusan Pemerintahan Pilihan				5.383.749.616				5.638.761.207
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				5.383.749.616				5.638.761.207
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		100 % 82,80 Indeks	3.525.765.330			100 % 83,60 Indeks	3.688.800.235
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		100 %	105.960.000			100 %	105.960.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	12 Dokumen	105.960.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		12 Dokumen	105.960.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100 %	150.480.000			100 %	225.000.000
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	20 Orang	150.480.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		20 Orang	225.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik		100 %	269.346.512			100 %	306.276.336
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara,	2 Paket	9.927.909	Dana Bagi Hasil (DBH)		2 Paket	4.243.155

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Loa Janan, Batuah						
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	12 Paket	21.666.587	Dana Bagi Hasil (DBH)		12 Paket	36.036.131
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	1 Paket	3.103.656	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Paket	4.397.050
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	12 Laporan	234.648.360	Dana Bagi Hasil (DBH)		12 Laporan	261.600.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD		100 %	971.837.627			100 %	1.025.903.187

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	15 Unit	66.131.524	Dana Bagi Hasil (DBH)		15 Unit	147.081.930
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	22 Unit	905.706.103	Retribusi Daerah - LRA, Dana Bagi Hasil (DBH)		22 Unit	878.821.257
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		100 %	1.481.045.811			100 %	1.266.497.100
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	1 Laporan	3.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Laporan	5.000.000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai	1 Laporan	344.045.811	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Laporan	382.545.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Air dan Listrik yang Disediakan	Kartanegara, Loa Janan, Batuah						
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	1 Laporan	1.134.000.000	Retribusi Daerah - LRA, Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Laporan	878.952.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		100 %	547.095.380			100 %	759.163.612
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	7 Unit	167.662.400	Dana Bagi Hasil (DBH)		7 Unit	191.080.000
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	59 Unit	169.432.980	Dana Bagi Hasil (DBH)		59 Unit	228.083.612

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	10 Unit	210.000.000	Retribusi Daerah - LRA, Dana Bagi Hasil (DBH)		10 Unit	340.000.000
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura		100 % 55 %	1.857.984.286			100 % 55 %	1.949.960.972
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat		985 Ha	1.857.984.286			990 Ha	1.949.960.972
3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	50.000 Batang	1.230.192.610	Retribusi Daerah - LRA, Dana Bagi Hasil (DBH)		55.000 Batang	1.230.519.221
3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga	22 Ton	627.791.676	Retribusi Daerah - LRA, Dana		50 Ton	719.441.751

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			Bagi Hasil (DBH)			
	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				4.616.197.982				5.282.606.516
3	Urusan Pemerintahan Pilihan				4.616.197.982				5.282.606.516
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				4.616.197.982				5.282.606.516
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan		100 % 82,80 Indeks	1.958.710.392			100 % 83,60 Indeks	2.482.606.516
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran		90 %	71.760.000			90 %	93.000.000
3.27.01.1.03.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	71.760.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		12 Dokumen	93.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		90 %	129.468.866			90 %	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	11.413.528	Dana Bagi Hasil (DBH)			-
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	22.685.834	Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH)			50.000.000
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.969.500	Dana Bagi Hasil (DBH)			5.000.000
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	91.400.004	Dana Bagi Hasil (DBH)			-
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD		90 %	252.863.450			90 %	667.317.000
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	1 Unit	2.951.200	Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Unit	667.317.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa						
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	249.912.250	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Unit	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		95 %	1.023.750.128			95 %	896.640.000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	197.594.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		12 Laporan	-
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	826.156.128	Dana Bagi Hasil (DBH)		12 Laporan	896.640.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		90 %	480.867.948			90 %	770.649.516
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	16 Unit	97.563.200	Dana Bagi Hasil (DBH)		16 Unit	107.811.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kel/Desa						
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Unit	23.650.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		26 Unit	30.000.000
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	3.681.448	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Unit	106.560.000
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	355.973.300	Dana Bagi Hasil (DBH)		2 Unit	526.278.016
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan		78 %	2.657.487.590			78,50 %	2.800.000.000
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan		330 Orang	265.977.392			90 Orang	2.215.000.000
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	30 Unit	167.939.694	Dana Bagi Hasil (DBH)		30 Unit	869.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa						
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	98.037.698	Dana Bagi Hasil (DBH)		30 Orang	1.345.500.000
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian		9 Laporan	2.391.510.198			9 Laporan	585.000.000
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.293.834.802	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Dokumen	265.000.000
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Kelompok	97.675.396	Dana Bagi Hasil (DBH)		6 Kelompok	320.000.000
				JUMLAH	91.839.944.000				88.550.841.573

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun sebagai acuan operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, dengan tetap berpijak pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023. Berdasarkan regulasi tersebut, Dinas memiliki mandat strategis dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, yang mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan teknis, serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan, dan pengembangan komoditas pangan, tanaman pangan, serta hortikultura yang berkelanjutan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2026 ini memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, yang mengangkat tema ***“Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”***. Tema tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan transformasi struktural di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian dan ketahanan pangan, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkualitas, dan berkelanjutan. Dalam kerangka itu, sektor pangan dan pertanian diposisikan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi produktif dan inklusif, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga menjamin

ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 direncanakan melaksanakan 9 program, 48 Kegiatan, dan 132 Sub Kegiatan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan total rencana pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp.91.839.944.000,00. Adapun pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 seperti yang tercantum dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				72.200.729.477
2	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				3.776.229.627
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				3.776.229.627
2.09.02	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		100 %	134.168.270
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan infrastruktur kemandirian pangan yang disediakan		100 %	134.168.270
2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Berau, Kab. Paser, Kota Balikpapan	1 Unit	47.803.706
2.09.02.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	1 Laporan	86.364.564
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan (PPH) Harapan Konsumsi Skor Pola Pangan (PPH) Harapan Ketersediaan		89,95 Skor 97,80 Skor	1.153.173.018

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan		12 Laporan	738.509.993
2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	1 Dokumen	92.432.433
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	1 Laporan	305.751.260
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	1 Laporan	126.338.744
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Balikpapan	1 Dokumen	77.428.920

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	1 Dokumen	136.558.636
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia		96,61 %	114.780.450
2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	1 Laporan	114.780.450
2.09.03.1.04	Promosi pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi	Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		3 Media	299.882.575
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	Jumlah promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	164.391.466
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman B2SA	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	106.158.699
2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	29.332.410

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		1,90 %	1.288.973.544
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	FSVA		1 Laporan	123.820.494
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimuktahirkan	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	2 Dokumen	123.820.494
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan yang Ditangani		10 Kec	1.165.153.050
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	770.654.004
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	1 Laporan	254.360.860

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	1 Dokumen	140.138.186
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan		87 %	1.199.914.795
2.09.05.1.01	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Registrasi, Sertifikasi dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar		23 Dokumen	1.199.914.795
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Sertifikat	72.289.155
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	58.016.199
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kab/kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	34.324.110
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	305.489.409
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	445.732.950

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan	2 Dokumen	284.062.972
3	Urusan Pemerintahan Pilihan				68.424.499.850
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				68.424.499.850
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		100 % 82,80 Indeks	64.624.554.993
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		90 %	106.114.196
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	52.481.396
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.518.000
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.130.000
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	20.212.800
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	29.772.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		91,40 %	62.083.995.468
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325 Orang/ Bulan	61.692.790.268
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	359.760.000
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	21.962.000
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan dokumen tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1.314.000
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	4.493.200
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	3.676.000
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik		48 %	4.963.900
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.819.300
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.325.300

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.819.300
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		85 %	7.408.000
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.604.000
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.604.000
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	4.200.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik		90 %	390.218.247
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Paket	5.014.460
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	41.448.383
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Paket	16.945.404
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	317.300.000
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	9.510.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD		90 %	34.188.410
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	17.082.688
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	17.105.722
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		90 %	1.581.475.850
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	462.047.776
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.119.428.074
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		90 %	416.190.922
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	140.176.000
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Unit	180.608.000
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42 Unit	39.182.000
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	25.524.922

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	24.200.000
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	6.500.000
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Tanaman Pangan (Ton) Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)		347.814,02 Ton 493.966,02 Ton	3.089.013.932
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan Yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan Jumlah Luas Lahan Yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura		9.250 Ha 860 Ha	3.089.013.932
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2.089.657.622
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Tanaman Pangan)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	583.601.165
3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 laporan	65.755.260
3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	150.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.02.1.01.0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	199.999.885
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)		16.415,06 Ha	710.930.925
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Tanaman Pangan Jumlah Fasilitas Hortikultura yang diberikan		220 Unit 3 Unit	710.930.925
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	104.830.445
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.916.080
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.916.080
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Samarinda,	350 Ha	88.272.040

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Samarinda Kota, Pelabuhan		
3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi (Tanaman Pangan)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	499.996.280
	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura				6.535.080.283
3	Urusan Pemerintahan Pilihan				6.535.080.283
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				6.535.080.283
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		100 % 82,80 Indeks	1.927.245.217
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		91,40 %	90.600.000
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	90.600.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		85 %	124.440.000
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Orang	124.440.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		90 %	243.568.534
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	5.511.999

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	12 Paket	29.680.832
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	12.125.703
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	12 Laporan	196.250.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD		90 %	278.521.521
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	15.851.654
3.27.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	262.669.867
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		90 %	833.271.162
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.500.000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	252.612.300
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	577.158.862

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		90 %	356.844.000
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	87.358.000
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 Unit	28.670.000
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	12 Unit	240.816.000
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi		100 %	4.607.835.066
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan sertifikat kompetensi/Rekomendasi		245 Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi	455.134.521
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	125 Sertifikat	109.300.419
3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	60 Laporan	121.505.985
3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi,	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Berau,	60 Laporan	224.328.117

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan		
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai		3 Varietas	4.152.700.545
3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Varietas Unggul Baru (VUB)	4.152.700.545
	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				3.104.186.642
3	Urusan Pemerintahan Pilihan				3.104.186.642
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				3.104.186.642
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		100 % 83,60 Indeks	2.553.444.477
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran		88%	78.960.000
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	1 Dokumen	78.960.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		83 %	14.040.000
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	14.040.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		83,55	141.647.462
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	1 Paket	6.351.650
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	1 Paket	38.237.830
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	2 Paket	5.777.984
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	1 Dokumen	1.980.000
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	89.299.998
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD		84 %	729.845.000
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	729.845.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		89.07 %	1.407.437.782
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	1 Laporan	325.907.492
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	2 Laporan	1.081.530.290

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		88.75 %	181.514.233
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	5 Unit	84.970.000
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	55 Unit	34.035.819
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	3 Unit	11.308.414
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	3 Unit	51.200.000
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk		50 %	446.361.965
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi		50 Kios	59.400.000
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	59.400.000
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi		11 Laporan	386.961.965
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	386.961.965
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani		90 %	104.380.200

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI		15.260 Ha	104.380.200
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.200 Ha	65.189.400
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Ha	39.190.800
	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura				5.383.749.616
3	Urusan Pemerintahan Pilihan				5.383.749.616
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				5.383.749.616
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		100 % 82,80 Indeks	3.525.765.330
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		100 %	105.960.000
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	12 Dokumen	105.960.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100 %	150.480.000
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kota Balikpapan	20 Orang	150.480.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik		100 %	269.346.512
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	2 Paket	9.927.909
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	12 Paket	21.666.587
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	1 Paket	3.103.656
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	12 Laporan	234.648.360
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD		100 %	971.837.627
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	15 Unit	66.131.524
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	22 Unit	905.706.103
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		100 %	1.481.045.811

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	1 Laporan	3.000.000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	1 Laporan	344.045.811
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	1 Laporan	1.134.000.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		100 %	547.095.380
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	7 Unit	167.662.400
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	59 Unit	169.432.980
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	10 Unit	210.000.000
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan		100 %	1.857.984.286
		Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura		55 %	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat		985 Ha	1.857.984.286

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	50.000 Batang	1.230.192.610
3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	22 Ton	627.791.676
	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				4.616.197.982
3	Urusan Pemerintahan Pilihan				4.616.197.982
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				4.616.197.982
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		100 % 82,80 Indeks	1.958.710.392
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran		90 %	71.760.000
3.27.01.1.03.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	71.760.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		90 %	129.468.866
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	11.413.528
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	22.685.834

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.969.500
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	91.400.004
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD		90 %	252.863.450
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	2.951.200
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	249.912.250
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		95 %	1.023.750.128
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	197.594.000
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	826.156.128
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		90 %	480.867.948
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	97.563.200
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Unit	23.650.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	3.681.448
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	355.973.300
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan		78 %	2.657.487.590
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan		330 Orang	265.977.392
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	167.939.694
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	98.037.698
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian		9 Laporan	2.391.510.198
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.293.834.802
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Kelompok	97.675.396
JUMLAH					91.839.944.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Renja Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun sebagai pedoman kerja untuk mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahunan pada bidang urusan pangan dan bidang urusan pertanian tahun 2026.

Dalam upaya menjamin terlaksananya program dan kegiatan, serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan diantara seluruh pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 secara efektif dan efisien;
2. Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2026 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) T.A 2026;

3. Penyusunan Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - c. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
4. Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pangan dan bidang urusan pertanian di Provinsi Kalimantan Timur.

RENJA TAHUN 2026 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, penjabaran Renstra perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran, menggambarkan tujuan sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya, mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah. Renja Dinas Lingkungan Hidup berawal dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya dirumuskan isu-isu penting dan diwujudkan ke dalam kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman dan acuan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup. Dokumen-dokumen perencanaan diatas sebagai pedoman Dinas Lingkungan Hidup untuk menghasilkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang akan ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
6. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan LembaranNegeraRepublik Indonesia Nomor 6781);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/MenLHKSetjen/2015 tentang Peran Masyarakat

dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 -2045;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur;
27. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
28. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2026 dan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 ini adalah :

1. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026 di bidang Lingkungan Hidup;

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
3. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 meliputi :

- BAB I **PENDAHULUAN**, berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, berisi tentang : Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang :
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran
Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan.

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

BAB V **PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur yang berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaksanaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebagai berikut :

Anggaran			Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
APBD	FCPF	Total			
40.881.532.979	4.812.247.315	45.693.780.294	47.467.757.154	44.446.430.348	93,63%

Adapun tabel rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2024 adalah tertuang dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 (T-C 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Timur

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran	5,00	≤5 (Tercemar Ringan)	2,65	5,00	2,65	147,00	5,00	2,65	147
		Indeks Standar Pencemar Udara	48,00	48 (baik)	35,00	48,00	35,00	127,08	48,00	35	127
3.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
3.2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu	81,00	%	100,00	81,00	100,00	123,46	81,00	100,00	123,46
3.3	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	40,00	%	49,06	40,00	49,06	122,65	45,00	50,00	111,11

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	532,00	Ha	162.103, 00	532,00	162.103,0 0	30.470,4 9	186.250, 00	186.250,00	100
4.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	30,00	%	30,46	30,00	30,46	101,53	35,00	35,00	100
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	52,00	%	47,74	52,00	47,74	91,81	52,00	50	96,15
5.1	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	24	Usaha	24	24	24	100	25	25	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	40,00	%	55,75	40,00	55,75	139,38	55,00	74,07	134,61

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	65,00	%	78,57	65,00	78,57	120,88	67,50	80	118,51
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	110,00	Kelompok / Lembaga	122,00	110,00	122,00	110,91	120,00	120	100
7.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	48,00	%	47,62	48,00	47,62	99,21	50,00	50	100
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84,00	%	100,00	84,00	100,00	119,05	84,42	84,42	100

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
9.1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi	15,00	%	100,00	15,00	100,00	666,67	20,00	20	100
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
10.1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengeloan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	88,00	%	82,51	88,00	82,51	93,76	89,00	89	100
11.1	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se- Kaltim	71,00	%	66,14	71,00	66,14	93,15	70,00	70	100

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2024 sebgayaan besar telah mencapai target, meskipun ada beberapa program dan kegiatan yang belum mencapai target. Hal tersebut terjadi karena faktor teknis diluar kontrol perencanaan, namun dengan upaya, strategi dan peningkatan koordinasi yang dijalankan oleh jajaran Dinas Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur kendala dan hambatan dapat dicarikan jalan pemecahannya.

Program yang tidak mencapai target diantaranya adalah

- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), tidak mencapai target disebabkan belum seluruh limbah B3 yang dihasilkan dilaporkan menggunakan aplikasi, untuk itu perlu terus dilakukan pembinaan kepada pelakukusaha penghasil limbah B3 melaksanakan kewajibannya.
- Program Pengelolaan Persampahan, belum mencapai target disebabkan karena penanganan sampah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal, perlu mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pengelolaan sampah
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, tidak mencapai target disebabkan belum seluruh sarana dan prasarana dapat dipenuhi dan berfungsi dengan baik sehingga belum dapat memberikan layanan kesekretariatan secara optimal dan capaian realisasi keuangan 93,63%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada sasaran/target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, dan/atau indikator lainnya seperti dalam SDG's dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan lingkungan berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Standar Nasional	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,15	75,00	75,10	80,36	74,46	76,63	75	75,1	Mencapai Target
Persentase Penurunan Emisi dari BAU		Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)	%	29,33	31,05	31,89	32,03	49,46	-	31,89	32,03	
Jumlah Penurunan Emisi		Menurunnya Emisi GRK	Emisi (Juta ton CO2eq)	15,558	16,994	18,030	18,551	26,238	-	18,030	18,551	
Indeks Kualitas Air (IKA)	Sangat Baik: $90 \leq x \leq 100$ Baik: $70 \leq x < 90$ Sedang: $50 \leq x < 70$ Kurang : $25 \leq x < 50$ Sangat Kurang: $0 \leq x < 25$	Menjaga Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks	53,85	53,52	53,62	53,72	52,64	52,64	53,62	53,72	Tidak Mencapai Target
Indeks Kualitas Udara (IKU)			Indeks	89,21	88,17	88,27	88,37	89,64	91,43	88,27	88,37	Mencapai Target
Indeks Kualitas Lahan (IKL)			Indeks	79,91	82,35	82,45	82,55	83,86	84,03	82,45	82,55	Mencapai Target
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)			Indeks	83,66	81,95	82,05	82,15	81,36	85,16	82,05	82,15	Mencapai Target
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif			%	-	-	14,79	14,97	-	31,03	14,79	14,97	

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persenstase Perurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan			%	-	-	27,53	31,48	-	49,19	27,53	31,48	
Status Mutu Air			Indeks	-	≤5 (Tercemar Ringan)	≤5 (Tercemar Ringan)	≤5 (Tercemar Ringan)	-	2,65 (Tercemar Ringan)	≤5 (Tercemar Ringan)	≤5 (Tercemar Ringan)	Mencapai Target
Status Mutu Udara			Indeks	-	48 (Baik)	47 (Baik)	46 (Baik)	-	35 (Baik)	47 (Baik)	46 (Baik)	Mencapai Target
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah			Indeks	-	-	54	55	-	53,77	54	55	
Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Pertahun dari Sektor Limbah			%	-	-	13,34	13,34	-	-	13,34	13,34	
Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Pertahun dari Sektor Persampahan			%	-	-	13,34	13,34	-	-	13,34	13,34	
Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan		Terkendalin ya pencemara n dan kerusakan lingkungan	%	-	5,00	6,00	7,00	-	29,53	6,00	7,00	Mencapai Target

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi lingkup kewenangan propinsi		Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup	%	-	97,00	98,00	100	-	96,91	98,00	100	Tidak Mencapai Tagret
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	-	68	74,5	75	71,50	74,30	74,5	75	Mencapai Target
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	-	82,15	88,80	88,85	-	88,75	88,80	88,85	Mencapai Target

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2024, sebagian besar mencapai target kinerja.

Indikator kinerja utama dalam implementasi suatu kebijakan menjadi penting sebagai tolok ukur keberhasilan. Selain itu memungkinkan untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala pada saat diimplementasikan. Sehingga, ketika dirasa output dan outcome yang diukur tidak tercapai sesuai keinginan, maka dapat dilakukan analisis untuk merumuskan kembali hal-hal yang belum terdeteksi sebelumnya.

Penetapan indikator kinerja utama merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai. Dengan demikian penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian. dengan penetapan kinerja ini, diharapkan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya. Selain itu, penetapan indikator kinerja utama merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah dan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur maka dirumuskan isu strategis lingkup pelayanan beserta faktor pendorong.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Permasalahan Pokok	Masalah	Masalah Tingkat Dua	Masalah Tingkat Tiga	Akar Masalah
Meningkatnya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup	1. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan pencemaran lingkungan	1. Potensi beban pencemaran makin tinggi	Belum optimalnya upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup

Permasalahan Pokok	Masalah	Masalah Tingkat Dua	Masalah Tingkat Tiga	Akar Masalah
			Belum efektifnya kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Terbatasnya pengumpulan data untuk menyusun kajian yang diambil dari lintas sektor
			Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Belum optimalnya upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) di luar kawasan hutan dan Taman Keanekaragaman hayati
			Masih rendahnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
			Belum optimalnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Belum efektifnya penilaian kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			Belum optimalnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Belum optimalnya Pengumpulan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		2. Belum optimalnya ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup	Belum optimalnya Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Belum seluruh usaha dan/atau kegiatan kewenangan propinsi diawasi dikarenakan keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pengawas di tingkat daerah, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis dalam pengawasan izin lingkungan
			Banyaknya Pengaduan Lingkungan Hidup	Masih banyaknya permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Permasalahan Pokok	Masalah	Masalah Tingkat Dua	Masalah Tingkat Tiga	Akar Masalah
		3. Belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah	Belum optimalnya tata kelola pengelolaan persampahan	Belum Optimalnya pengelolaan dan Cakupan Penanganan Sampah di masyarakat
	2. Meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Belum optimalnya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Belum optimalnya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor limbah dan persampahan	Belum optimalnya upaya mitigasi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor limbah dan persampahan

Dari berbagai uraian di atas, secara umum berbagai permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur dapat diidentifikasi dalam dokumen RPPLH sebagai berikut :

- (1) Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- (2) Dampak yang Diakibatkan Perubahan Iklim
- (3) Dampak yang Diakibatkan Kegiatan Pertambangan Batubara
- (4) Ancaman terhadap Kawasan Karst Sangkulirang- Tanjung Mangkalihat
- (5) Ancaman terhadap Kawasan 3 Danau (Jempang, Semayang, Melintang)
- (6) Ancaman terhadap Kawasan Teluk Balikpapan
- (7) Pencemaran terhadap Air Sungai Mahakam
- (8) Ancaman terhadap Kawasan Delta Mahakam

Selanjutnya dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, dirumuskan isu berikut ini :

- 1) Pengentasan Kemiskinan, Kelaparan dan Ketahanan Pangan,
- 2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kesejahteraan, Pendidikan Berkualitas, dan Kesetaraan Gender,
- 3) Pengembangan Industri, Inovasi, dan infrastruktur,
- 4) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan
- 5) Perwujudan Pembangunan Ramah Terhadap Ekosistem, Perubahan Iklim dan Transisi Energi,
- 6) Perwujudan Kota dan Permukiman Berkelanjutan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Energi Bersih, dan Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab,
- 7) Penanganan Dampak Pemindahan Ibukota Nusantara ke Pulau Kalimantan

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dengan rancangan RENJA Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada Tabel Reviu Rancangan RKPD Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur berikut ini :

Tabel 2.3 (T-C.31)
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur

PD : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
	WAJIB										
I.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Indeks Pencemaran Air	≤5 (tercemar ringan) Indeks	2.349.144.676	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Indeks Pencemaran Air	≤5 (tercemar ringan) Indeks	2.349.144.676	Selaras
			Indeks Standar Pencemar Udara	46 (Baik) Indeks				Indeks Standar Pencemar Udara	46 (Baik) Indeks		
			Jumlah Emisi GRK dari sektor limbah	318.721,2 Ton CO2e				Jumlah Emisi GRK dari sektor limbah	318.721,2 Ton CO2e		
1.	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Persentase pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	2.049.104.676	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Persentase pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	2.049.104.676	Selaras
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,	108 Lokasi	82.445.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,	108 Lokasi	82.445.000	Selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
	terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Udara, dan Laut			Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Udara, dan Laut			
	Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	10 Kab/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	216 Target	852.515.000	Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	10 Kab/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	216 Target	852.515.000	Selaras
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10 Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	2 Dokumen	860.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10 Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	2 Dokumen	860.000.000	Selaras
2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang disusun	1 Dokumen	254.144.676	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang disusun	1 Dokumen	254.144.676	Selaras
2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Persentase pemenuhan baku mutu	83%	200.080.000	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	10 Kab/Kota	Persentase pemenuhan baku mutu	83%	200.080.000	Selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
						Hidup					
2	Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	125 Lokasi	200.080.000	Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	125 Lokasi	200.080.000	Selaras
3	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	10 Kab/Kota	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	52%	99.960.000	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	10 Kab/Kota	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	52%	99.960.000	Selaras
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	10 Kab/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	18 Kegiatan	99.960.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	10 Kab/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	18 Kegiatan	99.960.000	Selaras
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10 Kab/Kota	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,25 Indeks	32.096.446.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10 Kab/Kota	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,25 Indeks	32.096.446.000	Selaras
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%		

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
1	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100%	385.000.000	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100%	385.000.000	Selaras
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	200.000.000	Selaras
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samari nda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samari nda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Selaras
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samari nda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samari nda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Selaras
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Laporan	15.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Laporan	15.000.000	Selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			SKPD		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
5	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	150.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	150.000.000	Selaras
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samari nda	Persentase penatausahaan keuangan	100%	25.450.525.369	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samari nda	Persentase penatausahaan keuangan	100%	25.450.525.369	Selaras
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samari nda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1414 Orang/Bulan	24.894.525.369	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samari nda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1414 Orang/Bulan	24.894.525.369	Selaras
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	500.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	500.000.000	Selaras
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Samari nda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Samari nda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Selaras
4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Samari nda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	1 Dokumen	2.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Samari nda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	1 Dokumen	2.000.000	Selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
	Pemeriksaan		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			Tanggapan Pemeriksaan		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Samari nda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	2.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Samari nda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	2.000.000	Selaras
6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samari nda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samari nda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.000.000	Selaras
3	Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Samari nda	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100%	39.740.000	Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Samari nda	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100%	39.740.000	Selaras
1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Samari nda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	2 Dokumen	2.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Samari nda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	2 Dokumen	2.000.000	Selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
	Milik Daerah SKPD		Daerah SKPD			Barang Milik Daerah SKPD		Daerah SKPD			
2	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samari nda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	27.740.000	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samari nda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	27.740.000	Selaras
2	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Samari nda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Samari nda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000	Selaras
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samari nda	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100%	252.445.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samari nda	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100%	252.445.000	Selaras
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samari nda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	95.445.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samari nda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	95.445.000	Selaras
2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samari nda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.500.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samari nda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.500.000	Selaras
3	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samari nda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	22.500.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samari nda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	22.500.000	Selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
4	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Kab/Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	130.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Kab/Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	130.000.000	Selaras
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samari nda	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100%	1.665.535.500	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samari nda	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100%	1.665.535.500	Selaras
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samari nda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samari nda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.000.000	Selaras
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samari nda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	451.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samari nda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	451.000.000	Selaras
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samari nda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	33.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samari nda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	33.000.000	Selaras
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samari nda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	109.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samari nda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	109.000.000	Selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
			yang Disediakan					yang Disediakan			
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samari nda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samari nda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000	Selaras
5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Samari nda	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Samari nda	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000	Selaras
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samari nda	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	991.535.500	Sub Kegiatan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samari nda	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	991.535.500	Selaras
5	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samari nda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samari nda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	20.000.000	Selaras
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samari nda	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100%	72.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samari nda	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100%	72.000.000	Selaras
2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Samari nda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	72.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Samari nda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	72.000.000	Selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samari nda	Presentase pelayanan jasa kantor	100%	3.692.440.131	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samari nda	Presentase pelayanan jasa kantor	100%	3.692.440.131	Selaras
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samari nda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samari nda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Selaras
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samari nda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.675.480.131	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samari nda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.675.480.131	Selaras
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samari nda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.018.280.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samari nda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.018.280.000	Selaras
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samari nda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	67%	534.440.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samari nda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	67%	534.440.000	Selaras
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Samari nda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	34 Unit	250.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Samari nda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	34 Unit	250.000.000	Selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
	Lapangan		Perizinannya			Dinas Operasional atau Lapangan		Perizinannya			
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samari nda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	180.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samari nda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	180.000.000	Selaras
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samari nda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	4.440.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samari nda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	4.440.000	Selaras
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samari nda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samari nda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Selaras
III.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	10 Kab/Kota	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	77%	735.855.324	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	10 Kab/Kota	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	77%	735.855.324	Selaras
1.	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap	100%	118.744.965	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap	100%	118.744.965	Selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
			dokumen RPPLH					dokumen RPPLH			
1	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	118.744.965	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	118.744.965	Selaras
2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100%	617.110.359	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100%	617.110.359	Selaras
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	554.510.359	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	554.510.359	Selaras
2	Sub Kegiatan Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS	1 Dokumen	62.600.000	Sub Kegiatan Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS	1 Dokumen	62.600.000	Selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
			kabupaten/kota					kabupaten/kota			
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	10 Kab/Kota	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	255.429 Ha	100.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	10 Kab/Kota	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	255.429 Ha	100.000.000	Selaras
1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	48%	100.000.000	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	48%	100.000.000	selaras
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Samari nda	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit	100.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Samari nda	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit	100.000.000	selaras
V.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10 Kab/Kota	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100%	220.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10 Kab/Kota	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100%	220.000.000	selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
1	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	24 Usaha	220.000.000	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	24 Usaha	220.000.000	selaras
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	2 Dokumen	95.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	10 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	2 Dokumen	95.000.000	selaras
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan	10 Kab/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan	3 Dokumen	125.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan	10 Kab/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan	3 Dokumen	125.000.000	selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
	persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, Surat Kelayakan Operasi, Perijinan Berusaha		persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, Surat Kelayakan Operasi, Perijinan Berusaha			persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, Surat Kelayakan Operasi, Perijinan Berusaha		persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, Surat Kelayakan Operasi, Perijinan Berusaha			
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10 Kab/Kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	97,6%	850.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10 Kab/Kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	97,6%	850.000.000	selaras
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	70%	850.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	70%	850.000.000	Selaras
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan	10 Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau	20 Dokumen	185.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan	10 Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau	20 Dokumen	185.000.000	Selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
	Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan			Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan			
2	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	110 Badan Usaha	665.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10 Kab/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	110 Badan Usaha	665.000.000	Selaras
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10 Kab/Kota	Persentase Kelompok masyarakat/lemaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan	70 %	350.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	10 Kab/Kota	Persentase Kelompok masyarakat/lemaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan	70 %	350.000.000	Selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
			hidup			MASYARAKAT		hidup			
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	4%	350.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	4%	350.000.000	Selaras
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal / lembaga masyarakat / komunitas / kelompok masyarakat	10 Kab/Kota	Jumlah lembaga pendidikan formal / lembaga masyarakat / komunitas / kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	50 Lembaga	350.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal / lembaga masyarakat / komunitas / kelompok masyarakat	10 Kab/Kota	Jumlah lembaga pendidikan formal / lembaga masyarakat / komunitas / kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	50 Lembaga	350.000.000	Selaras
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10 Kab/Kota	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	11,37%	250.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10 Kab/Kota	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	11,37%	250.000.000	Selaras
1	Kegiatan Pemberian	10	Persentase	8,33%	250.000.000	Kegiatan	10	Persentase	8,33%	250.000.000	selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
	Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kab/Kota	Peningkatan Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kab/Kota	Peningkatan Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi			
1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Samari nda	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	40 Entitas	250.000.000	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Samari nda	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	40 Entitas	250.000.000	selaras
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10 Kab/Kota	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	520.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10 Kab/Kota	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	520.000.000	selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
			kewenangan provinsi yang diselesaikan					kewenangan provinsi yang diselesaikan			
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100%	520.000.000	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	10 Kab/Kota	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100%	520.000.000	selaras
1	Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	4 Perkara	200.000.000	Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	4 Perkara	200.000.000	selaras
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	6 Pengaduan	320.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	6 Pengaduan	320.000.000	selaras
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10 Kab/Kota	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan	18,75%	965.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10 Kab/Kota	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan	18,75%	965.000.000	selaras

No.	Rancang Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (dalam ribu Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (juta)	
			Sampah					Sampah			
			Jumlah Emisi GRK dari sektor limbah	371.535,1 Ton CO2e				Jumlah Emisi GRK dari sektor limbah	371.535,1 Ton CO2e		
1	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	10 Kab/Kota	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	71%	965.000.000	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	10 Kab/Kota	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	71%	965.000.000	selaras
1	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	10 Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokumen	965.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	10 Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokumen	965.000.000	selaras

Dinas Lingkungan Hidup perlu menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk memastikan bahwa apa yang menjadi program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksakan oleh perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksananya. Dan seluruh program dan kegiatan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 telah selaras dengan Program dan kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kebijakan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota tahun 2026.

Berikut Program Hasil Pembahasan Forum Lintas Daerah Tahun 2026,

Tabel 2.4 (T-C.32) Program dari Hasil Pembahasan Forum Lintas Daerah Tahun 2026

No.	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Output Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	10 Kab/Kota	Indeks Pencemaran Air, Indeks Standar Pencemar Udara, Jumlah Emisi GRK dari sektor limbah	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Pengukuran,Pemantauan, dan Pelaporan Program Penurunan Emisi GRK

No.	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Output Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	10 Kab/Kota	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Penyusunan RPPLH dan KLHS
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	10 Kab/Kota	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	Pembinaan, Pemantauan, Identifikasi Lapangan, dan Pengumpulan data Kehati dan NKT
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10 Kab/Kota	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Fasilitasi Persetujuan/izin pengumpulan limbah B3
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10 Kab/Kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penerbitan rekomendasi persetujuan lingkungan dan pengawasan lingkungan
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10 Kab/Kota	Persentase Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	Pendampingan pembinaan Gerakan peduli dan Berbudaya lingkungan hidup

No.	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Output Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10 Kab/Kota	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Adiwiyata dan Kalpataru)
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10 Kab/Kota	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10 Kab/Kota	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Jumlah Emisi GRK dari sektor limbah	Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan sampah di kabupaten/kota

Berdasarkan hasil Musranbang Provinsi Kalimantan Timur terdapat usulan dari Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota untuk pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di akomodir melalui usulan Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, terkait Lingkungan Hidup Prioritas Nasional 2 adalah Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Prioritas Nasional	Program Prioritas
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

Untuk Pembangunan Rendah Karbo ditetapkan Sasaran Pembangunan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target 2026
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi GRK (kumulatif) (%)	17,47 (2023)7)	19,07
	Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan) (%)	28,53 (2023)7)	27,35

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2, Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau, dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Indeks Ekonomi Hijau	60,37 (2023)	68,34	71,01
Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	52,64 (2023)	58,00	60,00
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)b)	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	28 (17 terdaur ulang)
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	17,47 (2023)	18,37	19,07

Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
(GRK) Kumulatif (%)b)			
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)b)	28,53 (2023)	26,67	27,35
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44	0,47
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,53 (2024)	76,49	76,67

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2025-2029 menetapkan visi : **“Kaltim sukses menuju generasi emas”**. Untuk mewujudkan misi tersebut akan dicapai melalui 6 misi yaitu :

- 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera
- 2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah
- 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dan kesehatan
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan berintegrasi berbasis teknologi informasi
- 5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal
- 6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok urusan lingkungan hidup mendukung pencapaian visi gubernur dengan melaksanakan misi ke-6 : **“Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan”**.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2026

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	TARGET 2026
Tujuan 1: Terwujudnya Kaltim Sukses	Kontribusi PDRB Provinsi	%	3,90	4,30
Sasaran 4: Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,63	80,36
	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	(%)	75,55	55,05
Tujuan 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,16	85,84-86,53
Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN	Nilai AKIP	Nilai	78,50	79,19–79,78
Sasaran 10 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,75	4,10

Arah Kebijakan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

- 1) Menjaga kualitas lingkungan melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 2) Menjaga kualitas lingkungan melalui penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 3) Menjaga kualitas lingkungan melalui pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur berikut tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 :

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

Sasaran RKPD Yang Relevan	Tujuan dan Sasaran RENJA	Indikator	Satuan	Kondisi 2024	TARGET 2026
Sasaran 4 Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	indeks	52,64	71,43
		Indeks Kualitas Air Laut	indeks	85,16	81,50
		Indeks Kualitas Udara	indeks	91,43	85,02
		Indeks Kualitas Lahan	indeks	84,03	88,52
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	%	31,05	14,97
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan	%	49,19	31,48
	Sasaran 1 : Terkendalnya Potensi Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Status Mutu Air	Indeks	2,65 (Tercemar Ringan)	≤5 (Tercemar Ringan)
		Status Mutu Udara	Indeks	35 (Baik)	46 (Baik)
	Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	indeks	53,77	55
	Sasaran 3 : Meningkatnya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor limbah dan persampahan	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Limbah	%	N/A	13,34
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Persampahan	%	N/A	13,34
	Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	nilai	74,3	75,0

Sasaran RKPD Yang Relevan	Tujuan dan Sasaran RENJA	Indikator	Satuan	Kondisi 2024	TARGET 2026
	Publik Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	indeks	88,75	88,85

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Untuk mendukung program prioritas ditetapkan sub kegiatan prioritas. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Renja Dinas Lingkunga Hidup tahun 2026.

Tabel 3.4 Daftar kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 2. Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			1. Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	
2	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 1. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	
		Menurunnya Emisi GRK dari sektor persampahan		
		Menurunnya Emisi GRK dari sektor limbah		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2026 memuat 10 Program, 20 Kegiatan, dan 58 Sub Kegiatan yang tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan maju tahun 2027 Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				38.436.446.000				
I	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ideks Pencemaran Air	Samarinda , Kukar, Kubar, Bontang, Paser, Berau	≤ 5	2.385.000.000	APBD		≤ 5	1.382.500.000
		Indeks Standar Pencemar Udara		46				45	
		Jumlah Emisi GRK dari sektor limbah		318.721, 2 Ton CO2e				324.585 Ton CO2e	
1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kab/ Kota	100%	2.084.960.000	APBD		100%	1.285.000.000
	1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10 Kab/ Kota	2 Dokume n	950.000.000	APBD		2 Dokume n	380.000.000
	2	Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	10 Kab/ Kota	216 Paket	852.515.000	APBD		216 Paket	865.000.000

No	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	10 Kab/ Kota	108 Lokasi	82.445.000	APBD		108 Lokasi	25.000.000
	4	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang disusun	10 Kab/ Kota	1 Dokumen	254.144.676	APBD		1 Dokumen	20.000.000
2		Kegiatan Penganggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu	10 Kab/ Kota	83%	200.080.000	APBD		85%	60.000.000
	1	Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	10 Kab/ Kota	125 Lokasi	200.080.000	APBD		75 Lokasi	60.000.000
3		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	10 Kab/ Kota	52%	99.960.000	APBD		54%	37.500.000
	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	10 Kab/ Kota	18 Kegiatan	99.960.000	APBD		9 Kegiatan	37.500.000
II		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	10 Kab/ Kota	77%	735.855.324	APBD		100 %	300.000.000

No	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH	10 Kab/ Kota	100%	118.744.965	APBD		100%	120.000.000
	1	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	10 Kab/ Kota	1 Dokume n	118.744.965	APBD		1 Dokume n	120.000.000
2		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan lingkungan Hidup Strategis	10 Kab/ Kota	100%	617.110.359	APBD		100%	180.000.000
	1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	10 Kab/ Kota	1 Dokume n	554.510.359	APBD		1 Dokume n	100.000.000
	2	Sub Kegiatan Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	10 Kab/ Kota	1 Dokume n	62.600.000	APBD		1 Dokume n	80.000.000
III		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	10 Kab/ Kota	255.429 Ha	100.000.000	APBD		324.607 Ha	100.000.000
1		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	10 Kab/ Kota	48%	100.000.000	APBD		61%	100.000.000
	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	10 Kab/ Kota	1 Unit	100.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000

No		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IV		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	10 Kab/ Kota	100%	220.000.000	APBD		100%	110.000.000
1		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	10 Kab/ Kota	24 Usaha	220.000.000	APBD		24 Usaha	110.000.000
	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	10 Kab/ Kota	2 Dokume n	95.000.000	APBD		2 Dokume n	40.000.000
	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Kab/ Kota	3 Dokume n	125.000.000	APBD		2 Dokume n	70.000.000
IV		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah	10 Kab/Kota	100%	850.000.000	APBD		97,70%	500.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		HIDUP (PPLH)	Daerah Provinsi						
1		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	10 Kab/Kota	70%	850.000.000	APBD	72%	500.000.000
	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	10 Kab/Kota	20 Dokume n	185.000.000	APBD	15 Dokume n	112.500.000
	2	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Kab/Kota	110 Badan Usaha	665.000.000	APBD	55 Badan Usaha	387.500.000
V		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok masyarakat/lem baga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	10 Kab/Kota	70 %	350.000.000	APBD	72 %	100.000.000
1		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	10 Kab/Kota	4%	350.000.000	APBD	6%	100.000.000

No		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ kom unitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ kom unitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Kab/ Kota	50 Lembaga	350.000.000	APBD		50 Lembaga	100.000.000
VI		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10 Kab/ Kota	11,37%	250.000.000	APBD		12,79	125.000.000
1		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi	10 Kab/ Kota	8,33%	250.000.000	APBD		12,5%	125.000.000
	1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Kab/ Kota	40 entitas	250.000.000	APBD		20 entitas	125.000.000
VI		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	10 Kab/ Kota	100%	520.000.000	APBD		100%	300.000.000
1		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	10 Kab/ Kota	100%	520.000.000	APBD		100%	300.000.000

No	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1	Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	10 Kab/Kota	4 Perkara	200.000.000	APBD		2 Perkara	100.000.000
	2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	10 Kab/Kota	6 Pengaduan	320.000.000	APBD		4 Pengaduan	200.000.000
VII		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10 Kab/Kota	18,75%	965.000.000	APBD		22,50 %	550.000.000
		Jumlah Emisi GRK dari sektor limbah		371.535,1 Ton CO2e				383.033,7 Ton CO2e	
1		Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	10 Kab/Kota	71%	965.000.000	APBD		72%	550.000.000
	1	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	10 Kab/Kota	3 Dokumen	965.000.000	APBD		3 Dokumen	550.000.000
VII I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10 Kab/Kota	88,25 Indeks	32.096.446.000	APBD		85,5 Indeks	31.447.255.000
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%				100 %	
1		Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	100%	385.000.000	APBD		100%	270.000.000
	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	2 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	150.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	10.000.000	APBD	2 Dokumen	10.000.000
	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	10.000.000	APBD	2 Dokumen	10.000.000
	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Kab/Kota	4 Laporan	15.000.000	APBD	4 Laporan	20.000.000
	4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Kab/Kota	4 Laporan	150.000.000	APBD	4 Laporan	80.000.000
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan keuangan	Samarinda	100%	25.450.525.369	APBD	100%	25.556.000.000
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	1414 Orang/Bulan	24.894.525.369	APBD	1414 Orang/Bulan	25.000.000.000
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	1 Dokumen	500.000.000	APBD	1 Dokumen	500.000.000
	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	1 Dokumen	50.000.000	APBD	1 Dokumen	50.000.000
	4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Samarinda	1 Dokumen	2.000.000	APBD	1 Dokumen	2.000.000
	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Samarinda	12 Laporan	2.000.000	APBD	12 Laporan	2.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		SKPD							
	6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	2 Dokume n	2.000.000	APBD		2 Dokume n	2.000.000
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samarinda	100%	39.740.000	APBD		100%	31.740.000
	1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	2 Dokume n	2.000.000	APBD		2 Dokume n	2.000.000
	2	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	1 Dokume n	27.740.000	APBD		1 Dokume n	27.740.000
	3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Samarinda	2 Laporan	10.000.000	APBD		2 Laporan	2.000.000
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	100%	252.445.000	APBD		100%	362.851.745
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	105 Paket	95.445.000	APBD		105 Paket	165.851.745
	2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	1 Dokume n	4.500.000	APBD		1 Dokume n	5.000.000
	3	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	1 Dokume n	22.500.000	APBD		1 Dokume n	20.000.000
	4	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	20 Orang	130.000.000	APBD		20 Orang	175.000.000
5		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	100%	1.665.535.500	APBD		100%	1.456.562.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	2 Paket	30.000.000	APBD		2 Paket	20.000.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	4 Paket	451.000.000	APBD		4 Paket	200.000.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Samarinda	4 Paket	33.000.000	APBD		3 Paket	15.000.000
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	4 Paket	109.000.000	APBD		4 Paket	60.000.000
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Samarinda	12 Dokume n	6.000.000	APBD		12 Dokume n	15.000.000
6	Sub Kegiatan Fasilita si Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	12 Laporan	25.000.000	APBD		12 Laporan	25.000.000
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kab/Kota / Luar Daerah	100 Laporan	991.535.500	APBD		200 Laporan	1.131.562.000
7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Kab/Kota / Luar Daerah	6 Dokume n	20.000.000	APBD		6 Dokume n	20.000.000
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	Samarinda	100%	72.000.000	APBD		100%	149.939.255
1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	72.000.000	APBD		1 Paket	149.939.255
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa kantor	Samarinda	100%	3.696.760.131	APBD		100%	3.002.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	3.000.000	APBD		12 Laporan	2.000.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	1.675.480.131	APBD		12 Laporan	1.000.000.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	2.018.280.000	APBD		12 Laporan	2.000.000.000
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Samarinda	67%	534.440.000	APBD		69%	618.162.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	30 Unit	250.000.000	APBD		30 Unit	335.947.000
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	54 Unit	180.000.000	APBD		54 Unit	180.000.000
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Samarinda	1 Unit	4.440.000	APBD		1 Unit	2.215.000
4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Samarinda	1 Unit	100.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000

BAB V

PENUTUP

Dokumen ini memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran, disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ini harus memperhatikan kaidah dalam aturan yang berkaitan dengan teknis urusan lingkungan hidup, pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan keuangan pemerintah. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi.

Agar Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan dan memberi manfaat bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

RENJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perencanaan yang spesifik. Untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif diperlukan perencanaan yang matang dan terarah.

Perencanaan disusun baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Secara legal dan formal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2026 ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

14. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

15. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan untuk adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Dengan demikian penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk memastikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan;

- c. Sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026;
- d. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
- e. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Proses dan sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN SEKARANG

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun sekarang dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
- 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

4.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas dan fungsinya mendukung tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dengan tujuan “ Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas “, dan sasaran “ Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin “.

review hasil evaluasi RKPD atau Renja semester 2 Tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan: Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyakat Miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,215	0,154	71,62 %
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,94	0,612	64,89 %
Sasaran: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7622	0,7686	100,8 %
Tujuan: Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Indeks	78,5	80	101,9 %
Sasaran: Meningkatkan Birokrasi Yang Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	69,40	74,10	106,7%
Tujuan Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Dengan ASN Yang Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	88	100 %
Sasaran Meningkatkan Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Dengan ASN Yang Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	88	100 %

Capaian Indikator Utama DPMPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan Desanya	Desa	11	11	100 %
	Desa yang mampu menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa secara Optimal	Desa	212	341	160,8 %
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi kewenangan Provinsi	Kab/kota	10	10	100 %
	Desa dan Kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	Desa	23	30	130,4 %
	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	Indeks	82	82	100 %
	Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100 %

Berdasarkan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, DPMPD mengampu Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya status desa	Peningkatan Fasilitasi Penataan Desa	Meningkatkan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan. Pengisian Jabatan. dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kerjasama Desa	Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatkan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
	Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Desa	Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

	Mendorong Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemsayarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas,dan Profesionalisme Pemerintahan	Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel	Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatkan kualitas program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026
Meningkatnya Pemberdayaa n Masyarakat dan Kemandirian Desa	Tingkat Kemiskin an	Meningkatnya status desa	Persentase Desa Mandiri	26,40%
			Persentase Fasilitasi Penataan Desa	0,35 % (3 Desa)
		Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	28,57 % (2kerjasam a
		Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2,97 % (25 Desa)
			Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	2,97 % (25 Desa)
		Mendorong Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD)	3,2 % (27 Desa)
			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	4,2 %
		Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	86
			Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100 %

Reviw hasil evaluasi renja tahun 2024 berdasarkan tabel hasil evaluasi RKPD semester 2 tahun 2024 adalah perbandingan target kinerja yang sudah ditetapkan dan realisasi target kinerja, secara keseluruhan target kinerja DPMPD sudah tercapai bahkan capaian ada yang lebih dari 100 %, tetapi tim evaluator menyampaikan saran agar target kinerja bersifat *SMART*, terutama dalam hal ini adalah indikator kinerja Desa yang mampu menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa secara Optimal karena komponen komponen pengukur keberhasilan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa belum ada, sehingga diperlukan komponen penilaian untuk indikator tersebut.

Renja DPMPD Kalimantan Timur tahun 2026, mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra DPMPD Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029. Indikator kinerja dan target pada Renja DPMPD tahun 2026, berbeda dengan Renja DPMPD Tahun 2024 dan 2025. Indikator kinerja pada Renja DPMPD tahun 2026 mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada DPMPD adalah sebagai berikut :

1. Basis data belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa
2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM dan sapras kerja belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal.
3. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal.
4. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal
5. Koordinasi multi stakeholder dan antar perangkat daerah (bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan) dalam upaya menekan angka desa tertinggal belum berjalan baik.
6. Belum kuatnya kapasitas SDM serta sapras spesifik.
7. Belum meratanya akses pelayanan dan fasilitas pada dimensi Indeks Desa Membangun (IDM) yang meliputi Indeks Ketahanan Sosial, Indeks

Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi.

8. Belum optimalnya pembangunan potensi kawasan perdesaan/Belum optimalnya pemetaan potensi desa.
9. Belum optimalnya peningkatan kapasitas BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Implikasi dari tidak tercapainya target capaian program Renstra DPMPD adalah sebagai berikut :

1. Angka kemiskinan di desa yang masih tinggi
2. Masih ada 4 desa tertinggal
3. Peningkatan Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan masih kecil serta belum maksimalnya Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti
4. Rendahnya Fasilitas Penataan Desa
5. Rendahnya Fasilitas Kerjasama antar Desa antar Kabupaten, dan belum maksimalnya Pembangunan Kawasan Perdesaan
6. Belum maksimalnya peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan Anggota BPD serta tata kelola desa
7. Masih rendahnya Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa
8. Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang belum maju
9. Kualitas layanan dasar pedesaan masih timpang dibandingkan dengan layanan di perkotaan
10. Tata kelola pemdes masih belum baik dan kualitas belanja desa perlu ditingkatkan

Tindak lanjut perencanaan dan penganggaran yang diambil dalam mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan secara berkala yaitu setiap triwulan.
2. Membuat manajemen resiko pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga akan mengurangi resiko tidak tercapainya target kinerja.
3. Melakukan pemetaan kegiatan yang bisa dilaksanakan secara bersama atau kolaborasi dalam rangka efisiensi anggaran.
4. Melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder yang terkait dalam

rangka pencapaian target kinerja.

5. Melakukan kerjasama atau *crosscutting* dengan OPD lain dalam rangka pencapaian target kinerja.

Hasil analisis dari factor penyebab, implikasi dan rencana tindak lanjut dari tidak tercapainya target kinerja sehingga didapatkan masalah – masalah yang dihadapi oleh DPMPD yaitu :

1. Belum optimalnya penataan desa
2. Belum optimalnya kerjasama desa
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
4. Belum optimalnya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan
5. Masih rendahnya kualitas pelayanan

Dari hasil analisis tersebut maka arah kebijakan DPMPD adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi/penyuluhan kepada Kabupaten tentang penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi
2. Evaluasi rancangan perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa
3. Fasilitasi/sosialisasi kerjasama antar desa antar kabupaten dalam pengembangan usaha bersama, pengembangan potensi desa
4. Pengembangan pembangunan Kawasan perdesaan
5. Peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD
6. Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa
7. Pembinaan/peningkatan kapasitas pengelola BUMDes
8. Peningkatan kapasitas LKD
9. Pelatihan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemberian alat usaha kepada masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat
10. Pembinaan posyantek dalam pengembangan inovasi TTG di desa
11. Penyediaan sarana dan prasarana kepada LKD
12. Fasilitasi PKK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga
13. Peningkatan kapasitas MHA dan fasilitasi MHA
14. Peningkatan kapasitas kader posyandu
15. Pendidikan dan pelatihan berdasarkan kompetensi kepada ASN
16. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2026 dengan Pagu Anggaran sebesar 37.462.537.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk pembiayaan 5 (lima) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
			11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			17	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			26	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusna Pemerintahan Daerah	27	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			28	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			29	Pengadaan Mebel
			30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
			32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			37	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
			38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan Pengisian	39	Identifikasi Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi
			40	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa
		Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	41	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	42	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
			43	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
			44	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	45	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa
			46	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
			47	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			48	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
			49	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
			50	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
			51	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
			52	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
			53	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
			54	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	55	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
			56	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			57	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			58	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			59	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			60	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			61	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
			62	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
			63	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
			64	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat
			65	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dan Program/Kegiatan Tahun 2024 rata-rata mencapai 100%, sedangkan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dan Program/Kegiatan Tahun 2025 masih dalam Proses berjalannya Tahun Anggaran.

Adapun Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun lalu dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan pada **Tabel T-C.29** sebagai berikut :

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

PD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAM TIMUR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatian	82 Indeks	82	82	82	100 %	86	82	95,34 %
					Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti	100 Presentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
01	1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
01	1	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
01	1	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

01	1	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %
01	1	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	35 ASN	35 ASN	35 ASN	35 ASN	100 %	85 ASN	35 ASN	100 %
01	1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	100 %	85 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	100 %
01	1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
01	1	02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
01	1	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
01	1	02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
01	1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100 %	18 Laporan	18 Laporan	100 %
01	1	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
01	1	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
01	1	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100 %	25 Orang	25 Orang	100 %
01	1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %
01	1	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
01	1	05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
01	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100 %	25 Orang	25 Orang	100 %
01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang Berfungsi dengan Baik	150 Buah	150 Buah	150 Buah	150 Buah	100 %	150 Buah	150 Buah	100 %
01	1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Lomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %
01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %
01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %
01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %
01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %

01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
01	1	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
01	1	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusna Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	3 Unit	3 Unit	100 %
01	1	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %
01	1	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %
01	1	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %
01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100 %	15 Unit	15 Unit	100 %
01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %
01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100 %	20 Unit	20 Unit	100 %

[illegible]

03				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Presentase Peningkatan Status Desa yang Menjadi Maju	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	100 %	28,57 %	2,97%	100 %
03	1	01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100 %	2 Kerjasama	10 Kab/Kota	100 %
03	1	01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
03	1	01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
03	1	01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal.	35 Presentase	35 Presentase	35 Presentase	35 Presentase	100 %	2,97 %	35 Presentase	100 %
04	1	01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Mampu Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Secara Optimal.	296 Desa	296 Desa	296 Desa	296 Desa	100 %	25 Desa	296 Desa	100 %
04	1	01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
04	1	01	0004	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
04	1	01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
04	1	01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
04	1	01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	185 Orang	185 Orang	185 Orang	185 Orang	100 %	185 Orang	185 Orang	100 %

04	1	01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
04	1	01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100 %	50 Orang	50 Orang	100 %
04	1	01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100 %	50 Orang	50 Orang	100 %
04	1	01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
04	1	01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa dan Kelurahan yang Mampu Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	100 %	3,56 %	3,25%	100 %
05	1	01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Mampu Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	27 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	100 %	30 Desa	27 Desa	100 %
05	1	01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

05	1	01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
05	1	01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya	35 Lembaga	35 Lembaga	35 Lembaga	35 Lembaga	100 %	30 Lembaga	35 Lembaga	100 %
05	1	01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100 %	5 Unit	4 Unit	100 %
05	1	01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
05	1	01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
05	1	01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %

05	1	01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
05	1	01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
05	1	01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	35 Keluarga	35 Keluarga	35 Keluarga	35 Keluarga	100 %	40 Keluarga	35 Keluarga	100 %
05	1	01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	35 Keluarga	35 Keluarga	35 Keluarga	35 Keluarga	100 %	40 Keluarga	35 Keluarga	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya/tahun lalu dalam rangka mengentaskan/mengurangi jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kalimantan Timur dengan strategi dan arah kebijakan melalui program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran meningkatkan jumlah Desa Berkembang, dan mendorong Desa Berkembang menjadi Maju dan Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Uraian / penjelasan Indikator Kinerja Utama :

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
T.1	Tujuan : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	%	Definisi Operasional : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa, dengan indikator persentase desa mandiri menggunakan Indeks Desa, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa yaitu proses pemberdayaan masyarakat dan desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya, membuat keputusan, dan menjalankan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan 2. Tujuan : menguatkan kemampuan masyarakat dan institusi desa sehingga mampu mandiri, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indikator Persentase Desa Mandiri dengan Indeks Desa : Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDT. Pengukuran Persentase Desa Mandiri Desa Mandiri : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN					
				layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik. Persentase Desa Mandiri : Proporsi dari total desa yang telah mencapai kategori “Mandiri” menurut Indeks Desa. Dihitung dengan membandingkan jumlah desa yang masuk kategori mandiri dengan total desa yang ada, kemudian dikali 100%. Rumus /Formulasi Perhitungan : <table border="1"> <tr> <td>% Desa Mandiri</td><td>=</td><td>$\frac{\sum \text{Desa Mandiri}}{\sum \text{Desa di Kaltim}}$</td><td>X</td><td>100 %</td></tr> </table> Sumber Data : Kemendes PDT Tipe Indikator : -Positif	% Desa Mandiri	=	$\frac{\sum \text{Desa Mandiri}}{\sum \text{Desa di Kaltim}}$	X	100 %
% Desa Mandiri	=	$\frac{\sum \text{Desa Mandiri}}{\sum \text{Desa di Kaltim}}$	X	100 %					
S.1.1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	Definisi Operasional : Penataan Desa adalah tindakan Pemerintah daerah untuk melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Maksud penataan desa sebagai pedoman dalam Penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penataan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; meningkatkan daya saing desa. Indikator persentase fasilitas penataan desa yaitu jumlah desa yang difasilitasi penataan desa dibagi jumlah keseluruhan desa di kaltim dikali 100%					

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN					
				penataan desa meliputi : 1. Pembentukan desa 2. Penghapusan desa 3. Penggabungan desa 4. Perubahan status desa 5. Penetapan desa Langkah – langkah penataan desa : 1. Kabupaten mengusulkan desa desa yang akan dilakukan penataan 2. DPMPD provinsi melakukan fasilitasi kepada Kabupaten dalam penataan desa 3. DPMPD provinsi melakukan pendampingan Kabupaten ke Kemendagri untuk penyampaian usulan penataan desa Rumus /Formulasi Perhitungan : <table border="1"> <tr> <td>% fasilitasi penataan desa</td><td>=</td><td> $\frac{\sum \text{Desa yang difasilitasi penataan desa}}{\sum \text{Desa di Kaltim}}$ </td><td>X</td><td>100 %</td></tr> </table> Sumber Data : Bidang Pemerintahan Desa Tipe Indikator : -Positif	% fasilitasi penataan desa	=	$\frac{\sum \text{Desa yang difasilitasi penataan desa}}{\sum \text{Desa di Kaltim}}$	X	100 %
% fasilitasi penataan desa	=	$\frac{\sum \text{Desa yang difasilitasi penataan desa}}{\sum \text{Desa di Kaltim}}$	X	100 %					
S.1. 2	Sasaran : Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	Definisi Operasional : Kerjasama desa adalah desa yang difasilitasi untuk melakukan kerjasama antar desa. Ini mencakup desa-desa yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kerjasama yang difasilitasi, baik dalam bentuk penyusunan perjanjian kerjasama, pertemuan koordinasi, pelatihan, maupun kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar desa Indikator persentase fasilitasi kerjasama desa adalah jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa antar kabupaten dibagi jumlah keseluruhan kabupaten di Kaltim dikali 100 % Langkah – langkah kerjasama desa :					

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN					
				1. Identifikasi potensi desa yang menjadi komoditas unggulan dengan desa yang berdekatan antar kabupaten 2. Melakukan fasilitasi kerjasama antar desa antar kabupaten Rumus /Formulasi Perhitungan : <table> <tr> <td>% fasilitasi kerjasama desa</td><td>=</td><td> $\frac{\sum \text{Kerjasama antar desa antar kabupaten}}{\sum \text{Kabupaten di Kaltim}}$ </td><td>X</td><td>100 %</td></tr> </table> Sumber Data : Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tipe Indikator : -Positif	% fasilitasi kerjasama desa	=	$\frac{\sum \text{Kerjasama antar desa antar kabupaten}}{\sum \text{Kabupaten di Kaltim}}$	X	100 %
% fasilitasi kerjasama desa	=	$\frac{\sum \text{Kerjasama antar desa antar kabupaten}}{\sum \text{Kabupaten di Kaltim}}$	X	100 %					
S.1.3	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	Definisi Operasional : Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah pembinaan dan pengawasan kepada desa di mana fungsi pemerintahan di tingkat desa dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif. Indikator Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya adalah Jumlah desa yang difasilitasi pelatihan bagi aparatur desa dan anggota BPD dibagi jumlah desa keseluruhan di Kaltim dikali 100 % Langkah – langkah pembinaan aparatur desa dan anggota BPD : 1. Identifikasi desa yang belum pernah mendapat peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD 2. Pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD 3. Monitoring dan evaluasi hasil peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD					

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN					
				Rumus /Formulasi Perhitungan : <table> <tr> <td>% aparatur desa & anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya</td><td>=</td><td> $\frac{\sum \text{desa yang difasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desan \& anggota BPD}}{\sum \text{desa di Kaltim}}$ </td><td>X</td><td>100 %</td></tr> </table> Sumber Data : Bidang Pemerintahan Desa Tipe Indikator : -Positif	% aparatur desa & anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	=	$\frac{\sum \text{desa yang difasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desan \& anggota BPD}}{\sum \text{desa di Kaltim}}$	X	100 %
% aparatur desa & anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	=	$\frac{\sum \text{desa yang difasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desan \& anggota BPD}}{\sum \text{desa di Kaltim}}$	X	100 %					
S.1.4	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	%	Definisi Operasional : Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah pembinaan dan pengawasan kepada desa di mana fungsi pemerintahan di tingkat desa dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif. Indikator Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa adalah Jumlah desa yang difasilitasi tata kelola desa dibagi jumlah desa keseluruhan di Kaltim dikali 100 % Langkah – langkah fasilitas tata kelola desa : 1. Identifikasi desa yang belum pernah mendapat fasilitas tata kelola desa 2. Pelaksanaan fasilitas tata kelola desa 3. Monitoring dan evaluasi hasil fasilitas tata kelola desa Rumus /Formulasi Perhitungan : <table> <tr> <td>% fasilitas tata keloala desa</td><td>=</td><td> $\frac{\sum \text{desa yang difasilitasi tata kelola desa}}{\sum \text{desa di Kaltim}}$ </td><td>X</td><td>100 %</td></tr> </table> Sumber Data :	% fasilitas tata keloala desa	=	$\frac{\sum \text{desa yang difasilitasi tata kelola desa}}{\sum \text{desa di Kaltim}}$	X	100 %
% fasilitas tata keloala desa	=	$\frac{\sum \text{desa yang difasilitasi tata kelola desa}}{\sum \text{desa di Kaltim}}$	X	100 %					

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN					
				Bidang Pemerintahan Desa Tipe Indikator : -Positif					
S.1.5	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa	%	Definisi Operasional : Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah Proses yang melibatkan upaya sistematis untuk memperkuat kemampuan dan sumber daya lembaga masyarakat di desa agar lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, baik dalam hal tata kelola, pemberdayaan masyarakat, maupun penyediaan layanan kepada warga desa. LKD , LAD dimana masing-masing lembaga kemasyarakatan mempunyai SK kepengurus yang lengkap. Indikator Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu Jumlah Desa yang difasilitasi pendayagunaan LKD dibagi jumlah keseluruhan desa di Kaltim dikali 100 % Langkah – langkah pemberdayaan LKD : 1. Identifikasi desa yang belum pernah mendapatkan pemberdayaan LKD 2. Pelaksanaan Peningkatan kapasitas LKD dari hasil identifikasi desa 3. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas LKD Rumus /Formulasi Perhitungan : <table border="1"> <tr> <td>% pemberdayaan LKD</td> <td>=</td> <td>$\frac{\sum \text{desa yang difasilitasi pendayagunaan LKD}}{\sum \text{desa di Kaltim}}$</td> <td>X</td> <td>100 %</td> </tr> </table> Sumber Data : Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	% pemberdayaan LKD	=	$\frac{\sum \text{desa yang difasilitasi pendayagunaan LKD}}{\sum \text{desa di Kaltim}}$	X	100 %
% pemberdayaan LKD	=	$\frac{\sum \text{desa yang difasilitasi pendayagunaan LKD}}{\sum \text{desa di Kaltim}}$	X	100 %					

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
				Tipe Indikator : -Positif
S.1.6	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa	%	Definisi Operasional : Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat adalah Proses yang melibatkan upaya sistematis untuk memperkuat kemampuan dan sumber daya Masyarakat Hukum Adat (MHA), serta fasilitasi untuk penetapan MHA berdasarkan Peraturan atau Surat Keputusan Bupati. Indikator Persentase Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat adalah jumlah MHA yang difasilitasi dibagi jumlah keseluruhan MHA di Kaltim dikali 100 % Langkah – langkah Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat : 1. Pembentukan panitia pendampingan percepatan pengakuan verifikasi MHA 2. identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat atau pihak – pihak lain 3. Verifikasi dengan panitia berkunjung ke Desa untuk memastikan data dan informasi yang disampaikan di dalam berkas Permohonan pengakuan tersebut, apakah benar adanya. FGD, Wawancara dan Peninjauan Barang atau Situs 4. Validasi yaitu setelah Panitia melakukan Verifikasi atas dokumen pengajuan MHA, maka selanjutnya Panitia memberikan rekomendasi hasil Vertek kepada MHA untuk dilakukan perbaikan (bila ada). Dan selanjutnya Panitia mengumumkan hasil vertek dan validasi kepada MHA setempat dalam kurun waktu 1 bulan 5. Setelah Panitia melaksanakan Vertek dan Validasi, lalu Panitia menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan MHA. Berdasarkan rekomendasi dari Panitia MHA, maka Bupati/Walikota melakukan Penetapan Pengakuan dan Perlindungan MHA.

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN					
				Rumus /Formulasi Perhitungan : <table border="1"> <tr> <td>% pemberdayaan LAD dan MHA</td><td>=</td><td> $\frac{\sum \text{MHA yang difasilitasi}}{\sum \text{MHA di Kaltim}}$ </td><td>X</td><td>100 %</td></tr> </table> Sumber Data : Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Tipe Indikator : -Positif	% pemberdayaan LAD dan MHA	=	$\frac{\sum \text{MHA yang difasilitasi}}{\sum \text{MHA di Kaltim}}$	X	100 %
% pemberdayaan LAD dan MHA	=	$\frac{\sum \text{MHA yang difasilitasi}}{\sum \text{MHA di Kaltim}}$	X	100 %					
S.1.7	Sasaran : Mewujudkan Birokrasi yang Akuntabel	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	-	Definisi Operasional : Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan adalah sebuah instrumen untuk mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam suatu organisasi juga untuk meningkatkan kualitas layanan yang mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan Indikator Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan 1. Kecepatan Pelayanan: Seberapa cepat layanan diberikan, misalnya waktu respon terhadap permintaan atau penyelesaian tugas. 2. Keramahan Petugas: Bagaimana petugas memberikan pelayanan, apakah mereka ramah, sopan, dan membantu. 3. Akurasi Informasi: Seberapa akurat informasi yang diberikan oleh petugas kesekretariatan. 4. Kemudahan Prosedur: Seberapa mudah prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan layanan. 5. Kenyamanan Lingkungan: Apakah lingkungan tempat layanan diberikan nyaman dan kondusif. 6. Ketersediaan Informasi: Apakah informasi yang dibutuhkan mudah diakses dan tersedia. 7. Tanggap Terhadap Keluhan: Bagaimana petugas menanggapi keluhan atau					

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN						
				masalah yang diajukan oleh pengguna layanan. Indeks kualitas pelayanan kesekretariatan adalah dengan menjumlahkan skor dari berbagai indikator yang mencerminkan kualitas layanan, kemudian dibagi dengan jumlah total indikator Rumus /Formulasi Perhitungan : <table> <tr> <td>Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariat</td> <td>=</td> <td> $\frac{\sum \text{Skor indikator}}{\sum \text{indikator}}$ </td> </tr> </table> Sumber Data : Sekretariat (Bagian Umum) Tipe Indikator : -Positif	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariat	=	$\frac{\sum \text{Skor indikator}}{\sum \text{indikator}}$			
Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariat	=	$\frac{\sum \text{Skor indikator}}{\sum \text{indikator}}$								
S.1.8	Sasaran : Mewujudkan Birokrasi yang Akuntabel	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	Definisi Operasional : Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti adalah menggambarkan pelaksanaan Keluhan pengguna yang ditindaklanjuti di DPMPD Rumus /Formulasi Perhitungan : <table> <tr> <td rowspan="2">% Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti</td> <td rowspan="2">=</td> <td>$\sum \text{keluhan yang diterima}$</td> <td rowspan="2">X</td> <td rowspan="2">100 %</td> </tr> <tr> <td>$\sum \text{keluhan yang ditindaklanjuti}$</td> </tr> </table> Sumber Data : Sekretariat (Bagian Umum) Tipe Indikator : -Positif	% Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	=	$\sum \text{keluhan yang diterima}$	X	100 %	$\sum \text{keluhan yang ditindaklanjuti}$
% Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	=	$\sum \text{keluhan yang diterima}$	X	100 %						
		$\sum \text{keluhan yang ditindaklanjuti}$								

2.2.1. Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

2.2.2. Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- 3) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- 4) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- 5) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 6) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan Kelurahan;
- 7) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 9) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

2.2.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan :

- Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin
- Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Professional
- Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel

Sasaran :

- Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa
- Meningkatkan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Profesional
- Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel

Strategi :

1. Peningkatan Fasilitas Penataan Desa
2. Peningkatan Kerjasama Antar Desa
3. Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa
4. Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemsayarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
5. Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Arah Kebijakan :

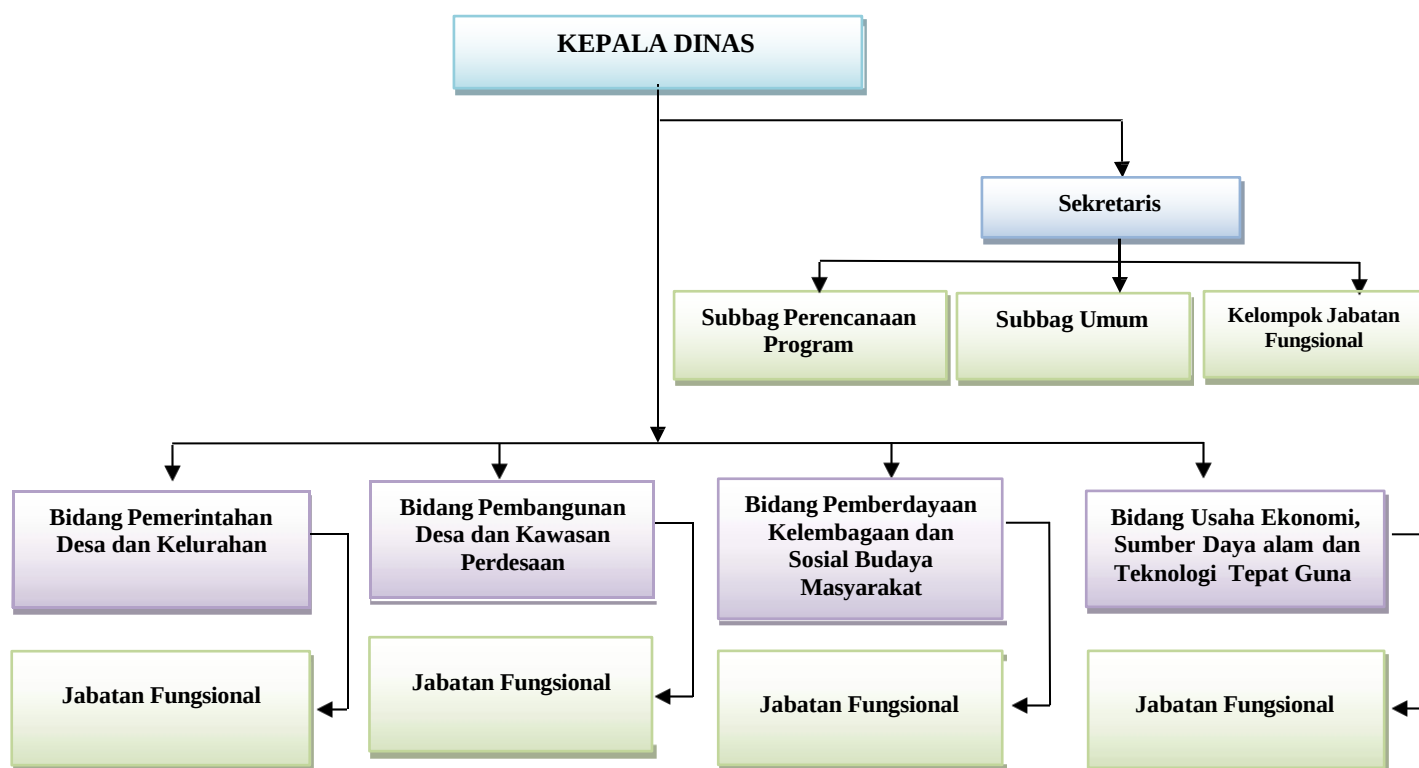
1. Meningkatkan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan. Pengisian Jabatan. Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
2. Meningkatkan Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5. Meningkatkan kualitas program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2.2.4. Struktur Organisasi

Secara struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang, seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



2.2.5. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

A. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2024 memiliki jumlah pegawai sebanyak 77 orang.

Jumlah Pegawai (PNS/Non PNS) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Jenis Kelamin dan Pendidikan

(Jumlah PNS)

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan							Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S3	S2	S1	SM / D 3	SLTA	SLTP	SD	
10	24			14	20	0	10	18	1	5	0	0	34

(Jumlah PPPK)

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
-	-	-		22	19	3	28	3	7	0	0	41

Sumber data: DPMPD Provinsi Kaltim

Sebaran Jumlah PNS dan Non PNS Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Sekretariat dan Bidang di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur per Tahun 2024

(Jumlah PNS)

NO.	BAGIAN / BIDANG	P E N D I D I K A N														JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	1	2	-	-	3	8
2	Bid.Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya masy.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	2	-	-	-	4	4
3	Bidang Usaha Eko Masy. Dan TTG	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	-	-	-	4	3
4	Bidang Pemdes dan kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	1
5	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaaan	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	-	-	4	4

(Jumlah PPPK)

NO.	BAGIAN / BIDANG	P E N D I D I K A N														JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat	-	-	-	-	4	1	1	-	3	5	1	-	-	-	10	6
2	Bid.Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya masy.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2
3	Bidang Usaha Eko Masy. Dan TTG	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	-	-	-	-	3	4
4	Bidang Pemdes dan kelurahan	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	1	-	-	4	2
5	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaaan	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	4	2

Sumber data: DPMPD Prov. Kaltim

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Sarana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

	SARANA KERJA YANG TERSEDIA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tanah dan Bangunan kantor	8.228 m2	Baik
2.	Kendaraan Roda 4	16 buah	Baik
3.	Kendaraan Roda 2	10 buah	Baik
4.	Komputer PC	22 buah	Baik
5.	Laptop	31 buah	Baik
6.	Mesin Tik	9 buah	Baik
7.	Telepon	1 unit	(0541) 7779725/ Baik
8.	Telepon/Faximil	1 Unit	(0541) 7779726 / Baik
9.	Mesin Foto Copy	3 unit	Kurang Baik
10.	AC	74 buah	Kurang Baik
11.	Listrik	1 jaringan	Baik
12.	Air	1 jaringan	Baik
13.	Telepon	2 jaringan	Baik
14.	Area Parkir	3 area	Baik
15.	Ruang Rapat	2 ruang	Baik
16.	Taman	1 area	Baik
17.	Masjid	1 unit	Baik
18.	Printer	28 Buah	Baik
19.	Brankas	3 unit	Baik
20.	Mebel Meja	45 unit	Baik
21.	Mebel Kursi	52 unit	Baik
22.	Lemari	45 unit	Baik
23.	Dispenser	4 unit	Baik
24.	Lemari Es	4 unit	Baik
25.	Sound System	2 unit	Baik
26.	Proyektor	2 unit	Baik

27.	Televisi	10 unit	Baik
28.	Whiteboard	2 unit	Baik
29.	Scanner	6 unit	Baik

Sumber data : DPMPD Provinsi Kaltim

2.2.6 Kinerja Pelayanan pada masing-masing Bagian/Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Sekretariat

- Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
 2. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
 3. Memfasilitasi Kebijakan Perencanaan Regulasi yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 4. Memfasilitasi Diseminasi dan Informasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Subbagian Umum mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
 2. Memfasilitasi peningkatan kualitas dan pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 3. Meningkatkan kualitas hubungan dengan Perangkat Daerah/Instansi Terkait

- Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

Mengkoordinir penyusunan, pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.

2. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

- Melaksanakan pengkajian pengembangan program Bidang Pemerintahan desa/kampung dan Kelurahan.
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan.
- Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, berkenaan dengan manajemen pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, Penguatan Kapasitas Sekretaris Desa.
- Pengelolaan keuangan Desa/Kampung (ADD/ADK), Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa, administrasi desa/kampung dan kelurahan.
- Peraturan desa/kampung, serta laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan.
- Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, serta fasilitasi tanah kas desa.
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.
- Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa.
- Sosialisasi Regulasi Tentang Pemerintahan Desa.
- Lomba Desa dan Kelurahan.
- Fasilitasi Penataan Kode Desa dan Kelurahan.
- Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa.

- Fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan desa/kampung dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
 - Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan pengembangan desa/kampung dan kelurahan, serta data pengelolaan keuangan desa/kampung.
3. Bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan
- Melaksanakan pengkajian dan pengembangan program pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembangunan desa.
 - Melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.
 - Mengumpulkan dan mengolah data pembangunan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat perdesaan sesuai dengan kewenangan lokal.
 - Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan lintas sektor masuk ke desa berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - Melaksanakan pemetaan penempatan dan relokasi pendamping desa.
 - Melaksanakan rekrutmen, monitoring dan evaluasi kegiatan pendamping desa.
 - Melakukan kajian terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan (Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis)
 - Melakukan fasilitasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan perdesaan.
 - Melakukan pembinaan,fasilitasi,perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan perdesaan.
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan pilot project pembangunan kawasan perdesaan.

- Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan perdesaan.
 - Melakukan pembinaan dan pengembangan Informasi desa dan kelurahan.
 - Melakukan Pembinaan dan pengembangan sistem informasi desa dan kelurahan meliputi pendayagunaan data profil desa/kampung dan kelurahan, sistem informasi posyandu, data informasi perkembangan desa.
 - Melakukan pengembangan sistem informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
4. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
- Melaksanakan pengkajian pengembangan program bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat.
 - Melaksanakan pembinaan peningkatan ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
 - Fasilitasi dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap HIV-AIDS, penyalahgunaan narkoba dan penyakit menular/tidak menular melalui Lembaga Masyarakat Kaltim Sehat (LMKS).
 - Pembinaan dan peningkatan peran aktif kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan melalui revitalisasi dan optimalisasi peran posyandu.
 - Memberikan pembinaan, pelayanan data dan peningkatan peran aktif yang berkaitan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

- Memfasilitasi pelaksanaan PMT-AS dan pelaksanaan PMT-AS dan penyelenggaraan perlombaan pelaksana PMT-AS terbaik.
- Memfasilitasi pelaksanaan perlombaan pelaksana terbaik gotong royong masyarakat.
- Memberikan pembinaan dan peningkatan peran aktif Kader PKK dan pelayanan data yang berkaitan dengan PKK.
- Memberikan Pembinaan dan Fasilitas Kampung KB.
- Memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui partisipasi pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pengurangan emisi.
- Memberikan pembinaan dan fasilitas pemantapan nilai-nilai budaya adat serta peningkatan kapasitas dan pelestarian adat maupun penyediaan data Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
- Memberikan fasilitas pembinaan Pengarustamaan Gender (PUG).

5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

- Melaksanakan pengkajian dan pengembangan program yang berkaitan dengan Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG.
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitas kegiatan usaha ekonomi masyarakat.
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitas kegiatan pendayagunaan TTG.
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitas kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana perdesaan.
- Membuat pedoman pelaksanaan program/kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG.
- Memperkuat pengembangan ekonomi masyarakat berkelanjutan (pertanian, aquakultur) berbasis pemberdayaan masyarakat.

- Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan Pasar Desa, Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
- Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Memberikan fasilitasi bantuan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perdesaan.
- Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berwirausaha, dan selanjutnya memberikan pembinaan sehingga menjadi usaha yang berhasil.
- Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan UMKM.
- Menampung aspirasi masyarakat terkait dengan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Penanggulangan Kemiskinan.
- Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan Penduduk Miskin, Pasar Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam.
- Melakukan pembinaan Pos Pelayanan Teknologi, serta Warung Teknologi Perdesaan (Wartekdes).
- Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengelola Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek).
- Memfasilitasi promosi dan informasi produk teknologi tepat guna unggulan yang ramah lingkungan melalui gelar Teknologi Tepat Guna.
- Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam.
- Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan teknologi tepat guna.
- Fasilitasi Pengembangan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana disajikan pada **Tabel T-C. 30** sebagai berikut :

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Provinsi Kalimantan Timur

	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD (%)		Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisis
				2024	2026	2024	2026	2026	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat		Presentase desa yang difasilitasi penataan desanya	1,31	2,14	1,31	-	5,11	-
			Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	2,38	2,97	2,38	-	3,57	-
			Presentasi Desa yang mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25	35	25	-	45	-
			Persentase Desa dan Kelurahan yang mampu mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	2,75	3,25	2,75	-	3,75	-
			Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	82	84	82	-	86	-
			Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100	100	100	-	100	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur** sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 80 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023, Kalimantan Timur masih menyisakan 4 desa tertinggal yang harus di tuntaskan.
- Konsep One Village One Product (OVOP) adalah konsep yang sedang berkembang di negara-negara ASEAN, dimana setiap desa menetapkan satu produk unggulan yang memiliki keunikan dan daya saing di pasar domesik dan internasional.
- Masih banyak desa yang belum memanfaatkan teknologi informasi (website dan media sosial) untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa.
- Berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi <http://prodeskel.kemendagri.go.id/>, masih terdapat 171 desa dan kelurahan di provinsi kalimantan timur yang belum pernah melakukan input data prodeskel.
- Masih banyak desa yang tidak terjangkau akses telekomunikasi, jaringan internet dan blankspot di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga terhambat dalam pengisian data-data pembangunan.
- Kurangnya pemahaman terhadap peraturan desa yang selalu dinamis
- kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa
- sering terjadi konflik terkait batas antar desa
- rentang kendali pelayanan kepada masyarakat di desa menjadi tidak maksimal

- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa
- belum optimalnya peningkatan kapasitas bumdes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa
- Belum optimalnya pendaftaran badan hukum Bumdes di desa berkembang dan tertinggal
- Belum optimalnya masyarakat miskin ekstrim yang dilibatkan dalam usaha Bumdes
- Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
- percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
- Belum optimalnya pengelolaan hasil hutan bukan kayu di Desa yang memiliki tutupan hutan

a. Sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Indeks Desa membangun, Kondisi 841 Desa se- kalimantan Timur berdasarkan **Indeks Desa Membangun (IDM)** tahun 2024 tersebut terpetakan sebagai berikut :

Status Desa Kalimantan Timur	IDM Tahun							
	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mandiri	0	2	11	51	87	136	209	265
Maju	8	32	107	202	312	349	364	377
Berkembang	140	289	415	456	387	339	263	195
Tertinggal	393	381	285	128	54	17	5	4
Sangat Tertinggal	295	137	23	4	1	0	0	0
Total	836	841	841	841	841	841	841	841

Status Desa Kalimantan Timur	Analisis Trend (YoY)							
	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mandiri	0,00%	0,24%	1,31%	6,06%	10,34%	16,17%	24,85%	31,51%
Maju	0,95%	3,80%	12,72%	24,02%	37,10%	41,50%	43,28%	44,83%
Berkembang	16,65%	34,36%	49,35%	54,22%	46,02%	40,31%	31,27%	23,19%
Tertinggal	46,73%	45,30%	33,89%	15,22%	6,42%	2,02%	0,59%	0,48%
Sangat Tertinggal	35,08%	16,29%	2,73%	0,48%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Melihat kondisi masih adanya desa tertinggal di Kalimantan Timur yaitu masih ada 4 desa tertinggal dan mandiri 265 desa, Maju 377 Desa, Berkembang 195 Desa. Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur maka yang menjadi isu penting adalah Masih terdapat 4 desa tertinggal di Kalimantan Timur.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal.
- Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
- Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
- Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.
- Adanya kesenjangan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing kawasan.

- Belum optimalnya penggalian dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa.
- Belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi SDA lokal.
- Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
- Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan.
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
- Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Belum terpenuhinya jumlah perangkat Desa dan Kelurahan yang memenuhi persyaratan.
- Belum tersedianya tanah kas Desa.
- Belum optimalnya penegasan batas antar desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Belum optimalnya Pembangunan Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
- Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kelurahan.

c. Dampak

1. Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
2. Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan

d. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

- **Tantangan** yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan pelayanan antara lain :

- (1) Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta;
- (2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an dan saat ini menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan;

- (3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
 - (4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
 - (5) Sumber daya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
 - (6) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional. (Hal. 26)
- **Peluang** dalam peningkatan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai Peluang dan berasal dari internal dan bisa di kontrol (*Controllable*) adalah :

1. Jumlah sumber daya manusia yang memadai.
2. Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
3. Koordinasi yang baik dengan Masyarakat atau perangkat Desa/Kelurahan.
4. Tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai.

Sedangkan beberapa hal yang dikategorikan sebagai Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bumdesa.
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan mandat dan wewenang yang jelas kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Timur untuk berkiprah lebih maksimal.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dibawah koordiasi 2 (dua) Kementerian yakni Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri.
10. Telah Terbentuknya LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

e. Rekomendasi Strategis Untuk Ditindaklanjuti

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam kaitan dengan hal tersebut maka rekomendasi strategis dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah :

- Kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan perdesaan sebagai salah satu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan rujukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan

pelestarian lingkungan dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan pemerintahan kelurahan.

- Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas dibidang pembangunan perdesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin. Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat miskin), difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik dan aspek lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan secara nasional, dan merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta memiliki posisi strategis dalam mencapai keberhasilan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.

- Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, menunjukkan bahwa RKPD telah selaras dan mengakomodir rumusan program dan kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, yaitu 5 (lima) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 66 (enam puluh enam) sub kegiatan dengan besaran pagu dana indikatif sesuai dengan yang diusulkan, Dari Rumusan dan Program dimaksud sebagaimana disajikan pada **Tabel T-C.31** sebagai berikut :

Tabel T-C. 31
Review RKPD Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

No	Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					40.396.976.000					48.805.199.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					21.589.175.870					24.616.235.441	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.084.000.000	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.084.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	200.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	150.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	125.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	125.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	175.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	175.000.000	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	434.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	434.000.000	

		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	35 ASN	9.854.968.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	35 ASN	9.854.968.200	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	8.852.980.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	8.852.980.000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	357.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	357.360.000	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	200.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	70.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	70.000.000	
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	35.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	35.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	18 Laporan	270.998.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	18 Laporan	270.998.200	
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.630.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.630.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	85.250.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	85.250.000	

1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	38.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	38.500.000	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	27.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	27.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		936.650.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		972.650.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	73.150.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	73.150.000	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	621.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	621.500.000	
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	159.500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	159.500.000	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	82.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	82.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang Berfungsi dengan Baik		3.173.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang Berfungsi dengan Baik		3.173.500.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Lomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	71.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Lomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	71.500.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	132.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	132.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	148.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	148.500.000	

4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	715.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	715.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	165.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	165.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.815.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.815.000.000	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	71.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	71.500.000	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	55.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	55.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusna Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		528.672.459	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		528.672.459	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	31.269.895	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	31.269.895	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	31.269.895	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	31.269.895	
3	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	385.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	385.000.000	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	81.132.669	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	81.132.669	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.880.135.211	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.880.135.211	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
PROGRAM PENATAAN DESA			Persentase Desa yang Difasilitasi Penataan Desannya	2,14%	683.000.000	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Desa yang Difasilitasi Penataan Desannya	2,14%	683.000.000	
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan Desannya	11 Desa	683.000.000	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan Desannya	11 Desa	683.000.000	
1	Identifikasi Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	33.000.000	Identifikasi Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	33.000.000	
2	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa	1 Dokumen	650.000.000	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa	1 Dokumen	650.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			Presentase Peningkatan Status Desa yang Menjadi Maju	2,97%	3.265.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Presentase Peningkatan Status Desa yang Menjadi Maju	2,97%	3.265.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		3.265.000.000	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		3.265.000.000	
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2.515.900.000	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2.515.900.000	
2	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100.100.000	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100.100.000	
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	649.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	649.000.000	

		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Presentase Desa yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal.	35,00%	7.052.650.080	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Presentase Desa yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal.	35,00%	7.052.650.080	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang Mampu Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Secara Optimal.		7.052.650.080	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang Mampu Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Secara Optimal.		7.052.650.080	
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	60.250.080	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	60.250.080	
2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	1.850.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	1.850.000.000	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	770.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	770.000.000	
4	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	275.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	275.000.000	
5	Fasilitasi Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa	185 Orang	82.500.000	Fasilitasi Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa	185 Orang	82.500.000	
6	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	550.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	550.000.000	
7	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	50 Orang	770.000.000	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	50 Orang	770.000.000	

8	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50 Orang	467.500.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50 Orang	467.500.000	
9	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	3 Dokumen	1.457.400.000	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	3 Dokumen	1.457.400.000	
10	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	770.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	770.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Persentase Desa dan Kelurahan yang Mampu Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	3,25%	7.807.150.050	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Desa dan Kelurahan yang Mampu Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	3,25%	7.807.150.050	
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Desa dan Kelurahan yang Mampu Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat		7.807.150.050	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Desa dan Kelurahan yang Mampu Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat		7.807.150.050	
1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	2.103.003.300	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	2.103.003.300	

2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	866.259.900	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	866.259.900	
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya	4 Lembaga	376.794.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya	4 Lembaga	376.794.000	
4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Unit	550.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Unit	550.000.000	
5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	400.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	400.000.000	

6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1.336.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1.336.000.000	
7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	51.700.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	51.700.000	
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	33.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	33.000.000	
9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	2.424.392.850	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	2.424.392.850	
10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	35 Keluarga	33.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	35 Keluarga	33.000.000	
11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	35 Keluarga	33.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	35 Keluarga	33.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, merupakan hasil analisis sesuai kebutuhan. Rumusan berdasarkan hasil Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi pelaksanaan Program tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

Program dan Kegiatan merupakan analisis dan penelaahan Usulan pemangku kepentingan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kampung dan Kelurahan Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan ke Provinsi maupun hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dan Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kampung dan Kelurahan se- Kalimantan Timur.

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu anggaran berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Usulan Program dan Kegiatan dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 disajikan pada **Tabel T-C.32** sebagai berikut :

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Provinsi Kaltim

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
PROGRAM PENATAAN DESA					
I	Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan Desannya	3 Desa	
1	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	
2	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa	1 Dokumen	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
II	Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Kerjasama	
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
2	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dokumen	
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
III	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang Mampu Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Secara Optimal.	25 Desa	
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	
2	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	
4	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	
5	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	185 Orang	
6	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	
7	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	50 Orang	
8	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50 Orang	
9	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	1 Dokumen	

10	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
IV	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Desa dan Kelurahan yang Mampu Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	30 Desa	
1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	
2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya	40 Lembaga	
4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 unit	
5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	
6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Dokumen	

7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	
9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	
10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	35 Keluarga	
11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	35 keluarga	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	

VI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	85 Orang	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 Laporan	
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	
VII	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
VIII	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	25 orang	

1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	
IX	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang Berfungsi dengan Baik	150 Buah	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Lomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	

8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	
X	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	
3	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	
XI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
XII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	20 jenis	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 unit	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	

3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	
4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 unit	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	25 unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Rencana Kerja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah mendukung pencapaian target pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan daerah dan perangkat daerah terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memiliki arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, mengamanatkan pada Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan dengan menempatkan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai prioritas akan mendorong komunitas di tingkat desa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Salah satu persyaratan utama dalam pengentasan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memperhatikan dan memberikan prioritas pada penguatan kemandirian, peningkatan kapasitas kerja dan daya saing usaha, peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar dan layanan dasar yang inklusif, pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan intensif, serta pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif.

Hubungan desa-kota yang saling mendukung sebagai satu kesatuan fungsi wilayah berperan sebagai kunci pemerataan ekonomi. Desa dapat menjadi bagian dari rantai pasok untuk mendukung ekosistem ekonomi kota, sementara kota menyediakan akses pasar, teknologi, dan inovasi. Untuk meningkatkan manfaat pertumbuhan ekonomi terhadap seluruh masyarakat, penguatan bisnis melalui koperasi produksi menjadi salah satu prioritas.

Hasil pembahasan desk urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa koordinasi teknis perencanaan pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan dengan hasil pembahasan dan kesepakatan yaitu outcome : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa; dengan dukungan :

1. Program Penataan Desa; sub kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa; Indikator Sub kegiatan : jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa, dengan target 20 unit.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa; Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan target 1 dokumen.

Hasil kesepakatan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Paser : Bankeu Desa dan BUMDes (Bankeu Spesifik) untuk Untuk Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur dasar yang ada di desa, meningkatkan sumber daya manusia dan banyaknya permasalahan kesehatan di tingkat desa di 139 Desa.
2. Kabupaten Kukar : Pelatihan Bimtek Aparatur Pemerintah Desa dan Bankeu Desa dan BUMDesa (Bankeu Spesifik); Banyaknya program dan kegiatan yang harus dibiayai Desa - Masih kurang nya Modal BUMDesa untuk pengembangan potensi menjadi usaha BUMDesa.
3. Kabupaten Berau : Pelatihan Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa; Penyediaan Sarana dan Prasana BUMDesa; Pelatihan kepada Pelaku BUMDesa; Bankeu Desa dan BUMDes (Bankeu Spesifik) dalam rangka melaksanakan program Pembangunan dan eningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung, Pemerintah Kampung membutuhkan dukungan Dana dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat khusus dengan peruntukan dan pengelolaannya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan yang dibiayai meliputi program/kegiatan dibidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung, bidang pembinaan kemasyarakatan kampung dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung sesuai dengan skala prioritas penggunaan dana Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat Khusus bagi Pemerintah kampung, ssuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang

Desa.

4. Kabupaten Penajam Paser Utara : Bankeu Desa dan BUMDes (Bankeu Spesifik) yaitu Kurangnya fasilitas pertanian yang memadai di area persawahan, dibutuhkannya sarana dan prasarana guna pertanian dan di butuhkannya pelatihan manajemen usaha dan teknologi pertanian bagi pengurus dan kelompok tani binaan BUMDes.
5. Kabupaten Kutai Barat : Bankeu Desa dan BUMDes (Bankeu Spesifik) yaitu Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
6. Kabupaten Kutai Timur : Bankeu Desa dan BUMDes (Bankeu Spesifik) yaitu Bankeu Desa dan BUMDes Kabupaten Kutai Timur
7. Kabupaten Mahakam Ulu : Bankeu Desa dan BUMDes (Bankeu Spesifik) dalam rangka Ketahanan Pangan untuk mendukung Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (BMG) di 50 Kampung.

Hasil kesepakatan forum lintas Perangkat Daerah disepakati program prioritas yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat, Lembaga Adat dan Hukum Adat; indikator Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat Desa (LKDA), dengan target tahun 2026 adalah 3,56 % (30 Desa); dengan output utama Pemberdayaan Desa melalui kebijakan penurunan kemiskinan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Dalam mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029 , maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Tujuan Strategis yaitu :

- Berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan;
- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
- Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme

Pemerintahan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

- Meningkatkan status desa
- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kerjasama Desa
- Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Desa
- Mendorong Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya status desa	Peningkatan Fasilitas Penataan Desa	Meningkatkan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan. Pengisian Jabatan. dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kerjasama Desa	Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatkan Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
	Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Desa	Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Mendorong Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemsayarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan	Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel	Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatkan kualitas program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya status desa	Persentase Desa Mandiri	26,40%
			Persentase Fasilitasi Penataan Desa	0,35 % (3 Desa)
		Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	28,57 % (2kerjasama)
		Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2,97 % (25 Desa)
			Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	2,97 % (25 Desa)
		Mendorong Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	3,2 % (27 Desa)
			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	4,2 %
		Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	86
			Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100 %

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor- Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Rumusan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Renstra 2025-2029 guna mendukung dan melaksanakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur terkait erat dengan tujuan ***“Terwujudnya Kaltim Sukses”*** dengan sasaran ***“Berkurangnya Kemiskinan Dan Kesenjangan”***.

Strategi DPMPD dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta mencapai tujuan dan sasaran adalah Peningkatan kapasitas dan peran aktif lembaga ekonomi desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan. Strategi peningkatan kapasitas dan peran aktif lembaga ekonomi desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan dijalankan melalui pelatihan manajemen usaha, penguatan modal BUMDes, serta pendampingan dalam pengelolaan unit-unit usaha produktif. Pemerintah Daerah juga turut memfasilitasi akses pasar dan kemitraan antara BUMDes dan pelaku usaha besar agar produk desa memiliki daya saing. Keterlibatan aktif masyarakat pun didorong dalam perencanaan dan pengelolaan usaha desa. Hal tersebut turut didukung oleh regulasi serta pemberian insentif fiskal dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan langkah langkah yang dijelaskan, diharapkan lembaga ekonomi desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan di perdesaan dengan menciptakan sumber penghidupan yang inklusif dan berkelanjutan.

Major Projec pada DPMPD Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Penyusunan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Administrasi dan peningkatan kapasitas Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Fasilitasi Penataan Desa
9. Fasilitasi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
10. Fasilitasi Tata Kelola Desa dan peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan Anggota BPD
11. Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan Desa ; Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Rekapitulasi Rumusan Program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, penyebaran lokasi dan kebutuhan dana/pagu indikatif dapat dijelaskan pada **Tabel T-C. 33** terlampir dalam lampiran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

4.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 sebagai berikut :

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;

B. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Administrasi Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
11. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
12. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah

C. Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

12. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
13. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
14. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
16. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
17. Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai
18. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
19. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
22. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
23. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
24. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
26. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
27. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
28. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
29. Pengadaan Mebel
30. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
31. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
32. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
34. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

35. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
37. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
38. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
39. Identifikasi. Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi
40. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
41. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
42. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
43. Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
44. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
45. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
46. Fasilitasi Penyusunan. Perencanaan. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
47. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
48. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
49. Fasilitasi Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
50. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
51. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
52. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
53. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

54. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
55. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
56. Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu.LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
57. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
58. Fasilitasi Penyediaan Sarana danPrasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). LembagaAdat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
59. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
60. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
61. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
62. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman. Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
63. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
64. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga. Warga. Dan Kelompok Masyarakat
65. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

D. Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan rencana kerja 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Pagu Indikatif sebesar 37.462.537.000,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk pembiayaan 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 65 (enam puluh empat) Sub Kegiatan.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menjadi sangat penting dan harus dilaksanakan sebagai langkah pengambilan kebijakan dalam menangani persoalan-persoalan dalam bentuk rumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pemerintah dalam bidang pemberdayaan, mengadopsi kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berbasis masyarakat dan keberpihakan kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk :

- a. Bahan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2026;
- b. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (RKA/DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2026;
- c. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan rencana kebijakan dimasa

mendatang oleh jajaran pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang pemberdayaan masyarakat.

RENJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri no. 86 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Perangkat Daerah diamanahkan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA). Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2026, merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis karena merupakan embrio penyusunan APBD Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026, dimana uraian jenis program dan kegiatan tetap mengacu pada dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 yang bersama-sama disusun oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2026 akan dijabarkan sebagai acuan bagi para pengelola program/kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran.

Usulan kegiatan dan besaran alokasi anggaran yang telah ditetapkan ini selanjutnya akan dibahas dalam rapat – rapat koordinasi prioritas pembangunan lintas bidang dalam lingkungan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur dengan memperhatikan aspirasi dan skala prioritas serta *core bisnis indicator* / indikator kinerja utama Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur yang selanjutnya akan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang akan disahkan/disetujui oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Bappeda Prov. Kalimantan Timur akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan prioritas kegiatan Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2026, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
11. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 –2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai pedoman dan landasan bagi jajaran Kepala Bidang

dan Sekretariat serta Kepala UPTD dalam menyusun dan merencanakan program dan kegiatan Tahun 2026, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 adalah :

1. Mewujudkan keselarasan program kegiatan antara Rancangan Akhir RKPD dengan implementasi usulan kegiatan dari Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam usulan jenis pekerjaan;
3. Melakukan inventarisasi dan kesesuaian program dan kegiatan, sesuai dengan skala prioritas yang harus diselesaikan pada tahun 2026;
4. Menciptakan mekanisme pengendalian dan membangun sistem kinerja pembangunan yang terarah, transparan dan terukur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH** berisi tentang : Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang: Perencanaan Penyusunan Program dan Kegiatan beserta Pendanaan pada Tahun 2026 berdasarkan pada RKPD Prov. Kaltim Tahun 2026.
- BAB V PENUTUP** berisi catatan yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (n-1)

Evaluasi Kinerja Tahun Lalu terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur, Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama dari Renstra Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur 2024 – 2026 dan Realisasi Renstra serta Evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur 2024 – 2026.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024 dari 4 Program dan 23 Kegiatan 61 Sub Kegiatan, Pagu yang tersedia untuk Dinas Perhubungan sebesar Rp. 77.099.420.482,- terealisasi sebesar Rp. 74.171.376.759,- atau 95,83% terhadap pagu dan dana yang tidak terserap (Silpa) sebesar Rp. 2.928.043.723,- atau 3,80%. Pagu yang tersedia untuk UPTD Terminal sebesar Rp. 14.122.279.272,- terealisasi sebesar Rp. 12.616.478.539,- atau 89,34% terhadap pagu dan dana yang tidak terserap (Silpa) sebesar Rp. 1.505.800.733,- atau 10,66% dan untuk keseluruhan Pagu sebesar Rp. 91.221.699.754,- terealisasi sebesar Rp. 86.445.643.806,- atau 95,14% terhadap pagu dan dana yang tidak terserap (Silpa) sebesar Rp. 4.433.844.456,- atau 4,86%. Dana Silpa tersebut merupakan hasil efisiensi dari belanja rutin dan pendukung kegiatan serta Silpa dari proses pelelangan pengadaan barang/jasa dan Belanja yang tidak terserap dikarenakan pemutusan kontrak, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel : 2.1.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu / 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan/2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=((10/4)
2 15 00	Dinas Perhubungan									
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	76 Indeks	Indeks	70 Indeks	72,81 Indeks		70 Indeks	18,52	24%
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	75 %	%	100 %	100 %		100 %	0	0%
2 15 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	90,5 %	%	84 %	84 %		92 %	30,77	34%
2 15 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	0	0%
2 15 01 1 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1	50%
2 15 01 1 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	14 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1	50%
2 15 01 1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	85 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Laporan	2	50%
2 15 01 1 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	40 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Laporan	7	35%
2 15 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	96 %	%	93 %	95,14 %	102%	94 %	13,35	14%
2 15 01 1 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/Bulan	79 Orang/Bulan	82 Orang/Bulan	74 Orang/Bulan	90%	145 Orang/Bulan	128	88%
2 15 01 1 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6	50%
2 15 01 1 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6	50%

2	15	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen	8	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	0	0%
2	15	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	18	Laporan	6	50%
2	15	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Dokumen	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	50%
2	15	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	93	%	%	91	%	91	%	100%	92	%	0	0%	
2	15	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	8	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	100%
2	15	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	16	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	1	50%
2	15	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	20	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100%	4	Laporan	1	25%
2	15	01	1	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	100	%	%	100	%	100	%	100%	100	%	47,62	48%	
2	15	01	1	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	5	42%
2	15	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi >20JP	25	%	%	17	%	23,52	%	138%	20	%	8,84	35%	
2	15	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	9	Paket	0	Paket	0	Paket	#DIV/0!	1	Paket	1	#DIV/0!
2	15	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	100%
2	15	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	0%
2	15	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35	Orang	84	Orang	20	Orang	43	Orang	215%	20	Orang	12	34%
2	15	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	93	%	%	91	%	91	%	100%	92	%	0	0%	
2	15	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	11	Paket	11	1100%
2	15	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	149	Paket	27	Paket	27	Paket	100%	8	Paket	6	100%
2	15	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	42	Paket	8	Paket	8	Paket	100%	6	Paket	4	100%
2	15	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	70	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	50%

2	15	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	2	Dokumen	0	0%
2	15	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	2	Dokumen	0	0%
2	15	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah		%		%	65	%	65	%	100%	0	%	0	#DIV/0!
2	15	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	19	Unit	4	Unit	4	Unit	100%			0	#DIV/0!
2	15	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100	%		%	100	%	100	%	100%	100	%	50	50%
2	15	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	50%
2	15	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	52	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	50%
2	15	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	50%
2	15	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	92,5	%		%	66	%	66	%	100%	92	%	0	0%
2	15	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	Unit	6	Unit	2	Unit	2	Unit	100%	2	Unit	1	50%
2	15	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	28	Unit	15	Unit	15	Unit	100%	9	Unit	5	167%
2	15	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	0	0%
2	15	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	149	Unit	280	Unit	413	Unit	413	Unit	100%	214	Unit	12	8%
2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Darat	0,44	Angka			0,41	Angka	0,41	Angka	100%	0,41	Angka	0	0%
							Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	55	%			50,74	%	50,74	%	100%	52,50	%	0	0%
							Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang	35	%			25	%	25	%	100%	30	%	0	0%
2	15	02	1	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Penetapan Dokumen atau Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan	2	Dokumen		Dokumen	80	Dokumen	80	Dokumen	100%	85	Dokumen	0	0%
2	15	02	1	01	04	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	2	Dokumen	0	Unit	0	Dokumen	0	Dokumen	#DIV/0!	0	Dokumen	0	0%

2	15	02	1	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	55	%	%	80	%	80	%	100%	85	%	0	0%	
2	15	02	1	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	751	Unit	4839	Unit	2977	Unit	2977	Unit	100%	22060	Unit	0	0%
2	15	02	1	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun		%	%		%		%			%	0	#DIV/0!	
2	15	02	1	03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%		0	#DIV/0!	
2	15	02	1	05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang dipatuhi	4	Dokumen		Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	0	0%
2	15	02	1	05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	4	Laporan	52	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100%	10	Laporan	1	25%
2	15	02	1	05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4	Laporan	24	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	1	25%
2	15	02	1	05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	Laporan	2	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	1	100%
2	15	02	1	07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang Dilakukan Ramp Check	1100	Unit		Unit	950	Unit	950	Unit	100%	1000	Unit	0	0%
2	15	02	1	07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	3	Laporan	17	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	3	Laporan	0	0%
2	15	02	1	07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10	Laporan	63	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100%	10	Laporan	3	30%
2	15	02	1	07	15	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9	Laporan	36	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100%	9	Laporan	1	11%
2	15	02	1	08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Beroperasi	565	Unit		Unit	15	Unit	15	Unit	100%	17	Unit	0	0%
2	15	02	1	08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4	Unit	21	Laporan	4	Unit	4	Unit	100%	4	Laporan	0	0%
2	15	02	1	08	03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	Unit	37	Unit	15	Unit	15	Unit	100%	0	Unit	0	#DIV/0!

2	15	02	1	09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	0	0%
2	15	02	1	09	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	0	0%
2	15	02	1	09	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0%
2	15	02	1	13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	130 Izin	Unit	100 Unit	100 Unit	100%	120 Unit	29	22%
2	15	02	1	13	01	fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	130 Unit	207 Unit	100 Unit	100 Unit	100%	120 Unit	29	22%
2	15	02	1	13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan	19 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	1	25%
2	15	02	1	14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	325 Izin	Unit	300 Unit	300 Unit	100%	310 Unit	514	158%
2	15	02	1	14	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	56 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	0	0%
2	15	02	1	14	04	fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	325 Unit	389 Unit	300 Unit	300 Unit	100%	310 Unit	514	158%

2	15	03					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Laut dan SDP	0,917	Angka	Angka	0,917	Angka	Angka		0,98	Angka	0	Angka		
								Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran	48,21	Indeks	Indeks	45,45	Indeks	Indeks			Indeks		Indeks		
2	15	03	1	03			Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	85	Unit	Unit	100	Unit	101	Unit	101%	105	Unit	41	48%	
2	15	02	1	03	01		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	85	Unit	246	Unit	100	Unit	101	Unit	101%	105	Unit	41	48%
2	15	02	1	03	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1	Laporan	9	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	0	0%
2	15	03	1	05			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	0	Dokumen	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	#DIV/0!	
2	15	02	1	05	01		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	0	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	#DIV/0!
2	15	03	1	06			Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	65	Badan Usaha	Badan Usaha	60	Badan Usaha	78	Badan Usaha	130%	65	Badan Usaha	70	108%	

2	15	02	1	06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	65	Dokumen	200	Izin	60	Dokumen	78	Dokumen	130%	65	Dokumen	70	108%
2	15	02	1	06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2	Laporan	10	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	1	50%
2	15	03	1	09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pemenuhan fasilitas utama dan penunjang pelabuhan laut	41	%		%	3	%	3	%	100%	1	%	0	0%
2	15	05	1	01	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1	Unit	0	Unit	2	Unit	2	Unit	100%	1	Unit	0	0%
2	15	03	1	10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan fasilitas utama dan penunjang pelabuhan SDP	53	%		%	3	%	3	%	100%	1	%	0	0%
2	15	05	1	10	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	2	Unit	0	Unit	2	Unit	2	Unit	100%	1	Unit	0	0%
2	15	05	1	10	09	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	24	Unit	0	Unit	2	Unit	2	Unit	100%	1	Unit	0	0%
2	15	05				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	40	%		%	40	%	40	%	100%	45	%	0	0%
2	15	05	1	01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	40	%		%	50	%	40	%	80%	45	%	0	0%
2	15	05	1	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	0%
2	15	05	1	01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian			0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%				

2 15 00					UPTD Terminal															
2	15	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	70	%	%	60	%	60	%	100%	63	%	0	0%	
2	15	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	40	Paket	8	Paket	8	Paket	100%	8	Paket	0	0%
2	15	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan/Perlengkapan KantorJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	37	Paket	6	Paket	6	Paket	100%	7	Paket	5	100%
2	15	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	14	Paket	7	Paket	7	Paket	100%	5	Paket	3	150%
2	15	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	50%
2	15	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	%	50	%	50	%	100%	%				#DIV/0!	
2	15	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	10	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	Unit			# DIV/0!
2	15	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100	%	%	100	%	100	%	100%	100	%	50	50%	
2	15	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	50%
2	15	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	50%
2	15	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	50%
2	15	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	50	%	%	30	%	30	%	100%	40	%	0	0%	
2	15	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	7	Unit	9	Unit	9	Unit	100%	9	Unit	7	70%
2	15	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	37	Unit	8	Unit	42	Unit	42	Unit	100%	39	Unit	0	0%
2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Darat	0,44	%	%	0,41	%	0,41	%	100%	0,41	Angka	0	0%	
2	15	02	1	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Terminal Tipe B	58	%	%	53	%	53	%	100%	63	%	0	0%	
2	15	02	1	03	06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	7	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	# DIV/0!	0	Unit	0	0%
2	15	02	1	03	07	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2	Unit	0	Unit	2	Unit	2	Unit	100%	1	Unit	0	0%

2	15	02	1	03	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	7	Unit	0	0%
2	15	02	1	03	09	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi	0	Orang	0	Orang	7	Orang	3	Orang	43%	6	Orang	0	#DIV/0!
2	15	02	1	03	10	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2	Unit	3	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	2	Unit	0	0%
2	15	02	1	03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	5	Unit	1	Unit		Unit		Unit	#DIV/0!	0	Unit	0	0%

Tabel 2.1.2
Program/Kegiatan, Anggaran dan Capaian Tahun n-2 (2024) Sumber Dana Murni dan Perubahan

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS PERHUBUNGAN					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.270.784.614	28.050.658.171	95,83
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100%				
	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	891.212.000	800.573.221	89,83
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	338.000.000	280.652.060	83,03
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	114.400.000	111.248.873	97,25
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	40.600.000	37.732.000	92,94
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	145.412.000	130.148.062	89,50
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	252.800.000	240.792.226	95,25
	Persentase Realisasi Anggaran	93%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.177.617.384	18.523.318.205	96,59
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.367.217.384	17.740.696.003	96,59
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	672.720.000	656.760.000	97,63
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.300.000	51.338.800	89,60
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.320.000	2.781.000	83,77
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54.800.000	52.655.500	96,09
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	22.260.000	19.086.902	85,75
	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	91%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	93.000.000	86.621.950	93,14
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	48.025.700	96,05
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.000.000	3.832.000	95,80
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	39.000.000	34.764.250	89,14

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	100%	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	48.200.000	47.712.158	98,99
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	48.200.000	47.712.158	98,99
	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	280.000.000	276.748.732	98,84
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	9.989.500	99,90
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	56.400.000	54.498.050	96,63
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	213.600.000	212.261.182	99,37
	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.285.821.315	2.244.434.402	98,19
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	49.991.000	99,98
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	428.621.315	412.085.000	96,14
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	149.408.000	99,61
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.509.200.000	1.495.419.869	99,09
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	49.456.558	98,91
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	98.000.000	88.073.975	89,87
	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	65%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	452.010.000	439.770.000	97,29
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	452.010.000	439.770.000	97,29
	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.186.191.348	4.786.818.403	92,30
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	24.228.000	96,91
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	992.000.000	835.680.403	84,24
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.169.191.348	3.926.910.000	94,19
	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	66%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	856.732.567	844.661.100	98,59
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.160.000	102.150.300	99,02
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245.572.567	238.564.600	97,15
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	8.000.000	7.300.000	91,25
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	413 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000	496.646.200	99,33

Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Perhubungan yang Berkualitas dan Berkeselamatan ke Pusat-Pusat Perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan (Angka)	0,006	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	43.521.835.868	42.134.021.352	96,81
	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)	175				
	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP (%)	82				
	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	80%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	39.196.354.750	38.205.110.564	97,47
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2977 Unit	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	39.196.354.750	38.205.110.564	97,47
	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53%	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	809.600.000	708.003.827	87,45
	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	809.600.000	708.003.827	87,45
	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLI Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi	4 Dokumen	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	598.467.500	573.357.695	95,80
	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10 Laporan	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	305.000.000	283.870.095	93,07
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	293.467.500	289.487.600	98,64
	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	78%	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	752.354.466	682.106.127	90,66
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	238.994.500	198.359.771	83,00
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	424.359.966	402.390.414	94,82
	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	89.000.000	81.355.942	91,41
	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	15 Unit	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	445.127.010	399.688.590	89,79
	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	78.207.000	75.263.190	96,24
	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Unit	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	366.920.010	324.425.400	88,42
	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	1 Dokumen	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	821.600.000	733.978.440	89,34
	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	731.600.000	651.176.075	89,01
	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	90.000.000	82.802.365	92,00

Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Perhubungan yang Berkualitas dan Berkeselamatan ke Pusat-Pusat Perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	100 Unit	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	597.332.142	554.292.994	92,79
	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	100 Unit	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	262.332.142	249.830.702	95,23
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	335.000.000	304.462.292	90,88
	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	300 Unit	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	301.000.000	277.483.115	92,19
	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	151.000.000	139.156.380	92,16
	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	300 Unit	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	150.000.000	138.326.735	92,22
	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP (Angka)	0,96	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.224.400.000	2.981.221.618	92,46
	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	100 Unit	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	331.283.000	321.180.445	96,95
	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	100 Unit	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	191.600.000	184.106.713	96,09
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	139.683.000	137.073.732	98,13
	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	2 Dokumen	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	846.261.300	768.461.358	90,81
	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	2 Dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	846.261.300	768.461.358	90,81

Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Perhubungan yang Berkualitas dan Berkeselamatan ke Pusat-Pusat Perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	60 Badan Usaha	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	252.000.000	248.482.947	98,60
	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan	60 Dokumen	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	118.800.000	115.491.877	97,22
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	133.200.000	132.991.070	99,84
	Jumlah Perencanaan/Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	3 Unit	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1.794.855.700	1.643.096.868	91,54
	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	1.794.855.700	1.643.096.868	91,54
	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	40%	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.082.400.000	1.005.475.618	92,89
	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	50%	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1.082.400.000	1.005.475.618	92,89
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	987.600.000	916.357.778	92,79
	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	94.800.000	89.117.840	94,01
JUMLAH DINAS PERHUBUNGAN				77.099.420.482	74.171.376.759	96,20

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	UPTD TERMINAL					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.565.588.748	4.373.821.507	95,80
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100%				
	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	60%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.768.600	576.793.626	97,14
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	24.577.000	98,31
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.368.600	149.192.970	94,21
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000	76.452.295	95,57
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.400.000	326.571.361	98,84

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	50%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000	51.925.000	86,54
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	51.925.000	86,54
	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.751.820.148	3.597.496.351	95,89
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	8.985.000	99,83
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.000.000	92.815.118	73,66
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.616.820.148	3.495.696.233	96,65
	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	30%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000	147.606.530	92,25
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	26.714.850	76,33
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	120.891.680	96,71
Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Perhubungan yang Berkualitas dan Berkeselamatan ke Pusat-Pusat Perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan (Angka)	0,006	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9.556.690.524	8.242.657.032	86,25
	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)	175				
	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP (%)	82				
	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53%	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	9.556.690.524	8.242.657.032	86,25
	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	7.904.926.660	6.631.764.850	83,89
	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	1 Unit	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	100.000.000	99.509.200	99,51
	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi	7 Orang	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	100.000.000	69.257.703	69,26
	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1.451.763.864	1.442.125.279	99,34
	JUMLAH UPTD TERMINAL			14.122.279.272	12.616.478.539	89,34
JUMLAH DINAS PERHUBUNGAN DAN UPTD TERMINAL			91.221.699.754	86.787.855.298	95,14	

Sumber : SIPD Tahun 2024

Mengacu pada DPA 2-15.0-00.0-00.01 tanggal 29 Desember 2023, alokasi anggaran total SKPD DPA Murni sebesar Rp. 58.273.329.134,- dan DPPA SKPD Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Nomor : 2-15.0-00.0-00.01 tanggal 14 Oktober 2024, alokasi anggaran total SKPD DPA Perubahan sebesar

Rp. 91.221.699.754,-. Rincian sebagaimana pada tabel 2.1.3. di bawah ini :

Tabel 2.1.3
Proporsi Alokasi Anggaran PD Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

No.	Nama Unit dan Jenis Belanja Langsung (BL)	Alokasi Anggaran Tahun 2024	
		DPA Murni	DPPA
1	Dinas Perhubungan	46.589.020.482,-	77.099.420.482,-
2	UPTD Terminal	11.684.308.652,-	14.122.279.272,-
TOTAL		58.273.329.134,-	91.221.699.754,-

Sumber : DPA PD Dishub Prov. Kalimantan Timur TA.2024

Tabel 2.1.4
Proporsi Alokasi Anggaran DPA Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Menurut Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian Belanja Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.760.384.364,-	29.270.784.614,-
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	13.521.836.118,-	43.521.835.868,-
3	Program Pengelolaan Pelayaran	3.224.400.000,-	3.224.400.000,-
4	Program Pengelolaan Perkeretaapiaan	1.082.400.400,-	1.082.400.000,-
Total Anggaran		46.589.020.482,-	77.099.420.482,-

Sumber : DPA PD Dishub Prov. Kalimantan Timur TA.2024

Tabel 2.1.5
Proporsi Alokasi Anggaran DPA Perangkat Daerah UPTD Terminal Menurut Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian Belanja Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4.565.588.748,-	4.566.587.748,-
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	7.118.719.904,-	9.556.690.524,-
Total Anggaran		11.684.308.652,-	14.122.279.272,-

Sumber : DPA PD Dishub Prov. Kalimantan Timur TA. 2024

Tabel 2.1.6
Perkiraan Capaian Tahun 2025
Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

No	Program/Kegiatan	Lokasi	DPA Tahun 2025	Target Capaian 2025 (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		33.615.418.141,-	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	334.646.984,-	90
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	50.113.445,-	100
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	23.110.912,-	98
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	100.011.970,-	90
1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	134.757.541,-	96
1.6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	23.666.544.979,-	100
1.7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	667.920.000,-	100
1.8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Perhubungan)	Samarinda	46.550.000,-	100
1.9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	27.30.000,-	95
1.10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	55.938.500,-	100
1.11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	4.856.526,-	95
1.12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	38.653.800,-	100
1.13	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	7.070.000,-	75
1.14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	19.405.100,-	75
1.15	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	35.602.000,-	100
1.16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	113.355.950	95
1.17	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	9.999.000,-	90
1.18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	47.939.500.-	97
1.19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	51.660.000,-	100
1.20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	49.999.716,-	100
1.21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	309.963.436,-	97
1.22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	201.333.127,-	100
1.23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar,Kubar, Kutim,Paser, PPU,Berau, Luar Daerah	538.313.580,-	100

1.24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	15.424.000,-	100
1.25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	2.637.664,-	95
1.26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	24.994.000,-	100
1.27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	991.999.500,-	100
1.28	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	4.171.292.911,-	100
1.29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	84.720.000,-	100
1.30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	111.843.000,-	100
1.31	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	2.600.000,-	100
1.32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	1.699.431.000,-	97

II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		152.167.662.547,-	
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Samarinda Bontang Balikpapan Kutim,Berau Kukar, PPU Paser	150.606.899.335,-	95
2.2	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Samarinda, Balikpapan, Kukar,Kutim, Berau	178.399.580,-	100
2.3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Samarinda, Balikpapan, Kukar,Kutim, Berau, Paser	58.267.500,-	100
2.4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Samarinda Bontang, Balikpapan Kutim,Kukar PPU,Paser	283.807.275,-	100
2.5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar,Kubar, Kutim,Paser, PPU, Berau	173.745.440,-	100
2.6	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar,Kubar, Kutim,Paser, PPU	70.999.440,-	90
2.7	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar,Kubar, Kutim,Paser, PPU,Berau	40.206.000,-	100

2.8	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Samarinda, Kukar	155.511.585,-	90
2.9	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Samarinda	65.119.552,-	80
2.10	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Kab/Kota se-Kaltim	88.883.670,-	90
2.11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Smd, Bpp	250.024.290,-	85
2.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	10 Kab/Kota se-Kaltim	97.399.440,-	90
2.13	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Kab/Kota se-Kaltim	98.399.440,-	90

III.	Program Pengelolaan Pelayaran		3.750.823.738,-	
3.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Samarinda Balikpapan Bontang PPU Mahulu	153.198.544,-	100
3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Balikpapan, Samarinda	109.700.708,-	100
3.3	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	10 Kab/Kota se-Kaltim	66.321.887,-	100
3.4	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Kab/Kota se-Kaltim	61.800.000,-	100

3.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Aangkutan Laut, Tally Mandiri, Depo Peti Kemas	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar,Kubar, Kutim,Paser, PPU,Berau	111.506.738,-	100
3.6	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kubar	3.248.295.861,-	100
IV	Program Pengelolaan Perkeretaapiaan		119.890.787,-	
4.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Samarinda, Kukar	119.890.787,-	90
	TOTAL		189.653.795.213	100

Tabel 2.1.7
Perkiraan Capaian Tahun 2025 UPTD Terminal

No	Program/Kegiatan	Lokasi	DPA Tahun 2025	Target Capaian 2025 (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		5.007.487.031,-	
1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	25.840.082,-	97
1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	766.855.840,-	95
1.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	78.463.672,-	100
1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar,Kubar, Kutim,Paser, PPU,Berau, Luar Daerah	437.136.000,-	100
1.5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	8.999.999,-	100
1.6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	233.991.850,-	100
1.7	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	2.507.546.588,-	100
1.8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	83.703.000,-	100
1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	864.950.000,-	100
II.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		3.258.877.420,-	
2.1	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Samarinda	475.666.000,-	100
2.2	Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Samarinda, Bontang, Kukar,Paser, PPU, Berau	1.034.000,-	100

2.3	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Samarinda	82.850.000,-	100
2.4	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kukar, PPU, Paser	2.699.327.420,-	77
	TOTAL		8.266.364.451,-	93

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026, sebagaimana di bawah ini :

Target Renstra Perangkat Daerah yang telah diselaraskan dengan RPJMD Prov. Kalimantan Timur 2024 – 2026, sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2.1.8
Target Renstra Perangkat Daerah 2024 – 2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan	Indeks	84	87	91
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Angka	78.50	79.30	80.01
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	85	85.5	86
4	Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0.846	0.864	0.882
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Angka	76	77	78
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	83	85	87
7	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadian	175	165	155
8	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	%	82	86	90
9	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 Keberangkatan	%	0.006	0.005	0.004
10	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	Angka	0.96	0.98	1.00
11	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	%	40	45	55
12	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	70	74	76
13	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100

Sumber : Renstra 2024 – 2026

Tabel 2.1.9
Target Renstra Perangkat Daerah Terhadap
RPD 2024 – 2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan	Indeks	84	87	91

Sumber : Renstra 2024 – 2026

Tabel 2.1.10
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra	Capaian Kinerja Renstra
			2024	2024
1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan	Indeks	84	84,19
2	Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0.846	0.846
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Angka	73	69,40
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	81	82.01
7	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadian	175	144
8	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	%	82	82
9	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 Keberangkatan	%	0.006	0.000
10	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	Angka	0.96	0.96
11	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	%	40	40
12	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	70	72.81
13	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100	100

Sumber : Evaluasi Capaian Renstra 2024

Tabel 2.1.11
Capaian Renstra Perangkat Daerah Terhadap
RPD Tahun 2024 – 2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPD	Capaian Kinerja RPD
			2024	2024
1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan	Indeks	84	84.19

Sumber : Evaluasi Capaian Renstra terhadap RPD 2024 – 2026

Tahun 2024 merupakan tahun awal dari RPD dan Renstra tahun 2024 – 2029, penyesuaian indikator kinerja dilakukan untuk dapat mengakomodir pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pada RPD Prov. Kaltim tahun 2024 – 2026 sektor perhubungan, capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan sebagian besar telah sesuai dengan target yang ditetapkan, capaian kinerja jumlah penumpang terminal yang terlayani tidak dapat sepenuhnya dicapai dikarenakan proses P3D yang masih berlangsung, kondisi prasarana terminal yang masih dalam proses perencanaan untuk rehabilitasi dan kondisi sarana angkutan perkotaan yang belum mendukung sehingga memerlukan waktu dan kinerja untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di terminal tipe B. Proses P3D juga masih berlangsung untuk Pelabuhan Laut Pengumpan Regional dan Pelabuhan/Dermaga Sungai Pengumpan yang menjadi kewenangan Provinsi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk pelaporan SPM Bidang Perhubungan sesuai dengan arahan dari Kemendagri bahwa Bidang Perhubungan sudah tidak termasuk dalam urusan dasar hanya urusan wajib, dan dengan terbitnya Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana terdapat pembagian kewenangan pusat dan daerah khusus untuk sektor Perhubungan lebih terfokus kepada Sektor Transportasi Darat, Laut dan SDP sedangkan untuk kewenangan Sektor Transportasi Udara seluruhnya menjadi kewenangan Pusat.

2.2.1 Capaian dan Analisa Kinerja Renja Tahun 2024

Berdasarkan Renja Tahun Lalu (N-2) / Tahun 2024, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel : 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 Tahun n-5	Tahun 2022 Tahun n-4	Tahun 2023 Tahun n-3	Tahun 2024 Tahun n-2	Tahun 2025 Tahun n-1	Tahun 2026 Tahun n	Tahun 2021 Tahun n-5	Tahun 2022 Tahun n-4	Tahun 2023 Tahun n-3	Tahun 2024 Tahun n-2	Tahun 2025 Tahun n-1	Tahun 2026 Tahun n	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(11)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)	(17)	(18)
1	Kuantitas Penumpang (orang)			4.500.000 Orang	6.000.000 Orang	8.100.000 Orang				4.664.922 Orang	8.513.323 Orang	10.049.451 Orang				1. Pertumbuhan ekonomi kaltim yang menunjukkan tren positif sehingga mendorong adanya investasi ataupun bisnis 2. Pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur
2	Kuantitas Komoditas (ton)			307.000.000 Ton	337.000.000 Ton	370.000.000 Ton				323.231.994 Ton	513.031.229 Ton	584.819.416 Ton				
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan						84	57,53	59,10				84,19	57,53	59,10	
4	Prosentase pergerakan sarana transportasi			33%	34%	35%				20%	33,74%	35,11%	35,11%			Sejalan dengan mulai bergerak naiknya pertumbuhan ekonomi di Kaltim dan semakin baiknya sarana dan prasarana jalan maka ikut mendukung pergerakan sarana transportasi
5	Rasio Konektivitas Provinsi						0,846						0,846			
6	Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi							0,56	0,58					0,56	0,58	
7	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan			70%	80%	85%				89,49%	98,51%	99,86%	99,86%			Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan merupakan <i>major project</i>
8	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan di Provinsi Kaltim							87,01	87,75					87,01	87,75	
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah						76					75,90	69,40			
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan						83					81,47	82,01			
10	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							70,05-72	72-74					70,05-72	72-74	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah							80,24-80,39	80,39-80,8					80,24-80,39	80,39-80,8	
11	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian							75	76					75	76	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti							70	75					70	75	

12	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP			85%	87%	88%				84%	85%	87%	87%			1. Perlu adanya komitmen dari Pemerintah Kab.Kota untuk menyerahkan Pelabuhan dan dermaga kewenangan provinsi 2. Sudah ada SK Gubernur terkait Rencana Induk Pelabuhan Provinsi (RIPP) yang menegaskan kewenangan provinsi terhadap pelabuhan dan dermaga sungai yang menjadi kewenangan provinsi 3. Sudah ada disposisi dari Pj. Gubernur Kaltim untuk segera membentuk tim guna memproses serah terima P3D dermaga-dermaga kewenangan provinsi dari pemerintah pusat dan kab/kota ke pemprov.kaltim 4. Telah melakukan rapat/pertemuan untuk tindak lanjut membahas P3D dermaga-dermaga di Kaltim
13	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP						0,96	0,98	0,98					0,98	0,98	
14	Rasio Konektivitas Laut & SDP							0,917	0,917					0,917	0,917	
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran							47	48,21					47	48,21	
15	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Lalu			512 Kasus	427 Kasus	342 Kasus	175 Kejadian	165 Kejadian		418 Kasus	195 Kasus	162 Kasus	162 Kasus	165 Kejadian		1. Adanya komitmen terhadap keberlanjutan dan kesinambungan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan 2. Tingginya komitmen pimpinan dan para stakeholder terkait upaya zero ODOL, Penegakkan Hukum terkait ODOL akan dilakukan secara berkelanjutan 3. Adanya upaya Dishub bersama Kepolisian Daerah untuk mensosialisasikan berkendara yang berkeselamatan
16	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP						82	86	86					86	86	
17	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan						0,006	0,005	0,005					0,005	0,005	

18	Rasio Konektivitas Darat							0,41	0,44					0,41	0,44	
	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan							52,50	55					52,50	55	
	Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang							30	35					30	35	
19	Persentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian			20%	50%	80%				20%	50%	80%	80%			Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian di Kalimantan Timur mengacu pada hasil Studi dan agar dilanjutkan dengan kajian studi lanjutan sesuai dengan tahap yang telah ada
20	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian						40%	45%	45%					45%	45%	
21	Jumlah penumpang terminal yang terlayani			650.000 Penumpang	700.000 Penumpang	750.000 Penumpang				301.083 Penumpang	377.969 Penumpang	337.020 Penumpang	337.020 Penumpang			Perbaikan pelayanan Terminal Penumpang Tipe B dan Angkutan Umum menjadi prioritas untuk dapat menaikkan jumlah pengguna angkutan umum

Tabel : 2.2.2
Capaian Kinerja RENJA Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan					103.69	ST	77,099,420,482.00	73,719,919,580.00	95.62	ST
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	70.00	72.81	104.01	ST	29,270,784,614.00	27,915,980,113.00	95.37	ST
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	100	ST				
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	%	84.00	84.00	100	ST	891,212,000.00	734,578,132.00	82.42	T
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3.00	3.00	100	ST	338,000,000.00	270,142,035.00	79.92	T
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2.00	2.00	100	ST	114,400,000.00	89,942,900.00	78.62	T
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2.00	2.00	100	ST	40,600,000.00	36,927,000.00	90.95	T
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4.00	4.00	100	ST	145,412,000.00	129,417,062.00	89	T
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20.00	20.00	100	ST	252,800,000.00	208,149,135.00	82.34	T
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase Realisasi Anggaran	%	93.00	95.14	102.3	ST	19,177,617,384.00	18,506,410,970.00	96.5	ST
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	82.00	74.00	90.24	T	18,367,217,384.00	17,765,529,370.00	99.49	ST
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12.00	12.00	100	ST	672,720,000.00	656,760,000.00	97.63	ST
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12.00	12.00	100	ST	57,300,000.00	23,289,100.00	40.64	SR
2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2.00	2.00	100	ST	3,320,000.00	2,781,000.00	83.77	T
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12.00	12.00	100	ST	54,800,000.00	52,171,500.00	95.2	ST
2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12.00	12.00	100	ST	22,260,000.00	5,880,000.00	26.42	SR

2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	%	91.00	91.00	100	ST	93,000,000.00	86,621,950.00	93.14	ST
2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	1.00	100	ST	50,000,000.00	48,025,700.00	96.05	ST
2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2.00	2.00	100	ST	4,000,000.00	3,832,000.00	95.8	ST
2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5.00	5.00	100	ST	39,000,000.00	34,764,250.00	89.14	T
2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	%	100.00	100.00	100	ST	48,200,000.00	43,370,058.00	89.98	T
2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12.00	12.00	100	ST	48,200,000.00	43,370,058.00	89.98	T
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	17.00	23.52	138.35	ST	280,000,000.00	276,748,732.00	98.84	ST
2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1.00	1.00	100	ST	10,000,000.00	9,989,500.00	99.9	ST
2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1.00	1.00	100	ST	56,400,000.00	54,498,050.00	96.63	ST
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20.00	43.00	215	ST	213,600,000.00	212,261,182.00	99.37	ST
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	%	91.00	91.00	100	ST	2,285,821,315.00	2,200,627,402.00	96.27	ST
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	1.00	100	ST	50,000,000.00	49,991,000.00	99.98	ST
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	27.00	27.00	100	ST	428,621,315.00	412,085,000.00	96.14	ST
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8.00	8.00	100	ST	150,000,000.00	149,408,000.00	99.61	ST
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	12.00	100	ST	1,509,200,000.00	1,459,093,869.00	96.68	ST
2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3.00	3.00	100	ST	50,000,000.00	49,456,558.00	98.91	ST
2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3.00	3.00	100	ST	98,000,000.00	80,592,975.00	82.24	T

2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	65.00	65.00	100	ST	452,010,000.00	439,770,000.00	97.29	ST
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4.00	4.00	100	ST	452,010,000.00	439,770,000.00	97.29	ST
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	%	100.00	100.00	100	ST	5,186,191,348.00	4,784,591,769.00	92.26	ST
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	12.00	100	ST	25,000,000.00	24,228,000.00	96.91	ST
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	100	ST	992,000,000.00	833,453,769.00	84.02	T
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	100	ST	4,169,191,348.00	3,926,910,000.00	94.19	ST
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	66.00	66.00	100	ST	856,732,567.00	843,261,100.00	98.43	ST
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2.00	2.00	100	ST	103,160,000.00	102,150,300.00	99.02	ST
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15.00	15.00	100	ST	245,572,567.00	238,564,600.00	97.15	ST
2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1.00	1.00	100	ST	8,000,000.00	5,900,000.00	73.75	S
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	413.00	413.00	100	ST	500,000,000.00	496,646,200.00	99.33	ST

2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	Angka	0.01	0.00	200	ST	43,521,835,868.00	41,903,202,751.00	96.28	ST
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadian	175.00	144.00	117.71	ST				
		Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	%	82.00	82.00	100	ST				
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	%	80.00	80.00	100	ST	39,196,354,750.00	38,100,183,264.00	97.2	ST
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	2,977.00	2,977.00	100	ST	39,196,354,750.00	38,100,183,264.00	414.3	ST
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	%	53.00	53.00	100	ST	809,600,000.00	706,902,627.00	87.32	T
2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	1.00	1.00	100	ST	809,600,000.00	706,902,627.00	87.32	T
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi	Dokumen	4.00	4.00	100	ST	598,467,500.00	557,257,695.00	93.11	ST
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	10.00	10.00	100	ST	305,000,000.00	267,770,095.00	87.79	T
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	4.00	4.00	100	ST	293,467,500.00	289,487,600.00	98.64	ST
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	%	78.00	78.00	100	ST	752,354,466.00	658,415,846.00	87.51	T
2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	2.00	2.00	100	ST	238,994,500.00	184,709,771.00	77.29	T
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	10.00	10.00	100	ST	424,359,966.00	399,977,114.00	94.25	ST
2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	9.00	9.00	100	ST	89,000,000.00	73,728,961.00	82.84	T

2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	Unit	15.00	15.00	100	ST	445,127,010.00	391,448,590.00	87.94	T
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	4.00	4.00	100	ST	78,207,000.00	67,023,190.00	85.7	T
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	15.00	15.00	100	ST	366,920,010.00	324,425,400.00	88.42	T
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	Dokumen	1.00	1.00	100	ST	821,600,000.00	705,836,680.00	85.91	T
2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1.00	1.00	100	ST	731,600,000.00	636,674,595.00	87.02	T
2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1.00	1.00	100	ST	90,000,000.00	69,162,085.00	76.85	T
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	Unit	100.00	100.00	100	ST	597,332,142.00	537,728,534.00	90.02	T
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit	100.00	100.00	100	ST	262,332,142.00	245,935,702.00	93.75	ST
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan	4.00	4.00	100	ST	335,000,000.00	291,792,832.00	87.1	T
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	Unit	300.00	300.00	100	ST	301,000,000.00	245,429,515.00	81.54	T
2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Laporan	4.00	4.00	100	ST	151,000,000.00	124,685,380.00	82.57	T
2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit	300.00	300.00	100	ST	150,000,000.00	120,744,135.00	80.5	T

2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	Angka	0.96	0.96	100	ST	3,224,400,000.00	2,915,912,758.00	90.43	T
2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	Unit	100.00	101.00	101	ST	331,283,000.00	313,315,505.00	94.58	ST
2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Unit	100.00	101.00	101	ST	191,600,000.00	177,101,773.00	92.43	ST
2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan	1.00	1.00	100	ST	139,683,000.00	136,213,732.00	97.52	ST
2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	Dokumen	2.00	2.00	100	ST	846,261,300.00	729,937,438.00	86.25	T
2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Dokumen	2.00	2.00	100	ST	846,261,300.00	729,937,438.00	86.25	T
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perizinan	BadanUsaha	60.00	78.00	130	ST	252,000,000.00	248,932,947.00	98.78	ST
2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	60.00	78.00	130	ST	118,800,000.00	102,971,877.00	86.68	T

2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Laporan	2.00	2.00	100	ST	133,200,000.00	145,961,070.00	109.58	ST
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Perencanaan/Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Unit	3.00	3.00	100	ST	1,794,855,700.00	1,623,726,868.00	90.47	T
2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit	2.00	2.00	100	ST	1,794,855,700.00	1,623,726,868.00	90.47	T
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	%	40.00	40.00	100	ST	1,082,400,000.00	984,823,958.00	90.99	T
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	%	50.00	40.00	80	T	1,082,400,000.00	984,823,958.00	90.99	T
2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen	1.00	1.00	100	ST	987,600,000.00	903,400,178.00	91.47	ST
2.15.05.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen	1.00	1.00	100	ST	94,800,000.00	81,423,780.00	85.89	T

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat
2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Terminal					102.69	ST	14,122,279,272.00	12,568,096,882.00	88.99	T
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	70.00	72.81	104.01	ST	4,565,588,748.00	4,362,136,224.00	95.54	ST
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	100	ST				
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	%	60.00	60.00	100	ST	593,768,600.00	567,992,426.00	95.66	ST
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8.00	8.00	100	ST	25,000,000.00	24,577,000.00	98.31	ST
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6.00	6.00	100	ST	158,368,600.00	149,192,970.00	94.21	ST
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7.00	7.00	100	ST	80,000,000.00	76,452,295.00	95.57	ST
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	12.00	100	ST	330,400,000.00	317,770,161.00	96.18	ST
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	50.00	50.00	100	ST	60,000,000.00	51,925,000.00	86.54	T
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1.00	1.00	100	ST	60,000,000.00	51,925,000.00	86.54	T
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	%	100.00	100.00	100	ST	3,751,820,148.00	3,597,968,518.00	95.9	ST
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	12.00	100	ST	9,000,000.00	8,985,000.00	99.83	ST
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	100	ST	126,000,000.00	93,287,285.00	74.04	S
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	100	ST	3,616,820,148.00	3,495,696,233.00	96.65	ST
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	30.00	30.00	100	ST	160,000,000.00	144,250,280.00	90.16	T
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9.00	9.00	100	ST	35,000,000.00	23,358,600.00	66.74	S
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	42.00	42.00	100	ST	125,000,000.00	120,891,680.00	96.71	ST

2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	%	82.00	82.00	100	ST	9,556,690,524.00	8,205,960,658.00	85.87	T
		Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	Angka	0.01	0.00	200	ST				
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadian	175.00	144.00	117.71	ST				
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	%	53.00	53.00	100	ST	9,556,690,524.00	8,205,960,658.00	85.87	T
2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	2.00	2.00	100	ST	7,904,926,660.00	6,625,794,850.00	121.2	ST
2.15.02.1.03.0008	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Unit	1.00	1.00	100	ST	100,000,000.00	99,509,200.00	99.51	ST
2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	Orang	7.00	3.00	42.86	SR	100,000,000.00	47,857,929.00	47.86	SR
2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1.00	1.00	100	ST	1,451,763,864.00	1,432,798,679.00	98.69	ST

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Pada tahun 2024 target kinerja yang tidak tercapai ada pada 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian dimana target kegiatan sebesar 50% tercapai 40% dengan capaian 80%, tidak tercapainya target tersebut dikarenakan diperlukan waktu proses penetapan regulasi menjadi surat keputusan gubernur yang melebihi tahun anggaran 2024.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Pada tahun 2024 target kinerja dari 4 program 22 kegiatan di Dinas Perhubungan dan 2 Program dan 5 kegiatan di UPTD Terminal hampir semua tercapai sesuai target dengan capaian rata – rata 100%, target yang tidak tercapai hanya pada 1 kegiatan yang di jelaskan sebelumnya.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Pada tahun 2024 target kinerja program dan kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu 2 program dan 2 kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi:

1. Indikator : Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan dengan capaian 104 % dari target 70 dan realisasi 71,81. peningkatan capaian ini di karenakan adanya peningkatan 2 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan indikator persentase realisasi anggaran dari target 93% meraih realisasi 95,14% dengan capaian 102,3%; dan
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah dengan indikator peningkatan persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dari target 17% meraih realisasi 23,52% dengan capaian 138,35%.

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Indikator : Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan dengan capaian 200 % dari target 0,01 dan realisasi 0,00 dengan pengertian tidak adanya kecelakaan yang dialami oleh angkutan AKDP selama tahun 2024 capaian ini dikarenakan adanya perbaikan pada pengelolaan Terminal Tipe B sebagai simpul keberangkatan angkutan AKDP, peningkatan sosialisasi pengemudi dan inspeksi manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dan peningkatan kepatuhan dalam perizinan AKDP.

2. Indikator : Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi dengan capaian 117,71% dari target 175 kejadian dan realisasi 144 kejadian kecelakaan di jalan kewenangan provinsi. Capaian ini didukung dengan peningkatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan keselamatan di jalan provinsi, penegakan hukum kendaraan angkutan yang terindikasi *ODOL* dan sinergitas 5 pilar keselamatan transportasi lewat forum LLAJ dan forum keselamatan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

No	Sub SKPD	Kegiatan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 2.15.02.1.02	1. Masih adanya ruas jalan provinsi yang belum laik untuk dipasang fasilitas perlengkapan jalan 2. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait	Kondisi jalan mantap yang bisa dan perlu untuk dipasang fasilitas keselamatan jalan
2	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 2.15.02.1.03	Tidak ada hambatan karena kegiatan berjalan sesuai rencana	Koordinasi yang baik dengan pihak ketiga sehingga pekerjaan selesai sesuai dengan jadwal/kontrak kerja
3	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 2.15.02.1.05	1. Kurangnya Kesadaran pengusaha terkait pentingnya manajemen rekayasa lalu lintas 2. Banyaknya Pengusaha yang mengabaikan/ tidak melaksanakan hasil dari rekomendasi andalalin	Pengusaha yang memiliki kewajiban pengurusan dokumen andalalin dalam proses pembangunan atau pengembangan wilayah
4	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 2.15.02.1.07	Tidak ada hambatan karena kegiatan berjalan sesuai dengan rencana	1. Adanya keinginan untuk membangun sikap / perilaku dan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dari segi sarana dan prasarana untuk mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan 2. Mendukung kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan 3. Pemenuhan tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
5	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.15.02.1.08	Tidak ada hambatan, target telah tercapai	1. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan angkutan barang umum dari Kab/Kota ke Provinsi 2. Pengusaha melakukan perubahan sifat kendaraan angkutan barang umum 3. Mendukung konektivitas daerah terisolir

6	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.15.02.1.09	Tidak ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai rencana	studi yang dilakukan akan menjadi acuan rencana kebijakan Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan
7	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.15.02.1.13	Perusahaan belum memahami mengenai penggunaan aplikasi OSS dalam hal pemenuhan persyaratan perolehan izin	Banyaknya masa berlaku izin penyelenggaraan yang telah lama mati/belum diperpanjang
8	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.15.02.1.14	Perusahaan belum banyak yang memahami mengenai penggunaan aplikasi OSS	1. Adanya prioritas di suatu aplikator ASK sehingga banyak yang melakukan pengurusan 2. Pengusaha melakukan perubahan sifat kendaraan angkutan barang umum 3. Masih tersedianya kuota ASK sehingga ada beberapa perusahaan yang ingin menambah jumlah kendaraan

9	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan 2.15.03.1.03	1. Dalam proses perizinan masih banyak pelaku usaha yang belum paham dalam mengenai tata cara pendaftaran permohonan izin baru ataupun perpanjangan izin secara online pada aplikasi e-ptsp dan website www.oss.go.id 2. Sebagian besar pemilik kapal belum memenuhi persyaratan administrasi karena terkendala dalam proses pengurusan dokumen dimana yang menjadi persyaratan yaitu surat ukur, pas kapal sungai danau dan sertifikat keselamatan, sertifikat kelayakan menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat kartu pengawasan izin trayek dan sertifikat standar (pengoperasian kapal) 3. Adanya peralihan kewenangan pengalihan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari BPTD kelas II kalimantan timur kepada KSOP kelas I samarinda, sehingga proses penerbitan sertifikat kapal sedikit memakan waktu	Semua proses dilaksanakan secara online baik surat menyurat maupun perizinan melalui oss, sehingga mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha
10	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi 2.15.03.1.04	-	Perlunya Studi Penetapan Jaringan Trayek dan Tarif Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas antar Kab/Kota dalam wilayah provinsi dilaksanakan adalah untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan berupa sk gubernur /pergub agar pelaksanaan penyelenggaraan transportasi sungai danau berjalan dengan baik

11	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 2.15.03.1.06	Masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui cara mengakses sistem OSS untuk dapat memproses perizinan berusahnya dan atau melakukan migrasi perizinannya dari perizinan manual sebelum adanya OSS menjadi Sertifikat Standar yang terverifikasi	Semua proses dilaksanakan secara online baik surat menyurat maupun perizinan melalui OSS, sehingga mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha
12	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 2.15.03.1.09	Kegiatan selesai dilaksanakan pada triwulan 4 meskipun mengalami keterlambatan dalam proses seleksi	Studi dilaksanakan sebagai dasar/acuan untuk pengembangan/pembangunan fasilitas pelabuhan/dermaga di Kaltim
13	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 2.15.05.1.01	Tidak ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai rencana	Adanya Acuan RAPERGUB tentang Rencana Induk Perkeretaapian Tahun 2024 - 2043 Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Dishub mulai menyusun studi-studi kelayakan penyelenggaraan perkeretaapian
14	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.15.01.1.01	Tidak ada hambatan, target telah tercapai	1. Pentingnya menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah sebagai guidance/panduan program kegiatan selama tahun berjalan 2. Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang dalam pemenuhan kelengkapan data dukung untuk penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran;

15	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.15.01.1.02	1. Keterlambatan proses realisasi keuangan karena aplikasi SIPD yang error 2. Kelengkapan berkas administrasi keuangan dari bidang yang belum/kurang lengkap sehingga memperlambat proses pencairan	1. Realisasi keuangan kegiatan yang sesuai dengan anggaran kas/sesuai dengan bulan berjalan 2. Komunikasi/koordinasi yang baik dari pimpinan kepada staf bidang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal
16	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.15.01.1.03	Tidak ada hambatan, target telah tercapai	1. Pentingnya pemahaman staf yang baik terhadap mekanisme dan prosedur pengelolaan BMD (sistem administrasi yang baik/tertib dalam pencatatan dan dokumentasi aset) 2. Koordinasi yang intensif dengan bidang aset serta melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap BMD
17	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 2.15.01.1.04	-	Adanya kerjasama yang baik antara admin pengelola retribusi di UPTD Terminal dengan Bendahara Penerimaan dan Staf Pengadministrasi Penerimaan di Dishub Prov. Kaltim dalam proses pembayaran dan rekap wajib retribusi
18	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.15.01.1.05	Jadwal/waktu pelatihan menunggu informasi dari pihak penyelenggara	Pentingnya pengelolaan data kepegawaian dan bimtek/pelatihan untuk mendukung kinerja pegawai Dinas Perhubungan, sehingga minat pegawai untuk mengikuti bimtek/pelatihan meningkat
19	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.15.01.1.06	Tidak ada hambatan, target telah tercapai	Realisasi menyesuaikan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan
20	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.15.01.1.07	Tidak ada hambatan, target telah tercapai	Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia sehingga kegiatan selesai dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana

21	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.15.01.1.08	Tidak ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin	Terealisasi sesuai dengan rencana kegiatan (realisasi sesuai dengan kebutuhan di bulan berjalan)
22	Dinas Perhubungan 2.15.0.00.0.00.01.0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.15.01.1.09	Menyesuaikan permohonan kebutuhan pemeliharaan	Realisasi sesuai dengan kebutuhan
23	UPTD Terminal 2.15.0.00.0.00.01.0002	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 2.15.02.1.03	Tidak ada hambatan yang signifikan	Koordinasi yang baik dengan pihak ketiga sehingga pekerjaan selesai sesuai dengan jadwal/kontrak kerja
24	UPTD Terminal 2.15.0.00.0.00.01.0002	Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.15.01.1.06	Tidak ada hambatan, target telah tercapai	Realisasi menyesuaikan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan
25	UPTD Terminal 2.15.0.00.0.00.01.0002	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.15.01.1.07	Tidak ada hambatan, target telah tercapai	Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia sehingga kegiatan selesai dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana
26	UPTD Terminal 2.15.0.00.0.00.01.0002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.15.01.1.08	Tidak ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin	Realisasi sesuai dengan bulan berjalan karena kegiatan bersifat rutin
27	UPTD Terminal 2.15.0.00.0.00.01.0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.15.01.1.09	Menyesuaikan permohonan kebutuhan pemeliharaan	Realisasi sesuai dengan kebutuhan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah :

a. Terhadap capaian sesuai target :

Capaian yang berada pada tingkat 100% menunjukkan bahwa target program/kegiatan telah direalisasikan sesuai dengan rencana. Implikasi dari capaian ini adalah adanya kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, yang menandakan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam mengelola program, sumber daya, serta pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini sekaligus menjadi indikator bahwa perangkat daerah mampu menjaga konsistensi pencapaian sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Terhadap capaian melebihi target :

Capaian program/kegiatan yang melebihi 100% menggambarkan adanya kinerja yang melampaui ekspektasi. Hal ini dapat diartikan sebagai keberhasilan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, meningkatkan inovasi, serta memperluas manfaat program kepada masyarakat. Namun demikian, kondisi ini juga mengimplikasikan perlunya evaluasi terhadap penetapan target pada awal perencanaan, karena terdapat kemungkinan target yang ditetapkan masih terlalu rendah atau belum sepenuhnya menggambarkan potensi capaian yang realistis. Oleh karena itu, penetapan target pada periode berikutnya perlu lebih proporsional dan menantang agar mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan

c. Terhadap capaian belum tercapai :

Capaian program/kegiatan yang belum mencapai target mengindikasikan adanya berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal dapat berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana, sementara hambatan eksternal dapat meliputi perubahan kebijakan, kondisi sosial-ekonomi, maupun situasi darurat di luar kendali perangkat daerah. Implikasi dari kondisi ini adalah perlunya evaluasi mendalam terhadap faktor penyebab ketidaktercapaian, sekaligus perumusan langkah perbaikan (corrective action) yang lebih tepat sasaran. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penyesuaian strategi, serta penguatan sinergi antar-stakeholder agar target yang telah ditetapkan dapat lebih realistis dan tercapai pada periode mendatang.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut :

a. Terhadap capaian sesuai target :

Kebijakan:

- Mempertahankan pola perencanaan yang sudah efektif.
- Menjaga konsistensi antara Renstra, Renja, dan RKA (anggaran).
- Menetapkan target dengan tingkat akurasi yang lebih presisi berdasarkan tren capaian.

Tindakan Penganggaran:

- Menyediakan alokasi anggaran yang proporsional untuk menjamin keberlanjutan capaian.
- Memastikan efisiensi penggunaan anggaran agar hasil dapat dipertahankan pada periode berikutnya.

b. Terhadap capaian melebihi target :

Kebijakan:

- Melakukan *review* terhadap indikator kinerja agar target lebih menantang namun realistis.
- Menjadikan capaian lebih dari 100% sebagai praktik baik (*best practice*) untuk diterapkan pada program lain.
- Mengintegrasikan inovasi yang terbukti efektif dalam perencanaan ke depan.

Tindakan Penganggaran:

- Melakukan penyesuaian anggaran agar selaras dengan potensi capaian aktual.
- Memberikan ruang fleksibilitas dalam anggaran untuk program yang berpotensi memberikan dampak lebih besar.

c. Terhadap capaian belum tercapai :

Kebijakan:

- Melakukan evaluasi mendalam (*root cause analysis*) terhadap faktor penghambat (internal maupun eksternal)
- Menyusun ulang prioritas program agar lebih fokus pada sasaran strategis yang paling krusial.
- Memperkuat koordinasi antarperangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan eksternal.
- Menetapkan strategi mitigasi risiko (risk management) pada tahap perencanaan.

Tindakan Penganggaran:

- Meningkatkan efisiensi belanja, terutama dengan mengurangi kegiatan yang kurang berdampak langsung pada capaian sasaran.
- Memastikan adanya dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM, sarana, dan sistem monitoring.

2.2.2 Kinerja Layanan Bidang LLAJ

-1997-

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, yang meliputi kegiatan : Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Pagar Pengaman Jalan.

Tabel 2.2.2.1
Data Terpasang dan Pagu Anggaran Fasilitas LLAJ

No	Jenis Fasilitas LLJ	Jumlah Terpasang					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Rambu Jalan	130 unit	1.333 unit	1.392 unit	105 unit	322 unit	170 unit
2	Rambu Informasi Ruas & Kapasitas Jalan	-	-	-	-	332 unit	
3	Marka Jalan	-	42.250 m	42.500 m	58.038 m	-	11.900 m
4	Pagar Pengaman Jalan	-	1.000 m	1.200 m	-	86 unit	
5	LPJU	-	10 unit	25 unit	62 unit	91 unit	755 unit
6	RPPJ	-	-	50	-	8 unit	
7	Paku Jalan	-	-	6.173 bh	5.014 bh	4.000 unit	2.000 unit
8	Alat Timbang Kendaraan Portable	-	-	3	-	-	
9	ZOSS	-	-	-	-	-	12 unit

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lalu Lintas Jalan, yang merupakan penerapan Penegakan Hukum dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup pengawasan, pembinaan, pengendalian dan penertiban lalu lintas angkutan kendaraan batubara dan kelapa sawit menyangkut jam operasi dan kapasitas muat untuk mendukung target nasional *Zero Over Dimension Over Loading (ODOL)*.

Tabel 2.2.2.2
Data Realisasi Anggaran Penerapan
Perda No.10 Tahun 2012

No	Uraian	Pagu Anggaran		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5

-1998-

1	Pagu Anggaran	1.555.510.000	1.432.116.000	293.467.500
2	Realisasi	1.422.539.107	1.349.254.439	289.487.600
Prosentase		91,45%	94,21%	98,64%

Program peningkatan pelayanan angkutan, meliputi kegiatan yang bersifat pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat operator dan pengguna jasa transportasi jalan, telah dilaksanakan sebanyak 6 kegiatan yang berlokasi di Kab/Kota di Kalimantan Timur.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain melaksanakan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam DPA SKPD, juga terdapat kegiatan yang mengacu kepada tupoksi berupa penerbitan ijin dan sertifikat terkait pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu :

Tabel 2.2.2.3

Data Realisasi Perijinan dan Sertifikat pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

No.	Uraian Perijinan / Sertifikat	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Surat Keputusan Pelaksanaan	-	5 SK	4 Sk	20 SK	15 SK	22 SK
2	Perpanjangan Kartu Pengawasan	83 unit	666 unit	76 unit	750 unit	103 unit	571 unit
3	Ijin Insidentil	2 Izin	25 Ijin	-	1 Ijin	3 Ijin	-
4	Surat Sertifikat Standar						22 SK

2.2.3 Kinerja Layanan Bidang Pelayaran

Terkait kegiatan rutin bidang yang bersifat pelayanan kepada masyarakat pemilik usaha angkutan SDP dan angkutan perairan maka Dinas Perhubungan melalui Bidang Pelayaran pada tahun 2024 telah menerbitkan rekomendasi perijinan yang meliputi :

Tabel 2.2.3.1

Data Realisasi Perijinan dan Sertifikat Transportasi SDP

No.	Uraian Perijinan / Sertifikat	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau (BBM) ke Hulu Sungai Mahakam			25 unit			
2	Ijin Fasilitas Penyeberangan Angkutan Khusus BBM/BBG di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau			19 unit			
3	Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau						15 unit
4	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal Sungai	20 unit	456 unit	258 unit		86 unit	33 unit
5	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan			2 unit			7 unit
6	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal Penyeberangan Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi	16 unit	19 unit	13 unit	16 unit	10 unit	14 unit
7	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal/Speedboat antar Kab/Kota Dalam Provinsi GT<7		4 unit				
8	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal/Speedboat antar Kab/Kota Dalam Provinsi GT<7		14 unit				
9	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Angkutan Sungai Danau Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi >7GT			217 unit	91 unit		
10	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speedboat Dalam Kota/Kab Dalam Provinsi >7GT			9 unit			
11	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speedboat Dalam Kota/Kab Dalam Provinsi <7GT			1 unit			3 unit
12	Perizinan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan						13 unit
	Jumlah	36 unit	493 unit	544 unit	107 unit	96 unit	85 unit

Tabel 2.2.3.2

Data Realisasi Rekomendasi Izin Badan Usaha Terkait Angkutan Perairan

No.	Uraian Rekomendasi	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	5	6	7	8	9	9
1	Surat Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)	18 rekom	7 rekom	34 rekom	28 rekom	19 rekom	33 rekom
2	Surat Ijin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)	21 rekom	17 rekom	37 rekom	42 rekom	69 rekom	66 rekom
3	Surat Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	3 rekom	-	9 rekom	20 rekom	36 rekom	2 rekom
4	Surat Ijin Depo	2 rekom	2 rekom	4 rekom	-	2 rekom	1 rekom

2.2.4 Kinerja Layanan UPTD Terminal Tipe B

-2000-
Pengelolaan terhadap 7 Terminal Tipe B tahun 2024 dapat dilihat dari jumlah produksi kendaraan dan penumpang sebagai berikut :

Tabel 2.2.4.1
Data Produksi Kendaraan dan Penumpang Terminal Tipe B Tahun 2024

NO	TERMINAL	JUMLAH TRAYEK	JUMLAH KENDARAAN		JUMLAH PENUMPANG	
			BERANGKAT	TIBA	BERANGKAT	TIBA
1	SUNGAI KUNJANG	12	11.631	6.871	39.213	94.166
2	LEMPAKE	7	2.150	1.099	35.258	16.208
3	BONTANG	7	1.550	1.148	22.082	19.522
4	SANGATTA	7	1.049	1.113	21.658	23.269
5	BERAU	2	928	1.010	12.459	10,607
6	TIMBAU	8	915	875	9.583	8.394
7	TANAH PASER	5	3.501	5.320	29.860	16.251
JUMLAH		48	21.724	17.436	170.113	188.417

Pada tahun 2024 jumlah kendaraan yang melalui terminal tipe B sebesar 39.160 unit dan jumlah penumpang yang melalui terminal tipe B sebesar 358.530 orang.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kebijakan Nasional terkait dengan pembangunan Kalimantan Timur sesuai dengan RPJMN yang diterjemahkan dalam RPJMD, kemudian dituangkan dalam pelaksanaannya berupa RKPD, khusus sektor perhubungan diprioritaskan pada pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi didalam kawasan strategis provinsi yaitu berupa penyelesaian program – program yang sudah digariskan dalam program Pengembangan Kawasan Ekonomi/Industri Khusus dan pusat pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak ekonomi daerah.

Program Nasional yang sudah diselaraskan dalam pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya regional Kalimantan Timur untuk sektor perhubungan adalah Pengembangan Kawasan Penunjang untuk mensuplai pertumbuhan Kawasan Industri Kariangau dan penyelesaian Kawasan Pelabuhan Internasional KIPI Maloy dan integrasi perencanaan transportasi IKN.

Identifikasi isu-isu strategis berperan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan suatu wilayah. Penyusunan isu strategis dilakukan dengan menganalisa rumusan permasalahan pembangunan perhubungan serta isu-isu strategis ditingkat internasional, nasional, dan regional yang berpengaruh terhadap rencana pembangunan transportasi daerah. Perumusan isu strategis perhubungan juga turut memperhatikan isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang termuat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta mempertimbangkan konteks lokal, potensi, dan tantangan sektor transportasi yang dihadapi Kalimantan Timur guna menyusun langkah – langkah pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Perumusan isu strategis perhubungan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1

[illegible]

Ketersediaan bandara internasional (Bandara SAMS Balikpapan dan Bandara APT Pranoto Samarinda) 3 serta bandara perintis (Bandara Kalimarau Berau, Bandara Melalan Kutai Barat, dll) dengan potensi pengembangan bandara baru		Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik				
--	--	--	--	--	--	--

Matriks Potensi, Permasalahan, Isu KLHS dan Isu Strategis Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

4 Pengembangan jaringan jalan utama untuk dapat menghubungkan antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur, dimana saat ini jalan provinsi sepanjang 938,85 km	Belum optimalnya fasilitas kelengkapan jalan	Kematian akibat kecelakaan lalu lintas		Pembangunan IKN, Superhub Ekonomi IKN, dan Mitra IKN	Minimnya pusat pertumbuhan	Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur perhubungan Kalimantan Timur
	Belum optimalnya peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi					
	Rendahnya modal share (penggunaan) angkutan umum AKDP	Persentase penduduk terlayani transportasi umum				
	Belum optimalnya standar teknis sarana transportasi dan rendahnya penurunan emisi GRK sektor transportasi					
	Belum optimalnya regulasi transportasi Kalimantan Timur					

	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan				
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan analisis terhadap potensi daerah, permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu regional, serta KLHS, dihasilkan 1 (satu) isu strategis pembangunan daerah sektor perhubungan Kalimantan Timur yaitu **"Belum Optimalnya Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Perhubungan Kalimantan Timur"**. Isu strategis yang juga masih memerlukan perhatian dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah tidak terintegrasinya sistem konektivitas sehingga dapat mengurangi efisiensi dalam pergerakan orang dan barang, membatasi pertumbuhan ekonomi, dan memperlambat pengembangan wilayah.

Wilayah – wilayah yang masih tertinggal di Kalimantan Timur pada umumnya masih menghadapi masalah dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar. Hal ini perlu segera diantisipasi agar masyarakat yang tinggal pada wilayah – wilayah tersebut mendapatkan hak kehidupan yang layak, untuk selanjutnya masyarakat tersebut mampu menjadi penopang pembangunan daerahnya.

Di sisi lain, persoalan konektivitas antar-wilayah juga muncul karena belum optimalnya aksesibilitas di karenakan sistem transportasi publik disisi sarana dan prasarana yang tidak terintegrasi, baik transportasi darat, sungai, laut dan udara yang menjangkau seluruh wilayah.

Dengan minimnya transportasi umum meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi yang akan meningkatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga penanganan isu keselamatan transportasi pun menjadi penting.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD terhadap analisis kebutuhan Perangkat Daerah dilakukan dengan membandingkan kebutuhan anggaran setiap kegiatan dan program untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra PD.

Analisis tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan di Perangkat Daerah yaitu pada kegiatan dan program strategis dan manajerial (operasional rutin) agar terjadi keseimbangan dalam penganggarannya dengan tetap mempertimbangkan target program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.

Dari tabel 2.4.1 dapat dilihat terdapat perubahan pagu anggaran dari rencana awal RKPD sebesar Rp. 47.309.000.000 menjadi sebesar Rp. 154.003.747.000 dimana peningkatan anggaran ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada Ranwal RKPD Rp. 33.925.748.440 dan dari analisa hasil kebutuhan menjadi Rp. 32.324.928.801 berkurang Rp. 1.600.819.639 /atau berkurang 4,72% yang merupakan pelaksanaan arahan untuk efisiensi anggaran dengan tetap di fokuskan pada mempertahankan pencapaian target program.
2. Anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Ranwal RKPD Rp. 5.007.833.702 dan dari analisa hasil kebutuhan menjadi Rp. 23.048.453.169 bertambah Rp. 18.040.619.467 yang merupakan pelaksanaan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan capaian program yaitu persentase perlengkapan jalan terpasang dimana baru mencapai 25% dari kebutuhan pada tahun 2024.
3. Anggaran Program Pengelolaan Pelayaran pada Ranwal RKPD Rp. 2.465.189.790 dan dari analisa hasil kebutuhan menjadi Rp. 94.286.205.990 bertambah Rp.

91.821.016.200 yang merupakan pelaksanaan program unggulan/strategis dari Gubernur yaitu program Jospol 7 dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kariangau di Balikpapan dan Jospol 8 dengan kegiatan Rehabilitasi Dermaga Sungai Melak, Pembangunan Dermaga Speedboat dan Pembangunan tiang tambat kapal.

4. Anggaran Program Pengelolaan Perkeretaapian pada Ranwal RKPD Rp. 1.021.050.314 dan dari analisa hasil kebutuhan menjadi Rp. 0 , yang merupakan langkah evaluasi dan menyusun ulang prioritas program agar lebih fokus pada sasaran strategis yang paling penting.
5. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di UPTD Terminail pada Ranwal RKPD Rp. 3.789.199.954 dan dari analisa hasil kebutuhan menjadi Rp. 3.100.667.815 berkurang Rp. 688.532.139 /atau berkurang 18,17% yang merupakan pelaksanaan arahan untuk efisiensi anggaran dengan tetap di fokuskan pada mempertahankan pencapaian target program.
6. Anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di UPTD Terminal pada Ranwal RKPD Rp. 1.099.977.800 dan dari analisa hasil kebutuhan menjadi Rp. 1.243.491.225 bertambah Rp. 143.513.425 sebagai bentuk upaya untuk menjaga pelayanan yang prima di Terminal Tipe B.

Tabel : 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

No.	Rancangan Awal RKPD					No.	Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif		Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		76 Indeks	Rp 29.932.827.794	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		76 Indeks	Rp 28.719.821.678	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		100%	Rp 3.992.920.646			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		75%	Rp 3.605.107.123	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu		92%	Rp 554.830.622	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu		90,5%	Rp 345.763.868	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	2 Dokumen	Rp 168.241.020	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	2 Dokumen	Rp 126.417.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Rp 84.056.340	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Rp 24.087.800	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Rp 29.852.296	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Rp 14.708.084	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	4 Laporan	Rp 104.325.000	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	4 Laporan	Rp 70.997.500	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	20 Laporan	Rp 168.355.966	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	20 Laporan	Rp 109.553.484	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		95%	Rp 28.033.476.415	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		96%	Rp 27.164.977.676	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	145 Orang/Bulan	Rp 27.309.040.672	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	145 Orang/Bulan	Rp 26.502.877.142	Penyesuaian anggaran
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	12 Dokumen	Rp 619.440.000	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	12 Dokumen	Rp 566.760.000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	12 Dokumen	Rp 31.800.000	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda Balikpapan	12 Dokumen	Rp 45.850.978	
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Samarinda	2 Dokumen	Rp 2.400.000	4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Samarinda	2 Dokumen	Rp 2.821.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	12 Laporan	Rp 66.120.000	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	12 Laporan	Rp 40.678.892	
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	12 Dokumen	Rp 4.675.743	6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	12 Dokumen	Rp 5.989.664	

1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik		93%	Rp 85.221.123	1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik		93%	Rp 78.644.614	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	1 Dokumen	Rp 25.200.000	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	1 Dokumen	Rp 26.344.440	
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Rp 52.800.000	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Rp 45.241.354	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	4 Laporan	Rp 7.221.123	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	4 Laporan	Rp 7.058.820	
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah		100%	Rp 64.848.000	1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah		100%	Rp 37.122.150	
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	12 Laporan	Rp 64.848.000	1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	12 Laporan	Rp 37.122.150	
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		25%	Rp 370.627.023	1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi >20JP		25%	Rp 114.139.466	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	1 Paket	Rp 113.127.900	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Rp -	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	1 Dokumen	Rp 7.221.123	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	1 Dokumen	Rp 7.162.820	
3	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	1 Dokumen	Rp 45.888.000	3	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	1 Dokumen	Rp 46.976.646	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Samarinda Luar Daerah	20 Orang	Rp 204.390.000	4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Samarinda	35 Orang	Rp 60.000.000	
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik		93%	Rp 1.279.672.757	1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik		93%	Rp 1.171.957.984	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	Rp 49.854.350	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	Rp 49.807.607	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	5 Paket	Rp 288.812.655	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	6 Paket	Rp 363.484.061	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	Rp 214.154.272	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	4 Paket	Rp 196.536.745	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda Balikpapan Bontang Paser Kutim Kubar Kukar Berau Mahulu PPU Luar Daerah	12 Laporan	Rp 702.585.580	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	12 Laporan	Rp 545.538.834	
5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Rp 9.916.000	5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Rp 6.672.850	
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Rp 14.349.900	6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Rp 9.917.887	

1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu		100%	Rp 3.021.003.500	1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu		100%	Rp 3.046.728.319	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	Rp 24.994.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	Rp 24.990.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp 991.999.500	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp 1.004.651.237	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp 2.004.010.000	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp 2.017.087.082	
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		93%	Rp 516.069.000	1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		92,5%	Rp 365.594.724	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	2 Unit	Rp 84.390.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	2 Unit	Rp 65.016.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	9 Unit	Rp 110.629.000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	3 Unit	Rp 97.928.000	
3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Samarinda	1 Unit	Rp 21.312.000	3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Samarinda	1 Unit	Rp 1.840.724	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	149 Unit	Rp 299.738.000	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	149 Unit	Rp 200.810.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi		155 Kejadian	Rp 5.007.833.702	II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Darat		0,44 Angka	Rp 1.679.450.378	
		Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP		90%				Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan		55%	Rp 572.836.329	
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan		0,004 Angka				Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang		35%	Rp 20.796.166.462	
2.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Penetapan Dokumen atau Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan			Rp -	2.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Penetapan Dokumen atau Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan		2 Dokumen	Rp 87.639.980	
1	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi			Rp -	1	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	2 Dokumen	Rp 87.639.980	
2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal		85%	Rp 1.974.193.416	2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal		55%	Rp 20.566.099.885	
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Samarinda	141 Unit	Rp 1.974.193.416	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Samarinda Kukar Kutim	751 Unit	Rp 20.566.099.885	
2.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun		60%	Rp 435.458.292	2.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun			Rp -	
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Kubar	1 Dokumen	Rp 435.458.292	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B			Rp -	Diarahkan pada pekerjaan prioritas

2.4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang dipatuhi		4 Dokumen	Rp 885.956.215	2.4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang dipatuhi		4 Dokumen	Rp 230.066.577	
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Samarinda Balikpapan Kukar Kutim Berau	10 Laporan	Rp 395.956.215	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Balikpapan Samarinda Kutai Timur Kutai Kartanegara Berau	4 Laporan	Rp 101.999.659	
2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Samarinda Balikpapan Kukar Kutim Berau	4 Laporan	Rp 490.000.000	2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Balikpapan Samarinda Kutai Kartanegara Bontang Paser Kutim	4 Laporan	Rp 53.067.147	
						3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Balikpapan Samarinda	1 Laporan	Rp 74.999.771	
2.5	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji		81%	Rp 703.521.965	2.5	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang Dilakukan Ramp Check		1100 Unit	Rp 485.196.349	
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Balikpapan Samarinda	3 Laporan	Rp 253.162.905	1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	3 Laporan	Rp 255.196.439	
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	10 Laporan	Rp 361.359.620	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	10 Laporan	Rp 159.999.931	
3	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	9 Laporan	Rp 88.999.440	3	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	9 Laporan	Rp 69.999.979	
2.6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia		20 Badan Usaha	Rp 76.206.000	2.6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Beroperasi		565 Unit	Rp 40.205.589	

1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	4 Laporan	Rp 76.206.000	1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	4 Laporan	Rp 40.205.589	
2.7	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia		1 Dokumen	Rp 149.991.394	2.7	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah	Jumlah Penetapan Kebijakan Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang Tersedia (Keputusan)		1 Dokumen	Rp 1.199.998.908	
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			Rp -	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Samarinda	1 Dokumen	Rp 1.000.000.000	
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Samarinda	1 Dokumen	Rp 149.991.394	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Samarinda	1 Dokumen	Rp 199.998.908	
2.8	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan		130 Unit	Rp 500.307.540	2.8	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan		130 Unit	Rp 260.712.908	
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	130 Unit	Rp 194.483.670	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	130 Unit	Rp 79.999.791	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Samarinda Balikpapan	4 Laporan	Rp 305.823.870	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Balikpapan Samarinda	4 Laporan	Rp 180.713.117	
2.9	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan		325 Unit	Rp 282.198.880	2.9	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan		325 Unit	Rp 178.532.973	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Samarinda Balikpapan Bontang Kukar Kubar Paser PPU Kutim Berau	4 Laporan	Rp 140.599.440	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	4 Laporan	Rp 89.533.076	

2	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	325 Unit	Rp 141.599.440	2	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	325 Unit	Rp 88.999.897	
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP		1 Angka	Rp 2.465.189.790	III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Laut dan SDP		0,917 Angka	Rp 1.500.000.000	
								Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran		48,21 Indeks	Rp 92.786.205.990	
3.1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perizinan		65 Badan Usaha	Rp 690.986.242	3.1	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Patuh Perizinan		85 Unit	Rp 262.899.252	
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Balikpapan Kutai Timur Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	65 Unit	Rp 118.800.000	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Penajam Paser Utara	85 Unit	Rp 153.198.544	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Balikpapan Kutai Timur Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	3 Laporan	Rp 572.186.242	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Balikpapan Samarinda	1 Laporan	Rp 109.700.708	
3.3	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Patuh Perizinan		85 Unit	Rp 305.499.252	3.3	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perizinan		65 Badan Usaha	Rp 173.306.738	

1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Penajam Paser Utara	85 Unit	Rp	178.998.544	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Balikpapan Kutai Timur Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	65 Dokumen	Rp	61.800.000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Penajam Paser Utara	1 Laporan	Rp	126.500.708	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Balikpapan Kutai Timur Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	2 Laporan	Rp	111.506.738	
3.4	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan/Dermaga Pengumpan Regional Kewenangan Provinsi		1 Unit	Rp	1.468.704.296	3.4	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pemenuhan fasilitas utama dan penunjang pelabuhan laut		41%	Rp	1.500.000.000	
1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Kubar	1 Unit	Rp	1.468.704.296	1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Balikpapan	1 Unit	Rp	1.500.000.000	
3.5	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan fasilitas utama dan penunjang pelabuhan SDP		0,00%	Rp	-	3.5	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan fasilitas utama dan penunjang pelabuhan SDP		53%	Rp	92.350.000.000	
1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan			Rp	-	1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Kubar Kukar Samarinda	2 Unit	Rp	19.192.234.600	
2	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia			Rp	-	2	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Samarinda	24 Unit	Rp	73.157.765.400	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian		55%	Rp	1.021.050.314	IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian			Rp	-	
4.1	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	Kaltim	45%	Rp	1.021.050.314	4.1	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian			Rp	-	
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Samarinda	1 Dokumen	Rp	1.021.050.314	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian			Rp	-	
JUMLAH					Rp	42.419.822.246	JUMLAH					Rp	149.659.587.960	

No.	Rancangan Awal RKPD					No.	Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif		Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		76 (ndeks)	Rp 1.120.402.016	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		76 Indeks	Rp 435.871.935	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		100%	Rp 2.668.797.938			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		75%	Rp 2.664.795.880	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik		70%	Rp 917.331.016	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik		70%	Rp 380.906.135	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	Rp 21.705.803	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	Rp 9.992.927	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	4 Paket	Rp 297.880.013	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	5 Paket	Rp 49.929.229	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	2 Paket	Rp 83.345.200	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	2 Paket	Rp 49.999.979	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan Kutai Timur Kutai Kartanegara Samarinda Berau Paser Bontang	12 Laporan	Rp 514.400.000	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan Kutai Timur Kutai Kartanegara Samarinda Berau Paser Bontang	12 Laporan	Rp 270.984.000	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu		100%	Rp 2.668.797.938	1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu		100%	Rp 2.664.795.880	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	Rp 8.999.489	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	Rp 5.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp 176.045.892	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp 176.044.466	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp 2.483.752.557	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp 2.483.751.414	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		50%	Rp 203.071.000	1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		50%	Rp 54.965.800	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	11 Unit	Rp 116.681.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	10 Unit	Rp 29.995.800	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	42 Unit	Rp 86.390.000	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	37 Unit	Rp 24.970.000	

II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi		155 Kejadian	Rp 1.099.977.800	II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Darat		0,44 Angka	Rp 1.243.491.225	
		Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP		90%								
		Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan		0,004 Angka								
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun		60%	Rp 1.099.977.800	1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Terminal Tipe B		73%	Rp 1.243.491.225	
1	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi			Rp -	1	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	Kaltim	7 Unit	Rp 150.000.000	
2	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Bontang	1 Unit	Rp 245.278.000	2	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Bontang Kutim	2 Unit	Rp 99.902.704	
3	Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Samarinda	1 Unit	Rp 45.400.000	3	Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Samarinda	1 Unit	Rp 20.499.781	
4	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Paser	1 Unit	Rp 809.299.800	5	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Paser Kukar	2 Unit	Rp 99.912.740	
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)			Rp -	6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Samarinda Kukar Kutim Paser Berau	5 Unit	Rp 873.176.000	
JUMLAH					Rp 4.889.177.754	JUMLAH					Rp 4.344.159.040	
TOTAL					Rp 47.309.000.000	TOTAL					Rp 154.003.747.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat, diperoleh pada saat sosialisasi internal perhubungan maupun masukan – masukan dari pemangku kepentingan yang lain. Usulan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan bersumber dari :

- a. Hasil evaluasi pelayanan dilapangan;
- b. Masukan tertulis dari LSM dan Perguruan Tinggi yang direalisasikan dalam kegiatan study maupun penyediaan jasa;
- c. Masukan dari institusi eksternal, berupa permintaan penyediaan fasilitas perhubungan guna mendukung sektor lain yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pembukaan keterisolasian wilayah;
- d. Permintaan para operator baik angkutan darat, laut, udara dan ASDP terhadap optimalisasi upaya penciptaan zero accident;
- e. Upaya keterbukaan publik dalam bentuk pendistribusian informasi melalui media masa, elektronik dan penyuluhan;
- f. Hasil evaluasi dari pihak pemeriksa internal (Inspektorat, Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, dll) terhadap pemenuhan fasilitas insfrastruktur perhubungan;
- g. Penyebaran kuesioner terhadap pelayanan sarana transportasi;
- h. Evaluasi internal Perangkat Daerah terhadap hal-hal yang kurang dan harus segera dipenuhi terhadap upaya peningkatan pelayanan jasa perhubungan;
- i. Hasil monitoring bersama dengan pihak operator, pengguna dan instansi (pemerintah daerah Prov/Kota/Kab) dan Pemerintah Pusat, dalam upaya pendistribusian pasokan logistik;
- j. Masukan dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah, Rakortek dan Musrenbang Daerah Prov. Kaltim.

-2018-

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur, tetap berdasarkan pada program dan kegiatan yang berkelanjutan dari Rencana Anggaran yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Dishub. Prov. Kaltim Tahun 2025 – 2029, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025 – 2045, dan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2025 – 2029. Daftar usulan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.5.1

**Usulan Pogram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Perhubungan Prov. Kaltim**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/V olume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kukar	LPJU TS	98 Unit	Pengadaan dan Pemasangan LPJU TS di Ruas Jalan Provinsi di Kab. Kutai Kartanegara (Muara Badak - Batas Bontang 1) (Aspirasi: id 1572046)
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kukar	Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	194 Unit	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) di Ruas Jalan Provinsi di Kab. Kutai Kartanegara (Aspirasi: id 1612587)
3	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kukar	LPJU TS	98 Unit	Pengadaan dan Pemasangan LPJU TS di Ruas Jalan Provinsi di Kab. Kutai Kartanegara (Muara Badak - Batas Bontang 2) (Aspirasi: id 1572069)
4	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kukar	LPJU TS	98 Unit	Pengadaan dan Pemasangan LPJU TS di Ruas Jalan Provinsi di Kab. Kutai Kartanegara (Simpang 3 Kota Bangun - Kota Bangun) (Aspirasi: id 1617378)
5	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kutim	LPJU TS	98 Unit	Pengadaan dan Pemasangan LPJU TS di Ruas Jalan Provinsi di Kab. Kutai Timur (Simpang 4 Kaliorang - Batas Berau) (Aspirasi: id 1616334)

2.6 Perumusan Kegiatan Prioritas

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, secara rinci penahapan pembangunan perhubungan di Kalimantan Timur tahun 2026 difokuskan pada penguatan perencanaan strategis dan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar wilayah, konektivitas pada pusat perekonomian (pusat produksi dan permukiman) dan pengembangan IKN, seiring dengan RKPD Kaltim Tahun 2026 dan RPJMD Kaltim Tahun 2025-2029 dimana terdapat Program Unggulan Jospol yang mendukung upaya perwujudan Kaltim Sukses dimana Dinas Perhubungan mengampu kegiatan unggulan pada Jospol 7 dan Jospol 8 pada RENJA Dishub Tahun 2026 yang dapat dijabarkan pada kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Penyusunan Revisi Tataran Transportasi Wilayah/Rencana Induk Transportasi Kaltim;
2. Penetapan kebijakan (Pergub/SK Gub) Terkait Rencana Induk, Trayek dan Tarif;
3. **Jospol 7 : Pembangunan Infrastruktur Transportasi Umum dan Pelabuhan Internasional :**
 - a. **Studi Pelabuhan Internasional di Kariangau Balikpapan.**
4. **Jospol 8 : Revitalisasi Sungai Mahakam untuk Transportasi Publik, dan Angkutan Industri dan Pariwisata :**
 - a. **Rehabilitasi Dermaga Sungai Melak Kab.Kutai Barat;**
 - b. **Pembangunan Dolphin Tambat Kapal di Sungai Mahakam;**
 - c. **Pembangunan Dermaga Speedboat;**
5. Rehabilitasi Terminal Tipe B Sungai Kunjang Samarinda;
6. Penguatan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Provinsi Kaltim;

7. Penguatan Revitalisasi Trayek Utama Angkutan Umum AKDP.
8. Penguatan Penanganan Kendaraan ODOL;
9. Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Jalan.

Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur, pada tahun rencana, senantiasa berusaha untuk mewujudkan pelayan prima kepada masyarakat melalui pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ditunjang oleh 4 program dengan 1 program unggulan/strategis yakni Program Pengelolaan Pelayaran dan 1 program prioritas yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan program – program lain yang tentunya mendukung program strategis dan prioritas tersebut.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029, sasaran strategisnya meliputi :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi nasional;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi nasional;
4. Menurunnya dampak lingkungan transportasi nasional;
5. Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi nasional;
6. Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten;
7. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan.

Arah kebijakan umum transportasi nasional antara lain :

1. Peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional;
2. Peningkatan efektivitas konektivitas backbone antar pulau dan sistem pendukungnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan;
3. Peningkatan efisiensi sistem distribusi dalam pulau untuk mengurangi biaya transportasi dan logistik;
4. Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi;
6. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan dasar;
7. Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan pada sistem utama melalui digitalisasi untuk mendukung daya saing;
8. Pemenuhan (*compliance*) standar teknis sarana dan prasarana transportasi;
9. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi;

10. Percepatan transformasi energi di sektor transportasi;
11. Peningkatan penerapan konsep transportasi ramah lingkungan;
12. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kebijakan Transportasi;
13. Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi;
14. Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan industri, teknologi, dan pengembangan sarana prasarana transportasi;
15. Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi;
17. Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemen Perhubungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Dalam rangka mewujudkan Kebijakan Nasional maupun Kebijakan Propinsi, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di bawah ini :

Tabel 3.2.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran
RENJA Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran
1	Memenuhi kebutuhan infrastruktur perhubungan yang handal	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan berdasarkan skala prioritas
2	Mewujudkan zero accident dalam berlalu lintas	Menurunnya angka kecelakaan berlalu lintas dan turunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas
3	Mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang aman, selamat, nyaman, tertib dan terkendali	Terselenggaranya pelayanan jasa angkutan yang aman, selamat, tertib dan terkendali
4	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan	Terpenuhinya kebutuhan perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan secara terintegrasi
5	Mewujudkan profesionalisme aparatur sesuai kebutuhan	Terlaksananya peningkatan SDM melalui Diklat Teknis
6	Mewujudkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan akuntabel	Terciptanya sistem pelaporan kinerja SKPD perhubungan yang akuntabel
7	Mewujudkan penyelenggaraan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perkantoran yang didukung peralatan, perlengkapan operasional serta SDM yang berkualitas

Dalam upaya penyelarasan target capaian, tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 harus selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan rencana target dan capaian RPD. Dalam rangka capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur, maka dengan tupoksi utama untuk melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan transportasi, baik berupa perijinan trayek, perluasan jaringan trayek, pemenuhan kondisi sarana dan prasarana yang laik, selamat, aman, nyaman dan tertib, juga

-2024-
 perlu pemenuhan dalam pembangunan fasilitas pendukung keselamatan serta infrastruktur transportasi yang memadai.

Salah satu arah pembangunan nasional adalah pemerataan pembangunan antar wilayah adalah menurunnya tingkat kesenjangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah kab/kota tertinggal, meningkatnya peran wilayah luar pulau jawa dalam pembentukan PDRB serta lebih meningkat dan merata dalam implementasi pelayanan dasar diberbagai wilayah Indonesia.

Implementasi perwujudan dan percepatan capaian target Provinsi dan Nasional dalam sektor Perhubungan, telah terakomodir dalam tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur. Adapapun tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang telah selaras dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang di Dukung Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Publik		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan (IKLI)	59,1
	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas ke pusat - pusat perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur	Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi (Indeks)	0,58
	Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Kalimantan Timur	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan di Provinsi Kaltim (%)	87.75

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	72 - 74
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	80.39-80.8

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi wilayah yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kebijakan tersebut disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2025 – 2029 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Tabel 3.2.3

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang di Dukung Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Publik		
Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas ke pusat - pusat perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur	1	1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelabuhan/dermaga SDP dan laut yang dipelihara/dibangun
		2 Meningkatkan pembangunan dan revitalisasi terminal tipe B
	2	1 Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum sebagai bagian dari pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur

Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Kalimantan Timur	3	Peningkatan keselamatan transportasi dan emisi GRK	1	Meningkatkan kelaikan sarana dan prasarana angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Minimal
			2	Meningkatkan sosialisasi keselamatan dan pembinaan kepada pengemudi kendaraan angkutan umum
	4	Peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan perlengkapan jalan sesuai spesifikasi teknis	1	Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan perlengkapan jalan sesuai spesifikasi teknis
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	5	Peningkatan akuntabilitas kinerja	1	Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja
	6	Peningkatan pelayanan dan kompetensi SDM	1	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM

3.3. Program dan Kegiatan

Terkait dengan isu-isu penting terutama dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah beserta aturan turunannya, dimana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan menjadi lebih terarah, maka rangka percepatan pembangunan wilayah dan tertib administrasi, maka program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024 disesuaikan dengan Struktur Organisasi Kelembagaan yang ada. Namun demikian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, dalam implementasinya tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang telah digariskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah melekat pada Perangkat Daerah.

3.3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2026

1. Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Tuntutan terhadap mutu, kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa perhubungan;
- b. Kondisi Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, sehingga memerlukan penanganan transportasi secara ideal dan berkesinambungan;
- c. Kondisi geografis Kalimantan Timur yang kompleks (darat, laut, udara dan sungai);
- d. Kondisi demografi masyarakat Kalimantan Timur yang tersebar/tidak merata;
- e. Munculnya kawasan – kawasan baru berbasis ekonomi terpadu;
- f. Kedinamisan sektor perhubungan yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan waktu;
- g. Destinasi wisata, budaya dan lingkungan yang memerlukan keseimbangan secara arif dan bijaksana.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

- a. Jumlah program Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2026 yang diusulkan sebanyak : 4 program dan 20 kegiatan, dan 59 sub kegiatan yang meliputi program/kegiatan untuk Perangkat Daerah termasuk UPTD.

- b. Sifat penyebaran/distribusi lokasi program dan kegiatan mengacu kepada Struktur Organisasi Kelembagaan Tahun 2023 sesuai penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, penekanan pada program/kegiatan prioritas adalah yang bersifat strategis dalam rangka peningkatan daya dukung sektor perhubungan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar.
- c. Kebutuhan anggaran pembangunan sektor perhubungan untuk pelaksanaan program/kegiatan strategis cukup besar yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijaksanaan, ditetapkan program yang implementasinya dalam pencapaian tujuan tertuang dalam kegiatan atau aktifitas, yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Pada tahun 2026 Dinas Perhubungan Provinsi

Kalimantan Timur melaksanakan program sebagai berikut :

Dinas Perhubungan :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;
- 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
- 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;

- 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah:
 - 1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
- 1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 5) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - 6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ):

2.1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ:

- 1) Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

2.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi:

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.

2.3 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi:

- 1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi;
- 2) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi;
- 3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi.

- 2.4 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan:
- 1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi;
 - 2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - 3) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- 2.5 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:
- 1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- 2.6 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:
- 1) Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi;
 - 2) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi.
- 2.7 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah

-2033-
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi:

- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi.

2.8 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi;
- 2) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan; Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

III. Program Pengelolaan Pelayaran

3.1 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan:

- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam

-2034-
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi.

3.2 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas:

- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas.

3.3 Penerbitan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah

-2035-
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi :

1) Pengoperasian dan Pemeliharaan
Pelabuhan Sungai dan Danau yang
Melayani Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi;

2) Pemenuhan Fasilitas Pelayanan
Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan
Penyeberangan yang Melayani Trayek
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

3.4 Pembangunan, Penerbitan Izin
Pembangunan dan Pengoperasian
Pelabuhan Pengumpan Regional:

1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan
Regional;

IV. Program Pengelolaan Perkeretaapian

4.1 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian:

1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana
Induk Perkeretaapian;

UPTD Terminal :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah:

1) Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor;

3) Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan;

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD.

1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.5 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B:
- 1) Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B;
 - 2) Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang);
 - 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B;
 - 4) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang.
 - 5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)

Adapun program kegiatan serta Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2026 dan penyesuaian dengan Prioritas Pembangunan pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel : 3.3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 15 2 15 0 0 0 0 01	Dinas Perhubungan				Rp 154.003.747.000				Rp 55.380.779.000
2 15 2 15 0 0 0 0 01	Dinas Perhubungan				Rp 149.659.587.960				Rp 51.212.779.000
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		76 Indeks	Rp 28.719.821.678	APBD	Rutin	78 Indeks	Rp 28.617.180.000
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		75%	Rp 3.605.107.123	APBD	Rutin	80%	Rp 4.872.500.000
2 15 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu		90,5%	Rp 345.763.868	APBD	Rutin	91%	Rp 540.000.000
2 15 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	2 Dokumen	Rp 126.417.000	APBD	Rutin	2 Dokumen	Rp 250.000.000
2 15 01 1 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Rp 24.087.800	APBD	Rutin	2 Dokumen	Rp 40.000.000
2 15 01 1 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Rp 14.708.084	APBD	Rutin	2 Dokumen	Rp 20.000.000
2 15 01 1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	4 Laporan	Rp 70.997.500	APBD	Rutin	4 Laporan	Rp 100.000.000
2 15 01 1 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	20 Laporan	Rp 109.553.484	APBD	Rutin	20 Laporan	Rp 130.000.000
2 15 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		96%	Rp 27.164.977.676	APBD	Rutin	96,5%	Rp 27.017.180.000
2 15 01 1 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	145 Orang/Bulan	Rp 26.502.877.142	APBD	Rutin	145 Orang/Bulan	Rp 26.300.200.000
2 15 01 1 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	12 Dokumen	Rp 566.760.000	APBD	Rutin	12 Dokumen	Rp 623.280.000

2	15	01	1	02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	12 Dokumen	Rp	45.850.978	APBD	Rutin	12 Dokumen	Rp	31.800.000
2	15	01	1	02	06				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Samarinda	2 Dokumen	Rp	2.821.000	APBD	Rutin	2 Dokumen	Rp	2.400.000
2	15	01	1	02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda Balikpapan	12 Laporan	Rp	40.678.892	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp	55.000.000
2	15	01	1	02	08				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	12 Dokumen	Rp	5.989.664	APBD	Rutin	12 Dokumen	Rp	4.500.000
2	15	01	1	03					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik		93%	Rp	78.644.614	APBD	Rutin	94%	Rp	85.200.000
2	15	01	1	03	01				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	1 Dokumen	Rp	26.344.440	APBD	Rutin	1 Dokumen	Rp	25.200.000
2	15	01	1	03	02				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Rp	45.241.354	APBD	Rutin	2 Dokumen	Rp	52.800.000
2	15	01	1	03	06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	4 Laporan	Rp	7.058.820	APBD	Rutin	4 Laporan	Rp	7.200.000
2	15	01	1	04					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah		100%	Rp	37.122.150	APBD	Rutin	100%	Rp	35.000.000
2	15	01	1	04	07				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	12 Laporan	Rp	37.122.150	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp	35.000.000
2	15	01	1	05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi >20JP		25%	Rp	114.139.466	APBD	Rutin	32%	Rp	113.088.000
2	15	01	1	05	03				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	1 Dokumen	Rp	7.162.820	APBD	Rutin	1 Dokumen	Rp	7.200.000
2	15	01	1	05	05				Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	1 Dokumen	Rp	46.976.646	APBD	Rutin	1 Dokumen	Rp	45.888.000
2	15	01	1	05	09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Samarinda	35 Orang	Rp	60.000.000	APBD	Rutin	40 Orang	Rp	60.000.000

2	15	01	1	06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik		93%	Rp 1.171.957.984	APBD	Rutin	94%	Rp 1.025.000.000
2	15	01	1	06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	Rp 49.807.607	APBD	Rutin	1 Paket	Rp 50.000.000
2	15	01	1	06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	6 Paket	Rp 363.484.061	APBD	Rutin	4 Paket	Rp 250.000.000
2	15	01	1	06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	4 Paket	Rp 196.536.745	APBD	Rutin	6 Paket	Rp 200.000.000
2	15	01	1	06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	12 Laporan	Rp 545.538.834	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp 500.000.000
2	15	01	1	06	10					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Rp 6.672.850	APBD	Rutin	2 Dokumen	Rp 10.000.000
2	15	01	1	06	11					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Rp 9.917.887	APBD	Rutin	2 Dokumen	Rp 15.000.000
2	15	01	1	08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu		100%	Rp 3.046.728.319	APBD	Rutin	100%	Rp 3.029.010.000
2	15	01	1	08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	Rp 24.990.000	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp 25.000.000
2	15	01	1	08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp 1.004.651.237	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp 1.000.000.000
2	15	01	1	08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp 2.017.087.082	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp 2.004.010.000
2	15	01	1	09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		92,5%	Rp 365.594.724	APBD	Rutin	97%	Rp 1.645.202.000
2	15	01	1	09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	2 Unit	Rp 65.016.000	APBD	Rutin	2 Unit	Rp 84.390.000
2	15	01	1	09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	3 Unit	Rp 97.928.000	APBD	Rutin	4 Unit	Rp 110.487.059
2	15	01	1	09	06					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Samarinda	1 Unit	Rp 1.840.724	APBD	Rutin	1 Unit	Rp 21.312.000
2	15	01	1	09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	149 Unit	Rp 200.810.000	APBD	Rutin	212 Unit	Rp 1.429.012.941

2	15	02								PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Darat		0,44 Angka	Rp 1.679.450.378	APBD	Prioritas	0,47 Angka	Rp 380.000.000
											Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan		55%	Rp 572.836.329			57,50%	Rp 680.000.000
											Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang		35%	Rp 20.796.166.462			40%	Rp 963.099.000
2	15	02	1	01						Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Penetapan Dokumen atau Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan		2 Dokumen	Rp 87.639.980	APBD	Prioritas	3 Dokumen	Rp 150.000.000
2	15	02	1	01	04					Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	2 Dokumen	Rp 87.639.980	APBD	Prioritas	2 Dokumen	Rp 100.000.000
2	15	02	1	01	07					Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Samarinda Balikpapan		Rp -	APBD	Prioritas	1 Dokumen	Rp 50.000.000
2	15	02	1	02						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal		55%	Rp 20.566.099.885	APBD	Prioritas	60%	Rp 663.099.000
2	15	02	1	02	02					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Samarinda Kab. Kukar Kab. Kutim	751 Unit	Rp 20.566.099.885	APBD	Prioritas	50 Unit	Rp 200.000.000
2	15	02	1	02	04					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara			Rp -	APBD	Prioritas	566 Unit	Rp 463.099.000
2	15	02	1	05						Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLJ Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi		4 Dokumen	Rp 230.066.577	APBD	Prioritas	4 Dokumen	Rp 300.000.000
2	15	02	1	05	01					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Balikpapan Samarinda Kutai Timur Kutai Kartanegara Berau	4 Laporan	Rp 101.999.659	APBD	Prioritas	4 Laporan	Rp 100.000.000
2	15	02	1	05	04					Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Balikpapan Samarinda Kutai Kartanegara Bontang Paser Kutim	4 Laporan	Rp 53.067.147	APBD	Prioritas	4 Laporan	Rp 100.000.000

2	15	02	1	05	05							Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Balikpapan Samarinda	1 Laporan	Rp	74.999.771	APBD	Prioritas	1 Laporan	Rp	100.000.000
2	15	02	1	07								Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang Dilakukan Ramp Check		1100 Unit	Rp	485.196.349	APBD	Prioritas	1200 Unit	Rp	530.000.000
2	15	02	1	07	04							Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	3 Laporan	Rp	255.196.439	APBD	Prioritas	3 Laporan	Rp	200.000.000
2	15	02	1	07	05							Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	10 Laporan	Rp	159.999.931	APBD	Prioritas	10 Laporan	Rp	250.000.000
2	15	02	1	07	15							Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	9 Laporan	Rp	69.999.979	APBD	Prioritas	9 Laporan	Rp	80.000.000
2	15	02	1	08								Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Beroperasi		565 Unit	Rp	40.205.589	APBD	Prioritas	580 Unit	Rp	135.000.000
2	15	02	1	08	02							Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	4 Laporan	Rp	40.205.589	APBD	Prioritas	4 Laporan	Rp	50.000.000

2	15	02	1	08	03					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Rp	-	APBD	Prioritas	580 Unit	Rp	85.000.000
2	15	02	1	09						Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah	Jumlah Penetapan Kebijakan Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang Tersedia (Keputusan)		1 Dokumen	Rp	1.199.998.908	APBD	Prioritas	1 Dokumen	Rp	20.000.000
2	15	02	1	09	01					Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Samarinda	1 Dokumen	Rp	1.000.000.000	APBD	Prioritas		Rp	-
2	15	02	1	09	02					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Samarinda	1 Dokumen	Rp	199.998.908	APBD	Prioritas	1 Dokumen	Rp	20.000.000
2	15	02	1	13						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan		130 Unit	Rp	260.712.908	APBD	Prioritas	130 Unit	Rp	150.000.000
2	15	02	1	13	01					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	130 Unit	Rp	79.999.791	APBD	Prioritas	130 Unit	Rp	50.000.000
2	15	02	1	13	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Samarinda Balikpapan	4 Laporan	Rp	180.713.117	APBD	Prioritas	4 Laporan	Rp	100.000.000
2	15	02	1	14						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan		325 Unit	Rp	178.532.973	APBD	Prioritas	350 Unit	Rp	75.000.000
2	15	02	1	14	03					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	4 Laporan	Rp	89.533.076	APBD	Prioritas	4 Laporan	Rp	50.000.000

2	15	02	1	14	04							Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	325 Unit	Rp	88.999.897	APBD	Prioritas	350 Unit	Rp	25.000.000
2	15	03										PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Laut dan SDP		0,917 Angka	Rp	1.500.000.000	APBD	Prioritas	0,917 Angka	Rp	326.000.000
													Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran		48,21 Indeks	Rp	92.786.205.990	APBD	Prioritas	51 Indeks	Rp	15.274.000.000
2	15	03	1	03								Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Patuh Perizinan		85 Unit	Rp	262.899.252	APBD	Prioritas	85 Unit	Rp	250.000.000
2	15	03	1	03	01							Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Balikpapan Samarinda Kutim Kubar Kukar PPU	85 Unit	Rp	153.198.544	APBD	Prioritas	85 Unit	Rp	150.000.000
2	15	03	1	03	02							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Balikpapan Samarinda Kutim Kubar Kukar PPU	1 Laporan	Rp	109.700.708	APBD	Prioritas	1 Laporan	Rp	100.000.000
2	15	03	1	04								Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia			Rp	-	APBD	Prioritas	1 Dokumen	Rp	100.000.000
2	15	03	1	04	02							Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			Rp	-	APBD	Prioritas	1 Dokumen	Rp	100.000.000

2	15	03	1	06						Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perizinan	65 Badan Usaha	Rp	173.306.738	APBD	Prioritas	70 Badan Usaha	Rp	174.000.000	
2	15	03	1	06	01					Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Samarinda Balikpapan Bontang Kukar Paser PPU Kutim Berau	65 Dokumen	Rp	61.800.000	APBD	Prioritas	70 Dokumen	Rp	62.000.000
2	15	03	1	06	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Samarinda Balikpapan Bontang Kukar Paser PPU Kutim Berau	2 Laporan	Rp	111.506.738	APBD	Prioritas	2 Laporan	Rp	112.000.000
2	15	03	1	09						Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pemenuhan fasilitas utama dan penunjang pelabuhan laut	41%	Rp	1.500.000.000	APBD	Prioritas	41%	Rp	326.000.000	
2	15	03	1	09	02					Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Balikpapan	1 Unit	Rp	1.500.000.000	APBD	Prioritas	1 Unit	Rp	326.000.000
2	15	03	1	10						Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan fasilitas utama dan penunjang pelabuhan SDP	53%	Rp	92.350.000.000	APBD	Prioritas	55%	Rp	14.750.000.000	
2	15	03	1	10	03					Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Kutai Barat Kutai Timur Samarinda	2 Unit	Rp	19.192.234.600	APBD	Prioritas	1 Unit	Rp	14.750.000.000

2	15	03	1	10	09							Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Samarinda	24 Unit	Rp	73.157.765.400	APBD	Prioritas		Rp	-
2	15	05										PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian			Rp	-	APBD	Rutin	40%	Rp	100.000.000
2	15	05	1	01								Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian			Rp	-	APBD	Rutin	40%	Rp	100.000.000
2	15	05	1	01	02							Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian			Rp	-	APBD	Rutin	1 Dokumen	Rp	100.000.000

Kode										Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
												Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)										(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2	15	2	15	0	0	0	0	1	01	UPTD Terminal			Rp	4.344.159.040				Rp	4.168.000.000	
2	15	01								Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		76 Indeks	Rp	435.871.935	APBD	Rutin	78 Indeks	Rp	979.000.000
											Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		75%	Rp	2.664.795.880	APBD	Rutin	80%	Rp	2.749.000.000
2	15	01	1	06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik		70%	Rp	380.906.135	APBD	Rutin	73%	Rp	795.000.000
2	15	01	1	06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	Rp	9.992.927	APBD	Rutin	2 Paket	Rp	15.000.000
2	15	01	1	06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	5 Paket	Rp	49.929.229	APBD	Rutin	8 Paket	Rp	250.000.000
2	15	01	1	06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	2 Paket	Rp	49.999.979	APBD	Rutin	2 Paket	Rp	80.000.000
2	15	01	1	06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan Kutai Timur Kartanegara Samarinda Berau Paser Bontang	12 Laporan	Rp	270.984.000	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp	450.000.000

2	15	01	1	08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu		100%	Rp	2.664.795.880	APBD	Rutin	100%	Rp	2.749.000.000
2	15	01	1	08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	Rp	5.000.000	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp	9.000.000
2	15	01	1	08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp	176.044.466	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp	240.000.000
2	15	01	1	08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Rp	2.483.751.414	APBD	Rutin	12 Laporan	Rp	2.500.000.000
2	15	01	1	09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		50%	Rp	54.965.800	APBD	Rutin	65%	Rp	184.000.000
2	15	01	1	09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	10 Unit	Rp	29.995.800	APBD	Rutin	10 Unit	Rp	84.000.000
2	15	01	1	09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Samarinda	37 Unit	Rp	24.970.000	APBD	Rutin	56Unit	Rp	100.000.000
2	15	02							PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Darat		0,44 Angka	Rp	1.243.491.225	APBD	Prioritas	0,47 Angka	Rp	440.000.000
2	15	02	1	03					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Terminal Tipe B		73%	Rp	1.243.491.225	APBD	Prioritas	83%	Rp	440.000.000
2	15	02	1	03	06				Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	Samarinda	7 Unit	Rp	150.000.000	APBD	Prioritas	7 Unit	Rp	100.000.000
2	15	02	1	03	07				Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Samarinda	2 Unit	Rp	99.902.704	APBD	Prioritas	2 Unit	Rp	100.000.000

2	15	02	1	03	08				Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Samarinda	1 Unit	Rp	20.499.781	APBD	Prioritas	1 Unit	Rp	20.000.000
2	15	02	1	03	10				Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	PPU Kukar	2 Unit	Rp	99.912.740	APBD	Prioritas	2 Unit	Rp	100.000.000
2	15	02	1	03	11				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Samarinda Kukar Kutim Paser Berau	5 Unit	Rp	873.176.000	APBD	Prioritas	3 Unit	Rp	120.000.000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan penyusunan program dan kegiatan beserta pendanaan pada tahun 2026 di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim berdasarkan pada RKPD Prov. Kaltim tahun 2026 yang disandingkan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada Permendagri 90 Tahun 2019 beserta aturan turunannya dengan menitikberatkan pendanaan pada program – program prioritas yang berkesinambungan dan mendukung visi dan misi RPJMD maupun RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Indikator program dan kegiatan disusun untuk mendukung kebijakan daerah yang selaras dengan kebijakan pusat dalam mendukung program prioritas nasional dan isu – isu strategis daerah. Program dan kegiatan manajerial disusun dengan selalu memperhatikan efesiensi dan efektifitas dalam pendanaan maupun pelaksanaannya.

Dinas Perhubungan pada tahun 2026 merencanakan 4 program dan 21 kegiatan, dan 58 sub kegiatan dimana terdapat 1 program strategis dengan 4 kegiatan 7 sub kegiatan dan 1 program prioritas dengan 8 kegiatan 15 sub kegiatan, 2 program penunjang dengan 9 kegiatan dan 36 sub kegiatan, program prioritas dan penunjang tersebut dilaksanakan oleh 1 sekretariat, 3 bidang teknis dan 1 UPTD yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) oleh Bidang Lalu Lintas & Prasarana dan Bidang Angkutan Jalan & Sarana , 1 UPTD Terminal dengan 3 Seksi, Program Pengelolaan Pelayaran oleh Bidang Pelayaran, Program Pengelolaan Perkeretaapian oleh Bidang Lalu Lintas & Prasarana yang semuanya disusun untuk mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di bidang perhubungan di Povinsi Kalimantan Timur dan diharapkan dapat mencapai target dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan secara berjenjang dapat

mendukung pencapaian target – target strategis dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029.

Pendanaan pada Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah murni dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sesuai dengan pagu indikatif RKPD tahun 2026, keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan dapat diantisipasi dengan pola – pola anggaran seperti aspirasi, pokok pikiran, penerapan prinsip *safeguarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi menjadi kegiatan yang terpisahkan dari proses pembangunan. Target Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2026 dapat dilihat pada matrik berikut :

Tabel : 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Sumber Dana	Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pekerjaan Utama	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2 15 2 15 0 0 0 0 01	Dinas Perhubungan					Rp 154.003.747.000		
2 15 2 15 0 0 0 0 01	Dinas Perhubungan					Rp 149.659.587.960		
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		76 Indeks		Rp 28.719.821.678		Rutin
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		75%		Rp 3.605.107.123		Rutin
2 15 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu		90,5%		Rp 345.763.868		Rutin
2 15 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	2 Dokumen	1. Dokumen RENJA 2025 (1 Dok) 2. Dokumen P-RENJA 2024 (1 Dok)	Rp 126.417.000	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2 15 01 1 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	1. Penyusunan RKA (1 Dok) 2. Penyusunan RKAP (1 Dok)	Rp 24.087.800	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2 15 01 1 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	1. Penyusunan DPA (1 Dok) 2. Penyusunan DPPA (1 Dok)	Rp 14.708.084	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2 15 01 1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	4 Laporan	1. Laporan LKjIP (1 Lap) 2. Laporan LPPD (1 Lap) 3. Laporan Capaian RENJA & RENSTRA (2 Lap)	Rp 70.997.500	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2 15 01 1 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	20 Laporan	1. Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1 & 2 (Dinas Perhubungan & 7 Terminal Tipe B) (2 Lap) 2. Laporan Evaluasi Sistem AKIP 4 Triwulan (4 Lap) 3. Laporan SIRA (12 Lap) 4. Laporan Monev Pembangunan (2	Rp 109.553.484	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2 15 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		96%		Rp 27.164.977.676		Rutin
2 15 01 1 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	145 Orang/Bulan	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Rp 26.502.877.142	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2 15 01 1 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	12 Dokumen	Jumlah laporan berkas pembayaran honorarium per bulan selama 12 bulan	Rp 566.760.000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin

2	15	01	1	02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	12 Dokumen	Jumlah laporan berkas verifikasi keuangan per bulan selama 12 bulan	Rp	45.850.978	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	02	06				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Samarinda	2 Dokumen	Dokumen bahan tanggapan dan Dokumen tindak lanjut pemeriksaan BPK	Rp	2.821.000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda Balikpapan	12 Laporan	Laporan Rekon Belanja Pengeluaran, Pendapatan dan Pajak per bulan selama 12 bulan	Rp	40.678.892	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	02	08				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	12 Dokumen	Dokumen prognosis realisasi anggaran per bulan selama 12 bulan	Rp	5.989.664	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	03					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik		93%		Rp	78.644.614		Rutin
2	15	01	1	03	01				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	1 Dokumen	Dokumen RKBMD dari aplikasi SIDIRGA	Rp	26.344.440	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	03	02				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	2 Dokumen	Dokumen KIB / KIR 2 semester	Rp	45.241.354	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	03	06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	4 Laporan	Laporan BA Penatausahaan Barang Milik Daerah Per Triwulan	Rp	7.058.820	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	04					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah		100%		Rp	37.122.150		Rutin
2	15	01	1	04	07				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	12 Laporan	Laporan rekap pengelolaan retribusi perizinan dan aset 7 Terminal (per bulan) & Laporan rekon pendapatan	Rp	37.122.150	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi >20JP		25%		Rp	114.139.466		Rutin
2	15	01	1	05	03				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	1 Dokumen	Dokumen Data Kepegawaian (Aplikasi SIM ASN, MyASN) (1 Dok)	Rp	7.162.820	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	05	05				Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	1 Dokumen	Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai (Aplikasi E-Kin) (1 Dok)	Rp	46.976.646	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	05	09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Samarinda	35 Orang	Jumlah ASN 35 orang yang mengikuti DIKLAT/BIMTEK	Rp	60.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin

2	15	01	1	06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik		93%		Rp 1.171.957.984		Rutin
2	15	01	1	06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	Pengadaan Alat-Alat Listrik Kantor	Rp 49.807.607	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	6 Paket	1. Pengadaan ATK 2. Pengadaan Kertas & Cover 3. Pengadaan Bahan Komputer/Tinta Printer 4. Pengadaan Mesin Pompa Air 5. Pengadaan Komputer & Tablet 6. Pengadaan Printer	Rp 363.484.061	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	06	05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	4 Paket	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan 1. Cetak Spanduk, Kop Dinas, Kotak Arsip 2. Penjilidan 3. Cetak Map Dinas 4. Penggandaan/Fotocopy	Rp 196.536.745	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	12 Laporan	Laporan Rekap Perjalanan Dinas per bulan selama 12 bulan di Aplikasi SIDA (12 Lap)	Rp 545.538.834	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	06	10					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	2 Dokumen	1. Laporan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip 2. Laporan Daftar Berkas Arsip yang Dimusnahkan	Rp 6.672.850	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	06	11					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	2 Dokumen	1. Dokumen PPID 2. Dokumen Satu Data	Rp 9.917.887	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu		100%		Rp 3.046.728.319		Rutin
2	15	01	1	08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	Laporan Rekap Surat Menyurat Dinas Perhubungan per bulan Selama 1 tahun (12 Bulan/12 Lap)	Rp 24.990.000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Laporan Rekap Pembayaran Air, Listrik, Internet per bulan selama 12 bulan (12 Lap)	Rp 1.004.651.237	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Laporan Rekap Pelaksanaan Jasa Kebersihan dan Jasa Pengamanan per bulan selama 12 bulan (12 Lap)	Rp 2.017.087.082	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		92,5%		Rp 365.594.724		Rutin
2	15	01	1	09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	2 Unit	Laporan pembelian bahan bakar, pembayaran pajak dan pemeliharaan rutin 2 kendaraan roda 4 1. KT 1929 M 2. KT 1042 BZ	Rp 65.016.000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin

2	15	01	1	09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	3 Unit	Laporan pembelian bahan bakar, pembayaran pajak dan pemeliharaan rutin 4 kendaraan operasional 1. KT 1396 B 2. KT 1613 M 3. KT 1173 I	Rp 97.928.000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	09	06					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Samarinda	1 Unit	Laporan pemeliharaan zoom	Rp 1.840.724	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	149 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Dishub yang Dipelihara/Direhabilitasi 1. Pemeliharaan Genset 1 Unit 2. Pemeliharaan AC 72 Unit 3. Pemeliharaan Komputer & Printer 76 Unit 4. Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Unit	Rp 200.810.000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	02								PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Darat		0,44 Angka		Rp 1.679.450.378		Prioritas
											Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan		55%		Rp 572.836.329		
											Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang		35%		Rp 20.796.166.462		
2	15	02	1	01						Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Penetapan Dokumen atau Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan		2 Dokumen		Rp 87.639.980		Prioritas
2	15	02	1	01	04					Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	2 Dokumen	1. Kegiatan Sosialisasi RAK (1 Dokumen) 2. Kegiatan Evaluasi/Monev RAK (1 Dokumen)	Rp 87.639.980	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	02	1	02						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal		55%		Rp 20.566.099.885		Prioritas
2	15	02	1	02	02					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Samarinda Kab. Kukar Kab. Kutim	751 Unit	1. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Ruas Jalan Provinsi di Kota Samarinda (165 Unit) 2. Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) di Ruas Jalan Provinsi di Kab Kukar (195 Unit) 3. Pengadaan dan Pemasangan LPJU TS di Ruas Jalan Provinsi di Kab Kukar (Muara Badak- BTS Bontang 1) (98 Unit) 4. Pengadaan dan Pemasangan LPJU TS di Ruas Jalan Provinsi di Kab Kukar (Muara Badak- BTS Bontang 2) (98 Unit) 5. Pengadaan dan Pemasangan LPJU TS di Ruas Jalan Provinsi di Kab Kukar (Simpang 3 Kota Bangun- Kota Bangun) (97 Unit) 6. Pengadaan dan Pemasangan LPJU TS di Ruas Jalan Provinsi di Kutim (Simpang 4 Kaliorang - BTS Berau) (98 Unit)	Rp 20.566.099.885	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas

2	15	02	1	05											Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLJ Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi		4 Dokumen		Rp 230.066.577		Prioritas
2	15	02	1	05	01										Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Balikpapan Samarinda Kutai Timur Kutai Kartanegara Berau	4 Laporan	1. Pelaksanaan dan Pengawasan Rekomendasi Andalalin (4 Tw/4 Lap)	Rp 101.999.659	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	02	1	05	04										Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Balikpapan Samarinda Kutai Kartanegara Bontang Paser Kutim	4 Laporan	Pelaksanaan Penegakan Hukum ODOL	Rp 53.067.147	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	02	1	05	05										Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Balikpapan Samarinda	1 Laporan	Pelaksanaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (1 Lap)	Rp 74.999.771	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	02	1	07											Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang Dilakukan Ramp Check		1100 Unit		Rp 485.196.349		Prioritas
2	15	02	1	07	04										Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	3 Laporan	1. Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor (1 Lap) 2. Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Tingat Prov (1 Lap) 3. Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat Nasional atau Evaluasi Pelajar Pelopor Tingkat Prov/Nasional (1 Lap)	Rp 255.196.439	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	02	1	07	05										Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	10 Laporan	1. Kegiatan Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan (4 Tw/4 Lap) 2. Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Chek) (4 Tw/4 Lap) 3. Forum Keselamatan (1 Lap) 4. Laporan Evaluasi Kegiatan Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan dan Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Chek) (1 Lap)	Rp 159.999.931	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	02	1	07	15										Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	9 Laporan	Pengawasan dan Koordinasi UPPKB di 9 Kab/Kota	Rp 69.999.979	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas

2	15	02	1	08						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Beroperasi		565 Unit		Rp 40.205.589		Prioritas
2	15	02	1	08	02					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	4 Laporan	Monev Angkutan Barang dan Tarif Angkutan (4 Tw/ 4 Lap)	Rp 40.205.589	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	02	1	09						Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah	Jumlah Penetapan Kebijakan Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang Tersedia (Keputusan)		1 Dokumen		Rp 1.199.998.908		Prioritas
2	15	02	1	09	01					Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Samarinda	1 Dokumen	Studi Review Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Kalimantan Timur (1 Dok)	Rp 1.000.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Prioritas
2	15	02	1	09	02					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Samarinda	1 Dokumen	Sosialisasi Multimoda (1 Dok)	Rp 199.998.908	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	02	1	13						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan		130 Unit		Rp 260.712.908		Prioritas
2	15	02	1	13	01					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	130 Unit	Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan Angkutan Umum 130 Unit	Rp 79.999.791	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	02	1	13	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Samarinda Balikpapan	4 Laporan	1. Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan (2 Lap (Laporan Tk. Prov dan laporan Tk. Nasional) 2. Rampcheck (1 Lap) 3. Sosialisasi (1 Lap)	Rp 180.713.117	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas

2	15	02	1	14						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan		325 Unit		Rp 178.532.973		Prioritas
2	15	02	1	14	03					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	4 Laporan	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (4 Tw/4 Lap)	Rp 89.533.076	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	02	1	14	04					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Balikpapan Kutai Timur Kutai Barat Kutai Kartanegara Samarinda Berau Penajam Paser Utara Paser Bontang	325 Unit	Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 325 Unit	Rp 88.999.897	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	03								PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Laut dan SDP		0,917 Angka		Rp 1.500.000.000		Prioritas
											Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran		48,21 Indeks		Rp 92.786.205.990		Prioritas
2	15	03	1	03						Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Patuh Perizinan		85 Unit		Rp 262.899.252		Prioritas
2	15	03	1	03	01					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Balikpapan Samarinda Kutim Kubar Kukar PPU	85 Unit	1. Dokumen Persetujuan Pengoperasian Kapal (5 dokumen) 2. Dokumen SPM Kapal (40 dokumen) 3. Dokumen Kartu Pengawasan Izin Trayek (40 dokumen)	Rp 153.198.544	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	03	1	03	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Balikpapan Samarinda Kutim Kubar Kukar PPU	1 Laporan	Jumlah Laporan Forum Keselamatan Pelayaran	Rp 109.700.708	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas

2	15	03	1	06						Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perizinan		65 Badan Usaha		Rp 173.306.738		Prioritas
2	15	03	1	06	01					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Samarinda Balikpapan Bontang Kukar Paser PPU Kutim Berau	65 Dokumen	Jumlah izin angkutan laut secara elektronik yang dikeluarkan	Rp 61.800.000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	03	1	06	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Samarinda Balikpapan Bontang Kukar Paser PPU Kutim Berau	2 Laporan	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Kegiatan Usaha Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (Forum Evaluasi dan Koordinasi Kegiatan Usaha Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (2 Laporan))	Rp 111.506.738	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	03	1	09						Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pemenuhan fasilitas utama dan penunjang pelabuhan laut		41%		Rp 1.500.000.000		Prioritas
2	15	03	1	09	02					Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Balikpapan	1 Unit	Study Pelabuhan Internasional di Kariangau Balikpapan	Rp 1.500.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	03	1	10						Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan fasilitas utama dan penunjang pelabuhan SDP		53%		Rp 92.350.000.000		Prioritas
2	15	03	1	10	03					Pembangunan dan Pemenuhan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Kutai Barat Kutai Timur Samarinda	2 Unit	1.Rehabilitasi Dermaga Sungai Melak Kalimantan Timur 2. Pembangunan Dermaga Speedboat	Rp 19.192.234.600	Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Prioritas
2	15	03	1	10	09					Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Samarinda	24 Unit	1. Pembangunan Dolphin Tambat Kapal di Sungai Mahakam 2. Studi Pengelolaan Alur Sungai Mahakam	Rp 73.157.765.400	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Prioritas

Kode										Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Sumber Dana	Catatan Penting
												Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pekerjaan Utama	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)										(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	2	15	0	0	0	0	01	01	UPTD Terminal				Rp 4.344.159.040			
2	15	01								Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan		76 Indeks		Rp 435.871.935		Rutin
											Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		75%		Rp 2.664.795.880		Rutin
2	15	01	1	06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik		70%		Rp 380.906.135		Rutin
2	15	01	1	06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 9.992.927	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	5 Paket	1. Pengadaan ATK 2. Pengadaan Kertas UPTD Terminal 3. Pengadaan Bahan Komputer UPTD Terminal 4. Pengadaan Webcam 5. Pengadaan Dispenser	Rp 49.929.229	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	2 Paket	1. Pengadaan Bahan Cetak (Kotak Arsip, Cetak Karcis, Map Dinas, Fotocopy, Jilid) 2. Pengadaan Cetak Spanduk	Rp 49.999.979	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan Kutai Timur Kutai Kartanegara Samarinda Berau Paser Bontang	12 Laporan	Laporan Rekap Perjalanan Dinas per bulan selama 12 bulan di Aplikasi SIDA (12 Lap)	Rp 270.984.000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu		100%		Rp 2.664.795.880		Rutin
2	15	01	1	08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	Laporan Rekap Surat Menyurat per bulan selama 12 bulan di Aplikasi SRIKANDI/Manual (12 Lap)	Rp 5.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Laporan Rekap Pembayaran Air, Listrik, Internet per bulan selama 12 bulan (12 Lap)	Rp 176.044.466	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	Laporan Rekap Pelaksanaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan per bulan selama 12 bulan (12 Lap)	Rp 2.483.751.414	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin

2	15	01	1	09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		50%		Rp 54.965.800		Rutin
2	15	01	1	09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	10 Unit	Laporan pembenan banan bakar, pembayaran pajak dan pemeliharaan rutin 10 kendaraan operasional atau lapangan 1. KT 1478 M 2. KT 2491 B 3. KT 2547 B 4. KT 2455 B 5. KT 5906 M 6. KT 6390 M 7. KT 5917 M 8. KT 5918 M 9. KT 5898 M 10. KT 2532 B	Rp 29.995.800	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	01	1	09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Samarinda	37 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Dishub yang Dipelihara/Direhabilitasi 1. Pemeliharaan AC Split 13 Unit 3. Pemeliharaan Komputer/Laptop 12 Unit 4. Pemeliharaan Printer 12 Unit	Rp 24.970.000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rutin
2	15	02								PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Darat		0,44 Angka		Rp 1.243.491.225		Prioritas
											Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan						
											Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang						
2	15	02	1	03						Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Terminal Tipe B		73%		Rp 1.243.491.225		Prioritas
2	15	02	1	03	06					Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	Samarinda	7 Unit	1. Pengawasan Operasional Terminal 2. Penjagaan Posko Lebaran dan Nataru	Rp 150.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	02	1	03	07					Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Samarinda	2 Unit	1. Pengadaan Rambu Lintas Terminal Tipe B Wilayah I 2. Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan Terminal Bontang dan Terminal Sangatta	Rp 99.902.704	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas

2	15	02	1	03	08				Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Samarinda	1 Unit	Pemeliharaan Perangkat Lunak	Rp	20.499.781	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	02	1	03	10				Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	PPU Kukar	2 Unit	1. Pengadaan Traffic Cone Terminal Tipe B Wilayah II 2. Pengadaan Rambu Lalu Lintas Terminal Tipe B Wilayah II	Rp	99.912.740	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas
2	15	02	1	03	11				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Samarinda Kukar Kutim Paser Berau	5 Unit	1. Terminal Sungai Kunjang dan Lempake 2. Terminal Timbau Tenggarong 3. Terminal Sangatta 4. Terminal Paser 5. Terminal Berau	Rp	873.176.000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Prioritas

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

1. Jumlah program Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2026 berdasarkan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2026 sebanyak 4 program dan 21 kegiatan, dan 58 sub kegiatan dengan alokasi anggaran indikatif sebesar Rp. 154.003.747.000,- ;
2. Sifat penyebaran/distribusi lokasi program dan kegiatan pada prinsipnya mengacu pada rencana Struktur Organisasi Kelembagaan Tahun 2026 sesuai Pergub Kaltim No. 43 Tahun 2023 serta penerapan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, penekanan pada program/kegiatan prioritas adalah yang bersifat strategis dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, khususnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, Penyelenggaraan Angkutan Jalan AKDP, Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga Sungai Tering, Melak, dan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Terminal Tipe B;
3. Dalam pelaksanaan program / kegiatan bidang perhubungan tidak dapat lepas dari keterkaitan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun *stakeholder* swasta dan masyarakat, oleh karena itu dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan selalu mengedepankan koordinasi yang intens sehingga tercipta kerjasama yang sinergis dan tepat sasaran dalam hal teknis kegiatan maupun pendanaan program/kegiatan;
4. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip – prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

5.2 Saran

1. Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan Renja Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2026;

2. Untuk menyusul rencana tindak bagi ⁻²⁰⁶²⁻pencapaian program prioritas pembangunan dan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan – kegiatan tersebut, serta untuk terwujudkannya sinergitas semua pihak yang terkait, maka setiap prioritas kegiatan akan dilakukan pengendalian dan pengawasan / monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan oleh Kepala Bidang teknis terkait dalam kendali Kepala Dinas, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

RENJA TAHUN 2026
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai turunan pelaksanaan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (dst.), Pemerintah Daerah diminta untuk mulai menyusun Rancangan Akhir RKPD sejak Bulan Desember tahun (n-2) perencanaan untuk selanjutnya menjadi bahan Konsultasi Publik. Sedangkan pada masa tersebut, penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 masih belum ditetapkan. Terhadap hal tersebut, maka penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 untuk sementara masih berpedoman pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang telah memuat penjabaran visi, misi, dan program unggulan Gubernur/Wakil Gubernur.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 memiliki kedudukan yang strategis sebagai tahun dasar pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen RKPD Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2026 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai Rancangan Akhir RENJA Diskominfo merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Diskominfo tahun 2025 – 2029 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus bidang Informasi Komunikasi Publik, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian. Aplikasi Informatika, dan Statistik.

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa adalah Program Diskominfo yang merupakan salah satu dari sekian program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029.

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029. Renstra

ini diwujudkan setiap tahun melalui Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan. dimana pelaksanaannya. berapa dana yang dibutuhkan oleh SKPD untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Sejalan dengan itu. berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat 2 bahwa rencana strategis perangkat daerah dirumuskan ke dalam rencana kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD; Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; maka dalam penyusunan Rancangan Akhir RENJA ini Diskominfo berupaya untuk melaksanakan amanat seperti yang tertulis tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RENJA Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);

- c. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

- i. Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11); dan
- k. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16).
- l. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194);
- m. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.3Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan serta rencana kerjanya.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai pedoman PD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2026 sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

1.4Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan I RENJA Diskominfo Prov. Kaltim adalah sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan.
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renja.
- b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap RKPD, penelaahan usulan program kegiatan masyarakat.
- c. Bab III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan.
Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.
- d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Memuat Rencana Kerja, program dan kegiatan, sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan untuk tahun 2026.
- e. Bab V Penutup
Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun ke depan oleh PD.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2025. Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan Perencanaan telah sinkron dengan pelaksanaan Proses pengadaan sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan (tepat waktu), dan Evaluasi pekerjaan yang selalu dilakukan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra - Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut dengan mempercepat pelaksanaan fisik dan memperketat pengawasan di lapangan.

Dalam rangka mencapai target serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada rancangan akhir rencana kerja tahun 2026 terdapat 5 program, 14 kegiatan, dan 73 sub-kegiatan dengan pagu indikatif yang bersumber dari APBD.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel T- C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2026 :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				128.021.672.556	119.456.109.480	93,31	167.749.455.970	36.494.3195.90	28.00
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks		52.782.314.706	51.103.332.939	96,82	72.807.066.555	18.800.050.738	45.60
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 persen		727.338.000	704.082.439	96,80	341.779.300	101.050.700	29,57
2	16	01	1.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		157.880.000	150.362.560	95,24	125.820.650	41.716.400	33.16
2	16	01	1.01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		178.504.500	176.699.932	98,99	44.838.000	16.642.700	37.12
2	16	01	1.01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		15.214.500	14.503.000	95,32	9.120.650	8.520.000	93.41

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		220.552.000	207.980.030	94,30	84.600.000	5,640,600	6.67
2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		155.187.000	154.536.917	99,58	77.400.000	28.531.000	36.86
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 persen		14.593.253.057	14.359.188.134	98,40	27.305.451.835	10.299.098.694	37.72
2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan		13.686.455.427	13.568.961.444	99,14	26.506.300.509	9.946.603.244	37.53
2	16	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		3.710.660	3.606.000	97,18	2.146.964	1.080.000	50.30
2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		765.530.500	655.587.640	85,64	729.070.000	346.932.200	24.24
2	16	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		10.642.400	9.798.400	92,07	8.834.756	2,880,000	47.59
2	16	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan		68.316.070	64.545.750	94,48	27.199.606	523,250	1.92

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
						Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD								
2	16	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		58.598.000	56.688.900	96,74	31.900.000	0	0
2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 persen		58.513.200	53.630.700	91,66	16.933.680	0	0
2	16	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		9.704.400	9.150.000	94,29	5.644.560	0	0
2	16	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		9.704.400	6.885.000	70,95	5.644.560	0	0
2	16	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		39.104.400	37.595.700	96,14	5.644.560	0	0
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 persen		932.718.400	920.088.868	98,65	54,970,760	0	0
2	16	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		271.893.000	270.768.000	99,59	0	0	0
2	16	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		147.057.400	142.620.576	96,98	5,820,760	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
2	16	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		147.600.000	145.594.780	98,64	5,200,000	0	0
2	16	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74 Orang		345.000.000	344.905.512	99,97	33,300,000	0	0
2	16	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		21.168.000	16.200.000	76,53	10,650,000	0	0
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen		3.198.469.970	2.791.068.524	87,26	1,491.756.472	429,725,606	24.78
2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		207.460.500	206.368.500	99,47	40,437,820	40,265,000	99.57
2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		145.241.780	145.241.780	100,00	155.653.486	38,443,000	43.86
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		130.033.990	129.006.400	99,21	132.766.366	35,627,500	29.43
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		2.715.733.700	2.310.451.844	85,08	1.133.378.800	315,390,106	21.67
2	16	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		25.538.029.087	24.911.332.066	97,55	29,520,000	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 persen		5.117.670.800	4.793.580.000	93,67	36.555.043.484	0	0
2	16	01	1.07	00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		826.763.225	825.363.266	99,83	39.877.000	0	0
2	16	01	1.07	00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		19.592.572.362	19.291.366.100	98,46	507.973.017	0	0
2	16	01	1.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit		1.022.700	1.022.700	100,00	36.007.025.567	0	0
2	16	01	1.07	00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		6.242.602.292	5.907.388.054	94,63	167.900	0	0
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen		6.242.602.292	11.069.000	0,18	5,589,425,953	2,909,976,799	52.63
2	16	01	1.08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		19.992.000	439.898.211	2200,37	16,736,000	8,599,000	51.38
2	16	01	1.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		599.999.500	193.774.043	32,30	543,949,100	192,403,110	51.38
2	16	01	1.08	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		195.510.000	5.262.646.800	2691,75	260.962.000	63,493,793	51.38

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		5.427.100.792	1.456.554.154	26,84	4,767,778,853	2,645,480,896	55.49
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 persen		1.491.390.700	458.258.199	30,73	1,451,705.071	386,272,100	27.48
2	16	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		485.404.000	123.250.000	25,39	673,015,999	191,174,200	28.41
2	16	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		125.970.000	398.645.955	316,46	1,430,000	0	0
2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		398.985.900	476.400.000	119,40	245.779.072	24.297.900	12.17
2	16	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		481.030.800			531.480.000	170,800,000	32.14
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	65 %		39.749.633.854	65.417.228.814	164,57	45.379.199.562	2,142,866,382	5.12
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	90 persen		39.749.633.854	65.417.228.814	164,57	45.379.199.562	2,142,866,382	5.12

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
2	16	02	1.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan		173.000.000	166.926.178	96,49	546.374.075	3,888,000	0.71
2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	250 Konten		704.000.000	674.694.688	95,84	8.181.256.730	773,420,477	11.65
2	16	02	1.01	0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang		157.800.000	139.056.260	88,12	95,559,020	980,000	1.03
2	16	02	1.01	0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	88 Persentase		6.590.290.650	6.086.383.488	92,35	338,641,920	41,443,800	12.24
2	16	02	1.01	0018	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase		16.665.795.190	16.479.222.487	98,88	977.049.894	128,416,000	5.32
2	16	02	1.01	0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen		7.902.400.000	4.882.304.333	61,78	118,375,522	118,375,522	1.67
2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan		1.218.600.000	1.187.629.147	97,46	1,709,771,601	1,709,771,601	21.47

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
2	16	02	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	90 Komunitas		661.038.500	644.759.236	97,54	329,068,730	74,077,865	22.51
2	16	02	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan		274.561.500	264.502.738	96,34	2,871,468,650	679,719,000	23.67
2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi		292.600.000	279.223.857	95,43	306,054,700	0	0
2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media		2.287.012.010	2.149.813.155	94,00	29,950,578,720	71,786,240	0.27
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	85 %		29.337.318.396	26.916.982.888	91,75	45.400.782.350	418,781,042	0.96
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100 persen		6.300.016.915	5.545.730.359	88,03	60,688,280	0	0
2	16	03	1.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen		79.392.000	75.289.980	94,83	60,688,280	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	90 persen		314.682.800	307.637.676	97,76	45.340.094.070	418,781,042	0.96
2	16	03	1.02	0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen		5.905.942.115	5.162.802.703	87,42	526,722,400	6,949,400	1.32
2	16	03	1.02	0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah							194,885,000	0	0
2	16	03	1.02	0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah							160,748,500	0	0
2	16	03	1.02	0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda							307,128,500	0	0
2	16	03	1.02	0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah							1,245,576,221	178,681,091	14.35
2	16	03	1.02	0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas							93,998,000	2,201,000	2.34
2	16	03	1.02	0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	10 kabupaten/kota		23.037.301.481	21.371.252.529	92,77	12.808.412.438	36,918,210	0.33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
2	16	03	1.02	0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi		913.972.700	848.771.916	92,87	3,000,000	0	0
2	16	03	1.02	0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan		308.084.000	304.517.890	98,84	1.433.216.667	0	0
2	16	03	1.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah							178,080,000	127,211,161	71.43
2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen		16.288.819.181	15.164.390.864	93,10	139,068,500	0	0
2	16	03	1.02	0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen		610.874.000	543.637.716	88,99	122,357,000	833,000	0.68
2	16	03	1.02	0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis							80,822,000	0	0
2	16	03	1.02	0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE							3,796,661,466	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
2	16	03	1.02	0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE							2,860,000	0	0
2	16	03	1.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE							371,455,600	59,807,180	16.10
2	16	03	1.02	0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah							12.242.251.584	6,180,000	0.05
2	16	03	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	45 perangkat daerah		126.000.000	123.532.912	98,04	11,632,850,194	0	0
2	16	03	1.02	0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	1 Dokumen		389.256.000	306.330.411	78,70			
2	16	03	1.02	0032	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	45 Perangkat Daerah		2.556.645.600	2.423.812.242	94,80			
2	16	03	1.02	0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi		320.000.000	282.339.970	88,23			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
2	16	03	1.02	0034	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen		250.000.000	228.345.137	91,34			
2	16	03	1.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Laporan		791.024.000	732.875.750	92,65			
2	16	03	1.02	0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi		282.626.000	264.423.852	93,56			
2	16	03	1.02	0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan		200.000.000	148.273.869	74,14			
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				4.762.127.500	4.676.858.250	98,21			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,75 Indeks		4.762.127.500	4.676.858.250	98,21	3.194.327.443	233,665,083	7.32
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	90 persen		492.388.400	4.676.858.250	949,83	3,194,327,443	233,665,083	7.32
2	20	02	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral							843,367,361	111,088,381	13.17

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
2	20	02	1.01	0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral							358,340,702	114,668,702	32.00
2	20	02	1.01	0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional							958,754,392	7,908,000	0.82
2	20	02	1.01	0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar							521.466.372	0	0
2	20	02	1.01	0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia							521,466,372	0	0
2	20	02	1.01	0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	70 %		674.982.000	487.536.590	72,23			
2	20	02	1.01	0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %		1.290.193.500	674.788.439	52,30			
2	20	02	1.01	0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %		787.187.400	1.280.558.123	162,68			
2	20	02	1.01	0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		1.517.376.200	775.982.938	51,14			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
2	20	02	1.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	150 Orang		1.390.278.100	1.457.992.160	104,87			
2	20	02	1.01	0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		1.146.667.600					
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				200.000.000					
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	60 Persen		385.000.000	1.279.495.299	332,34	968.110.060	45,000,104	7.24
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 persen		464.000.000	1.039.505.023	224,03	839.367.911	1,545,000	0
2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi							40,169,788	0	0
2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi							85,534,000	0	0
2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							671.188.123	1,545,000	0.48
2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi							42,476,000	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
2	21	02	1.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan		97.667.600	193.310.675	197,93			
2	21	02	1.01	0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	37 Perangkat Daerah		243.610.500	381.091.462	156,43			
2	21	02	1.01	0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		243.610.500	391.012.969	160,51			
2	21	02	1.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	1 Dokumen			74.089.917				
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	90 persen			239.990.276		128,742,149	43,455,104	33.75
2	21	02	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi							128,742,149	43,455,104	33.75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi 0		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Mei 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025
2	21	02	1.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	37 Kegiatan		243.610.500	239.990.276	98,51			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing membawahi tiga Kepala Seksi/Kasubbag (terlihat pada gambar dibawah ini :



Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). memiliki fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Bidang Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.

- c. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan.
- d. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.
- e. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika.
- f. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Statistik.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan. Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian. Aplikasi Informatika dan Statistik.
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris Dinas mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. perencanaan program dan pelaporan. urusan umum dan kehumasan. kepegawaian. ketatalaksanaan. perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.. dengan dibantu:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program. monitoring. evaluasi dan pelaporan.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian. ketatalaksanaan. perlengkapan dan pemeliharaan. hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat..
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran. perbendaharaan. verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan. mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. pembinaan. bimbingan. pengendalian serta pengembangan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan. dengan dibantu:

1. Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik. mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. pembinaan. pengaturan teknis dan pengendalian meliputi monitoring opini dan pengelolaan media komunikasi publik.;
2. Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik. mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. pembinaan. pengaturan teknis dan pengendalian meliputi pelayanan informasi dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.;
3. Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik. mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. pembinaan. pengaturan teknis dan pengendalian meliputi kemitraan media komunikasi publik.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. pembinaan. bimbingan. pengendalian serta pengembangan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian. dengan dibantu:

1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. pembinaan. pengaturan teknis dan pengendalian meliputi infrastruktur teknologi informasi komunikasi;

2. Seksi Pengelolaan Data dan Intergrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. pembinaan. pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi pengelolaan data dan integrasi sistem informasi
3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. pembinaan. pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi keamanan informasi dan persandian.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika. mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. pembinaan. bimbingan. pengendalian serta pengembangan teknis bidang Aplikasi Informatika.. dengan dibantu:

1. Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. pembinaan. pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan domain dan aplikasi.
2. Seksi Pengelolaan *e-Government* mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. pembinaan. pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan e-government;
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. pembinaan. pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi.

Kepala Bidang Statistik. mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi.

pembinaan. bimbingan dan pengendalian teknis bidang Statistik. dengan dibantu:

1. Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. pembinaan. pengaturan teknis Statistik Sosial;
2. Seksi Statistik Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. pembinaan. pengaturan teknis Statistik Ekonomi;
3. Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan. koordinasi. pembinaan. pengaturan teknis Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh 122 orang pegawai terdiri dari 51 orang Pegawai Negeri Sipil dan 71 orang Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Kontrak) yang ditempatkan di semua Bidang-Bidang. Untuk 51 Orang PNS berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Aparatur Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Tahun 2024

No.	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jumlah	Pria	Wanita
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Madya/ IV-d	S2	1	1	-
2	Sekretaris	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	1	1	-
3	Kepala Bidang	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	2	1	1
4	Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I/ III-d	S1	1	1	-
5	Jabatan Fungsional	Pembina/ IV-a	S2	3	3	-
		Penata Tk. I / III-d	S2	6	4	2
			S1	7	4	3

No.	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jumlah	Pria	Wanita
		Penata / III-c	S1	1	1	-
		Penata Muda Tk. I / III-b	S1	2	-	2
		Pengatur Tingkat I / II.d	D3	1	1	-
		Pengatur / II.c	D3	1	-	1
		Pembina/ IV-a	S2	3	3	-
6	Jabatan Pelaksana	Penata Tk. I / III-d	S1	3	3	-
		Penata /IIIc	S1	6	4	2
			D3	1	-	1
		Penata Muda Tk.I/ III-b	S1	2	1	1
			SMA	3	3	-
		Penata Muda/ III-a	S1	1	1	-
			SMA	3	3	-
		Pengatur Tk. I/ II-d	SMA	3	1	2
		Pengatur/ II-c	D3	1	-	1
			SMA	2	2	-
Jumlah				51	35	16

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi. berikut dijabarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disinkronkan pada Forum Perangkat Daerah dengan OPD Kabupaten/Kota yang diakomodir dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

BERITA ACARA KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENJA
DISKOMINFO TAHUN 2024 – 2026 DENGAN TEMA
"PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK MENCAPAI KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL"
di LINGKUNGAN PEMPROV KALTIM

Pada hari ini **Jum'at** Tanggal **Delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, telah diselenggarakan kegiatan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 Dengan Tema "Percepatan Transformasi Digital Untuk Mencapai Keterpaduan Layanan Digital di Lingkungan Pemprov Kaltim" yang bertempat di Hotel Gran Senyur Balikpapan, yang dihadiri oleh Para Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum pada daftar hadir peserta dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah mendengar, memperhatikan dan mempertimbangkan :

1.	Sambutan dan arahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Dra. Sri wahyuni, MPP yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Pemaparan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Penyampaian materi oleh masing - masing Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
4.	Tanggapan, saran dan gagasan dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

MENYEPAKATI

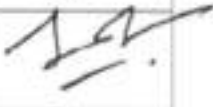
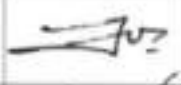
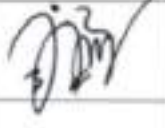
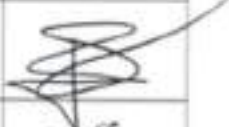
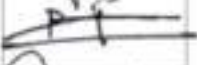
Kesatu	:	Mengoptimalkan Pelayanan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kedua	:	Mengoptimalkan Layanan Informasi Publik
Ketiga	:	Mengoptimalkan Transformasi Digital Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Keempat	:	Mengoptimalkan Tata Kelola Keamanan Informasi
Kelima	:	Penyediaan dan Peningkatan Data Statistik Sektor di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berkualitas
Keenam	:	Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Ketujuh	:	Meningkatkan Keamanan Siber Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Kedelapan	:	Menyinkronkan Diseminasi Jaringan Informasi Se-Kalimantan Timur
Kesembilan	:	Mewujudkan Smart Province di tahun 2025

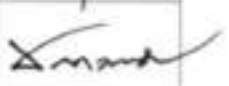
Kesepuluh	:	Mewujudkan sinergitas dan kolaborasi terkait pelaksanaan internet desa dengan target 35 titik Kabupaten di Kalimantan Timur
Kesebelas	:	Memfasilitasi Bantuan Keuangan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Keduabelas	:	Melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab/Kota dalam pelaksanaan CSIRT
Ketigabelas	:	Menyelaraskan program kegiatan dan target indikator
Keempatbelas	:	Menyiapkan data blankspot pada Kabupaten Kota untuk perencanaan pada Musrembangnas

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat dan disahkan untuk ditindaklanjuti.

**TANDA TANGAN BERITA ACARA KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENJA
DISKOMINFO TAHUN 2024 – 2026 DENGAN TEMA
"PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK MENCAPAI KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL"**

Balikpapan, 8 Maret 2024

No.	Institusi	Nama/Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur	H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si Kepala Dinas	
2.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	<u>Sukandar, S.Sos</u> Kepala atau yang mewakili	
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur	<u>Dhea Dwi P.</u> Kepala atau yang mewakili	
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur	<u>Irayani</u> Kepala atau yang mewakili	
5.	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur	<u>Drs. Juradi, M.TP</u> Kepala atau yang mewakili	
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan	<u>Juni Yastutik</u> Kepala atau yang mewakili	
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	_____ Kepala atau yang mewakili	
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Penajam Paser Utara	<u>Syafrudin Lamato, S.T., M.T</u> Kepala atau yang mewakili	
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Berau	_____ Kepala atau yang mewakili	
10.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Sandi Kab. Mahakam Ulu	<u>Bernadus Jur</u> Kepala atau yang mewakili	
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Barat	<u>Yesi Alexander, S.E., M.Si</u> Kepala atau yang mewakili	
12.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Kutai Timur	_____ Kepala atau yang mewakili	

13.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara	<u>Kepala atau yang mewakili</u>	
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang	<u>Kepala atau yang mewakili</u>	
15.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persanden Kab. Paser	<u>H. Anan Latief, S.Sos., M.M</u> Kepala atau yang mewakili	
16.	TVRI Stasiun Kalimantan Timur	<u>Dra. Rosnani</u> Kepala atau yang mewakili	
17.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur	<u>Ali Yamin Ishak, S.Sos</u> Kepala atau yang mewakili	
18.	Relawan Teknologi Informasi Komunikasi Provinsi Kalimantan Timur	<u>Nasruddin</u> Kepala atau yang mewakili	
19.	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	<u>Ir. H. Imran Duga, M.Sos</u> Kepala atau yang mewakili	

RENCANA KERJA TAHUN 2025 KEGIATAN BIDANG STATISTIK	
1.	Coaching Metadata I dan II Produsen Data
2.	Coaching EPSS
3.	Verifikasi dan Validasi Data Tahap I
4.	Verifikasi Data DSDD di E-Walidata Tahap I
5.	Coaching Metadata untuk Walidata Kab/Kota
6.	Coaching JIGD
7.	Verifikasi Data DSDD di E-Walidata Tahap I
8.	Verifikasi dan Validasi Data Tahap II

RENCANA KERJA TAHUN 2025 KEGIATAN BIDANG IKP DAN KEHUMASAN	
1.	Monitoring dan Evaluasi Panji-Panji Bidang IKP dan Kehumasan dan Pengelolaan Media Sosial OPD
2.	Sosialisasi Peraturan dan FCPF
3.	Uji Kompetensi Wartawan
4.	Bimtek Peningkatan SDM Komunikasi Publik dan Kehumasan dan Komunitas Informasi Masyarakat
5.	Focus Group Discussion SP4N LAPOR Pemprov Kaltim dan Kab/Kota
6.	Focus Group Discussion Kepatuhan Badan Publik
7.	Workshop Anti Hoax
8.	Forum Badan Koordinasi Kehumasan 2025
9.	Monitoring dan Evaluasi Komunitas Informasi Masyarakat

RENCANA KERJA TAHUN 2025 KEGIATAN BIDANG TIK DAN PERSANDIAN	
1.	Sosialisasi SPLP, Jaringa Intra Pemerintah, Pusat Data Nasional, Penyediaan Akses Internet Pemerintah, Pusat Kendali Pemerintah, Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Sertifikat Elektronik.
2.	Bimtek Keamanan Siber atau Sumber Daya Manusia Keamanan Siber
3.	Pelaksanaan CSIRT

RENCANA KERJA TAHUN 2025 KEGIATAN BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	
1.	Evaluasi dan Rakortek SENADA
2.	Rapat Koordinasi reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
3.	Pendampingan Tauval dan Ekspose Indeks Penilaian
4.	Rakor dan Monev Rencana dan Anggaran SPBE
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Manajemen dan Proses Bisnis SPBE
6.	Rapat Kerja dan Kick Off Smart Province
7.	Sosialisasi Literasi Digital dan Bimbingan Teknik SPBE
8.	Pelatihan Digital Talent

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Tabel T-C.30

No	Indikator	SPM / Standar nasional	ikkk Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2026 (thn n-2) 2024	Tahun 2026 (thn n-1) 2025	Tahun 2026 (thn n) 2026	Tahun 2026 (thn n+1) 2027	Tahun 2026 (thn n-2) 2024	Tahun 2026 (thn n-1) 2025	Tahun 2026 (thn n) 2026	Tahun 2026 (thn n+1) 2027	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 Presentase	100 Presentase	100 Presentase	100 Presentase	100 Presentase	100 Presentase	4.000.000.000	4.000.000.000	
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi		layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	55%	55%	55%	55%	55%	55%	200.000.000	300.000.000	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi		PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah)	63%	63%	63%	63%	63%	63%	200.000.000	300.000.000	
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 Presentase	100 Presentase	100 Presentase	100 Presentase	100 Presentase	100 Presentase	1.400.000.000	1.500.000.000	
6	Presentase Organisasi OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 Presentase	100 Presentase	100 Presentase	100 Presentase	100 Presentase	100 Presentase	1.400.000.000	1.500.000.000	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah		nilai per area keamanan informasi	64,34%	64,34%	64,34%	64,34%	64,34%	64,34%	500.000.000	500.000.000	

Adapun pencapaian urusan bidang Kominfo tahun 2026 dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi secara cepat, tepat, akurat dan terpercaya sesuai kebutuhan masyarakat, maka dalam Tahun 2026 dilaksanakan kegiatan:

1. Penyediaan jaringan layanan informasi yaitu
 - Sewa bandwidth teresterial
 - Sewa Link Fiber Optic
2. Media Center merupakan tempat untuk mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial;
3. Pada tahun 2025 untuk publikasi dilaksanakan pembuatan leaflet, baliho, dan spanduk.
4. Dalam rangka mempublikasikan informasi tentang pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2026 Diskominfo Provinsi Kaltim secara berkesinambungan melakukan kerjasama dengan TVRI Kalimantan Timur dan RRI Samarinda. Acara dialog interaktif di TVRI dilakukan setiap hari Rabu sedangkan untuk RRI setiap hari Selasa dengan nara sumber dari OPD dilingkungan Pemprov, Kaltim, Akademisi, LSM, DPRD dan Tokoh Masyarakat.
5. Pada tahun 2026 setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara rutin dilakukan pendokumentasian.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim direncanakan berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pameran yang digunakan sebagai sarana publikasi baik kegiatan Dinas Kominfo Prov. Kaltim sendiri maupun capaian pembangunan secara keseluruhan. Di tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim yaitu 2 kegiatan pameran di dalam daerah).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun isu strategis pada Dinas Kominfo Prov. Kaltim sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi (e-Government) dalam urusan Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- b. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Kalimantan Timur akan informasi pembangunan daerah
- c. Minimnya infrastruktur telekomunikasi di beberapa daerah pada provinsi Kalimantan Timur sehingga terbatasnya akses layanan komunikasi dan informasi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengurus urusan wajib bukan pelayanan dasar. Tugas Pokok yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Kaltim tahun 2025-2029 yang akan ditetapkan.

Infrastruktur dasar merupakan fasilitas dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan hal ini infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan baik dan layak. Melihat pentingnya infrastruktur dasar maka hal ini sangat mempengaruhi kehidupan. Salah satunya dapat terkait dengan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar sering dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti telekomunikasi merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, dengan meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan

informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah dapat diukur dengan jumlah interoperabilitas sistem informasi.

Program-program pembangunan ini harus dilaksanakan secara konsisten agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan program-program ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur membuat skala prioritas atau bertahap dengan memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan serta mempertimbangkan kondisi faktual isu-isu strategis di daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat memberikan akses layanan informasi dan komunikasi untuk kebutuhan publik secara tepat, cepat, efisien dan efektif serta sinergis dengan perkembangan teknologi yang tersedia.

Di tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sasaran dalam mempercepat dan meningkatkan pelayanan publik, hal utama yang akan dilaksanakan sesuai dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur diantaranya pengembangan infrastruktur TIK dan interoperabilitas aplikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah provinsi dalam hal pelayanan publik. Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah pengembangan akses telekomunikasi di daerah perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal.

Untuk melaksanakan misi *Good Governance*, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat perlu diakomodir dengan mempermudah akses terhadap informasi publik dengan membuat dan mengembangkan akses sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem

informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah.

Selain itu terdapat beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu:

- d. Penduduk yang tinggal di daerah terpencil umumnya berlatar belakang pendidikan kurang memadai;
- e. Pola pikir sederhana. umumnya sibuk bertani;
- f. Kurang kesempatan memperoleh pendidikan karena tidak tersedianya lembaga pendidikan yang memadai di desanya;
- g. Kurangnya Informasi sebagai akibat terjangkaunya desa mereka oleh jaringan layanan informasi.

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai mana tertera dalam tabel berikut ini:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur

Tabel T-C.31

No					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urutan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp0)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat			59.044.400.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat				
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat			57.742.898.429,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat				
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks 100 Persen	33.236.112.873,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks 100 Persen		
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 Persen	23.640.308,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 Persen		
2	16	01	1.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.020.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		
2	16	01	1.01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.020.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
2	16	01	1.01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.560.308,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		
2	16	01	1.01	00	Koordinasi dan Penyusunan	Pemprov	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan	4.020.000,00	Koordinasi dan Penyusunan	Pemprov	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1		

No					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urutan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp0)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
				06	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		
2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.020.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 persen	29.501.814.182,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 persen		
2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/Bulan	28.995.353.874,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/Bulan		
2	16	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.020.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	486.840.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		
2	16	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.020.000,00	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		
2	16	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	7.550.308,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan		

No					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urutan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp0)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							<i>Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD</i>					<i>Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD</i>			
2	16	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen	4.020.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen		
2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</i>	100 persen	2.998.494,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</i>	100 persen		
2	16	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	999.498,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen		
2	16	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	999.498,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen		
2	16	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	999.498,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan		
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)</i>	100 persen	2.994.933,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)</i>	100 persen		
2	16	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	1.083.937,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket		
2	16	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	455.498,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen		
2	16	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	1 Dokumen	455.498,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	1 Dokumen		

No					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urutan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp0)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	16	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Masyarakat Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74 Orang	500.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Masyarakat Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74 Orang		
2	16	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	500.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen	963.117.572,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen		
2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.767.390,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.795.605,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	68.584.577,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	774.010.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
2	16	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	960.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang	100 persen	383.646.243,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang	100 persen		

No					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urutan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp0)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
					Urusan Pemerintahan Daerah	Prov Kaltim, Masyarakat	kegiatan kantor			Urusan Pemerintahan Daerah	Prov Kaltim, Masyarakat	kegiatan kantor			
2	16	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	418.499,00	Pengadaan Mebel	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		
2	16	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	933.720,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit		
2	16	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	382.294.024,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	1.154.296.813,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen		
2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.400.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	517.776.813,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		
2	16	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	184.360.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		
2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	440.760.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 persen	1.203.604.328,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 persen		

No					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urutan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp0)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Daerah	Masyarakat				Daerah	Masyarakat				
2	16	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	350.128.774,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		
2	16	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	94.354,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		
2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	354.301.200,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
2	16	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	499.080.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah	65 Persen	1.898.877.124,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah	65 Persen		
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	90 Persen	1.898.877.124,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	90 Persen		
2	16	02	1.01	0014	Relasi Media	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam	1 Laporan	130.663.608,00	Relasi Media	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam	1 Laporan		

No						Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urutan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp0)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								<i>kegiatan relasi media</i>					<i>kegiatan relasi media</i>			
2	16	02	1.01	0015		Penyusunan Konten	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Konten Informasi Publik	250 Konten	319.470.000,00	Penyusunan Konten	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Konten Informasi Publik	250 Konten		
2	16	02	1.01	0016		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang	9.660.160,00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang		
2	16	02	1.01	0018		Diseminasi Informasi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	219.119.606,00	Diseminasi Informasi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase		
2	16	02	1.01	0019		Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	102.673.831,00	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen		
2	16	02	1.01	0020		Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	0,00	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan		
2	16	02	1.01	0021		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	90 Komunitas	51.164.212,00	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	90 Komunitas		
2	16	02	1.01	0022		Pelayanan Informasi Publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan	72.516.676,00	Pelayanan Informasi Publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan		
2	16	02	1.01	0023		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini,	Pemprov Kaltim,	Jumlah rekomendasi komunikasi	1 Rekomendasi	201.600.000,00	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini,	Pemprov Kaltim,	Jumlah rekomendasi komunikasi	1 Rekomendasi		

No					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urutan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp0)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
					dan Aspirasi Publik	Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			dan Aspirasi Publik	Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	ndasi		
2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	792.009.031,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media		
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	85 %	22.607.908.432,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	85 %		
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100 persen	42.063.780,00	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100 persen		
2	16	03	1.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen	42.063.780,00	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen		
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	60 Persen 90 persen	22.565.844.652,00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	60 Persen 90 persen		
2	16	03	1.02	0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	90.650.000,00	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen		
2	16	03	1.02	0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah	Pemprov Kaltim,	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan	10 kabupaten/kota	16.694.870.491,00	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah	Pemprov Kaltim,	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan	10 kabupat		

No					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urutan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp0)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
					Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Intra Pemerintah Daerah Provinsi			Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Intra Pemerintah Daerah Provinsi	en/kota		
2	16	03	1.02	0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi	95.700.000,00	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi		
2	16	03	1.02	0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	3.066.151.900,00	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan		
2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	125.000.000,00	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen		
2	16	03	1.02	0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	202.400.000,00	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen		
2	16	03	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	45 perangkat daerah	27.600.000,00	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	45 perangkat daerah		
2	16	03	1.02	0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	1 Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	1 Dokumen		
2	16	03	1.02	0032	Penyediaan Akses Internet	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan	45 Perangkat Daerah	27.600.000,00	Penyediaan Akses Internet	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan	45 Perangkat Daerah		

No					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urutan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp0)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
						Masyarakat	akses internet yang disediakan oleh Dinas				Masyarakat	akses internet yang disediakan oleh Dinas			
2	16	03	1.02	0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	1.342.000.000,00	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi		
2	16	03	1.02	0034	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen		
2	16	03	1.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Laporan	385.000.000,00	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Laporan		
2	16	03	1.02	0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	90.910.780,00	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi		
2	16	03	1.02	0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	367.961.481,00	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan		
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di			799.990.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di				

No					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urutan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp0)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	55 Persen	799.990.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	55 Persen		
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	90 persen	799.990.000,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	90 persen		
2	20	02	1.01	0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	70 %	379.410.000,00	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	70 %		
2	20	02	1.01	0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	119.680.000,00	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %		
2	20	02	1.01	0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %	1.416.000,00	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %		
2	20	02	1.01	0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	296.700.000,00	Peningkatan kualitas statistik sektoral	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		
2	20	02	1.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	150 Orang	1.392.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	150 Orang		
2	20	02	1.01	0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	1.392.000,00	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		

No						Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp0)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Masyarakat			501.511.571,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Masyarakat				
2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	44 persen	501.511.571,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	44 persen		
2	21	02	1.01			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 persen	340.125.000,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 persen		
2	21	02	1.01	00	05	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	130.525.000,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan		
2	21	02	1.01	00	06	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	37 Perangkat Daerah	99.710.000,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	37 Perangkat Daerah		
2	21	02	1.01	00	07	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	79.500.000,00	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		
2	21	02	1.01	00	08	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik	4 Dokumen	30.390.000,00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik	4 Dokumen		

No					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urutan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp0)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							<i>berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.</i>					<i>berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.</i>			
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Persentase PD yang terhubung dalam jaringan Komunikasi Sandi</i>	90 persen	161.386.571,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Persentase PD yang terhubung dalam jaringan Komunikasi Sandi</i>	90 persen		
2	21	02	1.02	00	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.</i>	37 Kegiatan	161.386.571,00	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	<i>Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.</i>	37 Kegiatan		

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melibatkan proses identifikasi dan evaluasi aspirasi masyarakat untuk mengembangkan program yang relevan dan efektif. Proses Penelaahan Usulan Program :

- 1.4.01.1 Identifikasi Aspirasi Masyarakat: Diskominfo Kaltim mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat nagari, kecamatan, dan kabupaten.
- 1.4.01.2 Prioritisasi Program: Program-program diidentifikasi dan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.
- 1.4.01.3 Evaluasi dan Perencanaan: Usulan program dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan nasional dan kemampuan implementasi.

Program Diskominfo Kaltim:

- a. Pelatihan Literasi Digital: Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital.
- b. Pengadaan Infrastruktur Digital: Pembangunan infrastruktur digital untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas digital.
- c. Penyediaan Jaringan Internet: Memperluas akses jaringan internet, terutama di daerah-daerah yang masih terbatas aksesnya.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan oleh Diskominfo Kaltim benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Ditahun 2026 ada beberapa usulan aspirasi masyarakat tetapi tidak ada yg diakomodir dikarenakan adanya persyaratan yg belum terpenuhi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk tahun 2026. Adapun rencana program yang dimaksud sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2026 diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2	3	10	4	8
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
A	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i>	100 Indeks
1.1	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu</i>	100 persen
1.1.1	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen
1.1.2	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen
1.1.3	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen
1.1.4	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2	3	10	4	8
1.1.5	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan
1.2	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)</i>	100 persen
1.2.1	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	140 Orang/ Bulan
1.2.2	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen
1.2.3	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen
1.2.4	2.16.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	1 Dokumen
1.2.5	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	1 Laporan
1.2.6	2.16.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen
1.3	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</i>	100 persen
1.3.1	2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2	3	10	4	8
1.3.2	2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
1.3.3	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
1.4	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 persen
1.4.1	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
1.4.2	2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
1.4.3	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
1.4.4	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang
1.4.5	2.16.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2	3	10	4	8
1.5	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen
1.5.1	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
1.5.2	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
1.5.3	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
1.5.4	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
1.5.5	2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
1.6	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 persen
1.6.2	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
1.6.3	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2	3	10	4	8
1.6.4	2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit
1.7	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	100 persen
1.7.1	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan
1.7.2	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan
1.7.3	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan
1.7.4	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan
1.8	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor</i>	100 persen
1.8.1	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	9 Unit
1.8.2	2.16.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	1 Unit
1.8.3	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2	3	10	4	8
1.8.4	2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah	70 %
2.1	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	85 persen
2.1.1	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan
2.1.2	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Konten Informasi Publik	250 Konten
2.1.3	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang
2.1.5	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	88 Persentase
2.1.6	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2 Dokumen

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2	3	10	4	8
2.1.7	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan
2.1.8	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	30 Komunitas
2.1.9	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	15Permohonan
2.1.10	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi
2.1.11	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	125 Media
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	82%
3.1	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100%
3.1.1	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen
3.2	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		persentase pengelolaan E- government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85%

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2	3	10	4	8
3.2.1	2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah</i>	1 Dokumen
3.2.2	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>	5 Aplikasi
3.2.3	2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan</i>	1 Dokumen
3.2.4	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda</i>	1 Laporan
3.2.5	2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah</i>	2 Aplikasi
3.2.6	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas</i>	10 unit
3.2.7	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>	10 kabupate n/kota
3.2.8	2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional</i>	10 Aplikasi
3.2.9	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional</i>	1 Layanan

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2	3	10	4	8
3.2.10	2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah</i>	1 Dokumen
3.2.11	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE</i>	1 Dokumen
3.2.12	2.16.03.1.02.0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo</i>	1 Dokumen
3.2.13	2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo</i>	1 Dokumen
3.2.14	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas</i>	40 Perangkat Daerah
3.2.15	2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan</i>	1 Aplikasi
3.2.16	2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE</i>	1 Dokumen
3.2.17	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional</i>	1 Dokumen

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2	3	10	4	8
3.2.18	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	37 perangkat daerah
B	2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
4	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	85 %
4.1	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	85 persen
4.1.1	2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang
4.1.2	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	70 Persentase
4.1.3	2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase
4.1.4	2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	30 Dokumen
4.1.5	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	30 Dokumen
C	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2	3	10	4	8
5	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		<i>Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah</i>	3 Tingkat
5.1	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100%
5.1.1	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan</i>	1 Dokumen
5.1.2	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</i>	1 Laporan
5.1.3	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	1 Laporan
5.1.4	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>	37 Perangkat Daerah
5.2	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi		Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	85%
5.2.1	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi</i>	37 Perangkat Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai suatu sistem yang tugas dan fungsinya dilakukan oleh beberapa subsistem yang masing-masing dilaksanakan oleh satu PD. Seluruh PD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saling berinteraksi dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seringkali informasi keluaran dari suatu PD akan diolah lebih lanjut oleh PD lainnya untuk menghasilkan informasi yang strategis. sehingga dengan demikian, aliran informasi dari satu PD ke PD lainnya harus dapat dijamin terlaksananya serta kebenarannya.

Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan perangkat Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung tugas keseharian pemerintahan sudah menjadi suatu kebutuhan. Dalam mewujudkan pembangunan/ pengembangan TIK yang terintegrasi maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bermaksud untuk melakukan sinergi implementasi TIK dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkandung didalamnya dengan tujuan agar:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
- b. Menciptakan transparansi terhadap sistem pemerintahan kepada masyarakat serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Kaltim.
- c. Mengurangi kesenjangan informasi di segenap lapisan masyarakat Kalimantan Timur.
- d. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektorial
- e. Meningkatnya Maturitas dan Tingkat Keamanan Informasi

Selain aspek-aspek di atas, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini dan ke depan adalah:

1. Kebijakan dan perundang-undangan.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pengaturan / regulasi di bidang komunikasi dan informatika masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi. Pengaturan di bidang penyiaran dilakukan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. pengaturan di bidang telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Demikian halnya pengaturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008. tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan pengaturan mengenai Informasi Publik dilakukan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. sedangkan pengaturan mengenai Pos dilakukan berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 1984 kemudian sejak tanggal 14 Oktober 2009 telah diberlakukan undang-undang baru yaitu Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

2. Masalah Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Beberapa permasalahan birokrasi saat ini di antaranya adalah belum terbangunnya budaya kerja yang kuat. belum berfungsinya pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan secara maksimal dan masih lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. sehingga secara keseluruhan kondisi tersebut mempengaruhi capaian kinerja yang kurang optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara menyeluruh. yang antara lain dapat ditempuh melalui reformasi birokrasi yang meliputi restrukturisasi kelembagaan peningkatan kualitas SDM dan remunerasi.

3. Teknologi.

Sebagai sebuah *general purpose technology*, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dapat dipergunakan dalam banyak bidang dan untuk memenuhi banyak macam kebutuhan. Walaupun begitu teknologi informasi sebenarnya memainkan peran fundamental yang sangat sederhana, yaitu:

- a. Menyediakan akses dan mengorganisasikan data, informasi dan pengetahuan dalam jumlah besar dengan kecepatan menakjubkan dan aman.
- b. Mempercepat dan mereduksi biaya transaksi dan produksi seluruh kegiatan perekonomian.
- c. Membentuk hubungan langsung antar manusia, komunitas, perusahaan, pemerintah, dan organisasi pada umumnya.

Mengingat pentingnya peranan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tersebut di atas, maka infrastruktur komunikasi dan informatika sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan bangsanya, mutlak harus dibangun dan disediakan oleh negara dengan melibatkan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Karena di masa depan, informasi tidak lagi menjadi domain negara, tetapi juga merupakan domain publik yang dapat dibuat dan diakses oleh setiap anggota masyarakat. Keterlibatan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia yang masih besar.

4. Informasi dan edukasi/*e-literacy*.

Belum optimalnya upaya pelayanan informasi publik untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat terhadap

informasi publik mengakibatkan adanya kesenjangan kemampuan akses masyarakat terhadap informasi. sehingga menimbulkan permasalahan dalam hal keadilan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi masyarakat secara individual.

Adanya ketidakjelasan pembatasan informasi publik dan yang bukan informasi publik. menimbulkan permasalahan mengenai hak masyarakat atas informasi pemerintah dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat serta perlindungan rahasia negara. yang antara lain juga disebabkan oleh belum disadarinya sekuritas informasi oleh institusi/lembaga penyedia informasi.

5. Pasar. Pelaku Usaha dan Masalah *Software* Ilegal/Bajakan. Perkembangan TIK terjadi sangat pesat dan cepat berubah sehingga membuat suatu perangkat teknologi informasi dan komunikasi menjadi cepat usang. Di Indonesia kemampuan untuk memproduksi perangkat TIK relatif sangat rendah sehingga mengakibatkan sifat ketergantungan dalam memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut memposisikan Indonesia sebagai Negara yang banyak mengimpor perangkat/produk industri di bidang TIK dimana ditinjau dari segi harga relatif menjadi lebih mahal. Kondisi sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kecenderungan terjadinya penggunaan perangkat TIK (software) bajakan yang cukup besar dan berdampak pada sistem industri dan perekonomian dalam negeri. Terjadinya pembajakan software yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya fungsi pengawasan terhadap aktivitas pemasaran perangkat TIK produk bajakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan. diperlukannya kebijakan yang berorientasi pada objek sasaran yang akan di capai. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah.
- b. Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem. metode. dan mutu penyebaran serta pelayanan informasi kepada masyarakat.
- c. Tersedianya infrastruktur bidang Komunikasi dan Informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat.
- d. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor
- e. Meningkatnya Maturitas dan Tingkat Keamanan Informasi

3.3 Program dan Kegiatan

Agar tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur diperlukan adanya tindakan nyata berupa program dan kegiatan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk tahun 2024 kegiatan yang diusulkan meliputi 5 program. 14 kegiatan dan 76 sub kegiatan yaitu:

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - 1.1. Pengelolaan Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1.1.1. Relasi Media
 - 1.1.2. Penyusunan Konten
 - 1.1.3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
 - 1.1.4. Diseminasi Informasi
 - 1.1.5. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

- 1.1.6. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 1.1.7. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- 1.1.8. Pelayanan Informasi Publik
- 1.1.9. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
- 1.1.10. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 2.1. Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - 2.1.1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 2.2. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah
 - 2.2.1. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
 - 2.2.2. Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
 - 2.2.3. Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
 - 2.2.4. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
 - 2.2.5. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
 - 2.2.6. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
 - 2.2.7. Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi

- 2.2.8. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
 - 2.2.9. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
 - 2.2.10. Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
 - 2.2.11. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
 - 2.2.12. Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
 - 2.2.13. Koordinasi penyusunan proses bisnis
 - 2.2.14. Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
 - 2.2.15. Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
 - 2.2.16. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
 - 2.2.17. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
 - 2.2.18. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 3.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi
 - 3.1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - 3.1.2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
 - 3.1.3. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
 - 3.1.4. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
 - 3.1.5. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 4.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - 4.1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - 4.1.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - 4.1.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik
 - 4.1.4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - 4.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi
 - 4.2.1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - 5.1. Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 5.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 5.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - 5.1.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5.1.4. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
 - 5.1.5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 5.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 5.2.1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn

- 5.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 5.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 5.2.4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 5.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
- 5.2.6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 5.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 5.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 5.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 5.3.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 5.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 5.4.2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 5.4.3. Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 5.4.4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 5.4.5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5.5. Administrasi Umum Perangkat Daaerah
 - 5.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.5.2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 5.5.3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

- 5.5.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
- 5.5.5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.6.1. Pengadaan Mebel
 - 5.6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.6.3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 5.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 5.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 5.8.2. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - 5.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.
 - 5.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2026. pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2026. serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD Tahun 2025. Namun. sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi. politik baik daerah maupun nasional. evaluasi kinerja RENJA Perangkat Daerah. Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat serta kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025. maka diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya adalah merubah arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap struktur pendapatan. belanja dan pembiayaan daerah dalam RKPD 2026.

Program/kegiatan yang merupakan penjabaran pagu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dituangkan pada tabel dibawah.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

No	Kode	Ura n / Bidang Ursa n / Progra m / Outco me / Kegiat an / Sub Kegiat an	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capaia n RENJA OPD Tahun 2024	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
							Targe t 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dinas Komunikasi dan Informatika						121.349.002.000,00							85.157.150.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						121.349.002.000,00							85.157.150.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						120.052.916.365,00							76.397.150.000,00	
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	-			100 Indeks 100 persen	48.310.173.355,00						-	38.017.150.000,00	
		[Meningkatkan kinerja layanan sekretariat]	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100	100	-	100	48.310.173.355,00							38.017.150.000,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, HASIL PENGELAAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		155.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
	2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	999.498,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		9.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
	2.16.01.1.06.0005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	3.588.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknolog	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	440.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, HASIL PENGELoLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelaya	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		570.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.09.00011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	499.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		535.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Z), dan penyandang disabilitas.					
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	-			63 persen	43.764.774.624,00						-	14.630.000.000,00	
		[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]														
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan	-			90 persen	43.764.774.624,00			Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	-	14.630.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Outco me / Kegiat an / Sub Kegiat an	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capaia n RENJA OPD Tahun 2024	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
							Targe t 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			n dan Program Prioritas								an, kesehat an, prestasi olahraga , kesetara an gender, serta penguat an peran perempu an, pemuda (generas i milenial dan generasi Z), dan penyand ang disabilita s.	akunta bel untuk mendu kung transfo rmasi pelaya nan publik				
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenu hi kriteria sebagai berikut: 1. terverifik asi				1 Lapor an	130.663.608,0 0	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memper kuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknolog i, pendidik an, kesehat an,	7. Penin gkatan tata kelola pemer intahan daera h yang profesi onal dan akunta bel untuk	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarak at		830.000.000 ,00	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media								prestasi olahraga , kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	mendukung transformasi pelayanan publik				
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				250 Konten	9.064.506.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga , kesetaraan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		1.850.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prkiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pelayanan publik				
	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				100 Orang	9.760.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguat	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											an peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	417.160.789,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				1 Dokumen	99.073.831,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		270.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prkiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		3.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				90 Komunitas	54.764.212,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		1.130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				25 Permohonan	2.174.516.302,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah media komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				5 Media	30.512.729.722,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		5.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi]	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	93	80	-	85	27.977.968.386,00							23.750.000.000,00	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	-			80 persen	42.063.780,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	-	350.000.000,00	

No	Kode	Ura s n / Bidang Ura s n / Progra m / Outco me / Kegiat an / Sub Kegiat an	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capaia n RENJA OPD Tahun 2024	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
							Targe t 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											an, pemuda (generas i milenial dan generasi Z), dan penyand ang disabilita s.					
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokume n Pengelol aan Nama Domain dan Sub Domain Pemerin tah Daerah				1 Doku men	42.063.780,00	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PAJAK DAERAH	Memper kuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknolog i, pendidik an, kesehat an, prestasi olahraga , kesetara an gender, serta penguat an peran perempu an, pemuda	7. Penin gkatan tata kelola pemerih ntahan daera h yang profesi onal dan akunta bel untuk mendu kung transfo rmasi pelaya nan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarak at		350.000.000 ,00	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.1.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														
	2.16.03.1.02.0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan														
								90.910.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transfo	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		775.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	rmasi pelayanan publik				
	2.16.03.1.02.0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah laporan operasi nalisasi pusat kendali				1 Laporan	2.029.052.701,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		4.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	transformasi pelayanan publik				
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
4	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data yang berkualitas pada portal satu data kalimantan timur	-			55 persen	799.830.000,00						-	6.800.000.000,00	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinyan Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data	-			90 persen	799.830.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	-	6.800.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kalimantan Timur								i, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	onal dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik				
	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadatat,				70 %	120.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akunt	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		1.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk								kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	bel untuk mendukung transformasi pelayanan publik				
	2.20.02.1.01.0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi				100 %	531.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dasi dari pembina data statistik								i, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	onal dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik				
	2.20.02.1.01.0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan				100 %	1.534.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, dan akuntabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabilitas.	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		1.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			statistik sektoral								kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	bel untuk mendukung transformasi pelayanan publik				
	2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				100 %	143.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prkiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											olahraga , kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kung transfo rmasi pelaya nan publik				
		[Meningkatnya ketersediaan data berkualitas pada portal satu data kaltim]						799.830.000,00							6.800.000.000,00	
	2.20.02.1.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				150 Orang	1.508.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, akunta	7. Penin gkatan tata kelola pemerin tahanan daerah yang profesi onal dan akunta	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		1.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	bel untuk mendukung transformasi pelayanan publik				
	2.20.02.1.01.0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral														
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				1 Laporan	1.508.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	transformasi pelayanan publik				
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
5	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	-			44 persen	496.255.635,00						-	1.960.000.000,00	
		[Meningkatkan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]														
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengam	-			100 persen	357.214.303,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesi	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	-	1.635.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			anan informasi								i, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	onal dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik				
	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

N o	Kode	Urusa n / Bidang Urusa n / Progra m / Outco me / Kegiat an / Sub Kegiat an	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capaia n RENJA OPD Tahun 2024	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
							Targe t 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksa naan Keaman an Informas i Pemerin tahan Daerah Provinsi Berbasis Elektroni k dan Non Elektroni k				1 Lapor an	146.014.303,0 0	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PAJAK DAERAH	Memper kuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknolog i, pendidik an, kesehat an, prestasi olahraga , kesetara an gender, serta penguat an peran perempu an, pemuda (generas i milenial dan generasi Z), dan penyand ang disabilita s.	7. Penin gkatan tata kelola pemerin tahan daera h yang profesi onal dan akunta bel untuk mendu kung transfo rmasi pelaya nan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarak at		525.000.000 ,00	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
	2.21.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
	J U M L A H							121.349.002.000,00							85.157.150.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan				4 Dokumen	30.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM),	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		325.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

N o	Kode	Urusa n / Bidang Urusa n / Progra m / Outco me / Kegiat an / Sub Kegiat an	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capaia n RENJA OPD Tahun 2024	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
							Targe t 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daera h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pemerintah Daerah	Persandi an Pemerin tah Daerah yang Ditetapk an baik berupa Peratura n Gubernu r, Keputus an Gubernu r maupun Norma, Standar, Prosedu r dan Kriteria yang digunak an sebagai panduan dalam menjala nkan penyele nggaraa n persandi an.						Kel/Des a		sains, teknolog i, pendidik an, kesehat an, prestasi olahraga , kesetara an gender, serta penguat an peran perempu an, pemuda (generas i milenial dan generasi Z), dan penyand ang disabilita s.	h yang profesi onal dan akunta bel untuk mendu kung transfo rmasi pelaya nan publik				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.1.02	0	Persentase PD yang terhubung dalam jaringan Komunikasi Sandi	-			90 persen	139.041.332,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat	-	325.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.1.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				37 Kegiatan	139.041.332,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pemprov Kaltim, Kab/Kot di Prov Kaltim, Masyarakat		325.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					

BAB.V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah Program Kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemilik fungsi perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kualitas kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur wajib bertanggungjawab untuk melaksanakan peta proses bisnis, meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Rakor dan Evaluasi SPBE/PEMDI Pemprov Kaltim
- b. Penyusunan regulasi pengembangan aplikasi dan integrasi sistem elektronik
- c. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola informasi/ PPID untuk Diskominfo kab/ kota se-Kaltim dan PPID Pelaksana Pemprov Kaltim dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
- d. Melakukan monitoring hoax dan mengklarifikasi hoax lewat media online, media sosial Diskominfo Kaltim

- e. Menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi.
- f. Monev SP4N Lapor pada OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, Diskominfo Kabupaten/ Kota se-Kaltim.
- g. Menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemda, isu publik, isu prioritas dan isu terindikasi krisis.
- h. Survei kepuasan masyarakat akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah
- i. Pembinaan CSIRT kab/Kota
- j. Pelaksanakan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial.
- k. Pelaksanakan Kegiatan Coaching Metadata Statistik Sektoral untuk meningkatkan keterampilan/kemampuan operator data dalam menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- l. Pelaksanakan Kegiatan Coaching Jaringan Informasi Geospasial (JIGD)

Demikian penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun 2026 yang disesuaikan dengan RKPD Tahun 2026.

Diharapkan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang telah disusun dapat diimplementasikan dalam kegiatan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja dan pendanaan yang telah dalam penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2026 dan diharapkan dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik secara konsisten.

RENJA TAHUN 2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun lalu telah memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat. Banyak prestasi yang telah diraih, namun bukan berarti permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur menyurut. Sebaliknya, era liberalisasi ekonomi yang terus bergulir memberikan banyak tantangan. Permasalahan pembangunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana wajah Provinsi Kalimantan Timur kini dan masa akan datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara lebih baik, fokus, dan konsisten.

Salah satu upaya agar kita dapat memproyeksikan diri di masa depan adalah dengan sungguh-sungguh memahami kondisi Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih terus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di masa datang. Langkah tersebut juga harus dibarengi dengan upaya mengenali berbagai potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur untuk dikembangkan demi meningkatnya kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode satu tahun kedepan. Rencana Kerja ini merupakan jabaran dari Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan merupakan operasionalisasi dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029. Rencana Kerja memuat gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun (Tahun 2026) serta menjawab apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja

serta bagaimana pengorganisasian sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.2 Landasan Hukum

Dasar yang menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah sbb ;

1. Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44221);
2. Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 000.7.24/0052/Bapp-II tanggal 6 Januari 2025 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai kurun waktu setahun yang lalu, disertai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam realisasi dan operasionalisasi program dan kegiatan serta memberikan gambaran rencana kerja tahun 2026 dengan proyeksi dan target yang diharapkan mempertimbangkan peluang dan tantangan kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
 - 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Perumusan Program Prioritas
- 4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Bab ini memuat revidi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni dialokasikan sebesar Rp. 32.645.108.364,00 dan pada anggaran Perubahan APBD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 sehingga total anggaran menjadi Rp.33.645.108.364,00 atau meningkat (3,06%).

Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini diampu oleh Sekretariat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai sasaran IKU yang ke-3, yaitu Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP). Pada program ini terdapat kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (PAP), yang dimana didalam kegiatan ini merupakan penganggaran untuk kegiatan operasional rutin seperti pembayaran gaji pegawai, biaya listrik, air, telepon, biaya *fotocopy*/cetak/penggandaan, honor-honor pengelola keuangan dan pembayaran operasional lainnya untuk mendukung kegiatan perkantoran. Selain pembayaran gaji, mayoritas penggunaan anggaran pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di tahun 2024 adalah untuk memperbaiki/rehabilitasi kerusakan yang ada pada gedung kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. Dikarenakan kondisi

gedung kantor yang cukup memprihatinkan, DPMPTSP mengajukan pergeseran anggaran serta penambahan anggaran di P-APBD 2024 guna memperbaiki gedung kantor. Adapun pergeseran anggaran bersumber dari anggaran perjalanan dinas Program Pengendalian Pelaksanaan. Selain untuk keperluan rehabilitasi kantor, pergeseran dan penambahan anggaran juga dilakukan untuk kepentingan makan minum rapat serta koordinasi SKPD.

Pada tahun 2024 program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp 22.888.926.984,00 dan terealisasi sebesar Rp 20.924.603.830,63 atau 91,42% dengan capaian Realisasi Kinerja sebesar 109,89%, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan kegiatan operasional pada program berjalan dengan sangat baik, walaupun masih terdapat jumlah sisa anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 83,49%, pada tahun 2024 ini realisasi anggaran meningkat sebesar 7,93% menjadi 91,42%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- ***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp416.160.996,00 atau 83,23%. Anggaran yang tidak dapat terserap secara maksimal khususnya pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi keuangan sebesar 54,59%, sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan berupa honor tim yang tidak dapat dibayarkan karena tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 100.3.4.1/498/III/BPKAD/2024 tahun 2024 tentang Ketentuan Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Juni 2024.

- ***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

Pada tahun 2024 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp11.327.552.564,00 dan terealisasi sebesar Rp10.416.022.075,00 atau 91,95%. Terdapat sisa anggaran terutama dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang serapannya tidak maksimal

karena berkurangnya 6 orang pegawai ASN yaitu 5 orang pensiun, 1 orang mutasi dan 4 orang Non ASN mengundurkan diri. Selain itu, pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN realisasi sebesar 64,47%, serapan anggaran yang tidak maksimal ini disebabkan jumlah honor KPA dan BPP dianggarkan sebanyak 6 orang, namun karena keterbatasan SDM hanya 1 KPA dan BPP yang dapat direalisasikan.

Sudah diusulkan untuk dilakukan pergeseran melalui surat Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900.1/1046/DPMPTSP-SEKR tanggal 7 Agustus 2024 Hal : Pergeseran Anggaran dari Belanja Berpotensi SILPA, namun usulan tidak dapat diakomodir oleh TAPD dikarenakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kesepakatan terhadap Perubahan KUA PPAS tahun 2024 dan telah mencapai tahap persetujuan.

- ***Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp29.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.240.000,00 atau 92,03%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp15.840.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp11.400.000,00 atau 71,96%.

- ***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp538.815.100,00 dan terealisasi sebesar Rp478.878.000,00 atau 88,88%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp384.938.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp93.940.000,00 atau 24,41%. Sisa anggaran merupakan sisa pengadaan barang dan jasa dibawah nilai DPA.

- ***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.437.942.604,00 dan terealisasi sebesar Rp2.275.159.732,00 atau 93,32%. Bila dibandingkan dengan persentase realisasi tahun lalu sebesar 90,72% maka terjadi kenaikan sebesar 2,60%. Sisa anggaran merupakan sisa pengadaan barang dan jasa dibawah nilai DPA.

- ***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp495.189.894,00 dan terealisasi sebesar Rp486.600.000,00 atau 98,21%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp2.922.132.600,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.435.532.600,00 atau 83,35%. Sisa anggaran merupakan sisa pengadaan barang dan jasa dibawah nilai DPA.

- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp5.828.739.022,00 dan terealisasi sebesar Rp5.196.880.474,00 atau 89,16%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 84,77% atau Rp1.026.358.734,00 dari anggaran Rp 1.210.756.200,00 maka terjadi kenaikan sebesar 4,39%. Sisa anggaran merupakan sisa pengadaan barang dan jasa dibawah nilai DPA.

- ***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.731.087.800,00 dan terealisasi sebesar Rp1.627.662.553,00 atau 94,03%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 85,38% atau Rp837.626.314,00 dari anggaran Rp981.030.800,00 maka terjadi kenaikan sebesar 8,65%. Sisa anggaran utamanya pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan.

2. Program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal merupakan program yang mendukung sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara. Program ini diampu oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, memiliki 1 (satu) kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi. Outcome yang diharapkan dari Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah teridentifikasinya dan tersedianya informasi terkait peluang investasi di Kalimantan Timur. Anggaran program ini sebesar Rp 2.634.777.000,00 atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 2.423.319.375,00 atau 91,97%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 97,43%, pada tahun 2024 ini realisasi anggaran menurun sebesar 5,46%. Hal ini disebabkan efisiensi atas harga penawaran belanja penyusunan dokumen kajian di *e-purchasing* serta realisasi yang dilaksanakan sesuai kebutuhan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

- **Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**

Pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi anggaran yang tersedia senilai Rp687.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp675.044.348,00 (98,20%). Tentunya hasil ini sangat baik dengan capaian Realisasi Kinerja sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain FGD Pengembangan Investasi di Sektor Pariwisata, Rapat Pembahasan Penyusunan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Kota Bontang, serta Penyusunan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Kota Bontang.

Untuk sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi, anggaran yang tersedia senilai Rp2.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.237.171.719,00 (97,26%). Tentunya hasil ini sangat baik dengan capaian Realisasi Kinerja sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain FGD Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertambangan, Workshop Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi, Pengembangan Aplikasi SIPINTAR, Penyusunan Buku Profil Investasi Kalimantan Timur, Penyusunan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Kalimantan Timur Lokus di

Kabupaten Kutai Kartanegara, Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi Infrastruktur Pendukung di KEK MBTK, Penyusunan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Kutai Timur dan Berau, serta Penyusunan Peta Potensi Investasi Kalimantan Timur.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal merupakan program yang mendukung sasaran meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan Non Batubara. Pada program ini dianggarkan sebesar Rp2.578.400.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.022.403.598,00 atau 78,44%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 89,09%, pada tahun 2024 ini realisasi anggaran menurun sebesar 10,65%. sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan berupa honor tim yang tidak dapat dibayarkan serta ada pembatalan perjalanan dinas promosi luar negeri.

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

Pada sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi anggaran yang tersedia senilai Rp1.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp752.051.900,00 (68,37%) dengan Realisasi Kinerja sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Sosialisasi Kemitraan dan UMKM, Penyusunan Pemetaan Data Kemitraan dan UMKM Potensial, Penyusunan Promosi Investasi Negara Potensial dan Calon Investor, serta Promosi Investasi di Luar Negeri. Anggaran pada sub kegiatan ini kurang maksimal terealisasi pada belanja perjalanan dinas luar negeri. Pembiayaan perjalanan dinas ini awalnya dimaksudkan untuk mendampingi Pj. Gubernur Kalimantan Timur ke Provinsi Anhui, Tiongkok dalam rangka penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang direncanakan akan dilakukan pada bulan

Desember 2024. Namun atas keinginan Pemerintah Provinsi Anhui, Tiongkok penandatanganan akan dilakukan pada bulan Juni 2025 seiring dengan penyelenggaraan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, di Provinsi Anhui, China yang akan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan selanjutnya. Atas dasar hal tersebut di atas, maka penggunaan sisa perjalanan dinas ke luar negeri pada tahun 2024 di batalkan.

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, anggaran yang tersedia senilai Rp1.478.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.270.351.698,00 (85,93%). Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Mahakam Investment Forum, High Level Meeting (HLM) Regional Investor Relations Unit (RIRU), ALKI II Zone Investment Forum, serta ikut serta dalam kegiatan Pameran/Expo baik di dalam daerah maupun di luar daerah. Sisa anggaran pada sub kegiatan ini berupa honor tim yang tidak dapat dibayarkan sebagai upaya tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 100.3.4.1/498/III/BPKAD/2024 tahun 2024 tentang Ketentuan Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Juni 2024.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.162.352.020,00 pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.926.481.952,00 atau 89,09%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 84,34%, pada tahun 2024 ini realisasi anggaran meningkat sebesar 4,75%.

- ***Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu Pengawasan Penanaman Modal, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya, Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.

Pada sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal, anggaran yang tersedia senilai Rp 612.000.000,00 terealisasi sebesar 516.083.438,00 (84,33%) dengan capaian Realisasi Kinerja sebesar 84%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Bimbingan Teknis Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Aparatur DPMPTSP Kabupaten/Kota, Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pengisian LKPM bagi pelaku usaha Non UMK, Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pengisian LKPM bagi pelaku usaha UMK. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat memotivasi para pelaku usaha untuk melaporkan LKPM nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan nilai realisasi investasi di Kalimantan Timur.

Pada sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya, anggaran yang tersedia senilai Rp 829.288.600,00 dan terealisasi sebesar 770.303.771,00 (92,14%) dengan Realisasi Kinerja sebesar 70,34%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha, Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Realisasi Investasi yang Ada di Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha anggaran yang tersedia senilai Rp854.613.000,00 dan terealisasi sebesar Rp769.367.713,00 (90,03%) dengan Realisasi Kinerja sebesar 85%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kegiatan Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko.

5. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal merupakan program yang mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.551.363.760,00 pada Program Pelayanan Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.041.396.266,00 atau 80,01%. Pada Program Pelayanan Penanaman Modal, serapan anggaran yang kurang maksimal disebabkan oleh kegiatan dengan sumber dana FCPF-CF, yang semula disampaikan oleh Ibu Sekda bahwa program dan kegiatan yang dirancang dan akan dilaksanakan harus sesuai dan sejalan (in line) dengan standar atau arahan yang ditetapkan bahwa penggunaan dana Program FCPF-CF di Kalimantan Timur diperuntukkan kepada kegiatan yang menyentuh dan memberikan dampak langsung kepada pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, khususnya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup di tingkat desa. Menanggapi arahan tersebut, DPMPTSP mengajukan surat permohonan kepada Sekretaris Daerah perihal Pergeseran Anggaran FCPF tahun 2024 melalui Surat Nomor: 900.1/916/DPMPTSP-SEKR tanggal 12 Juli 2024 perihal Pergeseran Anggaran FCPF tahun 2024, hal ini tidak dapat disetujui oleh TAPD sehingga kegiatan ini anggarannya menjadi SiLPA.

- *Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi*

Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah, Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah anggaran yang tersedia senilai Rp699.000.000,00 terealisasi sebesar Rp460.110.628,00 (65,82%) dengan

capaian Realisasi Kinerja sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Bimbingan Teknis Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik anggaran yang tersedia senilai Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp341.754.040,00 (75,95%).

Untuk sub kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko anggaran yang tersedia senilai Rp780.049.760,00 terealisasi sebesar Rp747.341.626,00 (95,81%) dengan capaian Realisasi Kinerja sebesar 75%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Rapat Koordinasi Evaluasi Pemenuhan Komitmen Kab/Kota Se Kalimantan Timur, Rapat Koordinasi Identifikasi dan Analisis Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan, serta Rapat Koordinasi Pengelolaan PTSP Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan NonPerizinan

Pada sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan anggaran yang tersedia senilai Rp622.314.000,00 terealisasi sebesar Rp531.749.592,00 (85,45%) dengan capaian Realisasi Kinerja sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan Perangkat Daerah Teknis Terkait se – Kab/Kota Kalimantan Timur. Sisa anggaran pada sub kegiatan ini berupa honor tim yang tidak dapat dibayarkan sebagai upaya tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 100.3.4.1/498/III/BPKAD/2024 tahun 2024 tentang Ketentuan Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Juni 2024. Meskipun sub kegiatan ini termasuk dalam Program Pelayanan Penanaman Modal, namun pelaksanaannya oleh Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp829.288.600,00 pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp770.303.771,00 atau 92,89%.

- Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Pada sub kegiatan ini, anggaran yang tersedia senilai Rp829.288.600,00 terealisasi sebesar Rp770.303.771,00 (92,89%). Tentunya hasil ini sangat baik dengan capaian Realisasi Kinerja sebesar 100%. Kegiatan yang dilakukan antara lain FGD Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Kab/Kota se Kalimantan Timur, Podcast dan Investment Goes to Campus serta pengembangan/pemeliharaan aplikasi perizinan e – PTSP.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/ RENSTRA

No.	Indikator Kinerja (satuan)	Satuan	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA (2029)	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Target
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Investasi	Rp (Triliun)	51,36	49,86	97,08%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95,61	92,61	96,86%
3	Nilai akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD	Nilai AKIP	76,50	70,20	91,76%

Dari tabel di atas, dapat dilihat pada indikator kinerja Nilai Investasi memiliki target akhir RENSTRA di tahun 2029 sebesar Rp.51,36 Triliun dengan realisasi pada tahun 2024 senilai Rp.49,86 Triliun yang berarti telah mencapai 97,08% dari target akhir yang ada. Demikian juga untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target akhir RENSTRA di tahun 2029 sebesar 95,61 dengan realisasi 2024 sebesar 92,61 atau 96,86%. Sedangkan untuk indikator Nilai AKIP, capaian 2024 masih sekitar 91,76% dari target akhir RENSTRA, yang tentunya akan optimis tercapai pada tahun 2029 nanti.

2.1.3 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Kajian Potensi Investasi Provinsi dan Kab/Kota belum maksimal, bahwa kajian potensi investasi masih perlu ditingkatkan lagi kualitasnya sehingga dapat menjadi sarana informasi pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri
2. Ketersediaan data potensi Lahan yang digunakan oleh investor masih kurang, hal ini menyebabkan investor yang berminat cukup kesulitan dalam hal mencari lokasi usaha
3. Masih kurangnya informasi target investor yang berminat untuk berinvestasi di Kaltim, hal ini menyebabkan promosi investasi belum tepat sasaran

4. Pengawasan Kepeminatan Investasi belum optimal, hal ini dapat menyebabkan calon investor belum dapat memperoleh informasi yang komperhensif di lokasi untuk kegiatan berusaha
5. Digitalisasi Promosi yang belum optimal, hal ini menyebabkan penyampaian informasi belum dapat secara cepat dan masif diterima investor dalam maupun luar negeri
6. Belum efektifnya pengawasan perizinan penanaman modal yang menyebabkan masih terjadinya beberapa ketidaksesuaian kegiatan yang dilakukan investor maupun kewajiban penyampaian laporan
7. Proses Pertimbangan Teknis yang cukup lama diterima dari SKPD teknis sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam proses perizinan
8. Belum optimalnya penerapan SAKIP, khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang masih perlu dilakukan pembenahan lebih lanjut.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur (Tabel T-C.29)

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Person (%)	Predikat
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					95,89	ST	33.645.108.364,00	30.148.068.412,63	89,61	T
2.18.01	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	Indeks	99,00	100,00	100,89	ST	22.888.926.994,00	20.024.603.800,63	91,42	T
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	100,00	100,00	100	ST	500.000.000,00	416.160.996,00	83,23	T
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	5,00	100	ST	200.000.000,00	185.969.760,00	92,98	ST
2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00	100	ST	50.000.000,00	49.702.400,00	99,40	ST
2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00	100	ST	50.000.000,00	49.751.200,00	99,50	ST
2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	1,00	1,00	100	ST	50.000.000,00	48.849.060,00	97,70	ST
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	5,00	100	ST	150.000.000,00	81.888.576,00	54,59	SR
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	100,00	100	ST	11.327.552.564,00	10.416.022.075,00	91,95	ST
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40,00	33,00	83	T	10.599.769.364,00	9.834.439.914,00	92,78	ST
2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	85,00	85,00	100	ST	410.400.000,00	364.600.000,00	88,86	R
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.000,00	1.165,00	116,5	ST	311.788.600,00	311.440.161,00	99,89	T
2.18.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	2.593.600,00	2.592.000,00	99,94	ST
2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	1,00	1,00	100	ST	2.000.000,00	1.950.000,00	97,50	ST
2.18.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	ST
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventaris barang milik daerah	Orang	1,00	1,00	100	ST	25.000.000,00	27.240.000,00	92,03	T
2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	1.000.000,00	980.000,00	98,00	ST
2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	1.000.000,00	980.000,00	98,00	ST
2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24,00	24,00	100	ST	27.600.000,00	25.300.000,00	91,67	T
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100,00	100,00	100	ST	538.815.100,00	478.878.000,00	88,86	T
2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6,00	6,00	100	ST	405.798.200,00	360.048.000,00	88,73	T
2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	25.000.000,00	22.615.000,00	90,46	T
2.18.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	25.000.000,00	22.615.000,00	90,46	T
2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9,00	9,00	100	ST	83.016.900,00	73.600.000,00	88,66	T

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	Laporan	439,00	439,00	100	ST	2.437.942.604,00	2.275.159.792,00	93,32	T
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	2,00	100	ST	25.937.800,00	25.858.000,00	99,69	ST
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	2,00	100	ST	1.164.456.674,00	1.054.939.000,00	90,59	T
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	100	ST	145.342.990,00	96.004.250,00	66,05	R
2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	120,00	120,00	100	ST	19.392.000,00	19.392.000,00	100,00	ST
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	270,00	270,00	100	ST	1.073.738.500,00	1.069.891.782,00	99,64	ST
2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	33,00	33,00	100	ST	9.074.700,00	9.074.700,00	100,00	ST
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	Unit/Tahun	87,00	87,00	100	ST	495.189.894,00	486.600.000,00	98,27	ST
2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3,00	3,00	100	ST	190.173.737,00	187.150.000,00	98,41	ST
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	37,00	37,00	100	ST	305.016.157,00	299.450.000,00	98,18	ST
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	Laporan	86,00	86,00	100	ST	5.828.736.022,00	5.196.880.474,00	89,16	T
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2,00	2,00	100	ST	10.000.000,00	9.700.000,00	97,00	ST
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48,00	48,00	100	ST	570.959.022,00	382.426.509,00	66,98	R
2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2,00	0,00	0	SR	0,00		0,00	SR
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36,00	36,00	100	ST	5.247.780.000,00	4.804.753.965,00	91,56	ST
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	100,00	100	ST	1.731.087.800,00	1.027.662.553,63	59,36	T
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit	29,00	29,00	100	ST	350.000.000,00	303.326.071,00	86,66	T
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	125,00	105,00	84	T	250.000.000,00	202.490.000,00	81,00	T
2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	1,00	100	ST	1.131.087.800,00	1.121.846.482,63	99,18	ST
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Ditawarkan	Dokumen/PRO	2,00	2,00	100	ST	2.634.777.000,00	2.423.319.375,00	91,97	T
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan	Potensi/Investasi	2,00	2,00	100	ST	2.634.777.000,00	2.423.319.375,00	91,97	T
2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	687.400.000,00	675.044.348,00	98,20	ST
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen	3,00	3,00	100	ST	1.947.377.000,00	1.748.275.027,00	89,78	T
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Keperluan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	Minat	11,00	11,00	100	ST	2.578.400.000,00	2.022.403.598,00	78,44	T
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi	Kegiatan	11,00	11,00	100	ST	2.578.400.000,00	2.022.403.598,00	78,44	T
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	6,00	6,00	100	ST	1.478.400.000,00	1.270.351.698,00	85,93	T
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen	5,00	5,00	100	ST	1.100.000.000,00	752.051.900,00	68,37	S

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kuluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100	ST	2.551.363.760,00	2.041.396.766,00	80,01	T
		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100	ST				
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	Item/Nonitem	5.000,00	9.273,00	185,46		2.551.363.760,00	2.080.955.886,00	80,31	T
2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi	Dokumen	7,00	7,00	100	ST	699.000.000,00	460.110.628,00	65,82	R
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem	PelakuUsaha	10,00	15,00	150	ST	622.314.000,00	531.749.592,00	85,45	T
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	PelakuUsaha	100,00	97,00	97	ST	450.000.000,00	341.754.040,00	75,95	S
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Listrik Daerah Kabupaten/Kota bagi	KegiatanUsaha	4,00	3,00	75	S	780.049.760,00	747.341.626,00	95,81	ST
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Bahubara	%	100,00	100,54	100,54	ST	2.162.952.020,00	1.926.481.962,00	89,09	T
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan URP/MD	Laporan	1.588,00	0,00	0	SR	2.162.952.020,00	1.926.481.962,00	89,09	T
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi	Kegiatanusaha	7,79	4,84	62,16	R	612.000.000,00	516.083.438,00	84,33	T
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan	Kegiatanusaha	105,00	105,00	100	ST	695.739.020,00	641.030.801,00	92,14	T
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha	PelakuUsaha	400,00	225,00	56,25	R	854.613.000,00	769.367.713,00	90,03	T
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Penanam Modal	%	100,00	100,00	100	ST	829.288.600,00	770.303.771,00	92,89	T
2.18.06.1.01	Urutan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat	Penyajian data terhadap informasi	Data	200,00	200,00	100	ST	829.288.600,00	770.303.771,00	92,89	T
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Dokumen	6,00	6,00	100	ST	829.288.600,00	770.303.771,00		T

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah ***“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”*** dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan dinas sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
9. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan pengaduan, advokasi, dan informasi perizinan;

10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
11. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
12. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Capaian kinerja adalah salah satu alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Capaian kinerja merupakan rambu atau tanda apakah sasaran kegiatan yang dilakukan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik dapat menghasilkan informasi kinerja yang member indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya, bila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja, maka dapat mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja pada dasarnya tidak hanya digunakan saat penyusunan laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja dapat juga merupakan komponen yang krusial sejak merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Adanya indikator kinerja menuntut perencanaan harus sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja bertujuan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang lebih sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur (T-C.30.)

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)*	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urutan Penanaman Modal											
1	Nilai Realisasi Investasi non migas dan non batubara	Triliun Rp	36,06	50,56	50,46	50,76	49,86	16,91	50,46	50,76	
2	Persentase Peningkatan Investasi	%	2,70	3,00	4,00	4,00	2,70	0,78	4,00	4,00	
3	Nilai Realisasi Investasi	Triliun Rp	76,02	79,86	79,41	81,8	76,33	43,47	79,41	81,8	

*Data sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran kondisi daerah yang membutuhkan perhatian dan upaya penanganan. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan bersama dengan beberapa hal lain menjadi input untuk perumusan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur untuk pembangunan periode tahun 2025 - 2029. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu strategis, yaitu:

- 1. Optimalisasi Iklim investasi sektor non migas dan batubara;
- 2. Peningkatan nilai tambah produk unggulan (hilirisasi);
- 3. Pemetaan peluang pasar investasi;
- 4. Optimalisasi pengawalan kepeminitatan investasi;
- 5. Optimalisasi pengawasan perizinan penanaman modal;
- 6. Integrasi data dan informasi.

Isu strategis dapat digambarkan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis pembangunan di Kalimantan Timur tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. Belum optimalnya pertumbuhan nilai investasi pada capaian realisasi investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara di Kaltim.
2. Rendahnya daya saing sektor unggulan dan belum berkembangnya hilirisasi sektor unggulan.
3. Belum terwujudnya Hilirisasi Industri non migas dan non batubara.
4. Lambatnya Transformasi Ekonomi berpengaruh pada resiliensi, Inklusivitas, dan Keberlanjutan Perekonomian Daerah.
5. Infrastruktur Dasar yang belum merata serta Konektivitas yang Belum terintegrasi.
6. Peluang Pembangunan IKN serta Pengembangan Kawasan Strategis dan Industri.
7. Pengembangan Tata Pemerintahan dan Birokrasi yang Profesional dan Akuntabel.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal (Ranwal) RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tabel (T-C.31)

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rancangan Awal RKPD				36,446,215,087,00	Hasil Analisis Kebutuhan				31.657.866.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	92 Indeks	22,574,185,273,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	94 Indeks	22.657.866.218,00
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 Persen				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 Persen	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (%)	100 Persen	923.166.580,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (%)	100 Persen	339.528.180,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	237.407.680,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	169.723.090,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	36.683.040,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	32.086.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	28.263.300,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	11.982.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	17.031.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	11.080.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Laporan	236.940.140,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	114.657.090,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100 Persen	13.542.782.626,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100 Persen	17.363.752.079,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (Orang/ Bulan)	60 Orang / Bulan	12.764.116.308,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (Orang/ Bulan)	85 Orang / Bulan	16.742.188.981,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	85 Dokumen	421.200.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	352.560.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1000 Dokumen	309.900.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1000 Dokumen	142.604.767,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.688.308,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.561.473,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	22.918.010,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	124.836.858,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah (Orang)	100 Persen	35.200.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah (Orang)	100 Persen	119.012.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.700.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.504.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.700.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	85.504.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24 Laporan	31.800.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Laporan	32.004.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	100 Persen	114.714.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	100 Persen	117.113.652,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3 Paket	67.570.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2 paket	10.285.650,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1 Dokumen	24.334.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1 Dokumen	9.904.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1 Dokumen	9.530.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1 Dokumen	4.924.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	14 Orang	80.850.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10 Orang	92.000.002,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana (Laporan)	280 Laporan	1.837.796.448,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana (Laporan)	56 Laporan	977.413.997,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	50.376.683,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	19.576.800,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	599.681.311,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	71.630.287,00
Penyediaan Barang dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Paket	53.245.520,00	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Paket	54.408.789,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	120 Dokumen	11.635.200,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	11.880.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	248 Laporan	1.001.975.950,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	719.448.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1000 Dokumen	36.657.500,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	71.726.936,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	33 Dokumen	134.600.967,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	28.743.185,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana (Unit/Tahun)	57 Unit/Tahun	2.175.372.731,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana (Unit/Tahun)	17 Unit/Tahun	154.172.212,00
Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1.003.006.145,00	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	8.456.806,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	168 Unit	1.172.366.586,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	145.715.406,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana (Laporan)	136 Bulan	2.604.995.288,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana (Laporan)	16 Laporan	2.676.809.848,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2 Laporan	10.006.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	5.448.000,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48 Laporan	740.316.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2 Laporan	740.304.872,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	94.079.288,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	257.272.976,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36 Laporan	1.770.600.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	1.673.784.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	100 Persen	1.340.157.600,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	100 Persen	910.064.250,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	29 Unit	330.812.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	22 Unit	271.932.050,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	250 Unit	321,237,365	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	78 Unit	309.011.500,00
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	90.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	29.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	249.900.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	100.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1.000.257.600,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	200.120.700,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 Persen	2,629,055,482,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 Persen	2.250.000.000,00
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Potensi Investasi yang direncanakan (Potensi Investasi)	2 Dokumen (Peta Potensi)	2.629.055.482,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Potensi Investasi yang direncanakan (Potensi Investasi)	1 Potensi Investasi	2.250.000.000,00
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)	3 Dokumen	629.055.192,00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)	2 Dokumen	426.892.433,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Samarinda	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi (Dokumen)	4 Dokumen	2.000.000.290,00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Samarinda	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi (Dokumen)	1 Dokumen	1.823.107.567,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	10 Persen	3.500.000.356,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor yang Berinvestasi	2489 Investor	2.250.000.000,00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Kegiatan Promosi (Kegiatan)	13 Dokumen	3.500.000.356,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Pengawasan Kepeminatan Investasi	15 Calon Investor	2.250.000.000,00
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	6 Dokumen	1.800.000.356,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	5 Dokumen	974.378.100,00
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	7 Dokumen	1.700.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	1.275.621.900,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 Persen	4.143.873.313,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 Persen	2.400.000.000,00
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Mendagri Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan melalui OSS dan E-PTSP	5200 Izin/ Non Izin	4.143.873.313,00	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Mendagri Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan melalui OSS dan E-PTSP	9500 Izin/ Non Izin	2.032.500.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Samarinda	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	6 Dokumen	1.200.064.400,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Samarinda	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1 Dokumen	549.293.400,00
Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berbasis Risiko	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	10 Pelaku Usaha	484.018.600,00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	25 Pelaku Usaha	264.000.000,00
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	120 Pelaku Usaha	1.070.700.425,00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	700 Pelaku Usaha	559.507.500,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Samarinda	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	6 Kegiatan Usaha	1.389.089.888,00	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Samarinda	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	7 Kegiatan Usaha	659.699.100,00
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah NIB yang Diterbitkan melalui OSS.			Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah NIB yang Diterbitkan melalui OSS.	300 Izin/ Non Izin	367.500.000,00
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	367.500.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Batubara (%)	100 %	2,999,100,513,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Menurunnya jumlah pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM	404 Pelaku Usaha	1.379.999.782,00
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM (Laporan)	1.629 Laporan	2,999,100,513,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase Penyampaian LKPM	80 Persen	1.379.999.782,00
Pengawasan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	7.942 Kegiatan Usaha	749.099.800,00	Pengawasan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	40 Kegiatan Usaha	400.000.000,00
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	400 Pelaku Usaha	1.500.000.478,00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Samarinda	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	400 Pelaku Usaha	279.999.782,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Samarinda	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	70 Kegiatan Usaha	750.000.235,00	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Samarinda	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	100 Kegiatan Usaha	700.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pemenuhan Layanan Informasi Yang Dibutuhkan Oleh Pengguna Layanan (%)	100 Persen	600.000.150,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	82 Persen	720.000.000,00
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		Penyajian data terhadap informasi (Data)	230 data	600.000.150,00	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan pelayanan data dan Informasi yang Dibutuhkan	100 Persen	720,000,000,00
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	600.000.150,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 Dokumen	720.000.000,00

Pada tabel 2.4 diatas merupakan rencana kerja tahun (n+1) yang dimaksud adalah rencana tahun anggaran 2026, merupakan perubahan dari Permendagri No. 13 tahun 2006 menjadi Permendagri No. 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur tidak mengakomodir usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Sejalan dengan ASTA CITA Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya DPMPTSP terkait pada angka 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastuktur serta angka 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Terdapat 2 (dua) program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, yaitu program unggulan Gratispol dan program unggulan Jospol. Kedua program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, dan sektor infrastruktur sebagai sebuah investasi untuk mewujudkan “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Pelaksanaan program unggulan dimaksud juga menjadi bagian penting dari upaya pelaksanaan Trisula Pembangunan Daerah yakni penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keterkaitan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dengan Program Unggulan Gubernur Jospol 9, yaitu Memudahkan Investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat dan swasta yang merupakan langkah krusial untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik minat investor domestik maupun asing. Pemerintah daerah dapat menyederhanakan perizinan investasi dengan mengefektifkan sistem satu pintu yang efisien, transparan, dan terdigitalisasi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi untuk proyek-proyek strategis. Selain itu, perlu adanya sinergi antara ketiga pihak dalam menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai potensi investasi di Kalimantan

Timur dengan melakukan promosi untuk menarik investasi, serta memastikan keamanan dan keberlanjutan investasi, serta kepastian hukum bagi investor. Melalui strategi ini diharapkan investasi di Kalimantan Timur akan meningkat pesat, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Dalam mendukung untuk pencapaian target Jospol 9, DPMPTSP Provinsi Kaltim merumuskan program-program unggulan sebagai berikut:

1. Penyusunan RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal)
2. Pembuatan Peta Peluang dan Potensi Investasi Provinsi Kaltim termasuk Penyusunan Pra Study Kelayakan Investasi dan IPRO
3. Promosi Penanaman Modal
4. Pengawasan Realisasi Investasi
5. Percepatan Perizinan dan Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal melalui sosialisasi, bimtek, rapat koordinasi dan forum komunikasi
6. Peningkatan kapasitas SDM dan Sarana Prasarana untuk Pelayanan Penanaman Modal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan goal yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan terukur melalui indikator dan standar yang sudah ditetapkan, maka terdapat beberapa penjelasan mengenai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah :

3.2.1 Tujuan

Sesuai dengan dokumen RENSTRA DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029, Tujuan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan adalah “Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif” dengan indikator Nilai Realisasi Investasi (Triliun Rupiah).

3.2.2 Sasaran

Sasaran program kegiatan DPMPTSP yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029 yaitu:

Sasaran pertama :

Meningkatkan Kualitas Penanaman Modal sektor Non Migas dan Non Batubara

Indikator : Nilai Realisasi Investasi pada Sektor Non Migas dan Batubara (triliun rupiah)

Sasaran kedua :

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan (nilai IKM)

Sasaran ketiga :

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD

Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD (nilai AKIP)

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah disusun, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Program untuk Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Program untuk Tujuan dan Sasaran 1, *Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal sektor Non Migas dan Non Batubara* tahun 2025 – 2029 :
 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Program Promosi Penanaman Modal;
 - c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Program untuk Tujuan dan Sasaran 2, *Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan* tahun 2025 - 2029:
 - a. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
3. Program untuk Tujuan dan Sasaran 3, *Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD* tahun 2025 - 2029:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 dengan berpedoman Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mencakup 6 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 48 sub kegiatan yaitu :

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pada kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan dan anggaran yang terdapat beberapa rencana pendanaan sub kegiatan yang terdiri dari :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan :
 - *Kegiatan Forum Perangkat Daerah Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi, Kab / Kota Se Kaltim*
 - *Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renja dan Renja Perubahan).*
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan :
 - Penyusunan RKA SKPD pada tahun (n+1)
 - Penyusunan RKA SKPD Perubahan pada tahun (n)
 - Melakukan rapat koordinasi dengan Bappeda dan BPKAD Prov. Kaltim.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan :
 - Penyusunan DPA SKPD pada tahun (n+1)
 - Penyusunan DPPA SKPD (Perubahan) pada tahun (n)
 - Melakukan rapat koordinasi dengan Bappeda dan BPKAD Prov. Kaltim.

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan :

- Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan;
- Melakukan koordinasi dengan beberapa Instansi terkait.

5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan :

- *Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).*
- *Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Penyusunan LPPD, IKI, IKU, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Rencana Aksi dan LKjIP/LAKIP).*

2. Administrasi Keuangan

Pada kegiatan ini merupakan rencana pendanaan untuk administrasi keuangan dan belanja gaji PNS dan Non PNS serta pendukung kegiatan pada bagian keuangan. Sub kegiatan terdiri dari :

- 6) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
- 7) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ;
- 8) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 9) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
- 10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan kartu inventaris ruangan (KIR).

- 11) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
- 12) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- 13) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- 14) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ;
- 15) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- 16) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 17) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini merupakan belanja mengikat pada perangkat daerah, karena pada kegiatan ini merupakan belanja rutinitas. Berikut sub kegiatan yang terdiri dari :

- 18) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
- 19) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
- 20) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
- 21) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
- 22) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ;
- 23) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 24) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini merupakan penyediaan sarana dan prasarana dalam bentuk barang guna meningkatkan performa dan kinerja aparatur ASN dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim. Berikut beberapa sub kegiatan yang akan dilaksanakan :

- 25) Pengadaan Mebel;
- 26) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini merupakan penyediaan prasarana dalam bentuk jasa guna meningkatkan performa dan kinerja aparatur ASN

dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim. Berikut beberapa sub kegiatan yang akan dilaksanakan :

- 27) Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
- 28) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
- 29) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
- 30) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini merupakan pemeliharaan dalam bentuk barang dan jasa guna meningkatkan performa dan kinerja aparatur ASN dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim. Berikut beberapa sub kegiatan yang akan dilaksanakan :

- 31) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 32) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 33) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
- 34) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 35) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

3.3.2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

9. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Sub kegiatan terdiri dari :

- 36) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
 - *Konsultasi Publik Naskah Akademik RUPMP;*
 - *Penyusunan Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi;*
 - *Rapat Pembahasan RUPM;*

37) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Penyusunan Investment Project Ready To Offer (IPRO);*
- *Rapat Pembahasan Potensi Industri Hilirisasi di Kalimantan Timur*

3.3.3 Program Promosi Penanaman Modal

10. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Sub kegiatan terdiri dari :

38) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Kegiatan Mahakam Investment Forum (MIF);*
- *Kegiatan High Level Meeting (HLM) Regional Investor Relation Unit (RIRU);*
- *Kegiatan Sistem Informasi Promosi Investasi;*
- *Pameran Dalam dan Luar Daerah*

39) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Kegiatan Kerjasama Penanaman Modal;*
- *Kegiatan Rapat Pengawalan Investasi;*
- *Sosialisasi Peraturan Menteri Investasi No.1 Tahun 2022;*

3.3.4 Program Pelayanan Penanaman Modal

11. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pada kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

40) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Rapat Pembahasan Perizinan;*
- 41) Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
- *Forum Pengelolaan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur;*
 - *Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Permasalahan Perizinan dan Non Perizinan.*
- 42) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
- *Bimbingan Teknis Sektor Lingkungan Hidup dan Pariwisata;*
 - *Bimbingan Teknis Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;*
 - *Bimbingan Teknis Perizinan Sektor Pertanian;*
 - *Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*
 - *Sosialisasi Perizinan Perlintasan (Crossing) yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;*
- 43) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Tingkat Kabupaten/Kota. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
- *Diseminasi Pendampingan Penerbitan NIB dan Perizinan di Kabupaten Paser;*
 - *Diseminasi Pendampingan Penerbitan NIB dan Perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara;*
 - *Diseminasi Pendampingan Penerbitan NIB dan Perizinan di Kota Balikpapan*

44) Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Evaluasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Timur;*
- *Kegiatan Mekanisme Penyusunan Laporan Penyelenggaraan PTSP Se-Kalimantan Timur.*

3.3.5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

12. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Pada kegiatan tersebut memiliki tiga sub kegiatan yang terdiri dari :

45) Pengawasan Penanaman Modal. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Rapat Evaluasi Hasil Kegiatan Pengawasan Yang Dilaksanakan (DPMPTSP, SKPD teknis, Pelaku Usaha);*
- *Rapat Konsolidasi dan Sinkronisasi Data Realisasi Investasi;*
- *Rapat Persiapan Tim Pengawasan dan Penyusunan Jadwal Pengawasan.*

46) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Kegiatan Sosialisasi Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;*
- *Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Kalimantan Timur.*
- *Pembuatan Aplikasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan.*

47) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;*
- *Sosialisasi Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.*

3.3.6 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

13. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, pada kegiatan ini hanya terdapat satu sub kegiatan yaitu :

48) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Forum Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur*
- *Investment Goes Campus.*
- *Podcast.*
- *Website, Aplikasi dan Media Sosial.*

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 DPMPSTP Provinsi Kalimantan Timur (T.C-33)

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra SKPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				31.657.866.000,00					36.665.759.311,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				31.657.866.000,00					36.665.759.311,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				31.657.866.000,00					36.665.759.311,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	94 Indeks	94 Indeks	22.657.866.218,00				93 Indeks	23.165.759.529,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100%	100%	339.528.180,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	100%	368.478.510,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	169.723.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	6 Dokumen	184.720.770,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	32.086.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	0 Dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	11.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	0 Dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra SKPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Daerah		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13 Laporan	11.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	0 Laporan	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4 Laporan	114.657.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	5 Laporan	183.757.740,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100%	100%	17.363.752.079,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	100%	18.225.240.812,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	85 Orang/ Bulan	16.742.188.981,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	132 Orang/ Bulan	17.579.280.812,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	352.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	1 Dokumen	486.160.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	142.604.767,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	1.300 Dokumen	159.800.000,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.561.473,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	0 Dokumen	-

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra SKPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	9.904.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	1 Dokumen	1.620.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	4.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	1 Dokumen	1.620.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	10 Orang	92.000.002,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	10 Orang	30.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	419 Laporan	56 Laporan	977.413.997,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	424 Laporan	678.817.160,00
Penyediaan Instalasi									
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	4 Paket	19.576.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	10 Paket	8.817.160,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	71.630.287,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	2 Paket	58.364.800,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	54.408.789,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	12 Paket	30.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra SKPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	12 Dokumen	11.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	120 Dokumen	11.635.200,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	719.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	12 Laporan	500.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	71.726.936,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	12 Dokumen	20.000.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	1 Dokumen	28.743.185,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	12 Dokumen	50.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	87 Unit/ Tahun	17 Unit/ Tahun	154.172.212,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	32 Unit/ Tahun	200.000.000,00
Urusan Pemerintah Daerah									
Pengadaan Mebel									
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.456.806,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	0 Paket	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra SKPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Daerah		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	22 Unit	271.932.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	31 Unit	271.970.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	244 Unit	309.011.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	244 Unit	150.000.000,00
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	29.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	1 Unit	45.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	0 Unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.120.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		-
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-	100 %	2.250.000.000,00				-	3.062.420.000,00
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase peningkatan investor yang mengakses peta potensi investasi	-	-	2.250.000.000,00			3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	2Potensi Investasi	2.200.000.000,00
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi									
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	2 Dokumen	426.892.433,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	0 Dokumen	-

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra SKPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Daerah		
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha	559.507.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	800 Pelaku Usaha	1.168.640.000,00
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko									
	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	6 Kegiatan Usaha	7 Kegiatan Usaha	659.699.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	7 Kegiatan Usaha	913.000.000,00
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah NIB yang Diterbitkan melalui OSS.	-	300 NIB	367.500.000,00				-	511.280.000,00
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	400 Pelaku Usaha	367.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	300 Pelaku Usaha	511.280.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Menurunnya jumlah pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM	-	404 Pelaku Usaha	1.379.999.782,00				-	3.600.000.000,00
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan LKPM	-	80 persen	1.379.999.782,00			3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	1629Laporan	3.600.000.000,00
Pengawasan Penanaman Modal									
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	40 Kegiatan usaha	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	40 Kegiatan usaha	1.200.000.000,00
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya									
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	-	100 Kegiatan usaha	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	45 Kegiatan usaha	1.400.000.000,00
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan	-	400 Pelaku Usaha	279.999.782,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan	400 Pelaku Usaha	1.000.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra SKPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Daerah		
	Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						horisontal pada sektor unggulan		
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	-	82%	720.000.000,00				80 %	840.000.000,00
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan pelayanan data dan Informasi yang Dibutuhkan	-	100 %	720.000.000,00			3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	-	840.000.000,00
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	5 Dokumen	720.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	7 Dokumen	840.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah

Di dalam pembahasan forum Finalisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur, khususnya untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah disepakati bahwa untuk rencana kerja tahun 2026 rencana program prioritas terdiri dari 3 (tiga) program yaitu **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, dan Program Pelayanan Penanaman Modal**. Pada program tersebut bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi sektor non migas dan non batubara serta pelaksanaan untuk membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan industri/ perusahaan yang bernilai meningkatkan investasi di Kalimantan Timur, diseluruh Kalimantan Timur terutama dikawasan Kariangau dan Balikpapan sekitarnya.

4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Rumusan rencana pendanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 yang sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur serta telah dianalisa pada saat Ekspose Renstra dan terdapat beberapa perubahan redaksi atau nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini dikarenakan penyesuaian dan telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Dalam hal lain nilai investasi, indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan nilai AKIP merupakan target khusus yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, dan yang akan disepakati menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) milik DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi perjanjian kinerja Kepala Dinas dengan Kepala Daerah.

Program/ kegiatan pendukung prioritas merupakan upaya untuk mendukung tercapainya sasaran program prioritas serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan salah satu untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah pada periode tahun 2025 – 2029. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 4.1 Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Tahun 2026

No	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	31.657.866.000,00
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.250.000.000,00
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.250.000.000,00
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	426.892.433,00
2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	1.823.107.567,00
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.250.000.000,00
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.250.000.000,00
3	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	974.378.100,00
4	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.275.621.900,00
3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.379.999.782,00
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.379.999.782,00
5	Pengawasan Penanaman Modal	400.000.000,00
6	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	700.000.000,00
7	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	279.999.782,00

4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	720.000.000,00
4	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	720.000.000,00
8	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	720.000.000,00
5	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.400.000.000,00
5	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.032.500.000,00
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	549.293.400,00
10	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	264.000.000,00
11	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	559.507.500,00
12	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	659.699.100,00
13	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	367.500.000,00
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.657.866.218,00
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.528.180,00
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	169.723.090,00
15	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	32.086.000,00
16	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.982.000,00
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.080.000,00
18	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.657.090,00

7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.363.752.079,00
19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.742.188.981,00
20	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	352.560.000,00
21	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	142.604.767,00
22	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.561.473,00
23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	124.836.858,00
8	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	119.012.000,00
24	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.504.000,00
25	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	85.504.000,00
26	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.004.000,00
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	117.113.652,00
27	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.285.650,00
28	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.904.000,00
29	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.924.000,00
30	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92.000.002,00
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	977.413.997,00
31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.576.800,00
32	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.630.287,00
33	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.408.789,00
34	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.880.000,00
35	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	719.448.000,00
36	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	71.726.936,00
37	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	28.743.185,00

11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.172.212,00
38	Pengadaan Mebel	8.456.806,00
39	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	145.715.406,00
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.676.809.848,00
40	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.448.000,00
41	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	740.304.872,00
42	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	257.272.976,00
43	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.673.784.000,00
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	910.064.250,00
44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	271.932.050,00
45	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	309.011.500,00
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00
47	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	29.000.000,00
48	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.120.700,00

BAB V

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 ini disampaikan, untuk memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan.

Selanjutnya kami mengharapkan agar alokasi dana yang mendukung Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 tidak mengalami perubahan secara signifikan dan berharap dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan sehingga apa yang menjadi komitmen kami untuk meningkatkan realisasi investasi dapat terlaksana dengan tujuan yang diharapkan.

RENJA TAHUN 2026 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (comon goals) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Akhir Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030 dan berpedoman pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2030.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Undang – Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
8. Undang – Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
9. Undang – Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahrgaaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Permenpora Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024;
22. Permenpora Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD), yang merupakan implementasi DBON di tingkat daerah atau DBOD;
23. Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kepemudaan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029;
27. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
28. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
29. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan maksud melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mempunyai maksud dan tujuan, antara lain :

1. Maksud

- a. Sebagai pedoman awal perencanaan tahunan.
Ranwal Renja menjadi dasar penyusunan kegiatan Dispora Kaltim pada tahun anggaran 2026, sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja final.
- b. Menjabarkan RPJMD/RPJPD ke tahunan.
Dokumen ini merupakan penjabaran program dan kegiatan yang termuat dalam RPJPD 2025–2045 serta RPJMD Kaltim 2025–2029, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.
- c. Menyinkronkan dengan kebijakan nasional dan daerah.
Ranwal Renja mengacu pada *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026* dan selaras dengan *Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2026*, serta kebijakan strategis sektor kepemudaan dan olahraga.
- d. Menjadi bahan konsultasi publik dan musrenbang.
Ranwal ini disusun sebagai draft untuk dikonsultasikan dalam forum perangkat daerah, musrenbang, dan pembahasan bersama Bappeda, sehingga aspirasi pemangku kepentingan bisa diakomodasi.
- e. Menjadi acuan penyusunan Renja Dispora final.
Setelah melalui pembahasan dan penyelarasan, Ranwal Renja akan menjadi dasar penyusunan Renja Dispora Kaltim 2026 yang final dan disahkan.

2. Tujuan

- a. Menjadi pedoman perencanaan program dan kegiatan
Agar seluruh program dan kegiatan Dispora Kaltim tahun 2026 tersusun secara terarah, terukur, dan sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.
- b. Mengintegrasikan kebijakan perencanaan
Supaya program/kegiatan kepemudaan dan keolahragaan selaras dengan:

- RPJPD Kaltim 2025–2045
- RPJMD Kaltim 2025–2029
- RKPD Kaltim 2026
- RKP Nasional 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan Ranwal RENJA DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2026 meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,

Berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Rencana Kerja beserta Pendanaan Program Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

BAB 5 PENUTUP

BAB 2. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA DISPORA 2025-2029

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Ada beberapa perubahan nomenklatur Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan pada tahun 2025 menyesuaikan RENSTRA 2025-2029 sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN 2025

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

- Penyiadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
3. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
 - Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi
- 4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
- 5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD)
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dispora Prov. Kaltim Tahun 2025 s/d Tahun 2029 Provinsi Kalimantan Timur

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan									
2	19				Bidang Urusan Pemerintahan Kepemudaan dan Keolahragaan									
2	19	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	98	95	95	93	98%	91	85	87%
2.19.01.1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	95	0	10	10	100%	10	20	21%
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	13	10	10	100%	3	3	30%
2	19	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	6	3	3	100%	3	3	100%
2	19	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	1	2	2	100%	2	1	50%
2	19	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	1	2	2	100%	2	1	50%
2	19	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	2	3	3	100%	3	2	67%
2	19	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100%	4	2	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 19 01 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat			Persentase realisasi anggaran	95	15	95	96	101%	95	36	38%
2 19 01 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88	78	88	88	100%	182	182	100%
2 19 01 2 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1	12	12	100%	12	6	50%
2 19 01 2 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	n/a	12	12	100%	12	6	50%
2 19 01 2 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	n/a	12	12	100%	12	6	50%
2 19 01 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	n/a	12	12	100%	12	6	50%
2 19 01 3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95	1	95	94	99%	95	0	0%
2 19 01 3 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	n/a	2	2	100%	2	0	0%
2 19 01 3 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	n/a	1	1	100%	1	0	0%
2 19 01 3 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	1	4	4	100%	1	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01	5		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Kelengkapannya	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95	n/a	95	94	99%	95	0	0%
2	19	01	5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	n/a	3	3	100%	0	0	#DIV/0!
2	19	01	5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	n/a	1	1	100%	1	0	0%
2	19	01	5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	n/a	50	50	100%	54	0	0%
2	19	01	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88	n/a	88	88	100%	88	0	0%
2	19	01	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	89	n/a	88	88	100%	84	0	0%
2	19	01	6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95	12	95	93	98%	95	0	0%
2	19	01	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	0	0%
2	19	01	6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	4	4	4	100%	6	0	0%
2	19	01	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	n/a	1	1	100%	1	0	0%
2	19	01	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	5	4	4	100%	4	0	0%
2	19	01	6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	1	4	4	100%	4	0	0%
2	19	01	6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2	1	2	0	0%	3	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 19 01 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	n/a	12	12	100%	12	6	50%
2 19 01 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	12	85	85	100%	95	21	22%
2 19 01 6 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	100%	1	0	0%
2 19 01 6 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	100%	1	0	0%
² 19 01 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95	12	95	94	99%	95	0	0%
2 19 01 7 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8	n/a	6	6	100%	0	0	#DIV/0!
2 19 01 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	n/a	3	3	100%	0	0	#DIV/0!
2 19 01 7 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	n/a	4	0	0%	0	0	#DIV/0!
2 19 01 7 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8	n/a	8	0	0%	5	0	0%
2 19 01 7 11	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
² 19 01 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95	12	95	94	99%	95	0	0%
2 19 01 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	5	12	12	100%	12	6	50%
2 19 01 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3	12	0	0%	12	6	50%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	19	01	9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95	12	95	94	99%	95	0	0%
2	19	01	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18	8	18	18	100%	2	0	0%
2	19	01	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	16	10	10	100%	30	0	0%
2	19	01	9	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	n/a	10	10	100%	0	0	#DIV/0!
2	19	01	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	n/a	10	10	100%	10	0	0%
2	19	01	9	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	92	100	0	0%	0	0	#DIV/0!
2	19	01	9	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	n/a	1	0	0%	1	0	0%
2	19	01	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	4	1	1	100%	0	0	#DIV/0!
2	19	01	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	n/a	1	5	500%	1	0	0%
2	19	01	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	4	4	4	100%	1	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.01	1.74	970	149	15%	1.31	0.08	6.11%
						Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.20		26	37	142%	27.32	0.11	0.4%
2	19	02	1		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480	15592	5480	10510	192%	5580	1961	35.14%
2	19	02	1	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	n/a	657	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	02	1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	n/a	10837	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	02	1	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600	1088	600	600	100%	1470	350	23.81%
2	19	02	1	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	n/a	2110	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	02	1	05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7	n/a	7	3	43%	7	0	0.00%
2	19	02	1	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	n/a	8	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	02	1	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan	n/a	300	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	02	1	10	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20	n/a	20	20	100%	20	0	0.00%
2	19	02	1	11	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	4	n/a	4	4	100%	4	0	0.00%
2	19	02	1	12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	750	n/a	750	0	0%	28	28	100%
2	19	02	1	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50	n/a	50	27	54%	50	0	0%
2	19	02	1	14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya	630	n/a	630	655	104%	5341	375	7.02%
2	19	02	1	15	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	3500	n/a	3500	3701	106%	5220	900	17.24%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
² 19 02 2	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	150	600	150	150	100%	170	120	70.59%
2 19 02 2	02				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	n/a	7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 02 2	03				Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penuguhan kemandirian ekonomi pemuda	5	n/a	5	5	100%	6	0	0.00%
2 19 02 2	04				Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100	n/a	100	100	100%	120	120	100%
2 19 03					Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	100	80.3	135	0	0%	135	0	0%
² 19 03 1					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi	24	3000	24	24	100%	24	24	100%
2 19 03 1	01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta	1	1	1	1	100%	1	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	03	1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2	2	2	2	100%	2	1	50%
²	19	03	2		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	765	7112	765	765	100%	600	0	0%
2	19	03	2	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	03	2	02	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	n/a	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	03	2	04	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	765	n/a	765	765	100%	350	0	0%
2	19	03	2	05	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	2	n/a	2	2	100%	1	0	0%
2	19	03	2	06	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	9	n/a	9	9	100%	5	1	20%
²	19	03	3		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630	1050	630	630	100%	630	0	0%
2	19	03	3	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100	n/a	0	0	#DIV/0!	350	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	03	3	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	03	3	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	n/a	625	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	03	3	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	n/a	240	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	03	3	05	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	03	3	06	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100	n/a	100	100	100%	100	0
2	19	03	3	07	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2	n/a	2	2	100%	1	0
2	19	03	3	08	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di	1	n/a	1	1	100%	1	0
2	19	03	3	09	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan	430	n/a	430	430	100%	430	0
2	19	03	4		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	150	425	150	150	100%	150	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	03	4	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	03	4	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	03	4	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5	1	5	5	100%	4	2	50%
2	19	03	4	05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4	n/a	4	4	100%	4	0	0%
2	19	04			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	11	8.09	11	9	82%	8.66	0	0%
2	19	04	1		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4000	15344	4000	4000	100%	45000	0	0%
2	19	04	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	n/a	10	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	04	1	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	30	1	30	28	93%	40	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD)	0.82	95	82	80	98%	82	80	97.56%
2	19	01	6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95	12	95	94	99%	95	94	99%
2	19	01	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	19	01	6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	19	01	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	19	01	6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	19	01	6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	1	0	0%	1	0	0%
2	19	01	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2	19	01	7		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan BMD	95	12	95	94	99%	95	94	99%
2	19	01	7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	1	1	1	100%	1	1	100%
2	19	01	8		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95	12	95	94	99%	95	94	98.95%
2	19	01	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	0	0%	12	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01	8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	2	1	0	0%	1	0	0%
2	19	01	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	0	0%	1	0	0%
²	19	01	9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95	12	95	94	99%	95	94	98.95%
2	19	01	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	1	0	0%	1	0	0%
2	19	01	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	1	0	0%	1	0	0%
2	19	01	9	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	4	4	0	0%	4	0	0%
2	19	01	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	n/a	4	0	0%	4	0	0%
2	19	01	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA DISPORA Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan semuanya memenuhi target kinerja hasil/keluaran bahkan ada satu program yang melampaui target kinerja yang ditetapkan.
- Adapun persentasi capaian kinerja beberapa kegiatan cenderung meningkat seiring dengan semakin banyaknya pola pelaksanaan melalui kemitraan pemuda diseluruh Kab/Kota yang terlibat sehingga memberikan masukan positif bagi pengembangan kapasitas kepemudaan di Kalimantan Timur.
- Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengalami peningkatan pencapaian kinerja tahun 2024 :

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan,

Kegiatan ini mencakup pelatihan Kecakapan Hidup dengan anggaran awal sebesar Rp 10.145.584.000, kemudian mengalami perubahan menjadi Rp 12.935.624.000. Hingga akhir tahun, anggaran yang terserap mencapai Rp 12.933.981.814 atau sekitar 99,99%, dengan sisa anggaran yang tidak terpakai (SILPA) sebesar Rp 1.636.186. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini ditargetkan sebanyak 3.700 orang, dan realisasinya mencapai 3.701 peserta.

Tujuan pelatihan ini, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), meliputi peningkatan minat pemuda dalam dunia wirausaha, penguatan motivasi dalam pengembangan bisnis, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan usaha, pengurangan jumlah pengangguran melalui ekonomi produktif, serta pelestarian kearifan lokal di kalangan generasi muda.

Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dengan melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur serta pemerintah kabupaten/kota. Fokus pelatihan ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah setempat, dengan pelaksanaan selama 5 hari untuk setiap sesi. Rata-rata jumlah peserta dalam setiap pelatihan adalah 45 orang, dan penyelenggaraannya dilakukan serempak dalam beberapa tahap.

Fasilitas pendukung pelatihan mencakup tempat pelatihan, peralatan, bahan pelatihan, serta kebutuhan konsumsi bagi peserta. Evaluasi kegiatan dilakukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaan di kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Samarinda, jumlah peserta melebihi target yang direncanakan.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan	Fokus Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Balikpapan	6	Barista, Content Creator, Food Pasrty, Handy Craft, Event Organizer dan Tata Rias Kecantikan	270
2	Berau	6	Babershop, Barista, Content Creator, Frozen Food, Tata Busana dan Tata Rias Kecantikan	271
3	Bontang	6	Babershop, Barista, Frozen Food, Food Pastry, Fotografi dan Tata Rias Kecantikan	271
4	Kutai Barat	6	Barista, Content Creator, Make Up Artist, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Perbengkelan	270
5	Kutai Kartanegara	8	Content Creator, Desain Grafis, Videografi, Pembuatan Buket, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Tata Busana	322
6	Kutai Timur	12	Cinder Mata, Content Creator, Desain Grafis, Fotografi, Perbengkelan, Publik Speaking, Tata Boga	540
7	Mahakam Ulu	2	Perbengkelan dan Tata Rias Kecantikan	43
8	Paser	6	Content Creator, Event Organizer, dan Videografi	270
9	Penajam Paser Utara	6	Tata Rias Kecantikan, Desain Grafis, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Content Creator	270
10	Samarinda	25	Babershop, Barista, Content Creator, Desain Grafis, Digital Marketing, Fotografi, Frozen Food, Meubelair, Tata Busana, Tata Boga, dan Tata Rias Kecantikan	1175
JUMLAH				3702

Pada bagian pelaksanaan, terdapat dua aspek utama yang dibahas, yaitu anggaran dan pelaksanaan program, kegiatan, serta sub kegiatan. Dalam aspek anggaran, disebutkan bahwa Bidang Pengembangan Pemuda memiliki anggaran awal sebesar Rp 25.453.600.000, namun setelah mengalami perubahan, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 30.993.202.000. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi yang tercapai mencapai Rp 30.980.481.519 atau sekitar 99,96% dari total anggaran yang tersedia. Sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang tersisa sebesar Rp 12.720.481, yang hanya mencakup 0,04% dari total anggaran.

Pada bagian pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, laporan ini menguraikan evaluasi terhadap implementasi setiap sub kegiatan. Salah satu sub kegiatan yang dibahas adalah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan

Pemuda Tingkat Provinsi. Anggaran awal yang dialokasikan untuk sub kegiatan ini adalah Rp 797.750.000, namun dalam perubahan anggaran jumlahnya meningkat menjadi Rp 2.597.704.550. Setelah dilakukan realisasi, anggaran yang digunakan mencapai Rp 2.596.474.550 atau sekitar 99,95%, dengan SiLPA sebesar Rp 1.275.450.

Dalam sub kegiatan ini, salah satu program yang dilaksanakan adalah Pelatihan Kepemimpinan Pemuda, yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan kepemimpinan dan kualitas pemuda dalam menghadapi tantangan zaman. Pelatihan ini memberikan ruang bagi pemuda untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, serta pemahaman akan perannya dalam masyarakat. Melalui pelatihan ini, diharapkan muncul pemimpin muda yang memiliki integritas serta mampu berkontribusi secara nyata di berbagai bidang pembangunan, khususnya di Kalimantan Timur.

Pelatihan Kepemimpinan Pemuda yang bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Pelatihan ini dianggap penting karena masih rendahnya tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda, khususnya di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam diri pemuda, serta membentuk calon-calon pemimpin yang berkualitas untuk masa depan.

Ada beberapa tujuan utama dari pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda ini, antara lain menanamkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air, menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dalam jiwa peserta, mencetak bibit-bibit calon pemimpin berkualitas, serta menjadi sarana kontrol sosial terhadap pemuda di berbagai wilayah yang menjadi target pelatihan.

Tabel Daftar pelaksanaan Pelatihan Di Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	KAB/KOTA	JENIS PELATIHAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PESERTA
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	BERAU	Kepemimpinan	42	58	100
2	BONTANG	Kepemimpinan	33	67	100
3	PENAJAM PASER UTARA	Kepemimpinan	40	35	75
4	BALIKPAPAN	Kepemimpinan	33	67	100
5	KUTAI TIMUR	Kepemimpinan	32	30	62
6	KUTAI BARAT	Kepemimpinan	27	23	50
7	MAHAKAM ULU	Kepemimpinan	22	28	50
8	KUTAI KARTANEGARA	Kepemimpinan	32	43	75

Tabel ini menunjukkan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur pada tahun 2024. Setiap pelatihan memiliki jumlah peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan total peserta yang bervariasi di setiap daerah.

Di Kabupaten Berau, jumlah peserta laki-laki sebanyak 42 orang dan perempuan 58 orang, dengan total 100 peserta. Kota Bontang juga memiliki 100 peserta dengan 33 laki-laki dan 67 perempuan. Kabupaten Penajam Paser Utara diikuti oleh 40 peserta laki-laki dan 35 peserta perempuan, sehingga totalnya 75 peserta. Kota Balikpapan memiliki jumlah peserta yang sama dengan Bontang, yaitu 33 laki-laki dan 67 perempuan dengan total 100 peserta.

Di Kabupaten Kutai Timur, pelatihan diikuti oleh 32 laki-laki dan 30 perempuan dengan total 62 peserta. Kabupaten Kutai Barat memiliki total peserta sebanyak 70 orang, terdiri dari 32 laki-laki dan 38 perempuan. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki jumlah peserta paling sedikit, yaitu 22 laki-laki dan 23 perempuan, sehingga totalnya 45 peserta. Sementara itu, di Kabupaten Kutai Kartanegara, jumlah peserta laki-laki sebanyak 32 orang dan perempuan 43 orang dengan total 75 peserta.

- b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan pada tahun 2024 dapat melebihi target ditetapkan sebagaimana berikut:

Data Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dalam Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mencakup berbagai program untuk meningkatkan kualitas atlet dan tenaga kepelatihan.

Workshop Standar Harga Satuan (SHS) Olahraga Tahun 2024

Workshop ini diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2024 di Hotel Platinum, Balikpapan, dan dihadiri oleh 114 peserta, yang terdiri dari 89 laki-laki dan 25 perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai standar harga satuan dalam bidang olahraga, yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran berbagai kegiatan olahraga di Kalimantan Timur.

Acara ini dibuka oleh Rabihatun Wahidah, S.Kom, M.Si, selaku Analis Kebijakan Ahli Muda. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah Ade Sukmawan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Thoni yang merupakan tenaga ahli dari BPKAD.

Pelatihan LTAD untuk Pelatih dan Guru Olahraga Se-Kalimantan Timur

Pelatihan ini berlangsung dari 28 Februari hingga 1 Maret 2024 di Hotel Grand Senyur, Balikpapan, dan diikuti oleh 37 peserta yang terdiri dari 28 laki-laki dan 9 perempuan. LTAD (Long-Term Athlete Development) merupakan pendekatan yang digunakan dalam pembinaan atlet agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan usia dan kemampuan mereka. Kegiatan ini dibuka oleh H.M. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M.Si, selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur. Narasumber yang dihadirkan dalam pelatihan ini adalah C. Sundara dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Prof. DR. Ria Lumintoraso dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), serta DR. Imam Hariadi dari UNY Yogyakarta.

Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Gubernur Kaltim Tahun 2024

Kejuaraan ini berlangsung dari 23 hingga 27 April 2024 di Lapangan Bulu Tangkis GOR Kadrie Oening, Samarinda. Dengan jumlah peserta

sebanyak 481 orang, terdiri dari 337 laki-laki dan 144 perempuan, turnamen ini menjadi ajang kompetisi bagi para atlet bulu tangkis dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sri Wartini, SE, MM, yang menjabat sebagai Sekretaris Dispora.

Open Roadrace Piala Gubernur Kaltim 2024

Ajang balap motor ini digelar pada 18 hingga 19 Mei 2024 di Sirkuit Non Permanen GOR Kadrie Oening, Samarinda. Sebanyak 277 peserta ambil bagian dalam kompetisi ini, terdiri dari 266 laki-laki dan 11 perempuan. Roadrace menjadi ajang yang penting bagi para pebalap motor untuk menunjukkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam berkendara dengan kecepatan tinggi secara aman dan profesional. Acara ini dibuka oleh H.M. Sirajuddin, SH, MT, yang menjabat sebagai Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pelatihan Pelatih Bola Basket Lisensi B Tahun 2024

Pelatihan ini berlangsung dari 4 hingga 7 Juni 2024 di Hotel Fugo, Samarinda. Sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan ini, yang terdiri dari 27 laki-laki dan 3 perempuan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelatih bola basket agar lebih kompeten dalam membina atlet muda. Acara ini dibuka oleh Rasman, SE, M.Si, selaku Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora. Narasumber yang dihadirkan dalam pelatihan ini adalah Andika Supriadi Saputra dan Ahmad Maulana S.Pd, M.Pd, dari PERBASI.

Kejuaraan Panahan Terbuka Piala Gubernur Kaltim Tahun 2024

Kejuaraan ini diselenggarakan pada 9 hingga 15 Juni 2024 di Lapangan ABC Stadion Utama Palaran, Samarinda, dengan jumlah peserta mencapai 281 orang, yang terdiri dari 253 laki-laki dan 28 perempuan. Panahan merupakan cabang olahraga yang membutuhkan konsentrasi tinggi, teknik yang baik, serta ketahanan fisik yang optimal. Pembukaan acara ini dilakukan oleh Rasman, SE, M.Si.

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Cedera dalam Olahraga (Sport Massage)

Pelatihan ini berlangsung pada 20 hingga 23 Juni 2024 di Hotel Jatra, Balikpapan. Sebanyak 28 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari 25

laki-laki dan 3 perempuan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada para pelatih dan tenaga medis mengenai teknik pijat olahraga yang dapat membantu dalam pemulihan cedera atlet. Acara ini dibuka oleh Rasman, SE, M.Si, dengan narasumber Enggista Hendriko Delano dan Sabda Hussain As Shafi, M.Or, dari Yogyakarta.

Kejuaraan Taekwondo Antar Pelajar Tingkat Cadet dan Junior Se-Kalimantan Timur

Kejuaraan ini berlangsung dari 5 hingga 7 Juli 2024 di Aula Serbaguna Tower Kadrie Oening, Samarinda, dengan jumlah peserta 344 orang, yang terdiri dari 174 laki-laki dan 170 perempuan. Taekwondo merupakan salah satu cabang olahraga bela diri yang banyak diminati oleh pelajar, karena mengajarkan kedisiplinan, teknik bertarung yang baik, serta meningkatkan kebugaran fisik. H.M. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M.Si, selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, membuka acara ini

Kejuaraan Sepak Bola Piala Gubernur Liga OPD Kaltim 2024

Kejuaraan sepak bola ini berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, yaitu dari 5 Juli hingga 15 Desember 2024, di Lapangan Sepak Bola GOR Kadrie Oening, Samarinda. Turnamen ini diikuti oleh 320 peserta dan dibuka oleh Dra. Sri Wahyuni, MPP, selaku Sekretaris Daerah.

Pelatihan Pelatih dan Wasit Catur Tahun 2024

Pelatihan ini akan berlangsung pada 8 hingga 10 Agustus 2024 di Hotel Neo, Balikpapan. Kegiatan ini diikuti oleh 57 peserta dan dipimpin oleh Rasman, SE., M.Si, selaku Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora. Narasumber dalam pelatihan ini adalah Chessy Prila Hariputra dan Drs. Hendry Jamal dari Percasi Pusat, serta Ir. Idris Karim, NA. WN dan Najhan Mustofa, S.Sos, WN, PNM dari Percasi Daerah.

Open Tournament Catur Junior

Turnamen ini akan diselenggarakan pada 30 Agustus hingga 2 September 2024 di Aula Serbaguna Tower Kadrie Oening, Samarinda. Sebanyak 136 peserta akan berpartisipasi dalam ajang ini, dengan H.M. Agus Hari Kesuma, SE., MM., M.Si sebagai penanggung jawab

kegiatan.

Kejuaraan Daerah Pencak Silat Piala Gubernur Kaltim 2024

Kejuaraan ini akan berlangsung dari 25 hingga 29 September 2024 di GOR Pencak Silat (Folder Air Hitam), Samarinda. Total 188 peserta akan mengikuti kejuaraan ini, dengan Rasman, SE., M.Si sebagai penanggung jawab.

Open Tournament Pencak Silat Piala Gubernur Kaltim 2024

Turnamen ini akan berlangsung pada 25 hingga 29 September 2024 di GOR Pencak Silat (Folder Air Hitam), Samarinda. Sebanyak 418 peserta akan turut serta dalam ajang ini, yang juga dikoordinasikan oleh Rasman, SE., M.Si.

Kejuaraan Bola Basket Piala Gubernur Kaltim 2024

Kejuaraan ini akan digelar pada 26 September hingga 6 Oktober 2024 di GOR Serbaguna Kompleks Olahraga Kadrie Oening, Samarinda. Sebanyak 900 peserta yang terbagi dalam 45 tim putra dan 30 tim putri akan berkompetisi dalam kejuaraan ini.

Kejuaraan Bola Voli Piala Gubernur Kaltim 2024

Kejuaraan ini akan berlangsung pada 12 hingga 20 Oktober 2024 di GOR Serbaguna Kompleks Olahraga Kadrie Oening, Samarinda. Sebanyak 690 peserta yang terdiri dari 25 tim putra dan 21 tim putri akan berpartisipasi. Acara ini dipimpin oleh Sri Wartini, SE., MM, selaku Sekretaris Dispora.

Open Tournament Angkat Besi Piala Gubernur Kaltim Tahun 2024 – Under 14 & 15-17

Turnamen ini akan diadakan pada 16 hingga 20 Oktober 2024 di GOR Serbaguna Kompleks Olahraga Kadrie Oening, Samarinda. Sebanyak 46 peserta akan mengikuti turnamen ini di bawah koordinasi Rasman, SE., M.Si, selaku Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora.

Kejuaraan Sepak Bola Piala Gubernur Kaltim U13 dan U15 Tahun 2024

Kejuaraan ini akan digelar pada 11 hingga 18 November 2024 di Lapangan Sepak Bola GOR Kadrie Oening, Samarinda, dengan jumlah peserta sebanyak 400 orang. Acara ini dibuka oleh Dra. Sri Wahyuni,

MPP, selaku Sekretaris Daerah.

Pelatihan Lisensi Pelatih dan Scorer Baseball dan Softball 2024

Pelatihan ini akan berlangsung pada 13 hingga 17 November 2024 di Hotel Gran Senyur, Balikpapan. Sebanyak 27 peserta akan mengikuti pelatihan ini yang dipimpin oleh Sri Wartini, SE., MM. Instruktur dalam kegiatan ini adalah Dr. Iwan Hermawan, S.Pd., M.Pd, Jajat Darajat Kusumah Negara, Indri Maulida Wardani, dan Nurul Annisa Octavianti dari UPI.

Kejuaraan Pickleball Kaltim Open Tahun 2024

Kejuaraan ini akan berlangsung pada 14 hingga 17 November 2024 di Lapangan Tennis GOR 27 September Universitas Mulawarman, Samarinda. Sebanyak 724 peserta akan berpartisipasi dalam ajang ini di bawah koordinasi Sri Wartini, SE., MM, selaku Sekretaris Dispora.

Kalimantan Timur SQUASH Open Tahun 2024

Kejuaraan ini akan berlangsung pada 30 November hingga 4 Desember 2024 di Lapangan Squash Dome, Balikpapan. Turnamen ini akan diikuti oleh 57 peserta di bawah koordinasi Rasman, SE., M.Si, selaku Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora.

Penataran Wasit/Juri, dan Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Karate

Pelatihan ini akan diselenggarakan pada 5 hingga 6 Desember 2024 di Hotel Fugo, Samarinda. Sebanyak 100 peserta akan mengikuti kegiatan ini, yang dipimpin oleh H.M. Agus Hari Kesuma, SE., MM., M.Si, selaku Kadispora Kaltim.

Kejuaraan Karate Junior Open Piala Gubernur Kaltim Tahun 2024

Kejuaraan ini akan berlangsung pada 6 hingga 8 Desember 2024 di GOR Serbaguna Kompleks Olahraga Kadrie Oening, Samarinda. Sebanyak 397 peserta akan berpartisipasi dalam kejuaraan ini di bawah koordinasi Ir. Seno Aji, selaku Ketua Umum Forki.

Pelatihan Wasit dan Juri Cabang Olahraga Voli Tingkat Daerah Tahun 2024

Pelatihan ini akan digelar pada 7 hingga 11 Desember 2024 di Hotel Puri Senyur, Samarinda, dengan jumlah peserta sebanyak 64 orang. Acara

ini dipimpin oleh H.M. Agus Hari Kesuma, SE., MM., M.Si, selaku Kadispora Kaltim

Kejuaraan Taekwondo Antar Club Piala Gubernur Kaltim Tahun 2024

Kejuaraan ini akan diadakan pada 12 hingga 15 Desember 2024 di Dojang Taekwondo (Folder Air Hitam), Samarinda. Sebanyak 360 peserta akan mengikuti kejuaraan ini di bawah koordinasi Rasman, SE., M.Si, selaku Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora.

Open Tournament Anggar Piala Gubernur Kaltim 2024

Turnamen ini akan berlangsung pada 12 hingga 17 Desember 2024 di GOR Anggar (Folder Air Hitam), Samarinda, dengan jumlah peserta sebanyak 59 orang. Kejuaraan ini dipimpin oleh Rasman, SE., M.Si, selaku Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora.

Pelatihan Pelatih dan Wasit Cabang Olahraga SQUASH Tahun 2024

Pelatihan ini akan diselenggarakan pada 28 hingga 30 Desember 2024 di Hotel Grand Tjokro, Balikpapan. Sebanyak 36 peserta akan mengikuti pelatihan ini yang dipimpin oleh H.M. Agus Hari Kesuma, SE, MM., M.Si, selaku Kadispora Kaltim. Instruktur dalam kegiatan ini adalah Sakimin, Juni Lengkong, Bella Gustiansyah, dan Paulina Noja Floriani Radus dari PSI.

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pada Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembentukan serta Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Kegiatan ini melibatkan beberapa agenda, yaitu:

Pembinaan PPLP yang berlangsung sepanjang tahun, dari 1 Januari hingga 31 Desember 2024, di Samarinda, Kompleks SKOI Kaltim, dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang. Narasumber dalam kegiatan ini meliputi Abdul Muqit (Pencak Silat), Eka Sahara (Taekwondo), dan Risman Fahri (Panahan).

Kejuaraan PPLP/D dan SKO Cabor Sepakbola yang diadakan pada

22 April hingga 1 Mei 2024 di Stadion Aji Imbut, Kutai Kartanegara, dengan 243 peserta. Acara ini dibuka oleh H.M. Syirajudin, SH., MT (Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat).

Kejuaraan PPLP/D dan SKO Cabor Panahan yang berlangsung pada 22 hingga 27 April 2024 di Stadion Palaran, Samarinda, dengan jumlah peserta sebanyak 216 orang.

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga serta Kompetisi di Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus

Kejuaraan Olahraga Pelajar Karate yang diadakan pada 2 hingga 6 Oktober 2024 di Dojang Taekwondo (Folder Air Hitam), Samarinda, dengan jumlah peserta sebanyak 954 orang. Acara ini dibuka oleh A.A. Bagus Surya Saputra Sugiarta, ST., MM (Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Prov. Kaltim), dengan FORKI Kaltim sebagai narasumber.

Kejuaraan Olahraga Pelajar Pencak Silat yang juga berlangsung pada 2 hingga 6 Oktober 2024 di GOR Pencak Silat (Folder Air Hitam), Samarinda, dengan 331 peserta. Acara ini dibuka oleh A.A. Bagus Surya Saputra Sugiarta, ST., MM, dengan IPSI Kaltim sebagai narasumber.

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kalimantan Timur, akan diadakan **Pekan Paralimpik Pelajar tingkat Provinsi** yang berlangsung pada 11–14 Desember 2024 di Stadion Aji Imbut, Kutai Kartanegara. Acara ini akan melibatkan 283 peserta dan dipimpin oleh H.M. Agus Hari Kesuma. NPCI Kaltim turut serta dalam mendukung penyelenggaraan acara ini guna memberikan kesempatan kepada atlet disabilitas untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam bidang olahraga.

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Dalam kategori ini, terdapat program **Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi**, yang mencakup beberapa kegiatan, yaitu **Panji Keolahragaan, Penilaian Duta Olahraga, dan Pemberian Penghargaan Olahraga**. Panji Keolahragaan akan berlangsung

sepanjang April–Desember 2024 di empat kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Sementara itu, Penilaian Duta Olahraga akan dilaksanakan pada 10–13 Desember 2024 di Hotel Puri Senyuir, Samarinda, melibatkan 12 peserta.

Puncaknya adalah Pemberian Penghargaan Olahraga pada 13 Desember 2024 di tempat yang sama, yang diikuti oleh 104 peserta dan dipimpin oleh H.M. Agus Hari Kesuma. Program ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada individu dan lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam dunia olahraga.

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi di bidang olahraga, akan dilakukan **Pembekalan Tenaga Penilai Sport Development Index (SDI)** pada 30 September–2 Agustus 2024 di Hotel Maxone, Balikpapan, dengan melibatkan 20 peserta. Selain itu, akan dilaksanakan **Penilaian SDI di tingkat kabupaten/kota**, yang mencakup lima daerah, yaitu Balikpapan, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Kutai Timur, dengan jumlah peserta masing-masing 30 orang. **Penilaian SDI tingkat provinsi** dijadwalkan pada 15–18 Agustus 2024 dan akan mencakup lima wilayah utama, yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan, dan Bontang. Kegiatan ini melibatkan tenaga ahli dari akademisi dan pemerintah untuk memastikan kualitas data yang dikumpulkan.

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

Sebagai upaya meningkatkan kualitas keolahragaan di Kalimantan Timur, dilakukan berbagai program yang berfokus pada kerja sama dan pengembangan organisasi terkait olahraga. Salah satu program utama adalah **Pemassalan Olahraga**, yang berlangsung sepanjang tahun 2024 dan melibatkan 3.000 peserta di berbagai wilayah Kalimantan Timur. Program ini bertujuan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam olahraga melalui berbagai kegiatan inklusif dan edukatif.

Selain itu, **terdapat program Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan**

Tradisional, yang juga diadakan sepanjang tahun 2024 dan mencakup 1.000 peserta. Kegiatan ini difokuskan untuk memperkenalkan serta melestarikan olahraga rekreasi dan tradisional kepada masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan minat terhadap olahraga lokal dan budaya.

Kejuaraan dan Festival Olahraga

Beberapa kejuaraan olahraga juga akan digelar sebagai bagian dari pengembangan prestasi dan apresiasi terhadap olahraga tradisional. **Kejuaraan Olahraga Tradisional** akan diselenggarakan pada 29–30 Desember 2024 di Gelora Kadrie Oening, Samarinda, dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Pada waktu yang sama dan tempat yang sama, akan diadakan juga **Kejuaraan Sepeda Tua, BMX, dan Break Dance**, yang akan melibatkan 27 peserta. Kedua kejuaraan ini dikelola oleh A.A. Bagus Surya Saputra Sugiarta, ST, MM, selaku Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Provinsi Kaltim.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap olahraga budaya, akan dilaksanakan **Festival Olahraga Tradisional** pada 11–14 Juli 2024 di Parigi Moutong, yang diikuti oleh 28 peserta. Festival ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih dalam olahraga tradisional yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat terus dilestarikan dan dipraktikkan oleh generasi muda.

Pelatihan dan Seminar Olahraga

Untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap olahraga, akan diadakan beberapa pelatihan dan seminar. **Lomba Senam Aerobik** akan digelar pada 24 Agustus 2024 di Gedung Serbaguna Stadion Utama Palaran, Samarinda, yang akan melibatkan 200 peserta. Kegiatan ini dipimpin oleh H.M. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M.Si, sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim.

Selain itu, **Seminar Olahraga Rekreasi dan Tradisional** akan diadakan pada 31 September–3 Oktober 2024 di Horison Hotel Samarinda, dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang. Seminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman lebih dalam mengenai perkembangan serta manfaat olahraga rekreasi dan

tradisional dalam kehidupan sehari-hari.

Program-program ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem olahraga di Kalimantan Timur, baik dalam bentuk peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan prestasi olahraga, maupun pelestarian budaya olahraga tradisional.

Pelatihan dan Pembinaan Juri serta Atlet

Sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia dalam bidang olahraga, beberapa pelatihan bagi juri dan atlet telah dirancang. **Pelatihan Juri Olahraga Petualangan dan Tantangan** akan dilaksanakan pada 20–23 Mei 2024 di Balikpapan, Hotel Horison Ultima, dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas juri dalam cabang olahraga petualangan. Selanjutnya, akan diadakan **Pelatihan Juri Olahraga Kesehatan dan Kebugaran** pada 24–27 April 2024 di Balikpapan, Hotel Horison Sagita, yang juga akan diikuti oleh 20 peserta. Pelatihan ini berfokus pada pengetahuan tentang olahraga kesehatan dan kebugaran, termasuk aspek teknis serta aturan kompetisi.

Untuk mendukung perkembangan marching band, terdapat dua program utama, yaitu **Pelatihan Juri Marching Band** yang diadakan pada 4–7 Desember 2024 di Balikpapan, Hotel Maxone, serta **Pembinaan Unit Marching Band** yang berlangsung sepanjang tahun 2024 di Samarinda, Dispora Kaltim. Program pembinaan ini akan melibatkan 65 peserta yang terdiri dari pelatih dan penggiat marching band.

Kejuaraan dan Partisipasi Atlet

Selain pelatihan, beberapa kejuaraan olahraga akan digelar sebagai bentuk pengembangan atlet dan kompetisi yang sehat. **Kejuaraan Olahraga Lari Trail** akan berlangsung pada 16 November 2024 di PPU, Kawasan IKN, dengan jumlah peserta sebanyak 542 orang. Kejuaraan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing atlet lari trail dalam ajang kompetisi yang lebih besar.

Di tingkat nasional, Kalimantan Timur akan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti **Partisipasi Kejuaraan Marching Band**, yang akan

berlangsung pada 15–20 November 2024 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.

Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan

Sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan koordinasi antarorganisasi olahraga, akan dilaksanakan beberapa kegiatan kerja sama. **Gathering Olahraga** akan diadakan pada 24 September 2024 di Balikpapan, La Casa Borneo, dengan 20 peserta. Gathering ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara berbagai organisasi olahraga dalam pengelolaan kegiatan olahraga.

Selain itu, akan ada **Pelatihan Pembekalan Wirausaha Olahraga**, yang akan diselenggarakan pada 30 Oktober–1 November 2024 di Bontang, Hotel Bintang Sintuk. Pelatihan ini akan diikuti oleh 35 peserta dan difokuskan pada peningkatan keterampilan wirausaha di bidang olahraga, guna mendukung keberlanjutan ekonomi bagi pelaku olahraga.

Terakhir, **Rapat Kerja Keolahragaan** dijadwalkan berlangsung pada 11–14 Juni 2024 di Kutai Kartanegara, Hotel Grand Elty, dengan 20 peserta. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan olahraga di Kalimantan Timur.

Dengan adanya program-program ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia dalam dunia olahraga dapat meningkat, sekaligus memperkuat ekosistem olahraga melalui kompetisi dan kerja sama antar organisasi.

Capaian Kinerja Lainnya

OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan OPD teknis yang bersifat membantu dalam pencapaian target RPJMD khususnya yang berkaitan dengan pengurangan pengangguran dan angka kemiskinan, tidak mengurangi secara signifikan tetapi sudah merupakan usaha yang positif dalam pencapaian target Renstra 2025-2029.

Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dispora Provinsi Kalimantan Timur

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan			n/a	1,12	2,79	1.09	0.4	0.88	1.09	1.12	Pada tahun 2023 mengalami peningkatan dan melebihi target, adapun faktor pendukung adalah mekanisme pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
2	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional			5,11	7	8	8.77	6,75	5.11	6.75	7	Untuk realisasi sementara 2025 belum dianalisis,

Kondisi Organisasi secara umum adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sumber daya aparatur yang ada secara jabatan struktural telah terpenuhi tetapi untuk jabatan pelaksana masih kurang atau masih belum memadai.
2. Dari sisi kualitas masih perlu peningkatan terutama untuk bidang pengelolaan administrasi keuangan, administrasi pengelolaan barang dan kemampuan penguasaan IT.
3. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional umum sampai saat ini belum ada pedoman tentang Penetapan Angka Kredit (PAK) dari BKN.
4. Sarana dan prasarana penunjang kantor (peralatan) belum terpenuhi secara maksimal.
5. Kantor yang saat ini digunakan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perkantoran karena masih menggunakan gedung PUSDIKLAT, sehingga banyak terkendala terhadap pemeliharaan dan pengembangan ruang kantor guna untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga pada tahun 2024 diusulkan untuk dapat menempati kantor yang dibangun dilokasi Gelora Kadrie Oening.

6. Dispora selaku pengampu terhadap urusan keolahragaan juga saat ini diamanahkan untuk mensosialisasikan seluruh kegiatan olahraga masyarakat dan tradisional kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tetap melakukan olahraga senam pagi atau aerobik di Komplek Gelora Kadrie Oening Sempaja setiap Jumat dan Minggu.

Pada kondisi ini pelaksanaan bidang kepemudaan dan keolahragaan, diampu OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan OPD teknis yang bersifat membantu dalam pencapaian target RPJMD khususnya yang berkaitan dengan pengurangan pengangguran dan angka kemiskinan, tidak mengurangi secara signifikan tetapi sudah merupakan usaha yang positif dalam pencapaian target RPJMD.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini sesuai Indikator Kinerja sebagai berikut :

- a. Sudah adanya peraturan - peraturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang tentunya akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga di Kalimantan Timur, diantaranya sudah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan telah disusunnya Perda tentang Kepemudaan di tahun 2023.
- b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara instansi (Provinsi dan Kab/Kota), *stakeholder* dan pemangku kebijakan dalam pencapaian target kinerja.
- c. Bersinergi dengan berbagai pihak, baik pihak lembaga, swasta maupun akademis guna memaksimalkan peran masing-masing dalam peningkatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan.
- d. Sinkronisasi program maupun kegiatan baik dari pusat, provinsi sampai ke Kabupaten/Kota, diharapkan tujuan, sasaran serta strategi pencapaian targetnya dapat lebih terarah dan sistematis.
- e. Sistem Informasi yang mulai tersinkronisasi (dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi).
- f. Meningkatnya Kepedulian pemerintah terhadap peningkatan angka partisipasi masyarakat untuk berolahraga.
- g. Meningkatnya nilai penghargaan/apresiasi terhadap olahragawan berprestasi di Kalimantan Timur

Hambatan/Masalah :

- a. Masih minimnya kegiatan kepemudaan yang mengakomodir kreatifitas pemuda, kepeloporan pemuda dan kepemimpinan
- b. Pembinaan kepemudaan secara menyeluruh tidak dapat dilakukan oleh hanya satu instansi.
- c. Penyajian Data Organisasi Kepemudaan belum terjaring dengan baik dan memadai berbasis teknologi aplikasi
- d. Lingkungan Kerja Bidang Pemuda Provinsi dan Kab/Kota masih terjebak dengan pekerjaan rutinitas tanpa memahami arti dan substansi pembinaan Kepemudaan
- e. Indikator target hanya mencakup Kab/Kota bukan menyentuh tingkat Kecamatan di lihat dari luasan Wilayah Kalimantan Timur
- f. Kesadaran masyarakat atas perilaku hidup sehat masih Kurang.
- g. Kegiatan pembinaan / pelatihan Olahraga yang belum berkesinambungan.

Analisis Kebijakan :

- a. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara instansi (Provinsi dan Kab/Kota), stakeholder dan pemangku kebijakan dalam pencapaian target kinerja
- b. Terbitnya Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepamudaan dan disahkan nya Perda tentang Pelayanan Pemuda
- c. Memberikan Fasilitas program dan kegiatan kepada masing-masing organisasi Kepemudaan dan atau Organisasi Komunitas Pemuda Prestasi lainnya dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai aspek kehidupan
- d. Pada tahun 2025 pelatihan wirausaha akan dilaksanakan dengan indikator keinginannya sudah mencakup Kecamatan di masing-masing Kab/Kota se-Kalimantan Timur dengan meningkatkan kualitas kompetensi pemuda dan tidak hanya mengejar kuantitas.
- e. Menyelenggarakan Rapat Kerja Keolahragaan Bersama Dinas yang menangani Keolahragaan di Kab/Kota guna mensinkronkan program kerja dan kegiatan agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
- f. Promosi kegiatan olahraga yang dilaksanakan di Kalimantan Timur baik yang diselenggarakan Pemerintah , Masyarakat atau Dunia Usaha
- g. Melakukan Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga dengan Metode Penilaian Sport Development Index (SDI).

Upaya dalam pencapaian keberhasilan kinerja:

- a. Melibatkan unsur akademisi dalam penyusunan RAD serta meningkatkan koordinasi dan berkolaborasi dengan *stake holder* penyelenggara kegiatan kepemudaan.
- b. Meningkatkan volume pelaksanaan pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
- c. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan lintas Program agar lebih terintegrasi dan bersinergi untuk meningkatkan capaian Kinerja Program Kepemudaan di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur;
- d. Melakukan Koordinasi dan penyusunan program kerja bersama Olahraga dengan stake holder terkait.
- e. Berusaha menjalin komunikasi dengan pengurus organisasi Kepemudaan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan organisasi Kepemudaan

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Rendahnya Tingkat produktivitas pemuda.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur yang dapat disimpulkan bahwa diperlukan langkah – langkah konkrit dari pemerintah khusus terhadap pemuda untuk menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, era digitalisasi tidak bisa dipungkiri lagi, pemuda-pemuda Kalimantan Timur harus maju untuk menyongsong dan mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

- b. Permasalahan perilaku yang menyimpang dikalangan pemuda.

Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekhawatiran di dalam masyarakat seperti maraknya pengguna/pengedar NAPZA, permasalahan perilaku yang menyimpang sehingga mengakibatkan menyebarnya HIV/AIDS di masyarakat dan perilaku kriminal remaja serta meningkatkan fungsi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang meliputi kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

- c. Kesenjangan kapasitas antar organisasi kepemudaan, sebagian besar masih belum aktif secara kelembagaan atau belum mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah

Kesenjangan kapasitas antar organisasi kepemudaan menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap efektivitas pembinaan dan pemberdayaan pemuda di daerah. Sebagian besar organisasi kepemudaan masih belum aktif secara

kelembagaan maupun program, sehingga keberadaannya belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Kondisi ini menyebabkan peran strategis pemuda dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun politik tidak terakomodasi dengan baik.

Minimnya kapasitas kelembagaan juga berimplikasi pada rendahnya kualitas program kerja, lemahnya tata kelola organisasi, serta terbatasnya jaringan kemitraan dengan pemerintah maupun pihak swasta. Akibatnya, potensi besar pemuda sebagai agen perubahan dan motor penggerak pembangunan tidak dapat dimaksimalkan. Di sisi lain, ketidakmerataan kapasitas antar organisasi kepemudaan menciptakan kesenjangan peluang partisipasi, di mana hanya sebagian kecil organisasi yang aktif mampu terlibat dalam proses pembangunan, sementara mayoritas lainnya tertinggal.

- d. Minimnya wadah dan fasilitas pembinaan kepemudaan yang representatif dan inklusif

Permasalahan ini memberikan dampak Pemuda kesulitan mengembangkan potensi diri di bidang pendidikan, seni, olahraga, kewirausahaan, maupun kepemimpinan. Meningkatnya kerentanan terhadap masalah sosial (pengangguran, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja) dan Terhambatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah.

- e. Prestasi Olahraga Kaltim yang cenderung menurun.

Prestasi olahraga Kaltim yang cenderung menurun sejak pelaksanaan PON XX 2021 dan ajang multi even lainnya dengan melihat dari jumlah atlet Kaltim yang memperkuat Timnas pada multi even Asian Games dan Olimpiade yang juga semakin menurun serat masih lemahnya kualitas SDM yang menangani olahraga baik pembina, pengurus, pelatih maupun insan olahraga lainnya yang sampai saat ini masih berkesan belum profesional baik ditingkat klub, Kabupaten atau Kota maupun di tingkat Provinsi.

- f. Rendahnya frekuensi kompetisi lokal/regional yang berjenjang dan terstruktur, terutama di tingkat pelajar dan komunitas.

Rendahnya frekuensi kompetisi lokal maupun regional yang berjenjang dan terstruktur, khususnya di tingkat pelajar dan komunitas, menimbulkan berbagai dampak yang cukup signifikan. Terbatasnya ruang kompetisi menghambat proses pembinaan prestasi olahraga karena bibit-bibit unggul sulit teridentifikasi sejak dini. Selain itu, minimnya ajang pertandingan juga berimplikasi pada menurunnya motivasi dan semangat berlatih para pelajar maupun komunitas olahraga, sehingga potensi yang dimiliki tidak berkembang secara optimal.

Ketiadaan kompetisi yang rutin dan terarah juga mengakibatkan rendahnya pengalaman bertanding yang sangat dibutuhkan untuk membentuk mental juara, kedisiplinan, dan sportivitas. Hal ini pada akhirnya memperlebar kesenjangan prestasi antar daerah serta menyulitkan pencapaian target prestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Dari sisi sosial, kurangnya kompetisi berjenjang mengurangi kesempatan interaksi positif antar pelajar dan komunitas olahraga, sehingga fungsi olahraga sebagai sarana pembinaan karakter, kerja sama, dan daya juang pemuda belum berjalan secara maksimal.

Lebih jauh lagi, rendahnya intensitas penyelenggaraan kompetisi lokal/regional juga berdampak pada hilangnya potensi ekonomi dan kreatif yang biasanya tergerak melalui kegiatan olahraga, seperti keterlibatan UMKM, industri kreatif, maupun pariwisata olahraga. Dengan demikian, kondisi ini menjadi salah satu kendala strategis dalam upaya mewujudkan pembinaan olahraga yang berkelanjutan, kompetitif, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

g. Masih rendahnya budaya olahraga ditengah-tengah Masyarakat.

Upaya pemerintah belum optimal dalam mengolahragakan masyarakat dan masih kurangnya pengetahuan terhadap arti pentingnya olahraga bagi kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, sosialisasi kepada masyarakat harus sampai pada tataran paling bawah dengan bekerjasama dengan stake holder terkait.

2.4. Penelaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan Dispora terhadap rancangan RKPD Prov. Kaltim 2026 terdapat beberapa hal perlu penyesuaian dari narasi indikator kinerja sampai pada target capaian kinerja pada sasaran dan program dengan melakukan internalisasi di instansi Dispora Kaltim serta melakukan penyesuaian terhadap capaian kinerja dalam RPJMD 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029 dan disinergikan terhadap hasil koordinasi Tingkat Kab/Kota dan Forum Lintas SKPD.

Dapat disimpulkan bahwa Penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 menekankan pentingnya pembangunan SDM pemuda yang kompetitif dan sehat melalui integrasi program kepemudaan dan olahraga. Hasil penelaahan ini menjadi bahan masukan strategis agar RKPD tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada investasi manusia sebagai motor pembangunan daerah.

2.5. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Akhir RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2026, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Rancangan RKPD Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN				155,582,388,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN				155,582,388,000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	47,165,880,621	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	47,165,880,621	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	95%	383,444,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	95%	383,444,000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	99,670,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	99,670,000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	58,388,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	58,388,000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	66,456,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	66,456,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	67,140,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	67,140,000	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	91,790,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	91,790,000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	95%	30,523,325,482	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	95%	30,523,325,482	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora Kaltim	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang/bulan	29,687,395,482	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora Kaltim	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang/bulan	29,687,395,482	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	586,020,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	586,020,000	
1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	49,970,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	49,970,000	
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	199,940,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	199,940,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95%	119,331,040	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95%	119,331,040	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	39,720,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	39,720,000	
1.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	29,760,240	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	29,760,240	
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	49,850,800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	49,850,800	
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Kelengkapannya		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95%	533,188,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Kelengkapannya		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95%	533,188,000	
1.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	342,300,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	342,300,000	
1.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	47,908,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	47,908,000	
1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	46,200,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	46,200,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kaltim	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	47,160,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kaltim	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	47,160,000	
1.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kaltim	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	49,620,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kaltim	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	49,620,000	
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95%	3,077,320,359	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95%	3,077,320,359	
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	19,995,626	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	19,995,626	
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	168,243,005	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	168,243,005	
1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	19,988,228	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	19,988,228	
1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	423,396,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	423,396,200	
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	191,513,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	191,513,500	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	99,964,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	99,964,000	
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2,004,366,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2,004,366,000	
1.6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	49,950,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	49,950,000	
1.6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	99,903,800	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	99,903,800	
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan BMD	95%	69,903,024	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan BMD	95%	69,903,024	
1.7.8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Dispora Kaltim	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	7 Unit	69,903,024	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Dispora Kaltim	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	7 Unit	69,903,024	
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95%	9,971,478,996	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95%	9,971,478,996	
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2,030,599,620	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2,030,599,620	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7,940,879,376	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7,940,879,376	
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95%	2,487,889,720	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95%	2,487,889,720	
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispora Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	118,966,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispora Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	118,966,000	
1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispora Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	321,310,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispora Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	321,310,000	
1.9.5	Pemeliharaan Mebel	Dispora Kaltim	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 Unit	55,500,000	Pemeliharaan Mebel	Dispora Kaltim	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 Unit	55,500,000	
1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	118 Unit	601,618,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	118 Unit	601,618,000	
1.9.8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Dispora Kaltim	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	115,300,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Dispora Kaltim	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	115,300,000	
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	926,680,920	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	926,680,920	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	249,798,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	249,798,000	
1.9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	98,716,800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	98,716,800	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.45 %	13,482,886,439	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	1.45 %	13,482,886,439	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	34.97 %				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	34.97 %		
2.1	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	9020 Orang	11,418,184,439	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	9020 Orang	11,418,184,439	
2.1.3	Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	2100 Orang	1,000,000,596	Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	2100 Orang	1,000,000,596	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.5	Perencanaan. Pengadaan. Pemanfaatan. Pemeliharaan. dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	49,996,200	Perencanaan. Pengadaan. Pemanfaatan. Pemeliharaan. dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	49,996,200	
2.1.10	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Dispora Kaltim	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	30 Orang	549,017,456	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Dispora Kaltim	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	30 Orang	549,017,456	
2.1.11	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	950,000,342	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	950,000,342	
2.1.12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Dispora Kaltim	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	0,08 Persentase	2,089,730,900	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Dispora Kaltim	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	0,08 Persentase	2,089,730,900	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	555,166,339	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	555,166,339	
2.1.14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	4840 Orang	1,999,999,392	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	4840 Orang	1,999,999,392	
2.1.15	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2000 Orang	4,224,273,214	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2000 Orang	4,224,273,214	
2.2	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	100 Organisasi	2,064,702,000	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	100 Organisasi	2,064,702,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2.4	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100 Organisasi	2,064,702,000	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100 Organisasi	2,064,702,000	
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan		Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping Medali	72,181,926,638	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan		Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping Medali	72,181,926,638	
3.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	7 Orang	397,119,400	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	7 Orang	397,119,400	
3.1.1	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Dispora Kaltim	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	1 Unit	397,119,400	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Dispora Kaltim	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	1 Unit	397,119,400	
3.2	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	500 Orang	3,613,063,400	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	500 Orang	3,613,063,400	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.2.4	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Dispora Kaltim	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	200 Orang	2,162,863,000	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Dispora Kaltim	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	200 Orang	2,162,863,000	
3.2.5	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	2,400,400	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	2,400,400	
3.2.6	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	1 Kegiatan	1,447,800,000	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	1 Kegiatan	1,447,800,000	
3.3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	500 Orang	59,458,905,592	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	500 Orang	59,458,905,592	
3.3.1	Seleksi Atlet Daerah	Dispora Kaltim	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300 Orang	500,000,000	Seleksi Atlet Daerah	Dispora Kaltim	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300 Orang	500,000,000	
3.3.6	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Dispora Kaltim	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	1,970,328,778	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Dispora Kaltim	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	1,970,328,778	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.3.7	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Dispora Kaltim	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	1,251,661,250	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Dispora Kaltim	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	1,251,661,250	
3.3.8	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	3 Dokumen	1,410,447,514	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	3 Dokumen	1,410,447,514	
3.3.9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100 Orang	54,326,468,050	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100 Orang	54,326,468,050	
3.4	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	100 Orang	8,712,838,246	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	100 Orang	8,712,838,246	
3.4.3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	10 Dokumen	8,501,802,926	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	10 Dokumen	8,501,802,926	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.4.5	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	1 Dokumen	211,035,320	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	1 Dokumen	211,035,320	
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	11 Organisasi	4,021,000,000	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	11 Organisasi	4,021,000,000	
4.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	5000 Orang	4,021,000,000	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	5000 Orang	4,021,000,000	
4.1.5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	4,021,000,000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	4,021,000,000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	86%	18,730,694,302	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	86%	18,730,694,302	
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95%	2,119,812,472	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95%	2,119,812,472	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD PPO	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	116,726,581	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD PPO	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	116,726,581	
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD PPO	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	199,857,573	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD PPO	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	199,857,573	
1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	UPTD PPO	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	114,040,100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	UPTD PPO	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	114,040,100	
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD PPO	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	78,388,218	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD PPO	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	78,388,218	
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,610,800,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,610,800,000	
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95%	15,168,451,830	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95%	15,168,451,830	
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6,732,928,550	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6,732,928,550	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	634,023,280	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	634,023,280	
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7,801,500,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7,801,500,000	
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95%	1,442,430,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95%	1,442,430,000	
1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	UPTD PPO	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	148,680,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	UPTD PPO	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	148,680,000	
1.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD PPO	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1,293,750,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD PPO	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1,293,750,000	

Penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur berdasarkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan adanya penambahan kegiatan, kegiatan pindah program, indikator, target dan pendanaannya tersebut, maka secara simultan juga dilakukan penambahan inovasi baru serta penyesuaian terhadap Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terhadap Perubahan RENSTRA DISPORA Tahun 2024-2026 dan RPD 2024-2025, dan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perangkat Daerah melakukan proses penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD-RI 2026 yang menjadi bagian dari sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Prov. Kaltim. Untuk tahun 2026, Dispora Prov. Kaltim tidak memiliki usulan program/kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2.6.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2025		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim															
1.	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja (%)	65%	67%		70%		70,50 %		75%		80%			
2.	Program Pempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	27,10%	28,10%		28,68 %		29%		29,69 %		30%			
2. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Prov. Kaltim															
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	28,67%	30,00		35,00		40,00		45,00		50,00		Dokumen Capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Kalimantan Timur	

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3. Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim															
1.	Program Pemberdayaan UMKM	Pertumbuhan Wirausaha	4,86	11,11		15,27		19,44		23,61		27,77		fasilitasi bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya (pemasaran, bantuan modal usaha dan pelatihan : peningkatan SDM dan produk, pemasaran digital dan manajemen usaha	
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kaltim															
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	1,02%	1,45%		1,58%		2%		2,50%		3%		Pelatihan Kewirausahaan Pemuda yang mengacu pada sektor informal	

SARAN DAN MASUKAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

No.	Instansi/Lembaga/Forum	Saran & Masukan
1.	Tim Transisi	- Potensi tenaga kerja lokal perlu proteksi dari Pemerintah Provinsi dengan membuat kebijakan (Pergub/Perda) dengan menggunakan tenaga kerja local sebanyak 60% - Sektor kerja perempuan sektor swasta perusahaan perlu diperhatikan untuk mempunyai hak cuti melahirkan, menyusui dan haid perlu dibuatkan kebijakan khusus - UMR di sektor informal menjadi atensi Disnaker ; - Pelatihan kerja dan domisili diperhatikan dalam persyaratan dalam perekrutan pekerjaan; - Program yang mendukung di Disnaker dalam peninjatan sertifikasi kerja.; - Perlu merumuskan dalam mewujudkan Indikator 2 dengan tujuan terwujudnya generasi emas.; - Menekan angka pengangguran terbuka yang masih tinggi di Kaltim karena anggaran sudah besar dalam bidang tenaga kerja; - Pelatihan kerja perlu target yang lebih besar dengan melihat perbandingan target pelatihan kerja di Kab/Kota Kaltim; - Output dalam pelatihan kerja diperhatikan lebih fokus kepada berapa banyak orang yang bekerja setelah dilatih - Pada tahun 2026 diharapkan target 10.000 orang yang mendapatkan bantuan pelatihan kerja.; - Renstra dan Renja terkait pencapaian sasaran 7 apakah sudah ada program yang diampu masuk dalam Ranwal RPJMD.
2.	Kepala Disnakertrans Prov. Kaltim	- Sertifikasi Kerja sudah dilakukan oleh Disnaker yaitu pelatihan operator lift dan alat berat dengan kelas kompetensi kerja kemudian Disnaker menyalurkan tenaga kerja kepada perusahaan yang membutuhkan; - Untuk Cuti Haid sudah ada pada aturan perusahaan terkait pelaksanaan.
3.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim	- Pelaksanaan karang taruna dilaksanakan oleh Dispora - Terkait sasaran di Dispora yang memiliki sasaran sama tetapi memiliki fokus yang berbeda dalam penanganannya; - SKOI untuk Tusi sudah dilakukan oleh Disdikbud.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2045 yaitu INDONESIA EMAS yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang ke-dua yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu: tema dan agenda pembangunan.

“Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”

Terlebih RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta RKP 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029. RKP 2026 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045. Adapun Tema RKP pada 2026 adalah

“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”

Tema ini dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan bangsa melalui stabilitas pangan dan energi, sekaligus mendorong transformasi ekonomi yang berdaya saing, merata, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan pangan dan energi diwujudkan melalui penguatan produksi dalam negeri, diversifikasi sumber daya, pengembangan energi terbarukan, peningkatan kapasitas riset dan inovasi, serta efisiensi dalam distribusi dan konsumsi. Sementara itu, terbangunnya ekonomi yang produktif dan inklusif dicapai dengan mendorong hilirisasi industri, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan literasi digital, serta pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global.

Dalam konteks ini, Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki keterhubungan strategis melalui perannya dalam menyiapkan generasi muda yang sehat, produktif, dan adaptif terhadap perubahan. Pemuda sebagai agen pembangunan diharapkan berkontribusi dalam sektor ketahanan pangan dan energi, antara lain melalui pengembangan wirausaha muda di bidang agribisnis, teknologi hijau, dan energi terbarukan. Selain itu, Dispora juga berperan dalam mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dan industri olahraga yang inklusif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan memperluas partisipasi pemuda dalam perekonomian daerah.

Lebih jauh, melalui pembinaan olahraga, penguatan karakter, serta penyediaan wadah kreatif dan inovatif, Dispora turut mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul yang menjadi fondasi utama dalam menggerakkan ekonomi produktif dan inklusif. Dengan demikian, program-program kepemudaan dan keolahragaan di daerah bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan prestasi dan partisipasi, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi nasional dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2026 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pembangunan Prov. Kaltim Tahun 2026, keselarasan antara RPJMN 2025 – 2029 dengan RPJMD Kaltim 2025-2029 belum sepenuhnya tersinkronisasi namun secara substantif RENJA 2026 dan RENSTRA 2025-2029 telah berpedoman pada RPJMD Kaltim 2025-2029, oleh karena itu data yang disajikan merupakan memiliki keterkaitan dengan RPJMN periode 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Nasional

No.	Prioritas Nasional
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2	Memantapkan pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa
3	Pengembangan infrastruktur merata dan penciptaan lapangan kerja berkualitas
4	Memperkuat pembangunan SDM unggul
5	Melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA)
6	Pembangunan dari desa dan dari bawah
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi
8	Mewujudkan harmoni sosial dan pelestarian lingkungan serta budaya

Tema RKPD Kalimantan Timur Tahun 2026 yang menitikberatkan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur berkualitas, serta ekonomi inklusif, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan dan program dalam Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Renja Dispora) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Hal ini tercermin dari peran strategis sektor kepemudaan dan keolahragaan dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Pertama, dalam aspek pendidikan, Dispora berkontribusi melalui program pengembangan kepemimpinan, keterampilan, dan kreativitas pemuda. Kegiatan pembinaan kepemudaan di luar jalur formal pendidikan menjadi pelengkap dalam membentuk generasi muda yang cerdas, berdaya saing, serta memiliki integritas. Hal ini sejalan dengan visi membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Kedua, dari sisi kesehatan, program olahraga masyarakat maupun olahraga prestasi yang dijalankan oleh Dispora berfungsi sebagai instrumen peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pembudayaan gaya hidup sehat, peningkatan partisipasi olahraga di kalangan pelajar, serta pembinaan atlet daerah turut mendukung prioritas pembangunan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.

Ketiga, terkait infrastruktur berkualitas, Renja Dispora memuat rencana pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan serta keolahragaan yang representatif dan inklusif. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga tidak hanya

ditujukan untuk meningkatkan prestasi atlet, tetapi juga untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang pembinaan dan aktivitas olahraga yang layak.

Keempat, dalam kerangka ekonomi inklusif, Dispora mendorong pemberdayaan pemuda melalui wirausaha kreatif, industri olahraga, serta kegiatan kepeloporan yang memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Melalui program kewirausahaan pemuda, kompetisi olahraga, dan event berskala lokal maupun nasional, terbuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat daya saing daerah.

Dengan demikian, Renja Dispora Kaltim Tahun 2026 merupakan bagian integral dari implementasi tema RKPD Kalimantan Timur. Program kepemudaan dan keolahragaan tidak hanya berfokus pada peningkatan prestasi dan partisipasi, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pencapaian pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi inklusif yang menjadi prioritas utama daerah.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi DISPORA maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada Prioritas ke-4 yaitu Memperkuta SDM yang Unggul, yang penjabaran singkatnya mencakup pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, generasi muda (milenial & Z), dan penyandang disabilitas. Pada dokumen RPJMD 2025-2029 tupoksi DISPORA masuk dalam Agenda Pembangunan yang sudah disusun dengan menitikberatkan pada sinergi antara pembangunan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, dan ekonomi inklusif—semua diarahkan untuk menciptakan generasi muda yang unggul dan membuka peluang pembangunan lokal yang berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan tujuan dan sasaran Rentsra 2025-2029 yaitu:

a. Tujuan

- ✓ Meningkatkan Kualitas dan Partisipasi Pemuda
- ✓ Mengembangkan Ekosistem Olahraga yang Kompetitif
- ✓ Meningkatkan Ketersediaan Sarpras Pemuda dan Olahraga
- ✓ Memperkuat Peran Pramuka

b. Sasaran

- ✓ Meningkatnya partisipasi aktif pemuda dalam organisasi, kegiatan sosial, wirausaha, dan kepemimpinan.
- ✓ Meningkatnya prestasi atlet daerah di tingkat nasional dan internasional.
- ✓ Terbangunnya fasilitas olahraga yang memadai, aman, dan merata di wilayah strategis.
- ✓ Meningkatnya jumlah peserta aktif gerakan pramuka di semua jenjang.

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran Renstra tahun 2019-2023, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi DISPORA sebagai OPD pengembangan kepemudaan. dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijaksanaan pada tahun 2025-2029, penetapan program operasional berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dengan tetap melihat prioritas daerah, maka ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini merupakan program yang menunjang pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan dan sub kegiatan operasional rutin kantor.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program Pengembangan Kepemudaan pada hakekatnya adalah upaya untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang berdaya saing sebagai bentuk perwujudan dan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda adalah program prioritas SKPD yang mendukung pencapaian RPD 2024-2026 yang bertujuan meningkatkan minat pemuda Kalimantan Timur untuk berwirausaha mandiri, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk menyongsong Kalimantan Timur sebagai IKN, dan sebagai bentuk pengurangan kemiskinan secara umum.

3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan adalah program prioritas SKPD yang mendukung pencapaian Renstra 2025-2029 program yang bertujuan meningkatkan prestasi olahraga di Kalimantan Timur melalui sistem pembinaan olahraga, mulai dari usia dini sampai dengan usia masa keemasan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang tidak hanya terbatas pada pelakunya tapi juga pada sarana dan prasarana yang digunakan selain itu program ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan Permenpora Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode 2021-2024.

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini merupakan program baru yang masuk dan diatur dalam Permendagri 90 tahun 2019, untuk mengakomodir keseluruhan kegiatan kepramukaan dan pengembangannya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, dan program ini sudah berjalan sejak tahun 2021-2023 yang masuk pada periode Renstra 2019-2023 dan dilanjutkan kembali pada RPD 2024 – 2026 dan Renstra 2025-2029 dengan melihat dan memperhatikan bahwa pengembangan kepramukaan harus tetap ada guna dapat meoptimalkan generasi muda kaltim dalam ikut meningkatkan kualitas SDM.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diatas, maka disusunlah kegiatan dalam tahun 2026 sebagaimana berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
10. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi

11. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
12. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
13. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
14. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
15. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, maka disusunlah sub kegiatan dalam tahun 2026 sebagaimana berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.
11. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
12. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
13. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
14. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
15. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
16. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
17. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
18. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
19. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
22. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
23. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
24. Penyediaan Bahan/Material

25. Fasilitas Kunjungan Tamu
26. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
27. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
28. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
29. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31. Pengadaan Mebel
32. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
33. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
34. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
36. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
37. Pemeliharaan Mebel
38. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
39. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
40. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
41. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
42. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
43. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
44. Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
45. Perencanaan Pengadaan Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
46. Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
47. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
48. Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi

49. Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
50. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi
51. Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
52. Koordinasi Sinkronisasi dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
53. Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
54. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
55. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
56. Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
57. Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
58. Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
59. Seleksi Atlet Daerah
60. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
61. Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
62. Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
63. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
64. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
65. Pelaksanaan standar nasional pengelolaan organisasi keolahragaan di provinsi
66. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi

Total keseluruhan Program sebanyak 4 (empat) Program (terdiri dari 1 Program Rutin Operasional dan 3 Program Teknis Bidang).

Total keseluruhan Kegiatan sebanyak 15 (lima belas) Kegiatan (terdiri dari 8 Kegiatan Rutin Operasional dan 7 Kegiatan Teknis Bidang).

Total keseluruhan Sub Kegiatan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Sub Kegiatan (terdiri dari 43 Sub Kegiatan Rutin Operasional dan 23 Sub Kegiatan Teknis Bidang).

Adapun penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu organisasi terlebih lagi pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra 2025-2029, indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Adapun Indikator Kinerja Utama berdasarkan pencapaian sasaran sebagai berikut :

Tabel. 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
1	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	1,02	1,31	1.45	1,45
2	Persentase Atlet Yang Masuk Pelatnas	Persen	70	75	70	70

Tabel. 4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	Persen	9.70	10.43	11.47	11.47
2	Persentase Peningkatan Prestasi olahraga	Persen	4	3.85	11.11	11.11

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Dispora Prov. Kaltim tahun 2025-2029 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang diemban.

4.2. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2026 dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, maka dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tidak secara langsung mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur namun dalam berperan penting dalam kaitan pencapaian program prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dimaksud. Disamping itu, Provinsi Kalimantan Timur juga memegang peranan penting dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah (provinsi dan kota) yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur yang memuat Rancangan Akhir kerangka ekonomi daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berikut kebutuhan dana Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025.

- a. Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Rp. 53.895.499.900,-
- b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Rp. 93.492.008.212,-
- c. Program Peningkatan Daya Saing Kepramukaan Rp. 12.450.000.000,-

d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Rp. 65.155.666.715,-

Total Pagu : Rp. 234.906.798.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

Adapaun detail pagu pendanaan sebagaimana table 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRATRA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTRATRA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD				3 Dokumen	49.971.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kelestarian gender, serta penguatan peran pemer intahan, perkotaan (generasi milenial dan generasi Z), dan per yang disabilitas.	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	ASN Dispara Provinsi Kalimantan Timur		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD				12 Laporan	199.948.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kelestarian gender, serta penguatan peran pemer intahan, perkotaan (generasi milenial dan generasi Z), dan per yang disabilitas.	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	ASN Dispara Provinsi Kalimantan Timur		410.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRADA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Borang Milk Daerah pada SKPD				3 Laporan	29.780.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat 1 pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi olahraga, kegiatan gender, serta penguatan peran per- empuan, perwujudan generasi milenial dan generasi Z), dan per- yandang disabilitas.	3. Memberi gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	ASN Dispos Provinsi Kalimantan Timur		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Borang Milk Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Borang Milk Daerah pada SKPD				4 Laporan	49.850.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat 1 pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi olahraga, kegiatan gender, serta penguatan peran per- empuan, perwujudan generasi milenial dan generasi Z), dan per- yandang disabilitas.	3. Memberi gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	ASN Dispos Provinsi Kalimantan Timur		120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				175 Orang	47.160.000,00	Serasa Kotabatu, Serasa Kecamatan, Serasa Hal Gasa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan pemahaman dan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi olahan, kewirausahaan gender, serta pengoptimalan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan	ASN Dispora Provinsi Kalimantan Timur		300.000.000,00	DINAS PERUBAH DAN OLAH RAGA
	2.16.01.1.02.001.1	Bidang dan Fungsi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bidang dan Fungsi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				175 Orang	38.000.000,00	Serasa Kotabatu, Serasa Kecamatan, Serasa Kecamatan	PAJAK DAERAH	Meningkatkan pemahaman dan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi olahan, kewirausahaan gender, serta pengoptimalan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan	ASN Dispora Provinsi Kalimantan Timur		300.000.000,00	DINAS PERUBAH DAN OLAH RAGA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Aspek Desain pada SKPD				1 Dokumen	48.900.000,00	Serasa Kota/Kab, Serasa Kecamatan, Serasa Rut/Desa	PALANG DAERAH	Mengperkuat 1 pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kearifatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pem nguan, pernoda (generasi milenial dan generasi Z), dan per jaringan disabilitas.	3. Menekan gum Ekstensi Inklusif dan Berkelanjut an	ASM Dispora Provinsi Kalimantan Tengah		120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.10.01 1.00.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	80.900.000,00	Serasa Kota/Kab, Serasa Kecamatan, Serasa Rut/Desa	PALANG DAERAH	Mengperkuat 1 pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kearifatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pem nguan, pernoda (generasi milenial dan generasi Z), dan per jaringan disabilitas.	3. Menekan gum Ekstensi Inklusif dan Berkelanjut an	ASM Dispora Provinsi Kalimantan Tengah		120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENIA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENIA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Persegi Jumlah Persegi: 10000	Persentase Pemenuhan BMD	-			95 %	85.900.024.00			Memperluas jaringan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, produksi, produksi, keselamatan gender, serta penguatan pemerintahan perencanaan, pemerintah, gubernur melayani dan gubernur dan per jaringan dan lain-lain	3. Membantu Gubernur Melayani dan Berkeadilan	ASN Dispora Provinsi Kalimantan Timur	-	200.000.000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.07.0000	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Chetakkan				7 Unit	85.900.024.00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sampang Setoran	PAJAK DAERAH	Memperluas jaringan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, produksi, produksi, keselamatan gender, serta penguatan pemerintahan perencanaan, pemerintah, gubernur melayani dan gubernur dan per jaringan dan lain-lain	3. Membantu Gubernur Melayani dan Berkeadilan	ASN Dispora Provinsi Kalimantan Timur		200.000.000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRARA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAGNAN MAJU BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PASU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PASU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusi Kantor yang Diadatkan				10 Laporan	7.040.370.075,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Desa/Selatan, Semua Solatara	PAJAK DAERAH	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyanggah digitalisasi.	1. Membangun Ekosistem Inovasi dan Berkelanjutan	ASN Dispora Provinsi Kalimantan Timur		5.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLIMPIAHAGA
2.10.01.1.00	Pemerintahan Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintah GMD yang dilaksanakan oleh lembaga dan instansi yang terkait					95 %	2.487.880.724,00			Meningkatkan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyanggah digitalisasi.	1. Membangun Ekosistem Inovasi dan Berkelanjutan	ASN Dispora Provinsi Kalimantan Timur		2.480.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLIMPIAHAGA
2.10.01.1.00.001	Penyediaan Jasa Pemerintahan, Rupa Pemerintahan dan Papan Kantor/Pusat Pemerintahan Daerah	Rupa Pemerintahan dan Papan Kantor/Pusat Pemerintahan Daerah									Meningkatkan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyanggah digitalisasi.	1. Membangun Ekosistem Inovasi dan Berkelanjutan	ASN Dispora Provinsi Kalimantan Timur			DINAS PEMUDA DAN OLIMPIAHAGA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dimodifikasi				3 Unit	300.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PRABUK CHAMPAH	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, kelestarian gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial) dan generasi Z), dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.	8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan	85% (Sesuai Rencana Kemandirian Tahun)		300.000.000,00	DINAS PRABUKA DAN OLAH RAGA
2.19.01.1.06.0611 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sistem dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Peralatan Pemenuhan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dimodifikasi				1 Unit	98.710.886,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PRABUK CHAMPAH	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, kelestarian gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial) dan generasi Z), dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.	8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan	85% (Sesuai Rencana Kemandirian Tahun)		100.000.000,00	DINAS PRABUKA DAN OLAH RAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEPEMUDAAN						13.482.886.438,00						-	25.000.000.000,00	
		[Meningkatkan Daya Seng Kepemudaan]	Rasio Wirausaha Pemuda	3	1,92	1,31	1,45	13.482.886.438,00	-	-	-	-	-	-	25.000.000.000,00	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENINGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Disampingkan Ahli Bencana Provinsi yang Didata dan Diakses Pengembangan				100 Orang	54.126.000.000,00	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana RAB HASIL (DBH)	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, produksi strategis, kelestarian gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, generasi milenial dan generasi Z, dan pen- gandang swasta.	1. Menun- gun Sektor Pendidikan	Kepulauan Disampingkan Provinsi Kalimantan Timur	-	10.000.000.000,00	DINAS PERUMBAH LINGKUNGAN DALAM RUMAH SAKIT
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Gelanggang	Aktivitas dan kinerja yang mengukur pembinaan dan pengembangan organisasi disampingkan	-			100 Orang	8.712.000.000,00			Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, produksi strategis, kelestarian gender, serta penguatan peran peremp- uan, pemuda, generasi milenial dan generasi Z, dan pen- gandang swasta.	3. Menun- gun Ekowisata budaya dan Berkelanjutan	Kepulauan Disampingkan Provinsi Kalimantan Timur	-	10.000.000.000,00	DINAS PERUMBAH LINGKUNGAN DALAM RUMAH SAKIT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERENCANAAN RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAOI INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAOI INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kerja Sama Organisasi Perempuan Provinsi dengan Lembaga Tertarik				10 Dokumen	9.561.892.928,00	Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAJAK ORG/PAJAK	Mempertu- kan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesetaraan gender, perencanaan daerah, keadilan gender, serta pergerakan perempuan dalam perencanaan daerah dan perencanaan daerah	3. Memberi dukungan ekonomi kegiatan daerah	Kabupaten Ombilin Provinsi Kalimantan Tengah		90.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.10.001.1.00.0000																
			Jumlah Dokumen penyusunan Standar nasional pengkajian Organisasi Perempuan di provinsi				1 Dokumen	211.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAJAK ORG/PAJAK	Mempertu- kan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesetaraan gender, perencanaan daerah, keadilan gender, serta pergerakan perempuan dalam perencanaan daerah dan perencanaan daerah	3. Memberi dukungan ekonomi kegiatan daerah	Kabupaten Ombilin Provinsi Kalimantan Tengah		2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
4	2.10.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						4.021.000.000,00							7.000.000.000,00	
		[Meningkatkan Kualitas Kepramukaan]	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	100	100	100	100	4.021.000.000,00							7.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.04.1.01	Pendidikan dan Pengembangan Organisasi Kopranusukan	Jumlah Peserta yang aktif dalam pendidikan dan pengembangan organisasi kopranusukan	-			1000 Orang	4.821.000.000,00			Mengajukan 1 pengajuan per sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, energi, lingkungan, gender, serta pengujian proses produksi, penguatan generasi milenial dan generasi Z, dan per yanding disabilitas.	1. Mendukung Sektor Pendidikan	Periode Usia 18 - 30 tahun dan kelompok Pemuda se-Kabiri	-	7.000.000.000,00	ORGANISASI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.15.04.1.01.000	Pengembangan Regimen Kopranusukan Provinsi														
			Jumlah Laporan Kegiatan Kopranusukan Provinsi				1 Laporan	4.821.000.000,00	Sektor Kesehatan, Sektor Kependidikan, Sektor Perlindungan	DANA DAU/DAK RAKDA, (DBH)	Mengajukan 1 pengajuan per sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, energi, lingkungan, gender, serta pengujian proses produksi, penguatan generasi milenial dan generasi Z, dan per yanding disabilitas.	1. Mendukung Sektor Pendidikan	Periode Usia 18 - 30 tahun dan kelompok Pemuda se-Kabiri		7.000.000.000,00	ORGANISASI PEMUDA DAN OLAH RAGA
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLIMPIADA								16.730.694.382,00							26.450.000.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.730.694.382,00							26.450.000.000,00	
2.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLIMPIADA						16.730.694.382,00							26.450.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2021	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bina- Cetakan dan Pengabdian yang dilaksanakan				1 Paket	75.306.218,00	Rute Genetika, Semus Kecamatan, Semus Kabupaten	PAJAK DAERAH	Mengpusat- kan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pencapaian kearifatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perekonomian masyarakat pedesaan dan perkotaan di generasi 2), dan per- wujudan keadilan	3. Memberi dukungan kegiatan inovatif dan berprestasi	ASRI Dapara Prov. Kabiri		100.000.000,00	LPTD PENGELOLAAN PRAKARANA OLAH RAGA
	2.10.01.1.00.0000	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SMD														
			Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SMD				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semus Kabupaten, Semus Kecamatan, Semus Kabupaten	PAJAK DAERAH	Mengpusat- kan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pencapaian kearifatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perekonomian masyarakat pedesaan dan perkotaan di generasi 2), dan per- wujudan keadilan	3. Memberi dukungan kegiatan inovatif dan berprestasi	ASRI Dapara Prov. Kabiri		100.000.000,00	LPTD PENGELOLAAN PRAKARANA OLAH RAGA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2021	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Peningkatan Kantor yang Diselesaikan				2 Laporan	334.025.285,00	Semua Kecamatan, Semua Kantor Desa, Semua KMD Desa	PAJAK DAERAH	Memperluas perdagangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keolahsaran, produksi daerahnya, kesetaraan gender, serta penguatan potensi pemerintah, potensi generasi muda dan generasi T1 dan per yandang masyarakat	5. Mendan gati Ekonomi Inklusif dan berkeadilan	Masyarakat dan ASN Dispora Prov. Kaltim		300.000.000,00	LPTD PENGELOLAAN PRAKARANA DAERAH
2.19.01.1.06.004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diselesaikan				12 Laporan	7.001.500.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kantor Desa, Semua KMD Desa	PAJAK DAERAH	Memperluas perdagangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keolahsaran, produksi daerahnya, kesetaraan gender, serta penguatan potensi pemerintah, potensi generasi muda dan generasi T1 dan per yandang masyarakat	5. Mendan gati Ekonomi Inklusif dan berkeadilan	Masyarakat dan ASN Dispora Prov. Kaltim		6.000.000.000,00	LPTD PENGELOLAAN PRAKARANA DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRIORITAS / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRADA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTRADA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipertahankan Keberadaannya				3 Unit	1.293.780.000,00	Serius Kota/Kab. Serius Kacamatan Serius Kabupaten	PAJAK DAGANG	Bantuan pembangunan sarana sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, pemerataan daerah, keselamatan gender, serta penguatan pemerintah regional, pemerintah desa/kelurahan, pemerintah desa/kelurahan, dan lain-lain	3. Meningkatkan governance dan transparansi dan akuntabilitas	Masyarakat dan ASN Dispora Prov. Kalimantan		15.000.000.000,00	UPD PENGELOLAAN PRASARANA DAERAH
			JUMLAH					155.562.380.000,00							219.350.000.000,00	

4.4. Lokasi Kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan diluar Provinsi Kalimantan Timur.

4.4. Kelompok Sasaran Penerima Manfaat

Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur periode 2025-2029 adalah :

1. Masyarakat Kalimantan Timur secara keseluruhan berdasarkan usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun.
2. Pelaku Olahraga, Pengurus Cabang Olahraga, Mantan Atlet atau Pelatih Berprestasi.
3. Organisasi Kepemudaan, Kelompok Pemuda dan Pemuda Non Produktif.
4. Organisasi Kepramukaan baik Provinsi dan Kab/Kota.

BAB 5 PENUTUP

Rancangan Akhir RENJA DISPORA Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA DISPORA Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir RENJA DISPORA Tahun 2026 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov. Kaltim Tahun 2026, sehingga Tujuan dan Sasaran Pembangunan dapat dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rancangan Akhir RENJA Tahun 2026 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2026.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur DISPORA berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien.
2. Rancangan Akhir RENJA Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2026, dimana RENJA Tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan DISPORA, seluruh aparatur DISPORA secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2026.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Renja Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

RENJA TAHUN 2026
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan Rencana Kerja yang berisi penjabaran dari dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan merupakan uraian lebih mendetail dari rencana strategis yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya dan dalam pelaksanaan RENJA dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 serta surat edaran nomor surat edaran nomor 0007.2.4/0052/Bapp-II tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026, yang kemudian diolah melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, meliputi evaluasi pencapaian target program dan

kegiatan, analisis kinerja pelayanan, review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat.

Tahun Anggaran 2026 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, yang memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana pada awal tahun 2017 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya adalah penggabungan dari dua lembaga yaitu Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok yang berbeda. Adapun tugas pokok dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan undang undang no 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 serta dituangkan ke dalam Perda No. 9 Tahun 2016 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Konstitusional Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Kalimantan Timur adalah Pancasila dan UUD

1945, dengan landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
14. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode satu tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu pula sebagai acuan bagi bidang-bidang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini telah memperhitungkan

besaran organisasi dan sekurang-kurangnya telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kemampuan keuangan.
2. Cakupan Tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus di wujudkan.
3. Jenis dan banyaknya tugas.
4. Luas Wilayah Kerja, Kondisi Geografis dan Topografi.
5. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.
6. Potensi Daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani.
7. Sarana dan Prasarana penunjang tugas.

Sejalan dengan itu, maka maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra)/Manajemen Strategik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Mengoptimalkan tugas dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi misi dan tujuan pembangunan daerah;
5. Penajaman Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penetapan pagu yang dituangkan di dalam RKPD tahun 2026.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Menjabarkan Visi, Misi yang diuraikankan dalam tujuan, sasaran dan strategik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan

Timur, yang diwujudkan ke dalam Program dan Kegiatan Perpustakaan secara rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan melalui Rencana Strategis (Renstra) yang dibuat dalam Rencana Kerja dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

2. Sebagai pedoman dan menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan Prioritas Program Pembangunan yang akan dilaksanakan dengan Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, pembinaan, pengawasan, integrasi, sinergi dan sinkronisasi Pembangunan baik antar Pemerintah Kab/Kota, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Menciptakan iklim Pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*, dengan prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, *Money Follow Program*, akuntabel, Transparan, keterbukaan, adil/tidak diskriminatif, bersaing dan Profesional.
6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara aparat baik Internal dan Ekternal.

1.4 Sistematika Penulisan Renja

Pembangunan bidang perpustakaan di Kalimantan Timur senantiasa memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang menempatkan pembangunan perpustakaan sebagai salah satu potensi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat berbudaya baca dan belajar sepanjang hayat.

Guna memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari Rencana Kerja (RENJA) ini, maka disusunlah sistematika penulisan sesuai dengan permendagri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Kaidah Pelaksanaan

5.2 Rencana tindak lanjut

Memuat uraian penutup berupa, Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang dibutuhkan.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan

memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pendekatan komperatif, antara lain:

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, dilakukan dengan pengukuran terhadap realisasi setiap target indikator baik dari program, kegiatan dan sub kegiatan, selain itu pengukuran juga dilakukan dari sisi keuangan dengan memperhatikan pagu inidikatif setiap program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap realisasi nya. Evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara periodik dan tersistem melalui aplikasi, dari evaluasi yang telah dilakukan diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur seperti gambar tabel berikut:

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (output)	Berkas			Berkas Target (Hasil) Kinerja Hasil Program dan Kegiatan (Output) dengan tahun (n-3)/2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2024			Target program dan kegiatan (Rencana Anggaran Daerah tahun (n-1))	Pencapaian Realisasi Capaian Target Kinerja Kegiatan	
			2024	2025	2026		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2024	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Realisasi Target	Capaian Realisasi Target
2.2.3.01.1.06.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berkecukupan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berkecukupan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	Dokumen	17	83%	
2.2.3.01.1.06.01	Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeriksaan Survei Pemetaan Kantor yang Berkecukupan Tugas dan Fungsi	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	25%	25%	
2.2.3.01.1.06.01	Pelayanan Korporel, Inklusi, Literasi, Peningkatan Anggaran Kantor	Jumlah pelayanan korporel, inklusi, literasi, dan peningkatan anggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.02	Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Kantor	Jumlah perencanaan strategis dan perencanaan anggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.04	Pelayanan Rantai Logistik Kantor	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.05	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.06	Pelayanan Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.07	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.08	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.09	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.10	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.11	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.12	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.13	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.14	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.15	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.16	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.17	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.18	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.19	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.20	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.21	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.22	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.23	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.24	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.25	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.26	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.27	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.28	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.29	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	
2.2.3.01.1.06.30	Manajemen Rantai Logistik Kantor dan Penganggaran	Jumlah pelayanan rantai logistik kantor dan penganggaran	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	20%	20%	

[illegible]

[illegible]

Kode	Urutan/Idang Urutan Pemeliharaan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2023			Target program dan kegiatan [Berapa Derajat tahun Daerah tahun n-1]	Ketercapaian Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan		Ketercapaian Realisasi Capaian Target Kinerja Pemeliharaan
			2024	2025	2026	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun (n-2)/2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun (n-2)/2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun (n-2)/2023		Realisasi	Capaian	
2.24.03.1.01.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Akreditasi yang ditetapkan Himpun	Jumlah Daftar Akreditasi Kabupaten Perikanan dan Perikanan Hasil Akreditasi yang ditetapkan Himpun	1000	1500	1750	1000	1	0	500	2	0.00%	
2.24.03.1.01.03	Penetapan dan Pengawasan Daftar Perikanan Akreditasi	Jumlah Daftar Perikanan Akreditasi yang ditetapkan Himpun	5	5	7	5	5	100	5	0	0	

Adapun akuntabilitas keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 lebih lanjut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Keadaan Keuangan APBD dan APBD-P Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024			
		Anggaran Belanja Murni (Rp)	Anggaran Belanja Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	34.982.016.185,-	38.185.663.404,-	35.184.290.712,-	92,14
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	5.744.534.681,-	39.971.571.461,-	38.563.210.700,-	96,48
3.	Program Pengelolaan Arsip	3.957.081.360,-	5.191.440.260,-	4.549.654.505,-	87,64
4.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	283.672.160,-	253.372.160,-	232.526.585,-	91,77
Jumlah		44.967.304.386,-	83.602.047.285,-	78.529.682.502,-	93,93

Tabel 2.2
Realisasi Pendapatan APBD dan APBD-P Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Uraian	Target	Target Perubahan	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(2)
- Pendapatan Asli Daerah			7.750.000
• Retribusi Pemakaian Ruangan (Sewa Kantin)	3.600.000	-	-
• Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya (Sewa Kantin)	-	3.600.000	2.750.000
• Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Aula)	-	-	5.000.000

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran APBN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Urusan Perpustakaan			
	Pembinaan Perpustakaan	318.507.000,-	132.135.000,-	41,49
2.	Urusan Kearsipan			
	Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	0,-	0,-	-
	Jumlah	318.507.000,-	132.135.000,-	41,49

Tabel 2.4
Realisasi Anggaran Per Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	512.786.000,00	509.472.273,00	99,35%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	165.200.000,00	165.125.300,00	99,95	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	182.000.000,00	179.150.905,00	98,43	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165.586.000,00	165.196.068,00	99,76	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.873.840.822,00	20.958.036.192,00	91,62	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.297.900.822,00	20.579.669.198,00	92,29	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	483.940.000,00	289.560.000,00	59,83	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	55.000.000,00	53.853.400,00	97,92	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37.000.000,00	34.953.594,00	94,47	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	105.849.600,00	105.246.885,00	99,43	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	105.849.600,00	105.246.885,00	99,43	

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	447.450.224,00	413.824.435,00	92,49	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000,00	39.550.500,00	98,88	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	171.250.224,00	169.694.082,00	99,09	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	236.200.000,00	204.579.853,00	86,61	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.334.644.295,00	6.767.231.333,00	92,26	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.798.750,00	24.500.120,00	88,13	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.094.140.154,00	3.839.508.770,00	93,78	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.521.391,00	97.369.000,00	97,84	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	163.625.000,00	58.259.200,00	35,61	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	62.553.600,00	43.169.000,00	69,01	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.887.005.400,00	2.704.425.243,00	93,68	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.819.269.663,00	4.542.542.421,00	94,26	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.700.000,00	8.543.196,00	58,12	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	908.559.040,00	766.828.305,00	84,40	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.896.010.623,00	3.767.170.920,00	96,69	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.091.822.800,00	1.887.937.173,00	90,25	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	259.339.300,00	164.055.617,00	63,26	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.717.633.500,00	1.671.855.056,00	97,33	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.850.000,00	52.026.500,00	45,30	

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
8.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	9.511.111.181,00	8.356.410.273,00	87,86	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	318.960.000,00	306.596.067,00	96,12	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	2.999.463.500,00	1.959.796.973,00	65,34	
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	725.015.900,00	692.010.845,00	95,45	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	446.590.000,00	441.959.480,00	98,96	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	313.000.000,00	306.279.816,00	97,85	
	Pengembangan Perpustakaan Deposit	115.250.000,00	111.499.461,00	96,75	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	4.393.027.781,00	4.359.946.585,00	99,25	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	64.604.000,00	52.372.446,00	81,07	
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	135.200.000,00	125.948.600,00	93,16	
9.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	30.460.460.280,00	30.206.800.427,00	99,17	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	4.457.424.540,00	4.387.699.062,00	98,44	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.314.540.000,00	1.293.671.926,00	98,41	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	234.290.000,00	214.206.404,00	91,43	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	24.283.157.740,00	24.161.035.835,00	99,50	
	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	171.048.000,00	150.187.200,00	87,80	
10.	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	2.176.001.720,00	1.678.388.519,00	77,13	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	2.118.164.820,00	1.621.654.211,00	76,56	
	Penyusutan Arsip Dinamis	27.482.100,00	26.720.600,00	97,23	
	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	30.354.800,00	30.013.708,00	98,88	

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
11.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	116.637.100,00	116.439.177,00	99,83	
	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	28.914.800,00	28.879.300,00	99,88	
	Akusisi Arsip Statis	87.722.300,00	87.559.877,00	99,81	
12.	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	2.898.801.440,00	2.754.826.809,00	95,03	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1.899.087.700,00	1.840.220.090,00	96,90	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	999.713.740,00	914.606.719,00	91,49	
13.	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	55.769.540,00	51.441.000,00	92,24	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	39.073.100,00	37.213.500,00	95,24	
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	16.696.440,00	14.227.500,00	85,21	
14.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	27.026.800,00	26.336.246,00	97,44	
	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	16.937.400,00	16.889.346,00	99,72	
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	10.089.400,00	9.446.900,00	93,63	
15.	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	78.471.000,00	67.821.362,00	86,43	
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	26.890.800,00	26.452.761,00	98,37	

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	15.989.400,00	15.453.016,00	96,65	
	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	35.590.800,00	25.915.585,00	72,82	
16.	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	16.820.820,00	16.802.055,00	99,89	
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	715.020,00	711.600,00	99,52	
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	16.105.800,00	16.090.455,00	99,90	
17.	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	75.284.000,00	70.125.922,00	93,15	
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	54.292.000,00	49.923.000,00	91,95	
	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	16.000.000,00	15.660.922,00	97,88	
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	4.992.000,00	4.542.000,00	90,99	
	Total	83.602.047.285,00	78.529.682.502,00	93,93	

Dari rangkaian tabel di atas serta Tabel T-C.29, dapat dijelaskan keseluruhan kinerja pada tahun 2024 dapat dikatakan baik, secara langsung capaian kinerja dilihat dari sisi keuangan belanja, anggaran yang dikelola yang bersumber dari dana APBD Murni Provinsi Kalimantan Timur Rp 52.825.127.062,-, sejalan dengan adanya perubahan anggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 000.7.2.4/11328/Bapp-II tanggal 27 Juni 2024 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Prov. Kaltim dan Perubahan RENJA PD Tahun 2024, maka pagu anggaran yang dialokasikan

pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengalami penambahan menjadi Rp 104.961.061.846,- (bertambah Rp 52.135.934.784,-) dengan total realisasi sampai dengan akhir Desember sebesar Rp 76.409.725.856,- dengan persentase 72,80%.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim juga memiliki kontribusi dalam pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, didapat dari Retribusi Pemakaian Ruangan berupa sewa tempat/kantin dan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan melalui sewa aula/ruangan serbaguna. Dari target yang ditetapkan tahun 2024 oleh Pemerintah Daerah Prov. Kaltim kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim sebesar Rp 68.400.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp 39.300.000,-, berkurang sebesar 29.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.825.000,- dengan persentase capaian sebesar 12,28%. Hal tersebut dikarenakan tingginya standar harga pada Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (sewa aula) yang dimana tidak sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim.

Anggaran Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang bersumber dari Perpustakaan Nasional RI sebesar Rp 332.939.000,- dengan realisasi sebesar Rp 322.785.242,- dengan persentase 96,95% dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur tidak mendapatkan Anggaran APBN untuk urusan kearsipan yang bersumber dari ANRI.

Adapun uraian keuangan serta target capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun berjalan 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.5
Proporsi Alokasi Anggaran DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

No.	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2025
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.203.033.900,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	194.203.830,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.420.764.784,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.380.058,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.200.000,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.076.084.057,00
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	362.626.731,00
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.415.271.740,00
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546.502.700,00
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAN	8.374.822.800,00
2.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	2.977.441.823,00
2.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	5.397.380.977,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.287.546.368,00
3.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	549.135.328,00
3.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	236.445.201,00
3.3	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	501.965.839,00
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	631.441.257,00
4.1	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	116.153.013,00

4.2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	7.582.622,00
4.3	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	229.560.423,00
4.4	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	152.620.207,00
4.5	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	125.524.992,00

Tabel 2.6
Perkiraan Capaian Program Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Timur

No	Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target Capaian 2025
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kaltim	82%
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		91%
II.	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kaltim	70,5%
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		79%
III.	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah OPD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Kategori Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kaltim	7 OPD
IV.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	77,00%

		akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional	Kelurahan Kaltim	
--	--	---	------------------	--

2.1.2. Evaluasi Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Nilai capaian kinerja Perangkat Daerah tidak hanya dilihat dari realisasi dan capaian Rencana Kerja (Renja) saja, tetapi juga mencakup capaian Renstra Perangkat Daerah yang berkaitan langsung dengan RPJMD Provinsi. Renstra Perangkat Daerah menjabarkan sasaran strategis dari arah kebijakan Perangkat Daerah. Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target dan Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
				2024	2025	2026
	Mengembangkan minat baca dan budaya literasi masyarakat Kalimantan Timur serta mewujudkan tata kelola kearsipan yang tertib dan handal	Terwujudnya Budaya Literasi untuk meningkatkan kualitas Masyarakat Kalimantan Timur yang berdaya Saing	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	78	79	45
			Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Skor)	69	70,5	48
		Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Standar	Jumlah OPD dan LKD yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan kategori “Baik”	4	7	9

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,10	67,5	70,01
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,98	83	83,98

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah Terhadap RPD
Tahun 2024-2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target dan Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
		2024	2025	2026
1.	Indeks Pembangunan Liteasi Masyarakat (Indeks)	78	79	45
2.	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Skor)	69	70,5	48
3.	Jumlah OPD dan LKD yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan kategori “Baik”	4	7	9

Mengikuti adanya pergantian Kepala Daerah, target Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalimantan Timur turut menyelaraskan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029. Namun, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki program prioritas dalam RPJMD. Selain itu, terdapat beberapa indikator baru yang mengikuti Inmendagri Pedoman Penyusunan RPJMD 2025-2029, sehingga belum memiliki baseline dan target kinerja pada tahun 2025. Berikut uraian target Renstra Perangkat Daerah 2025-2029:

Tabel 2.9

Target Indikator Kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	Mewujudkan Minat Baca dan Budaya Literasi Masyarakat serta Tata Kelola Kearsipan sebagai Bukti Akuntabilitas Kinerja dan Alat Bukti yang Sah	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	79	79,25	79,50	79,75	80
		Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah		72	72,50	73	73,50
1.	Meningkatnya Budaya Baca dan Kecakapan Literasi Masyarakat Kalimantan Timur	Persentase Peningkatan Literasi Masyarakat Dan Minat Baca		7,25%	7,50%	7,75%	8%
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur	Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah		73	74	75	76
		Jumlah OPD dan LKD yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan kategori “Baik”	7	9	11	13	15
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67,5	71	71,5	72	72,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	84,50	84,75	85	85,25

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi. Penjabaran misi masing-masing Sasaran Strategis sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta cara mencapai tujuan dari sasaran strategis, maka dari sasaran yang telah ditetapkan dan yang dicapai tahun 2024 telah dilaksanakan, dan sebagian besar dapat mencapai target kinerja yang diharapkan.

Nilai capaian masing-masing sasaran diperoleh dari capaian masing-masing indikatornya. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Tugas utama yang hendak dicapai dalam tahun 2026, yaitu: **Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku**

Sasaran ini juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun indikator keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
2. Tingkat Kegemaran Membaca
3. Jumlah OPD dan LKD yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori “Baik”
4. Nilai AKIP Perangkat Daerah
5. Indek Kepuasan Masyarakat

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indek)			35	40	45	78,34			Belum dilakukan perhitungan capaian 2025
2	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Skor)			46	47	48	69,53			Belum dilakukan perhitungan capaian 2025
3	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik" (OPD/LKD)			5	7	9	4	41		
4	Nilai AKIP perangkat daerah (Skor)			67	67,5	70,01	70,10	70,60		
5	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (Skor)			82,5	83	83,5	83,98	83,8		

Pada tahun pertama dalam RPD 2024-2026 yaitu tahun 2024 target Pembangunan Literasi dan Tingkat Kegemaran Membaca yang ditetapkan sebagai indikator kinerja pada bidang perpustakaan. Capaian realisasi dapat dilihat melebihi target yaitu 78,34 Indeks pada IPLM dan 69,53 Skor pada TGM. Pada urusan kearsipan, Jumlah Perangkat Daerah dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan kategori "Baik" yang ditetapkan didalam target sebanyak 5 OPD/LKD dan capaian sebanyak 4 OPD/LKD atau sebesar 80%. Untuk indikator Kepuasan Masyarakat memiliki target 82,5 Skor dengan realisasi 83,98 Skor.

Secara umum fungsi pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berada kategori baik atau memuaskan, hal tersebut seperti yang tertuang di dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 dengan nilai pada semester I sebesar 82,04% dan pada semester ke II sebesar 82,08% dengan nilai rata-rata untuk tahun 2024 adalah 82,06%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, ditemui beberapa faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Faktor pendorong dan penghambat dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong
 - a. Selain membuka layanan onsite Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim juga melakukan layanan lainnya, seperti:
 - Layanan Ekstensi (Perpustakaan Keliling) pada Dinas Sosial, UPTD. Panti Sosial, LAPAS.
 - Layanan Online seperti penggunaan e-Library yang telah dimiliki yaitu iKaltim, dpk.kaltimprov.go.id, pustakaborneo.id.
 - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim masih terus berupaya mendampingi Perangkat Daerah/LKD dengan melakukan kegiatan pembinaan dan advokasi mengenai pengelolaan kearsipan untuk mewujudkan Sadar dan Tertib Arsip di Kalimantan Timur. Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang penyelenggaraan kearsipan menekankan pada pasal 9 ayat 3 pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip baik Perangkat Daerah (OPD) maupun Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).
2. Faktor Penghambat
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim telah melakukan audit internal kearsipan kepada 6 OPD, dari hasil audit tersebut yang mendapat nilai "B" sebanyak 3 OPD dan audit eksternal kearsipan kepada 10 LKD, hasil audit tersebut yang mendapat nilai "B" sebanyak 6 LKD, hal tersebut dikarenakan beberapa elemen faktor penilaian tidak memenuhi angka minimal, seperti masih kurangnya pemahaman peraturan perundang-undangan tentang kearsipan, khususnya pengelolaan kearsipan pada tingkat Unit Pengolah dan Unit Kearsipan, kurangnya sarana dan prasarana

kearsipan yang sesuai dengan standar kearsipan, dan kurangnya sumber daya manusia kearsipan dalam hal ini jumlah arsiparis berdasarkan analisis beban kerja.

- b. Belum adanya mekanisme pemberian Reward dan Punishment atas kinerja pejabat pelaksana kegiatan di masing-masing bidang.
- c. Rendahnya kesadaran para penerima manfaat atau pengguna layanan dalam mengisi survei kepuasan masyarakat.
- d. Aparatur yang memberikan pelayanan belum sepenuhnya mengarahkan agar para tamu mengisi lembar SKM.

Sarana prasarana berupa mebel yang dalam kondisi rusak karena terdampak banjir yang kerap terjadi di dalam ruangan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- A. Belum optimalnya budaya baca, akses perpustakaan dan dimensi informasi serta pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno.
- B. Belum optimalnya sumberdaya manusia di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- C. Belum optimalnya kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota.
- D. Kuantitas dan kualitas koleksi masih rendah.
- E. Belum optimalnya upaya pengembangan koleksi deposit.
- F. Jumlah Perpustakaan yang perlu dibina sangat banyak dan menyebar secara tidak merata di Kalimantan Timur.
- G. Perpustakaan dan Kearsipan Umum Kab/Kota yang telah ada selama ini dan diharapkan dapat menjadi mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan pembinaan belum berfungsi secara baik. Disamping itu Kab/Kota pemekaran belum memiliki Kantor/instansi Perpustakaan dan Kearsipan.

- H. Kegiatan monev pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum ditindak lanjuti dengan baik oleh instansi terkait.
- I. Kepedulian Lembaga Pemerintah/Swasta untuk mendirikan perpustakaan dan kesadaran tentang penataan kearsipan masih rendah.
- J. Perlunya dukungan Pemerintah daerah dalam peningkatan jam layanan perpustakaan.
- K. Penempatan SDM kearsipan yang belum optimal.
- L. Tidak semua kepala perangkat daerah memahami peran strategis arsip dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
- M. Perlunya revitalisasi sarana dan prasarana utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja.

3. Tantangan dan Peluang

Pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur merupakan implikasi dari analisa terhadap Renstra Provinsi, serta hasil telaahan terhadap tantangan dan peluang yang ada untuk pengembangan pelayanan

Tantangan bagi pengembangan pelayanan, adalah:

- Tuntutan pelayanan kepada masyarakat secara profesional;
- Pesatnya kemajuan teknologi informasi untuk mengembangkan koleksi dan pelayanan dari format konvensional ke format digital;
- Dorongan dan dukungan dari pihak-pihak yang bergerak untuk mengembangkan literasi dan kearsipan;
- Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) menimbulkan konsekuensi untuk menyelamatkan arsip-arsip lembaga, instansi yang digabung/dibubarkan.

Sedangkan peluang bagi pengembangan pelayanan, adalah:

- Kewenangan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah sebagai Pembina dan pengelola arsip statis;
- Perpustakaan menjadi pusat pemanfaatan dan pembelajaran masyarakat;
- Sistem Informasi Kearsipan dan Perpustakaan yang dikembangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Penguatan jaringan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, ANRI maupun Perpustnas

Capaian indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ditinjau dari dua aspek yaitu menyangkut evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja. Capaian kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja.

Tabel 2.10
Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mengembangkan dan membudayakan minat baca masyarakat Kalimantan Timur	Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mengakses Layanan Perpustakaan (<i>Online</i> dan <i>Onsite</i>)	209.500 Pemustaka	Program Pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Standar	Jumlah Perangkat Daerah dan LKD yang Menyelenggarakan Kearsipan Sesuai Standar	5 OPD/LKD	Program Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 3. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
					Program Perlindungan dan	1. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang

No	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Penyelamatan Arsip	digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota
3.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan prima perangkat daerah	96 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan dan kegiatan program pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 (tiga) sasaran. Dilihat dari tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian kinerja dan indikator kinerja yang merupakan ukuran pencapaian sasaran tersebut.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, dan juga berdasarkan

Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Aldur RKPD tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

No	Rancangan Aldur RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					34.487.708.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				34.487.708.000	
					31.320.553.712	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				31.320.553.712	
				84,5 Indeks	31.320.553.705	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84,5 Indeks	31.320.553.705	
				92 %				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Didindak lanjuti	92 %		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akumulatif Kinerja PD	17 Dokumen	203.886.525	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan sepat waktu	17 Dokumen	203.886.525	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	103.295.004	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	103.295.004	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.434.545	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.434.545	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	49.962.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	49.962.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelaksanaan Tugas penyusunan keuangan	12 Bulan	27.566.377.699	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelaksanaan tugas penyusunan keuangan	12 Bulan	27.566.377.699	

No	Rancangan Abstrak RAPD					Hasil Analisis Ketuntasan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Induk (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	27.207.432.158	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	27.207.432.158	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	222.120.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	222.120.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	50.400.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	50.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	48.648.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	48.648.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	37.577.541	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	37.577.541	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	36.082.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	36.082.000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	36.082.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	36.082.000	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	162.726.909	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	162.726.909	

No	Rancangan GABRI RMPD					Hasil Analisis Kelestarian					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pengadaan Paketan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Paketan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	112.729.448	Pengadaan Paketan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Paketan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	112.729.448	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	25.179.461	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.179.461	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	34.811.006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	34.811.006	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemaksimalan Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	738.783.421	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemaksimalan Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	738.474.036	
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	29.699.412	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	29.699.412	
	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	148.674.163	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	148.674.163	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	12.923.476	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 Paket	12.923.476	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	24.678.345	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	24.678.345	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	50.923.240	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	50.923.240	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	394.575.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	394.575.400	

No	Rancangan dalam RKPD					Hasil Analisis Kebijakan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	75.000.000	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	75.000.000	
6.	Penyediaan Jasa Pemungut Unsur Pemerintahan Daerah		Penyediaan dan Pelaksanaan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang Perangkat daerah	12 Bulan	2.272.904.811	Penyediaan Jasa Pemungut Unsur Pemerintahan Daerah		Penyediaan dan Pelaksanaan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang Perangkat daerah	12 Bulan	2.272.904.811	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17.685.214	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17.685.214	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	957.905.397	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	957.905.397	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1.296.000.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1.296.000.000.000	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	12 Bulan	542.363.540	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	12 Bulan	542.363.540	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 Unit	300.214.340	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 Unit	300.214.340	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	145.556.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	145.556.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Keluaran				Catatan Penting
	Program/ Registan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Registan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/ yang Diperbaiki/ Dikerahabatkan	20 Unit	99.946.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/ yang Diperbaiki/ Dikerahabatkan	20 Unit	92.480.000
	PROGRAM PEMBIAYAAN PERPUSTAKAAN		Nilai Kegiatan Membaca Masyarakat (TGM)	71,5 Skor	1.758.002.007	PROGRAM PEMBIAYAAN PERPUSTAKAAN		Nilai Kegiatan Membaca Masyarakat (TGM)	71 Skor	1.758.002.007
A.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai dengan SGP	30 Perpustakaan	1.308.002.007	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai dengan SGP	35 Perpustakaan	1.308.002.007
			Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan offline	71.000 Orang				Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan offline	71.000 Orang	
			Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang Dikembangkan dan Dikerahabatkan	600 Eksemplar				Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang Dikembangkan dan Dikerahabatkan	600 Eksemplar	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kawasannya	10 Perpustakaan	200.000.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kawasannya	10 Perpustakaan	200.000.000
	Pengembangan Kethaasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang dikembangkan	300 Eksemplar	108.000.000	Pengembangan Kethaasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang dikembangkan	300 Eksemplar	108.000.000
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Daerah Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah tenaga perpustakaan yang dikembangkan kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah tenaga perpustakaan yang dikembangkan kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	100.000.000

Rancangan Abstrak RP/PO					Hasil Analisis Komunitas					Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Kota Samarinda, Semud Kecamatan, Semud Ke/Desa	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dibebankan	2 Perpustakaan	50.000.000	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Kota Samarinda, Semud Kecamatan, Semud Ke/Desa	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dibebankan	2 Perpustakaan	50.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Samarinda, Semud Kecamatan, Semud Ke/Desa	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dibebankan untuk Menwujudkan Ketersediaan Koleksi Perpustakaan	718 Eksemplar	350.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Samarinda, Semud Kecamatan, Semud Ke/Desa	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dibebankan untuk Menwujudkan Ketersediaan Koleksi Perpustakaan	718 Eksemplar	350.000.000	
	Pemeriksaan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Semud Kota/Kota, Semud Kecamatan, Semud Kelurahan	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang diambilkan oleh masyarakat	1 Dokumen	200.017.435	Pemeriksaan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Semud Kota/Kota, Semud Kecamatan, Semud Kelurahan	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang diambilkan oleh masyarakat	1 Dokumen	200.017.435	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Samarinda, Semud Kecamatan, Semud Ke/Desa	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO 20000 (ITSM : Information Technology Service	3 Perpustakaan	199.984.434	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Samarinda, Semud Kecamatan, Semud Ke/Desa	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	199.984.434	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kota Samarinda, Semud Kecamatan, Semud Ke/Desa	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	1 Dokumen	50.000.138	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kota Samarinda, Semud Kecamatan, Semud Ke/Desa	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	1 Dokumen	50.000.138	
9.	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Kota Samarinda, Semud Kecamatan, Semud Ke/Desa	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	10 Perpustakaan	50.000.000	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Kota Samarinda, Semud Kecamatan, Semud Ke/Desa	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	10 Perpustakaan	50.000.000	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		Penyelebaran Desakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	3 Kegiatan	450.000.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		Penyelebaran Desakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	3 Kegiatan	450.000.000	

No	Rancangan dasar BKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegiatannya Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Lokasi	90.000.000,00 (Rp.000)	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegiatannya Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Lokasi
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kawasan di Daerah Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kawasan di Daerah Provinsi	0	15.000.000,00 (Rp.000)	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kawasan di Daerah Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kawasan di Daerah Provinsi	1
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	8 Orang	275.000.000 (Rp.000)	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	8 Orang
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	2	70.000.000 (Rp.000)	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	2
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASAKAH KUNDO		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang digital	100 %	42.800.000 (Rp.000)	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASAKAH KUNDO		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang digital	80 %
10.	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Bekas Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		Jumlah Karya Cetak dan Karya Bekas Koleksi Daerah di Daerah Provinsi yang digital	600 Eksemplar	21.800.000 (Rp.000)	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Bekas Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		Jumlah Karya Cetak dan Karya Bekas Koleksi Daerah di Daerah Provinsi yang digital	600 Eksemplar
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Bekas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koleksi KCR yang Dihimpun dan Dikembalikan Serta Kapasitas Serah Simpan KCR	600 Eksemplar	21.000.000 (Rp.000)	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Bekas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koleksi KCR yang Dihimpun dan Dikembalikan Serta Kapasitas Serah Simpan KCR	600 Eksemplar
11.	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi		Jumlah Naskah Kuno yang digital	8 Eksemplar	21.800.000 (Rp.000)	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi		Jumlah Naskah Kuno yang digital	8 Eksemplar

No	Rancangan Akhir RPMD					Hasil Analisis Keluarahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat untuk Diarsipkan dan Didayagunakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengalihan, pengalihan untuk diarsipkan dan didayagunakan	16 Desember	21.000.000	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat untuk Diarsipkan dan Didayagunakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengalihan, pengalihan untuk diarsipkan dan didayagunakan	16 Desember	21.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.167.154.260	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.167.154.260	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			73 Indeks	937.379.260	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	75,25 Indeks	937.379.260	
12.	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	85 %	363.794.701	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	85 %	363.794.701	
	Pencapaian dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	300 Arsip	13.794.701	Pencapaian dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	300 Arsip	13.794.701	
	Pemilihan Arsipars Terpadu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah arsipars yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang dilakukan untuk pemilihan arsipars terpadu	25 Orang	50.000.000	Pemilihan Arsipars Terpadu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah arsipars yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang dilakukan untuk pemilihan arsipars terpadu	25 Orang	50.000.000	
	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	10 Laporan	50.000.000,00	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	10 Laporan	50.000.000	
	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	39 Lembaga	250.000.000	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	39 Lembaga	250.000.000	
13.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		Peningkatan Ketersediaan Arsip Statis Provinsi	300 Arsip	248.589.796	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		Peningkatan Ketersediaan Arsip Statis Provinsi	300 Arsip	248.589.796	
	Audisi Arsip Statis	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Audisi	350 Arsip	248.589.796	Audisi Arsip Statis	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Audisi	350 Arsip	248.589.796	

No	Rancangan Aksi RPMD					Hasil Analisis Keluarahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
14.	Pengelolaan Simpel Jaringan dalam Sistem Informasi Keasipian Nasional Tingkat Provinsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Presentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIMN	17 %	324.994.389	Pengelolaan Simpel Jaringan dalam Sistem Informasi Keasipian Nasional Tingkat Provinsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Presentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIMN	17 %	324.994.389	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Keasipian Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKM	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Keasipian Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKM	1.130 Pembaruan	149.956.369	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Keasipian Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKM	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Keasipian Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKM	500 Pengguna	149.956.369	
	Pembudayaan Kapasitas Unit Keasipian dan Lembaga Keasipian Daerah Provinsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Keasipian dan Lembaga Keasipian Daerah Provinsi	2 Laporan	175.000.000	Pembudayaan Kapasitas Unit Keasipian dan Lembaga Keasipian Daerah Provinsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Keasipian dan Lembaga Keasipian Daerah Provinsi	10 Laporan	175.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PERPELAYATAN ARSIP					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PERPELAYATAN ARSIP					
			Presentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	78 %	219.773.402			Presentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	78 %	219.766.413	
15.	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peningkatan penyusutan arsip berdasarkan jadwal Retensi Arsip	550 Berkas	55.784.679	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peningkatan penyusutan arsip berdasarkan jadwal Retensi Arsip	900 Arsip	55.784.679	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	300 Arsip	37.500.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	300 Arsip	37.500.000	
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	220 Berkas	18.284.679	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	220 Berkas	18.284.679	
16.	Audit/Checklist Arsip Statis dan Arsip Hasil Aktivitas Media yang Diaklasi oleh Lembaga Keasipian Provinsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaksanaan Pemeriksaan Arsip Statis dan Aktivitas Media	5 Kegiatan	69.950.353	Audit/Checklist Arsip Statis dan Arsip Hasil Aktivitas Media yang Diaklasi oleh Lembaga Keasipian Provinsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaksanaan Pemeriksaan Arsip Statis dan Aktivitas Media	5 Kegiatan	69.950.353	

No	Rancangan Aksi RPJPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemilahan dan Penetapan Autentikasi Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Autentikasi Arsip yang Dimisi dan Dietapan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip	34.036.544	Pemilahan dan Penetapan Autentikasi Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Autentikasi Arsip yang Dimisi dan Dietapan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip	34.074.111	
	Pemilahan dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	50 Arsip	34.990.882	Pemilahan dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	50 Arsip	34.976.842	
17.	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dilengkapi oleh Lembaga Keaslian Provinsi yang Sesuai NSPK	1 Laporan	104.000.842	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dilengkapi oleh Lembaga Keaslian Provinsi yang Sesuai NSPK	1 Laporan	104.036.781	
	Pemilahan dan Penetapan Autentikasi Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Autentikasi Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	5 Arsip	34.021.517	Pemilahan dan Penetapan Autentikasi Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Autentikasi Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	5 Arsip	34.036.454	
	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Semua Kota/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	5 Arsip	34.994.325	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Semua Kota/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	5 Arsip	34.996.327	
	Pemilahan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	34.956.000	Pemilahan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	34.956.000	

Capaian indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang akan dilaksanakan dari dua aspek yaitu menyangkut evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja. Capaian kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja.

Tabel 2.11
Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran
Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Minat Baca dan Budaya Literasi Masyarakat serta Tata Kelola Kearsipan sebagai Bukti Akuntabilitas Kinerja dan Alat Bukti yang Sah	Meningkatnya Budaya Baca dan Kecakapan Literasi Masyarakat Kalimantan Timur	Persentase Peningkatan Literasi Masyarakat Dan Minat Baca Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	7%	Program Pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
					Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi 2. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
		Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan Kalimantan Timur	73 Indeks	Program Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 3. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
			Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	9 OPD/LKD	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1. Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 2. Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi 3. Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang
		Terwujudnya Tata Kelola	Nilai SAKIP	71 Skor	Program Penunjang	1. Perencanaan, Penganggaran, dan

No	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Skor	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mensukseskan pencapaian target sasaran yang tergambar dalam indikator tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim telah mempunyai Program Pembinaan Perpustakaan yang diakomodir didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan rapat koordinasi bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang melibatkan perangkat Daerah, serta Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten/kota. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, setelah adanya Rapat Forum Koordinasi Daerah (RAKORDA) yang mengundang OPD dan Kab/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur menyepakati :

1. Berkomitmen mendukung upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan melalui optimalisasi penerapan regulasi yang relevan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
2. Mendorong pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi, seperti aplikasi literasi digital yang mudah diakses masyarakat, melalui publikasi dan promosi yang masif dan berkelanjutan, serta pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan kebutuhan sosial dan kebutuhan lokal.
3. Memperkuat kemitraan dan kolaborasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat dalam pelaksanaan program literasi.
4. Memperkuat peran perpustakaan sebagai simpul gerakan literasi masyarakat dan pusat pembelajaran sepanjang hayat, serta mengoptimalkan fungsi perpustakaan dan lembaga kearsipan sebagai pusat data dan informasi strategis daerah.
5. Mengoptimalkan pengembangan koleksi deposit di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, termasuk penyediaan ruang khusus konten lokal dan pemanfaatan aplikasi Pustaka Borneo, sekaligus mengimplementasikan konsep Center of Excellence (Pusat Keunggulan Budaya Kalimantan).
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan bacaan yang sesuai dengan karakteristik demografis dan budaya lokal, mendukung upaya penyelamatan naskah kuno dan koleksi langka melalui alih media, serta mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR), dengan dukungan penguatan anggaran untuk penyusunan Katalog Induk Daerah (KID), bibliografi, dan pengelolaan KCKR di kabupaten/kota.

7. Dalam rangka mewujudkan Kalimantan Timur Sukses Menuju Generasi Emas 2045, perlu disusun *roadmap* transformasi perpustakaan dan kearsipan daerah hingga tahun 2045 secara terstruktur dan berkelanjutan.
8. Program dan kegiatan perpustakaan serta kearsipan harus diarahkan secara strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui pemberdayaan potensi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan informasi.
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur perlu mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah, serta mendukung implementasi Indeks Desa (ID) dalam penyelenggaraan perpustakaan desa.
10. Mendorong penguatan sinergi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dalam mewujudkan tata kelola perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
11. Mengharapkan dukungan Perpustakaan Nasional RI dalam bentuk pendanaan melalui dana APBN/dana dekonsentrasi untuk pelaksanaan akreditasi dan re-akreditasi seluruh jenis perpustakaan, serta sertifikasi tenaga pengelola perpustakaan di wilayah Kalimantan Timur.
12. Mendorong keterlibatan aktif Bunda Literasi/Bunda Baca, Duta Baca Daerah, serta pegiat literasi dalam penguatan ekosistem literasi dan pembudayaan kegemaran membaca di seluruh lapisan masyarakat.

13. Mendorong pelaksanaan pelatihan literasi secara masif dan berjenjang kepada pustakawan, pengelola perpustakaan, dan relawan literasi sebagai bagian dari peningkatan kapasitas SDM literasi.
14. Para peserta Rakorda berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan melalui optimalisasi kegiatan akreditasi seluruh jenis perpustakaan dan pelaksanaan sertifikasi pustakawan secara merata di wilayah Kalimantan Timur.
15. Optimalisasi penyusutan arsip pada perangkat daerah sebagai upaya mewujudkan tertib arsip dan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
16. Dalam rangka ketersediaan arsip bernilai sejarah dan memiliki nilai guna tinggi serta bersifat autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Akuisisi Arsip Statis sebagai acuan proses penambahan khazanah arsip statis.
17. Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui pengawasan kearsipan dan pembinaan kearsipan pada perangkat daerah dilingkungannya.
18. Rapat Koordinasi Daerah Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 ditentukan dikemudian oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan RENSTRA Perpustakaan Nasional

Adapun arah kebijakan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter, melalui:
 - a. Pengembangan dan pembinaan perpustakaan melalui akreditasi dan standarisasi semua jenis perpustakaan, modernisasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, penguatan perpustakaan melalui bantuan bahan perpustakaan dan layanan perpustakaan bergerak melalui mobil perpustakaan keliling digital dan motor perpustakaan keliling.
 - b. Implementasi kebijakan dan pengkajian perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi melalui gerakan sosial literasi, penguatan influencer literasi baik duta baca, tokoh masyarakat dan agama serta public figure;
 - c. Peningkatan tenaga perpustakaan dan pegiat literasi yang kompeten sebagai pengelolaan perpustakaan dan pendamping literasi;
 - d. Penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu, dan inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan jejaring nasional perpustakaan.
2. Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara bagi terwujudnya pemajuan kebudayaan untuk memperteguh jati diri bangsa, melalui:

- a. Peningkatan koleksi nasional, deposit dan bibliografi serta pengolahan bahan perpustakaan yang lengkap dan mutakhir;
 - b. Peningkatan pelestarian dan alih media bahan perpustakaan dan naskah nusantara/kuno.
3. Peningkatan tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional RI yang baik dan andal, melalui:
- a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern Perpustakaan Nasional yang andal, efektif dan berintegritas;
 - b. Terwujudnya pelayanan hukum, kemitraan, tata laksana organisasi yang berkualitas;
 - c. Terwujudnya Aparat Sipil Negara dan ketatausahaan Perpustakaan Nasional yang profesional;
 - d. Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam melaksanakan misi tersebut, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah mensinergikan program kegiatan melalui pemberian bantuan/stimulan berupa sarana perpustakaan kepada pemerintah kabupaten/kota, desa/kelurahan, pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pengembangan sumber daya manusia. Program tersebut didukung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan supervisi, monitoring dan stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.

3.1.2 Telaahan RENSTRA Arsip Nasional Republik Indonesia

Misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun meliputi sebagai berikut:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti yang sah;

4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai perauran perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Sasaran jangka menengah adalah:

1. “Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan” dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan. Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) kebijakan kearsipan, (b) kapabilitas penyelenggara kearsipan, (c) pelayanan dan fasilitasi kearsipan, (d) akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.
2. “Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional” dengan indikator Indeks Ketersediaan Arsip. Indeks Ketersediaan Arsip mengukur tingkat ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi: (a) penciptaan dan akuisisi arsip, (b) penataan dan pengolahan arsip, (c) preservasi arsip.
3. “Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima” dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan. Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan tingkat kualitas pelayanan informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip, (b) penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan, (c) pengelolaan data dan informasi kearsipan. Ketiga indeks di atas, yaitu indeks kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan, indeks ketersediaan arsip, dan indeks pelayanan informasi kearsipan untuk

selanjutnya menjadi indeks yang bersifat terpadu dalam pengukuran tingkat kematangan atau kinerja kearsipan K/L/D.

4. “Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat dan daerah.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2024 - 2026
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Mengembangkan minat baca dan budaya literasi Masyarakat Kalimantan Timur serta mewujudkan tata kelola kearsipan yang tertib dan handal	Terwujudnya Budaya Literasi untuk meningkatkan kualitas Masyarakat Kalimantan Timur yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (INDEK)	35	40	45
			Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Skor)	46	47	48
		Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Standar	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	5	7	9
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	67	67,5	70,01
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50	83,00	83,50

Dari tabel di atas dapat dijabarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah berdasarkan Renstra 2024 - 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Mengembangkan minat baca dan budaya literasi Masyarakat Kalimantan Timur serta mewujudkan tata kelola kearsipan yang tertib dan handal, yaitu :

- a. Terwujudnya Budaya Literasi untuk meningkatkan kualitas Masyarakat Kalimantan Timur yang Berdaya Saing
Tolak ukur dalam indikator tujuan yang dipergunakan adalah
 - Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), tujuan indikator tersebut untuk melihat sedemikian sehingga mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan baik dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, pemustaka, dan anggota

perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

- Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) yaitu tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu

Metode perhitungan dengan menggunakan survey dan kajian Sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dengan tolak ukur jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan baik secara onsite atau kunjungan secara langsung maupun secara online melalui layanan e-library maupun web dan media media sosial lainnya Metode perhitungan dengan menggunakan sumber database buku tamu dan statistic.

- b. Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Standar

Dalam urusan kearsipan, indikator yang dipergunakan untuk mencapai tujuan adalah Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah di Kalimantan Timur Yang Menjalankan Standar Penyelenggaraan Kearsipan, dengan tolak ukur Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik". Sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kearsipan Yang Sesuai Standar dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah dan LKD yang Menyelenggarakan Kearsipan Sesuai Standar, tolak ukur yang dipergunakan yaitu jumlah perangkat daerah dan Lembaga kearsipan daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kearsipan dan memperoleh kategori "B".

- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah.

Dalam urusan pelayanan umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan indikator yang akan di capai yaitu Mewujudkan Birokrasi

Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik, terkait Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu instansi pemerintah yang memiliki orientasi pelayanan untuk umum selain dengan stake holder terkait. Sehingga indikator yang dipergunakan yaitu:

- Nilai AKIP perangkat daerah
- Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, melalui pembangunan Perpustakaan dan kearsipan yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Gubernur. Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara Pembuat Kebijakan, Pengawasan (Auditor), pelaksanaan (Operator) dan Masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian atau Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/Renstra). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Gubernur dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Gubernur. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPD 2024-2026. Hal ini berarti, secara tidak

langsung juga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Minat Baca dan Budaya Literasi Masyarakat serta Tata Kelola Kearsipan sebagai Bukti Akuntabilitas Kinerja dan Alat Bukti yang Sah	Meningkatnya Budaya Baca dan Kecakapan Literasi Masyarakat Kalimantan Timur
	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diamanatkan bahwa perpustakaan adalah sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung pendidikan nasional, perpustakaan berperan untuk mencetak manusia yang beriman serta sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, memiliki daya saing dan mampu memberikan kontribusinya dalam pembangunan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Beberapa arah kebijakan berikut ini akan menjadi acuan dan pertimbangan dalam upaya melaksanakan misi, tujuan dan sasaran di lingkup tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Melakukan supervisi dan pembinaan perpustakaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)
2. Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)
3. Meningkatkan Minat dan Budaya Gemar Membaca Masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan
4. Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan serta memfasilitasi pengembangan koleksi semua jenis perpustakaan
5. Mengembangkan Layanan Perpustakaan Berbasis Digital dalam rangka pemerataan layanan perpustakaan
6. Meningkatkan kualitas dan kapasitas perpustakaan yang ditandai oleh meningkatnya budaya baca, standar mutu perpustakaan dan kompetensi SDM di semua jenis perpustakaan
7. Penyelamatan kandungan fisik dan kandungan informasi karya tulis, cetak dan rekam terbitan daerah dan nusantara
8. Mengembangkan Kekhasan Koleksi Daerah/Konten Lokal Kaltim
9. Pembudayaan Gemar Membaca dan peningkatan literasi masyarakat

10. Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi, meliputi:
 - a. Menyusun peraturan/pedoman sistem kearsipan
 - b. Mengembangkan ke arah sistem administrasi kearsipan digital
 - c. Optimalisasi pelatihan-pelatihan SDM kearsipan baik pejabat fungsional arsiparis maupun pengelola arsip
11. Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip bernilai guna meliputi:
 - a. Akuisisi arsip statis baik di instansi Pemerintah, BUMN/D, Orsospol/Ormas, Swasta maupun Perorangan
 - b. Meningkatkan preservasi dan alih media arsip statis
 - c. Mengelola dan merawat arsip statis maupun inaktif
12. Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi, seperti:
 - a. Pameran arsip
 - b. Promosi jasa kearsipan
 - c. Penerbitan naskah sumber dan bulletin kearsipan
 - d. Pelayanan informasi arsip
13. Menyelenggarakan tugas pelayanan dengan melakukan optimalisasi SDM dan pelayanan publik
14. Pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional melalui aplikasi SRIKANDI
15. Penyelamatan Arsip OPD yang digabung/dibubarkan serta pemekaran kab/kota

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada berusaha memenuhi visi dan misi melalui program kerja yang berdasarkan pada Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur.

Pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 mencapai kesepakatan bersama yang disampaikan dalam pembahasan urusan perpustakaan dan kearsipan dimana terdapat penyesuaian 2 (dua) indikator outcome Bidang Perpustakaan yang telah disepakati Bersama. Indikator outcome yang pertama yaitu Indeks pembangunan literasi masyarakat dengan satuan Indeks dengan target nasional untuk tahun 2026 adalah 73,6 dan target daerah yaitu 70,5 dan Indikator outcome kedua yaitu Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dengan satuan Nilai, dengan target nasional adalah 75,4 dan target daerah adalah 71,5.

Kemudian pada Sub Kegiatan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat pada Program Pembinaan Perpustakaan diakomodir pada Ranwal Renja (Rancangan Awal Rencana Kerja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Pada Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno telah di akomodir 2 (dua) Sub Kegiatan yang di akomodir yaitu Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; dan Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan.

Pada pembahasan urusan kearsipan ditetapkan 1 (satu) indikator outcome yaitu Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintah Daerah dan penyesuaian target 2 (dua) Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Arsip yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Provinsi disepakati dengan target 44 Lembaga. Sub Kegiatan kedua juga pada Program Pengelolaan Arsip yaitu Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan

Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN dengan target yang disepakati adalah 1.000 Pengguna.

3.3.1 Program dan Kegiatan Indikatif Tahun 2026

1. Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai berikut:

- a. Kebutuhan Pemustaka dan Pencipta Arsip, Memahami kebutuhan informasi pengguna perpustakaan dan jenis arsip yang dihasilkan oleh instansi untuk merancang layanan yang relevan dan tepat guna;
- b. Perkembangan Teknologi, Mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan arsip dan layanan perpustakaan;
- c. Menurunnya kebiasaan membaca dan kesadaran untuk tertib arsip di masyarakat;
- d. Kebijakan Pemerintah, Menyelaraskan program dengan kebijakan nasional dan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan program.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagaimana diakomodir di dalam RENSTRA terlampir dan tertuang di dalam RKPD terdiri dari empat (4) Program, tujuh belas (17) Kegiatan, dan lima puluh enam (56) Sub Kegiatan.

3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat beberapa pemuktahiran nomenklatur sehingga menyebabkan adanya beberapa penyesuaian pada nomenklatur sub kegiatan.

Program sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, akan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pembinaan Perpustakaan, akan dilaksanakan melalui kegiatan :

A. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi

- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
- Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
- Pengembangan Perpustakaan Deposit
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat

- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi
- B. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno, akan dilaksanakan melalui kegiatan :
- A. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
- Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
- B. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
- Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
4. Program Pengelolaan Arsip, akan dilaksanakan melalui kegiatan :
- A. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
- Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis
 - Pemilihan Arsiparis Teladan
 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi
 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi
- B. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
- Akuisisi Arsip Statis

- C. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
- 5. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, akan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - A. Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun
 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
 - B. Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi
 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
 - C. Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang
 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang
 - Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang
 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada rincian tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	9	10
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					43.728.032.012
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					42.037.282.012
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		84,5 Indeks	85 Indeks	35.868.282.012
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindak lanjuti		92 %	93 %	
2 23 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu		17 Dokumen	17 Dokumen	350.000.000
2 23 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000
2 23 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan	100.000.000
2 23 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000
2 23 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan fungsi penatausahaan keuangan		12 Bulan	12 Bulan	29.773.196.425
2 23 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108 Orang/Bulan	108 Orang/Bulan	29.384.026.730

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 23 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	239.889.600
2 23 01 1.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	54.432.000
2 23 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	53.512.800
2 23 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	41.335.295
2 23 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah		12 Bulan	12 Bulan	100.000.000
2 23 01 1.03 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000
2 23 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	178.970.999
2 23 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	1 Paket	124.002.392
2 23 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3 Dokumen	27.697.407
2 23 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	20 Orang	27.271.200
2 23 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pelayanan Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	815.161.762

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 23 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	5 Paket	32.669.353
2 23 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	5 Paket	163.541.579
2 23 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	20 Paket	14.215.823
2 23 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	10 Paket	27.136.703
2 23 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	7 Dokumen	57.005.564
2 23 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	435.592.740
2 23 1 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	3 Dokumen	85.000.000
2 23 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan dan Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah		12 Bulan	12 Bulan	2.723.966.476
2 23 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2 Laporan	20.000.000
2 23 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	1.148.766.476
2 23 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	1.555.200.000
2 23 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor		12 Bulan	12 Bulan	1.926.986.350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 23 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzinannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Unit	33 Unit	350.000.000
2 23 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	2 Unit	1.300.000.000
2 23 01 1.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	50 Unit	276.986.350
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)		71 Skor	71,5 Skor	6.123.000.000
2 23 02 1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP		15 Perpustakaan	20 Perpustakaan	4.425.000.000
		Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite		71.000 Orang	74.000 Orang	
		Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan		600 Eksemplar	625 Eksemplar	
2 23 02 1.01 0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Perpustakaan	15 Perpustakaan	400.000.000
2 23 02 1.01 0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Eksemplar	350 Eksemplar	125.000.000
2 23 02 1.01 0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	65 Orang	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 23 02 1.01 0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	50.000.000
2 23 02 1.01 0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	718 Eksemplar	5.000 Eksemplar	1.550.000.000
2 23 02 1.01 0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000
2 23 02 1.01 0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	600.000.000
2 23 02 1.01 0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000
2 23 02 1.01 0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Perpustakaan	15 Perpustakaan	100.000.000
2 23 02 1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif		3 Kegiatan	12 Kegiatan	1.698.000.000
2 23 02 1.02 0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokasi Pembudayaan Kogemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Lokasi	7 Lokasi	370.000.000
2 23 02 1.02 0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Perpustakaan	3 Perpustakaan	375.000.000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	23	02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Orang	375.000.000
2	23	02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Perpustakaan	578.000.000
2	23	03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki		80 %	46.000.000
2	23	03	1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi yang dilestarikan		600 Eksemplar	25.000.000
2	23	03	1.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Eksemplar	25.000.000
2	23	03	1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan		8 Eksemplar	21.000.000
2	23	03	1.03	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Eksemplar	21.000.000
2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.690.750.000
2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja		72,25 Indeks	1.373.750.000
2	24	02	1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib		85 %	690.000.000
2	24	02	1.01	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Arsip	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 24 02 1.01 0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	27 Orang	150.000.000
2 24 02 1.01 0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	17 Laporan	75.000.000
2 24 02 1.01 0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39 Lembaga	40 Lembaga	450.000.000
2 24 02 1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Peningkatan Khasanah Arsip Statis Provinsi		300 Arsip	300 Arsip	300.000.000
2 24 02 1.02 0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Arsip	300 Arsip	300.000.000
2 24 02 1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN		17 %	20 %	383.750.000
2 24 02 1.03 0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Pengguna	550 Pengguna	165.000.000
2 24 02 1.03 0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	17 Laporan	218.750.000
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		78 %	79 %	317.000.000
2 24 03 1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Peningkatan penyusutan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip		300 Arsip	320 Arsip	67.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Dana/ Pagu Indikatif
2 24 03 1.01 0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220 Berkas	225 Berkas	25.000.000
2 24 03 1.01 0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Arsip	320 Arsip	42.000.000
2 24 03 1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Pelaksanaan Penilaian Arsip Statis dan alih media		5 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000
2 24 03 1.04 0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Arsip	105 Arsip	50.000.000
2 24 03 1.04 0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Arsip	55 Arsip	50.000.000
2 24 03 1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi yang Sesuai NSPK		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000
2 24 03 1.05 0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Arsip	5 Arsip	50.000.000
2 24 03 1.05 0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Arsip	5 Arsip	50.000.000
2 24 03 1.05 0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Arsip	5 Arsip	50.000.000

Sebagai SKPD pendukung program prioritas daerah, Dinas Perpustakaan dan kearsipan Prov. Kaltim merumuskan kegiatan prioritas guna memastikan keterpaduan dan kesinergian dalam pencapaian target meningkatnya kegemaran membaca dan tertib arsip di Kalimantan Timur. 6 Kegiatan prioritas merupakan unsur target IPLM dan TGM serta pengelolaan arsip, dituangkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Major Project Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Timur

NO	KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PAGU
MAJOR PROJECT PERANGKAT DAERAH				
1	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	718	Eksemplar	350.000.000
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi (Peningkatan IPLM dan TGM melalui Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca)	9	Orang	217.730.000
3	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi melalui Akreditasi Perpustakaan di Kab/Kota	10	Perpustakaan	200.000.000
4	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat untuk pemberian stimulan bagi pembaca ebook terakril	1	Dokumen	200.017.435
5	Penyeleksiaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Keewenangan Provinsi	38	Lembaga	250.000.000
6	Pengelolaan Arsip Statis Daerah melalui Akuisisi Arsip Statis	300	Arsip	248.589.796
TOTAL				1.406.337.231

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2026 berisi program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dari tujuan penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menentukan prioritas dan acuan anggaran dalam mencapai visi dan misi Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan di Kalimantan Timur. Dengan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit diharapkan peranan pemerintah dalam hal dukungan pendanaan guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel T-C33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

Rencana program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti yang dijabarkan di atas dapat pula dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			34.487.708.000
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			33.320.562.327
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84,5 Indeks	31.520.560.320
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindak lanjuti	92%	
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	17 Dokumen	203.860.525
2	23	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	103.295.004
2	23	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.434.545
2	23	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50.130.976
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan fungsi penatausahaan keuangan	12 Bulan	27.566.177.699
2	23	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/Bulan	27.207.432.158
2	23	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	222.120.000
2	23	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	1 Dokumen	50.400.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6
						Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
2	23	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	48.648.000
2	23	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	37.577.541
2	23	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	36.082.000
2	23	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	36.082.000
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	162.720.909
2	23	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	112.729.448
2	23	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.179.461
2	23	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	24.812.000
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	736.474.036
2	23	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	29.699.412
2	23	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	148.674.163

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6
2	23	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	12.923.476
2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	24.678.345
2	23	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.923.240
2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	394.575.400
2	23	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	75.000.000
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan dan Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	12 Bulan	2.272.994.611
2	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17.639.214
2	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	957.305.397
2	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.298.050.000
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	12 Bulan	542.250.540
2	23	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	300.214.540
2	23	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.556.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6
2	23	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	92.480.000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	71 Skor	1.758.002.007
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP	15 Perpustakaan	1.308.002.007
						Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara Online dan Onsite	71.000 Orang	
						Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	600 Eksemplar	
2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	10 Perpustakaan	200.000.000
2	23	02	1.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang dikembangkan	300 Eksemplar	108.000.000
2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	100.000.000
2	23	02	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	50.000.000
2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	718 Eksemplar	350.000.000
2	23	02	1.01	0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang	1 Dokumen	200.017.435

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6
						dimanfaatkan oleh masyarakat		
2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	3 Perpustakaan	199.984.434
2	3	02	1.01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	50.000.138
2	3	02	1.01	0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	10 Perpustakaan	50.000.000
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	3 Kegiatan	450.000.000
2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Lokus	90.000.000
2	23	02	1.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1 Perpustakaan	72.270.000
2	23	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	9 Orang	217.730.000
2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	70.000.000
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	80%	42.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi yang dilestarikan	600 Eksemplar	21.000.000
2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	600 Eksemplar	21.000.000
2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	8 Eksemplar	21.000.000
2	23	03	1.03	0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	16 Eksemplar	21.000.000
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			1.167.145.673
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	75,25 Indeks	937.379.260
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	85%	363.794.701
2	24	02	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	300 Arsip	13.794.701
2	24	02	1.01	0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	25 Orang	50.000.000
2	24	02	1.01	0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	10 Laporan	50.000.000
2	24	02	1.01	0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	39 Lembaga	250.000.000
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Peningkatan Khasanah Arsip Statis Provinsi	300 Arsip	248.589.796
2	24	02	1.02	0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	300 Arsip	248.589.796
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	17%	324.994.763

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6
2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	500 Pengguna	149.994.763
2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10 Laporan	175.000.000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	78%	229.766.413
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Peningkatan penyusutan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	300 Arsip	55.784.679
2	24	03	1.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	220 Berkas	18.284.679
2	24	03	1.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	300 Arsip	37.500.000
2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Pelaksanaan Penilaian Arsip Statis dan alih media	5 Kegiatan	69.950.953
2	24	03	1.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip	34.974.111
2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	50 Arsip	34.976.842
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi yang Sesuai NSPK	1 Laporan	104.030.781

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6
2	24	03	1.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	5 Arsip	34.036.454
2	24	03	1.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	5 Arsip	34.998.327
2	24	03	1.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	34.996.000

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur yaitu penyelenggaraan fungsi perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat maupun stakeholder terkait. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur tidak secara langsung mendukung Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur berperan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maupun stakeholder terkait yang mendayagunakan layanan perpustakaan maupun kearsipan yang dituangkan dokumen Rencana Pemerintah Daerah (RPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program kegiatan yang mendukung proiritas pembangunan daerah dituangkan ke dalam urusan perpustakaan dan urusan kearsipan dengan

rincian tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai dan ditetapkan pada setiap tahunnya adalah sebagai berikut.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan Minat Baca dan Budaya Literasi Masyarakat serta Tata Kelola Kearsipan sebagai Bukti Akuntabilitas Kinerja dan Alat Bukti yang Sah	Meningkatnya Budaya Baca dan Kecakapan Literasi Masyarakat Kalimantan Timur	Persentase Peningkatan Literasi Masyarakat Dan Minat Baca (%)	7	7,25	7,75	8	8,25
		Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan Kalimantan Timur (Indeks)	73	74	75	76	77
			Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik" (OPD/LKD)	9	11	13	15	17
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP (Skor)	71	71,5	72	72,5	73
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	80	83	86	89	91

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RPD dan RKPD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal-RENJA) Tahun 2026 yang telah disusun diharapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dan pedoman dalam Penyusunan RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan berguna dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan tahun 2026 yang konsisten

dan berkomitmen serta mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran yang dibutuhkan.

Adanya Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal-RENJA) Tahun 2026 ini diharapkan pula agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Demikian penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal-RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang memuat penjabaran Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan pada tahun mendatang.

RENJA TAHUN 2026 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembangunan daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, merupakan pendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, dasar perencanaan pembangunan nasional agar terjadi sinkronisasi, integrasi dan keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sinkronisasi, integrasi dan keselarasan tersebut diwujudkan melalui perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, matang, relevan dan konsisten pada masing-masing jenjang agar hasil akhir pembangunan dapat terwujud secara efektif dan efisien sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Dalam perekonomian nasional, penyediaan lapangan kerja, penerimaan ekspor dan penerimaan pajak. Dalam perkembangannya, subsektor ini tidak terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global. Perubahan strategis nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan kelautan dan perikanan harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan.

8 (delapan) ASTA CITA pembangunan nasional yang wajib dilaksanakan untuk pengembangan subsektor kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung perwujudan: **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: (1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kamritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan (2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri,

pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedaulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Kelautan dan Perikanan dan Indeks Biru Ekonomi Indoensia (IBEI). Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam daerah.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program subsektor kelautan dan perikanan agar mampu eksis dan unggul dalam menghadapi perubahan ekonomi global, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya melaksanakan perubahan secara berkelanjutan menuju arah perbaikan positif dengan berbagai program kegiatan yang bersolusi, aplikatif, inovatif dan ramah lingkungan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Organisasi Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Akhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya berpedoman berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2030 yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini

menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2026. RKT OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Timur adalah Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan yang berdasarkan akan penerapan konsep Blue Ekonomi sebagai penerjemahan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dimana selaras dengan Visi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yaitu : **“KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS”**. Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai satu diantara upaya penting guna mewujudkan transformasi ekonomi sub sektor Kelautan dan Perikanan, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

- (1) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM;
- (2) Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan;
- (3) Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif;
- (4) Pemerataan Pembangunan Wilayah;
- (5) Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi;
- (6) Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN;
- (7) Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK;
- (8) Kemandirian Pangan;
- (9) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan menindaklanjuti perwujudan visi dan misi tersebut sebagaimana terdapat dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2030.

Adapun Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 2025-2030 yang menjadi perwujudan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai visi adalah :

Misi 2 : Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah.

Langkah-langkah yang diambil dalam penjabaran pelaksanaan Misi Kedua

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan “**Tujuan Renstra**” untuk pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan dengan mengambil sasaran pelaksanaan yang menjadi kewenangannya dalam RPJMD tahun 2019-2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

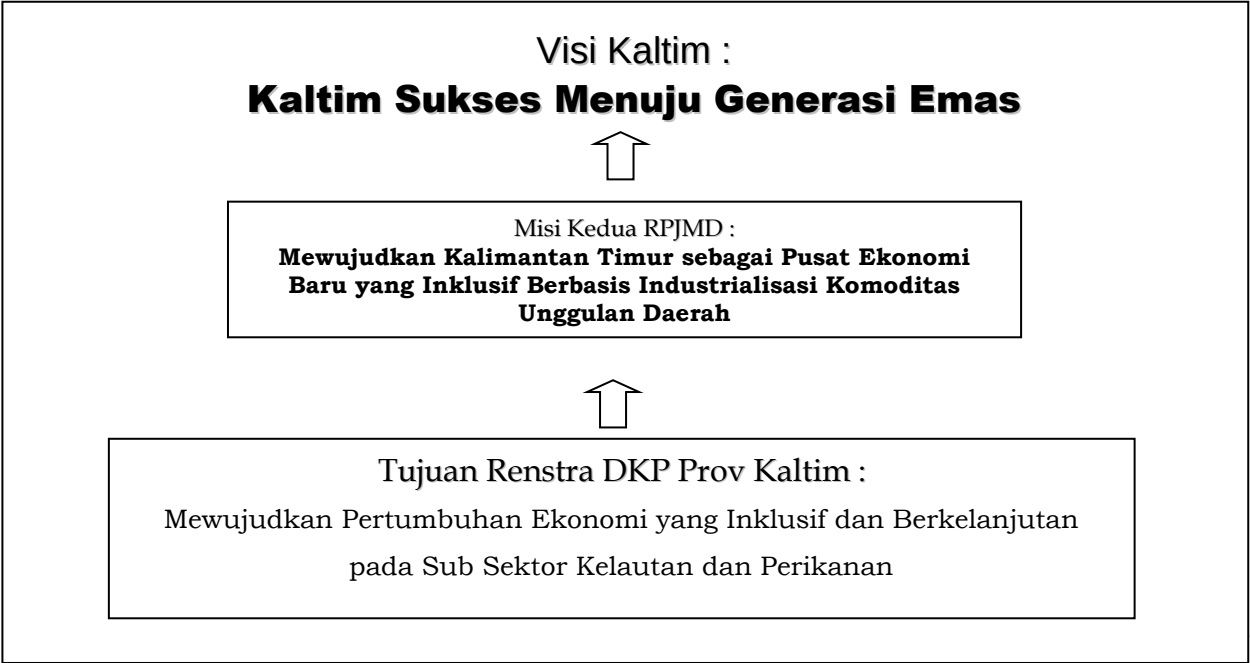
Tujuan Renstra DKP Prov Kaltim :

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan pada Sub Sektor Kelautan dan Perikanan

Untuk mewujudkan Tujuan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, diambil beberapa Sasaran untuk terwujudnya kemandirian ekonomi melalui sektor Kelautan dan Perikanan, diantaranya adalah :

- SASARAN** :
- 1. Meningkatnya daya saing dan kesejahteraan berkelanjutan sektor Kelautan dan Perikanan
 - 2. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.
 - 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah.

Hubungan DKP Prov Kaltim dalam mendukung Visi dan Misi Pemprov Kaltim



Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan misi kedua untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan serta kondisi potensi wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi

kewenangan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan. Pemanfaatan secara optimal Sumberdaya Kelautan dan Perikanan merupakan tujuan utama agar meningkatnya kemandirian ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan tujuan dan sasaran yang akan diambil. Strategi digunakan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya bidang kelautan dan perikanan, dan kebijakan diambil dalam rangka menentukan strategi dan arah kebijakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD yang antara lain adalah:

1. Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rancangan Akhir Rencana Kerja-OPD) tahun sebelumnya dan mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Program dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagai tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan Kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD harus selaras dalam program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum mendatang.
4. Program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur umumnya dan Kelautan Perikanan pada khususnya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raancangan Peraan Daerah tentng Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perubahan Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengsinkronisasikan agenda dan program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan kebutuhan riil OPD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menjadi dasar dalam penyusunan program/kegiatan yang terdapat di Rancangan Akhir Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 sebagai

rujukan dalam Penyusunan Rancangan Akhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

3. Merupakan landasan untuk menetapkan program dan kegiatan OPD serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
4. Rancangan Akhir Rencana Kerja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026 dengan tetap memperhatikan RKPD.
5. Rancangan Akhir Rencana Kerja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN,

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030.

Pada Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 6 Program, 47 Kegiatan, 108 Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran APBD setelah perubahan sebesar **Rp. 111,738,122,342,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 101.537.266.966,94,-** dengan persentase capaian sebanyak **91,0%**. Sedangkan untuk anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 28,053,904,902** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 26,914,708,791** dengan persentase capaian sebanyak **95.94%**.

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Realisasi Kinerja indikator Kualitas Layanan Kesekretariatan dengan target 90.4% dan realisasi 85% dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan realisasi 88.7%. Capaian indikator tersebut dihitung dari jumlah indikator program yang tercapai dibandingkan dengan jumlah seluruh indikator program.
- b. Realisasi Keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas dan UPTD) dapat dilaksanakan keseluruhan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56,884,333,583 (lima puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua koma enam puluh delapan rupiah) atau 93,10% dengan sisa anggaran Rp. 4,217,254,100,- (empat milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus koma tiga puluh dua rupiah) dari total anggaran Rp. 61,101,587,683,- (enam puluh satu milyar seratus satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

- c. Indikator tersebut tidak mencapai target dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik.
- d. Kebijakan adanya akuntabilitas diharapkan kinerja pegawai dapat meningkat. Karena dalam akuntabilitas, pegawai dihadapkan pada kewajiban yang harus dilaksanakan secara benar dan baik dan dapat mempertanggungjawabkan dari tugas tersebut sesuai dengan kewenangannya.

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

- a. Realisasi Kinerja indikator Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan target 72.97% dan realisasi 72.97%. Capaian indikator tersebut dihitung dari jumlah indikator program yang tercapai.
- b. Realisasi keuangan program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan sebesar Rp. 5,188,707,753,- (lima milyar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) atau sebesar 94,84% dengan sisa anggaran Rp. 282,090,597,- (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari total anggaran Rp. 5,470,798,350,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sedangkan fisik dicapai 100%.
- c. Indikator tersebut memenuhi target dikarenakan; Perencanaan Tata Ruang Pesisir yang Berkelanjutan Penyusunan rencana tata ruang pesisir yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi akan membantu mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Ini termasuk alokasi zona-zona konservasi, penentuan area tangkapan ikan, dan pengelolaan wilayah pesisir, Pengembangan Pariwisata Bahari yang Bertanggung Jawab Potensi pariwisata bahari dapat memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi, Perencanaan Tata Ruang Pesisir yang Berkelanjutan: Penyusunan rencana tata ruang pesisir yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi akan membantu mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Ini termasuk alokasi zona-zona konservasi, penentuan area tangkapan ikan, dan pengelolaan wilayah pesisir.
- d. Kebijakan Pembuatan dan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Ini melibatkan identifikasi dan pemetaan area berdasarkan karakteristik dan kegunaannya. Pendirian Kelembagaan Pengelolaan Kelembagaan yang kuat dan efisien diperlukan untuk mengawasi dan mengendalikan implementasi rencana pengelolaan dan zonasi, Penetapan/Penguatan Status Kawasan Status hukum kawasan harus ditetapkan atau diperkuat untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Upaya-Upaya Pengelolaan yang Secara Simultan Meliputi Aspek-Aspek Ekologi/Sumberdaya Hayati, Sosial-Ekonomi, dan Percepatan

Penatalaksanaan Ini melibatkan implementasi strategi dan tindakan yang dirancang untuk mempromosikan keseimbangan antara pelestarian ekologi, pemanfaatan sumber daya hayati, dan pembangunan sosial-ekonomi.

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- a. Realisasi Kinerja indikator Produksi Perikanan Tangkap dengan target 190.000 Ton dan realisasi 214.695 Ton atau 113%. Capaian indikator tersebut dihitung dari jumlah indikator program yang tercapai
- b. Realisasi keuangan program pengelolaan perikanan tangkap lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan sebesar Rp. 5,919,724,170,- (lima belas milyar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 81,06% dengan sisa anggaran Rp. 3,720,861,806,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah) dari total anggaran Rp. 19,640,585,976,- (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sedangkan kegiatan fisik dapat dilaksanakan 100%.
- c. Indikator tersebut melebihi target dikarenakan program pemerintah mengenai bantuan yang diserahkan masyarakat dan pembinaan-pembinaan baik secara formal maupun informal.
- d. Kebijakan mengevaluasi semua kegiatan untuk dijadikan pedoman kegiatan selanjutnya.

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- a. Realisasi Kinerja indikator Produksi Perikanan Budidaya dengan target 200.000 Ton dan realisasi 241.728,4 Ton atau 120.86%. Capaian indikator tersebut dihitung dari jumlah indikator program yang tercapai.
- b. Realisasi keuangan program perikanan budidaya sebesar Rp. 10,948,575,079,- (sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh sembilan koma satu rupiah) atau sebesar 91,36% dengan sisa anggaran Rp. 1,034,778,920,- (satu milyar tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas koma sembilan puluh sembilan rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 11,983,353,999,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- c. Indikator tersebut melebihi target dikarenakan;
 1. Pembinaan dan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) berjalan dengan baik dan diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya dan peningkatan perekonomian masyarakat perikanan di Kalimantan Timur.

2. Data produksi perikanan budidaya tahun 2024 diestimasi sebesar 241.728,37 ton atau naik sebesar 9,93% dari tahun sebelumnya yaitu 219.899,10 ton (2023). penetapan data produksi tahun 2024 masih menunggu validasi data dengan kabupaten dan kota dan validasi tingkat nasional melalui DJPB KKP RI.
- d. Kebijakan koordinasi dengan penyuluh dan pemerintah daerah kabupaten dan kota secara terus menerus.

5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- a. Realisasi Kinerja indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan target 100% dan realisasi 100% atau 100%. Capaian indikator tersebut dihitung dari jumlah indikator program yang tercapai.
- b. Realisasi Keuangan program ini sebesar Rp. 3,769,282,362,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) atau sebesar 95,35% dengan sisa anggaran Rp. 183,774,638,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 3,953,057,000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
- c. Indikator tersebut mencapai target dikarenakan; 1. penangkapan ikan yang dilakukan secara merusak atau destructive fishing masih kerap dijumpai baik di perairan laut maupun di perairan umum dan daratan. 2. sinergi dengan aparat penegak hukum dari polair polres kukar yang terjalin dengan cukup baik. 3. laporan masyarakat terkait makin maraknya aktifitas destructive fishing. 4. inspeksi kepatuhan pelaku usaha dilaksanakan secara terpadu bersama pengawas perikanan kab/kota, pembina mutu dan penyuluh perikanan pusat. 5. Inspeksi pelaku usaha pembudidayaan ikan di pud dan sampai dengan 12 mill laut serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan base on data oss rba untuk seluruh kab/kota. 6. Juknis pengawasan usaha dan produk perikanan sesuai dengan perdirjen psdkp nomor 6 tahun 2021.
- d. Kebijakan; 1. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang terdekat dengan kawasan rawan illegal fishing dan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing dengan dukungan ppns untuk penyidikan dari direktorat penanganan pelanggaran kkp melalui stasiun psdkp pontianak 3. Dalam pelaksanaan harus melihat kondisi air 4. Tidak terlalu banyak melibatkan personil yang diduga memberikan kebocoran informasi. 5. Penyadartahuan pelaku usaha terhadap peraturan perundang undangan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 6. penyesuaian jadwal pengawasan terpadu melalui oss rba.

6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Realisasi Kinerja indikator Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan dengan target 40.214 Ton dan realisasi 40.214% atau 100%, Indikator Nilai produk olahan hasil perikanan target Rp. 1,496,856,638,140 realisasi Rp. 1,496,856,638,140 atau 100%. Capaian indikator tersebut dihitung dari jumlah indikator program yang tercapai.
- b. Realisasi capaian program ini sebesar Rp. 2,117,867,400,- (dua milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 90,55% dengan sisa anggaran Rp. 221,096,600,- (dua ratus dua puluh satu juta sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 2,338,964,000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- c. Indikator tersebut mencapai target dikarenakan melaksanakan sinergitas Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota beraam Penyuluh Perikanan se Kalimantan Timur.
- d. Kebijakan program diatas selalu berkoordinasi secara terus menerus dengan UPT Pusat Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP).

7. Program Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar

- a. Realisasi Kinerja indikator Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut target Rp. 1,000,000,000 realisasi Rp. 1,000,000,000 atau 100%. Capaian indikator tersebut dihitung dari jumlah indikator program yang tercapai.
- b. Realisasi capaian program ini sebesar Rp. 4,489,662,443,-(empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga koma tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 94,47% dengan sisa anggaran Rp. 262,967,507,-(dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam koma enam puluh enam rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 4,752,629,950,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- c. Indikator tersebut mencapai target dikarenakan ketersediaan benih udang/ikan tersedia.
- d. Kebijakan program diatas selalu meningkatkan pengelolaan pembudidayaan secara baik dan berkelanjutan.

8. Program Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu

- a. Realisasi Kinerja indikator Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar dengan target 4,181,000 Ekor dan realisasi 4,181,000 Ekor atau 100%.
- b. Realisasi Keuangan program ini sebesar Rp. 1,792,010,080,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sepuluh ribu tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar 89,68% dengan sisa anggaran Rp. 206,185,473,- (dua ratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma sembilan rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 1,998,195,553,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- c. Indikator tersebut mencapai target dikarenakan banyaknya permintaan benih, baik benih ikan maupun udang oleh masyarakat pembudidaya.
- d. Kebijakan ketersediaan induk uang windu lokal (Balikpapan) dan mendatangkan indukan asal luar daerah provinsi, seperti dari prov. Aceh

9. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

- a. Realisasi Kinerja indikator Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan dengan target 70% dan realisasi 70% atau 100%.
- b. Realisasi Keuangan program ini sebesar Rp. 468,899,290,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 89,68% dengan sisa anggaran Rp. 30,050,541,- (tiga puluh juta lima puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 498,949,831,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah). Untuk pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- c. Indikator tersebut mencapai target dikarenakan hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan.
- d. Kebijakan dalam upaya capaian kinerja yaitu masyarakat paham dan mengerti tentang keamanan pangan produk perikanan yang aman untuk dikonsumsi

Jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, hasil pencapaian kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur (Tabel T-C.29)

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3:25:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	0.0	90.4	90.4	100.0	91.4	44	48.1
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	89.4	100	100.0	100.0	100	50.0	50
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	67.8	100	100	100.0	100	100	100.0
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14	8	8	100.0	8	8	100.0
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	2	2	100.0	2	2	100.0
3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	2	2	100.0	2	2	100.0
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	3	3	100.0	3	3	100.0
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	100	100	100	100.0	100	100	100.0
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	123	282	282	100.0	282	282	100.0
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	12	12	100.0	12	12	100.0
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	100.0	12	12	100.0
3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	12	12	100.0	12	12	100.0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	%	20	20	20	100.0	20	20	100.0
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20	20	20	100.0	20	20	100.0
3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!
3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	45	36	36	100.0	36	36	100.0
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	0	100	100	100.0	100	100	100.0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	10	10	100.0	10	10	100.0
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	4	4	100.0	4	4	100.0
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	2	2	100.0	2	2	100.0
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	12	100	100	100.0	100	100	100.0
3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	4	4	100.0	4	4	100.0
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	33	33	100.0	33	33	100.0
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	13	13	100.0	13	13	100.0
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100	100	100	100.0	100	100	100.0
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100	100	100	100.0	100	100	100.0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	31	31	100.0	31	31	100.0
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	102	102	100.0	102	102	100.0
3.25.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	20	20	100.0	20	20	100.0
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2	2	100.0	2	2	100.0
3:25:02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	293,031	72.97	72.97	100.0	85.68	81.1	94.6
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kawasan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	3982.3	327,819.31	327,819.31	100.0	327,819.31	327,819.31	100.0
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	5	6	6	100.0	6	6	100.0
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	30	60	60	100.0	60	60	100.0
3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Dokumen	30	-	-	#VALUE!	-	-	#VALUE!
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku Usaha	0	120	120	100.0	120	120	100.0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Dokumen	0	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.02.1.01.0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	Dokumen	0	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pertimbangan Teknis Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Dokumen	0	8	8	100.0	8	8	100.0
3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	Dokumen	0	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	6	6	100.0	6	6	100.0
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok Masyarakat	2	15	15	100.0	15	15	100.0
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	2	90	90	100.0	90	90	100.0
3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	6	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	5	90	90	100.0	90	90	100.0
3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	5	6	6	100.0	6	6	100.0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3:25:03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	182946	214,694	214,694	100.0	218,987.9	145.974	66.6
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah KUB yang mendapatkan bantuan didalam pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai 12 mil laut (KUB)	Kelompok Nelayan (KUB)	3	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (dokumen)	Dokumen	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	Unit	76	282	282	100.0	282	282	100.0
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	2	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.03.1.02.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat (dokumen)	Dokumen	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	12	20	20	100.0	20	20	100.0
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rekomendasi	175	150	150	100.0	150	150	100.0
3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Dokumen	175	150	150	100.0	150	150	100.0
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	800	470	470	100.0	470	470	100.0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	Dokumen	800	470	470	100.0	470	470	100.0
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelabuhan Perikanan	4	6	6	100.0	6	6	100.0
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	200	4	4	100.0	4	4	100.0
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	5	6	6	100.0	6	6	100.0
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rekomendasi	0	15	15	100.0	15	15	100.0
3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi	0	100	100	100.0	100	100	100.0
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi	0	15	15	100.0	15	15	100.0
3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	15	15	100.0	15	15	100.0
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	179,408.00	241,728.40	241,728.40	100.0	250,188.90	132.716	53.04
3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi	3	4	4	100.0	4	4	100.0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3.25.04.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	3	4	4	100.0	4	4	100.0
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Lokasi	10	10	10	100.0	10	10	100.0
3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	0	2	2	100.0	2	2	100.0
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	4	3	3	100.0	3	3	100.0
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	1	120	120	100.0	120	120	100.0
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	30	90	90	100.0	90	90	100.0
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang menerima bantuan di Perairan Darat	Unit	0	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	27	27	100.0	27	27	100.0
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	4	4	100.0	4	4	100.0
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	100	100	100	100.0	100	59.3	59.3
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha KP sampai dengan 12 mil yang Diperiksa Kepatuhan	Pelaku Usaha	172	172	172	100.0	172	172	100.0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3.25.05.1.01.0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di Wilayah Kerja PPNS Perikanan Provinsi yang Ditangani	Perkara	4	4	4	100.0	4	4	100.0
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	13	13	13	100.0	13	13	100.0
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/ atau Usaha Pengangkutan Ikan sampai dengan 12 Mil yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	153	153	153	100.0	153	153	100.0
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	6	6	6	100.0	6	6	100.0
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang Ditumbuhkan, dan Dikembangkan	Kelompok Masyarakat	20	20	20	100.0	20	20	100.0
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Diperiksa Kepatuhan nya	Pelaku Usaha	98	98	98	100.0	98	98	100.0
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/ atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	65	65	65	100.0	65	65	100.0
3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/ atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Diperiksa Kepatuhan nya Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	6	6	6	100.0	6	6	100.0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	27	27	27	100.0	27	27	100.0
3:25:06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan	Ton	0.00	40,214	40,214	100	42,224	0	#DIV/0!
		Nilai produk olahan hasil perikanan	Rupiah	0	1,496,856,638,140	1,496,856,638,140	100	1,565,658,796,240	0	#DIV/0!
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lokasi Perolehan Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Lokasi	10	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Pelaku Usaha	9	6	6	100.0	6	6	100.0
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu u	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	3	6	6	100.0	6	6	100.0
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Fasilitasi	Unit Usaha	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Fasilitasi	Unit Usaha	1	1	1	100.0	1	1	100.0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
1	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar									
3:25:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82	90	90	100	91.4	44	48.1
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	0	0	0	0	100	50	50
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20	20	20	20	20	20	20
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	5	5	100.0	5	5	100.0
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100	100	100	100	100	100	100
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	13	13	100.0	13	13	100.0
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	56	56	100.0	56	56	100.0
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3:25:04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Miliar Ekor	3	1	1	100	1.1	587.4	53.4
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Miliar Ekor	3	1	1	100	1	1	100
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	17	17	100.0	17	17	100.0
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	1	1	100.0	1	1	100.0
1	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan									
3:25:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82	90	90	100	91.4	44	48.1
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	0	0	0	0	0	0	0
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	100.0	1	1	100.0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20	20	20	100	20	20	100
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	15	15	100.0	15	15	100.0
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	100	100	100	100	100	100	100
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	9	9	100.0	9	9	100.0
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100	100	100	100	100	100	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	5	5	100.0	5	5	100.0
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	74	74	100.0	74	74	100.0
3:25:06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	%	60	70	70	100	70	56	80
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Unit Usaha	1	70	70	100	70	56	80
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan	1	3	3	100.0	3	3	100.0
1	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu									
3.25.01.1.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82	90	90	100	91.4	44	48.1
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	0	0	0	0	0	0	0
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20	20	20	100	20	20	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	18	18	100	18	18	100
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	100	100	100	100	100	100	100
3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	17	17	100.0	17	17	100.0
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	100.0	1	1	100.0
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100	100	100	100	100	100	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (6+8+10)/3	12=(11/5)
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	5	5	100.0	5	5	100.0
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	47	47	100.0	47	47	100.0
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3	3	100.0	3	3	100.0
3:25:04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	Ekor	3,797,000	4,181,000	4,181,000	100	4,393,750	2,346,262	53.4
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar	Ekor	3,797,000	4,181,000	4,181,000	100	4,393,750	2,346,262	53.4
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	2	2	100.0	2	2	100.0
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	1	1	100.0	1	1	100.0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan dekonsentrasi bidang perikanan dan kelautan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan pengembangan komoditi dan usaha kelautan dan perikanan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan pengolahan promosi dan pemasaran kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan	%	3.39	6.17	6.40	7.20	3.39	3.30	6.40	7.20	
	Produksi Perikanan	Ton	456,423	469,176.8	482313.3	495843.5	456,423	278,690	482313.3	495843.5	
	Indeks Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya	NTNP	100	100	100	101	100	103.46	100	101	
	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	36.73	36.73	36.73	36.75	36.73	35.2	36.73	36.75	
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	27.04	29.07	32.92	38.81	27.04	15.56	32.92	38.81	
	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Ha	327,819.31	327,819.31	328,247.25	355,658.24	327,819.31	266,030.78	328,247.25	355,658.24	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	74.30	75.32	76.34	77.36	74.30	0	76.34	77.36	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	89.4	85.5	86	86.99	89.4	44	86	86.99	

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur ditunjang oleh organisasi dan tata kerja yang terdiri dari unsur dinas dengan bidang-bidang dan unit pelaksana teknis dinas. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan dan kelautan.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian, sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang-Bidang yang terdiri dari 4 bidang yaitu :

1. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil :

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis rehabilitasi, konservasi kelautan dan perikanan serta reklamasi.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut dibantu oleh :

- a. Seksi Reklamasi dan Jasa Kelautan
- b. Seksi Konservasi Kelautan dan Perikanan
- c. Seksi Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan :

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, penangkapan ikan, pengawasan budidaya, pengolahan dan pemasaran.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut dibantu oleh 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :

- a. Seksi Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan
- b. Seksi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau² Kecil dan Penangkapan Ikan
- c. Seksi Pengawasan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran

3. Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknologi budidaya dan pembenihan, sarana dan prasarana budidaya dan pembenihan, pengembangan usaha pengolahan ikan, promosi investasi, perizinan pengolahan dan pemasaran.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut dibantu oleh 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :

- a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- b. Seksi Perikanan Budidaya
- c. Seksi Usaha Perikanan Budidaya

4. Bidang Perikanan Tangkap

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis prasarana dan pengelolaan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan, teknologi dan pengembangan usaha penangkapan ikan, serta pengelolaan sumber daya ikan dan pelayanan usaha penangkapan ikan.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut dibantu oleh :

- a. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan
- b. Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
- c. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

1. Kepala UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar, Kelas A membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengujian Mutu
 - c. Seksi Pengendalian Mutu
2. Kepala UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu, Kelas B membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Kelas B membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
4. Kepala UPTD Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) Berau, Kelas B membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
5. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru Balikpapan, Kelas B membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur diukur berdasarkan target sasaran pada kurun waktu perencanaan yang telah dilakukan lima tahun sebelumnya. Kinerja pelayanan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelayanan serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan di sektor kelautan dan perikanan. Tugas dekonsentrasi Dinas Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 2008. Tugas dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No.05 Tahun 2009.

Pelayanan Publik di bidang kelautan dan perikanan, dilakukan melalui :

- Kaji terap Teknologi Perikanan dan Kelautan
- Melakukan sosialisasi tentang teknologi perikanan dan kelautan;
- Pelayanan Fasilitas Prasarana perikanan dan kelautan, yaitu Fasilitas

Pangkalan Pendaratan Ikan, Prasarana Budidaya dan Tangkap, Fasilitas Pelayanan Usaha Pengolahan;

- Pelayanan usaha pemanfaatan asset daerah melalui pengujian mutu laboratorium, pengukuran bahan sampel ikan/udang untuk keamanan pangan, uji kualitas air, serta penjualan benih ikan/udang yang telah dilakukan di 3 UPT lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Kelautan dan Perikanan diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan di masa lima tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Belum optimalnya produksi perikanan hasil tangkapan.
2. Belum optimalnya produksi budidaya perikanan.
3. Belum optimalnya pengembangan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan.
4. Belum optimalnya pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berbasis rendah emisi.
5. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
6. Belum optimalnya mutu produk hasil perikanan.
7. Belum optimalnya ketersediaan komoditas perikanan unggulan (udang windu) dan ikan air payau/laut.
8. Belum optimalnya ketersediaan komoditas perikanan yang spesifik.

9. Penurunan kualitas air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, pembukaan hutan untuk perkebunan sawit, limbah industri maupun pertanian.
10. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya Kaltim (ikan dan rumput laut), dikarenakan teknologi yang masih sederhana/tradisional.
11. Perlunya sarana dan prasarana kapal penangkapan ikan dan alat tangkap modern dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap sebagai sumber pangan perikanan;
12. Belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi dalam rangka pemerataan pertumbuhan sesuai dengan semangat Nawacita yaitu membangun daerah dari pinggiran;
13. Belum optimalnya industri pengolahan perikanan Kaltim (khususnya di kawasan Indonesia Bagian Timur) dalam rangka mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif untuk memperkuat daya saing produk guna kesejahteraan masyarakat perikanan;
14. Kurangnya ketersediaan BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan;
15. Belum optimalnya pengawasan UU Perikanan (*Illegal Unreported and Unregulated Fishing*) dan *Destruktif Fishing*.
16. Perlunya peningkatan kawasan konservasi laut Kaltim sebagai sumber ketersediaan stok ikan;
17. Minimnya kapasitas SDM kelautan dan perikanan;
18. Peningkatan IPTEK kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi;
19. Belum optimalnya penyerahan bantuan kepada masyarakat dan penurunan Produksi akibat pandemi covid19.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah** dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Adapun Program Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Produksi Budidaya dan Pengolahan Pemsaran Hasil Perikanan
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
5. Program Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah.
6. Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau/Air Laut
7. Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

8. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
12. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
13. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel Review terhadap RKPD Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				78,176,774,022					81,738,462,595	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Kelautan dan Perikanan)	92.4 Indeks 100%	61,571,125,826	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Kelautan dan Perikanan)	92.4 Indeks 100%	55,007,683,810	Program dan kegiatan cocok namun besaran anggaran berbeda
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1,709,823,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	968,600,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	550000000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8Dokumen	316,760,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2Dokumen	57,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	150,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2Dokumen	39,920,000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	489,797,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	332,920,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	320,026,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	222,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100 %	52,414,010,237	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100 %	47,583,503,621	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/ Bulan	50,793,010,237	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	284Orang/Bulan	46,615,419,621	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	722,160,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1Dokumen	581,640,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	276,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	77,600,000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	260,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1Dokumen	80,378,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	195,833,234	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	81,406,000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	20,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1Dokumen	20,800,000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	55,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	58,890,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	92,006,766	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	67,370,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20 %	201,740,730	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20 %	108,876,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50,503,800	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1Dokumen	31,440,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	76,485,030	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1Dokumen	42,816,000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	74,751,900	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	34,620,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	687,589,800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	636,863,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	405,486,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	229,823,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	61,551,900	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	56,820,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	61,551,900	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	56,820,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	159,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	293,400,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1,765,799,407	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1,413,488,647	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,842,980	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,596,820	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	108,933,399	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64,797,648	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	88,703,028	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	56,454,179	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	27,840,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	27,840,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,517,480,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,238,800,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	100 %	38,638,812	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	100 %	38,095,385	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9,554,000	Pembelian Alat Pemancar Intenet
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	38,638,812	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	28,541,385	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3,443,333,840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3,010,706,740	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21,200,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8,610,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,386,533,840	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,787,216,740	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,035,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,214,880,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	1,310,190,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	1,247,550,417	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	624,841,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	567,556,000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	140,365,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	136,456,000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	44,984,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	43,538,417	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	500,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	500,000,000	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	85.71	4,723,955,428	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil		Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	85.71 %	1,200,000,000	program dan kegiatan cocok namun besaran anggaran berbeda
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3,256,658,739	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3 Kawasan	587,565,490	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	327819.31Ha	1,402,771,255	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	42698.3 Ha	269,008,978	
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30 Orang	65,841,180	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30 Orang	31,560,000	
	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	60 Pelaku Usaha	65,841,180	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	30 Pelaku Usaha	183,635,800	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	1 Dokumen	493,074,100	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	1 Dokumen	37,760,000	
	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen	66,350,276	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1Dokumen	65,600,712	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	8 Rekomend asi	457,245,891	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Pertimbangan Teknis Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4Peraturan Teknis	326,014,186	
	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen	172,776,224	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen	129,044,200	
	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	218,518,219	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	196,969,986	
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17 Kelompok Masyarakat	1,010,050,798	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10 Kelompok Masyarakat	286,420,324	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	90 Orang	239,263,000	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	88,835,842	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	131,000,000	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kelompok	67,118,486	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	120 Orang	100,000,000	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30 Orang	71,036,694	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompok	539,787,798	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2 Kelompok	59,429,302	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	223367.8	4,758,594,000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Produksi Perikanan Tangkap	223367.8 Ton	5,555,000,000	program dan kegiatan cocok namun besaran anggaran berbeda
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	1,135,540,278	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Jumlah KUB yang mendapatkan bantuan didalam pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai 12 mil laut (KUB)	10 KUB	3,602,000,000	Hibah ke Masyarakat
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	123,844,515	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	107,800,000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	28 Unit	1,011,695,763	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	185 Unit	3,494,200,000	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	190 Rekomendasi	450,000,000	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100 Rekomendasi	113,630,300	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	380Dokumen	450,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Dokumen	113,630,300	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	830 Dokumen	600,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200 Dokumen	273,321,049	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	830 Dokumen	600,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	200 Dokumen	273,321,049	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6 Pelabuhan Perikanan	1,963,594,000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	5 Pelabuhan Perikanan	1,526,500,000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	6 Unit	1,579,594,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Unit	1,329,980,428	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	384,000,000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	196,519,572	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	20 Rekomen dasi	150,000,000	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	30 Rekomendasi	39,548,651	
	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	20 Rekomen dasi	150,000,000	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	30 Rekomendasi	39,548,651	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya	258945.5	3,248,700,000	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Produksi Perikanan Budidaya	258945.5 Ton	18,375,778,785	program dan kegiatan cocok namun besaran anggaran berbeda
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	2,150,243,678	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Pokdakan laut yang mendapatkan manfaat	2 Pokdakan	724,617,279	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	308,700,000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	89,940,000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	242,360,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	16,299,000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	642,083,678	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	308,318,279	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembudidaya	90 Orang	418,500,000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembudidaya Ikan	60 Orang	116,330,521	
	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	538,600,000	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	70 Dokumen	193,729,479	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	1 Dokumen	898,356,322	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah Pokdakan PUD yang mendapatkan manfaat	1 Pokdakan	17,651,161,506	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	540,000,050	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	17,622,185,506	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	358,356,272	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	28,976,000	
5.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100	2,944,601,768	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		Persentase Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	100 %	950,000,000	program dan kegiatan cocok namun besaran anggaran berbeda
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	1,911,542,878	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah Pelaku Usaha KP sampai dengan 12 mil yang Diperiksa Kepatuhan nya	123 Pelaku Usaha	735,280,479	
	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	5 Perkara	763,775,768	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di Wilayah Kerja PPNS Perikanan Provinsi yang Ditangani	2 Perkara	270,540,448	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	153 Pelaku Usaha	367,301,110	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Provinsi	50 Pelaku Usaha	100,850,032	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	13 Pelaku Usaha	322,606,000	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/ atau Usaha Pengangkutan Ikan sampai dengan 12 Mil yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Provinsi	70 Pelaku Usaha	199,410,276	
	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	298,800,000	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Provinsi	3 Pelaku Usaha	108,905,967	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	19 Kelompok Masyarakat	159,060,000	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah POKMASWAS yang Ditumbuhkan, dan Dikembangkan	8 Kelompok Masyarakat	55,573,756	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	1,033,058,890	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Diperiksa Kepatuhan nya	46 Pelaku Usaha	214,719,521	
	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	65 Pelaku Usaha	337,900,000	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/ atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Provinsi	20 Pelaku Usaha	76,817,804	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	414,600,000	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/ atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Diperiksa Kepatuhan nya Kewenangan Provinsi	6 Pelaku Usaha	68,960,313	
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	28 Pelaku Usaha	280,558,890	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Provinsi	20 Pelaku Usaha	68,941,404	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
6.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Jumlah produk olahan hasil perikanan Nilai produk olahan hasil perikanan	44289 1680270182290	929,797,000	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		Jumlah produk olahan hasil perikanan Nilai produk olahan hasil perikanan	44289 Ton Rp. 1680270182290	650,000,000	program dan kegiatan cocok namun besaran anggaran berbeda
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	200,000,000	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Lokasi Perolehan Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	10 Lokasi	108,019,894	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Dokumen	200,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	108,019,894	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10 UMKM	689,797,000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	10 Pelaku Usaha	541,980,106	
	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	6 Kegiatan	689,797,000	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu u	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan	541,980,106	
	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN				1,410,898,778					1,095,625,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1,410,898,778					1,095,625,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1,410,898,778	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan				1,095,625,000	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PMHP)	92.4 Indeks 100%	955,055,289	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PMHP)	92.4 Indeks 100%	607,552,939	program dan kegiatan cocok namun besaran anggaran berbeda

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100 %	69,480,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100 %	71,520,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	69,480,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	71,520,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	136,450,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	23,520,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	136,450,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	23,520,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	416,502,112	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	197,275,014	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,949,072	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,714,463	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28,676,311	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29,304,342	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,112,685	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14,701,529	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14,371,524	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,939,200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,980,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	359,736,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	141,792,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	100 %	41,297,077	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	100 %	19,006,201	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	41,297,077	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	19,006,201	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	210,894,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	224,747,364	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,112,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	840,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	149,982,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	147,467,364	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	59,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	76,440,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	80,432,100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	71,484,360	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	36,235,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	32,998,360	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	44,196,900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	38,486,000	
2.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan (UPTD PMHP)	90%	455,843,489	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan (UPTD PMHP)	83 %	488,072,061	program dan kegiatan cocok namun besaran anggaran dan target berbeda
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	90 %	455,843,489	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2 Unit Usaha	488,072,061	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	8 Kegiatan	455,843,489	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	4 Kegiatan	488,072,061	
	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR				3,384,053,200	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar				1,884,282,800	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD SPAPAL MANGGAR)	92.4 Indeks 100%	1,610,169,060	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD SPAPAL MANGGAR)	92.4 Indeks 100%	893,008,060	program dan kegiatan cocok namun besaran anggaran berbeda
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100 %	91,200,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100 %	81,720,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	91,200,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	81,720,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	651,006,210	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	244,041,876	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,146,950	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,008,826	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47,900,016	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,375,312	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,963,144	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,475,388	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,741,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,483,150	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4,032,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,939,200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	575,222,600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	230,760,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	597,104,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	476,361,394	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	476,670,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	476,361,394	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	258,358,850	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	90,884,790	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	47,392,050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	34,149,790	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	110,966,800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	31,735,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,000,000	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (UPTD SPAPAL MANGGAR)	1100000000	1,773,884,140	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (UPTD SPAPAL MANGGAR)	1,1 Miliar Ekor	991,274,740	program dan kegiatan cocok namun besaran anggaran berbeda
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1200000000 Ekor	1,773,884,140	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah Pembenihan Ikan yang difasilitasi	2 Unit	991,274,740	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	1,548,084,140	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit	991,274,740	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAK-SEBULU				3,863,118,000	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu				1,629,859,805	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (SPAPAL Muara Badak-Sebulu)	92.4 Indeks 100%	2,375,796,000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (SPAPAL Muara Badak-Sebulu)	92.4 Indeks 100%	736,288,683	program dan kegiatan cocok namun besaran anggaran berbeda
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100 %	99,280,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100 %	77,640,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	99,280,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	77,640,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	231,201,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	4,200,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	231,201,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	4,200,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	877,775,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	249,817,344	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,165,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,850,010	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125,450,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,259,476	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,383,648	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,892,210	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	621,660,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	228,432,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	100 %	50,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	100 %	31,785,472	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	50,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	31,785,472	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	420,600,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	262,074,616	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	300,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	262,074,616	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	696,940,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	110,771,251	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	134,160,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	74,004,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	62,780,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	36,767,251	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	500,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	Belanja dialihkan pada subkegiatan lain
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (UPTD SPAPAL Muara Badak - Sebulu)	4732250	1,487,322,000	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (UPTD SPAPAL Muara Badak - Sebulu)	4732250 Ekor	893,571,122	program dan kegiatan cocok namun besaran anggaran berbeda
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar	4612500Ekor	1,487,322,000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (UPTD SPAPAL Muara Badak - Sebulu)	4732250 Ekor	893,571,122	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	900,000,000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit	893,571,122	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	587,322,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	-	Belanja dialihkan pada subkegiatan lain

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
						UPTD Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) Berau		-		413,990,800	rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD KKP3KKDPS)	92.4 Indeks 100%	163,990,800	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100 %	60,600,000	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	60,600,000	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	93,205,800	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,525,030	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43,013,603	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7,987,167	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40,680,000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	9,685,000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9,685,000	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	500,000	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	500,000	
						Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil		Persentase Luas Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (UPTD KKP3KKDPS)	100 %	250,000,000	rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
											RKPD
						Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	250,000,000	
						Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	285548.95 Ha	250,000,000	
						UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru Balikpapan				1,028,550,000	rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru)	92.4 Indeks 100%	988,550,000	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100 %	73,560,000	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	73,560,000	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	136,200,000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	136,200,000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	623,230,416	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	623,230,416	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	155,559,584	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	45,559,584	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	110,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah Pendaratan Hasil Perikanan di Pelabuhan Perikanan (UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru)	583.7 Ton	40,000,000	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	40,000,000	
TOTAL					86,834,844,000	TOTAL				87,790,771,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terhadap setiap program/kegiatan yang direncanakan baik internal maupun eksternal diupayakan berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat (*pro poor, pro job, pro growth dan pro environment*)

Arah kebijakan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelayanan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk merumuskan prioritas pembangunan, menetapkan rencana kerja tahunan, dan menyepakati program yang akan dilaksanakan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk memastikan pembangunan yang dilakukan inklusif, sesuai kebutuhan, serta dapat mengurangi masalah seperti kemiskinan.

Tujuan Musrenbang secara spesifik meliputi:

- **Menentukan prioritas pembangunan:**

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan serta program yang menjadi fokus utama pembangunan di suatu wilayah.

- **Menampung aspirasi masyarakat:**

Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, gagasan, dan kebutuhan mereka terkait pembangunan, sehingga pembangunan lebih responsif.

- **Menyusun rencana kerja:**

Merumuskan rencana kerja (termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKP) untuk periode waktu tertentu berdasarkan prioritas yang telah disepakati.

- **Mendukung perencanaan bottom-up:**

Memastikan usulan pembangunan berasal dari tingkat bawah (masyarakat dan desa) ke tingkat yang lebih atas, sehingga sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

- **Koordinasi dan sinergi:**

Mengakomodasi usulan dari berbagai tingkat pemerintahan (desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota) untuk memastikan sinkronisasi dan konsistensi dalam pembangunan.

- **Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan:**

Secara spesifik, beberapa Musrenbang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan sosial ekonomi.

Keselarasannya antara Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih cenderung dalam hal menampung aspirasi masyarakat antara lain kebutuhan apa yang mereka harapkan seperti masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan, oleh sebab itu dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta menjadi fokus dalam mendukung prioritas pembangunan khususnya perikanan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, secara *On-Farm* dan *Off-Farm* secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan *On Farm* antara lain meliputi:
 - Pengembangan komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi;
 - Meningkatkan optimalisasi penyediaan benih udang/ikan;
 - Pelayanan rekomendasi perijinan usaha budidaya, tangkap dan pengolahan.
 - Pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat pemanfaat berupa sarana dan prasarana pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasaran hasil perikanan.
- b. Sedangkan kegiatan *Off Farm* adalah untuk mendukung pengelolaan hasil produksi perikanan. Baik sejak pasca panen, pengolahan sampai pada pemasaran hasil. Adapun kegiatannya antara lain :
 - Diversifikasi produk olahan dan Layanan Pengujian mutu;
 - Promosi Hasil Produk Perikanan.

Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan (Reguler, Pokir dan Aspirasi) Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

A. Reguler

No	Rincian Output (RO) Usulan				Dukungan Kabupaten/Kota Melalui Kegiatan APBD Nomenklatur Sub Kegiatan Bersesuaian (Kepmen 050-1317, Hal. 516-521)	Kesepakatan	Catatan Pembahasan	Catatan Forum PD
	Nama Usulan	Volume	Satuan	Lokasi				
1.	Pengadaan Badan Perahu Kub Jaya Mandiri Perahu Bahan Fiber, Panjang 7 meter	12	Unit	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
2.	Pengadaan Badan Perahu Kub Nelayan Sumber Harapan Perahu Bahan Fiber, Panjang 7 meter	9	Unit	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
3.	Pengadaan Badan Perahu Kub Laut Pudak Baru Perahu Bahan Fiber, Panjang 7 meter	9	Unit	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
4.	Pengadaan Badan Perahu Kub Setia Kawan Perahu Bahan Fiber, Panjang 7 meter	11	Unit	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diakomdir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
5.	Pengadaan Mesin Diesel Kub Tunas Tumbuh Bersama Mesin Diesel Uk. 24 PK	11	Unit	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diakomdir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
6.	Pengadaan Mesin Diesel Kub Taddutang Nusantara Samarinda Mesin Diesel Uk. 24 PK	15	Unit	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diakomdir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
7.	Pengadaan Mesin Diesel Kub Nelayan Makmur Palaran Mesin Diesel Uk. 24 PK	15	Unit	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
8.	Pengadaan Mesin Diesel Kub Nelayan Marannu Berjaya Mesin Diesel Uk. 24 PK	14	Unit	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
9.	Pengadaan Mesin Diesel Kub Mega Buana Jaya	16	Unit	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi

No	Rincian Output (RO) Usulan				Dukungan Kabupaten/Kota Melalui Kegiatan APBD Nomenklatur Sub Kegiatan Bersesuaian (Kepmen 050-1317, Hal. 516-521)	Kesepakatan	Catatan Pembahasan	Catatan Forum PD
	Nama Usulan	Volume	Satuan	Lokasi				
	Mesin Diesel Uk. 24 PK				Tangkap		dg pergub kaltim	kewenangan
10.	Pengadaan Mesin Diesel Kub Tunas Nelayan Mesin Diesel Uk. 24 PK	15	Unit	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
11.	Pengadaan Mesin Ketinting Kub Pulo Battoa Bersatu Mesin Ketinting Uk. 18 PK	15	Unit	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
12.	Pengadaan Mesin Ketinting Kub Chelsea Mesin Ketinting Uk. 18 PK	11	Unit	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
13.	Pengadaan Mesin Diesel Kub Loktayum Mesin Diesel Uk. 24 PK	14	Unit	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
14.	Pengadaan Mesin Ketinting Kub Laut Biru Muara Mesin Ketinting Uk. 16 PK	10	Unit	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
15.	Pengadaan Mesin Diesel Kub Bukuan Jaya Mandiri Mesin Diesel Uk. 24 PK	12	Unit	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
16.	Pengadaan Bahan Webbing Pa Multifilamen D/9 Kub Cahaya Bone Bahan Webbin PA Multifilamen D/9 (1,5 inch x 100 MD x 100 YDS)	102	Pcs	Kalimantan Timur	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
17.	Pengadaan Pakan Ikan Air Tawar Di Samarinda Pakan ikan air tawar Protein 31 - 33 %, Lemak Maksimal 8 %, Bentuk Granul atau butiran - Kemasan dalam bentuk Karung	983	Kg	Samarinda	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
18.	Pengadaan Nener Di Penajam Paser Utara Benih Ikan bandeng (Nener	1965532	Ekor	PPU	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan

No	Rincian Output (RO) Usulan				Dukungan Kabupaten/Kota Melalui Kegiatan APBD	Kesepakatan	Catatan Pembahasan	Catatan Forum PD
	Nama Usulan	Volume	Satuan	Lokasi	Nomenklatur Sub Kegiatan Bersesuaian (Kepmen 050-1317, Hal. 516-521)			
	Ukuran seragam sekitar 1-2 cm dan sehat							
19.	Pengadaan Nener Di Kutai Kartanegara Benih Ikan bandeng (Nener) Ukuran seragam sekitar 1-2 cm dan sehat	2500000	Ekor	Kukar	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
20.	Pengadaan Benur Di Kutai Kartanegara Benih udang windu (Benur) PL.12	107960593	Ekor	Kukar	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
21.	Pengadaan Saponin Di Kutai Kartanegara Saponin 1 Kg	15000	Kg	Kukar	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
22.	Pengadaan Pakan Ikan Air Tawar Di Kutai Kartanegara Pakan ikan air tawar Protein 31 - 33 %, Lemak Maksimal 8 %, Bentuk Granul atau butiran - Kemasan dalam bentuk Karung	73458	Kg	Kukar	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
23.	Pengadaan Benur Di Penajam Paser Utara Benih udang windu (Benur) PL.12	1600001	Ekor	PPU	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
24.	Pengadaan Pakan Ikan Air Tawar Di Penajam Paser Utara Pakan ikan air tawar Protein 31 - 33 %, Lemak Maksimal 8 %, Bentuk Granul atau butiran - Kemasan dalam bentuk Karung	13200	Kg	PPU	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
25.	Pengadaan Pakan Ikan Air Tawar Di Samarinda Pakan ikan air tawar Protein 31 - 33 %, Lemak Maksimal 8 %, Bentuk Granul atau butiran - Kemasan dalam bentuk Karung	25784	Kg	Samarinda	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan
26.	Pengadaan Pakan Ikan Air Tawar Di Kutai Timur Dan Berau Pakan ikan air tawar Protein 31 - 33 %, Lemak Maksimal 8 %, Bentuk Granul atau butiran - Kemasan dalam bentuk Karung	8689	Kg	Berau	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diakomodir	proposal segera dilengkapi sesuai dg pergub kaltim	disesuaikan dengan kamus usulan dan regulasi kewenangan

B. Pokir dan Aspirasi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1.	27-03-2025	Nurhadi Saputra, SH., MH	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	memberikan bantuan sarana dan prasarana alat penangkap ikan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dan kuantitas atau pendapatan salah satu kelompok usaha nersama (KUB) "Mega Buana Jaya"	Jl. Rekreasi Rt 16 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	foto kopi KTP dan Kusuka Kurang. lengkapi proposal sesuai pergub	Disetujui	16	Mesin	250000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2.	29-03-2025	Nurhadi Saputra, SH., MH	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan kuantitas atau pendapatan salah satu kelompok usaha bersama (KUB) "Tunas Nelayan"	Jl. Rekreasi Rt 46 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Lengkapi proposal sesuai pergub. kartu kusuka kurang	Disetujui	15	Mesin	250000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3.	05-04-2025	H. Fadli Imawan, S.P., M.P	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Keberadaan Nelayan di Kelompok Nelayan Cahaya Terang Desa Senipa Kec. Batu Engau yang menggunakan jaring sebagai alat tangkap ikan membutuhkan dukungan pengadaan jaring yang memadai untuk mendukung aktifitas keseharian warga sebagai nelayan penangkap ikan	Desa Senipah Kec. Tanjung Harapan, Kab Paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Lengkapi proposal sesuai pergub	-	130	Pcs	775000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
4.	09-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN INTI KARYA BERSAMA TIDAK MEMILIKI DANA UNTUK MEMBELI BENUR UDANG	POKDAKAN INTI KARYA BERSAMA, JALAN KAPITAN RT. 04 DESA MUARA BADA K ILIR KECAMATAN MUARA BADA K KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah pernah mendapatkan bantuan melalui dana APBD-P Tahun 2024	-	-	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5.	09-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN KAMPUNG JULU TIDAK MEMILIKI DANA UNTUK MEMBELI BENUR UDANG	POKDAKAN KAMPUNG JULU, DESA TANI BARU RT. 015 KECAMATAN ANGGA NA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Kelompok sudah di akomodir di ID Usulan 1587932	-	-	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6.	09-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN PEKKA DUA TIDAK MEMILIKI DANA UNTUK MEMBELI BENUR UDANG	POKDAKAN PEKKA DUA, DESA TANI BARU RT. 016 KECAMATAN ANGGA NA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7.	09-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan	POKDAKAN TANI BERKAH TIDAK ADA MEMILIKI DANA UNTUK MEMBELI	POKDAKAN TANI BERKAH, DESA TANI	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	BENUR UDANG	BARU RT. 016 KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Provinsi Kalimantan Timur			Perikanan		KETENTUAN								Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
8.	09-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN TANJUNG MIRING TIDAK MEMILIKI DANA UNTUK MEMBELI BENUR UDANG	POKDAKAN TANJUNG MIRING, DESA TANI BARU RT. 016 KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Kelompok sudah di akomodir di ID Usulan 1587943	-	-	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9.	09-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN TELUK MUARA TIDAK MEMILIKI DANA UNTUK MEMBELI BENUR UDANG	POKDAKAN TELUK MUARA, DESA TANI BARU RT. 016 KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
10.	10-04-2025	H. Agus Aras	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	kelompok nelayan cahaya bone sangat membutuhkan sejumlah peralatan untuk mendukung kegiatan dan usaha nelayan dalam rangka pengembangan usaha produksi.	jl mh thamrin rt02, kel gunung elai, bontang utara, kota bontang, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Ukuran yg tersedia di SSH D/9 1 inch, satuannya PCS	Disetujui	60	Pcs	200000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
11.	11-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kesulitan dan mahal nya harga pakan, sehingga meurun tingkat produktifitas pokdakan Sukses Bersama Desa Handil Terusan	Handil A RT 08 Dusun II Desa handil Terusan kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	kg	150000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
12.	11-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	kesulitan dan mahal nya harga pakan, sehingga menurun nya tingkat produktifitas pokdakan Keluarga Harapan Desa Handil Terusan	Handil D RT 002 Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	Kg	150000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
13.	11-04-2025	H. Agus Aras	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	kelompok nelayan maju bersama mengandalkan kegiatan perikanan tangkap sebagai mata pencaharian utama,namun mengalami kendala seperti keterbatasan alat tangkap yang efektif dan ramah lingkungan, memerlukan bantuan tremmel net	kampung buyung-buyung rt.03, kecamatan tabalar, kabupaten berau, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	5000	unit	-	Non Belanja Transfer	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
				sebanyak 5000 unit														
14.	11-04-2025	H. Agus Aras	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	hasil laut tangkapan nelayan semakin kurang karena jangkauan nelayan saat melaut tidak memadai, karena terkendala kurangnya sarana dan prasarana sehingga kami mengajukan bantuan mesin	jl. letjend urip sumoharjo rt.12 segendis, bontang lestari, bontang selatan, kota bontang, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	10	unit	-	Non Belanja Transfer	-
15.	14-04-2025	Muhammad Samsun, S.E. M,Si	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Memperlancar Aktivitas Kegiatan Nelayan dalam upaya peningkatan penangkapan produksi tangkap perikanan	Tanjung Sembilang, RT. 009, Kel. Muara Sembilang, Kec. Samboja, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	24	Unit	-	Non Belanja Transfer	-
16.	15-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Mahalnya dan susahnya kelompok dalam penyediaan pakan, sehingga berkurangnya tingkat produktifitas kelompok Jaring Alam Desa Segihan	Jl. Syahrhan R, RT.001 Desa Segihan Kec.Sebulu, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Proses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	Kg	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
17.	15-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Sulit dan mahalnya kelompok mencari bibit benur, sehingga hasil produksi pokdakan Tambolo Jaya Mandiri Desa Muara Pantuan tidak bisa maksimal	Jl.Masjid RT.06/01 No.56 Desa Muara Pantuan Kec.Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2500000 Benur x Rp. 150 = 375000000	Disetujui	2500000	ekor	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
18.	15-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	sulit dan mahalnya bibit benur, produksi kelompok tidak bisa maksimal, sehingga penghasilan Pokdakan Jaya Taddutan Desa Saliki menurun	Jl. Erna Saliki RT.004 Desa Saliki Kec.Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	ekor	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
19.	15-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	sulit dan mahalnya harga pakan ikan, sehingga produktifitas kelompok menurun, otomatis penghasilan Pokdakan Sipakaraja Desa Handil Terusan ikut menurun	Desa Handil Terusan Kec. Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	kg	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
20.	15-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Sulit dan mahalnya harga pakan ikan, sehingga produksi ikan menurun, dan penghasilan kelompok Sarimas Berkarya Anggana juga menurun	Desa Sungai Mariam RT.025 Kec.Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	kg	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
21.	15-04-	H. Akhmed	Penyediaan Sarana	sulit dan mahalnya harga	Desa Saliki RT.7	Provinsi	Dinas Kelautan	Dinas	Usulan	PROSES DAPAT	Diproses lebih	2500000 Benur	Disetujui	2500000	ekor	100000000	-	Penyediaan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
	2025	Reza Fachlevi, S.Sos	Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	bitit benur, sehingga menurun nya tingkat produktifitas kelompok Jaya Baru Saliki, dan penghasilan anggota kelompok	Kec.Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur		Dan Perikanan	Kelautan Dan Perikanan	disetujui	DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	lanjut	x Rp. 150 = 375000000						Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
22.	15-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	sulit dan mahal nya harga pakan, sehingga menurun nya tingkat produksi hasil kelompok Semoga Berkah Desa Handil Terusan, dan penghasilan anggota kelompok jadi ikut menurun	Handil A RT. 08 Dusun II Desa Handil Terusan Kec.Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	kg	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
23.	15-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Sulit dan mahal nya harga benur, sehingga menurun nya tingkat produktifitas kelompok Taddutan Laut Desa Saliki, yang berakibat menurunnya penghasilan anggota kelompok	jalan reformasi RT 003 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	ekor	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
24.	15-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	sulit dan mahal nya harga benur, sehingga menurunnya tingkat produktifitas kelompok pembudidaya ikan Kampung Julu Desa Tani Baru	RT 015 Desa Tani Baru Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2500000 Benur x Rp. 150 = 375000000	Disetujui	2500000	ekor	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
25.	15-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	sulit dan mahal nya harga benur, sehingga menurunnya tingkat produktifitas pokdakan Tanjung Miring Desa Tani Baru	RT 016 Desa Tani Baru Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	3000000 Benur x Rp. 150 = 450000000	Disetujui	3000000	ekor	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
26.	15-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	kesulitan dan mahal nya harga pakan sehingga tingkat produktifitas pokdakan Hanter Etam Sejahtera Desa Tani Baru menurun, sehingga menurun penghasilan anggota kelompok	RT 03 Desa Tani Baru Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	ekor	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
27.	15-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	kesulitan dan mahal nya harga benur sehingga menurun tingkat produktifitas pokdakan Multi Guna kelurahan Gayam	Jalan Benua Etam Gg Belibis RT 03 Kelurahan Gayam Tanjung Redep, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000 500000 Nener x Rp. 325 = 162500000	-	2500000	ekor	462500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			Danau															
28.	15-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kesulitan dan mahal nya harga pakan, sehingga menurun nya tingkat produktifitas pokdakan Kasai Jaya Sejahtera	Kampung Kasai Kecamatan Derawan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp.150 = 300000000, 500000 Nener x Rp. 325 = 162500000	-	2500000	ekor	462500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
29.	15-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	kesulitan dan mahal nya harga benur, sehingga menurun nya tingkat produktifitas pokdakan Rantau Tarik kampung Tabalar Muara	Kampung Tabalar Muara RT 03, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp.150 = 300000000, 1000000 Nener x Rp. 325 = 325000000, 50 saponin x Rp. 718713 = 35935650	-	1	Paket	660935650	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
30.	16-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	ANGGOTA POKDAKAN BERKAH RUMPUT GLASILARIA TIDAK MEMILIKI DANA UNTUK MEMBELI BENUR UDANG	POKDAKAN BERKAH RUMPUT GLASILARIA, Tanjung Sembilang RT. 007 Kelurahan Muara Sembilang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
31.	16-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	ANGGOTA POKDAKAN BINA BERSAMA KERSIK TIDAK MEMILIKI DANA UNTUK MEMBELI BENUR UDANG	POKDAKAN BINA BERSAMA KERSIK, Jalan Langaseng RT.003 Dusun Empang Desa Kersik Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	-	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
32.	16-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	ANGGOTA POKDAKAN BINA MANDIRI TIDAK MEMILIKI DANA UNTUK MEMBELI BENUR UDANG	POKDAKAN BINA MANDIRI, Kelurahan Salok Api Laut RT.002 Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
33.	17-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Budidaya Perikanan Air Laut (Benih Ikan (Kerapu, Kakap Putih), Pakan, Mesin Pakan, Aquatech, Bibit Rumput Laut,) serta Perahu dan mesin Ketinting 7 PK untuk monitoring di Kab/Kota	Perlu adanya bantuan sarana dan bibit rumput laut untuk meningkatkan produksi rumput laut yang berkelanjutan untuk kelompok Pokdakan Nestapa	Kelurahan Teritip Kec. Balikpapan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Bibit Rumput Laut Rp. 16000/Kg x 10000 Kg = 160000000	-	10000	Kg	160000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
34.	17-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Budidaya Perikanan Air	Perlu adanya bantuan sarana dan bibit rumput	Kelurahan Manggar Kec.	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN	Diproses lebih lanjut	Bibit Rumput Laut Rp.	-	10000	Kg	160000000	-	Penyediaan Sarana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			Laut (Benih Ikan (Kerapu, Kakap Putih), Pakan, Mesin Pakan, Aquatech, Bibit Rumput Laut,) serta Perahu dan mesin Ketinting 7 PK untuk monitoring di Kab/Kota	laut untuk meningkatkan produksi rumput laut yang berkelanjutan untuk kelompok Pokdakan Moji Laut Biru	Balikpapan Timur, Provinsi Kalimantan Timur			Dan Perikanan		SESUAI KETENTUAN		16000/Kg x 10000 Kg = 160000000						Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
35.	17-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Budidaya Perikanan Air Laut (Benih Ikan (Kerapu, Kakap Putih), Pakan, Mesin Pakan, Aquatech, Bibit Rumput Laut,) serta Perahu dan mesin Ketinting 7 PK untuk monitoring di Kab/Kota	Perlu adanya bantuan sarana dan bibit rumput laut untuk meningkatkan produksi rumput laut yang berkelanjutan untuk kelompok Pokdakan Alga Hijau Teritip	Kelurahan Teritip Kec. Balikpapan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Bibit Rumput Laut Rp. 16000/Kg x 10000 Kg = 160000000	-	10	Paaket	-	Non Belanja Transfer	-
36.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN BUDI BERSAMA TIDAK MAMPU BELI BENIH UDANG DAN	POKDAKAN BUDI BERSAMA, Handil 9 RT.06 Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
37.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN HARAPAN MEKAR BARU TIDAK MAMPU BELI BENUR UDANG DAN LAINNYA	POKDAKAN HARAPAN MEKAR BARU, Muara Sembilang RT.10 Kelurahan Muara Sembilang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
38.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN INTI KARYA BERSAMA TIDAK MAMPU BELI BENUR UDANG	POKDAKAN INTI KARYA BERSAMA, Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Pokdakan Inti Karya Bersama Telah mendapatkan bantuan melalui dana APBD-P thn 2024	-	-	Paket	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
39.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN JUJUR JAYA TIDAK MAMPU MEMBELI BENIH/BENUR	POKDAKAN JUJUR JAYA, Kelurahan Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	318610000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
40.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3	POKDAKAN JUKUT NICO TIDAK MAMPU MEMBELI PAKAN PEMBENIHAN DAN PEMBESARAN	POKDAKAN JUKUT NICO, Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	7850 Kg x 38148/kg = 299461800	Disetujui	7850	Kg	200000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			Danau															
41.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN KOLAM INDAH TIDAK MAMPU MEMBELI PAKAN PEMBENIHAN DAN PEMBESARAN	POKDAKAN KOLAM INDAH, Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	7850 Kg x 38148/kg = 299461800	-	7850	Kg	299461800	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
42.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN LELE SUNGAI TABUK TIDAK MAMPU MEMBELI PAKAN PEMBENIHAN DAN PEMBESARAN	POKDAKAN LELE SUNGAI TABUK, Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	7850 Kg x 38148/kg = 299461800	Disetujui	7850	Kg	200000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
43.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN MERPATI TIDAK MAMPU MEMBELI BENUR UDANG DAN SAPONIN	POKDAKAN MERPATI, Kelurahan Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000 69 zak Saponin x 718713 = 49591197	Disetujui	1	Paket	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
44.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN MUARA KUTAI SEJAHTERA TIDAK MAMPU MEMBELI BENUR DAN LAINNYA	POKDAKAN MUARA KUTAI SEJAHTERA, Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	-	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
45.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN MUTIARA HANTER TIDAK MAMPU MEMBELI PAKAN PEMBENIHAN DAN PEMBESARAN	POKDAKAN MUTIARA HANTER, Desa Handil terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	7850 Kg x 38148/kg = 299461800	-	7850	Kg	299461800	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
46.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN PADA IDI TIDAK MAMPU MEMBELI BIBIT/BENUR UDANG DAN SAPONIN	POKDAKAN PADA IDI, Kelurahan Muara Sembilang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000 69 zak Saponin x 718713 = 49591197	Disetujui	1	Paket	311390000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
47.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar	POKDAKAN PERMATA HANTER TIDAK MAMPU MEMBELI PAKAN PEMBENIHAN DAN PEMBESARAN	POKDAKAN PERMATA HANTER, Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	7850 Kg x 38148/kg = 299461800	-	7850	Kg	299461800	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau		Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur													Daerah Kabupaten/Kota
48.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN USAHA BERSAMA TIDAK MAMPU MEMBELI PAKAN PEMBENIHAN DAN PEMBESARAN	POKDAKAN USAHA BERSAMA, Desa Segihan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	7850 Kg x 38148/kg = 299461800	-	7850	Kg	299461800	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
49.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN PULAU JAWA TIDAK MAMPU MEMBELI BENUR UDANG DAN LAINNYA	POKDAKAN PULAU JAWA JAYA, Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
50.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN PULAU LAYANG SEJAHTERA TIDAK MAMPU MEMBELI BENUR UDANG DAN LAINNYA	POKDAKAN PULAU LAYANG SEJAHTERA, Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
51.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN RUMPUN KELUARGA TIDAK MAMPU MEMBELI BENUR UDANG DAN LAINNYA	POKDAKAN RUMPUN KELUARGA, Kelurahan Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	-	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
52.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN SUMBER MAKMUR TIDAK DAPAT MEMBELI BENUR UDANG DAN LAINNYA	POKDAKAN SUMBER MAKMUR, Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
53.	17-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN TAMBAK BANJAR BELUM MAMPU MEMBELI PAKAN PEMBENIHAN DAN PEMBESARAN	POKDAKAN TAMBAK BANJAR, Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	7850 Kg x 38148/kg = 299461800	Disetujui	7850	Kg	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			Danau		Timur													
54.	18-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Panorama Surya Indah Jl Nusiyrwan Ismail RT.15 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang mengajukan permohonan bantuan pengadaan pakan ikan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan usaha budidaya ikan	Jl Nusiyrwan Ismail RT.15 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	Kg	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
55.	18-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) Breeder Farm Fisheries Jl. Assahadah RT.19 Gg. Tani 2 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Samarinda mengajukan permohonan bantuan pengadaan pakan ikan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan usaha budidaya ikan	Jl. Assahadah RT.19 Gg. Tani 2 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	Kg	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
56.	18-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) Rin Sukses Farm Jalan Puskesmas RT.33 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda mengajukan permohonan bantuan pengadaan pakan ikan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan usaha budidaya ikan	Jalan Puskesmas RT.33 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	Kg	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
57.	18-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Rejo Mulyo Maju Jalan Rejo Mulyo RT.32 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara mengajukan permohonan bantuan pengadaan pakan ikan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan usaha budidaya ikan	Jalan Rejo Mulyo RT.32 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	Kg	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
58.	18-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Sumber Alam Mulia Jalan Karang Mulya RT.19 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda mengajukan permohonan bantuan pengadaan pakan ikan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan usaha budidaya ikan	Jalan Karang Mulya RT.19 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	Kg	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
59.	18-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pemuda Berdikari Maju Jalan Tol Balsam RT.06 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda mengajukan permohonan bantuan pengadaan pakan ikan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan usaha budidaya ikan	Jalan Tol Balsam RT.06 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	Kg	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
60.	18-04-2025	Muhammad Darlis,	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Artemia	Jalan Pangeran Suryanata	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga	Disetujui	8000	Kg	100000000	-	Penyediaan Sarana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
		S.Hut., M.Si	Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Indonesia Jaya Jalan Pangeran Suryanata Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu mengajukan permohonan bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan (SARPOKAN) pengadaan pakan ikan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan usaha budidaya ikan	Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur			Dan Perikanan		SESUAI KETENTUAN		Per kg) = 305184000						Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
61.	18-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Royal Fish Mandiri Jalan Sultan Sulaiman RT.18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda mengajukan permohonan bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan (SARPOKAN) pengadaan pakan ikan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan usaha budidaya ikan	Jalan Sultan Sulaiman RT.18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	Kg	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
62.	18-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Sindo Lestari Jalan Srikandi RT.10 Kelurahan Bentuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda mengajukan permohonan bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan (SARPOKAN) pengadaan pakan ikan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan usaha budidaya ikan	Jalan Srikandi RT.10 Kelurahan Bentuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	Kg	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
63.	19-04-2025	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	KUB BERKAH MAHAKAM MANDIRI mengajukan permohonan bantuan mesin ketinting	RT. 026 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Usulan Tidak Sesuai Dengan Kamus Usulan Perikanan Budidaya	-	18	Unit	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
64.	19-04-2025	Yenni Eviliana, S.E	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok Nelayan "SETIA RANDOM" mengajukan permintaan mesin ketinting guna menunjang produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	Desa Random Kec. Tanjung Harapan Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	15	set	-	Non Belanja Transfer	-
65.	19-04-2025	Yenni Eviliana, S.E	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok Nelayan "Sejahtera Random" mengajukan permintaan set mesin ketinting guna meningkatkan produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	desa random Kec. Tanjung Harapan Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	15	set	-	Non Belanja Transfer	-
66.	19-04-2025	Yenni Eviliana, S.E	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok nelayan "SAMA DUE" mengajukan permintaan mesin ketinting guna meningkatkan produktivitas dan perekonomian warga setempat.	Desa Rantau Panjang kec.Tanah Grogot Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	9	set	-	Non Belanja Transfer	-
67.	19-04-2025	Yenni Eviliana, S.E	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok Nelayan PAKARESO mengajukan permintaan mesin ketinting dan alat tangkap	Desa Muara Adang Kec. Long Ikis kab. Paser, Provinsi	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	10	Paket	-	Non Belanja Transfer	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
				guna menunjang produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	Kalimantan Timur													
68.	19-04-2025	Salehuddin, S.Sos, S.Fil	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Bantuan Benur dan nener untuk kelompok Pokdakan Hanter Etam Maju desa Saliki kecamatan Muara Badak	Desa Saliki Kecamatan Muara Badak , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah pernah mendapatkan bantuan melalui dana APBD-P Tahun 2024	-	-	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
69.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	diperlukan bantuan Benur Udang untuk menunjang kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Harapan Maju yang dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan penghasilan nelayan di kelompok Harapan Maju	Desa Seniung Jaya RT. 06 Kecamatan Pasir Belengkong, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir di ID Usulan 1618367	-	1000000	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
70.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	diperlukan bantuan Nener Bandeng untuk menunjang kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Harapan Maju yang dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan penghasilan nelayan di kelompok Harapan Maju.	Desa Seniung Jaya RT. 06 Kecamatan Pasir Belengkong, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir di ID Usulan 1618367	-	500000	Ekor	165500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
71.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	diperlukan saponin dan pupuk untuk meningkatkan kegiatan usaha kelompok Pembudidaya Ikan Air Payau "Harapan Maju"	Desa Seniung Jaya RT. 06 Kec. Pasir Belengkong, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir di ID Usulan 1618367	-	125	Sak	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
72.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	diperlukan bantuan Benur Udang untuk menunjang kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Jaya Raya yang dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan penghasilan nelayan di kelompok Jaya raya	Desa Muara Pasir RT 06 Kec. Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir di ID Usulan 1618429	-	1000000	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
73.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	diperlukan bantuan Nener Bandeng untuk menunjang kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Jaya Raya yang dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan penghasilan nelayan di kelompok Jaya raya	Desa Muara Pasir RT 06 Kec. Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir di ID Usulan 1618429	-	500000	Ekor	165500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
74.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota	diperlukan saponin dan pupuk untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Jaya Raya	Desa Muara Pasir RT 06 Kec. Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir di ID Usulan 1618429	-	125	Sak	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau		Timur													Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
75.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	diperlukan bantuan Benur Udang untuk menunjang kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Sambau Jaya yang dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan penghasilan nelayan di kelompok Sambau Jaya.	Gang Fitrah RT 02 Desa Pondong Baru Kec. Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618521	-	750000	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
76.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	diperlukan bantuan nener bandeng untuk menunjang kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Sambau Jaya yang dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan penghasilan nelayan di kelompok Sambau Jaya.	Gang Fitrah RT 02 Desa Pondong Baru Kec. Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618521	-	375000	Ekor	121875000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
77.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	dibutuhkan saponin dan pupuk sp36 untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Sambau Jaya	Gang Fitrah RT 02 Desa Pondong Baru Kec. Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618521	-	375	Sak	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
78.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkann Bantuan Benur Udang untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Nia Sejahtera dalam upaya menunjang pendapatan dan nilai tambah bagi seluru anggota Kelompok Nia Sejahtera	Desa Pondong Baru RT 001 Kec. Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618438	-	800000	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
79.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkann Bantuan Nener (Bandeng) untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Nia Sejahtera dalam upaya menunjang pendapatan dan nilai tambah bagi seluru anggota Kelompok Nia Sejahtera	Desa Pondong Baru RT 001 Kec. Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618438	-	400000	Ekor	130000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
80.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	diperlukan saponin dan pupuk untuk meningkatkan kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Nia Sejahtera	Desa Pondong Baru RT 001 Kec. Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618438	-	400	Sak	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
81.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan	Dibutuhkann Bantuan Nener Bandeng untuk kegiatan usaha budidaya	Desa Suiliran Baru RT 23 Rawa Jentik	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan	-	500000	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	ikan kelompok Harapan Jaya dalam upaya menunjang pendapatan dan nilai tambah bagi seluruh anggota Kelompok Harapan Jaya	Kec. Paser Belengkong, Provinsi Kalimantan Timur			Perikanan		KETENTUAN		1618486						Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
82.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkann Bantuan Benur (Udang) untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Harapan Jaya dalam upaya menunjang pendapatan dan nilai tambah bagi seluruh anggota Kelompok Harapan Jaya.	Desa Suiliran Baru RT 23 Rawa Jentik Kec. Paser Belengkong, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618486	-	1000000	Ekor	165500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
83.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	dibutuhkan saponin dan pupuk untuk meningkatkan usaha budidaya ikan kelompok Harapan Jaya	Desa Suiliran Baru RT 23 Rawa Jentik Kec. Paser Belengkong, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618486	-	200	Sak	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
84.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	dibutuhkan benur udang windu untuk kegiatan budidaya ikan kelompok Kanal Batangan	RT 05 Desa Muara Pasir Kec. Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Benur x Rp. 150 = 150000000	-	1000000	Ekor	150000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
85.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	perlu saponin untuk meningkatkan kegiatan budidaya ikan kelompok Kanal Batangan	RT 05 Desa Muara Pasir Kec. Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	50 zak x 718713 = 35935650	-	50	Sak	35935650	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
86.	21-04-2025	Didik Agung Eko Wahono	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkannya Bibit dan Pakan Ikan untuk Kelompok Budidaya Ikan "Usaha Bersama Maju Jaya"	Jalan Melati RT.12 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggaraong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Yang di akomodir hanya pakan ikan air tawar 6000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 228888000	Disetujui	6000	Kg	206567031	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
87.	21-04-2025	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN TENDA BIRU mengajukan permohonan bantuan benur udang	Dusun Tanjung Berukang Desa Sepatin RT. 005 Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1300000 Benur x Rp. 150 = 195000000	Disetujui	1300000	Ekor	195000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
88.	21-04-	Baharuddin	Penyediaan Sarana	POKDAKAN PERMATA	Dusun Tanjung	Provinsi	Dinas Kelautan	Dinas	Usulan	PROSES DAPAT	Diproses lebih	1300000 Benur	Disetujui	1300000	Ekor	195000000	-	Penyediaan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
	2025	Demmu, S.Pi, M.Si	Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	BUNDA mengajukan permohonan bantuan benur udang	Berukang Desa Sepatin RT. 002 Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur		Dan Perikanan	Kelautan Dan Perikanan	disetujui	DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	lanjut	x Rp. 150 = 195000000						Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
89.	21-04-2025	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Tani Tambak BUNGA MALAM mengajukan permohonan bantuan benur	Dusun Tanjung Berukang Desa Sepatin Rt.010 Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1300000 Benur x Rp. 150 = 195000000	Disetujui	1300000	Ekor	195000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
90.	21-04-2025	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok Nelayan DANAU HARAPAN mengajukan permohonan bantuan mesin ces	Jl. Kampung Lama RT XII Desa Jantur Kecamatan Muara Muntai, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	13	Unit	-	Non Belanja Transfer	-
91.	21-04-2025	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok Nelayan PERSATUAN NELAYAN mengajukan permohonan bantuan mesin ces	Jl. Kampung Lama RT.XII Desa Jantur Kecamatan Muara Muntai, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	12	Unit	-	Non Belanja Transfer	-
92.	21-04-2025	Ananda Emira Moeis, S.Sn	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	terkendala alat transportasi seperti kapal, mesin kapal untuk mekakukan aktivitas tangkap bagi nelayan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap KUB Tunas Tumbuh Bersama	Jl. Mesjid Gg. Nelayan RT. 32 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Hanya mesin yang bisa diakomodir	Disetujui	11	Unit	200000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
93.	21-04-2025	Ananda Emira Moeis, S.Sn	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	terkendala alat transportasi seperti kapal, mesin kapal untuk mekakukan aktivitas tangkap bagi nelayan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap KUB Marannu Berjaya.	Jl. Trikora Gg. Makassar RT. 52 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	foto copy surat tanah belum ada. hanya mesin yg bisa diakomodir	Disetujui	14	Unit	240000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
94.	21-04-2025	Ananda Emira Moeis, S.Sn	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	terkendala alat transportasi seperti kapal, mesin kapal untuk mekakukan aktivitas tangkap bagi nelayan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap KUB Taddutang Nusantara Samarinda	Jl. Mangkupalas RT. 13 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Seberang , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	hanya mesin yang diakomodir. foto copy surat tanah belum ada	Disetujui	15	Unit	260000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
95.	21-04-2025	Ananda Emira Moeis, S.Sn	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	terkendala alat transportasi seperti kapal, mesin kapal untuk mekakukan aktivitas tangkap bagi nelayan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap KUB Nelayan Makmur Palaran	Jl. Gaya Baru RT. 06 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	hanya mesin yang d rekomendasikan	Disetujui	15	Unit	260000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
96.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur	perlu benur udang windu untuk kegiatan budidaya	Desa Muara Adang Kec. Long	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir di ID	-	450000	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	ikan kelompok Penjawen Jaya	Ikis, Provinsi Kalimantan Timur			Dan Perikanan		SESUAI KETENTUAN		Usulan 1618433						Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
97.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkann Bantuan Nener (Bandeng) untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Penjawen Jaya dalam upaya menunjang pendapatan dan nilai tambah bagi seluruh anggota Kelompok Penjawen Jaya.	Desa Muara Adang Kec. Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir di ID Usulan 1618433	-	250000	Ekor	81250000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
98.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	perlu saponin untuk meningkatkan kegiatan budidaya ikan kelompok Penjawen Jaya	Desa Muara Adang Kec. Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir di ID Usulan 1618433	-	270	Sak	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
99.	21-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	perlu nener bandeng untuk kegiatan budidaya ikan kelompok kanal batangan	RT. 005 Desa Muara Pasir Kec. Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Nener x Rp. 325 = 325000000	-	1000000	Ekor	325000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
100.	21-04-2025	Abdul Rakhman Bolong, S.Kom	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Keterbatasan sarana operasional khususnya mesin perahu. Sebagian besar nelayan masih menggunakan mesin yang sudah tua, berkekuatan kecil, bahkan ada yang masih mengandalkan tenaga manual. Kondisi ini mengakibatkan jangkauan melaut yang terbatas, hasil tangkapan yang tidak optimal, dan meningkatnya risiko keselamatan saat berada di laut.	Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	10	Mesin	-	-	-
101.	21-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidayaan Ikan (Pokdakan) Rizki Mina Barokah Jalan Talang Sari RT.02 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda mengajukan permohonan bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan (SARPOKAN) pengadaan pakan ikan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan usaha budidaya ikan	Jalan Talang Sari RT.02 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	Kg	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
102.	21-04-2025	Muhammad Darlis,	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur	Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) Muara	Jl. Dermaga Baru RT.12 Desa	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 =	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
		S.Hut., M.Si	Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Salo Tireng Jl. Dermaga Baru RT.12 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu	Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur			Dan Perikanan		SESUAI KETENTUAN		300000000						Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
103.	21-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Muara Salo Tireng Jl. Dermaga Baru RT.12 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Saponin	Jl. Dermaga Baru RT.12 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	120 zak (3000 Kg) x 718713 = 86245560	-	3000	Kg	86245560	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
104.	21-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Muara Bersinar Jl. Bina Cipta Gg. Keramat RT.15 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu	Jl. Bina Cipta Gg. Keramat RT.15 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
105.	21-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Muara Bersinar Jl. Bina Cipta Gg. Keramat RT.15 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Saponin	Jl. Bina Cipta Gg. Keramat RT.15 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	120 zak (3000 Kg) x 718713 = 86245560	-	3000	Kg	86245560	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
106.	21-04-2025	Yonavia, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	BANTUAN PAKAN IKAN KEPADA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN LITAK AQUACULTURE	KAMPUNG LINGGANG MELAPEH BARU KECAMATAN LINGGANG BIGUNG, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	7500 Kg x 38148/kg = 286110000	-	250	SAK	286110000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
107.	21-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Tangga Bue Jl. Kapitan Toko Lima RT.09 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu	Jl. Kapitan Toko Lima RT.09 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
108.	21-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Tangga Bue Jl. Kapitan Toko Lima RT.09 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Saponin	Jl. Kapitan Toko Lima RT.09 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	120 zak (3000 Kg) x 718713 = 86245560	-	3000	Kg	86245560	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
109.	21-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Sejahtera Bersama Sungai Perangar RT.03 Desa Sepatin Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Sungai Perangar RT.03 Desa Sepatin Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Nener x Rp. 325 = 325000000	-	1000000	Ekor	325000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
110.	21-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Muara Taddutang Jl. Kapitan Toko Lima RT.05 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu	Jl. Kapitan Toko Lima RT.05 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
111.	21-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Muara Taddutang Jl. Kapitan Toko Lima RT.05 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Saponin	Jl. Kapitan Toko Lima RT.05 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	120 zak (3000 Kg) x 718713 = 86245560	-	3000	Kg	86245560	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
112.	22-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Toko Lima Sejahtera Jl. Dermaga Baru RT.12 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu	Jl. Dermaga Baru RT.12 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
113.	22-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Butuh Pakan yang cukup untuk menunjang pengembangan usaha dan peningkatan produksi usaha di Pokdakan Maju Bersama	Jalan. Danau Seamayang RT.002 Kecamatan Gunung Tabur - Kabupaten Berau 77352, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1200 Kg x 38148/kg = 45776000	-	12000	Kg	45776000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
114.	22-04-2025	Syahariah, SE	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	PERMOHONAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA BIOFLOG	Jl. Tanjung Jumlai RT. 002 Kelurahan Pejala Kecmatan Penajam, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Tidak ada di Kamus Usulan	-	1	Paket	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
115.	22-04-2025	Kamaruddin Ibrahim	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Permohonan Bantuan Pengadaan GPS Perikanan KUB Sepingga Jaya Abadi	Jl. Marsma R Ismahyudi RT 18 Kel. Sepingga Raya Kec. Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	lengkapi Proposal	-	29	Unit	377000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
116.	22-04-	Syahariah,	Penyediaan Sarana	PERMOHONAN BANTUAN	Jl. Bere-bere	Provinsi	Dinas Kelautan	Dinas	Usulan	PROSES DAPAT	Diproses lebih	2000000 Benur	Disetujui	1	Paket	250000000	-	Penyediaan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
	2025	SE	Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	SARANA PRASARANA BUDIDAYA UDANG WINDU DAN BANDENG	RT.008 Kel. Tjg Tengah, Provinsi Kalimantan Timur		Dan Perikanan	Kelautan Dan Perikanan	disetujui	DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	lanjut	x Rp 150 = 300000000 500000 Nener x 325 = 162500000						Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
117.	22-04-2025	Syahariah, SE	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Permohonan Bantuan Sarana Prasarana Budidaya	Jl. Ahmad Yani RT. 01 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Yang di akomodir hanya Nener (Benih Ikan Bandeng) 750000 Ekor x 325 = 243750000	Disetujui	750000	Ekor	250000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
118.	22-04-2025	Syahariah, SE	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Permohonan Bantuan Pakan Ikan	Jl. Lobak RT. 04 Desa Sebakung Jaya Kecamatan Babulu, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	10000 Kg x 38148/kg = 381480000	Disetujui	333	karung	250000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
119.	22-04-2025	Syahariah, SE	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Permohonan Bantuan Pakan Ikan	Jl. Lobak RT. 08 Desa Sebakung Jaya Kecamatan Babulu, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	9400 Kg x 38148/kg = 358591200	Disetujui	313	karung	250000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
120.	22-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Maddennuange Jl. M. Jafar S RT.04 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan bantuan mesin ketinting Yasuka 500 Excellent yang merupakan kebutuhan dasar anggota kelompok	Jl. M. Jafar S RT.04 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	14	Unit	-	Non Belanja Transfer	-
121.	22-04-2025	Syahariah, SE	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Permohonan Bantuan Jaring Udang	Jl. Mulawarman RT. 04 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	1	paket	-	-	-
122.	22-04-2025	Syahariah, SE	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	PERMOHONAN BANTUAN JARING UDANG (TRAMMEL NET)	Jl Mulawaran RT.04 Kel Pantai Lango Kec Penajam,, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	450	set	-	-	-
123.	22-04-2025	Syahariah, SE	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	PERMOHONAN BANTUAN JARING UDANG (TRAMMEL NET)	Jln. Mulawarman RT.02 Kel. Pantai Lango Kec. Penajam, Provinsi	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	250	Set	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
					Kalimantan Timur													
124.	22-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	dibutuhkan nener bandeng untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Batang Junior	Desa Muara Pasir Kec. Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Nener x Rp. 325 = 325000000	-	1000000	Ekor	325000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
125.	22-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	dibutuhkan benih udang (benur) untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Batang Junior	Desa Muara Pasir Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Benur x Rp. 150 = 150000000	-	1000000	Ekor	150000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
126.	22-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	perlu saponin untuk meningkatkan kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Batang Junior	Desa Muara Pasir Kec. Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	50 zak x 718713 = 35935650	-	50	Sak	35935650	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
127.	22-04-2025	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Tani Tambak TANJUNG JAYA mengajukan permohonan bantuan benur udang	Dusun Tanjung Berukang Desa Sepatin Rt. 02 Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1300000 Benur x Rp. 150 = 195000000	Disetujui	1300000	Ekor	195000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
128.	22-04-2025	Salehuddin, S.Sos, S.Fil	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Bantuan benur dan nener untuk kelompok pembudidaya ikan Tani Tambak desa Tani Baru Kecamatan Anggana	Desa Tani Baru RT 17 Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp 150 = 300000000 350000 Nener x 325 = 113750000	Disetujui	2350000	Ekor	400000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
129.	22-04-2025	Salehuddin, S.Sos, S.Fil	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Bantuan Bibit Benur dan nener untuk Pokdakan MATTUJUJ TUJUH	Jalan Kapitan RT 04 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah pernah mendapatkan bantuan melalui dana APBD-P Tahun 2024	-	-	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
130.	22-04-2025	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	KUB HANDIL DUA NELAYAN mengajukan permohonan bantuan sarana dan prasarana perikanan	Rt. 007 Dusun Handil Dua Desa santan Tengah Kecamatan Marang Kayu, Provinsi Kalimantan	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	10	Unit	-	Non Belanja Transfer	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
					Timur													
131.	22-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	diperlukan pakan ikan untuk meningkatkan kegiatan budidaya ikan kelompok Sepakat Baru	Jl. Jend. A.Yani RT IV Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2850 Kg x 38148/kg = 108721800	-	2850	kg	108721800	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
132.	22-04-2025	Salehuddin, S.Sos, S.Fil	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Bantuan benih Benur dan nener untuk Pokdakan Tambak Berkah Desa Muara Badak ilir	Jalan Kapitan RT 04 Desa Muara Badak ilir Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah pernah mendapatkan bantuan melalui dana APBD-P Tahun 2024	-	-	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
133.	22-04-2025	Salehuddin, S.Sos, S.Fil	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Bantuan Benur dan nener untuk Pokdakan Borneo Jaya Desa Tani Baru kecamatan Anggana	Jalan Muara llo selatan RT 16 Desa Tani Baru Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp 150 = 300000000 350000 Nener x 325 = 113750000	Disetujui	2350000	Ekor	400000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
134.	22-04-2025	Salehuddin, S.Sos, S.Fil	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Bantuan Benur dan Nener udang untuk Pokdakan Sungai Tengkorak Desa Tani Baru Kecamatan Anggana	Desa Tani Baru RT 09 Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp 150 = 300000000 350000 Nener x 325 = 113750000	Disetujui	2350000	Ekor	400000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
135.	22-04-2025	Salehuddin, S.Sos, S.Fil	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Bantuan Benih Benur dan Nener udang untuk Pokdakan Muna Asri desa Tani Baru Kecamatan Anggana	Desa Tani Baru RT 16 kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp 150 = 300000000 350000 Nener x 325 = 113750000	Disetujui	2350000	Ekor	400000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
136.	22-04-2025	Salehuddin, S.Sos, S.Fil	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Bantuan Benih Benur dan Nener udang untuk Pokdakan Sinar utama jaya desa Tani Baru Kecamatan Anggana	Desa Tani Baru RT 06 Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp 150 = 300000000 350000 Nener x 325 = 113750000	Disetujui	2350000	Ekor	400000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
137.	22-04-2025	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	KUB NELAYAN JAYA MANDIRI mengajukan permohonan bantuan perahu	Jl. Yos Sudarso Rt. 06 Kelurahan Sarijaya Kecamatan sanga sanga, Provinsi Kalimantan	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	null	Disetujui	13	Unit	221000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
					Timur													
138.	22-04-2025	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	KUB NELAYAN LAUT BIRU MUARA mengajukan permohonan bantuan perahu	Jl. Padat Karya Rt. 004 Kelurahan Sangasanga Muara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	lengkapi kusuka yang kurang	Disetujui	10	Unit	170000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
139.	22-04-2025	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	KUB LAUT PUDAK BARU mengajukan permohonan bantuan perahu	Jl. Pudak Baru RT. 10 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sangasanga, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Kukusa kurang. NPWP kelompok belum ada	Disetujui	10	Unit	170000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
140.	22-04-2025	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	KUB NELAYAN SUMBER HARAPAN mengajukan permohonan bantuan perahu	Jl,. Pudak baru Rt. 10 Kelurahan pendingin Kecamatan sangasanga, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Berita acara kelompok belum ada	Disetujui	10	Unit	170000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
141.	22-04-2025	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	KUB SETIA KAWAN mengajukan permohonan bantuan perahu	Jl. Jalur Pipa RT. 05 Kelurahan Muara Sangasanga Kecamatan sangasanga, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	disesuaikan dengan kebutuhan	Disetujui	12	Unit	204000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
142.	22-04-2025	H. Agus Aras	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	sarana dan prasarana mesin kapal	jl. panglima batur rt.013, bentua baru ulu, sangkulirang, kutai timur, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	10	unit	-	Non Belanja Transfer	-
143.	22-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papiyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Masih kurangnya bibit ikan air tawar dan keramba jaring apung pada Pokdakan Mitra Belayan Kenohan	Jl.Kemakmuran RT.02 Desa Teluk Muda Kec.Kenohan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	Kg	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
144.	22-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Untuk meningkatkan perekonomian anggota Kelompok Usaha Bersama Pelak Maju Desa Muara Ritan mengajukan permohonan bantuan Kelengkapan Nelayan berupa Perahu Fiber dan Mesin Ces	Jl. Jaya Nata RT.002 Muara Ritan Kec.Tabang, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	20	unit	-	Non Belanja Transfer	-
145.	22-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papiyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	mahal dan sulit pakan ikan sehingga menurun tingkat produktifita Pokdakan Buen Were Desa Jemparing	Desa Jemparing Kec. Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	-	8000	Kg	305184000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
146.	22-04- 2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Untuk meningkatkan perekonomian anggota Kelompok Nelayan (KUB) Bina Bersama Desa Jantur mengajukan permohonan bantuan Alat Tangkap Ikan	Jl.Pulau Sempurna RT.001 Desa Jantur Kec.Muara Muntai, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	16	unit	-	-	-
147.	22-04- 2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Untuk meningkatkan perekonomian anggota kelompok Usaha Bersama Lalang Samudera Desa Liang mengajukan permohonan bantuan Perahu Fiber	Jl.Panglima Suta Kanan RT.07 Desa Liang Kec.Kota Bangun, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	13	unit	-	Non Belanja Transfer	-
148.	22-04- 2025	Abdul Rakhman Bolong, S.Kom	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok Nelayan KUB Sungai Mariam Bersatu di Desa Sungai Mariam Kacamatan Anggana menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan alat tangkap dan sarana operasional, khususnya mesin perahu. Sebagian besar nelayan masih menggunakan mesin yang sudah tua, berkekuatan kecil, bahkan ada yang masih mengandalkan tenaga manual. Kondisi ini mengakibatkan jangkauan melaut yang terbatas, hasil tangkapan yang tidak optimal, dan meningkatkan risiko keselamatan saat berada di laut	Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	13	Mesin	-	-	-
149.	22-04- 2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Perlu adanya bantuan pakan ikan untuk menunjang kebutuhan kegiatan usaha produksi budidaya ikan air tawar di kelompok budidaya ikan di Kampung Merancang Ilir RT.002 Kecamatan Gunung Tabur - Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	Kampung Merancang Ilir RT.002 Kecamatan Gunung Tabur - Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	12000 Kg x 38148/kg = 457776000	-	12000	Kg	457776000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
150.	22-04- 2025	Abdul Rakhman Bolong, S.Kom	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	KUB Nelayan Bersatu di Desa Sungai Mariam Kacamatan Anggana menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan alat tangkap dan sarana operasional, khususnya mesin perahu. Sebagian besar nelayan masih menggunakan mesin yang sudah tua, berkekuatan kecil, bahkan ada yang masih mengandalkan tenaga manual. Kondisi ini mengakibatkan jangkauan melaut yang terbatas, hasil tangkapan yang tidak optimal, dan meningkatkan risiko keselamatan saat berada di laut	Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	10	Mesin	-	-	-
151.	22-04- 2025	Ananda Emira Moeis, S.Sn	Penyediaan Sarana Budidaya Perikanan Air Laut (Benih Ikan (Kerapu, Kakap Putih), Pakan, Mesin Pakan, Aquatech, Bibit	Kurangnya Pengembangan Usaha Tangkap Dan Budidaya Ikan Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDARAN) Cahaya Laut	Jl. MH THAMRIN RT. 02 KELURAHAN GUNUNG ELAI KECAMATAN	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Pokdakan cahaya Laut Salleba telah mendapatkan bantuan dari	-	-	SET	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			Rumput Laut,) serta Perahu dan mesin Ketinting 7 PK untuk monitoring di Kab/Kota	Salebba Jaya	BONTANG UTARA, Provinsi Kalimantan Timur							Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur di thn 2025						Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
152.	22-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Mahalnya Harga pakan sehingga tingkat produktifitas pokdakan Terusan menurun	Handil D RT 03 Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	Disetujui	8000	Kg	100000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
153.	22-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	mahal dan sulitnya bibit udang, sehingga menurun hasil pokdakan Tambak Berkah DesaLori Kec. Tanjung Harapan Kab. Pasir	Desa Lori Kec. Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp.150 = 225000000, 500000 Nener x Rp. 325 = 162500000	-	2000000	ekor	378500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
154.	22-04-2025	Yenni Eviliana, S.E	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok nelayan Tepian Dayo megajukan permintaan Mesin ketinting	Desa Random Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	15	set	-	Non Belanja Transfer	-
155.	23-04-2025	Yenni Eviliana, S.E	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok Nelayan DERARI mengajukan permohonan bantuan perahu fiberglass dan mesin	Desa Sandeley Kec. Kuaro Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	10	paket	-	Non Belanja Transfer	-
156.	23-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Mahal dan sulitnya bahan paka ikan, sehingga menurunnya tingkat produktifitas Pokdakan Atang Saping Desa Rangan	Desa Rangan Kec. Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	-	8000	Kg	305184000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
157.	23-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN PUTRA KALTIM TIDAK MAMPU MEMBELI BIBIT BENUR UDANG	POKDAKAN PUTRA KALTIM, RT.013 DESA MUARA PANTUAN KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
158.	23-04-2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan,	POKDAKAN MAWAR MELATI MENGUSULKAN PENGADAAN BENUR UDANG	POKDAKAN MAWAR MELATI, RT.004 DESA MUARA PANTUAN KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			dan Saponin di Kawasan 3 Danau		KARTANEGARA, Provinsi Kalimantan Timur													
159.	23-04- 2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN ASOKA 2 TIDAK MAMPU MEMBELI BENUR UDANG DAN MENGUSULKAN PENGADAAN BENUR UDANG	POKDAKAN ASOKA 2, RT.004 DESA MUARA PANTUAN KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
160.	23-04- 2025	Hj. Sulasih, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	POKDAKAN SINAR CAHAYA TAMBAK MENGUSULKAN PENGADAAN BENUR UDANG	POKDAKAN SINAR CAHAYA TAMBAK, RT.002 DESA MUARA PANTUAN KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
161.	23-04- 2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Perlu pakan ikan untuk meningkatkan usaha budidaya ikan kelompok Berkat Bersama	Jl. Dr. FI Thobing RT 9 KM 9 Desa Rempanga Kec. Loakulu, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	12000 Kg x 38148/kg = 457776000	-	12000	Kg	457776000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
162.	23-04- 2025	Yenni Eviliana, S.E	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok Nelayan Sumber Laut mengajukan permintaan mesin ketinting	Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabutaen Paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	19	set	-	Non Belanja Transfer	-
163.	23-04- 2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Sejahtera Abadi RT.14 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu	RT.14 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	-	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
164.	23-04- 2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Passonge RT.03 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu	RT.03 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Benur x Rp. 150 = 150000000	-	1000000	Ekor	150000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
165.	23-04- 2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Berkah Pemangkaran Sungai	Sungai Perangat RT.03 Desa Sepatin	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI	Diproses lebih lanjut	1000000 Nener x Rp. 325 = 325000000	-	1000000	Ekor	325000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Perangat RT.03 Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Nener Bandeng	Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur			Perikanan		KETENTUAN								Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
166.	23-04-2025	Yenni Eviliana, S.E	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok tani TEPIAN LESAT mengajukan permintaan bantuan mesin ketinting	desan random kec.tanjung harapan kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	15	set	-	Non Belanja Transfer	-
167.	23-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Windu Salo Cina RT.14 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu	RT.03 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	-	2666666	Ekor	-	Non Belanja Transfer	-
168.	23-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Anggrek Dusun 02 RT.04 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu	Dusun 02 RT.04 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Benur x Rp. 150 = 150000000	-	1000000	Ekor	150000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
169.	23-04-2025	H. Fadli Imawan, S.P., M.P	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Keberadaan Nelayan di Kelompok Nelayan Pada Idi' Desa Senipah Kec. Batu Engau yang menggunakanjaring sebagai alat tangkap ikan membutuhkan dukungan pengadaan jaring yang memadai untuk mendukung aktifitas keseharian warga sebagai nelayan penangkap ikan	Desa Senipah, Kec. Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	1	Paket	-	-	-
170.	23-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Muara Berukang Dusun Tanjung Berukang RT.10 Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu dan Nener Bandeng	Dusun Tanjung Berukang RT.10 Desa Sepatin Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Nener x Rp. 325 = 325000000 2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	-	3000000	Ekor	625000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
171.	23-04-2025	H. Fadli Imawan, S.P., M.P	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Keberadaan Nelayan di Kelompok Nelayan SIPATUO Desa Senipa Kec. Batu Engau yang menggunakanjaring sebagai alat tangkap ikan membutuhkan dukungan pengadaan jaring yang memadai untuk mendukung aktifitas keseharian warga sebagai nelayan penangkap ikan	Desa Senipah Kec. Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	25	Unit	-	Non Belanja Transfer	-
172.	23-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Ramah Lingkungan RT.10 Desa	RT.10 Desa Muara Pantuan Kecamatan	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI	Diproses lebih lanjut	1000000 Benur x Rp. 150 = 150000000	-	1000000	Ekor	150000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu	Anggana, Provinsi Kalimantan Timur			Perikanan		KETENTUAN								Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
173.	23-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Syukur Jaya RT.04 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu	RT.04 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Benur x Rp. 150 = 150000000	-	1000000	Ekor	150000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
174.	23-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Berkah Putra Putri RT.05 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu	RT.05 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Benur x Rp. 150 = 150000000	-	1000000	Ekor	150000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
175.	23-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Surya Gemilang RT.03 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu	RT.03 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	-	2000000	Ekor	300000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
176.	23-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) MUTIARA Dusun Tanjung Berukang RT.15 Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu dan Nener Bandeng	Dusun Tanjung Berukang RT.15 Desa Sepatin Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Nener x Rp. 325 = 325000000 2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	3000000	Ekor	625000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
177.	23-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Mekar Sari Dusun Tanjung Berukang RT.05 Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu dan Nener Bandeng	Dusun Tanjung Berukang RT.05 Desa Sepatin Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Nener x Rp. 325 = 325000000 2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	-	3000000	Ekor	625000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
178.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkan Siponin untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Selengot Jaya	Desa Selengot Kec. Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618495	-	80	Sak	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
179.	23-04-	Muhammad	Penyediaan Sarana	Kelompok Pembudidaya	RT.10 Desa	Provinsi	Dinas Kelautan	Dinas	Verifikasi	PROSES DAPAT	Diproses lebih	1000000 Nener	-	3000000	Ekor	625000000	-	Penyediaan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
	2025	Darliis, S.Hut., M.Si	Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Ikan (POKDAKAN) Pesona Sepatin RT.10 Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu dan Nener Bandeng	Sepatin Kecamatan Anggan, Provinsi Kalimantan Timur		Dan Perikanan	Kelautan Dan Perikanan	TAPD	DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	lanjut	x Rp. 325 = 325000000 2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000						Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
180.	23-04- 2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) PESONAMU Dusun Tanjung Berukang RT.02 Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu dan Nener Bandeng	Dusun Tanjung Berukang RT.02 Desa Sepatin Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Nener x Rp. 325 = 325000000 2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	-	3000000	Ekor	625000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
181.	23-04- 2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) PESISIR BERUKANG Dusun Tanjung Berukang RT.05 Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu dan Nener Bandeng	RT.05 Dusun Tanjung Berukang Desa Sepatin Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Nener x Rp. 325 = 325000000 2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	3000000	Ekor	625000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
182.	23-04- 2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) MAULANA Dusun Tanjung Berukang RT.10 Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu dan Nener Bandeng	RT.15 Dusun Tanjung Berukang Desa Sepatin Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Nener x Rp. 325 = 325000000 2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	Disetujui	3000000	Ekor	625000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
183.	23-04- 2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	mahal dan sulitnya bibit udang, shingga menurun hasil pokdakan Tambak mandiri Desa Lori Kec. Tanjung Harapan Kab. Pasir	Desa Lori Kec. Tanjung Harapan , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp.150 = 225000000, 500000 Nener x Rp. 325 = 162500000	-	2000000	ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
184.	23-04- 2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Permohonan Bantuan Nener dan Benur	RT. 03 Handil Terusan Tani Baru Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Kelompok sudah di akomodir di ID Usulan 1587950	-	-	ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
185.	23-04- 2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Untuk menunjang produksi udang	RT. 7 Desa Tani Baru Kec. Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 = 225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000	-	2000000	Ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			Danau															
186.	23-04-2025	Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) MAULANA BERKAH Dusun Tanjung Berukang RT.10 Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan permohonan Bantuan Benur Udang Windu dan Nener Bandeng	RT.10 Desa Sepatin Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Nener x Rp. 325 = 325000000 2000000 Benur x Rp. 150 = 300000000	-	3000000	Ekor	625000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
187.	23-04-2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Pemohonan Bantuan Nener dan Benur Hanter Etam Jaya	RT. 03 Handil Terusan Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 = 225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000	-	2000000	ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
188.	23-04-2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	PENINGKATAN PRODUKSI UDANG DESA PONDONG BARU	Desa PONDONG Baru Kecamatan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 = 225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000	-	2000000	Ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
189.	23-04-2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Pemohonan Bantuan Benur dan Nener Sri Rejeki	RT. 09 desa tani baru kecamatan anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 = 225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000	-	2000000	ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
190.	23-04-2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Peningkatan Produksi Udang Tambak Sumber Rejeki Desa Desa Lori Kec. Tanjung Harapan	Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 = 225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000	-	2000000	Ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
191.	23-04-2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Pemohonan Pakan Ikan Kelompok Sipakanai Dalle	RT 13 Desa Handil Terusan Kecamatan Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	6000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 228888000	Disetujui	6000	kg	218562400	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
192.	23-04-2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota	Pemohonan Pakan Ikan Kelompok Mega Buana	Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	6000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 228888000	Disetujui	6000	kg	218562400	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau															
193.	23-04- 2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Permohonan Pakan Ikan Kelompok Sukses Bersama	Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Kelompok sdh di akomodir di ID Usulan 1576545	-	-	kg	-	-	Penyediaan Sarana Pembudayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
194.	23-04- 2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Peningkatan produksi udang dan Ikan Pokdakan Mario Marennu Desa lori Kec. Tanjung Harapan	Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 = 225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000	-	2000000	Ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
195.	23-04- 2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Permohonan Pakan Kelompok Padaelo	Jl. Handil Terusan Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	6000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 228888000	Disetujui	6000	kg	218562400	-	Penyediaan Sarana Pembudayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
196.	23-04- 2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkann Bantuan Benur (Udang) dan Nener (Bandeng) untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Selengot Jaya dalam upaya menunjang pendapatan dan nilai tambah bagi seluruh anggota Kelompok Selengot Jaya.	Desa Selengot Kec. Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618495	-	600000	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
197.	23-04- 2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Permohonan Bantuan Nener dan Benur Kelompok Padaidi	Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 = 225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000	-	2000000	ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
198.	23-04- 2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkan benur udang windu untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Mamminasa	RT.003 Desa Tanjung Aru Kec. Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Benur x Rp. 150 = 150000000	-	1000000	Ekor	150000000	-	Penyediaan Sarana Pembudayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
199.	23-04- 2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar	Permohonan Bantuan Nener dan Benur Kelompok Tani Jaya	RT 07 Desa Tani Baru Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 = 225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000	-	2000	Ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau															Daerah Kabupaten/Kota
200.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkan saponin untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Mamminasa	RT.003 Desa Tanjung Aru Kec. Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	50 zak x 718713 = 35935650	-	50	Sak	35935650	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
201.	23-04-2025	Dr. Muhammad Husni Fahrurddin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Permohonan Benur dan Nener Kelompok Maju Bersama	Rt. 16 Desa Tani Baru Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 = 225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000	-	2000000	Ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
202.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkan Siponin untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Mulia Pertama	Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir di ID Usulan 1618425	-	100	Sak	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
203.	23-04-2025	Dr. Muhammad Husni Fahrurddin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Pengadaan Pakan pembibitan dan pakan pembesaran Pokdakan Berkat Usaha Bersama Desa Loa Lepu Kec. Tenggarong	Desa Loa Lepu Kec. Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	6000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 228888000	Disetujui	6000	Kg	218562400	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
204.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkann Bantuan Benur (Udang) dan Nener (Bandeng) untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Mulia Pertama dalam upaya menunjang pendapatan dan nilai tambah bagi seluruh anggota Kelompok Mulia Pertama.	Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir di ID Usulan 1618425	-	500000	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
205.	23-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Mahal dan sulitnya bibit udang, sehingga menurunnya tingkat produktiftitas Pokdakan Pusaka Tani Desa Pondong Baru	Desa Pondong Baru Kecamatan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp.150 = 225000000, 500000 Nener x Rp. 325 = 162500000	-	2000000	ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
206.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng	Dibutuhkan benur udang windu untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok mitra baru	Desa Labuangkallo, Kecamatan Tanjung	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1000000 Benur x Rp. 150 = 150000000	-	1000000	Ekor	150000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau		Harapan, Provinsi Kalimantan Timur													Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
207.	23-04-2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Permohonan Nener dan Benur Kelompok Salo Cina Bersinar	Desa Handil Terusan Kevamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 = 225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000	-	2000000	Ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
208.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkan saponin untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Mitra Baru	Desa Labuangkallo, Kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	50 zak x 718713 = 35935650	-	50	Sak	35935650	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
209.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkan Saponin untuk menunjang kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Raja Bandeng	RT. 02 Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618500	-	150	Sak	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
210.	23-04-2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Pengajuan Nener dan Benur Kelompok Sinar Jaya	Muara Pantuan Kecamatan Anggana , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 = 225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000	-	2000000	Ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
211.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkann Bantuan Benur (Udang) dan Nener (Bandeng) untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Raja Bandeng dalam upaya menunjang pendapatan dan nilai tambah bagi seluruh anggota Kelompok Raja Bandeng.	RT. 02 Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618500	-	650000	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
212.	23-04-2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Pengadaan pakan Pembenihan dan pakan pembesaran pada POKDAKAN Berkat Sehat Desa Loa Raya Kec. Tenggarong	Desa Loa Raya Kec. Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	6000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 228888000	Disetujui	6000	Kg	218562400	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
213.	23-04-2025	Dr. Muhammad	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur	Pengajuan Nener dan Benur Kelompok Pesisir	Muara Pantuan Kecamatan	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 =	-	2000000	Ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
		Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Maju	Anggana, Provinsi Kalimantan Timur			Dan Perikanan		SESUAI KETENTUAN		225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000						Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
214.	23-04- 2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Pengajuan Benur dan Nener Kelompok Pantuan Mekar	RT. 18 Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 = 225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000	-	2000000	Ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
215.	23-04- 2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Pengadaan Pakan Pembenihan dan pembesaran pada POKDAKAN Kutai Bangkit Biru Desa Mangkurawang Kec. Tenggarong	Jl. Mangkurawang RT. 006 Desa Mangkurawang Kec. Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	6000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 228888000	-	6000	Kg	228888000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
216.	23-04- 2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Pengajuan Benur dan Nener Kelompok Harapan Jaya	Desa Tani Baru Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 = 225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000	-	2000000	ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
217.	23-04- 2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Perlu adanya bantuan Saponin yang di butuhkan untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Tambak Jaya	Desa Labuangkallo, Kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618445	-	150	Sak	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
218.	23-04- 2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Pengadaan pakan pembenihan dan pembesaran pada POKDAKAN Perjuangan Bahari Desa Sukarame	Jl. AW. Long Senopati RT. 002 Desa Sukarame Kec. Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	6000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 228888000	-	6000	Kg	228888000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
219.	23-04- 2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	mahal dan sulitnya bibit udang (benur) sehingga menurunnya hasil pokdakan Tambak Jaya Makmur desa Lori	Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp.150 = 225000000, 500000 Nener x Rp. 325 = 162500000	-	2000000	ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
220.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Memerlukan bantuan sarana ikan air payau yang di butuhkan nener dan benur udang windu untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok tambak lestari	Desa Semuntal, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618508	-	700000	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
221.	23-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Mahalnya harga pakan membuat rendahnya produktifitas pokdakan Sumber Rezeki	Jalan Mangga 3 Gg Batu Redi RT 08 Tanjung Redep, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	-	8000	kg	305184000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
222.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkann Bantuan Benur (Udang), Nener (Bandeng) dan Saponin untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Mitra Jaya dalam upaya menunjang pendapatan dan nilai tambah bagi seluruh anggota Kelompok Mitra Jaya.	DESA LABUANGKALLO KECAMATAN TANJUNG HARAPAN, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir di ID Usulan 1618411	-	1	Paket	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
223.	23-04-2025	Dr. Muhammad Husni Fahrurddin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Permohonan Bantuan Benur dan Nener Kelompok Sungai Tengkorak	Rt. 09 Desa Tani Baru Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 = 225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000	-	2000000	Ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
224.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dibutuhkann Bantuan Benur (Udang) dan Nener (Bandeng) untuk kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Tambak Jaya dalam upaya menunjang pendapatan nilai tambah bagi seluruh anggota Kelompok Tambak Jaya.	Desa Labuangkallo, Kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618445	-	650000	Ekor	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
225.	23-04-2025	Dr. Muhammad Husni Fahrurddin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Permohonan Benur dan Nener Kelompok Raya jaya	Pondong Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp 150 = 225000000, 500000 Nener x 325 = 162500000	-	2000000	Ekor	387500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
226.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan,	Perlu sekali bantuan sarana dan prasarana Budidaya ikan Air payau, yaitu membutuhkan Saponin bagi Pokdakan Tambak Lestari guna meningkatkan keschjateraan nelayan.	Desa Semuntal, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sudah di akomodir ID Usulan 1618508	-	100	Sak	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			dan Saponin di Kawasan 3 Danau															
227.	23-04-2025	Apansyah, S.T.P	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	minimnya alat tangkap pada nelayan sehingga tidak maksimal dalam usaha menangkap ikan sehingga berpengaruh dengan hasil tangkap	kampung mahuang kec. Gn. Tabur , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	15	unit	-	Non Belanja Transfer	-
228.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok nelayan sangat dibutuhkan sarana dan prsarana mendukung budidaya perikanan, baik pupuk, bibit ikan maupun udang di kelompok harapan maju desa seniung jaya Kabupaten paser	Desa Seninung jaya RT 06 Kecamatan Paser Belengkong , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1950000 Benur x Rp. 150 = 292500000, 650000 Nener x Rp. 325 = 211250000, 65 zak Saponin x 718713 = 46716345	-	1	paket	550466345	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
229.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Perlu adanya bantuan Benih ini untuk meningkatkan nilai tambah bagi anggota kelompok agar meningkatkan pendapatan dalam upaya menunjang keberlangsungan hidup di Desa Labuangkallo Kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Desa Labuangkallo Kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Benih Ikan Bandeng (Nener) 325 x 500.000 = 162500000	-	500000	Ekor	162500000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
230.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Perlu adanya bantuan Benih ini untuk meningkatkan nilai tambah bagi anggota kelompok agar meningkatkan pendapatan dalam upaya menunjang usaha Perikanan Air Payau sehingga memudahkan keberlangsungan hidup di lingkungan Masyarakat Muara Paser RT.005 Kecamatan Tanah Grogot	Muara Paser RT.005 Kecamatan Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Kelompok telah terakomodir di ID Usulan 1613408, 1613419 dan 1613429	-	1	paket	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
231.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Sangat Perlu adanya bantuan Benih ini untuk meningkatkan nilai tambah bagi anggota kelompok agar meningkatkan pendapatan dalam upaya menunjang keberlangsungan hidup di lingkungan Masyarakat Desa Tanjung Aru kecamatan Tanjung Harapan	Desa Tanjung Aru kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Benih Ikan Bandeng (Nener) 325 x 550.000 = 178750000	-	550000	Ekor	178750000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
232.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kurangnya hasil Kelompok nelayan atau podakan Mitra Jaya Kabupaten Paser, sehingga berpengaruh kepada kesejahteraan nelayan, untuk itu dibutuhkan Benih Udang, Nener dan Saporin	Podakan Mitra Jaya Desa Labangkallo Kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2100000 Benur x Rp. 150 = 315000000, 700000 Nener x Rp. 325 = 227500000, 70 zak Saponin x 718713 = 50309910	-	1	paket	592809910	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
233.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan,	diperlukan bantuan Saponin dan Pupuk untuk menunjang kegiatan usaha budidaya ikan kelompok Jaya Raya yang dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan penghasilan nelayan di kelompok Jaya	Muara Pasir RT 005 Kecamatan Tanah grogot, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Kelompok Telah di akomodir di ID Usulan 1618429	-	-	Sak	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			dan Saponin di Kawasan 3 Danau	raya														
234.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	sangat dibutuhkan sekali bantuan Benih Udang, nener dan saporin bagi Pokdakan Mulia Pertama Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Pokdakan Mulia Pertama Desa Lori kecamatan Tanjung Harapan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2250000 Benur x Rp. 150 = 337500000, 750000Nener x Rp. 325 = 243750000, 75 zak Saponin x 718713 = 53903475	-	1	paket	635153475	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
235.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Penuh Harapan masyarakat atau Pokdakan Jaya Raya dalam kebutuhan sarana dan prasarana Budidaya Ikan Air Payau, di Desa Muara Paser Kecamatan tanah grogot kabupaten Paser	Desa Muara Pasir RT.005 Pokdakan Jaya Raya kecamatan Tanah grogot, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1950000 Benur x Rp. 150 = 292500000, 650000 Nener x Rp. 325 = 211250000, 65 zak Saponin x 718713 = 46716345	-	1	paket	550466345	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
236.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petambak ikan Penjawen jaya desa Muara Adang Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur	Pokdakan Penjawen Jaya Desa Muara Adang Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1650000 Benur x Rp. 150 = 247500000, 550000 Nener x Rp. 325 = 178750000, 55 zak Saponin x 718713 = 39529215	-	1	paket	465779215	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
237.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kurangnya bibit Ikan Air payau, benur dan nener di Pokdakan NIA SEJAHTERA Desa Pondong Kecamatan Kuaro kabupaten Paser	Pokdakan NIA SEJAHTERA, Desa Pondong Baru RT.001 Kecamatan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2400000 Benur x Rp. 150 = 360000000, 800000 Nener x Rp. 325 = 260000000, 80 zak Saponin x 718713 = 57497040	-	1	paket	677497040	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
238.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Masih Minimnya perolehan hasil petambak dan pembudidaya ikan di Pokdakan Tambak Jaya Desa Labuankallo Kecamatan tanjung Harapan Kabupaten Paser sehingga menurunnya kesejahteraan Petambak ikan	Pokdakan TAMBAK JAYA DESA LABUANGKALLO KECAMATAN TANJUNG HARAPAN, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1650000 Benur x Rp. 150 = 247500000, 550000Nener x Rp. 325 = 178750000, 55 zak Saponin x 718713 = 39529215	-	1	paket	465779215	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
239.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Belum meningkatnya produksi Ikan atau udang di Pokdakan Tambak Berkah 3, Kampung Pegat Betumbuk Kecamatan derawan Kabupaten Berau ,	Kampung Pegat Betumbuk Kecamatan Pulau Derawan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp. 150 = 225000000, 500000 Nener x Rp. 325 = 162500000, 50 zak Saponin x 718713 = 35935650	-	1	paket	423435650	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
240.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu,	Masih kurangnya hasil pembudidayaan ikan di Pokdakan Tambak Berkah 4, Kampung Pegat batumbuk Kecamatan Pula Derawan Kabupaten Beraju	TAMBAK BERKAH 4, KAMOUNG PEGAT BATUMBUK KECAMATAN PULAU	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp. 150 = 225000000, 500000 Nener x Rp. 325 = 162500000, 50 zak Saponin x	-	1	paket	423435650	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau		DERAWAN, Provinsi Kalimantan Timur							718713 = 35935650						Kabupaten/Kota
241.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Masih beluk maksimalnya bibit Benur, nener di Pokdakan Berkah 5, Kampung batumbuk Kecamatan Pulau Derawan kabupaten Berau	TAMBAK BERKAH 5, KAMPUNG BATUMBUK KECAMATAN PULAU DERAWAN, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp. 150 = 225000000, 500000 Nener x Rp. 325 = 162500000, 50 zak Saponin x 718713 = 35935650	-	1	paket	423435650	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
242.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Hasil yang masih kurang maksimal dikarenakan kekurangan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, di Pokdakan TAMBAK BERKAH 6, Kampung Pegat Batumbuk kecamatan pulau derawan kabupaten Berau	Kampung Pegat Batumbuk Pokdakan TAMBAK BERKAH 6, Kecamatan Pulau Derawan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp. 150 = 225000000, 500000 Nener x Rp. 325 = 162500000, 50 zak Saponin x 718713 = 35935650	-	1	paket	423435650	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
243.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kurang Maksimalnya Hasil dari Pokdakan Sumber Rizki, desa Labuangkallo Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, untuk benur udang, Nener dan Saporin	POKDAKAN SUMBER RIZKI DESA LABUANGKALLO KECAMATAN TANJUH HARAPAN , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	600000 Benur x Rp. 150 = 90000000, 1800000 Nener x Rp. 325 = 585000000, 60 zak Saponin x 718713 = 43122780	-	1	paket	718122780	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
244.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Kurangnya produksi dari kelompok Pokdakan HARAPAN JAYA dalam menghasilkan Ikan Air Payau di Desa SULIRAN Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser	Desa Suliran Baru RT 23 Kecamatan Paser belengkong Pokdakan Harapan jaya, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp. 150 = 225000000, 500000 Nener x Rp. 325 = 162500000, 50 zak Saponin x 718713 = 35935650	-	1	paket	423435650	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
245.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Dalam rangka meningkatkan hasil perikanan tentunya kelompok Pokdakan SELENGOT JAYA, DESA SELENGOT JAYA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER	Desa Selengot Jaya, Kecamatan Tanjung Harapan, , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1650000 Benur x Rp. 150 = 247500000, 550000Nener x Rp. 325 = 178750000, 55 zak Saponin x 718713 = 39529215	-	1	paket	465779215	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
246.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	belum maksimalnya hasil budidaya ikan di Pokdakan Raja Bandeng Desa Tanjung Aru Kecamatan tanjung Harapan Kabupaten Paser	Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan Pokdakan Raja Bandeng, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1650000 Benur x Rp. 150 = 247500000, 550000Nener x Rp. 325 = 178750000, 55 zak Saponin x 718713 = 39529215	-	1	paket	465779215	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
247.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota	Sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan hasil budidaya ikan di Pokdakan Tambak lestari Desa Semuntai Kecamatan	Desa Semuntai Kecamatan Tanah Grogot , Provinsi Kalimantan	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	1500000 Benur x Rp. 150 = 225000000, 500000 Nener x Rp. 325 =	-	1	paket	423435650	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Tanah grogot kabupaten paser, mohon sarana dan prasarana budidaya ikan air payau	Timur							162500000, 50 zak Saponin x 718713 = 35935650						Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
248.	23-04-2025	Sigit Wibowo, S.E	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	kurangnya peningkatan hasil pembudidayaan ikan di Pokdakan Sambau jaya Desa Podong Baru kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, sangat di butuhkan sarana dan prasarana Budidaya Ikan , berupa pupuk, bibit ikan, benur dan saporin, nener	Gang Fitrah RT 02 Desa Pondong Baru Kecamatan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	2250000 Benur x Rp. 150 = 337500000, 750000Nener x Rp. 325 = 243750000, 75 zak Saponin x 718713 = 53903475	-	1	paket	635153475	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
249.	23-04-2025	Drs. Makmur HAPK, MM	Penyediaan Sarana Budidaya Perikanan Air Laut (Benih Ikan (Kerapu, Kakap Putih), Pakan, Mesin Pakan, Aquatech, Bibit Rumpul Laut,) serta Perahu dan mesin Ketinting 7 PK untuk monitoring di Kab/Kota	kelompok pembudidaya ikan mekar sari	Jl.Iswahyudi Kel.Rinding, kec.teluk bayur, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	6000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 228888000	Disetujui	6000	Kg	200000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
250.	23-04-2025	Drs. Makmur HAPK, MM	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	permohonan mesin kapal kelompok bangun makmur	Jl.Pendidikan II kampung Sei Bebanir rt.04, kec.Sambaliung , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	30	unit	-	Non Belanja Transfer	-
251.	23-04-2025	Yenni Eviliana, S.E	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok Nelayan "Nelayan Bintang Laut" mengajukan permintaan bantuan guna menunjang produktivitas dan meningkatkan perekonomian warga desa setempat	Desa Muara Adang Kec.Long Ikis Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	19	paket	-	Non Belanja Transfer	-
252.	23-04-2025	Arfan, SE	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	kelompok nelayan chealsea meminta bantuan kepada penyediaan sarana usaha perikanan berupa mesin ketinting 18 pk	Jl. tipalayo Rt. 35 No. 29 Berebas - Bontang, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Disiapkan proposal Aslinya	Disetujui	12	Unit	180000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
253.	23-04-2025	Arfan, SE	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	kelompok nelayan pulo baltoa bersatu meminta bantuan penyediaan sarana usaha perikanan untuk memperlancar keperluan kelompok dalam mencari ikan	jl. kuta rt. 11 kel. berbas pantai kec. bontang selatan, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Perbaiki Proposalnya	Disetujui	15	unit	200000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
254.	23-04-2025	Yenni Eviliana, S.E	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok Nelayan "SEMOGA BERKAH" Mengajukan permohonan bantuan alat bantu nelayan guna menunjang produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	Desa Petiku Kec.Long Kali Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	15	set	-	Non Belanja Transfer	-
255.	23-04-2025	Yenni Eviliana, S.E	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok nelayan "BERKAH" mengajukan permohonan bantuan alat bantu nelayan	Desa Petiku kec.long kali kab.paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	14	set	-	Non Belanja Transfer	-
256.	23-04-2025	Yenni Eviliana, S.E	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok nelayan "Harapan Masin" mengajukan permintaan bantuan alat nelayan	Desa Petiku Kec.Long Kali Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	19	set	-	Non Belanja Transfer	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
257.	23-04-2025	Yenni Eviliana, S.E	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok Nelayan "Bina Usaha" mengajukan permintaan alat bantu nelayan	desa petiku kec.long kali kab.paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	15	set	-	Non Belanja Transfer	-
258.	23-04-2025	Arfan, SE	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	kelompok nelayan Loktayum meminta bantuan mesin dongfen 24 pk	jl. s hasanuddin rt. 34 no. 29 berebas, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Perbaiki Proposal sesuai pergub	Disetujui	15	unit	200000000	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
259.	23-04-2025	Yenni Eviliana, S.E	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	kelompok nelayan "Jaya Abadi FR" Mengajukan permintaan bantuan alat nelayan	desa petiku kec.long kali kab.paser, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	13	set	-	Non Belanja Transfer	-
260.	23-04-2025	Arfan, SE	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	Kelompok maritim jayameminta bbantuan sarana perikanan mesin ketinting untuk memperlancar pekerjaan	jl. batu sahasa 4 rt. 06 kel. bontang kuala , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	12	unit	-	Non Belanja Transfer	-
261.	23-04-2025	Arfan, SE	Penyediaan Sarana Budidaya Perikanan Air Laut (Benih Ikan (Kerapu, Kakap Putih), Pakan, Mesin Pakan, Aquatech, Bibit Rumput Laut,) serta Perahu dan mesin Ketinting 7 PK untuk monitoring di Kab/Kota	kelompok nelayan putra tihi tihi medminta bantuan mesin ketinting 7 pk untuk memudahkan kelompok budidaya	Tihi - Tihi RT. 17 Bontang Lestari, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	Sesuai kamus usulan di Perikanan Budidaya untuk Pengadaan perahu mesin tempel satu paket tidak bisa di pisah, pengadaan perahu mesin tempel hanya untuk monitoring rumput laut, untuk usulan Bidang Perikanan Budidaya perahu mesin tempel hanya 1 buah per kelompok	-	15	unit	-	-	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
262.	23-04-2025	Arfan, SE	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, dst)	kelompok pemuda nelayan bontang kuala meminta bantuan permohonan mesin ketinting merk ryu	Jl. Kapt Pieretende rt. 05 n0 26, Bontang kuala, kec. bontang utara, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dikembalikan	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	-	-	12	unit	-	Non Belanja Transfer	-
263.	23-04-2025	Budianto Bulang	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	MEMPERTAHANKAN KETAHANAN PANGAN PADA DESA BATU TIMBAU ULU MELALUI PROGRAM PENGADAAN BENIN IKAN NILA, PAKAN IKAN NILA, MESIN PELET NILA	DESA BATU TIMBA ULU, KECAMATAN BATU AMPAR , Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Usulan disetujui	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	6000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 228888000	Disetujui	6000	Kg	200000000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
264.	28-04-2025	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3	mahalnya harga pakan ikan yang membuat kelompok pokdakana Bangun Mina Sejahtera menurun tingkat produktifitasnya	Jalan Kemakmuran Gg Nangka RT 01 Kampung Sei Bebanir Bangun Kec. Sambaliung, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	8000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 305184000	-	8000	kg	305184000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			Danau															
265.	28-04- 2025	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di Kab/Kota dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Kab/Kota serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau	Pokdakan Sanggulan Idaman memerlukan bantuan untuk meningkatkan hasil produksi perikanan	Jl. Erlin RT 003 Desa Sanggulan Kec. Sebulu, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Verifikasi TAPD	PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI KETENTUAN	Diproses lebih lanjut	6000 Kg x 38148 (Harga Per kg) = 228888000	-	6000	8 Item	228888000	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran Strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai (Permen KP Nomor : 25/PERMEN-KP/2016 tentang Renstra KKP Tahun 2025-2029), lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. Sasaran Strategis Rentsra KKP 2025 - 2029

Goals	Arah Kebijakan	Objectives	Control and Check Point	Baseline 2024	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
 Mengurangi Tekanan dan Aktivitas Perikanan yang Tidak Ramah Lingkungan	Pengangkapan ikan Terukur Berbasis Kuota Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Perairan dan PPK	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Meningkatkan efektivitas pengawasan sumber daya KP Meningkatkan kontribusi daya manusia KP yang kompeten	Nilai Tercapit Nelayan	101,70	105-108	108-109	107-108	108-109	109-110
			Nilai Tercapit Pembiayaan Ikan	102,07	103,20	103,60	103,76	104,00	104,20
			Nilai Tercapit Petambak Garam	129,62	130	130,25	130,50	130,75	131
			Peningkatan Indeks Kepatuhan Sektor KP	Indikator baru	76,00	77,7	80,2	81,7	83,8
 Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Perairan dan PPK Pemberdayaan Sempah Pantai di Laut	Meningkatkan pengelolaan wilayah perairan dan pulau-pulau kecil Memperkuat penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang laut dan zona-zona wilayah perairan sesuai partisipatif dan berbasis ekosistem Mengurangi jumlah sampah yang masuk ke laut	Peningkatan Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (Skala 0-1)	0,90	0,99	0,92	0,96	0,98	0,91
			Persentase Penyelenggaraan Perikanan Ruang Laut dan Zona Perairan	Indikator baru	13,80	34,88	55,78	77,55	100
			Persentase persentase volume sampah yang masuk ke laut (%)	Indikator baru	1	40	50	60	70
			Indeks Performa/ Efisiensi	81,78	90,05	90,18	90,15	90,20	90,25

Ultimate Goals	Arah Kebijakan	Objectives	Control and Check Point	Baseline 2024	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
 Melindungi Laut dan Sumber Dayanya	Memperluas Kawasan Konservasi Laut	Meningkatkan efektivitas pengawasan sumber daya KP	Peningkatan Indeks Kepatuhan Sektor KP	Indikator baru	76,00	77,7	80,2	81,7	83,8
 Mengurangi Tekanan dan Aktivitas Perikanan yang Tidak Ramah Lingkungan	Pengangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan								
 Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Perairan dan PPK Pemberdayaan Sempah Pantai di Laut								

Sedangkan arah kebijakan program dan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur, telah disusun Kegiatan Unggulan yang merupakan kegiatan yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit agar mencapai Misi ke 2 (dua) dan JOSPOL ke 2 (dua) dalam hal Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan Pelayanan Publik. Adapun Kegiatan Unggulan Dinas Kelautan dan Perikanan;

1. Pengembangan Kampung Budidaya Ikan Kerapu (Maratua Kabupaten Berau), Ikan Nila (Loa Kulu Kabupaten Kukar) dan Ikan Patin (Sebakung Kabupaten Penajam Paser Utara).
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI Sambaliung Kabupaten Berau).
3. Rehabilitasi dan Revitalisasi Pabrik Es dan Cold Storage sebagai sarana Sistem Rantai Dingin (PPI Sambaliung (Berau), PPI Sangatta (Kutim), PPI Selili (Samarinda), PPI Manggar Baru (Balikpapan), PPI Api-Api (PPU).

Dalam pelaksanaannya, kegiatan unggulan dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan, serta Direktif Kepala Daerah. Pelaksanaan kegiatan unggulan bersinergi antara DKP Provinsi dengan DKP Kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah.

Program DKP Tahun 2026, berikut:

- ✓ Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan target tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) 92.4 dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti 100%.
- ✓ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan target kinerja produksi perikanan hasil tangkapan sebesar 223367.8 ton.
- ✓ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan target kinerja produksi perikanan budidaya sebesar 258945.5 ton.
- ✓ Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan target Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 85.71%.
- ✓ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan target kinerja berupa Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 100%.
- ✓ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan target Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan 154233.4 Ton dan Nilai produk olahan hasil perikanan Rp. 5.803.184.818.
- ✓ Target Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan 83%.
- ✓ Target Peningkatan Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut sebanyak 1,100,000,000 milyar ekor.

- ✓ Target Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar sebanyak 4,732,250 ekor.
- ✓ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru) Jumlah Pendaratan Hasil Perikanan di Pelabuhan Perikanan 583.7 Ton
- ✓ Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (UPTD KKP3KKDPS) Persentase Luas Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 100%

Kebijakan program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur selaras dengan arah kebijakan Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka menunjang pembangunan khususnya dibidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan yang telah diakomodir dalam Permendagri No, 8 Tahun 2017, Tabel T-A.2 Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan tema dan prioritas pembangunan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tema dan prioritas pembangunan.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan pembangunan perikanan dan kelautan tahun 2025-2030 adalah :

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan pada Sub Sektor Kelautan dan Perikanan

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Perencanaan Strategis Tahun 2025-2030, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya daya saing dan kesejahteraan berkelanjutan sektor Kelautan dan Perikanan.
3. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan

Timur, telah disusun Kegiatan Unggulan yang merupakan kegiatan yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2030 untuk mencapai untuk mencapai Misi ke 2 (dua) dan JOSPOL ke 2 (dua) dalam hal Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan Pelayanan Publik. Adapun Kegiatan Unggulan Dinas Kelautan dan Perikanan;

1. Pengembangan Kampung Budidaya Ikan Kerapu (Maratua Kabupaten Berau), Ikan Nila (Loa Kulu Kabupaten Kukar) dan Ikan Patin (Sebakung Kabupaten Penajam Paser Utara).
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI Sambaliung Kabupaten Berau).
3. Rehabilitasi dan Revitalisasi Pabrik Es dan Cold Storage sebagai sarana Sistem Rantai Dingin (PPI Sambaliung (Berau), PPI Sangatta (Kutim), PPI Selili (Samarinda), PPI Manggar Baru (Balikpapan), PPI Api-API (PPU).

Dalam pelaksanaannya, kegiatan unggulan dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan, serta Direktif Kepala Daerah. Pelaksanaan kegiatan unggulan bersinergi antara DKP Provinsi dengan DKP Kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, sumber dana pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari APBD Provinsi dan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun Program dan Kegiatan sumber dana APBD Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Program ini dilaksanakan dilandasi oleh kebutuhan akan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimana dalam pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sarana untuk memenuhi kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur maupun UPTD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari.

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam mendukung target produksi perikanan tangkap secara nasional yang diemban oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Adapun kegiatan dari Program Pengembangan Perikanan Tangkap yaitu :

1. Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
3. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
5. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
6. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan produksi pengolahan hasil perikanan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam mendukung target produksi perikanan secara nasional yang diemban oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Adapun kegiatan dari Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan yaitu :

1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
3. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
4. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut dan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan luas kawasan yang dikelola secara berkelanjutan.

Adapun kegiatan dari Program Pengelolaan Ruang Laut yaitu :

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.
3. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Program ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pengawasan wilayah perairan Kalimantan Timur yang diawasi oleh pengawas perikanan sehingga dapat menurunkan persentase wilayah bebas illegal logging dan kegiatan yang dapat merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

Adapun kegiatan dari Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.
2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan sesuai dengan standar dalam rangka meningkatkan ekspor hasil perikanan.

Adapun kegiatan dari Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu :

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

7. Program Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD. SPAPAL Manggar)

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan benih dalam mendukung target produksi perikanan budidaya secara nasional yang diemban oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut oleh UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan

Adapun kegiatan dari Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan yaitu :

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut)

8. Program Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD. SPAPAL Sebulu)

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan benih ikan air payau/laut spesifik penting dalam mendukung target produksi perikanan budidaya secara nasional yang diemban oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut oleh UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan.

Adapun kegiatan dari Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau/Air Laut yaitu :

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Anggaran pagu indikatif OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 (Tabel T-C.33)

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target 6	Rp. 7			Target 10	Rp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
Dinas Kelautan dan Perikanan						81,738,462,595	APBD			65,440,482,650
3:25:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	Indeks		92.4	51,798,368,423	APBD		92.6	52,576,965,400
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%		100	3,209,315,387	APBD		100	1,882,739,250
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	Berau,Kukar,Btg,PPU,BPN, SMD	100	968,600,000	APBD		100	1,566,230,000
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Berau,Kukar,Btg,PPU,BPN, SMD	8	316,760,000	APBD		8	503,790,000
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	Berau,Kukar,Btg,PPU,BPN, SMD	2	57,000,000	APBD		2	183,210,000
3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	Berau,Kukar,Btg,PPU,BPN, SMD	2	39,920,000	APBD		2	137,410,000
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Berau,Kukar,Btg,PPU,BPN, SMD	3	332,920,000	APBD		3	448,670,000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target 6	Rp. 7			Target 10	Rp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1	222,000,000	APBD		1	293,150,000
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%		100	47,583,503,621	APBD		100	48,011,940,000
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Berau,Kuka,Btg,PPU,BPN, SMD	284	46,615,419,621	APBD		286	46,781,892,000
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	581,640,000	APBD		1	825,097,000
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	77,600,000	APBD		1	81,320,000
3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		1	80,378,000	APBD		1	84,227,000
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	81,406,000	APBD		1	85,301,000
3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		1	20,800,000	APBD		1	21,796,000
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	58,890,000	APBD		1	61,710,000
3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1	67,370,000	APBD		1	70,597,000
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	%	PPU, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau, Paser, Kukar	20	108,876,000	APBD		20	184,755,400
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	PPU, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau, Paser, Kukar	1	31,440,000	APBD		1	8,386,000
3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	PPU, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau, Paser, Kukar	1	42,816,000	APBD		1	132,649,000
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang	Jumlah Laporan	Laporan	PPU, Balikpapan,	1		APBD		1	43,720,400

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target 6	Rp. 7			Target 10	Rp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
	Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau, Paser, Kukar		34,620,000				
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	PPU, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau, Kukar	20	636,863,000	APBD		20	629,850,000
3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	PPU, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau, Kukar	1	229,823,000	APBD		1	230,432,000
3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	PPU, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau, Kukar	1	56,820,000	APBD		1	103,695,000
3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	PPU, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau, Kukar	1	56,820,000	APBD		1	103,695,000
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	PPU, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau, Kukar	30	293,400,000	APBD		40	192,028,000
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	10 Kab/Kota, Luar Prov. Kaltim	100	1,413,488,647	APBD		100	796,580,000
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Samarinda	1	9,596,820	APBD		1	19,570,000
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Samarinda	1	16,000,000	APBD		1	6,099,000
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Samarinda	1	64,797,648	APBD		1	73,174,000
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Samarinda	1	56,454,179	APBD		1	62,745,000
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Samarinda	1	27,840,000	APBD		1	17,221,000
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10 Kab/Kota, Luar Prov. Kaltim	1	1,238,800,000	APBD		1	617,771,000
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	Samarinda	100	38,095,385	APBD		100	35,400,000
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Samarinda	0	9,554,000	APBD		5	21,240,000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target 6	Rp. 7			Target 10	Rp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Samarinda	5	28,541,385	APBD		5	14,160,000
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	PPU, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau, Kukar	100	3,010,706,740	APBD		100	2,034,789,250
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Samarinda	1	8,610,000	APBD		1	9,559,250
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	PPU, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau, Kukar	1	1,787,216,740	APBD		1	1,076,600,000
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	PPU, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta, Berau, Kukar	1	1,214,880,000	APBD		1	948,630,000
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%		100	1,247,550,417	APBD		100	1,200,160,000
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar, Berau,	25	567,556,000	APBD		25	470,160,000
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Samarinda	20	136,456,000	APBD		20	180,000,000
3.25.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	Samarinda	5	43,538,417	APBD		5	50,000,000
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Samarinda	2	500,000,000	APBD		2	500,000,000
3:25:02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser	85.71	1,200,000,000	APBD		87.36	750,000,000
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kawasan	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser	3	587,565,490	APBD		4	372,487,000
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser	42698.3	269,008,978	APBD		70109.3	206,458,000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser	30	31,560,000	APBD		30	32,010,000
3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Dokumen	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser	1	-	APBD		-	-
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku Usaha	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser	30	183,635,800	APBD		30	32,012,000
3.25.02.1.01.0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	Dokumen	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser	1	65,600,712	APBD		-	-
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pertimbangan Teknis Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Peraturan Teknis	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser	4	326,014,186	APBD		4	251,950,000
3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	Dokumen	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser	1	129,044,200	APBD		1	151,170,000
3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser	3	196,969,986	APBD		3	100,780,000
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok Masyarakat	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser	10	286,420,324	APBD		13	125,563,000
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser	30	88,835,842	APBD		30	29,744,000
3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser	2	67,118,486	APBD		2	16,285,000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target 6	Rp. 7			Target 10	Rp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser	30	71,036,694	APBD		60	12,430,000
3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser	2	59,429,302	APBD		2	67,104,000
3:25:03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton		223367.8	5,555,000,000	APBD	Jospol	227834.9	7,830,778,000
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah KUB yang mendapatkan bantuan didalam pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai 12 mil laut (KUB)	KUB		10	3,602,000,000	APBD		17	1,634,027,000
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	Berau;Kutim;Bontang;Kuk ar;Samarinda;Balikpapan;P PU;Paser	1	107,800,000	APBD		1	1,005,554,000
3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	Berau;Kutim;Bontang;Kuk ar;Samarinda;Balikpapan;P PU;Paser	185	3,494,200,000	APBD		20	628,473,000
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rekomendasi	8 Kab/Kota, Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, dan Paser	100	113,630,300	APBD		235	565,627,000
3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Dokumen	8 Kab/Kota, Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, dan Paser	100	113,630,300	APBD		235	565,627,000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	8 Kab/Kota, Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, dan Paser	200	273,321,049	APBD		250	754,169,000
3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	Dokumen	8 Kab/Kota, Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, dan Paser	200	273,321,049	APBD		250	754,169,000
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelabuhan Perikanan	6 PPI, PPI Api-API Kab. PPU, PPI Selili Samarinda, PPI Tj. Limau Bontang, PPI Sangatta Kutim, PPI Sambaliung Berau	5	1,526,500,000	APBD	Jospol	5	3,846,257,000
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	6 PPI, PPI Api-API Kab. PPU, PPI Selili Samarinda, PPI Tj. Limau Bontang, PPI Sangatta Kutim, PPI Sambaliung Berau	5	1,329,980,428	APBD	Jospol	5	2,809,275,000
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	6 PPI, PPI Api-API Kab. PPU, PPI Selili Samarinda, PPI Tj. Limau Bontang, PPI Sangatta Kutim, PPI Sambaliung Berau	5	196,519,572	APBD	Jospol	5	1,036,982,000
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rekomendasi	8 Kab/Kota, Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, dan Paser	30	39,548,651	APBD		50	188,543,000
3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	8 Kab/Kota, Berau, Kutim, Bontang, Kukar, Samarinda, Balikpapan, PPU, dan Paser	30	39,548,651	APBD		50	188,543,000
3:25:04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	7 Kab/Kota, Paser, PPU, Balikpapan, Kukar, Kutim, Bontang dan Berau	258,945.50	18,375,778,785	APBD	Jospol	268,008.60	900,000,000
3.25.04.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	7 Kab/Kota, Paser, PPU, Balikpapan, Kukar, Kutim, Bontang dan Berau	0	-	APBD		6	16,020,000
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di	Jumlah Pokdakan laut yang mendapatkan manfaat	Pokdakan		2	724,617,279	APBD		9	306,161,000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
	Laut									
3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	89,940,000	APBD		1	24,708,000
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	KJA Bontang dan BBIP Talisayan Berau	1	16,299,000	APBD		2	36,112,000
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	7 Kab/Kota, Paser, PPU, Balikpapan, Kukar, Kutim, Bontang dan Berau	3	308,318,279	APBD		4	170,578,000
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	7 Kab/Kota, Paser, PPU, Balikpapan, Kukar, Kutim, Bontang dan Berau	60	116,330,521	APBD		70	32,690,000
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		70	193,729,479	APBD		80	42,073,000
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pokdakan PUD yang mendapatkan manfaat	Pokdakan	10 Kab/Kota, Paser, PPU, Balikpapan, Samarinda, Kukar, Kutim, Kubar, Mahulu, Bontang dan Berau	1	17,651,161,506	APBD	Jospol	3	577,819,000
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Kelompok Pembudidaya Ikana di Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	17,622,185,506	APBD	Jospol	3	528,569,000
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Kelompok Pembudidaya Ikana di Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	28,976,000	APBD		1	49,250,000
3:25:05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	Provinsi Kaltim	100	950,000,000	APBD		100	750,000,000
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha KP sampai dengan 12 mil yang Diperiksa Kepatuhan nya	Pelaku Usaha	Provinsi Kaltim	123	735,280,479	APBD		170	579,445,000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
3.25.05.1.01.0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di Wilayah Kerja PPNS Perikanan Provinsi yang Ditangani	Perkara	Provinsi Kaltim	2	270,540,448	APBD		2	236,102,000
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha		50	100,850,032	APBD		65	91,431,000
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/ atau Usaha Pengangkutan Ikan sampai dengan 12 Mil yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	Provinsi Kaltim	70	199,410,276	APBD		102	134,561,000
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	Provinsi Kaltim	3	108,905,967	APBD		3	49,741,000
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang Ditumbuhkan, dan Dikembangkan	Kelompok Masyarakat	Provinsi Kaltim	8	55,573,756	APBD		8	67,610,000
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Diperiksa Kepatuhan nya	Pelaku Usaha		46	214,719,521	APBD		51	170,555,000
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/ atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	Provinsi Kaltim	20	76,817,804	APBD		20	34,322,000
3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/ atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Diperiksa Kepatuhan nya Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	Provinsi Kaltim	6	68,960,313	APBD		6	64,537,000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target 6	Rp. 7			Target 10	Rp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
	provinsi									
3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Diperiksa Kepatuhan sesuai Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	Provinsi Kaltim	20	68,941,404	APBD		25	71,696,000
3:25:06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk olahan hasil perikanan	Ton	Kabupaten/Kota Se Kaltim	44,289	650,000,000	APBD		46,441	750,000,000
		Nilai produk olahan hasil perikanan	Rupiah		1,680,270,182,290		APBD		1,765,987,693,815	
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lokasi Perolehan Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Lokasi		10	108,019,894	APBD		10	91,836,000
3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen		1	108,019,894	APBD		1	91,836,000
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Pelaku Usaha		10	541,980,106	APBD		15	658,164,000
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu u	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan		3	541,980,106	APBD		4	658,164,000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
1	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar					1,884,282,800	APBD			1,524,990,300
3:25:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	UPTD. SPAPAL MAnggar dan BBU Tanjung Tengah	92.4	172,604,790	APBD		92.6	636,583,500
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	UPTD. SPAPAL MAnggar dan BBU Tanjung Tengah	100	720,403,270	APBD		100	138,406,800
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%		100	81,720,000	APBD		100	91,389,000
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1	81,720,000	APBD		1	91,389,000
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%		100	244,041,876	APBD		100	95,168,000
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	1,008,826	APBD		1	742,000
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	4,375,312	APBD		1	45,428,000
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	2,475,388	APBD		1	912,000
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	3,483,150	APBD		1	978,000
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1	1,939,200	APBD		1	354,000
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	230,760,000	APBD		1	46,754,000
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%		100	476,361,394	APBD		100	356,364,800
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	476,361,394	APBD		1	43,037,000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target 6	Rp. 7			Target 10	Rp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%		100	90,884,790	APBD		100	206,368,500
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		13	34,149,790	APBD		13	42,670,000
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		56	31,735,000	APBD		56	92,680,000
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	25,000,000	APBD		1	71,018,500
3:25:04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar)	Miliar Ekor		1,1	991,274,740	APBD		1,2	750,000,000
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pembenihan Ikan yang difasilitasi	Unit		2	991,274,740	APBD		2	750,000,000
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit		8	991,274,740	APBD		17	605,769,000
1	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan					1,095,625,000	APBD			779,819,750
3:25:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks		92.4	261,970,561	APBD		92.6	230,771,100
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%		100	345,582,378	APBD		100	49,048,650
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%!		100	71,520,000	APBD		100	69,480,000
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1	71,520,000	APBD		1	69,480,000
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%		20	23,520,000	APBD		20	45,402,100
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		15	23,520,000	APBD		15	45,402,100

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target 6	Rp. 7			Target 10	Rp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%		100	197,275,014	APBD		100	37,493,650
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	4,714,463	APBD		1	518,650
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	29,304,342	APBD		1	3,053,000
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	5,112,685	APBD		1	483,000
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	14,371,524	APBD		1	1,670,000
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1	1,980,000	APBD		1	214,000
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	141,792,000	APBD		1	31,555,000
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%		100	19,006,201	APBD		100	918,000
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		9	19,006,201	APBD		9	918,000
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%		100	224,747,364	APBD		100	84,880,000
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	840,000	APBD		1	394,000
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	147,467,364	APBD		1	11,161,000
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	76,440,000	APBD		1	73,325,000
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%		100	71,484,360	APBD		100	41,646,000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target 6	Rp. 7			Target 10	Rp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		5	32,998,360	APBD		5	20,583,000
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		1	38,486,000	APBD		1	21,063,000
3:25:06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	%		83	488,072,061	APBD		86	500,000,000
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Unit Usaha	Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kaltim	2	488,072,061	APBD		3	500,000,000
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan	kabupaten/kota di Prov. Kaltim	4	488,072,061	APBD		4	500,000,000
1	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu					1,629,859,805	APBD			1,248,630,300
3.25.01.1.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks		92.4	224,396,723	APBD		92.6	451,080,000
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%		100	511,891,960	APBD		100	47,550,300
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%		100	77,640,000	APBD		100	100,630,000
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	Kutai Kartanegara	1	77,640,000	APBD		1	100,630,000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target 6	Rp. 7			Target 10	Rp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
	Keuangan SKPD	SKPD								
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%		20	4,200,000	APBD		20	73,885,000
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kutai Kartanegara	1	4,200,000	APBD		2	73,885,000
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%		100	249,817,344	APBD		100	35,424,300
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kutai Kartanegara	1	4,850,010	APBD		1	2,025,000
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kutai Kartanegara	1	10,259,476	APBD		1	5,060,300
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kutai Kartanegara	1	3,383,648	APBD		1	2,240,000
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kutai Kartanegara	1	2,892,210	APBD		1	1,211,000
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10 Kab/Kota, Luar Prov. Kaltim	1	228,432,000	APBD		1	24,888,000
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kutai Kartanegara	4	31,785,472	APBD		2	47,835,000
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%		100	262,074,616	APBD		100	121,653,000
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kutai Kartanegara	1	262,074,616	APBD		1	12,105,000
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%		100	110,771,251	APBD		100	110,699,000
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kutai Kartanegara	3	74,004,000	APBD		5	14,260,000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target 6	Rp. 7			Target 10	Rp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
	Lapangan									
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kutai Kartanegara	2	36,767,251	APBD		32	6,674,000
3:25:04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	Ekor		4,732,250	893,571,122	APBD		4,840,750	750,000,000
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	Ekor		4,732,250	893,571,122	APBD		4,840,750	750,000,000
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Kutai Kartanegara	7	893,571,122	APBD		2	257,812,000
	UPTD Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) Berau	-				413,990,800	APBD			750,000,000
3:25:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	Berau	92.4	61,100,000	APBD		92.6	200,000,000
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%		100	102,890,800	APBD		100	50,000,000
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%		100	60,600,000	APBD		100	61,200,000
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1	60,600,000	APBD		1	61,200,000
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%		100	93,205,800	APBD		100	37,576,000
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	1,525,030	APBD		1	438,000
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	43,013,603	APBD		1	10,159,000
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	7,987,167	APBD		1	838,000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target 6	Rp. 7			Target 10	Rp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	40,680,000	APBD		1	26,141,000
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%		100	9,685,000	APBD		100	134,131,000
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	9,685,000	APBD		1	12,424,000
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%		100	500,000	APBD		100	17,093,000
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		1	500,000	APBD		2	17,093,000
3:25:02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%		100	250,000,000	APBD		100	500,000,000
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kawasan		1	250,000,000	APBD		1	453,575,000
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha		285,548.95	250,000,000	APBD		285,548.95	453,575,000
1	UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru Balikpapan					1,028,550,000	APBD			1,000,000,000
3:25:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	UPTD PP Manggar Baru Balikpapan	92.4	229,119,584	APBD		92.6	200,000,000
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	UPTD PP Manggar Baru Balikpapan	100	759,430,416	APBD		100	50,000,000
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%		100	73,560,000	APBD		100	91,389,000
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen		1	73,560,000	APBD		1	91,389,000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Target 6	Rp. 7			Target 10	Rp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL						87,790,771,000	APBD		-	70,743,923,000
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%		100	136,200,000	APBD		100	30,873,000
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	136,200,000	APBD		1	10,172,000
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%		100	623,230,416	APBD		100	73,123,000
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	623,230,416	APBD		1	19,051,000
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%		100	155,559,584	APBD		100	29,615,000
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket		1	45,559,584	APBD		1	9,585,000
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket		1	110,000,000	APBD		1	13,000,000
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Pendaratan Hasil Perikanan di Pelabuhan Perikanan	Ton		583.7	40,000,000	APBD		595.3	750,000,000
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelabuhan Perikanan		1	40,000,000	APBD		1	750,000,000
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit		1	40,000,000	APBD		1	750,000,000
TOTAL						87,790,771,000				70,743,923,000

Tabel 7. Pagu APBN Tahun 2025

No.	Satuan Kerja	Pagu* (Rp.)
1.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Pembinaan Dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran Dan Monev. Pembangunan KKP) (01)/DK	209,000,000
2.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (03)/TP	256,949,000
3.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (04)/TP	97,430,000
4.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (05)/DK	156,640,000
	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (05)/TP	482,366,000
5.	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan (06)/DK	142,305,000
6.	Program Pengelolaan Ruang Laut (07)/DK	200,000,000
	Total Anggaran	1,544,690,000

**Angka Sementara*

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 selain menjadi pelaksanaan kegiatan, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Rencana Kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

RENJA TAHUN 2026 DINAS PARIWISATA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur telah memasuki tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 – 2029. Pada periode ini, pembangunan Pariwisata Kalimantan Timur dapat lebih didalami terhadap program kegiatan yang telah dilakukan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2026 Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 Provinsi Kalimantan Timur serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, tahun 2026 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Hasil pembahasan forum PD dan dinamika pembangunan serta serangkaian hasil Rapat Kerja (Raker) Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/Instansi Vertikal dan SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026 ini akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 2025 acara ini melibatkan seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan aspirasi yang berkembang dirumuskan dalam kesepakatan yang menjadi bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon serta Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan renacana kerja pemerintah daerah;
3. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
5. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
6. Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029;
7. Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Talanpekda) Provinsi Kalimantan Timur Periode 2021-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan tahun 2026 selaras dengan Program Strategis Nasional Kementerian Pariwisata, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025, Perubahan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA PD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta Program dan Kegiatan PD Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD (RENJA PD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3.	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3.	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 5 Program, 14 Kegiatan, 40 Sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp 82.946.424.560 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 78.672.436.320 dengan persentase capaian sebesar 94,85%.

Capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi keuangan Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.184.467.244 (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) atau 88,99% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.743.721.117 (dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah) dari total anggaran Rp. 24.928.188.361 (dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

2. Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata

Realisasi keuangan Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.969.561.427 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 91,96% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 872.170.349 (delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dari total anggaran Rp. 10.841.731.776 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

3. Program Pemasaran Pariwisata

Realisasi keuangan Program Pemasaran Pariwisata dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.314.241.422 (sepuluh milyar tiga ratus empat belas juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) atau 95,04% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 538.601.379 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dari total anggaran Rp.10.852.842.801 (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah).

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Realisasi keuangan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.225.870.458 (dua puluh delapan milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) atau 99,92% dengan sisa anggaran sebesar Rp.

74.216.794 (tujuh puluh empat juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dari total anggaran Rp.28.300.081.252 (dua puluh delapan milyar tiga ratus juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Realisasi Keuangan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.978.295.769 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 99,44% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 45.251.601 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus satu rupiah) dari total anggaran Rp.8.023.574.370 (delapan milyar dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Dari penjelasan diatas hasil pencapaian kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.

Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan PD dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD th 2025) (n-1)*	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th (berjalan)	
			Target RENSTRA PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan : Pilihan							
	Bidang Urusan : Pariwisata							
26.02	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	30	30	100%	-	-	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan PD dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD th 2025) (n-1)*	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th (berjalan)	
			Target RENSTRA PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
26.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Daya Tarik yang Dikelola	33,33	33,33	100%	-	-	100%
26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	100%	2 Lokasi	2 Lokasi	100%
26.02.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	2 Produk Wisata	2 Produk Wisata	100%	2 Produk Wisata	2 Produk Wisata	100%
26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
26.02.1.03	Kegiatan: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola Produk Wisatanya	3 Destinasi Pariwisata	3 Destinasi Pariwisata	100%	3 Destinasi Pariwisata	3 Destinasi Pariwisata	100%
26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
26.02.1.04	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina	15 Usaha Pariwisata	15 Usaha Pariwisata	100%	15 Usaha Pariwisata	15 Usaha Pariwisata	100%
26.02.1.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan PD dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD th 2025) (n-1)*	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th (berjalan)	
			Target RENSTRA PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100%	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100%
					100%			100%
26.03	Program : Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan - Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara	2 Juta 310 Ribu	6.295.708 16.507	363%	6 Juta 15.5 Ribu	2.000.000 5.000	363%
26.03.1.01	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	- Jumlah Jangkauan Pemasaran Produk Wisata Kaltim	6 Daerah/Kota	6 Daerah/Kota	100%	6 Daerah/Kota	6 Daerah/Kota	100%
26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dlaam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata, Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
26.03.1.01.03	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
					100%			100%
26.05	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase Tercapainya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi	97 %	137 %	141%	141%	100%	100%
26.05.1.01	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	9 Kegiatan	12 Kegiatan	133%	9 Kegiatan	9 Kegiatan	133%
		Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	700 Orang	980 Orang	140%	700 Orang	700 Orang	140%
26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	40 Orang	100%
26.05.1.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan	15 Orang	75 Orang	500%	200 Orang	120 Orang	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan PD dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD th 2025) (n-1)*	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th (berjalan)	
			Target RENSTRA PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata						
26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	70 Orang	70 Orang	100%	70 Orang	30 Orang	100%
26.05.1.01.08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
26.05.1.01.09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	710 Orang	710 Orang	100%	710 Orang	530 Orang	100%
26.04	Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Sub Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	23,53 %	23,53 %	100%	23,53 %	23,53 %	100%
26.04.1.01	Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Kota Kreatif yang Dikembangkan	3 Kota Kreatif	3 Kota Kreatif	100%	3 Kota Kreatif	3 Kota Kreatif	100%
26.04.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	1 Sarpras	100%
26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan	5 Kegiatan	100%
26.04.1.02	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jenis Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	3 Jenis Ekosistem	3 Jenis Ekosistem	100%	3 Jenis Ekosistem	3 Jenis Ekosistem	100%
26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Haki	100%
26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	5 Monev	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan PD dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD th 2025) (n-1)*	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th (berjalan)	
			Target RENSTRA PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Ekosistem Ekonomi Kreatif						
3.26.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pariwisata	95%	95%	100%	95%	95%	100%
3.26.01.1.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang diadakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
26.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Jasa Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	100 Kali	100 Kali	100%	100 Kali	100 Kali	100%
26.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Tersedianya jasa penunjang urusan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan PD dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD th 2025) (n-1)*	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th (berjalan)	
			Target RENSTRA PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
26.01.1.09.01	Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan	pemerintah daerah Tersedianya jasa pemeliharaan dan biayanya	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Pariwisata Kalimantan Timur yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan Visi dan Misinya yang diharapkan mampu mewujudkan daerah tujuan pariwisata Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, dapat meningkatkan industri pariwisata Kalimantan Timur sebagai penopang perekonomian daerah selain kekayaan sumber daya alamnya, mampu meningkatkan seni dan budaya daerah untuk selalu dipelihara dan dilestarikan sebagai karakter jati diri dan pemersatu bangsa, serta dapat meningkatkan penyelenggaraan pariwisata yang profesional dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Visi Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dan 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) kegiatan yang diukur dengan 2 (dua) indikator utama.

Perihal tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Peningkatan Jumlah Pergerakan Wisatawan [Orang]	-	-	6.918.000	7.238.000	7.620.000	9.437.981	1.293.838	7.620.000	7.620.000	Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan adalah dengan meningkatkan inovasi produk, kekuatan pemasaran, peningkatan sarpras destinasi pariwisata (aksesibilitas dan konektifitas), pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dan sinergitas antar pelaku wisata
	a. Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara (wisnus) [Orang]	-	-	6.900.000	7.219.000	7.600.000	9.382.976	1.287.907	7.600.000	7.600.000	
	b. Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara (wisman) [Orang]	-	-	18.000	19.000	20.400	55.005	5.931	20.400	20.400	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah										
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	70	72	75	66	-	75	75	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	-	-	88,20	88,30	88,40	83,5	-	88,40	88,40	

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian realisasi untuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara terealisasi sebanyak 9.382.976 orang dari target kinerja tahun 2024 sebesar 6.918.000 orang atau dengan capaian 136,43%. Capaian indikator jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara telah tercapai dan melebihi target hal ini terjadi karena beberapa event nasional maupun internasional yang diadakan di Kalimantan Timur.

Sementara untuk target nilai akuntabilitas kinerja PD tidak tercapai targetnya karena tidak sesuainya format dokumen yang dibutuhkan dengan dokumen yang dibuat. Serta nilai indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah tidak mencapai target dikarenakan kekurangan responden dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa poin sebagai isu strategis pengembangan Kepariwisata dan ekonomi kreatif Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Penetapan IKN menjadi peluang besar bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Dinamika ini mendorong pertumbuhan pesat pada pelaku usaha pariwisata yang kini semakin beragam dan inovatif. Bersamaan dengan itu, sektor ekonomi kreatif pun tak kalah menunjukkan tajinya. Kontribusinya terhadap ekonomi daerah tidak bisa dipandang sebelah mata dan menyimpan potensi besar untuk dikembangkan. Sub-sektor unggulan seperti kuliner, kriya, aplikasi, dan *game* menjadi motor penggerak utama, didukung oleh sub-sektor potensial lainnya seperti seni pertunjukan, fotografi/videografi, dan musik.

Transformasi digital memainkan peran krusial dalam geliat ini. Melalui digitalisasi informasi, promosi pariwisata menjadi lebih aktif, dinamis, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Berbagai asosiasi kepariwisataan pun tumbuh subur, menunjukkan adanya kolaborasi yang kuat antar pelaku industri.

2. Perkembangan pola hidup masyarakat yang menjadikan pariwisata sebagai kebutuhan dan gaya hidup .

Saat ini, pariwisata bukan lagi sekadar kegiatan liburan sesekali, melainkan telah menjadi kebutuhan dan bagian dari gaya hidup masyarakat. Fenomena ini didorong oleh perubahan pola pikir dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (*work-life balance*).

Masyarakat modern semakin menghargai pengalaman baru dan petualangan. Perjalanan tidak hanya dilakukan untuk bersantai, tetapi juga sebagai cara untuk mengisi ulang energi, memperluas wawasan, dan membangun koneksi sosial. Mulai dari mengunjungi kafe-kafe estetik, berburu kuliner unik di kota lain, hingga menjelajahi alam, setiap kegiatan pariwisata menjadi bagian dari identitas diri yang dapat dibagikan di media sosial.

Pariwisata kini menjadi ekspresi diri, di mana destinasi yang dipilih, foto-foto yang diunggah, dan cerita perjalanan yang dibagikan menjadi cerminan dari minat dan gaya hidup seseorang. Hal ini menciptakan pergeseran besar dalam industri pariwisata, yang kini harus beradaptasi dengan permintaan pasar yang tidak hanya

mencari tempat istirahat, tetapi juga pengalaman yang otentik, personal, dan *instagrammable*

3. Pelaku usaha Pariwisata semakin tumbuh dan variatif.

Dalam ekosistem pariwisata saat ini, terjadi pertumbuhan yang signifikan pada jumlah pelaku usaha pariwisata. Tak hanya kuantitas, variasi layanan dan produk yang mereka tawarkan pun semakin beragam. Jika dulu industri ini didominasi oleh hotel dan biro perjalanan besar, kini kita melihat munculnya berbagai jenis usaha yang lebih spesifik dan unik.

Berkembangnya usaha penginapan alternatif seperti *homestay*, *glamping*, dan vila-vila pribadi yang menawarkan pengalaman lebih otentik. Di sektor kuliner, restoran dan kafe dengan konsep tematik semakin menjamur. Begitu juga dengan biro perjalanan yang kini tidak hanya menawarkan paket wisata umum, tetapi juga paket-paket khusus, seperti wisata petualangan, wisata budaya, atau wisata kuliner yang dirancang khusus sesuai minat wisatawan.

Munculnya inovasi ini tidak lepas dari peran teknologi dan media sosial yang memudahkan pelaku usaha baru untuk menjangkau pasar. Dampaknya, wisatawan memiliki lebih banyak pilihan yang dapat disesuaikan dengan preferensi dan anggaran mereka, sementara industri pariwisata menjadi lebih dinamis dan kompetitif.

4. Pelaku ekonomi kreatif terus tumbuh.

Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi telah menjadi katalis bagi pertumbuhan pelaku

ekonomi kreatif. Jika dulu hanya segelintir orang yang berani menekuni bidang ini, sekarang kita melihat lonjakan signifikan dalam jumlah individu dan kelompok yang berkreasi dan menghasilkan nilai ekonomi dari ide-ide mereka.

Ini termasuk para desainer grafis lepas, videografer konten, musisi *indie*, perajin lokal, hingga pengembang aplikasi dan *game*. Mereka memanfaatkan platform digital untuk memamerkan karya, berinteraksi langsung dengan *audiens*, dan menjual produk atau jasa tanpa perantara yang rumit.

Pola pikir masyarakat yang semakin menghargai produk unik dan personal juga memicu pertumbuhan ini. Mereka tidak lagi hanya mencari barang massal, melainkan juga cerita, keunikan, dan nilai di balik sebuah karya. Hal ini memberikan ruang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi dan menemukan ceruk pasar mereka. Alhasil, ekonomi kreatif kini menjadi sektor yang dinamis, penuh potensi, dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian lokal.

5. Sektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi yang tidak sedikit bagi ekonomi daerah dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya pada sub sektor ekonomi kreatif unggulan (Kuliner, Kriya, Aplikasi dan *Game*) dan Sub sektor ekonomi potensial (Seni Pertunjukan, Fotografi/ *Videografi*, Musik).
6. Digitalisasi informasi menunjang promosi pariwisata yang aktif dan dinamis.

Dunia pariwisata telah berubah secara drastis dengan adanya digitalisasi informasi. Ini bukan sekadar tren, melainkan sebuah revolusi yang membuat promosi pariwisata menjadi jauh lebih aktif dan dinamis dari sebelumnya.

Dulu promosi hanya mengandalkan brosur atau iklan televisi yang jangkauannya terbatas. Sekarang, dengan kekuatan media sosial, situs *web*, dan aplikasi perjalanan, setiap destinasi bisa "berbicara" langsung kepada calon wisatawan di seluruh dunia. Informasi mengenai tempat wisata, kegiatan yang bisa dilakukan, hingga ulasan dari pengunjung lain bisa diakses dalam hitungan detik.

Fenomena ini mendorong terciptanya interaksi dua arah. Para pelaku pariwisata bisa secara langsung membagikan konten yang menarik, seperti foto dan video berkualitas tinggi, serta mengadakan promosi *real-time*. Di sisi lain, calon wisatawan dapat dengan mudah menemukan informasi, bertanya, bahkan memesan tiket atau akomodasi hanya dengan beberapa klik. Alhasil, promosi tidak lagi pasif, melainkan menjadi sebuah percakapan yang berkelanjutan, menciptakan pengalaman yang lebih personal dan menarik bagi setiap individu yang ingin menjelajahi dunia.

7. Asosiasi kepariwisataan semakin tumbuh.

Pemandangan industri pariwisata saat ini diperkaya dengan meningkatnya jumlah dan peran asosiasi kepariwisataan. Entitas ini tak lagi menjadi organisasi pasif; sebaliknya, mereka tumbuh menjadi wadah kolaborasi yang vital bagi para pelaku industri.

Asosiasi ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, memastikan kebijakan yang dibuat selaras dengan kebutuhan di lapangan. Lebih dari itu, mereka menjadi tempat para profesional bertukar pikiran, berbagi praktik terbaik, dan menghadapi tantangan bersama.

Kehadiran asosiasi yang kuat ini juga memberikan dampak positif bagi wisatawan. Dengan adanya standar dan etika yang dijaga bersama, kualitas layanan pariwisata menjadi lebih terjamin. Pada akhirnya, pertumbuhan asosiasi kepariwisataan mencerminkan kematangan industri yang tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak bersama dalam satu visi untuk memajukan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

8. Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan desa wisata semakin tumbuh dan berkembang.

Terdapat pergeseran pola pikir yang signifikan di tengah masyarakat pedesaan. Semakin banyak warga yang menyadari potensi besar di sekitar mereka, sehingga kesadaran untuk mewujudkan desa wisata semakin tumbuh dan berkembang.

Mereka tidak lagi melihat desa hanya sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai aset berharga yang memiliki daya tarik wisata. Dengan semangat gotong royong, warga desa mulai berinisiatif untuk mengelola potensi alam, budaya, dan kearifan lokal.

Inisiatif ini memunculkan berbagai inovasi, mulai dari membangun area camping yang dikelola komunitas, melestarikan seni pertunjukan tradisional, hingga menawarkan paket *homestay* yang autentik. Dampaknya pun sangat nyata. Desa wisata tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga membangkitkan kebanggaan lokal dan semangat untuk menjaga kelestarian lingkungan serta tradisi. Fenomena ini membuktikan bahwa pariwisata bisa tumbuh dari bawah, didorong oleh partisipasi aktif dan kesadaran kolektif dari masyarakat itu sendiri.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara keseluruhan, Rancangan Awal RKPD mencakup beberapa program utama untuk Bidang Pariwisata dan program penunjang pemerintahan daerah. Namun, setelah analisis kebutuhan, terdapat beberapa penyesuaian yang signifikan, terutama dalam alokasi anggaran, meskipun target capaiannya tetap sama.

Secara keseluruhan, total pagu indikatif pada rancangan awal adalah Rp 40,900,000,000 sedangkan total kebutuhan dana setelah analisis meningkat menjadi Rp 43,101,208,364. Kenaikan ini menunjukkan adanya kebutuhan pendanaan yang lebih besar dari perkiraan awal untuk mencapai target yang ditetapkan.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata: Anggaran untuk program ini berkurang drastis dari Rp 10.225.000.000 pada rancangan awal menjadi Rp 5.100.000.000 setelah analisis. Meskipun targetnya tetap

sama, yaitu mengembangkan 30% daya tarik wisata, terjadi penyesuaian signifikan pada beberapa kegiatan:

1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi mengalami penurunan pagu dari Rp 3.427.000.000 menjadi Rp 1.223.000.
2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi juga turun dari Rp 2.475.000.000 menjadi Rp 250.000.000.
3. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, dari Rp 3.573.000.000 menjadi Rp 3.376.000.000.

Program Pemasaran Pariwisata: Alokasi anggaran untuk program ini menurun dari Rp 3.500.000.000 menjadi Rp 2.200.000.000. Targetnya tetap melaksanakan 4 kegiatan pemasaran untuk meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif: Kebutuhan dana untuk program ini meningkat sangat signifikan, dari Rp 5.218.000.000 menjadi Rp 15.105.000.000. Kenaikan ini terutama disebabkan kebutuhan yang lebih besar untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, dari Rp 3.005.000.000 menjadi Rp 5.514.000.000 dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dari Rp 2.213.000.000 menjadi Rp 9.590.000.000.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terdapat penurunan kebutuhan anggaran untuk program ini, dari Rp 5.250.000.000 menjadi Rp 1.778.000.000. Penurunan ini terjadi pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM turun dari Rp 4.700.000.000 menjadi Rp 1.478.000.000 dan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif turun dari Rp 550.000.000 menjadi Rp 300.000.000.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam juta)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (dalam juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata		Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW)	30%	10.225	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata		Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW)	30%	5.100	
1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Persentase Lokasi Daya Tarik Wisata yang Dikelola	33,3%	3.573	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Persentase Lokasi Daya Tarik Wisata yang Dikelola	33,3%	3.376	
1.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Persentase Kawasan Strategis yang Dikelola	100%	3.427	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Persentase Kawasan Strategis yang Dikelola	100%	1.223	
1.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Persentase Destinasi yang Dikelola	100%	2.475	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Persentase Destinasi yang Dikelola	100%	250	
1.4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata		Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha	100%	750	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah		Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha	100%	250+	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam juta)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (dalam juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pariwisata yang Ditetapkan			Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pariwisata yang Ditetapkan			
2	Program Pemasaran Pariwisata		Rata-rata lama tinggal wisatawan - (BPS) Nusantara Mancanegara	1,65 2,70	3.500	Program Pemasaran Pariwisata		Rata-rata lama tinggal wisatawan - (BPS) Nusantara Mancanegara	1,65 2,70	2.200	
2.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Terhadap Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Kegiatan)	4 Kegiatan	3.500	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Terhadap Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Kegiatan)	4 Kegiatan	2.200	
3	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		Persentase Tercapainya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)	100 %	5.218	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		Persentase Tercapainya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)	100 %	15.105	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam juta)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (dalam juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Disediakan (Lokasi)	1 lokasi	3.005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Disediakan (Lokasi)	1 lokasi	5.514	
3.2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%) (4 sub sektor : Kuliner, kriya-wastra, seni pertunjukan, Aplikasi)	100 %	2.213	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%) (4 sub sektor : Kuliner, kriya-wastra, seni pertunjukan, Aplikasi)	100 %	9.590	
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Persentase Tercapainya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan SDM-nya (%)	100 %	5.250	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Persentase Tercapainya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan SDM-nya (%)	100 %	1.778	
4.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan		Jumlah SDM Parekras yang Tersertifikasi (Orang)	50 Orang	4.700	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan		Jumlah SDM Parekras yang Tersertifikasi (Orang)	50 Orang	1.478	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam juta)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (dalam juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					
4.2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah Subsektor Ekraf yang dikembangkan Kapasitasnya (Subsektor)	4 Sub Sektor	550			Jumlah Subsektor Ekraf yang dikembangkan Kapasitasnya (Subsektor)	4 Sub Sektor	300	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	81 Indeks 100%	16.707	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	81 Indeks 100%	19.354	
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90%	1.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90%	800	
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	82%	11.902	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase ASN yang mendapatkan layanan	82%	14.275	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam juta)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (dalam juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			tepat waktu (%)					administrasi keuangan tepat waktu (%)			
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	70%	50	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	70%	31	
5.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	1.993	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	459	
5.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (bulan)	12 bulan	1.621	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (bulan)	12 bulan	2.688	
5.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	12 bulan	140	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	12 bulan	639	
	TOTAL				40.900	TOTAL				43.101	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pembangunan Pariwisata Kalimantan Timur juga ikut mewujudkan beberapa misi Jospol yang digagas oleh Gubernur diantaranya jospol 4 yaitu “Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM” melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi profesi, dan juga jospol 5 yaitu “Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa” melalui kegiatan Lomba dan Jambore Desa/Kampung Wisata Se-Kalimantan Timur dan juga promosi pariwisata.

Usulan program dan kegiatan pada tabel T-C.32 diperoleh melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat, masukan dari pemangku kepentingan, serta hasil kajian perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Misalnya, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata di Kota Bontang, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Timur merupakan respon terhadap kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana penunjang destinasi wisata serta upaya pengembangan Geopark Sangkulirang - Mangkalihat. Usulan ini sejalan dengan isu strategis peningkatan kualitas destinasi wisata, sekaligus mendukung tugas pokok perangkat daerah dalam penyediaan infrastruktur kepariwisataan.

Selanjutnya, program pemasaran pariwisata yang meliputi Pameran Unggulan Nasional, Fasilitas *Table Top East* Kalimantan, Bali *Beyond Travel Fair*, Bincang-Bincang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemilihan Duta dan Putri Pariwisata Kalimantan Timur, serta partisipasi dalam berbagai *event* berskala nasional maupun internasional, merupakan bentuk penguatan promosi destinasi pariwisata daerah. Kegiatan ini sesuai dengan isu peningkatan daya saing pariwisata dan mendukung fungsi perangkat daerah dalam hal promosi dan pemasaran.

Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, yang mencakup Sarahsehan Pelaku Ekonomi Kreatif, *East Borneo International Folklore*

Festival, Fasilitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Fasilitas Produksi Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, hingga penyediaan Sarpras Temindung *Creative Hub* disusun berdasarkan kebutuhan pelaku ekonomi kreatif akan perlindungan dan pengembangan usaha. Hal ini relevan dengan isu penguatan ekosistem ekonomi kreatif serta mendukung fungsi perangkat daerah dalam pemberdayaan pelaku industri kreatif.

Adapun program pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup pelatihan tata kelola destinasi pada desa wisata, sertifikasi tenaga kerja pariwisata, fasilitasi *workshop* SDM ekonomi kreatif, serta berbagai bentuk pelatihan inovasi, disusun untuk menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM. Usulan tersebut sesuai dengan isu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pelaksanaan tugas pokok perangkat daerah dalam meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%) (mancanegara dan nusantara)	%	
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah destinasi wisata yang meningkat daya tariknya		
	Sub kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	Lokasi	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Daya Tarik Wisata Provinsi		
	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Daya Tarik Wisata di KSPP yang dikelola		
	Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	
	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang	
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola		
	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang	
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase pelaku usaha pariwisata yang berstandar	%	
	Sub kegiatan Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha	
	Sub kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Laporan	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Peningkatan jumlah tayangan media pemasaran pariwisata (%)	%	
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata yang berhasil dipromosikan		
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	
	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	%	
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase pelaku wisata (Parekraf) yang terfasilitasi pengembangan kapasitas dan sertifikasi	%	
	Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase kerjasama peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku pariwisata dan ekraf	%	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		yang berjalan dengan baik		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Orang	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	%	
	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase pelaku ekraf yang terhubung dengan ekosistem ekraf	%	
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan	Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Ekosistem Ekonomi Kreatif		
	Sub Kegiatan Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah terlaksanakannya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif	Promosi	
	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Presentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang disediakan	%	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	
	Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar	Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Ekspor dan Pasar Domestik		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Kalimantan Timur	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	%	
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (%)	%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunannya	Laporan	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa	Laporan	
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	
	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	%	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	
	Sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab VI Pasal 7,8 dan 9 adalah ; Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kabupaten/kota..

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025 dan Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Talanpekda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2025

Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dalam Ripparnas 2010 – 2025, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

PROVINSI	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL/KPPN (RIPPARNAS)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (RIPPARNAS)	DESTINASI PARIWISATA NASIONAL/D PN (RIPPARNAS)
Kalimantan Timur	1. KPPN Long Apari dskt		DPN LONG BAGUN–MELAK dskt
	2. KPPN Long Bagun dskt	KSPN. Long Bagun dskt	
	3. KPPN Melak–Kersik Luway dskt		
	4. KPPN Kota Bangun–Tanjung Isuy dskt	KSPN. Kota Bangun–Tanjung Isuy dskt	DPN TENGGARONG–BALIKPAPAN dskt
	5. KPPN Tenggarong dskt		
	6. KPPN Samarinda Kota dskt		
	7. KPPN Bontang–Sangata dskt		
	8. KPPN Balikpapan–Semboja dskt		

PROVINSI	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL/KPPN (RIPPARNAS)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (RIPPARNAS)	DESTINASI PARIWISATA NASIONAL/D PN (RIPPARNAS)
	9. KPPN Tanjung Redeb dskt		DPN DERAWAN–KAYAN MENTARANG dskt
	10.KPPN Derawan–Sangalaki dskt	KSPN. Derawan–Sangalaki dskt	
Kalimantan Utara	1.KPPN Kayan Mentarang dskt	KSPN. Kayan Mentarang dskt	
	2.KPPN Tarakan dskt		

Kebijakan Nasional terhadap Pariwisata khususnya Kalimantan Timur adalah.

Rekomendasi Pengembangan Pariwisata Kaltim meliputi:

1. Percepatan penetapan RIPPARDA Provinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kuantitas serta kualitas aksesibilitas menuju KSPN&KPPN
3. Percepatan Implementasi pendaftaran usaha pariwisata.
4. Diseminasi Standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada Pelaku usaha pariwisata.
5. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata dan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pariwisata;
6. Diseminasi ACCSTP kepada pelaku dan SDM Usaha Pariwisata
7. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Usaha Pariwisata;
8. Identikasi kebutuhan WPA dan Auditor Usaha Pariwisata, disampaikan kepada Kementerian Pariwisata C.q. Direktorat Industri Pariwisata & Pusat kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.
9. Penyusunan Travel Pattern Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjadi obyek pariwisata andalan dan terpelihara untuk mendatangkan wisatawan yang berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat.

yang dielaborasikan dalam program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, yaitu **“Terwujudnya Kalimantan Timur menjadi Daerah Tujuan Pariwisata yang berdaya saing”** dalam mendukung perwujudan visi Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan.

3.2.1 Tujuan

Tujuan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan.

Berdasarkan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim menetapkan tujuan sebagai berikut:

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas maka telah ditetapkan 5 (lima) tujuan strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepariwisataan kalimantan timur yang berdaya saing.;
- b. Meningkatnya industri pariwisata sebagai penopang perekonomian daerah;
- c. Meningkatnya Kualitas persembahan Seni dan Budaya yang mendukung daya tarik pariwisata;
- d. Meningkatnya Penyelenggaraan Kepariwisata yang Profesional dan Akuntabel.

3.2.2 Sasaran

Sasaran dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan meningkatnya kepariwisataan kalimantan timur yang berdaya saing dijabarkan menjadi lima sasaran strategis, yaitu:
 - 1) Daya tarik wisata di 7 (Tujuh) kawasan pengembangan pariwisata (KPP) berdaya saing;

- 2) Kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisata nusantara meningkat;
 - 3) Banyaknya karya seni budaya yang dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata;
 - 4) Banyaknya karya seni budaya yang dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata;
 - 5) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
 - 6) Meningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur;
 - 7) Terpenuhinya urusan kelembagaan pemerintah daerah;
 - 8) Dokumen perencanaan pengendalian evaluasi disusun tepat waktu.
- b. Tujuan meningkatnya industri pariwisata sebagai penopang perekonomian daerah dijabarkan menjadi dua sasaran strategis, yaitu:
- 1) Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata;
 - 2) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
- c. Tujuan menggali, melestarikan, mengembangkan serta meningkatnya seni dan budaya sebagai karakter jati diri dan pemersatu bangsa dijabarkan menjadi dua sasaran strategis, yaitu:
- 1) Meningkatnya Pengembangan budaya di Kalimantan Timur;
 - 2) Meningkatnya industri ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya.
- d. Tujuan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian Dinas Pariwisata dijabarkan menjadi tiga sasaran strategis, yaitu:
- 1) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dinas Pariwisata;
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset dan kepegawaian Dinas Pariwisata; dan

3) Meningkatnya Kapasitas Aparatur.

e. Tujuan meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dijabarkan menjadi tiga sasaran strategis, terdiri:

1) Meningkatnya kualitas perencanaan Dinas Pariwisata;

2) Meningkatnya kinerja Dinas Pariwisata; dan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.3 Program dan Kegiatan

Kebijakan nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk tahun 2025 berfokus pada percepatan sektor pariwisata melalui berbagai program unggulan. Program ini mencakup transformasi digital (*Tourism 5.0*), Gerakan Wisata Bersih, peningkatan pariwisata berbasis minat khusus (seperti gastronomi, wisata bahari, dan *wellness tourism*), penyelenggaraan acara berskala global dengan kekayaan intelektual Indonesia, dan pengembangan desa wisata berbasis komunitas. Program ini ditargetkan untuk mencapai 1,8 miliar pergerakan wisatawan domestik, 16 juta wisatawan mancanegara, dan berkontribusi 4,6% terhadap PDRB nasional pada 2025.

Penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memberikan dampak positif pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lokal. Pembangunan IKN menjadi daya tarik utama yang meningkatkan jumlah kunjungan, baik untuk keperluan kerja maupun wisata. Peningkatan ini juga berkontribusi pada pertumbuhan tingkat hunian dan bisnis kuliner di sekitar IKN.

Program nasional Kementerian Pariwisata memiliki implikasi signifikan bagi Kalimantan Timur:

1. Peningkatan Pariwisata Berbasis Minat Khusus: Dengan adanya program nasional yang mendorong wisata berbasis minat khusus, Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk mengembangkan berbagai potensi wisata alamnya, seperti hutan, sungai, dan arung

- jeram, serta wisata bahari. Pemerintah dan otoritas IKN juga telah bekerja sama untuk mengembangkan destinasi wisata baru seperti Goa Tapak Raja dan Bukit Bangkirai, yang berdekatan dengan IKN.
2. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Komunitas: Program ini sangat relevan bagi Kalimantan Timur, di mana kesadaran masyarakat untuk mewujudkan desa wisata terus tumbuh. Dukungan dari pusat dapat mempercepat pengembangan desa-desa wisata, memberdayakan masyarakat lokal, dan melestarikan kearifan lokal seperti seni musik dan ukiran Dayak Kenyah.
 3. Gerakan Wisata Bersih dan Transformasi Digital: Program ini sejalan dengan kebutuhan Kalimantan Timur. Meningkatnya jumlah kunjungan ke IKN dan sekitarnya memerlukan pengelolaan kebersihan dan sanitasi yang lebih baik. Selain itu, digitalisasi dalam promosi dan layanan pariwisata akan sangat membantu provinsi dalam memasarkan potensi wisatanya kepada wisatawan domestik dan mancanegara.

Secara keseluruhan, program nasional Kementerian Pariwisata memberikan kerangka strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Kalimantan Timur untuk mengintegrasikan potensi lokalnya dengan pembangunan IKN, sehingga pariwisata dan ekonomi kreatif dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur berkontribusi aktif dalam mendukung program unggulan Kepala Daerah, terutama yang berfokus pada pariwisata dan ekonomi kreatif. Kontribusi ini terlihat melalui berbagai strategi dan program yang terintegrasi dengan visi pembangunan provinsi. Salah satu program unggulan Kepala Daerah adalah pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa.

Strategi dan Kontribusi Utama Dinas Pariwisata antara lain:

1. Pengembangan Destinasi dan Ekonomi Kreatif: Dinas Pariwisata berfokus pada optimalisasi sarana dan prasarana destinasi wisata yang sudah ada, sekaligus membangun destinasi baru. Strategi ini melibatkan pelibatan masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata

(Pokdarwis) dan komunitas pariwisata. Pendekatan ini sejalan dengan program unggulan kepala daerah untuk mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan mengembangkan pariwisata berbasis desa.

2. Digitalisasi dan Promosi: Dinas Pariwisata mengoptimalkan promosi melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, *website*, dan digital *marketing*. Strategi ini bertujuan untuk membangun identitas tempat wisata (*branding*) dan menargetkan segmen wisatawan yang tepat. Hal ini mendukung program pemerintah daerah yang mendorong ekonomi kreatif dan digital.
3. Peningkatan Kapasitas SDM: Dinas Pariwisata mengadakan berbagai pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Program seperti *workshop* digitalisasi *branding* dan promosi desa wisata diadakan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor ini. Peningkatan kualitas SDM ini krusial untuk menghadapi bonus demografi dan mewujudkan visi Kalimantan Timur yang berdaya saing global.
4. Kolaborasi dan Sinergi: Dinas Pariwisata juga berperan dalam mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memajukan sektor pariwisata. Selain itu, Dinas Pariwisata mengadakan acara dan festival lokal, seperti Apresiasi Kreasi Kalimantan Timur, sebagai wadah bagi pelaku seni dan ekonomi kreatif untuk mempromosikan potensi mereka.

Sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah “Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah” dengan Isu Strategis “Menuju Kalimantan Timur sebagai daerah Tujuan Wisata Kelas dunia”.

Hal tersebut mendorong setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat merealisasikan dalam program kegiatan dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2026 dari pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur sebagai program penunjang adalah sebagai berikut ;

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- c) Program Pemasaran Pariwisata
- d) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- e) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				43.101.208.364				32.625.588.000
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				43.101.208.364	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil			32.625.588.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		82 Indeks 100%	18.917.009.763				19.075.588.000
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu		90%	800.000.000				1.000.000.000
3.26.01.1.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	365.343.287	Dana Alokasi Umum			700.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.1.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	166.369.320	Dana Alokasi Umum			150.000.000
3.26.01.1.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	268.287.393	Dana Alokasi Umum			150.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		82%	14.275.928.578				14.333.287.000
3.26.01.1.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74 Orang/ Bulan	13.879.208.578	Pajak Daerah Dana Alokasi UmumD ana Bagi Hasil			13.861.287.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.1.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	396.720.000	Pajak Daerah			472.000.000
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		70%	31.296.000				-
3.26.01.1.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Paket	31.296.000	Dana Bagi Hasil			-
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa		12 Bulan	459.013.266				305.601.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	31.909.699	Dana Bagi Hasil			-
3.26.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	142.254.345	Dana Bagi Hasil			-
3.26.01.1.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang Kab. Kutai Barat,	30 Paket	26.111.545	Dana Bagi Hasil			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jempang, Tanjung Isuy						
3.26.01.1.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	6.750.000	Dana Bagi Hasil			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Paket	80.017.097	Dana Bagi Hasil			-
3.26.01.1.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	13.860.000	Dana Bagi Hasil			-
3.26.01.1.06.00 07	Penyediaan Bahan/Material		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	19.376.580	Pajak Daerah			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Laporan	138.734.000	Dana Bagi Hasil			305.601.000
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	22.381.288				200.000.000
3.26.01.1.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang Kab. Kutai	20 Unit	22.381.288	Dana Bagi Hasil			200.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Barat, Jempang, Tanjung Isuy							
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Bulan	2.688.598.600				2.716.700.000	
3.26.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	12 Laporan	719.108.600	Pajak Daerah	-	-	716.700.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa						
3.26.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.969.490.000	Pajak Daerah			2.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik		80%	639.792.031				520.000.000
3.26.01.1.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	290.238.500	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil			330.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	atau Kendaraan Dinas Jabatan								
3.26.01.1.09.00 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	21.503.531	Dana Bagi Hasil			30.000.000
3.26.01.1.09.00 10	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	328.050.000	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil			160.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung Isuy						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana				
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	-	0,5%	5.100.000.000			0.5	5.250.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Destinasi Wisata yang Meningkat Daya Tariknya		4 Destinasi	3.376.667.200			7 Destinasi	1.650.000.000	
3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lokasi	2.976.667.200	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil		3	1.200.000.000	
3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Orang	400.000.000	Dana Bagi Hasil		95	450.000.000	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Daya Tank Wisata di KSPP yang dikelola		4 DTW	1.223.332.800			7	2.800.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.02.1.02.00 04	Pengadaan/Pemeliha raan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	873.332.800	Dana Bagi Hasil		3	2.400.000.000
3.26.02.1.02.00 09	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Orang	350.000.000	Pajak Daerah		95	400.000.000
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikelola		2 Destinasi	250.000.000			7	350.000.000
3.26.02.1.03.00 10	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	60 Orang	250.000.000	Pajak Daerah		95	350.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa						
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah yang berstandar		10	250.000.000			15	450.000.000
3.26.02.1.04.00 09	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	125.000.000	Dana Bagi Hasil		10	250.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.02.1.04.00 10	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	125.000.000	Dana Bagi Hasil		1	200.000.000
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Tayangan Media Pemasaran Pariwisata	-	29,1%	2.200.000.000			29,74%	1.500.000.000
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Wisata dan Kawasan Strategis Pariwisata yang Berhasil dipromosikan		30 Destinasi	2.200.000.000			30	1.500.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.03.1.01.00 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	1.300.000.000	Dana Bagi Hasil		11	950.000.000
3.26.03.1.01.00 05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	300.000.000	Dana Bagi Hasil		5	250.000.000
3.26.03.1.01.00 06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kegiatan	600.000.000	Dana Bagi Hasil		5	350.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual		5,07%	15.105.601.57 9			5,07%	5.300.000.000
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Presentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang disediakan		11%	5.514.850.851			11	3.450.000.000
3.26.04.1.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	151.820.000	Dana Bagi Hasil		2	200.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.04.1.01.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	72.930.513	Dana Bagi Hasil		5	250.000.000
3.26.04.1.01.00 06	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.290.100.338	Dana Bagi Hasil		1	3.000.000.000
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terhubung dengan Ekosistem Ekonomi Kreatif		10%	9.590.750.728			10	1.850.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.04.1.02.00 05	Pengembangan Sistem Pemasaran		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.584.485	Dana Bagi Hasil		1	100.000.000
3.26.04.1.02.00 10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	43.400.000	Dana Bagi Hasil		10	375.000.000
3.26.04.1.02.00 14	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Promosi	268.581.000	Dana Bagi Hasil		2	150.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.04.1.02.00 15	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	2.192.700.000	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil		1	100.000.000
3.26.04.1.02.00 19	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	6.913.485.243	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil		1	1.000.000.000
3.26.04.1.02.00 20	Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Produk	72.000.000	Dana Bagi Hasil		25	125.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana				
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		1,16%	1.778.597.022			1,16%	1.500.000.000	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Kerjasama Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berjalan dengan Baik		0.85 %	1.478.597.022			0,85	1.200.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.05.1.01.00 04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang	728.597.022	Dana Alokasi Umum		120	550.000.000
3.26.05.1.01.00 08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	250.000.000	Dana Alokasi Umum		3	250.000.000
3.26.05.1.01.00 14	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Orang	350.000.000	Dana Alokasi Umum		90	250.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.05.1.01.00 17	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	150.000.000	Dana Alokasi Umum		30	150.000.000
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Wisata (Parekraf) yang Terfasilitasi Pengembangan Kapasitas dan Sertifikasi		0.31 %	300.000.000			0,31	300.000.000
3.26.05.1.02.00 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Orang	300.000.000	Dana Alokasi Umum		90	300.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.3.1 Fokus Program Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2026

Penjelasan Rencana Program dan Kegiatan Pariwisata
Tahun Anggaran 2025.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan pagu rencana sebesar Rp. 18.917.009.763,-

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan pagu rencana sebesar Rp. 5.100.000.000,-

- 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
- 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
- 4) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Program Pemasaran Pariwisata dengan pagu rencana sebesar Rp. 2.200.000.000,-

- 1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan pagu rencana sebesar Rp. 15.105.601.579,-

- 1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan pagu rencana sebesar Rp. 1.778.597.022,-

- 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.
- 2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata memiliki 5 (lima) program dan 16 (enam belas) kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pembangunan Pariwisata Kalimantan Timur juga ikut mewujudkan beberapa misi Jospol yang digagas oleh Gubernur diantaranya jospol 4 yaitu “Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM” melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi profesi, dan juga jospol 5 yaitu “Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa” melalui kegiatan Lomba dan Jambore Desa/Kampung Wisata Se-Kalimantan Timur dan juga promosi pariwisata.

Program Pemasaran Pariwisata yang meliputi Pameran Unggulan Nasional, Fasilitas *Table Top East* Kalimantan, Bali *Beyond Travel Fair*, Bincang-Bincang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemilihan Duta dan Putri Pariwisata Kalimantan Timur, serta partisipasi dalam berbagai *event* berskala nasional maupun internasional, merupakan bentuk penguatan promosi destinasi pariwisata daerah. Kegiatan ini sesuai dengan isu peningkatan daya saing pariwisata dan mendukung fungsi perangkat daerah dalam hal promosi dan pemasaran.

Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, yang mencakup Sarahsehan Pelaku Ekonomi Kreatif, *East Borneo International Folklore Festival*, Fasilitas Pelaku Ekonomi Kreatif,

Fasilitasi Produksi Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, hingga penyediaan Sarpras Temindung *Creative Hub* disusun berdasarkan kebutuhan pelaku ekonomi kreatif akan perlindungan dan pengembangan usaha. Hal ini relevan dengan isu penguatan ekosistem ekonomi kreatif serta mendukung fungsi perangkat daerah dalam pemberdayaan pelaku industri kreatif.

Adapun program pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup pelatihan tata kelola destinasi pada desa wisata, sertifikasi tenaga kerja pariwisata, fasilitasi *workshop* SDM ekonomi kreatif, serta berbagai bentuk pelatihan inovasi, disusun untuk menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM. Usulan tersebut sesuai dengan isu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pelaksanaan tugas pokok perangkat daerah dalam meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2026	
				TARGET	PAGU(Rp)
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				Rp 43.101.208.364
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp 18.917.009.763
3.26.01.1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	Kalimantan Timur, Luar Daerah	90%	Rp 800.000.000
3.26.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Kalimantan Timur	82%	Rp 14.275.928.578
3.26.01.1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kalimantan Timur, Luar Daerah	70%	Rp 3.1296.000
3.26.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa	Kalimantan Timur, Luar Daerah	12 Bulan	Rp 459.013.266
3.26.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kalimantan Timur	1 Unit	Rp. 22.381.288
3.26.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	12 Bulan	Rp 2.688.598.600

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2026	
				TARGET	PAGU(Rp)
3.26.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	Kalimantan Timur	80%	Rp 639.792.031
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Rp 5.100.000.000
3.26.02.1.0 1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Destinasi Wisata yang Meningkatkan Daya Tariknya	Kalimantan Timur	4 Destinasi	Rp 3.376.667.200
3.26.02.1.0 2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata di KSPP yang Dikelola	Kalimantan Timur	4 DTW	Rp 1.223.332.800
3.26.02.1.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikelola	Kalimantan Timur	2 Destinasi	Rp 250.000.000
3.26.02.1.0 4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata yang Berstandar	Kalimantan Timur	100 %	Rp 250.000.000
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Rp 2.200.000.000
3.26.03.1.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Wisata dan Kawasan Strategis Pariwisata yang Berhasil Dipromosikan	Kota Samarinda, Kab Kutai Kartanegara, Kab Kutai Barat, Luar Daerah	30 Destinasi	Rp 2.200.000.000
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				Rp 15.105.601.579
3.26.04.1.0 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan Baik</i>	Kab Kutai Kartanegara, Kab Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Bontang	11 %	Rp 5.514.850.851
3.26.04.1.0 2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terhubung dengan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab Berau, Kab Paser, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab Penajam Paser utara, Kab Mahakam Ulu	10 %	Rp 9.590.750.728
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Rp 1.778.597.022
3.26.05.1.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Kerjasama Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berjalan dengan Baik	Kalimantan Timur, Luar Daerah	0,85 %	Rp 1.478.597.022
3.26.05.1.0 2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Wisata (Parekraf) yang Terfasilitasi	Kalimantan Timur, Luar Daerah	0,31 %	Rp 131.712.774

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2026	
				TARGET	PAGU(Rp)
		Pengembangan Kapasitas dan Sertifikasi			

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur diberikan amanah dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata berdasarkan pada tujuan, sasaran, dan Program Kerja yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Strategis Dispar 2025 – 2029, Renja 2026, serta Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2025.

Program kegiatan yang telah disepakati dalam dokumen RPJMD di dalam rencana kerja tahun 2026 ini agar dapat dimaksimalkan dukungan pendanaan untuk mencapai target akhir Renstra SKPD dan RPJMD pada 2027 mendatang.

Untuk selanjutnya tataran indikator kinerja utama ini perlu untuk dibahas lebih lanjut agar terdapat penajaman-penajaman yang sesuai dengan perkembangan Kepariwisata Kalimantan Timur dengan melihat isu-isu nasional yang berkembang. Sehingga tercapai Visi Misi Dinas Pariwisata untuk mendukung Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur Terpilih yang telah dituangkan dalam RPJMD 2025 – 2029.

Akhirnya dengan harapan Dinas Pariwisata tentunya dapat menyumbangkan pembangunan kepada masyarakat menjadi lebih maju dan meningkat dibidang Pariwisata

RENJA TAHUN 2026 DINAS PERKEBUNAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang diikuti oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyusunan renja PD tahun 2026 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 -2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.

Tujuan yang diharapkan dari Renja ini adalah :

1. Terjabarkannya Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RKPD tahun 2026;
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2026;
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja Perangkat Daerah tahun 2026; dan
4. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan RKPD dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat ringkasan singkat dari rencana kerja dan pendanaaan Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan mengacu kepada RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksana kegiatan adalah Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu :

- 1) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan (UPTD PBP);
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP); dan
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Produsen Benih Tanaman Perkebunan (UPTD PBTP).

Pada Tahun 2024, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Murni sebesar Rp. 91.115.131.294,- dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 47.526.538.168,- dan program pembangunan sebesar Rp. 43.588.593.126,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menjadi Rp. 94.827.902.847,- (bertambah Rp. 3.712.771.553) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 51.251.909.721,- dan program pembangunan sebesar Rp. 43.575.993.126,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 88.673.035.592,83,- (93,51%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 48.816.256.889,- (95,25%) belanja pembangunan sebesar Rp. 39.856.778.704,- (91,46%).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik untuk program rutin maupun teknis pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi. Program ini mendukung dalam mewujudkan urusan penunjang pemerintah daerah provinsi.
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan produksi komoditas perkebunan, terlaksananya pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta peningkatan pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat.
3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan kesejahteraan kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan.
4. Program penyuluhan pertanian. Program ini mendukung dalam pembentukan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan.
5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Program ini mendukung dalam penurunan emisi gas rumah kaca serta tingkat serangan OPT sub sektor perkebunan.
6. Program perizinan usaha pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana penjabaran berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Realisasi keuangan Dinas dan 3 UPTD sebesar Rp48.816.256.889,- dari pagu 51.251.909.721,- dengan capaian keuangan 95,25%. Program ini memiliki output:

- a) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti, dengan capaian sebagai berikut:
 - Dinas Perkebunan
Dari target 100% terealisasi 100% atau 100%.
 - UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
Dari target 100% terealisasi 100% atau 100%.
 - UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
Dari target 100% terealisasi 100% atau 100%.
 - UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
Dari target 100% terealisasi 100% atau 100%.
- b) Indeks Kualitas Layan Kesekretariatan, dengan capaian sebagai berikut:
 - Dinas Perkebunan

Dari target 78,93% terealisasi 95,77% atau 121,34%.

- UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 86% terealisasi 98,10% atau 114,24%.

- UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 79% terealisasi 97,80% atau 124%.

- UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 80% terealisasi 97,40% atau 121,75%.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.986.574.820,- dari pagu Rp. 24.754.994.050,- dengan capaian kinerja keuangan 88,82%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi terealisasi sebesar Rp. 16.819.731.444,- dari pagu dana Rp. 19.539.925.010,- dengan capaian kinerja keuangan 86,08%. Indikator kinerja program ini adalah tingkat pemenuhan sarana perkebunan dengan capaian 25% atau 98,58% dari target 25,36%. Capaian ini diperoleh dari persentase pemenuhan pupuk untuk perkebunan rakyat sebesar 23,66% dan pemenuhan benih untuk perkebunan rakyat sebesar 1,34% dengan melaksanakan:

1. Perluasan seluas 430 Ha;
2. Peremajaan seluas 350 Ha;
3. Intensifikasi seluas 1.950 Ha; dan
4. Rehabilitasi seluas 50 Ha

Pada tahun 2024 pemenuhan pupuk melalui bantuan yang diserahkan kepada masyarakat mencapai 2.780 Kg dari kebutuhan pupuk 2.820 Kg dan pemenuhan benih mencapai 3.759.900 benih dari kebutuhan benih sebanyak 112.526.786 benih. Dimana pemenuhan sarana perkebunan tersebut mencakup 8 komoditi yang terdiri dari: Kelapa Sawit, Lada, Karet, Kakao, Kelapa Dalam, Aren, Pala dan Kopi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Pemenuhan Sarana Perkebunan Rakyat Tahun 2024

No.	Uraian Kegiatan	Volume Bantuan
1	[#] Intensifikasi Aren 50 Ha	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	250 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	5 Kg
2	[#] Intensifikasi Kakao 100 Ha	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	500 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	10 Kg
3	[#] Intensifikasi Karet 200 Ha	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	1 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	20 Kg
4	[#] Intensifikasi Kelapa 100 Ha	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	500 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	10 Kg
5	[#] Intensifikasi Kelapa Sawit 300 Ha	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	1.5 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	30 Kg
6	[#] Intensifikasi Lada 150 Ha	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	750 Liter
	Pupuk Majemuk	15 Kg
	Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	
7	[#] Intensifikasi Pala 50 Ha	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	250 Liter
	Pupuk Majemuk	5 Kg
	Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	
8	[#] Peremajaan Kebun Kakao 50 Ha	
	Benih Kakao Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	50 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	250 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	5 Kg
9	[#] Peremajaan Kebun Karet 300 Ha	

No.	Uraian Kegiatan	Volume Bantuan
	Benih Karet Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	150 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	1.5 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	30 Kg
10	[#] Rehabilitasi Kebun Lada 50 Ha	
	Benih Lada Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	80 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	250 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	5 Kg
11	[#] Intensifikasi Kelapa Sawit 1.500 Ha (Major Project)	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	5 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	150 Kg
12	[#] Perluasan Areal Aren 25 Ha	
	Benih Aren Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	5 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	125 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	2.5 Kg
13	[#] Perluasan Areal Kakao Mahakam Ulu 25 Ha	
	Benih Kakao Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	25 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	125 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	2.5 Kg
14	[#] Perluasan Areal Kakao 100 Ha	
	Benih Kakao Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	100 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	500 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	10 Kg
15	[#] Perluasan Areal Karet 100 Ha	
	Benih Karet Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	50 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	500 Liter
	Pupuk Majemuk	10 Kg

No.	Uraian Kegiatan	Volume Bantuan
	Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	
16	[#] Perluasan Areal Kelapa Sawit 100 Ha	
	Benih Sawit Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	13 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	500 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	10 Kg
17	[#] Perluasan Areal Kopi 20 Ha	
	Benih Kopi Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	20 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	100 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	2 Kg
18	[#] Perluasan Areal Lada 20 Ha	
	Benih Lada Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	80 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	250 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	5 Kg
19	[#] Perluasan Areal Pala 50 Ha	
	Benih Pala Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	5 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	250 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	5 Kg

Sumber: Bidang Pengembangan Komoditi (2024)

Dimana rincian penerima manfaat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Lokasi dan Penerima Manfaat Pemenuhan Sarana Perkebunan Tahun 2024

No.	Kelompok Tani	Ketua	Alamat (Desa/ Kamp/ Kelurahan/ Kecamatan)	Kab/Kota	Jumlah KK	Luas (Ha)
1.1	Intensifikasi Aren 50 Ha					
1.	Sama Rasa	Parlan	Ds. Kedang Ipil, Kec. Kota Bangun	Kukar	25	25
2.	Keliran Jaya	M. Hutadin	Ds. Tuana Tuha, Kec. Kenohan	Kukar	15	25
1.2	Intensifikasi Kakao 100 Ha					

No.	Kelompok Tani	Ketua	Alamat (Desa/ Kamp/ Kelurahan/ Kecamatan)	Kab/Kota	Jumlah KK	Luas (Ha)
1.	KWT. Sumber Rejeki	Siti Faikah	Ds. Sumber Sari, Kec. Kota Bangun	Kukar	25	25
2.	Bangen Tawai	Ajang	Ds. Rantau Sentosa, Kec. Busang	Kutim	28	37
3.	Sungai Anai	Harifin Apui	Ds. Rantau Sentosa, Kec. Busang	Kutim	32	38
1.3	Intensifikasi Karet 200 Ha					
1.	Sabar Subur	Hartoyo	Ds. Tempakan, Kec. Batu Engau	Paser	28	28
2.	Sederhana	Sumarli	Ds. Busui, Kec. Batu Sopang	Paser	18	30
3.	Tani Maju	Muhammad Yusri	Kel. Bentuas, Kec. Palaran	Samarinda	15	15
4.	Sinar Tani V	Wolter	Kmp. Mencimai, Kec. Barong Tongkok	Kubar	10	16
5.	Tepian Pering	Jumiah	Ds. Bakungan, Kec. Loa Janan	Kukar	13	15
6.	Alam Subur	Wildan Hafiz	Ds. Sambera Baru, Kec. Marangkayu	Kukar	18	35
7.	Karya Bersama	Muhammad Amin	Ds. Sebuntal, Kec. marangkayu	Kukar	10	16
8.	Tawakal	Helman Wahyudi	Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur	Balikpapan	18	20
9.	Jalan Beimbai	Masransyah	Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur	Balikpapan	14	25
1.4	Intensifikasi Kelapa 100 Ha					
1.	Radak Sangkong	Dami	Kmp. Muara Tae, Kec. Jempang	Kubar	20	20
2.	Sinar Jaya	Sappe	Kel. Tanjung Tengah, Kec. Penajam	PPU	32	46
3.	Karya Bina Bersama	Iwan Priyanto Irza	Kel. Handil Baru, Kec. Samboja	Kukar	19	19
4.	Tunas Muda	Abdul Rahman	Kel. Handil Baru, Kec. Samboja	Kukar	15	15
1.5	Intensifikasi Kelapa Sawit 300 Ha					
1.	Daya Taka	Yapan	Kel. Sepan, Kec. Penajam	PPU	21	35
2.	Masa Kini	Muhlis	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	24	25
3.	Mekar Sari	Muliadi	Ds. Teluk Muda,	Kukar	14	20

No.	Kelompok Tani	Ketua	Alamat (Desa/ Kamp/ Kelurahan/ Kecamatan)	Kab/Kota	Jumlah KK	Luas (Ha)
			Kec. Kenohan			
4.	Mongoh Raya	Fitriansyah	Ds. Kahala, Kec. Kenohan	Kukar	15	20
5.	Hambau Berseri	Ikhwan Nur	Ds. Hambau, Kec. Kembang Janggut	Kukar	11	10
6.	Ketapang Jaya	Ilmi Prasetyo	Ds. Pelawan, Kec. Sangkulirang	Kutim	30	30
7.	Suka Maju	Sigit Al Jihat	Ds. Bumi Jaya, Kec. Kaubun	Kutim	35	50
8.	Makmur Bersama	M. Sidik	Kmp. Jambuk Makmur, Kec. Bongan	Kubar	20	30
9.	Bina Keluarga	Musmulyadi	Kmp. Penawai, Kec. Bongan	Kubar	25	25
10.	Cipta Karya	Akhmad Wahyudi	Kmp. Bukit Harapan, Kec. Bongan	Kubar	23	25
11.	Maju Bersama	Udil Thamrin S.	Kmp. Muara Gusik, Kec. Bongan	Kubar	26	30
1.6	Intensifikasi Lada 150 Ha					
1.	Jaya Kasih	Sius	Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung	Berau	14	13
2.	Bukit Harapan	Akhmad Multazam	Kmp. Sukan Tengah, Kec. Sambaliung	Berau	11	12
3.	Semoga Berkah	Yasmin	Kmp. Merancang Ilir, Kec. Gng Tabur	Berau	21	21
4.	Maju Bersama	Fathur Rizal	Kmp. Teluk Semanting	Berau	27	15
5.	Harapan Sejahtera	Ali Maskur	Kel. Karang Joang	Balikpapan	10	9
6.	Bunga Pisang	Muksin	Kel. Karang Joang	Balikpapan	6	5
7.	Bunga Salak	Sarip	Kel. Karang Joang	Balikpapan	6	5
8.	Tanah Leluhur	Basir	Kel. Karang Joang	Balikpapan	3	2
9.	Sapo Jaya Mandiri	Supardi	Kel. Karang Joang	Balikpapan	10	5
10.	Mekar Maju	Lane Supandi	Kel. Karang Joang	Balikpapan	10	6
11.	Mekar Bakti	Salla	Kel. Karang Joang	Balikpapan	6	3
12.	Mekar Tani Sejahtera	Nafiah	Kel. Karang Joang	Balikpapan	6	4
13.	Sumber Rejeki	Basriawan	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	10	10

No.	Kelompok Tani	Ketua	Alamat (Desa/ Kamp/ Kelurahan/ Kecamatan)	Kab/Kota	Jumlah KK	Luas (Ha)
14.	Mawar	H. Hannase	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	10	20
15.	Sukses Abadi	Jumasaha	Kmp. Bukit Harapan, Kec. Loa Janan	Kukar	20	20
1.7	Intensifikasi Pala 50 Ha					
1.	Mitra Tani	Busman	Kmp. Teluk Sumbang, Kec. BidukBiduk	Berau	25	50
1.8	Rehabilitasi Kebun Lada 50 Ha					
1.	Mega Buana	Basri. B	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	12	12
2.	Tunas Baru	H. Syarifuudin	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	17	17
3.	Harapan Sejahtera	Ali Maskur	Kel. Karang Joang, Balikpapan Utara	Balikpapan	14	13
4.	Mekar Tani Sejahtera	Nafiah	Kel. Karang Joang, Balikpapan Utara	Balikpapan	5	2
5.	Mekar Maju	Lane Supandi	Kel. Karang Joang, Balikpapan Utara	Balikpapan	7	3
6.	Mekar Bakti	Salla	Kel. Karang Joang, Balikpapan Utara	Balikpapan	4	3
1.9	Peremajaan Kebun Karet 300 Ha					
1.	Tuah Abadi II	Seti Warno	Kmp. Linggang Amer, Linggang Bigung	Kubar	50	50
2.	Bina Usaha II	Bonuifasius Dion	Kmp. Linggang Bigung Baru	Kubar	25	25
3.	Cinta Jaya III	Y. Watas M	Kmp. Linggang Melapeh	Kubar	25	55
4.	Suka Abadi	Dermansyah	Kmp. Linggang Melapeh Baru	Kubar	33	33
5.	Suka Tani II	Rustinawari. M	Kmp. Ombau Asa	Kubar	26	26
6.	Mitra Tani VI	Rusmanto	Kmp. Belempung Ulaq	Kubar	37	37
7.	Abadi Jaya IV	Inocentius Kadis	Kmp. Juhan Asa	Kubar	20	20
8.	Sido Mulyo I	Supadmono	Kmp. Sumber Rejo	Kubar	21	25
9.	Cahaya Noor V	Nurhayati	Kmp. Sekolaq Darat	Kubar	29	29
1.10	Peremajaan Kebun Kakao 50 Ha					
1.	Sentosa Sejahtera	Peridis	Ds. Tantau Sentosa, Kec.	Kukar	59	50

No.	Kelompok Tani	Ketua	Alamat (Desa/ Kamp/ Kelurahan/ Kecamatan)	Kab/Kota	Jumlah KK	Luas (Ha)
			Busang			
1.11	Intensifikasi Kelapa Sawit (Major Project) 1.500 Ha					
1.	Bina Bersama	Yoso Wiyono	Ds. Krayan Makmur, Kec. Long Ikis	Paser	16	40
2.	Margo Dadi	Armansyah	Ds. Krayan Makmur, Kec. Long Ikis	Paser	19	52
3.	Jaya Mulya	Nardi	Ds. Krayan Makmur. Kec. Long Ikis	Paser	18	20
4.	Mantap Karya	Warsito	Ds. Krayan Makmur. Kec. Long Ikis	Paser	17	50
5.	Tunas Pasir	Miyarto	Ds. Krayan Makmur. Kec. Long Ikis	Paser	21	50
6.	Bila Mana	Badriansyah	Ds. Krayan Makmur. Kec. Long Ikis	Paser	21	50
7.	Suka Tentrem	Barman Sukirman	Ds. Krayan Makmur. Kec. Long Ikis	Paser	22	50
8.	Sari Utama	Luther Sattu	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	14	21
9.	Maju Tani	Bukholif	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	35	55
10.	Tani Makmur	Donatus Nei	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	23	35
11.	Sekar Sari	Eduardus Egho	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	18	28.5
12.	Suka Damai	Arnoldus Ado	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	22	35.5
13.	Sari Bumi	Mesno	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	17	27
14.	Maju Jaya	Widodo	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	20	33
15.	Hidup Rukun	Sukadi	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	15	23
16.	Sudi Makmur	Yuli Riyanto	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	24	36.5
17.	Daya Taka	Idrus Daud	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	20	30.5

No.	Kelompok Tani	Ketua	Alamat (Desa/ Kamp/ Kelurahan/ Kecamatan)	Kab/Kota	Jumlah KK	Luas (Ha)
18.	Karya Taruna	Sukarno	Ds. Klempang Sari, Kec. Kuaro	Paser	16	38
19.	Eka Prasetya	Saidi	Ds. Klempang Sari, Kec. Kuaro	Paser	17	42
20.	Karya Daya Taka B	M. Ramli	Ds. Klempang Sari, Kec. Kuaro	Paser	18	42
21.	Karya Utama	Sugeng	Ds. Klempang Sari, Kec. Kuaro	Paser	18	42
22.	Sumber Rejeki	Sani B	Ds. Klempang Sari, Kec. Kuaro	Paser	18	48
23.	Buern Taka	Rahmad Hanafi	Ds. Padang Jaya, Kec. Kuaro	Paser	18	27
24.	Akat Berayak	Rowi Karwita	Ds. Padang Jaya, Kec. Kuaro	Paser	13	20
25.	Penyombolum Taka	Darmanto	Ds. Padang Jaya, Kec. Kuaro	Paser	15	23
26.	Buen Were	Rofiq' Udin	Ds. Padang Jaya, Kec. Kuaro	Paser	19	28.5
27.	Taka Bekerai	Kardianto	Ds. Padang Jaya, Kec. Kuaro	Paser	15	22.50
1.12	Perluasan Areal Aren 25 Ha					
1.	Sante'au	Yahya Wijaya P	Kmp. Linggang Kebut	Kubar	25	25
1.13	Perluasan Areal Kakao 100 Ha					
1.	Sumber Makmur	Pujar Aji Prasetyo	Ds. Sungai Payang, Kec. Loa Kulu	Kukar	16	15
2.	Bukit Harapan	Akhmad Multazam	Kmp. Sukan Tengah, Kec. Sambaliung	Berau	11	20
3.	Tunas Muda	Pilipus Sardinsyah	Kmp. Sekolaq Darat, Kec.Sekolaq	Kubar	15	15
4.	Karya Mandiri I	Bertolomeus M	Kmp. Linggang Amer	Kubar	12	12
5.	Karya Indah II	Anus	Kmp. Linggang Amer	Kubar	25	38
1.14	Perluasan Areal Kakao Mahakam Ulu 25 Ha					
1.	Mambes 3	Herylianus Gubtur	Kmp. Mamahak Besar	Mahulu	20	12.5
2.	Mambes 4	Rovianus Madang	Kmp. Mamahak Besar	Mahulu	20	12.5
1.15	Perluasan Areal Karet 100 Ha					
1.	Poros Permai	Agus Salim	Kmp. Nguyub Ulu, Kec. Tering	Kubar	25	30
2.	Tipak Permai	Asmadi	Kmp. Nguyub Ulu, Kec. Tering	Kubar	25	25
3.	Jantur Lungau	Yanto	Kmp. Pepas	Kubar	25	25

No.	Kelompok Tani	Ketua	Alamat (Desa/ Kamp/ Kelurahan/ Kecamatan)	Kab/Kota	Jumlah KK	Luas (Ha)
			Eheng, Kec. Barong T			
4.	KWT.Kelumpang Bercahaya	Eli Yati	Kmp. Kelumpang	Kubar	17	20
1.16	Perluasan Areal Kelapa Sawit 100 Ha					
1.	Tebru Membangun	Wahyudi	Ds. Tebru Paser Damai, Kec. Bt Engau	Paser	20	35
2.	Karya Usaha	Hj. Aisyah	Ds. Rintik. Kec. Babulu	PPU	19	25
3.	Pilar Jaya	Bana	Kel. Sepan Kec. Penajam	PPU	31	40
1.17	Perluasan Areal Kopi 20 Ha					
1.	Jelawet Jaya	Indrawansyah	Kmp. Linggang Tutung	Kubar	10	10
2.	Kmp. Kopi Luawak	Rindoni	Ds. Prangat Baru. Kec.Marangkayu	Kukar	5	10
1.18	Perluasan Areal Lada 20 Ha					
1.	Pesona Lestari	Yanorol	Kmp. Suakong, Kec. Bentian Besar	Kubar	15	5
2.	KWT. Berkat Mandiri	Saldiana	Kmp. Kelian, Kec. Damai	Kubar	10	5
3.	Tunas Mekar	H. Kasman	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	10	10
1.19	Perluasan Areal Pala 50 Ha					
1.	Bersama	H. Abd. Rauf	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	12	7.5
2.	Mega Buana	Basri. B	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	10	7
3.	Jaya Raya	Ahmad	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	10	7
4.	Masa Kini	Muhlis	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	15	8.5
5.	Mentum Jaya	Willy F Cerda	Kmp. Linggang Melapeh Baru	Kubar	15	10
6.	Sumber Usaha	Kurdiman	Kmp. Linggang Mapan	Kubar	10	10

Sumber: Bidang Pengembangan Komoditi (2024)

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dari pagu sebesar Rp. 4.052.760.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.013.506.513,- atau 99,03%. Indikator kinerja program ini adalah persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat dengan realisasi 95,01% atau 100,01% dari target 95%. Capaian kinerja ini dihitung dari jumlah benih salur yang tersertifikasi dibagi dengan kebutuhan benih untuk perluasan Perkebunan rakyat. Pada tahun 2024

jumlah benih yang tersertifikasi sebanyak 354.140 benih dengan kebutuhan benih untuk pengembangan sebanyak 372.750 benih.

- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) terealisasi sebesar Rp. 1.153.336.863,- atau 99,23% dari pagu Rp. 1.162.309.040,-. Indikator kinerja pada program ini adalah jumlah benih perkebunan yang diawasi peredaranya dengan capaian sebanyak 12.460.941 benih atau 207,68% dari target 6.000.000 benih. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rekapitulasi Pengawasan Peredaran Benih Tahun 2024

No.	Komoditi	Jumlah Pengawasan Benih
1	Kalapa Sawit	11.096.449
2	Lada	98.000
3	Karet	202.000
4	Aren	22.075
5	Kelapa	38.168
6	Kakao	777.853
7	Pala	24.000
8	Kopi	177.396
9	Benih Ilegal (Lada)	25.000
	TOTAL	12.460.941

Sumber: UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (2024)

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 372.448.408,- dari pagu Rp. 435.780.000,- (85,47%) dengan output pelaksanaan program luas kebun yang dibangun seluas 52.381 Ha dari target 50.702 Ha atau 103,31%. Rincian penambahan luas komoditi perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rekapitulasi Penambahan Luas Areal Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2024

No.	Komoditi	Luas (Ha)		Penambahan (Ha)
		2023*)	2024**)	
1.	Kelapa Sawit	1.411.861	1.473.772	
2.	Karet	123.776	115.717	
3.	Kakao	7.777	7.630	
4.	Kelapa dalam	20.068	19.624	
5.	Lada	8.031	7.729	
6.	Kopi	1.495	1.325	
7.	Komoditi Lain	2.668	2.550	
Total		1.575.966	1.628.347	52.381

Sumber: Statistik Perkebunan (2024) *) Angka Tetap 2022 **) Angka Tetap 2023

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Bidang Usaha dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.931.967.140,- dari pagu Rp. 7.540.801.250,- dengan capaian kinerja keuangan 91,93%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan Berkelanjutan dan Bidang Usaha realisasi keuangan sebesar Rp. 5.742.777.830,- atau 90,75% dari pagu dana Rp. 6.327.817.950,-. Output program ini adalah persentase luas areal Perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) dengan capaian sebesar 100,31% atau 100,31% dari target 100%. Capaian ini dihitung dari area yang ditangani sebesar 144.444 Ha di bagi dari dengan area terdampak seluas 144.000 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5. Luas Area yang Ditangani Tahun 2024

No.	Aksi/ Lokasi	Luas (Ha)
I	Review peta indikatif ANKT Kab. Berau	83.000
II	Review peta indikatif ANKT Kab. Penajam Paser Utara	2.454
III	Review peta indikatif ANKT Kab. Paser	16.461
IV	Monitoring ANKT di Area Perkebunan	4.562
V	PBS yang melaksanakan mitigasi GRK	34.315,38

No.	Aksi/ Lokasi	Luas (Ha)
	berbasis limbah POME	
1.	Kab. Berau	5.676,61
2.	Kab. Kutai Timur	19.955,72
3.	Kab. Kutai Kartanegara	8.683,05
VI	Pendampingan ISPO Kebun Sawit Rakyat	3.651,62
1.	Kab. Paser	1.038,10
2.	Kab. Penajam Paser Utara	189,20
3.	Kab. Kutai Timur	1.346,65
4.	Kab. Kutai Kartanegara	1.077,67
	TOTAL	144.444

- Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan gangguan usaha tanaman perkebunan yang dilakukan sebanyak 5 pelaku usaha. Pelaku usaha tersebut antara lain:
 1. Koperasi Long Blea Sejahtera Kab. Kutai Timur dengan PT Karya Prima Agro Sejahtera (PT KPAS/ DSN Group) Kab. Kutai Timur;
 2. PT Subur Abadi Plantation Kab. Kutai Timur dengan pemilik ijin usaha pertambangan;
 3. KPPRI AROMA dengan PT Erabara Persada Nusantara Kab. Kutai Timur;
 4. Kelompok Tani Makmur II Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat Kab. Kutai Kartanegara oleh aktifitas pertambangan; dan
 5. PT Delta Utama Resources Kab. Kutai Barat dengan Koperasi Sawit Jempang Sukses Bersama Kab. Kutai Barat.

- b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) terealisasi sebesar Rp. 1.189.189.310,- atau 98,04% dari pagu sebesar Rp. 1.212.983,300,-. Indikator kinerja program ini yaitu persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan capaian 90,62% atau 164,76% dari target 55%. Capaian ini diperoleh dari seluas 1.160 Ha areal yang dikendalikan di bagi 1.280 Ha luas areal yang dilaporkan akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6. Luas Areal Perkebunan yang Dikendalikan dan Ditanggulangi Akibat Serangan OPT Tahun 2024

No.	Uraian	Komoditi	Luas yang Dikendalikan (Ha)	Lokasi
1	Penyakit layu Pucuk (<i>Fuserium, spp</i>)	Kelapa Sawit	0.5 Ha	Desa Sriraharja Kec. Babulu Kab. PPU
2	Kumbang Tanduk (<i>Orictes rhinoceros, L</i>)	Kelapa Kopyor	1.5 Ha	Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara
3	Tikus (<i>Rattus, spp</i>)	Kelapa Sawit	205.5 Ha	Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur
4	Rayap (<i>Coptatermes, spp</i>)	Kelapa Sawit	30 Ha	Kec. Paser Belengkong Kab. Paser
5	Ulat Api (<i>Satothea, spp</i>)	Kelapa Sawit	594 Ha	Desa Miau Baru Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur
6	Ulat Api (<i>Satothea, spp</i>)	Kelapa Sawit	27 Ha	Kec. Batu Engau Kab. Paser
7	Ulat Api (<i>Satothea, spp</i>)	Kelapa Sawit	270 Ha	Kec. Batu Engau Kab. Paser
8	Kumbang Tanduk (<i>Orictes rhinoceros, L</i>)	Kalapa	30 Ha	Kec. Teritip Kota Balikpapan
9	Busuk pangkal Batang (<i>Gonoderma boniniense</i>)	Kelapa Sawit	2 Ha	Kec. Babulu Laut kab. PPU
TOTAL			1,160 Ha	

Sumber: UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (2024)

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini terealisasi sebesar Rp. 1.215.328.968,- atau 98,15% dari pagu sebesar Rp. 1.238.209.041,-. Program ini memiliki indikator persentase perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dari target 40,59% tercapai 41,22% atau 101,55%. Capaian ini diperoleh dari jumlah Perusahaan yang mendapat sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) sampai dengan tahun 2024 yakni sejumlah 115 perusahaan dibagi dengan jumlah perusahaan besar swasta di Kalimantan Timur yakni sejumlah 279 perusahaan. Pada tahun 2024 terdapat penambahan 35 perusahaan. Perusahaan yang telah mendapatkan

sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) pada tahun 2024 tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perusahaan yang Mendapat Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) Tahun 2024

No	Kabupaten	Realisasi PUP	Kelas	Petugas
1.	Berau	1) PT. Buana Mudantara 2) PT. Hutan Hijau Mas 3) PT. Malindomas Perkebunan 4) PT. Satu Sembilan Delapan 5) PT. Anugerah Agung Prima Abadi 6) PT. Dwiwira Lestari Jaya 7) PT. Yudha Wahana Abadi 8) PT. Natura Pasific Nusantara 9) PT. Gunta Samba Jaya 10) PT. Berau Sawit Sejahtera 11) PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation (Talisayan Estate) 12) PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation (Biatan Estate) 13) PT. Inti Energi Kaltim 14) PT. Sentosa Kalimantan Jaya 15) PT. Global Primatama Mandiri	III II II II II II II II II III II II II III II II	1. Syahrazat, ST 2. Purwo Hindarto, SP 3. Sovian Rody, SP 4. Endah Sariwulan, SP 5. Sunarto 6. Doni Manurung 7. Heni Risnawati, SP 8. Masyhadi 9. Marsin, S.Pt 10. Digdo Wahyudi, SP 11. Bayu Arminanda
2.	Kutai Timur	1. PT. Tridaya Hutan Lestari 2. PT. Bima Palma Nugraha 3. PT. Bima Agri Sawit 4. PT. Sabhantara Rawi Sentosa 5. PT. Sinergi Agro Industri 6. PT. Sinergi Agro Industri 7. PT. Indonesia Plantations 8. PT. Perkebunan Warga Rimba 9. PT. Kresna Duta Agroindo 10. PT. Tapian Nadenggan	III II II III II II II III	1. Abd. Gani Sukkara, SP, MM 2. Mohammad Ali, SP 3. Deddy Eko Wahyudi, S.Hut 4. Haryanto, SP 5. RR Shanti (2022) 6. Ir. Aminuddin Aziz, MP 7. Syahriansyah, S.Hut, MM 8. Nina Indriani. SP 9. Joko Susanto, S.Hut 10. Septi Aisyiah, SP
3.	Kutai Kartanegara	1. PT. Maju Kalimantan Hadapan 2. PT. Sawit Prima Sakti 3. PT. Jaya Mandiri Sukses 4. PT. Cahaya Anugerah Platations 5. PT. Sawit Kaltim Lestari 6. PT. Agrieast Borneo Kencana 7. PT. Agrojaya Tirta Kencana (Opr)		1. Desy Noriyani, S.Hut, MP 2. M. Taufik Rahmani, SP, MP 3. M. Faisal, SP, MP 4. Darmi, SP, MP 5. Ardiansyah, S.PKP 6. Atika Wahyuni, SE
4.	Mahakam Ulu	1. PT. Permata Agro Sejahtera 2. PT. Putra Utama Lestari 3. PT. Borneo Bhakti Sejahtera	E III II	1. Agustina Inuq

Sumber: Bidang Usaha (2024)

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini terealisasi sebesar Rp. 9.350.459.368,- atau 97,34% dari pagu sebesar Rp. 9.606.208.785,-. Target indikator pada program ini yaitu:

1. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian yang meningkatkan kapasitasnya dengan capaian 13,48% atau 120,89% dari target 11,15%. Capaian ini diperoleh dari akumulasi jumlah orang yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 89 orang dibagi dengan target orang yang dilatih selama 3 tahun sebanyak 660 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Daftar Sumber Daya Manusia Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024

No.	Aktivitas	Jumlah SDM yang Ditingkatkan	Lokasi
1.	Pelatihan Peningkatan Sumberdaya Manusia Bagi Petugas Pendamping, dengan tema”Pengembangan Kelembagaan Petani Perkebunan Berbasis Korporasi”	20 Orang	Kab. Paser
2.	Pelatihan <i>Training Of Trainer</i> Bagi Petugas Kabupaten/Kota dengan tema “Pendampingan Penumbuhan Kebersamaan Kelembagaan Petani Dengan Sistem Kebersamaan Ekonomi dan Manajemen Kemitraaan (SKE-MK)”	20 Orang	
		2 Orang	Samarinda
		2 Orang	Kab. Kukar
		2 Orang	Kab. Kubar
		2 Orang	Kab. Kutim
		2 Orang	Kab. PPU
		8 Orang	Kab. Paser
3.	Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Petugas Teknis Perkebunan” dengan tema “Budidaya Tanaman Kakao Berkelanjutan”	20 Orang	
		3 Orang	Samarinda
		3 Orang	Kab. Kukar
		5 Orang	Kab. Kubar
		4 Orang	Kab. Kutim
		5 Orang	Kab. Mahulu
4.	Peningkatan pengolahan dari kelapa menjadi minyak kelapa	10 Orang	Kab. Kukar
5.	Peningkatan SDM melalui Perolehan NIB dan PIRT dari Dinas Kesehatan	1 Orang	Kab. Kukar
6.	Pelatihan Peningkatan perubahan logo dan kemasan yang lebih menarik	5 Orang	
		2 Orang	Kab. PPU
		2 Orang	Samarinda
		1 Orang	Kab. Paser
7.	Pelatihan Perencanaan Bisnis Komoditi Perkebunan	9 Orang	
	a. Minuman rempah Instan	1 Orang	Kab. Kukar

No.	Aktivitas	Jumlah SDM yang Ditingkatkan	Lokasi
	b. Gula aren semut	1 Orang	Kab. Paser
	c. Jahe	1 Orang	Balikpapan
	d. Gula Semut	1 Orang	Samarinda
	e. <i>Cocopeat, cocofiber</i>	1 Orang	Samarinda
	f. Kelapa Jelly	2 Orang	Balikpapan
	g. Kopi bubuk dan kopi roasting	1 Orang	Kab. Kutim
	h. Gula semut	1 Orang	Kab. Kutim
8.	Pelatihan Business Matching Komoditas Hasil Pertanian	4 Orang	
	i. Gula kelapa	1 Orang	Kab. PPU
	j. <i>Cocopeat dan cocomesh</i>	1 Orang	Kab. PPU
	k. VCO	1 Orang	Kab. Paser
	l. Teh rosella dan bawang tiwai	1 Orang	Samarinda
	TOTAL	89 Orang	

Sumber: Bidang Pengembangan Komoditi serta Bidang Pengolahan dan Pemasaran (2024)

2. Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat dengan capaian 30,77% atau 116,11% dari target 26,50%. Capaian ini diperoleh dari akumulasi jumlah kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 36 lembaga dibagi dengan target kelembagaan petani selama 3 tahun sebanyak 117 lembaga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9. Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024

No.	Lembaga	Pengurus	Alamat
A.	Pelatihan Pendampingan dan Pemberdayaan Petani Perkebunan		
1	Poktan Terbu Membangun	Wahyu	Desa Tebru Paser Damai Kec. Batu Engau Kab. Paser
2	Poktan Bersama	H. Abd. Raub	Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar
3	Poktan Masa Kini	Muhlis	Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar
4	Gapoktan Sumber Makmur	Pujar Aji Prasetyo	Desa Sungai Payang Loa Kulu Kab. Kukar
5	Poktan Kampung Kopi Luwak	Rindoni	Desa Prangat Baru Kec. Marangkayu Kab. Kukar
6	Poktan Karya Usaha	Hj. Asyah	Desa Rintik Kecamatan Babulu Kab. PPU

No.	Lembaga	Pengurus	Alamat
7	Poktan Pilar Jaya	Bana	Kelurahan Sepan Kec. Penajam Kab. PPU
8	Poktan Bukit Harapan	Akhmad Multazam	Kamp. Sukan Tengah Kec. Sambaliung Kab. Berau
9	Poktan Jantur Lungau	Yanto	Kamp. Pepas Eheng Kec. Barong Tongkok
10	Poktan Tunas Muda	Pilipus Sardiansyah	Kamp. Sekoleq Joleg Kec. Sekolaq Darat
11	Poktan Poros Permai	Agus Salim	Kamp. Muyub Ulu Kec. Tering
12	Poktan Tipak Permai	Asmadi	Kamp. Muyub Ulu Kec. Tering
13	KWT. Kelumpang Bercahaya	Eli Yati	Kamp. Kelumpang Kec. Mook Manar Bulatn
14	Poktan Sumber Usaha	Kurdiman	Kamp. Linggang Mapan Kec. Linggang Bigung
15	Poktan Karya Mandiri I	Bertolomeus Maidolin	Kamp. Linggang Amer Kec. Linggang Bigung
16	Poktan Jelewet Jaya	Indrawansyah	Kamp. Linggang Tutung Kec. Linggang Bigung
17	Poktan Karya Indah II	Anus	Kamp. Linggang Amer Kec. Linggang Bigung
18	Poktan Mentum Jaya	Willy F. Cerda	Kamp. Linggang Melapeh Baru Kec. Linggang Bigung
19	Poktan Sente'au	Yahya Wijaya Putra	Kamp. Kebut Kec. Linggang Bigung
20	Poktan Suka Abadi	Darmansyah	Kamp. Lingang Melapeh Kec. Linggang Bigung
B.	Pelatihan Sekolah Lapang Kelompok Tani		
21	Poktan Batu Lengiran	Basri	Desa Karangan Dalam
C.	Pelatihan Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Perkebunan		
22	KUD Rangan Jaya	Teguh Asmaraas Hadi	Desa Padang Jaya Kec. Kuaro
23	KUD Tunas Murni	Armadi	Desa Kelempang Sari Kec. Kuaro
24	KUD Sumber Makmur	Suparjo	Desa Kendarom Kec. Kuaro
25	KUD Bumi Subur	Budiono	Desa Kertabumi Kec. Kuaro
26	KUD Jaya Mukti	Ajansyah	Desa Modang Kec. Kuaro
27	KUD Tani Subur	Suwardi	Desa Tani Subur Kec. Kuaro

No.	Lembaga	Pengurus	Alamat
28	Poktan Kandank Kayu	Dowik Suprawiyatna	Desa Kandank Kayu Kec. Kuaro
29	KUD Sumber Rejeki	Ngatimin	Desa Krayan Makmur Kec. Long Ikis
30	KUD Tani Makmur	Widodo	Desa Kayungo Sari Kec. Long Ikis
31	Koperasi Induk Paser Bumi Jaya Bersama Kab. Paser	Aliyadi	Kecamatan Long Ikis Kab. Paser
D.	1. Peningkatan SDM Petani tentang Pengolahan dan Pemasaran Kopi Luwak Prangat 2. Produk memperloeh sertifikasi Halal		
32	Kelompok Tani Kopi Luwak Prangat		Desa Prangat Baru Kecamatan Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara
E.	1. Terhubung dengan jejaring pasar melalui Business Matching 2. Terakses dengan pembiayaan melalui LPEI		
33	Koperasi Produsen Kriya Inovasi Mandara (KIM Nusantara)		Penajam Paser Utara
F.	Terakses pasar melalui Bunex 2024		
34	Bumdes Bawaq Na Lung Anai (Poktan Udip Tiga)		Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara
G.	Terakses pasar dengan PT Multi Kusuama Cemerlang		
35	UPPB setia kawan		Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam kab. PPU
H.	Peningkatan Kelembagaan melalui Perolehan PIRT dan Sertikasi Indikasi Geografis		
36	MPIG Gula Aren		Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan kab. Kutai Kartanegara

Sumber: Bidang Pengembangan Komoditi serta Bidang Pengolahan dan Pemasaran (2024)

Tabel TC.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Urusan Pilihan										
	Bidang Urusan Pertanian										
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perkebunan										
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90,83		78,93	95,77	Indeks	121,34	85	181	199
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		100	100	%	100,00	100	200	200
3.27.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100		100,00	100	%		100	200	200
3.27.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	10 Dokumen	4	4	Dokumen	100,00	3	17	155
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6		2	2	Dokumen	100,00	2	4	67
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6		2	2	Dokumen	100,00	2	4	67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9		3	3 Dokumen	100,00	3	6	67
3.27.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	4 Laporan	6	6 Laporan	100,00	6	16	89
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100		100	100 %	100,00	100	200	200
3.27.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192	81 Orang/ Bulan	86	84 Orang/ Bulan	97,67	138	303	158
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	1 Dokumen	1	1 Dokumen	100,00	1	3	100
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	45		1	1 Dokumen	100,00	15	16	36
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	9		3	3 Dokumen	100,00	1	4	44
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	36		12	12 Laporan	100,00	12	24	67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	36		12	12Dokumen	100,00	12	24	67
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)	75		75	20%	26,67	75	95	127
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	18		2	3Dokumen	150,00	2	5	28
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	18		1	1Dokumen	100,00	2	3	17
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12		4	4Laporan	100,00	4	8	67
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi perkebunan (%)	100		100	109,33%	109,33	100	209	209
3.27. 01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	3		1	1Laporan	100,00	1	2	67
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	83,33		35,71	92,86%	260,04	59,52	152	183
3.27.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		1	1Paket	100,00	1	2	67
3.27. 01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		1	1Paket	100,00	1	2	67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27. 01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3		1	1Dokumen	100,00	1	2	67
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	53	149Orang	72	78Orang	108,33	15	242	457
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu		5Unit	4	4Unit	100,00	4	13	-
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4Paket	4	4Paket	100,00	1	9	75
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12	4Paket	4	5Paket	125,00	4	13	108
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	4Paket	4	4Paket	100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	-Paket	4	4Paket	100,00	4	8	67
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	12Dokumen	12	12Dokumen	100,00	12	36	100
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	3	1Laporan	1	1Laporan	100,00	1	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	39	Jenis 13	13	13	Jenis	100,00	7	33	85
3.27.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	10	Unit 10	1	1	Unit	100,00		11	110
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	9		1	1	Unit	100,00	1	2	22
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	184	Unit 58	79	188	Unit	237,97	21	267	145
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	Jenis 3	4	4	Jenis	100,00	4	11	275
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	Laporan 1	1	1	Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	Laporan 1	1	1	Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	Laporan 1	1	1	Laporan	100,00	1	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	1Laporan	1	1Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	90		90	90%	100,00	90	180	200
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	67	36Unit	21	21Unit	100,00	23	80	119
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	2Unit	1	1Unit	100,00	1	4	133
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	60	21Unit	20	20Unit	100,00	69	110	183
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	25,46		25,36	25,00%	98,58	25,41	50	198
		Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	10		9	9Jenis	100,00	10	19	190
3.27.002.1.01.001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3	1Laporan	1	1Laporan	100,00	1	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Kebun yang dibangun (Ha)	149.702	- ha	50.702	62.772	Ha	123,81	49.000	111.772	75
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata (Jenis)	2		2	2	Jenis	100,00	2	4	200
3.27.003.1.01.001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	3	1 Dokumen	1	1	Dokumen	100,00	1	3	100
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	3	-	1	1	Dokumen	100,00	1	2	67
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	100		100	100,31	%	100,31	100	200	200
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku Usaha)	250	176 Pelaku Usaha	200	224	Pelaku Usaha	112,00	225	625	250
3.27.005.1.01.002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	126.000	21.248 Ha	144.000	144.444,43	Ha	100,31	124.000	289.692	230
3.27.005.1.01.003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	2.175	430 Ha	500	980	Ha	196,00	725	2.135	98

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	70,30		40,59	41,22PUP	101,55	55,45	97	138
3.27.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)	225	107Perusahaan	75	75Perusahaan	100,00	75	257	114
3.27.006.1.01.003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	6	1Laporan	2	2Laporan	100,00	2	5	83
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)	79,49		26,50	30,77%	116,11	52,99	84	105
		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	34,55		11,15	13,48%	120,90	23,03	37	106
		Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	7		3	3Kegiatan	100,00	2	5	71
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (orang)	140		65	65orang	100,00	40	105	75
		Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)	1.248		476	476Orang	100,00	416	892	71
3.27.007.1.02.001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	3	1Dokumen	1	1Dokumen	100,00	1	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.007.1.02.002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	63	Kelompok 10	21	21 Kelompok	100,00	21	52	83
		<i>Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)</i>	54	-	1	1 Lembaga	100,00	18	19	35
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	1	unit 1	1	Unit 1	100,00	1	3	300
3.27.007.1.03.006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Unit)	1	Unit 1	1	Unit 1	100,00	1	3	300
3.27.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan								-	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	87,20		85,87	98,10 Indeks	114,24	86,20	184	211
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		100	% 100	100,00	100	200	200
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)</i>	100		100	% 100	100,00	100	200	200
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	Dokumen 1	1	Dokumen 1	100,00	1	3	100
3.27. 01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%)	100		100	% 148,91	148,91	100	249	249
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Ratribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1		1	Laporan 1	100,00	1	2	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	66	77 %	59	100	% 169,49	62	239	362
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30		13	15 Orang	115,38	11	26	87
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	1	3 Unit	1	1	Unit 100,00	1	5	500
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4 Paket	4	4	Paket 100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	4 Paket	4	4	Paket 100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	4 Paket	4	4	Paket 100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	4 Paket	4	4	Paket 100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	12 Dokumen	12	12	Dokumen 100,00	12	36	100
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	1 Laporan	1	1	Laporan 100,00	1	3	100
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6	6 Jenis	2	2	Jenis 100,00	2	10	167

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	25 Unit	10	10 Unit	100,00	8	43	478
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4	3 Jenis	4	4 Jenis	100,00	4	11	275
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	50		55	68,75 %	125,00	50	119	238
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	2 Unit	2	1 Unit	50,00	2	5	83

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	5 Unit	4	4	Unit	100,00	4	13	108
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	39	59 Unit	13	40	Unit	307,69	13	112	287
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	18.000.000		6.000.000	12.460.941	benih	207,68	6.000.000	18.460.941	103
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih)	15.000.000		5.000.000	12.435.941	benih	248,72	5.000.000	17.435.941	116
3.27.002.1.02.001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	450	298 Sertifikat	150	499	Sertifikat	332,67	200	997	222
3.27.002.1.02.001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3	1 Laporan	1	1	Laporan	100,00	1	3	100
3.27.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan									-	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	88,38		79	97,80	Indeks	123,80	83,75	182	205
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		100	100	%	100,00	100	200	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	92		100	100%	100,00	100	200	217
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	1 Dokumen	1	1 Dokumen	100,00	1	3	100
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%)	100		100	100%	100,00	100	200	200
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Ratribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	3		1	1 Laporan	100,00	1	2	67
		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	70,50		35	35%	100,00	53	88	125
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	8 Orang	6	6 Orang	100,00	11	25	139
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	1	3 Unit	1	1 Unit	100,00	1	5	500
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	4 Paket	4	4 Paket	100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	4 Paket	4	4 Paket	100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	4 Paket	4	4 Paket	100,00	4	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket 4	4	Paket 4	100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen 12	12	Dokumen 12	100,00	12	36	100
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan 1	1	Laporan 1	100,00	1	3	100
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	26	Jenis 5	14	Jenis 14	100,00	3	22	85
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	5		17	Unit 17	100,00	1	18	360
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	38	Jenis 3	4	Jenis 4	100,00	4	11	29
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan 1	1	Laporan 1	100,00	4	6	200
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan 1	1	Laporan 1	100,00	1	3	100
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Laporan 1	1	Laporan 1	100,00	1	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	1Laporan	1	1Laporan	100,00	1	3	100
		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	75		65	65%	100,00	70	135	180
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	1Unit	1	1Unit	100,00	1	3	100
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1Unit	1	1Unit	100,00	1	3	100
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	8Unit	10	10Unit	100,00	29	47	157
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)(%)	65	-	55	90,62%	164,76	60	151	232
		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)	84		26	26Pelaku Usaha	100,00	28	54	64

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.005.1.01.001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3.360	547 Ha	1.040	1.160	Ha	112	1.120	2.827	84
3.27.0.00.0.00.01.0004	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan									-	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85,50		80	97,40	%	121,75	82,75	180	211
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		100	100	%	100,00	100	200	200
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100		100	100	%	100,00	100	200	200
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	1 Dokumen	1	1	Dokumen	100,00	1	3	100
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%)	100		100	100,01	%	100,01	100	200	200
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	3		1	1	Laporan	100,00	1	2	67
		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	60		40	100	%	250,00	50	150	250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21	7 Orang	8	8	Orang	100	7	22	105
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	1	3 Unit	1	1	Unit	100	1	5	500
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	4 Paket	4	4	Paket	100	4	12	100
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	2 Paket	4	4	Paket	100	4	10	83
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	4 Paket	4	4	Paket	100	4	12	100
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	2 Paket	4	4	Paket	100	4	10	83
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	12 Dokumen	12	12	Dokumen	100	12	36	100
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	1 Laporan	1	1	Laporan	100	1	3	100
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	15	2 Jenis	4	4	Jenis	100	6	12	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		7	7Unit	100,00	1	8	400
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		10	10Unit	100,00	14	24	480
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	8	3Jenis	4	4Jenis	100	4	11	138
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	1Laporan	1	1Laporan	100	1	3	100
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	1Laporan	1	1Laporan	100	1	3	100
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1Laporan	1	1Laporan	100	1	3	100
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	1Laporan	1	1Laporan	100	1	3	100
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	70		60	60,37%	100,62	65	125	179
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	2Unit	2	2Unit	100	2	6	120

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit 1	3	3	Unit	100	1	5	56
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit 13	5	5	Unit	100	3	21	233
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	98	% 88,00	95	95,01	%	100	96,50	280	285
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	150.000	Benih 50.000	50.000	50.000	Benih	100	50.000	150.000	100
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	6	Laporam 1	1	1	Laporan	100,00	2	4	67

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah dilakukan perhitungan statistik perkebunan, realisasi kinerja pada tahun 2024 maupun realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C30. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Produksi Komoditi Perkebunan	Ton	22.303.000	19.829.215	88,91	Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (2024)
2	NTP perkebunan rakyat	Persentase	135	186,89	138,44	Sumber: Dirjenbun Kementan RI
3	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SPO (<i>Sustainable Palm Oil</i>)	Pelaku Usaha	100	134	134	Rata-rata NTP perkebunan rakyat dalam 1 tahun (Sumber: BPS 2024)
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	89	90,01	101,13	Sumber: Laporan IKM Disbun 2024
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	77,50	78,10	100,77	LHE SAKIP Disbun Tahun 2023

Pada tahun 2024, rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 merupakan Tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan periode Tahun 2025 – 2029. Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini 4 (empat) tahun ke depan sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya mendukung terwujudnya target pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2025 - 2029.

Ekonomi Kalimantan Timur masih ditopang oleh minyak bumi dan gas alam, serta pertambangan batubara. Semakin menurunnya produksi sektor migas dan batubara, berdampak pada sektor-sektor lain, utamanya jasa dan perdagangan, sehingga memberikan pengaruh pada ekonomi Kalimantan Timur. Produksi Kawasan di Kalimantan Timur juga masih rendah. Pada perkebunan, terdapat 3,2 juta Ha peruntukan perkebunan dalam RTRW Kalimantan Timur, ijin usaha perkebunan yang diterbitkan 2.3 juta Ha dengan luasan areal tertanam 1,6 juta Ha, termasuk 1,4 juta Ha kelapa sawit. Masih terdapat 957.500 Ha areal lahan yang belum dimanfaatkan.

Permasalahan pembangunan perkebunan mencerminkan kesenjangan antara realita/capaian pembangunan perkebunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Provinsi Kalimantan Timur. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dinas Perkebunan Provinsi maupun Kabupaten-Kabupaten di Kalimantan Timur belum memiliki peta permasalahan di sektor perkebunan yang dipetakan secara spasial, kuantitatif dan sesuai dengan urgensinya. Permasalahan yang teridentifikasi hanya bersifat kuantitatif dan tidak terpetakan. Misalnya, sulit untuk mendapatkan data spasial dan akurat terkait kebutuhan peremajaan masing-masing komoditas perkebunan. Demikian juga dengan data-data lain, seperti yang terkait dengan praktik pemupukan dan kebutuhan pupuk, hama dan penyakit tanaman, penurunan produktifitas dan mutu produk, pemasaran hasil, kelembagaan, kebutuhan infrastruktur dan berbagai hal lain. Karena

permasalahan belum terpetakan dengan baik, sulit untuk membuat perencanaan pembangunan sektor perkebunan yang tepat, sesuai kebutuhan berdimensi spasial dan waktu serta terintegrasi dengan sektor sektor lain.

Walaupun belum berbasis spasial, identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan perkebunan dan mencapai tujuan dan sasaran dinas serta berkontribusi pada pencapaian target RPJMD telah dilakukan. Hasil identifikasinya sebagai berikut:

Tabel 2.10 Permasalahan Perkebunan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sub sektor perkebunan belum optimal dalam mendorong peran strategisnya sebagai penggerak utama transformasi ekonomi Daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Produksi Komoditas Perkebunan belum optimal	1. Belum optimalnya penggunaan benih yang unggul dan bermutu 2. Kurang tersedianya prasarana dan sarana pendukung budidaya tanaman 3. Masih rendahnya pengawasan peredarana sarana, prasarana dan alsintan 4. Masih tingginya tingkat serangan OPT dan gangguan usaha lainnya 5. Masih rendahnya pemanfaatan bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan 6. Belum optimalnya penerapan teknologi dalam usaha budidaya tanaman perkebunan 7. Terjadinya alih fungsi lahan perkebunan 8. Terbatasnya luas peruntukan dalam RTRW untuk pengembangan sub sektor perkebunan 9. Belum adanya penetapan kawasan perkebunan provinsi
		Rendahnya nilai tambah produk perkebunan	1. Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan keterampilan petani dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan 2. Keterbatasan modal dan kredit untuk pengembangan hilirisasi pengolahan hasil perkebunan 3. Sebaran prasarana dan sarana pascapanen yang belum merata

			dan tidak sesuai kebutuhan spesifik komoditas di Kabupaten/Kota 4. Rendahnya adopsi teknologi serta inovasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan 5. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pekebun tentang manfaat kemitraan dalam akses pasar 6. Rendahnya evaluasi berkala terhadap efektifitas sarana dan prasarana yang telah di bangun 7. Lemahnya rantai pasok dan hilirisasi produk 8. Rendahnya mutu hasil produk perkebunan 9. Belum tersedianya regulasi tentang standarisasi harga komoditas perkebunan selain Kelapa Sawit 10. Pola kemitraan pekebun dan perusahaan masih terbatas dan belum berjalan efektif 11. Masih rendahnya pengawasan terhadap Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan produksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 12. Masih adanya pabrik kelapa sawit tanpa kebun 13. Rendahnya sumber daya manusia pelaku usaha perkebunan 14. Kurang tersedianya petugas penyuluh lapangan khusus perkebunan 15. Belum maksimalnya pengelolaan kelembagaan pekebun yang ada
--	--	--	---

		Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan kebutuhan energi baru terbarukan yang berbahan baku dari sub sektor perkebunan	1. Belum Optimalnya Pembinaan dan Pendampingan Sertifikasi Perkebunan Berkelanjutan 2. Masih terbatasnya pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk pengembangan bioenergi 3. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan cadangan karbon rendah untuk pembangunan perkebunan 4. Pengelolaan ANKT di area perkebunan belum diterapkan secara optimal dan konsisten 5. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi tentang penerapan kewajiban pemenuhan bahan baku Sawit 20% 6. Kurangnya bahan baku yang berasal dari aneka palma lainnya sebagai Energi Baru Terbarukan (EBT) 7. Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang belum menjangkau seluruh wilayah 8. Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun 9. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penggunaan energi baru terbarukan dari sub sektor perkebunan 10. Belum optimalnya pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB)
--	--	--	---

			11. Masih rendahnya partisipasi dan fasilitasi penerbitan STDB 12. Masih adanya gangguan usaha dan Konflik perkebunan
		Implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi pelayanan publik belum optimal	1. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel 2. Kurangnya kesadaran dalam peningkatan kapabilitas SDM yang profesional dan akuntabel 3. Kurangnya kuantitas SDM yang handal 4. Belum optimalnya penetapan sanksi yang tegas bagi kinerja pegawai 5. Belum optimalnya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 6. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik 7. Kurangnya komitmen aparaturnya dalam menerapkan zona integritas 8. Belum optimalnya pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 9. Belum optimalnya pengelolaan aset

Semua tanaman perkebunan, termasuk kebun plasma sawit, tidak diusahakan dengan optimalisasi nilai tambah. Selama puluhan tahun, semua komoditas perkebunan hanya diusahakan tanpa usaha untuk mendapatkan nilai tambah, baik selama proses produksi di on farm (kebun) maupun di pasca panen, pemasaran dan pengolahan (processing). Ini artinya, petani tidak memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dari usahatani dan bisnis perkebunan mereka. Petani sejak dulu hanya mengandalkan penjualan bahan baku asalan dari hasil panen mereka. Nilai

tambah dapat diperoleh, misalnya melalui integrasi tanaman perkebunan dengan ternak, penghematan (optimalisasi dan efisiensi) penggunaan saprodi, penanganan pasca panen, sistem penjualan dan pengolahan hasil. Dalam banyak hal, petani sendiri tidak banyak bisa berbuat untuk mendapatkan nilai tambah ini, karena (misalnya) keterbatasan pengetahuan, modal dan akses pasar yang tepat bila produk yang dihasilkan telah mendapatkan nilai tambah.

Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan kebutuhan energi baru terbarukan yang berbahan baku dari sub sektor perkebunan juga menjadi permasalahan pada fungsi pelayanan Dinas Perkebunan. Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization/FAO*) dan Badan Energi Internasional (*International Energy Agency/IEA*), mendefinisikan pertanian energi sebagai pendekatan yang memanfaatkan sumber daya pertanian, seperti biomassa, bioenergi, dan teknologi energi terbarukan, untuk menghasilkan energi berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Melalui produksi biofuel, biogas, dan biomassa, pertanian energi tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga memberikan diversifikasi pendapatan bagi petani. Pertanian energi berbasis biomassa semakin menjadi topik sentral dalam pengembangan energi berkelanjutan di banyak negara kawasan Asia Pasifik. Sebagai bagian dari energi baru terbarukan (EBT), biomassa pertanian dipandang tidak hanya sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga sebagai strategi mitigasi perubahan iklim yang mampu mendorong pembangunan pedesaan yang inklusif.

Konsep ini berbasis pada ekonomi sirkular, di mana limbah pertanian, industri, dan perkotaan dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Banyak contoh inovatif di kawasan ini yang semakin menegaskan potensi biomassa sebagai pilar penting dalam transisi energi. Di Vietnam, sekam padi telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar alternatif yang ekonomis. Di Filipina, limbah jagung dikelola untuk menghasilkan bioetanol dan biogas yang mendukung kebutuhan energi lokal. Sementara itu, di Indonesia tanaman indigofera dimanfaatkan untuk produksi bioenergi dan pakan ternak, menciptakan nilai tambah dari sektor pertanian.

Pengembangan energi biomassa membantu pengurangan emisi karbon sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi komunitas pedesaan. Di Indonesia, pembangkit energi milik perusahaan listrik negara mengembangkan

ekosistem biomassa sebagai bahan baku alternatif pengganti batu bara melalui program *co-firing* di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai target *net zero emissions* (NZE) pada tahun 2060 mendatang dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai mitra pengelola biomassa. Dukungan kebijakan strategis, pembiayaan berbasis karbon, dan kolaborasi lintas batas menjadi kunci percepatan pengembangan energi biomassa. Partisipasi petani, koperasi, dan sektor swasta sangat penting agar manfaat energi biomassa dapat dirasakan secara luas. Secara keseluruhan, pengembangan energi biomassa memiliki potensi besar untuk mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Sumber daya biomassa yang melimpah, dukungan regulasi yang memadai, serta peluang dari pasar kredit karbon menjadikan biomassa solusi strategis dalam menghadapi krisis energi dan lingkungan. Meskipun ada tantangan, seperti pengelolaan rantai pasok dan biaya teknologi, masa depan biomassa tetap cerah dengan kolaborasi lintas sektor dan penguatan ekosistem pasar karbon.

Disamping permasalahan teknis yang dihadapi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pelayanan publik juga merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah tersebut. Namun dalam realitanya masalah pelayanan publik dilingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bukti nyata bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas. Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang

adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi.

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu pembangunan perkebunan dan hasil penelaahan kebijakan nasional hingga daerah, sebelum menentukan isu-isu strategis, berikut ini akan dirangkum hasil identifikasi isu-isu menurut dinamika global, nasional dan regional.

Tabel 2.11 Identifikasi Isu-Isu Menurut Dinamika Global, Nasional Dan Regional

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD		
			Global	Nasional	Regional
1. Melimpahnya komoditas unggulan sektor pertanian: Sub Sektor Perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao, lada, aren, kelapa dalam, kopi); 2. Melimpahnya sumber daya alam, seperti batu bara, minyak dan gas, kelapa sawit, serta mineral logal yang menjadi basis utama pengembangan hilirisasi industri pengolahan energi, petrokimia, smelter, bioenergi, dan CPO berbasis green industry 3. Ketersediaan lahan dan produksi dari sektor pertanian (dalam arti luas) membuka peluang untuk diversifikasi industri berbasis agro-maritim	1. Produksi komoditas perkebunan belum optimal 2. Rendahnya nilai tambah produk perkebunan 3. Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan kebutuhan energi baru terbarukan yang berbahan baku dari sub sektor perkebunan 4. Implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi pelayanan publik belum optimal	1. Pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan 2. Industri, inovasi, dan infrastruktur	1. Ketahanan Pangan 2. Perubahan geopolitik dan peta ekonomi dunia	1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Ketahanan Ekonomi	1. Ketahanan Pangan 2. Diversifikasi ekonomi 3. Pengembangan Industri

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur lima tahun ke depan, meliputi :

1. Peningkatan produksi komoditas perkebunan
2. Pemenuhan pangan yang berbahan baku dari komoditas perkebunan untuk IKN
3. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan perkebunan
4. Peningkatan kualitas hasil pasca panen, pengolahan dan perluasan akses pasar
5. Peningkatan kemitraan pekebun
6. Penurunan emisi GRK dalam pembangunan perkebunan
7. Terbatasnya akses pasar bagi produk yang tidak memenuhi standar keberlanjutan
8. Pemenuhan bahan baku untuk bioenergi dari sub sektor perkebunan
9. Penguatan implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi pelayanan publik

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program-program prioritas Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian Program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan OPD dan telah terakomodasi dalam Rancangan Akhir RKPD tahun 2025.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
DINAS+3 UPTD					77.964.423.000	DINAS+3 UPTD				52.745.820.000	
DINAS PERKEBUNAN					67.226.246.372	Dinas Perkebunan				40.921.988.094	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	95,09	41.094.674.997	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	95,09	32.462.512.891	
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	7.397.701.748	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	878.222.058	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	708.347.626	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	362.240.410	
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	66.714.387	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	-	Untuk efisien dalam pelaksanaan kegiatan maka sub kegiatan dihilangkan digabung dengan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	6.207.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	-	Untuk efisien dalam pelaksanaan kegiatan maka sub kegiatan dihilangkan digabung dengan sub kegiatan penyusunan dokumen

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											perencanaan perangkat daerah
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	702.769.576	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	-	Untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan dan digabung kedalam sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	5.913.662.559	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	246.966.744	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	269.014.904	Penyesuaian dengan adanya Kepmendagri no 900.1-2850 Tahun 2025
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	27.337.720.638	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	27.255.327.949	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	137	26.665.713.412	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	137	26.665.713.412	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	480.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	457.320.000	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	15	128.325.058	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	15	89.902.031	
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	11.499.068	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	-	Untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan di hilangkan dan digabung kedalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	12	28.370.422	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	12	42.392.506	
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	22.852.678	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	-	Untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan di hilangkan dan digabung kedalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)	75	173.189.610	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)	75	63.546.854	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6	17.856.904	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	-	Untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan di hilangkan dan digabung kedalam sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	6	145.194.839	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	0	-	Untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan di hilangkan dan digabung kedalam sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	10.137.867	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	63.546.854	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi perkebunan (%)	100	9.061.839	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi perkebunan (%)	100	17.704.978	
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	1	9.061.839	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	1	17.704.978	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	83,33	1.021.740.328	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	83,33	131.582.560	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	487.815.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	-	Efisiensi anggaran pengadaan pakaian dinas tidak dianggarkan
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	38.564.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	85.182.560	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Samarinda, Balikpapan</i>	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	24.591.328	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Samarinda, Balikpapan</i>	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	-	Untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan di hilangkan dan digabung kedalam sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal (orang)	23	470.770.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal (orang)	23	46.400.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	4	1.985.520.209	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	4	1.098.217.668	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Samarinda</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	55.009.830	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Samarinda</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	45.943.222	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Samarinda</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	330.483.227	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Samarinda</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	160.138.951	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Samarinda</i>	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	362.054.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Samarinda</i>	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	222.060.000	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Samarinda</i>	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	84.503.152	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Samarinda</i>	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	90.225.495	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Samarinda</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	11.520.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Samarinda</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	0	-	Efisiensi anggaran pengadaan pakaian dinas tidak dianggarkan
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1.141.950.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	579.850.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	5	252.939.835	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	5	14.126.156	
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6	220.020.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	-	Efisiensi anggaran pengadaan pakaian dinas tidak dianggarkan
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	32.919.835	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	14.126.156	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	2.336.499.190	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	2.448.298.548	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	36.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	20.000.000	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	594.267.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	631.317.648	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	143.471.590	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	11.300.900	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1.562.760.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1.785.680.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	90	580.301.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	90	555.486.120	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	23	315.173.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	15	333.434.120	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	176.418.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	133.342.000	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	69	88.710.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	69	88.710.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produksi Komoditas Perkebunan	20.004.096,00	15.622.350.076	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produksi Komoditas perkebunan (Ton)	20.004.096,00	3.686.927.115	
								Persentase Kelompok Tani yang memanfaatkan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (%)	13,33%		
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	10	15.622.350.076	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	10	3.686.927.115	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	15.622.350.076	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Samarinda, Balikpapan, Mahakam Ulu, Bontang, Berau	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	3.632.479.289	
						Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Paser	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	1	27.223.913	Penyesuaian dengan adanya Kepmendagri no 900.1-2850 Tahun 2025

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar,Berau,Paser	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	1	27.223.913	Penyesuaian dengan adanya Kepmendagri no 900.1-2850 Tahun 2025
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Luas kebun yang dibangun (Ha)	44525	1.243.654.780	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Luas kebun yang dibangun (Ha)	44525	996.382.221	
								Persentase pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan oleh Kelompok Tani (%)	0,12		
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata (Jenis)	2	1.243.654.780	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Data Prasarana Pertanian Perkebunan (Jenis)	1	996.382.221	
								Jumlah Kelompok Tani yang memanfaatkan prasana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Kelompok Tani)	2		
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	1.056.751.280	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	756.997.461	
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	1	186.903.500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	1	143.003.595	
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar,Berau,Paser	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	27.235.694	Penyesuaian dengan adanya Kepmendagri no 900.1-2850 Tahun 2025

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Paser	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	2	69.145.471	Penyesuaian dengan adanya Kepmendagri no 900.1-2850 Tahun 2025
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Perkebunan) (%)	100	4.906.646.362	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan (%)	100	1.509.943.943	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)	250	4.906.646.362	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)	94	1.509.943.943	
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	126000	2.012.128.758	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	95000	856.999.890	
3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	725	2.894.517.604	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	700	652.944.053	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase perkebunan besar berizin usaha yang terbina dan terawasi	33,05	1.358.499.284	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase perkebunan besar berizin usaha yang terbina dan terawasi (%)	33,05	717.847.091	
			Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan	19,62				Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan (%)	19,62		
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)	75	1.358.499.284	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina, diawasi dan dimitrakan (Pelaku Usaha)	35	717.847.091	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	2	1.358.499.284	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang mendapatkan sertifikasi perkebunan berkelanjutan (Pelaku usaha)	7	717.847.091	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	25,39	3.000.420.873	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)	36,17	1.548.374.833	
			Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)	36,17				Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Kapasitasnya Meningkat (%)	25,39		
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	542.933.827	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	-	
3.27.07.1.01.0004	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (orang)	40	542.933.827	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (orang)	0	-	Efisiensi anggaran maka sub kegiatan tidak dianggarkan dan penyuluh tahun 2026 kewenangan berpindah ke pusat
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)	416	1.610.046.353	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah pelaku perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (orang)	130	1.438.418.092	
								Jumlah produk perkebunan yang dipasarkan (produk)	19		
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	878.171.171	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Paser, Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Luar Prov Kaltim	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	1.238.428.496	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	21	731.875.182	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Balikpapan	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	10	199.989.596	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)	18	847.440.693	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)	1	109.956.741	
3.27.07.1.03.0005	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1	551.405.542	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	0	-	Sub Kegiatan di hilangkan karena pada tahun 2025 koorporasi telah terbentuk
3.27.07.1.03.0006	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1	296.035.151	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar,Berau,Paser	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	1	109.956.741	
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN					2.518.500.320	UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN				2.329.277.174	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	87,2	1.590.710.983	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	95	1.405.796.283	
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100	84.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100	74.640.000	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	74.640.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27. 01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100	2.571.220	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100	14.953.576	
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Ratribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	2.571.220	Pelaporan Pengelolaan Ratribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	14.953.576	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	66	174.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	66	150.000.000	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	10	174.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	10	150.000.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1	336.189.630	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1	255.099.248	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4.013.418	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4.010.274	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	75.008.391	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	57.774.633	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	69.262.961	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	69.212.244	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	13.348.060	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	11.802.097	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	7.756.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	1.980.000	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	166.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	110.320.000	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	2	8.548.383	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	0	-	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	8.548.383	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	Efisiensi anggaran tidak dianggarkan
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	4	870.125.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1	794.141.459	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4.830.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	6.000.000	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ymag disediakan (Laporan)	1	150.095.750	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ymag disediakan (Laporan)	1	145.421.459	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	715.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	642.720.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	50	114.316.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	2	116.962.000	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	24.406.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	27.052.000	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	2	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	2	50.000.000	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	13	39.910.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	60	39.910.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	8000000	927.789.337	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	200	923.480.891	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih)	5000000	927.789.337	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih)	1	812.922.441	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	150	487.558.052	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	10 Kab/ Kota di Kaltim, Kalimantan Utara	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	200	458.832.623	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	440.231.285	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	354.089.818	
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara	Jumlah sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang dikelola (SDG)	2	110.558.450	
						Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Varietas Unggul Baru (VUB))	1	110.558.450	Penyesuaian dengan adanya Kepmendagri no 900.1-2850 Tahun 2025
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN					2.833.857.613	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN				6.250.552.220	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	88,38	1.702.158.966	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	82,75	1.750.552.220	
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	100	84.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	100	96.240.000	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	96.240.000	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	100	1.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	100	1.113.500	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Rtribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1.000.000	Pelaporan Pengelolaan Rtribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1.113.500	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	70,5	78.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	30	45.000.000	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6	78.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6	45.000.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	1	372.151.068	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	1	297.354.708	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	9.080.076	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	11.028.783	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	51.150.714	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	83.438.639	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	36.473.270	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	40.177.936	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	22.064.608	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	25.101.350	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	3.878.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	3.960.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar kalitim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	249.504.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar kalitim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	133.648.000	
3.2701.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	5	98.598.498	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	2	43.001.852	
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	2	60.099.074	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	0	-	Efisiensi anggaran tidak dianggarkan
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	38.499.424	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	43.001.852	
3.27.01.1.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	4	963.127.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	1	877.223.400	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.200.000	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	242.727.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda, Loa Janan Kab. Kukar	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	227.383.400	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	715.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda, Loa Janan Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	644.640.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	75	104.322.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	1	390.618.760	

Kode	RANCANGAN AWAL RCPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	1	24.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	1	17.036.000	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	341.541.760	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	10	29.972.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	10	32.041.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	90	1.131.698.647	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	67	4.500.000.000	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)	30	1.131.698.647	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)	4		
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	1200	1.131.698.647	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	2840	4.500.000.000	
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN					5.385.818.695	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN				3.244.002.512	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	85,5	1.954.474.155	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	79,9	1.601.773.797	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100	84.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100	84.960.000	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100	49.927.158	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100	17.400.000	
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1	49.927.158	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1	17.400.000	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	60	112.970.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	38	90.000.000	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	112.970.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6]	90.000.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1	345.430.657	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1	311.240.517	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	7.970.348	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	7.168.774	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	89.812.341	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	112.375.166	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	35.880.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	42.180.000	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	33.836.768	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	19.136.577	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1.939.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1.980.000	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	175.992.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	128.400.000	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	6	339.575.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	0	-	
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	291.436.400	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	Efisiensi anggaran tidak dianggarkan
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	48.139.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	Efisiensi anggaran tidak dianggarkan
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	4	897.698.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	3	883.866.200	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4.630.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.000.000	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	148.468.800	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	156.586.200	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	744.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	722.280.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	70	123.912.140	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	70	214.307.080	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	44.662.140	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	46.967.080	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	120.000.000	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	29.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	47.340.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Samarinda	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	98	3.431.344.540	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Samarinda	Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD (%)	3,32	1.642.228.715	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan (benih)	50000	3.431.344.540	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Jumlah potensi produksi benih unggul dan bermutu (Benih)	1100000	1.642.228.715	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	2	3.431.344.540	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	20000	1.642.228.715	

Berdasarkan hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan ada beberapa hal yang menjadi catatan dan penyesuaian :

1. Terdapat beberapa Sub kegiatan yang dihilangkan guna efisien dan efektifnya pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya sub kegiatan baru hasil dari penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 -2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Adanya efisiensi anggaran yang merupakan tindaklanjut dari Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 sehingga ada beberapa sub kegiatan yang dihilangkan/tidak dianggarkan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran Renstra maupun pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan kristalisasi kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan sesuai amanah dari Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat di atasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Selain itu, program dan kegiatan yang dirumuskan juga mempertimbangkan berbagai usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi atau dihimpun melalui pengumpulan informasi di lapangan, termasuk hasil pengamatan serta pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

Adapun program-program prioritas subsektor perkebunan yang langsung berkaitan dan menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;

Lebih lanjut, pada tahun 2026, subsektor Perkebunan melaksanakan kegiatan utama yang bersifat operasional dan langsung menyentuh kebutuhan Masyarakat Perkebunan. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan yang mendukung Program Unggulan Jospol 1 Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern, serta kegiatan prioritas yang menjadi major project Dinas Perkebunan. Kegiatan prioritas tersebut di antaranya:

1. Pengembangan Komoditi Kakao, Kopi dan Aren di Kabupaten Kutai Karta

2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pengembangan Agen Pengendali Hayati (APH)
3. Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Komoditas Perkebunan
4. Sosialisasi Pengawasan Peredaran Benih serta Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat dan Berlabel

Seluruh program dan kegiatan subsektor Perkebunan dirumuskan sesuai dengan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 (sebagaimana terlampir).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dicapai dengan Program Prioritas Nasional (terkait pertanian) yakni:

- a. PN 2 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru dengan Program Prioritas **Swasembada Pangan** melalui :
 - Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah, dengan indikator : Produksi tanaman vanili, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, karet, kakao, the serta pertumbuhan PDB tanaman perkebunan
 - Pengembangan Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dengan indikator persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian
- b. PN 5 – Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan Program Prioritas **Pengembangan Hilirisasi** Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor melalui :
 - Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit
 - Pengembangan Hilirisasi Kelapa
 - Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong

Terkait Program Nasional di atas maka kerangka strategis atau rumah strategi Kementerian Pertanian sebagai berikut:



Gambar 3.1 Rumah Strategis Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian adalah Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

“**Pertanian**” bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. (Bab I, Pasal 1, angka 2 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan)

“**Maju**” bermakna bahwa Pertanian Indonesia mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian: Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran

“**Berkelanjutan**” bermakna bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. (Bab I, Pasal 1, angka 1 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan). □ “Berkelanjutan” juga mengandung makna bahwa sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya.

“**Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia**” bermakna bahwa (1) komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian; (2) Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan

kesejahteraan petani; (3) komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat; dan (4) Kesehatan rakyat dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

Visi Kementerian Pertanian dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan petani

Kesejahteraan Petani merupakan kondisi di mana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui upaya agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian.

2. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Misi 2 ini mencakup seluruh rantai nilai pertanian : Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran

Misi 2 ini juga mendorong penerapan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan: pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Bab I, Pasal 1, Angka 1, UU nomor 22 tahun 2019)

3. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia

Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia yaitu:

- Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian;
- Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani;
- Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT); dan

Misi 3 ini mendorong optimasi manfaat pertanian bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia

4. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia.

Misi 4 menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan serta dampak penyakit hewan kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Misi 4 ini menjadi misi khusus dikarenakan otoritas veteriner di Indonesia hanya berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Otoritas veteriner dibutuhkan sebagai Pembina seluruh SDM veteriner di Indonesia. Pencegahan dan penanganan penyebaran penyakit hewan merupakan bagian yang terpisah dari pengelolaan pangan asal ternak.

5. Meningkatkan penajaman reformasi birokrasi kementerian pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat

Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. RB Kementan dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik. Fokus RBN yang diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Visi Misi diatas dapat dicapai dengan melaksanakan delapan pilar strategis. Berikut delapan pilar strategis tersebut:

- Pilar 1 :
Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai kebutuhan produksi
- Pilar 2 :
Produksi dan produktivitas pertanian secara modern dan berkelanjutan
- Pilar 3 :
Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional
- Pilar 4 :
Kawasan sentra produksi pangan menuju lumbung pangan nasional
- Pilar 5 :
Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian
- Pilar 6 :
Pemanfaatan teknologi pertanian modern
- Pilar 7 :
Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani
- Pilar 8 :
Sistem kesehatan hewan nasional

Berdasarkan rumah strategis tersebut maka dapat dijabarkan ke dalam beberapa sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan
- 2. Meningkatnya pendapatan petani
- 3. Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian
- 4. Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan
- 5. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian

Sasaran strategis diatas dijabarkan dalam sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja sasaran Program Ditjen Perkebunan

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program	
SP 1	Meningkatnya indeks harga yang diterima pekebun	IKP 1	Indeks harga yang diterima pekebun
SP 2	Terpenuhinya kebutuhan pangan asal perkebunan dari produksi dalam negeri	IKP 2	Persentase produksi perkebunan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal perkebunan dalam negeri
SP 3	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman perkebunan	IKP 3	Indeks mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman perkebunan
SP 4	Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan yang siap digunakan	IKP 4	Rata rata volume ekspor komoditas perkebunan
SP 5	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	IKP 5	Indeks hilirisasi komoditas perkebunan unggulan
SP 6	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku boi energi	IKP 6	Persentase produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi terhadap total produksi
SP 7	Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Organisasi Ditjen. Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel	IKP 7	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Perkebunan

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dari Renja tahun 2026 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun kedepan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan serta sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2025 - 2029 adalah :

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sub Sektor Perkebunan.

Indikator :

- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Perkebunan (%)
- Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Perkebunan (%)

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan serta sampai tiga tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Dinas Perkebunan dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai pada periode 2025 - 2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kesejahteraan Pekebun sub Sektor Perkebunan

Indikator :

- Rata-rata produktitas komoditas unggulan perkebunan (Kg/Ha)
- NTP Perkebunan Rakyat (Indeks)

2. Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca sub sektor perkebunan

Indikator :

- Jumlah Emisi GRK Sub Sektor Perkebunan (ton CO₂ eq)

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

Indikator :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (nilai)
- Indeks Pelayanan Publik (indeks)

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2026
Sasaran 1 Akselerasi Perekonomian Daerah	1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sub Sektor Perkebunan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Perkebunan (%)	1,81
		1. Meningkatnya Daya Saing dan Kesejahteraan Pekebun sub Sektor Perkebunan	1. Rata-rata produktitas komoditas unggulan perkebunan (Kg/Ha)	3.031
			2. NTP Perkebunan Rakyat (Indeks)	192.88
Sasaran 4 Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Perkebunan (%)	4,38
		2. Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca sub sektor perkebunan	Jumlah Emisi GRK Sub Sektor Perkebunan (Ton CO2 eq)	16.121.500
Sasaran 9 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai/predikat)	80,25/A
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (indeks)	90,25
Sasaran 10 Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1 Program

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program yang terkait dengan pelayanan administratif perkantoran/pelayanan publik dan program yang terkait dengan pembangunan langsung kepada masyarakat pekebun.

Program pembangunan perkebunan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan

Timur khususnya pembangunan perkebunan selama 3 tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program Dinas Perkebunan pada tahun 2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administratif

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Program Pembangunan Perkebunan

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- d. Program Perizinan Usaha Pertanian; Dan
- e. Program Penyuluhan Pertanian.

3.3.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan pada tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 serta mengacu pada RKPD 2026, dapat dijabarkan ke dalam aktivitas atau kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang terkait dengan pelayanan administrasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - c) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 - d) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

- c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - d) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; dan
 - f) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - c) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
- a) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah;
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
- a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - b) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai; dan
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 6) Administasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan :
- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - d) Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor.
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:

- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
- c) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Kegiatan yang terkait dengan pembangunan

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengawasan sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian;
 - b) Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan; dan
 - c) Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
- 2) Pengawasan Mutu, penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih;
 - b) Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
 - c) Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
 - a) Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian;
 - b) Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani; dan
 - c) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
 - d) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, meliputi sub kegiatan:

- a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
- c) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

d. Program Perizinan Usaha Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian

e. Program Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan
 - b) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.
- 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pendampingan dan pengawalan korporasi petani; dan

Adapun total anggaran indikatif kebutuhan anggaran pada Tahun 2026 untuk Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) UPTD adalah sebesar **Rp. 52.745.820.000,-** (*Lima puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*). Total anggaran dinas sebesar Rp. 40.921.987.386,- UPTD PBP sebesar Rp. 2.329.277.388,- UPTD P2TP sebesar Rp. 6.250.552.526,- dan UPTD PBTP sebesar Rp. 3.244.002.700,- . Adapun rincian Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel. T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
DINAS+3 UPTD				52.745.820.000			50.700.693.000
DINAS PERKEBUNAN				40.921.988.094			39.839.542.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		95,09	30.701.676.675	1.1.01 Pajak Daerah	95,21	29.809.729.182
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		100	1.760.836.216		100	1.891.613.818
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)		100	878.222.058		100	762.477.100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Samarinda, Luar Provinsi	7	362.240.410		7	340.303.504
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	6	246.966.744		6	218.232.744
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	1	269.014.904		1	203.940.852
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)		100	27.255.327.949		100	27.184.848.765

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Samarinda	137	26.665.713.412		139	26.597.852.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1	457.320.000		1	465.600.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	1	89.902.031		1	88.950.310
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	12	42.392.506		12	32.446.455
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)		30	63.546.854		30	46.196.570
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Samarinda, Balikpapan, Paser dan Kukar	4	63.546.854		6	46.196.570
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi perkebunan (%)		100	17.704.978		1	9.269.635
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim	1	17.704.978		1	9.269.635
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)		100,00	131.582.560		100,00	125.358.560

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim	1	85.182.560		1	49.058.560
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	23	46.400.000		23	76.300.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)</i>		4	1.098.217.668		4	1.268.295.270
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	1	45.943.222		1	45.943.222
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	160.138.951		4	90.459.801
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	222.060.000		4	242.330.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	90.225.495		4	83.339.784
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	1	579.850.000		1	806.222.463
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)</i>		1	14.126.156			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Samarinda	2	14.126.156		-	-
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)</i>		4	2.448.298.548		4	1.994.938.700
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	Samarinda	1	20.000.000		1	20.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1	631.317.648		1	592.017.648
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	1	11.300.900		1	11.300.900
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1	1.785.680.000		1	1.371.620.152
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)</i>		61,73	555.486.120		64,29	309.958.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Samarinda	15	333.434.120		23	208.906.400

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	1	133.342.000		1	60.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	69	88.710.000		69	40.552.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Komoditas perkebunan (Ton)		20.004.096,00	3.686.927.115	1.2.01.07Dana bagi Hasil (DBH)	20.092.114,00	4.026.566.366
	Persentase Kelompok Tani yang memanfaatkan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (%)		13,33%			15,00%	
<i>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</i>	<i>Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)</i>		5	3.686.927.115		6	4.026.566.366
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Samarinda, Balikpapan, Mahakam Ulu, Bontang, Berau	1	3.632.479.289		1	3.972.118.466
Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Paser	1	27.223.913		1	27.223.950
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Paser	1	27.223.913		1	27.223.950

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)		44.525	996.382.221	1.1.01 Pajak Daerah	40.450	426.381.548
	Persentase pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan oleh Kelompok Tani (%)		12%			16%	
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Data Prasarana Pertanian Perkebunan (Jenis)	Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Samarinda, Balikpapan, Mahakam Ulu, Bontang, Berau	1	996.382.221		1	426.381.548
	Jumlah Kelompok Tani yang memanfaatkan prasana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Kelompok Tani)		2			4	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Samarinda, Balikpapan, Mahakam Ulu, Bontang, Berau	1	756.997.461		0	-
Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi. Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Samarinda, Balikpapan, Mahakam Ulu, Bontang, Berau	1	143.003.595		1	157.302.745
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Paser	1	27.235.694		2	27.235.731

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar,Berau,Paser	2	69.145.471		2	69.145.589
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan (%)		100,00	1.509.943.943	1.1.01 Pajak Daerah 1.2.01.07 Dana bagi Hasil (DBH)	100,00	1.311.677.615
<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)</i>	<i>7 Kabupaten (Berau, Kutim, Kukar, Kubar, Mahulu, PPU dan Paser)</i>	<i>94</i>	<i>1.509.943.943</i>		<i>94</i>	<i>1.311.677.615</i>
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	Berau, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, Mahakam Ulu, Samarinda	95.000	856.999.890		95.000	745.087.315
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	7 Kabupaten (Berau, Kutim, Kukar, Kubar, Mahulu, PPU dan Paser)	700	652.944.053		700	566.590.300
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perkebunan besar berijin usaha yang terbina dan terawasi (%)		33,05	717.847.091	1.1.01 Pajak Daerah 1.2.01.07 Dana bagi Hasil (DBH)	49,64	623.722.985
	Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan (%)		19,62			20,58	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina, diawasi dan dimitrakan (Pelaku Usaha)		35	717.847.091			
	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang mendapatkan sertifikasi perkebunan berkelanjutan (Pelaku usaha)		7	-		35	623.722.985
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)		3	717.847.091		1	149.260.385
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)		36,17	1.238.428.496	1.1.01 Pajak Daerah 1.2.01.07 Dana bagi Hasil (DBH)	55,45	1.082.334.685
	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)		25,39	309.946.337		47,76	667.516.601
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaku perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (orang)	Paser, Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar,Berau,Luar Prov Kaltim	130	1.438.418.092		280	1.682.499.691
	Jumlah produk perkebunan yang dipasarkan (produk)		19			21	
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	Paser, Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar,Berau,Luar Prov Kaltim	1	1.238.428.496		1	1.082.334.685

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Balikpapan	10	199.989.596		16	600.165.006
<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</i>	<i>Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)</i>	<i>Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar,Berau,Paser</i>	<i>1</i>	<i>109.956.741</i>		<i>1</i>	<i>67.351.595</i>
Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar,Berau,Paser	1	109.956.741		1	67.351.595
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN (PBP)				2.329.277.174			2.122.945.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	Samarinda	95,00	999.275.576	1.1.01 Pajak Daerah	95,20	956.565.817
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		100	406.520.707		100	410.890.129
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))</i>	<i>Samarinda</i>	<i>100</i>	<i>74.640.000</i>		<i>100</i>	<i>74.640.000</i>
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1	74.640.000		1	74.640.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	Samarinda	100	14.953.576		100	41.353.576
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Samarinda dan Luar Provinsi	1	14.953.576		1	41.353.576
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))		66	150.000.000		58	130.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Samarinda dan Luar Provinsi	10	150.000.000		11	130.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	Samarinda	1	255.099.248		1	259.468.670
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	4.010.274		4	4.010.274
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	57.774.633		4	55.774.633
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	69.212.244		4	69.392.244

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	11.802.097		4	19.291.519
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Samarinda	12	1.980.000		12	1.980.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Samarinda dan Luar Provinsi	1	110.320.000		1	111.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	Samarinda	3	794.141.459		3	794.141.459
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	Samarinda	1	6.000.000		1	6.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1	145.421.459		1	145.421.459
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1	642.720.000		1	642.720.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	Samarinda	68,50	116.962.000		68,50	67.852.241

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Samarinda	2	27.052.000		2	24.406.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	2	50.000.000		1	24.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	60	39.910.000		25	19.446.241
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	10 Kab/Kota di Kaltim	8.000.000	923.480.891	1.1.01 Pajak Daerah	8.000.000	755.489.554
<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i>	<i>Jumlah benih bersertifikat yang beredar (benih)</i>	<i>10 Kab/Kota di Kaltim</i>	<i>7.000.000</i>	<i>812.922.441</i>		<i>7.000.000</i>	<i>668.932.059</i>
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	10 Kab/Kota di Kaltim, Kalimantan Utara	200	458.832.623		250	391.270.702
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1	354.089.818		1	277.661.357

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang dikelola (SDG)</i>	<i>Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara</i>	2	110.558.450		2	86.557.495
Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Varietas Unggul Baru (VUB))	Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara	1	110.558.450		1	86.557.495
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN				6.250.552.220			5.920.421.100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		82,75	1.220.614.112	1.2.01.07Dana bagi Hasil (DBH)	85,75	934.276.500
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		100	529.938.108		100	486.144.600
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan TanamanPerkebunan (P2TP))</i>		100	96.240.000		100	96.240.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1	96.240.000		1	96.240.000
<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%)</i>		100	1.113.500		100	1.003.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pelaporan Pengelolaan Ratribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Samarinda	1	1.113.500		1	1.003.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan TanamanPerkebunan (P2TP)		30	45.000.000		53	15.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Jawa Timur	6	45.000.000		11	15.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit) (UPTD Pengembangan Perlindungan TanamanPerkebunan (P2TP)		1	297.354.708		1	253.561.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	11.028.783		4	9.085.366
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	83.438.639		4	48.884.470
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	40.177.936		4	31.795.325
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	25.101.350		4	18.523.740
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Samarinda	12	3.960.000		12	3.878.400

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab/Kota dan Luar Daerah	1	133.648.000		1	141.393.899
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis) (UPTD Pengembangan Perlindungan TanamanPerkebunan (P2TP)</i>		2	43.001.852		10	25.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Samarinda	9	43.001.852		17	25.000.000
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Pengembangan Perlindungan TanamanPerkebunan (P2TP)</i>		3	877.223.400		4	877.223.400
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	Samarinda	1	5.200.000		1	5.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Samarinda, Loa Janan Kab. Kukar	1	227.383.400		1	227.383.400
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda, Loa Janan Kab. Kukar	1	644.640.000		1	644.640.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan TanamanPerkebunan (P2TP))</i>		60	390.618.760		60	152.393.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	Samarinda	1	17.036.000		1	16.031.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	1	341.541.760		1	106.391.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	10	32.041.000		40	29.971.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)(%)	10 Kabupaten/Kota	90	4.500.000.000	1.2.01.07Dana bagi Hasil (DBH)	90	4.500.000.000
<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)</i>	<i>10 Kabupaten/ Kota</i>	<i>67</i>	<i>4.500.000.000</i>		<i>30</i>	<i>4.500.000.000</i>
	<i>Jumlah pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan teknologi pengembangan dan perbanyak bio pestisida dan aph (Pelaku Usaha)</i>	<i>Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, Kota Bontang</i>	<i>4</i>			<i>7</i>	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	10 Kab/Kota	2.840	4.500.000.000		1.200	4.500.000.000
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN				3.244.002.512			2.817.783.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		79,9	1.128.947.080	1.1.01 Pajak Daerah	78,25	872.620.400
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		100	472.826.717		100	447.312.738
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))</i>		<i>100</i>	84.960.000		<i>100</i>	84.960.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1	84.960.000		1	84.960.000
<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))</i>		<i>100</i>	<i>17.400.000</i>		<i>100</i>	<i>17.400.000</i>
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	1	17.400.000		1	17.400.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		38	90.000.000		25	60.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Samarinda dan Luar Wilayah Prov Kaltim	6	90.000.000		4	60.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		1	311.240.517		1	242.312.738
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	4	7.168.774		4	7.168.774
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	4	112.375.166		4	50.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	4	42.180.000		4	43.875.244
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Samarinda	4	19.136.577		4	19.329.520
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Samarinda	12	1.980.000		12	1.939.200

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab/Kota Se Kaltim dan Luar Wilayah Prov Kaltim	1	128.400.000		1	120.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		3	883.866.200		3	801.160.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Samarinda	1	5.000.000		1	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	1	156.586.200		1	200.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	1	722.280.000		1	596.160.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))		68	214.307.080		68	114.100.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Samarinda	2	46.967.080		2	45.676.300

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	3	120.000.000		3	39.174.100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	3	47.340.000		3	29.250.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD (%)		3,32	1.642.228.715	1.1.01 Pajak Daerah	3,45	1.497.850.462
<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i>	<i>Jumlah potensi produksi benih unggul dan bermutu (Benih)</i>		<i>1.100.000</i>	<i>1.642.228.715</i>		<i>1.200.000</i>	<i>1.497.850.462</i>
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	20.000	1.642.228.715		15.000	1.497.850.462

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2026, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2026, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD Tahun 2026. Namun, sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, politik baik daerah maupun nasional, evaluasi kinerja Renja Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat serta kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024, maka diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya adalah merubah arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam RKPD 2026.

Sejalan dengan program unggulan Jospol yaitu hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan produksi sebagai bahan baku industri. Pengembangan hilirisasi industri berbasis pertanian membutuhkan kepastian ketersediaan bahan baku yang mencukupi agar aglomerasi ekonomi dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan produksi Komoditas perkebunan untuk memastikan bahwa kebutuhan bahan baku tercukupi untuk memenuhi permintaan industri. Peningkatan produksi tersebut dapat dilakukan melalui ekstensifikasi areal tanam maupun intensifikasi dengan modernisasi sarana dan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan produktifitas tanam dengan cara : (1) penggunaan benih yang unggul dan bermutu (2) memenuhi ketersediaan prasarana dan sarana pendukung budidaya tanaman (3) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan pelaku usaha perkebunan (4) penanganan serangan OPT dan gangguan usaha lainnya dan (5) mengoptimalkan penerapan teknologi dalam usaha budidaya tanaman perkebunan.

4.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Secara garis besar, belanja pemerintah daerah dialokasikan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Kode	Organisasi	RKPD 2026 (Rp)
3..27.3.27.0.0.0.0.06	Dinas perkebunan	52.745.820.000
3..27.3.27.0.0.0.0.06	Dinas perkebunan	40.921.987.386
3..27.3.27.0.0.0.0.06.01	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	2.329.277.388
3..27.3.27.0.0.0.0.06.02	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	6.250.552.526
3..27.3.27.0.0.0.0.06.03	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	3.244.002.700

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Disesuaikan

Secara garis besar, pemerintah daerah telah berupaya optimal menekan adanya SiLPa pada tahun sebelumnya. Namun pada beberapa Perangkat Daerah memerlukan strategi yang relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada pengoptimalan capaian positif kinerja pembangunan di tahun berkenaan.

Program/kegiatan yang merupakan penjabaran pagu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dituangkan pada tabel dibawah.

Tabel 4.2
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	269.014.904,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur		293.898.752,00	DINAS PERKEBUNA N					
		3	2 7	0 1	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
		3	2 7	0 1	1.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
		3	2 7	0 1	1.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
		3	2 7	0 1	1.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
		3	2 7	0 1	1.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD				12 Laporan	42.392.506,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur		28.370.612,00	DINAS PERKEBUNA N					

[illegible]

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.785.680.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur		1.562.760.000,00	DINAS PERKEBUNA N	
	3	2 7	0 1	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	3	2 7	0 1	1.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
	3	2 7	0 1	1.0 9	000 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
	3	2 7	0 1	1.0 9	001 0	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				69 Unit	88.710.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur		88.710.000,00	DINAS PERKEBUNA N	
2	3	2 7	0 2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Komoditas perkebunan Persentase Kelompok Tani yang memanfaatkan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	-			2000409 6 Ton 13.33 %	3.686.927.115,00						-	16.654.387.568,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						[Meningkatnya produksi komoditas tanaman perkebunan]																	
	3	2	0	1.0		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi	-			5 Jenis	3.686.927.115,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	Kelompok Tani	-	16.654.387.568,00				
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																	
							Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	3.632.479.289,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	Kelompok Tani		16.599.939.668,00	DINAS PERKEBUNA N			
						-																	
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan																	
							Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan				1 laporan	27.223.913,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	Kelompok Tani		27.223.950,00	DINAS PERKEBUNA N			
						[Meningkatnya pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani]	Persentase Kelompok tani yang Memanfaatkan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	83.33	0	0	13.33	3.686.927.115,00							16.654.387.568,00				
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan				1 laporan	27.223.913,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Tani		27.223.950,00	DINAS PERKEBUNAN
3	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
						[Meningkatkan Luasan Areal Perkebunan]	Luas kebun yang dibangun	30050	52381	49000	44525	996.382.221,00							722.841.080,00	
	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian														
	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
	3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	143.003.595,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Tani		193.033.500,00	DINAS PERKEBUNAN
						[Meningkatkan pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani]	Persentase Pemanfaatan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Kelompok Tani	100	0	0	12	996.382.221,00							722.841.080,00	
	3	27	03	1.01	0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	27.235.694,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Tani		27.235.731,00	DINAS PERKEBUNAN				
	3	2	0	1.0	002	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan																	27.235.731,00	DINAS PERKEBUNAN
							Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				2 Unit	69.145.471,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Tani		69.145.589,00	DINAS PERKEBUNAN				
4	3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap perkebunan	-			100 %	1.509.943.943,00						-	7.806.607.623,00					
						[Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim (DPI) pada area perkebunan]	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan	100	100.28	100	100	1.509.943.943,00							7.806.607.623,00					
	3	2	0	1.0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi																		
	3	2	0	1.0	000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				95000 Ha	856.999.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Perkebunan		4.484.170.550,00	DINAS PERKEBUNAN				

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah korporasi petani yang didampingi				1 Unit	109.956.741,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Tani dan Penyuluh		436.741.628,00	DINAS PERKEBUNAN
						UPTD Pengawasan Benih Pekebunan														
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.329.277.174,00							2.690.018.101,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.329.277.174,00							2.690.018.101,00	
7	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
						[Meningkatkan kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan)]	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 97.9	100 98.1	100 86.2	100 95	1.405.796.283,00							1.562.227.924,00	
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
	3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	-			100 %	14.953.576,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	-	2.565.220,00	

[illegible]

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	11.802.097,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengawasa n Benih Perkebunan		12.713.020,00	UPTD PENGAWAS AN BENIH PEKEBUNAN
	3	2 7	0 1	1.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokume n	1.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengawasa n Benih Perkebunan		1.980.000,00	UPTD PENGAWAS AN BENIH PEKEBUNAN	
	3	2 7	0 1	1.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	110.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengawasa n Benih Perkebunan		168.304.000,00	UPTD PENGAWAS AN BENIH PEKEBUNAN	
	3	2 7	0 1	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	3	2 7	0 1	1.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengawasa n Benih Perkebunan		4.830.000,00	UPTD PENGAWAS AN BENIH PEKEBUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	2 7	0 1	1.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
	3	2 7	0 1	1.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
	3	2 7	0 1	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	-			68.50 %	116.962.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Pengawasa n Benih Perkebunan	-	114.316.000,00		
	3	2 7	0 1	1.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
	3	2 7	0 1	1.0 9	000 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
												50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir						50.000.000,00	UPTD PENGAWAS AN BENIH PEKEBUNAN	
						-						1.405.796.283,00							1.562.227.924,00		
	3	2 7	0 1	1.0 9	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 Laporan	354.089.818,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	Pelaku Usaha Perkebunan		440.231.677,00	UPTD PENGAWAS AN BENIH PEKEBUNAN
	3	2 7	0 2	1.0 3		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi														
	3	2 7	0 2	1.0 3	000 2	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme														
						Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai					1 Varietas Unggul Baru (VUB)	110.558.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	Pelaku Usaha Perkebunan		200.000.000,00	UPTD PENGAWAS AN BENIH PEKEBUNAN
						UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan														
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						6.250.552.220,00							3.473.737.613,00	
	3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
9	3	2 7	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	-			82.75 Indeks 100 %	1.750.552.220,00						-	1.642.038.196,00	
						[Meningkatkan kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan)]														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	-			100 %	96.240.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Pengemban gan Perlindunga n Tanaman Perkebunan	-	84.960.000,00	
	3	2	0	1.0	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokume n	96.240.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Pengemban gan Perlindunga n Tanaman Perkebunan		84.960.000,00	UPTD PENGEMBA NGAN PERLINDUN GAN TANAMAN PERKEBUNA N
	3	2	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah														
	3	2	0	1.0	000 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	-			30 %	45.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Pengemban gan Perlindunga n Tanaman Perkebunan	-	78.000.000,00	
	3	2	0	1.0	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	nit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	-			1 Unit	297.354.708,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Pengemban gan Perlindunga n Tanaman Perkebunan	-	371.591.528,00	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	133.648.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Pengemban gan Perlindunga n Tanaman Perkebunan		249.504.000,00	UPTD PENGEMBA NGAN PERLINDUN GAN TANAMAN PERKEBUNA N	
		3	2 7	0 1	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
		3	2 7	0 1	1.0 7	001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	43.001.852,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Pengemban gan Perlindunga n Tanaman Perkebunan		39.025.668,00	UPTD PENGEMBA NGAN PERLINDUN GAN TANAMAN PERKEBUNA N	
		3	2 7	0 1	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	-		3 Jenis	877.223.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Pengemban gan Perlindunga n Tanaman Perkebunan	-	963.127.000,00		
		3	2 7	0 1	1.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.200.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Pengemban gan Perlindunga n Tanaman Perkebunan		5.200.000,00	UPTD PENGEMBA NGAN PERLINDUN GAN TANAMAN PERKEBUNA N	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
												227.383.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan		242.727.000,00	UPTD PENGEMBA NGAN PERLINDUN GAN TANAMAN PERKEBUNA N				
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	644.640.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan		715.200.000,00	UPTD PENGEMBA NGAN PERLINDUN GAN TANAMAN PERKEBUNA N				
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	-			60 %	390.618.760,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	-	104.334.000,00					
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	17.036.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan		24.350.000,00	UPTD PENGEMBA NGAN PERLINDUN GAN TANAMAN PERKEBUNA N				
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	32.041.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Pengemban gan Perlindunga n Tanaman Perkebunan		29.984.000,00	UPTD PENGEMBA NGAN PERLINDUN GAN TANAMAN PERKEBUNA N
10	3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														
						[Terkendalinya Penyebaran Organisme Penggangu Tanaman (OPT) pada Tanaman Perkebunan]	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Penggangu Tanaman (OPT)	90	90.62	90	90	4.500.000.000,00							1.831.699.417,00	
	3	2	0	1.0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT Jumlah pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan teknologi pengembangan dan perbanyakan bio pestisida dan APH	-			67 Pelaku Usaha 4 Pelaku Usaha	4.500.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	Pelaku Usaha Perkebunan	-	1.831.699.417,00	
	3	2	0	1.0	000	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
							Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				2840 Ha	4.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	Pelaku Usaha Perkebunan		1.831.699.417,00	UPTD PENGEMBA NGAN PERLINDUN GAN TANAMAN PERKEBUNA N
						UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.244.002.512,00							3.175.774.704,00	
	3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
11	3	2 7	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)) Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	-			100 % 79.90 Indeks	1.601.773.797,00						-	1.675.774.704,00	
						[Meningkatkan kinerja layanan keseekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan)]														
	3	2 7	0 1	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	-			100 %	84.960.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	-	84.960.000,00	
	3	2 7	0 1	1.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokume n	84.960.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		84.960.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNA N
						-														
	3	2 7	0 1	1.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	-			100 %	17.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	-	49.927.263,00	

[illegible]

[illegible]

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	5.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		4.630.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNA N
		3	2 7	0 1	1.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	156.586.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		210.120.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNA N
		3	2 7	0 1	1.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	722.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		744.600.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNA N
		3	2 7	0 1	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	-			68 %	214.307.080,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	-	154.184.700,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	46.967.080,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		45.684.700,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNA N
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		50.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNA N
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	47.340.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		58.500.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNA N

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	-			3.32 %	1.642.228.715,00						-	1.500.000.000,00	
						[Terpenuhinya Ketersediaan Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu]	Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD	3.83	3.22	3.19	3.32	1.642.228.715,00							1.500.000.000,00	
	3	2	0	1.0		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah potensi produksi benih unggul dan bermutu	-			1100000 Benih	1.642.228.715,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	Pelaku Usaha Perkebunan	-	1.500.000.000,00	
	3	2	0	1.0	001	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang														
							Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				20000 Batang	1.642.228.715,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	Pelaku Usaha Perkebunan		1.500.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNA N

BAB V. PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 ini merupakan rancangan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029 Rancangan RKPD Tahun 2026. Renja 2026 disusun sebagai rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra dalam rangka pencapaian tujuan, sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya manusia yang dimiliki dinas, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tantangan yang berorientasi pada kebijakan program dengan menerapkan konsep pembangunan sistem dan usaha perkebunan berkelanjutan berbasis sumberdaya yang terbarukan.

Apabila dalam periode waktu pelaksanaan Renja ini terdapat hal-hal pokok yang perlu disesuaikan, terutama terkait dengan substansi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, maka selanjutnya substansi Renja ini dapat diperbaiki sesuai kebutuhan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;

Semua pihak terkait pembangunan sub sektor Perkebunan di Kalimantan Timur perlu menjaga komitmen dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan selama Tahun 2026.

RENJA TAHUN 2026
DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan periode 2025-2029 yang memuat rancangan awal kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Tahun 2026 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala organisasi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang telah disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkembangan isu strategis global dan nasional yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional, asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
- b. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari misi, tujuan, sasaran dan program kegiatan dan sub kegiatan perenagkat daerah seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

- c. Rencana kerja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026
- d. Rencana kerja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak penyusunan rencana kerja hingga penetapan dokumen rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

- 1. Disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan;
- 2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
- 3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja harus selaras dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disepakati seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;
- 4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran output dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

9. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode satu tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu pula sebagai acuan bagi bidang – bidang di rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian program/kegiatan rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan yang diharapkan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah ini adalah:

1. Terjabarkannya Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026
4. Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusun Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah, dan penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangaunan selama 1 (satu) tahun ke depan oleh Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merupakan tahun pertama periode Renstra Tahun 2024-2026 yang melaksanakan 6 (enam) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Gambaran hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 tersaji dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2025

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	$\frac{11}{10/9 \times 100}$	12	13	$\frac{14}{13/12 \times 100}$
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur											
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian	Indeks	96,88	-	93,3	93,3	100	95,17	44,85	47,13
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100	-	100	100	100	100	100	100,00
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	94	-	90	90	100	92	43	46,74

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	Skor	92	80	90	90	100	91	39,4	43,30
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	%	86	-	80	80	100	83	30,5	36,75
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Score	86	80	80	80	100	83	30,68	36,96
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	86	80	80	80	100	83	30,68	36,96
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	86	80	80	80	100	83	38	45,78
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	86	71	80	80	100	83	41,5	50,00
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	86	80	80	80	100	83	51	61,45

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	Skor	97,3	-	96,21	95,53	99,29	97,29	24,03	24,70
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	87,46	-	87,53	98,2	112,19	88	64,92	73,77
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	KK	725	-	625	625	100	660	0	0,00
		Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	Rupiah, Milyar	970	-	860	858	99,77	920	525	57,07
		Jumlah produksi pupuk asal KOHE	Ton	435	-	385000	328554	85,34	410000	0	0,00
		Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	%	58,2	-	37,04	37,04	100,00	47,62	0	0,00
		Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	%	29	-	25	25	100,00	27	7,46	27,63
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan	Jumlah bibit sapi ber-SKLB	Ekor	280	-	175	175	100,00	225	175	77,78
		Jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nuthfa)	UnitUsaha	130	-	108	113	104,63	119	108	90,76

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
	Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	%	1,75	-	1,95	0,29	14,87	1,85	1,37	135,04
		Persentase Akseptor IB dari Indukan	%	13,5	-	12,5	13,43	107,44	13	10,13	77,92
		Persentase Calving Rate	%	62	-	61	55	90,16	61,5	23	37,40
		Pertumbuhan Upgrade Closed house	%	72	-	50	50	100,00	61,5	50	81,30
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan	Unit	42	-	18	18	100,00	31	17	54,84
		Luasan HPT	Ha	1.250	-	1150	1133	98,52	1225	1172,5	95,71
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	%	65	-	29,58	29,58	100,00	47	36,84	78,38
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari	Jumlah Pengadaan Ternak	Indukan / Bibit	7200	-	2700	3527	130,63	4700	2700	57,45

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
	Daerah Provinsi Lain										
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99,8	-	99,54	100	100,46	99,72	83,94	84,18
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	Unit	5	-	3	3	100,00	4	3	75,00
		Jumlah Nilai Akses pembiayaan	MilyarRupiah	133	-	134	139	103,73	120	22	18,33
		Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	Ha	158	-	107	153	142,99	155	143	92,26
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	92,45	-	91,79	95,41	103,94	92,41	76,7	83,00
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	97,75	-	95,11	100	105,14	95,81	78,76	82,20
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut)	Kecamatan	72	-	64	76	118,75	68	56	82,35
		Persentase pelayanan kesehatan hewan	%	49	-	43,5	50,13	115,24	45,8	28,5	62,23

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis	%	26	-	20	20,39	101,95	68	56	82,35
		Tingkat kesembuhan GANGREP	%	83	-	76,5	98,4	128,63	80	44,64	55,80
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	%	88	-	72	76	105,56	80	44,44	55,55
		Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	%	2,4	-	3,2	5,28	60,61	2,85	2,19	130,14
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting	gram per hari	33,6	-	27,5	27,5	100,00	30,5	0	0,00
		Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ	Unit	47	-	23	23	100,00	36	17	47,22
		Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang	%	91	-	81	95,23	117,57	86	100	116,28

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
		memenuhi persyaratan (ASUH)									
		Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif	%	22	-	24,48	24,78	98,79	23,5	23,8	98,74
		Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	%	1,5	-	1,32	1,38	104,55	1,41	0,33	23,40
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	%	65	-	58	75,8	130,69	60	61,16	101,93
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	99,73	-	99,35	100	100,65	99,59	87,24	87,60
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	Unit	139	-	114	122	107,02	126	124	98,41
		Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	%	100	-	32,9	32,9	100,00	65,8	28	42,55

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	99,78	-	99,74	99,99	100,25	99,73	43,56	43,68
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembudidaya unggas	RTUP	49.530	-	49215	49190	99,95	49310	59	0,12
		Jumlah peternak milenial	Orang	125	-	75	75	100,00	100	20	20,00
		Rasio SD komoditas/ produk peternakan	Rasio	1,139	-	1,154	1,154	100,00	1,146	0	0,00
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	Unit	11	-	9	9	100,00	13	9	69,23
3.27.0.00.0.00.02.0002 UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	Indeks	96,88	-	93,3	93,3	100,00	95,17	33,31	35,00
		Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	%	100	-	100	100	100,00	100	100,00	100,00
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	Score	92	-	90	90	100,00	91	25,00	27,47
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Score	86	-	80	80	100,00	83	21,00	25,30

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Score	86	80	80	80	100,00	83	21,00	25,30
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	86	80	80	80	100,00	83	21,00	25,30
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	86	80	80	80	100,00	83	83,00	100,00
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	86	80	80	80	100,00	83	21,00	25,30
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	86	80	80	80	100,00	83	21,00	25,30
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Skor	99	-	88,54	89,12	100,66	98,73	65,25	66,09

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	angka kelahiran	%	27	-	25,5	38	149,02	26,1	14	53,64
		Angka kematian ternak	%	1,97	-	2,13	3,5	60,86	2,05	1,5	136,67
		Calving Interval	Bulan	16,3	-	17,01	14	82,30	16,66	12	72,03
		Jumlah PAD	Rupiah	127000000	-	113000000	204088000	180,61	120000000	84248000	70,21
		Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	204,5	-	133,7	187,5	140,24	194	184,94	95,33
		Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	Stek/pols	20.000	-	10000	273960	2739,60	15000	20800	138,67
		Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan	Ton	1.850	-	1500	1501,28	100,09	1800	848	47,11
		Jumlah produksi pupuk	Ton	25	-	10	13,55	135,50	20	13,7	68,50
		Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	%	10	-	0	0	0,00	5	0	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0003 UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	96,88	-	93,3	93,3	100,00	95,17	43,6	45,81
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100	-	100	100	100,00	100	100	100,00
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	Score	92	-	90	90	100,00	91	40,79	44,82

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Score	86	80	80	80	100,00	83	19,31	23,27
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Score	86	80	80	80	100,00	83	34,09	41,07
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	86	80	80	80	100,00	83	26,98	32,51
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	86	80	80	80	100,00	83	83	100,00
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	86	80	80	80	100,00	83	27,01	32,54
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	86	80	80	80	100,00	83	34,47	41,53
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Skor	99,44	-	98,68	100	101,34	99,18	62,5	63,02

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
	MASYARAKAT VETERINER										
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Jumlah PAD	Rupiah	235000000	-	190000000	641622000	337,70	212000000	58865000	27,77
		Peningkatan Kepuasan pelanggan	Score	88,31	-	84	95,05	113,15	86	90,53	105,27
		Peningkatan Ruang lingkup pengujian	Absolut	50	-	39	39	100,00	45	20	44,44

Tabel 1 1

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program pada Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja dengan capaian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki 2 (dua) outcome, Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti. Realisasi Capaian Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti pada Dinas dan UPTD mencapai 100% yang berarti layanan kesekretariatan berjalan sesuai dengan prosedur dan keluhan pengguna layanan telah seluruhnya ditindaklanjuti, program ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu dengan capaian 90% dari target 90% atau capaian 100%. Terdapat 18 dokumen yang disusun tepat waktu dari 20 dokumen. Dokumen yang telah disusun tepat waktu adalah RENSTRA 2024-2026, RENJA 2024, Perjanjian Kinerja, IKU 2024-2026, DPA, RKA, Rencana Aksi, Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja dan Casecading, LHE dan TLHE AKIP, Laporan monitoring dan evaluasi (Renja, Renaksi, PK), SOP, IKI, dan Pengukuran Kinerja.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Realisasi Indikator Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran Skor 90 dari target 90 skor, dengan capaian realisasi keuangan seluruh Dinas dan UPTD menurut konsolidasi Bersama BPKAD per 31 Desember 2024 adalah 93,03%, terdapat selisih perbedaan dari aplikasi SIPD dan aplikasi SIRA pada hasil akhir realisasi keuangan. Aplikasi SIPD 93,03% SIRA 92,58%.
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Realisasi capaian Indikator Tingkat Pengelolaan administrasi BMD 80% dari target 80%. Pada tahun 2024 terdapat 181 barang yang masuk daftar usul pemusnahan atau penghapusan BMD berupa alat dan mesin.

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Realisasi Tingkat Pengelolaan kepegawaian 80 Skor dari target 80 Skor. Terdapat 31 orang pegawai dinas yang mengikuti peningkatan SDM
- Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum 80% dari target 80% atau capaian 100%, sehingga administrasi umum berjalan dengan baik selama tahun 2024
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Realisasi Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah 80% dari target 80%. Dinas Peternakan memiliki jumlah BMD asset tetap 1828 dan BMD aset lainnya.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Realisasi Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80% dari target 80%. Pada Tahun terdapat 1259 naskah surat masuk dan 1201 naskah surat keluar
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Realisasi capaian Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik 80% dari target 80%

Beberapa faktor penghambat dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perubahan penilaian SAKIP sesuai Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2026
- 2) Kurangnya keterampilan dan pemahaman staf terhadap proses administrasi keuangan dapat menghambat efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut
- 3) Kurangnya keterampilan dan pemahaman staf terhadap proses administrasi keuangan dapat menghambat efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut
- 4) Kurangnya pelatihan dan pemahaman staf tentang kebijakan administrasi umum dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan
- 5) Kurangnya pemahaman dan pelatihan staf tentang regulasi pengadaan daerah dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan pengadaan

- 6) Ketidakmampuan untuk menyediakan dukungan keuangan yang memadai dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan jasa penunjang urusan
- 7) Ketidakcukupan anggaran untuk pemeliharaan dapat membatasi kemampuan untuk menjaga dan memperbaiki barang milik daerah secara teratur

Adapun faktor pendorong dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Penerapan teknologi informasi yang memadai telah memudahkan pengukuran dan pemantauan indikator kinerja, yang pada gilirannya mendorong peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja.
 - 2) transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
 - 3) Keberadaan kebijakan dan prosedur kepegawaian yang jelas dan terstandarisasi
 - 4) Penerapan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan
 - 5) Adanya kebijakan yang jelas dan mendukung dalam pengadaan barang milik daerah
 - 6) Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan
 - 7) Pengelolaan inventaris BMD yang baik
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian memiliki 3 (tiga) outcome Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis, Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan dan Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Adapun realisasi masing-masing outcome adalah sebagai berikut:

- a. Capaian outcome Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis pada program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu 99,29%. Realisasi Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan

Agribisnis mendapat skor 95,53 dari target skor 96,21. Kegiatan yang mendukung outcome tersebut yaitu Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian mempunyai indikator sebagai berikut:

- Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi
Capaian kinerja indikator jumlah keluarga miskin terfasilitasi adalah 625 KK atau 100% dari target 625 KK, pada Tahun 2024 terdapat penambahan KK yang terfasilitasi sebanyak 60 KK dari kondisi awal Tahun 2023 565 KK, 60 KK tersebar di 2 Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Bontang.
- Jumlah Nilai Pengeluaran Komoditas Ternak
Capaian kinerja indikator jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak adalah 858 Miliar Rupiah atau 99,77% dari target 860 Miliar Rupiah terdapat penambahan nilai pengeluaran komoditas 25 Miliar Rupiah, yang didapatkan dari komoditas Sarang Burung Walet sebesar 145,795 kg
- Jumlah Produksi Pupuk Asal KOHE
Capaian kinerja indikator jumlah produksi pupuk asal KOHE adalah 328.544 ton dari target 385.000 ton atau 85,34%. Perhitungan Pengolahan Kotoran Hewan (KOHE) didapatkan dari populasi Tahun 2023 dan Pengadaan Ternak Tahun 2024 (Sapi 10.757 ton, Kambing 6.375 ton dan Unggas 311.411 ton)
- Persentase Pemanfaatan Jumlah Biogas
Capaian kinerja persentase pemanfaatan jumlah biogas pada Tahun 2024 adalah 37,04% dari target 37,04% atau 100%. Fasilitasi revitalisasi dan kantong biogas sebanyak 20 unit di 5 kelompok yaitu : KT. Maju Bersama (Paser), KT. Trubus Kencana (Paser), KT. Sabar Subur (Paser), KT. Sinar Tani (Paser), KT. Rawa Buah (Paser)
- Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan
Capaian kinerja indikator persentase kapasitas usaha pengolahan 25% dari target 25% atau 100%. Capaian mengalami peningkatan Tahun 2024 90 pelaku usaha menjadi 115 pelaku usaha.

Beberapa faktor penghambat dalam menjalankan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut:

- 1) Program Pendaftaran Ijin Edar Makanan Dalam (MD)/PiRT sudah tidak memungut biaya dari pelaku usaha sehingga anggaran tidak terealisasi
- 2) Uji Laboratorium Produk Akhir mendapatkan kuota gratis uji lab dari BPOM
- 3) Sulitnya mendapatkan rekomendasi Alat Sarana Pengolahan Daging yang bersertifikat SNI
- 4) Kurangnya Proposal expo/pameran dalam dan luar daerah
- 5) Beberapa kelompok ternak telah berhasil menjual produk ternak mereka, namun masih ada kendala dalam hal pemasaran. Belum adanya offtaker dalam membeli ternak menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh peternak

Adapun faktor pendorong dalam menjalankan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut:

- 1) Dukungan dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dalam mendukung terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana pertanian
 - 2) Dukungan dan Komitmen Kelompok Tani/Ternak Penerima Bantuan sarana dan prasarana pertanian demi kelancaran pelaksanaan kegiatan
- b. Capaian outcome Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan pada program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu 112,19%. Realisasi Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan mendapatkan skor 98,20 dari target skor 87,53. Tercapainya Outcome Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian didukung oleh 4 kegiatan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Kegiatan ini memiliki indikator yang mendukung program sebagai berikut:
 - Realisasi capaian kinerja jumlah bibit sapi yang ber-SKLB

sebanyak 175 ekor dari target 175 ekor atau telah terealisasi 100%. Bibit sapi yang ber-SKLB berada di Kabupaten Paser dan Kabupten Penajam Paser Utara.

- Realisasi capaian kinerja jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nuthfa) sebanyak 113 unit usaha dari target 108 unit usaha atau 104,63% yang tersebar di 7 (tujuh) Kab/Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Paser, Berau dan Samarinda.
 - Jumlah DOC yang kualitasnya dibawah standar mengalami penurunan dari 1,95% menjadi 0,29% dengan realisasi capaian kinerja 185,13%. Data DOC berasal dari Perusahaan Kemitraan dan Peternak di Kab/Kota Kutai Kartanegara, Berau dan Balikpapan.
 - Persentase Akseptor IB dari indukan mencapai 13,43% dari target 12,50% atau realisasi sebesar 107,44%. Realisasi 13,43% merupakan hasil dari 2114 ekor betina produktif yang dilakukan IB dari total indukan 15.743 ekor indukan
 - Pada Tahun 2024 Persentase Calving Rate mencapai 55% dari target 61%. Calving rate adalah persentase keberhasilan kelahiran dari jumlah induk yang dikawinkan atau yang tersedia untuk beranak dalam periode tertentu. Semakin tinggi calving rate, semakin baik tingkat reproduksi ternak. Realisasi Kelahiran pada Tahun 2024 adalah 1635 ekor dari ternak yang kawin IB dan kawin alam.
 - Terdapat 50% closed house yang telah di upgrade pada tahun 2024 dari target 50% atau realisasi capaian 100%. Kandang closed house tersebar di 5 (lima) Kab/kota yaitu Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara dan Samarinda.
- 2) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
- Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan

Realisasi jumlah pengolahan pakan, bank pakan sebanyak 18 unit dari target 18 unit atau 100% yang telah diberikan ke 9 (Sembilan) Desa Korporasi Ternak di 8 (delapan) Kab/kota.

- Luasan HPT

Luasan HPT pada Tahun 2024 realisasi mencapai 98,52 seluas 1.133 Ha dari target 1.150 Ha. Luasan HPT didukung dengan aktifitas penanaman HPT di 9 (Sembilan) Kab/Kota Balikpapan, Samarinda, Paser, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Bontang dan Penajam Paser Utara

3) Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/ berkhasiat/aman realisasi mencapai 29,58% dari target 29,58%. Terdapat 15 unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu dari 60 unit usaha yang dibina atau dilakukan pengawasan.

4) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain memiliki indikator jumlah pengadaan ternak, realisasi kinerja jumlah pengadaan ternak pada tahun 2024 berjumlah 3.527 indukan/bibit dari target 2.700 indukan/bibit. Jenis ternak pengadaan adalah sapi bali sebanyak 1.186 ekor, kambing jawarandu sebanyak 361 ekor, ayam lokal 1240 ekor dan itik 740 ekor. Penyebaran ternak sapi dilakukan di kab/kota Paser, Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Samarinda kepada 42 kelompok ternak, untuk ternak kambing dilakukan penyebaran di kab/kota Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara dan Berau ke 9 kelompok ternak, penyebaran ternak unggas dilakukank kepada 16 kelompok ternak untuk kab/kota Paser, Penajam Paser Utara dan Bontang.

c. Capaian Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mencapai skor 89,12 atau 100,66% dari target skor 88,54. Tercapainya Outcome Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian didukung oleh 1 kegiatan sebagai berikut:

1) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi merupakan kegiatan dari UPTD Pembibitan Hijauan Pakan Ternak (PTHPT) yang mendukung sasaran meningkatnya pangan asal ternak, didukung oleh beberapa indikator sebagai berikut:

- Angka Kelahiran

Realisasi angka kelahiran kinerja tahun 2024 mencapai 38% dari target 25,50%. Selama tahun 2024 di UPTD PTHPT jumlah kelahiran ternak Sapi Bali sebanyak 29 ekor (Jantan 15 ekor dan Betina 14 ekor). Selain ternak sapi terdapat 2 ekor Rusa Sambar Betina, sehingga total kelahiran di UPTD PTHPT berjumlah 31 ekor.

- Angka kematian ternak

Kematian ternak di UPTD PTHPT sebanyak 3,50% dari target 2,13% semakin rendah presentase maka semakin baik realisasi kinerja.

- Calving Interval

Realisasi kinerja calving interval mencapai 14 bulan dari target 17,01 bulan dengan capaian yang sangat baik. Namun implikasi calving interval 14 bulan berarti efisiensi reproduksi kurang optimal, karena sapi tidak beranak setiap tahun. Ideal calving interval adalah ≤ 13 bulan, lebih pendek jarak dua kelahiran berturut semakin baik reproduksi ternak. Faktor yang mempengaruhi jarak beranak adalah post partum estrus (PPE), post partum mating (PPM), dan S/C. Penyebab CI menjadi panjang karena terlambatnya kawin pasca melahirkan, kawin berulang dan kegagalan memelihara kebuntingan hingga lahir. Semakin lama PPE dan PPM serta tingginya nilai S/C maka jarak beranak akan semakin lama pula. Efisiensi reproduksi pada sapi dianggap baik apabila jarak antar kelahiran tidak melebihi 12 bulan atau 365 hari.

- Jumlah PAD

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp204.088.000 di tahun 2024 atau 181% dari target Rp113.000.000 dengan rincian Retribusi Pelayanan tempat Penginapan/Pesanggarahan Villa pada pemakaian mess, gedung pelatihan, guest house, pemakaian rumah dinas sebesar Rp7.600.000, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada retribusi karcis masuk sebesar Rp16.451.000 dan Retribusi Penjualan Hasi Produksi Usaha Pemerintah daerah pada penjualan ternak bibit, ternak non bibit, bibit HMT, dan pupuk kandang sebesar Rp180.637.000

- Jumlah Populasi Ternak/Hewan

Populasi ternak pada tahun 2024 mencapai 187,50 ST dari target 133,70 ST atau realisasi capaian 140%. Pada UPTD PTHPT populasi Rusa Sambar 205 ekor, Sapi Bibit 4 ekor, Sapi Bali 123 ekor, Bull 4 ekor, Ayam (Kampung dan Nunukan) 285 ekor, Ayam (KUB, Merawang, Arab) 865 ekor

- Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi

Produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi sebanyak 273.960 stek/pols tersebar diKab/kota Penajam Paser Utara, Samarinda, Kutai Kartanegara, Paser dan Bontang. Jenis rumput yang didistribusikan antara lain Gama Umami (164.040 stek/pols), Pakchong (50.180 stek/pols), Zanzibar (24.330 stek/pols), Biograss (6.100 stek/pols), Paspalum (600 stek/pols), Rumput Odot (2.550 stek/pols), Brachiaria Humidicola (23.850 stek/pols), Taiwan Grass (250 stek/pols) dan Setaria (2.060 stek/pols).

- Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan

Produksi HPT dan pakan tambahan mencapai 1.501,28 ton dari target 1.500 ton. Produksi HPT yang dihasilkan adalah Rumput BH (1.174.994 kg), Rumput Gajah (29.475 kg), Pakchong, Zanzibar, Gama Umami dan Pakan Olahan.

- Jumlah produksi pupuk

Produksi pupuk pada tahun 2024 mencapai 13,55 ton dari target 10 ton. Produksi pupuk yang dihasilkan berupa pupuk padat, pupuk cair dan pupuk urine

3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Rata-rata capaian pada Program penyediaan dan pengembangan prasarana yaitu 109,44% dengan capaian keuangan mencapai 97,62% atau Rp. 5.079.227.884,00,- dari Rp5.203.314.220,00,-. Capaian outcome dari program ini adalah Tingkat pemenuhan prasarana peternakan dengan realisasi skor 100 dari target 99,54 skor atau 100,46%. Program ini didukung oleh kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan indikator sebagai berikut:

- Jumlah Investasi di Bidang Peternakan

Realisasi jumlah investasi di bidang peternakan sebanyak 3 unit dari target 3 unit atau 100% yaitu dengan PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera dengan komoditas sapi potong, kambing, ayam di Kabupaten Kutai Kartanegara, PT. Multi Harapan Utama komoditas sapi potong di Kabupaten Kutai Kartanegara dan PT. Gunta Samba komoditas sapi potong di Kabupaten Berau.

- Jumlah Nilai Akses pembiayaan

Realisasi akad kredit dan jumlah debitur pada tahun 2024 sub sektor peternakan mencapai 554 debitur dengan akad kredit Rp51.097.900.000. Realisasi capaian mencapai 153 Miliar Rupiah atau 142,99% dari target 107 Miliar Rupiah

- Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan

Kawasan pemanfaatan untuk peternakan mencapai 139 Ha dari target 134 Ha atau 103,73% di 10 (sepuluh) Kab/kota.

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki 3 (tiga) outcome yaitu Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ, Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner dan Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat. Adapun realisasi masing-masing outcome adalah sebagai berikut:

a. Capaian Outcome Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ dan Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat. Realisasi capaian Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ mencapai skor 95,41 dari target 91,79 skor atau 104%. Capaian outcome pada program ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi didukung oleh beberapa indikator sebagai berikut:

- Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM, absolut)

Realisasi capaian wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ yaitu 76 kecamatan dari target 64 kecamatan atau sebesar 119%. Kasus terjadi di Kecamatan Loa Janan, Tenggara Seberang dan Sambutan dan Samarinda Kota, Bontang Barat, Teluk Pandan, Balikpapan Selatan, Tabang, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Kongbeng, Samarinda Ulu, Bontang Utara, Palaran (tw3), Tanjung Redeb, Tumbit Dayak, Bumi Jaya, Waru, Rantau Pulung, Karangan, Bengalon, Kaliorang, Kaubun, Muara Wahau, Tanah Grogot, Samarinda Utara, Samboja.

- Persentase pelayanan kesehatan hewan

Pelayanan kesehatan hewan pada tahun 2024 mencapai 50,13% dari target 43,50% atau 115%. Pelayanan Kesehatan hewan tahun 2024 sebanyak 107.000 layanan.

- Tingkat kesembuhan GANGREP

Realisasi capaian tingkat kesembuhan gangguan reproduksi mencapai 98,40% dari target 76,50% atau 129% dengan total kasus 125 dan tidak sembuh 2 kasus. Pada triwulan I terdapat 14 kasus di Kab/Kota Kutai Kartanegara dan Samarinda dan sembuh seluruhnya. Triwulan II kasus terdapat 39 dan terdapat

1 kasus yang tidak sembuh/culling 1 ekor, kasus terjadi di Kab/kota PPU, Balikpapan, Paser, dan Kukar. Triwulan III terdapat 48 kasus dan sembuh seluruhnya di Kab/kota Paser, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau dan Kukar. Triwulan IV terdapat 24 kasus dan tidak sembuh 1 kasus

2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

- Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis Kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan

Realisasi capaian kinerja mencapai 76,60% dari target 72% atau 106,39%. Persentase kepatuhan terhitung dari jumlah kumulatif iSIKHNAS sebanyak 7.244 dibagi dengan jumlah frekuensi lalu lintas ternak sebanyak 9.457

- Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ

Realisasi capaian penurunan resiko masuknya PHMSZ

adalah 5,28% dari target 3,20%.

b. Capaian outcome Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu 100 dari target 95,11 atau 105,14%. Kegiatan yang mendukung capaian outcome pada program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yaitu:

- 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan indikator Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis dengan capaian 20,39% dari target 20% mendapatkan persentase kinerja 101,95%. Indikator berikut memiliki aktifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penyakit Zoonosis yang dilakukan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sebanyak 21 Kali kepada siswa sekolah dan Masyarakat umum. Aktifitas dilakukan pada 6 (enam) Kab/Kota Samarinda, Kutim, Kubar, Paser, Balikpapan dan

Penajam Paser Utara

2) Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan mempunyai indikator sebagai berikut:

- Jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting
Realisasi kinerja jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting yaitu 27,50 gram per hari dari target 27,50 gram per hari atau persentase 100%. Aktivitas yang dilakukan terkait pemenuhan konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting kepada 2 (dua) Kota adalah pemberian telur ayam di kota Bontang sebanyak 12000 butir, Kota Samarinda 12000 butir. Telur ayam yang didistribusikan selama 60 hari berupa telur rebus masing-masing kota 200 orang, pemberian daging ayam dan daging giling pada 400 orang selama 2 bulan sebanyak 720 kg.
- Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)
Realisasi kinerja Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) adalah 95,23% dari target 81% persentase kinerja 117,57%. Total sampel yang diuji selama Tahun 2024 yaitu 1170 sampel dan 1114 sampel yang memenuhi persyaratan.
- Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif
Realisasi kinerja Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif yaitu 24,78% dari target 24,48% persentase 104,55%. Pemotongan ternak produktif Awal tahun mengalami penurunana dari 455 ekor menjadi 113 ekor.
- Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan
Realisasi kinerja Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan 1,38% dari target 1,32% persentase 104,55%. Pengawasan Kesejahteraan Hewan pada 6 Kab/kota Balikpapan, Kukar, PPU, Paser, Bontang dan Samarinda dari 25 unit usaha yang dilakukan pengawasan terdapat 15 unit yang sudah menerapkan kesrawan.

- 3) Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan memiliki capaian realisasi 75,70 % dari target 58% dengan persentase 130,69%. Rekomendasi pada tahun 2024 yang adalah 854 rekomendasi dan yang disetujui 613 rekomendasi
- c. Capaian outcome Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat mencapai skor 100 dari target 96,68 skor atau 101,34%. Program ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain: Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Program ini juga didukung oleh salah satu kegiatan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator sebagai berikut:
- Peningkatan Jumlah PAD
Realisasi PAD di UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet mengalami peningkatan Rp641.622.000 atau Rp190.000.000 atau sebesar 337,7%. PAD dengan rincian Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp641.622.000 (unggas, hewan besar/kecil, pemakaian kandang observasi rabies, pemeriksaan darah, pemeriksaan PCR (Polymerase Chain Reaction), elisa, pemeriksaan fisik dan kimia pada bahan makanan asal hewan, biosey/identifikasi spesies daging/produk panga nasal hewan, pemeriksaan mikrobiologi, residu, dan sewa alat pengujian spektrofotometer).
 - Peningkatan Kepuasan pelanggan
Capaian kinerja Kepuasan Pelanggan mencapai skor 95,05 dari target 84 skor atau 113,15%. Hasil Survei terkait Persepsi Kualitas Pelayanan diolah secara deskriptif untuk membantu menggambarkan kualitas dengan menghubungkan angka-angka dan variable penilaian. Berdasarkan hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan UPTD. Laboratorium Keswan dan Kesmavet Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada 01 Agustus 2024.

Adapun nilai SPKP yang didapatkan yaitu 3,80 atau 95,05 persen yang masuk dalam kualitas pelayanan sangat baik.

- Peningkatan Ruang lingkup pengujian
Capaian realisasi 39 dari target 39 atau 100% selama tahun 2024. Terdapat penambahan ruang lingkup pengujian selama tahun 2024 sebanyak 5 ruang lingkup pengujian.
- Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ
Realisasi kinerja zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ 23 unit target 23 unit sebesar 100%. Kompartemen bebas kasus PHMSZ 23 unit dilakukan di Kab/kota Balikpapan, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, Samarinda dan Kutai Barat pada komoditi Kambing dan Sapi.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program Perizinan Usaha Pertanian memiliki capaian outcome Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan dengan skor 100 dari target 99,35 dengan persentase 101%. Program ini didukung dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatannya dalam Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator sebagai berikut:

a. Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan

Realisasi capaian jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan sebanyak 122 unit dengan target 114 unit persentase 107%. Peran swasta pada tahun 2024 mengalami peningkatan 18 unit dari total 122 unit. Perusahaan yang berperan dalam bidang peternakan mayoritas adalah Perusahaan tambang Batubara.

b. Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice

Realisasi Capaian Jumlah Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice adalah 32,90% dari target 32,90% persentase 100%. Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dengan 12 Perusahaan/inti bersama 328 orang/plasma.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian memiliki outcome Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan dengan capaian kinerja skor 99,99

dari target 99,74 persentase 100,25%. Program ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian memiliki indikator sebagai berikut:
 - Jumlah pembudidaya unggas
Realisasi capaian kinerja jumlah budidaya unggas sebanyak 49.190 RTUP dari target 49.215 RTUP dengan persentase 99,95%. Pada tahun 2024 pembudidaya unggas yang mendapat pembinaan (RTUP) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Balikpapan sebanyak 60 orang dari 13 kelompok
 - Persentase jumlah peternak milenial
Realisasi capaian jumlah peternak milenial adalah 75% dari target 75% dengan persentase 100%. Aktifitas indikator ini adalah melakukan pertemuan dan pembinaan kepada peternak milenial, pada tahun 2024 peternak milenial berjumlah 81 orang dari 5 Kab/kota (Berau 11 orang, Paser 12 orang, Balikpapan 16 orang, Bontang 30 orang, dan PPU 12 orang)
 - Rasio SD komoditas/ produk peternakan
Realisasi capaian kinerja mendapatkan rasio SD komoditas/produk peternakan 1,15 dari target rasio 1,15 persentase 100%
- b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan memiliki indikator Jumlah Desa Korporasi Ternak dengan realisasi capaian 9 unit PDKT dari target 9 unit persentase 100%. Desa Korporasi Ternak terdapat di 7 Kab/Kota (Balikpapan 1 unit, Berau 1 unit, Kubar 1 unit, Kukar 1 unit, Kutim 2 unit, Paser 2 unit dan Samarinda 1 unit). Pengembangan Desa Korporasi Ternak yaitu 1 (satu) unit DKT terdiri dari 2 kelompok yang berada didesa yang berdekatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kesejahteraan Peternak

Indikator:

Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan

Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Sehingga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat tingkat daya beli petani.

Tabel 2 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 (dua) Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai Konstanta	108,58	104,14	95.91

Pada tahun 2024 indeks yang diterima petani (It) sebesar 123,71 dan indeks yang dibayarkan petani (Ib) sebesar 118,78 sehingga diperoleh NTP tahun 2024 sebesar 104,14. Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini tinggi, karena capaian kinerja mencapai 95,91% artinya sepanjang tahun 2024 petani ternak masih mengalami keuntungan atau masih bisa belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Jika NTP di atas 100, maka peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi dibanding biaya rumah tangga. Sementara jika NTP-nya pas 100, maka peternak tidak untung dan tidak rugi. Jika NTP di bawah 100 peternak mengalami kerugian karena penghasilan dari penjualan produksi peternakan masih lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pokok rumah tangga. Hal yang dapat mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan adalah indeks yang diterima petani (It) dan indeks yang dibayarkan petani (Ib). Jika demand Masyarakat pada produk peternakan meningkat atau tinggi tetapi supply dari peternak rendah maka indeks indeks yang diterima petani (It) akan

meningkat. NTPP Kalimantan timur juga dipengaruhi oleh harga produksi, harga pakan, biaya logistic tinggi karena infrastruktur jalan/transportasi di Kalimantan Timur yang masih sulit antar daerah yang menyebabkan indeks yang dibayar petani (Ib) bisa lebih tinggi dibandingkan indeks yang diterima petani (It).

Tabel 3 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai Konstanta	107,23	104,14	-2,88

*Sumber BPS KALTIM

Pada tabel di atas terlihat adanya penurunan NTP Peternakan pada Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 dari 107,23 menjadi 104,14 atau mengalami penurunan sebesar -2,88%. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan daya beli masyarakat terhadap produk hasil peternakan. Jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir nilai NTP peternakan paling tinggi pada tahun 2019 mencapai 110,95 dan paling rendah pada tahun 2020 mencapai 101,65. Penurunan nilai NTP peternakan ini akibat dari bergesernya minat konsumsi produk segar ke produk beku, harga jual ayam hidup yang mengalami penurunan dan masih dalam transisi wabah Penyakit Mulut dan Kuku yang menyebabkan penurunan produksi dan permintaan produk hasil peternakan.

Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya produksi pangan asal ternak

Indikator:

1. Produksi Daging
2. Produksi Telur
3. Produksi Aneka Ternak Lainnya

Pangan asal ternak sangat penting karena berkontribusi besar terhadap gizi, kesehatan, dan ketahanan pangan Masyarakat. Permintaan pangan asal ternak saat ini cenderung terus meningkat, seiring dengan penambahan

penduduk, perkembangan ekonomi masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan, peningkatan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani. Kurangnya konsumsi protein hewani dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti stunting pada anak, anemia, serta penurunan fungsi kognitif dan fisik. Kesadaran akan pentingnya konsumsi protein hewani juga dapat mendorong peningkatan permintaan terhadap produk peternakan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor peternakan dan kesejahteraan peternak lokal. Kebutuhan pangan asal ternak ini belum semuanya terpenuhi dari produksi lokal sehingga masih mendatangkan daging dari luar wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 4 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Daging
Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Daging	Ton	76.024,70	77.652,26	102,14
2	Produksi Telur	Ton	15.294,50	15.397,23	100,67
3	Produksi Aneka Ternak Lainnya	Ton	174,95	175,61	100,38
Capaian Kinerja Sasaran 2					101,06

*Angka Sementara Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024)

Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini sangat baik, karena capaian rata-rata produksi daging dan telur mencapai 101,06% yaitu produksi daging sebesar 102,14%, produksi telur sebesar 100,67 dan produksi aneka ternak lainnya 100,38%.

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Daging	Ton	76.110,37	77.652,26	2,03
2	Produksi Telur	Ton	15.594,32	15.397,23	-1,26
3	Produksi Aneka Ternak Lainnya	Ton	166,62	175,61	5,40

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa produksi daging mengalami peningkatan sebesar 1.541,89 ton atau 2,03%, dari 76.110,37 ton menjadi 77.652,26 ton sedangkan untuk produksi telur mengalami penurunan (1,26%) atau sebanyak 197,09 ton dari 15.594,32 ton menjadi 15.397,23 ton sedangkan pada produksi aneka ternak lainnya mengalami kenaikan 5,40% sebanyak 159,62 dari 166,62 ton menjadi 175,61 ton.

Produksi daging mengalami peningkatan karena meningkatnya populasi di Kalimantan Timur dari Tahun 2023. Namun produksi daging Kalimantan Timur belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi daging Masyarakat Kalimantan Timur yang mencapai 92.994,89 ton/tahun pada Tahun 2024, sehingga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi daging masih mendatangkan daging dan produk olahan daging dari luar Kalimantan Timur. Keterbatasan lahan untuk pakan dan kawasan peternakan dan adanya penyakit hewan yang dapat mempengaruhi produksi daging.

Produksi telur secara keseluruhan mengalami peningkatan pada tahun 2023 mencapai 15.750,3 ton/tahun dan pada tahun 2024 produksi telur sebesar 15.397,23 ton mengalami penurunan 353,07 ton, sedangkan konsumsi telur mencapai 23.327,25 ton/tahun sehingga produksi telur belum dapat mencukupi konsumsi telur di Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi telur antara lain UMP Kalimantan timur yang tinggi serta topografi lahan yang sulit menyebabkan biaya produksi tinggi sehingga kurangnya minat pengusaha untuk membuka usaha peternakan di Kalimantan Timur, kurangnya lahan pakan dan bahan baku pakan untuk unggas, dan peningkatan penyakit Avian Influenza (AI / Flu Burung) pada tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2023-2024 mengalami kenaikan, pada tahun 2024 mengalami kenaikan produksi aneka ternak (walet, madu kelulut dan maggot) dari 166,62 ton menjadi 175,61 ton atau sebesar 5,40%. Hal ini disebabkan Permintaan sarang burung walet untuk kebutuhan ekspor di Indonesia terus meningkat sehingga mendorong peningkatan produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya populasi ternak yang terbatas bergesernya minat konsumsi dari daging segar ke daging beku,

Tabel 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Sasaran Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Catatan Analisis
		Tahun 2024	Target 2025	Target 2026	Tahun 2024	
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	108,58	109,12	110,00	104,14	
2	Produksi Daging (Ton)	76.024,70	77.773,30	79.717,60	77.652,26	
	Produksi Telur (Ton)	15,294.50	15,799.20	16,352.20	15.397,23	
	Produksi Aneka Ternak Lainnya	174,95	183,70	192,88	175,61	

Analisis Gambaran Tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas berisi tentang pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

- (1). Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- (2). Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (3). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (4). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
- (5). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan dan agribisnis peternakan;

- (6). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
- (7). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- (8). Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- (9). Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (10). Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- (11). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

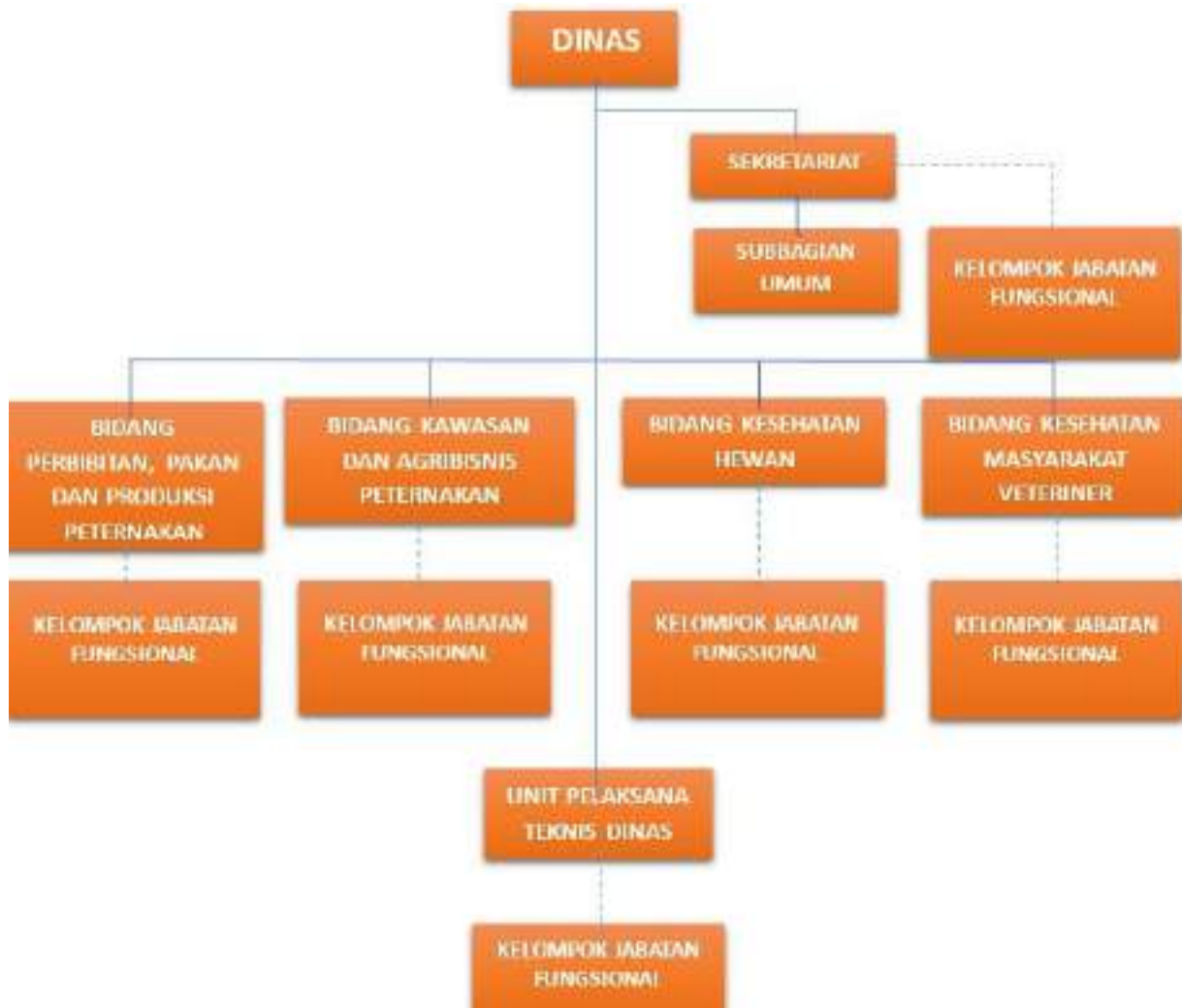
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan::
 - a. Sub Bagian Umum
3. Kepala Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan
4. Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis
5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan
6. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Benih dan Bibit Ternak
 - c. Seksi Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
8. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan

c. Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Gambar Bagan berikut:



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah “Peran sub sektor peternakan dan keswan kurang optimal dalam diversifikasi ekonomi”, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Laju produksi lokal kurang optimal memenuhi kebutuhan pangan asal ternak;

Dinamika pertumbuhan populasi komoditas peternakan di Kalimantan Timur sejak Tahun 2020 sampai dengan 2024 masih relatif rendah, dari 15 komoditas binaan sub sektor peternakan terdapat 8 komoditas dengan tren pertumbuhan positif, dan terdapat 7 komoditas mengalami tren penurunan. Permasalahan pada masing-masing komoditas bersifat spesifik dan perlu strategi yang spesifik dan fokus penyelesaian masalah pada komoditas tersebut. Komoditas peternakan diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar yaitu komoditas Ruminansia, Komoditas Non Ruminansia (termasuk didalamnya aneka ternak). Komoditas ruminansia diantaranya adalah Sapi potong, sapi perah, Kerbau, Kambing, dan domba sedangkan komoditas non ruminansia diantaranya adalah Ayam Potong, Ayam Petelur, Ayam Buras (kampung), Itik, Puyuh, Merpati, Kelinci, Kuda, Babi dan itik manila.

Pertumbuhan negatif banyak dialami pada dinamika populasi komoditas ruminansia terutama pada ternak sapi potong, Sapi Perah dan Kerbau mengalami tren penurunan pada masing-masing 0,45%, -2,58% dan -2,14%, namun terdapat komoditas ternak ruminansia yang mengalami pertumbuhan positif yaitu domba dengan pertumbuhan 18,69%. Sedangkan pertumbuhan positif banyak dialami pada dinamika populasi komoditas non ruminansia ayam petelur, itik dan itik manila berturut-turut 9,69%, 7,26% dan 20,31%, namun juga terdapat penurunan pada komoditas ayam potong -0,56%.

No	Jenis Ternak	Existing Population					r (%)
		2020	2021	2022	2023	2024*	
1	S a p i	119,974	121,290	108,613	57,757	71,949	0.45
2	Sapi Perah	87	76	68	12	69	- 2.68
3	Kerbau	6,552	6,539	6,490	1,325	4,254	- 2.14
4	Kambing	69,929	68,997	58,552	26,978	40,783	4.88
5	Domba	635	694	642	611	935	18.69
6	Babi	83,652	76,292	45,839	18,957	28,832	2.60
7	Kuda	95	143	95	24	94	- 1.52
8	Ayam Buras	4,435,205	4,815,976	5,183,873	686,916	2,569,524	- 1.80
9	Ayam Petelur	1,218,994	1,223,739	1,340,217	1,282,503	1,295,328	9.69

No .	Jenis Ternak	Existing Population					r (%)
		2020	2021	2022	2023	2024*	
10	Ayam Pedaging	59,402,832	60,804,149	61,412,191	54,860,076	55,408,677	- 0.56
11	Itik	254,749	261,263	269,564	47,290	155,377	7.26
12	Kelinci	10,830	9,462	7,931	857	1,006	- 4.58
13	Puyuh	79,222	94,339	88,143	19,518	16,161	3.65
14	Merpati	5,015	5,375	5,678	5,735	5,792	4.65
15	Itik Manila	52,823	64,178	67,608	45,791	21,090	20.31

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Timur, 2024

Untuk dapat memenuhi kebutuhan sapi potong diperlukan populasi dasar sebesar 431.028 ekor, dengan asumsi jumlah Pemotongan per Tahun 53.213 ekor, jika 90% dapat diambil dari populasi maka setiap Tahun dapat dipotong 47.892 ekor. Sedangkan populasi Tahun 2022 sebanyak 108,613 ekor sehingga masih perlu penambahan 322,415 ekor. Produktivitas sapi di Kalimantan Timur dapat digambarkan dengan indikator sebagai berikut:

- Bobot lahir rata-rata Kurang dari 20 kg untuk ternak sapi bali, bobot lahir rata-rata untuk sapi persilangan sebesar 30 kg
- Rata-rata berat hidup sapi (NonBX) yang dipotong 242,15 kg sedangkan rata-rata berat potong sapi Brahman 292,50kg pada Tahun 2021 (BPS-RI, 2021).
- Angka Kelahiran dari total populasi pada Tahun 2017 berturut-turut Sapi 15,91%, Kerbau 28.84%, Kambing 21,02%. (BPS-RI, Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2017, 2017).
- Angka Kematian dari total populasi pada Tahun 2017 berturut-turut Sapi 2,41%, Kerbau 7,27% dan Kambing 7,66% (BPS-RI, Survei.
- Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2017, 2017)Calving interval rata-rata 19,6 bulan. Indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk bobot lahir sapi Bali hingga mencapai 25 kg dan Sapi silangan mencapai 35Kg, untuk bobot potong sapi Minimal 400 kg dan calving interval rata-rata 16- 17 bulan.

b. Tingginya harga pakan dan keterbatasan ketersediaan bahan baku pakan. Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi. Produksi hijauan pakan ternak Tahun 2021 mencapai 36.400 Ton dengan luas kebun HPT 1.367Ha, dengan Produktifitas produksi hijauan mencapai 26,6 Ton/Ha/Tahun. Produktivitas hijauan ini akan meningkat jika dilakukan pemeliharaan/manajemen perawatan HPT yang baik, pemupukan yang baik dan dengan bibit HPT yang berkualitas. Potensi produktivitas rumput gajah dapat mencapai 200-300 Ton/ha/Tahun.

c. Kesulitan peternak dalam mengakses modal dan sistem agribisnis yang tidak kondusif (pasar tidak stabil, ketergantungan terhadap pasar lokal, pergeseran minat ke frozen)

Permasalahan potensi komoditas ternak lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal di Kalimantan Timur menjadi persoalan yang perlu ditangani. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain:

1. Kurangnya perhatian pemerintah. Pemerintah belum memberikan perhatian yang optimal terhadap pengembangan potensi ternak lokal di Indonesia. Sehingga, potensi tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
2. Kurangnya akses pasar. Beberapa komoditas ternak lokal belum memiliki akses pasar yang luas sehingga peternak tidak memiliki insentif yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya.
3. Keterbatasan teknologi dan informasi. Peternak seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak lokal yang mereka miliki.

4. Tidak adanya dukungan keuangan. Peternak kecil dan menengah seringkali kesulitan untuk mendapatkan dukungan keuangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mengembangkan bisnisnya.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat Konsumen belum sepenuhnya menyadari potensi dan nilai dari komoditas ternak lokal sehingga masih lebih memilih komoditas ternak impor.

Kalimantan Timur memiliki potensi ternak lokal seperti Kerbau Kalimantan Timur (Kerbau kalang), Rusa Sambar, Ayam Nunukan dan Aneka Ternak, yang belum di manfaatkan dan di eksplorasi secara maksimal agar dapat menjadi usaha peternakan yang menguntungkan. Aneka ternak yang juga menjadi potensi adalah budidaya Burung Walet, Kelinci dan Lebah Kelulut. Setiap jenis ternak tersebut memiliki keunggulan dan layak untuk dikembangkan dalam mendukung diversifikasi usaha peternakan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- d. Masih adanya penyakit hewan menular dan wabah yang mengancam produktivitas ternak dan kesehatan masyarakat veteriner

Kesehatan hewan masih menjadi perhatian khusus untuk 3 Tahun kedepan, penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) harus terus diupayakan secara masif, agar Kalimantan Timur segera bebas dari wabah tersebut. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan.

Kejadian penyakit baru selain PMK yang harus diwaspadai adalah penyakit African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi, dan Penyakit Lumpie Skin Deasease (LSD). Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Kalimantan Timur terjadiannya masih cukup tinggi seperti BVD, IBR, Pullorum, Anaplasmosis, Tripanosomiasis, Babesiolosis sedangkan penyakit hewan menular strategis yang sangat berpengaruh terhadap keuntungan peternak adalah AI, jembrana, bruceolosis.

Kejadian penyakit Avian Influenza (AI) meningkat pada Tahun 2022

sebanyak 76 kasus dari Tahun 2021 sebanyak 5 Kasus, kejadian penyakit ASF meningkat pada Tahun 2022 sebanyak 1.251 ekor dari Tahun 2021. sebanyak 784 ekor, dan PMK mulai terjadi Tahun 2022 sebanyak 123 ekor. Penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis yang masih banyak terjadi di Kalimantan Timur seperti Rabies, Salmonellosis, fasciolosis dan AI. Keterbatasan biaya, tenaga medis/ paramedik dan peralatan menjadi hambatan dalam penanggulangan penyakit hewan menular tersebut. Disamping pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit hewan menular, juga harus dilakukan penerapan dan replikasi program ISIKHNAS secara rutin dan berkala untuk menganalisis status kesehatan hewan

- e. Keterbatasan lahan untuk peternakan dan infrastruktur yang kurang memadai

Kawasan peternakan yang teralokasi dengan baik merupakan hal yang penting untuk mendukung keberlanjutan produksi hewan ternak yang berkualitas dan berkelanjutan. Di Kalimantan Timur, masih terdapat permasalahan terkait alokasi kawasan peternakan yang memadai. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya alokasi kawasan peternakan di Kalimantan Timur adalah:

1. Kurangnya dukungan pemerintah Kota/Kabupaten. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam alokasi kawasan peternakan. Jika tidak ada dukungan yang cukup dari pemerintah Kota/Kabupaten, maka alokasi kawasan peternakan akan terbatas.
2. Keterbatasan lahan yang tersedia. Di Kalimantan Timur, lahan menjadi faktor pembatas dalam alokasi kawasan peternakan yang memadai. Jika lahan tidak cukup, maka sulit untuk mengalokasikan kawasan peternakan yang optimal.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat. Masyarakat juga memainkan peran penting dalam alokasi kawasan peternakan. Jika masyarakat tidak memahami pentingnya kawasan peternakan yang memadai, maka sulit untuk mengalokasikan kawasan peternakan yang optimal.

Pengembangan Kawasan peternakan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya lahan, ternak, peternak, teknologi, sarana dan

prasarana dalam rangka meningkatkan produktivitas peternakan, pendapatan dan kesejahteraan peternak, serta menciptakan pewilayahan komoditas. Pengembangan Kawasan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal padahal potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur cukup mendukung diantaranya tersedianya lahan eks tambang, adanya perkebunan sawit yang dapat diintegrasikan dengan sapi, dan adanya kebijakan menggunakan perhutanan social untuk masyarakat.

f. Akses Pembiayaan Usaha Peternakan Oleh Masih Rendah

Akses pembiayaan untuk usaha peternakan sering menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para peternak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan permasalahan akses pembiayaan dalam usaha peternakan antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang produk pembiayaan. Banyak peternak yang tidak mengetahui produk pembiayaan yang tersedia untuk usaha peternakan sehingga sulit untuk memperoleh pembiayaan.
- b. Ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh lembaga pembiayaan. Persyaratan yang ketat dari lembaga pembiayaan seringkali sulit dipenuhi oleh para peternak, terutama bagi peternak yang baru memulai usahanya.
- c. Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan yang diperlukan oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan biasanya meminta jaminan dalam bentuk aset yang cukup besar, dan hal ini seringkali menjadi kendala bagi peternak yang belum memiliki aset yang cukup besar.
- g. Kurangnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Keterlibatan swasta dalam pembangunan peternakan di Kalimantan Timur menjadi permasalahan yang masih perlu diperhatikan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya keterlibatan swasta antara lain:

- Kurangnya insentif dari pemerintah untuk menarik investasi swasta. Pemerintah perlu memberikan insentif yang cukup menarik bagi

investor swasta untuk berinvestasi di sektor peternakan.

- Masih rendahnya kualitas infrastruktur dan layanan pendukung di daerah tersebut. Infrastruktur yang buruk dan kurangnya layanan pendukung, seperti listrik, air, dan jalan yang baik, seringkali menjadi kendala bagi para investor swasta.
- Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di Kalimantan Timur. Tanpa adanya data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di daerah tersebut, para investor swasta cenderung enggan untuk berinvestasi.

Perusahaan peternakan swasta di Kalimantan Timur masih sedikit dan didominasi oleh perusahaan ayam pedaging. Perusahaan swasta yang menggeluti usaha ayam pedaging dalam jumlah besar baru 7 perusahaan, selebihnya yaitu perusahaan skala menengah dan kemitraan. Sedangkan untuk perusahaan penggemukan sapi dalam skala besar baru terdapat 1 unit di Kab. PPU. Peran swasta yang masih rendah ini dikarenakan tingginya biaya investasi peternakan di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk peternakan rakyat kesulitan mendapat modal untuk usaha dibidang peternakan.

h. Kapasitas SDM Dan Kelembagaan Peternakan masih rendah

Masalah kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan yang masih rendah merupakan tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan sektor peternakan di Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan antara lain:

- a. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pelatihan dan pendidikan yang memadai sangat penting dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan. Namun, kurangnya fasilitas dan program pelatihan dan pendidikan yang memadai juga menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.
- b. Rendahnya kualitas kemampuan manajemen peternakan. Masalah manajemen peternakan yang buruk dapat menghambat perkembangan peternakan dan menjadi hambatan dalam

meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.

- c. Kurangnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang memadai. Dukungan kelembagaan yang memadai, seperti asosiasi peternak atau kelompok tani, dan regulasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk mendukung pengembangan peternakan. Namun, kurangnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang memadai dapat menghambat perkembangan peternakan dan mengurangi kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.

Penurunan jumlah RTUP pada beberapa komoditas ternak menunjukkan bahwa terdapat penurunan minat usaha terhadap komoditas tersebut dengan berbagai alasan diantaranya adalah minat generasi peternak terhadap usaha peternakan yang turun, kasus penyakit hewan, kelayakan usaha dan permasalahan terbatasnya lahan usaha untuk peternakan.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan

Prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Adapun program prioritas yang ditetapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mendukung program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Program Jospol nomor 1 yaitu Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern dengan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) dan Pembangunan Hatchery Ayam Lokal Unggul. Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) tahun 2026 ditargetkan sebanyak 3 unit dengan dukungan anggaran sebesar Rp 9.900.000.000 dan Kegiatan Pembangunan Hatchery Ayam Lokal Unggul berlokasi di UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan dukungan anggaran sebesar

Rp 5.000.000.000. Berikut Penjabaran Program Prioritas Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2026 mendukung program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Program Jospol nomor 1 yaitu Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern.

Tabel 7 Dukungan Anggaran Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Ternak Tahun 2026

Sasaran	Indikator sasaran	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Program (Rp)
Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP)	106,23 Nilai	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	90,54 Skor	50.057.076
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,08 Skor	81.018.000
			Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	82,02 Skor	1.511.506.612
Meningkatnya Produksi dan Daya Saing Dan Komoditas Peternakan	Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	91030,14 Ton	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi Peternakan	85,57 Skor	5.775.491.806
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas kawasan untuk peternakan	500 Ha	1.672.657.000
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH	94,97 Skor	702.103.506
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Dinas dan Kepuasan Masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,01 Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Layanan Kesekretariatan	92,57 Indeks	107.166.000
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Indeks		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindaklanjuti	100%	

Tabel 8 Dukungan Anggaran Kegiatan Pembangunan Hatchery Ayam Lokal Unggul Tahun 2026

Sasaran	Indikator sasaran	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Program (Rp)
Meningkatnya Produksi dan Daya Saing Dan Komoditas Peternakan	Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	91030,14 Ton	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak	85,95 Skor	228.700.150
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Dinas dan Kepuasan Masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	80,01 Nilai 87 Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindaklanjuti	92,57 Indeks 100%	4.771.299.850

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program-program prioritas Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian Program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan OPD dan telah terakomodasi dalam Rancangan Akhir RKPD tahun 2026.

Tabel 9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur				92.153.979.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur				83.788.529.000
02.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				80.274.948.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				71.355.528.082
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Layanan Kesekretariatan	96,88 Score	40.767.730.466	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Layanan Kesekretariatan	92,57 Indeks	35.385.026.593
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 %				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100%	530.458.392
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	94 %	1.914.622.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran tepat waktu	100%	914.216.667
								Persentase Pelaporan Monev Tepat waktu	100%	
								Persentase dokumen data informasi statistik dan spasial tepat waktu	88,89%	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	670.118.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	233.646.865
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	95.731.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.240.182
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	smd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	95.731.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	smd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	10.458.506

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
3.27.0 1.1.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	smd, bpn, ppu, luarProv	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	382.924.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	smd, bpn, ppu, luarProv	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	73.023.373
3.27.0 1.1.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	670.118.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	582.847.741
3.27. 01.1. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	92 Score	24.018.578.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	3,75%	31.727.498.078
								Persentase ketepatan realisasi angkas per triwulan	93.50%	
3.27.0 1.1.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/Bulan	22.486.881.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 Orang/Bulan	31.194.643.999
3.27.0 1.1.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	765.849.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	447.815.112
3.27.0 1.1.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	95.731.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4.958.667
3.27.0 1.1.02 .06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Smd	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	95.731.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Smd	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.095.300
3.27.0 1.1.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Smd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	1 Laporan	430.790.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Smd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	1 Laporan	59.976.800

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
	Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Triwulanan/Semesteran SKPD		Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
3.27.0 1.1.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Smd	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	143.596.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Smd	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	10.008.200
3.27. 01.1. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	86 Score	478.655.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase inventarisasi BMD	82%	42.460.000
								PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	82%	
3.27.0 1.1.03 .01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	95.731.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.830.000
3.27.0 1.1.03 .02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	95.731.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	15.230.000
3.27.0 1.1.03 .03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	287.193.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	17.400.000
3.27. 01.1. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan kepegawaian	86 Skor	622.251.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan kepegawaian	77 Skor	111.883.000
3.27.0 1.1.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	95.731.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Smd	-	-	-
3.27.0 1.1.05 .03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Smd	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	95.731.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Smd	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.298.000
3.27.0 1.1.05 .05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Smd	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	4 Dokumen	143.596.000	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Smd	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	4 Dokumen	57.185.000

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
			Penilaian Kinerja Pegawai					Penilaian Kinerja Pegawai		
3.27.0 1.1.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Smd	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	287.193.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Smd	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	44.400.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	86 %	1.627.428.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat pengelolaan kehumasan	83%	730.385.785
3.27.0 1.1.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	47.865.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.773.098
3.27.0 1.1.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Paket	382.924.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	84.239.360
3.27.0 1.1.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	95.731.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	104.773.327
3.27.0 1.1.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Smd	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	47.865.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Smd	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Dokumen	19.800.000
3.27.0 1.1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.053.043.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	488.800.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	86 %	95.731.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	95,10 %	93.028.703

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
								Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	96,30 %	
3.27.0 1.1.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Smd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	95.731.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Smd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	93.028.703
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86 %	1.723.160.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	85%	1.765.554.360
3.27.0 1.1.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	95.731.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	16.680.000
3.27.0 1.1.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	478.655.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	435.011.980
3.27.0 1.1.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.148.774.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.313.862.380
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	86 %	1.196.638.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD (Dinas)	96%	530.458.392
3.27.0 1.1.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	201.035.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	279.333.800
3.27.0 1.1.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	430.790.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	273 Unit	128.115.342

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Smd	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	181.889.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Smd	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	55.556.175
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	382.924.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	67.453.075
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	90,54 Skor	2.620.378.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	90,54 Skor	293.402.156
			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	85,57 Skor	25.994.158.000			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan, pakan, dan produksi peternakan	85,57 Skor	25.531.861.959
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Persentase Peningkatan Omset Pemasaran Produk UPH	5%	2.620.378.000	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Persentase Peningkatan Omset Pemasaran Produk UPH	5%	293.402.156
			Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	58,20%						
			Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	725 KK						
			Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	970 Milyar, Rupiah						
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana	4 Laporan	1.572.227.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana	4 Laporan	80.249.904

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
			Pendukung Pertanian					Pendukung Pertanian		
3.27.0 2.1.01 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1.048.151.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4 Laporan	213.152.252
3.27. 02.1. 03	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Calving Rate	62%	6.540.466.000	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Angka kelahiran sapi	61,50%	21.410.992.943
			Persentase Akseptor IB dari Indukan	13,50%				Jumlah sapi bibit yang ber-SKLB	275 Ekor	
			Jumlah bibit sapi ber-SKLB	280 Ekor				Jumlah kelahiran sapi hasil IB	1500 Ekor	
								Jumlah usaha peternak sapi, kambing dan domba	3398 RT	
			Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	1,75%	2.767.120.000			Persentase peredaran DOC dibawah standar	1,8%	2.541.907.160
			Pertumbuhan Upgrade Closed house	72%				Persentase pertumbuhan closed house	64%	
			Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	130 Unit Usaha				Jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	3754 RT	
								Jumlah usaha peternak unggas Non Ras	37661 RT	
						Jumlah usaha peternak petelur	335 RT			
3.27.0 2.1.04 .01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	6.540.466.000	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	21.410.992.943
3.27.0 2.1.04 .04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu,	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen	3 Laporan	2.767.120.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu,	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen	5 Dokumen	2.541.907.160

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
	Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi			Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi				
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi		Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan	42 Unit	3.270.233.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi		Jumlah unit/kelompok pengolahan pakan/bank pakan (unit/kelompok)	95 Unit/Kelompok	1.210.643.602		
			Luasan HPT	1250 Ha	3.773.345.000			Persentase peningkatan mutu keamanan pakan	82%			
								Jumlah identifikasi sumber bahan baku pakan lokal	65 Unit/Kelompok			
								Luas lahan hijauan pakan ternak unggul dalam bentuk polygon	100 Ha			
3.27.02.1.05.04	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	2 Laporan	3.270.233.000	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	2 Laporan	961.480.975		
3.27.02.1.05.05	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar	1 Dokumen	3.773.345.000	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar	2 Dokumen	249.162.627		
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	65%	838.521.000	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		Persentase obat hewan yang beredar yang memenuhi persyaratan mutu	96,09 %	368.318.254		
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	838.521.000	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	368.318.254		

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Pengadaan Ternak	7200 (Indukan/Bibit)	8.804.473.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		-	-	-
3.27.02.1.07.04	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1100 Ekor	8.804.473.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	-	-	-
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,80 Skor	1.397.535.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Luas kawasan untuk peternakan	500 Ha	2.030.051.143
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	158 Ha	1.397.535.000	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah investor usaha peternakan	5 Unit	2.030.051.143
			Jumlah Akses pembiayaan	133 (Rupiah, Milyar)						
			Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	5 Unit						
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1.397.535.000	Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1.835.406.058
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	74.935.210
3.27.03.1.01.13	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	10 Ha	-	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	10 Ha	119.709.875

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet		Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	92,45 Skor	6.708.168.000	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH	94,97 Skor	3.022.595.414
			Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	97,75 Skor	5.066.062.000			Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,08 Skor	1.781.796.219
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Tingkat kesembuhan GANGREP	72 Kecamatan 83%	2.096.303.000 2.515.563.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		persentase wilayah yang terkendali dari PHMSZ dari daerah terdampak Jumlah wilayah yang dilakukan surveillance hewan	96,30% 35 Kecamatan	2.615.245.414
			Persentase pelayanan kesehatan hewan	49%				Jumlah unit usaha peternakan yang menerapkan Biosecurity	280 Kelompok	
			-	-				Persentase hewan yang dilakukan pelayanan	51,13%	
			Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis	26%	628.890.000			Persentase wilayah yang terkendali rabies dari Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR))	82,52%	184.998.154
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	1.362.597.000	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4 Laporan	886.338.600
3.27.04.1.01.04	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	40 Wilayah	733.706.000	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	40 Wilayah	141.993.308
3.27.04.1.01.05	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	2.515.563.000	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	1.586.913.506

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.04.1.01.09	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	628.890.000	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	184.998.154
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	88%	1.677.042.000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Tingkat kepatuhan persyaratan teknis KESWAN (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku	54,48%	407.350.000
			Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	2,40%	419.260.000			Hewan yang terlindungi dari PHMSZ pasca lalu lintas di titik sebar	98,15%	
3.27.04.1.02.04	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM (Laporan)	12 Laporan	1.677.042.000	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM (Laporan)	2 Laporan	407.350.000
3.27.04.1.02.05	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2 Laporan	419.260.000	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	-	-	-
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	91%	2.340.871.000	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat PraNKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	4,74%	1.579.277.884
			-	-	-			Tingkat kesadaran masyarakat yang	50%	

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
								memahami kesejahteraan hewan		
			Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	1,50%	209.630.000			Persentase Peningkatan mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	86,47%	
			Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif	22%	1.048.151.000			Persentase peningkatan penerapan SKSR/AMPM pada sapi betina di RPH	26,37%	
			Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting	33,6 Gram/Hari	209.630.000			-	-	-
3.27.0 4.1.03 .01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	11 Unit	838.521.000	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	-	-	-
3.27.0 4.1.03 .02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2 Laporan	1.680.536.000	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2 Laporan	649.999.871
3.27.0 4.1.03 .04	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	7 Unit Usaha	209.630.000	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	5 Unit Usaha	94.280.203
3.27.0 4.1.03 .05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	10 Unit Usaha	660.335.000	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	2 Unit Usaha	254.999.584

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.0 4.1.03 .06	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	35 Unit Usaha	1.048.151.000	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	10 Unit Usaha	479.999.769
3.27.0 4.1.03 .07	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	100 Orang	209.630.000	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	400 Orang	74.998.577
3.27.0 4.1.03 .08	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	1 Produk	-	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	1 Produk	24.999.880
3.27. 04.1. 04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	65%	628.890.000	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Tingkat kepatuhan persyaratan teknis produk hewan (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku	80,47%	17.520.181
3.27.0 4.1.04 .03	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	70 Dokumen	628.890.000	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	856 Dokumen	17.520.181

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian		Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	99,73 Skor	698.767.000	Program Perizinan Usaha Pertanian		Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	86,96	249.474.106
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	100%	559.014.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Akses Pembiayaan	63 Milyar, Rupiah	249.474.106
			Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	139 Unit	139.753.000			Persentase PKS yang sesuai Kaidah peraturan yang ada	2,90%	
3.27.06.1.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	1200 Dokumen	559.014.000	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	4 Dokumen	141.185.232
3.27.06.1.01.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	139.753.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	108.288.874
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian		Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	99,78 Skor	4.891.372.000	Program Penyuluhan Pertanian		Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	82,02 Skor	2.530.862.100
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Rasio SD komoditas/ produk peternakan	1,139 Rasio	489.137.000	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Informasi Supply Demand Komoditas/Produk Peternak	14 Dokumen	146.575.377
			Jumlah peternak millenial	125 Orang	1.467.412.000			Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem integrasi dengan perkebunan sawit	3 Unit/Klpk	391.407.044
			Jumlah pembudidaya unggas	49530 RTUP						
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	489.137.000	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	146.575.377

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	25 Kelompok	1.467.412.000	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	8 Kelompok	391.407.044
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah Desa Korporasi Ternak	11 Unit	2.934.823.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Persentase Peningkatan kompetensi Peternak	83%	1.684.225.402
								Persentase Kelembagaan Korporasi/Kopera si Tani yang dibentuk dan beroperasi	1,21%	264.560.809
								Jumlah rencana aksi kab/kota untuk mendukung Korporasi ternak	12 Dokumen	44.093.468
3.27.07.1.03.05	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah korporasi petani yang didampingi	33 Unit	1.956.549.000	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah korporasi petani yang didampingi	22 Unit	1.684.225.402
3.27.07.1.03.06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	11 Unit	978.274.000	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	3 Uni	308.654.277
02.02	UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak					UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				9.611.988.891
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Layanan Kesekretariatan	96,88 Score	3.284.200.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92,57 Indeks	1.632.182.037
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100%				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	473.323.821
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	92 Score	262.736.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	3,75%	134.762.000

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.0 1.1.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ppu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	213.473.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ppu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	132.720.000
3.27.0 1.1.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	ppu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	12 Dokumen	49.263.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	ppu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.042.000
3.27. 01.1. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	86 Score	328.420.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase inventarisasi BMD	83,50%	17.420.000
								PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	83,50%	
3.27.0 1.1.03 .01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	ppu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	65.684.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	ppu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.042.000
3.27.0 1.1.03 .02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	ppu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	131.368.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	ppu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	9.316.000
3.27.0 1.1.03 .03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ppu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	131.368.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ppu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.062.000
3.27. 01.1. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan kepegawaian	86 Score	492.630.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83,50%	25.800.000
3.27.0 1.1.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	ppu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	328.420.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	ppu	-	-	-
3.27.0 1.1.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	ppu, smd, bpn, luarprov	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	164.210.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	ppu, smd, bpn, luarprov	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.800.000
3.27. 01.1. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	86%	656.840.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat pengelolaaan kehumasan	83,50%	353.749.052

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.0 1.1.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ppu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.684.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ppu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.425.094
3.27.0 1.1.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ppu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	98.526.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ppu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	37.070.158
3.27.0 1.1.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ppu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	65.684.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ppu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	22.157.800
3.27.0 1.1.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	ppu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	65.684.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	ppu	-	-	-
3.27.0 1.1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	ppu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	361.262.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	ppu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	282.096.000
3.27. 01.1. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	86%	394.104.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	95,10%	18.198.941
								Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	96,30%	
3.27.0 1.1.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ppu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	197.052.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ppu	-	-	-
3.27.0 1.1.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	ppu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	197.052.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin	ppu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	18.198.941

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86%	656.840.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	85%	1.082.252.044
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ppu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	65.684.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ppu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	13.110.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ppu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	262.736.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ppu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	230.102.044
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	ppu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	328.420.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	ppu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	839.040.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	86%	492.630.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	83,50%	473.323.821
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ppu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	65.684.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ppu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	113.785.360
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ppu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	213.473.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ppu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	210.838.461
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	ppu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 Unit	213.473.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	ppu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	148.700.000
3.27.02	Program Penyediaan dan		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap	99 Skor	3.703.469.000	Program Penyediaan dan		Tingkat kemanfaatan sarana terhadap	85,95 Skor	7.506.483.033

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
	Pengembangan Sarana Pertanian		capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Pengembangan Sarana Pertanian		capaian kinerja teknis kegiatan pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak		
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah Populasi Ternak/Hewan	204,5 ST	2.036.908.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah Populasi Ternak/Hewan	160 ST	6.321.606.225
			angka kelahiran	27%				angka kelahiran	41%	
			Calving Interval	16,3 Bulan				Persentase jumlah ternak yang ber-SKLB	5,50%	
			Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	10%				Persentaser Jumlah Mortalitas/Kemati an Ternak/Hewan	3,10%	
			Angaka Mortalitas/Kemati an Ternak/Hewan	1,97%				-	-	
			Jumlah produksi pupuk	25 Ton	1.666.561.000			Jumlah pupuk KOHE	25 Ton	1.184.876.808
			Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	20000 (Stek/pols/kg)				jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	155.000 Stek/pols/k g	
			Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan	1850 Ton				Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan olahan	2.300 Ton	
			Jumlah PAD	RP 127.000.000				-	-	
			3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	ppu			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Laporan	2.036.908.000
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	ppu	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	1.666.561.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	ppu	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	1.184.876.808

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
02.03	UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				4.891.362.000	UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				2.821.012.027
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Layanan Kesekretariatan	96,88 Score	2.934.813.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92,57 Indeks	1.118.314.159
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100%				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	185.295.510
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	92 Score	234.785.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	3,75%	118.405.500
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	190.763.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	115.320.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	44.022.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.085.500
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	86 Score	293.480.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase inventarisasi BMD	83,50%	17.068.677
								PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisas	83,50%	
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	smd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	58.696.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	smd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.869.609
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	smd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	117.392.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	smd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.396.568
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	smd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	117.392.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	smd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	9.802.500

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan kepegawaian	86 Score	440.223.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	146.741.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	smd	-	-	-
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	smd, bpn, luarprov	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	293.482.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	smd, bpn, luarprov	-	-	-
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	86%	528.266.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat pengelolaan kehumasan	83%	156.755.129
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	58.696.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.476.620
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75 Paket	88.044.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	22.001.750
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	58.696.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	9.348.759
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	smd	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	58.696.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	smd	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.960.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	264.134.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	109.968.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase pemenuhan	86%	352.178.000	Pengadaan Barang Milik Daerah		Persentase Pemilihan Penyedia	95,10%	170.363.453

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
	Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		pengadaan barang dan jasa tepat waktu Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	96,30%	
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	smd	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	176.089.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	smd	-	-	-
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	smd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	176.089.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin	smd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	170.363.453
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86%	586.963.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	85%	655.721.400
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	58.696.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	15.200.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	234.785.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	192.681.400
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	293.482.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	447.840.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	86%	498.918.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	96%	185.295.510
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	11 Unit	58.696.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	14 Unit	101.331.200

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	190.763.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	69.978.598
3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	smd	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	58.696.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	smd	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	4.440.000
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	190.763.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	9.545.712
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	99,44 Skor	1.956.549.000	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Tingkat layanan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	94,28 Skor	1.517.402.358
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah Ruang lingkup pengujian	50 Absolut	1.956.549.000	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Persentase keterlambatan penerbitan sertifikat hasil pengujian	2%	1.517.402.358,00
			Nilai Kepuasan pelanggan	88,31 Score				Tingkat Kepatuhan/ketepatan waktu kalibrasi alat Lab	98,20%	
			Jumlah PAD	Rp 235.000.000				Persentase kesalahan hasil uji	1%	
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	600 Dokumen	1.956.549.000	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	500 Dokumen	1.517.402.358,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat khususnya peternak disampaikan ke Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Kabupaten/Kota, yang langsung ditujukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim melalui Rapat Konsultasi dan Koordinasi Teknis Daerah (Rakontekda) dan Musrenbang kabupaten/kota. Usulan-usulan tersebut diseleksi sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan pada Musrenbang Provinsi. Setelah mendapat pagu dana indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim tetap berkoordinasi dengan Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan usulan tersebut.

Tabel 10 Usulan Aspirasi Langsung Kabupaten Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	PROFIL PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
1	2536462	Dr. Drs. Tur Wahyu Sutrisno, M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Tingginya penggunaan pupuk kimia pada lahan pertanian yang menyebabkan turunnya sehingga perlu adanya penyediaan pupuk organik yang lebih banyak yaitu pupuk kotoran sapi (BL)	Kelompok Tani Mega Mulya Desa Bangun Mulya, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
2	2536532	Dr. Drs. Tur Wahyu Sutrisno, M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Tingginya penggunaan pupuk kimia pada lahan pertanian yang menyebabkan turunnya sehingga perlu adanya penyediaan pupuk organik yang lebih banyak yaitu pupuk kotoran sapi (BL)	Kelompok Tani Ongko Makmur Bangun Mulya, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
3	2537336	Dr. Drs. Tur Wahyu Sutrisno, M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)	Tidak tersedianya alat mekanisasi untuk pencacah runmpot dan pelepah sawit (BL)	Desa Gunung Makmur, Provinsi Kalimantan Timur	3	unit

NO	ID USULAN	PENGUSUL	PROFIL PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
4	2531705	H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)	Mobil Klinik Hewan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di Kota Samarinda	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Jl. Biola No. 1, Provinsi Kalimantan Timur	1	unit
5	2530014	Ir. ENDAH ERNANY T, M.Si.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	APBD I - Peningkatan populasi ternak sapi potong untuk peningkatan produksi daging di Kabupaten Berau	Sukan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur	1	Paket
6	2531113	MURNI	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)	DPPP Kota Balikpapan menghadapi tantangan dalam penanganan kesehatan hewan, khususnya hewan liar dan terlantar. Keterbatasan sarana, seperti tidak tersedianya mobil klinik hewan, menghambat upaya respon cepat di lapangan. Pelayanan jemput bola sangat dibutuhkan untuk menjangkau wilayah yang sulit dijangkau serta meningkatkan upaya aktif penanganan dan pengendalian hewan. Ketersediaan mobil klinik hewan mendukung layanan lebih efektif, memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dan keswan	Jl. Syarifuddin Yoes Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan (Halaman Belakang Gedung Kesenian) Balikpapan Telp/ WA : 0822-2666-4430, Provinsi Kalimantan Timur	1	unit
7	2532284	MURNI	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Poktan Sepakat Sukses menghadapi kendala dalam pengadaan bibit ternak akibat keterbatasan modal, bibit harus didatangkan dari luar daerah sehingga menambah biaya. Selain itu, kualitas genetik bibit lokal mulai menurun akibat inbreeding. Dibutuhkan dukungan permodalan dan akses bibit unggul yang berkualitas untuk pengembangan usaha ternak secara berkelanjutan. Selain itu, lokasi peternakan babi ini berada di dekat aliran Sungai Manggar (mengatasi pencemaran DAS Manggar)	Jl. Pasir Putih RT. 37 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
8	2532660	MURNI	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Ba	Poktan Tunas Karya, Beringin Sadar, dan Sumber Rejeki	Poktan Tunas Karya (Jl. Mufakat	50	ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	PROFIL PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
				bi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	mengalami kendala dalam pengembangan usaha ternak sapi akibat keterbatasan modal. Kebutuhan bibit ternak sapi jantan dan betina belum dapat dipenuhi secara optimal karena tingginya biaya sarana produksi peternakan, termasuk bibit ternak, pembuatan kandang dll. Dukungan permodalan dan bantuan sarana sangat dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas produksi/skala usaha dan mendorong kemandirian/kesejahteraan kelompok (penguatan ekonomi petani)	RT.31 Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan); Poktan Beringin Sadar (Jl. Mulawarman RT. 73 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan); Poktan Sumber Rejeki (Jl. Gn. Binjai RT.14 Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur), Provinsi Kalimantan Timur		
9	2532681	MURNI	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Peternak	KWT ER 5 Kelurahan Sepinggan membutuhkan pelatihan budidaya ayam buras untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis menjadi kendala dalam mengelola budidaya secara optimal. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil ternak, sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat peran perempuan dalam sektor peternakan	Perum Daksa RT. 5 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	1	paket
10	2530680	H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Untuk peningkatan produksi ternak di Kota Samarinda mendukung prioritas nasional dan provinsi dalam swasembada pangan	Jl. Biola No.1, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kota Samarinda		
11	2536493	Ade Rianto Embongbulan, S.T. M.Ling	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kurang produktivitasnya ketersediaan Daging dalam mendukung percepatan program swasembada daging di Indonesia sehingga perlu adanya penambahan bibit ternak sapi bali (BL)	Kelompok Tani Subur II Kelurahan Petung, Provinsi Kalimantan Timur		

Tabel 11 Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
1	1539356	Abdul Rahman Agus	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permohonan Bantuan Ternak Sapi "Kelompok Tani (SIDODADI)"	Kampung Linggang Purworejo, Kec Tering Kab. Kutai Barat Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	11	ekor
2	1593177	Abdul Rahman Agus	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permohonan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani "Berkah Jaya"	Kp Linggang Purworejo, Kec Tering Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	10	ekor
3	1605897	Abdul Rahman Agus	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permohonan Bibit Ternak Sapi Kelompok Tani Harapan Bersama	Kampung Sumber Rejo, Kec Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	21	ekor
4	1611254	Abdul Rakhman Bolong, S.Kom	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Desa Loaduri Ilir memiliki kondisi geografis dan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan peternakan, khususnya ternak kambing. Namun, hingga saat ini pengembangan peternakan kambing belum optimal karena keterbatasan modal dan akses terhadap bibit kambing unggul.	Desa Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	1	Paket
5	1615397	Abdul Rakhman Bolong, S.Kom	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Desa Loajanan Ulu memiliki kondisi geografis dan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan peternakan, khususnya ternak kambing. Namun, hingga saat ini pengembangan peternakan kambing belum optimal karena keterbatasan modal dan akses terhadap bibit kambing unggul.	Desa Loajanan Ulu, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	55	Ekor
6	1543089	Ananda Emira Moeis, S.Sn	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Besarnya Kebutuhan Daging Sapi Pada Wilayah Samarinda Dan Sekitarnya Pada Kelompok Tani Berkat Rezeki Bersama	Jln. Padat Karya RT. 73 Kel. Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur	20	Ekor Sapi
7	1543368	Ananda Emira Moeis, S.Sn	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan,	Kurangnya Peningkatan Produksi Hasil Ternak Dan Guna	Jl. Sukorejo Kel. Lempake, Kec. Samarinda Utara,	1	Unit

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
			Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)	Meningkatkan Efisiensi Kerja Pada Kelompok Tani Subur Kel. Lempake	Provinsi Kalimantan Timur		
8	1600791	Arfan, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok tani gunung subur meminta bantuan kambing	Jl. Gunung subur, Dusun Kemuning, Desa Martadinata Kec. Teluk pandan, Provinsi Kalimantan Timur	50	Ekor
9	1600853	Arfan, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani sumber rezeki meminta bantuan kepada pemerintah bantuan sapi	Jl. Kampung Kajang Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan, Provinsi Kalimantan Timur	14	ekor
10	1618738	Arfan, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok tani Masdarling Meminta Bantuan Pengadaan ternak sapi	jl. suka rahmat rt. 09 desa suka rahmat kec. teluk pandan, Provinsi Kalimantan Timur	16	ekor
11	1618755	Arfan, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	kelompok tani meranti meminta bantuan pengadaan bibit sapi bali 50 ekor Terdiri dari sapi betina 45 dan sapi jantan 5 ekor, dalam rangka menyukkseskan program gerakan pembangunan pemerataan dan kemandirian masyarakat kaltim	Desa Marah Haloq kec. Telen, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekot
12	1618928	Arfan, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok tani ternak ingin maju meminta bantuan bibit sapi untuk meningkatkan pendapatan anggota kelompok tani, meminta 50 ekor sapi yaitu 45 ekor sapi betina dan 5 ekor sapi jantan	Jl. AMD rt. 06 desa Kelinjau ulu kec. muara ancalong, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
13	1618973	Arfan, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	kelompok tani lembah hijau meminta bantuan pengadaan hewan ternak sapi untuk meningkatkan perekonomian kelompok	jln. sawitto desa muara bengalon kec. Bengalon, Provinsi Kalimantan Timur	20	ekor
14	1534812	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Ternak Sapi MUTIA JAYA mengajukan permohonan penggemukan ternak sapi	Jl. Poros RT.013 Dusun Tama Mulya Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu, Provinsi Kalimantan Timur	21	ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
15	1534909	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani SALO MANIS MEKAR mengajukan permohonan bantuan Ternak Sapi	Jl. Batu Menetes RT. 17 Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu, Provinsi Kalimantan Timur	15	ekor
16	1535172	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Ternak SIKAMALI mengajukan permohonan ternak kerbau	Jl. KH. Dewantara Rt. 28 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor
17	1535220	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani ALAM CEMARA mengajukan permohonan bantuan sapi	Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja, Provinsi Kalimantan Timur	32	ekor
18	1535259	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani BINA BERSAMA mengajukan permohonan bantuan sapi	Jln. Hidup Baru RT. 019 KM.45 Dalam Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Provinsi Kalimantan Timur	25	ekor
19	1571993	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani KARYA HIDUP BARU mengajukan permohonan bantuan penggemukan sapi untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan memaksimalkan dalam pemenuhan kebutuhan daging.	Jl. Hidup Baru KM. 45 RT. 06 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja, Provinsi Kalimantan Timur	25	ekor
20	1598253	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani PELUNCUR MAKMUR mengajukan permohonan penggemukan ternak sapi	Jl. Awang long RT. 19 Jaya Kecamatan Muara Kaman, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
21	1598259	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Ternak BERKAH JAYA CITRA mengajukan usulan permohonan bantuan ternak sapi	Jl. Pipe Line 14 Citra Tanjung Pude Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor
22	1607001	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Ternak KAMPUNG TERNAK mengajukan permohonan bantuan ternak sapi	RT. 1 Dusun I Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor
23	1607452	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk	Kelompok Tani SEJAHTERA JAYA mengajukan permohonan bantuan pemotong rumput	Jl. Balikpapan - Handil II Pemedas Rt. 05 Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja, Provinsi Kalimantan Timur	13	Unit

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
			Organik, dan Mobil Klinik Hewan)				
24	1615623	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Ternak SAMATURU mengajukan permohonan penggemukan sapi	Jl. Kayu Ara Rt. 035 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	15	ekor
25	1629179	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani "PANTAI INDAH" mengajukan permohonan bantuan pengadaan ternak sapi	Terusan Rt.019 Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu, Provinsi Kalimantan Timur	31	ekor
26	1618189	Budianto Bulang	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	KELOMPOK TANI BERINGIN JAYA MEMBUTUHKAN BIBIT SAPI UNTUK MENINGKATKAN PENGHASILAN DAN PRODUKTIFITAS KELOMPOK	DESA BENUA BARU KEC. MUARA BENGKAL, Provinsi Kalimantan Timur	20	ekor
27	1619213	Budianto Bulang	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	BIBIT TERNAK BABI DAN KANDANG kelompok tani maju jaya	Jl. Tanjung Manis RT.03 Desa Long Tesak, Kecamatan muara ancalong, Provinsi Kalimantan Timur	300	ekor
28	1632333	Budianto Bulang	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	KELOMPOK TANI TENJEU MAKMUR MEMERLUKAN BIBIT SAPI UNTUK MENINGKATKAN HASIL PETERNAKANNYA	JL. TANJUNG MANIS RT. IV DESA LONG TESAK KEC. MUARA ANCALONG, Provinsi Kalimantan Timur	24	ekor
29	1606068	Didik Agung Eko Wahono	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Perlunya Bibit dan Pakan Ayam untuk Kelompok Usaha Ternak Ayam "Ayam Makmur Mandiri"	Jalan Melati RT.13 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	1	ekor
30	1606117	Didik Agung Eko Wahono	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)	Perlunya Kandang Ayam untuk Kelompok Usaha Ternak Ayam "Ayam Makmur Mandiri"	Jalan Melati RT.13 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	1	ekor
31	1617259	Didik Agung Eko Wahono	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bibit ternak sapi	Rt.09 desa bukit raya kecamatan tenggarong sebrang kabupaten kutai kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	200	ekor
32	1616845	Dr. Andi Satya Adi Saputra, Sp.Og., M.Kes	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka	Masih belum terpenuhinya kebutuhan daging sapi di wilayah Samarinda	Kelompok Tani Bina Mulya Jalan Joyo Mulyo Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara,	20	ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
			ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)		Provinsi Kalimantan Timur		
33	1616915	Dr. Andi Satya Adi Saputra, Sp.Og., M.Kes	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Masih belum terpenuhinya kebutuhan daging Sapi di wilayah Samarinda	KELOMPOK TANI JAYA MAKMUR Jl. Joyo Mulyo RT. 13 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur	18	ekor
34	1617031	Dr. Andi Satya Adi Saputra, Sp.Og., M.Kes	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	kurangnya bibit Unggul Hewan ternak	Komunitas Pemuda Tani (KOMPENI) Jl. Letjen R. Suprpto No. 18 RT. 20 Kelurahan Api - Api Kecamatan Bontang Utara, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
35	1617079	Dr. Andi Satya Adi Saputra, Sp.Og., M.Kes	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	masih kurangnya produksi dan Produktivitas peternak Sapi Local maupun yang Peranakan	Kelompok Tani PETANI GEMAS jalan Gunung Lai RT. 27 Kelurahan tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur, ,	30	ekor
36	1617114	Dr. Andi Satya Adi Saputra, Sp.Og., M.Kes	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	kurang terpenuhinya kebutuhan daging kambing di kalimantan timur	Kelompok Tani Gunung Subur Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
37	1595290	Dr. Muhamma d Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Pengajuan Ternak Sapi Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang	Dusun Sidodadi RT 06 Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	35	ekor
38	1633998	Dr. Muhamma d Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Maju Bersama memohon Bantuan Ternak Sapi untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota Kelompoknya	Jl. Erlian RT 04 Desa Sanggulan Kec. Sebulu, Provinsi Kalimantan Timur	24	ekor
39	1568166	Firnadi Ikhsan, S.Pi	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	tingkat ekonomi masyarakat petani/peternak yang masih rendah	Dusun 1 RT.02, Desa Sidomulyo Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	23	Ekor
40	1592827	Firnadi Ikhsan, S.Pi	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	tingkat ekonomi masyarakat petani/peternak yang masih rendah	Jl. Dusun Sidorejo RT.012, Desa Margahayu, Kec. Loa Kulu, Provinsi Kalimantan Timur	20	Ekor
41	1617760	Firnadi Ikhsan, S.Pi	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	masih kurangnya tingkat ekonomi petani	Jl. Kencanaa RT 03 No. 11 Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	20	Ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
42	1617771	Firnadi Ikhsan, S.Pi	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	masih kurangnya tingkat ekonomi petani	Desa Loa Raya RT. 03 RT.47 Kec. Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	25	Ekor
43	1617791	Firnadi Ikhsan, S.Pi	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	masih kurangnya ekonomi masyarakat petani	Jl Danau Lipan RT.09 Desa Muara Kaman Ilir, Muara Kaman, Provinsi Kalimantan Timur	500	Ekor
44	1552774	H. Agus Aras	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	kemiskinan dan kecilnya modal usaha ternak membuat kelompok tani sulit mengajukan kredit atau pinjaman, namun adanya potensi yang besar dalam peternakan sapi	RT.18 DUSUN TANAH DATAR, DESA TELUK SINGKAMA, SANGATTA SELATAN, KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	100	Ekor
45	1554662	H. Agus Aras	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	keterbatasan modal bai kelompok tani, penurunan harga komoditas pertanian dan keterbatasan akses terhadap bibit unggul, diharapkan bantuan ini dapat mewujudkan kemandirian dan berkelanjutan usah ternak sapi kelompok tani	Jalan Manggis RT 04 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	30	Ekor
46	1577075	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	masih kurangnya pemenuhan akan kebutuhan daging sapi serta guna meningkatkan penghasilan kelompok Ternak Maju Jaya desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu	Jalan Poror RT 07 Dusun Pelita Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu, Provinsi Kalimantan Timur	50	59
47	1614227	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Demi meningkatkan perekonomian kelompok Tani Kelansari Berseri Desa Sebulu Ulu mengajukan bantuan bibit Ternak Kambing Boer	Jl.Manunggal RT.02 Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu, Provinsi Kalimantan Timur	20	Ekor
48	1614258	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Mekar Wangi Desa Tani Bhakti memerlukan bantuan bibit ternak sapi bali untuk meningkatkan	Dusun Manunggal Jaya RT.12 Desa Tani Bhakti Kec.Loja Janan, Provinsi Kalimantan Timur	25	Ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
				perekonomian kelompok			
49	1614281	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Pelita Desa Tani Bhakti memerlukan bantuan bibit ternak Sapi Bali untuk meningkatkan perekonomian anggota kelompok	Jl.Pondok Ore RT.07 Dusun Karya Bhakti Desa Tani Bhakti Kec.Loa Janan, Provinsi Kalimantan Timur	25	Ekor
50	1616450	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	masih kurangnya pemenuhan daging sapi lokal di karena msh rendahnya produktifitas kelompok ternak Margahayu Makmur Desa Margahayu	Jalan Poros RT 009 Dusun Sidorejo Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu, Provinsi Kalimantan Timur	100	Ekor
51	1616588	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	masih rendahnya pemenuhan kebutuhan akan daging kambing serta melimpahnya pakan kambing di desa Sarinadi, maka kambing sangat cocok dikembangkan di desa Sarinadi	RT 11 Desa Sarinadi kecamatan Kota Bangun Darat, Provinsi Kalimantan Timur	25	Ekor
52	1595672	H. Andi Faisal Assegaf, S.Sos, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok ternak Maju Jaya Desa Sawit Jaya memohon bantuan pengadaan hewan ternak sapi pada saat Reses karena kelompok tersebut kesulitan dan kekurangan modal untuk membeli hewan ternak.	Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor
53	1595732	H. Andi Faisal Assegaf, S.Sos, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Makmur pada saat Reses meminta bantuan berupa pengadaan bibit ternak sapi, kelompok tersebut kesulitan dan kekurangan modal untuk membeli bibit sapi.	Desa Kayungo Sari, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur	22	ekor
54	1595747	H. Andi Faisal Assegaf, S.Sos, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Harapan Jaya memohon bantuan berupa pengadaan bibit ternak sapi, kelompok tersebut kesulitan dan kekurangan modal untuk membeli bibit sapi.	Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor
55	1595819	H. Andi Faisal Assegaf, S.Sos, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas	Kelompok Tani Makmur Jaya meminta bantuan pengadaan bibit	Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten	30	ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
			s dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	ternak sapi, kelompok tersebut kesulitan dan kekurangan modal untuk membeli bibit sapi.	Paser, Provinsi Kalimantan Timur		
56	1582980	Muhammad Samsun, S.E. M,Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	dalam rangka pengembangan peternakan dan peningkatan produksi peternakan	Palacari Ilir RT. 01, Desa Batu-Batu, Kec. Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	28	ekor
57	1583014	Muhammad Samsun, S.E. M,Si	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)	Pengembangan Peternakan dsan Peningkatan Produksi Peternakan	Palacari Ilir, RT. 01, Desa Batu-Batu, Kec. Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	26	kandang/unit
58	1606611	Muhammad Samsun, S.E. M,Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Memajukan Usaha Kelompok Ternak Sapi	Desa Tanjung Limau, Kec. Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	28	ekor
59	1606649	Muhammad Samsun, S.E. M,Si	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)	Untuk Menunjang Kegiatan dan Pemeliharaan Ternak Sapi oleh Peternak	Kp. Sidodadi RT. 11 Desa Tanjung Limau, Kec. Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	26	kandang/unit
60	1618222	Muhammad Samsun, S.E. M,Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Untuk Membantu Usaha Kelompok Tani (Bibit Ternak Kambing)	Jln. Raden Ismanun, RT. 04 Desa Loh Sumber, Kec. Loa Kulu, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
61	1601212	Salehuddin, S.Sos, S.Fil	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan penggemukan ternak sapi untuk kelompok tani Martadipura Baru Desa Liang Kecamatan Kota Bangun	Jalan Panglima Suta Kanan RT 08 Desa Liang Kecamatan Kota Bangun, Provinsi Kalimantan Timur	16	ekor
62	1570522	Sigit Wibowo, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Dibutuhkan bibit ternak sapi betina dan sapi jantan untuk meningkatkan kesejahteraan petani Mekar Jaya	Jl. Sisinga Magaraja RT 08 Desa Padang Jaya Kec. Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor
63	1613076	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	PERMOHONAN BANTUAN BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK SAPI	Jl. Desa Bangun Mulya Dusun III Desa Bangun Mulya Kec. Waru, Provinsi Kalimantan Timur	1	Paket

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
64	1617815	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Untuk meningkatkan hasil produksi dan meningkatkan pendapatan petani	Jl. Tomat RT. 07 Desa Sebakung jaya Kecamatan Babulu, Provinsi Kalimantan Timur	15	ekor
65	1630002	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permohonan bantuan usaha budidaya ternak sapi	Gang Melati RT. 03 Desa Sidorejo Kec. Penajam , Provinsi Kalimantan Timur	22	ekor
66	1632167	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permohonan bantuan ternak sapi	RT. 01 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam, Provinsi Kalimantan Timur	103	ekor
67	1632178	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	RT. 09 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam , Provinsi Kalimantan Timur	73	ekor
68	1632188	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	Jln. Pariwisata Dusun II Desa Sidorejo kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	49	ekor
69	1632201	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Pengembangan ternak sapi	Jl. Pariwisata RT.01 Desa Sidorejo kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	75	ekor
70	1632216	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	Jl. Gama RT. 03 Kelurahan Sesumpu kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	57	ekor
71	1632228	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan budidaya ternak sapi	Gang Melati RT.03 Desa Sidorejo kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	49	ekor
72	1632271	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	Jln. Gama RT 04 Kelurahan Sesumpu kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	82	ekor
73	1632280	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Pengembangan ternak sapi	Jl. Pariwisata RT 01 Desa Sidorejo kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	42	ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
74	1632303	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Ternak Sapi	Jl. Pariwisata RT. 06 Kelurahan Saloloang kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	46	ekor
75	1633728	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	Jl. Provinsi RT. 02 Km 02 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam , Provinsi Kalimantan Timur	1	Paket
76	1633740	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	Jl. Jambu RT. 01 Kelurahan Sesumpu Kecamatan Penajam , Provinsi Kalimantan Timur	21	ekor
77	1633795	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan Pengembangan Budidaya Ternak Sapi	Jl. Mata Air Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
78	1633910	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	Jl. AMD RT 26 Kel. Penajam Kacamata Penajam, Provinsi Kalimantan Timur	1	paket
79	1634107	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	J. Desa Bangun Mulya Dusun III RT. 10 Kecamatan Waru , Provinsi Kalimantan Timur	1	paket
80	1634113	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	Jln. Mawar RT. 01 Kelurahan. petung kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	1	paket
81	1580626	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok tani Subur Makmur mengajukan permintaan bibit guna menunjang produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	desa rantau panjang kec.Tanah Grogot kab.paser, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
82	1580630	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Harapan Rizki mengajukan bibit sapi guna menunjang produktivitas dan meningkatkan perekonomian warga desa setempat	desa mengkudu kec.batu engau kab.paser, Provinsi Kalimantan Timur	31	ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
83	1580871	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permintaan kelompok tani Generasi Mandiri berupa bibit ternak sapi guna menunjang produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	Desa Modang Kec.Kuaro Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	17	ekor
84	1580874	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Pengajun bibit ternak sapi oleh kelompok tani Jati Mulya guna menunjang produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	Desa Modang Kec.Kuaro Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	28	ekor
85	1580876	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permintaan bibit sapi oleh kelompok tani Serayung Makmur guna mendukung produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	Desa Modang Kec.Kuaro Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	18	ekor
86	1581370	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani "Tani Terpadu" mengajukan permintaan bibit ternak sapi guna menunjang produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	Desa Mengkudu Kec.Batu Engau Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	40	ekor
87	1581382	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Inled mengajukan permintaan bibit ternak sapi guna menunjang produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	Desa Modang Kec.Kuaro Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	17	ekor
88	1581580	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Rukun Karya mengajukan permintaan bibit ternak sapi guna menunjang produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	Desa Padang Pengrapat Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur	20	ekor
89	1581608	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Truna Jaya Mengajukan permintaan bibit ternak sapi guna meningkatkan produktivitas dan perekonomian warga setempat	Desa Padang Pengrapat Kec. Tanah Grogot kab.PASER, Provinsi Kalimantan Timur	20	ekor
90	1616435	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka	Kelompok tani Sinar Pantai mengajukan permohonan bantuan bibit	Desa Lori Kec.Tanjung Harapan Kabupaten.Paser,	13	ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
			ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	ternak sapi guna membantu produktivitas dan meningkatkan perekonomian warga desa	Provinsi Kalimantan Timur		
91	1581380	Yonavia, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	PERMOHONAN BANTUAN BIBIT BABI SIAP KAWIN (INDUKAN BABI)	Jalan AW senopati RT.8 Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	5	ekor
92	1586474	Yonavia, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permohonan Bantuan Bibit Sapi Jantan dan Betina bagi Kelompok Tani Sumber Rojo Koyo	Kampung Sumber Bangun Rt.002 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor
93	1524520	Selamat Ari Wibowo	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok tani SUMBER AGUNG mengajukan permintaan bibit ternak sapi	dusun mukti jaya desa jonggon jaya RT.016 kec.loakulu, Provinsi Kalimantan Timur	23	ekor
94	1524478	Selamat Ari Wibowo	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permintaan bibit ternak sapi oleh kelompok tani JOYO MULYO guna meningkatkan taraf perekonomian warga setempat	dusun karya bhakti desa mulawarman, Provinsi Kalimantan Timur	60	ekor
95	1616987	Dr. Muhammad Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan Bibi Sapi Bali Timbul Mulya	Desa Sukamaju RT.08 Dusun Sidodadi Kec. Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mencermati Rancangan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, dengan tema “Penggerak Utama Kawasan Timur Indonesia”, maka untuk mendukung pencapaian Rancangan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 tersebut maka Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan operasional yang meliputi program prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan yang dituangkan dalam empat program prioritas yaitu:

- Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas
- Program nilai tambah dan daya saing industry
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Program Dukungan Manajemen

Berdasarkan program prioritas tersebut diatas yang terkait dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yaitu:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas bertujuan untuk memenuhi produksi daging secara nasional. Target produksi daging sapi/kerbau pada tahun 2025 sebesar 399,61 ribu ton, target produksi daging ayam tahun 2025 sebesar 4.339,6 ribu ton, target produksi daging itik tahun 2025 sebesar 44,66 ribu ton, target produksi daging babi tahun 2025 sebesar 104,49 ribu ton, target produksi daging kambing tahun 2025 sebesar 42,15 ribu ton, dan target produksi daging domba tahun 2025 sebesar 35,83 ribu ton. Target tersebut merupakan penyediaan protein hewani.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Program nilai tambah dan daya saing industri bertujuan untuk meningkatkan produk ekspor seperti hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, serta bibit dan benih.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian dari pembangunan pertanian oleh karena itu kebijakan pembangunan pertanian dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Tema Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah “Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Mengacu pada kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional serta Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur maka dapat disampaikan pokok-pokok pikiran Renja 2026 sebagai berikut:

1. Tema pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2026 adalah “Kolaborasi dan Penguatan Kelembagaan Peternakan untuk kemandirian protein hewani menuju Generasi Emas”.
2. Kebijakan operasional dengan berpedoman pada program pembangunan yang telah ditetapkan meliputi:
 - a) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan didukung enam kegiatan yaitu pengawasan peredaran sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan provinsi, peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi, pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor dan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.
 - b) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan kegiatan penataan prasarana pertanian didukung sub kegiatan perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian
 - c) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan didukung kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular

lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi, penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan, sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan

- d) Program perizinan usaha pertanian dengan didukung dua kegiatan yaitu penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
- e) Program penyuluhan pertanian dengan didukung dua kegiatan yaitu pengembangan penerapan penyuluhan pertanian dan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis Kawasan
- f) Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan didukung tujuh kegiatan yaitu perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan periode 2025-2019. Rencana Kinerja Tahun 2026 yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut:

Tabel 12 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sub Sektor Peternakan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sub sektor peternakan(%)	1.89

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan produksi pangan asal hewan khususnya daging, telur dan produksi aneka ternak lainnya, maka sasaran rencana kerja tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP)	106,23
2	Meningkatnya Produksi dan Daya Saing Dan Komoditas Peternakan	Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	91030,14
3	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalisme ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Skor) Indeks Kepuasan Masyarakat (indek)	80.01 87.00

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yaitu “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, Kaltim Sukses memiliki makna keberhasilan membangun kaltim sebagai pusat perekonomian baru nasional yang dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan Generasi Emas dimaknai dengan adanya tekad dan semangat yang kuat untuk membangun kualitas SDM Kaltim menjadi sehat, cerdas, berakhlak dan produktif. Visi tersebut di dukung dengan enam misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan Sejahtera
2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat Ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2030 terdapat dua program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Program Gratispol dan Jospol. Dalam Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dilanjutkan dengan musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap Tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terkait dengan program unggulan gubernur dan wakil gubernur program unggulan yang terkait dengan program unggulan tersebut yaitu program jospol no 1. Hilirisasi industri peternakan melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern, Adapun program yang ditetapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mendukung program jospol nomor 1 yaitu Pengembangan Desa Korporasi

Ternak dan Hatchery ternak unggas. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

Program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama 3 Tahun ke depan yang disesuaikan dengan urusan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), dan perubahan terakhir Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur di implementasikan ke dalam 6 (enam) kelompok program, yaitu program yang menunjang penyelenggaraan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan dan program utama yang mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Adapun jumlah Kegiatan yang tercantum dalam rancangan akhir rencana kerja yaitu 21 kegiatan dan 100 sub kegiatan. Berikut Kegiatan dan sub kegiatan penunjang dan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan pada Tahun 2026 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian meliputi sub kegiatan:

- a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
- b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDH Tumbuhan dan Mikroorganisme
- c. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
- d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan

- e. Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor meliputi sub kegiatan:
 - Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
- 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian
- 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
 - Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan
 - Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis
 - b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM
 - c. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, meliputi sub kegiatan:
 - Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
 - Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan
 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan

- Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan
 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi sub kegiatan:
- Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
5. Program Perizinan Pertanian
- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
- Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian
- a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
- Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
- b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawan, meliputi sub kegiatan:
- Pendampingan dan pengawalan korporasi petani
 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
- Kegiatan yang tercakup dalam program di atas merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan administrasi dan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, yang harus dijabarkan menjadi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan memperhatikan isu-isu strategis dari

perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi pembangunan dan arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta pengembangannya. Adapun total anggaran yang diusulkan melalui Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 83.788.529.000,- (Delapan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Rancangan RKPD tahun 2026, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2026, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD 2026. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun rumusan rencana kerja dan pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan perangkat daerah tahun 2026 pada tabel 14

Tabel 14 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur					83.788.529.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur			62.955.879.000
02.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					71.355.528.082	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			54.866.582.800
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Layanan Kesekretariatan	Indeks	92,57		35.385.026.593	Indeks Layanan Kesekretariatan	Indeks	93,03	35.913.070.681
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindaklanjuti	%	100,00		530.458.392	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindaklanjuti	%	100	313.994.100
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran tepat waktu	%	100,00		914.216.667	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran tepat waktu	%	100,00	787.500.000
		Persentase Pelaporan Monev Tepat waktu	%	100,00			Persentase Pelaporan Monev Tepat waktu	%	100,00	
		Persentase dokumen data informasi statistik dan spasial tepat waktu	%	88,89			Persentase dokumen data informasi statistik dan spasial tepat waktu	%	100,00	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	smd	233.646.865	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	265.000.000
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	smd	14.240.182	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	12.500.000
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	smd	10.458.506	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	12.500.000
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	9	smd	73.023.373	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	9	95.000.000

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	smd	582.847.741	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	402.500.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	%	3,75		31.727.498.078	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi (Dinas)	%	3,50	32.052.989.880
		Persentase ketepatan realisasi angkas per triwulan	%	93.50			Persentase ketepatan realisasi angkas per triwulan (Dinas)	%	93,75	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	222	Smd	31.194.643.999	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	225	31.497.989.880
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Smd	447.815.112	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	450.000.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Smd	4.958.667	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	5.000.000
3.27.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	Smd	10.095.300	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	10.000.000
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	Smd	59.976.800	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	80.000.000
3.27.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	Smd	10.008.200	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	10.000.000
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisasi BMD	%	82,00		42.460.000	Persentase inventarisasi BMD	%	84,00	55.062.000
		PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	%	82,00			PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	%	84,00	

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Smd	9.830.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10.332.000
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	Smd	15.230.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	26.460.000
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	Smd	17.400.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	18.270.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Skor	77,00		111.883.000	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Skor	79,00	133.761.057
3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	Smd	10.298.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	10.836.000
3.27.01.1.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	Smd	57.185.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	70.425.057
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	Smd	44.400.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	52.500.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaana kehumasan	%	83,00		730.385.785	Tingkat pengelolaana kehumasan	%	86,00	852.743.631
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	Smd	32.773.098	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	31.500.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	Smd	84.239.360	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	80.811.333
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	Smd	104.773.327	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	109.922.838
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	3	Smd	19.800.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	25	20.361.600

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	488.800.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	610.147.860
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	95,10		93.028.703	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	95,30	16.175.237
		Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	96,30			Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	96,50	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	Smd	93.028.703	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	82	16.175.237
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	%	85,00		1.765.554.360	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	%	86,00	2.014.838.876
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Smd	16.680.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	17.501.400
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Smd	435.011.980	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	457.023.714
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Smd	1.313.862.380	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.540.313.762
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD (Dinas)	%	96,00		530.458.392	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD (Dinas)	%	96,00	313.994.100
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	Smd	279.333.800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	134.659.880
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	273	Smd	128.115.342	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	178	100.000.000
3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	8	Smd	55.556.175	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	8	53.084.220

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.01. 1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	Smd	67.453.075	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	4	26.250.000
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	85,57		25.531.861.959	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	88,14	9.089.518.019
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	90,54		293.402.156	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	92,35	300.000.000
3.27.02. 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Omset Pemasaran Produk UPH	%	5		293.402.156	Persentase Peningkatan Omset Pemasaran Produk UPH	%	5,00	300.000.000
3.27.02. 1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	80.249.904	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4,00	100.000.000
3.27.02. 1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	213.152.252	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	4,00	200.000.000
3.27.02. 1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Angka kelahiran sapi	%	61,5		21.410.992.943	Angka kelahiran sapi	%	62	6.576.495.618
		Jumlah sapi bibit yang ber-SKLB	Ekor	275			Jumlah sapi bibit yang ber-SKLB	Ekor	325	
		Jumlah kelahiran sapi hasil IB	Ekor	1500			Jumlah kelahiran sapi hasil IB	Ekor	1750	
		Jumlah usaha peternak sapi, kambing dan domba	RT	3398			Jumlah usaha peternak sapi, kambing dan domba	RT	3428	
		Persentase peredaran DOC dibawah standar	%	1,8		2.541.907.160	Persentase peredaran DOC dibawah standar	%	1,7	864.500.000
		Persentase pertumbuhan closed house	%	64			Persentase pertumbuhan closed house	%	69	
		Jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	RT	3754			Jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	RT	4167	

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Jumlah usaha peternak unggas Non Ras	RT	37661			Jumlah usaha peternak unggas Non Ras	RT	37681	
		Jumlah usaha peternak petelur	RT	335			Jumlah usaha peternak petelur	RT	355	
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	21.410.992.943	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	6.576.495.618
3.27.02.1.04.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	5	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	2.541.907.160	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	5	864.500.000
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi	Jumlah unit/kelompok pengolahan pakan/bank pakan (unit/kelompok)	Unit/Kelompok	95		961.480.975	Jumlah unit/kelompok pengolahan pakan/bank pakan (unit/kelompok)	Unit/Kelompok	125	746.780.386
		Persentase peningkatan mutu keamanan pakan	%	82			Persentase peningkatan mutu keamanan pakan	%	83	
		Jumlah identifikasi sumber bahan baku pakan lokal	Unit/Kelompok	65		249.162.627	Jumlah identifikasi sumber bahan baku pakan lokal	Unit/Kelompok	80	433.092.019
		Luas lahan hijauan pakan ternak unggul dalam bentuk polygon	Ha	100			Luas lahan hijauan pakan ternak unggul dalam bentuk polygon	Ha	200	
3.27.02.1.05.04	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Laporan	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	961.480.975	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Laporan	2	746.780.386
3.27.02.1.05.05	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar	Dokumen	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	249.162.627	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar	Dokumen	2	433.092.019
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase obat hewan yang beredar yang memenuhi persyaratan mutu	%	96,09		368.318.254	Persentase obat hewan yang beredar yang memenuhi persyaratan mutu	%	96,59	468.649.996
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan	Laporan	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu,	368.318.254	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan	Laporan	4	468.649.996

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Keamanan Obat Hewan yang Beredar			bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv		Keamanan Obat Hewan yang Beredar			
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas kawasan untuk peternakan	Ha	500,00		2.030.051.143	Luas kawasan untuk peternakan	Ha	600,00	2.880.000.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah investor usaha peternakan	Unit	5		2.030.051.143	Jumlah investor usaha peternakan	Unit	6	2.880.000.000
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.835.406.058	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	3	2.380.000.000
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	74.935.210	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	200.000.000
3.27.03.1.01.13	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	10	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	119.709.875	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	10	300.000.000
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH	Skor	94,97		3.022.595.414	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH	Skor	95,47	2.640.000.000
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	91,08		1.781.796.219	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	92,90	500.000.000
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	persentase wilayah yang terkendali dari PHMSZ dari daerah terdampak	%	96,3		2.615.245.414	persentase wilayah yang terkendali dari PHMSZ dari daerah terdampak	%	96,35	2.148.935.891
		Jumlah wilayah yang dilakukan surveillance hewan	Kecamatan	35			Jumlah wilayah yang dilakukan surveillance hewan	Kecamatan	37	
		Jumlah unit usaha peternakan yang menerapkan Biosecurity	Kelompok	280			Jumlah unit usaha peternakan yang menerapkan Biosecurity	Kelompok	290	
		Persentase hewan yang dilakukan pelayanan	%	51,13			Persentase hewan yang dilakukan pelayanan	%	51,63	
		Persentase wilayah yang terkendali rabies dari Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)	%	82,52		184.998.154	Persentase wilayah yang terkendali dari Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)	%	84,46	100.118.400

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	886.338.600	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	4	983.014.256
3.27.04.1.01.04	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	40	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	141.993.308	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	45	167.320.540
3.27.04.1.01.05	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	12	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.586.913.506	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	12	998.601.095
3.27.04.1.01.09	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang	50	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	184.998.154	Jumlah kader zoonosis	Orang	50	100.118.400
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Tingkat kepatuhan persyaratan teknis KESWAN (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku	%	54,48		407.350.000	Tingkat kepatuhan persyaratan teknis KESWAN (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku	%	63,47	491.064.109
		Hewan yang terlindungi dari PHMSZ pasca lalu lintas di titik sebar	%	98,15			Hewan yang terlindungi dari PHMSZ pasca lalu lintas di titik sebar	%	98,7	
3.27.04.1.02.04	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	Laporan	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	407.350.000	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	Laporan	2	491.064.109
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat PraNKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	4,74		1.579.277.884	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat PraNKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	5,52	382.788.600
		Tingkat Kesadaran Masyarakat yang memahami kesejahteraan hewan	%	50			Tingkat Kesadaran Masyarakat yang memahami kesejahteraan hewan	%	60	
		Persentase Peningkatan mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang	%	86,47			Persentase Peningkatan mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang	%	30,77	

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
		memenuhi persyaratan (ASUH)					memenuhi persyaratan (ASUH)			
		Persentase peningkatan penerapan SKSR/AMPM pada sapi betina di RPH	%	26,37			Persentase peningkatan penerapan SKSR/AMPM pada sapi betina di RPH	%	86,97	
3.27.04.1.03.02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	649.999.871	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	2	75.000.000
3.27.04.1.03.04	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	5	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	94.280.203	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	5	62.907.000
3.27.04.1.03.05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	254.999.584	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	2	80.000.000
3.27.04.1.03.06	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	10	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	479.999.769	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	10	80.000.000
3.27.04.1.03.07	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	400	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	74.998.577	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	400	58.626.200
3.27.04.1.03.08	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	Produk	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	24.999.880	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	Produk	1	26.255.400
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat kepatuhan persyaratan teknis produk hewan (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku	%	80,47		17.520.181	Tingkat kepatuhan persyaratan teknis produk hewan (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku	%	83,36	17.093.000

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.04. 1.04.03	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	856	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	17.520.181	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	858	17.093.000
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	86,96		249.474.106	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	88,70	350.000.000
3.27.06. 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akses Pembiayaan	Milyar, Rupiah	63,00		249.474.106	Jumlah Akses Pembiayaan	Milyar, Rupiah	64,00	350.000.000
		Persentase PKS yang sesuai Kaidah peraturan yang ada	%	2,90			Persentase PKS yang sesuai Kaidah peraturan yang ada	%	2,90	
3.27.06. 1.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	141.185.232	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	4	175.000.000
3.27.06. 1.01.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	108.288.874	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4	175.000.000
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	82,02		2.530.862.100	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	85,30	2.880.000.000
3.27.07. 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Informasi Supply Demand Komoditas/Produk Peternak	Dokumen	14		537.982.421	Jumlah Informasi Supply Demand Komoditas/Produk Peternak	Dokumen	14	700.000.000
		Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem integrasi dengan perkebunan sawit	Unit/Klpk	3			Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem integrasi dengan perkebunan sawit	Unit/Klpk	3	
3.27.07. 1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	146.575.377	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	2	200.000.000
3.27.07. 1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	8	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	391.407.044	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	5	500.000.000

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Peningkatan kompetensi Peternak	%	83		1.992.879.679	Persentase Peningkatan kompetensi Peternak	%	85	2.180.000.000
		Persentase Kelembagaan Korporasi/Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	%	1,21			Persentase Kelembagaan Korporasi/Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	%	1.31	
		Jumlah rencana aksi kab/kota untuk mendukung Korporasi ternak	Dokumen	12			Jumlah rencana aksi kab/kota untuk mendukung Korporasi ternak	Dokumen	3	
3.27.07.1.03.05	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	22	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.684.225.402	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	25	200.000.000
3.27.07.1.03.06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	3	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	308.654.277	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	3	1.980.000.000
02.02	UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak					9.611.988.891	UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			5.154.422.800
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	92,57		1.632.182.037	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	93,03	1.286.146.400
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100		473.323.821	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	368.276.400
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	%	3,75		134.762.000	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	%	3,5	130.000.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	ppu	132.720.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	127.500.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	ppu	2.042.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	2.500.000
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisasi BMD	%	83,5		17.420.000	Persentase inventarisasi BMD	%	84	27.000.000
		PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	%	83,5			PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	%	84	

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	ppu	2.042.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.500.000
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	ppu	9.316.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	21.000.000
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	ppu	6.062.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	3.500.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	%	83,5		25.800.000	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	%	84	30.000.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	ppu, smd, bpn, luarprov	25.800.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	30.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaanan kehumasan	%	83,5		353.749.052	Tingkat pengelolaanan kehumasan	%	84	198.000.000
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	ppu	12.425.094	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	14.000.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14	ppu	37.070.158	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	12.000.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	ppu	22.157.800	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	12.000.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	ppu	282.096.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	160.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	95,10		18.198.941	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	95,3	42.000.000
		Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	95,3			Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	96,5	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	ppu	18.198.941	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	42.000.000

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	%	85		1.082.252.044	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	%	86	859.146.400
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	ppu	13.110.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	15.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	ppu	230.102.044	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	180.422.800
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	ppu	839.040.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	663.723.600
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	%	83,5		473.323.821	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	%	84	368.276.400
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	ppu	113.785.360	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	145.000.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	ppu	210.838.461	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	65	170.000.000
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	ppu	148.700.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	53.276.400
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak	Skor	85,95		7.506.483.033	Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak	Skor	88,53	3.500.000.000
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro	Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	160		6.321.606.225	Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	175	1.700.000.000
		angka kelahiran	%	41,00			angka kelahiran	%	43,00	
		Persentase jumlah ternak yang ber-SKLB	%	5,5			Persentase jumlah ternak yang ber-SKLB	%	6,05	

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Organisme Kewenangan Provinsi	Persentaser Jumlah Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	3,10			Persentaser Jumlah Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	3	
		Jumlah pupuk KOHE	Ton	25		1.184.876.808	Jumlah pupuk KOHE	Ton	35	1.800.000.000
		jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	Stek/pols /kg	155.000			jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	Stek/pols /kg	160.000	
		Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan olahan	Ton	2.300			Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan olahan	Ton	2.500	
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12	ppu	6.321.606.225	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12	1.700.000.000
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	ppu	1.184.876.808	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	1.800.000.000
02.03	UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					2.821.012.027	UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			2.934.873.400
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	92,57		1.118.314.159	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	93,03	1.047.916.700
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100		185.295.510	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	236.956.700
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	%	3,75		118.405.500	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	%	3,5	113.000.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	smd	115.320.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	110.000.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	3.085.500	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	3.000.000
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisasi BMD	%	83,5		17.068.677	Persentase inventarisasi BMD	%	84	26.000.000
		PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisas	%	83,5			PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisas	%	84	

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	smd	1.869.609	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	6.000.000
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	smd	5.396.568	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	9.000.000
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	smd	9.802.500	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	11.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaana kehumasan	%	83		156.755.129	Tingkat pengelolaana kehumasan	%	86	176.000.000
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	smd	11.476.620	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	11.000.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	smd	22.001.750	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	20.000.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	smd	9.348.759	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	14.000.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	2	smd	3.960.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	2	4.000.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	smd	109.968.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	127.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	95,1		170.363.453	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	95,3	-
		Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	96,3			Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	96,5	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	smd	170.363.453	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	%	85		655.721.400	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	%	86	732.916.700

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.01. 1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	smd	15.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	14.000.000
3.27.01. 1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	192.681.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	221.500.000
3.27.01. 1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	447.840.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	497.416.700
3.27.01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	%	96		185.295.510	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	%	96	236.956.700
3.27.01. 1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	smd	101.331.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	114.956.700
3.27.01. 1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	68	smd	69.978.598	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	63.000.000
3.27.01. 1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	smd	4.440.000	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	20.000.000
3.27.01. 1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	smd	9.545.712	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	39.000.000
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat layanan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Skor	94,28		1.517.402.358	Tingkat layanan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Skor	94,75	1.650.000.000
3.27.04. 1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase keterlambatan penerbitan sertifikat hasil pengujian	%	2		1.517.402.358	Persentase keterlambatan penerbitan sertifikat hasil pengujian	%	6,50	1.650.000.000
		Tingkat Kepatuhan/ketepatan waktu kalibrasi alat Lab	%	98,2			Tingkat Kepatuhan/ketepatan waktu kalibrasi alat Lab	%	94,75	

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Persentase kesalahan hasil uji	%	1			Persentase kesalahan hasil uji	%	0,90	
3.27.04. 1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	500	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kk, luarPrv	1.517.402.358	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	600	1.650.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program, kegiatan, serta sub kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Rencana Kerja juga berfungsi untuk memperhatikan kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, sebagai upaya mendukung Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Rencana Kerja. Kemudian Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

RENJA TAHUN 2026 DINAS KEHUTANAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah (PD), yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan dan diikuti untuk menjadi Dokumen Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan, dimulai dengan Rencana Awal Renja-PD.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara Subtansial merupakan penerjemahan dari Visi, Misi Kepala Daerah dalam bentuk Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2026.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan berpedoman pada Renstra dan RKPD. Rumusan Program dan Kegiatan yang termuat pada Renja antara lain adalah :

1. Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) tahun sebelumnya dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Program yang tercantum dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagai tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-PD) dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dengan mengarah pada pencapaian sasaran- sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur umumnya dan kehutanan pada khususnya.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025– 2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja Tahun 2026 ini adalah sebagai memberikan arah dan acuan dalam penyusunan kegiatan dan sub kegiatan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan rencana strategis perangkat daerah.
2. Mensinkronisasikan program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan kebutuhan riil SKPD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Memberikan arahan untuk menetapkan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
4. Rencana Kerja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026 dengan tetap memperhatikan RKPD.
5. Rencana Kerja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN berisikan penjelasan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU berisikan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH berisikan uraian rencana kerja perangkat daerah yang tertuang dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaannya.

BAB V PENUTUP berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan evaluasi terhadap beberapa hal antara lain:

1. Pendanaan sebagai dukungan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan
2. Program dan Kegiatan
3. Capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan
4. Hambatan atau kendala yang dihadapi untuk tercapainya target – target yang telah ditetapkan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengelola anggaran sebesar Rp. 630.852.636.087,- (Enam Ratus Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah) terdiri dari APBD Murni sebesar Rp. 282.580.173.316,- (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah), Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 123.132.050.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) sejumlah Rp. 190.932.337.000,- (Seratus Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menerima dana dari Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) yang penggunaannya diarahkan pada kegiatan yang mendukung penurunan emisi karbon seperti Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat yang mengelola kawasan hutan melalui perhutanan sosial adalah sebesar Rp. 34.208.075.771,- (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merencanakan sebanyak 4 Program Teknis dan 1 Program Penunjang (kesekretariatan) total 5 Program dan didukung oleh 14 Kegiatan. Dari Program / Kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah terlaksana dengan prosentase hasil capaian realisasi anggaran sebesar 94,62%. Jika diperinci capaian prosentase berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut:

Sumber Dana	Pagu (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	%
APBD Murni	282.580.173.316,-	267.594.513.509,-	94,70
Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	123.132.050.000,-	113.768.721.346,-	92,40
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	190.932.337.000,-	184.173.231.641,-	96,46
FCPF-CF	34.208.075.771,-	31.356.134.949,-	91,66
Total	630.852.636.087,-	596.892.601.445,-	94,62

Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur serta UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana disampaikan dibawah ini.

PROGRAM	TARGET 2024		REALISASI 2024		%	
	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81	244.102.277.245	85	231.510.791.558	94	95
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.450.000	273.399.865.737	6.293.432,95	256.065.007.308	141	94
	850		1.632,96		192	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	610.540,98	15.237.704.611	610.540,98	14.632.667.676	100	96
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	20.000	93.647.118.074	28.561	90.515.157.849	142,81	97
	20		21		105	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	10.104	4.465.670.420	10.104	4.168.977.054	100	93

Tingkat capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator kinerja adalah Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan dengan target 81% sudah terealisasi dengan hasil 85% atau capaian sebesar 105%. Perolehan Skor didapatkan dari pengisian kuesioner yang diisi secara online dan offline oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur atau melalui scan QR Code atau lembar kuesioner yang tersedia di kantor lingkup Dinas Kehutanan yang bisa diakses setelah selesai mendapatkan pelayanan. Kuesioner yang diisikan mengandung 9 unsur pelayanan yaitu Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya / Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; Saran dan Masukan.

Program Penunjang Pemerintah Daerah pada Dinas Kehutanan terdiri dari 8 kegiatan dan telah dilaksanakan dengan tidak ada kendala. Capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 231.510.791.558,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau 95% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 244.102.277.245,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Seratus Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah). Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebanyak 8 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,7% dan rata – rata capaian anggaran sebesar 95%. Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tabel dibawah ini.

No	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Indikator	Target			Realisasi			Capaian %	
				Kinerja		Keuangan	Kinerja		Keuangan	Kinerja	Keuangan
1.	3.28.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70	Nilai AKIP	1.859.551.000	68	Nilai AKIP	1.792.409.673	100	96
2.	3.28.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12	Laporan	132.236.427.872	12	Laporan	127.622.099.127	98	97
3.	3.28.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	68	Laporan	1.042.153.000	68	Laporan	1.011.104.086	97,06	97

No	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Indikator	Target			Realisasi			Capaian %	
				Kinerja		Keuangan	Kinerja		Keuangan	Kinerja	Keuangan
4.	3.28.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	230	Laporan	6.099.491.170	220	Laporan	5.865.161.741	100	96,87
5.	3.28.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	16.075.606.603	12	Bulan	15.467.081.817	96	95,01
6.	3.28.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	912	Unit	28.762.318.017	867	Unit	27.500.885.212	100	98,89
7.	3.28.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	29.412.428.573	12	Bulan	27.087.260.577	86	91,30
8.	3.28.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	649	Unit	28.614.301.010	618	Unit	25.164.789.325	97	81,86

2. Program Pengelolaan Hutan

Program Pengelolaan Hutan merupakan program yang dilaksanakan serta diintervensi bersama oleh beberapa bidang di Dinas Kehutanan sesuai dengan tupoksinya yaitu Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Bidang Pengelolaan DAS RHL dan Bidang Perlindungan KSDAE. Indikator program ada 2 yaitu 1). Produksi Hasil Hutan Kayu, satuannya M3; 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu, satuannya Ton. Capaian realisasi kinerja indikator program Produksi Hasil Hutan Kayu dari target 4.450.000 M3 terealisasi sebesar 6.293.432,95 M3 atau sebesar 141%; Capaian indikator program Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari target 850 Ton terealisasi sebesar 1.632,96 Ton atau sebesar 192%. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 256.065.007.308,- (Empat Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau sebesar 94% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 273.399.865.737,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian program tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Kegiatan	Indikator	Target			Realisasi			Capaian %	
				Kinerja		Keuangan	Kinerja		Keuangan	Kinerja	Keuangan
1.	3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	40	Dokumen	8.667.665.071	20	Dokumen	8.157.630.091	50	94
2.	3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17	Ha	15.630.820.246	5.189.869,46	Ha	14.842.344.765	100,71	95
3.	3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	2.421,20	Ha	98.910.094.352	2.374,20	Ha	93.784.978.286	98,06	95

No	Kode	Kegiatan	Indikator	Target			Realisasi			Capaian %	
	Rekening			Kinerja		Keuangan	Kinerja		Keuangan	Kinerja	Keuangan
4.	3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179	Ha	55.193.033.705	105	Ha	51.572.177.534	0	93
5.	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	56.688.148		10.959.121.800	55.584.674		10.817.861.925	98,05	99
6.	3.28.003.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	21.013	M3	2.055.735.100	4.514	M3	1.957.153.277	21,48	95
7.	3.28.003.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	102	Jumlah SK	2.545.319.250	102	Jumlah SK	2.523.426.120	100	99

Faktor pendukung pencapaian indikator program pengelolaan hutan sebesar 141% dan 192% adalah:

1. Dilakukannya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Unit Manajemen terkait aspek produksi, lingkungan dan sosial
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada pemegang Izin terkait penatausahaan hasil hutan
3. Adanya akses ke sistem pelaporan (SI-PUHH, SI-CAKEP, SI-HHBK, SI-PNBP, SIMPONI) sehingga produksi Hasil Hutan unit manajemen dapat terpantau melalui sistem

Pencapaian indikator program pengelolaan hutan yang diperoleh dari Produksi Hasil Hutan Kayu dan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu berkontribusi langsung terhadap pendapatan domestik regional sub sektor kehutanan untuk Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, hal tersebut diatas juga memberikan pengelolaan hutan berkelanjutan yang dijalankan di Provinsi Kalimantan Timur yang dibuktikan dari hasil produksi kayu dan non kayu yang terus berjalan hingga saat ini.

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan KSDAE beserta UPTD yang ada di tingkat tapak. Indikator program adalah Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola seluas 610.540,98 Ha tercapai 100% atau terealisasi seluas 610.540,98 Ha. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 14.632.667.676,- (Empat Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh

Enam Rupiah) atau sebesar 96% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 15.237.704.611,- (Lima Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah). Capaian target program dapat dikatakan berhasil mengingat indikatornya adalah luasan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola mencapai luasan yang ditargetkan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program adalah sesuai table di bawah ini:

No	Kode Rekening	Kegiatan	Indikator	Target			Realisasi			Capaian %	
				Kinerja		Keuangan	Kinerja		Keuangan	Kinerja	Keuangan
1.	3.28.004.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola	610.540	Ha	14.532.199.611	610.540	Ha	13.936.788.301	100	96
2.	3.28.004.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species)	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	96.044.550	100	96
3.	3.28.004.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	100	Ha	605.505.000	100	Ha	599.834.825	100	99

Faktor pendukung pencapaian target program ini adalah:

1. Terjadi Penurunan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh curah hujan di wilayah Kalimantan Timur cukup tinggi.
2. Dukungan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan /lahan dan perlindungan hutan cukup memadai dan dimanfaatkan secara optimal.
3. Telah dilakukan peningkatan kapasitas SDM Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Brigdalkarhutla, melalui pelatihan, bimtek dan sosialisasi.
4. Telah dibentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) di bawah binaan UPTD KPHP/HL/Tahura sebagai partisipasi masyarakat.
5. Telah dilakukan patroli perlindungan hutan secara berkala sebagai tindakan pencegahan.

Berdasarkan pencapaian target yang telah disampaikan diatas pada program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem berdampak pada menurunnya angka kejadian kebakaran hutan, terbangunnya kolaborasi antara para pihak dalam menjaga kawasan hutan dalam pencegahan deforestasi atau degradasi hutan yang berkontribusi langsung terhadap penurunan emisi di sektor kehutanan.

4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dilaksanakan oleh bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan beserta UPTD lingkup Dinas Kehutanan. Program ini memiliki indikator Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat dari target yang ditetapkan 20.000 Ha terealisasi sebesar 28.561 Ha atau sebesar 143% serta indikator Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dari target 20 kelompok usaha terealisasi sebanyak 21 Kelompok Usaha atau sebesar 105%. Capaian realisasi keuangan program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur bersama UPTD yang berada ditingkat tapak sebesar Rp. 90.515.157.849,- (Sembilan Puluh Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 97% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 93.629.118.074,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah). Kegiatan yang mendukung program adalah seperti ditabel di bawah ini:

No	Kode	Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi			Capaian %		
	Rekening			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan		
1	3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	92	Kelompok	93.629.369.262	90	Kelompok	90.515.157.849	98	97

Faktor pendukung pencapaian target program ini adalah:

1. Adanya Roadmap Perhutanan Sosial
2. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) yang di SK kan oleh Gubernur Kaltim
3. Program ini sebagai program prioritas pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan

Pencapaian Target pada program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan berdampak pada semakin luasnya akses pengelolaan yang diberikan kepada masyarakat yang tentunya diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Melalui hasil usaha dari 266 kelompok usaha yang telah terbentuk.

5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan DAS RHL dengan indikator Persentase Tutupan Lahan Meningkat dengan target 14% dan capaian sebesar 14.12% atau 101%.

Capaian realisasi keuangan program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah sebesar Rp. 4.168.977.054,- (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 93% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.465.670.420, (Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah). Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagaimana tersebut dibawah ini

No	Kode	Kegiatan	Indikator	Target			Realisasi			Capaian %	
	Rekening			Kinerja		Keuangan	Kinerja		Keuangan	Kinerja	Keuangan
1	3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	2	DAS	4.465.670.420	2	DAS	4.168.977.054	100	93

Faktor pendukung pencapaian target program ini adalah:

1. Mitra pembangunan melakukan penanaman sehingga memberikan kontribusi terhadap tutupan lahan

Faktor penghambat pencapaian optimal adalah:

1. Penanaman yang dilakukan mitra kerja tidak dilakukan berbarengan, sehingga pelaporan tidak bersamaan.

Dampak yang dihasilkan dari keberhasilan pencapaian target pada program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah meningkatnya luas tutupan lahan di provinsi Kalimantan Timur, hal tersebut berkontribusi terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur dan mengurangi luas lahan kritis.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD (Tabel T-C.29.)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Renja Th 2025	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Th 2024	Realisasi Renja Th 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Th 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pilihan									
	Bidang Urusan Kehutanan									
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Kayu (M3); Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	4.475.000 950	M3 Ton	- 730	5.050.000,00 1.078,00	5.548.203,23 147,67	109,89 2,00	4.475.000 2,00	100,00 111,41
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	57	Dokumen	-	30	30	100,00	19	33
3.28.03.1.01.001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	6	Dokumen	-	6	1,00	16,67	2	33
3.28.03.1.01.002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	42	Laporan	-	12	9,00	75,00	14	33
3.28.03.1.01.003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	262	Laporan	-	780	705,00	90,38	262	100
3.28.03.1.01.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	30	Laporan	-	0	-	-	10	33
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	60	Dokumen	-	28	32,00	114,29	20	33
3.28.03.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	87	Dokumen	-	30	29,00	96,67	29	33
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17	Hektar	-	1743159.879	1.012.545,00	58,09	5.153.407,17	100
3.28.03.1.03.001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	26	Dokumen	-	24	26,00	108,33	26	100
3.28.03.1.03.002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Provinsi Secara Berkala	27	Dokumen	-	7	8,00	114,29	9	33
3.28.03.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	271	Laporan	-	0	-	-	90	33
3.28.03.1.03.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	12	Unit Manajemen	-	79	32,00	40,51	4	33
3.28.03.1.03.006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi Yang di Sahkan	150	Dokumen	-	0	-	-	50	33
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3600	Hektar	-	2206	2.186,00	99,09	1200	33
3.28.03.1.04.001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	48	Dokumen	-	13	13,00	100,00	16	33
3.28.03.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	3600	Hektar	-	2143	2.101,00	98,04	1200	33
3.28.03.1.04.005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	103	Unit	-	100	100,00	-	103	100
3.28.03.1.04.008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	129	Laporan	-	51	51,00	100,00	43	33
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179,13	Kasus	-	50	39,00	78,00	7929179,13	100
3.28.03.1.05.001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	938660	Hektar	-	10000	10.000,00	100,00	938660	100
3.28.03.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	3061190	Hektar	-	4436121	3.995.012,00	90,06	3061190	100
3.28.03.1.05.003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	18	Laporan	-	6	6,00	100,00	6	33
3.28.03.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	166	Laporan	-	156	155,00	99,36	156	94
3.28.03.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pengulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/pengulangan kebakaran hutan dan lahan (Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun)	355	Laporan	-	355	343,00	96,62	354	100
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang Dikelola	5153407,17	Unit	-	6	4,00	66,67	5153407,17	100
3.28.03.1.06.003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	27	Unit	-	9	7,00	77,78	9	33
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Hasil Produksi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas 6000m3 per tahun yang aktif	63000	Meter Kubik	-	16	15,00	93,75	21000	33
3.28.03.1.07.001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	144		-	48	48,00	100,00	48	33
3.28.03.1.07.002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	153	Unit Manajemen	-	38	37,00	97,37	51	33
3.28.03.1.07.003	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	39	unit Manajemen	-	13	13,00	100,00	13	33
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Terverifikasi	20 10	Jumlah SK Sertifikat	-	141	159,00	112,77	20 10	100
3.28.03.1.09.001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit. Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	26	ngada/Penge	-	57	45,00	78,95	23	88
3.28.03.1.09.002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	60	Sertifikat	-	20	20,00	100,00	20	33
3.28.03.1.09.005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	240	Laporan	-	95	98,00	103,16	80	33

03.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang Dikelola	930.008	Hektar	-	<1,5	0,12	100,00	930.008	930.008	100
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas kawasan hutan TAHURA Provinsi yang dikelola	64814,98	Hektar	0	64814	64814	100,00	64814,98	64814,98	100
3.28.04.1.01.002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi kegiatan pengamanan kawasan TAHURA	36	Laporan	-	12	12,00	100,00	12	12	33
3.28.04.1.01.005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	750	Laporan	-	1	1,00	100,00	250	250	33
3.28.04.1.01.008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	9	Laporan	-	5	5,00	100,00	3	3	33
3.28.004.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Ular yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade in Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	6	-	1	1,00	100,00	2	2	33	
3.28.004.1.02.001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	3	-	1	1,00	100,00	1	1	33	
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian	Luas KBEP yang dikelola	865193	Hektar	-	7022,21	6.050,00	86,16	545726	545726	63
3.28.04.1.03.004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Ditangani	150	Hektar	-	14	2,00	14,29	50	50	33
3.28.04.1.03.005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok / Masyarakat yang diberdayakan	1710	Laporan	-	10	10,00	100,00	570	570	33
3.28.004.1.03.006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100000	Hektar	-	6000	6.000,00	100,00	100000	100000	100
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	60.000	Hektar	-	32000	32.441,00	101,38	32000	32000	11
		2. Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	60	Kelompok	-				20	20	33
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	290	Laporan	-	172	170,00	98,84	90	90	31
3.28.05.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh yang dilakukan Peningkatan Kapasitas	308	Kegiatan	-	129	53,00	41,09	266	266	86
3.28.05.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	183	KTH/KUPS	-	118	118,00	100,00	168	168	92
3.28.05.1.01.003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	60000	Hektar	-	58541	57.758,00	98,66	60000	60000	100
03.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub Das yang Dujekika	358.150,00	%	-	13,98	14,40	103,00	354.150,00	354.150,00	100
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota	3	Laporan	-	21	21,00	100,00	1	1	33
3.28.06.1.01.001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan	2	Dokumen	-	1	2,00	200,00	1	1	50
3.28.06.1.01.002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dab Koordinasi Optimalisasi DAS	9	DAS/SUB DAS	-	10	10,00	100,00	4	4	44
3.28.06.1.01.004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	900	Laporan	-	1	1,00	100,00	300	300	33
3.28.06.1.01.005	Pengembangan Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	3	Laporan	-	1	1,00	100,00	1	1	33
03.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85	%	-	82	82,00	100,00	81	81	95
		2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100	%	-				100	100	100
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100	%	-	70	70,00	100,00	100,00	100,00	100
3.28.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	-	8	8,00	100,00	4,00	4,00	33
3.28.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA SKPD	6	Dokumen	-	0	-	-	2	2	33
3.28.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	6	Dokumen	-	0	-	-	2	2	33
3.28.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	6	Dokumen	-	0	-	-	2	2	33
3.28.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Dokumen	-	6	6,00	100,00	4,00	4,00	33
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	%	-	252	252,00	100,00	100	100	100
3.28.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550	Orang	-	12	12,00	100,00	550	550	100
3.28.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	203	Dokumen	-	12	12,00	100,00	203	203	100
3.28.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian	37	Dokumen	-	12	24,00	200,00	37	37	100
3.28.01.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	-	4	4,00	100,00	4	4	100
3.28.01.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	Dokumen	-				1	1	33
3.28.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66	Bulan	-	24	24,00	100,00	66	66	100
3.28.01.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	Dokumen	-	0	-	-	1	1	33
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang telah ditatausahakan	100	%	-	68	68,00	100,00	100	100	100
3.28.01.1.03.001	Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	Laporan	-	3	3,00	100,00	2	2	33
3.28.01.1.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKP	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	-	-	0	-	-	4	4	33
3.28.01.1.03.003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	21	Laporan	-	3	3,00	100,00	7	7	33
3.28.01.1.03.004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	39	Laporan	-	10	10,00	100,00	13	13	33
3.28.01.1.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	102	Laporan	-	24	24,00	100,00	34	34	33
3.28.01.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	3	Laporan	-	11	11,00	100,00	1	1	33

3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	%	-	230	230,00	100,00	100	100	100
3.28.01.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	254	Paket	-	453	435,00	96,03	254	254	100
3.28.01.1.05.003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	-	0	-	-	1	1	33
3.28.01.1.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	32	Laporan	-	17	17,00	100,00	32	32	100
3.28.001.1.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	Dokumen	-	1	1,00	100,00	2	2	33
3.28.01.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	363	Orang	-	182	162,00	89,01	363	363	100
3.28.01.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek / Pelatihan	29	Orang	-	23	19,00	82,61	29	29	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100	%	-	12	12,00	100,00	100	100	100
3.28.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	61	Paket	-	12	12,00	100,00	61	61	100
3.28.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	164	Paket	-	12	12,00	100,00	164	164	100
3.28.01.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	98	Paket	-	12	12,00	100,00	98	98	100
3.28.01.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan	53	Paket	-	12	12,00	100,00	53	53	100
3.28.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	69	Paket	-	12	12,00	100,00	69	69	100
3.28.01.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	86	Paket	-	12	12,00	100,00	86	86	100
3.28.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364	Paket	-	12	12,00	100,00	364	364	100
3.28.01.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	Paket	-	0	-	-	1	1	33
3.28.01.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18	Paket	-	12	12,00	100,00	6	6	33
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100	%	-	957	912,00	95,30	100	100	100
3.28.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	-	89	88,00	98,88	1	1	50
3.28.01.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Mebel	45	Unit	-	26	27,00	103,85	45	45	100
3.28.01.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	214	Unit	-	720	703,00	97,64	200	200	93
3.28.01.1.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14	Unit	-	1	1,00	100,00	14	14	100
3.28.01.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	Unit	-	1	1,00	100,00	7	7	100
3.28.01.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Unit	-	324	322,00	99,38	5	5	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	%	-	12	12,00	100,00	100	100	100
3.28.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	91	Jan / (Lapora	-	12	12,00	100,00	91	91	100
3.28.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	208	Jan / (Lapora	-	12	12,00	100,00	208	208	100
3.28.01.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14	Jan / (Lapora	-	12	12,00	100,00	14	14	100
3.28.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	205	Jan / (Lapora	-	12	12,00	100,00	205	205	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100	%	-	649	618,00	95,22	100	100	100
3.28.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	unit	-	21	21,00	100,00	6	6	100
3.28.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	699	Unit	-	710	691,00	97,32	699	699	100
3.28.001.1.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	Unit	-	2	2,00	100,00	2	2	100
3.28.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	945	Unit	-	690	671,00	97,25	945	945	100
3.28.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	Unit	-	11	20,00	181,82	14	14	100
3.28.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	Unit	-	7	7,00	100,00	25	25	100
3.28.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	-	5	4,00	80,00	3	3	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Dinas Kehutanan didukung oleh 4 Bidang Teknis, 17 UPTD KPHP, 2 UPTD KPHL dan 1 UPTD Tahura Bukit Suharto. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung; memiliki peran sebagai unit pelaksana teknis di tingkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan produksi / lindung di wilayah kerjanya. Tugas utamanya meliputi perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan kegiatan- kegiatan yang terkait dengan hutan produksi / lindung dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem hutan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. UPTD berperan penting dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Dinas Kehutanan memiliki sumber daya aparatur Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2024 memiliki jumlah pegawai sebanyak 530 orang. Personel Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD dilihat dari tingkat pendidikan maka kualitas SDM tersebut dapat memenuhi dengan kebutuhan dan kualitasnya, hal ini terlihat bahwa 15,28% berpendidikan Pasca Sarjana; 43,77% berpendidikan Sarjana; 10 % berpendidikan Diploma; 29,25 % berpendidikan SLTA dan 1,13 % berpendidikan SLTP, dan 0,57 % berpendidikan SD.

Pelaksanaan tugas tersebut Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang undangan; pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan provinsi, pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di provinsi, pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan, pelaksanaan pengelolaan DAS lintas kabupaten / kota dan dalam kabupaten / kota di provinsi dan koordinasi kebijakan kehutanan di provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dilakukan melalui program – program yang telah disusun. Hasil dari pelaksanaan program tersebut diukur dengan indikator kinerja.

Capaian kinerja program Pengelolaan hutan dengan indikator yaitu indikator produksi hasil hutan kayu dengan satuan M³ hingga akhir tahun 2024 dapat dicapai sebesar 141% dari target 4.450.000 M³; capaiannya adalah sebesar 6.293.432,95 M³. Capaian ini didapatkan dari hasil produksi kayu alam dan kayu tanaman oleh pemegang ijin / unit manajemen (UM). Indikator kedua adalah produksi hasil hutan bukan kayu dengan satuan Ton hingga akhir tahun 2024 dapat dicapai sebesar 192%. Capaian ini didapatkan dari produksi hasil hutan bukan kayu oleh pemegang ijin / unit manajemen (UM) yaitu sebesar 1.632,96 Ton, capaian ini lebih besar dari target yaitu 850 Ton.

Capaian program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan indikator kerusakan hutan dalam kawasan hutan dengan satuan % hingga akhir tahun 2024 dapat dicapai sebesar 0,17% atau sebesar 83% dari target kurang dari 1%. Capaian ini didapatkan dari kerusakan hutan yang terjadi baik disebabkan oleh kebakaran hutan juga oleh perambahan yang dibandingkan dengan luas kawasan hutan. Capaian target ini bersifat negatif atau semakin kecil semakin baik capaiannya.

Capaian program pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan dengan indikator luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat sampai dengan akhir tahun 2024 dapat dicapai sebesar 142,8% atau sebesar 28.561 Ha dari target 20.000 Ha. Sedangkan kelompok usaha masyarakat yang berhasil ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2024 sebanyak 21 kelompok atau sekitar 105% dari 20 kelompok yang menjadi target untuk ditingkatkan kapasitasnya. Kelompok usaha yang ditingkatkan berasal dari Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan rincian 2 Kelompok usaha KTH kelasnya ditingkatkan dari pemula ke madya, sedangkan pada kelompok usaha perhutanan sosial terdapat 19 kelompok usaha ditingkatkan kelasnya menjadi gold yang semula berada di kelas blue dan silver.

Capaian ini didapatkan dari luas areal yang diusulkan oleh masyarakat disekitar hutan untuk dikelola dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh kelompok usaha masyarakat baik dari Kelompok Tani Hutan atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, dan diusulkan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk difasilitasi usulannya ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Capaian program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sampai akhir tahun 2024 dengan indikator luas DAS dan Sub DAS yang dikelola seluas 10.104 Ha sesuai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Tabel T-C.30.)

No.	Indikator	SPM/Std Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th n-2 (2024)	Th n-1 (2025)	Th n-0 (2026)	Th n+1 (2027)	Th n-2 (2024)	Th n-1 (2025)	Th n-0 (2026)	Th n+1 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial (%)			75,00	75,75	78,78		163,64	75,75	0,88		
2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)			<1	<1	<1		0,16	<1	<1		
3	Persentaseluas lahan kritis yang direhabilitasi			89,00	93,07	97,14		108,84	24,20	97,14		
4	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)			1,49	1,5	1,51	1,52	1,49	1,5	1,51	1,52	
5	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			n/a	0,533	0,547	0,5555	n/a	0,533	0,547	0,5555	
6	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)			1	6	6	6	1	6	6	6	
7	Persentase Peningkatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)			10	10	10	10	10	10	10	10	
8	Persentase Tutupan Lahan Sempadan Sungai (%)			n/a	0,2	0,23	0,47	n/a	0,2	0,23	0,47	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tingkat regional, beberapa isu terkait pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur secara umum menarik untuk ditelaah yakni transformasi ekonomi berbasis sumberdaya alam tidak terbarukan menjadi ekonomi berbasis agroindustri yang lebih ramah lingkungan, serta program pembangunan rendah emisi yang dimaksudkan untuk memberikan dukungan penuh terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) bersama masyarakat internasional lainnya. Selain itu, beberapa isu strategis sektor kehutanan juga telah dirumuskan untuk region Kalimantan dan dipaparkan saat kegiatan konsultasi publik mengenai rancangan *background study* Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Bidang Kehutanan tahun 2020- 2024, antara lain: (1) pengelolaan hutan di Indonesia hingga saat ini belum menerapkan prinsip lestari; (2) program kehutanan yang sesuai kondisi dan paradigma saat ini adalah operasionalisasi KPH; dan (3) tujuan pembangunan kehutanan adalah jasa lingkungan dan konservasi. Secara lebih rinci, isu strategis yang menjadi salah satu landasan penyusunan kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

(1) disharmoni antara UUD 1945 dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan masyarakat; (2) posisi strategis Kalimantan Timur akan menjadi fokus pembangunan wilayah Timur Indonesia memerlukan dukungan kebijakan geopolitik nasional; (3) keterbatasan sumber dana pembangunan karena ketidakseimbangan antara kemampuan sumberdaya alam terhadap penerimaan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan; (4) transformasi basis ekonomi wilayah dari sumberdaya alam tidak terbarukan ke hilirisasi industri menuju pembangunan berkelanjutan memerlukan dukungan modal investasi dan infrastruktur serta kedaulatan ekonomi daerah; (5) terbukanya pasar bebas ASEAN berdampak terhadap investasi daerah dan kerakyatan, serta persaingan tenaga kerja bersertifikat; (6) peningkatan penduduk berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan dan energi; pemulihan kerusakan ekosistem membutuhkan biaya besar; dan (7) lemahnya aksesibilitas ekonomi antar wilayah produksi terhadap pusat pelayanan.

Berdasarkan telaah terhadap Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Program Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019–2023 yang didukung dengan telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015–2019, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) tahun 2015 – 2035, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), secara umum terdapat isu strategis utama yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya, adalah:

1. Belum optimalnya perencanaan dan pemanfaatan hutan yang menyebabkan banyak potensi hasil hutan belum tertangani dengan baik.

Sebagaimana sasaran pembangunan daerah yang ditargetkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kemasyarakatan. Secara konvensional, Produk Domestik regional Bruto (PDRB) sering digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan jumlah nilai rupiah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian daerah untuk waktu satu tahun. Dalam kaitannya dengan PDRB, pengelolaan sumberdaya hutan nasional di Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan lebih dari empat dekade dan sempat menjadi sumberdaya alam yang memiliki kontribusi sebagai penyumbang devisa nomor satu di Kalimantan Timur pada era 1970-an. Namun saat ini, kontribusi terbesar terhadap PDRB Kalimantan Timur telah diduduki oleh sumberdaya lainnya yakni minyak dan gas bumi, batubara dan perkebunan kelapa sawit. Menghadapi tantangan mendatang, pengelolaan sumberdaya hutan seluas lebih dari 8 juta hektar hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kerakyatan sebagaimana juga dirumuskan pada Misi 2, melalui peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Terkait dengan belum optimalnya pemanfaatan produk hasil hutan kayu dan jasa lingkungan maka perlu dilakukan langkah-langkah pro-aktif dengan memaksimalkan peran dan pelibatan mitra pembangunan yang lebih dulu *concern* terhadap isu ini termasuk UPT KLHK bidang kelitbangan dan perguruan tinggi

khususnya Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Pengembangan produk non kayu telah dilakukan di kedua instansi namun juga masih terkendala untuk membuat produk tersebut menjadi ekonomis dan dapat diterima pasar. Isu inovasi dan diversifikasi produk hasil hutan ini sepatutnya perlu dielaborasi dan dimasukkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2024 - 2026. Menjawab tantangan tersebut di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memerlukan regulasi yang mengatur mengenai pembagian manfaat sumberdaya alam yang menguntungkan bagi daerah penghasil. Regulasi yang dimaksud di atas seringkali tidak hanya pada sektor kehutanan namun terkait dengan sektor lainnya. Terkait dengan peningkatan nilai tambah hutan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan perlu mengusulkan adanya regulasi tentang pembatasan penjualan kayu bulat (log) ke luar Provinsi Kalimantan Timur yang dibarengi dengan pengembangan industri hilir perkayuan baik secara tradisional maupun modern yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di provinsi ini. Regulasi lain juga perlu dilakukan antara lain mengusulkan revisi PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi yang telah diubah melalui PP No 58 Tahun 2007 namun belum memenuhi semangat UU tentang pemerintahan daerah. Seiring pelaksanaan pembangunan daerah, pertambahan penduduk dan kebutuhan ruang untuk aktivitas manusia justru menekan keberadaan sumberdaya alam, khususnya hutan.

Meningkatnya populasi manusia sekitar dan di dalam kawasan hutan dapat menjadi penyebab utama dari kerentanan penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat. Terlebih lagi keterlibatan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan masih relatif rendah karena pengelolaan hutan selama ini masih belum memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan baik keterlibatan dalam izin pemanfaatan yang telah ada maupun pengelolaan mandiri melalui skema berbasis masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa lingkungan dan wisata alam.

Kinerja Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dalam 5 tahun terakhir belum mampu mewujudkan target Program Perhutanan Sosial yang diindikasikan seluas 660.782 hektar di provinsi ini. Menjawab permasalahan tersebut, pengelolaan hutan di tingkat tapak yang dilakukan oleh Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur baik melalui UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) baik produksi (KPHP) dan lindung (KPHL) maupun UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) hendaknya didorong agar implementasi Perhutanan Sosial ini dapat diwujudkan secepatnya sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Berbagai skema Perhutanan Sosial dipersiapkan untuk peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, baik kemitraan dengan KPH dan pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan, maupun skema HKm, HTR, HD, dan Hutan Adat.

Pengelolaan hutan di Provinsi Kalimantan Timur masih dipandang belum lestari karena masih banyaknya permasalahan-permasalahan mendasar yang belum terselesaikan dengan baik, baik oleh pemerintah daerah maupun pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Salah satu permasalahan yang dialami adalah belum optimalnya pemantapan kawasan hutan dan penyelesaian konflik tenurial. Ketidakpastian status dan fungsi kawasan hutan di tingkat tapak menyebabkan semakin banyaknya ketidakcocokan antara fungsi kawasan dengan izin pemanfaatan/penggunaan kawasan (adanya lokasi perkebunan dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam) dan terjadinya tumpang tindih perizinan (IUPHHK-HA dan Tambang Batubara), serta adanya konflik batas kawasan hutan dan perkampungan masyarakat. Kondisi itu diperparah dengan pengelolaan kawasan yang belum optimalnya penerapan multisistem silvikultur berdasarkan kondisi bentang alam (*landscape*) serta pemanenan hasil hutan kayu yang tidak ramah lingkungan.

Berbagai permasalahan itu akhirnya juga berkontribusi pada meningkatnya kerusakan kawasan hutan baik penurunan kualitas hutan (degradasi hutan) maupun kehilangan kawasan hutan (deforestasi) akibat alih fungsi kawasan hutan menjadi peruntukan lain. Degradasi hutan dan deforestasi menjadi isu strategis dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak yang kini menjadi topik pembahasan dan sorotan dunia internasional. Secara umum, degradasi hutan dan deforestasi selalu dikaitkan adanya konversi kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan (kebun sawit, tambang, pertanian dan perkampungan), perambahan hutan, illegal logging, serta pengelolaan hutan oleh pemegang izin yang belum menjaga kelestarian dan

keseimbangan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan hutan oleh Pemerintah Pusat/Daerah hingga saat ini bersifat pelayanan administrasi perizinan dan tanggungjawab pada pengelolaan di tingkat tapak sangat lemah. Komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi hutan, dan peningkatan stok karbon di kawasan hutan (REDD+) yang disampaikan pemerintah Indonesia kepada dunia internasional hendaknya dijadikan focus utama dalam pengelolaan hutan di Kalimantan Timur. Diperlukan inovasi kebijakan ramah lingkungan yang mengatur tentang penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara lestari berbasiskan masyarakat untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Salah satu upayanya adalah moratorium konversi kawasan hutan untuk peruntukan lain sekaligus mengoptimalkan lahan tidur (semak belukar) sebagai prioritas untuk pembangunan perekonomian daerah; perumusan sistem silvikultur yang tepat berdasarkan kondisi bentang alam; dan penerapan teknik *reduced impact logging* (RIL) untuk pemanenan hutan. Bahkan saat ini, teknik RIL telah dikembangkan menjadi RIL carbon atau RIL-C untuk diterapkan oleh seluruh unit manajemen hutan. Upaya lain yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) memanfaatkan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam untuk Dana Reboisasi (DBH SDA DR). Untuk itu perlu memaksimalkan peran unit pengelola hutan tingkat tapak atau UPTD KPHP/KPHL/Tahura. Nama dan letak KPH bisa dilihat dari gambar 1 berikut:

2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat disekitar hutan terhadap program-program pembangunan sektor kehutanan yang dapat memberdayakan masyarakat.

Program perhutanan sosial dan kemitraan ¹sesungguhnya bukan merupakan program baru. Dari 13,911 juta hektar target pemerintah dalam RPJM tahun 2020 - 2024, seluas 881.198,03 hektar alokasi lahan untuk program ini ada di Provinsi Kalimantan Timur, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.1 Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten / Kota	Status dan Fungsi Kawasan Hutan				Jumlah Total
		HL	HP	HPK	HPT	
1	Berau	32.499,50	26.527,29	11.075,89	2.696,79	72.799,48
2	Kota Balikpapan	2,40	124,16			126,56
3	Kota Bontang	3,56		55,76		59,32
4	Kota Samarinda		48,54			48,54
5	Kutai Barat	40.629,49	6.140,85	71,34	3.156,99	49.998,67
6	Kutai Kartanegara	12.747,54	46.472,89	1.772,25	15.701,26	76.693,94
7	Kutai Timur	83.251,87	16.198,87	360,47	57.995,50	157.806,71
8	Mahakam Ulu	421.682,98	7.301,90		49.991,74	478.976,63
9	Paser	11.549,02	8.743,92	3.017,76	20.743,55	44.045,25
10	Panajam Paser Utara		642,93			642,93
Jumlah Total		602.366,37	112.201,35	16.353,47	150.276,84	881.198,03

Sumber: Keputusan MENLHK RI Nomor 6642 Tahun 2024 tanggal 29 April 2024 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS Revisi IX)

Realisasi Laporan perkembangan perhutanan sosial s/d Bulan Desember Tahun 2024 sebesar 330.184,61 hektar yang dikelola oleh 179 Unit Pengelola (Kelompok Perhutanan Sosial) dimana unit pengelola sebelumnya sejumlah 137 Unit, dengan jumlah penambahan sebanyak 42 unit, dimana luas sebelumnya adalah sebesar 287.068 hektar bertambah menjadi 330.184,61 Hektar. Yang dimaksud dengan Kelompok Perhutanan Sosial terdiri dari Kelompok Tani Hutan, Lembaga Desa atau Koperasi. Sampai dengan saat ini Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari: Hutan Desa semula seluas 246.733 hektar sebanyak 60 Unit menjadi seluas 285.690,94 dikelola oleh 84 Unit, Hutan Kemasyarakatan (HKm) semula seluas 15.693 hektar sebanyak 52 Unit menjadi seluas 19.877,45

¹ Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup terbaru No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016

Hektar yang dikelola oleh 70 Unit, sedangkan untuk realisasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 16.215,48 hektar dikelola oleh 18 Unit, Kemitraan seluas 629,89 hektar dikelola oleh 4 Unit serta Hutan Adat seluas 7.770,85 hektar dikelola oleh 2 Unit belum ada penambahan.

Tabel 2.3.2 Perkembangan Perhutanan Sosial Per KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur s.d. 2024

NO.	KABUPATEN	JUMLAH					LUAS (HA)					TOTAL PER-KABUPATEN	
		HD	HKm	HTR	KEMIT RAAN	HA	HD	HKm	HTR	KEMIT RAAN	HA	Jumlah	LUAS (HA)
1	BALIKPAPAN	-	12	-	-	-	-	1.897	-	-	-	11	1.897
2	BERAU	20	7	1	3	-	103.633	119,21	1.096	425	-	22	98.927
3	KUTIM	7	10	10	1	-	26.910,75	3.136	10.556	109	-	22	38.772
4	KUKAR	25	32	4	-	-	68.906	8.575	3.574	-	-	50	67.153
5	KUBAR	11	1	3	-	1	27.204	-	989	-	48,85	12	28.242
6	MAHAKAM ULU	15	-	-	1	-	40.743	-	-	96	-	13	40.839
7	PASER	6	5	-	-	1	1.550	361	-	-	7.722	6	9.633
8	PPU	-	1	-	-	-	-	1605	-	-	-	1	1.605
9	BONTANG	-	2										
JUMLAH TOTAL KALTIM		60	52	18	5	2	246.733	15.693	16.215	630	7.770,85	137	287.068

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan, 2024

3. Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan

Lahan kritis masih banyak ditemui di Provinsi Kalimantan Timur. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah ini, diprediksi luas hutan kritis Kaltim seluas 274.477 hektar. Seluas 272.450,31 hektar dikelompokkan sebagai kritis, dan seluas 1.196,30 hektar sangat kritis.

Tabel 2.3.4 Luas Penyebaran Lahan Kritis Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi	Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak kritis	Grand Total
Kalimantan Timur	5.271.198,41	272.450,31	3.512.659,59	1.196,30	3.618.279,64	12.675.784,59
Total						12.675.784,59

Sumber: Keputusan Dirjen PDASRH MENLHK RI No.SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis

Dengan kemampuan melakukan RHL per tahunnya berkisar antara 6.000 hektar – 10.000 hektar, kami berpandangan bahwa kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan masih menjadi kegiatan prioritas dimasa depan. Meskipun kami menyadari bahwa upaya penurunan lahan kritis sepenuhnya tidak dapat disandarkan hanya kepada program/kegiatan RHL. Namun perlu juga diimbangi dengan kebijakan- kebijakan yang mengurangi tingginya tingkat konversi hutan dan lahan.

Tabel 2.3.5 Data Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Per-Kabupaten/Kota Tahun 2024

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi
1.	KALIMANTAN TIMUR	Bearu	189
2.		Kutai Timur	17.555
3.		Kukar	15.804
4.		Kubar	1.926
5.		Mahakam Ulu	463
6.		Bontang	-
7.		Balikpapan	-
8.		PPU & Paser	2.215
9.		Samarinda	13
JUMLAH			38.165

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, 2024

Upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas hutan dan lahan melalui kegiatan RHL seringkali masih menemui beberapa kendala-kendala. Seperti saat ini, terbatasnya kewenangan provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan RHL hanya di luar kawasan hutan ²dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Ini membuat ruang kami menjadi sangat terbatas, sementara kami memiliki sejumlah KPHP/KPHL yang wilayah kerjanya adalah kawasan hutan³.

² Sesuai UU No.24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

³ Kewenangan Pusat ada di dalam kawasan

Hal lainnya adalah berkenaan dengan kontribusi sektor kehutanan dalam program penurunan emisi gas rumah kaca. Memang jika merujuk kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan⁴ bahwa pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) serta penyusunan profil emisi GRK sepenuhnya merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Namun dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari instansi teknis terkait, termasuk Dinas Kehutanan. Kontribusinya sangat diharapkan dalam upaya-upaya adaptasi dan mitigasi sektor berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan RHL bisa dikatakan sebagai kegiatan utama sektor berbasis lahan untuk mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca. Tidak saja berkontribusi dalam perbaikan kualitas tutupan lahan, namun juga membantu untuk mengurangi jumlah karbon yang lepas di atmosfer, dan menyimpannya di dalam vegetasi. Dikarenakan peran gandanya tersebut, maka untuk mendukung program penurunan emisi GRK tersebut kami perlu melakukan pengukuran, verifikasi dan pelaporan kegiatan RHL tersebut.

4. Belum optimalnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistemnya (KSDAE)

Upaya untuk menurunkan intensitas terjadinya gangguan terhadap kawasan hutan berupa aktivitas illegal logging/perambahan, kebakaran hutan, dan gangguan terhadap tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi yang terjadi di wilayah yang menjadi kewenangan kami, seperti di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto dan juga di wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim.

a) Kebakaran Hutan

Upaya pencegahan dan deteksi dini kebakaran hutan salah satunya dilakukan melalui pantauan Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua. Selama kurun waktu tahun 2019-2024 atau lima tahun terakhir terdeteksi paling banyak pada tahun 2019 dengan jumlah 991 titik hotspot dan

⁴ No,74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan hal.19

paling sedikit pada tahun 2022 dengan jumlah 120 titik hotspot. Dari data pantauan inilah yang dijadikan acuan dalam menjalankan penanganan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk melihat keadaan lapangan sebenarnya dan pengambilan langkah dan kebijakan penanganan selanjutnya dengan melibatkan KPH setempat.

Tabel 2.3.6 Data Hotspot Tahun 2019 – 2024 di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Tahun	Hotspot	Satelit
1	2019	991	NOAA, SNPP & Terra/Aqua
2	2020	312	
3	2021	136	
4	2022	120	
5	2023	649	
6	2024	323	

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Bidang Perlindungan dan KSDAE, 2024

Dari data sebaran hotspot diatas digambarkan perubahan sebaran hotspot pertahun dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga bisa menurun dan meningkat, Informasi berbasis deteksi dini (seperti informasi penyebaran hotspot harian) dan monitoring kebakaran hutan (hasil verifikasi hotspot, luasan kebakaran) harus selalu tersedia. Meskipun saat ini pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak lagi dilakukan oleh UPTD PKHL, namun sebaliknya dikoordinir oleh Bidang terkait di Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan KPH provinsi.

Kegiatan yang sifatnya pencegahan dan pemadaman menjadi tanggung jawab KPH, namun untuk lokasi-lokasi di APL (luar kawasan hutan) membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait, seperti dengan pertanian, perkebunan, dan lainnya.

Tabel 2.3.7 Luas Areal Terbakar Th. 2024

No.	Kab/Kota	Kebakaran	Total
1	Berau	185,40	3.135,55
2	Kutai Timur	2.299,77	4.009,76
3	Bontang	57	59
4	Kutai Kartanegara	4.160,93	4.454,80
5	Kutai Barat	89,40	434,75
6	Mahakam Ulu	5,52	21,77
7	Balikpapan	4,32	26,33
8	Penajam Paser Utara	10,31	550,04
9	Paser	57	74
10	Samarinda	-	0
Total		6.869,65	12.766,01

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Bidang Perlindungan dan KSDAE, 202

b) Illegal logging/perambahan

Gambaran secara nasional, aktivitas illegal logging dan peredaran kayu illegal cenderung menurun secara signifikan⁵ Prestasi yang telah dicapai tersebut kemungkinan besar akan mampu dipertahankan di masa depan. Optimisme tersebut timbul karena didukung arahan pengelolaan kehutanan berbasiskan tapak. Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi.

Walaupun pada level tertentu, kami pun harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Terutama untuk wilayah yang di atasnya masih ditumbuhi tegakan pohon dan masih menjadi aset negara. Ini dapat ditemui di wilayah-wilayah berhutan yang akan dikonversi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan kepada industri pengolahan kayu tetap harus dilakukan. Karena sangat mungkin di industri pengolahan ditemukan bahan baku dari sumber yang tidak sah. Hal ini merupakan tugas kami untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum atas hilangnya aset-aset negara tersebut.

⁵ Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015, hal 225

Hal lain yang juga penting adalah bagaimana kami mendorong SDM kami untuk lebih cerdas dan professional dalam menangani perkara-perkara illegal logging/kebakaran hutan, memberikan dalam memberikan keterangan ahli untuk tujuan-tujuan penyidikan/penyelidikan, termasuk juga penanganan pelanggaran administratif kehutanan (perdata) yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Luas kerusakan akibat aktifitas Illegal Logging yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur adalah seluas 1.049,64 Ha. Luas kerusakan tertinggi akibat aktifitas Illegal Logging berada di Kabupaten Kutai Timur yaitu seluas 645,11 Ha. Kerusakan hutan yang diakibatkan oleh aktifitas Perambahan yang dilakukan oleh masyarakat baik perambahan untuk berladang atau berkebun dan bertempat tinggal. Luas Kerusakan hutan akibat perambahan adalah seluas 5.896,35 Ha areal perambahan terluas sebesar 4.454,80 Ha di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.3.7 Luas Areal Illegal Logging Dan Perambahan Tahun 2024

NO	UPTD KPHP/L & TAHURA	ILLEGAL LOGING (Ha)	PERAMBAHAN (Ha)	TOTAL
1	Berau	22,15	2.928	3.135,55
2	Kutai Timur	645,11	1.064,88	4.009,76
3	Bontang	-	2	59
4	Samarinda	-	-	0
5	Kutai Kartanegara	33,70	260,17	4.454,80
6	Balikpapan	-	22,01	26,33
7	PPU	293	246,73	550,04
8	Paser	-	17	74
9	Kutai Barat	55,68	289,67	434,75
10	Mahulu	-	16,25	21,77
JUMLAH TOTAL		1.049,64	4.846,71	5.896,35

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Bidang Perlindungan dan KSDAE, 2024

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026

Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan usulan rancangan awal RENJA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah Persandingan antara Rancangan Awal RKPD 2026 dengan Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Hutan
 - a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - b. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - c. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - d. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - e. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - f. Perbenihan Tanaman Hutan
 - g. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - a. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
 - b. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES (*Convention on International Trade In Endangerous Species*) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
 - c. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - a. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara

Program Tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan dengan sumber anggaran DBH SDA DR adalah sebagai berikut (Nomenklatur PMK 55 Tahun 2024):

1. Program Rehabilitasi di luar Kawasan sesuai kewenangannya
2. Program Rehabilitasi Hutan dan lahan sesuai kewenangannya
3. Program Pembangunan dan pengelolaan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial
5. Program Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
6. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan
8. Program Perbenihan Tanaman Hutan
9. Program Penyuluhan kehutanan
10. Program Strategis lainnya

Berdasarkan hasil analisis penyesuaian kebutuhan yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terhadap Rancangan Awal RKPD 2026, terdapat beberapa perubahan dari sisi alokasi anggaran yang diletakkan pada program – program yang ada di dinas kehutanan, perubahan tersebut disebabkan karena adanya perubahan/penambahan indikator program yang tertuang pada INMENDAGRI No. 2 Tahun 2025 yaitu indikator pada program KSDAE dan indikator pada program pengelolaan DAS, selain itu penambahan kegiatan juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan penganggaran termonitoring dengan baik secara berkala dan dilaporkan kepada kepala daerah. secara lebih lengkap hasil telaahan rancangan awal RKPD dan analisis penyesuaian kebutuhan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dituangkan pada tabel 2.4.1.

Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 (Tabel T-C.31)

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
					Dinas Kehutanan		254.839.651.804						Dinas Kehutanan		285.283.995.961							
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks	155.237.123.320		3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan	100 % 83 Indeks	191.636.278.204				
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	2.913.200.000		3	28	01	1.01		Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Presentase Perencanaan, Penganggaran,	100 %	2.684.333.108				
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4 Dokumen	843.870.284	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Pajak Daerah	3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	783.653.644	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	PAJAK DAERAH	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	184.927.764	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 Dokumen	174.904.762	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	127.499.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 Dokumen	90.138.682	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	
3	28	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Laporan	719.573.456	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Laporan	622.570.304	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Catatan Penting						
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Sumber Dana	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana			
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.037.329.456	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah, Pendapa tan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degrada tion (REDD+) Results Based Payment	3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.013.065.716	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, PENDAPAT AN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFOREST RATIO N AND FOREST DEGRADA TION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	122.534.437.930			3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	160.327.874.683			
3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	529 PNS 19 PPPK Orang/ Bulan	120.536.386.150	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	771 Orang/ Bulan	158.550.358.655	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PAJAK DAERAH	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	916.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	934.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N	

Rancangan Awal RKPD													Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	446.298.252	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	134.534.282	Kota Balikp apan, Balikp apan Kota, Kland asan Ulu	HASIL PENGELO L AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		
											3	28	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	83.628.382	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	HASIL PENGELO L AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emes teran SKPD	4 Laporan	635.673.528	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest era n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /S emesteran SKPD	4 Laporan	267.928.474	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangat ta Utara, Sangat ta Utara Kota Balikpa pan, Balikpa pan Kota, Klanda san Ilir Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	PAJAK DAERAH, HASIL PENGELO L AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting				
Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana		Target 2026			Pagu Indikatif (Rp)

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daera h	3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	179.500.000	Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kota Samarinda , Samarinda Kota, Bugis	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	350.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daera h	3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	252.354.550	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kota Balikpap an, Balikpap an Tengah, Gunungs ari Ulu Kota Samarin da, Samarinda Kota, Bugis Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting						
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daera h	3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	294.240.759	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangat ta Selata n, Sangat ta Selata n Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N					
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	1.122.283.299			3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	1.314.642.960							
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	441.630.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Daerah	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	499.266.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM					

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
																						Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana																	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	83.000.980	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daerah	3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	83.000.980	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3	28	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	243.652.319	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Daerah	3	28	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	191.115.980	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	354.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daerah	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	541.260.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	4.035.739.740			3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	4.926.976.873			
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.135.870	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daerah	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.346.370	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	126.909.796	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Daerah	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.859.958.917	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	92.784.528	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Daerah	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	44.923.426	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	11.635.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daera h	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.635.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHK AN, DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	2.872.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Daerah	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.474.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.06	0010	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	390.522.632	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Daerah	3	28	01	1.06	0010	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	282.796.980	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	507.651.714	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daera h	3	28	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	217.555.980	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	4.256.788.843			3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.496.251.885			
3	28	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.504.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daera h	3	28	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.504.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		Sumber Dana
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	390 Unit	2.751.988.843	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daerah	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	495 Unit	1.991.451.885	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.262.489.200			3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.561.531.500			
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.560.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Daerah	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.780.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	899.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daerah	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	842.911.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	303.696.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daerah	3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	405.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.054.233.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	2.310.840.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan														Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			
										Daerah							Disediakan							
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	16.362.184.308			3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	14.554.131.443					
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	59.920.804	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daerah	3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	59.920.804	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	936.376.519	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daerah	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 Unit	964.874.019	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	117.794.460	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daerah	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	161 Unit	111.764.460	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			
3	28	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	11.084.125	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) , Pajak Daerah	3	28	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	195.604.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana					
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.237.008.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Daerah	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	13.221.968.160	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %	50.407.266.164			3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %	46.864.755.134			
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen	896.204.319			3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen	812.139.319			
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	896.204.319	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	812.139.319	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR)	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting
Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		Sumber Dana
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	5 Dokumen	1.213.353.347	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	1.213.353.347	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					13.315.594.070			3	28	03	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Ha	13.241.213.540				
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	5 Dokumen		2.253.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	5 Dokumen	458.362.550	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR)		

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			Sumber Dana
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	524 Ha	8.700.847.181	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisa si (DR), Pendapa tan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degrada tion (REDD+) Results Based Payme nt	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	524 Ha	10.832.561.274	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR), PENDAPA TAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORES TRATIO N AND FOREST DEGRADA TION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT		
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20 Laporan	2.361.746.889	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisa si (DR)	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20 Laporan	1.950.289.716	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR)		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			22.592.238.777			3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<25000 Ha	21.285.002.220				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana						
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	9.631.938.777	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelol aan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an, DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisa si (DR), Pendapa tan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degrada tion (REDD+) Results Based Payme nt	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	9.129.446.634	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORES TRATIO N AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana					
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangg ulanga n Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	11.352.300.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser,	Hasil Pengelol aan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an, DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisa si (DR), Pendapa tan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degrada tion (REDD+) Results Based Payme nt	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penan ggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	10.548.617.988	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an,	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKA N, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR), PENDAPA TAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORES TRATIO N AND FOREST DEGRADA TION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening				Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Target 2025				Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi				Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan									

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Kode Rekening				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Target 2025				Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi				Sumber Dana				Target 2025				Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi				Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis Kebutuhan									Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi										Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	1 Operasi	412.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisa hkan	3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	2 Operasi	411.564.190	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR)	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																									
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
3	28	03	1.07	0005											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	3	28	03	1.07	0005											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								
3	28	03	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi					Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif					29 Unit Manageme n	446.604.198	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisa si (DR)	3	28	03	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi					Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif					29 Unit Manageme n	341.004.198	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR)								

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	48 Unit Managemen	1.251.586.018	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	48 Unit Managemen	1.128.515.101	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																						
					Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana																																																	
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan															3.521.624.800															3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan					1. Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; 2. Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi					105 SK; Sertifika					2.751.864.114														

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
										</															

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana						
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana				
3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	15 Laporan	750.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisa si (DR)	3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	25 Laporan	518.893.074	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR)	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	30000 Batang	1.200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	95626 Batang	1.491.836.012	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR)	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
																	Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	15 Unit Usaha	1.021.624.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	35 Unit Usaha	368.015.228	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR)	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																						
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																								
Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana																				Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana									
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	665193 Ha	1.400.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisa si (DR)	3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	665193 Ha	1.173.850.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahaka m Ulu,	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR)																																						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting
Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
								Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok	41.905.987.320		3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok	40.402.556.733		

Rancangan Awal RKPD												Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 Kelompok	41.905.987.320				3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 Kelompok	40.402.556.733				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	90 Kelompok	2.252.949.067	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisa si (DR), Pendapa tan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degrada tion (REDD+) Results Based Payme nt		3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	17 Kelompok	2.464.900.150	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR), PENDAPA TAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORES TRATIO N AND FOREST DEGRADA TION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																													
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	350 Orang	26.479.451.206	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisasi (DR)	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	350 Orang	25.890.505.683	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)																												
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20000 Hektar	3.380.424.553	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20000 Hektar	2.656.528.302	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser,	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT																												

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		Sumber Dana
3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahk an	3	28	06	1.01	0005	Pengemba ngran Kelembag aan Pengelola an DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	300.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR)		
3	28	06	1.01	0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	650.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisa hkan	3	28	06	1.01	0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	650.000.000		Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR)		
3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	8 Dokumen	1.411.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisa hkan	3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	8 Dokumen	1.411.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHK AN, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR)		
					UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto			11.378.274.800								UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto			14.445.070.307					
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3.341.209.236			3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks	3.599.712.706					

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting							
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi						Sumber Dana
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.122.375.820			3	28	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	140.640.000									
3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ Bulan	981.735.820	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah																	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	140.640.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	140.640.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL						
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			267.102.000			3	28	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	313.602.000									
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	118.602.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	118.602.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL						
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	148.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	195.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		Sumber Dana
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			320.817.816			3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	192.848.258					
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.154.300	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisa hkan	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.572.146		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL		
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	98.246.600	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisa hkan	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.539.635		Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHK AN, DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR)		
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.878.730	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.839.023	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		Sumber Dana
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.283.786	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Hasil Pengelolan Kecamatan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	37.119.054	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)			
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Pajak Daerah	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	155.376.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Hasil Pengelolan Kecamatan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	72.900.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
										an												
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			263.548.605			3	28	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.319.565.718				
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	150.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisa hkan	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	91 Unit	1.288.790.493	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHK AN, DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR)	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	113.548.605	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.775.225	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			540.124.995			3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	769.742.600			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	246.451.395	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	245.650.600		Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	293.673.600	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	524.092.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHK AN, DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			827.240.000			3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	863.314.130				
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	300.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Hasil Pengelo laan Kekaya an Daerah yang Dipisah kan, Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	336.401.930		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHK AN, DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFE R UMUM-DANA BAGI HASIL	

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		27.240.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		27.240.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		500.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		499.672.200	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				193.402.700			3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %		186.868.048			
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				193.402.700			3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen		186.868.048			
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen		193.402.700	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen		186.868.048	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																											
Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	64.814,98 Ha	2.000.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisasi (DR)	3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	64.814,98 Ha	1.784.617.754	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR)	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			272.755.500			3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	1 Hektar	265.355.062			
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	120 Orang	150.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisasi (DR)	3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	60 Orang	142.600.418	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR)	
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	25 Ha	122.755.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	25 Ha	122.754.644	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	

Rancangan Awal RKPD												Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana				
									Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			841.066.700			3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Hektar 20 Kelompok	919.762.251						
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			841.066.700			3	28	05	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	919.762.251						
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	691.066.700	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapa tan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degrada tion (REDD+) Results Based Payment	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	691.066.700	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFOREST RATIO N AND FOREST DEGRADA TION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting						
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											

[illegible]

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			
										yang Dipisahk an														
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	689.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	514.501.342	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM			
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95.798.335			3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	88.728.336					
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	95.798.335	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	88.728.336	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N			
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			757.748.324			3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	757.748.324					
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.164.724	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.164.724	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a Kab. Berau, Tanjung Redeb.	PAJAK DAERAH			

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141.218.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahk an	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141.218.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	601.365.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	601.365.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			440.111.680			3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	416.091.680				
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	143.738.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	149.238.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	55.290.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	46.950.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	PAJAK DAERAH		
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.000.000	Kab. Berau, Kelay, Sido Bangen Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungan	PAJAK DAERAH		
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	221.083.680	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.903.680	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			7.347.558.921			3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %	12.129.291.062				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	2 Unit		1.170.864.387	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil, DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisa si (DR)	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisa si KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	6 Unit	6.389.253.387	Kab. Berau, Kelay, Sido Bangen Kab. Berau, Segah, Bukit Makmur Kab. Berau, Tanjung Redeb, Karang Ambun Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungun Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR)	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				320.129.365			3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	320.129.365			
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen		320.129.365	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	320.129.365	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah,	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana					
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			305.980.000			3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	305.980.000					Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa		
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	305.980.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapa tan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degrada tion (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	305.980.000					Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			4.221.978.980			3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	202 Ha	4.107.854.826							

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																									
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi						Sumber Dana																								
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	67 Ha	4.143.718.343	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	202 Ha	4.038.714.189	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT																								
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	78.260.637	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	69.140.637	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM																								

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting	
Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			1.328.606.189			3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170 Ha	1.006.073.484				
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	397.968.074	Kab. Berau, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	321.404.346	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKA N		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penang gulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	489.349.371	Kab. Berau, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penan ggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	341.221.728	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKA N		
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	50 Ha	441.288.744	Kab. Berau, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Hasil Pengel olaan Kekaya an Daerah yang Dipisah kan, Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantas an Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	247.584 Ha	343.447.410	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHK AN, DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok	1.309.203.279		Lokasi	Sumber Dana	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				1.530.328.347			3	28	05	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.309.203.279				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok		555.026.403	Kab. Berau, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	380.290.935	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	
												3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	532.652.162	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFOREST RATIO N AND FOREST DEGRADA TION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang		192.708.000	Kab. Berau, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	146.318.400	Kab. Berau, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Hektar	782.593.944	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Hektar	249.941.782		Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan			15.190.692.330								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan			11.943.807.850			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			4.148.604.600			3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks	3.548.610.610			
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.059.766.896			3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	199.176.000			
3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	793.966.896	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan												

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			426.606.000			3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	302.464.000				
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	151.056.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daerah yang Dipisahk an	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	168.144.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	275.550.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daerah yang Dipisahk an	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	134.320.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			868.539.998			3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	778.412.767				
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.008.533	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daerah yang Dipisahk an	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.008.533	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	59.854.255	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daerah	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	65.606.853	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA		

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			
										h yang Dipisahk an											N			
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.522.718	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	39.522.718	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.395.392	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	40.515.563	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan	714.819.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah , Hasil Pengel olaan Kekayaan Daerah yang Dipisahk	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	618.819.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH			

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
										an													
3	28	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			675.077.700			3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	872.464.400			
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.180.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an		3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.180.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	178.380.100	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah		3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	174.393.600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	485.517.600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an		3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	686.890.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N	
3	28	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.014.214.006			3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.345.717.443			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	709.844.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	709.844.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	47.392.166	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	57.986.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH		
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	256.977.040	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	577.886.143	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			8.610.253.690			3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %	6.551.455.722				
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			1.350.000.000			3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.160.248.248				

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
															Provinsi								
3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	3 Unit	1.350.000.000	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	4 Unit	1.160.248.248	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Jelm Sibak Kab. Paser, Long Kali, Long Kali Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR)		
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			183.600.000			3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	183.593.990				
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	183.600.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	183.593.990	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan			280.000.000			3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan	5.153.407 Ha	233.018.000				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan														Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
																						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
					Hutan Lindung											dan Hutan Lindung	Hutan							
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	280.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	233.018.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			3.450.000.000			3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.438.357.151					

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	118 Ha	3.450.000.000	Kab. Kutai Barat, Bongana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	111 Ha	3.438.357.151	Kab. Kutai Barat, Bongana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			3.346.653.690			3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	1.536.238.333			
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	637.141.280	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisasi	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	132.889.848	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan,	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR)	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																												
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																												
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	335746 Ha	553.819.720	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	335746 Ha	274.167.367	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT																																											
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			2.431.834.040			3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok	1.843.741.518																																													
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			2.431.834.040			3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.843.741.518																																													

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	555.229.230	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	608.327.896	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORSTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	12.998.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	1.621.960.440	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1.067.782.793	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	05	1.01	0008			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	3	28	05	1.01	0008				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	150 Hektar	154.644.370	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	25 Hektar	154.632.829	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT		
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus			15.487.550.666								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus			13.133.411.786				
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.950.592.165			3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks	1.947.445.478				
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			148.800.000			3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000				
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	148.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	148.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			84.009.500			3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	34.659.100				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																		
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	84.009.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	34.659.100	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM																																	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			830.940.648			3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	432.499.464																																			
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.928.981	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.202.020	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM																																	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	66.627.095	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekaya an Daerah yang Dipisa hkan	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	218.710.770	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N																																	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	8.794.572	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah , Hasil Pengel olaan Kekaya an Daerah yang Dipisah kan, Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.396.674	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N																																	

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
																						Target 2025
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	741.590.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	198.190.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			177.935.345														

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Sumber Dana					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana						
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	177.935.345	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah													
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.133.341.912			3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	918.706.000				
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.173.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.170.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PAJAK DAERAH		
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.764.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.016.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	967.404.912	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	753.520.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi
									Dipisa hkan												N		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			575.564.760			3	28	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	412.780.914					
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	382.544.160	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisa hkan	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	307.330.914		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	43.020.600	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisa hkan	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	30.450.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	150.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	75.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			11.481.937.696			3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %	9.618.099.991		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			2.647.940.392			3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.487.255.332		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	35 Unit	2.647.940.392	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, DBH Sumber Daya Alam Kehutan-an- Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	7 Unit	1.487.255.332	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			250.000.000			3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																						
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongana, Semua Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongana, Semua Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment																					

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	599.983.800	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	599.983.800	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		Sumber Dana
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	207.528.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	207.528.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			6.386.575.300			3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	6.220.245.058					

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	192.488.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	244.558.504	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR)
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	6.194.087.300	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Karian gau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	260 Ha	5.975.686.554	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Karian gau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR)

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		Sumber Dana
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			1.389.910.004			3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	853.087.601					
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0 Dokumen		0	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa		3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	132.640.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bonga n, Semua Kel/De sa Kota Balikpa pan, Balikpa pan Barat, Karian gau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR)		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penang gulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	652.225.900		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikp apan, Balikp apan Barat,	Pendapa tan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degrada tion (REDD+) Results		3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penan ggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	652.225.900	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bonga n, Semua Kel/De sa Kota Balikpa	PENDAPAT AN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFOREST RATIO N AND FOREST DEGRADA TION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
																						Kode Rekening			
																				</					

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana					
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	814.932.805	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Karian gau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisa si (DR)	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	1.103.391.247	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bonga n, Semua Kel/De sa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Karian gau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR)	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	240.088.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Karian gau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku,	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisa hkan	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	72.904.724	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Karian gau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Penajam	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHK AN, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR)	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

[illegible]

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	22.300.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	32.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	22.300.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	22.300.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	52.300.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	53.600.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	38.722.781	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	48.490.563	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	448.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	379.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			506.572.115			3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	506.572.115			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	129.121.422	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daerah yang Dipisahk an	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	129.121.422	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	377.450.693	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Hasil Pengelol aan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an, DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	377.450.693	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKAN, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR)	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			698.769.600			3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	698.769.600			
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	303.403.200	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daerah yang Dipisahk an	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	303.403.200	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	395.366.400	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahk an	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	395.366.400	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.581.722.154			3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.123.551.310			
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	451.274.290	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	451.274.290	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanah Grogot Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	30.450.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua	Hasil Peng elolaa n Kekayaan	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	30.450.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										si (DR)											(DR)	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			250.000.000			3	28	03	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	249.213.502				
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa a	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	249.213.502	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI I (DR)	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			375.225.900			3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	375.225.900			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																													
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana																																		
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	100.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	137.495 Ha	100.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN																												
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			2.357.561.030			3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Hektar 20 Kelompok	2.330.561.030																														
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			2.357.561.030			3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	2.330.561.030																														
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	200.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	191.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser,	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)																												

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting																																
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																			
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	1.857.561.030	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	1.848.561.030	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT																																	
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3 Orang	100.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	9 Orang	100.000.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN																																	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana										
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	200.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	191.000.000	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)		
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan			16.356.387.208								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan			14.036.060.488				
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			4.326.666.062			3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %	2.889.754.071				
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			563.989.368			3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 %	154.200.000				
3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menenerima Gaji dan Tunjangan ASN	6/13 Orang/ Bulan	409.789.368	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan													
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	12 Dokumen	154.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	154.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3	28	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																							
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																							
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	690 Ha	7.098.838.720	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	690 Ha	6.893.456.944	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT																																						
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			2.305.134.967			3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	1.763.824.422																																								

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana							
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	540.938.532	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	359.608.532	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.484.262.025	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Hasil, Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.254.781.480	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting						
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					1.911.277.296				3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok	1.913.990.563				
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					1.911.277.296				3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	1.913.990.563				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok		196.999.250	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisa hkan	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	83.599.250	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pan dan, Sem ua Kel/ Des a	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
											X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %	17.643.298			
											X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	17.643.298			
											X	XX	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.643.298	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan			11.536.152.170								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan			10.486.358.730			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.536.152.170			3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks	3.217.415.424			
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.006.350.884			3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	141.240.000			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/Bulan	865.110.884	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan												
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.240.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.240.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			22.590.000			3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	22.595.500			
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	22.590.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	22.595.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan														Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			105.444.000																
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	105.444.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan														
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			288.095.246			3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	424.568.264					
											3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	51.140.304	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	149.615.246	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	233.227.960	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	138.480.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekayaan	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	140.200.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan														Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	840.408.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.417.440.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			466.162.000			3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	450.343.000				
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	326.762.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	367.147.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	139.400.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	83.196.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			5.394.372.240			3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %	5.122.698.299						
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			349.119.600			3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	346.391.326						
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	2 Unit	349.119.600	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	3 Unit	225.391.326	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
											3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	5 Unit	121.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR)				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting						
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			265.909.600					3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		1 Dokumen	244.882.000				
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	265.909.600	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	244.882.000		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL				
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			550.285.470					3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		5.153.407 Ha	561.512.794				
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	448.837.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	460.064.824		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL				
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi	5 Dokumen	101.447.970	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan	5 Dokumen	101.447.970		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan														Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan														Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya	3 Unit	1.287.889.372	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya	3 Unit	1.292.084.243	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkatkan kapasitasnya	10 Orang	329.827.900	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkatkan kapasitasnya	20 Orang	295.227.900	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Hektar	110.385.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar	144.225.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan													Catatan Penting																							
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																									
											Target 2025				Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi				Sumber Dana											Target 2025				Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi				Sumber Dana

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan													Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
						Pelaksana an Tugas ASN												ta Utara					
																		Kab. Kutai Timur, Sangat ta Utara, Sangat ta Utara Kota Samari nda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				
3	28	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			123.000.000			3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	123.000.000			
3	28	01	1.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	123.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	123.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangat ta Utara, Sangat ta Utara Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan													Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			537.157.808			3	28	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100 %	608.972.800			Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa						
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	130.051.808	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	117.916.329	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	33.700.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	33.850.471	Kab. Kutai Timur, Sangat ta Utara, Sangat ta Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	373.406.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	457.206.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)		
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.633.867.126			3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	2.082.349.416				
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	114.500.216	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	114.500.216	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting							
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting
3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2.519.366.910	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.967.849.200	Kab. Kutai Timur, Sangat ta Utara, Sangat ta Utara	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			658.687.600			3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	757.976.800						
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	252.190.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	215.980.000	Kab. Kutai Timur, Sangat ta Utara, Sangat ta Utara	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	406.497.600	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	541.996.800	Kab. Kutai Timur, Sangat ta Utara, Sangat ta Utara	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			1.087.311.131			3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	712.284.022					
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	2 Unit	1.087.311.131	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolan Prasarana Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an, DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisa si (DR)	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisa si KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	5 Unit	712.284.022	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangat ta Utara, Sangat ta Utara Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHK AN, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR)			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	0 Unit		Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan													
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			179.924.975				3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	158.924.975			
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	179.924.975	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	158.924.975	Kab. Kutai Timur, Sangat ta Utara, Sangat ta Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			207.360.000				3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	127.465.000			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	207.360.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	127.465.000	Kab. Kutai Timur, Sangat ta Utara, Sangat ta Utara Kab. Kutai Timur, Karangan , Karangan Dalam Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Beno Harapan Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			3.079.673.370			3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	219 Ha	3.340.978.120				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	58.320.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	58.320.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR)	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha		Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR)												

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting								
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	220 Ha	3.021.353.370	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisa si (DR). Pendapa tan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degrada tion (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	219 Ha	3.282.658.120	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Beno Harapan Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR), PENDAPA TAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORES TRATIO N AND FOREST DEGRADA TION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT							
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			1.743.850.264			3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	870.248.332									

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	99.720.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	69.120.000	Kab. Kutai Timur, Sangat ta Utara, Sangat ta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																																	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																		
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	671.068 Ha	415.095.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	671.068 Ha	250.846.485	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT																																	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			586.031.534			3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok	735.231.381																																			
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			586.031.534			3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	735.231.381																																			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																														
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Catatan Penting				
Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana						Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana														
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	239.522.080	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	222.331.815	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT																													
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	87.600.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	52.640.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																													

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting							
Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	05	1.01	0006					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	278.590.458	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semu a Kel/De sa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT									
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	258.909.454	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	181.669.108	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semu a Kel/De sa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL							

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan														Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana				
3	28	01								3	28	01														
3	28	01	1.02							3	28	01	1.02													
3	28	01	1.02	0001						3	28	01	1.02	0002												
3	28	01	1.02	0002						3	28	01	1.02	0002												

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)
								a														
								Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa														
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelaaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9.828.000		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	26.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	18.021.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			69.480.000			3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	52.718.314				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting																	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																
											Target 2025				Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi				Sumber Dana																
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						104.298.000									3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	101.375.000							
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	40.218.000				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14 Dokumen	38.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai				PAJAK DAERAH	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	26.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	26.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			350.000.000			3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	286.985.060			
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.138.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.135.385	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																		
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	12.583.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	12.579.174	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																																	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.261.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.271.771	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																																	

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
3	28	01	1.07				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	3	28	01	1.07				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.253.883.325			3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	1.441.708.101			
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	414.970.072	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	144.487.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	838.913.253	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	1.297.221.081	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			956.330.400			3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.371.994.216			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening									

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	
3	28	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	11.451.919	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	11.451.919	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																													
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting								
Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana																																		
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH																												
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			16.444.951.733			3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %	14.366.627.480																														
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			3.983.565.900			3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.312.365.291																														
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	144.973.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	119.773.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)																												

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	137.202.400						
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	176.781.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	137.202.400		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			774.987.075			3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	686.786.796						
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	179.110.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	162.310.100		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	170.588.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	112.626.240	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	170 Ha	9.708.366.433	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	224 Ha	9.157.035.089	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	16 Dokumen	400.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	185.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN- DANA REBOISASI (DR)
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	24 Laporan	602.629.480	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	390.229.060	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu,	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting						
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	1000 Ha	247.152.325	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	111283 Ha	247.152.604	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting								
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			850.009.548					3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok	703.237.773							
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			850.009.548					3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	703.237.773							
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	449.999.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	454.199.403	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun , Semu a Kel/De sa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semu a Kel/De sa Kab. Mahakam Ulu, Long	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN AN- DANA REBOISASI (DR)							

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	8 Orang	110.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana																				Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan														Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
										Dipisahk an																	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			47.469.200				3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	47.462.000			a Kel/D esa				
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	47.469.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	47.462.000	Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N						
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150.767.365				3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	150.767.365							
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	10.967.365	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisa hkan	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	10.967.365	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N						
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	139.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	139.800.000	Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan														Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan														Catatan Penting																														
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																			
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.377.600	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.997.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN																																	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	237.111.835	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	237.093.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN																																	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			212.383.058			3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	212.370.445																																			
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	84.844.658	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	84.843.958	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN																																	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	127.538.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	127.526.487	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			588.555.450			3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	576.488.300		
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.030.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.030.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.415.450	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	198.348.300	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	370.110.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	370.110.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	327.598.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	327.590.100	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	47.900.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	47.900.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.196.800	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			8.195.557.156			3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %	7.010.557.918				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	192.270.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahk an	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	98.612.000	Kab. Berau , Semu a Kecamatan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			303.480.000			3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 M3	150.746.900				
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	113.400.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisa hkan	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	101.106.900	Kab. Berau , Semu a Kecamatan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalia n, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	190.080.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisa hkan	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	49.640.000	Kab. Berau , Semu a Kecamatan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			4.411.480.242			3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	185 Ha	4.021.098.889				

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting																																																		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																		
Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana																																																							
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)					Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)					1 Dokumen					145.660.000					Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Hasil Pengelolaa n Kekeya aan Daerah yang Dipisahk an					3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)					Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)					1 Dokumen					45.248.246					Kab. Berau, Semu a Keca matan, Semu a Kel/D esa					HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN					
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara					Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara					50 Ha					4.265.820.242					Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisa si (DR), Pendapa tan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degrada tion (REDD+) Results Based Payme nt					3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara					Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara					185 Ha					3.975.850.643					Kab. Berau, Semu a Keca matan, Semu a Kel/D esa					HASIL PENGELOLAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORES TRATIO N AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED					

Rancangan Awal RPKD										Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
																						PAYMENT	
3	28	03	1.05			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		1.856.035.000			3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	1.360.168.154				
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	150.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	149.989.794	Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELO AAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKA N		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulanga n Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 Laporan	1.148.480.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Hasil Pengelol aan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an, DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisa si (DR), Pendapa tan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degrada tion (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penan ggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	768.477.670	Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKA N, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR), PENDAPA TAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORES TRATIO N AND FOREST DEGRADA TION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																									
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	44126 Ha	557.555.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan an Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	44126 Ha	441.700.690	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT																								
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			1.374.359.204			3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok	1.015.494.675																										
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1.374.359.204			3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	1.015.494.675																										

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	487.880.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisasi (DR)	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	348.024.759	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	155.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kehutanan yang Dipisahkan	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 Orang	43.920.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
											3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	374.999.148	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Hektar	731.479.204	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan an Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an, DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisa si (DR), Pendapa tan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Hektar	248.550.768	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISASI (DR)		
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah			13.715.896.124								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah			11.235.111.644				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			
3	28	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3.642.539.424				3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretariatan	100 % 83 Indeks	2.636.294.694				
3	28	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			278.120.000				3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	198.920.000				
3	28	01	1.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	129.480.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	129.480.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			
3	28	01	1.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	148.640.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.440.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			87.440.000			3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 % 100 %	44.240.000				
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	87.440.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	44.240.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			227.058.744			3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	156.900.698				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	76 Paket	118.498.744	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	65.140.698	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	108.560.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	91.760.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			302.900.956			3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	218.609.856				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Pagu Indikatif (Rp)	28.028.956	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	57.737.856	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	36.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	238.872.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	160.872.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
3	28	01	1.08				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	3	28	01	1.08				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.323.723.404			3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	813.277.320			
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.219.120	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.219.120	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.681.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.681.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.202.823.284	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	692.377.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			968.271.774			3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	792.970.102					
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	438.106.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	257.062.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	530.165.774	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	535.908.102	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			8.561.315.845			3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %	7.386.562.631					

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			1.628.027.427			3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.289.534.415				
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	5 Unit	1.628.027.427	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	1.289.534.415		Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHK AN, DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFE R UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR)	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			371.972.573			3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	337.312.573				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan														Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
															Hutan Konservasi (KPHK)												
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	371.972.573	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	337.312.573	Kab. Berau, Sambaliung , Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			674.985.748			3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	243.709.715								
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	255.007.127	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	139.807.127	Kab. Berau, Sambaliung , Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan														Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Target 2025				Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi				Sumber Dana							Target 2025				Pagu Indikatorif (Rp)				Lokasi				Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			1.512.040.855			3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok	1.212.254.319				
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1.512.040.855			3	28	05	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.212.254.319				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	710.459.175	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an- Dana Reboisa si (DR), Pendapa tan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degrada tion (REDD+) Results	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	612.692.639	Kab. Berau, Sambaliung , Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN- DANA REBOISAS I (DR), PENDAPA TAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORES TRATIO N AND FOREST DEGRADA TION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting							
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	162.270.000	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	128.070.000	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)								
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai			13.828.123.034								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai				11.750.969.674									
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3.053.592.279			3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks	2.512.060.191										

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			614.252.088			3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	124.800.000				
3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/Bulan	429.452.088	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan													
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	12 Laporan	60.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah													

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi											Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan													Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	29.088.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	29.088.000	Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	54.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	28.800.000	Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			324.276.235			3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	330.276.235				
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	18.594.467	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	18.594.467	Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	49.951.768	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.951.768	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	255.730.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	261.730.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.039.975.798			3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.040.695.798				
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	58.335.960	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahk	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	58.335.960	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan														Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana			
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			
										an										Kel/D esa				
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	172.904.838	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	172.904.838	Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N			
3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	808.735.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	809.455.000	Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N			
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			714.448.500			3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	714.448.500					
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.950.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua	Hasil Peng elolaa n Kekay aan	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.950.000	Kab. Berau , Semu a Keca	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	123.425.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	123.425.000	Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	22.740.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	22.740.000	Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	561.333.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisahk an	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	561.333.500	Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELOL AAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKA N		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting			
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			243.951.658					3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	243.951.658																
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	194.955.658	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	194.955.658	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN																
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48.996.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48.996.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN																
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			8.184.902.312			3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %	6.806.609.312																		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				1.545.466.200			3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1.343.866.200					
3	28	03	1.01	0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH	3 Dokumen	1.545.466.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Sumber Daya Alam Kehutan-an-Dana Reboisasi (DR)															
												3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	2 Unit	1.343.866.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				420.746.320			3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	247.186.320				
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen		420.746.320	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daerah yang Dipisa hkan	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	247.186.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELO LAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHK AN. DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				228.600.000			3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	198.700.000				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	6 Dokumen	178.200.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, DBH Sumber Daya Alam Kehutan-an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	144.600.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)		
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	50.400.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	54.100.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			3.706.695.600			3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	156 Ha	3.597.495.600				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana										
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	186.150.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Peng elolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	76.950.000	Kab. Berau , Semu a Kecamatan , Semu a Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	3.520.545.600	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	156 Ha	3.520.545.600	Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			2.283.394.192			3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	1.419.361.192				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana							
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	1.230.560.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	735.710.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulanga n Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	36 Laporan	1.052.833.792	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelol aan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an, Pendapa tan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degrada tion (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penan ggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	598.700.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATI O N AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
											3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantas an Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20000 Ha	84.950.392	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting																							
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
3	28	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.320.792.076				3	28	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %	2.106.153.928																						
3	28	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				399.260.112				3	28	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	139.200.000																						
3	28	01	1.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Orang/ Bulan	260.060.112	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																		
3	28	01	1.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM																							
3	28	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				135.876.000				3	28	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	80.076.000																						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting								
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	41.076.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Penge lolaan Kekay aan Daerah yang Dipisahk an	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	41.076.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN							
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	94.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	39.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM							
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			783.525.862			3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaa n Administrasi Umum	100 %	497.034.314									
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.721.494	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.956.471	Kab. Kuti i Timu r, San gatta Utar a, San gatta Utar a Kab. Kuta i Timu r, Sangku liran, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit	HASIL PENGELOLAA N KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM							

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan														Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			111.037.102			3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	446.511.414				
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	56.561.790	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	152.436.402	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangku liring, Benua Baru Ulu	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	54.475.312	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Penge lolaan Kekay aan Daera h yang Dipisa hkan	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	294.075.012	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangku liring, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			510.068.000			3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	625.567.200				

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			Sumber Dana		
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	171.320.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Penge lolaan Kekay aan Daerah yang Dipisahk an	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	151.320.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	338.748.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	474.247.200	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangku liran, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	HASIL PENGELOLAA N KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			381.025.000			3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	317.765.000			
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	269.715.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Penge lolaan Kekay aan Daerah yang Dipisa hkan	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	269.715.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			Sumber Dana		
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	111.310.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	48.050.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			8.265.092.648			3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	0.71 % 1 %	6.807.355.057			
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			2.034.475.044			3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.016.319.020			
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	79.208.044	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	2 Unit	47.200.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting
Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			
328031.010008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit	1.955.267.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	328031.010008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	4 Unit	969.119.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)					
328031.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			417.095.684			328031.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	310.741.834							
328031.020001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	417.095.684	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	328031.020001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	310.741.834	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sanggatta Utara, Sanggatta Utara	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL					

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana													Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	28	03	1.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	135.221.868	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisa si (DR)	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	152.319.304	Kab. Kutai Timur, Sangkul irang, Semua Kel/Des a Kab . Kut ai Tim ur, Kali ora ng, Se mu a Kel/ Des a Kab . Kut ai Tim ur, San dar an, Se mua Kel/ Des a	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																													
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan															
Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana																																		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	583.072.144	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	415.194.346	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur																													

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																									
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting				
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulanga n Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	864.388.616	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Pendap atan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degrad ation (REDD+) Results Based Payme nt	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangg ula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	711.331.141	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkul irang, Semua Kel/Des a Kab . Kut ai Tim ur, Kali ora ng, Se mua Kel/ Des a Kab. Kutai Timur, San dar an, Se mua Kel/ Des a	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATI O N AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT																								
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			858.201.572			3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelol a masya rakat	20.000 Ha 20 Kelompok	1.451.317.151																										

Rancangan Awal RKP										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

[illegible]

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Hektar	300.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Hektar	92.772.271	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kali ora ng, Se mua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau			12.321.826.800								UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau			11.480.024.000			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana					
3	28	3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhanpengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %					01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhanpengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %	2.391.212.959					
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %				3	28	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000				
		01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5 / 13 Orang/ Bulan	334.356.496	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	189.164.000			3	28	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	178.140.000				
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	113.564.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	102.150.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaia n	1 Dokumen	75.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Hasil Peng elolaa n Kekey aan Daera h yang Dipisa hkan	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	75.990.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Keca matan , Semu a Kel/D esa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	516.493.311			3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	364.971.440				

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	171.602.637	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	176.520.763	Kab. Kuta i Timu r, San gatta Utar a, San gatta Utar a	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.950.674	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	Hasil Pengelol aan Kekayaa n Daerah yang Dipisahk an, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.818.677	Kab. Kuta i Timu r, San gatta Utar a, San gatta Utar a	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	327.940.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	Hasil Peng elolaa n Kekay aan Daera h yang Dipisa hkan	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	169.632.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting							
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	304.784.951				3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	346.709.824					
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	274.104.951	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	316.029.824	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL				
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30.680.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	30.680.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL				
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %	8.643.016.632			3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %	7.642.843.668						
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.719.714.960			3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.719.714.960						

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																								
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana					Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana										
3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	5 Unit	1.719.714.960	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	6 Unit	1.719.714.960	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)																								
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			292.963.176			3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.963.176																										

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	292.963.176	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.963.176	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			184.800.000			3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	185.580.000			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	184.800.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	185.580.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			5.565.010.284			3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	385 Ha	4.698.197.320				
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	120 Ha	5.565.010.284	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutan an-Dana Reboisa si (DR), Pendapa tan atas Dana Reducin g Emissio n from Deforest ration and Forest Degradat ion	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	345 Ha	4.698.197.320	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATI O N AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Target 2025					Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi					Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	
3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1 Laporan	63.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	2 Laporan	63.260.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			864.591.434			3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok	1.445.967.373			
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			864.591.434			3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	1.445.967.373			
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	516.351.312	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	230.914.287	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			Sumber Dana
										3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	975.906.870	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)		
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	5 Orang	148.240.122	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3 Orang	148.240.122	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	200.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	90.906.094	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam			14.125.308.800							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam			12.003.524.400				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3.472.849.500			3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %	1.963.278.868			
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.708.286.232		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	243.800.000			
3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	1.503.286.232	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
											3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	205.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	95.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100.000.000		Barang Milik	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah	100 %	57.600.000			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
																Pada SKPD yang telah Ditatausahakan						
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	57.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.000.000			3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	70.000.000			
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	70.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			285.281.786		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	288.438.896			
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.196.490	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.353.600	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Ulu Kota Samarinda, Samarinda	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	88.723.296	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	67.231.718	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.962.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.962.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	152.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	173.891.578	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			876.717.600		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	900.876.090			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	204.158.490	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	696.717.600	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	696.717.600	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			402.563.882		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	402.563.882				
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	153.198.968	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	153.198.968	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	51.764.914	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	51.764.914	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		Sumber Dana									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	270.800.000	Kab. Berau, Maratua, Teluk Harapan Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Sa ma rin da, Sa ma rin da Kot a, Pelabuhan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			120.000.000			3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	78.000.000			

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis Kebutuhan									Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Dokumen Laporan	1.100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	887.450.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT		
									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	0	1 Laporan 0	84.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)		
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			75.000.000			3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	730.007,98 Hektar	70.800.000				
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			75.000.000			3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	1 Hektar	70.800.000				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)
3	28	04	1.03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	25 Ha	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	04	1.03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	70.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			4.356.459.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat at 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Hektar 20 Kelompok	4.142.759.300			
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			4.356.459.300		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	4.142.759.300			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	9 Unit	3.706.459.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	9 Unit	3.645.143.300	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT		
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	350.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	287.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)		

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting				
Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			368.800.000			3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentas e Pegawai yang Mendapatk an Pelayanan Kepegawaian	100 %	342.800.000				
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	52.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	52.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	316.800.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	290.800.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			836.712.118			3	28	01	1.06		Administra si Umum Perangkat Daerah	Presenta se Pelaksan aan Administrasi Umum	100 %	878.358.441				
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7.640.197	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngsan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.316.897	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana					
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	150.843.218	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	261.002.061	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	26.702.595	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	26.702.595	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	54.190.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	55.052.500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	597.336.108	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	528.284.388	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.670.532.300			3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.525.094.400			
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	1.670.532.300	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	1.525.094.400	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			453.846.000			3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	668.683.200			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana				
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95.784.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95.784.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	358.062.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	572.899.200	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			645.815.900			3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	614.677.070		
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	645.815.900	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	614.677.070	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kcamatan , Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			7.171.816.812			3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %	7.477.329.356				
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			2.132.734.734			3	28	03	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	2.226.602.016				
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	3 Unit	132.734.734	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	3 Unit	138.413.494	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	2.000.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	85 Unit	326.363.522	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Rancangan Awal RKPD												Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		Sumber Dana	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	227.785.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	8 Dokumen	231.696.140	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			2.645.023.078			3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	60 Hektar	2.822.097.206			
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	170 Ha	2.494.660.378	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	170 Ha	2.670.894.912	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	12 Laporan	150.362.700	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	151.202.294	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	972.341.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	848.800.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
											3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	123793 Ha	142.661.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			2.000.000.000			3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Hektar 6 Unit	1.456.024.507			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			2.000.000.000			3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	1.456.024.507			
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	207.031.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	134.652.507	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	446.964.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	6 Unit	1.076.890.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																						
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting					

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	80.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	80.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN																				
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			226.584.000			3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	204.984.000																						
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	42.624.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	42.624.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN																				
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	51.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	51.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN																				
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	132.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	110.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN																				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			643.360.280			3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	494.126.924						
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.819.840	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	83.190.481	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	100.321.500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	100.321.500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.778.940	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.574.943	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	487.440.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	305.040.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			446.583.000			3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Miliik Daerah yang Di adakan	100 %	446.583.000						
3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	446.583.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	446.583.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			455.894.800			3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	455.894.800						

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
															Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	446.315.160	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	448.662.960	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			8.107.745.258			3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %	7.556.396.214			
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			1.636.499.280			3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.556.258.168			
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan	1 Unit	182.548.400	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan	1 Unit	185.067.600	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Rancangan Awal RKPD												Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
3	28	03	1.04	0001							3	28	03	1.04	0001		dipelihara					
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	286.294.400	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	229.653.832	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	70 Ha	3.869.680.138	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	180 Ha	4.193.010.138	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 Laporan	336.580.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)												

Rancangan Awal RKPD												Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	410.738.46 Ha	84.780.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	410.738.46 Ha	84.744.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			1.506.274.462			3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 kelompok	1.506.274.462			
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1.506.274.462			3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 kelompok	1.506.274.462			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																									
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	284.112.962	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	254.023.750	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT																								
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	874.178.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	904.267.712	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT																								
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	100.973.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	100.973.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)																								

[illegible]

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	148.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	148.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	44.920.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan												
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			28.000.000														
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	28.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan												
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			176.205.600			3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	112.797.920			
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	41.205.600	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	43.997.920	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	

Rancangan Awal RKPD													Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaa an Sistem Informasi Kepegawaia n	4 Dokumen	30.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan													
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	105.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	68.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			338.807.330			3	28	01	1.06		Administras i Umum Perangkat Daerah	Presenta se Pelaksan aan Administrasi Umum	100 %	363.458.980				
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.500.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.495.864	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.943.892	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	71.240.437	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	38.500.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	29.962.479	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	21.500.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.455.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.939.200	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.939.200	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	189.424.238	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	228.366.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.814.395.200			3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	80.005.455			
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	99.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	27.258.106	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	106.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	52.747.349	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.608.595.200	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan												

Rancangan Awal RKPD												Hasil Analisis Kebutuhan												Catatan Penting
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi										Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			
									an, Semua Kel/Desa															
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			609.453.700				3	28	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	593.808.100					
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	161.186.500	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	161.186.500	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	448.267.200	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	432.621.600	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			235.571.400				3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	260.511.400				
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	235.571.400	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	235.571.400	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		

Rancangan Awal RKPD												Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Rancangan Awal RKPD												Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			145.000.000					3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	143.809.091																				
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	145.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	143.809.091	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM																				
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			456.030.936					3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	456.014.940																				
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	300.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	300.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL																				
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di	2 Dokumen	156.030.936	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan	2 Dokumen	156.014.940	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser,	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN																				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	3.157.762.680	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	177 Ha	3.157.762.680	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT		
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 Laporan	173.260.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan	173.260.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			1.612.544.646			3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan akan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	1.792.544.646				

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	170.000.000	Kab. Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	170.000.000	Kab. Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	1.292.544.646	Kab. Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.292.544.646	Kab. Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	240.810,97 Ha	150.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	75948 Ha	330.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			1.430.000.000			3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Hektar 20 Kelompok	1.250.000.000			
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1.430.000.000			3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	1.250.000.000			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan			19.061.489.300							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan				21.566.127.254				
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.327.677.440				3	28	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks	5.087.810.921				
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			718.790.316				3	28	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	253.384.000				
3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7 Orang/Bulan	469.550.316	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan													
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.440.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.440.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	12 Laporan	100.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	104.944.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana
										3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	837.501.510	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)			
										3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.070.163.595					
										3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.524.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			
										3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	281.919.595	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			
										3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	783.720.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)			
										3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	939.100.500					

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi			Sumber Dana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	450.356.100	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	324.356.100	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samari nda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			250.000.000			3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	161.800.000			
3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen/ 1400 Ha Dokumen	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	161.800.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			630.000.000			3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam	50 Ha	808.642.500			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	641.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	412.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT		
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16.378,95 Ha	497.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16.378 Ha	301.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT		
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			100.000.000			3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan	730.007,98 Ha	100.000.000				

Rancangan Awal RKPD												Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi											Sumber Dana	Target 2025				Pagu Indikatif (Rp)
																EKOSISTEMNYA	Konservasi Provinsi yang dikelola								
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			100.000.000				3	28	04	1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	2 Spesies	100.000.000						
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	3 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit	297.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	197.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			478.043.570			3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	196.336 Ha	415.043.570			
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			478.043.570			3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	415.043.570			
3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	478.043.570	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	415.043.570	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	

[illegible]

[illegible]

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi
									Kel/Des a														
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	119.520.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	133.440.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semes teran SKPD	12 Laporan Laporan	54.150.693	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/S emesteran SKPD	12 Laporan	53.150.693	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			49.950.693			3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presenta se Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahaka n	100 %	48.950.693				
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	49.950.693	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusuna n Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	48.950.693	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			195.193.097			3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	368.251.967				
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.042.404	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	72.101.274	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen Dokumen	54.150.693	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	53.150.693	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	132.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	243.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, PAJAK DAERAH		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			941.395.312			3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	579.451.110				
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12.715.425	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	19.584.082	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana		Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	186.345.980	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	179.316.861	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	36.057.269	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	36.876.962	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	39.996.638	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	47.813.205	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	666.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	295.860.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			
						SKPD									Konsultasi SKPD							
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			17.777.460			3	28	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	5.470.748.228				
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	17.777.460	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	6.123.228	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
											3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.364.270.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Catatan Penting				
															Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
															Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting					
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan																				

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	226.837.200	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			329.604.425			3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	244.953.569				
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	231.567.606	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	144.476.750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	15.630.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	18.070.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	82.406.819	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1 Unit	82.406.819	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		

Rancangan Awal RKPD												Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting																					
Kode Rekening						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan						Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
3	28	03				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				9.999.980.144					3	28	03				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas Lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	0.71 % 1 %	3.893.834.000																			
3	28	03	1.01			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				6.317.147.144					3	28	03	1.01			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	536.701.000																			
3	28	03	1.01	0002		Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	240.377.144	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	126.701.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)																					

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting			
Kode Rekening						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Catatan Penting					
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana		
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	8 Unit	6.076.770.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	8 Unit	410.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			300.000.000			3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	100.000.000			

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi									Sumber Dana	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	300.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			1.000.000.000			3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	850.000.000				
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen	250.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting				
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana					
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	750.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	750.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			1.832.833.000			3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	25 Hektar	1.860.133.000			
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	75.000.000	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	1.682.833.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	1.710.133.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	75.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	75.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			550.000.000			3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	547.000.000			
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	225.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	225.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting		
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulanga n Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3 Laporan	225.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pen anggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanak an Dalam Satu Tahun	12 Laporan	222.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATI O N AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	724.418 Ha	100.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	28	03	1.05	0007	Pencegah an dan Pemberant asan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	557.621,65 Ha	100.000.000	Kab. Mahaka m Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			766.899.490			3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Hektar 2 unit	783.824.490		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			766.899.490			3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaa n masyarakat	3 Kelompok	783.824.490		

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting			
Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Sumber Dana		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Sumber Dana	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	441.899.490	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR), Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	491.044.490	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	42.780.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	
TOTAL								535.400.847.000			J U M L A H					545.768.865.000						

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terhadap setiap program/kegiatan yang direncanakan diupayakan berorientasi kepada menjawab kebutuhan masyarakat secara khusus yang berada di sekitar hutan.

Arah Kebijakan Program Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah :

- Pengembangan produk pengolahan hasil hutan dan pemasaran dari kawasan hutan (HHK, HHBK dan Jasa Lingkungan) dalam rangka peningkatan produksi serta Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial dalam rangka pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan.
- Meningkatkan pengendalian terhadap kebakaran hutan dan lahan serta pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan.
- Meningkatkan pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Arah kebijakan ini akan ditindak lanjuti oleh Program dan Kegiatan yang akan berkaitan langsung dengan masyarakat di sekitar hutan.

Masyarakat sekitar hutan merupakan penjaga hutan sehari-hari. Jika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka hutan akan tetap terjaga. Sebaliknya, bila masyarakatnya miskin, maka akan mengganggu kelestarian hutan bahkan jika kegiatan hutan tidak melibatkan masyarakat justru mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial dan bakal membuka akses yang memicu konflik sosial.

Diharapkan masyarakat memiliki ketrampilan untuk mengelola hutan hingga pemasaran hasil hutan. Selain itu, juga dikembangkan pola kerjasama antara pihak-pihak, seperti kemitraan dengan pemegang konsesi. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan kelembagaan merupakan hal yang prioritas, sehingga masyarakat dapat menjadi mandiri dan profesional dalam mengelola hutan.

Melalui aneka usaha hasil hutan dengan program hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, membuka peluang besar bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan hutan baik kayu atau non kayu secara legal, peran pemerintah dan lembaga pendampingan untuk mendukung masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Melalui kebijakan meningkatkan Pengelolaan Das dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur membuka ruang Aspirasi bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin berkontribusi terhadap lingkungan melalui penanaman – penanaman yang dilakukan baik melalui penanaman pohon yang dapat memberikan manfaat secara alam ataupun penanaman pohon yang dilakukan untuk mendapatkan nilai ekonomi bagi masyarakat atau kelompok masyarakat. Dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memberi ruang melalui proposal Aspirasi atau usulan dari kelompok masyarakat di tahun 2026 dan telah dilakukan verifikasi lapangan terhadap usulan tersebut sebanyak 27 Usulan.

Selain itu, untuk mendukung Implementasi Perhutanan Sosial pasca diterbitkan persetujuan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga mendorong partisipasi para pihak terkait baik dari akademisi, perangkat daerah yang berada di Provinsi/Kab/Kota, sektor swasta dan mitra pembangunan untuk mendukung program/kegiatan yang diselenggarakan oleh pemegang persetujuan perhutanan sosial dalam kerangka *Integrated Area Development* Berbasis Perhutanan Sosial. Dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah mendorong Penerbitan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tata Laksana Penyusunan Dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial Di Kalimantan Timur, sejalan dengan hal tersebut telah menerima usulan/aspirasi dari Kabupaten/Kota untuk fasilitasi penyusunan dokumen IAD berbasis perhutanan sosial di 4 Kabupaten Kota pada tahun 2026. Secara lebih lengkap usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan disajikan pada tabel dibawah ini .

Tabel. 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur (T-C.3.2)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pengelolaan Hutan		1. Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) 2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 3. Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4. Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		
	Bantuan Bibit Buah/Multipurpose Tree Species (MPTS) dalam rangka Penghijauan Lingkungan				
		jl poros bontang samarinda km.10 rt.01, desa suka damai, kecamatan teluk pandan, kutai timur		2.000 Batang	
		Desa Kombeng Indah Kec. Kongbeng Kutai Timur		1.000 Batang	
		Desa Karya Bhakti Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur		3.200 Batang	
		Desa Makmur Jaya Kec. Kombeng Kab. Kutai Timur		1.700 Batang	
		Desa Wanasari Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur,		1.500 Batang	
		Desa Wahau Baru Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur,		2.000 Batang	
		Jalan Gunung Tunggul Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur,		550 Batang	
		Jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Loa Bakuung Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur,		550 Batang	
		Jalan Karatak Hanyar Kelurahan Loa bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur,		550 Batang	
		Jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang , Provinsi Kalimantan Timur,		550 Batang	
		Jalan Kemuning Kelurahan Loa Bakung Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur,		550 Batang	
		Jalan Kemuning Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur		950 Batang	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Jalan Swadaya Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur,		550 Batang	
		Jalan Kartak Hanyar Kelurahan Loa bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur,		950 Batang	
		Jalan KH. Hasyim Asy'ari, Provinsi Kalimantan Timur,		950 Batang	
		Jalan Jakarta Blok Y Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur,		650 Batang	
		Jalan Jakarta Blok BQ 10 RT 67 Samarinda Kelurahan Loa Bakung Samarinda,		550 Batang	
		Jalan Jakarta Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur,		350 Batang	
		Jalan Padat Karya Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur,		550 Batang	
		Jalan Lobang Tiga Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur,		550 Batang	
		Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, Provinsi Kalimantan Timur,		950 Batang	
		Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, Provinsi Kalimantan Timur,		950 Batang	
		Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, Provinsi Kalimantan Timur,		950 Batang	
		Jalan Sendawar Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur,		950 Batang	
2	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan		Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)		
	Fasilitasi Penyusunan Dokumen IAD				
		Kabupaten PPU		1 Dokumen	
		Kabupaten Paser		1 Dokumen	
		Kota Bontang		1 Dokumen	
		Kabupaten Kutai Kartanegara		1 Dokumen	

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu *"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"*. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi 8 Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 dengan Sasaran Utama Pembangunan Nasional, adalah:

- Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju
- Kemiskinan Menurun & Ketimpangan berkurang
- Kepemimpinan & pengaruh di dunia Internasional meningkat
- Peningkatan daya saing sumber daya manusia
- Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, mendapatkan tugas untuk mengintervensi 5 Dari 8 Prioritas Nasional ini, yakni diantaranya:

- Prioritas Nasional Ke 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru dengan Program Rancangan Strategis antara lain Penyelamatan Mata Air Kritis; Agroforestri untuk ketahanan Pangan dan Energi; Ketahanan Pangan, Energi dan Air melalui Usaha Kelompok Tani Hutan; Pemulihan Ekosistem Gambut; Konservasi & Pengembangbiakan Spesies Terancam Punah; Penguata Sistem Monitoring Gas Rumah Kaca yang terintegrasi.

- Prioritas Nasional Ke 5 yakni Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan Program Rancangan Strategis antara lain Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus.
- Prioritas Nasional Ke 6 yakni Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan dengan Program Rancangan Strategis antara lain Kegiatan Prioritas Bantuan Sosial yang Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan; Kegiatan Prioritas Kartu Usaha Afirmatif, Desa Mandiri; Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.
- Prioritas Nasional Ke 7 yakni Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan dengan Program Reformasi Birokrasi; Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Prioritas Nasional Ke 8 yakni Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur dengan Program Pembangunan Berketahanan Iklim; Pengelolaan Risiko Bencana.

Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan khususnya Propinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel, berikut:

No	Program	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
1.	<u>Kawasan Perkotaan</u> Pembangunan Kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitar Ibu Kota Nusantara	Kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara • Ibu Kota Nusantara • Kota Samarinda • Kota Balikpapan • Kota Bontang • Kabupaten Panajam Paser Utara • Kabupaten Kutai Kartanegara • Kabupaten Kutai Timur • Kabupaten Paser	Ibu Kota Nusantara a) Pembangunan Kawasan dan Pemindahan b) Pembangunan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara c) Pembangunan sosial dan sumber daya manusia d) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	IKN APBN (Belanja K/L), APB IKN*, DANA TRANSFER IKN*, KPBU, SWASTA MURNI <i>*Berlaku ketika status sudah menjadi Daerah Khusus Daerah Sekitar IKN</i> APBN, APBD, KPBU, SWASTA

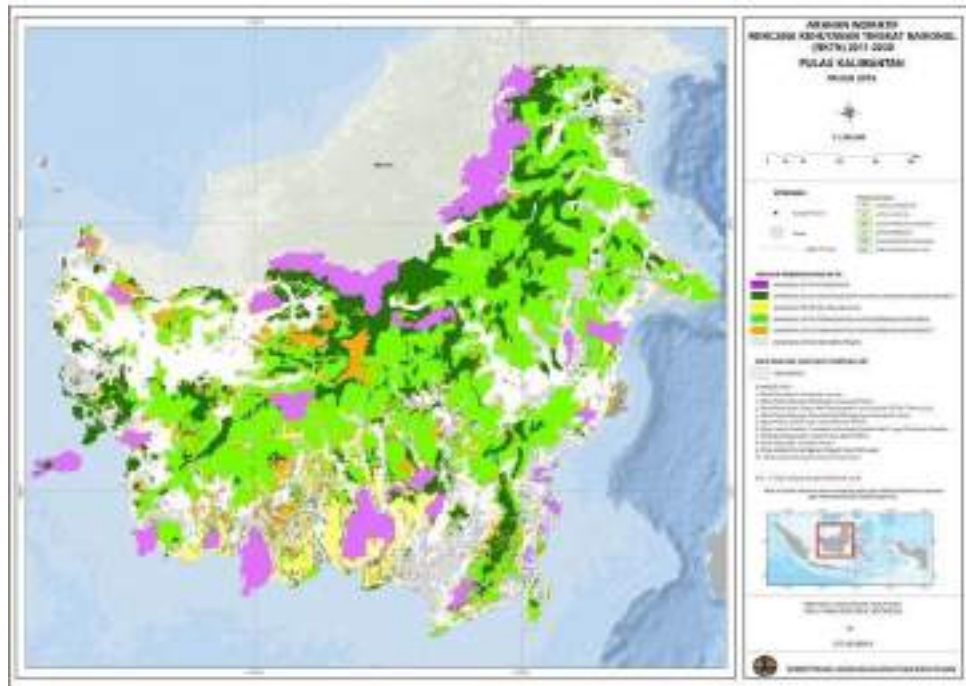
No	Program	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Indikasi Sumber Pendanaan
2.	<u>Pengembangan dan Pengelolaan kawasan konservasi di Kalimantan</u> Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di (<i>Heart of Borneo</i>) disertai peningkatan upaya mitigasi penanggulangan bencana	Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>) • Kalimantan Barat • Kalimantan Tengah • Kalimantan Timur • Kalimantan Utara	Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan a) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan b) Peningkatan kualitas ekosistem gambut c) Rehabilitasi ekosistem <i>magrove</i> d) Penyediaan informasi pendukung peningkatan ketahanan iklim e) Penguatan perencanaan dan kapasitas hukum kawasan hutan f) Pelaksanaan penataan aset reforma agraria g) Pelayanan peringatan dini multiancaman bencana	APBN, APBD

Sumber: Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025 – 2029 Kementerian PPN/Bappenas

B. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2011-2030

KLHK telah melakukan pembaharuan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional melalui Permen LHK No. P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030. Prioritas Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Pulau Kalimantan di dalam RKTN Tahun 2011-2030, adalah:

- Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan dan hutan hak
- Menyelesaikan masalah kawasan hutan
- Peningkatan peran konservasi
- Efisiensi usaha kehutanan dan pengembangan Sustainable Forest Management (SFM) bagi usaha kehutanan
- Pengembangan hutan tanaman.
- Pengembangan industri kehutanan
- Mempertahankan daya dukung dan daya tampung air pada kawasan hutan



Gambar 3.1. Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Pulau Kalimantan

Dinas Kehutanan Kaltim juga telah menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) tahun 2011-2030, yang ditetapkan melalui Pergub Kaltim No. 19 tahun 2012, yang kemudian diubah melalui Pergub Kaltim No. 55 tahun 2018. Berdasarkan RKTP tersebut, visi pembangunan kehutanan ke depan adalah: “Pembangunan kehutanan yang terpadu dan berkelanjutan (*integrated sustainable forestry development*) di Kalimantan Timur”. Secara terinci cakupan dari Visi tersebut di atas adalah :

- a. Pembangunan kehutanan yang terpadu, berarti :
 - Memadukan antara tujuan efisiensi ekonomi, integritas ekologi, keadilan sosial dan identitas budaya
 - Memadukan antara kepentingan vertikal (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan kepentingan horisontal (antar sektor) dan spasial (hulu dan hilir, kawasan kehutanan dan non-kehutanan)
- b. Pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan, berarti:
 - Menyinambungkan antara kepentingan generasi sekarang dengan kepentingan generasi yang akan datang;
 - Menyinambungkan antara kebutuhan produk/jasa (industri dan pasar) dan kapasitas pasokannya (sumber daya dan tapak).

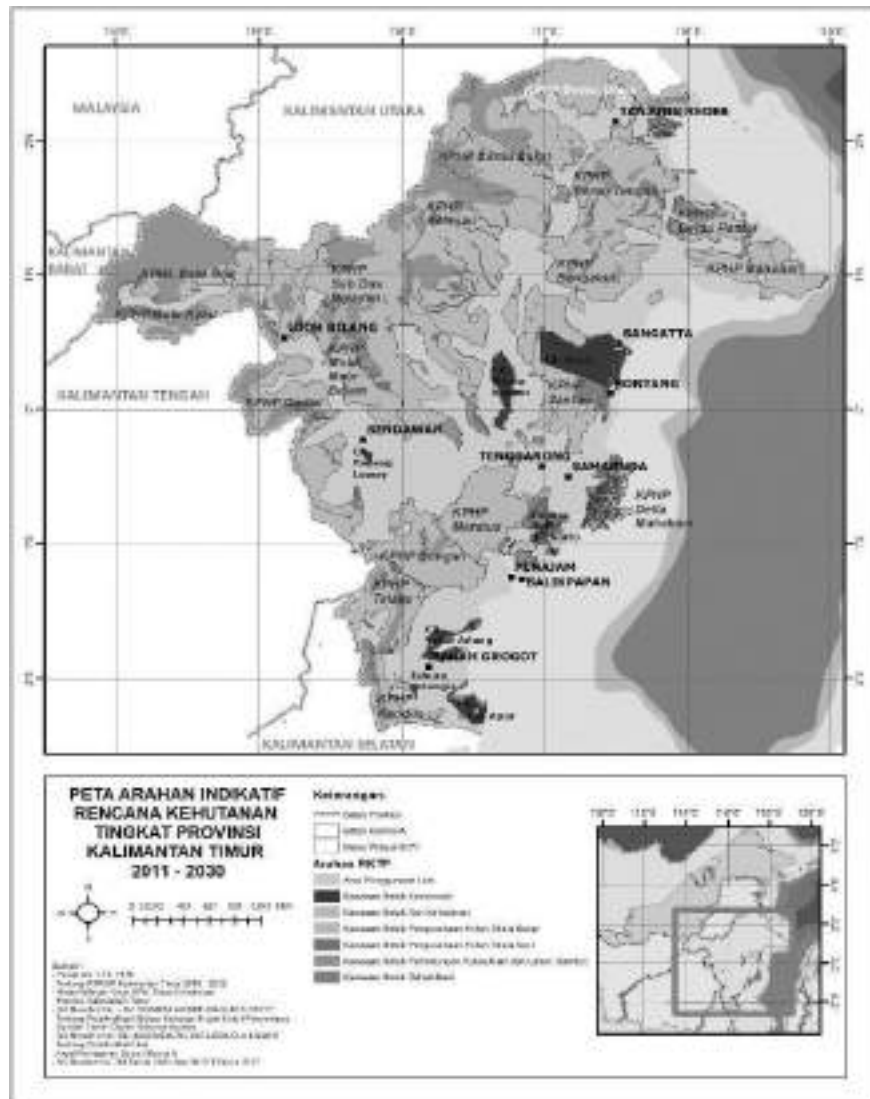
Misi untuk mencapai visi pengelolaan hutan provinsi adalah:

- Misi 1. Optimalisasi tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, termasuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, serta pengembangan multi-produk kehutanan.
- Misi 2. Meningkatkan upaya perlindungan, pelestarian, serta pemulihan kawasan hutan.
- Misi 3. Memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk penyelesaian konflik kehutanan dan memperkuat perhutanan sosial.
- Misi 4. Meningkatkan kapasitas pengelola kawasan hutan, utamanya penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Tabel 3.1. Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025

No.	Fungsi Kawasan	Luas (Hektare)
1.	Kawasan Konservasi (KSA/KPA)	± 460.377
2.	Kawasan Hutan Lindung (HL)	$\pm 1.748.792$
3.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	$\pm 2.920.146$
4.	Kawasan Hutan Produksi Tetap	$\pm 2.943.554$
5.	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	± 78.187
Jumlah		$\pm 8.151.056$

Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan RI No.397 Tahun 2022 tanggal 17 Juli 2025 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 3.2. Peta Arahkan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2030

C. Telaah Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019-2024 (REVISI)

Visi Indonesia 2045 dan Visi dan Misi Presiden 2020-2024 menerjemahkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang dituangkan kedalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Dari 7 PN, Kementerian LHK mendukung pada 4 (empat) PN yaitu:

- a. (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

- b. (PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- c. (PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
- d. (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Pada PN 1, Kementerian LHK mendukung Program Prioritas (PP) 2 peningkatan kuantitas /ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan PP 6 peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Kegiatan Prioritas (KP) pada PP 2 diantaranya pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumberdaya air dan ekosistemnya. KP pada PP 6 diantaranya peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir, serta peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Pada PN 2, Kementerian LHK mendukung PP 4 pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, KP pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara. Pada PN 3, Kementerian LHK mendukung PP 6 pengentasan kemiskinan dan PP 7 peningkatan produktivitas dan daya saing. KP pada PP 6 diantaranya keperantaraan usaha dan dampak sosial, reforma agraria, dan perhutanan sosial. KP pada PP 7 yaitu pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.

Pada PN 6, Kementerian LHK mendukung PP 1 peningkatan kualitas lingkungan hidup, PP 2 peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan PP 3 pembangunan rendah karbon. KP pada PP 1 diantaranya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan dan kerusakan SDA LH, penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA dan LH. KP pada PP 2 yaitu peningkatan ketahanan iklim. KP pada PP 3 diantaranya pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta rendah karbon pesisir dan laut.

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra Kementerian LHK) Tahun 2020-2024 sebelumnya yang ditetapkan melalui Permen LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020, yang kemudian dilakukan perubahan Renstra KLHK tahun 2020-2024 dan

ditetapkan dengan Permen LHK No. 1 tahun 2022. Visi KLHK adalah “Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK tersebut, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni: Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya; Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Misi yang akan dijalankan berjumlah empat yang merepresentasikan tujuan dan sasaran strategisnya, masing-masing mewakili 4 pilar yaitu lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola, yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan:

1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup
3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan
4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima

Sasaran strategis untuk Pilar Lingkungan, kondisi lingkungan hidup dan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim, adalah: (a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; (b) Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah; (c) Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon; dan (d) Menurunnya laju penyusutan hutan. Sasaran strategis pilar ekonomi, aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup, adalah : (a) Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah; (b) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan; (c) Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan *bioprospecting*; (d) Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pilar sosial, pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan, memiliki sasaran strategis: (a) terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate; (b) Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan; (c) Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata. Sedangkan pilar tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, memiliki sasaran strategis: (a) Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas; dan, (b) Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Milestone pembangunan LHK pada tahun 2024 adalah sirkular ekonomi dan keberdayaan masyarakat akses kelola telah menjangkau di seluruh provinsi, seiring perbaikan kondisi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin merata. Dinas Kehutanan Kalimantan Timur perlu mengacu pada Renstra KLHK sebagai dasar penetapan strategi dan arah kebijakan kehutanan Kalimantan Timur.

D. Penentuan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan kehutanan di Kalimantan Timur memberikan gambaran kondisi daerah yang membutuhkan perhatian dan upaya penanganan. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis pembangunan kehutanan. Permasalahan pembangunan kehutanan, serta kebijakan nasional dan provinsi, menjadi dasar untuk perumusan isu strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2025-2029.

Isu strategis pembangunan sektor Kehutanan di Kalimantan Timur tahun 2025- 2029 meliputi:

1) Kontribusi Sektor Kehutanan Dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah

Pemanfaatan hutan masih bertumpu pada produk hasil hutan kayu, yang saat ini mulai mengalami stagnan, seiring dengan semakin tumbuhnya produk pengganti kayu. Perubahan peraturan dan kebijakan kehutanan nasional, diharapkan dapat mendorong diversifikasi produk hasil hutan, terutama pengembangan pemanfaatan hutan untuk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Prioritas utama yang perlu dilakukan adalah mempertahankan dan tetap meningkatkan produktivitas dan produksi hasil hutan kayu, sembari memastikan ketercukupan bahan baku untuk Industri Usaha Pengolahan Hasil Hutan, serta mendorong produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

2) Penanganan Dan Pengembangan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Sektor Kehutanan

Isu perubahan iklim dan perkembangan upaya mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, dapat menjadi peluang baru dalam meningkatkan upaya penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan. Terbitnya kebijakan Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink tahun 2030 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai upaya pencapaian target Kontribusi Nasional yang Ditentukan tahun (*Nationally Determined Contribution/NDC*) tahun 2030 dan percepatan *Long- Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050, merupakan ruang bagi sektor Kehutanan Kalimantan Timur untuk berkontribusi dalam upaya tersebut.

Provinsi Kalimantan Timur yang sedang melaksanakan Program Penurunan Emisi GRK Berbasis Hutan dan Lahan (*East Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction Program/EK-JERP*) melalui skema *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF- Carbon Fund) yang berlangsung hingga 2026, menjadi potensi diperolehnya insentif finansial karbon untuk mendukung pembangunan sektor Kehutanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 adalah ***“Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan”***, dengan menselaraskan pada Tujuan 1 ***“Terwujudnya Kaltim Sukses; Pusat Ekonomi Baru Kawasan Timur Indonesia”*** pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 Provinsi Kalimantan Timur, dengan sasaran perangkat daerah yang meliputi:

- 1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan dengan target tahun 2026 1,51 % dengan indikator kinerja:
 - Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) 6.402.024 M³/tahun
 - Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 1.645 Ton
 - Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan sebesar 3,25 Milyar Rupiah
- 2) Meningkatnya pengelolaan hutan dengan target tahun 2026 seluas 465.671 Ha dengan indikator kinerja:
 - Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola 544.821 Ha
 - Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai 0,23%
 - Luas kawasan yang dikelola masyarakat 370.184 Ha
 - Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) 6%
 - Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) 10%
 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,540
 - Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPADan konservasi provinsi yang dikelola 95,337 Ha.
- 3) Menurunnya Emisi GRK Sektor Kehutanan dengan target tahun 2026 1,74 juta ton CO₂e % dengan indikator kinerja:
 - Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon 1 unit
 - Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4,45%
 - Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi <0,5%

4) Meningkatnya unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target tahun 2026 indeks 87 kepuasan masyarakat perangkat daerah dan nilai 77,50 akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja:

- Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 85,84
- Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti 100%

Berikut Target Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang ditentukan di Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Target Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

Sasaran	Indikator	Target 2026
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan (%)	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	1,51
Meningkatnya pengelolaan hutan (Ha)	Meningkatnya tutupan lahan diwilayah DAS (Ha)	465.671
Menurunnya Emisi GRK Sektor Kehutanan (%)	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU) (juta ton CO ₂ e)	1,74
Meningkatnya unsur penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	87 77,50

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dengan memperhatikan faktor faktor yang menjadi pertimbangan antara lain target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang mengusung Tema “Optimalisasi Diversifikasi Ekonomi Didukung Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”

Melalui program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya pada Tujuan 1 ***“Terwujudnya Kaltim Sukses; Pusat Ekonomi Baru Kawasan Timur Indonesia”*** dengan indikator “Kontribusi PDRB Provinsi Terhadap PDB Nasional (%)” pada Sasaran 1 yaitu “Terakselerasinya Perekonomian Daerah” dan Sasaran 4 “Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan”.

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur, yaitu melalui Program:

1. Program Pengelolaan Hutan pada Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara,
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan (melalui Hutan Rakyat) dengan target 3.583 Hektar lahan yang di hijaukan di luar Kawasan hutan yang dapat ditanami dengan tanaman produktif yang dapat dimanfaatkan untuk nilai tambah ekonomi masyarakat disekitar hutan.
2. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan target 47 Kelompok Usaha Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
 - a. Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dengan target 71 Kelompok Tani Hutan yang mandiri yang mengikuti penguatan pendampingan kelembagaan

- b. Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dengan target 47 Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya
- c. Sub Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial dengan target 23.350 Hektar luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial

Kontribusi sektor Kehutanan dalam mendukung pengentasan kemiskinan secara tidak langsung mendukung pengentasan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Kontribusi sektor Kehutanan dalam mendukung pengentasan kemiskinan secara tidak langsung mendukung pengentasan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Pada Sub Kegiatan Penghijauan Lingkungan, dengan cara pemberian bibit unggul tanaman produktif disertai pemberian pupuk dan upah dilahan masyarakat, yang hasilnya dapat dipanen langsung oleh masyarakat. Pemberian bantuan alat ekonomi produktif bagi kelompok masyarakat di sekitar hutan melalui program Perhutanan Sosial yang diharapkan dapat mempunyai nilai ekonomi dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemberian Bantuan Bibit unggul tanaman produktif yang ditanam didalam Kawasan hutan melalui Program Perhutanan Sosial, yang hasil dari tanaman tersebut bisa langsung dinikmati oleh masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kerhutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 dan Pemuktahirannya. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan 5 (Lima) program dimana 4 (Empat) program adalah program teknis, dan 1 (Satu) program adalah program penunjang, Empat program teknis yang akan dilaksanakan semua merupakan Program Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur karena keempatnya mendukung pencapaian target daerah provinsi kalimantan timur. Program Prioritas adalah program yang mendukung capaian kinerja daerah yang menjadi capaian kinerja Gubernur Kalimantan Timur. Program yang menjadi Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Hutan.
- 2) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 3) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan
- 4) Program Pengelolaan DAS

Program yang mendukung Sasaran Dinas Kehutanan yang pertama “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan (%)” adalah:

- 1) Program Pengelolaan Hutan.
- 2) Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

Program yang mendukung Sasaran Dinas Kehutanan yang kedua “Meningkatnya pengelolaan hutan (Ha)” adalah:

- 1) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das).
- 2) Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
- 3) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Program yang mendukung Sasaran Dinas Kehutanan yang ketiga “Menurunnya Emisi GRK Sektor Kehutanan (%)” adalah:

- 1) Program Pengelolaan Hutan.

Program yang mendukung Dinas Kehutanan yang keempat “Meningkatnya unsur penunjang urusan pemerintahan daerah” adalah:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program dan Kegiatan Tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk memenuhi pelayanan kepada internal ASN terlebih terhadap masyarakat, dimana didalam pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sarana adminisitrasi perkantoran yang memadai, disamping untuk memenuhi kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maupun UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Indikator	Target
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85,84
Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan-kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah antara lain:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Hutan

Program Pengelolaan Hutan yang mendukung sasaran 1 (satu), “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan (%)”. Indikator Program Pengelolaan Hutan yang mendukung sasaran satu adalah:

Indikator	Target
Produksi Hasil Hutan Kayu	6.402.024 M ³ /Tahun
Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1.645 Ton

Kegiatan yang mendukung adalah :

1. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - 1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
2. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - 1) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
 - 2) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
 - 3) Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi

Program Pengelolaan Hutan yang mendukung sasaran 3 (tiga) yaitu Menurunnya Emisi GRK Sektor Kehutanan (%). Indikator Program Pengelolaan Hutan yang mendukung sasaran 3, yaitu :

Indikator	Target
Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	1 Unit
Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4,45%
Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	<0,5%

Kegiatan yang mendukung adalah :

1. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - 1) Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
 - 2) Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
 - 3) Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
2. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 1) Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
 - 2) Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 3) Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
 - 4) Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
3. Perbenihan Tanaman Hutan
 - 1) Sertifikasi Sumber Benih
 - 2) Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
 - 3) Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan
 - 4) Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan

4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
 - 3) Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan
 - 4) Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mendukung sasaran 2 (dua) “Meningkatnya pengelolaan hutan (Ha)”. Indikator Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mendukung sasaran 2 adalah:

Indikator	Target
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,54
Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola	95.337 Ha

Kegiatan yang mendukung adalah :

1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
 - 1) Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
 - 2) Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi
 - 3) Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
 - 4) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi
2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES (*Convension on International Trade In Endangerous Species*) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES

3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

- 1) Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
- 2) Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan mendukung 2 sasaran, sebagai berikut: Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yang mendukung sasaran 1 (satu) “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan (%)”. Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yang mendukung sasaran 1 adalah:

Indikator	Target
Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Rp.3.250.000.000,-

Kegiatan yang mendukung adalah :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - 1) Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
 - 2) Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yang mendukung sasaran 2 (Dua) yaitu “Meningkatnya pengelolaan hutan (Ha)”. Indikator Program Pengelolaan Hutan yang mendukung sasaran 2, yaitu :

Indikator	Target
Luas kawasan yang dikelola masyarakat	370.184 Ha
Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	6%
Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10%

Kegiatan – kegiatan yang mendukung adalah :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - 1) Penyiapan Perhutanan Sosial
2. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - 1) Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
 - 2) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
3. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
 - 2) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
 - 3) Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) mendukung sasaran 2 (dua) yaitu “Meningkatnya pengelolaan hutan (Ha)”. Indikator Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mendukung Tujuan 2 adalah:

Indikator	Target
Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	544.821 Ha
Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,23%

Kegiatan – kegiatan yang mendukung adalah :

1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
 - 2) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
 - 3) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
 - 4) Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai baik yang berasal dari APBD Murni ataupun sumber dana lainnya. Dalam hal ini dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 438.744.661.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Sumber dana yang mendukung program dan kegiatan adalah:

No	Sumber Dana	PAGU INDIKATIF Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Tahun 2026
1	Pajak Daerah	84.222.766.000,-
2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	30.689.230.000,-
3	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	69.258.463.000,-
4	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi	158.574.202.000,-
5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.746.565.086,-
6	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	5.000.000.000,-
Total		438.744.661.000,-

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 (T-C.33.)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Kehutanan				231.044.676.152				270.929.348.338
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				231.044.676.152				270.929.348.338
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				231.044.676.152				270.929.348.338
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		85.84 Indeks 100 %	163.526.310.440			-	173.690.757.304
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan		100 %	750.000.000			-	2.589.238.804
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	248.447.385	DANA BAGI HASIL (DBH)			783.653.644
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	87.892.615	DANA BAGI HASIL (DBH)			174.904.762
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	63.660.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			90.138.682
3	28	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	2 Laporan	150.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			527.476.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	200.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.013.065.716
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan		100 %	153.836.369.761			-	154.206.518.500
3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	724 Orang/ Bulan	153.030.059.280	PAJAK DAERA H, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKA SI UMUM (DAU)			153.386.518.500
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12 Dokumen	506.310.481	DANA BAGI HASIL (DBH)			500.000.000
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Buluminung	21 Laporan	39.350.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			70.000.000
3	28	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	1 Dokumen	28.550.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			40.000.000
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	4 Laporan	203.550.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			170.000.000
3	28	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	1 Dokumen	28.550.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			40.000.000
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		100 %	209.600.000			-	300.000.000
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	209.600.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			300.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100 %	917.575.660			-	1.175.000.000
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	665.975.660	DANA BAGI HASIL (DBH)			670.000.000
3	28	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	110.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			150.000.000
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Orang	141.600.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			355.000.000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	2.169.461.996			-	4.955.000.000
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	55.476.075	DANA BAGI HASIL (DBH)			70.000.000
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	55.404.300	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.900.000.000
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan	Semua Kota/Kab,	1 Paket	43.441.621	PAJAK DAERA			55.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			H, HASIL PENGE LOLAA N KEKAY AAN DAERA H YANG DIPISA HKAN, DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1.795.140.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			2.500.000.000
3	28	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	110.000.000	PAJAK DAERA H, DANA BAGI HASIL (DBH)			225.000.000
3	28	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	110.000.000	PAJAK DAERA H, HASIL PENGE LOLAA N KEKAY AAN DAERA H YANG DIPISA HKAN, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKA SI UMUM (DAU)			205.000.000
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100 %	43.239.703			-	1.400.000.000
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	43.239.703	HASIL PENGE LOLAA N KEKAY AAN DAERA H YANG DIPISA HKAN, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKA SI UMUM (DAU)			1.400.000.000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	4.808.886.250			-	3.710.000.000
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	879.091.850	HASIL PENGE LOLAA N KEKAY AAN DAERA H YANG DIPISA HKAN, DANA BAGI HASIL (DBH)			900.000.000
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	422.688.000	PAJAK DAERA H, DANA BAGI HASIL (DBH)			410.000.000
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3.507.106.400	HASIL PENGE LOLAA N KEKAY AAN DAERA H YANG DIPISA HKAN, SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH)			2.400.000.000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100 %	791.177.070			-	5.355.000.000
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	205.914.624	DANA BAGI HASIL (DBH)			250.000.000
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Unit	97.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			980.000.000
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit	111.612.446	DANA BAGI HASIL (DBH)			125.000.000
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	376.650.000	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA BAGI HASIL (DBH)			4.000.000.000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (Dinas Kehutanan) Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (Dinas Kehutanan)		6.402.024 M3/tahun 1.645 Ton 1 Unit <0,5 % 4.45 %	37.548.255.712			-	48.363.041.674
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		19 Unit	369.766.000			-	921.613.539
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Dokumen	369.766.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			921.613.539

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		5.153.407, 17 hektare	4.172.567.822			-	7.098.990.076
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi								
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	635.216.076	DANA BAGI HASIL (DBH)		635.216.076	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung								
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.	3 Dokumen	376.035.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			376.035.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	03	1.03	0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi								
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	648.742.180	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.000.000.000
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.512.574.566	DANA BAGI HASIL (DBH), FCPF			3.087.739.000
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		300 Hektar	11.450.928.135			-	11.012.283.169
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)								
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	372.093.918	SILPA DBH SDA DR			450.000.000
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	447 Ha	9.176.131.048	SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH), DBH SDA DR			8.650.000.000
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	1.902.703.169	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			1.912.283.169
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		7.592.619 Ha	18.178.515.690			-	24.700.154.890
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8.039.210.362	SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH), FCPF			10.326.112.800
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pe- ngulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam	7 Laporan	7.500.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH), DBH SDA DR, FCPF			11.352.300.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,	2544784 Ha	1.349.556.696	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.621.742.090

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	03	1.05	0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal								
						Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Operasi	1.289.748.632	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.400.000.000
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		1.645 Ton	94.450.000			-	400.000.000
3	28	03	1.06	0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar								
						Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit Managemen	94.450.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			400.000.000
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif		16.499 M3	708.293.000			-	1.100.000.000
3	28	03	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi								
						Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu)	Semua Kota/Kab, Semua	20 Unit Managemen	318.518.000	DANA BAGI HASIL			400.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Administrasi	Kecamatan, Semua Kel/Desa			(DBH)			
3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi								
						Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit Manajemen	389.775.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			700.000.000
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dan Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi		35 Sertifikat	2.573.735.065			-	3.130.000.000
3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih								
						Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Sertifikat	397.636.800	SILPA DBH SDA DR			530.000.000
3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit								
						Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua	25 Laporan	467.430.902	SILPA DBH SDA DR			550.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan								
						Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000 Batang	1.207.291.418	SILPA DBH SDA DR			1.600.000.000
3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan								
						Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua	25 Unit Usaha	501.375.945	SILPA DBH SDA DR			450.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan bibit dalam provinsi	Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks) (Dinas Kehutan) Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Dinas Kehutanan) (Ha)		0,540 Indeks 95.337 Ha	2.500.000.000			-	3.250.000.000
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi		2 Spesies	504.080.000			-	1.000.000.000
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES								
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	504.080.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.000.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP dan Daerah penyangga di KSA/KPA yang dikelola		30.523 Ha	1.995.920.000			-	2.250.000.000
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi								
						Jumlah Kelompok/Masyar akat yang Diberdayakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240 Orang	1.196.552.000	SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH)			1.250.000.000
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi								
						Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai	Kab. Penajam Paser Utara,	30523 Ha	799.368.000	DANA BAGI HASIL			1.000.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ekosistem Penting yang Dikelola	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			(DBH)			
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Dinas Kehutanan) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Dinas Kehutanan) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Dinas Kehutanan)		370,184 hektare 3,25 Miliar Rupiah 6 % 10 %	22.108.500.000			-	42.314.549.360
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		20 Kelompok	22.108.500.000			-	42.314.549.360
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Kelompok	791.200.431	SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH), DBH SDA DR			2.060.450.204

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan								
						Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183 Orang	903.540.839	HASIL PENGE LOLAA N KEKAY AAN DAERA H YANG DIPISA HKAN, SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH), FCPF			1.931.639.548
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.	1018 Orang	17.433.439.681	SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH), DBH SDA DR			27.787.731.057

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	5000 Hektar	1.116.350.998	HASIL PENGE LOLAA N KEKAY AAN DAERA H YANG DIPISA HKAN, SILPA DBH SDA DR		2.580.446.285	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota	5 Unit	1.863.968.051	HASIL PENGE LOLAAN KEKAYA AN DAERAH H YANG DIPIKSA HKAN, SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			7.954.282.266
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (Dinas Kehutanan) Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola		0,23 % 544.821 Ha	5.361.610.000			-	3.311.000.000
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan		1 Dokumen	5.361.610.000			-	3.311.000.000
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota	300 Orang	1.428.275.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.500.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	300.000.000	SILPA DBH SDA DR			400.000.000
3	28	06	1.01	0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah								
						Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	650.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS								
						Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara,	8 Dokumen	2.983.335.000	SILPA DBH SDA DR			1.411.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
					UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto				9.878.839.380				12.108.728.591
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.878.839.380				12.108.728.591
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				9.878.839.380				12.108.728.591
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto) (Indeks) Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto)		85.84 Indeks 100 %	950.950.600			-	1.478.136.311
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	64.440.000			-	140.640.000
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12 Dokumen	64.440.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			140.640.000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum		100 %	17.260.000			-	66.111.781
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Paket	7.260.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			21.572.146
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Paket	10.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			44.539.635
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	826.930.600			-	907.742.600

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	3 Laporan	231.730.600	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			245.650.600
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12 Laporan	595.200.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			662.092.000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik		100 %	42.320.000			-	363.641.930
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	28 Unit	35.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)			336.401.930
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12 Unit	7.320.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			27.240.000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Kayu Produksi hasil hutan bukan kayu		6.402.024 M3 1.645 TON	61.668.024			-	50.000.000
3	28	03	1.02			Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Dokumen	61.668.024			-	50.000.000
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	61.668.024	DBH SDA DR			50.000.000
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	2.1 Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto)		64.814,98 Ha	8.607.763.759			-	10.001.896.729
3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola		64.814,98 Ha	8.607.763.759			-	10.001.896.729
3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi								
						Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.	5 Desa	212.569.105	SILPA DBH SDA DR			300.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa						
3	28	04	1.01	0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi								
						Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	35 Ha	87.840.000	SILPA DBH SDA DR			150.000.000
3	28	04	1.01	0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi								
						Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	412 Ha	6.548.040.662	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			7.551.896.729
3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi								
						Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64814,98 Ha	1.759.313.992	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			2.000.000.000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto) Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto) (Ha) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto) (Rupiah)		0,3 % 10 Hektar 0,03 Miliar Rupiah	258.456.997		-	578.695.551	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5 Kelompok	258.456.997			-	578.695.551
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kelompok	187.030.355	SILPA DBH SDA DR			350.000.000
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Hektar	71.426.642	DBH SDA DR			228.695.551

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat				9.464.450.100				0
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.464.450.100				0
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				9.464.450.100				0
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat) Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat) (Indeks)		100 % 85,84 Indeks	1.858.305.000			-	0
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	67.320.000			-	0
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	12 Dokumen	67.320.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.240.000			-	0
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	8 Paket	10.240.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100 %	909.595.000			-	0
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kel/Desa	1 Unit	909.595.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	810.350.000			-	0
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	3 Laporan	181.550.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung	12 Laporan	628.800.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Disediakan	Redeb						
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik		100 %	60.800.000			-	0
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	24 Unit	60.800.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat) Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat)		< 0,5 % 0,207 %	4.880.720.577			-	0
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	1.971.355.677			-	0
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.971.355.677	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		167 Hektar	1.788.543.466			-	0
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Tumbit Dayak Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	40 Ha	1.637.244.077	SILPA DBH SDA DR			0
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan								
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua	2 Laporan	151.299.389	SILPA DBH SDA DR			0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kel/Desa						
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		771406,25 Hektar	1.120.821.434			-	0
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	250.965.924	SILPA DBH SDA DR			0
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pe- ngulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	12 Laporan	336.883.740	SILPA DBH SDA DR			0
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	242.327 Ha	195.997.150	SILPA DBH SDA DR			0
3	28	03	1.05	0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal								
						Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	4 Operasi	336.974.620	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat) (Ha) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat)		1000 Ha 0,1 Miliar Rupiah 0,53 % 0,3 %	2.414.630.803			-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(Rupiah) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat)							
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5 Kelompok	2.414.630.803			-	0
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	3 Kelompok	543.727.867	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan								
						Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	1 Orang	102.888.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	8 Orang	283.323.815	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	1000 Hektar	407.212.464	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.077.478.657	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat)		0,011 %	310.793.720			-	0
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	310.793.720			-	0
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	7 Orang	310.793.720	SILPA DBH SDA DR			0
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan				9.379.363.350				11.625.120.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.379.363.350				11.625.120.000
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				9.379.363.350				11.625.120.000
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan) (Indeks) Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan)		85.84 Indeks 100 %	1.186.803.600			-	1.925.120.000
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	65.460.000			-	148.800.000
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	65.460.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			148.800.000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			-	25.000.000
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Kota Balikpapan, Semua	2 Paket	10.000.000	DANA BAGI HASIL			25.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kantor yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kel/Desa			(DBH)			
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		100 %	165.630.000			-	200.000.000
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	165.630.000	DBH SDA DR			200.000.000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	895.713.600			-	901.320.000
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	174.393.600	DANA BAGI HASIL (DBH)			180.000.000
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	721.320.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			721.320.000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100 %	50.000.000			-	650.000.000
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Unit	50.000.000	PAJAK DAERA H, DANA BAGI HASIL (DBH)			650.000.000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan di luar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan) Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan)		<0,5 % 0,203 %	5.585.053.368			-	6.700.000.000
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	157.052.700			-	100.000.000
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua	1 Dokumen	157.052.700	DBH SDA DR			100.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Tersusun	Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa						
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		160 Ha	3.270.186.389			-	3.100.000.000
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)								
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	1 Dokumen	53.793.500	DBH SDA DR			100.000.000
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Barat, Bongan, Deraya Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	55 Ha	3.216.392.889	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			3.000.000.000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		332.993,46 Ha	2.157.814.279			-	3.500.000.000
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	12 Dokumen	179.714.558	DBH SDA DR			500.000.000
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pe- ngulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.664.130.706	SILPA DBH SDA DR			2.500.000.000
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang	Kab. Penajam	332.993,46 Ha	313.969.015	DBH SDA			500.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dilakukan pengamanan hutan	Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			DR			
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan)		500 Ha 0,05 Miliar Rupiah 0,3 % 0,53 %	2.286.467.721			-	2.500.000.000
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5 Kelompok	2.286.467.721			-	2.500.000.000
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kelompok	197.160.415	DBH SDA DR			500.000.000
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	181.314.145	DBH SDA DR			250.000.000
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Hektar	221.493.776	SILPA DBH SDA DR			250.000.000
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kab. Kutai Barat, Bongan, Tanjung Soke	1 Unit	1.686.499.385	DBH SDA DR			1.500.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek						
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan)		0,011 %	321.038.661			-	500.000.000
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	321.038.661			-	500.000.000
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	7 Orang	321.038.661	DBH SDA DR			500.000.000
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus				9.033.643.365				8.110.717.450
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.033.643.365				8.110.717.450
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				9.033.643.365				8.110.717.450
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus) (Indeks)		100 % 85.84 Indeks	1.192.595.050			-	0
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	65.460.000			-	0
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	12 Dokumen	65.460.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			-	0
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	1 Paket	10.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	1.067.135.050			-	0
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	3 Laporan	170.015.050	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	12 Laporan	897.120.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100 %	50.000.000			-	0
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	29 Unit	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus) Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus)		0,203 % <0,5 %	7.077.368.500			-	5.900.000.000
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	1.729.243.074			-	200.000.000
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.729.243.074	SILPA DBH SDA DR			200.000.000
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		178 Ha	4.218.833.426			-	4.300.000.000
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)								
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Samarinda,	1 Dokumen	246.479.346	SILPA DBH SDA DR			300.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa						
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	178 Ha	3.972.354.080	DBH SDA DR			4.000.000.000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		330.344 Hektar	1.129.292.000			-	1.400.000.000
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	449.800.000	DBH SDA DR			500.000.000
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pe- ngulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	10 Laporan	370.992.000	DBH SDA DR			500.000.000
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	330344 Ha	308.500.000	DBH SDA DR			400.000.000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus) Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus)		0.53 % 50 Ha 0.3 % 0,03 Miliar Rupiah	563.935.295			-	1.910.717.450
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5 Kelompok	563.935.295			-	1.910.717.450
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	7 Kelompok	163.417.962	DBH SDA DR			310.717.450
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	10 Orang	92.400.000	DBH SDA DR			400.000.000
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	50 Hektar	100.400.000	DBH SDA DR			300.000.000
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	2 Unit	207.717.333	DBH SDA DR			900.000.000
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus)		0,011 %	199.744.520			-	300.000.000
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	199.744.520			-	300.000.000
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	7 Orang	199.744.520	DBH SDA DR			300.000.000
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo				9.541.183.125				14.513.317.670
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.541.183.125				14.513.317.670
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				9.541.183.125				14.513.317.670
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo) (Indeks)		100 % 85.84 Indeks	1.020.890.198			-	1.593.317.670

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan		100 %	63.060.000			-	141.240.000
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	63.060.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			141.240.000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			-	50.000.000
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	10.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	769.124.000			-	773.160.000
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	3 Laporan	216.164.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			220.200.000
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	12 Laporan	552.960.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			552.960.000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100 %	178.706.198			-	628.917.670
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34 Unit	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			500.000.000
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bitasi	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	128.706.198	SILPA DBH SDA DR			128.917.670
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan		<0,5 % 0,207 %	6.133.660.515			-	7.670.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo) Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo)							
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	220.498.510			-	300.000.000
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	220.498.510	DBH SDA DR			300.000.000
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		215 Ha	5.132.416.815			-	6.070.000.000
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)								
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.588.800	DBH SDA DR			70.000.000
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Ha	5.101.828.015	DBH SDA DR			6.000.000.000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		135.680 Ha	780.745.190			-	1.300.000.000
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	386.257.950	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA			500.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hutan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			DR			
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	343.120.000	DBH SDA DR			700.000.000
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135680 Ha	51.367.240	DBH SDA DR			100.000.000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo) (Rupiah) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo)		2.000 Ha 0,2 Miliar Rupiah 0,3 % 0,53 %	2.146.492.652			-	4.750.000.000
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		11 Kelompok	2.146.492.652			-	4.750.000.000
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser,	6 Kelompok	70.729.000	SILPA DBH SDA DR			250.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Orang	25.327.000	SILPA DBH SDA DR			200.000.000
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2000 Hektar	53.275.000	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			300.000.000
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	1.997.161.652	SILPA DBH SDA DR			4.000.000.000
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo)		0,011 %	240.139.760			-	500.000.000
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	240.139.760			-	500.000.000
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	240.139.760	DBH SDA DR			500.000.000
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				11.387.354.460				16.791.564.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				11.387.354.460				16.791.564.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				11.387.354.460				16.791.564.000
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan) (Indeks) Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan)		85.84 indeks 100 %	1.372.116.000			-	1.891.564.000
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	69.113.600			-	154.200.000
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	12 Dokumen	69.113.600	DANA BAGI HASIL (DBH)			154.200.000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			-	100.000.000
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	1 Paket	10.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 % 100 %	1.244.976.000			-	1.256.160.000
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	3 Laporan	288.816.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			300.000.000
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	12 Laporan	956.160.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			956.160.000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100 % 100 %	48.026.400			-	381.204.000
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	4 Unit	37.876.400	DANA BAGI HASIL (DBH)			281.204.000
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	15 Unit	10.150.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan) Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan)		0,203 % <0,5 %	8.354.508.220			-	12.000.000.000
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	531.708.110			-	500.000.000
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	2 Dokumen	531.708.110	SILPA DBH SDA DR			500.000.000
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		626 Ha	6.429.211.900			-	8.000.000.000
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Ha	6.429.211.900	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			8.000.000.000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		261.679 Ha	1.393.588.210			-	3.500.000.000
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	505.868.920	SILPA DBH SDA DR			1.000.000.000
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penan ggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	802.379.290	SILPA DBH SDA DR			2.000.000.000
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.646,90 Ha	85.340.000	SILPA DBH SDA DR			500.000.000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok		0,53 % 0,3 % 0,5 Miliar Rupiah 100 hektar	1.269.369.120			-	2.400.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan) (Rupiah) Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan) (Ha)							
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		8 Kelompok	1.269.369.120			-	2.400.000.000
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	4 Kelompok	264.728.050	SILPA DBH SDA DR			500.000.000
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kutai Kartanegara,	7 Orang	120.285.000	SILPA DBH SDA DR			200.000.000
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	100 Hektar	107.010.000	SILPA DBH SDA DR			200.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	777.346.070	SILPA DBH SDA DR			1.500.000.000
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan)		0,022 %	391.361.120			-	500.000.000
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	391.361.120			-	500.000.000
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Orang	391.361.120	SILPA DBH SDA DR			500.000.000
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan				9.717.863.400				12.135.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.717.863.400				12.135.000.000
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				9.717.863.400				12.135.000.000
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan) Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan)		85.84 Indeks 100 %	2.900.576.164			-	3.535.000.000
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	59.970.000			-	141.240.000
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	59.970.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			141.240.000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.880.500			-	300.000.000
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.880.500	DANA BAGI HASIL (DBH)			300.000.000
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100 %	1.163.717.664			-	1.000.000.000
3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.163.717.664	DBH SDA DR			1.000.000.000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	1.108.297.000			-	1.143.760.000
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	213.097.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			250.000.000
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	895.200.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			893.760.000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100 %	557.711.000			-	950.000.000
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Unit	134.776.000	SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH)			400.000.000
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	17 Unit	20.870.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			150.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Semua Kel/Desa						
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	402.065.000	SILPA DBH SDA DR			400.000.000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan) Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan)		0,203 % <0,5 %	5.463.847.141			-	5.400.000.000
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	596.152.921			-	500.000.000
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	596.152.921	SILPA DBH SDA DR			500.000.000
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		250 Ha	3.266.264.506			-	3.600.000.000
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)								
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	122.055.232	DBH SDA DR			100.000.000
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Ha	3.144.209.274	DBH SDA DR			3.500.000.000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		982.043 Ha	1.601.429.714			-	1.300.000.000
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	46.364.481	SILPA DBH SDA DR			300.000.000
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.384.035.233	DBH SDA DR			800.000.000
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	982043 Ha	171.030.000	SILPA DBH SDA DR			200.000.000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan) Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan)		0,1 Miliar Rupiah 630 Ha 0.3 % 0.53 %	1.129.841.438		-	2.800.000.000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		4 Kelompok	1.129.841.438			-	2.800.000.000
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kelompok	343.813.936	SILPA DBH SDA DR			500.000.000
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	197.522.000	SILPA DBH SDA DR			400.000.000
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650 Hektar	125.667.859	SILPA DBH SDA DR			400.000.000
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	462.837.643	SILPA DBH SDA DR			1.500.000.000
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan)		0,011 %	223.598.657			-	400.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	223.598.657			-	400.000.000
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	223.598.657	DBH SDA DR			400.000.000
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon				12.778.153.920				8.018.317.822
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				12.778.153.920				8.018.317.822
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				12.778.153.920				8.018.317.822
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon) (Indeks) Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon)		85,84 Indeks 100 %	2.678.810.738			-	2.135.169.185
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	60.660.000			-	141.240.000
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	4 Dokumen	60.660.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			141.240.000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			-	127.012.424
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	1 Paket	10.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKA SI UMUM (DAU)			127.012.424
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100 %	1.366.745.938			-	565.713.661
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	4 Paket	386.977.913	DBH SDA DR			0
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	8 Unit	80.535.425	SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH)			103.089.661

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	01	1.07	0010	Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	3 Unit	899.232.600	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			462.624.000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	805.400.000			-	805.400.000
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	3 Laporan	212.240.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			212.240.000
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	12 Laporan	593.160.000	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)			593.160.000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik		100 %	436.004.800			-	495.803.100
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	36 Unit	42.728.000	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)			429.613.100
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	7.272.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			66.190.000
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	3 Unit	386.004.800	SILPA DBH SDA DR			0
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon) Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon)		<0,5 % 0,207 %	7.770.376.139			-	4.983.172.477
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah unit KP/PL yang dikelola		1 Unit	616.522.884			-	357.589.217

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	616.522.884	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			357.589.217
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		236 Hektar	5.767.673.225			-	3.437.963.500
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)								
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	75.507.700	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			56.704.900
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Peningkatan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86 Ha	5.692.165.525	SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH), DBH SDA DR			3.381.258.600
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		655874,58 Hektar	1.386.180.030			-	1.187.619.760
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	43.341.000	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			187.619.760
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Peran gulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	689.228.626	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			668.365.100
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	655.874,58 Ha	653.610.404	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			331.634.900
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon) Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan		0,3 % 1100 Hektar 0,53 % 0,1 Miliar Rupiah	1.874.325.383			-	899.976.160

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hutan Produksi Bengalon) (Ha) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon) (Rupiah)							
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		7 Kelompok	1.874.325.383			-	899.976.160
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kelompok	239.769.689	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			256.400.766
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan								
						Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	51.650.000	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			69.440.000
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1100 Hektar	301.813.024	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			146.329.348
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	1.281.092.670	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			427.806.046
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon)		0,011 %	454.641.660			-	0
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	454.641.660			-	0
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Orang	454.641.660	DBH SDA DR			0
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau				9.512.900.685				0
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.512.900.685				0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				9.512.900.685				0
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau) Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau)		100 % 85.84 Indeks	1.020.102.000			-	0
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	70.920.000			-	0
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	70.920.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			-	0
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	7 Paket	10.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	889.182.000			-	0
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	195.702.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	693.480.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100 %	50.000.000			-	0
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Unit	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi		0,193 % <0,5 %	7.043.201.820			-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau) Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau)							
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	723.141.908			-	0
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	723.141.908	DBH SDA DR			0
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		190 Hektar	5.447.533.184			-	0
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Ha	5.179.113.168	DBH SDA DR			0
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Laporan	268.420.016	DBH SDA DR			0
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		194.381 Hektar	872.526.728			-	0
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	373.992.000	DBH SDA DR			0
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pe- nggulan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	30 Laporan	365.378.800	SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH), DBH SDA DR			0
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194381 Ha	133.155.928	DBH SDA DR			0
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)		1500 Ha 0,05 Miliar Rupiah 0.53 % 0.3 %	743.518.180			-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau)							
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3 Kelompok	743.518.180			-	0
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kelompok	161.820.000	SILPA DBH SDA DR			0
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	138.600.000	DBH SDA DR			0
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Hektar	111.329.980	DBH SDA DR			0
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua	2 Unit	331.768.200	DBH SDA DR			0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kel/Desa						
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau)		0,011 %	706.078.685			-	0
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	706.078.685			-	0
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	706.078.685	DBH SDA DR			0
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara				8.949.036.575				12.092.015.707
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.949.036.575				12.092.015.707
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				8.949.036.575				12.092.015.707
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara) Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara) (Indeks)		100 % 85,84 Indeks	2.768.627.530			-	2.981.201.261
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	67.140.000			-	77.140.000
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	67.140.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			77.140.000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			-	62.573.731
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	10.000.000	SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH)			62.573.731
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100 %	1.972.968.280			-	1.982.968.280
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.972.968.280	DBH SDA DR			1.982.968.280

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	668.519.250			-	778.519.250
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	118.799.250	DANA BAGI HASIL (DBH)			128.799.250
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	549.720.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			649.720.000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100 %	50.000.000			-	80.000.000
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Unit	30.050.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			40.050.000
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	9.950.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			19.950.000
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	10.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			20.000.000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara) Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara)		< 0,5 % 0,203 %	4.882.482.337			-	6.296.505.162
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Dokumen	167.378.664			-	189.992.970
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	167.378.664	SILPA DBH SDA DR			189.992.970

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		195 Ha	3.989.420.145			-	4.038.859.675
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)								
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	71.969.500	SILPA DBH SDA DR			111.409.030
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Ha	3.917.450.645	DBH SDA DR			3.927.450.645
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		260.147 Hektar	725.683.528			-	2.067.652.517
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	105.019.990	SILPA DBH SDA DR			350.000.000
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	317.772.538	SILPA DBH SDA DR			500.106.117
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260147 Ha	177.479.000	SILPA DBH SDA DR			857.555.000
3	28	03	1.05	0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal								
						Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Operasi	125.412.000	SILPA DBH SDA DR			359.991.400
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		0,540 Indeks	48.521.660			-	314.603.591
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi		2 Spesies	48.521.660			-	314.603.591
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES								
						Jumlah Laporan Pengendalian dan	Kab. Berau, Semua	1 Laporan	48.521.660	SILPA DBH			314.603.591

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Kecamatan, Semua Kel/Desa			SDA DR			
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara) (Rupiah) Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara) (Ha) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara)		0,53 % 0,1 Miliar Rupiah 1000 Hektar 0,3 %	946.688.708			-	1.799.705.693
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5 Kelompok	946.688.708			-	1.799.705.693
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kelompok	354.473.015	SILPA DBH SDA DR			487.880.000
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan								
						Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	42.000.000	SILPA DBH SDA DR			146.034.000
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	42.000.000	SILPA DBH SDA DR			275.976.000
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Hektar	138.417.413	SILPA DBH SDA DR			387.817.413
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	369.798.280	SILPA DBH SDA DR			501.998.280
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara)		0,011 %	302.716.340			-	700.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	302.716.340			-	700.000.000
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Orang	302.716.340	SILPA DBH SDA DR			700.000.000
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah				8.771.809.220				10.450.500.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.771.809.220				10.450.500.000
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				8.771.809.220				10.450.500.000
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah) (Indeks) Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah)		85,84 Indeks 100 %	1.001.718.000			-	1.455.500.000
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 Persen	60.040.000			-	150.000.000
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas								
					ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	12 Dokumen	60.040.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			150.000.000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	11.520.317			-	50.500.000
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	11.520.317	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.500.000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 Persen	880.160.683			-	955.000.000
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	155.480.683	DANA BAGI HASIL (DBH)			205.000.000
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	724.680.000	PAJAK DAERA H, DANA BAGI HASIL (DBH)			750.000.000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi		100 Persen	49.997.000			-	300.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemerintahan Daerah	Dengan Baik							
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	49.997.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			300.000.000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah) Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah)		<0,5 % 0,203 %	4.781.978.948			-	5.990.000.000
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	188.399.988			-	550.000.000
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	188.399.988	SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH)			550.000.000
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		180 Ha	3.545.191.000			-	4.000.000.000
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Berau, Sambaliung, Pilsanjau Kab. Berau, Tabalar, Tabalar Ulu Kab. Berau, Tabalar, Tubaan	60 Ha	3.545.191.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			4.000.000.000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		334.455,70 Ha	1.048.387.960			-	1.440.000.000
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Berau, Kelay, Panaan Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab. Berau, Sambaliung, Pilsanjau Kab. Berau, Sambaliung, Long Lanuk Kab. Berau, Tabalar, Semurut Kab. Berau,	12 Dokumen	190.968.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			400.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Tabalar, Tabalar Ulu						
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penan ggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	12 Laporan	776.283.300	DANA BAGI HASIL (DBH)			950.000.000
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab. Berau, Kelay, Panaan Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Tabalar Ulu	334.455,7 Ha	81.136.660	SILPA DBH SDA DR			90.000.000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah) (Ha) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah) (Rupiah)		1000 Ha 0,3 % 0,53 % 0,05 Miliar Rupiah	2.670.828.262			-	2.705.000.000
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6 Kelompok	2.670.828.262			-	2.705.000.000
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Berau, Sambaliung, Pesayan Kab. Berau, Sambaliung, Pilanjau Kab. Berau, Tabalar, Tubaan	3 Kelompok	77.580.000	SILPA DBH SDA DR			75.000.000
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan								
						Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	51.191.140	SILPA DBH SDA DR			150.000.000
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	51.890.000	SILPA DBH SDA DR			150.000.000
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	1000 Hektar	134.280.000	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKA SI UMUM (DAU)			130.000.000
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab. Berau, Sambaliung, Pilanjaw Kab. Berau, Sambaliung, Long Lanuk	3 Unit	2.355.887.122	SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH)			2.200.000.000
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah)		0,011 %	317.284.010			-	300.000.000
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	317.284.010			-	300.000.000
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Orang	317.284.010	DBH SDA DR			300.000.000
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai				8.966.382.470				9.858.221.296
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.966.382.470				9.858.221.296
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				8.966.382.470				9.858.221.296
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai) Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai) (Indeks)		100 % 85,84 Indeks	1.558.128.800			-	1.918.040.000
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	58.320.000			-	58.320.000
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua	12 Dokumen	58.320.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			58.320.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			-	20.000.000
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kel/Desa	10 Paket	10.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			20.000.000
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100 %	750.451.200			-	1.100.000.000
3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa	3 Unit	750.451.200	SILPA DBH SDA DR			1.100.000.000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	689.357.600			-	689.720.000
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	139.637.600	DANA BAGI HASIL (DBH)			140.000.000
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	549.720.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			549.720.000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100 %	50.000.000			-	50.000.000
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai) Persentase luas		0,203 % <0,5 %	5.076.509.936			-	5.210.044.636

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai)							
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	332.606.656			-	399.806.656
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	332.606.656	SILPA DBH SDA DR			399.806.656
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		140 Ha	3.264.345.040			-	3.770.000.000
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)								
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	94.000.000	SILPA DBH SDA DR			170.000.000
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa	40 Ha	3.170.345.040	DBH SDA DR			3.600.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa						
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		149.826 Ha	1.479.558.240			-	1.040.237.980
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	587.517.080	DBH SDA DR			650.000
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pe- ngulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	749.995.320	DBH SDA DR			800.000.000
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	149826 Ha	84.822.920	SILPA DBH SDA DR			150.000.000
3	28	03	1.05	0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal								
						Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	4 Operasi	57.222.920	SILPA DBH SDA DR			89.587.980
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai) Persentase Peningkatan		0,3 % 0,53 % 500 Ha 0,205 Miliar Rupiah	2.086.607.074			-	2.485.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai) Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai) (Ha) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai) (Rupiah)							
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3 Kelompok	2.086.607.074			-	2.485.000.000
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kelompok	128.635.920	SILPA DBH SDA DR			120.000.000
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan								
						Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	78.720.000	DBH SDA DR			85.000.000
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Orang	162.720.000	DBH SDA DR			180.000.000
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Hektar	80.070.000	SILPA DBH SDA DR			100.000.000
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.636.461.154	SILPA DBH SDA DR			2.000.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai)		0,011 %	245.136.660			-	245.136.660
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	245.136.660			-	245.136.660
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	7 Orang	245.136.660	DBH SDA DR			245.136.660
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar				9.243.311.050				10.980.108.086
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.243.311.050				10.980.108.086
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				9.243.311.050				10.980.108.086
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar) Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatian (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar) (Indeks)		100 % 85,84 Indeks	996.510.000			-	1.103.569.390
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	60.600.000			-	139.200.000
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	12 Dokumen	60.600.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			139.200.000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			-	84.569.390
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,	1 Paket	10.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			84.569.390

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Disediakan	Sangatta Utara						
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	871.080.740			-	879.800.000
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang , Benua Baru	3 Laporan	221.280.740	DANA BAGI HASIL (DBH)			230.000.000
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang , Benua Baru	12 Laporan	649.800.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			649.800.000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100 %	54.829.260			-	0
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	35 Unit	54.829.260	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar) Persentase luas kerusakan kawasan hutan di luar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar)		0,203 % <0,5 %	6.952.960.969			-	7.819.998.920
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	443.051.377			-	479.631.810
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangkulirang , Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua	1 Dokumen	443.051.377	DBH SDA DR			479.631.810

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa						
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		191 Hektar	4.236.838.225			-	5.150.000.000
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)								
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang , Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	135.443.810	DBH SDA DR			150.000.000
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang , Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	65 Ha	4.101.394.415	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			5.000.000.000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		239,248 Hektar	2.273.071.367			-	2.190.367.110
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang , Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	488.060.325	DBH SDA DR			490.367.110
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penan- ggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang , Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	12 Laporan	605.490.988	DBH SDA DR			0
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang	Kab. Kutai Timur,	239,248 Ha	557.199.760	DBH SDA			700.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dilakukan pengamanan hutan	Sangkulirang , Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa			DR			
3	28	03	1.05	0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal								
						Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang , Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	4 Operasi	622.320.294	DBH SDA DR			1.000.000.000
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar)		0,540 Indeks	68.373.270			-	200.000.000
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi		2 Spesies	68.373.270			-	200.000.000
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES								
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang , Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	68.373.270	DBH SDA DR			200.000.000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar) Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar) (Ha) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar) (Rupiah)		0,53 % 300 Ha 0,03 Miliar Rupiah 0,3 %	914.935.231			-	1.500.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar)							
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5 Kelompok	914.935.231			-	1.500.000.000
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliurang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	4 Kelompok	83.905.719	DBH SDA DR			500.000.000
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan								
						Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	1 Orang	94.080.000	DBH SDA DR			100.000.000
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliurang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	1 Orang	137.804.782	DBH SDA DR			200.000.000
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliurang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	300 Hektar	102.492.945	DBH SDA DR			200.000.000
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tanjung Mangkalia	1 Unit	496.651.785	DBH SDA DR			500.000.000
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar)		0,011 %	310.531.580			-	356.539.776

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	310.531.580			-	356.539.776
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang , Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	7 Orang	310.531.580	DBH SDA DR			356.539.776
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau				9.114.958.970				10.148.043.594
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.114.958.970				10.148.043.594
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				9.114.958.970				10.148.043.594
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau) (Indeks) Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau)		85,84 Indeks 100 %	1.031.719.400			-	1.501.850.400
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	65.460.000			-	148.800.000
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	65.460.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			148.800.000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			-	173.070.000
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			173.070.000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	906.259.400			-	849.594.400
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	240.259.400	DANA BAGI HASIL (DBH)			239.848.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	666.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			609.746.400
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100 %	50.000.000			-	330.386.000
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34 Unit	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			330.386.000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau) Persentase luas kerusakan kawasan hutan di luar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau)		0,207 % <0,5 %	6.602.021.290			-	7.361.193.332
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	500.000.000			-	499.999.694
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	500.000.000	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			499.999.694
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		230 Hektar	5.252.021.290			-	5.061.193.638
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	60 Ha	5.252.021.290	DBH SDA DR			5.061.193.638

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa						
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		939.988,16 6043245 Hektar	850.000.000			-	1.800.000.000
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000	SILPA DBH SDA DR			276.347.570
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Perlindungan Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	350.000.000	SILPA DBH SDA DR			559.976.408
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	939.988,17 Ha	100.000.000	SILPA DBH SDA DR			163.676.022
3	28	03	1.05	0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal								
						Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang,	4 Operasi	200.000.000	SILPA DBH SDA DR			800.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa						
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau) (Ha) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau) (Rupiah) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau)		1500 Ha 0,03 Miliar Rupiah 0,53 % 0,3 %	1.218.941.000			-	1.084.999.862
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3 Kelompok	1.218.941.000			-	1.084.999.862
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	2 Kelompok	75.000.000	SILPA DBH SDA DR			150.000.000
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan								
						Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	50.200.000	SILPA DBH SDA DR			50.000.000
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	50.200.000	SILPA DBH SDA DR			135.000.000
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau,	1500 Hektar	516.900.000	DBH SDA DR			249.999.862

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa						
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	1 Unit	526.641.000	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			500.000.000
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau)		0,011 %	262.277.280			-	200.000.000
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	262.277.280			-	200.000.000
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	7 Orang	262.277.280	DBH SDA DR			200.000.000
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam				10.947.095.670				12.080.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				10.947.095.670				12.080.000.000
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				10.947.095.670				12.080.000.000
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam) (Indeks) Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam)		85.84 Indeks 100 %	1.061.377.200			-	0
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	65.460.000			-	0
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12 Dokumen	65.460.000	HASIL PENGE LOLAAN KEKAYAAN			0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										DAERA H YANG DIPISA HKAN, DANA BAGI HASIL (DBH)			
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			-	0
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10 Paket	10.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	935.917.200			-	0
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3 Laporan	204.157.200	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12 Laporan	731.760.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100 %	50.000.000			-	0
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	17 Unit	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam) Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam)		0,203 % <0,5 %	4.496.823.100			-	5.130.000.000
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	244.080.000			-	280.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Dokumen	244.080.000	DBH SDA DR			280.000.000
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		50 ha	2.096.519.800			-	3.200.000.000
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)								
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	156.000.000	SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH)			200.000.000
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	50 Ha	369.519.800	SILPA DBH SDA DR			1.000.000.000
3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan								
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Ha	1.571.000.000	DBH SDA DR			2.000.000.000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		108.707,95 ha	2.156.223.300			-	1.650.000.000
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	931.743.100	DBH SDA DR			700.000.000
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pe- ngulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1.199.480.200	SILPA DBH SDA DR			750.000.000
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108707.29 Ha	25.000.000	SILPA DBH SDA DR			200.000.000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam) (Ha) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam) (Rupiah)		500 Hektar 0,3 % 0,53 % 0,6 Miliar Rupiah	5.342.415.370		-	6.850.000.000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		4 Kelompok	5.342.415.370			-	6.850.000.000
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	2 Kelompok	403.968.000	DBH SDA DR			500.000.000
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	30 Orang	150.000.000	DBH SDA DR			300.000.000
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki Kab. Kutai	500 Hektar	191.109.700	DBH SDA DR			250.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang						
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	3 Unit	4.597.337.670	DBH SDA DR			5.800.000.000
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam)		0,011 %	46.480.000			-	100.000.000
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	46.480.000			-	100.000.000
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Orang	46.480.000	DBH SDA DR			100.000.000
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai				9.148.117.280				1.600.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.148.117.280				1.600.000.000
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				9.148.117.280				1.600.000.000
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai) Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai)		85.84 Indeks 100 %	1.959.675.600			-	0
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	65.460.000			-	0
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	65.460.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			-	0
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua	1 Paket	10.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kel/Desa						
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	866.124.000			-	0
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	107.004.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	759.120.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100 %	1.018.091.600			-	0
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Unit	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	968.091.600	DBH SDA DR			0
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai) Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Pengelolaan Hutan Produksi Damai)		<0,5 % 0,203 %	5.584.308.060			-	0
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	670.002.528			-	0
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	670.002.528	SILPA DBH SDA DR			0
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan		175 Hektar	3.831.831.270			-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dipelihara							
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Ha	3.831.831.270	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			0
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		516.533 Ha	1.082.474.262			-	0
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	239.368.272	SILPA DBH SDA DR			0
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Plan ggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	592.622.300	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			0
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	516533 Ha	171.022.790	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			0
3	28	03	1.05	0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal								
						Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Operasi	79.460.900	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			0
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai)		0,540 Indeks	63.480.000			-	0
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi		2 Spesies	63.480.000			-	0
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES								
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	63.480.000	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			0
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai) Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai)		0.3 % 200 Ha 0,125 Miliar Rupiah 0.53 %	1.202.309.820			-	1.600.000.000
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		4 Kelompok	1.202.309.820			-	1.600.000.000
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kelompok	93.671.820	DBH SDA DR			100.000.000
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan								
						Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	7 Orang	102.480.000	DBH SDA DR			150.000.000
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	328.200.000	DBH SDA DR			350.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Hektar	97.259.500	SILPA DBH SDA DR			0
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	580.698.500	SILPA DBH SDA DR			1.000.000.000
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai)		0,011 %	338.343.800			-	0
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	338.343.800			-	0
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Orang	338.343.800	DBH SDA DR			0
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn				9.584.055.800				0
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.584.055.800				0
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				9.584.055.800				0
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor		85,84 Indeks 100 %	1.300.639.532			-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Bulatan) (Indeks) Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatan							
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan		100 %	60.660.000			-	0
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	60.660.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			-	0
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	10.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100 %	377.919.532			-	0
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	377.919.532	SILPA DBH SDA DR			0
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	802.060.000			-	0
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	117.700.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	684.360.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100 %	50.000.000			-	0
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	45.570.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	4.430.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn) Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn)		<0,5 % 0,203 %	5.669.398.048			-	0
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPH/L yang dikelola		1 Unit	991.883.608			-	0
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	991.883.608	SILPA DBH SDA DR			0
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		145 Hektar	3.592.562.100			-	0
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)								
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	180.000.000	DBH SDA DR			0
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,	65 Ha	3.412.562.100	DBH SDA DR			0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Semua Kel/Desa						
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		410.738 Hektare	1.084.952.340			-	0
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	168.060.000	SILPA DBH SDA DR			0
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Plan ggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	754.732.340	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			0
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.738 Ha	162.160.000	SILPA DBH SDA DR			0
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatan) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatan) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatan) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatan)		2.000 Hektar 0,53 % 0,3 % 0,15 Miliar Rupiah	2.355.984.520			-	0
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6 Kelompok	2.355.984.520			-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kelompok	259.533.750	DBH SDA DR			0
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	93.000.000	SILPA DBH SDA DR			0
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2000 Hektar	200.000.000	DBH SDA DR			0
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.803.450.770	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			0
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn)		0,011 %	258.033.700			-	0
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	258.033.700			-	0
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Orang	258.033.700	DBH SDA DR			0
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake				9.355.216.000				10.729.794.830
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.355.216.000				10.729.794.830

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				9.355.216.000				10.729.794.830
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake) Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Pengelolaan Hutan Produksi Telake)		85.84 Indeks 100 %	1.508.381.500			-	2.114.453.300
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	70.320.000			-	163.680.000
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	1 Dokumen	70.320.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			163.680.000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			-	10.000.000
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	1 Paket	10.000.000	SILPA DBH SDA DR			10.000.000
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100 %	350.000.000			-	350.000.000
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	350.000.000	SILPA DBH SDA DR			350.000.000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	1.028.061.500			-	1.330.262.000
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	3 Laporan	165.861.500	DANA BAGI HASIL (DBH)			160.862.000
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	12 Laporan	862.200.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.169.400.000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100 %	50.000.000			-	260.511.300
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	40 Unit	42.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			235.571.300
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	38 Unit	8.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			24.940.000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake) Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake)		0,207 % <0,5 %	5.614.334.500			-	5.874.341.530
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	750.000.000			-	750.000.000
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	3 Dokumen	750.000.000	SILPA DBH SDA DR			750.000.000
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		145 Ha	3.484.341.420			-	3.744.348.450
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)								
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	2 Dokumen	122.746.920	SILPA DBH SDA DR			122.746.920
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Ha	3.188.334.500	DANA BAGI HASIL (DBH)			3.448.341.530
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan								
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	173.260.000	SILPA DBH SDA DR			173.260.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		245.390 Ha	1.379.993.080			-	1.379.993.080
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	229.993.080	SILPA DBH SDA DR			229.993.080
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penan ggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	950.000.000	SILPA DBH SDA DR			950.000.000
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.694 Ha	200.000.000	DBH SDA DR			200.000.000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake) (Rupiah) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Pengelolaan Hutan Produksi Telake) Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Pengelolaan Hutan Produksi Telake) (Ha) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Pengelolaan Hutan Produksi Telake)		0,05 Miliar Rupiah 0.3 % 100 Ha 0.53 %	1.924.000.000			-	2.432.500.000
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6 Kelompok	1.924.000.000			-	2.432.500.000
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kelompok	300.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			300.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Hektar	124.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			124.000.000
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	1.500.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			2.008.500.000
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake)		0,011 %	308.500.000			-	308.500.000
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	308.500.000			-	308.500.000
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	308.500.000	DBH SDA DR			308.500.000
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan				12.306.809.594				17.658.826.274
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				12.031.373.594				17.658.826.274
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				12.031.373.594				17.658.826.274
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan) Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan)		85.84 Indeks 100 %	2.418.312.392			-	2.016.004.000
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Laporan 12 Dokumen	61.200.000			-	0
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	12 Dokumen	61.200.000	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3 Paket 8 Paket 50 Paket 20 Paket 12 Laporan	1.107.388.392			-	1.600.000.000
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	10 Paket	397.578.392	SILPA DBH SDA DR, DANA BAGI HASIL (DBH), DBH SDA DR			700.000.000
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12 Laporan	709.810.000	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			900.000.000
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		14 Unit 5 Paket	416.004.000			-	416.004.000
3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	2 Unit	416.004.000	DBH SDA DR			416.004.000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	783.720.000			-	0
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha	1 Laporan	783.720.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Disediakan	Indah						
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		41 Unit 50 Unit	50.000.000			-	0
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	22 Unit	47.970.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	3 Unit	2.030.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan) Persentase luas kerusakan kawasan hutan di luar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan)		0,184 % <0,5 %	3.924.279.484			-	4.700.920.400
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	1.200.920.400			-	1.200.920.400
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Dokumen	1.200.920.400	DBH SDA DR			1.200.920.400
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		57 Ha	1.723.359.084			-	2.500.000.000
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	37 Ha	1.723.359.084	DBH SDA DR			2.500.000.000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan	Luas Kegiatan Perlindungan		16.115 Ha	1.000.000.000			-	1.000.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Hutan							
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	150.000.000	DBH SDA DR			150.000.000
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penan- ggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	450.000.000	DBH SDA DR			450.000.000
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.115 Ha	400.000.000	DBH SDA DR			400.000.000
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan)		0,540 Indeks	100.000.000			-	100.000.000
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi		2 Spesies	100.000.000			-	100.000.000
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000	DBH SDA DR			100.000.000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan) Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan) (Ha) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan) (Rupiah)		0,53 % 0,3 % 50 Ha 0,7 Miliar Rupiah	5.177.811.718			-	10.341.901.874
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6 Kelompok	5.177.811.718			-	10.341.901.874
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kelompok	200.000.000	DBH SDA DR			200.000.000
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	50 Hektar	100.000.000	DBH SDA DR			150.000.000
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai	4 Unit	4.877.811.718	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			9.991.901.874

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pinang Luar						
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan)		0,011 %	410.970.000			-	500.000.000
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	410.970.000			-	500.000.000
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	7 Orang	410.970.000	DBH SDA DR			500.000.000
X					NON URUSAN				275.436.000				0
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				275.436.000				0
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan) Persentase Keluhan Penggungan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan)		85.84 Indeks 100 %	275.436.000			-	0
X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	275.436.000			-	0
X	XX	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	3 Laporan	275.436.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook				20.619.440.434				13.068.022.800
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				20.619.440.434				13.068.022.800
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				20.619.440.434				13.068.022.800
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Penggungan Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook)		100 % 85,84 Indeks	6.041.363.260			-	554.973.500
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100 %	58.800.000			-	137.160.000
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,	12 Dokumen	58.800.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			137.160.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Tugas ASN	Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			-	0
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	10.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100 %	5.465.000.000			-	0
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	4.890.000.000	DBH SDA DR			0
3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	575.000.000	DBH SDA DR			0
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100 %	457.563.260			-	314.800.000
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	152.763.260	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua	12 Laporan	304.800.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			314.800.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik		100 %	50.000.000			-	103.013.500
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Unit	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			103.013.500
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook) Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (UPTD Kesatuan Pengelolaan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook)		<0,5 % 0,193 %	11.264.362.468			-	9.822.826.494
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola		1 Unit	985.000.000			-	250.000.000
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	985.000.000	DBH SDA DR			250.000.000
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		138 Hektar	7.549.826.494			-	7.349.826.494
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)								
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	300.000.000	SILPA DBH SDA DR			100.000.000
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Negara								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	86 Ha	6.649.826.494	SILPA DBH SDA DR			6.649.826.494
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan								
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	11 Laporan	600.000.000	DBH SDA DR			600.000.000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		644.456 Hektar	2.729.535.974			-	2.223.000.000
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan								
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	890.000.000	DBH SDA DR			890.000.000
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pe- ngulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.506.535.974	SILPA DBH SDA DR, DBH SDA DR			1.000.000.000
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan								
						Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	644.456 Ha	333.000.000	SILPA DBH SDA DR			333.000.000
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook)		0,540 Indeks	450.000.000			-	0
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi		2 Spesies	450.000.000			-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi								
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES								
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	450.000.000	DBH SDA DR			0
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook) Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook) Luas kawasan yang dikelola masyarakat (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook)		0,3 % 0,05 Miliar Rupiah 5.000 Ha 0,53 %	2.357.925.000			-	2.184.433.100
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3 Kelompok	2.357.925.000			-	2.184.433.100
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan								
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kelompok	502.498.933	DBH SDA DR			351.380.000
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan								
						Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	63.000.000	DBH SDA DR			84.920.000
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan								
						Jumlah SDM bidang kehutanan	Semua Kota/Kab,	1 Orang	113.400.000	DBH SDA			126.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						yang meningkat kapasitasnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			DR			
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial								
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	5000 Hektar	123.325.000	DBH SDA DR			123.325.000
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial								
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.555.701.067	DBH SDA DR			1.498.808.100
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook)		0,011 %	505.789.706			-	505.789.706
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola		1 DAS	505.789.706			-	505.789.706
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	7 Orang	505.789.706	SILPA DBH SDA DR			505.789.706
Jumlah									438.744.661.000				462.897.646.458

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kehutanan tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian ada keselarasan antara prioritas Perangkat Daerah dengan tema dan prioritas Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Rencana kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi / mitra kerja untuk inventarisasi dan sinkronisasi dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Kontribusi berbagai pihak terkait dengan sektor kehutanan dalam mewujudkan tercapainya tujuan yang ditetapkan yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi serta Penurunan Emisi Sektor Kehutanan

5.1. Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja

Rencan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 memerlukan langkah – langkah praktis dan strategis namun harus tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. adapun beberapa kaidah pelaksanaan Renja 2026 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan

subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

5. Renja Tahun 2026 merupakan rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi sesuai peranannya masing – masing;
6. Renja tahun 2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026;
7. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 wajib dilaksanakan oleh seluruh Kepala Bidang dan Kepala UPTD beserta unit- unit dibawahnya dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Renca Kerja Tahun 2026 yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

RENJA TAHUN 2026
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA
MINERAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai turunan pelaksanaan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (dst.), Pemerintah Daerah diminta untuk mulai menyusun Rancangan Awal RKPD sejak Bulan Desember tahun (n-2) perencanaan untuk selanjutnya menjadi bahan Konsultasi Publik. Sedangkan pada masa tersebut, penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 masih belum ditetapkan. Terhadap hal tersebut, maka penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 untuk sementara masih berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang telah memuat penjabaran visi, misi, dan program unggulan Gubernur/Wakil Gubernur.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan rencana tahunan pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dimana :

1. Dokumen Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

2. Dokumen Rencana Kerja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Dokumen Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Selain itu, Dalam penyusunan Ranhir Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur harus mengimplementasikan dan melaksanakan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) dengan menyelaraskan kebijakan, program, dan proyek pembangunan dengan prinsip-prinsip TPB yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Ranhir Rencana Kerja Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui 6 (enam) tahapan sebagai berikut

1. Persiapan Penyusunan;
2. Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja;
3. Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja;
4. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja;
5. Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tugas pokok dan fungsi serta

kewenangannya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55333);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dimaksudkan untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, sesuai dengan rencana program prioritas yang telah digariskan dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dirangkum dalam 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

- Bab I : menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Rencana Kerja meliputi latar belakang perlunya penyusunan Rencana Kerja, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.
- Bab II : menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- Bab III : menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, yang ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan nasional dalam sektor energi dan sumberdaya mineral.
- Bab IV : menguraikan rencana kerja dan kerangka pendanaan perangkat daerah.
- Bab V : merupakan bab penutup, berisi catatan penting yang menjadi perhatian dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari periode perencanaan strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Pelaksanaan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Tahun 2024 yang tertuang ke dalam 5 program dan 21 kegiatan dan 54 sub kegiatan, strategis dan administratif, secara umum dapat dilaksanakan sesuai rencana, berdasarkan pencapaian target kinerja keluaran masing-masing program/kegiatan, namun ada 2 Program yang tidak memenuhi Target Realisasi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program/kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 116,556,892,224 dengan realisasi sebesar Rp. 79,394,535,862.48 atau sebesar 68.12%.

Tabel 2.1
Capaian Realisasi Program Tahun 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN %
				TARGET	REALISASI	
1	PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	92.97	93.06	100.10
		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	34.10	34.29	100.55
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	250	178.4	71.36
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100.00	100	100.00
2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi	%	33.56	52.44	156.26
		Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	TonCoe/Tahun	243,246.51	1,180,525.00	485.32
		Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	%	43.76	43.98	100.50
3	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	Point	84.2	91.69	108.90
		Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	100.00
4	PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	%	45.38	51.37	113.20
5	PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	%	100	100	100.00

Rata-rata tingkat pencapaian target kinerja kegiatan Tahun 2024 yang mengacu pada indikator kinerja Outcome adalah 139.65% sehingga kinerja seluruh kegiatan secara umum dapat dikategorikan Baik.

Tabel 2.2
Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	250	178.4	kWp	71.36	Tertundanya penyelesaian pembangunan PLTS Terpusat 3 lokasi antara lain : 1. Pembangunan PLTS Terpusat OFF-Grid Desa Batoq Kelo 2. Pembangunan PLTS Terpusat OFF-Grid Desa Wana Pariq 3. Pembangunan PLTS Terpusat OFF-Grid Desa Tri Pariq

Tabel 2.3
Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100.00	100.00	%	100.00	Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100.00	100.00	%	100.00	

Tabel 2.4
Realisasi program yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	92.97	93.06	%	100.10	
	Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	34.10	34.29	%	100.55	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi	33.56	52.44	%	156.26	
	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	243,246.51	1,180,525.00	TonCoe/Tahun	485.32	
	Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	43.76	43.98	%	100.50	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84.2	91.69	Point	108.90	
PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	45.38	51.37	%	113.20	

Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya dan melebihi target kinerja program pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 (n-2) disebabkan dari beberapa factor internal dan eksternal. Berikut factor-faktor penyebabnya antara lain :

a. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Program/Kegiatan

Pertama, Responsif masyarakat dalam menanggapi program dari pemerintah cukup baik, hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat yang secara aktif turut serta secara langsung mengawasi progam dan kegiatan pemerintah serta berkontribusi dalam hal-hal memecahkan masalah yang timbul untuk perbaikan kearah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan khususnya Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Energi Terbarukan.

Kedua, meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam pencapaian realisasi yang melebihi target karena seluruh rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Prov. Kaltim berjalan sesuai rencana, yaitu Pembangunan PLTS off Grid sebanyak 6 unit diantaranya :

Selain itu terdapat beberapa tambahan pembangunan yaitu pemasangan sambungan gratis hingga Tahun 2025 pada rumah warga di Kabupaten Kukar yang dilaksanakan melalui dana CSR PT. KPB (perusahaan tambang batubara) diantaranya:

- Desa Loa Duri sebanyak 47 Sambungan Gratis
- Desa Bakungan sebanyak 31 Sambungan Gratis
- Desa Batuah sebanyak 64 Sambungan Gratis.
- Kampung Bekokong Kecamatan Jempang, Kampung Muara Siram, Siram Makmur, Siram Jaya Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat
- Kecamatan Pulau Derawan Desa Teluk Semanting, Desa Kasai, Kecamatan Batu Putih Desa Tembudan, Kayu Indah, Ampen Medang, Sumber Agung, Kecamatan Tabalar Desa Semurut, Desa Buyung-Buyung, Kecamatan Kelay Desa Sidobangen Kab. Berau
- Kecamatan Paser Balengkong Desa Sunge Batu, Kecamatan Tanah Grogot Desa Prepat, Desa Sungai Langir, Kecamatan Muara Komam desa Swang Slutung, Kecamatan Long Kali Desa Muara Lambakan,

Kecamatan Batu Engau Desa Romu, Desa Liwang, Desa Segendang, Desa Pengguren Jaya Kab. Paser

- Kecamatan Bengalon Desa Keraitan, Kecamatan Kaubun Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun Desa Cipta Graha, Kecamatan Karangan Desa Muksti Lestari Kab. Kutai Timur.

b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dipengaruhi oleh pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Setiap peningkatan pelaksanaan kemitraan pemerintah swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat, maka dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Kontribusi pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan berkontribusi sangat besar bagi keberhasilan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah di era otonomi daerah ditentukan kemampuan dan kreativitas pemerintah daerah di dalam merumuskan model pembangunan daerah sesuai kewenangannya, melalui pendekatan komunikasi pembangunan dengan seluruh komponen pembangunan di daerah baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Model pembangunan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah adalah penerapan pola kemitraan pemerintah-swasta. Hal ini tentunya akan membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur.

Keberadaan swasta yang berinvestasi dalam sektor pertambangan dan energi Provinsi Kalimantan Timur merupakan potensi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata melalui pola kemitraan pembangunan. Pola pembangunan daerah tersebut diwujudkan melalui kerjasama pembangunan sarana-sarana pembangkit listrik yang menunjang operasional pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan bersama berdasarkan skala prioritas

kebutuhan pembangunan daerah, dimana masing-masing mitra mengalokasikan sumber daya dalam mendukung prioritas program daerah.

Pencapaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai model pembangunan daerah berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal diprakarsai dan inisiatif lokal dalam era otonomi daerah dipengaruhi oleh pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Model kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan program adalah wujud keberpihakan swasta sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawabnya untuk turut serta dalam membangun dan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Pelaksanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal selama ini selalu mengandalkan kemampuan sumber daya dan organisasi pemerintah daerah. Kombinasi kerjasama antara dua lembaga yang berbeda orientasi antara pemerintah daerah dengan swasta (investor), dimana pemerintah daerah sebagai organisasi publik yang memiliki orientasi sosial, sedangkan swasta merupakan organisasi privat yang berorientasi keuntungan (komersial).

Kesadaran baru mengenai perlunya dikembangkan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan pembangunan pada era persaingan global, bahwa tidak mungkin lagi pemerintah dan swasta berjalan sendiri-sendiri. Kemampuan sumberdaya pemerintah daerah dalam hal pembiayaan pembangunan yang terbatas sementara permasalahan pembangunan yang kompleks memerlukan penanganan yang komprehensif dan memadai serta tepat sasaran, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan kemitraan dengan swasta untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dengan tetap memaksimalkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah.

Kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan program/kegiatan dipandang sebagai nilai baru dalam pembangunan daerah yang berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal serta memberikan pandangan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam arti formal, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama swasta dan masyarakat. Sinergitas ketiga aktor pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran

Dalam bidang pemanfaatan energi terbarukan, karena biaya teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan relatif mahal/tinggi, dan daerah yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di daerah terpencil, terluar dan tertinggal, maka diperlukan peran serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam membangun infrastruktur dimaksud, melalui program dan pendanaan yang memadai.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur seperti grafik dibawah:

Tabel T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i>	100 % 89.12 Indeks	100 % 84.20 Indeks	100 % 85.00 Indeks	100 % 85.08 Indeks	100.09	100 % 86.51 Indeks	100 % 89.12 Indeks	100
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	10 Laporan	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase realisasi anggaran</i>	90.00 %	87.17 %	95.00 %	95.00 %	100	95.00 %	95.00 %	100
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	123 Orang/ Bulan	123 Orang/ Bulan	123 Orang/ Bulan	123 Orang/ Bulan	100	123 Orang/ Bulan	123 Orang/ Bulan	100
3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	68.49 %	35.56 %	35.56 %	35.56 %	100	35.56 %	35.56 %	100
3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai</i>	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	5 Unit	100
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	3 Paket	100
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	4 Paket	100
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor</i>	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100	9 Unit	9 Unit	100
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	15 Unit	100
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	<i>Jumlah Volume Pengambilan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota</i> <i>Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota</i>	12939254.38 M3 3197.08 KM2	12939254.38 M3 2210 KM2	12939254.38 M3 2307 KM2	12939254.38 M3 2307 KM2	100	12939254.38 M3 3075 KM2	12939254.38 M3 3197.08 KM2	100
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi</i>	1 CAT	1 CAT	1 CAT	1 CAT	100	1 CAT	1 CAT	100
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	<i>Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	<i>Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100	16 Laporan	16 Laporan	100
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	204	00	102	102	100	102	204	100
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	<i>Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi</i>	1 Peta	1 Peta	1 Peta	1 Peta	100	1 Peta	1 Peta	100
3.29.03.1.01.0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	<i>Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
							100			100
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.03.1.04.0007	Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

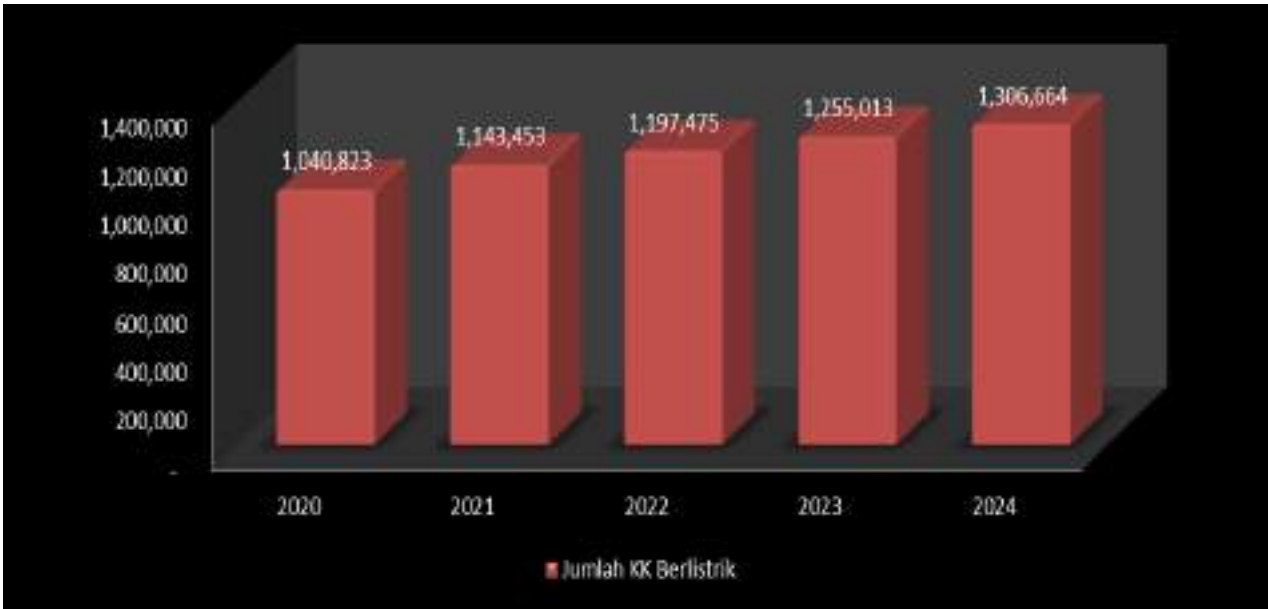
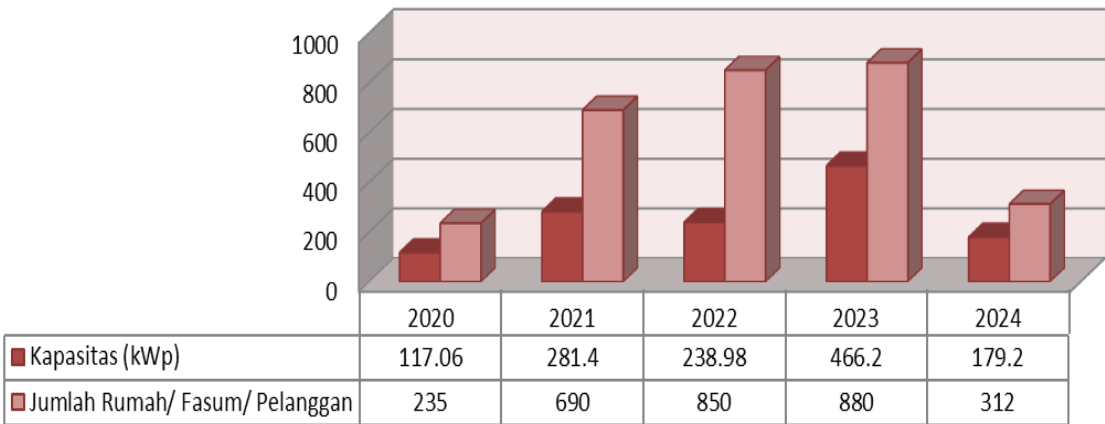
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	<i>Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	<i>Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin dan informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.03.1.12.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.03.1.17	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	<i>Jumlah Dokumen untuk Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.03.1.17.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.03.1.17.0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	<i>Jumlah Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	0.4996	0.378840015	0.382520217	0.382520217	100	0.382520217	0.4996	100
		Porsi EBT dalam Bauran Energi	15.73	8.14	10.39	12.40	116.84	12.40	15.73	100
		Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT (SBM)	9,388,542.39	6,994,832.59	7,156,724.94	7,156,724.94	100	7,156,724.94	9,388,542.39	100
3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	<i>Jumlah dokumen Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	<i>Jumlah dokumen data potensi biomassa</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	<i>Jumlah dokumen data potensi biogas</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	<i>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	<i>Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

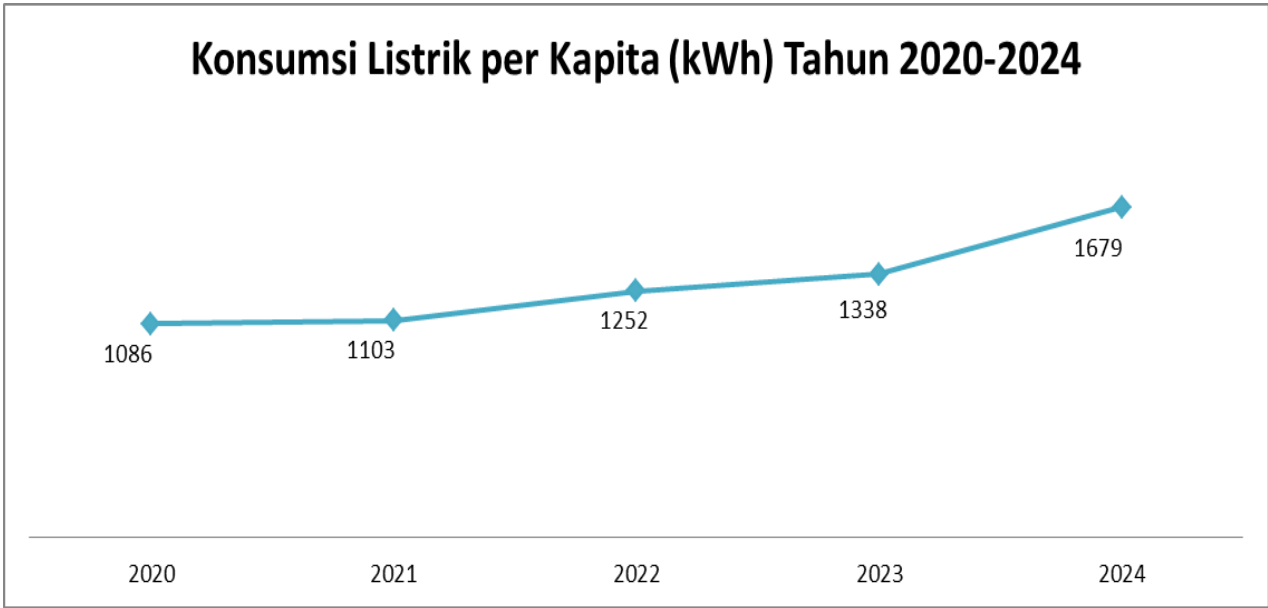
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	<i>Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	<i>Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	100	50 unit	50 unit	100
3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	<i>Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	<i>Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	<i>Jumlah hasil kegiatan konservasi energi</i>	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	<i>Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	<i>Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	97.06	96.17%	96.62	96.62	100	96.62	97.06	100
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	<i>Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)</i>	12 Perusahaan	12 Perusahaan	12 Perusahaan	12 Perusahaan	100	12 Perusahaan	12 Perusahaan	100
3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</i>	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

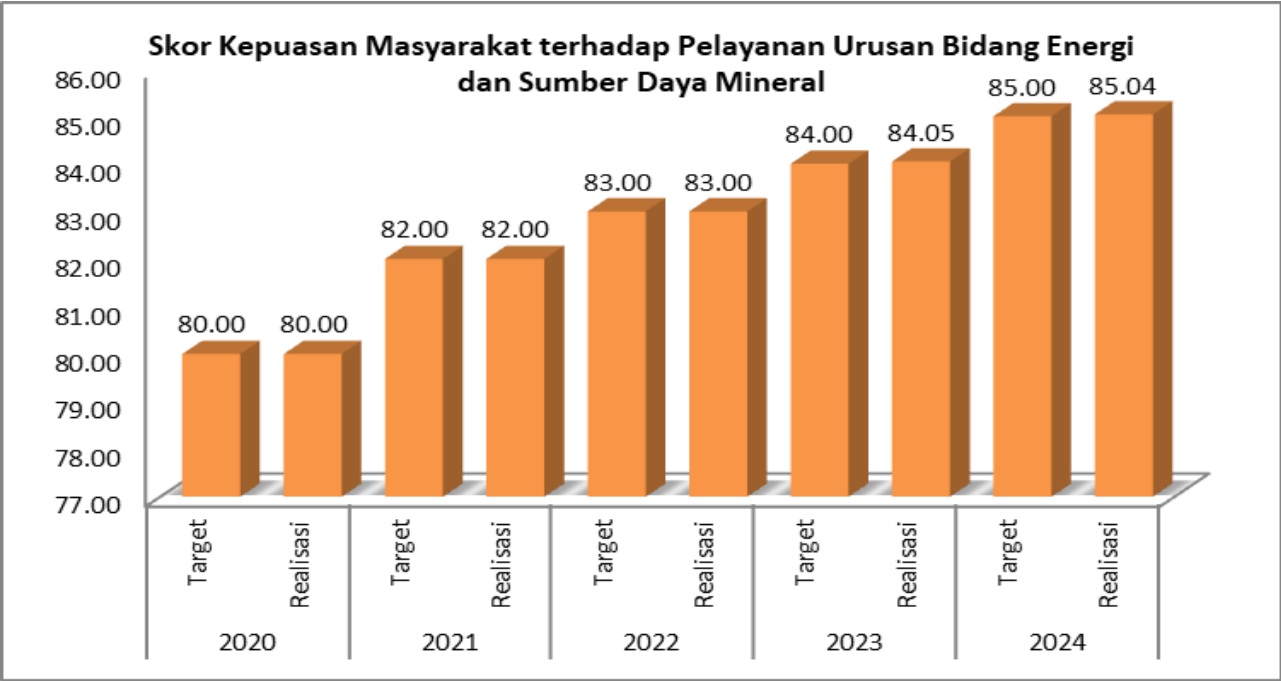
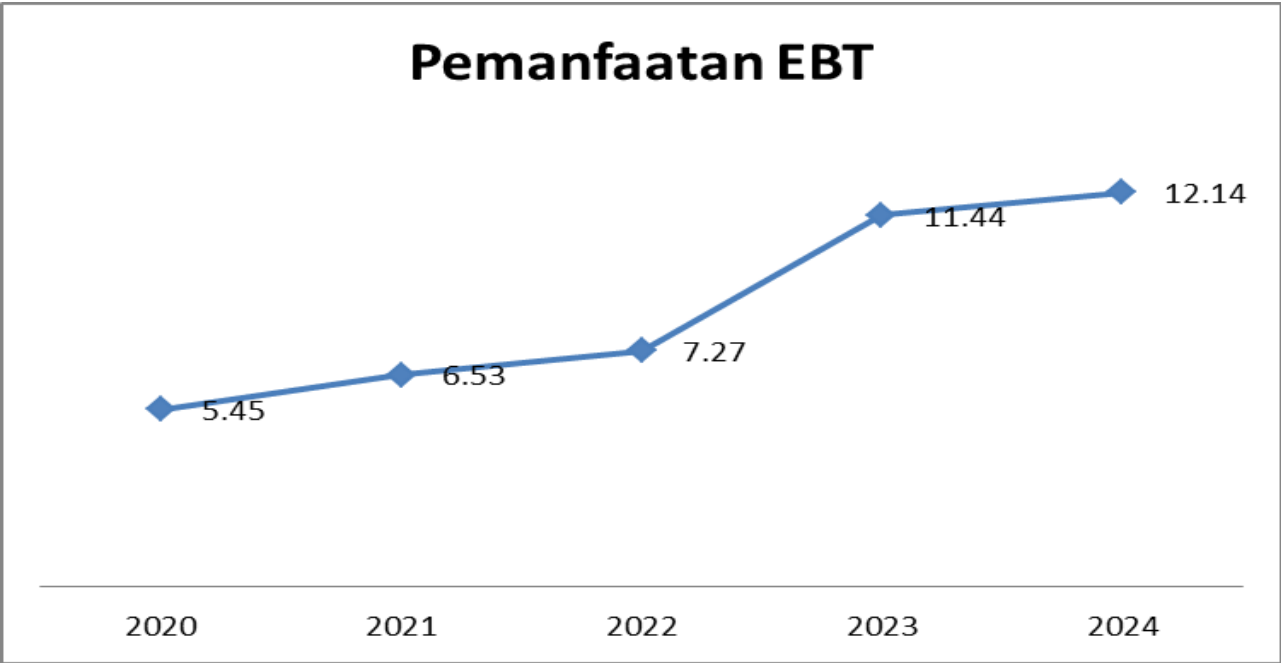
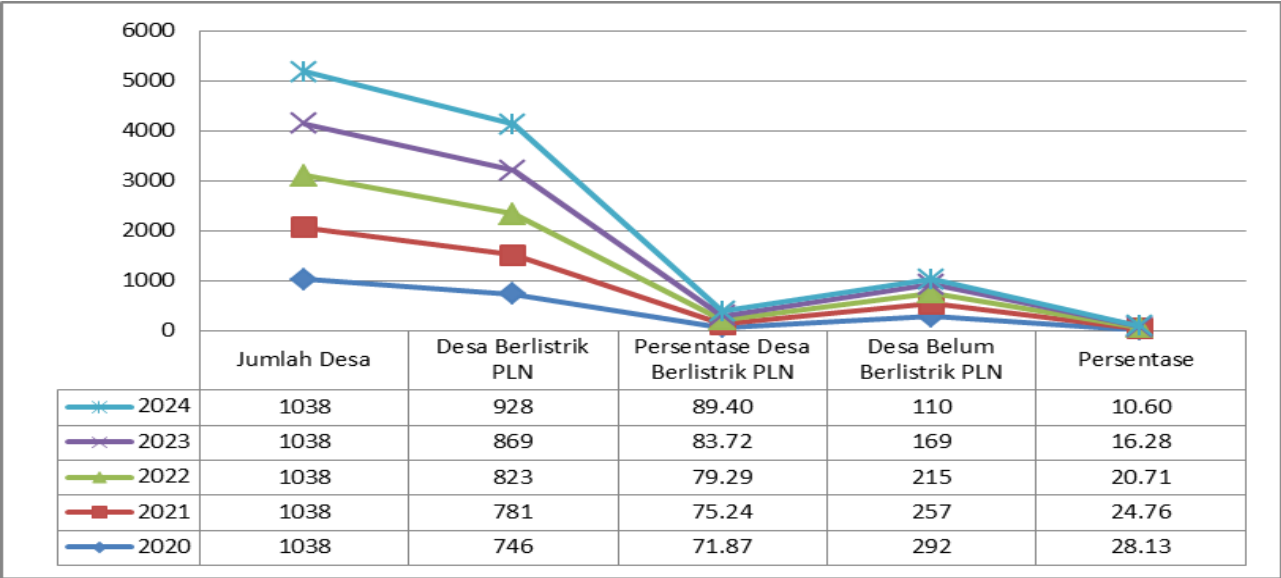
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	<i>Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)</i>	12 Perusahaan	12 Perusahaan	12 Perusahaan	12 Perusahaan	100	12 Perusahaan	12 Perusahaan	100
3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	<i>Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	<i>Panjang Jaringan distribusi tenaga listrik yang terbangun</i>	5 km	5 km	5 km	5 km	100	5 km	5 km	100
3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	<i>Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100

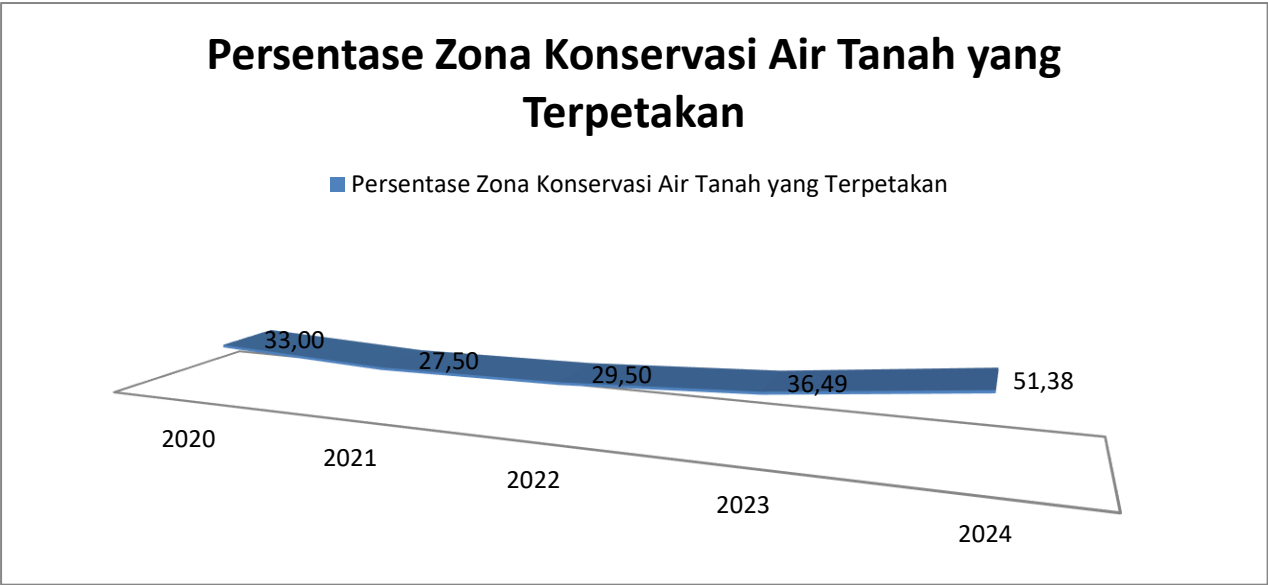
PTLS Terpusat/Komunal Yang Dibangun dengan APBD
Prov. Kaltim Tahun 2020-2024



Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2020-2024







2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sehubungan bidang urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pilihan sehingga tidak memiliki SPM dan juga tidak memiliki standar sebagai tolok ukur pencapaian kinerja. Kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diukur dengan menggunakan indikator dengan target kinerja yang telah disepakati secara internal sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Capaian kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Tahun 2024 digambarkan dalam Tabel T-C.30.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Timur

[illegible]

Secara umum realisasi capaian Tahun 2024 telah memenuhi target sesuai dengan yang direncanakan, bahkan beberapa Program dan Kegiatan realisasi capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Tahun 2025 (tahun n) yang merupakan periode pertama Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan tercapai 100% sebagaimana target pada Dokumen Renstra Tahun 2025-2029. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh stakeholder lainnya terkait pemenuhan kebutuhan energi listrik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi tujuan, sasaran, output, outcome, pembiayaan dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral.

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur menjadi dasar penetapan kebijakan strategis pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut :

A. Isu Strategis Geologi dan Air Tanah:

Belum optimalnya pengelolaan potensi geologi dan air tanah di Kalimantan Timur yang mengakibatkan :

1. Kawasan karst belum terlindungi;
2. Keragaman geologi Kalimantan Timur belum ditetapkan sebagai warisan geologi;
3. Pengelolaan air tanah belum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan;
4. Terhambatnya proses perijinan pemanfaatan air tanah karena belum terbitnya regulasi dari pemerintah;
5. Optimalisasi pemanfaatan potensi geologi termasuk geopark

B. Isu Strategis Mineral dan Batubara:

1. Tidak optimalnya tata kelola perijinan MBLB menyebabkan lambatnya pelayanan publik dan menimbulkan konflik;
2. Pemanfaatan potensi MBLB belum optimal dalam mendorong industri hilir di Kaltim;
3. Tidak adanya kewenangan dalam pengelolaan tambang batubara menjadi isu dimasyarakat karena dianggap pemerintah melakukan pembiaran terhadap tambang ilegal;
4. Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);

Tidak optimalnya pengelolaan pada sektor ini menyebabkan timbulnya permasalahan layanan yang berakibat pada :

- Lemahnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan MBLB;
- Kerusakan lingkungan akibat pertambangan tanpa izin komoditas batubara dan batuan;
- Banyaknya konflik pertambangan yang harus diselesaikan
- Lambatnya optimalisasi lahan pasca tambang dan perbaikan lahan kritis

C. Isu Strategis Ketenagalistrikan :

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap listrik dapat berjalan dengan optimal. Dari total 1.263.831 jumlah KK dan 3.849.832 jumlah penduduk di Kalimantan Timur, 85,75 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 6,53 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN dan sampai dengan tahun 2022 masih terdapat 199 Desa Berlistrik Non PLN dan 82.581 KK Berlistrik Non PLN. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non PLN.

Pada Tahun 2022, Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 91,98 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 92,29 persen pada

tahun 2022. Desa yang sudah terjangkau aliran listrik, baik hanya menggunakan genset dan listrik yang menyala tidak lebih dari 6 jam sehari. Terdapat 109 Tahun 2025 desa yang belum berlistrik PLN atau bisa dikatakan belum berlistrik selama 24 jam, yang akan dikejar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PLN dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari (PLTS/SHS).

Sistem ketenagalistrikan Kalimantan Timur ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi yang disebut Sistem Mahakam yang terkoneksi dengan Sistem Barito Kalimantan Selatan. Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Kalimantan Timur tidak hanya ditopang oleh pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Timur namun juga Kalimantan Selatan.

Penyediaan tenaga listrik untuk mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat desa belum sepenuhnya dapat dinikmati, hal ini menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks diantaranya adalah :

1. Masih banyak Desa (antar dusun/RT) yang belum terjangkau jaringan listrik PLN;
2. Kegiatan elektrifikasi pedesaan memerlukan dukungan infrastruktur dan pendanaan yang besar;
3. Akses jaringan listrik belum merata terutama daerah perdesaan, pedalaman dan perbatasan;
4. Wilayah 3T yang tidak bisa dijangkau jaringan listrik PLN.

D. Isu Strategis Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi:

1. Penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca);
2. Tuntutan peran penurunan emisi dari sektor energi dalam pencapaian target NZE Indonesia (912 juta ton CO² pada tahun 2030 dan NZE di tahun 2060);
3. Peluang pemenuhan kebutuhan Green Energi Untuk IKN;
4. Antisipasi transisi energi yang berkeadilan.

Belum optimalnya dukungan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dalam pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi untuk menopang pembangunan Kalimantan Timur menyebabkan :

- Optimalisasi penggunaan EBTKE;
- Rendahnya Rasio Bauran Energi Terbarukan;
- Kendala regulasi menyebabkan rendahnya investasi Swasta pada EBT;
- Masih minimnya akses energi di daerah 3T;

Isu strategis menjadi dasar penetapan kebijakan strategis pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi geologi dan air tanah di Kalimantan Timur
 - Diperlukan upaya perlindungan kawasan karst di Kalimantan Timur.
 - Keragaman geologi Kalimantan Timur belum dilindungi sebagai warisan geologi.
 - Pengelolaan air tanah belum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian air tanah
2. Tidak optimalnya tata kelola perijinan MBLB menyebabkan lambatnya pelayanan publik dan menimbulkan konflik.
3. Pemanfaatan potensi MBLB belum optimal dalam mendorong industri hilir di Kalimantan Timur.
4. Tidak adanya kewenangan dalam pengelolaan tambang batubara menjadi isu dimasyarakat karena dianggap pemerintah melakukan pembiaran terhadap tambang ilegal.
5. Peningkatan konsumsi bahan tambang sebagai material pembangunan infrastruktur memerlukan pembinaan dan pengawasan.
6. Terjadinya kerusakan lingkungan akibat pertambangan tanpa izin komoditas batubara dan batuan.
7. Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan dalam meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDRB.
8. Belum optimalnya pengelolaan MLBB untuk mendorong industri hilir di Kalimantan Timur.
9. Belum optimalnya tatakelola perijinan MBLB
10. Penyediaan listrik untuk mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat desa.
 - Masih banyak desa belum berlistrik PLN 24 jam di Kalimantan Timur (109 desa 2025).
 - Kegiatan elektrifikasi pedesaan memerlukan dukungan infrastruktur dan pendanaan yang besar.

- Akses jaringan listrik belum merata terutama daerah perdesaan, pedalaman dan perbatasan.
11. Tuntutan peran penurunan emisi dari sektor energi dalam pencapaian target NZE Indonesia (912 juta ton CO₂ pada tahun 2030 dan NZE di tahun 2060).
12. Peluang pemenuhan kebutuhan Green Energi Untuk IKN
13. Antisipasi transisi energi yang berkeadilan.
- Persentase EBT masih rendah akibat biaya investasi yang tinggi.
 - Masih minimnya akses energi di daerah 3T.
 - Rendahnya investasi sektor EBT akibat harga jual-beli energi yang kurang menarik.
 - Perlunya percepatan dan antisipasi transisi energi yang berkeadilan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 terdapat 5 Program, 26 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.285.319.000, berdasarkan hasil analisis kebutuhan dana untuk kegiatan pembangunan terdapat 5 Program, 26 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan serta dibutuhkan dana sebesar Rp. 107.285.319.000.

Dalam rangka pemenuhan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang belum mendapatkan listrik baik yang bersumber dari PLN maupun Non-PLN, berdasarkan analisis kebutuhan bahwa bertambahnya pagu anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur akan dipergunakan untuk Pembiayaan Program Prioritas yaitu melaksanakan Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Perluasan Jaringan Dusun dimana terdapat sebanyak 109 Desa yang belum berlistrik PLN dan Pembangunan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) di 5 Kabupaten antara lain Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang bersumber dari PLN Pemerintah Daerah bersinergi dengan PT. PLN (Persero) untuk percepatan pemenuhan energi listrik daerah-daerah yang belum berlistrik PLN dengan memprioritaskan pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik untuk desa-desa yang belum berlistrik PLN, sedangkan Pemerintah Daerah dapat berkontribusi untuk melistriki desa dan antar dusun/RT yang belum terjangkau listrik PLN dengan melakukan pembangunan jaringan distribusi listrik yang belum dapat dijangkau oleh PLN, untuk pembangunan antar desa, Pemerintah daerah dan PT. PLN (Persero) saling berkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih lokasi saat pembangunan dilaksanakan.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030 pembangunan akan difokuskan pada pemenuhan :

1. Target pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik seluruh desa (109 desa) bisa terselesaikan paling lambat pada tahun 2030, dengan asumsi anggaran tersedia.
2. Melaksanakan pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik di seluruh desa hingga dusun/RT yang belum berlistrik PLN di seluruh Kalimantan Timur, berkoordinasi dengan pihak PLN sehingga tidak berbenturan lokasi yang akan dibangun antara pemerintah daerah dan PLN.
3. Pemerintah daerah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan pembangunan infrastruktur jaringan distribusi tenaga listrik bilamana program kegiatan tersebut tersedia dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah daerah mengusulkan kepada PT. PLN (Persero) untuk dilaksanakan pembangunan infrastruktur jaringan distribusi tenaga listrik yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero).

Upaya pencapaian EBT (Energi Baru Terbarukan) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengembangan potensi sumber daya EBT, penyusunan kebijakan dan regulasi, peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur dan teknologi seperti PJU-TS dan PLTS atap, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan melalui Forum Energi Daerah (FED).

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 difokuskan pada :

Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses, Sasaran 3 Infrastruktur Berkualitas dan Sasaran 4 Pembangunan Berkelanjutan

Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan tema **“Penguatan Fondasi Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”** merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2026 yaitu :

1. Membangun sektor pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama pada upaya promotif dan preventif;
3. Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
4. Membangun infrastruktur konektivitas.

Memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta isu-isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi pada Tahun 2026 dalam bidang urusan energi dan sumberdaya mineral sebagaimana pada Tabel T-C.31. berikut :

Tabel 2.5
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas ESDM
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

TUJUAN/SASARAN (RESNTRA)	STRATEGI (RENSTRA)	ARAH KEBIJAKAN (RENSTRA)
1	2	3
Tujuan 1 : Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Memperluas akses kelistrikan ke wilayah terpencil dan belum terjangkau
Sasaran 1 : Meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan	Pemenuhan Infrastruktur dengan Pembangunan jaringan listrik desa dan perluasan jaringan distribusi.	1. Pembangunan jaringan listrik desa dan perluasan jaringan distribusi. 2. Peningkatan kapasitas dan modernisasi gardu induk serta infrastruktur transmisi. 3. Pemasangan listrik bagi rumah tangga tidak mampu (subsidi listrik). 4. Kerja sama dengan PLN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari EBT	Pembangunan infrastruktur pembangkit berbasis EBT seperti PLTS, PLTMH, dan biomassa di daerah yang belum terjangkau listrik PLN.	1. Penyediaan infrastruktur pendukung untuk pengembangan EBT skala rumah tangga dan komunitas. 2. Pengembangan infrastruktur mini-grid atau PLTS komunal di daerah terpencil.
	1. Menurunkan emisi GRK dari pembangkitan dan konsumsi energi secara bertahap dan terukur, melalui transisi menuju sistem energi rendah karbon. 2. Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. 3. Mendorong efisiensi energi di seluruh sektor pengguna akhir (rumah tangga, industri, komersial, dan transportasi) guna mengurangi emisi secara langsung. 4. Mengembangkan infrastruktur dan teknologi energi bersih yang mendukung penurunan emisi, seperti PLTS, smart grid, dan kendaraan listrik. 5. Memperkuat tata kelola dan kelembagaan energi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengurangan emisi secara efektif dan berkelanjutan.	1. Mendorong pembangunan pembangkit energi terbarukan skala besar dan kecil (PLTS, PLTB, PLTMH, biomassa). 2. Insentif dan regulasi untuk memperluas penggunaan PLTS atap di sektor rumah tangga, industri, dan pemerintah. 3. Peningkatan bauran EBT dalam sistem energi daerah. 1.
Sasaran 3 : Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) sektor energi	1. Meningkatkan efisiensi energi di industri, bangunan, dan peralatan rumah tangga. 2. Substitusi bahan bakar fosil dengan energi baru dan terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, angin, hidro, dan biomassa. 3. Pengembangan transportasi listrik dan infrastruktur pendukungnya (misalnya SPKLU). 4. Penerapan PLTS atap untuk sektor rumah tangga, komersial, dan industri.	1. Implementasi standar efisiensi energi di sektor industri, transportasi, dan bangunan. 2. Modernisasi peralatan industri dan sistem kelistrikan untuk menekan konsumsi energi fosil. 3. Kampanye hemat energi dan digitalisasi manajemen energi (energy management system). 4. Peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan infrastruktur pendukung (SPKLU).
	5. Pengukuran muka air tanah 6. Analisa kandungan zat padat terlarut (TDS)	5. Pengukuran muka air tanah paling sedikit 1 (satu) kali setahun 6. Analisa kandungan zat padat terlarut (TDS) paling sedikit 1 (satu) kali setahun
	7. Melakukan monitoring dan evaluasi ijin- ijin yang tumpang tindih dengan sektor lain / beda komoditas	7. Memfasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan dan izin lainnya agar dapat melakukan kegiatannya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku 8. Berkoordinasi dengan Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota
	8. Melaksanakan keputusan gubernur tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan perizinan berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	9. Melakukan sosialisasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat terhadap Perpres 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian perizinan berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 10. Berkoordinasi dengan instansi terkait
Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	a. Pengembangan profesionalisme aparatur dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan layanan publik berbasis elektronik secara transparan dan berintegritas b. Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT. b. Pemenuhan dukungan penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

RPJMD			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya Kaltim Sukses	Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru KTI (Kontribusi PDRB Kaltim)	Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
		Pembangunan Berkelanjutan	Penurunan Intensitas Emisi GRK

Renstra																	
Tujuan	Indikator	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sasaran	Indikator Kinerja	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh)	1,679	1,861	2,043	2,225	2,407	2,589	2,771	Meningkatnya infrastruktur ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik*	1,306,604	1,341,910	1,377,216	1,412,522	1,447,828	1,483,134	1,518,440
									Meningkatnya Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari EBT	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	100.94	168	165.75	163.50	161.25	159.00	156.75
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Energi (%)*	6.11	7.99	9.86	11.81	13.91	16.16	18.77	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor energi	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor Energi (Ton CO2e)*	33,848,126.81	33,729,811.87	33,611,496.92	33,430,173.58	33,218,007.91	32,918,081.63	32,443,903.72
										Jumlah Volume Pengambilan Air Tanah pada Cekungan	12,939,254.38	12,939,254.38	12,939,254.38	12,939,254.38	12,939,254.38	12,939,254.38	12,939,254.38
										Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	2,307.00	3,075.00	3,197.08	3,795.10	4,358.78	4,850.65	4,966.44
										Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	0	10	20	20	20	40	40
										Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	0	2	4	4	4	8	8
									Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1. Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah 2. Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	85.08 75.2	85.35 75.35	85.50 75.45	85.65 75.55	85.80 75.65	86.00 75.75	86.15 75.8

Dalam pencapaian Prioritas pembangunan yang dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah, indikator kinerja tujuan dan sasaran, program prioritas, indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas, target kinerja program serta pagu anggaran program prioritas, program wajib serta pendukung dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

REKAP PAGU DAN RINCIAN BELANJA TAHUN 2026		
URAIN	PAGU (Rp.)	Persentase
	2026	
BELANJA WAJIB MENGIKAT	27,961,715,559.00	26.06
1 Gaji Pokok dan Tunjangan	22,741,107,992.00	21.20
2 Operasional	4,668,515,027.00	4.35
3 Pemeliharaan Gedung/Pemeliharaan Kendaraan/Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	552,092,540.00	0.51
TUPOKSIONAL/MANAJERIAL	2,308,769,350.00	2.15
1 Program Pengeloan Aspek Kegeloagian	1,232,885,350.00	1.15
2 Program Pengeloan Mineral dan Batubara	1,075,884,000.00	1.00
PRIORITAS	77,014,834,091.00	71.79
1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	29,465,443,876.00	27.46
2 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	47,549,390,215.00	44.32
TOTAL	107,285,319,000.00	100.00

Total Pagu	107,285,319,000.00	Komposisi (%)
Total Perjadiin Tahun 2026	8,317,800,000.00	7.753
Belanja Barang Diserahkan Masyarakat	72,458,203,664.00	67.538
Honorarium	360,180,000.00	0.336
Belanja TALI	421,834,804.00	0.393
Gaji dan Tunjangan	22,741,107,992.00	21.197
Pemeliharaan	552,092,540.00	0.515
Belanja Bahan Cetak	181,512,790.00	0.169
Makanan dan Minuman Rapat	167,451,493.00	0.156
Belanja Modal	100,785,934.00	0.094
Belanja Jasa Kemanan dan Kebersihan Kantor	1,513,920,000.00	1.411
Belanja Pameran	225,000,000.00	0.210
Belanja Penyertaan BimTek	60,000,000.00	0.056
Belanja ATK	50,000,000.00	0.047
Belanja Jasa Analisa Laboratorium	36,975,000.00	0.034
Belanja Alat Listrik	40,041,330.00	0.037
Belanja Bahan Komputer	8,088,940.00	0.008
Belanja Bahan Benda Pos	20,490,000.00	0.019
Belanja Perabot Kantor	10,786,100.00	0.010
Belanja Isi Tabung gas, Isi APAR	4,940,413.00	0.005
Belanja Pengelolaan BMD	5,760,000.00	0.005
Belanja Surat Kabar	5,940,000.00	0.006
Belanja Paket Pengiriman	2,408,000.00	0.002

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Lembar 1 dari 12

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				37,285,319,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				107,285,319,000.00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				37,285,319,000.00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				107,285,319,000.00	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				37,285,319,000.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				107,285,319,000.00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 89.12 Indeks	26,543,836,782.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 89.12 Indeks	27,961,715,559.00	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	578,446,056.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	880,512,476.00	
3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	54,000,345.00		Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150,200,345.00	
3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,001,365.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	267.00 6,794,	
3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,999,545.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	545.00 5,119,	
3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,645,256.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	256.00 5,765,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	4,999,545.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	6,793,008.00	
3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	20,600,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	24,800,000.00	
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	483,200,000.00		Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	681,040,055.00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase realisasi anggaran</i>	90.00 %	23,100,547,992.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase realisasi anggaran</i>	90.00 %	23,100,547,992.00	
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	123 Orang/ Bulan	22,741,107,992.00		Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	123 Orang/ Bulan	22,741,107,992.00	
3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	355,440,000.00		Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	355,440,000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	4 Dokumen	2,000,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	4 Dokumen	2,000,000.00	
3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	1 Dokumen	2,000,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	1 Dokumen	000.00 2,000,	
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</i>	100 %	8,000,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</i>	100 %	000.00 8,000,	
3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	2,000,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	000.00 2,000,	
3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	6,000,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	6,000,000.00	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	68.49 %	4,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	68.49 %	208,600,000.00	
3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	2,000,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	2,000,000.00	
3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	1 Dokumen	2,000,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	1 Dokumen	2,000,000.00	
3.29.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	-	-		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	15 Orang	204,600,000.00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai</i>	5 Unit	684,731,747.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai</i>	5 Unit	1,256,207,747.00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	25,000,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	25,000,000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,000,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,000,000.00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	47,286,116.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	47,286,116.00	
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5,000,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5,940,000.00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					Penyediaan Bahan/Material					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5,000,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5,000,000.00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10,000,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10,820,000.00	
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	582,445,631.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,152,161,631.00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	1,858,651,387.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	1,955,754,804.00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20,000,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20,000,000.00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	324,731,387.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	421,834,804.00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,513,920,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,513,920,000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i>	100 %	309,459,600.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i>	100 %	552,092,540.00	
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	9 Unit	201,010,800.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	9 Unit	311,284,640.00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	15 Unit	33,448,800.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	15 Unit	63,337,900.00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	75,000,000.00		Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	177,470,000.00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		<i>Jumlah Volume Pengambilan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota</i>	12939254.38 M3 122.08 KM2	875,200,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		<i>Jumlah Volume Pengambilan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota</i>	12939254.38 M3 122.08 KM2	1,232,885,350.00	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		<i>Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi</i>	1 CAT	825,200,000.00	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		<i>Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi</i>	1 CAT	1,182,775,350.00	
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah					Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	258,192,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	315,707,350.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah					Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi</i>	3 Dokumen	354,208,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi</i>	3 Dokumen	654,208,000.00	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah					Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	16 Laporan	212,800,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	16 Laporan	212,860,000.00	
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		<i>Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	50,000,000.00	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		<i>Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	50,110,000.00	
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah					Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	4 Laporan	50,000,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	4 Laporan	50,110,000.00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		<i>Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR</i>	20 Ha 4 Rekomendasi	800,800,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		<i>Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR</i>	20 Ha 4 Rekomendasi	1,075,884,000.00	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		<i>Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi</i>	1 Peta	49,900,000.00	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		<i>Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi</i>	1 Peta	50,040,000.00	
3.29.03.1.01.0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut					Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut</i>	1 Laporan	49,900,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut</i>	1 Laporan	50,040,000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Dokumen	183,200,000.00	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Dokumen	181,828,000.00	
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Dokumen	91,600,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Dokumen	90,903,000.00	
3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Laporan	91,600,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Laporan	90,925,000.00	
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>	1 Dokumen	87,200,000.00	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>	1 Dokumen	363,200,000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29.03.1.04.0007	Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)					Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)</i>	1 Dokumen	87,200,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)</i>	1 Dokumen	363,200,000.00	
3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	37,400,000.00	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	36,720,000.00	
3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	37,400,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	36,720,000.00	
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		<i>Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi</i>	1 Dokumen	120,600,000.00	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		<i>Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi</i>	1 Dokumen	120,816,000.00	
3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan</i>	1 Dokumen	41,600,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan</i>	1 Dokumen	41,816,000.00	
3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam</i>	1 Laporan	79,000,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam</i>	1 Laporan	79,000,000.00	
3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin dan informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu</i>	1 Dokumen	206,100,000.00	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin dan informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu</i>	1 Dokumen	206,550,000.00	
3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Dokumen	58,200,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Dokumen	58,300,000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29.03.1.12.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	147,900,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	148,250,000.00	
3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Laporan	79,000,000.00	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Laporan	79,065,000.00	
3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Laporan	79,000,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Laporan	79,065,000.00	
3.29.03.1.17	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam		Jumlah Dokumen untuk Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	1 Dokumen	37,400,000.00	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam		Jumlah Dokumen untuk Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	1 Dokumen	37,665,000.00	
3.29.03.1.17.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam					
		Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	1 Laporan	16,600,000.00		Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	1 Laporan	16,865,000.00	
3.29.03.1.17.0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam					Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam					
		Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	1 Dokumen	20,800,000.00		Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	1 Dokumen	20,800,000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		<i>Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT Porsi EBT dalam Bauran Energi Persentase Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT</i>	9,388,542.39 SBM 15.73 % 0.4996 %	3,600,000,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		<i>Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT Porsi EBT dalam Bauran Energi Persentase Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT</i>	9,388,542.39 SBM 15.73 % 0.4996 %	47,549,390,215.00	
3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi		<i>Jumlah dokumen Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi</i>	1 Dokumen	300,000,000.00	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi		<i>Jumlah dokumen Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi</i>	1 Dokumen	300,600,000.00	
3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa					Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>jumlah dokumen data potensi biomassa</i>	1 Dokumen	75,000,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>jumlah dokumen data potensi biomassa</i>	1 Dokumen	75,375,000.00	
3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas					Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah dokumen data potensi biogas</i>	1 Dokumen	75,000,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah dokumen data potensi biogas</i>	1 Dokumen	75,225,000.00	
3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas					Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas</i>	1 Laporan	150,000,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas</i>	1 Laporan	150,000,000.00	
3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi		<i>Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi</i>	1 Laporan	100,000,000.00	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi		<i>Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi</i>	1 Laporan	100,080,000.00	
3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)					Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)</i>	1 Laporan	100,000,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)</i>	1 Laporan	100,080,000.00	
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		<i>Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi</i>	1 Laporan	2,900,000,000.00	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		<i>Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi</i>	1 Laporan	46,840,360,215.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah					Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah</i>	1 Laporan	268,800,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah</i>	1 Laporan	269,160,000.00	
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT					Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>	1591 unit	2,631,200,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>	1591 unit	46,571,200,215.00	
3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		<i>Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi</i>	1 Laporan	100,000,000.00	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		<i>Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi</i>	1 Laporan	100,000,000.00	
3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi					Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi</i>	1 Laporan	100,000,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi</i>	1 Laporan	100,000,000.00	
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral		<i>Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral</i>	1 Dokumen	100,000,000.00	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral		<i>Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral</i>	1 Dokumen	100,160,000.00	
3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi					Pelaksanaan kegiatan konservasi energi					
		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah hasil kegiatan konservasi energi</i>	1 Unit	100,000,000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah hasil kegiatan konservasi energi</i>	1 Unit	100,160,000.00	
3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi		<i>Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi</i>	1 Laporan	100,000,000.00	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi		<i>Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi</i>	1 Laporan	108,190,000.00	
3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota					Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota</i>	1 Laporan	100,000,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota</i>	1 Laporan	108,190,000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Rasio Elektrifikasi	97.06 %	5,465,482,218.00	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Rasio Elektrifikasi	97.06 %	29,465,443,876.00	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	12 Perusahaan	86,600,000.00	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	12 Perusahaan	86,678,000.00	
3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	86,600,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	86,678,000.00	
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	12 Perusahaan	383,400,000.00	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	12 Perusahaan	383,700,000.00	
3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	383,400,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	383,700,000.00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Panjang Jaringan distribusi tenaga listrik yang terbangun	5 km	4,995,482,218.00	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Panjang Jaringan distribusi tenaga listrik yang terbangun	5 km	28,995,065,876.00	
3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	144,600,000.00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	144,660,000.00	
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					
		Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Unit	4,850,882,218.00		Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Unit	28,850,405,876.00	
J U M L A H					37,285,319,000.00						107,285,319,000.00

Sasaran RKPD Tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas diharapkan akan tercapai dengan melaksanakan program dan kegiatan prioritas di bidang urusan energi dan sumberdaya mineral dengan target kinerja sebagaimana pada Tabel T-C.31.

Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah sebagaimana disebut di atas, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 juga telah menggariskan program/kegiatan pendukung dalam bidang urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Inmendagri No. 02 Tahun 2025.

Dari hasil review dan klarifikasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan baik prioritas maupun pendukung dalam RKPD tersebut ditemukan bahwa rumusan program/kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, besaran pagu indikatif, serta prakiraan maju Tahun 2027 telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan usulan dari masyarakat dan hasil pengumpulan informasi maupun pengamatan selama pelaksanaan forum Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Rakortekrenbang Kalimantan Timur terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur serta pengusulan langsung melalui proposal. Kegiatan yang diusulkan/diminta oleh masyarakat tersebut terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar yaitu :

- Pembangunan jaringan distribusi listrik sepanjang 13 kms
- Pembangunan instalasi biogas untuk PDKT Kapasitas 17 M³.
- Pembangunan Apdal pada rumah Tangga belum berlistrik PLN
- Pembangunan PLTS Atap Kota Balikpapan

- Pembangunan PJUTS Lanjutan Jl Mulawarman - Teritip, Jl Soekarno Hatta KM 15 - KM 24, Jl Projakal, Jl KM 55 Tembus KM 13
- Pembangunan PLTS di Pulau Gusung Kota Bontang

Usulan kegiatan tersebut di atas sebagian yang dapat terakomodir di dalam rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026, sebagaimana juga telah digariskan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pengelolaan Ketenagalistrikan		Rasio Elektrifikasi	97.06%	
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Panjang Jaringan distribusi tenaga listrik yang terbangun	23.055 Meter	
		Dusun Kuyung Desa Sebemban Kec. Muara Wis		8670 Meter	Jaringan distribusi tenaga listrik
		Kelurahan Loa Ipuh Kec. Tenggarong,		6000 Meter	Jaringan distribusi tenaga listrik
		Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kubar		3895 Meter	Jaringan distribusi tenaga listrik
		Desa Sepaso Barat Kec. Bengalong Kutim		4490 Meter	Jaringan distribusi tenaga listrik
2	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan		Persentase Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	0.4996	
			Porsi EBT dalam Bauran Energi	15.73	
	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	1 Laporan	
		Kec. Muara Badak kab. Kukar			Instalasi Biogas 17 M3
	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT		Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1604 unit	
		Peridan	Kec. Sangkaulirang	258	APDAL
		Saka	Kec. Sangkaulirang	210	APDAL
		Mandu Dalam	Kec. Sangkaulirang	150	APDAL
		Pelawan	Kec. Sangkaulirang	220	APDAL
		Muyub Aket	Kec. Tering	120	APDAL
		Tanjung Pagar	Kec. Muara Pahu	100	APDAL
		Harapan Baru	Kec. Kuaro	250	APDAL
		Merabu	Kec. Kelay	90	APDAL
		Long Pelay	Kec. Kelay	120	APDAL
		Nyaribungan	Kec. Laham	85	APDAL
		Naha Tifab	Kec. Long Apari	120	APDAL
	Pembangunan PLTS Atap Kota Balikpapan				Rakortekrenbangprov Kota Balikpapan
	Pembangunan PJUTS Lanjutan				Jl Mulawarman - Teritip, Jl Soekarno Hatta KM 15 - KM 24, Jl Projakal, Jl KM 55 Tembus KM 13
	Pembangunan PLTS				Pulau Gusung Kota Bontang

Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	SPESIFIKASI TEKNIS			
	SUTM (m)	SUTR (m)		Gardu 100 KVA (unit)
Desa Sebemban (Dusun Kuyung) Kec. Muara Wis Kab. Kutai Kartanegara	±7150	±1520	8670	±4
Kelurahan Loa Ipuh (Kampung Mualaf) Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara	±4000	±2000	6000	±1
Desa Sepaso Barat (Blok Etam) Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur	±1632	±2263	3895	±1
Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat	±1200	±3290	4490	±1
3 Paket Pengawasan Jaringan Distribusi wilayah Kab. Kukar, Kutim, Kubar			23055	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah menargetkan 100% listrik nasional berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT) dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Strategi nasional juga difokuskan pada modernisasi sistem kelistrikan dan peningkatan integrasi EBT melalui teknologi seperti BESS (Battery Energy Storage System), CCS (Carbon Capture and Storage), dan hidrogen, serta penggunaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk memperkuat rantai pasokan energi bersih.

Target EBT global sempat diturunkan dari 23% menjadi 17-19% pada Tahun 2025 serta ditargetkan 25-26% pada Tahun 2030, dan 70-72% pada Tahun 2060, karena lambatnya pengembangan EBT serta dominasi batubara. Upaya mempercepat pensiun PLTU dan transisi energi menghadapi tantangan besar, seperti kebutuhan investasi senilai antara USD 1,2 triliun hingga Tahun 2050 untuk clean energy dan infrastruktur, serta adanya subsidi bahan bakar fosil, terutama batubara, yang mempersulit daya saing EBT. Meski Indonesia memiliki potensi GBES (Geothermal, Bioenergy, Solar, dsb.), eksplorasi dan pengembangannya sering terhambat oleh biaya tinggi, regulasi ketat, dan resistensi masyarakat lokal.

Kebijakan pada Tahun 2026 mengindikasikan upaya serius menciptakan keseimbangan antara ketahanan energi jangka pendek (melalui subsidi, migas, pertambangan) dan transisi energi jangka panjang (EBT, regulasi dan investasi berkelanjutan) melalui rekomendasi antara lain Percepatan pengesahan dan implementasi UU EBT serta reformasi subsidi fosil, Penguatan mekanisme *blended finance* untuk pembiayaan proyek EBT lokal, Fokus pada efisiensi penerimaan PNBP untuk mendukung EBT, Pendekatan inklusif terhadap masyarakat lokal dalam pengembangan proyek EBT.

Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2026-2045 yang terkait dengan bidang urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana tertuang dalam dokumen Rancangan RPJMN 2026-2045

yaitu pembangunan wilayah difokuskan untuk menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di seluruh Indonesia dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas dengan upaya transformatif super prioritas percepatan transmisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transformasi hijau.

Tahapan Transformasi Ekonomi Tahap I (Pertama) Tahun 2025-2029 yaitu Perkuatan Fondasi Transformasi difokuskan pada Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktifitas tenaga kerja.

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan.

Isu Strategis Transformasi Ekonomi Percepatan Transisi Energi pada Dokumen Teknokratik RPJMN 2026-2029 adalah sebagai berikut :

1. Ketergantungan terhadap energi fosil yang cadangannya terus menurun
2. Emisi GRK sektor energi yang masih cukup tinggi terutama sektor pembangkit dan transportasi
3. Potensi energi terbarukan yang sangat besar dan pemanfaatan masih sangat kecil.
4. Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang belum memadai
5. Keterbatasan dukungan pendanaan transisi energi.
6. Pemanfaatan energi baru yang belum berkembang.
7. Dominasi pembangkit listrik berbasis fosil dan keterbatasan sistem penyaluran.
8. Ketimpangan dan rendahnya kualitas pelayanan ketenagalistrikan.
9. Ketergantungan pada produksi impor.
10. Belum optimalnya tata kelola ketenagalistrikan termasuk kebijakan tarif dan harga.
11. Terbatasnya rantai nilai domestik pendukung transisi energi.
12. Keterbatasan untuk adopsi dan adaptasi perkembangan teknologi (termasuk digitalisasi).

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tujuan dan sasaran yang tercantum pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur pada akhir Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, BESERTA TARGET KINERJA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

[illegible]

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 menjalankan Tujuan 1 Terwujudnya Kaltim Sukses dengan indikator yaitu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru KTI (Kontribusi PDRB Kaltim) Sasaran 3 Infrastruktur Berkualitas dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur serta Sasaran 4 Pembangunan Berkelanjutan dengan indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK dengan Program Prioritas antara lain:

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
2. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Saat ini, Kalimantan Timur tengah berupaya mengusulkan salah satu kawasan geologisnya untuk menjadi Geopark Nasional, yaitu di Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat yang berada di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Berfokus pada keunikan bentang alam dan kekayaan geologi yang dimilikinya, usulan ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pengakuan, tetapi juga untuk melestarikan situs-situs geologi penting seperti formasi batuan purba, gua-gua karst, dan kekayaan alam lainnya. Dengan diakuinya kawasan ini sebagai geopark, diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga warisan geologi, budaya, dan hayati. Selain itu, status ini juga bisa membuka peluang baru untuk pengembangan pariwisata berbasis lingkungan yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, dan memperkuat identitas regional Kalimantan Timur sebagai destinasi wisata alam yang unik.

Tujuan dan Sasaran sebagaimana disebut diatas diharapkan akan tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi program penunjang/kesekretariatan dan program strategis/teknis. Uraian program dan kegiatan tersebut mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 maupun Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Secara rinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 terdiri atas 5 program dan 26 kegiatan serta 58 sub kegiatan sebagai berikut :

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
(PILIHAN) :**

3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
3.29.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3.29.03.1.01.0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUP MBLB dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3.29.03.1.04.0007	Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka PMDN pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.03.1.12.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
3.29.03.1.17	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam
3.29.03.1.17.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam
3.29.03.1.17.0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi
3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa
3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas
3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas
3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi
3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral

3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi
3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Rumusan program dan kegiatan yang meliputi indikator kinerja, jumlah pagu indikatif, sumber dana, dan prakiraan maju Tahun 2027 sebagaimana pada Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33.
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiran Maju Tahun 2027
Provinsi Kalimantan Timur**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

lembar 1 dari 20

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
								NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			107,285,319,000.00							115,852,450,000.00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			107,285,319,000.00							115,852,450,000.00
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			107,285,319,000.00							115,852,450,000.00
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 89.12 Indeks	27,961,715,559.00						-	38,753,400,000.00
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	880,512,476.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat	-	2,050,400,000.00
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150,200,345.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat		700,000,000.00
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,794,267.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat		10,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	5,119,545.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat		10,000,000.00
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	5,765,256.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat		10,000,000.00
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	6,793,008.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat		10,000,000.00
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	24,800,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat		310,400,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	681,040,055.00	Kalimantan Timur	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat		1,000,000,000.00
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase realisasi anggaran</i>	90.00 %	23,100,547,992.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	-	Pemerintah, ASN	-	25,253,000,000.00
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	123 Orang/Bulan	22,741,107,992.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	-	Pemerintah, ASN		24,500,000,000.00
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	355,440,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	-	Pemerintah, ASN		750,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	2,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		1,500,000.00
	3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		1,500,000.00
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 %	8,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN	-	2,000,000.00
	3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		1,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	6,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		1,000,000.00
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	68.49 %	208,600,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN	-	535,000,000.00
	3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	2,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		10,000,000.00
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	1 Dokumen	2,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		25,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	15 Orang	204,600,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pemerintah, ASN		500,000,000.00
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai</i>	5 Unit	1,256,207,747.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN	-	5,213,000,000.00
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	25,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		50,000,000.00
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	10,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		25,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	47,286,116.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		30,000,000.00
	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5,940,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		25,000,000.00
	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		8,000,000.00
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10,820,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		75,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,152,161,631.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		5,000,000,000.00
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	1,955,754,804.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN	-	4,750,000,000.00
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		25,000,000.00
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	421,834,804.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		225,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1,513,920,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		4,500,000,000.00
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i>	100 %	552,092,540.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN	-	950,000,000.00
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	9 Unit	311,284,640.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		550,000,000.00
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	15 Unit	63,337,900.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		100,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	177,470,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		300,000,000.00
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	<i>Jumlah Volume Pengambilan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota</i> <i>Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota</i>	12939254.38 M3 122.08 KM2	1,232,885,350.00						-	2,450,000,000.00
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi</i>	1 CAT	1,182,775,350.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum	-	1,750,000,000.00
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah										
			<i>Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	315,707,350.00	Kalimantan Timur	PAJAK DAERAH	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum		350,000,000.00
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah										
			<i>Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi</i>	3 Dokumen	654,208,000.00	Kalimantan Timur	PAJAK DAERAH	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum		400,000,000.00
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	16 Laporan	212,860,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum		1,000,000,000.00
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	50,110,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pemerintah, Stakholder, Perusahaan dan Masyarakat	-	700,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	4 Laporan	50,110,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Pemerintah, Stakholder, Perusahaan dan Masyarakat		700,000,000.00
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	<i>Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR</i>	20 Ha 4 Rekomend asi	1,075,884,000.00						-	4,600,000,000.00
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	<i>Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi</i>	1 Peta	50,040,000.00			-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda	-	400,000,000.00
	3.29.03.1.01.0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut										
			<i>Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut</i>	1 Laporan	50,040,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		400,000,000.00
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Dokumen	181,828,000.00			-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	BUMD, Pemerintah, Masyarakat	-	1,000,000,000.00
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Dokumen	90,903,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	BUMD, Pemerintah, Masyarakat		500,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka PMDN pada WIUP Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Laporan	90,925,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	BUMD, Pemerintah, Masyarakat		500,000,000.00
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>	1 Dokumen	363,200,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda	-	500,000,000.00
	3.29.03.1.04.0007	Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)</i>	1 Dokumen	363,200,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		500,000,000.00
	3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	36,720,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda	-	200,000,000.00
	3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	36,720,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		200,000,000.00
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	<i>Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi</i>	1 Dokumen	120,816,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda	-	1,200,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan										
			<i>Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan</i>	1 Dokumen	41,816,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		600,000,000.00
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam</i>	1 Laporan	79,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		600,000,000.00
	3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin dan informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu</i>	1 Dokumen	206,550,000.00			-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda	-	1,050,000,000.00
	3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Dokumen	58,300,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		200,000,000.00
	3.29.03.1.12.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Laporan	148,250,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		850,000,000.00
	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)</i>	1 Laporan	79,065,000.00			-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda	-	200,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)</i>	1 Laporan	79,065,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		200,000,000.00
	3.29.03.1.17	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	<i>Jumlah Dokumen untuk Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam</i>	1 Dokumen	37,665,000.00			-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda	-	50,000,000.00
	3.29.03.1.17.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam</i>	1 Laporan	16,865,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PAJAK DAERAH	-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		25,000,000.00
	3.29.03.1.17.0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam										
			<i>Jumlah Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam</i>	1 Dokumen	20,800,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PAJAK DAERAH	-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		25,000,000.00
4.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	<i>Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT Porsi EBT dalam Bauran Energi Persentase Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT</i>	9,388,542.39 SBM 15.73 % 0.4996 %	47,549,390,215.00						-	23,749,050,000.00
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	<i>Jumlah dokumen Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi</i>	1 Dokumen	300,600,000.00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat	-	2,380,400,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa										
			<i>jumlah dokumen data potensi biomassa</i>	1 Dokumen	75,375,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		128,200,000.00
	3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas										
			<i>Jumlah dokumen data potensi biogas</i>	1 Dokumen	75,225,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		152,200,000.00
	3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas										
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas</i>	1 Laporan	150,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		2,100,000,000.00
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	<i>Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi</i>	1 Laporan	100,080,000.00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat	-	205,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)										
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)</i>	1 Laporan	100,080,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		205,000,000.00
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	<i>Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi</i>	1 Laporan	46,840,360,215.00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat	-	20,575,450,000.00
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah										
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah</i>	1 Laporan	269,160,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		575,450,000.00
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT										
			<i>Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>	1591 unit	46,571,200,215.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		20,000,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	<i>Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi</i>	1 Laporan	100,000,000.00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat	-	183,200,000.00
	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi										
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi</i>	1 Laporan	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		183,200,000.00
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral</i>	1 Dokumen	100,160,000.00			-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat	-	100,000,000.00
	3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi										
			<i>Jumlah hasil kegiatan konservasi energi</i>	1 Unit	100,160,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		100,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	<i>Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi</i>	1 Laporan	108,190,000.00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat	-	305,000,000.00
	3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota										
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota</i>	1 Laporan	108,190,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		305,000,000.00
5.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	<i>Rasio Elektrifikasi</i>	97.06 %	29,465,443,876.00						-	46,300,000,000.00
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	<i>Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)</i>	12 Perusahaan	86,678,000.00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	BUMN, Badan Usaha Swasta, Pemerintah, Masyarakat	-	500,000,000.00
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</i>	12 Laporan	86,678,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	BUMN, Badan Usaha Swasta, Pemerintah, Masyarakat		500,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	<i>Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)</i>	12 Perusahaan	383,700,000.00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	BUMN, Badan Usaha Swasta, Pemerintah, Masyarakat	-	300,000,000.00
	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri										
			<i>Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri</i>	12 Dokumen	383,700,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	BUMN, Badan Usaha Swasta, Pemerintah, Masyarakat		300,000,000.00
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	<i>Panjang Jaringan distribusi tenaga listrik yang terbangun</i>	5 km	28,995,065,876.00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	BUMN, Badan Usaha Swasta, Pemerintah, Masyarakat	-	45,500,000,000.00
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>	1 Laporan	144,660,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	BUMN, Badan Usaha Swasta, Pemerintah, Masyarakat		500,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan										
			<i>Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>	1 Unit	28,850,405,876.00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	BUMN, Badan Usaha Swasta, Pemerintah, Masyarakat		45,000,000,000.00
	J U M L A H				107,285,319,000.00							115,852,450,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung Kalimantanb pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Renstra Dinas ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029.

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2026. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur seperti pada Tabel dibawah.

Tabel 4.1.
Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											115,852,450,000.00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			107,285,319,000.00							115,852,450,000.00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			107,285,319,000.00							115,852,450,000.00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 89.12 Indeks	27,961,715,559.00						-	38,753,400,000.00	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	880,512,476.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat	-	2,050,400,000.00	
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150,200,345.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PAJAK DAERAH	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat		700,000,000.00	
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD											
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	6,794,267.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat		10,000,000.00	

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	5,119,545.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat		10,000,000.00
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	5,765,256.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat		10,000,000.00
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	6,793,008.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat		10,000,000.00
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	24,800,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat		310,400,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	681,040,055.00	Kalimantan Timur	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, Stake Holders, dan Masyarakat		1,000,000,000.00
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase realisasi anggaran</i>	90.00 %	23,100,547,992.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN	-	25,253,000,000.00
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	123 Orang/Bulan	22,741,107,992.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		24,500,000,000.00
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	355,440,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		750,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	4 Dokumen	2,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		1,500,000.00
	3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	1 Dokumen	2,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		1,500,000.00
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</i>	100 %	8,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN	-	2,000,000.00
	3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	2,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		1,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	6,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		1,000,000.00
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	68.49 %	208,600,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN	-	535,000,000.00
	3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	2,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		10,000,000.00
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	1 Dokumen	2,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		25,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	15 Orang	204,600,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pemerintah, ASN		500,000,000.00
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai</i>	5 Unit	1,256,207,747.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN	-	5,213,000,000.00
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	25,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		50,000,000.00
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	10,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		25,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	47,286,116.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		30,000,000.00
	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5,940,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		25,000,000.00
	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		8,000,000.00
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10,820,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		75,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1,152,161,631.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		5,000,000,000.00
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor</i>	12 Laporan	1,955,754,804.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN	-	4,750,000,000.00
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	20,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		25,000,000.00
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	421,834,804.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		225,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1,513,920,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		4,500,000,000.00
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i>	100 %	552,092,540.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN	-	950,000,000.00
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	9 Unit	311,284,640.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		550,000,000.00
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	15 Unit	63,337,900.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		100,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	177,470,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Pemerintah, ASN		300,000,000.00
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	<i>Jumlah Volume Pengambilan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota</i>	12939254.38 M3 122.08 KM2	1,232,885,350.00						-	2,450,000,000.00
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi</i>	1 CAT	1,182,775,350.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum	-	1,750,000,000.00
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah										
			<i>Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	315,707,350.00	Kalimantan Timur	PAJAK DAERAH	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum		350,000,000.00
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah										
			<i>Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi</i>	3 Dokumen	654,208,000.00	Kalimantan Timur	PAJAK DAERAH	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum		400,000,000.00
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	16 Laporan	212,860,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum		1,000,000,000.00
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	50,110,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pemerintah, Stakholder, Perusahaan dan Masyarakat	-	700,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	4 Laporan	50,110,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pemerintah, Stakholder, Perusahaan dan Masyarakat		700,000,000.00
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	<i>Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR</i>	20 Ha 4 Rekomendasi	1,075,884,000.00						-	4,600,000,000.00
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	<i>Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi</i>	1 Peta	50,040,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda	-	400,000,000.00
	3.29.03.1.01.0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut										
			<i>Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut</i>	1 Laporan	50,040,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		400,000,000.00
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Dokumen	181,828,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	BUMD, Pemerintah, Masyarakat	-	1,000,000,000.00
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Dokumen	90,903,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	BUMD, Pemerintah, Masyarakat		500,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka PMDN pada WIUP Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Laporan	90,925,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	BUMD, Pemerintah, Masyarakat		500,000,000.00
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>	1 Dokumen	363,200,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda	-	500,000,000.00
	3.29.03.1.04.0007	Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)</i>	1 Dokumen	363,200,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		500,000,000.00
	3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	36,720,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda	-	200,000,000.00
	3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	36,720,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		200,000,000.00
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	<i>Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi</i>	1 Dokumen	120,816,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda	-	1,200,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan										
			<i>Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan</i>	1 Dokumen	41,816,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		600,000,000.00
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam</i>	1 Laporan	79,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		600,000,000.00
	3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin dan informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu</i>	1 Dokumen	206,550,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda	-	1,050,000,000.00
	3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Dokumen	58,300,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		200,000,000.00
	3.29.03.1.12.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	1 Laporan	148,250,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		850,000,000.00
	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)</i>	1 Laporan	79,065,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda	-	200,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)</i>	1 Laporan	79,065,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		200,000,000.00
	3.29.03.1.17	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	<i>Jumlah Dokumen untuk Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam</i>	1 Dokumen	37,665,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda	-	50,000,000.00
	3.29.03.1.17.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam</i>	1 Laporan	16,865,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PAJAK DAERAH	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		25,000,000.00
	3.29.03.1.17.0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam										
			<i>Jumlah Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam</i>	1 Dokumen	20,800,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PAJAK DAERAH	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pertambangan, Pelaku Usaha Jasa Pertambangan, Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan, Pemda		25,000,000.00
4.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	<i>Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT Porsi EBT dalam Bauran Energi Persentase Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT</i>	9,388,542.39 SBM 15.73 % 0.4996 %	47,549,390,215.00						-	23,749,050,000.00
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	<i>Jumlah dokumen Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi</i>	1 Dokumen	300,600,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat	-	2,380,400,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa										
			<i>jumlah dokumen data potensi biomassa</i>	1 Dokumen	75,375,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		128,200,000.00
	3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas										
			<i>Jumlah dokumen data potensi biogas</i>	1 Dokumen	75,225,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		152,200,000.00
	3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas										
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas</i>	1 Laporan	150,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		2,100,000,000.00
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	<i>Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi</i>	1 Laporan	100,080,000.00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat	-	205,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)										
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)</i>	1 Laporan	100,080,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		205,000,000.00
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	<i>Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi</i>	1 Laporan	46,840,360,215.00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat	-	20,575,450,000.00
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah										
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah</i>	1 Laporan	269,160,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		575,450,000.00
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT										
			<i>Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>	1591 unit	46,571,200,215.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		20,000,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	<i>Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi</i>	1 Laporan	100,000,000.00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat	-	183,200,000.00
	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi										
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi</i>	1 Laporan	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		183,200,000.00
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral</i>	1 Dokumen	100,160,000.00			-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat	-	100,000,000.00
	3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi										
			<i>Jumlah hasil kegiatan konservasi energi</i>	1 Unit	100,160,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		100,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	<i>Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi</i>	1 Laporan	108,190,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat	-	305,000,000.00
	3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota										
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota</i>	1 Laporan	108,190,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Badan Usaha Pengembang Energi Terbarukan, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Masyarakat		305,000,000.00
5.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	<i>Rasio Elektrifikasi</i>	97.06 %	29,465,443,876.00						-	46,300,000,000.00
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	<i>Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)</i>	12 Perusahaan	86,678,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	BUMN, Badan Usaha Swasta, Pemerintah, Masyarakat	-	500,000,000.00
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</i>	12 Laporan	86,678,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	BUMN, Badan Usaha Swasta, Pemerintah, Masyarakat		500,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	<i>Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)</i>	12 Perusahaan	383,700,000.00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	BUMN, Badan Usaha Swasta, Pemerintah, Masyarakat	-	300,000,000.00
	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri										
			<i>Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri</i>	12 Dokumen	383,700,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	BUMN, Badan Usaha Swasta, Pemerintah, Masyarakat		300,000,000.00
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	<i>Panjang Jaringan distribusi tenaga listrik yang terbangun</i>	5 km	28,995,065,876.00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	BUMN, Badan Usaha Swasta, Pemerintah, Masyarakat	-	45,500,000,000.00
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>	1 Laporan	144,660,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	BUMN, Badan Usaha Swasta, Pemerintah, Masyarakat		500,000,000.00

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan										
			<i>Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>	1 Unit	28,850,405,876.00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	BUMN, Badan Usaha Swasta, Pemerintah, Masyarakat		45,000,000,000.00
		J U M L A H				107,285,319,000.00						115,852,450,000.00

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana digariskan dalam Dokumen RKPD 2026 Provinsi Kalimantan Timur bahwa tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah ***“Optimalisasi Diversifikasi Ekonomi Didukung Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”***, dengan prioritas pembangunan adalah :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama pada upaya promotif dan preventif;
3. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan ketahanan pangan;
4. Penguatan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas ESDM Tahun 2026 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung Kalimantanban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, dan Kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Demikian semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur khususnya, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya.

RENJA TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN.
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang dibuat oleh setiap Perangkat Daerah untuk menjabarkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Renja Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam periode Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah sebagai acuan melaksanakan kegiatan, termasuk alokasi anggaran dan target kinerja yang ingin dicapai, serta menjadi dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 mengikuti tata cara pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan;
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2025–2029;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, antara lain:

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

10. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Presiden RI No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perindustrian No.13/MIND/PER/1/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No.111/MIND/PER/ 10/2009 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Surat Edaran Gubernur Nomor: 000.7.2.4/0052/Bapp-II tanggal 6 Januari 2025 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) Menjadi Rancangan Rencana Kerja (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur

tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) tahun 2026;

18. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjabarkan rencana strategis perangkat daerah ke dalam rencana kerja tahunan yang lebih operasional sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

- a) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan kegiatan prioritas, terutama dalam pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur.
- b) Menyelaraskan antara program dan kegiatan perangkat daerah dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
- c) Mensinergikan rencana pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada taraf Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d) Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan RKPD dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat ringkasan singkat dari rencana kerja dan pendanaaan Daerah.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan atau permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan sebanyak 18 (delapan belas) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD Murni sejumlah Rp148.376.283.644 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat rupiah), pada anggaran Perubahan sebesar Rp152.666.467.816 (Seratus Lima Puluh Dua

Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) Dana Tambahan terdiri dari:

1. Penambahan Dana Kegiatan Kriya Nusa (Dekranasda) sebesar Rp2.500.000.000
2. Dana Transfer Umum (DTU) Perlindungan Sosial dampak Inflasi sebesar Rp1.621.141.572

Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 Rp135.771.098.140 (Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) atau sebesar 88,93%. Gambaran hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 tersaji dalam table 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		(Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
3.31.3.30.2.17.01.0000	URUSAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH											
3.31.3.30.2.17.01.0000	BIDANG URUSAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH											
SEKRETARIAT												
2.17.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0	Nilai	89,21							

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,90	Indeks	0	89	Indeks	88,50	100%	88,80	177,30	199%
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	Persen	0	100	%	100	100%	100	200	200%
2.17.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0	Nilai	76,1							
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	0	Dokumen	0	29	Dokumen	29	100%	29	58	
		Presentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100	Persen								
2.17.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Laporan yang disusun sesuai Ketentuan			94,35							
		jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun				75	Dokumen	75	100,00%	75	150	
		Persentase realisasi anggaran	95	Persen								
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah				18,00	Dokumen	18,00	100,00%	18,00	36,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Yang Berfungsi Dengan Baik	85	Persen			Dokumen				0,00	0,00%

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
2.17.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek			60							
		Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi				189,00	Orang	189,00	100,00%		189,00	
		Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	30,00	Persen								
2.17.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah			12							
		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah				12,00	Dokumen	12,00	100,00%	12,00	24,00	
		Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	85	Persen			Dokumen				0,00	0,00%
2.17.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop			25							
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00	Paket	100,00	100,00%	100,00	200,00	
		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	100,00	%								
2.17.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop		Bulan	12							

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		(Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60,00	Kegiatan	60,00	100,00%	12,00	72,00	
		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100,00	%								
2.17.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop		Bulan	12							
		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik				200,00	Unit	200,00	100,00%	200,00	400,00	
		Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	85	%								
BIDANG KOPERASI & UKM												
2.17.003	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat			9,3							
		Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat				31,00	%	47,00	151,61%	35,00	82,00	
		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	55,00	%							0,00	0,00%
2.17.003.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan			28						28,00	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
2.17.06.1.01.01	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	96,00	Unit Usaha		30,00	Unit Usaha	36,00	120,00%	29,00	65,00	67,71%
2.17.007	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas			2,5						2,50	
		Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital				5,00	%	5,02	100,40%	10,00	15,02	
		Pertumbuhan Wirausaha (%)	2,91	%							0,00	
2.17.007.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira usaha pemula			500						500,00	
		Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra (IKK)				7,50	%	7,52	100,27%	7,50	15,02	
		Jumlah usaha kecil yang dilakukan pembinaan dan pendampingan (digitalisasi, kemitraan, perijinan, pemasaran, standarisasi dan sertifikasi produk)	2000,00	Unit Usaha							0,00	0,00%
2.17.008	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital			3						3,00	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		(Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah UKM Potensial Ekspor				20,00	UKM	20,00	100,00%	40,00	60,00	
		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	28,00	%							0,00	0,00%
2.17.008.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah wira usaha mandiri			16						16,00	
		Jumlah UKM yang di fasilitasi				455,00	UKM	460,00	101,10%	455,00	915,00	
		Jumlah UKM yang difasilitasi utk menjadi UKM potensi ekspor	120,00	UKM							0,00	0,00%
		Jumlah UKM yang di fasilitasi untuk memanfaatkan teknologi digital	290,00	UKM							0,00	0,00%
BIDANG PERDAGANGAN												
3.30.002	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA (Eksportir) (Evdoren 2023)			228						228,00	
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu (Renstra 2024-2026)				100,00	%	100,00	100,00%	100,00	200,00	
		persentase surat rekomendasi yang tepat waktu (Renstra 2024-2026)				100,00	%	100,00	100,00%	100,00	200,00	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%) (Renstra 2026-2030)	100,00	%							0,00	0,00%
3.30.02.1.02	Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi	jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%) (Renstra 2026-2030)	100,00	%								
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%) Renstra 2024-2026)				100,00	%	100,00	100,00%	100,00	200,00	
3.30.002.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah SKA yang diterbitkan (Evdoren 2023)			3740						3740,00	
		Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA (Renstra 2024-2026 dan Renstra 2026-2030)	270,00	Eksportir		260,00	Eksportir	265,00	101,92%	265,00	530,00	196,30%

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
3.30.004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Stabilitas Harga Bapokting (%) (Evdoren 2023)			71,79							
		Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%) Renstra 2024-2026 dan Renstra 2026-2030)				16,00	%	12,87	124,32%	14,00	26,87	
		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%) (Renstra 2026-2030)	1,06	%								
3.30.004.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Ketersediaan Bapokting (Bulan) (Evdoren 2023)			12							
		persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag (IKK output) (Renstra 2024-2026 dan Renstra 2026-2030)	100,00	%		100,00	%	100,00	100,00%	100,00	200,00	200,00%

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
3.30.04.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (Renstra 2024-2026 dan Renstra 2026-2030)	48,00	Laporan		48,00	Laporan	50,00	104,17%	48,00	98,00	204,17%
3.30.004.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau (Jenis Komoditi) (Evdoren 2023)			21							
		persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau (Renstra 2024-2026 dan Renstra 2026-2030)	85,00	%		80,00	%	80,77	100,96%	80,00	160,77	189,14%
3.30.005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara(Evdoren 2023)			-25,09							
		Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru				67,00	Jenis	28,00	41,79%	70,00	98,00	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		(Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Produk yang masuk pasar ekspor baru (produk)	19,00	produk								
		Negara (daerah) tujuan baru produk ekspor (daerah) (Renstra 2024-2026 dan Renstra 2026-2030)	12,00	daerah								
3.30.005.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang) (Evdoren 2023)			3							
		jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir (Renstra 2024-2026 dan Renstra 2026-2030)	10,00	Pelaku Usaha		10,00	Pelaku Usaha	10,00	100,00%	10,00	20,00	200,00%
3.30.007	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran (produk) (Evdoren 2023)			5							
		Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri (Renstra 2024-2026)				75,00	%	75,00	100,00%	90,00	165,00	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Renstra 2026-2030)	80,00	%								
3.30.007.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran(Evdoren 2023)			10							
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang (Renstra 2024-2026)	24,29	%		13,51	%	14,20	105,11%	23,43	37,63	154,92%
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk (ikk Output) (Renstra 2024-2026 dan Renstra 2026-2030)	37,50	%		25,00	%	25,00	100,00%	33,33	58,33	155,55%
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta sosialisasi P3DN (orang) (Renstra 2024-2026 dan Renstra 2026-2030)	100,00	Orang		800,00	Orang	800,00	100,00%	800,00	1600,00	1600,00%

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
3.30.03	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan (%) (Renstra 2024-2026)				10,00	%	10,00	100,00%	0,00	10,00	
		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%) (Renstra 2026-2030)	57,10	%								
3.30.03.101	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station (rapat, koordinasi , FGD) (Renstra 2024-2026 dan Renstra 2026-2030)	1,00	Kegiatan		6,00	Kegiatan	6,00	100,00%	0,00	6,00	600,00%
BIDANG PKTN												
3.30.006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi	0,00	0	15%	0,00		0,00	0,00%	0,00	15%	0,00%
		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100,00	%	100%	100%		1,00	100,00%	1,00	100%	100%
3.30.006.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Konsumen yang telah diberikan edukasi			1000	1000	Pelaku Usaha	1274	127 %	1000,00	3274	655%

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	500,00	Pelaku Usaha	0	0,00		0,00		0,00		0,00%
3.30.006.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan	0,00	0	27 Jenis	0,00		0,00	0,00%	0,00	0%	0,00%
		Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5,00	%		0,00	%	0,00	100 %	0,05	5%	0,00%
BIDANG INDUSTRI												
3.31.002	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri			4						4,00	
		Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara				5,20	%	10,21	196,35%	5,60	15,81	
		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri (%)	40,81	%							0,00	0,00%
3.31.002.1.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	6,00	Dokumen	5	9,00	Dokumen	9,00	100,00%	5,00	19,00	316,67%

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
3.31.004.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi			8						8,00	
		Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	175,00	Industri		80,00	Industri	174,00	217,50%	3,00	177,00	101,14%
3.31.3.30.2.17.01.0002	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG											
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD BPSMB)	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap urusan bidang perindustrian,perdagangan,koperasi dan ukm		Nilai	87,18							
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,90	%		88,50		95,83	10793,00 %	88,80	184,63	207,68%
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100,00	%		100,00		100,00	10000,00 %	100,00	200,00	200,00%
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan		%	100						100,00	
		Jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun				13,00		13,00	10000,00%	12,00	25,00	
		Persentase Realisasi Anggaran	95,00	%								

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Bulan	12						12,00	
		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah				7,00		6,00	8600,00%		6,00	
		Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	85,00	%								
3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5,00	Dokumen		5,00		4,00	8000,00%		4,00	80,00%
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop		Dokumen	23						23,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10,00		10,00	10000,00%		10,00	
		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	95,00	%								
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop		Bulan	12						12,00	
		Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				38,00		38,00	10000,00%	38,00	76,00	
		Persentase Layanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	95,00	%								

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop		Bulan	12						12,00	
		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik				58,00		48,00	8300,00%	58,00	106,00	
		Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	85,00	%								
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Capaian target sertifikat mutu barang		%	100						100	
		Persentase peningkatan sertifikat layanan sertifikasi, pengujian, dan kalibrasi yang diterbitkan	8,00	%							0,00	0
		Mutu Layanan UPTD BPSMB				82		95,43	116,38		95,43	
		Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku		%		73		75,00	102,74		75,00	
3.30.006	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifiksdi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk		%	100						100,00	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP		IKM		12		10,00	83	12,00	22,00	
		Jumlah Keluhan Pelanggan				2		0,00	0	20,50	20,50	
		Jumlah Laporan Mutu Akreditasi		laporan		11		11,00	100	12,00	23,00	
		Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan HACCP	5	IKM								
		Jumlah keluhan pelanggan	100	%								
		Jumlah laporan mutu akreditasi	11	Laporan								
		Persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	100	%								
3.30.06.1.02	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Mutu Akreditasi	12,00	Laporan								
		Jumlah sampel produk UKM yang diuji	20,00	Produk								
3.31.3.30.2.17.01.0003	UPTD PELATIHAN KOPERASI											
2.17.001	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0		80,00	90,00	%	80,00	88,89%	88,80	248,80	276,44%
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,90	indeks	0	0		0	0,00%		0	0,00%

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	%	0	0		0	0,00%		0	0,00%
2.17.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan			100	100	%	100	110,98%		200	222,09%
		Persentase realisasi anggaran	95	%					0,00%	12,00	12	13,33%
2.17.001.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5	Dokumen					0,00%	5,00	5,00	5,56%
2.17.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS/NONPNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek			4	25	orang	4	4,44%		8	8,89%
		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	90	%					0,00%	20,00	20	22,22%
2.17.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	85	%	12	12	bulan	12	13,33%	12,00	36	40,00%
2.17.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	95	%	21	25	unit	21	23,33%	12,00	54	60,00%
2.17.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95	%	12	12	bulan	12	13,33%	12,00	36	40,00%
2.17.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	85	%	12	12	bulan	12	13,33%	18,00	42	46,67%

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
2.17.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)				300	Koperasi dan UKM	240	266,67%		240	266,67%
		Persentase Koperasi dan UKM yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	3	%					0,00%		0	0,00%
2.17.005.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti pelatihan	600	orang					0,00%		0	0,00%

Program yang tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu program Pengembangan Ekspor dengan capaian 41% hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan permintaan komoditi utama yaitu batu bara. Program kegiatan yang mencapai target yang ditetapkan adalah program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Program yang pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan yaitu Program Disparitas harga bahan pokok dan penting, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengolahan Sistem Informasi Industri Nasional, berkenaan dengan ini dapat dijelaskan kondisi-kondisi yang mendukung tercapainya target yaitu:

- a. Hal ini menunjukkan bahwa Upaya pemerintah untuk mengendalikan harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok melalui berbagai kebijakan berjalan dengan baik dan adanya jenis komoditi bapok yang secara kuantitatif sudah mampu disediakan oleh Kaltim yaitu daging ayam boiler, sebanyak 90% lokal sudah mampu dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Dukungan anggaran yang mencukupi karena terdapat beberapa program yang pencapaiannya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.

Program yang tidak mencapai target tersebut akan menyebabkan ketersediaan devisa negara terganggu. Namun hal tersebut tidak secara signifikan berpengaruh, karena banyak faktor lainnya seperti pencapaian daerah lainnya yang lebih besar dari pada Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mengatasi hal tersebut diatas maka perlu dilakukan inovasi kegiatan yang mampu mendorong peningkatan produk diluar produk utama (Batu bara) diantaranya

melalui penetapan komoditi unggulan ekspor di semua kab/kota serta terus dilakukannya kurasi terhadap produk yang layak ekspor untuk difasilitasi pemasarannya.

2.1.1.1. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

1) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dalam rangka tugas dan fungsi bidang Perdagangan dalam Koordinasi Distribusi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok, Operasi Pasar Barang Kebutuhan Pokok. Target Indikatornya adalah Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting sebesar Realisasi Kinerja Program sebesar 12,87% dengan target 16% dan 69% kinerja realisasi pupuk dengan target kinerja 85%. Alokasi anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp989.590.400 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp976.213.698 (98,65%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi dicapai dengan indikator output 100% Laporan harga harian melalui informasi Kemendag.
- Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dicapai dengan 80,77% Komoditi Bapokting yang Dipantau.
- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya dicapai dengan indikator output 10

Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

2) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Mendukung Tugas dan fungsi Bidang Industri dengan indikator Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara dengan capaian kinerja 10,29% dari target kinerja 5,20%. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp11.444.463.700 dengan realisasi sebesar Rp11.241.779.929 atau 98,23% dengan melaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan indikator Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan Industri Provinsi tercapai 9 dokumen dengan target 9 dokumen.

3) Program Pengembangan Ekspor

Program ini mendukung tugas dan fungsi bidang Perdagangan dalam Sosialisasi Pengembangan Pasar Ekspor, Monitoring Ekspor langsung, Koordinasi Pengembangan dan Peningkatan Ekspor Daerah, Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu: Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan indikator Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru sebesar 28 Jenis dengan target 67 jenis. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 1 (Satu) kegiatan ini sebesar Rp1.220.347.800 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp1.183.406.551 (96,97%).

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

dengan Indikator Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi Eksportir capaian 10 pelaku usaha dengan target 10 pelaku usaha.

4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD Pelatihan Koperasi)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja UPTD Pelatihan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Indikator Kinerjanya Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan UPTD Pelatihan Koperasi dengan target program sebesar 88,50% dengan realisasi sebesar 80,00% dan Indikator Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terealisasi 80%. Program ini terdiri atas 7 (tujuh) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal UPTD Pelatihan Koperasi dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan ini sebesar Rp3.726.885.826 terealisasi sebesar Rp2.820.390.776 (75,68%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah dokumen administrasi keuangan tiap tahun dengan capaian indikator sebesar 12 dokumen dengan anggaran sebesar Rp90.000.000 terserap sebesar Rp87.960.000 atau sebesar 97,73%.
- Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah sebesar 4 dokumen dengan anggaran sebesar Rp80.801.025 terserap sebesar Rp44.816.900 atau sebesar 55,47%.

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi 12 orang dengan anggaran sebesar Rp118.800.100 terserap sebesar Rp61.603.000 atau sebesar 51,85%.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output sejumlah 12 dokumen Administrasi Umum Perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp417.382.576 terserap sebesar Rp374.459.864 atau sebesar 89,72%.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan indikator output sejumlah 12 paket Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp393.662.643 terserap sebesar Rp340.650.000 atau sebesar 86,53%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian sejumlah 12 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp2.303.818.282 terserap sebesar Rp1.820.500.340 atau sebesar 79,02%.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik dengan capaian 12 dokumen anggaran sebesar Rp322.421.300 terserap sebesar Rp90.400.672 atau sebesar 28,04%.

5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini merupakan program pendukung tugas dan fungsi Bidang Koperasi dan UKM. indikator kinerja Persentase Koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan dengan capaian kinerja sebesar 1,40% dari target kinerja 2,34%. Alokasi anggaran sebesar Rp4.997.364.160 dan terserap sebesar

Rp4.664.718.591 atau 93,34% untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi. Capaian indikator kinerja sebesar 150 orang jumlah Koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan dengan target 210 orang.

2.1.2. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Indikator Kinerjanya Indeks Kualitas Layanan dengan target program sebesar 88,50% dengan realisasi sebesar 88,50% dan Indikator Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terealisasi 100%. Program ini terdiri atas 8 (delapan) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 8 (delapan) kegiatan ini sebesar Rp108.580.972.454, terealisasi sebesar Rp94.748.246.935,70 (87,26%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 29 dokumen

dengan anggaran sebesar Rp1.306.545.160 terserap sebesar Rp1.267.733.726 atau sebesar 97,03%.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah dokumen administrasi keuangan tiap tahun dengan capaian indikator sebesar 75 dokumen dengan anggaran sebesar Rp23.912.253.010 terserap sebesar Rp21.308.100.322,00 atau sebesar 89,11%.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah sebesar 18 dokumen dengan anggaran sebesar Rp157.898.600 terserap sebesar Rp135.039.803 atau sebesar 85,52%.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi 189 orang dengan anggaran sebesar Rp1.566.354.100 terserap sebesar Rp1.405.314.787 atau sebesar 89,72%.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output sejumlah 12 (Dua Belas) dokumen Administrasi Umum Perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp4.101.510.523 terserap sebesar Rp4.043.211.449,70 atau sebesar 98,58%.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan indikator output sejumlah 100 paket Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp66.628.313.195 terserap sebesar Rp56.704.108.740 atau sebesar 85,11%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah engan capaian sejumlah 60 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp8.352.675.340 terserap sebesar Rp7.377.037.729 atau sebesar 88,32%.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik dengan anggaran sebesar Rp2.555.422.526 terserap sebesar Rp2.507.700.379 atau sebesar 98,13%.

2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini merupakan program pendukung tugas dan fungsi Bidang Perdagangan. Indikator kinerja Persentase terbentuknya Food Station/Pusat Distribusi Pangan tercapai 10% dari target kinerja 10% dengan alokasi anggaran sebesar Rp457.400.000 dan terealisasi sebesar Rp441.045.000 atau 96,42% untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

- Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi seta Lelang Komoditas. Capaian indikator kinerja sebesar 6 kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station dengan target 6 kegiatan.

3) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini merupakan program pendukung tugas dan fungsi Bidang Koperasi dan UKM. indikator kinerja Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital dengan capaian kinerja sebesar 5,02% dari target kinerja 5%. Alokasi anggaran sebesar Rp6.914.608.816 dan terserap sebesar Rp6.443.501.476 atau 93,19% untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

- Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Capaian indikator kinerja sebesar 7,52% jumlah usaha kecil yang bermitra dengan target 7%.

4) Program Pengembangan UMKM

Program ini merupakan program pendukung tugas dan fungsi Bidang Koperasi dan UKM. Indikator kinerja Jumlah UKM Potensial Ekspor dengan capaian kinerja sebesar 20% dari target kinerja 20%. Alokasi anggaran sebesar Rp916.990.000 dan terserap sebesar Rp858.823.378 atau 93,66% untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

- Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Menengah. Capaian indikator kinerja sebesar 460 jumlah UKM yang di fasilitasi dengan target 455 UKM.

5) Program Penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini merupakan program pendukung tugas dan fungsi Bidang Perdagangan. Indikator kinerja Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri tercapai 75% dari target kinerja 75% dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.043.177.400 dan terealisasi sebesar Rp1.034.393.090 atau 93,16% untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri. Capaian indikator kinerja sebesar 25% pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk dengan target 25%.
- Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri. Capaian indikator kinerja sebesar 14,20% pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang dengan target 13,51%.
- Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Capaian indikator kinerja sebesar 800 jumlah yang di sosialisasi dengan target 800 Orang.

6) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini merupakan tugas dan fungsi 2 (dua) bidang pengampu yaitu Bidang Perdagangan dengan Indikator kinerja Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu dengan capaian kinerja 100% dari target 100% dan persentase surat rekomendasi yang tepat waktu dengan capaian 100% dari

target 100%, serta Indikator kinerja Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga dengan capaian 86,57% dari target kinerja 80% yang diampu oleh Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp278.481.600 dan terserap sebesar Rp270.637.510 atau sebesar 97,18% untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:

- Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar. Capaian indikator kinerja sebesar 18 Pelaku usaha yang di sosialisasi dengan target 9 Pelaku Usaha dan Indikator Jumlah rekomendasi yang tepat waktu tercapai 100% dari target 100%.
- Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API). Capaian indikator kinerja sebesar 265 Eksportir yang aktif menggunakan SKA dengan target 260 Eksportir.

7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Indikator Kinerjanya Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dengan target program sebesar 88,50% dengan realisasi sebesar 95,43% dan Indikator Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terealisasi 100%. Program ini terdiri atas 7 (tujuh) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan. Alokasi

anggaran untuk melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan ini sebesar Rp3.291.355.399 terealisasi sebesar Rp2.704.726.918 (82,18%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah dokumen administrasi keuangan tiap tahun dengan capaian indikator sebesar 13 dokumen dengan anggaran sebesar Rp79.320.000 terserap sebesar Rp79.320.000 atau sebesar 100%.
- Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah sebesar 5 dokumen dengan anggaran sebesar Rp66.295.000 terserap sebesar Rp56.837.706 atau sebesar 85,73%.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi 20 orang dengan anggaran sebesar Rp159.000.100 terserap sebesar Rp154.311.120 atau sebesar 97,05%.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output sejumlah 6 dokumen Administrasi Umum Perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp683.619.347 terserap sebesar Rp629.441.341 atau sebesar 92,07%.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan indikator output sejumlah 10 paket Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp1.729.862 terserap sebesar Rp1.275.000 atau sebesar 73,71%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan indikator output

Jumlah kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah engan capaian sejumlah 38 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp2.107.408.640 terserap sebesar Rp1.660.912.254 atau sebesar 78,81%.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik dengan capaian 48 unit anggaran sebesar Rp193.982.550 terserap sebesar Rp122.629.497 atau sebesar 63,22%.

2.1.3. Realisasi Program dan Kegiatan yang tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan.

1) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Mendukung Tugas dan fungsi Bidang Industri dengan indikator Persentase Jumlah Industri yang terdaftar di SIINas capaian 59,24% dengan target 18,69%, Anggaran sebesar Rp453.200.000 dengan realisasi sebesar Rp424.198.678 atau 93,60% dengan melaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan indikator jumlah industri yang tersedia kewenangan provinsi berbasis SIINas capaian 174 industri dari target kinerja 80 industri.

2) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Mendukung tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan indikator Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tercapai 100% dengan target 77% dengan anggaran Rp4.339.338.240 dengan realisasi sebesar Rp4.115.886.987 atau 94,85%, dengan melaksanakan 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Konsumen yang telah diberikan edukasi dengan capaian 1.274 orang melebihi target 1.000 orang.
- Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan dengan capaian 5% dengan target 5%.

3) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Mendukung tugas dan fungsi Bidang Industri dengan indikator Persentase pengendalian perijinan berusaha sektor Industri capaian 10,95 % target 5% dengan anggaran Rp586.000.000 dengan realisasi sebesar Rp535.094.582 atau 91,31% dengan melaksanakan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut:

- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi dengan indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan capaian 53,57% dengan target 25%.

4) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini merupakan program pendukung tugas dan fungsi Bidang Koperasi dan UKM. indikator kinerja Persentase Koperasi binaan Provinsi yang sehat dengan capaian kinerja sebesar 47% dari target kinerja 31%. Alokasi anggaran sebesar Rp734.732.515 dan terserap sebesar Rp712.891.341 atau 97,03% untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:

- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi. Capaian indikator kinerja sebesar 44% Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi dengan target 54%.

- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Capaian indikator kinerja sebesar 23,64% Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi dengan target 20%.

5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini merupakan program pendukung tugas dan fungsi Bidang Koperasi dan UKM. indikator kinerja Persentase Koperasi modern binaan Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 50% dari target kinerja 34%. Alokasi anggaran sebesar Rp999.468.500 dan terserap sebesar Rp969.886.276 atau 97,04% untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Capaian indikator kinerja sebesar 44,35% koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha dengan target 59,65%.

6) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)

Program ini merupakan program pendukung tugas dan fungsi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Capaian indikator kinerja mutu layanan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dengan realisasi capaian 95,43% dari target 82% dan Indikator Kinerja persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku dengan capaian realisasi 75% dari target 73%. Alokasi anggaran Program ini sebesar Rp1.692.091.006 terserap sebesar Rp1.625.256.424 atau 96,05%.

- Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di seluruh daerah kabupaten/Kota. Terdapat 4 indikator kinerja pada kegiatan ini, yaitu:

- o Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP dengan capaian realisasi 10 IKM dari target 12 IKM.
- o Jumlah keluhan pelanggan dengan capaian realisasi 0% dari target 2%.
- o Jumlah laporan mutu akreditasi dengan capaian realisasi 11 Laporan dari target 11 Laporan.
- o Persentase capaian penerbitan sertifikat layanan dengan capaian realisasi 124% dari target 100%.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2024.

Faktor penyebab tidak tercapai target sampai dengan akhir Tahun 2024 karena adanya sisa lelang pengadaan barang dan jasa dan adanya factor teknis dan non teknis dilapangan yang tidak dapat dikendalikan sehingga dalam mencapai target kinerja kurang maksimal.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah mencakup peluang dan tantangan yang memengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Dukungan kebijakan, ketersediaan anggaran, kompetensi SDM, serta sinergi dengan pemangku kepentingan menjadi faktor yang dapat mempercepat pencapaian target. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya, perubahan regulasi, kurang optimalnya koordinasi, serta faktor eksternal seperti dinamika ekonomi maupun bencana dapat menjadi penghambat. Oleh karena itu, implikasi tersebut harus diantisipasi melalui evaluasi berkelanjutan, penyesuaian strategi, dan penguatan tata kelola agar target Renstra tetap dapat dicapai secara efektif dan akuntabel.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain adalah melakukan penajaman prioritas program dan kegiatan sesuai kebutuhan daerah, mengoptimalkan alokasi anggaran berbasis kinerja, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika internal maupun eksternal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan misi yang ke dua yaitu “Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”. Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain: Sasaran Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD). Kemudian ditetapkan Sasaran Kinerja Utama yang menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik dan sesuai bidang layanan Perangkat Daerah. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Capaian indikator pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	-	√	10,06	10,06	10,43	11	7,97	8,94	10,76		Indikator dari tahun 2024
2	Nilai Ekspor Non Migas (Juta Dollar)	-	√	5.666	5.666	6.006	6.366	4.246	4.098	4.179		Indikator dari tahun 2024
3	Persentase Stabilitas Harga dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	-	√	1,16	1,15	1,15	1,15	1,07	1,06	1,04		Indikator dari tahun 2024
4	Indeks Keberdayaan Konsumen (Poin)	-	√	54	62	62	64	52,40	57,63	59,47		Pencapaian tahun
5	Pertumbuhan Omzet Koperasi (%)	-	√	19	19	21	23	42,36	50,84	55,58		Indikator dari tahun 2024
6	Pertumbuhan Omzet UKM (%)	-	√	5,8	5,8	6,3	6,8	3,50	7,10	9,44		Indikator dari tahun 2024

6 indikator tabel diatas merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah (PD). Namun pencapaian dari seluruh indikator tersebut membutuhkan dukungan pencapaian dari seluruh Perangkat Daerah (PD) lainnya khususnya Perangkat Daerah (PD) yang mengampu urusan peningkatan ekonomi daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur adalah di level koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) maupun lembaga vertical lainnya.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2025 implementasinya mencakup pelaksanaan dalam 18 (delapan belas) program yang merupakan bagian dari 4 (empat) sasaran selama tahun 2024, maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

❑ Sasaran I	:	Peningkatan Kontribusi industri pengolahan
Dengan Indikator	:	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran I pada tahun 2024 ini adalah 10,06%, dan realisasi tingkat capaian sampai dengan Triwulan IV hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 7,97%, sehingga persentase pencapaian indikator I sebesar 79,22%.

❑ Sasaran II	:	Peningkatan daya saing komoditi dan Ekspor Kaltim
Dengan Indikator	:	Nilai Ekspor non Migas dan Non batubara (Juta Dollar)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran II (dua) pada tahun 2024 ini adalah untuk indikator Nilai Ekspor non Migas dan Non batubara ditetapkan targetnya sebesar 5.666 juta dollar dan realisasi sampai dengan Triwulan

IV tahun 2024 sebesar 3.325 juta dollar, sehingga persentase pencapaian indikator sasaranannya sebesar 59%.

☐ Sasaran III	:	Peningkatan Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen.
Dengan Indikator	:	Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran III (tiga) pada tahun 2024 adalah dengan nilai 62 poin dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh nilai 57,63 sehingga pencapaian indikator sasaranannya sebesar 92,95 persen.

☐ Sasaran IV	:	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM
Dengan Indikator	:	1. Pertumbuhan Omzet Koperasi 2. Pertumbuhan Omzet UKM

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran IV (empat) tahun 2024 adalah untuk indikator Pertumbuhan Omzet Koperasi sebesar 19% dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 50,84% Koperasi sehingga persentase pencapaian sasaranannya sebesar 267,58 persen. Untuk indikator Nilai Omzet UKM sebesar 5,8 persen dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 7,10 persen, sehingga persentase pencapaian indikator sasaranannya sebesar 122,41 persen.

☐ Sasaran V	:	Peningkatan efisiensi Distribusi Perdagangan
Dengan Indikator	:	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran V (lima) pada tahun 2024 adalah dengan nilai 1,15% dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap

indikator tersebut diperoleh nilai 1,06% sehingga pencapaian indikator sasarannya sebesar 124,76 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada isu strategis tahun 2025–2029 Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
2. Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif berbasis Industrialisasi.
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administrasi dan Aparatur
 1. Perlunya peningkatan kinerja dan profesionalitas aparatur.
 2. Masih kurangnya sumber Daya Manusia PNS.
- b. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
 1. Masih banyak jumlah koperasi tidak aktif, yang mengakibatkan pembubaran koperasi, disinyalir koperasi yang ada terbagi atas koperasi aktif non produktif, koperasi tidak aktif namun produktif dan koperasi tidak aktif dan tidak produktif.
 2. Kurangnya penguatan kelembagaan Koperasi, sehingga pengelolaan koperasi belum dilakukan dengan benar dan professional.

3. Kurangnya daya saing produk lokal dan SDM pelaku usaha Koperasi dan UKM.

c. Urusan Pilihan Perindustrian

1. Belum Memadainya Infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang termasuk konektivitas antar wilayah.
2. Perlu peningkatan kompetensi sumber daya industri.
3. Diperlukan komitmen dan respon stakeholder secara serius dalam bekerjasama untuk menyelesaikan masalah sektor perindustrian.
4. Belum maksimalnya pengembangan sentra IKM.
5. Belum maksimalnya daya saing dan daya tarik investasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri.

d. Urusan Pilihan Perdagangan

1. Terbatasnya Ekspor Komoditi dan Produk non Migas non Batubara.
2. Rendahnya Daya Saing Produk yang dipasarkan.
3. Belum optimalnya Pemanfaatan peluang Ekspor langsung di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Terbatasnya Jangkauan Pemasaran komoditi dan produk ekspor.
5. Terbatasnya produksi dan sarana distribusi bahan pokok.
6. Belum optimal fasilitasi sistem distribusi perdagangan.
7. Belum optimal Kerjasama Perdagangan.
8. Konsumen Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya masih pada tahap mampu belum kritis.
9. Belum adanya peran aktif masyarakat menggunakan hak dan kewajiban sebagai konsumen.
10. Pelaku usaha masih ada yang belum patuh.
11. Belum optimal pemanfaatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Provinsi Kalimantan Timur.
12. Stabilitas Harga Kebutuhan Masyarakat dan Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Masyarakat.

Berikut adalah tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal
2. Birokrasi yang rumit dan tidak efisien
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang terbatas
4. Anggaran terbatas
5. Budaya kerja yang kurang responsif
6. Minimnya partisipasi dan pengawasan publik

Berikut adalah peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah:

1. Transformasi Digital dan E-Government
2. Dukungan regulasi dan kebijakan nasional
3. Inovasi pelayanan publik
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Peningkatan partisipasi Masyarakat
6. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting yang menjadi masalah-masalah mendesak yaitu antara lain:

1. Perlunya peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur.
2. Perlunya peningkatan kualitas manajemen dan produktivitas Koperasi.
3. Kebijakan untuk mendorong tercapainya jumlah RAT Koperasi.
4. Perlunya Forum FGD lintas Sektor membahas Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus.
5. Perlunya operasi pasar atau pasar murah sebagai salah satu upaya menstabilkan harga barang pokok yang naik.
6. Sosialisasi konsumen cerdas dan pelaku usaha taat SNI.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Secara Keseluruhan hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	50.322.186.099	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	88,9 Indeks	39.584.064.210	
			Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	89 Indeks				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	1.727.652.881	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	1.645.290.996	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	850.022.834	
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	768.301.496	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	506.792.956	
2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	155.925.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	21.688.000	
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	68.722.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	21.810.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	468.698.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	208.840.412	
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	183.644.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	91.031.990	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tiap Tahun	75 Dokumen	33.054.128.349	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Realisasi Anggaran	95 %	32.600.328.350	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	32.076.648.350	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	191 Orang/ Bulan	32.076.648.350	
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	398.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	522.480.000	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	15.000.000	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	215.200.000	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	223.520.000	-	-	-	-	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	14 Laporan	75.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	14 Laporan	1.200.000	
2.17.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	49.999.999	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	245.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Yang Berfungsi Dengan Baik	85 %	1.200.000	
2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	67.200.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.200.000	
2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	15.000.000	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	63.600.000	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/BimtekSosialisasi	189 orang	2.013.170.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	30 %	232.300.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	63.600.000	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	1.006.450.000	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	61.200.000	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	219.840.000	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	662.080.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	232.300.000	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	3.198.313.646	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	85 %	1.360.766.556	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	51.941.846	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	54.113.467	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	171.957.400	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	-	-	-	-	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	314.562.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	294.280.580	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	643.546.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	190.476.800	
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	23.270.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24.240.000	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	59.410.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	132.000.000	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.813.625.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	567.000.000	
2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	50.000.000	
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	48.733.709	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 paket	2.184.218.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	100 %	161.391.588	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	580.962.000	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.364.200.000	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	147.539.588	
2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	49.500.000	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	89.056.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.852.000	
2.17.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Dokumen	5.207.119.308	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95%	4.988.495.820	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.722.300	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1.139.398.740	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1.097.198.000	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.062.998.268	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.881.297.820	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	2.774.145.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	85%	1.117.211.943	
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	41.709.700	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	437.340.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	218.034.843	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	188.960.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	299.882.000	
2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	103 Unit	117.835.400	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	103 Unit	97.835.400	
2.17.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	49.920.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	88.800.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.335.356.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	308.550.000	
2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	511.438.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	62.400.000	
2.17.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	93.296.000	-	-	-	-	-	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	36 %	1.499.918.699	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	55 %	242.000.000	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi	75 %	749.955.780	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat (melaksanakan RAT)	44 Unit Usaha	122.000.000	
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	46 Unit Usaha	749.955.780	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	44 Unit Usaha	122.000.000	
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi	20 %	749.962.919	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Pembinaan Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan atau Pengawasan	28 Unit Usaha	120.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	46 Unit Usaha	749.962.919	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	44 Unit Usaha	120.000.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi	100 %	2.375.070.980	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang Berkualitas	60 %	758.000.000	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Koperasi Provinsi yang Mengalami Perkembangan Usaha	63,65 %	2.375.070.980	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah koperasi sektor riil yang dilakukan pembinaan	60 Unit Usaha	758.000.000	
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	46 Unit Usaha	462.174.160	-	-	-	-	-	
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	12 Unit Usaha	1.912.896.820	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	96 Unit Usaha	758.000.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	15 %	2.120.388.322	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Pertumbuhan Wirausaha Baru	2,91 %	21.710.242.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	7,5 %	2.120.388.322	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah usaha kecil yang dilakukan pembinaan dan pendampingan (digitalisasi, kemitraan, perijinan, pemasaran, standarisasi dan sertifikasi produk)	2000 Unit Usaha	21.710.242.000	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	140 Unit Usaha	864.289.282	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2000 Unit Usaha	21.710.242.000	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	150 Orang	406.954.460	-	-	-	-	-	
2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	3500 Unit Usaha	499.320.500	-	-	-	-	-	
2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	150 unit Usaha	349.824.080	-	-	-	-	-	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Jumlah UKM Potensial Ekspor	60 UKM	1.525.712.071	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	28 %	250.000.000	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Jumlah UKM yang di fasilitasi	455 UKM	1.525.712.071	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Jumlah UKM yang difasilitasi utk menjadi UKM potensi ekspor	120 UKM	250.000.000	
								Jumlah UKM yang di fasilitasi untuk memanfaatkan teknologi digital	290 UKM		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha	939.402.451	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	410 Unit Usaha	250.000.000	
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	258 Orang	586.309.620	-	-	-	-	-	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				29.585.183.810	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				40.672.126.492	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				15.685.259.904	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				20.582.387.424	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Surat Rekomendasi yang Tepat Waktu	100%	409.198.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100 %	300.000.000	
			Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga	90%							
3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya diTingkat Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi yang Tepat Waktu	100 %	55.982.000	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya diTingkat Daerah Provinsi		Jumlah rekomendasi tepat waktu	100 %	100.000.000	
3.30.02.1.02.0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	10 Dokumen	55.982.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	3 Dokumen	100.000.000	

[illegible]

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag	100 %	326.160.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag	100 %	150.000.000	
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	2400 Laporan	237.840.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	240 Laporan	100.000.000	
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	480 Laporan	88.320.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	48 laporan	50.000.000	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		persentase komoditi bapokting yang di pantau	85 %	551.877.243	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau	85 %	450.000.000	
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	15 Laporan	71.878.878	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	150.000.000	
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	16 Laporan	479.998.365	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Laporan	300.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	10 Laporan	250.000.000	-	-	-	-	-	
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	200.000.000	-	-	-	-	-	
3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	5 Laporan	50.000.000	-	-	-	-	-	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Produk Daerah yang Masuk Pasar Ekspor dan atau Negara Tujuan Baru	73 Jenis	1.736.033.960	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Produk yang Masuk Pasar Ekspor Baru (Produk)	19 Produk	304.903.676	
								Negara (daerah) Tujuan Baru Produk Ekspor Daerah	12 Daerah	295.022.144	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Jumlah Pelaku Usaha yang Didampingi Untuk Menjadi Eksportir	10 Pelaku Usaha	1.736.033.960	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	599.925.820	
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	4 Pelaku Usaha	409.145.150	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	199.980.000	
3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	343.320.000	Pameran Dagang Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	45.096.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
							Semua Kel/Desa				
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	248.256.400	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	49.946.144	
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	20 Produk	735.312.410	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	10 Produk	304.903.676	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Barang Beredar Yang Diawasi yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan`	80 %	9.566.188.958	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100 %	1.683.268.000	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha yang Teredukasi	1000 Pelaku Usaha	6.025.465.072	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	500 Pelaku Usaha	1.213.568.000	
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	3.787.149.960	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	1.213.580.000	
3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1 LPKSM	538.723.460	-	-	-	-	-	
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	30 Pengaduan	1.699.591.652	-	-	-	-	-	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5 %	3.540.723.886	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5 %	469.700.000	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan	Semua Kota/Kab,	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang	3 Laporan	1.770.361.943	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan	Semua Kota/Kab,	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar	3 Laporan	469.688.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi			Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi			
3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kasus yang Ditangani	3 Kasus	1.770.361.943	-	-	-	-	-	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase produk UMKM Binaan yang Terserap di Pasar Dalam Negeri	100 %	614.509.743	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	80 %	198.991.424	
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Pengembangan Produk	41,7 %	208.477.127	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	37,5 %	49.832.000	
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	10 UMKM	208.477.127	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	9 UMKM	49.880.000	
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang	45,45 %	52.176.000	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	24,29 %	49.952.000	
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20 UMKM	52.176.000	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15 UMKM	49.952.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah yang Disosialisasi	800 orang	353.856.616	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Peserta Sosialisasi P3DN	100 orang	99.159.424	
3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7 Laporan	353.856.616	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 Laporan	99.159.424	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				13.899.923.906	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				20.089.724.069	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5,29 %	12.704.445.460	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	40,81 %	19.339.880.969	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	5 Dokumen	12.704.445.460	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	6 Dokumen	19.339.880.969	
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	149.839.387	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	49.981.326	
3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	95.773.387	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	49.981.326	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	119.935.387	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	49.981.326	
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	9.989.064.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	15.179.560.333	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	2.199.993.912	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	2.203.616.000	
3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	149.839.387	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	56.951.992	
3.31.02.1.01.0008	-	-	-	-	-	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	3 Rekomendasi	1.749.808.666	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	15 %	695.713.230	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100 %	399.957.342	
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Presentase jumlah hasil pemantauan	26 %	695.713.230	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Presentase jumlah hasil pemantauan	25,5 %	399.957.342	
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	495.798.622	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	289.980.192	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	3 Dokumen	199.914.608	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	3 Dokumen	109.977.150	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	19,58 %	499.765.216	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya Informasi Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	100 %	349.885.758	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	3 industri	499.765.216	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	175 Industri	349.885.758	
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi	1 Dokumen	149.980.520	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui	1 Dokumen	149.913.982	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Informasi Industri Nasional (SIINas)		Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Informasi Industri Nasional (SIINas)		Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	99.901.864	-	-	-	-	-	
3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	249.882.832	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	199.971.776	
	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG				4.895.435.550	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG				1.856.094.984	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.895.435.550	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.856.094.984	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				4.895.435.550	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.856.096.329	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	2.868.687.310	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	58.140.000	
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,9 Indeks	1.213.843.447	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tiap Tahun	13 Laporan	84.120.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	95 %	74.400.000	
3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	84.120.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	74.400.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.1.04	Adinistrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	96.552.214	Adinistrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.248.000	
3.30.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	19.985.300	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	470.400	
3.30.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	19.992.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	470.400	
3.30.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	18.821.404	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	470.400	
3.30.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	18.600.000	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	470.400	
3.30.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	19.153.510	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	366.400	
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	20 Orang	223.870.720	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	90 %	47.160.000	
3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	26.270.720	-	-	-	-	-	
3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	197.600.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	47.160.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
							Semua Kel/Desa				
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	715.995.318	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	85 %	136.613.779	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	11.985.839	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.013.208	
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.045.651	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.697.775	
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	59.392.008	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.999.996	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	45.952.820	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.510.800	
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.579.000						
3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	19.200.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.392.000	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	511.840.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	75.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	497.102.658	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	95 %	20.248.916	
3.30.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	397.612.000	-	-	-	-	-	
3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	99.490.658	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	20.248.916	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 Kegiatan	957.516.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	933.036.752	
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.948.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.040.000	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	203.368.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	181.900.000	
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	742.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	742.096.752	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	58 Unit	293.530.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	85 %	58.276.000	
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	79.550.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	25.506.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Dinas Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan	Semua Kel/Desa				
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	151.980.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	32.770.000	
3.30.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	62.000.000	-	-	-	-	-	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	75 %	2.026.748.240	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Peningkatan Sertifikat Layanan Sertifikasi, Pengujian, dan Kalibrasi Yang Diterbitkan	8 %	584.111.537	
			Mutu Pelayanan BPSMB	(A) 84 %							
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang Mendapatkan Pendampingan GMP	14 IKM	2.026.748.240	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan HACCP	5 IKM	584.111.537	
			Jumlah Keluhan Pelanggan	2,5 %				Jumlah keluhan pelanggan	100%		
			Jumlah Laporan Mutu Akreditasi	12 Laporan				Jumlah laporan mutu akreditasi	11 Laporan		
			Persentase Capaian Penerbitan Sertifikat Layanan	100%				Persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	100%		
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2800 Sertifikat	844.907.246	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2600 Sertifikat	272.649.285	
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	195 Laporan	483.153.626	Pengembangan Layanan Pengujian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	180 laporan	189.551.452	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah produk potensial yang dipantau	6 Produk	189.209.880	-	-	-	-	-	
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	509.477.488	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	121.910.800	
	UPTD PELATIHAN KOPERASI				5.476.104.469	UPTD PELATIHAN KOPERASI				2.120.433.088	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.476.104.469	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.120.433.088	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				5.476.104.469	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				2.120.433.088	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	3.602.423.447	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	76.859.600	
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89 Indeks				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88.9 Indeks	1.401.866.539	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tiap Tahun	12 Bulan	91.680.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	95 %	72.360.000	
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	91.680.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	72.360.000	
2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	81.848.772	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	14.130.883	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	13.350.652	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	902.700	
2.17.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	18.704.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	976.500	
2.17.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	13.665.696	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	2.851.981	
2.17.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	16.800.000	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	8.400.000	
2.17.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	19.328.424	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	999.702	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah SDM Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi	20 Orang	89.796.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	90 %	45.480.000	
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	89.796.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.480.000	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	666.864.696	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	85 %	123.321.164	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	26.973.584	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.219.920	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
							Semua Kel/Desa				
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	174.914.520	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	16.168.960	
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	43.031.290	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.539.070	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	44.999.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.932.284	
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	118.867.732	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	216.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	87.000.000	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Unit	502.031.999	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	95 %	44.379.385	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	157.607.447	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	344.424.552	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	44.379.385	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Kegiatan	1.184.668.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	1.102.263.088	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	6.980.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	5.000.000	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	240.006.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	202.849.188	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.098.800	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.950.000	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	917.583.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	869.280.000	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Sarana Dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	18 Unit	985.533.080	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang digunakan dan berfungsi baik	85 %	76.859.600	
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	19.083.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	27.288.800	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	40.898.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	6.018.000	
2.17.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	15 Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	15 Unit	10.000.000	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	38.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	17.616.719	
2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	512.752.500	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	9.998.000	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	344.799.180	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.054.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	7,81 %	1.873.681.022	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi dan UKM yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	3 %	641.706.949	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	2200 Orang	1.873.681.022	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	600 Orang	641.706.949	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2200 Orang	1.873.681.022	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	600 Orang	641.706.949	
TOTAL					97.800.000.000					108.920.615.000	

Perencanaan penganggaran ditetapkan hanya mempertimbangkan kemungkinan ketersediaan anggaran, namun setelah melalui kajian kebutuhan maka didapatkan kebutuhan anggaran yang mengalami kenaikan, hal tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah sasaran penerima manfaat program, perubahan kondisi faktor eksternal maupun internal yang berpengaruh, perubahan harga yang signifikan karena perubahan lingkungan dan juga adanya kondisi tertentu yang berdampak cukup signifikan seperti kelangkaan barang kebutuhan pokok Masyarakat atau bencana lainnya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Penelaahan usulan pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta perencanaan pembangunan.
2. Peningkatan SDM dan Pendapatan UKM dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut hasil dari Forum Perangkat Daerah yang merangkum usulan Dinas Perindagkop Kabupaten/Kota:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)		
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah usaha kecil yang dilakukan pembinaan dan pendampingan (Unit Usaha)	15 Kelompok Pelaku Usaha	Pelatihan dan Bantuan Peralatan Usaha Bagi Pelaku Usaha

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan beberapa usulan kegiatan dari Aspirasi masyarakat yaitu usulan Kegiatan Prioritas Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupa Penguatan dan Pembinaan Digitalisasi UKM melalui Pelatihan Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan juga dari usulan Pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir pada matrik diatas. Usulan tersebut telah sesuai dengan kamus usulan yang ditetapkan yaitu: Penguatan dan Pembinaan Digitalisasi UKM dengan syarat merupakan kelompok usaha atau koperasi, memiliki NIB, serta menyampaikan proposal yang dilengkapi dengan RAB, sehingga usulan tersebut dapat diakomodir dan dilaksanakan karena telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yaitu pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Adapun terhadap pelaku usaha dibawahnya perlu dan penting juga untuk dilakukan pembinaan dengan harapan akan meningkatkan usaha mereka dari usaha mikro ke usaha kecil.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yaitu melakukan perubahan berdasarkan RPJMD 2025-2029.

Sasaran merupakan tujuan terhadap sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan Rancangan RKPD tahun 2026 kebijakan nasional sektor Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

A. Sektor Koperasi & UKM

1. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Nasional
2. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui program Fasilitasi Sertifikasi HAKI.
3. Pengembangan Kewirausahaan melalui program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, Perkoperasian, Keterampilan Teknis dan Manajerial).
4. Pembinaan dan pengawasan, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi akses pasar dan akses pembiayaan.

Berkaitan Kebijakan Nasional di sektor Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan program kegiatan tahun 2026 telah selaras dengan kebijakan

nasional tersebut. Program yang telah dilaksanakan dan yang akan direncanakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan rencana kerja yang disusun adalah sebagai berikut Pengembangan Kewirausahaan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, Perkoperasian, Keterampilan Teknis dan Manajerial, program ini dilaksanakan dalam rangka membantu usaha mikro kecil dalam memperoleh akses pembiayaan dan Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Nasional.

Dalam hal mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha telah dilaksanakan program yang membantu pengembangan usaha KUKM. Demikian pula halnya kebijakan pengembangan kewirausahaan telah dilaksanakan dan direncanakan program pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajerial bagi pengurus koperasi dan pelatihan ketrampilan teknis bagi pelaku koperasi.

B. Sektor Industri

1. Meningkatkan Nilai Tambah sektor Industri
2. Pertumbuhan Industri:
 - a. Pengembangan Perwilayahan Industri diluar pulau jawa
 - b. Penumbuhan Populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha.
 - c. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)
3. Pembangunan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa:
 - a. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA, Menciptakan nilai tambah, menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim dan pariwisata.

- b. Percepatan Pembangunan Konektivitas/Infrastruktur.
- c. Pengembangan SDM dan IPTEK.
- d. Pengembangan regulasi dan Kebijakan
- e. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian Insentif fiskal dan non-fiskal.

Berkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional berdasarkan arah pembangunan kebijakan nasional, jika dikaitkan dengan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sudah sejalan dan selaras. Dimana pada sektor industri, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 3 (tiga) Kawasan Industri, yaitu Kawasan Ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan Kaltim Industrial Estate (KIE).

Berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 dengan total luas area sebesar 557,34 Ha. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam terutama kelapa sawit, kayu dan energi didukung dengan posisi geostrategis yaitu terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). ALKI II merupakan lintasan laut perdagangan internasional yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Sulawesi, serta merupakan jalur regional lintas trans Kalimantan dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju.

KEK MBTK diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi di wilayah tersebut. Berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur, KEK MBTK akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya.

Kawasan Industri Kariangau (KIK) berlokasi di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat dengan menempati area seluas 133 Ha, dengan rencana pengembangan hingga

3.565 Ha yang selanjutnya akan dikembangkan hingga ke Pulau Balang. KIK memiliki letak strategis karena berada di teluk Balikpapan yang berhadapan langsung dengan selat Makassar yang merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II), posisi strategis tersebut memudahkan dalam mobilisasi barang untuk tujuan domestik maupun mancanegara (ekspor-impor). Hal ini ditunjang dengan kedalaman laut Teluk Balikpapan yang dapat dilalui dengan kapal berkapasitas 50.000 ton. Kawasan Industri Kariangau dibangun untuk mengakomodir pembangunan industri kimia, batubara, pengolahan kayu, pengeboran minyak, pupuk dan aneka industri lainnya. Hingga saat ini tercatat ada sekitar 20 pabrik yang sudah mengantongi izin membuat pabrik, dimana 13 diantaranya sudah beroperasi menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja. Perusahaan yang sudah beroperasi antara lain bergerak dalam pengolahan CPO (*Crude Palm Oil*), pertambangan, batubara, dan migas, industri perkapalan, industri logam, tekstil perkayuan, serta pergudangan. Dalam menjalankan fungsinya, Kawasan Industri Kariangau didukung oleh infrastruktur terminal peti kemas, pembangkit tenaga listrik, jalan akses, jembatan dan jalan tol.

PT. Kaltim Industrial Estate (KIE), awalnya bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri yang menyediakan lahan bagi berbagai perusahaan berbasis gas bumi, yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 1990 di Bontang oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur (PT. Pupuk Kaltim). Kini PT. KIE telah berkembang menjadi diversified firm sehingga saat ini ada lima pilar bisnis yakni : Kawasan Industri, Rekayasa dan Konstruksi, Properti, Beton dan Trading. Komitmen jajaran PT. KIE untuk senantiasa meningkatkan kualitas proses bisnis dan memahami kebutuhan konsumen, serta dukungan penuh PT. Pupuk Kaltim merupakan faktor kunci keberhasilan PT. KIE dalam mengembangkan bisnis-bisnis ini.

PT. KIE merupakan anak perusahaan dari PT. Pupuk Kaltim yang juga merupakan pengelola Kaltim Industrial Estate

dengan luas ± 230 Ha, kepemilikan saham sebesar 99,99% PT. Pupuk Kaltim merupakan perusahaan produsen pupuk dengan kapasitas produksi urea $\pm 3,43$ juta ton per tahun, amoniak sebanyak $\pm 2,74$ juta ton per tahun dan NPK ± 350 ribu ton per tahun.

C. Sektor Perdagangan

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah.
 - a. Pemantauan dan informasi harga & stok kebutuhan bahan pokok dan barang strategis.
 - b. Penyusunan Prognosa Kebutuhan Bahan Pokok dan Strategis.
 - c. Penanganan/pemantauan jalur distribusi bahan pokok dan barang strategis.
 - d. Sebagai Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Kaltim.
 - e. Sosialisasi Perlindungan Konsumen.
 - f. Sosialisasi Cinta Produk Indonesia.
2. Mendorong peningkatan kualitas produk Indonesia dan ekspor yang bernilai tambah lebih tinggi.
 - a. Pengawasan Barang Beredar di 10 Kabupaten/Kota.
 - b. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Standarisasi Bidang Perdagangan.
 - c. Peningkatan pemanfaatan skema kerjasama perdagangan internasional.
 - Meningkatkan promosi ekspor melalui promosi terpadu (nation branding) melalui pengembangan tagline promosi bersama antar Kementerian dan pengembangan nation branding.
 - Identifikasi peluang pasar produk barang dan jasa dengan penyediaan informasi/katalog produk buatan Indonesia dan melakukan upaya aktif untuk

menjadikan Indonesia pemasok jaringan produksi global.

- d. Mendorong para pengusaha untuk ekspor dan mencetak para eksportir baru.
- Pengembangan industri pengolah sumber daya alam berorientasi ekspor.
- Peningkatan ekspor produk KUMKM melalui program kemitraan, fasilitasi ekspor diversifikasi produk dan standirisasi dan inovasi.

Program yang direncanakan pemerintah untuk tahun 2026 diatas secara umum telah bersinergi atau sejalan dengan program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 melalui kegiatan yang didanai oleh APBD dan didukung oleh pendanaan dari pemerintah pusat (APBN), sebagai berikut penyelarasan target Nasional dengan daerah:

Tabel 3.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Urusan Daerah

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Prov
			2026
-1	-2	-3	-4
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
1	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	55
2	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	60
3	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	2,91
4	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	28
5	Persentase Koperasi dan UKM yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	3
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
1	Produk yang masuk pasar ekspor baru	Produk	19
2	Negara (Daerah) tujuan baru produk ekspor	Daerah	12
3	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	100

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Prov
			2026
4	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	80
5	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	1,06
6	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	57,1
7	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100
8	Persentase peningkatan sertifikat layanan sertifikasi, pengujian, dan kalibrasi yang diterbitkan	%	8
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
1	Persentase realisasi investasi sektor industri	%	40,81
2	Persentase rekomendasi izin yang diterbitkan usaha industri yang diterbitkan	%	100
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	100

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran merupakan tujuan terhadap sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan RPJMD 2025-2029:

Tabel 3.2
Tujuan Renstra 2025-2029
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

SASARAN RPJMD PROV KALTIM	TUJUAN DISPERINDAGKOP
Sasaran 1: Terakselerasinya Perekonomian Daerah	1. Mewujudkan akselerasi perekonomian daerah melalui penguatan sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan.

Sasaran peningkatan kontribusi industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian daerah dan nasional. Beberapa sasaran yang dapat diidentifikasi terkait peningkatan kontribusi industri pengolahan Provinsi Kalimantan Timur antara lain Peningkatan Produksi dan Kualitas. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan teknologi dan peningkatan kualitas SDM Industri Pengolahan, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi di pasar domestik dan Internasional.

Diversifikasi produk untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan variasi produk agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan riset dan pengembangan terhadap produk baru serta mengeksplorasi produk yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif di Provinsi Kalimantan Timur.

Peningkatan Ekspor pada volume dan nilai ekspor produk industri pengolahan dari Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dapat dicapai dengan memperluas pasar ekspor, mengembangkan jaringan distribusi yang efisien, serta meningkatkan kualitas produk agar dapat memenuhi standar pasar internasional.

Peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam transportasi, distribusi dan penyimpanan produk industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Timur serta dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan industri pengolahan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan infrastruktur transportasi,

menyediakan fasilitas pergudangan dan jaringan distribusi yang efisien, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan implementasi sasaran-sasaran diatas, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Timur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional serta memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

2. Peningkatan daya saing Komoditi dan Ekspor Kaltim

Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi komoditi di Provinsi Kalimantan Timur, serta meningkatkan daya saing komoditi dan ekspor di pasar domestik dan internasional. Beberapa strategi untuk mencapai terkait peningkatan daya saing komoditi dan ekspor Provinsi Kalimantan Timur, meningkatkan produksi komoditi dan meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar domestik dan internasional. Stake holder pengembangan teknologi pertanian dan peternakan yang modern, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, serta peningkatan keahlian petani dan peternak melalui pelatihan dan pendidikan, mengembangkan komoditi baru dan meningkatkan variasi produk agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeksplorasi komoditi yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif di Provinsi Kalimantan Timur serta melakukan riset dan pengembangan terhadap komoditi, strategi memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan akses ke pasar domestik dan internasional. Melakukan promosi dan branding produk, penyediaan informasi pasar dan pembeli potensial, serta kerjasama dengan pelaku bisnis dan industri yang memiliki jaringan luas di pasar domestik dan internasional.

Untuk menunjang sasaran dan untuk menjaga Disparitas harga barang pokok dan penting, diperlukan peningkatan

infrastruktur transportasi, perbaikan jalur distribusi dan penyediaan fasilitas pergudangan untuk mempermudah akses dan kemudahan transportasi, pengiriman, dan distribusi barang pokok dan penting serta produk komoditi di Provinsi Kalimantan Timur, selain itu diperlukan juga dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan komoditi dan ekspor di Provinsi Kalimantan Timur.

Dan perlu adanya peningkatan indeks keberdayaan konsumen di Kaltim untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup konsumen di Provinsi Kalimantan Timur Dalam sasaran ini, pemerintah berupaya untuk memberikan akses yang lebih baik kepada konsumen terhadap produk dan layanan yang berkualitas serta mengembangkan kapasitas konsumen untuk memahami dan menggunakan produk dan layanan secara efektif.

Salah satu strategi untuk mencapai sasaran ini adalah dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas produk dan layanan yang tersedia di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dapat dicapai dengan mendukung pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang memproduksi produk dan layanan berkualitas tinggi, dan memperkuat kemitraan antara produsen dan konsumen. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempromosikan produk lokal yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, agar masyarakat lebih tertarik dan merasa bangga menggunakan produk-produk tersebut.

Selain itu, peningkatan kapasitas konsumen juga menjadi fokus dalam sasaran ini. Pemerintah berupaya untuk memberikan edukasi dan pelatihan bagi konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, serta cara memilih dan menggunakan produk dan layanan dengan bijak dan efektif. Dengan meningkatkan kapasitas konsumen, diharapkan konsumen akan lebih berdaya dalam mengambil keputusan yang tepat dan menghindari penipuan atau penggunaan produk dan layanan yang berbahaya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi yang diperlukan oleh konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem informasi yang memadai mengenai produk dan layanan yang tersedia di pasar. Dengan adanya informasi yang akurat dan mudah diakses, konsumen akan lebih mudah memilih produk dan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.

Koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Koperasi berdasarkan Jenis nya terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Selama ini Koperasi simpan pinjam mendapatkan prioritas pembinaan namun dalam fungsinya sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah sangat minim. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Yang akan berfokus pada peningkatan tenaga kerja, modal dan aset.

Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha berfokus pada UKM ekspor dan UKM memanfaatkan bahan baku lokal.

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan UPTD Pelatihan Koperasi

Sasaran ini dapat dicapai dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan, program, dan anggaran di dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dengan memperkuat mekanisme pelaporan, audit internal, dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif. Melalui transparansi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan tentang kinerja dan penggunaan sumber daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan. Dengan memiliki indikator kinerja yang jelas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dapat memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat mencakup aspek-aspek seperti peningkatan jumlah perizinan usaha, peningkatan investasi sektor industri dan perdagangan, peningkatan pendapatan koperasi, dan sebagainya.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan Keputusan terkait kebijakan dan program di sektor industri, perdagangan, dan koperasi. Melalui partisipasi masyarakat, kebijakan dan program yang diimplementasikan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan berbagai bentuk partisipasi, seperti melalui konsultasi publik, dialog dengan pelaku usaha, atau pembentukan forum atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik yang disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat. Hal ini meliputi peningkatan efisiensi proses administrasi, responsivitas terhadap permintaan dan keluhan masyarakat, dan penerapan standar pelayanan yang berkualitas. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan langkah-langkah seperti penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi, pelatihan staf dalam pelayanan publik yang baik, dan pengembangan sistem umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan yang diberikan.

Dan didalam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur terdapat dua UPTD yaitu Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Pelatihan Koperasi. Untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dapat dijelaskan sebagai perbaikan dan peningkatan transparansi, tanggung jawab, dan kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga tersebut kepada masyarakat.

Beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang:

- Menerapkan praktik-praktik transparan dalam operasionalnya. Ini berarti memberikan akses informasi yang mudah dipahami dan komprehensif kepada masyarakat mengenai prosedur pengujian, kriteria sertifikasi mutu barang, biaya yang terkait, dan hasil

pengujian.

- Menjaga dan meningkatkan standar kualitas pelayanan yang disediakan. Ini melibatkan penggunaan metode pengujian yang akurat, peralatan yang mutakhir, serta tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasil kerjanya secara berkala. Evaluasi ini dapat melibatkan peninjauan internal dan eksternal, serta pengukuran kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur.
- Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengujian dan sertifikasi mutu barang, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan forum atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, keluhan, dan saran terkait pelayanan yang diberikan.
- Memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk menangani keluhan dari masyarakat. Keluhan harus ditindaklanjuti dengan cepat dan solusi yang memadai harus diberikan untuk memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi.

UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang perlu memastikan bahwa ada sistem akuntabilitas internal yang kuat di tempatnya. Hal ini melibatkan pemantauan dan pengawasan internal yang ketat terhadap proses pengujian dan sertifikasi mutu barang, serta tindakan disiplin jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, diharapkan akan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ini akan membantu memastikan bahwa barang-barang yang beredar di pasaran memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan melindungi kepentingan konsumen.

Dan untuk Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Pelatihan Koperasi mengacu pada

usaha untuk memperbaiki transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang pelatihan dan pengembangan koperasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa UPTD tersebut menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat terkait pelatihan koperasi.

Beberapa aspek yang diperlukan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Pelatihan Koperasi:

- Menerapkan prinsip transparansi dalam kegiatan operasionalnya. Ini meliputi menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang program pelatihan yang ditawarkan, persyaratan pendaftaran, biaya yang terkait, jadwal, dan evaluasi hasil pelatihan.
- Menjaga dan meningkatkan standar kualitas dalam penyelenggaraan Pelatihan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa materi pelatihan relevan dan *up-to-date*, fasilitas dan sumber daya yang memadai, serta melibatkan instruktur yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidang koperasi.
- Melakukan evaluasi kinerja secara teratur untuk mengukur efektivitas pelatihan yang diselenggarakan. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap kepuasan peserta, tingkat kelulusan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta dampak pelatihan terhadap pengembangan koperasi di masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan koperasi dapat meningkatkan akuntabilitas. UPTD Pelatihan Koperasi dapat melibatkan komunitas koperasi, asosiasi, atau pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan, diskusi, dan penilaian program pelatihan.
- Memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk

memastikan bahwa kegiatan pelatihan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan tindakan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran.

- Menyediakan saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat, baik itu melalui media sosial, situs web, atau pusat informasi. Informasi mengenai program pelatihan, proses pendaftaran, dan hasil evaluasi harus mudah diakses dan dipahami oleh Masyarakat.

Dengan mengimplementasikan sasaran-sasaran ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dapat mencapai peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik yang berdampak positif pada sektor industri, perdagangan, dan koperasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan strategi dan program-program ini, diharapkan dapat tercapai.

Tabel 3.3
Target Indikator Utama Tahun 2026

Tujuan		Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2026
1	TUJUAN 1: Terwujudnya Akselerasi Perekonomian Sektor Indagkop dan UKM	Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Pengolahan Non Migas dan Non batubara (%)	17,30 %	1	Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batu bara terhadap PDRB (%)	10.8
		Persentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim (%)	15,57	2	Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor Kaltim	Persentase produk dalam daerah yang masuk Pasar Ekspor dan atau Negara Tujuan Baru	18,2
						Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)	12,3
						Nilai indeks keberdayaan konsumen (Indeks)	63
		Pertumbuhan nilai PDRB sektor Koperasi dan UKM (%)	15,20	3	Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Pertumbuhan Omzet UKM	6,50
						Pertumbuhan Omzet Koperasi	22
				4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop	Nilai Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop	78.50
						Indeks Kepuasan Masyarakat Disperindagkop	86.00
						Indeks Kepuasan Masyarakat (UPTD BPSMB) (Indeks)	96.00
						Indeks Kepuasan Masyarakat (UPTD PELATIHAN KOPERASI) (Indeks)	88.00

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ada 18 program, 43 kegiatan dan 107 sub kegiatan. Untuk lokasi kegiatan hampir di semua wilayah Provinsi Kalimantan Timur Kebutuhan dana APBD Rp108.920.615.000. Jika rumusan program dan kegiatan yang dirinci tidak sesuai dengan Rancangan Akhir maka akan berdampak pada capaian kinerja baik program maupun kegiatan. Dan diharapkan kebutuhan anggaran yang ada di rumusan rencana kerja dapat sesuai dengan yang diharapkan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran maka dibuat beberapa program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, yaitu:

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	Kegiatan		Subkegiatan	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN
				8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No	Program	Kegiatan		Subkegiatan	
				12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				15	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				27	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
				28	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
				29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	9	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	31	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
		10	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	11	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	33	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	12	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan	34	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

No	Program	Kegiatan		Subkegiatan	
			Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	13	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	35	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
6	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	14	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	36	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		15	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	37	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	16	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	38	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	17	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	39	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
				40	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
		18	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	41	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
				42	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	19	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	43	Pameran Dagang Internasional/Nasional
				44	Pameran Dagang Lokal
				45	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
				46	Peningkatan Citra Produk Ekspor
10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	20	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	47	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
		21	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	48	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

No	Program	Kegiatan		Subkegiatan	
11	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	22	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	49	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
		23	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	50	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
		24	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	51	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	25	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	52	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
				53	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
				54	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
				55	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
				56	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				57	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
				58	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
13	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	26	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	59	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
				60	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
14	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	27	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	61	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
				62	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
15	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	28	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	63	Pengembangan Layanan Kalibrasi
				64	Pengembangan Layanan Pengujian
				65	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD BPSMB)	29	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		30	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	67	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
				68	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
				69	Pengolahan Data Retribusi Daerah
				70	Penetapan Wajib Retribusi Daerah

No	Program	Kegiatan		Subkegiatan	
				71	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
		31	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		32	Administrasi Umum Perangkat Daerah	73	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				74	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				75	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				76	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				77	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				78	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		33	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		34	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				81	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				82	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		35	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				84	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	36	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	85	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PELATIHAN KOPERASI)	37	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		38	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	87	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
				88	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
				89	Pengolahan Data Retribusi Daerah
				90	Penetapan Wajib Retribusi Daerah
				91	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
		39	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		40	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				94	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				95	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				96	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		41	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		42	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No	Program	Kegiatan		Subkegiatan	
				99	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				100	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				101	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		43	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				103	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				104	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
				105	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				106	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
				107	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 3.5
Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 Tertuang Dalam Prioritas Pembangunan Tahun 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2026 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA)	PAGU INDIKATIF
3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Tujuan 1: Terwujudnya Kaltim Sukses												
	Sasaran 1: Terakselerasinya Perekonomian Daerah												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (%)	28%	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang difasilitasi utk menjadi UKM potensi ekspor	120 UKM	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	290 Unit Usaha	1. Bisnis Matching UKM dan koperasi untuk rantai pasok, pembiayaan dan pemasaran (2025-2030) * Milenial Job Center (MJC) Mempertemukan konten kreator dengan pelaku usaha		250.000.000,00

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2026 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA)	PAGU INDIKATIF
											2. Fasilitasi Promosi UKM dan Koperasi (2025-2030) 3. Peningkatan kompetensi UKM dan Koperasi mengenai literasi Digital (Manajemen Produksi, Pemasaran, dan Pembiayaan) (2026-2030) * Optimalisasi AI dan konten kreator untuk peningkatan pemasaran produk 4. Bimtek UKM Ekspor (2025-2030) 5. Pameran UMKM (Expo, Kaltim Fair) (2025-2030)		
						Jumlah UKM yang di fasilitasi untuk memanfaatkan teknologi digital	290 UKM						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH DAN USAHA MIKRO	Pertumbuhan Wirausaha (%)	8,86%	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha kecil yang dilakukan pembinaan dan pendampingan (digitalisasi, kemitraan, perijinan, pemasaran, standarisasi	370 Unit Usaha	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Lapangan Kerja, Pemerataan	2000 Unit Usaha	1. 1. Fasilitasi (Pelatihan, Bantuan Alat, Pemasaran, dll) Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) (2025-2030) 2. Monitoring, Evaluasi dan		20.000.000.000,00

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2026 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA)	PAGU INDIKATIF
						dan sertifikasi produk)		Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		Pendampingan PKT (2026-2030) (fasilitasi peningkatan mutu produk => pengujian kalibrasi dan sertifikasi)		
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	60%	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi sektor riil yang dilakukan pembinaan	30 Unit Usaha	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	39 Unit usaha	2. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi / Koperasi Desa Merah Putih (Akuntabilitas, Tata Kelola, Kepatuhan, dan Kesehatan) (2025 - 2030) 3. Jasa Pemeringkatan Koperasi (2026-2030) 4. Perhitungan Nilai Tambah Koperasi dan UKM (2026-2030) 5. Pendampingan Koperasi Sektor Riil (2025 - 2030) 6. Pendampingan Koperasi Modern		700.000.000,00

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2026 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA)	PAGU INDIKATIF
											kab/kota (2026-2030) 7. Pendampingan Kopontren (2026-2030)		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yg masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	35 jenis	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	1. Mengikuti Pameran TEI (2026) 2. Bimtek Persiapan Bagi Peserta Pameran (2026,2027,2028,2029,2030) 3. Kurasi Calon Peserta Pameran (2026,2027,2028,2029,2030)		200.000.000,00
								Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	1. Mengikuti Pameran Kaltim Fair/ Kaltim Expo (2026) 2. Bimtek Persiapan Bagi Peserta Pameran (2026,2027,2028,2029,2030)		60.000.000,00

PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH	TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATA N	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2026 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSA NAAN SUB KEGIATA N (MINIMAL KAB/KOT A)	PAGU INDIKATIF
											3. Kurasi Calon Peserta Pameran (2026,2027,2028,2029,2030)		
								Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	1. melaksanakan Misi dagang Dengan ITPC/Atase Perdagangan / Buyer Secara Online (2026,2027,2028,2029,2030) 2. Kurasi Lapangan Produk potensial Ekspor ke kota/kab kaltim (2026,2027,2028,2029,2030)		50.000.000,00
								Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	10 Produk	1. Belanja Pengujian Produk Potensial Ekspor hasil dari Program Desa Devisa (2026,2027,2028,2029,2030)		290.000.000,00

PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH	TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATA N	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2026 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSA NAAN SUB KEGIATA N (MINIMAL KAB/KOT A)	PAGU INDIKATIF
											2. Pelatihan/ bimtek terkait Ekspor Di Program Desa Devisa ((2026,2027,2028,20 29,2030) 3. Bimtek /pelatihan Ekspor untuk pelaku usaha ekspor (2026,2027,2028,20 29,2030) 4. Pembuatan Materi Promosi (2026,2027,2028,20 29,2030) 5. Pengiriman Sampel Produk UKM Ekspor (2026,2027,2028,20 29,2030) 6. Belanja Pengujian Produk Potensial Ekspor (2026,2027,2028,20 29,2030) 7. Pendampingan dan indentifikasi UKM Ekspor dan Potensial Ekspor (2026,2027,2028,20 29,2030)		

PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH	TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATA N	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2026 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSA NAAN SUB KEGIATA N (MINIMAL KAB/KOT A)	PAGU INDIKATIF
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	1,06	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag (IKK output)	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	240 Laporan	1. Koordinasi kebijakan terbaru mengenai barang kebutuhan pokok di kementerian perdagangan (2026, 2027, 2028, 2029, 2030) 2. Koordinasi dan pemantauan sentra produksi barang kebutuhan pokok di provinsi kalimantan timur (2026, 2027, 2028, 2029, 2030) 3. monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok di provinsi kalimantan timur di pasar pantau dan distributor (2026, 2027, 2028, 2029, 2030)		100.000.000,00

PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH	TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATA N	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2026 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSA NAAN SUB KEGIATA N (MINIMAL KAB/KOT A)	PAGU INDIKATIF
								Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	48 laporan	1. monitoring harga dan stok barang penting kabupaten dan kota se-kalimantan timur (2026, 2027, 2028, 2029, 2030) 2. sinkronisasi data ke kemendag (2026, 2027, 2028, 2029, 2030) 3. pendataan dan profil pelaku usaha barang penting di kabupaten dan kota se-kalimantan timur (2026, 2027, 2028, 2029, 2030)		50.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	40,81%	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	6 Dok	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Konsultasi Teknis Draft Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (2025 s/d 2029)		49.999.992,00

PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH	TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATA N	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2026 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSA NAAN SUB KEGIATA N (MINIMAL KAB/KOT A)	PAGU INDIKATIF
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembang an, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen	1. Forum dan keepakatan keterkaitan antara industri besar dan IKM dalam hal rantai pasok (2025 s/d 2029) 2. Forum pembangunan/pen gembangan kawasan industri (2025 s/d 2030)		49.999.992,00
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1. FGD dan komitmen bersama peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Industri Galangan Kapal (2025, 2026)		49.999.992,00
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1. Pembangunan Rumah Produksi Bersama Minyak Goreng di Desa Kelekat (2026) + UKL/UPL + Pengawasan 2. DED KIK (2026)		400.000.000,00

PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH	TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATA N	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2026 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSA NAAN SUB KEGIATA N (MINIMAL KAB/KOT A)	PAGU INDIKATIF
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	1. Pelaksanaan Dekranasda Award Prov. Kaltim (2025 s/d 2030) 2. Melaksanakan Kunjungan Kerja/Rapat/Koord inasi DEKRANASDA Provinsi Kaltim (2025 s/d 2030) 3. Melaksanakan Penyusunan Informasi Produk Kerajinan Khas Kalimantan Timur ((2025 s/d 2030) 4. Pelaksanaan Fasilitasi Produk Kerajinan Display Produk Dekranasda (2025 s/d 2030)) 5. Pelaksanaan Gelar Kriya Dekranasda (2025 s/d 2030) 6. Pelaksanaan Rakernas Dekranas (2025 s/d 2030) 7. Fasilitasi pelatihan penguatan industri		2.200.000.000,0 0

PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH	TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATA N	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2026 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSA NAAN SUB KEGIATA N (MINIMAL KAB/KOT A)	PAGU INDIKATIF
											kerajinan (2025 - 2030) 8. Jasa Penyelenggaraan acara gelar kerajinan khas kaltim (2026-2030) 9. Pelatihan Desain Motif Kerajinan (2026, 2029) 10. Pendampingan Sertifikasi Halal (2026 - 2030)		
								Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna n Industri	1 Dokumen	1. Monitoring Pembangunan Industri Provinsi (2026 s/d 2029) 2. Identifikasi lahan potensial di KPI bagi pelaku usaha melalui RPIK yang telah dibuat		56.964.658,00

PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH	TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATA N	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2026 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSA NAAN SUB KEGIATA N (MINIMAL KAB/KOT A)	PAGU INDIKATIF
								Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	1. Kajian Review Masterplan KIK (2026) 2. AMDAL KIK (2026) 3. ANDALALIN KIK (2026)		3.460.000.000,00

Selain melaksanakan program prioritas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur juga turut mendukung program unggulan Gubernur terpilih yang diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya:

1. Program Jospol Pengembangan Kewirausahaan Terpadu

Program Jospol Pengembangan Kewirausahaan Terpadu merupakan program strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memperkuat ekosistem kewirausahaan daerah secara terintegrasi. Program ini diarahkan untuk mendorong penciptaan wirausaha baru, penguatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan daya saing usaha melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Ruang lingkup program meliputi fasilitasi pelatihan dan pengembangan keterampilan kewirausahaan, pendampingan manajerial dan teknis, penyediaan akses pembiayaan dan permodalan, perluasan jaringan pemasaran, serta penguatan pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha. Pelaksanaan program dilakukan secara terpadu melalui sinergi perangkat daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Melalui implementasi Jospol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmen dalam mendukung transformasi ekonomi daerah pasca migas, dengan menempatkan kewirausahaan sebagai pilar penting penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan struktur ekonomi daerah. Program ini juga selaras dengan visi pembangunan daerah, yakni menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus lokomotif pembangunan nasional dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).

Target yang ditetapkan pada Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu pada tahun 2025 yaitu 1.000 UMKM Penerima, tahun 2026 yaitu 2.000 UMKM Penerima, tahun 2027 yaitu 2.000 UMKM Penerima, tahun 2028 yaitu 2.500 UMKM Penerima, dan tahun 2029 yaitu 2.500 UMKM Penerima.

2. Program Jospol Rumah Produksi Bersama

Program Jospol Rumah Produksi Bersama (RPB) Provinsi Kalimantan Timur merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memperkuat ekosistem kewirausahaan dan daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyediaan fasilitas produksi terpadu. RPB hadir sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha, khususnya sektor industri pengolahan, agar mampu meningkatkan kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan produk lokal yang berdaya saing tinggi.

Melalui Rumah Produksi Bersama (RPB), pemerintah menyediakan sarana produksi bersama yang dilengkapi dengan peralatan modern, standar higienis, serta pendampingan teknis yang berorientasi pada peningkatan mutu dan efisiensi produksi. Program ini tidak hanya memberikan ruang kolaborasi bagi para pelaku UMKM, tetapi juga menjadi pusat inovasi, standardisasi produk, serta hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Selain itu, keberadaan Rumah Produksi Bersama (RPB) di Kalimantan Timur diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas produk UMKM sesuai standar pasar nasional maupun internasional, mendorong terbentuknya rantai nilai (*value chain*) yang lebih kuat antar pelaku usaha, memperluas akses pasar melalui kemitraan dengan sektor swasta, lembaga keuangan, serta platform pemasaran digital, menjadi instrumen percepatan transformasi ekonomi daerah berbasis industri pengolahan dan kewirausahaan terpadu.

Dengan implementasi Program Jospol Rumah Produksi Bersama (RPB), Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk melahirkan lebih banyak wirausaha tangguh, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berikut target Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Pakan Ternak di Desa Loleng pada tahun 2025.
2. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Minyak Goreng di Desa Kelekat pada tahun 2026.
3. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Coklat di Kampung Merasa, Kabupaten Berau dan Kopi di Kampung Linggan Melapeh, Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2027.
4. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Buah-Buahan di Kota Samarinda dan Desa Selangkau, Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2028.
5. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Pengolahan Hasil Laut di Kota Balikpapan dan Kota Bontang pada tahun 2029.
6. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Pakan Ternak di Kabupaten Paser dan Rotan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2030.
7. DED Rumah Produksi Bersama (RPB) di 4 (empat) Lokasi pada tahun 2027 yaitu Rumah Produksi Bersama (RPB) Pengolahan Hasil Laut di Kota Balikpapan dan Kota Bontang, Rumah Produksi Bersama (RPB) Pakan Ternak di Kabupaten Paser dan Rumah Produksi Bersama (RPB) Rotan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Program Jospol Pusat Distribusi Provinsi

Program Jospol Pusat Distribusi Provinsi (PDP) Kalimantan Timur merupakan bagian dari strategi penguatan sistem perdagangan daerah yang diarahkan untuk menjamin kelancaran arus barang, meningkatkan efisiensi rantai distribusi, serta memperluas akses pasar bagi produk unggulan daerah, khususnya hasil industri pengolahan dan produk UMKM. Program ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata niaga yang tertib, transparan, serta mendukung stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok maupun produk lokal di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pusat Distribusi Provinsi (PDP) berperan sebagai sentra logistik terpadu yang dilengkapi dengan sarana pergudangan, manajemen rantai pasok, serta fasilitas distribusi yang modern. Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyediakan wadah untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan produk lokal maupun kebutuhan pokok secara lebih efisien, sekaligus memperkuat posisi pelaku UMKM dan koperasi dalam ekosistem perdagangan daerah.

Pelaksanaan Program Jospol Pusat Distribusi Provinsi (PDP) diarahkan pada beberapa fokus kegiatan, yaitu:

1. Pengembangan Infrastruktur Distribusi

Pembangunan dan pengelolaan gudang distribusi yang terintegrasi dengan pusat produksi, pelabuhan, dan jalur transportasi utama. Penyediaan sarana penyimpanan berstandar (termasuk *cold storage*) untuk produk pangan segar, hasil pertanian, perikanan, dan olahan.

2. Penguatan Sistem Logistik dan Rantai Pasok

Pengelolaan stok barang secara terukur untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga. Penerapan sistem informasi distribusi berbasis digital guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan.

3. Fasilitasi Akses Pasar Produk Lokal

Penyediaan ruang distribusi bagi UMKM dan koperasi untuk memasarkan produk unggulan daerah. Kerja sama dengan pelaku usaha besar, ritel modern, marketplace, dan lembaga distribusi nasional untuk memperluas akses pasar.

4. Pendampingan Kelembagaan dan Tata Kelola

Penguatan peran koperasi dan BUMD sebagai pengelola pusat distribusi. Penyusunan regulasi operasional untuk menjamin keterlibatan semua pihak secara adil dan berkelanjutan.

Dengan adanya Program Jospol Pusat Distribusi Provinsi (PDP), manfaat yang diharapkan antara lain:

- a. Terciptanya sistem distribusi barang yang lebih efisien dan merata di seluruh kabupaten/kota.
- b. Meningkatkan akses pasar produk lokal sehingga mampu bersaing di tingkat nasional bahkan ekspo.
- c. Menekan disparitas harga antar wilayah, terutama untuk barang kebutuhan pokok dan produk unggulan.
- d. Memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui tata niaga yang sehat, tertib, dan terintegrasi.

Dengan demikian, Program Jospol Pusat Distribusi Provinsi (PDP) Kalimantan Timur menjadi salah satu langkah strategis dalam Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan sistem perdagangan daerah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendukung transformasi ekonomi berbasis hilirisasi dan kewirausahaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur berisikan Program dan Kegiatan prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025–2029 dengan tema pembangunan tahun 2026 yaitu “Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Serta Ekonomi Produktif dan Inklusif Sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.” sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasarkan perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya, berikut Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027:

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Kalimantan Timur**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				104.944.086.928				98.377.054.864
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				64.272.177.615				67.892.820.021
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				64.272.177.615				67.892.820.021
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		88,9	41.311.935.615			89	41.892.820.021
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		100%				100%	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu		100%	850.163.358			100%	1.028.000.000
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	506.792.956	APBD		6 Dokumen	580.000.000
2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	21.688.000	APBD		5 Dokumen	25.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	21.810.000	APBD		4 Dokumen	23.000.000
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	208.840.412	APBD		11 Laporan	250.000.000
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	91.031.990	APBD		3 Laporan	150.000.000
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran		95%	32.600.328.350			100%	32.947.601.590
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191 Orang/ Bulan	32.076.648.350	APBD		191 Orang/ Bulan	32.397.414.834
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	522.480.000	APBD		12 Dokumen	527.704.800
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	1.200.000	APBD		14 Laporan	22.481.956
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berfungsi Dengan Baik		85%	1.200.000			100%	1.212.000
2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1.200.000	APBD		1 Laporan	1.212.000
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		30%	232.300.000			30%	234.623.000
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	232.300.000	APBD		40 Orang	234.623.000
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		85%	1.360.844.556			100%	1.373.833.087

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	54.113.467	APBD		5 Paket	54.113.467
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	294.280.580	APBD		5 Paket	297.223.386
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	190.476.800	APBD		12 Paket	192.302.788
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	24.240.000	APBD		4 Dokumen	24.482.400
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	132.000.000	APBD		5 Laporan	133.320.000
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	567.000.000	APBD		12 Laporan	572.670.000
2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.500.000
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	48.733.709	APBD		1 Dokumen	49.221.046
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah		100%	161.391.588			100%	140.785.504
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	147.539.588	APBD		4 Unit	126.794.984
2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	13.852.000	APBD		1 Unit	13.990.520
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		95%	4.988.495.820			100%	5.038.380.778
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.000.000	APBD		12 Laporan	10.100.000
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	1.097.198.000	APBD		36 Laporan	1.108.169.980

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.881.297.820	APBD		12 Laporan	3.920.110.798
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik		85%	1.117.211.943			100%	1.128.384.062
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	41.709.700	APBD		8 Unit	42.126.797
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	218.034.843	APBD		16 Unit	220.215.191
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105 Unit	299.882.000	APBD		105 Unit	302.880.820
2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103 Unit	97.835.400	APBD		1 Unit	98.813.754
2.17.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	88.800.000	APBD		5 Unit	89.688.000
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	308.550.000	APBD		10 Unit	311.635.500
2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	62.400.000	APBD		3 Unit	63.024.000
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-	55%	242.000.000			70%	1.000.000.000
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat (melaksanakan RAT)		44 Unit Usaha	122.000.000			56 Unit Usaha	600.000.000
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Unit Usaha	122.000.000	APBD		56 Unit Usaha	600.000.000
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Jumlah Pembinaan Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan atau Pengawasan		28 Unit Usaha	120.000.000			35 Unit Usaha	400.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Unit Usaha	120.000.000	APBD		56 Unit Usaha	400.000.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas	-	60%	758.000.000			65%	2.000.000.000
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi sektor riil yang dilakukan pembinaan		60 Unit Usaha	758.000.000			65 Unit Usaha	2.000.000.000
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 Unit Usaha	758.000.000	APBD		104 Unit Usaha	2.000.000.000
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha Baru	-	2,91%	21.710.242.000			3,05%	21.000.000.000
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha kecil yang dilakukan pembinaan dan pendampingan (digitalisasi, kemitraan, perijinan, pemasaran, standarisasi dan sertifikasi produk)		2000 Unit Usaha	21.710.242.000			2000 Unit Usaha	21.000.000.000
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2000 Unit Usaha	21.710.242.000	APBD		2000 Unit Usaha	21.000.000.000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalni Kemitraan dan Ekspor	-	28%	250.000.000			31,5%	2.000.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasi untuk memanfaatkan teknologi digital		290 UKM	250.000.000			320 UKM	2.000.000.000
		Jumlah UKM yang difasilitasi utk menjadi UKM potensi ekspor		120 UKM				150 UKM	
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410 Unit Usaha	250.000.000	APBD		470 Unit Usaha	2.000.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				40.671.909.313				30.484.234.843
3,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				20.582.185.244				6.000.000.000
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi		100%	300.000.000			100%	500.000.000
3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi yang tepat waktu		100%	100.000.000			100%	200.000.000
3.30.02.1.02.0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	100.000.000	APBD		3 Dokumen	200.000.000
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA		270 Eksportir	200.000.000			275 Eksportir	300.000.000
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3900 Dokumen	200.000.000	APBD		3950 Dokumen	300.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya		57,1%	17.200.000.000			71,4%	800.000.000
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station		1 Kegiatan	17.200.000.000		Indikator tahun 2027 diganti menjadi jumlah laporan pengelolaan pusat distribusi provinsi	-	800.000.000
3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	17.200.000.000	APBD		2 Unit	800.000.000
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		1,06%	600.000.000			1,06%	1.200.000.000
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi Kemendag		100%	150.000.000			100%	300.000.000
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240 Laporan	100.000.000	APBD		240 Laporan	200.000.000
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 laporan	50.000.000	APBD		48 Laporan	100.000.000
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau		85%	450.000.000			85%	900.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	150.000.000	APBD		12 Laporan	300.000.000
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	300.000.000	APBD		18 Laporan	600.000.000
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk yang masuk pasar ekspor baru		19 Produk	599.925.820			22 Produk	1.700.000.000
		Negara (daerah) tujuan baru produk ekspor		12 Daerah				13 Daerah	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir		10 Pelaku Usaha	599.925.820			10 Pelaku Usaha	1.700.000.000
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Pelaku Usaha	199.980.000	APBD		3 Pelaku Usaha	450.000.000
3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Pelaku Usaha	45.096.000	APBD		4 Pelaku Usaha	250.000.000
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Pelaku Usaha	49.946.144	APBD		5 Pelaku Usaha	100.000.000
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Produk	304.903.676	APBD		10 Produk	900.000.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	100%	1.683.268.000			100%	1.200.000.000
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi		500 Pelaku usaha	1.213.580.000			800 Pelaku Usaha	800.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 BPSK	1.213.580.000	APBD		3 BPSK	800.000.000
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan		5%	469.688.000			5,4%	400.000.000
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	469.688.000	APBD		3 Laporan	400.000.000
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan		80%	198.991.424			83,3%	600.000.000
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk		37,5 %	49.880.000			50%	200.000.000
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 UMKM	49.880.000	APBD		12 UMKM	200.000.000
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang		24,29 %	49.952.000			28,57%	200.000.000
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 UMKM	49.952.000	APBD		20 UMKM	200.000.000
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta sosialisasi P3DN		100 Orang	99.159.424			200 Orang	200.000.000
3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	99.159.424	APBD		2 Laporan	200.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				20.089.724.069				24.484.234.843
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri	-	40,81%	19.339.880.969			42,31%	23.100.000.000
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi		6 Dokumen	19.339.880.969			6 Dokumen	23.100.000.000
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	49.981.326	APBD		1 Dokumen	100.000.000
3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	49.981.326	APBD		2 Dokumen	50.000.000
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	49.981.326	APBD		1 Dokumen	200.000.000
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	15.179.560.333	APBD		6 Dokumen	19.240.000.000
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	2.203.616.000	APBD		7 Dokumen	2.250.000.000
3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	56.951.992	APBD		1 Dokumen	60.000.000
3.31.02.1.01.0008	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Rekomendasi	1.749.808.666	APBD	Sub kegiatan pada tahun 2027 dihapuskan	-	1.200.000.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	-	100%	399.957.342			100%	820.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan		25,5 %	399.957.342			30%	820.000.000
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	289.980.192	APBD		1 Dokumen	500.000.000
3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	109.977.150	APBD		3 Dokumen	320.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	-	100%	349.885.758			100%	564.234.843
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS		175 Industri	349.885.758			200 Industri	564.234.843
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	149.913.982	APBD		1 Dokumen	264.234.843
3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	199.971.776	APBD		2 Dokumen	300.000.000
	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG				1.856.094.984				2.701.930.200
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.856.094.984				2.701.930.200
3,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.856.094.984				2.701.930.200
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		88,9	1.271.983.447			89	1.301.930.200
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		100%				100%	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran		95%	74.400.000			95%	84.120.000
3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	74.400.000	APBD		12 Dokumen	84.120.000
3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah		5 Dokumen	2.248.000			5 Dokumen	2.500.000
3.30.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	470.400	APBD		1 Dokumen	500.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Semua Kel/Desa						
3.30.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	470.400	APBD		1 Dokumen	500.000
3.30.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	470.400	APBD		1 Laporan	500.000
3.30.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	470.400	APBD		1 Dokumen	500.000
3.30.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	366.400	APBD		1 Laporan	500.000
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		90%	47.160.000			90%	45.000.000
3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	47.160.000	APBD		5 Orang	45.000.000
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		85%	136.613.779			90%	169.993.800
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.013.208	APBD		1 Paket	2.500.000
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	33.697.775	APBD		6 Paket	19.587.600
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	4.999.996	APBD		3 Paket	5.000.000
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	15.510.800	APBD		2 Paket	2.500.000
3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.392.000	APBD		4 Laporan	2.600.000
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	75.000.000	APBD		15 Laporan	137.806.200

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah		95%	20.248.916			95%	20.000.000
3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Unit	20.248.916	APBD		11 Unit	20.000.000
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		95%	933.036.752			95%	940.316.400
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	9.040.000	APBD		50 Laporan	11.948.400
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	14 Laporan	181.900.000	APBD		12 Laporan	186.168.000
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	742.096.752	APBD		12 Laporan	742.200.000
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik		85%	58.276.000			85%	40.000.000
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	25.506.000	APBD		15 Unit	20.000.000
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	9 Unit	32.770.000	APBD		12 Unit	20.000.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan sertifikat layanan sertifikasi, pengujian, dan kalibrasi yang diterbitkan		8%	584.111.537			8,5%	1.400.000.000
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IKM Yang Mendapatkan Pendampingan HACCP		5 IKM	584.111.537			5 IKM	1.400.000.000
		Jumlah Keluhan Pelanggan		100%				100%	
		Jumlah Laporan Mutu Akriditasi		11 Laporan				11 Laporan	
		Persentase Capaian Penerbitan Sertifikat Layanan		100%				100%	
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	2600 Sertifikat	272.649.285	APBD		2763 Sertifikat	600.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Semua Kel/Desa						
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180 laporan	189.551.452	APBD		191 Laporan	500.000.000
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Sertifikat	121.910.800	APBD		1 Sertifikat	300.000.000
	UPTD PELATIHAN KOPERASI				2.120.433.088				2.971.599.690
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.120.433.088				2.971.599.690
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				2.120.433.088				2.971.599.690
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan		88,9	1.478.726.139			89	1.471.599.690
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		100%				100%	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaraa		95%	72.360.000			95%	72.360.000
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	72.360.000	APBD		12 Dokumen	72.360.000
2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		5 Dokumen	14.130.883			5 Dokumen	6.784.000
2.17.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	902.700	APBD		12 Dokumen	1.000.000
2.17.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	976.500	APBD		12 Dokumen	1.000.000
2.17.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.851.981	APBD		12 Dokumen	2.784.000
2.17.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	8.400.000	APBD		12 Dokumen	1.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	999.702	APBD		12 Dokumen	1.000.000
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		90%	45.480.000			90%	50.000.000
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	45.480.000	APBD		3 Orang	50.000.000
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		85%	123.321.164			12%	120.000.000
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.219.920	APBD		1 Paket	10.000.000
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	16.168.960	APBD		2 Paket	10.000.000
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	9.932.284	APBD		2 Paket	10.000.000
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	87.000.000	APBD		15 Laporan	90.000.000
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah		95%	44.379.385			95%	39.991.790
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	44.379.385	APBD		3 Unit	39.991.790
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		95%	1.087.079.188			95%	1.104.463.900
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	5.000.000	APBD		20 Laporan	5.000.000
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	202.849.188	APBD		12 Laporan	205.000.000
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	9.950.000	APBD		3 Laporan	10.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	869.280.000	APBD		12 Laporan	884.463.900
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik		85%	91.975.519			85%	78.000.000
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	27.288.800	APBD		3 Unit	28.100.000
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	6.018.000	APBD		3 Unit	4.900.000
2.17.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	10.000.000	APBD		5 Unit	10.000.000
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	17.616.719	APBD		12 Unit	5.000.000
2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	9.998.000	APBD		1 Unit	10.000.000
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	21.054.000	APBD		1 Unit	20.000.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi dan UKM yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	-	3%	641.706.949			3,5%	1.500.000.000
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan ukm yang Mengikuti Pelatihan		600 Orang	641.706.949			780 Orang	1.500.000.000
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600 Orang	641.706.949	APBD		780 Orang	1.500.000.000
TOTAL					108.920.615.000				104.050.584.754

BAB V

PENUTUP

Renja Atau Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 berdasarkan acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Tema Pembangunan RKPD tahun 2026 adalah “Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Serta Ekonomi Produktif dan Inklusif Sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Penyusunan Renja tahun 2026, dilakukan melalui berbagai tahapan dan dibahas dalam forum koordinasi dan konsultasi, baik antar Dinas Perindagkop kab/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, tergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat penyusunan Renja tahun 2026 ini. Salah satu asumsi yang digunakan dalam proses penyusunan Renja tahun 2026 ini adalah adanya kerjasama semua pelaku pembangunan dalam memberikan kontribusi sesuai peran serta kemauan untuk turut mengawal dan mengendalikan melaksanakan semua rencana program/kegiatan yang telah direncanakan.

5.1. Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan

Renja 2026 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Renja Tahun 2026 merupakan rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku Industri Pelaku KUKM dan Pelaku usaha untuk menjamin efektivitas dan efesiensi pelaksanaan;
3. Renja tahun 2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026;
4. Setiap Unit Bidang dan UPTD lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan mempedomani RENJA Tahun 2026 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renja K/L 2026.
5. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 wajib dilaksanakan oleh seluruh Kepala Bidang dan Kepala UPTD beserta unit-unit dibawahnya dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel

dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku

5.2 Rencana Tindak Lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, selanjutnya Renja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

RENJA TAHUN 2026 SEKRETARIAT DAERAH

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tak lepas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan landasan hukum di bidang perencanaan dan pembangunan yang mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis tiga tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, RENJA mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan.

Tahapan penyusunan RENJA Perangkat Daerah, disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat tersebut, dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur tahun 2024, Rencana Kerja memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Lebih luas lagi diharapkan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai gambaran bagaimana mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerja sama, penetapan lokasi (penlok) penegasan batasan wilayah dan pertanahan, pada Biro POD, pemilihan pengadaan barang dan jasa, pembinaan pelaku barang dan jasa, LPSE pada Biro PBJ, fungsi pengelolaan pemberian dana hibah terkait sarana prasarana keagamaan, dan hibah pendidikan khusus berbasis keagamaan Biro Kesejahteraan Rakyat.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kalimantan Timur Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Sekretariat Daerah, hasil evaluasi RENJA Sekretariat Daerah tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi RENJA tahun berjalan.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, juga akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan di lingkungan Biro-Biro untuk tahun 2026 sesuai prioritas Pembangunan Kalimantan Timur, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan memperhatikan kebijakan dan program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Tahapan ini dilakukan dengan:
 - a. membentuk Tim Penyusun RENJA Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah;
 - b. Melaksanakan orientasi mengenai RENJA untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah;
 - c. menyusun tata cara sebagai panduan kerja; dan
 - d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan mengevaluasi capaian RENJA Sekretariat Daerah tahun yang lalu.
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal RENJA Sekretariat Daerah. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir RENJA Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:

- I. Pendahuluan
 - II. Hasil Evaluasi RENJA Tahun Lalu
 - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - IV. Rencana Kerja dan Pendanaan
 - V. Penutup
6. Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan berpedoman pada tahapan dimaksud, maka diharapkan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi komitmen bersama guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah, serta menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

24. Surat Edaran Pj. Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 007.2.4/0136/Bapp-II Tanggal 8 Januari 2024 Tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026.
25. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2/318/B.Adpm.I/2025 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu disusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang urusan pemerintahan yang bersifat penunjang, khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, pemberian pelayanan administratif, serta pembinaan Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah selama 1 (satu) tahun. Dokumen ini disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dan Rancangan RKPD Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah:

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2025.
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah ke dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 dan prakiraan tahun 2027.
3. Menetapkan rencana target kinerja dan pagu indikatif program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.
5. Menyediakan instrumen untuk evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah dan laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dengan tersusunnya RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2026 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RENJA
Sekretariat Daerah, proses penyusunan RENJA

Sekretariat dan keterkaitan antara RENJA Sekretariat Daerah dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Sekretariat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah .

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Sekretariat Daerah serta susunan garis besar dokumen.

BAB II

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah tahun 2022 dan capaian Renstra Sekretariat Daerah

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melakukan *review* hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah tahun yang lalu, dan/atau realisasi APBD, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan minimal

(SPM), maupun terhadap IKK.

2.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Menjelaskan uraian Tugas, Fungsi dan diagram struktur Sekretariat Daerah

2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Menjelaskan permasalahan yang ada pada Sekretariat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi pelayanan Sekretariat Daerah.

2.5 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, meliputi tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi misi, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah.

2.6 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Menguraikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antar rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025

Berisi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan

isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta kaitannya dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2026.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Berisi rencana kerja dan pendanaan biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2026.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan, catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan dan program yang telah disusun, dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan evaluasi yang dijabarkan dalam Bab Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu, dimaksudkan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam RENJA tahun lalu.

Evaluasi yang dimaksud untuk mengetahui:

1. Target kinerja yang tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Agar lebih memudahkan dalam memahaminya evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, dituangkan ke dalam Tabel 2.1 berisi evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan pencapaian kinerja berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 s/d Tahun 2025**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisas i Renja PD Tahun (2024)	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
Biro Umum															
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Biro Umum	85 Indeks	-	84 Indeks	89,87 Indeks	106,99 %	84,5 Indeks	84,5 Indeks	100%		
					Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	90 Persen	-	80 Persen	100 Persen	125,00 %	100 Persen	100 Persen	100%		
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	100 Persen	100%	
4	01	01	1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	683 Orang/Bulan	373 Orang / Bulan	383 Orang / Bulan	383 Orang / Bulan	100,00 %	683 Orang / Bulan	683 Orang / Bulan	100%

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4	0	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	100 Persen	100%
4	0	01	1	03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
4	0	01	1	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
4	0	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	100 Persen	100%
4	0	01	1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00 %	9 Paket	9 Paket	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1						2	3	4	5	Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	01	1	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	0	01	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	145 Orang	125 Orang / Bulan	175 Orang / Bulan	175 Orang / Bulan	100,00 %	30 Orang / Bulan	30 Orang / Bulan	100%
4	0	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	100 Persen	100%
4	0	01	1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	5 Paket	5 Paket	100,00 %	7 Paket	7 Paket	100%
4	0	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	8 Paket	8 Paket	100,00 %	8 Paket	8 Paket	100%
4	0	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	225 Paket	225 Paket	210 Paket	210 Paket	100,00 %	219 Paket	219 Paket	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 Paket	14 Paket	16 Paket	16 Paket	100,00 %	12 Paket	12 Paket	100%
4	0	01	1	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
4	0	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1850 Laporan	1920 Orang / Perjalanan	2340 Orang / Perjalanan	2340 Orang / Perjalanan	100,00 %	2209 Orang / Perjalanan	2209 Orang / Perjalanan	100%
4	0	01	1	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	0	01	1	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	0	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	100 Persen	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	01	1	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	15 Unit	111 Unit	5 Unit	5 Unit	100,00 %	1 Unit	1 Unit	100%
4	0	01	1	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	-	18 Unit	18 Unit	100,00 %	8 Unit	8 Unit	100%
4	0	01	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	330 Unit	-	-	-	-	200 Unit	200 Unit	100%
4	0	01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	150 Unit	150 Unit	766 Unit	766 Unit	100,00 %	299 Unit	299 Unit	100%
4	0	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	100 Persen	100%
4	0	01	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4	0	1	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
4	0	1	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
4	0	1	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
4	0	1	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	100 Persen	100%
4	0	1	01	1	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66 Unit	-	-	-	-	22 Unit	22 Unit	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisas i Renja PD Tahun (2024)	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	222 Unit	80 Unit	273 Unit	273 Unit	100,00 %	211 Unit	211 Unit	100%
4	01	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	550 Unit	447 Unit	920 Unit	920 Unit	100,00 %	685 Unit	685 Unit	100%
4	01	01	1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100,00 %	13 Unit	13 Unit	100%
4	01	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	325 Unit	325 Unit	340 Unit	340 Unit	100,00 %	2602 Unit	2602 Unit	100%
4	01	01	1	11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	75 Persen	75,00%	100 Persen	100 Persen	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisas i Renja PD Tahun (2024)	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	01	1	11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang / Bulan	1 Orang / Bulan	0 Orang / Bulan	0,00%	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	100%
4	0	01	1	11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	8 Paket	8 Paket	20 Paket	20 Paket	100,00%	18 Paket	18 Paket	100%
4	0	01	1	11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	8 Orang	4 Orang	4 Orang	100,00%	8 Orang	8 Orang	100%
4	0	01	1	11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang / Bulan	1 Orang / Bulan	1 Orang / Bulan	100,00%	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	100%
4	0	01	1	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00%	100 Persen	100 Persen	100%
4	0	01	1	12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	15 Paket	15 Paket	100,00%	19 Paket	19 Paket	100%

[illegible]

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1						2	3	4	5	Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	01	1	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	12 Laporan	9	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	33 Laporan	100%
4	0	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Hukum	100%	100%%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
4	0	01	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Orang	2 Orang	2 Orang	1 Orang	50	2 Orang	5 Orang	100%
4	0	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	0	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	50 Paket	12	101 Paket	97 Paket	96	30 Paket	139 Paket	100%
4	0	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7 Paket	12	15 Paket	15 Paket	100	5 Paket	32 Paket	100%

[illegible]

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	-	30 Unit	30 Unit	100	28 Unit	58 Unit	100%
4	0	05				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum dan bantuan hukum yang difasilitasi	100%	98,81%	100%	103%	103%	100%	100%	100%
4	0	05	1	01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%	103%	103%	100%	100%	100%
4	0	05	1	01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah produk hukum pengaturan yang disusun	80 Dokumen	67	90 Dokumen	68 Dokumen	76	35 Dokumen	170 Dokumen	100%
4	0	05	1	01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang disusun	750 Dokumen	901	750 Dokumen	741 Dokumen	99	500 Dokumen	2142 Dokumen	100%
4	0	05	1	01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan dikelola informasi hukumnya	800 Dokumen	968	700 Dokumen	809 Dokumen	116	600 Dokumen	2377 Dokumen	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	05	1	01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi	350 Dokumen	359	400 Dokumen	382 Dokumen	96	350 Dokumen	1091 Dokumen	100%
4	01	05	1	02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	05	1	02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	10 Perkara	12	10 Perkara	10 Perkara	100	10 Perkara	32 Perkara	100%
4	01	05	1	02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan	5 Kasus	12	25 Kasus	25 Kasus	100	5 Kasus	42 Kasus	100%
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN															
1						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi	97	84	85	100	118	100	85	88

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja PD Tahun (2024)	Realisas i Renja PD Tahun (2024)	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10={5+7+9}	11=(10/4)
								Pimpinan								
1	1						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	25	25
4	0	1	01	1	01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	2	9	450	9	2	22
4	0	1	01	1	01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja lingkup Setda	4	4	4	4	100	4	2	50
4	0	1	01	1	12		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik	100	100	100	90	90	100	25	25
4	0	1	01	1	02	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan ASN	12	12	12	12	100	12	5	42
4	0	1	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	100	100	90	90	100	25	25

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0	01	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan hasil pendidikan dan pelatihan	4	4	4	2	50	4	2	50
4	0	01	1	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda	2	2	2	16	800	2	1	50
4	0	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	90	90	100	100	100
4	0	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan Alat tulis kantor	12	12	12	150	1250	12	5	42
4	0	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	12	12	15	50	333	12	6	50
4	0	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	160	160	160	15	9	160	70	44
4	0	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang diadakan	627	627	1000	150	15	627	450	72

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	90	90	100	100	100
4	01	01	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	5	5	5	60	1200	5	2	40
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	90	90	100	100	100
4	01	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya (STNK) dan dipelihara	15	15	15	12	80	15	6	40
4	01	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	12	12	12	12	100	12	5	42
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	90	90	100	100	100

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
-	-	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12	12	12	9	75	12	5	42
4	01	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Listrik, dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	12	12	12	11	92	12	5	42
4	01	01	1	13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	100	100	100	100	100	100	100
4	01	01	1	13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah dokumen naskah pidato dan presentasi	12	12	12	12	100	12	5	42
4	01	01	1	13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen yang terpublikasi	12	12	12	12	100	12	5	42
4	01	01	1	13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah dokumen penyediaan data yang terdokumentasi	12	12	12	12	100	12	5	42
4	01	01	1	14		Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiata n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisas i Renja PD Tahun (2024)	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4	0	1	01	1	14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah dokumen koordinasi acara kegiatan Pemda	4	4	4	4	100	4	2	50
4	0	1	01	1	14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen kunjungan tamu yang terlayani	2	2	2	2	100	2	1	50
4	0	1	01	1	14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah dokumen administrasi keprotokolan	2	2	2	2	100	2	1	50
Biro Pengadaan Barang dan Jasa																
1	7						PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%
								Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	40%	-	30%	40%	133%	35%	35%	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	7	1.0	1			Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4	-	4	4	100%	4	4	100%
1	7	1.0	1	1		Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	7	1.0	1	2		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	2	2	2	100%	1	1	100%
1	7	1.0	1	3		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	2	2	2	100%	1	1	100%
1	7	1.0	2			Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	1	-	1	1	100%	1	1	100%
1	7	1.0	2	1		Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	7	1.0	2	2		Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	100%	1	1	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	7	1.0	2	3		Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	7	1.0	3			Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4					4	4	100%
1	7	1.0	3	1		Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250	200	250	250	100%	250	250	100%
1	7	1.0	3	2		Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	7	1.0	3	3		Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	80	-	71	81	114%	78	85	109%

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1.0	2			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	90	-	-	-	-	85	91	107%
1	1	1.0	2	2		Penyediaan admnisitrasi pelaksanan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	-	1	1	100%	1	1	100%
1	1	1.0	2	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	12	100%	12	12	100%
1	1	1.0	5			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70	-	50	60	120%	60	60	100%
1	1	1.0	5	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	1	1	100%	1	-	-
1	1	1.0	5	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	20	20	20	100%	10	10	100%

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1.05	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	12	11	11	100%	20	-	-
1	1	1.06				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	86	-	80	80	100%	83	83	100%
1	1	1.06	2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	2	2	2	100%	3	3	100%
1	1	1.06	5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	2	2	2	100%	12	12	100%
1	1	1.06	10			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40	20	20	20	100%	40	40	100%
1	1	1.07				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	90	-	85	85	100%	88	88	100%

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1.0	7	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	100%	126	126	100%	40	40	100%
1	1	1.0	8			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administrasi Umum	86	-	80	80	100%	83	83	100%
1	1	1.0	8	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100%	12	12	100%
1	1	1.0	8	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
1	1	1.0	8	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
1	1	1.0	9			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	86	-	80	80	100%	83	83	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisas i Renja PD Tahun (2024)	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1.0	9	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	1	1.0	9	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	1	2	2	100%	2	2	100%
1	1	1.0	9	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	50	40	40	100%	40	40	100%
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
4.01.01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90	82	85%	85%	100%	87%	87%	100%
4.01.01.1.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95%	98%	95%	90%	95%	95%	95%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2	2	100%
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	6 Orang	7 Orang	7 Orang	100%	7	7	100%
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12	12	100%
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12	12	100%

[illegible]

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah	Daerah dalam kondisi Baik								
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	9	9	100%
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12	12	100%
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah	-	90%	-	-	-	-	-	-
		Persentase Pengendalian Penerapan SPM	-	100%						
		Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	90%	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Konsultasi dibidang Pemerintahan								
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3	3	100%
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3	3	100%
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	100%	95%	95%	100%	95%	100%	100%
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3	3	100%
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	3	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4	4	133%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan									
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)								
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3	3	100%								
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30	1 Laporan	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	30	30	100%								
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20	1 Laporan	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20	20	100%								
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	3	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3	3	100%								
Biro Kesejahteraan Rakyat																		
4	01	01							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	84	100	86.59	86,59	100 Indeks	-	-

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisas i Renja PD Tahun (2024)	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4	0	1	01				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100	-	100	100	100	100	97,6	97,6%	
4	0	1	01	1	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95	90%	93,00%	93,00%	100	94%	92%	92%
4	0	1	01	1	02	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4	0	1	01	1	02	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	0	1	01	1	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	84%	100%	100%	100	100	100%	100%
4	0	1	01	1	05	11	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	4 Orang	2 Orang	4 orang	4 orang	100	4 Orang	4 Orang	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisas i Renja PD Tahun (2024)	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Perundang- Undangan								
4	01	01	1	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100%
4	01	01	1	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	-	6 Paket	6 Paket	100	6 Paket	4 Paket	100%
4	01	01	1	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	-	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100%
4	01	01	1	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%
4	01	01	1	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100%
4	01	01	1	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	01	1			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	17 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	-	-	-
4	01	01	1	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	90	90	100	100%	100%
4	01	01	1	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	10 Unit	8 Unit	8 Unit	100	8 Unit	8 Unit	100%
4	01	01	1	09-	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20 Unit	18 Unit	18 Unit	100	18 Unit	18 Unit	100%
4	01	04				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100%	100%	100%	97%	97,22	90%	100%	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4	0	1	04				Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	
4	0	1	04	1	01		Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	0	1	04	1	01	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	250 Unit	100 Unit	100 Lembaga	232 Lembaga	232	250 Unit	196 Unit	78,4%
4	0	1	04	1	01	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100	10 Lembaga	10 Lembaga	100%
4	0	1	04	1	02		Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
4	0	1	04	1	02	01	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi,	4 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan								
4	01	04	1	02	02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	01	04	1	02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	01	04	1	03		Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100%	100%	100%	100%	98	100%	100%	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisas i Renja PD Tahun (2024)	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							yang ditindaklanjuti								
4	01	04	1	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	01	04	1	03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi	4 Dokumen	20 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							dan Tenaga Kerja								
4	01	04	1	03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen	83	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN															
1	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	-	85,86	-	-	-	-	86	-
							Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85	-	85	97,38	114,56	85	182	215

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	-	1	-	-	-	-	1	-
							Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	-	100	100	100	100	200	200
1	1	1.0 3	4			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	100	1	3	300
1	1	1.0 6				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	300
1	1	1.0 6	3			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50	53	50	50	100	50	153	306
	1	1.0 5	9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	22	10	10	100	10	42	280,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	1	1.05	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15	10	10	10	100	10	30	200,00
	1	1.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	82	100	80	100	125	80	280	341,46
	1	1.06	2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	3	300
1	1	1.06	5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	10	1	1	100	1	12	1200
1	1	1.06	9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4	15	4	4	100	4	23	575
1	1	1.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	92	100	90	100	111,11	92	292	317,39

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1.07	6			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	84	10	10	100	10	104	1040
	1	1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	100	85	100	117,65	85	285	335,29
	1	1.08	1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	12	1	12	1200	1	25	2500
	1	1.08	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12	1	12	100	1	25	2500
	1	1.08	4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	12	1	12	100	1	25	2500
	1	1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi)	85	100	85	100	117,65	85	285	335,29

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Pembangunan)								
	1	1.09	1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	1	2	1	50	2	4	200
	1	1.09	2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	4	2	4	200,00	2	10	3,333,333,333
	1	1.09	6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	30	20	30	150,00	20	80	400
18						PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	85	-	-	-	0	85	85	100,00
							Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah	-	100	100	100	100	0	200	-

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan								
							Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	-	90	80	90	112,5	0	180	-
8	1.01					Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85	83,3	80	83,3	104,13	85	251,6	296,00
						Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	85	-	-	-	-	85	85	100,00
8	1.01	1				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4	6	6	6	100	4	16	400

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	8	1.0 1	2		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4	12	6	12	200	4	28	700
1	8	1.0 1	3		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III	6	6	6	6	100	6	18	300
	8	1.0 2			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85	100	80	100	125	80	280	329,412
	8	1.0 2	1		Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	3	300
	8	1.0 2	2		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	1	1	1	100	1	3	300
	8	1.0 2	3		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan	1	1	1	1	100	1	3	300

Kode	Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Daerah								
Biro Organisasi										
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	84	-	82	77,45	94,45	83	85	102.41
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100	-	100	73,74	73,74	100	75	75.00
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	12	12	12	100,00	12	12	100.00
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100,00	100	100	100.00
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12	12	100,00	12	12	100.00

Kode	Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100,00	100	100	100.00
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2	2	1	1	100,00	4	4	100.00
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	1	3	12	400,00	0	3	0.00
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95		90	67,53	75,03	92	95	103.26
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	6	4	66,67	3	3	100.00
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	2	100,00	2	2	100.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100,00	2	2	100.00
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1	1	100,00	1	1	100.00
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	1	100,00	1	1	100.00
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	2	2	2	100,00	7	7	100.00
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	100	100,00	100	100	100.00
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	15	15	17	17	100,00	81	17	20.99

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	100	100,00	100	100	100.00
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	0	0,00	1	1	100.00
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	13	13	100,00	0	12	0.00
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	100	100	100	100,00	100	100	100.00
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	18	18	11	11	100,00	9	9	100.00
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	21	13	12	92,31	12	12	100.00

Kode	Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	74	88,48	72	88,217	122,52	73	74	101.37
		Indeks Kematangan Organisasi	47	48,68	44	47,13	107,11	45	47	104.44
		Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	3	0	1	4	400,00	5	4	80.00
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	89	59,46	40	81,08	202,70	60	89	148.33
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	100	87,06	86	86,11	100,13	87	100	114.94
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada	63,00	56,41	0	61,54	0.00	65.00	65	100.00

Kode	Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Evaluasi Kematangan								
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai ketentuan.	92,00	100.00	100	100	100.00	100.00	100	100.00
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	82,00	59,46	82.00	83.78	102.17	82.00	82	100.00
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100	100	100	100	100,00	100	100	100.00
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100	100	100	100	100,00	100	100	100.00

Kode	Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penataan, Pengendalian, dan Penilaian Kematangan Organisasi	40	40	40	40	100,00	40	40	100.00
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	2	2	2	2	100,00	2	2	100.00
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	1	1	1	1	100,00	1	1	100.00
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2	2	2	2	100,00	2	2	100.00
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90	100	100	100	100,00	90	90	100.00
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan	100	100	90	87,93	97,70	100	100	100.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan								
		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Penerapan SAKIP nya	40	40	0	40	0	0	40	0.00
		Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM nya	40	40	0	40	0	0	40	0.00
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1		1	1	100,00	1	1	100.00
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3		1	1	100,00	3	3	100.00
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1		1	1	100,00	1	1	100.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	1		1	1	100,00	3	1	33.33
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1		1	1	100,00	3	1	33.33
401		Biro Perekonomian								
40106										
40106										
40106101										
401061010001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan	2 Dokumen	2 laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan n/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
								Kebijakan Ekonomi Makro								
041061012							Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	1 laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
04106102							Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
041061021							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	3 laporan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
041061022							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
041061023							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
04106103							Pengelolaan Kebijakan dan	Laporan Pengelolaan	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Koordinasi BUMD dan BLUD	Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD								
0410610310001						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	1 laporan	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
0410610310002						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
0410610310004						Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
04101							Persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro	83%	-	81 Indeks	81 Indeks	100%	82 Indeks	82 Indeks	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisas i Renja PD Tahun (2024)	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Perekonomian								
4	0	1	01	1	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	-	100%	-	-	-	-	-	-
4	0	1	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	-	4 dokumen	-	-	-	-	-
4	0	1	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 laporan	-	-	-	-	-
4	0	1	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95%	92%	95%	95%	100%	95%	100%
4	0	1	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4	0	1	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	-	100%	-	-	-	-	-
4	0	01	1	03	06	Penatausahaan	Jumlah Laporan	-	1 laporan	-	-	-	-	-	-

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	1					Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
04101105						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0410110505						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	24 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	25 Dokumen	25 Dokumen	100%
0410110509						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	14 orang	3 Orang	3 Orang	100%	3 Orang	3 Orang	100%
0410110502						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	45 paket	-	41 paket	41 paket	100%	-	-	100%
04101106						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	90%	100%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
0410110602						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 paket	10 paket	50 paket	50 paket	100%	30 paket	30 Paket	100%

[illegible]

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisas i Renja PD Tahun (2024)	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pemerintah Daerah	Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik								
4	0 1	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-	5 paket	4 paket	80%	1 paket	1 paket	80%
4	0 1	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan/Perlengk apan Kantor yang disediakan	15 Unit	1 Laporan	14 Unit	14 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
4	0 1	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	0 1	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	2 unit	1 unit	50%	1 unit	1 unit	100%
4	0 1	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 unit	12 laporan	25 unit	25 unit	100%	25 unit	25 unit	100%
4	0 1	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	1	0	0	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 dirumuskan dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang yang membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pemberian pelayanan administratif, serta pembinaan Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah. Perumusan tujuan strategis ini diselaraskan dengan misi pembangunan daerah serta arah kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026. Adapun Tujuan Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 antara lain:

1. Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK.
2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat Daerah berperan penting dalam memastikan konsistensi, koherensi, dan rasionalitas kebijakan yang dihasilkan, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas koordinasi kebijakan antar perangkat daerah, optimalisasi pengelolaan administrasi pemerintahan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis, digunakan sejumlah indikator kinerja utama seperti Indeks Kualitas Kebijakan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah. Indikator tersebut mencerminkan kualitas perumusan kebijakan, efektivitas pelaksanaan administrasi pemerintahan, serta tingkat kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, kinerja Sekretariat Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi

nyata terhadap terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berdaya saing. Adapun gambaran indikator kinerja yang tercantum dalam tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
1	Indeks Kelembagaan	71.53	72.00	73.00	74.00	88.48	88.22	89.00	Secara umum, capaian indeks kelembagaan Provinsi Kalimantan Timur berada pada kategori sangat baik karena nilainya mendekati angka maksimal 100. Namun, bila dibandingkan antar tahun, terjadi sedikit penurunan sebesar 0,26 poin dari tahun 2023 ke 2024. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama: 1. Masih terdapat perangkat daerah yang belum melakukan pemenuhan variabel penilaian sesuai dengan Indeks Kelembagaan. 2. Bukti dukung yang tidak lengkap atau belum sesuai standar sehingga memengaruhi validitas penilaian. 3. Kurangnya pemahaman teknis dari perangkat daerah mengenai dimensi-dimensi yang menjadi indikator penilaian, sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018. Meskipun capaian indeks kelembagaan Prov. Kaltim masih berada dalam kategori sangat baik, adanya penurunan nilai menunjukkan perlunya komitmen dan konsistensi perangkat daerah dalam melengkapi variabel dan bukti dukung. Dengan

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									penguatan sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan oleh Biro Organisasi, diharapkan capaian tahun berikutnya dapat meningkat dan menjaga tren positif dalam penguatan tata kelola kelembagaan.
2	Indeks Kematangan Organisasi	43.59	44.00	45.00	47.00	48.68	47.43	48.00	Capaian indeks menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 1,25 poin dari tahun 2023 ke tahun 2024. Penurunan ini menandakan adanya variabel yang belum terpenuhi secara optimal sehingga memengaruhi rata-rata nilai indeks. Dari 11 variabel penilaian, terdapat 4 variabel yang rata-rata nilainya masih berada pada Tingkat III (tiga), yaitu: Variabel III: Penjamin Mutu Layanan (3,87) → Masih rendahnya implementasi sistem penjaminan mutu pada proses penyelenggaraan layanan publik. Variabel V: Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (3,94) → Keterbatasan pelaksanaan diklat yang terarah dan berkelanjutan bagi aparatur sehingga kompetensi ASN belum meningkat optimal. Variabel VI: Analisis Kebijakan (3,96) → Belum optimalnya kapasitas perangkat daerah dalam melakukan kajian dan analisis berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Variabel VIII: Manajemen Risiko (3,85)

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									→ Penerapan manajemen risiko belum menyeluruh, masih terbatas pada unit tertentu, serta kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam mitigasi risiko kelembagaan. Walaupun capaian indeks mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, pencapaian target tahun 2025 sebesar 48,00 poin masih sangat memungkinkan dengan strategi perbaikan yang tepat. Fokus pada penguatan empat variabel kunci di atas menjadi faktor penting untuk mendorong peningkatan indeks kematangan organisasi di Provinsi Kalimantan Timur.
3	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapatkan nilai AKIP predikat Minimal A (memuaskan)	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	4.00	5.00	Pada tahun 2024, jumlah Perangkat Daerah klaster utama yang memperoleh predikat A (Memuaskan) sebanyak 4 perangkat daerah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, meskipun jumlah tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan total perangkat daerah yang seharusnya mampu mencapai predikat serupa. Faktor penyebab belum optimalnya capaian tersebut antara lain: Komitmen Pimpinan Sebagian besar pimpinan perangkat daerah belum maksimal dalam memberikan teladan akuntabilitas dan kinerja. Kurangnya keteladanan membuat budaya kerja berbasis kinerja sulit terbangun secara menyeluruh. Penerapan Reward dan Punishment

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									Belum konsisten dalam pemberian penghargaan maupun sanksi berdasarkan capaian kinerja organisasi maupun individu, sehingga motivasi kerja tidak merata. Budaya Transparansi dan Akuntabilitas Minimnya konsistensi dalam menerapkan prinsip transparansi menyebabkan pegawai di bawah pimpinan cenderung tidak memiliki kesadaran yang sama dalam menjaga akuntabilitas. Kepemimpinan yang Kurang Efektif Lemahnya koordinasi antar unit kerja mengakibatkan kinerja organisasi tidak berjalan optimal. Kepemimpinan yang tidak efektif turut menghambat pencapaian predikat AKIP yang lebih tinggi. Capaian 4 perangkat daerah dengan predikat A (Memuaskan) di tahun 2024 menunjukkan adanya kemajuan, namun jumlah tersebut masih bisa ditingkatkan. Kunci perbaikan ada pada komitmen pimpinan, penerapan reward & punishment, budaya akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi. Dengan upaya konsisten, target peningkatan jumlah perangkat daerah berpredikat A dapat dicapai pada tahun-tahun mendatang.

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
4	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIPnya memperoleh predikat minimal BB (sangat baik)	0.00	40.00	60.00	100.00	59.46	81.08	82.00	Tahun 2023: 59,46% atau setara dengan 22 Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP dengan predikat minimal BB (Sangat Baik). Tahun 2024: meningkat signifikan menjadi 81,08% atau 30 Perangkat Daerah yang memperoleh predikat minimal BB. Peningkatan sebesar 21,62% atau tambahan 8 perangkat daerah menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun capaian meningkat, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, yaitu: Kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome), sehingga masih terfokus pada output/aktivitas. Indikator kinerja yang ditetapkan beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Lemahnya keterkaitan dalam penjenjangan kinerja (cascading) dari level provinsi ke perangkat daerah hingga unit kerja. Belum konsisten dalam pengukuran, perjanjian kinerja, monitoring capaian, dan pelaporan kinerja, sehingga memengaruhi kualitas implementasi SAKIP secara keseluruhan. Peningkatan signifikan dari 59,46% (2023) menjadi 81,08% (2024) menunjukkan adanya komitmen kuat dalam

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, masih diperlukan penguatan pada aspek orientasi outcome, indikator kinerja yang SMART, serta konsistensi dalam cascading dan monitoring. Dengan strategi perbaikan yang dijalankan, target peningkatan kualitas SAKIP di tahun mendatang semakin realistis untuk dicapai.
5	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	0.00	85.00	87.00	89.00	87.06	95.69	96.00	Terjadi peningkatan signifikan sebesar 8,63% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil meningkatkan kualitas layanan publik sehingga memperoleh nilai IKM di atas 80 (predikat B). Meskipun capaian IKM sangat baik, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki agar target 2025 dapat tercapai, antara lain: 1. Penyusunan standar pelayanan pada beberapa unit layanan belum sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan. 2. Konsistensi penerapan standar pelayanan masih lemah, sehingga terdapat perbedaan antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaannya. 3. Pelayanan di luar SOP masih terjadi, menandakan lemahnya pengendalian dan pengawasan internal.

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									4. Inovasi pelayanan belum optimal, sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis. 5. Tindak lanjut pengaduan masyarakat belum berjalan maksimal, menyebabkan persepsi masyarakat terhadap responsivitas layanan masih beragam. 6. Sarana dan prasarana penunjang layanan di beberapa unit masih terbatas, berpengaruh terhadap kenyamanan dan kualitas layanan publik. Capaian IKM di atas 80 (B) yang meningkat dari 87,06% (2023) menjadi 95,69% (2024) menunjukkan kinerja pelayanan publik Pemprov Kaltim sudah sangat baik dan mendekati target 2025 sebesar 96%. Namun, untuk memastikan capaian tersebut berkelanjutan, perlu penguatan pada konsistensi penerapan standar pelayanan, optimalisasi inovasi, responsif terhadap pengaduan, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai.
6	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	4.35	4.25	4.00	4.00	38.72	43,49	45,66	penguatan tata kelola pengadaan dengan metode kompetitif sudah berjalan efektif. Kenaikan signifikan setiap tahun mengindikasikan peningkatan transparansi, efisiensi, dan persaingan sehat dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemprov Kaltim.
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	63.00	69.00	75.00	75.00	73,41	88,96	89,85	Pencapaian ini menggambarkan peningkatan signifikan efektivitas belanja pemerintah daerah melalui mekanisme pengadaan. Kinerja

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									melampaui target menandakan adanya konsistensi dalam mengarahkan belanja publik agar sesuai prinsip value for money serta akuntabilitas.
8	peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	0.00	2.20	2.50	2.70	143,07	21,63	22,71	Walaupun sempat melonjak tinggi pada 2023 karena kemungkinan adanya kebijakan afirmasi atau proyek besar berbasis PDN/UMK, capaian pada 2024 lebih realistis dan stabil. Tren capaian tetap konsisten melampaui target. Hal ini mencerminkan keseriusan Pemprov Kaltim dalam mendukung keberpihakan pada produk dalam negeri dan UMK-Koperasi.

Sumber Data: IKK Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, dapat dilihat arah perkembangan kinerja Sekretariat Daerah dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Untuk melengkapi gambaran kinerja secara menyeluruh, pada bagian berikutnya disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur utama keberhasilan pencapaian tujuan strategis Sekretariat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
1	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Analisis Capaian Indikator Persentase

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									Perumusan Kebijakan di Bidang Kesra yang difasilitasi berhasil mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target kebijakan yang direncanakan telah difasilitasi sesuai dengan program kerja tahunan. Capaian ini mengindikasikan adanya konsistensi pelaksanaan program, koordinasi yang baik antarunit kerja, serta dukungan faktor pendukung yang memadai. Keberhasilan ini juga mencerminkan meningkatnya peran Biro/Bagian terkait dalam mengawal proses perumusan kebijakan bidang kesejahteraan

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									n rakyat sehingga berdampak positif terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah. Faktor Pendorong Tersedianya anggaran yang cukup mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga perumusan kebijakan dapat berjalan tanpa hambatan finansial. Regulasi yang jelas menjadi pedoman bagi pelaksanaan program sehingga arah kebijakan lebih terukur dan terarah. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sub Bagian yang tersusun dengan baik menjadi acuan kerja yang

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									sistematis. Ketersediaan SDM yang memadai memungkinkan pelaksanaan fasilitasi berjalan sesuai target. Faktor Penghambat Masih terdapat ketidakpatuhan dalam melaksanakan RKT, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan atau inkonsistensi meskipun capaian tetap 100%. Keterbatasan kemampuan SDM dalam penyusunan perencanaan kegiatan membuat kualitas perencanaan belum optimal. Keterbatasan SDM dalam penyusunan output dan

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									outcome berpotensi menurunkan kualitas hasil meskipun target kuantitatif tercapai.
2	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	Analisis Capaian Indikator Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi mencapai hasil 100%, menunjukan Seluruh pemerintah daerah yang wajib menyusun LPPD telah difasilitasi dalam proses penyusunan/penyampaian laporannya. Faktor pendorong Dukungan penuh dari pimpinan instansi/pemerintah daerah sehingga fasilitasi LPPD menjadi prioritas. Koordinasi yang Efektif dengan

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									adanya komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota faktor penghambat Adanya revisi aturan teknis secara mendadak yang membutuhkan waktu penyesuaian. Ketersediaan SDM yang kompeten dalam fasilitasi.
3	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	Analisis Capaian Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi mencapai hasil 100%, menunjukkan seluruh kebijakan daerah yang menjadi sasaran fasilitasi telah didampingi

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									sesuai ketentuan Faktor pendorong Dukungan penuh dari pimpinan instansi/pemerintah daerah sehingga fasilitasi menjadi prioritas. Koordinasi yang Efektif dengan adanya komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota faktor penghambat Adanya revisi aturan teknis secara mendadak yang membutuhkan waktu penyesuaian. Ketersediaan SDM yang kompeten dalam fasilitasi.
4	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi	0,00	100,00	100,00	100,00	95,00	100,00	100,00	Analisis Capaian Persentase Kerja Sama Daerah

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									Yang Difasilitasi mencapai hasil 100%, menunjukan seluruh usulan kerja sama daerah yang menjadi sasaran telah memperoleh fasilitasi sesuai mekanisme yang berlaku . Faktor pendorong Komitmen Pimpinan terhadap fasilitasi kerja sama daerah menjadi prioritas dalam mendukung pembangunan daerah Koordinasi yang Efektif dengan adanya komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota Dukungan Anggaran dan Sarana dengan tersedia dana dan

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									fasilitas untuk pendampingan, sosialisasi, dan evaluasi kerja sama faktor penghambat Proses fasilitasi kadang terkendala oleh perbedaan agenda antar pihak yang bekerja sama.. Ketersediaan SDM yang kompeten dalam fasilitasi.
5	Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM	0,00	100,00	100,00	100,00	101,59	100,00	100,00	Analisis Capaian Indikator Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM mencapai hasil 100%, menunjukkan seluruh rancangan

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/di evaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM telah memperoleh fasilitasi sesuai mekanisme yang berlaku Faktor pendorong Komitmen Pimpinan terhadap rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/di evaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAMh menjadi prioritas dalam mendukung pembangunan daerah Koordinasi yang Efektif

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									dengan adanya komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota Tersedianya Anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Melakukan Koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin faktor penghambat Judul Rapergub/Raperda tidak dapat ditindaklanjuti Kurang memadai alat bukti
6	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Analisis Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi mencapai hasil 100%,

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									menunjukkan seluruh eluruh target kebijakan daerah di bidang perekonomian yang menjadi sasaran telah mendapatkan fasilitasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Faktor pendorong Ketersediaa n Regulasi dan Pedoman Teknis yang jelas, sehingga proses fasilitasi lebih terarah Dukungan Anggaran dan Sarana yang memadai untuk penyusunan dan asistensi kebijakan faktor penghamb t Variasi Kondisi Wilayah dan Potensi Ekonomi yang berbeda

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									antar daerah sehingga membutuhkan pendekatan berbeda
7	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	0,00	90,00	95,00	100,00	0,00	90,00	95,00	Analisis Indikator Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian mencapai hasil 100%,Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong kegiatan ekonomi, investasi, dan optimalisasi potensi lokal. Faktor pendorong Kebijakan Ekonomi Daerah yang Tepat Sasaran sehingga mampu mendorong pertumbuhan sektor unggulan (pertanian, pariwisata, UMKM, industri

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									lokal) Komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan strategis dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan bidang perekonomian faktor penghambat Fluktuasi Ekonomi Global/Nasional yang memengaruhi harga komoditas dan iklim investasi daerah. Keterbatasan Infrastruktur Ekonomi menyebabkan akses transportasi, logistik, dan pasar yang belum optimal.
8	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	0,00	71,00	73,00	76,00	70,55	86,69	86,69	Analisis Indikator Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa mencapai hasil

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									86,96, Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan barang/jasa di instansi telah berjalan dengan baik, dengan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang relatif tinggi Faktor pendorong Fasilitasi dan dukungan sistem informasi yang memudahkan SKPD untuk mendapatkan hasil pencatatan RUP penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									yang mempercepat proses dan meminimalkan intervensi manual faktor penghambat Belum terpenuhinya SDM JF PPBJ karena kewenangan terkait penambahan pegawai bukan kewenangan Biro PBJ Koordinasi Teknis yang Kompleks terutama pada pengadaan lintas unit kerja.
9	Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	0,00	90,00	91,00	92,00	96,63	95,20	95,20	Analisis IndikatorTingkat Capaian Realisasi Pembangunan mencapai hasil 95,20, Capaian

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah berada pada kategori sangat baik, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum tercapai secara penuh Faktor pendorong Komitmen Pimpinan dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program prioritas Perencanaan yang Matang melalui sinkronisasi RKPD, Renja, dan penganggaran

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									faktor penghambat Belum tertibnya administrasi pelaksanaan Pembangunan (Dokumen administrasi teknis) Keterlambatan Proses Pengadaan yang menyebabkan realisasi tidak optimal
10	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	0,00	70,00	80,00	100,00	97,30	81,08	81,08	Analisis Indikator Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB mencapai hasil 81.08, Capaian ini menunjukkan

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									bahwa sebagian besar perangkat daerah telah mampu menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dengan baik, meskipun masih terdapat perangkat daerah yang perlu ditingkatkan kualitasnya Faktor pendorong Komitmen Pimpinan Daerah untuk memperkuat penerapan SAKIP Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									kinerja. faktor penghambat Belum seluruh PD menindaklanjuti rekomendasi perbaikan SAKIP sesuai LHE dari Inspektoral Variasi Kapasitas SDM antar perangkat daerah yang tidak merata dalam pemahaman SAKIP
11	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah	0,00	85,00	85,50	86,00	84,26	86,40	86,40	Analisis Indikator Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah mencapai hasil 84,26, Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									besar pengguna layanan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Faktor pendorong Komitmen Pimpinan dan Aparatur dalam meningkatkan kualitas layanan Standar Pelayanan yang Jelas sesuai regulasi dan SOP faktor penghambat Variasi Ekspektasi Pengguna sebagian pengguna masih memiliki standar kepuasan yang berbeda-

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									beda. Tingginya Mobilitas Pelayanan khususnya pelayanan kerumaht anggaan Pimpinan dan Sekretaria t Daerah khususny a tamu- tamu Pimpinan yang tidak terencana atau tidak terprediks i
12	Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	0,00	70,00	71,00	72,00	0,00	81,80	81,80	Analisis Indikator Nilai akuntabili tas Kinerja Perangkat Daerahme ncapai hasil 81.08, Capaian ini menunjuk kan bahwa perangkat daerah telah melaksan akan prinsip akuntabili tas

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									dengan cukup konsisten. Komitmen Pimpinan Daerah untuk memperkuat penerapan SAKIP Faktor pendorong Komitmen Pimpinan Daerah dalam memperkuat penerapan SAKIP Ketersediaan Regulasi dan Pedoman Teknis yang jelas terkait manajemen kinerja Pendampingan dan Monitoring dari inspektora t maupun Bagian/ Biro Organisasi. faktor penghamb

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									at Belum seluruh PD menindakl anjuti rekomend asi perbaikan SAKIP sesuai LHE dari Inspektor at Variasi Kapasitas SDM antar perangkat daerah yang tidak merata dalam pemaham an SAKIP Variasi Kualitas Perencana an Kinerja antar perangkat daerah yang belum seragam
13	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0,00	85,00	85,50	86,00	86,29	86,41	86,41	Analisis Indikator Indeks Kepuasan Masyarak at Perangkat Daerah mencapai hasil 86,41,

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									Capaian ini menunjukkan bahwa berarti masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan, meskipun ada aspek tertentu yang masih perlu ditingkatkan Faktor pendorong Komitmen Pimpinan dan Pegawai dalam memberikan pelayanan prima. Profesionalisme dan Responsivitas Petugas dalam memberikan layanan Standar Pelayanan yang Jelas sesuai

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	6	7	8	9	12	13	14	15
									dengan regulasi faktor penghambat Beban Layanan Tinggi di waktu tertentu sehingga menurunkan kecepatan layanan Variasi Ekspektasi Masyarakat yang berbeda-beda sehingga memengaruhi hasil survei

Sumber Data: Sekretariat Daerah, diolah

Hasil capaian kinerja pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai/melebihi target capaian yang ditetapkan serta menjalankan tugas dengan baik dan dapat melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Meskipun demikian, dalam proses pencapaian target tersebut terdapat sejumlah faktor yang menjadi pendorong keberhasilan maupun kendala yang masih dihadapi. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kekuatan yang telah dimiliki serta tantangan yang perlu

segera diatasi guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah ke depan.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah pada periode perencanaan menunjukkan adanya berbagai faktor pendorong yang memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target indikator, sekaligus beberapa faktor penghambat yang perlu segera mendapatkan perhatian. Pada aspek fasilitasi perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, pencapaian kinerja didukung oleh tersedianya anggaran, regulasi yang jelas, rencana kerja tahunan yang telah disusun, serta dukungan sumber daya manusia. Namun demikian, masih dijumpai kendala berupa ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan rencana kerja, keterbatasan kapasitas aparatur dalam perencanaan, dan kelemahan dalam penyusunan output maupun outcome kinerja. Kondisi serupa juga terlihat pada fasilitasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana mekanisme pelaporan telah berjalan, tetapi kualitas capaian indikator kunci outcome LPPD belum sepenuhnya sesuai standar yang ditetapkan oleh regulasi terbaru.

Dalam fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama daerah, pencapaian kinerja relatif baik, meskipun masih diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan serta pedoman teknis yang lebih lengkap bagi perangkat daerah dan mitra kerja sama. Sementara itu, dalam bidang harmonisasi produk hukum dan penanganan masalah hukum serta HAM, dukungan regulasi, sarana prasarana, dan ketersediaan anggaran bantuan hukum menjadi faktor utama pendorong, sedangkan keterbatasan data dukung, judul rancangan peraturan yang tidak dapat ditindaklanjuti, serta alat bukti yang kurang memadai menjadi hambatan signifikan.

Pada bidang perekonomian, komitmen tinggi dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan menjadi kekuatan utama, namun terdapat hambatan terkait regulasi honorarium serta belum terealisasinya sumber dana dari FCPF. Meski demikian, capaian realisasi pendapatan daerah dari hasil kebijakan ekonomi relatif tidak menemui kendala berarti berkat adanya kemitraan kuat antara pemerintah daerah, BUMD, dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya, pada

aspek pengadaan barang dan jasa, dukungan sistem informasi, tambahan SDM melalui mekanisme PPPK, serta fasilitasi LKPP menjadi faktor penting dalam pencapaian target. Hambatan masih ditemui pada keterbatasan kemampuan SKPD dalam melakukan input RUP, keterbatasan SDM jabatan fungsional PBJ, serta proses verifikasi dan penilaian kematangan LKPP.

Demikian pula pada capaian realisasi pembangunan, dukungan anggaran, SDM yang kompeten, dan budaya kerja inovatif menjadi pendorong, namun belum tertibnya administrasi, pelaporan, serta integrasi data pembangunan antar-aplikasi masih menjadi kendala utama. Dari sisi reformasi birokrasi, sebagian besar perangkat daerah telah menerapkan cascading kinerja dan memanfaatkan aplikasi e-SAKIP dalam monitoring, tetapi komitmen pimpinan yang belum merata serta tindak lanjut rekomendasi perbaikan masih menjadi hambatan. Tingkat kepuasan layanan Sekretariat Daerah menunjukkan pengaruh positif dari dukungan anggaran dan pimpinan, meski kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, sinergi antar-biro, serta peningkatan kapasitas SDM, namun terkendala oleh perbedaan persepsi dalam pengisian aplikasi, seringnya pergantian operator, dan kompleksitas regulasi evaluasi SAKIP. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah cenderung meningkat berkat pelaksanaan survei secara rutin, pembaruan standar pelayanan, serta komitmen pimpinan hingga pelaksana. Akan tetapi, kesadaran ASN maupun non-ASN untuk mendorong pengguna layanan mengisi kuesioner masih rendah, dan pelaporan hasil survei belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem aplikasi.

Secara keseluruhan, analisis faktor pendorong menunjukkan bahwa dukungan regulasi, ketersediaan anggaran, komitmen pimpinan, serta penguatan sistem informasi menjadi modal penting dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah. Sementara itu, faktor penghambat utama lebih banyak terkait dengan keterbatasan kapasitas

SDM, ketidakpatuhan terhadap rencana kerja, lemahnya pengelolaan data dan dokumen pendukung, serta belum optimalnya integrasi aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan berkelanjutan berupa peningkatan kompetensi SDM, penguatan komitmen pimpinan, integrasi sistem informasi, serta penegakan disiplin dalam pelaksanaan rencana kerja untuk memastikan target kinerja dapat tercapai secara konsisten

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan kinerja Sekretariat Daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

Berdasarkan realisasi kinerja pada tabel sebelumnya, terlihat bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mampu mencapai sebagian besar target yang ditetapkan, khususnya dalam aspek fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi antarperangkat daerah, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta harmonisasi produk hukum. Capaian positif ini menunjukkan adanya dukungan regulasi, anggaran, dan perencanaan kerja tahunan yang terarah.

Namun demikian, capaian yang diperoleh belum sepenuhnya menjawab berbagai tantangan mendasar pembangunan daerah. Masih terdapat kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan data dukung, ketidakpatuhan dalam menjalankan rencana kerja, serta minimnya pedoman teknis yang seragam di antara perangkat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa

indikator yang belum tercapai atau masih membutuhkan peningkatan perlu diperhatikan secara serius.

Oleh karena itu, hasil pengukuran kinerja tidak hanya menjadi gambaran pencapaian, tetapi juga menjadi bahan evaluasi penting untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan. Permasalahan tersebut kemudian dipilah menurut masalah pokok, masalah, dan akar masalah agar dapat dirumuskan langkah strategis yang lebih terarah dan berkesinambungan. Rincian permasalahan pembangunan menurut urusan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4

Pemetaan Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi simplikasi dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintah	Belum optimalnya kinerja aparatur dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan	Kurangnya pemahaman secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya
		Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Biro Pemerintahan dan Biro Kesejahteraan Rakyat
		Data yang tersedia belum lengkap, akurat dan valid
		Belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan
		Belum optimalnya koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran di Perangkat Daerah
	Belum optimalnya target penawaran kerjasama	Kurangnya pemahaman penawaran kerjasama secara mendalam
	Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum secara kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum	Kurangnya pemahaman secara mendalam oleh ASN maupun Perangkat Daerah dalam menelaah ketentuan perundang- undangan dan produk-produk Hukum
	Belum optimalnya pengendalian pembangunan	Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Belum optimalnya penerapan kebijakan dan prinsip serta ketaatan kode etik pengadaan barang dan jasa	Kurangnya penerapan prinsip, kode etik, dan kebijakan pengadaan barang dan jasa
	Belum optimalnya Penerapan SAKIP	Masih kurangnya penerapan akuntabilitas kinerja sebagai budaya kerja
		Belum optimalnya monitoring dan evaluasi guna perbaikan kinerja
	Belum optimalnya kualitas layanan administrasi Pimpinan	Belum optimalnya penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Belum optimalnya penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Sumber Data: Sekretariat Daerah, diolah

2.3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan capaian kinerja yang telah diraih sekaligus tantangan yang masih dihadapi, Sekretariat Daerah dituntut untuk senantiasa responsif, kreatif, dan inovatif dalam menyikapi perubahan yang terjadi, baik pada lingkup internal pemerintahan maupun dalam dinamika kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan tidak lagi cukup hanya berorientasi pada target jangka pendek, tetapi harus disusun secara lebih komprehensif agar mampu mengantisipasi isu-isu strategis serta permasalahan mendasar yang berpotensi muncul di masa mendatang. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan yang dijalankan tidak sekadar memenuhi indikator kinerja, melainkan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sesuai dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan di Sekretariat Daerah perlu didasarkan pada analisis yang menyeluruh,

baik terhadap capaian pelayanan perangkat daerah serta identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi sebagai landasan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menjadi fokus prioritas ke depan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program yang dirancang dapat lebih terarah, terukur, serta berkontribusi pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dari proses analisis tersebut, terdapat beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke depan. **Pertama**, dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya kualitas kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum. Hal ini berimplikasi pada belum maksimalnya dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

Kedua, pada bidang perekonomian, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa, kualitas kebijakan yang ada masih memerlukan penguatan agar tata kelola pembangunan dapat lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penguatan di bidang ini sangat penting untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

Ketiga, dalam hal pelayanan publik, Sekretariat Daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas layanan dan kebijakan yang berorientasi pada penerapan administrasi dan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Langkah ini menjadi sangat krusial agar pelayanan publik tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara nyata.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berfokus pada peningkatan kualitas kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta pelayanan publik. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan

program dan kegiatan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan riil perangkat daerah. Oleh karenanya, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian antara program yang direncanakan dengan kondisi faktual di lapangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
Biro Umum					231.399.255.000					360.448.340.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5	231.399.255.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	85	360.448.340.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik (Biro Umum)	100 %	117.724.851.225	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik (Biro Umum)	100%	129.746.035.493	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	683 Orang/Bulan	115.441.601.813	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	683 Orang/Bulan	127.531.930.492	

		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.283.249.412	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.214.105.001	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah (Biro Umum)	100 %	1.442.898.170	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah (Biro Umum)	100%	1.327.219.334	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	617.884.240	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	672.055.704	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab,	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	12 Laporan	825.013.930	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Kota Samarinda,	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	12 Laporan	655.163.630	

		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Daerah pada SKPD			SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Daerah pada SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100%	3.191.567.845	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100%	3.129.732.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	842.146.845	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	910.356.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	4 Dokumen	1.618.129.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Samarinda, Semua	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	4 Dokumen	1.688.376.000	

		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kepegawaian				Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kepegawaian			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	175 Orang	731.292.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	531.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100%	25.474.287.205	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100%	49.663.003.086	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Paket	284.240.992	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 Paket	494.919.126	

		tan, Semua Kel/Des a	Kantor yang Disediakan			Bangunan Kantor	tan, Semua Kel/Des a Kota Balikpa pan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	536.473.143	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Balikpa pan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	486.242.399	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	6.168.732.84 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Balikpa pan,	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	321 Paket	21.700.320.894	

							Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	533.738.814	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	772.471.805	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.507.491.676	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.499.307.600	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.322.302.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.503.473.650	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	828.895.640	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	904.944.360	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	4 Dokumen	292.412.100	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	4 Dokumen	301.323.252	

		Semua Kel/Des a	Elektronik pada SKPD			pada SKPD	Semua Kel/Des a Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Elektronik pada SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum)	100%	4.593.312.150	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum)	100%	17.645.733.849	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	342.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	6.155.453.024	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1 Unit	342.000.000						

		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Disediakan								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	253 Unit	2.564.487.749	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	330 Unit	9.990.486.999	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 Unit	1.344.824.401	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	55 Unit	1.499.793.826	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum)	100%	32.747.473.620	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum)	100%	57.563.921.014	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	49.506.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	49.560.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.667.950.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.667.948.600	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.980.991.420	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.136.705.850	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.049.026.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.709.706.564	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat	100%	18.162.376.464	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kalimantan Timur	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat	100%	42.155.222.470	

			Daerah (Biro Umum)			Daerah		Daerah (Biro Umum)			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	52 Unit	381.102.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	66 Unit	1.369.400.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	205 Unit	3.014.030.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	262 Unit	4.821.094.390	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	600 Unit	1.275.078.864	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	187.500.000	

		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	13.345.815.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	33.585.117.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	195 Unit	146.350.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	147 Unit	2.192.111.080	

							pan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a				
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	13.743.506.3 58	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	17.889.134.675	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/B ulan	250.252.236	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/B ulan	250.252.236	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	189.240.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	452.928.000	

		a					a				
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	870.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	869.040.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	12.434.014.122	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	16.316.914.439	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	14.318.981.963	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	41.328.338.079	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	5.942.656.457	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	26.001.840.575	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang	20 Paket	4.849.873.215	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	20 Paket	11.512.130.851	

		tan, Semua Kel/Des a	Disediakan				tan, Semua Kel/Des a	yang Disediakan			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	23 Paket	3.526.452.29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	23 Paket	3.814.366.653	
Biro Administrasi Pimpinan					16.376.897.000					21.418.239.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	Kaliman tan Timur	Indeks Kualitas Layanan Keseekretarian Biro Administrasi Pimpinan	100 Indeks	16.376.897.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaliman tan Timur	1. Indeks Kualitas Layanan Keseekretarian 2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	81 84%	21.418.239.000	
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	1.041.642.000	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90%	1.507.234.673	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokume n	659.006.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokume n	916.684.673	

		tan, Semua Kel/Des a					tan, Semua Kel/Des a				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	382.636.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	590.550.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.115.891.18 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90%	179.880.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	4.115.891.18 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokume n	179.880.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan	90 %	714.404.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan	90%	1.820.604.000	

			Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha					Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	309.204.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	673.404.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	405.200.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	68 Orang	1.147.200.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90%	1.949.893.353	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90%	2.255.900.362	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	220.031.353	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	240.561.182	

		Semua Kel/Des a					Semua Kel/Des a				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	118.700.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	177.955.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	40.362.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	40.384.180	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.570.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.797.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan,	90%	369.219.776	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan,	90%	369.910.186	

			Kepegawaian dan Tata Usaha					Kepegawaian dan Tata Usaha			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	369.219.776	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	369.910.186	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90%	9.603.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90%	16.329.600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.603.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	16.329.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan,	90%	399.760.704	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan,	90%	245.400.848	

			Kepegawaian dan Tata Usaha					Kepegawaian dan Tata Usaha			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	352.880.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	198.260.848	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	46.880.704	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	47.140.000	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kaliman tan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100%	6.142.581.45 6	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kaliman tan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100%	11.529.870.845	
	Penyiapan Materi Pimpinan	Semua Kota/Ka b, Semua	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokume n	558.383.400	Penyiapan Materi Pimpinan	Semua Kota/Ka b, Semua	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	2 Dokume n	596.160.000	

		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	2.856.379.660	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	5.258.967.725	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	2.727.818.396	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	3 Laporan	5.674.743.120	
	Fasilitasi Keprotokolan	Kalimantan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100%	1.633.900.929	Fasilitasi Keprotokolan	Kalimantan Timur	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100%	3.493.108.486	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	955.096.929	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	1.352.526.605	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	446.124.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Laporan	1.152.600.000	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	232.680.000	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	987.981.881	
Biro Hukum					6.244.666.000					3.951.487.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum	90 %	1.728.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	421.775.838	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100%	103.920.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100%	95.760.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	103.920.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	95.760.000	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	7.680.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	7.680.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	990.995.672	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	306.775.718	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	142.043.110	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	22.075.020	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	8.635.718	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Semua Kota/Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	55 Laporan	826.877.542	Penyelenggaraan Rapat	Semua Kota/Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	268.140.000	

	dan Konsultasi SKPD	b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Koordinasi dan Konsultasi SKPD	b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	134.693.884	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	120	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	134.693.884	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	120	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	460.762.944	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	453.762.944	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	0	

		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kantor yang Disediakan				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	29.947.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	8.560.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	29.947.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.560.000	
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Kalimantan Timur	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100%	4.444.666.000	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Kalimantan Timur	1. Persentase fasilitasi penyelesaian masalah hukum 2. Persentase rancangan produk hukum yang dihasilkan	100% 100%	3.514.711.162	
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Kalimantan Timur	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	2.729.666.000	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Kalimantan Timur	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	1.899.496.202	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	80 Dokumen	860.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	80 Dokumen	640.315.554	

		tan, Semua Kel/Des a					tan, Semua Kel/Des a				
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	750 Dokume n	310.000.000		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	750 Dokume n	205.400.000
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	800 Dokume n	690.000.000		Pendokumenta sian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	800 Dokume n	400.342.888
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	350 Dokume n	869.666.000		Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kot a	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	350 Dokume n	653.437.760
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kaliman tan Timur	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat	100%	1.715.000.00 0		Fasilitasi Bantuan Hukum	Kaliman tan Timur	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat	100%	1.615.214.960

			Peradilan					Peradilan			
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	1.105.000.000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	1.149.982.232	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	610.000.000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	465.232.728	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-	-	72.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	15.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	72.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	15.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	72.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	15.000.000	

		a					a				
Biro Organisasi					7.790.563.000				4.343.462.000		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	84 Indeks	2.090.563.000,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	88 Indeks	886.478.489	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi)	100%	115.440.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi)	100%	103.329.510	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115.440.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	103.329.510	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Organisasi)	100%	10.230.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Organisasi)	100%	3.600.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.230.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.600.000	
	Administrasi Kepegawaian	Kalimantan	Persentase Administrasi	100%	85.217.500						

	Perangkat Daerah	Timur	Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi)								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	60.217.500,						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	25.000.000						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)	95%	1.185.674.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)	95%	662.939.199	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	37.473.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	72.153.331	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Balikpapan, Semua	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	278.350.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Semua	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	78.089.248	

		Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.096.620	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	47.700.000						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	707.250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	495.600.000	

		Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	98.401.000						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Biro Organisasi)	100%	194.076.000,	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Biro Organisasi)	100%	43.797.780	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	194.076.000,	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	43.797.780	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Biro Organisasi)	100%	419.330.500						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	1.000.000						

		da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Surat Menyurat								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	418.330.500						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi)	100%	80.594.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi)	100%	72.812.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 Unit	61.812.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	52.312.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarin da, Semua Kecama tan,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar	21 Unit	18.782.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarin da, Semua Kecama tan,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	20.500.000	

		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Kalimantan Timur	Indeks Kematangan Organisasi	47 Indeks	5.700.000.000	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Kalimantan Timur	1. Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada evaluasi Kematangan Organisasi	63%	3.456.983.511	
			Indeks Kelembagaan	74 Indeks				2. Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (Sangat Baik)	82%		
								3. Persentase Perangkat Daerah yang Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memperoleh nilai >80 (Baik)	86%		
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kalimantan Timur	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100%	2.350.000.000	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kalimantan Timur	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penataan, Pengendalian, dan Penilaian Kematangan Organisasi	40 PD	1.744.304.631	
			Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100%							
	Fasilitasi Penataan	Kota	Jumlah Dokumen	2	800.000.000	Fasilitasi	Kota	Jumlah Dokumen	3	410.840.997	

	Kelembagaan Provinsi	Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen		Penataan Kelembagaan Provinsi	Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	750.000.000	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	911.401.450	
	Penataan Analisis Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa B	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	800.000.000	Penataan Analisis Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	422.062.184	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Kalimantan Timur	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP	100%	3.350.000.000	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Kalimantan Timur	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Penerapan SAKIP nya	40 PD	1.712.678.880	

			Pertriwulan	90%				Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM nya	40 PD		
			Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)								
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	950.000.000	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	300.004.000	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	950.000.000	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	341.170.330	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	300.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	175.000.000	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	530.000.000	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	307.336.881	

		tan, Semua Kel/Des					tan, Semua Kel/Des a				
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokume n	620.000.000	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokume n	589.167.669	
Biro Pemerinta han dan Otonomi Daerah					7.291.398.0 00					9.026.204.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaliman tan Timur	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90%	3.062.831.77 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaliman tan Timur	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	87 Indeks	1.337.161.880	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	95%	140.520.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	95%	122.400.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	2 Dokume n	140.520.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	2 Dokume n	122.400.000	
	Administrasi Kepegawaian	Kaliman tan	Persentase Pelaporan	100%	42.000.000	Administrasi Kepegawaian	Kaliman tan	Persentase Pelaporan	100%	17.180.100	

Perangkat Daerah	Timur	Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah Biro POD			Perangkat Daerah	Timur	Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah Biro POD			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	42.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	17.180.100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Biro POD	100%	1.293.226.140	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Biro POD	100%	1.009.672.780	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	69.467.920	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	63.822.130	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	45.758.220	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	43.650.650	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Semua Kota/Kab	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	1.178.000.000	Penyelenggaraan Rapat	Semua Kota/Kab	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	902.200.000	

	dan Konsultasi SKPD	b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Koordinasi dan Konsultasi SKPD	b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi pada Biro POD	100%	46.695.553						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	46.695.553						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD	100%	1.490.890.078	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD	100%	123.820.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Laporan	5.091.625	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.485.798.453	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.820.000	

		tan, Semua Kel/Des					tan, Semua Kel/Des				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro POD)	100%	49.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro POD)	100%	64.089.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	51.269.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12.820.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Kaliman tan Timur	1. Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	4.228.566.22 9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Kaliman tan Timur	1. Persentase Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaporkan 2. Persentase Kebijakan bidang Pemerintahan	100% 100%	7.689.042.120	

								3. Persentase Kebijakan bidang Otonomi Daerah	100%		
								4. Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan	100%		
								5. Persentase Kerjasama Daerah yang di Tindaklanjuti	100%		
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Kalimantan Timur	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100%	1.119.550.130	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Kalimantan Timur	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100%	2.687.202.120	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	718.987.850	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	2.286.329.920	
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	400.562.280	Fasilitasi Penataan Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	400.872.200	
	Pelaksanaan	Kaliman	Persentase	95%	1.700.014.22	Pelaksanaan	Kaliman	Persentase	100%	3.801.840.000	

	Otonomi Daerah	tan Timur	Kegiatan Koordinasi, Fasilitas dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah		4	Otonomi Daerah	tan Timur	Kegiatan Koordinasi, Fasilitas dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah			
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 dokumen	400.000.024	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	417.665.000	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 dokumen	750.011.780	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	3 Dokumen	2.682.700.000	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 dokumen	550.002.420	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	701.475.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	1.409.001.875	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	1.200.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Semua Kota/Kab,	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang	30 Dokumen	559.001.875	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Semua Kota/Kab,	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang	30 Dokumen	623.000.000	

		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Difasilitasi				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Difasilitasi			
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	400.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	239.000.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	450.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	338.000.000	
Biro Kesejahteraan Rakyat					8.693.319.000					1.772.971.544.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	3.363.319.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat Biro Kesejahteraan Rakyat	85 Indeks	1.376.265.139	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Realisasi Keuangan (Biro Kesejahteraan Rakyat)	95%	307.135.164	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Realisasi Keuangan (Biro Kesejahteraan Rakyat)	95%	427.760.000	
	Pelaksanaan	Semua	Jumlah Dokumen	12	286.135.164	Pelaksanaan	Semua	Jumlah Dokumen	12	406.760.000	

	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	21.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	21.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (Biro Kesra)	100%	32.178.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (Biro Kesra)	100%	32.178.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	32.178.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	32.178.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum (Biro Kesra)	12 Bulan	1.025.995.390	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum (Biro Kesra)	12 Bulan	785.912.539	
	Penyediaan Peralatan dan	Semua Kota/Kab	Jumlah Paket Peralatan dan	6 Paket	199.343.780	Penyediaan Peralatan dan	Semua Kota/Kab	Jumlah Paket Peralatan dan	38 Paket	139.000.000	

	Perlengkapan Kantor	b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Perlengkapan Kantor	b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	59.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.260.929	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	767.651.610	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	617.651.610	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang (Biro Kesejahteraan Rakyat)	12 Bulan	1.824.183.846	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang (Biro Kesejahteraan Rakyat)	12 Bulan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.804.183.846						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)	100%	173.826.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)	100%	120.414.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	134.037.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	100.322.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	39.789.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.092.600	

	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kalimantan Timur	Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana Prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	5.330.000.000	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kalimantan Timur	1. Jumlah penerima manfaat kebijakan keagamaan di bidang kesra	5.715 Orang	1.771.595.278.861	
								2. Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra	19.900 Orang		
								3. Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra non pelayanan dasar yang difasilitasi	100%		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kalimantan Timur	Persentase bahan koordinasi Lembaga Bina Spiritual dan sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	1.500.000.000	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kalimantan Timur	Persentase bahan koordinasi Lembaga Bina Spiritual dan sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	138.185.860.000	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	300 Unit	800.000.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	300 Unit	11.242.860.000	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	700.000.000	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	126.943.000.000	

		Kel/Des a					Kel/Des a				
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Kaliman tan Timur	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100%	1.700.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Kaliman tan Timur	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100%	1.631.809.418.861	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen	600.000.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen	1.631.409.418.861	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4 Dokumen	550.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4 Dokumen	200.000.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen	550.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen	200.000.000	

	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Kalimantan Timur	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100%	2.130.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Kalimantan Timur	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100%	1.600.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	736.600.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	700.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	4 Dokumen	745.600.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	4 Dokumen	700.000.000	

			Transmigrasi dan Tenaga Kerja			dan Tenaga Kerja		Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	647.800.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	200.000.000	
Biro Perekonomian					30.537.706.000					3.283.479.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	83 Indeks	3.273.833.610	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	83 Indeks	1.000.182.496	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Realisasi Keuangan (Biro Perekonomian)	95%	140.166.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Realisasi Keuangan (Biro Perekonomian)	95%	99.816.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	140.166.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	99.816.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian	100%	235.812.985	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian	100%	109.301.000	

			pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian)					pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian)			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	58.417.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	37.811.400	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	3.914.500	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5.489.600	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	173.480.985	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	66.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian)	90%	1.282.461.393	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian)	90%	550.905.130	
	Penyediaan Peralatan dan	Semua Kota/Kab	Jumlah Paket Peralatan dan	30 Paket	66.088.925	Penyediaan Peralatan dan	Semua Kota/Kab	Jumlah Paket Peralatan dan	30 Paket	48.091.904	

	Perlengkapan Kantor	b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Perlengkapan Kantor	b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	18.354.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.024.890	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	31.171.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.935.654	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.831.300						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	1.159.015.668	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	469.852.682	

		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian)	100%	265.851.362	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian)	100%	194.129.716	
	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	22.197.653						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	243.653.709	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	194.129.716	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)	100%	1.295.768.870	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)	100%	7.661.650	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.078.510	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.661.650	

		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.275.690.360						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)	100%	53.773.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)	100%	38.369.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	28.883.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	20.369.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	24.890.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	18.000.000	

		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kalimantan Timur	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	27.263.872.390	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kalimantan Timur	1. Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Perekonomian (Ekonomi Makro dan Mikro) yang difasilitasi	100%	2.283.296.504	
								2. Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi	100%		
								3. Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang difasilitasi	100%		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kalimantan Timur	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	1.140.705.460	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kalimantan Timur	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	620.616.406	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	758.710.152	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	385.523.048	

		Kel/Des a					Kel/Des a				
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokume n	381.995.308	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokume n	235.093.358	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kaliman tan Timur	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	24.020.785.8 95	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kaliman tan Timur	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	410.939.483	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Dokume n	23.456.860.9 16	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	3 Dokume n	220.506.796	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokume n	246.802.824	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokume n	108.327.314	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Semua Kota/Ka b, Semua	umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	2 Dokume n	317.122.155	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Semua Kota/Ka b, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	2 Dokume n	82.105.373	

		Kecamatan, Semua Kel/Des a	Kebijakan Energi dan Air			Energi dan Air	Kecamatan, Semua Kel/Des a	Kebijakan Energi dan Air			
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kalimantan Timur	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	2.102.381.035	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kalimantan Timur	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	100%	1.251.740.615	
								Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	1.181.621.705	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	801.871.572	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	248.986.499	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	150.103.842	

	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	671.772.831	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	299.765.201	
Biro Administrasi Pembangunan					13.005.000.000					21.602.256.793	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	5.493.219.651	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	1.327.927.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	100%	247.400.390	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	100%	187.360.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	247.400.390	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	187.360.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Terlaksananya Administrasi	100%	199.935.464						

			Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	84.885.464						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	102.200.000						
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	20 Orang	12.850.000						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	85%	1.596.459.19 0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	85%	749.704.600	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	143.594.464	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10.000.200						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.442.864.526	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	719.704.600	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang (Biro Administrasi Pembangunan)	95%	241.455.783						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	241.455.783						

		tan, Semua Kel/Des a									
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	85%	2.876.192.824	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	85%	279.326.400	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	220.981.300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	215.366.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.653.211.524	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.960.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85%	331.776.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85%	111.536.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	55.136.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	28.968.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	248.240.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	54.168.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	28.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	28.400.000	

		Kel/Des a					Kel/Des a				
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Kaliman tan Timur	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	90%	7.511.780.34 9	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNA N	Kaliman tan Timur	1. Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	86%	20.274.329.793	
								2. Persentase Realisasi Pengendalian Bantuan Keuangan	85%		
								3. Persentase Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85%		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90%	4.469.563.16 0	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaliman tan Timur	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90%	18.874.329.793	
			Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	90%				Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	90%		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	883.265.400	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	500.000.000	
	Pengendalian	Semua	Jumlah Laporan	4	584.497.760	Pengendalian	Semua	Jumlah Laporan	4	250.000.000	

	Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan		Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	3.001.800.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	18.124.329.793	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90%	3.042.217.189	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90%	1.400.000.000	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	552.800.000	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	400.000.000	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah J	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.249.246.198	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	500.000.000	

	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.240.170.991	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	500.000.000	
Biro Pengadaan Barang dan Jasa					10.713.905.000					6.104.445.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	80 Indeks	3.810.356.597	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	1.839.292.522	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	90%	141.373.353	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	90 %	120.600.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	136.554.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	120.600.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4.819.353						

		a									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70%	242.416.612	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ)	70%	102.400.560	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	67.416.612	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	81.900.560	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	134.700.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20.500.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	40.300.000						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	86%	884.606.405	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	86%	765.942.942	
	Penyediaan Peralatan dan	Semua Kota/Kabupaten	Jumlah Paket Peralatan dan	3 Paket	193.735.200	Penyediaan Peralatan dan	Semua Kota/Kabupaten	Jumlah Paket Peralatan dan	4 Paket	140.976.918	

	Perlengkapan Kantor	b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Perlengkapan Kantor	b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	49.345.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	27.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	641.526.205	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	597.766.024	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase prasarana kantor yang terpenuhi	90%	220.953.724	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	Persentase prasarana kantor yang terpenuhi	90 Persen	81.599.440	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	220.953.724	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	81.599.440	

		a					a				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	86%	2.166.407.503	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	86 Persen	660.663.780	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.884.424	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	198.664.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.507.780	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.955.858.379	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	472.656.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	86%	154.599.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kalimantan Timur	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	86 Persen	108.085.800	

[illegible]

			Purchasing Terhadap Pengadaan Pelalui Penyedia								
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	2.951.910.488	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	1.839.604.000	
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	400.459.176	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	202.732.000	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1.718.201.312	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	1.215.090.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	833.250.000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	421.782.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kalimantan Timur	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 Variabel	1.700.330.800	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kalimantan Timur	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 Variabel	1.339.277.200	

	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	487.925.000	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	3 Laporan	342.619.000	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	604.076.800	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	603.670.200	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	608.329.000	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	392.988.000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	2.251.307.115	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	1.086.271.278	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	815.327.900	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	483.858.000	

		a					a				
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	791.575.900	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	273.224.638	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	644.403.315	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	329.188.640	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan terhadap program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jejaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi SKPA.

Akan tetapi, pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, usulan tersebut merupakan masukan kegiatan dan sub kegiatan baru yang dirasa penting dan berasal dari Biro-Biro yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2. 6
Usulan Program/Kegiatan/Subkegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2026

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
1	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jalan Sarimas RT.25 Gang Darul Amin Desa Sungai Mariam, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
2	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jalan Batara Agung Dewa Sakti / Jalan Poros Kutai Lama RT.02, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
3	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jalan Padat Karya RT.11 Desa Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
4	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JL. Poros Muara Badak Marang Kayu RT. 21 Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
5	Program Kesejahteraan Rakyat//Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jalan kauman RT.02 Desa Bukit Raya, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
6	Program Kesejahteraan Rakyat//Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	JALAN GUNUNG SARI RT 5, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
7	Program Kesejahteraan Rakyat//Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	JALAN POROS RT 31, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
8	Program Kesejahteraan Rakyat//Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	JALAN RAYA SAMARINDA SEBULU KM. 47, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
9	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	JALAN DEWI SARTIKA RT 05 DUSUN RAPAK REJO, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
10	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	JALAN POROS BUKIT PARIAMAN GANG BPP RT 15, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
11	Program Kesejahteraan Rakyat/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	DUSUN KARYA JAYA RT 01, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
12	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	JALAN A. YANI NO 02 , Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
13	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	JALAN KRISNA RT 05 DUSUN SIDO REJO, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
14	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JALAN KAUMAN NO 5 RT 02 DUSUN SIDO DADI, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
15	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JALAN SEPAYUNG DUSUN SUKA KARYA RT 09, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
16	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JALAN SUKARAME RT 26 DUSUN SUKA MAJU, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
17	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	JALAN FLAMBOYAN RT 18 L2, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
18	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	JALAN SADEWA BLOK C RT 12 DUSUN KARYA HARAPAN, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
19	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	JALAN LONG BAGUN RT 11, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
20	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JALAN DR. SOETOMO DUSUN SIDO DADI RT 7, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
21	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JALAN RAYA MULAWARMAN RT 08 BLOK F, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
22	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	JALAN BELIDA I BLOK C NO 12 RT 031, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
23	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	RT 16 DUSUN BINA MULYA, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
24	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jalan Samarinda-Anggana RT.12 Desa Sungai Mariam, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
25	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jalan Saamarinda No.194 Desa Sungai Mariam, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
26	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JL. H. NURDIN, RT. 03, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
27	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	JL. NARAS GUNAAQ, RT. 15, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
28	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jalan Raya Samarinda-Sebulu KM.47 Desa Suka Maju, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
29	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. H. M Ardans Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
30	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jln Ruhui Rahayu II GG. Perdamaian II RT 10 No 8, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
31	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JL.TRANS KALIMANTAN NO.27 RT.001 KAMPUNG CEMPEDAS, KECAMATAN MUARA LAWA, KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR, 75575, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
32	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jalan Padat Karya Perumahan Puspita Bengkuring, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
33	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	RT.001 Sekolaq Darat , Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
34	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jalan Pembangunan RT.14 Desa Anggana, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
35	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. P. Suryanata, Komplek Graha Indah, Blok. AE. No. 1, Kota Samarinda, 75124, Provinsi Kalimantan Timur., Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
36	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	JALAN A.. YANI NO 02 RT 19, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
37	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	RT 02 DUSUN PANJI, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
38	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	JALAN ANGGREK RT 02, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
39	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	RT 21 DUSUN SUMBER JAYA, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
40	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jl. Pramuka RT. 002, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
41	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. Sepinggian Asri Utara VIII RT. 44 Kel. Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
42	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Petinggi husaini RT.32 (Belakang Puskesmas Lamaru), Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
43	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jalan Satu RT 14 No 56 A, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
44	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	JALAN AWANG LONG NO 53, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
45	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	JALAN PESUT GANG HM SALMAN RT 20, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
46	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	JALAN TRUNOJOYO RT 04, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
47	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. Banjar, Rt. 14, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
48	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Margabakti RT. 05 Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
49	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JL PADAT KARYA KM 8,5 RT 67 BLOK B NO. 11, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
50	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JL.NARAS GUNAAQ RT.013 KELURAHAN SIMPANG RAYA, KECAMATAN BARONG TONGKOK, KAB. KUTAI BARAT PROV. KALIMANTAN TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
51	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. provinsi km 18 Rt 06 kel. petung kec. Penajam, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
52	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jalan : Slamet Riyadi Gg.08 RT.041 No.05 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
53	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jl. Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
54	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. Slamet Riyadi No. 01 (Lt. 2), Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
55	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. Ahmad Yani RT. 01 Gg Ghuan Barong Tongkok , Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
56	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	YAYASAN PONDOK PESANTREN HIFZHIL QUR'AN (MA AL MUFID), Jl. Poros Bontang-Samarinda RT. 010 Dusun Gunung Kuari Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
57	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	jalan karang jawa RT 07 NO 08 kelurahan karang jati kecamatan Balikpapan tengah, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
58	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JL. SEKOLAHAN RT.003 KAMPUNG LINGGANG MAPAN ,KEC.LINGGANG BIGUNG , KAB. KUTAI BARAT, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
59	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. Pembangunan, Rt 005, Kampung Balok Asa, Kec. Barong Tongkok, Kutai Barat, Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
60	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	JLN. FLAMBOYAN RT 64 NO 35 BATU AMPAR LESTARI, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
61	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	PONDOK PESANTREN IHYA' ULUMUDDIN (TPQ IHYA' ULUMUDDIN), Jl. Mangga RT. 001 Dusun 1 Desa Bumi Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
62	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jl. Siaga Dalam No 106 RT 37 Damai, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
63	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JALAN IMAM BONJOL GANG LIKIT RT.015 KELURAHAN SIMPANG RAYA KEC. BARONG TONGKOK ,KAB. KUTAI BARAT, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
64	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	JLN. MULAWARMAN RT. 53 NO.52 , Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
65	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JL. MH THAMRIN GG. KELADI 2 RT.03 TANJUNG LIMAU, KEL. GUNUNG ELAI, KEC. BONTANG UTARA, KOTA BONTANG., Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
66	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Kampung Muara Baroh RT. 001, Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat , Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
67	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. P. Hidayatullah RT. 02 Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
68	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. Dr. Soewondo RT.IV Kampung Long Iram Kota Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
69	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. Wonokitri Selatan RT.03 Kampung Sukomulyo Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
70	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	RT 002, Muara Leban, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
71	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JLN. S. PARMAN RT 19, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
72	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jalan Basuki Rahmat No 42 Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75117, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
73	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. Mangkujenang RT. 23 Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran , Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
74	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	DUSUN DELTA MAHAKAM RT. 018 No. 001 , Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
75	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Marsma R. Ismahyudi RT 05 No 30 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
76	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jln. Panca Karya Kampung Siram Makmur Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
77	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Raya Simpang Budaya Rt. XV Kampung Ujoh Bilang Kec. Long Bagun, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
78	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. KS TUBUN GG. VULKANIK 1A RT. 08, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
79	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. Sopo Nyono RT.04 , Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
80	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jl. Padat Karya Pinang Seribu RT 40 , Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
81	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Harmonika No. 1 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
82	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl P Hidayatullah RT 05 , Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
83	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Banggeris, Rt. 033 No. 30, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
84	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	MAJELIS TA'LIM AL-HIKMAH, Jln. Hidayatulloh Gg. Hikmah RT.03 RW.01 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutim, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
85	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	MAJELIS TA'LIM AL-AMANAHA, Gang Prima RT.19 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
86	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	MAJELIS TA'LIM AL-MAGFIROH, Jl. Ringroad RT.07 Gg. Berkah Kelurahan Singa Gaweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
87	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JALAN SETIA RUNGKAQ RT.OI KAMPUNG JONTAI, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
88	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. PADAT KARYA RT. 16 , Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
89	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jln. MT. Haryono (Ring Road) Gg. Al Auliya RT. 43, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
90	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	MAJELIS TA'LIM MIFTAHUL JANNAH, Jl. Yos Sudarso IV Gg. Musholla RT.20 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
91	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	MAJELIS TA'LIM USWATUN HASANAH, Desa Sangatta Selatan RT.03 Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
92	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	MAJELIS TA'LIM AL- MUNAWWAROH, Jl. Poros Kabo Gg. Karya Bakti 1 No.20 RT.13 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
93	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	MAJELIS TA'LIM ANNUR, Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
94	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	MAJELIS TA'LIM RAUDHATUL JANNAH, Desa Sangatta Selatan RT.02 Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
95	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	MAJELIS TA'LIM AR-RIDHO, Jl. Yos Sudarso IV Gg. Sankis RT.024 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
96	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	MAJELIS TA'LIM BABUSSALAM, Kelurahan Teluk Lingga RT.51 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
97	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	MAJELIS TA'LIM BAITURRAHIM, Kelurahan Teluk Lingga RT.02 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
98	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	MAJELIS TA'LIM AL-AMIN, Kelurahan Teluk Lingga RT.16 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
99	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	MAJELIS TA'LIM AL-MUKARROMAH, Desa Sangatta Utara RT.64 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
100	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	MAJELIS TA'LIM DARUL AMAN, Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
101	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	MAJELIS TA'LIM UKHUWAH ISLAMIAH, Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
102	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jln. MT. Haryono (Ring Road) Gg. Al Auliya RT. 43, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
103	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jalan Anggrek Desa Marga Mulya Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
104	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Desa Persiapan Tepian Raya Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
105	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	GANG FAMILY 1A RT.23 NO.84 DESA SANGATTA UTARA KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
106	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	JL. DELIMA GG. DELIMA 2 RT.10 NO.48 DESA SINGA GEMBARA KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
107	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	JL. YOS SUDARSO III GG. RAHMAT RT.034 RW.01 KELURAHAN TELUK LINGGA KABUPATEN KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
108	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jalan Bo Lawing Ubung RT.III, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
109	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JALAN POROS SANGATTA - BONTANG KM 3 DUSUN BUKIT RAYA DESA PERSIAPAN PINANG RAYA KECAMATAN SANGATTA SELATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
110	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Tepo Gang Darma Ayu No. 09 RT. 07, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
111	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JALAN RAYA 99 RT.02 RESAK, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
112	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl Harmonika No. 1B RT 32, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
113	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Alamat : Jln. Ekonomi RT.13 Loa Buah Kec.Sungai Kunjang Samrinda, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
114	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jl. awanglong RT.15 Desa Sepaso, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
115	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	JL. AW SYAHRANI DESA SANGATTA UTARA KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
116	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jl. Mulawarman RT 018 Gang Setia 2, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
117	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Komplek PGRI RT.48, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
118	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JALAN MELATI RT 12 BLOK H, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
119	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Mook Manaar Bulatn, RT. 06, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
120	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. PEMBANGUNAN RT. 18 DUSUN MARGOMULYO, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
121	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. P. Suryanata, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
122	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. Gerbang Dayaku RT.12 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
123	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Kapal layar 5 RT 20 Kel. Loktua, Kec. Bontang Utara, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
124	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jalan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
125	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jalan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
126	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	KAMPUNG MENCIMAI KECAMATAN BARONG TONGKOK, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
127	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jln. Ra Erairiam RT.VI Kampung Long Iram Kota Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
128	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Basuki Rahmat, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
129	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jalan Polder Air Hitam RT 21, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
130	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Gg Musholla Km.13 RT 09 Desa Sangkiman, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
131	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jln Margo Santoso II RT 04, Pinang Raya, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
132	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Gg Santai RT 15, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
133	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. Merdeka RE Martadinata Gg Mushola No 148 RT 019 Mekarsari Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
134	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. Poros Gunung Kapur No.02 RT.12 , Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
135	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. A.W. Syahrani Gang 3B RT. 35, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
136	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl.Widyagama RT.001 NO.09, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
137	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. Mulyo Pranoto RT.06, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
138	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Jl. H.A.M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
139	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JL. AMD GURU BESAR RT.033 DUSUN III SINGA KARTI DESA SANGATTA UTARA KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
140	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. REJO MULYO RT. 33, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
141	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Desa Lebaho Ulaq, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
142	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. MT Haryono Komp Balikpapan Baru Blok B2 RT.19 No. 08, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
143	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Mayjen Sutoyo RT 06, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
144	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. Selamat 2 No. 132 RT. 06 Kelurahan Teluk Lingga, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
145	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	JL RA KARTINI RT 030, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
146	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	YAPIA Al-Azhar, Jl. M. Said RT 12 Lok Bahu, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
147	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Kapal Selam 3 RT.15 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
148	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. DI Panjaitan Gg. Piano 4 RT. 03 Kel. Bontang Baru, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
149	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. KENANGAN NO. 16 RT. 21 , Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
150	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	JL. D. I PANJAITAN NO. 17 RT. 80, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	Biro Kesra
151	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Brigjen Katamso GB Pakis RT.17 Kel. Gn. Elai, Kec. Bontang Utara, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
152	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Otista RT. 24 Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
153	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Kaktus Blok E No.14 Perum Griya Wisata RT.14 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
154	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jalan Kadrie Oening RT 31 No 06 Gang Raspen, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
155	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Siradj Salman Perum Grand Mutiara Blok. D No. 2 RT.29, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
156	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	DESA SINGA GEMBARA KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
157	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Ir. Juanda RT.06 Kel. Tanjung Laut, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
158	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	jl.KH.Wahid HASyim Gg. Papadaan RT. 024, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
159	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	JL. Habibon RT 26. Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
160	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Makassar RT.22 Kel. Gn. Telihan, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
161	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jl. Letjen. S. Parman RT 04, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	Biro Kesra
162	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	JL. PEPAYA 3 PALARAN BUKUAN, SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
163	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Sidrap No.05 RT.020 Kel. Guntung, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
164	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. RE. Martadinata RT.04 Loktuan, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	CATATAN
165	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Selamat Riyadi RT.09 Kel. Loktuan, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra
166	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jl. Kapal Selam 1 RT. 19 Loktuan, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	Biro Kesra

Sumber Data: Sekretariat Daerah, diolah

BAB III

Tujuan dan Sasaran

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2025–2029 memperlihatkan adanya penekanan pada penguatan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif. Namun, dalam konteks Sekretariat Daerah, tidak terdapat pemetaan langsung program dan kegiatan yang secara eksplisit diarahkan untuk mendukung prioritas nasional, sebagaimana berlaku pada perangkat daerah teknis melalui forum rakortekrenbang. Hal ini disebabkan karena fungsi Sekretariat Daerah lebih bersifat koordinatif, fasilitatif, dan administratif, sehingga kontribusinya terhadap prioritas nasional tidak ditunjukkan melalui kegiatan teknis sektoral, melainkan melalui penguatan tata kelola dan dukungan manajerial terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, peran Sekretariat Daerah dalam kerangka mendukung RPJMN lebih ditekankan pada penciptaan sistem koordinasi yang efektif, perumusan kebijakan yang responsif, serta pelayanan administratif yang akuntabel. Ketiga aspek tersebut menjadi landasan penting agar program dan kegiatan perangkat daerah lain dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional, sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah tetap terkoneksi dengan tujuan pembangunan jangka menengah nasional.

3.1.2 Telaahan Terhadap prioritas Provinsi

Dalam rangka mencapai visi pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui RPJMD 2025–2029 telah merumuskan berbagai prioritas strategis yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah. Prioritas tersebut tidak hanya mencerminkan arah

kebijakan makro, tetapi juga menuntut peran aktif perangkat daerah, termasuk Sekretariat Daerah, dalam memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, setiap langkah pembangunan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sejalan dengan dinamika lingkungan strategis.

Sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD mencakup penguatan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing, penanggulangan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan pembangunan infrastruktur yang merata serta berkelanjutan. Di samping itu, terdapat pula fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta perhatian serius terhadap isu-isu lingkungan dan ketahanan bencana. Keseluruhan sasaran ini menunjukkan bahwa pembangunan Kalimantan Timur diarahkan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Adapun untuk Sekretariat Daerah, prioritas tersebut memiliki implikasi penting dalam hal peningkatan kualitas kebijakan, koordinasi administratif, serta penyediaan layanan birokrasi yang efektif. Hal ini menuntut adanya responsivitas, kreativitas, dan inovasi dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan kebutuhan riil daerah. Sekretariat Daerah juga dituntut menjadi penghubung strategis yang mampu memastikan keterpaduan antarperangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Dengan demikian, arah kebijakan Sekretariat Daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam mendorong efektivitas pembangunan. Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut, maka Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026 yang mendukung Sepuluh Prioritas Daerah dapat dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 3. 1
Indikasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026
yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah

No	Prioritas Daerah	Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Lokasi Kegiatan
1	Terakselerasinya Perekonomian Daerah	Program : Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Perekonomian (Ekonomi Makro dan Mikro) yang difasilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
			Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang difasilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

No	Prioritas Daerah	Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Lokasi Kegiatan
		Kegiatan : Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra non pelayanan dasar yang difasilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

No	Prioritas Daerah	Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Lokasi Kegiatan
		Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi penyelesaian masalah hukum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
			Persentase rancangan produk hukum yang dihasilkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

No	Prioritas Daerah	Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Lokasi Kegiatan
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaporkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
			Persentase Kebijakan bidang Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
			Persentase Kebijakan bidang Otonomi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
			Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
			Persentase Kerjasama Daerah yang di Tindaklanjuti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,

No	Prioritas Daerah	Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Lokasi Kegiatan
				Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
			Persentase Realisasi Pengendalian Bantuan Keuangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
			Persentase Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

No	Prioritas Daerah	Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Lokasi Kegiatan
		Kegiatan : Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

No	Prioritas Daerah	Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Lokasi Kegiatan
		Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

No	Prioritas Daerah	Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Lokasi Kegiatan
6	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
7	Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah penerima manfaat kebijakan non pelayanan dasar di bidang kesra	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8	Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah penerima manfaat kebijakan keagamaan di bidang kesra	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

No	Prioritas Daerah	Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Lokasi Kegiatan
		Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi Lembaga Bina Spiritual dan sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
9	Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada evaluasi Kematangan Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (Sangat Baik)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penataan, Pengendalian, dan Penilaian Kematangan Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Penerapan SAKIP nya Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM nya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,

No	Prioritas Daerah	Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Lokasi Kegiatan
				Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memperoleh nilai >80 (Baik)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Penerapan SAKIP nya Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM nya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra non pelayanan dasar yang difasilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Sumber Data: Sekretariat Daerah, diolah

Terdapat 2 (dua) program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, yaitu program unggulan Gratispol dan program unggulan Jospol. Kedua program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, dan sektor infrastruktur sebagai sebuah investasi untuk mewujudkan “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Sekretariat Daerah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat mengampu dan mendukung 2 (Dua) dari 7 (Tujuh) Program Unggulan Gratispol yang mendukung upaya perwujudan Generasi Emas, yaitu:

1. Gratis Kuliah S1-S3, Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh penduduk usia sekolah di Kalimantan Timur dapat melanjutkan kuliah Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktoral (S3) secara gratis. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah melalui pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikerjasamakan dengan institut dan universitas;
2. Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah, Merupakan kegiatan unggulan yang memberikan kesempatan dan penghargaan bagi setiap imam (atau dengan sebutan lainnya) serta penjaga rumah ibadah untuk dapat menunaikan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) secara gratis. Kelompok sasaran kegiatan unggulan ini adalah para imam (atau dengan sebutan lainnya) dan penjaga rumah ibadah yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah/lembaga/yayasan rumah ibadah setempat serta mendapatkan persetujuan dari Gubernur. Instrumen utama kegiatan unggulan ini adalah pembiayaan penuh biaya perjalanan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) oleh pemerintah. Melalui kegiatan unggulan ini, diharapkan akan semakin memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai modal terwujudnya kehidupan yang rukun, damai dan toleran.

Sekretariat Daerah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat juga mengampu dan mendukung 1 (Satu) dari 9 (Sembilan) Program Unggulan Jospol dan arah kebijakan unggulan yang mendukung upaya perwujudan Kaltim

Sukses, yaitu Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah, merupakan penghargaan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan pengabdian masyarakat, sekaligus mendorong kualitas pendidikan dan kehidupan beragama. Guru sekolah umum dan pesantren dapat diberikan tunjangan kinerja, insentif khusus, serta pelatihan berkala untuk peningkatan kompetensi. Sementara itu, penjaga rumah ibadah juga perlu mendapat perhatian melalui pemberian insentif rutin sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan. Melalui meningkatkan insentif ini diharapkan motivasi dan kinerja para pendidik serta penjaga rumah ibadah akan meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan beragama yang harmonis di Kalimantan Timur.

Berikut Tabel Program Unggulan Kepala Daerah yang diampu Sekretariat Daerah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat.

Tabel 3.2

Program Unggulan Kepala Daerah yang Diampu oleh Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi	No	Target/ Sasaran Penerima Manfaat	Pagu (Rp)	Program Unggulan
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra	1	158.981 orang penerima program beasiswa pendidikan gratis (S1, S2, S3)	1.377.861.500.000	Gratispol
		Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti				
		Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2	36.946 orang penerima insentif guru	121.843.500.000	Jospol

2	Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah penerima manfaat kebijakan keagamaan di bidang kesra	1	930 orang penerima manfaat perjalanan religi (umrah/religi nasional)	32.550.000.000	Gratispol
		Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi Lembaga Bina Spiritual dan sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi				
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	2	4.800 orang penerima manfaat insentif untuk penjaga rumah ibadah lintas agama	28.800.000.000	Jospol
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yaitu

“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berperan penting dalam mendukung dan berkontribusi pada pelaksanaan **misi ke-4, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi.**

Dalam kerangka misi tersebut, Sekretariat Daerah memiliki fungsi strategis sebagai motor penggerak tata kelola pemerintahan, yang meliputi koordinasi penyusunan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan program lintas perangkat daerah, serta pemberian dukungan administratif dan pelayanan teknis pemerintahan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan

demikian, keberadaan Sekretariat Daerah tidak hanya menjadi pusat koordinasi, tetapi juga penjamin integrasi kebijakan, efektivitas birokrasi, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang semakin efektif, profesional, dan berintegritas dengan dukungan teknologi informasi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan dukungan teknis pemerintahan;
3. Meningkatnya integrasi sistem informasi dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka indikator kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target 2026
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan di lingkungan Sekretariat Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	55.75	55.00	60.00
1	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang di Tindaklanjuti	0.00	0.00	100.00

2	Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Rancangan	Indeks Reformasi Hukum	0.00	0.00	91.00
3	Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Capaian Aksi HAM	0.00	0.00	70.00
4	Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	0.00	0.00	100.00
5	Sasaran IV : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian	0.00	0.00	100.00
6		Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	0.00	0.00	100.00
7	Sasaran V : Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program dan kegiatan unggulan daerah yang sesuai dengan target waktu dan capaian fisik	0.00	0.00	83.00
8	Sasaran VI : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	0.00	80.00
9	Sasaran VII : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Organisasi yang dibentuk	Indeks Kematangan Organisasi	0.00	0.00	48.00
10		Jumlah Perangkat Daerah klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	0.00	0.00	5,00

11		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	0.00	0.00	85.00
12	Sasaran VIII: Meningkatkan Kualitas layanan umum dan rumah tangga KDH, WKDH, dan Sekretariat Daerah	Indeks kepuasan pengguna layanan terhadap layanan umum dan rumah tangga KDH, WKDH, dan Sekretariat Daerah	0.00	0.00	86,5
13	Sasaran IX: Meningkatkan Kepatuhan Tindaklanjut Peningkatan Kualitas SAKIP Sekretariat Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah yang di Tindaklanjuti	0.00	0.00	75.00
14	Sasaran X: Meningkatkan Kualitas layanan administrasi, dokumentasi, dan protokoler	Tingkat kepuasan Pengguna Layanan terhadap layanan administrasi, dokumentasi, dan protokoler	0.00	0.00	82.00

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Sekretariat Daerah melaksanakan 8 (delapan) program, 30 (tiga puluh) kegiatan dan 98 (sembilan puluh delapan) sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - 8) Fasilitas Kunjungan Tamu
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- i. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

- j. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- k. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
 - 1) Penyiapan Materi Pimpinan
 - 2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - 3) Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
- l. Fasilitasi Keprotokolan
 - 1) Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
 - 2) Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3) Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 - 3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - 4) Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
- b. Fasilitasi Bantuan Hukum
 - 1) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 - 2) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

3. Program Penataan Organisasi

- a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 1) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
 - 2) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
 - 3) Penataan Analisis Jabatan
- b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 - 1) Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 - 3) Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
 - 4) Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan

- 5) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

4. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 - 1) Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
 - 2) Fasilitasi Penataan Wilayah
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - 1) Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - 2) Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
 - 3) Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - 1) Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
 - 2) Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
 - 3) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

5. Program Kesejahteraan Rakyat

- a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
 - 1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
 - 2) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
- b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
 - 1) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
 - 2) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
 - 3) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
- c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan

6. Program Perekonomian dan Pembangunan

- a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
- b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
 - 3) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

- a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
 - 2) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
 - 3) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
- b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
 - 2) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 3) Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

8. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1) Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3) Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
- b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - 1) Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
 - 2) Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3) Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2) Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3) Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026, serta mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Penjabaran kegiatan yang terdapat di dalam program harus memiliki rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian kebijakan tersebut. Program yang dirumuskan sebaiknya memenuhi kriteria yang merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana, bentuk penjabaran lebih rinci langkah- langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan serta mengikat/mengelompokkan kegiatan sejenis.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

-3923-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				4 Unit	6.155.453.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pengguna Layanan Sekretariat Daerah dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim		380.919.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				330 Unit	9.990.486.999,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pengguna Layanan Sekretariat Daerah dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim		2.864.049.562,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				55 Unit	1.499.793.826,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pengguna Layanan Sekretariat Daerah dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim		1.028.744.177,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				20 Paket	11.512.130.851,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Pengguna Layanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim		6.604.664.138,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				23 Paket	3.814.366.653,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Pengguna Layanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim		4.030.851.948,00	BIRO UMUM
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						21.418.239.000,00							19.360.715.133,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						21.418.239.000,00							19.360.715.133,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						21.418.239.000,00							19.360.715.133,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						21.418.239.000,00						-	19.360.715.133,00	
		[Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan]	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	83 86	- 82	- 83.5	81 84	21.418.239.000,00	-	-	-	-	-	-	19.360.715.133,00	-

-3931-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha</i>	-			90 %	1.507.234.673,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Biro Biro di Lingkup Sekretariat Daerah	-	1.206.525.375,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	916.684.673,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Biro Biro di Lingkup Sekretariat Daerah		763.531.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	590.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Biro Biro di Lingkup Sekretariat Daerah		442.994.375,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

-3935-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	1.797.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan, Para Tamu Biro Administrasi Pimpinn		1.540.350.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha</i>	-			90 %	369.910.186,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan	-	407.042.500,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				32 Unit	369.910.186,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan		407.042.500,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha</i>	-			90 %	16.329.600,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan	-	21.328.210,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

-3944-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim		801.081.296,00	BIRO HUKUM
		[Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Hukum]	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89	100	89	87	421.775.838,00	-	-	-	-	-	-	1.357.993.706,00	-
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	-			100 %	8.560.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	-	8.560.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	8.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim		8.560.000,00	BIRO HUKUM
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						3.514.711.162,00						-	3.514.711.282,00	
		[Meningkatnya kualitas rancangan produk hukum yang dihasilkan, dan penyelesaian masalah hukum]	Persentase fasilitasi penyelesaian masalah hukum Persentase rancangan produk hukum yang dihasilkan	100	100	100	100	3.514.711.162,00	-	-	-	-	-	-	3.514.711.282,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				10 Kasus	1.149.982.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah Prov. Kaltim dan Stakeholder terkait		1.149.982.232,00	BIRO HUKUM
		-	-	-	-	-	-	3.514.711.162,00	-	-	-	-	-	-	3.514.711.282,00	-
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				5 Kasus	465.232.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah Prov. Kaltim dan Stakeholder terkait		465.232.728,00	BIRO HUKUM
	X	NON URUSAN						15.000.000,00							72.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						15.000.000,00							72.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						15.000.000,00						-	72.000.000,00	

-3948-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	-			100 %	15.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	-	-	72.000.000,00	BIRO HUKUM
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	-		72.000.000,00	BIRO HUKUM
		BIRO ORGANISASI						4.343.462.000,00							6.912.156.447,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						4.343.462.000,00							6.912.156.447,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						4.343.462.000,00							6.912.156.447,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						886.478.489,00						-	1.439.914.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	78.089.248,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim		278.350.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	17.096.620,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim		16.500.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	495.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim		707.250.000,00	BIRO ORGANISASI

-3963-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</i>				3 Dokumen	417.665.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur		450.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan</i>				3 Dokumen	2.682.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur		3.106.557.018,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		[Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah]	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan	100	100	100	100	7.689.042.120,00	-	-	-	-	-	-	11.787.235.686,00	-
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>				3 Laporan	701.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur		700.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kerja Sama]	Persentase Kerjasama Daerah yang di Tindaklanjuti	100	100	100	100	7.689.042.120,00	-	-	-	-	-	-	11.787.235.686,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				3 Laporan	338.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur		792.916.140,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						1.772.971.544.000,00							3.469.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.772.971.544.000,00							3.469.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.772.971.544.000,00							3.469.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.376.265.139,00						-	1.769.000.000,00	
		[Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat]	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95	100	-	85	1.376.265.139,00	-	-	-	-	-	-	1.769.000.000,00	-
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan (Biro Kesejahteraan Rakyat)	-			95 %	427.760.000,00			-	-	Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	-	330.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	406.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat		308.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat		22.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (Biro Kesra)	-			100 %	32.178.000,00			-	-	Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	-	37.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	32.178.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat		37.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

-3966-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum (Biro Kesra)	-			12 Bulan	785.912.539,00			-	-	seluruh pegawai di biro kesra	-	1.208.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				38 Paket	139.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	seluruh pegawai di biro kesra		250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	29.260.929,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	seluruh pegawai di biro kesra		60.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	617.651.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	seluruh pegawai di biro kesra		898.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang (Biro Ksejahteraan Rakyat)	-			12 Bulan	10.000.000,00			-	-	Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	-	20.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat		20.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)	-			100 %	120.414.600,00			-	-	Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	-	174.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	100.322.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat		134.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	20.092.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat		40.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

-3967-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						1.771.595.278.861,00						-	1.700.000.000,00	
		[Meningkatnya kapasitas lembaga bina spiritual dan sarana prasarana keagamaan]	Jumlah penerima manfaat kebijakan keagamaan di bidang kesra	6.495	-	-	5.715	1.771.595.278.861,00	-	-	-	-	-	-	1.700.000.000,00	-
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi Lembaga Bina Spiritual dan sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	-			100 %	138.185.860.000,00			-	-	Masyarakat Umum, Lembaga, dan Organisasi lainnya	-	1.700.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				300 Unit	11.242.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Masyarakat Umum, Lembaga, dan Organisasi lainnya		1.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				10 Lembaga	126.943.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	-	Masyarakat Umum, Lembaga, dan Organisasi lainnya		700.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		[Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar]	Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra	223.553	-	-	198.900	1.771.595.278.861,00	-	-	-	-	-	-	1.700.000.000,00	-
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	-			100 %	1.631.809.418.861,00			-	-	Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	-	0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

-3973-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				49 Laporan	469.852.682,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim		940.262.400,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian)</i>	-			100 %	194.129.716,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	-	113.039.887,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	194.129.716,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim		113.039.887,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Pereknomian)</i>	-			100 %	7.661.650,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	-	22.086.361,00	BIRO PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				10 Dokumen	801.871.572,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait		1.585.562.728,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	150.103.842,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait		359.366.515,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	299.765.201,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait		690.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						21.602.256.793,00							13.130.645.915,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						21.602.256.793,00							13.130.645.915,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						21.602.256.793,00							13.130.645.915,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.327.927.000,00						-	5.025.311.764,00	

-3979-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan]	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87	100	-	85	1.327.927.000,00	-	-	-	-	-	-	5.025.311.764,00	-
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	-			100 %	187.360.000,00			-	-	Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan	-	260.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	187.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan		260.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	-			85 %	749.704.600,00			-	-	Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan	-	4.148.594.464,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan		143.594.464,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	719.704.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan		4.005.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	-			85 %	279.326.400,00			-	-	Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan	-	284.941.300,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	215.366.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan		220.981.300,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	63.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan		63.960.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

-3980-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	-			85 %	111.536.000,00			-	-	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor, Peralatan/Perlengkapan Mesin Kantor	-	331.776.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28.968.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor, Peralatan/Perlengkapan Mesin Kantor		55.136.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	54.168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor, Peralatan/Perlengkapan Mesin Kantor		248.240.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	28.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor, Peralatan/Perlengkapan Mesin Kantor		28.400.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						20.274.329.793,00						-	8.105.334.151,00	
		[Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah]	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	90	80	-	86	20.274.329.793,00	-	-	-	-	-	-	8.105.334.151,00	-
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	-			90 % 90 %	18.874.329.793,00			-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait	-	4.885.363.160,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				4 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait		954.665.400,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				4 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait		630.697.760,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

-3981-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah]	Persentase Realisasi Pengendalian Bantuan Keuangan	88	-	-	85	20.274.329.793,00	-	-	-	-	-	-	8.105.334.151,00	-
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				6 Laporan	18.124.329.793,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait		3.300.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		[Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan]	Persentase Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	88	-	-	85	20.274.329.793,00	-	-	-	-	-	-	8.105.334.151,00	-
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-			90 %	1.400.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait	-	3.219.970.991,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait		650.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait		1.250.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait		1.319.970.991,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						6.104.445.000,00							13.340.731.757,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						6.104.445.000,00							13.340.731.757,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						6.104.445.000,00							13.340.731.757,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.839.292.522,00						-	4.408.781.054,00	
		[Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa]	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87	100	84	85	1.839.292.522,00	-	-	-	-	-	-	4.408.781.054,00	-
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	-			90 Persen	120.600.000,00			-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	-	136.554.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

-3982-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	120.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim		136.554.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ)	-			70 %	102.400.560,00			-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	-	184.900.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	81.900.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	20.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim		184.900.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	-			86 Persen	765.942.942,00			-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	-	944.013.830,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	140.976.918,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim		193.735.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	27.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim		49.369.730,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	597.766.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim		700.908.900,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana kantor yang terpenuhi	-			90 Persen	81.599.440,00			-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	-	2.436.208.900,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

-3983-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				40 Unit	81.599.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim		2.436.208.900,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			86 Persen	660.663.780,00			-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	-	514.476.324,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim		11.884.424,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	180.507.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim		199.184.700,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	472.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim		303.407.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i>	-			86 Persen	108.085.800,00			-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	-	192.628.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim		13.568.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	68.025.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim		122.260.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				40 Unit	38.060.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim		56.800.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

-3984-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						4.265.152.478,00						-	8.931.950.703,00	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa]	Tingkat Kematangan UKPBJ	3	3	3	3	4.265.152.478,00	-	-	-	-	-	-	8.931.950.703,00	-
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	-			4 Variabel	1.839.604.000,00			-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	-	3.911.195.488,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				3 Laporan	202.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		417.849.176,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	1.215.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		2.495.400.312,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				3 Laporan	421.782.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		997.946.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	-			1 Variabel	1.339.277.200,00			-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	-	2.259.112.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				3 Laporan	342.619.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		815.673.800,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	603.670.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		604.086.800,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	392.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		839.352.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	-			4 Variabel	1.086.271.278,00			-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	-	2.761.642.615,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				300 Orang	483.858.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		869.315.900,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	273.224.638,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		1.185.339.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				2 Dokumen	329.188.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		706.987.315,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	J U M L A H							2.203.149.456.793,00						350.118.545.876,40		

BAB V

Penutup

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan atau dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode satu tahun yang sifatnya operasional, yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah.

RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026. RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, diharapkan komitmen sebagai kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan RENJA Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, RENJA, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan RENJA Tahun 2026.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan ketentuan dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya.

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan pada tahun 2024, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung pencapaian sasaran tersebut. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) adalah serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang berisikan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026, yaitu meliputi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk kegiatan yang menyangkut aktivitas kedewanan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena sering terjadi dinamika dalam pembahasan anggaran sehingga belum dapat mengakomodir seluruh kegiatan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, baik pada bidang pembentukan peraturan daerah provinsi, penganggaran, maupun pengawasan.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja ini seluruh aktivitas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 lebih difokuskan pada kegiatan yang tertuang pada RENJA DPRD. Oleh karena itu, agar dapat mendukung tugas dan fungsi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 maka diharapkan ada penambahan anggaran pada Tahun Anggaran 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 ini berdasarkan landasan hukum sebagai dasar penyusunannya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 9. Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur : (11-289/2022);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran

- 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 44);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 13. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/0052/Bapp-II tentang Penyusunan Rancangan Akhir Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026;
 14. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/14291/Bapp-II tentang Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026;
 15. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/15594/Bapp-II tentang Penyesuaian Pagu Indikatif Perangkat Daerah Pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026.
 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

- *Maksud*

1. Sebagai penjabaran dari Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029.
2. Pengoptimalan tugas dan fungsi serta peranan Sekretariat DPRD Kalimantan timur dalam menunjang kegiatan kedewanan seperti Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD untuk merumuskan dan memaparkan arah program dan kegiatan untuk Tahun 2026 yang efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2026

telah memperhitungkan besaran organisasi dan memperhitungkan faktor – faktor antara lain :

- a. Program Kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Cakupan tugas yang meliputi fasilitasi kegiatan kedewanan.
- c. Sarana dan prasarana penunjang tugas kedewanan.
- d. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis.
- e. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani.
- f. Kemampuan Keuangan Daerah.

- *Tujuan*

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 ini menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja dalam pemerintahan. Tujuan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari misi yang ada di Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yaitu tujuan 3 yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang baik”. Sasaran 9 yaitu, Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan Profesionalisme Pemerintahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan;
- II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- IV. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- V. Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, Rencana Kerja ini diharapkan dapat menyesuaikan dengan Rancangan Akhir Renstra (2025-2029) dan disesuaikan dengan pagu indikatif pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini juga tidak lepas dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 yang mengacu pada hasil laporan kinerja/realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur ditunjang dengan Urusan Perangkat Daerah dengan ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah itu sendiri adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk evaluasi perencanaan periode 1 tahun. Evaluasi pelaksanaan rencana yang dimaksud disini adalah evaluasi kinerja Tahun 2024 didasarkan pada hasil penetapan APBD tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

TABEL 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja Program Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Program/Kegiatan/Subkegiatan dan target kinerja Tahun 2023				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	indikator	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4				5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan													
Sekretariat DPRD													
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Indeks Kepuasan DPRD terhadap	85	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap	82	84,41	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan	83,00	83,48	101	85		

TUGAS DAN FUNGSI DPRD	layanan Persidangan dan penyusunan perundang-undangan		TUGAS DAN FUNGSI DPRD	layanan sekretariat DPRD			Persidangan dan penyusunan perundang-undangan						
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	85					Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	83,00	83,41	100	85		
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan	85					Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan	83,00	83,79	101	85		
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100	100		

Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100	80	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100	100	100	100		
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda	1	1	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1,00	1,00	100	1		
Pembahasan Rancangan Akhir Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Akhir perda	10	Pembahasan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1	1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan perda	10,00	4,00	40	6		
Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	4	0	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	3,00	0,00	0	2		

Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan / atau Naskah Akademik yang difasilitasi.	3	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	3	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan / atau Naskah Akademik yang difasilitasi.	3,00	3,00	100	3		
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang disusun.	1	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	1	Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang disusun.	1,00	1,00	100	1		
Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	66000					Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	66.000,00	45.840,00	69,45	59400		

Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas	100	100	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100	100	100	100		
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS.	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS.	1,00	1,00	100	1		
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.	1	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.	1,00	1,00	100	1		
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1,00	1,00	100	1		
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1	1	Jumlah Dokumen Hasil	1,00	1,00	100	1		

	n Perubahan APBD			Perubahan APBD			Pembahasan Perubahan APBD						
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasa n Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester.	1	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	1	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester.	1,00	1,00	100	1		
Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasa n Pertanggun gjawaban APBD.	1					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjaw aban APBD.	1,00	1,00	100	1		
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kegiatan Pengawasa n oleh DPRD yang difasilitasi	100	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggar aan Pemerintahan	100	100	Persentase Kegiatan Pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100	100	100	100		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	6	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	12,00	12,00	100	12		

Pemerintahan dan Hukum	Pemerintah an Bidang Pemerintah an dan Hukum.		Pemerintahan dan Hukum	Bidang Pemerintahan dan Hukum			Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.						
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Infrastrukturu.	12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6	6	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.	12,00	12,00	100	12		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6	6	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat	12,00	12,00	100	12		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Perkenomia n	12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6	6	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkenomia n	12,00	12,00	100	12		

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Sumber Daya Alam	12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	5	5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1,00	1,00	100	1		
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	6	6	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1,00	1,00	100	1		
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung	Jumlah Rekomenda si Hasil Pembahasa n Laporan	1	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawa	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan	1	1	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan	1,00	1,00	100	1		

jawaban Kepala Daerah	Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah		ban Kepala Daerah	Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah			Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah						
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan Kapasitas	100	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100	100	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan Kapasitas	100	100	100	100		
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1,00	1,00	100			
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2500	2500	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9,00	9,00	100	9		

Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20	15	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	55	55	100	12		
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	8	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20,00	12,00	60	30		
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	12	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8,00	7,00	87,5	7		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja DPRD	1	1	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1,00	1,00	100	2		

Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1,00	1,00	100	1		
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD	100	100	Persentase Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100	100	100	100		
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laopran Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	12	Jumlah Laopran Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48,00	48,00	100	12		
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	2	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1,00	1,00	100	2		
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil	165	165	Jumlah Dokumen Hasil	3,00	2,00	66,67	3		

	Pelaksanaan Reses			Pelaksanaan Reses			Pelaksanaan Reses						
Sosialisasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rancangan peraturan daerah	33000					Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rancangan peraturan daerah				4900		
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	100	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	100	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	100	100	100	100		
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	100	1		
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1	100	1		

Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang dibahas	100	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas	100	100	Persentase Kerja Sama Daerah yang dibahas	100	100	100	100		
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi. Verifikasi. dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	12	12	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4,00	4,00	100	4		
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	10	10	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12,00	12,00	100	12		
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100	Fasilitasi Tugas DPRD	persentase tugas DPRD yang difasilitasi	100	100	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100	100	100	100		
Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Dokumen	12	Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Dokumen	12	12	Jumlah Dokumen Hasil	12,00	12,00	100	12		

Pelaksanaan Tugas DPRD	Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Pelaksanaan Tugas DPRD	Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3	3	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3,00	3,00	100	3		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24	24	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6,00	6,00	100	6		
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12,00	12,00	100	12		

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	6					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4,00	4,00	100	6		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	80	84,41	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85,00	87,00	102,35	95		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100	2		
Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen	2	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen	1	1	Jumlah Dokumen RKA-	2	2	100	2		

Dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1							
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	Jumlah Laporan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	100	2		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1							

				Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD									
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100	2		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100	2		

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980	980	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980,00	980,00	100	980		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	12,00	100	12		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	12,00	100	12		
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaa	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se	12	12	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	2,00	2,00	100	2		

[illegible]

	realisasi anggaran												
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dipelihara	100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	100	100	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dipelihara	100	100	100	100		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	4	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,00	2,00	100	2		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamana n Barang Milik Daerah SKPD	4					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4,00	4,00	100	4		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik	4					Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik	4,00	4,00	100	4		

	daerah pada SKPD						daerah pada SKPD						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.	300	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	313	313	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.	300,00	280,00	93,33	283		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1,00	1,00	100	1		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	2,00	2,00	100	2		

	Kepegawaia n.												
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi/Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41	41	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.	1,00	1,00	100	1		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian.	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	12	12	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian.	1,00	1,00	100	1		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41,00	41,00	100	41		
Sosisalisasi Peraturan	Jumlah Orang yang	60					Jumlah Orang yang Mengikuti	60,00	60,00	100	60		

Perundang-undangan	Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.						
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10,00	10,00	100	10		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	40	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	20	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	24,00	24,00	100	40		

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27	27	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	13,00	13,00	100	12		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah yang Disediakan.	5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	Jumlah Paket Peralatan Rumah yang Disediakan.	5,00	5,00	100	5		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	6	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	10,00	10,00	100	10		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	12,00	100	12		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,00	1,00	100	1		

	Undangan yang Disediakan			yang Disediakan			Undangan yang Disediakan						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00	1,00	100	1		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3					Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3,00	3,00	100	3		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1									1		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik	100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik	100	100	100	100		

Pemerintah Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan.	4	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan.	4,00	4,00	100	4		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	8	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20,00	20,00	100	4		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.	2,00	2,00	100	2		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	50	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	47	47	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	70,00	70,00	100	50		

	yang Disediakan.			yang Disediakan									
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.	436,00	434,00	99,54	2		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100	100	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	100	100	100	100		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	12	12	100	12		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	12	100	12		

	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.			Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			dan Listrik yang Disediakan.						
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	12	12	100	4		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100	12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah	100	100	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah	100	100	100	100		

	yang dipelihara			Daerah yang dipelihara			Daerah yang dipelihara						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	10	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.	10,00	10,00	100	10		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	91	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90	90	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	75,00	75,00	100	91		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	1	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1,00	1,00	100	1		

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.	1500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1396	1396	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.	1.396,00	1.396,00	100	1500		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara.	6	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6	6	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara.	6,00	6,00	100	6		
Pemeliharaan Aset tak berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipeliharahan	5					Jumlah Aset tak Berwujud yang dipeliharahan	5,00	5,00	100	5		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Lainnya	5	5	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	6,00	6,00	100	7		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2	2	Jumah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	1,00	1,00	100	1		

	Dipelihara/ Direhabilitas i.												
Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i.	1	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	1	Jumah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi.	1,00	1,00	100	1		
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahtera an DPRD	100	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	100	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	100	100	100		
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD.	770	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPR	770	770	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD.	770,00	770,00	100	55		
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut	3	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3	3	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan.	7,00	7,00	100	3		

	DPRD yang Disediakan.												
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD.	55	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55	6	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD.	55,00	17,00	30,91	55		
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100	100	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100	100	100	100		
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	12	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4,00	4,00	100	4		
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	12	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12,00	12,00	100	12		
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan	12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	6	6	Jumlah Laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	12,00	12,00	100	12		

	konsultasi DPRD												
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	4	Penyelenggaraan Admininstrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12	12	Jumlah Paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	4,00	4,00	100	4		
											-		
											-		

Target Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur tercapai seluruhnya namun terdapat catatan hasil evaluasi kinerja Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Perlu penguatan implementasi pola koordinasi dan kolaborasi berbasis kewenangan antar pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan/fasilitasi kedewanan (Pembentukan Perda Provinsi, Anggaran dan Pengawasan) yang transparan dan akuntabel.
2. Perlu penguatan basis data dan sistem informasi/komunikasi untuk peningkatan kualitas layanan publik pada Lembaga parlementer dan penyebarluasan produk peraturan/kebijakan pembangunan daerah;
3. Perlu penguatan SDM aparatur penyelenggara layanan, sarana dan prasarana serta regulasi kegiatan kedewanan untuk peningkatan kualitas layanan publik pada Lembaga parlementer dan penyebarluasa produk peraturan/kebijakan pembangunan daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi DPRD, maka Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2026 mempunyai 2 Program dan 18 Kegiatan. Sekretariat DPRD dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis. Hal ini merupakan adanya pergeseran peran dan kedudukan DPRD sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, maka dengan alokasi anggaran sebagaimana yang termuat pada RKPD Tahun 2026 tersebut belum dapat mengakomodir sepenuhnya upaya-upaya dalam mendukung kinerja DPRD. Oleh karena itu, diharapkan anggaran yang diberikan sesuai dengan permintaan yang sudah disusun oleh Sekretariat DPRD.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping upaya peningkatan sumber daya manusia, juga melakukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan DPRD, yaitu diantaranya penyebaran informasi kegiatan kedewanan melalui Website, media sosial (instagram, facebook, twitter, dll), media massa DPRD dalam rangka penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan melakukan pemeliharaan serta perawatan asset yang dimiliki, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak serta pemenuhan dan pengadaan berbagai macam perlengkapan dan peralatan kantor.

TABEL 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (%)					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAPAIAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kepuasan Anggota Dprd	Indeks Kepuasan Masyarakat		82				8					
2	Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD				BB (71)	BB (72)	BB (73)		67,9 (B)		BB (73)		
3	Indeks Kepuasan DPRD terhadap dukungan Sekretariat DPRD				83	84	85		83,87		85		
4	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap						85	86			85	86	

	Pelayanan Sekretariat DPRD												
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					73	75			73	75		
4	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N					70	70			70	70		
5	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N					100	100			100	100		
6	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					80	80			80	80		

Berdasarkan Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah Survei Kepuasan Masyarakat, dalam hal ini Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD. Pada Tahun 2024 di Indeks Kepuasan DPRD terhadap dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebesar 83.87 dengan predikat baik dan mendapatkan nilai SAKIP sebesar 67,9 dengan predikat Baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis yang dihadapi pada pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD Provinsi Kalimantan Timur oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

- 1. Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia seperti Kurangnya koordinasi baik dari internal maupun eksternal sehingga berpengaruh terhadap kinerja DPRD dan Kualitas SDM yang Belum Merata
- 2. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem dan Prosedur Kerja
- 3. Belum optimal pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana seperti Penggunaan sistem digitalisasi masih minim, sehingga memperlambat proses administrasi dan pelayanan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4 Hasil review terhadap Rancangan Awal Renja untuk pelaksanaan Tahun 2026, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

[illegible]

4.02.01.1 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.610.867.021	4.02.01.1. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.610.867.021	
4.02.01.1 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	351.532.870	4.02.01.1. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	351.532.870	
4.02.01.1 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	394.907.686	4.02.01.1. 01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	394.907.686	
4.02.01.1 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	20.098.000	4.02.01.1. 01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	20.098.000	
4.02.01.1 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	405.964.779	4.02.01.1. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	405.964.779	

4.02.01.1 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	438.363.686	4.02.01.1. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	438.363.686	
4.02.01.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	38.028.456.986	4.02.01.1. .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	38.028.456.986	
4.02.01.1 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	35.993.770.800	4.02.01.1. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	35.993.770.800	
4.02.01.1 .02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1.076.402.000	4.02.01.1. 02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1.076.402.000	
4.02.01.1 .02.0003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	12	299.846.686	4.02.01.1. 02.0003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	12	299.846.686	
4.02.01.1 .02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	176.419.000	4.02.01.1. 02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	176.419.000	

4.02.01.1 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	12	482.018.500	4.02.01.1. 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12	482.018.500	
4.02.01.1 .03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara</i>	100%	1.201.524.258	4.02.01.1. 03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara</i>	100%	1.201.524.258	
4.02.01.1 .03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	137.772.560	4.02.01.1. 03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	137.772.560	
4.02.01.1 .03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	812.808.600	4.02.01.1. 03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	812.808.600	
4.02.01.1 .03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	4	151.849.058	4.02.01.1. 03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	4	151.849.058	

4.02.01.1 .03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	1	99.094.040	4.02.01.1. 03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	1	99.094.040	
4.02.01.1 .05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	2.438.647.445	4.02.01.1. 05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	2.438.647.445	
4.02.01.1 .05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	283	68.015.640	4.02.01.1. 05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	283	68.015.640	
4.02.01.1 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	840.485.000	4.02.01.1. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	840.485.000	
4.02.01.1 .05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	309.377.505	4.02.01.1. 05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	309.377.505	
4.02.01.1 .05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi/Kepegawai an	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.	1	62.895.900	4.02.01.1. 05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi/Kepegaw aian	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.	1	62.895.900	

4.02.01.1 .05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian.	1	335.826.840	4.02.01.1. 05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian.	1	335.826.840	
4.02.01.1 .05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41	358.019.300	4.02.01.1. 05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41	358.019.300	
4.02.01.1 .05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	60	305.234.760	4.02.01.1. 05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	60	305.234.760	
4.02.01.1 .05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10	158.792.500	4.02.01.1. 05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10	158.792.500	
4.02.01.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	6.535.793.776	4.02.01.1. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	6.535.793.776	

4.02.01.1 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	40	249.982.137	4.02.01.1. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40	249.982.137	
4.02.01.1 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	1.667.853.020	4.02.01.1. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	1.667.853.020	
4.02.01.1 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	2.202.025.000	4.02.01.1. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	2.202.025.000	
4.02.01.1 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	940.735.630	4.02.01.1. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	940.735.630	
4.02.01.1 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	637.038.810	4.02.01.1. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	637.038.810	
4.02.01.1 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0	0	4.02.01.1. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0	0	
4.02.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	592.787.779	4.02.01.1. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	592.787.779	

4.02.01.1 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3	245.371.400	4.02.01.1. 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3	245.371.400	
4.02.01.1 .07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	25.138.404.743	4.02.01.1. 07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	25.788.730.895	
4.02.01.1 .07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	6.621.440.000	4.02.01.1. 07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	6.621.440.000	
4.02.01.1 .07.0005	Pengadaan Mebel	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	9.316.321.057	4.02.01.1. 07.0005	Pengadaan Mebel	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	9.316.321.057	
4.02.01.1 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56	3.200.151.582	4.02.01.1. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56	3.850.477.734	
4.02.01.1 .07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	6.000.492.104	4.02.01.1. 07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	6.000.492.104	
4.02.01.1 .08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</i>	100%	17.440.175.400	4.02.01.1. 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</i>	100%	17.440.175.400	

4.02.01.1 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	72.760.000	4.02.01.1. 08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	72.760.000	
4.02.01.1 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	9.036.595.200	4.02.01.1. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	9.036.595.200	
4.02.01.1 .08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	151.300.200	4.02.01.1. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	151.300.200	
4.02.01.1 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	8.179.520.000	4.02.01.1. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	8.179.520.000	
4.02.01.1 .09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara</i>	<i>100%</i>	<i>14.215.447.930</i>	4.02.01.1. 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara</i>	<i>100%</i>	<i>14.215.447.930</i>	

4.02.01.1 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	1.228.532.000	4.02.01.1. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	1.228.532.000	
4.02.01.1 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	91	2.392.678.000	4.02.01.1. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	91	2.392.678.000	
4.02.01.1 .09.0005	Pemeliharaan Mebel	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	60.000.000	4.02.01.1. 09.0005	Pemeliharaan Mebel	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	60.000.000	
4.02.01.1 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15000	3.294.012.100	4.02.01.1. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15000	3.294.012.100	
4.02.01.1 .09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6	3.929.121.430	4.02.01.1. 09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6	3.929.121.430	
4.02.01.1 .09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	KALIMANTAN TIMUR	jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5	58.830.000	4.02.01.1. 09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	KALIMANTAN TIMUR	jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5	58.830.000	

4.02.01.1 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	1.813.250.000	4.02.01.1. 09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	1.813.250.000	
4.02.01.1 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1.239.024.400	4.02.01.1. 09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1.239.024.400	
4.02.01.1 .09.0011 P	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200.000.000	4.02.01.1. 09.0011 P	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200.000.000	
4.02.01.1 .15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	56.738.192.850	4.02.01.1. 15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	56.738.192.850	
4.02.01.1 .15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55	55.000.000.000	4.02.01.1. 15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55	55.000.000.000	
4.02.01.1 .15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3	1.112.483.350	4.02.01.1. 15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3	1.112.483.350	

4.02.01.1 .15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55	625.709.500	4.02.01.1. 15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55	625.709.500	
4.02.01.1 .16	Layanan Administrasi DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Layanan Adminitrasi DPRD	100	31.461.713.799	4.02.01.1. 16	Layanan Administrasi DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Layanan Adminitrasi DPRD	100	31.730.513.799	
4.02.01.1 .16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4	859.524.060	4.02.01.1. 16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4	1.128.324.060	
4.02.01.1 .16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	201.005.139	4.02.01.1. 16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	201.005.139	
4.02.01.1 .16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	15.371.174.600	4.02.01.1. 16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	15.371.174.600	
4.02.01.1 .16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4	15.030.010.000	4.02.01.1. 16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4	15.030.010.000	
4.02 . 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan penyusunan perundang- undangan	85	170.190.775.792	4.02 . 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan penyusunan perundang- undangan	85	343.490.726.697	

			Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	85					Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	85		
			Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan	85					Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan	85		
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100		
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100%	34.509.051.628	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100%	52.314.883.352	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	5.574.286.372	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	5.891.338.736	
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	6	2.186.418.350	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	6	2.188.448.750	
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2	512.202.364	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2	548.202.364	

4.02.02.1 .01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	592.885.422	4.02.02.1. 01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	592.885.422	
4.02.02.1 .01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	556.378.500	4.02.02.1. 01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	556.378.500	
4.02.02.1 .01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	59400	25.086.880.620	4.02.02.1. 01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	59400	42.537.629.580	
4.02.02.1 .02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100%	5.520.172.000	4.02.02.1. 02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100%	9.215.554.000	
4.02.02.1 .02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1.114.486.000	4.02.02.1. 02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1.998.310.000	
4.02.02.1 .02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1.066.770.000	4.02.02.1. 02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1.181.970.000	
4.02.02.1 .02.0003	Pembahasan APBD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1.118.486.000	4.02.02.1. 02.0003	Pembahasan APBD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	2.011.610.000	

4.02.02.1 .02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	1.063.800.000	4.02.02.1. 02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	1.983.210.000	
4.02.02.1 .02.0005	Pembahasan Laporan Semester	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	8.844.000	4.02.02.1. 02.0005	Pembahasan Laporan Semester	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	8.844.000	
4.02.02.1 .02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawa ban APBD	1	1.147.786.000	4.02.02.1. 02.0006	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawab an APBD	1	2.031.610.000	
4.02.02.1 .03.0001	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Kegiatan Pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi</i>	100%	15.241.209.686	4.02.02.1. 03.0001	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Kegiatan Pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi</i>	100%	41.118.708.363	
4.02.02.1 .03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	3.003.561.092	4.02.02.1. 03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	7.404.561.092	
4.02.02.1 .03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	3.003.561.092	4.02.02.1. 03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	7.820.361.092	

4.02.02.1 .03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	2.686.761.092	4.02.02.1. 03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	6.934.761.092	
4.02.02.1 .03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	2.607.561.092	4.02.02.1. 03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	6.662.961.092	
4.02.02.1 .03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	805.482.000	4.02.02.1. 03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	1.223.620.000	
4.02.02.1 .03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	2.004.501.680	4.02.02.1. 03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	8.089.871.415	
4.02.02.1 .03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1.129.781.638	4.02.02.1. 03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	2.982.572.580	

4.02.02.1 .04	Peningkatan Kapasitas DPRD	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan Kapasitas</i>	100%	46.960.028.679	4.02.02.1. 04	Peningkatan Kapasitas DPRD	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan Kapasitas</i>	100%	105.765.327.016	
4.02 . 02 . 1.04 . 02	Pendalaman Tugas DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9	4.298.800.000	4.02 . 02 . 1.04 . 02	Pendalaman Tugas DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9	5.302.600.000	
4.02.02.1 .04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30	2.930.169.288	4.02.02.1. 04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30	2.930.169.288	
4.02.02.1 .04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	687.669.288	4.02.02.1. 04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	687.669.288	
4.02.02.1 .04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2	26.304.174.620	4.02.02.1. 04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2	83.828.897.80 4	
4.02.02.1 .04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	2.410.334.847	4.02.02.1. 04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	2.687.110.000	
4.02.02.1 .04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	10.328.880.636	4.02.02.1. 04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	10.328.880.63 6	

4.02.02.1 .05	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi</i>	100%	34.394.804.401	4.02.02.1. 05	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi</i>	100%	79.885.138.110	
4.02.02.1 .05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	5.457.345.288	4.02.02.1. 05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	5.457.345.288	
4.02.02.1 .05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	1.442.841.661	4.02.02.1. 05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	2.271.589.500	
4.02.02.1 .05.0003	Pelaksanaan Reses	KALIMANTAN TIMUR	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	23.084.737.180	4.02.02.1. 05.0003	Pelaksanaan Reses	KALIMANTAN TIMUR	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	61.963.981.86 0	
4.02.02.1 .05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	4900	4.409.880.272	4.02.02.1. 05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	4900	10.192.221.46 2	
4.02.02.1 .06	<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi</i>	100%	2.654.386.666	4.02.02.1. 06	<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	KALIMANTAN TIMUR	<i>Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi</i>	100%	3.184.545.666	
4.02.02.1 .06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	376.093.364	4.02.02.1. 06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	503.052.364	
4.02.02.1 .06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	2.278.293.302	4.02.02.1. 06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	2.681.493.302	

4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas	100%	1.142.061.144	4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas	100%	1.393.089.690	
4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi. Verifikasi. Dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4	306.000.000	4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi. Verifikasi. Dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4	557.028.546	
4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12	836.061.144	4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12	836.061.144	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100%	29.769.061.588	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100%	50.613.480.500	
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	8.091.357.288	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	19.175.921.288	
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3	65.677.000	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3	65.677.000	

4.02.02.1 .08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6	6.862.681.644	4.02.02.1. 08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6	6.862.681.644	
4.02.02.1 .08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	743.163.288	4.02.02.1. 08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	743.163.288	
4.02.02.1 .08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	6	14.006.182.368	4.02.02.1. 08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	KALIMANTAN TIMUR	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	6	23.766.037.28 0	
					365.000.000.000						539.219.077.057	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah Rancangan Akhir Rencana Kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan didalam dokumen Rancangan Akhir Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029.

Selanjutnya dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja dilakukan dengan melihat dari hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan, untuk kemudian disusun kedalam Program dan Kegiatan tahun depan yang dalam hal ini, Sekretariat DPRD berperan sebagai fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan pada anggaran di tahun yang akan datang, termasuk pada masing-masing bagian di Sekretariat DPRD dan juga mengumpulkan usulan-usulan kegiatan Dewan untuk dikerjakan di tahun yang akan datang. Dari usulan-usulan yang masuk di Sekretariat DPRD, maka direncanakan pada Tahun 2026 ada 18 Kegiatan dan 91 Sub Kegiatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sudah sesuai dan sejalan dengan Rancangan Akhir RPJMD. Untuk Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur arah kebijakannya telah sesuai pula dengan arah kebijakan pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 96 menyebutkan bahwa DPRD memiliki 3 Fungsi yakni Pembentukan Peraturan Daerah, Penyusunan Anggaran dan Pengawasan.

Selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 bahwa Indikator Kinerja Kunci yaitu.

- 1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N;
- 2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N;
- 3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dengan demikian Sekretariat DPRD arah kebijakannya telah sesuai pula dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional Tahun 2025-2029, Tujuan, Sasaran,Strategi dan Kebijakan.

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Tujuan Sekretariat DPRD	Sasaran Sekretariat DPRD	Strategi-Strategi Sekretariat DPRD	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Professional Dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat DPRD	Pengembangan pelatihan dan bimtek berkala bagi pegawai Sekretariat DPRD
			Penguatan sistem administrasi dan tata kelola kerja Sekretariat DPRD	Penyusunan dan penerapan SOP yang jelas dan terukur dalam pelayanan
			Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dan penyediaan informasi	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola administrasi dan penyediaan informasi yang efektif, transparan, dan akuntabel
			Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar bagian dalam mendukung tugas DPRD	Peningkatan efisiensi anggaran melalui evaluasi dan pengawasan rutin

			Optimalisasi pengelolaan anggaran dan sarana prasarana penunjang kegiatan DPRD	Peningkatan kualitas dukungan administratif dan teknis dalam penyusunan produk hukum DPRD
--	--	--	--	---

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, Yaitu

- *Tujuan*

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD bersifat spesifik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai. Adapun Tujuan yang dituangkan, antara lain :

Tujuan Sekretariat DPRD : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- *Sasaran*

Sasaran adalah sesuatu yang terarah dan terukur dari tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain :

 - Sasaran Sekretariat DPRD : Meningkatnya kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD

3.3. Program dan Kegiatan

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :

a. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

- Sub Keegiatannya :
- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 - 2) Pembahasan Rancangan Perda.
 - 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan.

- 4) Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik.
- 5) Penyusunan Tata Tertib DPRD.
- 6) Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatannya :

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS.
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
- 3) Pembahasan APBD.
- 4) Pembahasan Perubahan APBD.
- 5) Pembahasan Laporan Semester.
- 6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sub Kegiatannya :

- 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum.
- 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.
- 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.
- 5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- 6) Pengawasan Penggunaan Anggaran.
- 7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatannya :

- 1) Pendalaman Tugas DPRD.
- 2) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli,
- 3) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
- 4) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
- 5) Penyusunan Program Kerja DPRD.
- 6) Publikasi dan Dokumentasi DPRD.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub Kegiatannya :

- 1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah.
- 2) Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD.
- 3) Pelaksanaan Reses.

- 4) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Sub Kegiatannya :

- 1) Penyusunan Kode Etik DPRD.
- 2) Pengawasan Kode Etik DPRD.

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Sub Kegiatannya :

- 1) Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah.
- 2) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

h. Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatannya :

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD.
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
- 4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.
- 5) Fasilitasi Pelaksanaan tugas panitia khusus

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas pada setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatannya :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatannya :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- 3) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatannya :

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- 3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatannya :

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya.
- 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- 6) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 7) Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan.
- 8) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatannya :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 2) Penyediaan Peratalat dan Perlengkapan Kantor.
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatannya :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 2) Pengadaan Mebel.

- 3) Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya.
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatannya :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Sub Kegiatannya :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 3) Pemeliharaan Mebel.
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Sub Kegiatannya :

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
- 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.
- 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

j. Layanan Administrasi DPRD.

Sub Kegiatannya :

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
- 2) Fasilitasi Fraksi DPRD.
- 3) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.
- 4) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

BAB IV

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rancangan Akhir RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun selanjutnya.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						375.000.000.000,00							401.569.930.610,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						375.000.000.000,00							401.569.930.610,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						375.000.000.000,00							401.569.930.610,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti</i> <i>Indeks Kualitas Layanan</i>	-			100 % 89 Indeks	199.809.924.551,00						-	214.359.164.681,00	
		[Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan]	Indeks Kualitas Layanan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang <i>ditindaklanjuti</i>	100 95	100 85	-	100 89	199.809.924.551,00	-	-	-	-	-	-	214.359.164.681,00	-
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu</i>	-			100 %	1.976.370.679,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN DAN ANGGOTA DPRD Provinsi Kalimantan Timur	-	1.771.953.724,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	446.332.862,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN DAN ANGGOTA DPRD Provinsi Kalimantan Timur		386.686.157,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	811.669.223,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		960.194.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	151.586.066,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		238.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	98.925.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	2.546.152.118,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	-	2.679.148.780,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				238 Unit	67.904.076,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		74.907.660,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	938.759.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		925.730.165,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				41 Orang	362.179.058,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		393.973.493,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				219 Orang	314.594.484,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		330.426.639,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	154.632.177,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		174.671.970,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.036.595.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		9.940.115.747,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	149.438.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	11.093.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		11.074.712.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	-			100 %	21.441.257.178,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	-	15.854.629.562,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	1.227.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		1.344.785.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				98 Unit	2.392.336.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		2.631.813.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

-4077-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i>				5 Paket	15.029.916.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		16.534.016.870,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan</i>	-			100 % 70 % 80 %	175.190.075.449,00						-	187.210.765.929,00	
		[Meningkatkan kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 70	-	-	100 70	175.190.075.449,00	-	-	-	-	-	-	187.210.765.929,00	-
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	<i>Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi</i>	-			100 %	34.147.978.494,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	-	37.959.956.790,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>				1 Dokumen	4.055.878.578,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		6.131.715.009,00	SEKRETARIAT DPRD

											judi, dan pe nyeludupan .					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				7 Dokumen	601.407.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		2.405.060.185,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				3 Dokumen	573.515.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		563.422.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	588.167.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		652.173.964,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	1.012.473.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		1.170.180.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	7.123.437,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		9.728.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1.045.773.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		1.262.564.600,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				2 Dokumen	28.334.700.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		28.934.592.082,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1.905.167.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		2.651.368.332,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	17.585.367.276,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		11.362.681.259,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan]	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	80	-	-	80	175.190.075.449,00	-	-	-	-	-	-	187.210.765.929,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah</i>				4 Dokumen	396.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		336.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun</i>				12 Dokumen	867.784.157,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		919.667.258,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 70	-	-	100 70	175.190.075.449,00	-	-	-	-	-	-	187.210.765.929,00	-
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi</i>	-			100 %	18.930.892.944,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	-	32.745.967.747,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	740.825.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		817.479.617,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				6 Dokumen	7.484.509.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	ASN dan ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		15.406.800.605,00	SEKRETARIAT DPRD	
	J U M L A H							375.000.000.000,00							401.569.930.610,00		

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan suatu dokumen perencanaan yang bersifat taktis dan strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) memiliki jangka waktu satu tahun yang merupakan pedoman bagi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yaitu sebagai unsur pelayanan untuk kelancaran kegiatan DPRD.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini meliputi : Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan, Bagian Umum dan Keuangan dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Ketiga bagian tersebut masing-masing memiliki fungsi dan program yang jelas dan rasional, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih dan fokus pada permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal-hal diatas, diharapkan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pemecahan masalah mendasar sehingga hasilnya dapat dinikmati secara lebih merata dan lebih adil bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan sehingga nantinya akan tercipta sasaran hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian laporan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2026 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, mudah-mudahan laporan ini dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan APBD Tahun 2026.

RENJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam mengupayakan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan segala potensi, permasalahan dan tantangan yang ada. Perencanaan pembangunan disusun utamanya berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang tersebut memberikan arahan dalam penyusunan rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Lebih lanjut secara lebih terperinci, khususnya terkait Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan diamanatkan mekanismenya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (selanjutnya disebut Renja). Peraturan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan kerja pelaksanaan tugas tahunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen yang memuat rencana kerja berdasar tugas dan fungsi serta penjenjangan kinerja. Penjenjangan tersebut

dimaksudkan bahwa Perangkat Daerah menjadi organisasi yang menggerakkan pembangunan sesuai visi dan misi kepala daerah dan berupaya mencapai visi dimaksud. Secara substansi, hal tersebut adalah tujuan dan sasaran perangkat daerah, hingga penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan, disertai indikator kinerja, target capaian kinerja dan kebutuhan pendanaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam praktiknya, kedudukan Renja Perangkat Daerah sangat strategis dalam menerjemahkan perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah dan panjang. Hal ini didasari oleh proses penyusunan Renja yang telah melalui proses sinkronisasi atau penyelarasan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai bentuk implementasi Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah.

Renja sebagai penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra merupakan dokumen yang secara substansial memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi serta merupakan acuan dalam penyusunan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Renja juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas & Tata Kerja Perangkat Daerah
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor [XX](#) Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Gubernur Nomor XX tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode satu tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu pula sebagai acuan bagi bidang-bidang di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan, penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan penyajian dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisi tentang: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025

BAB V PENUTUP

1.5 Hal penting terkait Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kaltim tahun 2026 merupakan tahun Pertama dari penjabaran atau implementasi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 – 2029. Hingga tahun 2025,

pelaksanaan kinerja organisasi masih mengacu pada Rencana Strategis periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, yakni Renstra 2024 – 2026. Keberadaan atau posisi beberapa dokumen yang dijadikan pedoman dalam proses penyusunan Renja Bappeda tahun 2026, yakni berpedoman pada Renstra Bappeda Kaltim Tahun 2024 – 2026 saat penyusunan tahap Rancangan Awal Renja sedangkan pada tahapan penyusunan Rancangan hingga Penetapan Renja Bappeda Tahun 2026 dilakukan simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan Renstra Bappeda Kaltim Tahun 2025-2029 sehingga akan mempengaruhi substansi penyajian terutama pada bagian evaluasi kinerja perangkat daerah. Terdapat beberapa indikator kinerja yang berubah metode perhitungannya, berbeda definisi, hingga indikator dan komponen penyusun perhitungan capaian target indikator yang diganti dengan indikator baru. Pengisian akan disesuaikan dengan kondisi terkini, yakni menyesuaikan dengan indikator yang digunakan pada tahun berjalan. Adanya dinamika ini secara umum tidak mengganggu proses penilaian maupun evaluasi kinerja mengingat substansi utama penilaian serta refleksi dari hasil kinerja masih bersifat senada, beriringan, serta didukung oleh evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh perangkat daerah (Bappeda Kaltim).

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, serta untuk memastikan kesinambungan serta kesesuaian program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2026, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2024 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian target kinerja dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2024 alokasi anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp72.308.109.244. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (2 program urusan dan 1 program penunjang), 14 kegiatan dan 79 Sub Kegiatan. Gambaran hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 tersaji dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2024 dan
Pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2024-2026	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target RENJA PD Thn 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks kualitas layanan kesekretariatan (Indeks)	85	-	80	109	136,25	82	82	96
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu (%)	99	100	97	100	103,09	98	98	98
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	3	2	2	100	3	5	71,43
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6	2	2	2	100	2	4	66,67
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)	6	2	2	2	100	2	4	66,67
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD (Laporan)	3	2	1	1	100	2	3	100
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	2	1	1	100	1	2	66,67

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2024-2026	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target RENJA PD Thn 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	270	79	90	83	92,23	155	238	88,14
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	12	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	-	12	12	100	1	13	36,11
5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	54	18	18	18	100	31	49	90,74
5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu (Dokumen)	21	-	7	7	100	7	14	66,67
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	3	-	1	1	100	1	2	66,67

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2024-2026	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target RENJA PD Thn 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	12	-	4	4	100	4	8	66,67
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	100	43	100	146	146	100	100	100
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian (Dokumen)	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (Dokumen)	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	240	177	102	147	145,54	116	263	109,58
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum yang disediakan tepat waktu (%)	99	-	96	100	104,17	97	97	97,98
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	79	13	22	22	100	8	30	37,97
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	18	15	6	6	100	6	12	66,67
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	11	-	2	2	100	2	4	36,36

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2024-2026	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target RENJA PD Thn 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	5	4	4	100	5	9	75
5.01.01.1 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	6	5	2	2	100	7	9	150
5.01.01.1 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)	3	1	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3	1	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	1	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	2	1	1	100	12	13	433,33
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (dokumen)	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1 .07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	-	1	1	100	-	1	50
5.01.01.1 .07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	-	13	13	100	-	13	325
5.01.01.1 .07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (Paket)	6	-	9	9	100	2	11	183,33

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2024-2026	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target RENJA PD Thn 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	-	28	28	100	27	55	1833,33
5.01.01.1.07.0008	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	-	1	1	100	1	2	33,33
5.01.01.1.07.0011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	-	2	0	0	2	4	66,67
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	1	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	3	1	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	3	1	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	98	93,63	90	100	111,11	94	94	95,92
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	8	2	2	2	100	2	4	50
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	97	57	26	26	100	36	62	63,92

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2024-2026	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target RENJA PD Thn 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1 .09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	60	20	27	27	100	27	54	90
5.01.01.1 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	90	93	166	166	100	135	301	334,44
5.01.01.1 .09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (Unit)	3	-	1	1	100	20	21	700
5.01.01.1 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1	100	2	3	300
5.01.01.1 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	4	20	20	100	130	150	250
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian dokumen rencana pembangunan daerah antar periode perencanaan (%)	100	100	100	85	85	100	100	100
		Tingkat Kesesuaian dokumen rencana pembangunan daerah antar level pemerintahan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	95	95	100	100	100
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu (Dokumen)	8	3	3	3	100	3	6	75
5.01.02.1 .01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	4	1	1	1	100	-	1	25
5.01.02.1 .01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5	3	2	2	100	2	4	80

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2024-2026	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target RENJA PD Thn 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.02.1.01.0005	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	5	1	2	2	100	2	4	80
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	8	3	3	3	100	3	6	75
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Data dan Informasi)	360	110	115	115	100	120	235	65,28
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	9	2	3	3	100	3	6	66,67
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	240	92	80	116	145	80	160	66,67
5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia pemerintah Kab/Kota yang dibina pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah (Orang)	120	30	40	220	550	40	80	66,67
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan(Buku)	3	3	1	1	100	1	2	66,67
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi yang dianalisis (Dokumen)	8	2	3	3	100	2	5	62,50
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	8	3	5	5	100	3	8	100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2024-2026	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target RENJA PD Thn 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.02.1 .03.0003	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	9	2	3	3	100	3	6	66,67
5.01.02.1 .03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	9	4	3	3	100	3	6	66,67
05.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian dokumen rencana pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Tingkat kesesuaian dokumen rencana perangkat daerah antar periode perencanaan (%)	100	100	100	97	97	100	100	100
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) (%)	100	99,49	100	95	95	100	100	100
5.01.03.1 .01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	10	1	4	4	100	3	7	70
5.01.03.1 .01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	30	-	10	10	100	1	11	36,67
5.01.03.1 .01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	30	10	10	10	100	1	11	36,67

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2024-2026	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target RENJA PD Thn 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	6	1	2	2	100	1	3	50
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	20	2	4	4	100	3	7	35
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	39	-	10	10	100	2	12	30,77
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	39	1	10	10	100	1	11	28,21
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6	-	2	2	100	2	4	66,67
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) (%)	100	100	98	100	98	100	100	100
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	20	2	4	4	100	3	7	35

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2024-2026	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target RENJA PD Thn 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03.1 .02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	27	-	9	9	100	9	18	66,67
5.01.03.1 .02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	27	9	9	9	100	9	18	66,67
5.01.03.1 .02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	10	2	6	6	100	2	8	80
5.01.03.1 .02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	10	1	4	4	100	3	7	70
5.01.03.1 .02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	9	-	3	3	100	3	6	66,67
5.01.03.1 .02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	9	3	3	3	100	3	6	66,67
5.01.03.1 .02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	13	4	5	5	100	4	9	69,23

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2024-2026	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target RENJA PD Thn 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	10	1	4	4	100	3	7	70
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	6	-	2	2	100	2	4	66,67
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	6	2	2	2	100	2	4	66,67
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	6	1	1	1	100	2	3	50

Evaluasi hasil Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Gambaran terhadap capaian kinerja Program sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.**

Program ini merupakan Program yang ada di setiap perangkat daerah yang berfungsi sebagai penunjang Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Capaian kinerja program ini diukur dengan menggunakan dua indikator.

Indikator (1) : Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti.

Indikator ini mengukur tingkat keluhan dari pengguna layanan Bappeda yang mendapatkan tindak lanjut. Dari target 100%, realisasi kinerja 100%. Capaian kinerja tersebut mendapatkan predikat Sangat Tinggi (ST) dengan rasio capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan proses tindak lanjut terhadap keluhan pengguna layanan dilakukan secara cepat, tepat dan efisien berdasarkan hasil penjarangan keluhan yang didapat melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan per Triwulan oleh Bappeda Kaltim.

Indikator (2) : Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan.

Indikator ini terdiri dari beberapa komponen perhitungan yang berfungsi sebagai penilaian terhadap kinerja Sekretariat Bappeda. Dari target 80 Indeks, realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 109 Indeks dengan tingkat capaian sebesar 136,25%. Rincian perhitungan capaian kinerja yang merupakan komposit dari beberapa

kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rumusan Perhitungan Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No.	Komponen perhitungan	Capaian Kinerja	Bobot	Nilai Akhir
a.	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	40%	40
b.	Presentase Realisasi Anggaran	91.42	30%	27.42
c.	Presentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	147	25%	36.75
d.	Presentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	100	5%	5
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (a + b + c + d) =				109.17

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai Perencana Pembangunan Daerah dengan fokus utama Program berada pada penyusunan dokumen perencanaan Provinsi, pendampingan/fasilitasi dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, pengendalian pelaksanaan Pembangunan Daerah serta ketersediaan Data dan Informasi yang akan digunakan dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah.

Capaian kinerja ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator. Hasil perhitungan capaian beserta rumus perhitungan dan penjelasan terhadap capaian kinerja tersaji pada tabel 2.3. berikut:

Tabel 2.3. Rumusan Perhitungan Capaian Indikator
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Program/ Indikator	Komponen Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Keterangan
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
Indikator 1: Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan				95.49%	Menyandingkan kesesuaian pada level tujuan, sasaran dan program antara dokumen RPD 2024- 2026 dengan dokumen RKPD 2025 dan P-RKPD 2024
	RPD vs RKPD 2025			96%	
	a. Kesesuaian Level Tujuan			98%	
	Narasi tujuan	100%	40%	40%	
	Indikator Kinerja	100%	40%	40%	
	Target Kinerja	87.50%	20%	18%	Penurunan nilai target di Dinas lingkungan hidup
	b. Kesesuaian Level Sasaran			99%	
	Narasi tujuan	100.00%	40%	40%	
	Indikator Kinerja	100.00%	40%	40%	
	Target Kinerja	95.45%	20%	19%	Penurunan nilai target di Dinas lingkungan hidup
	c. Kesesuaian Level Program			93%	
	Narasi tujuan	100.00%	40%	40%	
	Indikator Kinerja	85.42%	40%	34%	Terjadi perubahan bahasa, Pengurangan dan penambahan indikator
	Target Kinerja	92.26%	20%	18%	Terjadi perubahan bahasa, pengurangan dan penambahan target
	RPD vs P-RKPD 2024			92%	
	a. Kesesuaian Level Tujuan			98%	
	Narasi tujuan	100.00%	40%	40%	
	Indikator Kinerja	100.00%	40%	40%	
	Target Kinerja	87.50%	20%	18%	
	b. Kesesuaian Level Sasaran			98%	
	Narasi tujuan	100.00%	40%	40%	
	Indikator Kinerja	100.00%	40%	40%	

Program/ Indikator	Komponen Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Keterangan
	Target Kinerja	90.91%	20%	18%	Penurunan nilai target di dinas lingkungan hidup dan peningkatan target dinas kesehatan
	c. Kesesuaian Level Program			80%	
	Narasi tujuan	100.00%	40%	40%	
	Indikator Kinerja	56.95%	40%	23%	Terjadi perubahan bahasa, pengurangan dan penambahan indikator
	Target Kinerja	85.42%	20%	17%	Terjadi perubahan bahasa, pengurangan dan penambahan target
Indikator 2: Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan				85%	
	Jumlah Prioritas Pembangunan yang mendapat dukungan Program dari seluruh kabupaten/ Kota (RKPD 2025)	87.50%	80%	70%	Terdapat prioritas pembangunan provinsi yang belum memperoleh dukungan program dari kab/kota.
	Jumlah Prioritas Pembangunan yang mendapat dukungan Program dari seluruh kabupaten/Kota (P-RKPD 2024)	75%	20%	15%	Terdapat prioritas pembangunan provinsi yang belum memperoleh dukungan program dari kab/kota.
Indikator 3: Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti				100%	
	Jumlah Hasil Evaluasi RKPD 2023 yang ditindaklanjuti dalam penyusunan RKPD 2025		80%	80%	
	Jumlah Hasil Evaluasi RKPD 2024 yang ditindaklanjuti dalam penyusunan P-RKPD 2024		20%	20%	

c. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Program ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai Perencana Pembangunan Daerah dengan fokus utama Program yaitu pada koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi serta harmonisasi dan sinergitas antara Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah maupun dengan Kabupaten/Kota. Capaian kinerja program ini diukur dengan menggunakan dua indikator.

Indikator (1): **Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan**, dari target 100%, realisasi kinerja 97%. Capaian kinerja tersebut mendapatkan predikat capaian kinerja Sangat Tinggi dengan rasio capaian sebesar 97%. Indikator ini tidak mencapai target yang diharapkan dikarenakan adanya inkonsistensi antara Dokumen Renstra dengan Dokumen Renja di beberapa perangkat daerah. Inkonsistensi tersebut merupakan akibat dari tindak lanjut yang harus dilakukan oleh perangkat daerah setelah proses penyesuaian/pemutakhiran nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Indikator (2): **Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah** dari target 100%, realisasi kinerja 100%. Capaian kinerja tersebut

mendapatkan predikat capaian kinerja Sangat Tinggi dengan rasio capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan telah digunakannya aplikasi SIPD dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, sehingga meminimalisir terjadinya inkonsistensi antara dokumen rencana pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah.

2. Kinerja pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan IV telah mendapatkan hasil yang optimal dimana dari 14 Kegiatan yang dilaksanakan, hanya 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dari target 100% hanya tercapai 95% dan (2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang mendapatkan realisasi kinerja 98% dari target 100%. Hal yang mendasari tidak tercapainya target kinerja tersebut yaitu terbitnya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang menyebabkan beberapa dinas/badan melakukan penyesuaian Program, kegiatan, indikator, dan target sehingga menyebabkan terjadinya inkonsistensi/tidak selarasnya dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (Renstra) dengan dokumen perencanaan tahunan (Renja) di Perangkat Daerah yang diampu oleh bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Terdapat 12 kegiatan yang sampai dengan akhir triwulan IV memiliki rasio capaian 100% atau 85,71% dari total seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Tingginya

capaian kinerja ini didorong oleh adanya komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal/agenda yang telah disusun sebelumnya dengan didukung oleh tersedianya data dan informasi serta anggaran yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan

3. Sampai dengan akhir pelaksanaan Renja Tahun 2024 terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan. Secara rinci gambaran terhadap sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja beserta faktor penyebab tidak mencapai target kinerja yaitu (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, tidak mencapai target dikarenakan terdapat Pegawai ASN Bappeda yang Pensiun, Mutasi dan Meninggal dunia sehingga target kinerja tidak tercapai; (2) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya tidak mencapai target dikarenakan adanya kendala pada lokasi yang akan dilakukan pemasangan/pengadaan sarana dan prasarana sedang mengalami rehab/renovasi.

Dari hasil penjabaran terhadap pencapaian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan triwulan IV tahun 2024, beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian target kinerja antara lain:

1. Faktor Pendorong
 - a. Tersedianya timeline/jadwal yang sesuai dengan peraturan perundangan;
 - b. Sistem administrasi yang efektif mencakup pengolahan data yang cepat dan akurat, peningkatan kepuasan ASN serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas sesuai standar operasional prosedur (SOP);
 - c. Koordinasi serta adanya dukungan yang baik antar unit kerja di Bappeda serta kepatuhan terhadap peraturan

perundangan terkait penyusunan dokumen perencanaan & penganggaran dalam setiap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran;

- d. Kesepahaman dengan bidang-bidang di Bappeda Kaltim untuk menyusun dokumen perencanaan Bappeda yang tepat waktu dan tepat proses;
- e. Komitmen seluruh personel Bappeda terhadap target-target kinerja yang perlu dicapai

2. Faktor Penghambat

- a. Terhambatnya proses administrasi dan manajemen kinerja akibat gangguan sistem yang berada diluar kendali/jangkauan internal (misal, gangguan jaringan internet, server aplikasi SIPD sedang tidak stabil dan kerap gangguan);
- b. Adanya penyesuaian dan pemutakhiran kebijakan dari pemerintah pusat yang terjadi ditengah pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah sehingga konsistensi dalam perencanaan sulit untuk dicapai;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah adalah proses evaluasi dan pengukuran capaian kinerja pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, baik dalam hal pelayanan publik maupun pelayanan internal, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan, guna mencapai tujuan organisasi. Analisis kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi dari capaian kinerja dari tujuan dan sasaran organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan elemen penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah menekankan bahwa perencanaan strategis menjadi dasar atau acuan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah harus sesuai dan selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Tahun 2024 – 2026, Kalimantan Timur berada dalam periode transisi pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, untuk periode 2024 – 2026, Kalimantan Timur menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023.

Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda tahun 2024 – 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Dokumen ini menjadi dasar penilaian kinerja organisasi pada level strategis. Dalam upaya pencapaian target strategis, dokumen RENSTRA juga telah menuangkan kinerja organisasi hingga level sub kegiatan, yakni kinerja yang menunjukkan keluaran-keluaran kinerja yang mendukung capaian kinerja yang lebih tinggi. Target strategis sebagaimana dimaksud mencakup dua tujuan dan dua sasaran perangkat daerah. Masing-masing komponen (tujuan dan sasaran) telah dilengkapi dengan indikator kinerja untuk mengukur capaian/keberhasilan dan progress kinerja organisasi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang

dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan Renja (P-Renja) Bappeda tahun 2024, terdapat tiga sasaran strategis yang menjadi arah pelaksanaan kinerja organisasi. Tabel 2.4 berikut menggambarkan ketiga sasaran strategis tersebut.

Tabel 2.4.
Sasaran Strategis Bappeda Kaltim tahun 2024

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran (Satuan)		Target 2024
Tujuan 1: Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		92,00
Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah (%)	92,00
	2	Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi (%)	91,00
	3	Persentase program prioritas pembangunan yang mencapai target (%)	80,00
Tujuan 2: Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Tidak menjadi IKU Bappeda		
Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	1	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (poin)	79,00
	2	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah (indeks)	85,00

Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 tercantum dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan
Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Keterangan
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	13
RENSTRA 2024-2026										
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	-	✓	92	92,5	93	98,80			Indikator Tujuan 1
2	Persentase konsistensi antara dokumen rencana pembangunan daerah dengan dokumen rencana perangkat daerah	-	✓	92	94	96	96,43			Indikator Sasaran 1
3	Persentase keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi	-	✓	91	93	95	92,04			Indikator Sasaran 1
4	Persentase program prioritas pembangunan yang mencapai target	-	✓	80	85	90	88,00			Indikator Sasaran 1
5	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	-	-	79	80	81	80,90	80,95		Indikator Sasaran 2
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	-	-	85	85,5	86	86,38			Indikator Sasaran 2

Pengukuran dan analisis kinerja dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Lampiran II peraturan tersebut, analisis kinerja dilakukan untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Tujuan kedua, yakni "Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas" tidak dilakukan evaluasi dan analisis mengingat tujuan ini merupakan sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 sehingga evaluasi terhadap tujuan kedua tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi RPD 2024-2026.

Tujuan pertama Bapda tahun 2024-2026 menggambarkan upaya organisasi untuk menghasilkan produk perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran. Tahun 2024 merupakan tahun pertama penggunaan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) sebagai indikator dari tujuan strategis organisasi. Indeks ini diformulasikan melalui tujuh kriteria, yakni:

1. Tingkat kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD/RPD;
2. Tingkat kesesuaian antara RENJA dengan RKPD;
3. Tingkat kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD/RPD;
4. Tingkat kesesuaian antara APBD dengan RKPD;
5. Tingkat capaian program prioritas;
6. Hasil penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/Kota (penilaian terhadap dokumen); dan
7. Hasil penilaian PPD Provinsi (proporsi indikator provinsi di atas rata-rata nasional).

Dari kriteria tersebut tampak bahwa kinerja perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada tahap penyusunan dokumen. Kinerja perencanaan juga termasuk memastikan bahwa program/kegiatan yang telah direncanakan memperoleh alokasi

anggaran yang sesuai untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Sementara itu, aspek PPD merupakan hasil penilaian dari Penghargaan Pembangunan Daerah. Nilai yang digunakan adalah hasil PPD baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Hasil penilaian PPD Kabupaten/Kota memberi gambaran mengenai kinerja Pemerintah Provinsi dalam melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sementara untuk hasil penilaian PPD Provinsi menggunakan hasil penilaian dari Pemerintah Pusat. Ketujuh kriteria penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) tersebut memiliki bobot atau faktor penentu masing-masing yang akan mempengaruhi nilai akhir dari indeks.

Tahun 2024 ditargetkan nilai IPPD mencapai 92,00. Pada akhir tahun 2024, dilakukan perhitungan IPPD dengan nilai akhir 98,80. Nilai ini menunjukkan capaian kinerja tujuan adalah mencapai 107,39% (realisasi kinerja sangat tinggi). Nilai indeks ini menggambarkan bahwa terdapat sinkronisasi yang baik pada dokumen perencanaan dan penganggaran, terutama untuk penganggaran program-program prioritas. Kualitas perencanaan pembangunan provinsi juga tergambar dari hasil/nilai PPD yang menunjukkan beberapa aspek penentu kualitas dokumen perencanaan pembangunan provinsi sudah berada di atas rata-rata nasional.

Pencapaian sasaran strategis pertama merupakan turunan atau upaya penjabaran dari tujuan pertama. Dengan mekanisme penjelasan yang berbeda, bahwa tujuan pertama dapat dicapai melalui pencapaian sasaran pertama. Sasaran pertama ini akan diukur tingkat kesuksesannya melalui tiga indikator, yakni:

1. Tingkat/persentase konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

2. Tingkat/persentase konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Dokumen Rencana Pembangunan Provinsi
3. Persentase Program Prioritas pembangunan yang Mencapai target

Indikator pertama akan menunjukkan apakah dokumen perencanaan pembangunan telah sepenuhnya dijadikan rujukan atau digunakan oleh perangkat daerah dalam merencanakan kinerjanya. Idealnya, kondisi ini harus terpenuhi untuk memastikan Pembangunan berjalan ke arah yang telah ditetapkan, yakni menuju pencapaian visi Pembangunan daerah. Sementara itu, indikator kedua akan mengukur sinkronisasi antara Perencanaan pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota. Adanya indikator ini akan mendorong perencana di Bappeda Provinsi untuk memastikan visi, misi, target utama, dan program-program prioritas pembangunan provinsi menjadi rujukan serta memperoleh dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Indikator ketiga merupakan upaya mengukur capaian program-program utama yang memiliki daya ungkit besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Masing-masing indikator memiliki komponen atau aspek perhitungan yang lebih detail. Masing-masing komponen tersebut diberikan nilai signifikansi yang berbeda. Secara garis besar aspek-aspek dalam ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Aspek dalam perhitungan indikator kinerja Sasaran Pertama

Indikator	Aspek perhitungan	Bobot
Tingkat/persentase konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	1. Kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD/RPD (Target tujuan, sasaran, program)	30
	2. Kesesuaian antara RKPD dengan RENJA (Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja)	30

Indikator	Aspek perhitungan	Bobot
	3. Kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD/RPD (Jumlah program dan indikator)	20
	4. Kesesuaian antara tujuan RENSTRA PD dengan sasaran RPJMD/RPD (Jumlah sasaran)	20
Tingkat/persentase konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Dokumen Rencana Pembangunan Provinsi	Persentase rekomendasi hasil fasilitasi dokumen rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	50
	Persentase kabupaten/Kota yang prioritas pembangunannya selaras dengan Provinsi	25
	Persentase Indikator sasaran provinsi yang mendapat dukungan program dari kabupaten/kota	25
Persentase Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target	Persentase Indikator Program Prioritas yang mencapai target	-

Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.4 capaian kinerja sasaran strategis pertama menunjukkan kinerja yang baik. Realisasi pada awal periode perencanaan jangka menengah telah melampaui target yang ditetapkan. Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja sasaran pertama ini antara lain:

- Tersedianya aplikasi SIPD yang berperan dalam membantu proses kendali keselarasan antara DOKRENBANGDA dan DOKREN Perangkat Daerah, keselarasan antar penjenjangan kinerja, bahkan keselarasan/sinkronisasi pada proses perencanaan dan penganggaran;
- Ketelitian dalam proses perencanaan, terutama dalam proses analisis rencana kegiatan serta sub kegiatan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah;
- Adanya atensi dari KPK terhadap melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), di mana upaya pencegahan korupsi dilakukan sejak tahap perencanaan. Selain itu, MCP juga menekankan kepatuhan dan transparansi dalam tata kelola

pemerintahan, termasuk proses perencanaan dan penganggaran;

- Meningkatnya kualitas proses pembahasan dan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah serta proses verifikasi anggaran perangkat daerah dengan mengacu pada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Koordinasi dan komunikasi yang baik serta efektif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- Adanya proses Review APIP dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Sasaran strategis kedua dari kinerja Bappeda Kaltim berkaitan dengan aspek akuntabilitas dan layanan publik yang diberikan Bappeda kepada berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja. Terdapat dua indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan sasaran kedua ini, yakni Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) perangkat daerah dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah. Sebagaimana tersaji dalam tabel 2.4 kedua indikator di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis kedua berada pada kategori "Sangat Tinggi". Capaian ini memberikan gambaran bahwa Bappeda Kaltim memberikan pelayanan yang baik sesuai tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas tersebut pun, Bappeda Kaltim telah menerapkan prinsip akuntabel. Nilai AKIP tahun 2025 (penilaian tahun 2024) masuk dalam kategori A dengan nilai 80,95.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun

2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas & Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok, yaitu Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, di mana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, fungsi BAPPEDA yakni melaksanakan:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
- b) perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan.
- c) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan;
- d) pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.
- f) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j) pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- k) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- 1) pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Beberapa tantangan ataupun permasalahan yang masih dihadapi oleh Bappeda Kaltim dalam pelaksanaan tugas menjalankan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan antara lain:

- 1) Penguatan hasil evaluasi pembangunan daerah sebagai fondasi dalam penyusunan penyusunan rencana kerja hingga alokasi anggaran yang dibutuhkan pada tahun bersangkutan maupun periode maju (n+1);
- 2) Penguatan koordinasi dengan pihak legislatif dalam upaya pencapaian target pembangunan daerah;
- 3) Pemanfaatan data secara lebih mendalam untuk menemukenali permasalahan pembangunan dan merumuskan strategi penyelesaian masalah secara efektif dan tepat sasaran;
- 4) Pengumpulan dan kalkulasi data kinerja internal yang cukup kompleks, belum terintegrasi, dan belum memiliki mekanisme baku
- 5) Peningkatan implementasi prinsip akuntabel dalam pelaksanaan tugas organisasi, baik pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga implementasi SAKIP.

Beberapa isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian organisasi dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan. Isu-isu tersebut antara lain:

1. Peran Bappeda dalam merespon serta bersikap adaptif dalam menghadapi dinamika pembangunan baik nasional maupun internasional
2. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas secara proses dan membawa hasil yang berdampak

3. Peran strategis Bappeda dalam mewujudkan Kaltim sebagai mitra IKN terutama terkait perwujudan superhub ekonomi
4. Pembinaan jabatan fungsional perencana
5. Penggunaan teknologi dan penciptaan inovasi dalam rangka pemecahan masalah dan melahirkan mekanisme kerja yang semakin efektif

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Dokumen RKPD 2026 dan hasil analisa terhadap kebutuhan organisasi untuk pelaksanaan tugas tahun 2026, seperti yang tercantum dalam tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	<i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i>	85 Indeks	46.996.999.661	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	<i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i>	85 Indeks	42.908.920.945
			<i>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</i>	100%				<i>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</i>	100%	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu</i>	99%	800.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang ditetapkan tepat waktu</i>	99%	577.000.000
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	410.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	321.562.000
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	54.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	16.000.000
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	34.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	24.999.500
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	128.340.000
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	152.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.126.000
5.01.01.1.01.0011	-	-	-	-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	5 Dokumen	35.972.500

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	33.037.194.944	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	33.043.444.944
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	151 Orang/Bulan	31.904.444.944	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	151 Orang/Bulan	31.904.444.944
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.098.044.758	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.129.094.800
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9.873.696	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	-	-
5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.966.252	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	9.937.034	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	9.905.200
5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	9.928.260	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	155.441.520	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	71.500.160
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.070.380	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.806.040

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	57.190.380	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.296.040
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	73.150.380	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	28.148.040
5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.030.380	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.250.040
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	1.166.813.900	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	100%	651.202.160
5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	109.368.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	109.536.000
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	46.006.380	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	43.850.040
5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	48.310.380	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.840.040
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	47.950.380	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	35.636.040
5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	22.510.380	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	13.440.040

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	133 orang	892.668.380	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 orang	417.900.000
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	99%	2.731.306.251	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	99%	1.672.670.765
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	143.373.965	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	143.959.947
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	219.689.570	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	140.195.605
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.627.445	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.582.170
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	399.997.210	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	288.036.473
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	175.961.951	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	105.974.910
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.310.380	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.135.040
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.007.590	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.204.540
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.452.310.380	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	800.640.040
5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	107.992.380	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	85.942.040

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	124.035.380	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-
5.01.01.1.07	Pengadaaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen hasil Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.125.027.496	Pengadaaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen hasil Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	857.448.603
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	28.775.120	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	356.141.996	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	37.526.003
5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	36.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.654.110.380	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	819.922.600
5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	4.130.238.380	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	3.851.488.415
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.310.380	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.240.040
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.514.928.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.119.329.640

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.600.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.716.918.735
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	98%	2.850.911.170	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	98%	2.184.165.898
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	64.998.070	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	65.656.000
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	862.997.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	600.036.294
5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	27 Unit	19.000.000	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	18.740.040
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149 Unit	143.990.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit	155.301.900
5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	106.237.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	14 Unit	109.320.100
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.243.354.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	998.763.564
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	129 Unit	410.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71 Unit	236.348.000

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	100%	8.636.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Tingkat Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	4.256.000.000
		Provinsi dan Luar Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100%			Provinsi dan Luar Daerah	Tingkat Keselarasan RKPD dengan RKP	100%	
		Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100%						
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	2 Dokumen	4.214.976.948	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	2 Dokumen	2.128.558.000
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Samarinda	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	223.074.055	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Samarinda	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	100.000.000
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Samarinda	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	755.061.820	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Samarinda	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	329.581.000
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	3.236.841.073	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1.698.977.000
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	125 Data dan Informasi	1.179.461.186	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	125 Data	706.000.000
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk penyusunan Kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	3 Dokumen	436.357.540	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk penyusunan Kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	3 Dokumen	400.000.000

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	414.975.900	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	125.000.000
5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	232.575.500	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	125.000.000
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	95.552.346	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	56.000.000
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	2 Dokumen	3.241.561.866	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3 Dokumen	1.421.442.000
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	640.000.760	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	350.000.000
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	1.770.999.562	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	650.000.000
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	2 Dokumen	830.561.544	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	20 Dokumen	421.442.000

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100%	17.334.598.339	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Tingkat Keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	100%	6.586.317.055
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100%	4.005.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	2.569.783.574
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	500.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	290.000.000
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	500.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	290.000.000
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	500.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	290.000.000

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	500.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	11 Laporan	290.000.000
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	500.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	317.622.340
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	500.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 Laporan	375.000.000
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	500.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 Laporan	286.631.996
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	505.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	16 Laporan	430.529.238

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD)	100%	10.229.598.339	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	2.640.533.481
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	346.078.047	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	460.283.476
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	287.709.760	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	185.152.000
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10 Laporan	365.746.611	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	153.719.058
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	716.517.582	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10 Laporan	499.028.947

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	295.828.462	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	280.908.324
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	101.007.308	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	95.154.644
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	871.549.250	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	100.893.169
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	7.245.161.319	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	865.393.863
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100%	3.100.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100%	1.376.000.000
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	1.478.955.696	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	423.511.803

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	412.878.646	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	213.860.928
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	730.801.613	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	494.138.978
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	477.364.045	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	244.488.291

Hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur disandingkan terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dilakukan terhadap konsistensi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan Sub Kegiatan baru yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD. Sub kegiatan ini ditambahkan untuk mengakomodir pelaksanaan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Bappeda, Penyusunan/reviu proses bisnis Bappeda, penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), dokumen tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Bappeda serta reviu atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bappeda;
2. Selain melakukan penambahan Sub Kegiatan baru, juga terdapat beberapa Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektifitas untuk menunjang capaian kinerja kegiatan. Beberapa Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - c. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - d. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - e. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - f. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - g. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Pulau Kalimantan mengusung Tema “*Superhub* Ekonomi Nusantara” dengan tema spesifik untuk Provinsi Kalimantan Timur yaitu “Penggerak Utama Ekonomi Kawasan Timur Indonesia” dengan beberapa *highlight* arah kebijakan/indikasi intervensi antara lain:

a. Transformasi Sosial

1. Penuntasan *stunting* dan percepatan eliminasi malaria khususnya di kab/kota dengan kasus tertinggi;
2. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya;
3. Percepatan peningkatan partisipasi pendidik dan pengembangan perguruan tinggi eksisting yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

b. Transformasi Ekonomi

1. Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui
 - (i) hilirisasi komoditi unggulan (kelapa sawit, batu bara,

migas dan hasil hutan), dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan seperti industri *oleochemicals*, *petrochemicals*, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi;

2. Pengembangan basis-basis sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati dan energi terbarukan;
3. Pengembangan bandara utama (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang di Balikpapan) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah;
4. Pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan trans kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Kalimantan Timur;
5. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Samarinda dan Balikpapan; Pengembangan pembangkit listrik hidro, sistem penyimpanan energi, interkoneksi Sistem Kalimantan 150kV serta sistem terisolasi (*isolated grid*).

c. Transformasi Tata Kelola

1. Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
2. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perisinan berbasis digital.

d. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas

nasional, serta perluasan pemanfaatan pembiayaan alternatif seperti dana jasa ekosistem dan pasar karbon;

2. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.

e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi

1. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat;
2. Pengembangan diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal;
3. Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim di Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kota Balikpapan;
4. Pengembangan irigasi di WS Mahakam untuk mendukung ketahanan pangan;
5. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.

Adapun arah kebijakan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2026 berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029, dengan tema RKPD tahun 2026 adalah :

“Pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, serta ekonomi produktif dan inklusif sebagai fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renja tahun 2026 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 seperti tersaji pada pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026
1	2	3	4
A.	Tujuan 1: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam mendukung peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	91,40
1.	Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas substansi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah	Tingkat Pencapaian Target Pembangunan Daerah (%)	82,50
2.	Sasaran 1.2 : Meningkatnya akuntabilitas, tata kelola, dan profesionalisme perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai)	83,50
		Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah (Indeks)	87,00

Berdasarkan Tabel 3.1 yang menjabarkan rumusan tujuan, sasaran dan target kinerja Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang kemudian dijabarkan dalam pelaksanaan 3 Program, 14 Kegiatan dan 70 Sub Kegiatan. Rincian rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 beserta prakiraan maju tahun 2027, tersaji dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				53.751.238.000			47.078.815.000
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Samarinda	85 Indeks	42.908.920.945		97,6 Indeks	40.233.815.000
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		100%			100%	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	Provinsi dan Luar Daerah	100%	577.000.000		100%	675.000.000
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	321.562.000		2 Dokumen	350.000.000
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	16.000.000		2 Dokumen	25.000.000
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	24.999.500		2 Dokumen	35.000.000
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	128.340.000		1 Laporan	95.000.000
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	50.126.000		1 Laporan	95.000.000
5.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Provinsi dan Luar Daerah	5 Dokumen	35.972.500		3 Dokumen	75.000.000
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	Provinsi dan Luar Daerah	100%	33.043.444.944		100%	30.734.523.562
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	151 Orang/ Bulan	31.904.444.944		155 Orang/ Bulan	29.724.523.562
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi dan Luar Daerah	1 Dokumen	1.129.094.800		1 Dokumen	1.000.000.000
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Samarinda	18 Laporan	9.905.200		5 Laporan	10.000.000
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi dan Luar Daerah	7 Dokumen	71.500.160		7 Dokumen	71.550.000
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	1 Dokumen	7.806.040		1 Dokumen	7.800.000

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1 .03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	1 Dokumen	25.296.040		1 Dokumen	25.300.000
5.01.01.1 .03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	28.148.040		1 Laporan	28.200.000
5.01.01.1 .03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	4 Laporan	10.250.040		4 Laporan	10.250.000
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Provinsi dan Luar Daerah	100%	651.202.160		100%	473.088.564
5.01.01.1 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Samarinda	1 Paket	109.536.000		-	-
5.01.01.1 .05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	1 Dokumen	43.850.040		1 Dokumen	43.000.000
5.01.01.1 .05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi dan Luar Daerah	1 Dokumen	30.840.040		1 Dokumen	31.000.000
5.01.01.1 .05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi dan Luar Daerah	1 Dokumen	35.636.040		1 Dokumen	35.638.584
5.01.01.1 .05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	13.440.040		1 Laporan	13.450.000
5.01.01.1 .05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi dan Luar Daerah	41 Orang	417.900.000		146 orang	350.000.000
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	Provinsi dan Luar Daerah	99%	1.672.670.765		100%	1.735.368.574
5.01.01.1 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	3 Paket	143.959.947		9 Paket	101.087.407
5.01.01.1 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	5 Paket	140.195.605		6 Paket	140.000.000
5.01.01.1 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	7.582.170		2 Paket	7.601.785
5.01.01.1 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Samarinda	4 Paket	288.036.473		5 Paket	200.000.000
5.01.01.1 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	2 Paket	105.974.910		7 Paket	176.056.353
5.01.01.1 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Samarinda	1 Dokumen	60.135.040		1 Dokumen	60.310.380
5.01.01.1 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	1 Laporan	40.204.540		1 Laporan	40.312.649
5.01.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	800.640.040		1 Laporan	925.000.000
5.01.01.1 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	1 Dokumen	85.942.040		1 Dokumen	85.000.000
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	1 Dokumen	857.448.603		1 Dokumen	1.104.000.000

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	3 Unit	37.526.003		1 Unit	284.000.000
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Samarinda	1 Unit	819.922.600		1 Unit	820.000.000
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Samarinda	100%	3.851.488.415		100%	3.855.312.080
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	1 Laporan	15.240.040		1 Laporan	15.312.080
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	1 Laporan	1.119.329.640		1 Laporan	1.120.000.000
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Laporan	2.716.918.735		1 Laporan	2.720.000.000
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Samarinda	98%	2.184.165.898		100%	1.584.972.200
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	2 Unit	65.656.000		2 Unit	65.661.820
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	19 Unit	600.036.294		36 Unit	600.000.000
5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Samarinda	10 Unit	18.740.040		27 Unit	19.310.380
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	145 Unit	155.301.900		135 Unit	100.000.000
5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Samarinda	14 Unit	109.320.100		20 Unit	100.000.000
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	2 Unit	998.763.564		2 Unit	500.000.000
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	71 Unit	236.348.000		129 Unit	200.000.000
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan RPJMD dengan RKP		100%	4.256.000.000		100%	3.100.000.000
		Tingkat Keselarasan RKP dengan RKP		100%			100%	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	2.128.558.000		2 Dokumen	1.500.000.000
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Samarinda	1 Berita Acara	100.000.000		1 Berita Acara	100.000.000
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Samarinda	1 Berita Acara	329.581.000		1 Berita Acara	300.000.000

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.02.1 .01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	1.698.977.000		2 Dokumen	1.100.000.000
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Provinsi dan Luar Daerah	125 Data	706.000.000		125 Data	555.000.000
5.01.02.1 .02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk penyusunan Kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	Provinsi dan Luar Daerah	3 Dokumen	400.000.000		3 Dokumen	300.000.000
5.01.02.1 .02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Provinsi dan Luar Daerah	80 Orang	125.000.000		100 Orang	100.000.000
5.01.02.1 .02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	40 Orang	125.000.000		100 Orang	100.000.000
5.01.02.1 .02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Provinsi dan Luar Daerah	1 Buku	56.000.000		1 Buku	55.000.000
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	3 Dokumen	1.421.442.000		3 Dokumen	1.045.000.000
5.01.02.1 .03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Provinsi dan Luar Daerah	5 Laporan	350.000.000		5 Laporan	250.000.000
5.01.02.1 .03.0003	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	3 Laporan	650.000.000		3 Laporan	500.000.000
5.01.02.1 .03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Provinsi dan Luar Daerah	20 Dokumen	421.442.000		20 Dokumen	295.000.000
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah		100%	6.586.317.055		100%	3.745.000.000
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	100%	2.569.783.574		100%	1.400.000.000
5.01.03.1 .01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	290.000.000		2 Dokumen	226.047.931

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1 .01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	10 Laporan	290.000.000		10 Laporan	146.340.988
5.01.03.1 .01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	10 Laporan	290.000.000		10 Laporan	165.591.687
5.01.03.1 .01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	11 Laporan	290.000.000		11 Laporan	251.993.341
5.01.03.1 .01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	317.622.340		2 Dokumen	102.774.299
5.01.03.1 .01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	14 Laporan	375.000.000		14 Laporan	161.882.839
5.01.03.1 .01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	14 Laporan	286.631.996		14 Laporan	108.561.185
5.01.03.1 .01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	16 Laporan	430.529.238		16 Laporan	236.807.729
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Provinsi dan Luar Daerah	100%	2.640.533.481		100%	1.600.000.000
5.01.03.1 .02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	460.283.476		2 Dokumen	96.114.407
5.01.03.1 .02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	9 Laporan	185.152.000		9 Laporan	49.175.171
5.01.03.1 .02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	9 Laporan	153.719.058		9 Laporan	44.171.631

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	10 Laporan	499.028.947		10 Laporan	123.408.471
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	280.908.324		2 Dokumen	82.670.791
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	3 Laporan	95.154.644		3 Laporan	38.008.533
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	5 Laporan	100.893.169		5 Laporan	105.504.037
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	4 Laporan	865.393.863		4 Laporan	1.060.946.958
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Provinsi dan Luar Daerah	100%	1.376.000.000		100%	745.000.000
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	423.511.803		2 Dokumen	224.556.109
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	213.860.928		2 Laporan	52.603.664
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	494.138.978		2 Laporan	318.069.236
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	244.488.291		2 Laporan	149.770.991

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan, sasaran dan prioritas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Memperhatikan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tidak secara langsung mendukung Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud, Bappeda berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan pada tingkat nasional dan daerah yang dituangkan pada kebijakan pembangunan dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Bappeda memiliki tugas untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD dan dijabarkan dalam Renja serta konsistensi dalam perumusan penganggaran. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh perangkat

daerah akan mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun prioritas pembangunan yang dirumuskan oleh perangkat daerah untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi adalah mewujudkan target prioritas pembangunan daerah dan meningkatkan konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.

Pada tahun anggaran 2026, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur merencanakan pelaksanaan sebanyak 3 program, 14 kegiatan dan 70 sub kegiatan dengan total rencana pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp53.751.238.000 dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
05.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				53.751.238.000
05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i>		85 Indeks	42.908.920.945
		<i>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</i>		100%	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang ditetapkan tepat waktu	Provinsi dan Luar Daerah	100%	577.000.000
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	321.562.000
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	16.200.000
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	24.999.500
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	128.340.000
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	50.126.000

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Provinsi dan Luar Daerah	5 Dokumen	35.972.500
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	Provinsi dan Luar Daerah	100%	33.043.444.944
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	151 Orang/ Bulan	31.904.444.944
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi dan Luar Daerah	1 Dokumen	1.129.094.800
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	18 Laporan	9.905.200
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi dan Luar Daerah	7 Dokumen	71.500.160
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	1 Dokumen	7.806.040
5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	1 Dokumen	25.296.040
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	28.148.040
5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	4 Laporan	10.250.040
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	Provinsi dan Luar Daerah	100%	651.200.160
5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Samarinda	1 Paket	109.536.000

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	1 Dokumen	43.850.040
5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi dan Luar Daerah	1 Dokumen	30.840.040
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi dan Luar Daerah	1 Dokumen	35.636.040
5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	13.440.040
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi dan Luar Daerah	41 Orang	417.900.000
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	Provinsi dan Luar Daerah	99%	1.672.670.765
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	3 Paket	143.959.947
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	5 Paket	140.195.605
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	7.582.170
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Samarinda	4 Paket	288.036.473
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	2 Paket	105.974.910
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Samarinda	1 Dokumen	60.135.040
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	1 Laporan	40.204.540
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	800.640.040
5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	1 Dokumen	85.940.040

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.07	Pengadaaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	1 Dokumen	857.448.603
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	3 Unit	37.526.003
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Samarinda	1 Unit	819.922.600
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Samarinda	100%	3.851.488.415
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	1 Laporan	15.240.040
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	1 Laporan	1.119.329.640
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Laporan	2.716.918.735
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Samarinda	98%	2.184.165.898
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	2 Unit	65.656.800
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	19 Unit	600.036.294
5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Samarinda	10 Unit	18.740.040
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	145 Unit	155.301.900
5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Samarinda	14 Unit	109.320.100

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	2 Unit	998.763.564
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	71 Unit	236.348.000
05.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan RPJMD dengan RKPD		100%	4.256.000.000
		Tingkat Keselarasan RKPD dengan RKP		100%	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	2.128.558.000
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Samarinda	1 Berita Acara	100.000.000
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Samarinda	1 Berita Acara	329.581.000
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	1.698.977.000
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Provinsi dan Luar Daerah	125 Data	706.000.000
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analaisis Data untuk penyusunan Kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencaan pembangunan daerah)	Provinsi dan Luar Daerah	3 Dokumen	400.000.000
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Provinsi dan Luar Daerah	80 Orang	125.000.000

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	40 Orang	125.000.000
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Provinsi dan Luar Daerah	1 Buku	56.000.000
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	3 Dokumen	1.421.442.000
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Provinsi dan Luar Daerah	5 Laporan	350.000.000
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	3 Laporan	650.000.000
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Provinsi dan Luar Daerah	20 Dokumen	421.442.000
05.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah		100%	6.586.317.055
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	100%	2.569.783.574
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	290.000.000

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	10 Laporan	290.000.000
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	10 Laporan	290.000.000
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	11 Laporan	290.000.000
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	317.622.340
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	14 Laporan	375.000.000
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	14 Laporan	286.631.996
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	16 Laporan	430.529.238

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Provinsi dan Luar Daerah	100%	2.640.533.481
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	460.283.476
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	9 Laporan	185.152.000
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	9 Laporan	153.719.058
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	10 Laporan	499.028.947
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	280.908.324
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	3 Laporan	95.154.644

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	5 Laporan	100.893.169
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	4 Laporan	865.393.863
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Provinsi dan Luar Daerah	100%	1.376.000.000
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	2 Dokumen	423.511.803
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	213.860.928
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	494.138.978
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	244.488.291

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Pada periode Renja ini, penyusunannya simultan dan saling berkoordinasi dengan proses penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 akan menjadi acuan serta dasar dalam operasional tugas urusan perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Secara garis besar, target kinerja Bappeda tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Target 2026
1	2	3	4
A.	Tujuan 1: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam mendukung peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	91,40
1.	Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas substansi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah	Tingkat Pencapaian Target Pembangunan Daerah (%)	82,50
	Program 1: Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan RPJMD dengan RKPD Tingkat Keselarasan RKPD dengan RKP	100% 100%
	Kegiatan 1.1: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	2 Dok
	Kegiatan 1.2: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	125 Data
	Kegiatan 1.3: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2 Dok
	Program 2: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan DOKRENBANGDA dengan DOKREN PD	100%
	Kegiatan 2.1: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	% keselarasan DOKRENBANGDA dengan DOKREN PD Bidang PPM	100%

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Target 2026
1	2	3	4
	Kegiatan 2.2: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	% keselarasan DOKRENBANGDA dengan DOKREN PD Bidang PSDA	100%
	Kegiatan 2.3: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan	% keselarasan DOKRENBANGDA dengan DOKREN PD Bidang Infraswil	100%
2.	Sasaran 1.2 : Meningkatnya akuntabilitas, tata kelola, dan profesionalisme perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai)	83,50
		Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah (Indeks)	87,00
	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100

Target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen ini menjadi pengarah bagi seluruh aparatur di lingkungan Bappeda Kaltim dalam melaksanakan tugasnya. Secara berjenjang, dimulai dari target sub. Output, target sub. Kegiatan, dan seterusnya, merupakan upaya dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam lingkup yang lebih luas, kinerja Bappeda merupakan salah satu bagian penting dalam pencapaian target-target pembangunan daerah.

RENJA TAHUN 2026 BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Sedangkan penyusunan program dan kegiatannya mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan lagi dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan lagi dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan pedoman kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode Tahun Anggaran 2026. Rencana Kerja Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan, dan sub kegiatan berikut dengan kerangka pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang telah disusun Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmen) Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029.

Strategi dan Arah Kebijakan pada Rencana Kerja Tahun 2026 perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan perkembangan isu nasional dan regional yang menjadi potensi peluang dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Rencana Kerja Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam mendukung tahap penyusunan KUA-PPAS dan RKA APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal. Undang-Undang ini menegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan melalui pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi pemungutan.

Dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Kemandirian Fiskal melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pendapatan, yaitu

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian peran Badan Pendapatan Daerah merupakan implementasi langsung dari amanat Undang-Undang No.1 Tahun 2022, dimana daerah memiliki peran untuk:

1. Mengelola potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara efektif
2. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan
4. Mendukung terwujudnya kemandirian fiskal daerah sebagaimana diamanatkan dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur maksud dari disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.
2. Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi serta Peranan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain – lain.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. **Menjabarkan tujuan dan sasaran strategis** Badan Pendapatan Daerah ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang rinci, terarah, realistis, dan

terukur sebagai dasar operasional pelaksanaan tugas serta pencapaian target pembangunan daerah.

2. **Menyediakan acuan resmi dan terintegrasi** bagi seluruh jajaran aparatur dalam menyusun langkah-langkah kerja, menetapkan skala prioritas, serta mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien dengan dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi Kalimantan Timur.
3. **Menetapkan tolok ukur yang obyektif** dalam pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja sehingga capaian kinerja dapat diukur secara transparan dan akuntabel.
4. **Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)** melalui pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil, efisiensi anggaran, dan kepuasan publik, guna memperkuat legitimasi kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
5. **Memastikan sinergi antara perencanaan teknokratik dan aspiratif** dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga setiap program kerja dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Rencana Kerja ini diawali dari:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2. 3. Isu -Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan konstribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indiktator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024. IKU tersebut dirancang untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024.

Fokus utama dari kebijakan tersebut adalah pada **Optimalisasi Pendapatan Daerah**, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal, memperluas basis penerimaan, serta memperkuat tata kelola penerimaan daerah secara akuntabel dan berkelanjutan.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja merupakan hasil pengukuran antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya. Proses ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun penyebab kegagalan dalam pelaksanaan suatu program dan kegiatan.

Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana target kinerja telah tercapai dibandingkan dengan realisasi aktual, serta untuk mengidentifikasi kemajuan yang diperoleh maupun kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Secara umum, capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui komitmen antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Gubernur Kalimantan Timur, dapat dijelaskan sebagai berikut: melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rupiah	9.510.000.000.000,00	10.222.220.308.579,00	107,49%
2		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	100,00	107,49	107,49%
3	Meningkatnya Layanan Publik Perangkat Daerah	Indekss Kepuasan Masyarakat	Indekss	>86.80	88,38	101,82%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,5	80,5	102,55%

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut tidak lepas dari pencapaian sasaran Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rumusan sesuai dengan Pergub. No. 77 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yaitu : Direncanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan dengan menggunakan Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dilaksanakan oleh Bidang Pajak Daerah dengan menggunakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Bidang Bukan Pajak Daerah dengan menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah serta dibantu oleh UPTD se Kaltim dengan menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dikendalikan dan dievaluasi oleh Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dengan menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pencapaian Program dan Kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan Daerah				227.298.877.840,00		197.925.925.642,00	109,72	87,08
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan Kesekretariatan	Indeks	75,00	212.501.427.140,00	75,54	188.019.138.130,00	101	88,48
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	Persen	100,00		105,87		105,87	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	731.337.500,00	100,00	396.329.090,00	100	54,19
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	220.000.000,00	2,00	121.892.586,00	100	55,41
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	128.645.000,00	2,00	52.333.858,00	100	40,68
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen DPA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	17.545.000,00	2,00	16.020.075,00	100	91,31
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Laporan	14,00	258.710.000,00	14,00	161.467.581,00	100	62,41
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2,00	106.437.500,00	2,00	44.614.990,00	100	41,92
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	164.640.035.370,00	87,62	149.516.386.796,00	110	90,81

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	309,00	163.896.995.870,00	309,00	148.938.349.519,00	100	90,87
5.02.01.1.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	415,00		415,00	313.920.000,00	100	90,80
5.02.01.1.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Laporan	1,00	62.496.000,00	1,00	41.910.700,00	100	67,06
5.02.01.1.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Laporan	19,00	334.823.500,00	19,00	222.206.577,00	100	66,37
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	303.680.000,00	100,00	271.605.035,00	100	89,44
5.02.01.1.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH	Dokumen	10,00	174.680.000,00	10,00	152.725.191,00	100	87,43
5.02.01.1.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Laporan	36,00	129.000.000,00	36,00	118.879.844,00	100	92,15
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan	Dokumen	7,00	1.614.168.500,00	7,00	754.785.718,00	100	46,76

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		penyebarluasan retribusi daerah							
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan retribusi daerah	Dokumen	3,00		3,00		100	
		Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	M	1.019,00		1.078,00		106	
5.02.01.1.04.00 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2,00	318.092.500,00	2,00	84.204.821,00	100	26,47
5.02.01.1.04.00 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	142.572.000,00	1,00	92.112.398,00	100	64,61
5.02.01.1.04.00 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	4,00	361.880.000,00	4,00	135.364.305,00	100	37,41
5.02.01.1.04.00 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	3,00	307.264.000,00	3,00	185.745.580,00	100	60,45
5.02.01.1.04.00 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	3,00	301.304.000,00	3,00	174.724.414,00	100	57,99
5.02.01.1.04.00 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4,00	183.056.000,00	4,00	82.634.200,00	100	45,14
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	1.966.753.350,00	85,00	1.276.905.632,00	85	64,92
5.02.01.1.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	563.338.050,00	3,00	394.050.000,00	100	69,95

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10,00	306.000.000,00	10,00	281.844.372,00	100	92,11
5.02.01.1.05.00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	10,00	192.000.000,00	10,00	123.210.400,00	100	64,17
5.02.01.1.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	70,00	545.415.300,00	41,00	353.595.460,00	59	64,83
5.02.01.1.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70,00	360.000.000,00	79,00	124.205.400,00	113	34,50
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	6.709.642.491,00	100,00	4.273.769.781,00	100	63,70
5.02.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	297.017.435,00	1,00	236.453.000,00	100	79,61
5.02.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	1.062.010.410,00	4,00	781.632.750,00	100	73,60
5.02.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	2.345.062.046,00	2,00	976.500.000,00	100	41,64
5.02.01.1.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72,00	19.392.000,00	72,00	13.464.000,00	100	69,43
5.02.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	63,00	2.736.010.600,00	99,00	2.265.720.031,00	157,14	82,81

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	250.150.000,00	2,00	0,00	100	0,00
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	12.803.075.117,00	100,00	11.588.594.504,00	100	90,51
5.02.01.1.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2,00	68.062.000,00	2,00	57.340.000,00	100	84,25
5.02.01.1.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2,00	137.988.500,00	1,00	134.250.000,00	50	97,29
5.02.01.1.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	197,00	6.627.313.491,00	183,00	6.193.452.500,00	92,89	93,45
5.02.01.1.07.00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	5.307.462.806,00	1,00	4.588.156.604,00	50	86,45
5.02.01.1.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6,00	662.248.320,00	6,00	615.395.400,00	100	92,93
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	21.887.408.612,00	100,00	18.861.395.586,00	100	86,17
5.02.01.1.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	12.727.200,00	12,00	7.000.000,00	100	55,00
5.02.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	1.836.699.468,00	12,00	1.322.462.816,00	100	72,00
5.02.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4,00	20.037.981.944,00	4,00	17.531.932.770,00	100	87,49

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	1.845.326.200,00	0,00	1.335.059.067,00	0	72,35
5.02.01.1.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17,00	415.469.000,00	17,00	225.302.119,00	100	54,23
5.02.01.1.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150,00	579.857.200,00	75,00	376.045.080,00	50	64,85
5.02.01.1.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	850.000.000,00	3,00	733.711.868,00	100	86,32
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Persen	100,00	1.190.928.000,00	91,90	752.520.103,00	92	63,19
		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Persen	100,00		106,04		106	
		Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Persen	100,00		72,20		72	
		Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Persen	100,00		285,92		286	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	MilyarRpiah	244,44	456.330.000,00	237,70	220.619.395,00	97	48,35
		Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	MilyarRpiah	951,31		334,85		35	
		Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	MilyarRpiah	13,86		145,88		1,052.00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.02.1.03.00 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	4,00	456.330.000,00	4,00	248.439.455,00	100	54,44
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	TriliunRp piah	7,05	734.598.000,00	11,70	531.900.708,00	166	72,41
5.02.02.1.05.00 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	4,00	734.598.000,00	4,00	531.900.708,00	100	72,41
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	13.606.522.700,00	100,00	9.028.654.530,00	100	66,36
		Persentase tercapainya target Pajak Daerah	Persen	100,00		99,75		99,75	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah	Dokumen	22,00	13.606.522.700,00	22,00	9.028.654.530,00	100	66,36
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah	Dokumen	3,00		3,00		100	
		Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Predikat	2,00		2,00		100	
		Jumlah realisasi Pajak Daerah	TriliunRp piah	8,30		8,57		103	
		Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	Aplikasi	2,00		2,00		100	
5.02.04.1.01.00 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2,00	1.052.958.000,00	2,00	160.588.083,00	100	15,25

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.04.1.01.00 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2,00	315.270.000,00	2,00	186.500.096,00	100	59,16
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	1,00		1,00		100	
5.02.04.1.01.00 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	9,00	398.004.000,00	9,00	148.115.507,00	100	37,21
5.02.04.1.01.00 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	13,00	1.357.175.000,00	13,00	751.845.462,00	100	55,40
5.02.04.1.01.00 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen Ketetapan	3,00	488.562.000,00	3,00	272.480.861,00	100	55,77
5.02.04.1.01.00 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	2,00	8.470.085.700,00	2,00	6.572.284.047,00	100	77,59
5.02.04.1.01.00 09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	4,00	271.680.000,00	4,00	178.899.396,00	100	65,85
5.02.04.1.01.00 11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen SuratPersetujuan/ Penolakan	4,00	163.200.000,00	4,00	108.389.600,00	100	66,42
5.02.04.1.01.00 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	9,00	414.480.000,00	9,00	185.113.337,00	100	44,66
5.02.04.1.01.00 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	3,00	240.608.000,00	3,00	172.502.660,00	100	71,69

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	20,00	434.500.000,00	20,00	291.935.481,00	100	67,19
5.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda				10.169.756.242,00		9.781.065.534,00	93,26	96,18
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indekss kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	Indeks	75,00	9.229.958.242,00	92,93	9.042.138.204,00	124	97,97
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)	Persen	100,00		105,87		105,87	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	45.600.000,00	100,00	45.474.800,00	100	99,73
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	45.600.000,00	2,00	45.474.800,00	100	99,73
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	85,00	108.840.000,00	95,47	108.840.000,00	112	100,00
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	95,00	108.840.000,00	95,00	108.840.000,00	100	100,00
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	MilyarRupiah	1.019,00	49.056.000,00	1.078,00	46.413.612,00	106	94,61
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	12.600.000,00	1,00	11.886.864,00	100	94,34
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	18.144.000,00	4,00	16.223.348,00	100	89,41

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.04.00 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	18.312.000,00	12,00	18.303.400,00	100	99,95
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	44.961.960,00	100,00	42.233.305,00	100	93,93
5.02.01.1.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6,00	44.961.960,00	6,00	42.233.305,00	100	93,93
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	847.621.844,00	100,00	840.044.841,00	100	99,11
5.02.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	15.000.000,00	1,00	14.857.000,00	100	99,05
5.02.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	457.764.964,00	1,00	453.936.800,00	100	99,16
5.02.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	57.755.680,00	1,00	54.444.300,00	100	94,27
5.02.01.1.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	1.939.200,00	12,00	1.860.000,00	100	95,92
5.02.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	10,00	315.162.000,00	10,00	314.946.741,00	100	99,93
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	653.268.774,00	100,00	640.614.000,00	100	98,06
5.02.01.1.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	458.870.201,00	1,00	448.864.000,00	100	97,82

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19,00	194.398.573,00	19,00	191.750.000,00	100	98,64
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	6.906.731.064,00	100,00	6.833.072.810,00	100	98,93
5.02.01.1.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	100	100,00
5.02.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	1.132.357.984,00	12,00	1.069.436.590,00	100	94,44
5.02.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	5.769.373.080,00	5,00	5.758.636.220,00	100	99,81
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	573.878.600,00	100,00	485.444.836,00	100	84,59
5.02.01.1.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12,00	194.960.600,00	12,00	194.904.836,00	100	99,97
5.02.01.1.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10,00	121.846.000,00	10,00	121.610.000,00	100	99,81
5.02.01.1.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	257.072.000,00	1,00	168.930.000,00	100	65,71

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	Persen	100,00	939.798.000,00	100,00	920.687.330,00	100	97,97
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	Persen	100,00		97,95		97,95	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	Milyar Rupiah	766,54	939.798.000,00	750,85	920.687.330,00	98	97,97
		Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	Undefined	0,00		0,00		0	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	127.900.000,00	12,00	127.759.730,00	100	99,89
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	441.434.000,00	4,00	433.342.000,00	100	98,17
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	84,00	370.464.000,00	84,00	359.585.600,00	100	97,06

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan				7.854.721.470,00		6.137.209.538,00	89,02	78,08
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)	Persen	100,00	7.282.375.470,00	105,87	5.863.860.591,00	105,87	80,52
		Indekss kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	Indeks	75,00		92,58		123,44	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	15.426.000,00	100,00	4.932.400,00	100	31,97
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	15.426.000,00	2,00	4.932.400,00	100	31,97
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	100.426.000,00	78,13	100.320.000,00	97,66	99,89
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	86,00	100.426.000,00	86,00	100.320.000,00	100	99,89
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerahn	Milyar Rupiah	1.019,00	90.998.000,00	1.078,00	44.043.529,00	106	48,40
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	34.906.000,00	1,00	17.841.830,00	100	51,11

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	46.906.000,00	4,00	20.121.699,00	100	42,90
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	9.186.000,00	12,00	6.080.000,00	100	66,19
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	8.385.570,00	100,00	3.680.000,00	100	43,88
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4,00	8.385.570,00	4,00	3.680.000,00	100	43,88
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	975.410.467,00	63,33	818.414.388,00	63	83,90
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	18.808.000,00	1,00	11.315.600,00	100	60,16
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	274.785.267,00	3,00	201.963.591,00	100	73,50
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	22.668.000,00	0,00	0,00	0	0,00
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	10.549.200,00	2,00	0,00	16,67	0,00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	25,00	648.600.000,00	25,00	605.135.197,00	100	93,30
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	425.696.105,00	100,00	416.709.960,00	100	97,89

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	63.554.205,00	0,00	61.089.960,00	0	96,12
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	34,00	362.141.900,00	34,00	355.620.000,00	100	98,20
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	4.553.418.328,00	100,00	3.760.738.530,00	100	82,59
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	5.271.900,00	12,00	3.500.000,00	100	66,39
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	1.186.482.000,00	12,00	991.992.210,00	100	83,61
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	3.361.664.428,00	5,00	2.765.246.320,00	100	82,26
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	1.112.615.000,00	80,47	715.021.784,00	80,47	64,26
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15,00	576.245.000,00	12,00	221.866.954,00	80	38,50
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	114,00	124.970.000,00	70,00	102.484.550,00	61,4	82,01
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	411.400.000,00	1,00	390.670.280,00	100	94,96
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	Persen	100,00	572.346.000,00	90,61	387.764.307,00	90,61	67,75

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	Persen	100,00		100,00		100	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	Persen	100,00	572.346.000,00	90,61	387.764.307,00	90,61	67,75
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	64.406.000,00	12,00	45.784.928,00	100	71,09
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	286.920.000,00	4,00	221.058.264,00	100	77,05
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	103,00	221.020.000,00	103,00	120.921.115,00	100	54,71
	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara				10.896.041.600,00		10.024.447.422,00	100,08	92,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar)	Persen	100,00	10.159.033.600,00	105,87	9.481.538.423,00	105,87	93,33
		Indekss kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	Indeks	75,00		85,67		114,23	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	2.088.000,00	100,00	720.000,00	100	34,48
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	2.088.000,00	2,00	720.000,00	100	34,48

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	109.080.000,00	92,00	104.050.000,00	115	95,39
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	73,00	109.080.000,00	73,00	104.050.000,00	100	95,39
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Milyar Rupiah	1.019,00	76.536.000,00	1.078,00	62.924.722,00	105,79	82,22
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	28.368.000,00	1,00	24.323.900,00	100	85,74
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	19.128.000,00	4,00	15.223.391,00	100	79,59
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	29.040.000,00	12,00	23.377.431,00	100	80,50
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	38.280.000,00	100,00	33.275.847,00	100	86,93
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7,00	38.280.000,00	7,00	33.275.847,00	100	86,93
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	450.286.250,00	100,00	437.780.081,00	100	97,22
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	6.650.900,00	1,00	5.282.375,00	100	79,42
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	126.218.600,00	3,00	118.227.750,00	100	93,67

Kode	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	27.294.350,00	1,00	26.818.470,00	100	98,26
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokum en	12,00	4.258.400,00	12,00	3.600.000,00	100	84,54
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Lapora n	14,00	285.864.000,00	14,00	283.851.486,00	100	99,30
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	3.311.105.136,00	100,00	3.222.722.000,00	100	97,33
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	68.862.800,00	1,00	68.862.000,00	100	100,00
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	58,00	3.242.242.336,00	58,00	3.153.860.000,00	100	97,27
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	5.537.613.334,00	100,00	5.130.993.445,00	100	92,66
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapora n	12,00	13.215.400,00	12,00	5.055.500,00	100	38,25
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapora n	12,00	1.174.924.206,00	12,00	1.023.177.847,00	100	87,08
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	5,00	4.349.473.728,00	5,00	4.102.760.098,00	100	94,33
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	634.044.880,00	100,00	489.072.328,00	100	77,14

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15,00	432.006.200,00	15,00	371.025.448,00	100	85,88
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	129,00	91.686.680,00	65,00	45.723.380,00	50,39	49,87
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	110.352.000,00	1,00	72.323.500,00	100	65,54
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	Persen	100,00	737.008.000,00	100,00	684.592.999,00	100	92,89
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	Persen	100,00		105,72		105,72	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	Milyar Rupiah	422,08	737.008.000,00	446,23	684.592.999,00	105,72	92,89
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	328.110.000,00	12,00	324.450.810,00	100	98,88
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	62.688.000,00	4,00	62.537.137,00	100	99,76
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	75,00	346.210.000,00	75,00	297.605.052,00	100	85,96
5.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang				4.810.692.692,00		4.461.937.530,00	66,91	92,75

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan Kesekretariatan	Indeks	75,00	3.961.546.192,00	86,90	3.784.335.532,00	115,87	95,53
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	Persen	100,00		105,87		105,87	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	26.472.000,00	100,00	24.977.480,00	100	94,35
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	26.472.000,00	2,00	24.977.480,00	100	94,35
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	98.400.000,00	94,00	94.240.000,00	117,5	95,77
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	41,00	98.400.000,00	138,00	94.240.000,00	336,59	95,77
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	M	1.019,00	45.208.500,00	1.078,00	37.306.377,00	106	82,52
5.02.01.1.04.0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	5,00	16.900.000,00	5,00	14.540.000,00	100	86,04
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	5,00	9.764.000,00	5,00	8.578.000,00	100	87,85
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	5,00	18.544.500,00	5,00	14.188.377,00	100	76,51

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat	Persen	100,00	45.726.500,00	100,00	32.911.010,00	100	71,97
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7,00	45.726.500,00	8,00	32.911.010,00	114,29	71,97
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	629.176.424,00	100,00	614.549.145,00	100	97,68
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	5.974.800,00	1,00	5.641.200,00	100	94,42
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	108.565.724,00	4,00	105.086.600,00	100	96,80
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	24.469.500,00	2,00	24.429.400,00	100	99,84
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3.878.400,00	12,00	2.970.000,00	100	76,58
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	30,00	486.288.000,00	60,00	475.791.945,00	200	97,84
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	539.461.792,00	100,00	530.223.000,00	100	98,29
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	109.238.510,00	0,00	108.400.000,00	0	99,23
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	53,00	430.223.282,00	45,00	421.823.000,00	84,91	98,05

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	2.078.132.976,00	100,00	2.007.745.120,00	100	96,61
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	2.999.300,00	1,00	2.570.000,00	100	85,69
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	342.613.000,00	12,00	307.389.880,00	100	89,72
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,00	1.732.520.676,00	6,00	1.697.785.240,00	100	98,00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	498.968.000,00	100,00	474.892.090,00	100	95,17
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12,00	291.674.000,00	12,00	274.872.440,00	100	94,24
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	61,00	44.670.000,00	61,00	39.868.450,00	100	89,25
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	162.624.000,00	1,00	160.151.200,00	100	98,48
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	Indeks	75,00	849.146.500,00	92,14	748.573.508,00	122,85	88,16
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)	Persen	100,00		100,00		100	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	Milyar Rupiah	151,39	849.146.500,00	139,49	748.573.508,00	92,14	88,16
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	9,00	318.920.000,00	21,00	301.209.229,00	233,33	94,45
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	6,00	197.640.000,00	6,00	194.356.290,00	100	98,34
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	2.000,00	332.586.500,00	3.700,00	253.007.989,00	185	76,07
5.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur				4.869.395.216,00		4.124.706.514,00	107,36	84,71
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indekss kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	Indeks	75,00	4.526.313.216,00	84,97	3.908.596.148,00	113,29	86,35
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim)	Persen	100,00		105,87		105,87	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	45.649.580,00	100,00	41.479.178,00	100	90,86
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	45.649.580,00	2,00	41.479.178,00	100	90,86
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	97.920.000,00	84,04	89.010.000,00	105,05	90,90

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	62,00	97.920.000,00	62,00	89.010.000,00	100	90,90
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Milyar Rupiah	1.019,00	170.230.000,00	1.078,00	155.343.902,00	106	91,26
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	66.436.000,00	1,00	60.986.692,00	100	91,80
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	50.994.000,00	4,00	45.878.106,00	100	89,97
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	52.800.000,00	12,00	48.479.104,00	100	91,82
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	48.179.960,00	100,00	46.717.082,00	100	96,96
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9,00	48.179.960,00	12,00	46.717.082,00	133,33	96,96
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	646.281.040,00	100,00	504.607.284,00	100	78,08
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	24.304.300,00	1,00	23.857.825,00	100	98,16
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	159.179.200,00	3,00	158.374.200,00	100	99,49
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	34.854.600,00	2,00	31.618.125,00	100	90,71

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	11.020.800,00	12,00	3.060.000,00	100	27,77
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	23,00	416.922.140,00	23,00	287.697.134,00	100	69,01
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	231.916.140,00	100,00	230.381.000,00	100	99,34
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	22.542.630,00	0,00	22.340.000,00	0	99,10
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12,00	209.373.510,00	12,00	208.041.000,00	100	99,36
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	2.671.618.096,00	100,00	2.419.605.882,00	100	90,57
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	5.495.600,00	12,00	1.053.000,00	100	19,16
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	806.479.200,00	12,00	612.130.712,00	100	75,90
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	1.859.643.296,00	5,00	1.806.422.170,00	100	97,14
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	614.518.400,00	100,00	497.151.265,00	100	80,90
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	9,00	308.534.200,00	9,00	242.262.453,00	100	78,52

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54,00	139.609.200,00	54,00	88.541.512,00	100	63,42
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	166.375.000,00	1,00	166.347.300,00	100	99,98
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	Persen	100,00	343.082.000,00	100,00	320.920.921,00	100	93,54
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	Persen	100,00		125,61		125,61	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	Milyar Rupiah	302,44	343.082.000,00	379,89	320.920.921,00	126	93,54
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	226.264.000,00	12,00	222.233.255,00	100	98,22
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	36.024.000,00	4,00	32.612.905,00	100	90,53
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	271,00	80.794.000,00	928,00	66.074.761,00	342,44	81,78
5.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat				5.277.115.315,00		4.606.819.935,00	104,73	87,30
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indekss kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	Indeks	75,00	4.730.661.315,00	86,34	4.151.031.835,00	115	87,75

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar)	Persen	100,00		105,87		105,87	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	33.432.000,00	100,00	32.255.200,00	100	96,48
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	33.432.000,00	2,00	32.255.200,00	100	96,48
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	98.400.000,00	87,30	96.000.000,00	109,13	97,56
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	92,00	98.400.000,00	92,00	96.000.000,00	100	97,56
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Milyar Rupiah	1.019,00	89.664.000,00	1.078,00	87.133.331,00	105,79	97,18
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	41.544.000,00	1,00	40.350.000,00	100	97,13
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	19.800.000,00	4,00	18.463.331,00	100	93,25
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	28.320.000,00	12,00	28.320.000,00	100	100,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	46.200.000,00	100,00	44.088.000,00	100	95,43
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10,00	46.200.000,00	20,00	44.088.000,00	200	95,43
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	474.311.860,00	100,00	471.529.869,00	100	99,41
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	6.599.700,00	1,00	6.595.000,00	100	99,93
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	164.965.300,00	3,00	163.135.469,00	100	98,89
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	22.244.460,00	1,00	22.206.400,00	100	99,83
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3.878.400,00	12,00	2.970.000,00	100	76,58
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	19,00	276.624.000,00	19,00	276.623.000,00	100	100,00
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	245.499.091,00	100,00	242.078.000,00	100	98,61
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	73.536.419,00	1,00	70.190.000,00	100	95,45
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	171.962.672,00	10,00	171.888.000,00	100	99,96

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	3.249.061.864,00	100,00	2.778.274.546,00	100	85,51
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	13.470.000,00	12,00	10.706.700,00	100	79,49
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	633.509.176,00	12,00	522.231.726,00	100	82,43
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	2.602.082.688,00	5,00	2.245.336.120,00	100	86,29
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	494.092.500,00	100,00	476.120.989,00	100	96,36
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7,00	252.988.500,00	7,00	236.471.819,00	100	93,47
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	67,00	81.550.000,00	67,00	81.149.170,00	100	99,51
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	159.554.000,00	1,00	158.500.000,00	100	99,34
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)	Persen	100,00	546.454.000,00	100,00	529.924.000,00	100	96,98
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	Persen	100,00		114,84		114,84	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	Milyar Rupiah	130.391,00	546.454.000,00	149.740,00	529.924.000,00	114,84	96,98
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	271.588.000,00	12,00	270.524.000,00	100	99,61
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	82.400.000,00	4,00	82.400.000,00	100	100,00
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	760,00	192.466.000,00	760,00	177.000.000,00	100	91,96
5.02.0.00.0.00.01.0008	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara				4.719.097.561,00		4.371.263.555,00	56,79	92,63
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU)	Persen	100,00	3.954.157.561,00	105,78	3.774.183.421,00	105,78	95,45
		Indekss kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	Indeks	75,00		86,91		115,88	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	26.400.000,00	100,00	25.620.785,00	100	97,05
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	26.400.000,00	2,00	25.620.785,00	100	97,05
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	100.800.000,00	94,49	96.000.000,00	118,11	95,24

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	75,00	100.800.000,00	75,00	96.000.000,00	100	95,24
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	M	1.019,00	41.864.000,00	1.078,00	40.875.646,00	105,79	97,64
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	14.442.000,00	1,00	14.083.261,00	100	97,52
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	14.102.000,00	4,00	13.765.185,00	100	97,61
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	13.320.000,00	12,00	13.027.200,00	100	97,80
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	57.000.000,00	90,00	46.456.920,00	90	81,50
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	57.000.000,00	5,00	46.456.920,00	45,45	81,50
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	665.350.986,00	100,00	656.414.834,00	100	98,66
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	15.692.968,00	1,00	15.461.000,00	100	98,52
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	216.499.378,00	3,00	211.765.988,00	100	97,81
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	42.280.240,00	1,00	40.848.000,00	100	96,61

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3.878.400,00	12,00	2.970.000,00	100	76,58
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	20,00	387.000.000,00	20,00	384.499.846,00	100	99,35
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	318.299.971,00	100,00	303.920.000,00	100	95,48
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	31.137.500,00	1,00	30.970.000,00	100	99,46
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00	287.162.471,00	5,00	272.950.000,00	100	95,05
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	2.256.071.904,00	100,00	2.137.271.453,00	100	94,73
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	13.909.000,00	12,00	6.250.500,00	100	44,94
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	412.276.400,00	12,00	373.816.949,00	100	90,67
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	1.829.886.504,00	5,00	1.757.204.004,00	100	96,03
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	488.370.700,00	100,00	467.623.783,00	100	95,75
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	15,00	206.246.600,00	15,00	196.782.233,00	100	95,41

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48,00	84.894.100,00	48,00	74.767.550,00	100	88,07
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	197.230.000,00	1,00	196.074.000,00	100	99,41
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	Persen	100,00	764.940.000,00	63,45	684.970.134,00	63,45	89,55
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah PPU (UPTD PPRD PPU)	Persen	100,00		100,00		100	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	Milyar Rupiah	172,53	764.940.000,00	109,47	684.970.134,00	63	89,55
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	113.500.000,00	12,00	113.357.021,00	100	99,87
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	342.460.000,00	4,00	337.406.045,00	100	98,52
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	1.272,00	308.980.000,00	1.272,00	234.207.068,00	100	75,80
5.02.0.00.0.00.01.0009	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser				4.644.981.822,00		3.940.182.188,00	57,3	84,83
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser)	Persen	100,00	3.993.454.822,00	105,87	3.531.967.306,00	105,87	88,44

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indekss kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	Indeks	75,00		84,64		112,85	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	22.879.200,00	100,00	20.883.210,00	100	91,28
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	22.879.200,00	2,00	20.883.210,00	100	91,28
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	98.400.000,00	89,00	96.000.000,00	111,25	97,56
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72,00	98.400.000,00	64,00	96.000.000,00	88,89	97,56
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	M	1.019,00	27.705.600,00	1.078,00	22.621.762,00	105,79	81,65
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	9.235.200,00	1,00	6.817.200,00	100	73,82
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	9.235.200,00	4,00	8.200.000,00	100	88,79
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	9.235.200,00	12,00	7.604.562,00	100	82,34

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	45.537.400,00	100,00	32.266.697,00	100	70,86
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9,00	45.537.400,00	9,00	32.266.697,00	100	70,86
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	998.963.400,00	98,00	917.464.364,00	98	91,84
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	33.026.200,00	1,00	32.857.400,00	100	99,49
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	331.112.100,00	3,00	324.520.606,00	100	98,01
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	113.917.100,00	1,00	39.465.400,00	100	34,64
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	1.980.000,00	12,00	1.815.000,00	100	91,67
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	31,00	518.928.000,00	30,00	518.805.958,00	96,77	99,98
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	61.914.650,00	100,00	53.300.000,00	100	86,09
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	22.657.000,00	1,00	18.700.000,00	100	82,54
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00	39.257.650,00	4,00	34.600.000,00	100	88,14

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	2.275.064.872,00	100,00	1.993.388.804,00	100	87,62
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	10.448.800,00	12,00	5.149.000,00	100	49,28
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	666.143.000,00	12,00	483.348.138,00	100	72,56
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	1.598.473.072,00	5,00	1.504.891.666,00	100	94,15
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	462.989.700,00	52,00	396.042.469,00	52	85,54
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17,00	181.294.300,00	17,00	158.872.919,00	100	87,63
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	112,00	67.295.400,00	50,00	24.669.550,00	44,64	36,66
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	214.400.000,00	1,00	212.500.000,00	100	99,11
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)	Persen	100,00	651.527.000,00	100,00	501.034.882,00	100	76,90
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	Persen	100,00		82,43		82,43	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	Milyar Rupiah	172,53	651.527.000,00	142,22	501.034.882,00	82,43	76,90
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	180.800.000,00	12,00	173.691.702,00	100	96,07
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	183.520.000,00	4,00	136.087.116,00	100	74,15
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	106,00	287.207.000,00	106,00	191.256.064,00	100	66,59
5.02.0.00.0.00.01.0010	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau				5.014.178.412,00		4.840.495.428,00	60,16	96,54
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indekss kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	Indeks	75,00	4.439.916.412,00	85,06	4.290.794.382,00	113	96,64
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	Persen	100,00		105,87		105,87	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	45.600.000,00	100,00	45.474.800,00	100	99,73
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	45.600.000,00	2,00	45.474.800,00	100	99,73
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	90.240.000,00	96,54	90.240.000,00	120,68	100,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	116,00	90.240.000,00	116,00	90.240.000,00	100	100,00
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Milyar Rupiah	1.019,00	82.354.000,00	1.078,00	81.833.554,00	106	99,37
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	30.920.000,00	1,00	30.565.200,00	100	98,85
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	39.606.000,00	4,00	39.565.054,00	100	99,90
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	11.828.000,00	12,00	11.703.300,00	100	98,95
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	87.000.000,00	100,00	86.260.076,00	100	99,15
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5,00	87.000.000,00	5,00	86.260.076,00	100	99,15
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi	Persen	100,00	745.137.180,00	100,00	744.473.822,00	100	99,91
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	6.597.800,00	1,00	6.574.800,00	100	99,65
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	137.496.580,00	4,00	137.035.800,00	100	99,66
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	90.886.000,00	1,00	90.801.500,00	100	99,91

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3.716.800,00	12,00	3.716.800,00	100	100,00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	35,00	506.440.000,00	35,00	506.344.922,00	100	99,98
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	502.444.838,00	100,00	484.912.000,00	100	96,51
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	71.860.458,00	1,00	71.674.000,00	100	99,74
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	63,00	430.584.380,00	63,00	413.238.000,00	100	95,97
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	2.313.656.544,00	100,00	2.246.687.843,00	100	97,11
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	19.153.500,00	12,00	19.153.500,00	100	100,00
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	573.869.600,00	12,00	512.725.949,00	100	89,35
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	1.720.633.444,00	5,00	1.714.808.394,00	100	99,66
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	573.483.850,00	100,00	570.673.494,00	100	99,51
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	17,00	168.603.850,00	17,00	165.971.994,00	100	98,44

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	96,00	85.080.000,00	96,00	84.905.500,00	100	99,79
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	319.800.000,00	1,00	319.796.000,00	50	100,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)	Persen	100,00	574.262.000,00	100,00	529.922.711,00	100	92,28
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	Persen	100,00		97,00		97	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	Milyar Rupiah	170,15	574.262.000,00	165,05	529.922.711,00	97	92,28
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	83.900.000,00	12,00	83.604.126,00	100	99,65
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	197.502.000,00	4,00	197.381.027,00	100	99,94
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	598,00	292.860.000,00	598,00	248.937.558,00	100	85,00

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada tahun 2024 mencapai angka 75,74 atau sedikit di atas target 75, dengan tren proyeksi yang terus meningkat hingga 78 pada tahun 2027. Hal ini mengindikasikan adanya konsistensi dalam peningkatan kualitas pelayanan internal yang menjadi dasar bagi efektivitas penyelenggaraan tugas Bapenda. Selain itu, persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti juga mencapai 100 persen pada tahun 2024, menunjukkan komitmen tinggi dalam merespons kebutuhan masyarakat dan menjaga kepuasan publik.

Dari sisi pendapatan, capaian kinerja menunjukkan variasi. Realisasi retribusi daerah pada tahun 2024 mencapai 105,87 persen, melampaui target yang ditetapkan. Namun, hingga Agustus 2025, capaian baru berada pada angka 62,02 persen sehingga masih memerlukan optimalisasi pemungutan pada sisa tahun berjalan. Hal serupa juga terlihat pada pajak daerah, di mana tahun 2024 mencapai 99,75 persen dari target, namun pada 2025 baru terealisasi 53,96 persen. Meskipun demikian, proyeksi hingga 2027 menunjukkan capaian akan tetap stabil di angka 100 persen.

Indikator lain yang cukup menonjol adalah realisasi lain-lain PAD yang sah, yang pada tahun 2024 mencapai 285,92 persen, jauh melampaui target yang ditetapkan. Namun capaian ini bersifat fluktuatif, karena pada tahun 2025 per Agustus baru mencapai 99,98 persen. Sementara itu, realisasi dana transfer juga menunjukkan capaian baik di tahun 2024 yaitu sebesar 106,04 persen, meskipun pada tahun 2025 per Agustus baru terealisasi 56,61 persen. Kondisi ini dapat dipahami karena mekanisme penyaluran transfer dari pemerintah pusat biasanya dilakukan secara bertahap, sehingga diperkirakan target akan tercapai pada akhir tahun anggaran.

Pada indikator lain-lain pendapatan daerah yang sah, capaian tahun 2024 hanya mencapai 72,7 persen, di bawah target yang ditetapkan. Hingga Agustus 2025, realisasi bahkan baru sebesar 49,78 persen. Hal ini menunjukkan perlunya upaya intensifikasi serta identifikasi sumber-sumber pendapatan alternatif yang dapat dioptimalkan. Jika tidak diantisipasi, capaian indikator ini berpotensi menjadi titik lemah dalam keseluruhan kinerja pendapatan daerah.

Sementara itu, indikator terkait responsivitas layanan publik juga menunjukkan hasil yang baik. Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen. Kondisi ini mencerminkan komitmen Bapenda dalam menjaga kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Dengan proyeksi capaian yang konsisten hingga tahun 2027, diharapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bapenda dapat terus meningkat.

Proses analisa kinerja pelayanan merupakan siklus berkelanjutan untuk memastikan peningkatan terus-menerus, adapun capaian kinerja pelayanan Renstra Badan Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

No	INDIKATOR KINERJA	SPM/ standar dan nasional	KSR	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2024	2025	2026	2024	2025 (Per Agustus)	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kualitas Layanan Berkeadilan	-	-	75	76	77	75,18	-	77	78	Indikator yang digunakan mengacu pada target Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026
2	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (%)	-	-	100	100	100	100,07	62,02	100	100	
3	Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (%)	-	-	100	100	100	285,02	98,88	100	100	
4	Persentase Realisasi Dana Transfer (%)	-	-	100	100	100	100,04	56,81	100	100	
5	Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)	-	-	100	100	100	72,7	49,78	100	100	
6	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	-	-	100	100	100	99,75	53,84	100	100	
7	Persentase Revisi/Pengguna Layanan yang diadukalai (%)	-	-	100	100	100	100	-	100	100	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH, khususnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Bapenda Kaltim), sepanjang tahun 2024 menghadapi berbagai isu strategis yang mencerminkan dinamika kebijakan nasional, perubahan regulasi fiskal, serta tantangan teknis dalam pelayanan publik. Isu-isu ini menjadi perhatian utama dalam rangka meningkatkan efektivitas kelembagaan dan optimalisasi pendapatan daerah.

1. Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)

Tahun 2024 merupakan fase lanjutan penerapan UU HKPD yang membawa perubahan signifikan terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah, termasuk restrukturisasi jenis pajak, formula dana transfer, dan pelaporan kinerja fiskal.

2. Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Lokasi IKN yang berada di wilayah Kalimantan Timur memberikan tekanan tambahan terhadap ketersediaan infrastruktur, kebutuhan layanan fiskal, serta penyesuaian kebijakan perpajakan di kawasan penyangga. Hal ini menuntut kesiapan Bapenda dalam memetakan potensi objek pajak baru dan mengantisipasi pergerakan ekonomi daerah.

3. Keterbatasan Integrasi dan Validitas Data Objek/Subjek Pajak

Belum maksimalnya keterpaduan data antarinstansi seperti Dukcapil, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan menyebabkan tantangan dalam pemutakhiran data objek pajak kendaraan dan properti. Hal ini berdampak pada akurasi target pendapatan.

4. Tantangan Digitalisasi Pelayanan Pajak Daerah

Meski transformasi digital sudah berjalan melalui layanan e-Samsat, aplikasi pajak online, dan kanal pembayaran daring, namun pemerataan adopsi teknologi serta literasi digital di kalangan wajib pajak masih perlu ditingkatkan, khususnya di wilayah non-perkotaan.

5. Keterbatasan SDM dalam Penguasaan Sistem Digital dan Fiskal Baru

Masih dibutuhkan penguatan kapasitas ASN, khususnya dalam penguasaan sistem informasi perpajakan, analisis fiskal, serta pemahaman terhadap regulasi baru. Regenerasi SDM juga perlu diperhatikan untuk kesinambungan layanan.

6. Pengawasan Internal dan Pencegahan Kebocoran Pendapatan

Meningkatnya volume transaksi digital dan layanan daring menuntut penguatan sistem pengawasan berbasis elektronik serta evaluasi berkala terhadap potensi risiko kebocoran penerimaan pajak dan retribusi.

7. Ketergantungan pada Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB

Struktur PAD Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh dua jenis pajak utama tersebut. Ketergantungan ini dapat menjadi risiko

fiskal apabila terjadi perlambatan di sektor otomotif atau perubahan kebijakan pusat yang berdampak pada distribusi pendapatan.

8. Peningkatan Ekspektasi dan Tuntutan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Publik

Masyarakat semakin menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Antrean panjang, keterbatasan kanal informasi, serta kurangnya aksesibilitas di beberapa UPTD menjadi tantangan yang harus segera direspon melalui peningkatan kualitas layanan front office maupun digital.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan keterkaitannya dengan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah selaras dengan arah kebijakan dan sasaran dalam dokumen Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2024–2026 serta Rancangan Awal RKPD.

Untuk Tahun 2026, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diformulasikan secara terukur dan terarah. Rumusan ini bertujuan untuk mempermudah proses pengukuran kinerja, sekaligus memastikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tema pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.

Adapun perbedaan dalam besaran alokasi anggaran antar kegiatan yang muncul dalam proses penyusunan, didasarkan pada kemampuan keuangan daerah, yang dalam hal ini merujuk pada kapasitas fiskal dan proyeksi penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, prioritas penganggaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan efisiensi, urgensi program, serta dampak langsung terhadap peningkatan kinerja pelayanan dan penerimaan daerah.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur					365.418.043.000,00	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur					202.119.316.333,00	
	Badan Pendapatan Daerah (Induk)					307.370.661.718,00	Badan Pendapatan Daerah (Induk)					144.677.800.939,00	
5.2 .02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Samarinda	1	Persentase Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (%)	100	1.796.674.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Samari nda	1	Persentase Realisasi Penerimaan Lain-lain (%)	100	1.796.674.000,00	
			2	Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (%)	100								
			3	Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)	100								
			4	Persentase Realisasi Pendapatan Transfer (%)	100								
5.0 2.0 2.1 .03	Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Samarinda	1	Jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Rp)	Rp432.266.776.014	465.684.000,00	Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Samari nda	1	Jumlah Realisasi Penerimaan Lain-lain (Rp)	921.694.922.246,00	465.684.000,00	
			2	Jumlah Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp)	Rp127.393.299.506								
			3	Jumlah Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp)	Rp599.156.146.399								

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 2.1 .05	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Samarinda	1	Jumlah Penerimaan Transfer (Triliun Rp)	Rp8.425.772.462.437	1.330.990.000,00	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Samari nda	1	Jumlah Penerimaan Transfer (Triliun Rp)	9.334.429.762.111,00	1.330.990.000,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Samarinda	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	51,94	16.986.213.600,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Samari nda	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	52,58	15.493.012.400,00	
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan (%)	100								
				Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Indeks)	88,25								
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Samarinda	1	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	100	16.986.213.600,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Samari nda	1	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	100	15.493.012.400,00	
			2	Persentase Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah yang diselesaikan (%)	100				2	Persentase Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah yang diselesaikan (%)	100		
			3	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100				3	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
			4	Persentase penyelesaian analisis pengembangan pendapatan dan pelayanan (%)	100				4	Persentase penyelesaian analisis pengembangan pendapatan dan pelayanan (%)	100		

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
			5	Persentase dokumen perencanaan pendapatan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100				5	Persentase dokumen perencanaan pendapatan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Samarinda	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	81,5	288.587.774.118,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Samari nda	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	81,5	127.388.114.539,00	
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	935.497.650,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	915.653.518,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	242.365.774.051,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	103.586.585.624,00	
5.0 2.0 1.1 .03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase laporan Rencana Kebutuhan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diselesaikan tepat waktu	100	366.504.000,00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase laporan Rencana Kebutuhan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diselesaikan tepat waktu	100	365.400.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	2.433.201.800,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	2.383.148.000,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	98	2.168.742.048,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	98	1.945.668.660,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	8.518.035.912,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	7.302.422.120,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	24.553.751.707,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samari nda	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	3.266.927.120,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Samarinda	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	5.664.869.350,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Samari nda	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	5.458.162.677,00	
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	1.581.397.600,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samari nda	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	2.164.146.820,00	
	UPTD PPRD Samarinda					10.655.178.252,00	UPTD PPRD Samarinda					10.627.324.932,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Samarinda	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	2.013.735.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Samari nda	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	2.013.735.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Samarinda	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		2.013.735.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Samari nda	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		2.013.735.000,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
			2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Samarinda	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	81,03	8.641.443.252,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Samari nda	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	81,03	8.613.589.932,00	
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	46.550.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	46.550.000,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	127.320.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	127.320.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	75.316.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	75.316.000,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	9,09	259.200.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	34	259.200.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	1.415.710.488,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	1.280.486.784,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	996.932.018,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samari nda	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	996.932.018,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Samarinda	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.790.596.996,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Samari nda	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.864.211.852,00	
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	929.817.750,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samari nda	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	963.573.278,00	
	UPTD PPRD Kutai Kartanegara					9.104.555.975,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara					9.085.188.208,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kutai Kartanegara	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	1.326.860.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kutai Kartanegara	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	1.326.860.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Kutai Kartanegara	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		1.326.860.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Kutai Kartanegara	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	1.326.860.000,00	
			2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kutai Kartanegara	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	77	7.777.695.975,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kutai Kartanegara	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	77	7.758.328.208,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	18.000.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	18.000.000,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	109.080.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	109.080.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	67.200.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	67.200.000,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	13,63	96.600.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	44,7	96.600.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	1.468.575.254,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	1.468.575.254,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	984.556.257,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	965.188.490,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kutai Kartanegara	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.141.009.888,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kutai Kartanegara	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.141.009.888,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	892.674.576,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	892.674.576,00	
	UPTD PPRD Kutai Timur					5.215.662.122,00	UPTD PPRD Kutai Timur					5.206.417.646,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kutai Timur	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	656.334.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kutai Timur	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	656.334.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kutai Timur	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		656.334.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kutai Timur	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	656.334.000,00	
			2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kutai Timur	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	83,34	4.559.328.122,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kutai Timur	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	83,34	4.550.083.646,00	
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	153.200.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	153.199.965,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	221.472.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	221.471.565,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	27,02	136.800.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	41,6	136.800.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	1.251.540.945,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	1.251.466.791,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Timur	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	142.947.799,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Timur	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	137.878.859,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kutai Timur	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.643.339.540,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kutai Timur	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.639.261.900,00	
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Timur	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	903.587.838,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Timur	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	903.564.566,00	
	UPTD PPRD Kutai Barat					5.454.922.597,00	UPTD PPRD Kutai Barat					5.528.638.664,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kutai Barat	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	793.703.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kutai Barat	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	798.883.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Kutai Barat	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		793.703.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Kutai Barat	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	798.883.000,00	
			2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kutai Barat	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	85	4.661.219.597,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kutai Barat	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	85	4.729.755.664,00	
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	40.464.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	40.464.000,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	109.080.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	109.704.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	101.304.000,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	29,72	52.800.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	32,4	50.400.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	803.915.302,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	951.175.640,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Barat	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	243.244.245,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Barat	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	253.674.082,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kutai Barat	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.313.249.200,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kutai Barat	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.337.124.270,00	
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Barat	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	988.762.850,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Barat	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	889.173.672,00	
	UPTD PPRD Balikpapan					7.108.897.511,00	UPTD PPRD Balikpapan					6.535.664.957,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Balikpapan	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	864.470.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Balikpapan	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PA (%)	100	864.470.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Balikpapan	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		864.470.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Balikpapan	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	864.470.000,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
		Balikpapan	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100			Balikpapan	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Balikpapan	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	73	6.244.427.511,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Balikpapan	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	73	5.671.194.957,00	
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	23.720.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	23.720.000,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	108.480.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	108.480.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	89.050.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	89.050.000,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	18,36	38.400.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	26,08	38.400.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	925.330.354,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	925.330.354,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	919.382.957,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	522.973.443,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Balikpapan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3.018.064.200,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Balikpapan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3.044.241.160,00	
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	1.122.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	919.000.000,00	
	UPTD PPRD Bontang					5.068.301.823,00	UPTD PPRD Bontang					5.032.290.936,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bontang	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	789.870.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bontang	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB(%)	100	811.425.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Bontang	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		789.870.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Bontang	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	811.425.000,00	
			2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bontang	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	85	4.278.431.823,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bontang	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	85	4.220.865.936,00	
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	35.136.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	35.136.000,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	34.160.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	34.160.000,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	38,46	126.000.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	68,9	130.800.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	989.594.525,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	1.016.198.058,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bontang	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	503.642.006,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bontang	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	469.823.862,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Bontang	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.593.274.217,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Bontang	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.543.920.016,00	
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bontang	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	890.185.075,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bontang	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	884.388.000,00	
	UPTD PPRD Penajam Paser Utara					5.044.913.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara					5.044.913.000,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Penajam Paser Utara	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	732.715.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Penajam Paser Utara	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	777.499.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penajam Paser Utara	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		732.715.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penajam Paser Utara	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	777.499.000,00	
		Penajam Paser Utara	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100			Penajam Paser Utara	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penajam Paser Utara	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	80	4.312.198.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penajam Paser Utara	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	80	4.267.414.000,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	26.520.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	18.120.000,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	41.792.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	41.792.000,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	36,36	97.200.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	62,5	76.320.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	599.060.919,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	609.439.868,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	816.373.565,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	848.264.715,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penajam Paser Utara	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.702.104.280,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penajam Paser Utara	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.644.412.324,00	
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	922.707.236,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	922.625.093,00	
	UPTD PPRD Paser					5.159.700.000,00	UPTD PPRD Paser					5.159.700.000,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Paser	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	799.470.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Paser	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	799.470.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Paser	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		799.470.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Paser	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	799.470.000,00	
		Paser	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100			Paser	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Paser	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	83	4.360.230.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Paser	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	83	4.360.230.000,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	33.600.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	33.600.000,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	67.200.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	67.200.000,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	42,3	49.200.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	39,28	49.200.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	864.642.119,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	864.642.119,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paser	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	702.541.567,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paser	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	702.541.567,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Paser	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.969.277.692,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Paser	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.969.277.692,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	567.328.622,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	567.328.622,00	
	UPTD PPRD Berau					5.235.250.002,00	UPTD PPRD Berau					5.221.377.051,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Berau	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	710.330.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Berau	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	754.010.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Berau	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		710.330.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Berau	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	754.010.000,00	
		Berau	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100			Berau	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Berau	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	90	4.524.920.002,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Berau	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	90	4.467.367.051,00	
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	51.360.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	51.360.000,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	111.120.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	111.120.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	132.630.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	99.030.000,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	43,75	51.840.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	31,25	43.440.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	845.751.205,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	783.437.486,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berau	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	584.067.142,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berau	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	651.906.915,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Berau	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.820.587.655,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Berau	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.794.678.650,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berau	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	927.564.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berau	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	932.394.000,00	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar bersumber dari sektor Pajak Daerah, dengan kontribusi utama berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam pelaksanaan pemungutan kedua jenis pajak tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Bapenda Kaltim) tidak bertindak secara tunggal, melainkan bersinergi dengan sejumlah instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan secara terpadu oleh tiga lembaga, yaitu:

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui Direktorat Lalu Lintas, yang memiliki kewenangan dalam kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang bertanggung jawab atas penetapan dan pemungutan PKB dan BBNKB; serta
- PT Jasa Raharja (Persero), yang melakukan pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Pelayanan terpadu dalam sistem SAMSAT menuntut adanya sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas antar instansi, guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi yang erat antar pihak menjadi keharusan dalam setiap tahapan proses pelayanan, mulai dari registrasi hingga pembayaran.

Sebagai bentuk tanggapan terhadap aspirasi masyarakat serta upaya peningkatan mutu layanan, Forum Tim Pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Timur secara rutin menyelenggarakan rapat koordinasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Forum ini menjadi wadah kolaboratif dalam:

- Menyampaikan dan menindaklanjuti usulan masyarakat terkait pelayanan perpajakan kendaraan bermotor;
- Mengidentifikasi serta menganalisis isu-isu strategis dan permasalahan lapangan;
- Merumuskan kebijakan perbaikan sistem layanan, penguatan infrastruktur, serta strategi sosialisasi dan edukasi perpajakan.

Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan elemen penting dalam penyusunan perencanaan yang partisipatif dan responsif. Melalui pendekatan ini, Bapenda Kaltim tidak hanya memperkuat kualitas pelayanan publik, tetapi juga membangun hubungan kepercayaan dengan wajib pajak, meningkatkan kepatuhan, serta memperluas jangkauan penerimaan daerah melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Pendapatan	Kalimantan Timur	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,91	-
		Kalimantan Timur	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100%	-
		Kota Samarinda	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAD Wilayah Samarinda	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAD Wilayah Kutai Kartanegara	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kabupaten Kutai Timur	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAD Wilayah Kutai Timur	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kabupaten Kutai Barat	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAD Wilayah Kutai Barat	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kota Balikpapan	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAD Wilayah Balikpapan	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kota Bontang	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAD Wilayah Bontang	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kabupaten Penajam Paser Utara	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAD Wilayah Penajam Paser Utara	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kabupaten Paser	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAD Wilayah Paser	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kabupaten Berau	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAD Wilayah Berau	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan optimalisasi tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur, penetapan program dan kegiatan harus sejalan dengan **arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional**. Hal ini bertujuan untuk memperkuat peran daerah dalam **meningkatkan penerimaan daerah (PAD)** secara berkelanjutan sebagai salah satu pilar pendukung pembangunan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan proses analisis dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang oleh Bapenda selaras dengan kebijakan pusat, baik secara substansi maupun arah strategisnya. Telaahan ini melibatkan identifikasi aspek-aspek kunci dari kebijakan yang berdampak langsung pada peran Bapenda, khususnya dalam hal fiskal dan pelayanan publik.

Adapun langkah-langkah utama dalam proses telaahan terhadap kebijakan nasional mencakup:

1. Identifikasi Kebijakan

Mengidentifikasi kebijakan yang akan ditelaah, termasuk tujuan, konteks, dan sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut.

2. Analisis Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan dan analisis terhadap data pelaksanaan kebijakan nasional yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini

termasuk evaluasi capaian, efektivitas pelaksanaan, dan kendala-kendala di lapangan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut.

3. **Evaluasi Dampak Kebijakan**

Menilai dampak implementasi kebijakan terhadap aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, dampak pengalihan jenis pajak tertentu, insentif fiskal, atau perubahan struktur pendapatan daerah akibat penyesuaian regulasi pusat.

4. **Penilaian Efektivitas dan Efisiensi**

Mengevaluasi sejauh mana kebijakan pusat mampu mendorong daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan, termasuk dalam konteks digitalisasi layanan, tata kelola pajak kendaraan bermotor, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5. **Partisipasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan**

Menelaah sejauh mana partisipasi dari pemangku kepentingan—baik internal maupun eksternal—dilibatkan dalam implementasi kebijakan nasional, serta bagaimana masukan dari masyarakat dan asosiasi profesi diakomodasi dalam pelaksanaannya.

6. **Relevansi dan Konsistensi Kebijakan**

Menilai kesesuaian kebijakan nasional dengan kebutuhan dan konteks daerah saat ini, serta memastikan konsistensi antara tujuan pusat dan tujuan pembangunan daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program daerah tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan arah pembangunan nasional.

7. **Formulasi Rekomendasi**

Berdasarkan hasil telaahan, disusun rekomendasi strategis untuk perbaikan perencanaan, penyesuaian program, serta langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil oleh Bapenda agar pelaksanaan program dan

kegiatan semakin efektif dalam mendukung pencapaian target nasional dan daerah secara simultan.

Dengan melakukan telaahan yang sistematis terhadap kebijakan nasional, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diusulkan tidak hanya kontributif terhadap capaian indikator pembangunan daerah, tetapi juga memperkuat sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam kerangka pembangunan nasional.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Peran strategis ini menjadikan Bapenda sebagai salah satu ujung tombak dalam mendukung keberlangsungan fiskal daerah, pembiayaan pembangunan, serta pelayanan publik yang berkelanjutan.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

“Kapasitas Fiskal Daerah yang Berkelanjutan”

Indikator Tujuan	Target
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (Kategori)	Sangat Tinggi

Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur telah mempunyai 3 (tiga) sasaran yaitu :

No	Sasaran	Indikator		
		Uraian	Target	Satuan
1	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	100	Persentase
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,9	Nilai

Sesuai dengan sasaran tersebut maka Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan beberapa strategi antara lain :

- Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah
- Meningkatkan Penerimaan Bukan Pajak Daerah
- Optimalisasi Layanan Kesekretariatan

Adapun kebijakan yang ditempuh Bapenda Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendataan Wajib Pajak Daerah
- Melakukan Pemutakhiran Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- Penguatan Kolaborasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Mendorong Perumusan Dasar Hukum terkait kendaraan luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Timur
- Peningkatan edukasi kepada Masyarakat terkait Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor
- Perluasan Jangkauan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor
- Melakukan Audit terhadap Wajib PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
- Mengusulkan Perubahan Pergub terkait Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Mendorong Kementerian terkait untuk Meningkatkan Nilai Perolehan Air (NPA)
- Mendorong Percepatan proses harmonisasi regulasi yang mengatur NJAB
- Penguatan tim Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan terhadap PERANGKAT DAERAH/BLUD pemungut Retribusi Daerah
- Penguatan sistem informasi dan integrasi data Retribusi Daerah
- Penguatan pendataan dan pelaporan terhadap PERANGKAT DAERAH/BLUD pemungut Retribusi Daerah oleh UPTD PPRD di wilayah masing-masing

- Penguatan Sinergi dan Koordinasi antara Bapenda, Biro Ekonomi, dan BUMD
- Peningkatan Koordinasi dengan Kementerian dan Instansi terkait
- Advokasi kepada Pemerintah Pusat terkait Percepatan Penerbitan Perpres dan PMK Dana Transfer
- Menyusun target kinerja yang terukur dari IKI, IKK, IKU hingga tujuan dan sasaran
- Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi secara rutin serta melibatkan instansi terkait
- Menyusun Peta Pengembangan Kompetensi SDM
- Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk kegiatan pengembangan SDM
- Penguatan Evaluasi Kinerja Pegawai
- Sosialisasi penatausahaan dan pengelolaan kearsipan kepada pengelola arsip
- Membentuk Tim Pengelola Arsip
- Penataan arsip melalui pihak ketiga
- Menyusun SK Tim penyusunan Laporan Keuangan
- Menyusun SOP Penatausahaan Keuangan
- Meningkatkan koordinasi internal terkait penyusunan laporan keuangan
- Penyempurnaan Data Barang Milik Daerah
- Penguatan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penguatan inventarisasi Barang Milik Daerah

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu program sebanyak 3 dan kegiatan sebanyak 12 serta sub kegiatan sebanyak 55 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

PROGRAM

1. Program penunjang urusan daerah provinsi.
2. Program pengelolaan keuangan daerah.
3. Program pengelolaan pendapatan daerah.

KEGIATAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
11. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

SUB KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH
10. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH
11. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH
12. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
13. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
14. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
15. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
16. Pengolahan Data Retribusi Daerah
17. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
18. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
20. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
21. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
23. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
24. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
27. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
28. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
PERANGKAT DAERAH
29. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT
DAERAH
30. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31. Pengadaan Mebel
32. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
33. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
35. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
36. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
37. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
38. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
39. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
41. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring,
dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya
42. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
43. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

44. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
45. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
46. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
47. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
48. Penetapan Wajib Pajak Daerah
49. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
50. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
51. Penagihan Pajak Daerah
52. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
53. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
54. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
55. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2026, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan total pendapatan daerah sebesar Rp 20,45 triliun. Angka ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 10,753 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp 9,334 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 362,034 miliar. Proyeksi tersebut merefleksikan optimisme pemerintah provinsi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan, sekaligus menyesuaikan arah kebijakan nasional dan dinamika pembangunan daerah.

Tahun 2026 merupakan tahun lanjutan implementasi penuh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Sejumlah perubahan mendasar yang telah dimulai pada tahun 2025 perlu terus diperkuat, terutama dalam aspek harmonisasi sistem perpajakan daerah, penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, penyesuaian regulasi daerah, serta pelaksanaan pelayanan pajak yang lebih modern dan berbasis kinerja. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjadi bagian penting dari konsolidasi sistem fiskal yang efisien dan responsif terhadap dinamika kewajiban perpajakan masyarakat.

Selain penguatan regulasi, fokus Bapenda tahun 2026 juga diarahkan pada transformasi pelayanan pajak dan retribusi secara digital. Perluasan layanan elektronik seperti e-Samsat, pembayaran pajak secara daring, serta integrasi layanan melalui aplikasi dan platform perbankan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kemudahan layanan dan kepatuhan wajib pajak. Di sisi

lain, edukasi masyarakat serta peningkatan kapasitas SDM aparatur pajak daerah tetap menjadi aspek pendukung yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan pendapatan daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan target-target strategis tersebut, Bapenda Kaltim mengusulkan kebutuhan pendanaan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 202.119.316.333,00. Anggaran ini mencakup pembiayaan kegiatan operasional dan strategis baik pada unit induk Badan Pendapatan Daerah maupun pada sembilan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPRD) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Penetapan besaran pagu dana pada masing-masing UPTD telah mempertimbangkan kebutuhan riil wilayah, beban kerja layanan, potensi pendapatan, serta pengembangan sistem informasi perpajakan dan pelayanan publik daerah yang adaptif terhadap tuntutan zaman. Adapun besarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Pendanaan Bidang dan UPTD Bapenda Prov. Kaltim

No	UNIT KERJA	PENDANAAN RANKHIR
1	Bapenda Induk	144.677.800.939,00
2	Samarinda	10.627.324.932,00
3	Kutai Kartanegara	9.085.188.208,00
4	Kutai Timur	5.206.417.646,00
5	Kutai Barat	5.528.638.664,00
6	Bontang	5.032.290.936,00
7	Balikpapan	6.535.664.957,00
8	Penajam	5.044.913.000,00
9	Paser	5.159.700.000,00
10	Berau	5.221.377.051,00
	Bapenda induk & UPTD	202.119.316.333,00

Dari pagu pendanaan yang sudah ditetapkan tersebut juga telah dirincikan sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada masing – masing

unitnya. Hal ini bisa dilihat pada tabel rencana kerja dan pendanaan berikut ini:

Tabel 4.2

RENCANA KINERJA TAHUN 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
Kapasitas Fiskal Daerah yang Berkelanjutan				1	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	Optimalisasi Pendapatan Daerah			1	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	%	103,98	100			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah			1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,5	80,9			
			Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur						202.119.316.333,00		
			Badan Pendapatan Daerah (Induk)						144.677.800.606,00		
		5.2.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	Persentase Realisasi Penerimaan Lain-lain (%)	%	124,33	100	1.796.674.000,00	Bidang Penerimaan Bukan Pajak	Kalimantan Timur
		5.02.02.1.03	Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1	Jumlah Realisasi Penerimaan Lain-lain (Rp)	Rp	718.425.147.986,00	921.694.922.246,00	465.684.000,00	Bidang Penerimaan Bukan Pajak	Kalimantan Timur
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	4	4	465.684.000,00	Bidang Penerimaan Bukan Pajak	Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.02.1.05	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Jumlah Penerimaan Transfer (Triliun Rp)	Rp	11.698.786.391.340, 00	9.334.429.762.111,00	1.330.990.000,00	Bidang Penerimaan Bukan Pajak	Kalimantan Timur
		5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	4	4	1.330.990.000,00	Bidang Penerimaan Bukan Pajak	Kalimantan Timur
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	%	46,32	52,58	15.493.012.400,00		
					Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan (%)	%	100	100			
					Indekss Kepuasan Pengguna Layanan (Indekss)	Indekss	88,72	88,25			
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	%	99,75	100	15.493.012.400,00		
				2	Persentase Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah yang diselesaikan (%)	%	100	100			
				3	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			
				4	Persentase penyelesaian analisis pengembangan pendapatan dan pelayanan (%)	%	100	100			
				5	Persentase dokumen perencanaan pendapatan yang diselesaikan tepat waktu (%)	%	100	100			
		5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	2	309.048.000,00	Bidang PPSIP	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	2	2	911.826.000,00	Bidang PPSIP	Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.04.1.01.0006	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	9	2	693.720.000,00	Bidang PEP	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	13	13	2.495.902.400,00	Bidang PPSIP	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokume n	3	3	1.330.715.000,00	Bidang Pajak Daerah	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	7.218.526.000,00	Bidang Pajak Daerah	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokume n	4	4	328.645.000,00	Bidang Pajak Daerah	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokume n	4	4	197.320.000,00	Bidang Pajak Daerah	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokume n	9	9	1.120.120.000,00	Bidang PEP	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	3	3	388.740.000,00	Bidang PEP	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	2	498.450.000,00	Bidang PPSIP	Kalimantan Timur
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Keseekretarian	Indekss	81,4	81,5	127.388.114.539,00	Sekretaria t	Kalimanta n Timur
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	915.653.518,00	Sekretaria t	Kalimanta n Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	2	2	278.970.000,00	Subbag Program	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Dokume n	20	20	139.928.000,00	Subbag Program	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen DPA- PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- PERANGKAT DAERAH	Dokume n	2	2	21.216.000,00	Subbag Program	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Laporan	14	5	365.000.000,00	Subbag Program	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	110.539.518,00	Subbag Program	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	103.586.585.624,00	Subbag Keuangan	Kalimanta n Timur
		5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	309	478	102.718.619.304,00	Subbag Keuangan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	1127	12	585.600.000,00	Subbag Keuangan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Laporan	1	1	63.389.720,00	Subbag Keuangan	Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
		5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Laporan	18	18	218.976.600,00	Subbag Keuangan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Persentase laporan Rencana Kebutuhan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diselesaikan tepat waktu	Laporan	100	100	365.400.000,00		
		5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH	1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH	Dokumen	10	10	209.400.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Laporan	36	20	156.000.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	105,87	100	2.383.148.000,00		
		5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2	2	401.150.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	492.158.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	4	2	555.340.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokumen	3	4	340.932.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	1	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Laporan	3	4	307.440.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	286.128.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	71	1.945.668.660,00		
		5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	644.166.612,00	Subbag Umum & kepegawaian	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	10	250.000.000,00	Subbag Umum & kepegawaian	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	10	10	364.134.048,00	Subbag Umum & kepegawaian	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	59	250.800.000,00	Subbag Umum & kepegawaian	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	43	52	436.568.000,00	Subbag Umum & kepegawaian	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	7.302.422.120,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	91.819.546,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	5	5	1.198.450.924,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	3	3	4.266.299.650,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokume n	12	12	19.392.000,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	1.315.140.000,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PERANGKAT DAERAH	Dokume n	10	10	411.320.000,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	3.266.927.120,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2	502.288.943,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	197	100	1.458.008.177,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	2		-	Perlengkap an	Kalimantan Timur
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	6		1.306.630.000,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	5.458.162.677,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	11.400.000,00	Subbag Umum & Kepegawai an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	12	12	2.049.741.840,00	Subbag Keuangan	Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
					Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	3.397.020.837,00	Subbag Umum & Kepegawai an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	2.164.146.820,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	18	354.164.800,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	150	170	749.982.020,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	18	1.060.000.000,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
			UPTD PPRD Samarinda						10.627.324.932,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	97,95	100	2.013.735.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,0 0	1.760.000.000.000,0 0	2.013.735.000,00		
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	233.300.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah	Laporan	4	4	946.450.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1	Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokumen SSPD	84	12	833.985.000,00	UPTD PPRD Samarinda Kota Samarinda
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Kesekretariatan	Indekss	80,78	81,03	8.613.589.932,00	
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	46.550.000,00	
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2	2	46.550.000,00	UPTD PPRD Samarinda Kota Samarinda
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	127.320.000,00	
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	95	12	127.320.000,00	UPTD PPRD Samarinda Kota Samarinda
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	75.316.000,00	
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	5.208.000,00	UPTD PPRD Samarinda Kota Samarinda
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokumen	12	4	5.208.000,00	UPTD PPRD Samarinda Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	64.900.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	9,09	259.200.000,00		
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	30	259.200.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	1.280.486.784,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	40.247.044,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	6	641.347.380,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	2	222.812.360,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokume n	12	12	1.980.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	374.100.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	996.932.018,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	2	379.652.485,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	19	54	617.279.533,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	4.864.211.852,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	7.000.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.345.846.852,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	5	3.511.365.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	963.573.278,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	17	436.713.278,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	112	181.740.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4	345.120.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
			UPTD PPRD Kutai Kartanegara						9.085.188.208,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	105,72	100	1.326.860.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,00	1.760.000.000.000,00	1.326.860.000,00		
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	364.800.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara a	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	660.520.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara a	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1 Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokume n SSPD	75	12	301.540.000,00		
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1 Indekss Layanan Keseekretariatan	Indekss	76,34	77	7.758.328.208,00		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	18.000.000,00		
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Dokume n	2	2	18.000.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara a	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	109.080.000,00		
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	62	12	109.080.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara a	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	67.200.000,00		
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	18.000.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara a	Kabupaten Kutai Kartanegara

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokumen	12	4	18.600.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	30.600.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	44,7	96.600.000,00		
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	30	96.600.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	1.468.575.254,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	12.690.477,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	6	316.275.890,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	3	244.204.487,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	4.258.400,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	891.146.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	965.188.490,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	44.694.720,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	58	64	920.493.770,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	4.141.009.888,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	11.450.500,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.379.159.388,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	2.750.400.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	892.674.576,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	21	513.311.700,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	129	124	118.002.876,00	UPTD PPRD Kutai	Kabupaten Kutai Kartanegara

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
										Kartanegara	
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	261.360.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
			UPTD PPRD Kutai Timur						5.206.417.646,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	125,61	100	656.334.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,00	1.760.000.000.000,00	656.334.000,00		
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	486.172.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	74.904.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1	Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokumen SSPD	271	12	95.258.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Kesekretariatan	Indekss	82,82	83,34	4.550.083.646,00		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	153.199.965,00		
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2	2	153.199.965,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	106.440.000,00		
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	62	12	106.440.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	221.471.565,00		
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	93.651.895,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokume n	12	4	73.003.670,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	54.816.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	41,06	136.800.000,00		
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9	15	136.800.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	1.251.466.791,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	23.680.202,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	3	128.759.179,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	1	17.947.410,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	5.940.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	1.075.140.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	137.878.859,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	48.086.880,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	12	10	89.791.979,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	1.639.261.900,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	6.000.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	681.711.900,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	951.550.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	903.564.566,00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	12	470.606.066,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	54	82	234.518.500,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	198.440.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
			UPTD PPRD Kutai Barat						5.528.638.664,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	114,84	100	798.883.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp			798.883.000,00		
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	228.088.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	248.120.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1	Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokume n SSPD	760	12	322.675.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Kesekretariatan	Indekss	84,5	85	4.729.755.664,00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	40.464.000,00		
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Dokume n	2	2	40.464.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	106.440.000,00		
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	92	12	106.440.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	101.304.000,00		
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	41.544.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokume n	12	4	23.760.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	36.000.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	32,4	50.400.000,00		
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	12	50.400.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	951.175.640,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	32.671.650,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	6	184.243.940,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	2	243.700.050,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokume n	12	12	3.960.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	486.600.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	253.674.082,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	33.044.328,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	10	20	220.629.754,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	2.337.124.270,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	21.200.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	771.813.300,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	1.544.110.970,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	889.173.672,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	15	515.247.672,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	67	60	117.600.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	256.326.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
			UPTD PPRD Balikpapan						6.535.664.957,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	90,61	100	864.470.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,00	1.760.000.000.000,00	864.470.000,00		
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	71.400.000,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	376.030.000,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1	Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokume n SSPD	103	12	417.040.000,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Keseekretariatan	Indekss	72,14	73	5.671.194.957,00		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	23.720.000,00		
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokume n	2	2	23.720.000,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	108.480.000,00		
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	86	12	108.480.000,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	89.050.000,00		
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	59.600.000,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokume n	12	4	15.150.000,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	14.300.000,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	26,08	38.400.000,00		
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	12	38.400.000,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	925.330.354,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	17.931.284,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	6	184.215.610,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	2	96.524.260,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokume n	12	12	1.939.200,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	624.720.000,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	522.973.443,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	103.768.340,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	34	33	419.205.103,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	3.044.241.160,00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	5.668.000,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.272.068.960,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	6	1.766.504.200,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	919.000.000,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	12	322.750.000,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	114	130	216.250.000,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5	380.000.000,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan
			UPTD PPRD Bontang						5.032.290.936,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	84,31	100	811.425.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,00	1.760.000.000.000,00	811.425.000,00		
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek	Laporan	4	4	66.600.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
					Pajak dan Wajib Pajak Daerah						
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	455.600.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1	Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokumen SSPD	2000	12	289.225.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Kesekretariatan	Indekss	84,58	85	4.220.865.936,00		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	35.136.000,00		
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2	2	35.136.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	106.440.000,00		
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	41	12	106.440.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	34.160.000,00		
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	15.920.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokumen	12	4	9.120.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	9.120.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	38,46	130.800.000,00		
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	10	130.800.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	1.016.198.058,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	12.787.420,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	7	277.236.388,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	4	177.015.850,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokume n	12	12	3.878.400,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	545.280.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	469.823.862,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	6	1	189.373.880,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	53	31	280.449.982,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	1.543.920.016,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	4.560.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	445.108.813,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	1.094.251.203,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	884.388.000,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	7	255.358.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	61	84	83.720.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	545.310.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
			UPTD PPRD Penajam Paser Utara						5.044.913.000,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	63,45	100	777.499.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,00	1.760.000.000.000,00	777.499.000,00		
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	122.404.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	346.935.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1	Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokume n SSPD	1272	12	308.160.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Keseekretariatan	Indekss	79,92	80	4.267.414.000,00		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	18.120.000,00		
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Dokume n	2	2	18.120.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	106.440.000,00		
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	75	12	106.440.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	41.792.000,00		
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	14.442.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokumen	12	4	14.102.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	13.248.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	62,5	76.320.000,00		
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11	20	76.320.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	609.439.868,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	14.331.453,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	9	153.873.364,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	3	127.952.051,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	3.960.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	309.323.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	848.264.715,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	28.457.280,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	5	13	819.807.435,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	1.644.412.324,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	11.970.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	421.301.024,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	1.211.141.300,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	922.625.093,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	19	304.701.200,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	48	111	94.439.293,00	UPTD PPRD Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
										Paser Utara	
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	523.484.600,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
			UPTD PPRD Paser						5.159.700.000,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	82,43	100	799.470.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,0 0	1.760.000.000.000,0 0	799.470.000,00		
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	167.040.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	352.740.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1	Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokume n SSPD		12	279.690.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Keseekretariatan	Indekss	82,95	83	4.360.230.000,00		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	33.600.000,00		
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Dokume n	2	2	33.600.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	106.440.000,00		
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	72	12	106.440.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	67.200.000,00		
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	16.800.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokume n	12	4	16.800.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	33.600.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	39,28	49.200.000,00		
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9	11	49.200.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	864.642.119,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	33.802.379,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	7	165.488.952,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	2	124.370.788,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	1.980.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	539.000.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	702.541.567,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	49.810.217,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	4	43	652.731.350,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	1.969.277.692,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12.560.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	785.561.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	5	1.171.156.692,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	567.328.622,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	20	267.786.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	112	179	99.502.622,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	200.040.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
			UPTD PPRD Berau						5.221.377.051,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	72,75	100	754.010.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,00	1.760.000.000.000,00	754.010.000,00		
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	80.100.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	439.360.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1	Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokumen SSPD	598	12	234.550.000,00		
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Kesekretariatan	Indekss	89,75	90	4.467.367.051,00		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	51.360.000,00		
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2	2	51.360.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	111.120.000,00		
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	116	12	111.120.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	99.030.000,00		
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	36.360.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokume n	12	4	23.080.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	39.590.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	31,25	43.440.000,00		
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	10	43.440.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	783.437.486,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	9.287.266,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	3	151.369.420,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	3	92.670.800,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	3.960.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	526.150.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	651.906.915,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	554.966.477,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	63	18	96.940.438,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	1.794.678.650,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	28.400.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	779.291.200,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	4	986.987.450,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	932.394.000,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17	288.334.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	96	106	244.560.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3	399.500.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau

Diharapkan pada tahun – tahun berikutnya dengan program yang telah ditetapkan dapat meningkat tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur yang semakin berat dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan bagian dari proses perencanaan tahunan perangkat daerah yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah memuat arah kebijakan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja tahunan yang selaras dengan dokumen RPJMD, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Tugas tersebut meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang pendapatan daerah, pengelolaan pajak dan retribusi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja pendapatan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah dan mitra kerja memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga dapat mendukung pencapaian target pendapatan daerah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah

**RENJA TAHUN 2026
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, perubahan struktur BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah dengan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) .

Renja PD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan Renja PD pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja PD oleh karena itu penyusunan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD dengan mengacu pada evaluasi rancangan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis (Renstra) PD.

Renja PD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, tujuan dan sasaran renja serta berpedoman pada Renstra PD. Renja PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pada pelaksanaan penyusunan Renja PD dalam tahun berjalan juga dilakukan Pengukuran Kinerja (PK) untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Renja PD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja PD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra PD dan RKPD tahun bersangkutan. Renja PD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja PD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah yang tertuang dalam RKPD dan Renstra PD dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan. Oleh sebab itu penyusunan Renja BPKAD Tahun Anggaran 2026 diharapkan lebih konkrit dan terukur.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program, kegiatan, sub kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
3. Penyusunan Renja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2026 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama satu tahun.

1.2 Landasan Hukum

Bahwa Penyusunan Renja PD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, mengacu :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Mendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 – 2045.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

- a. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan tahunan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;

Tujuan antara lain :

1. Menjabarkan Renstra ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BPKAD Provinsi Kaltim;

1.4 Sistematika Penulisan

Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB 1 PENDAHULUAN**
1. 1 Latar Belakang
 1. 2 Landasan Hukum

- 1. 3 Maksud dan Tujuan
- 1. 4 Sistematika Penulisan

BAB 2	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB 3	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3.	Program dan Kegiatan
BAB 4	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB 5	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi PD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Rankhir Renja PD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja, metode ini diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun program kegiatan. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, selain menjalankan tugas dan fungsi selaku SKPD juga selaku SKPKD yang melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset-aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Memperhatikan ketentuan tersebut, bahwa BPKAD sebagai unsur penunjang urusan keuangan dan aset dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara tidak

langsung juga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kaltim Tahun 2025-2029. Terdapat 6 Misi dalam mewujudkan Visi “KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS”, antara lain sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera;
2. Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Profesional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi;
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguata Budaya dan Kearifan Lokal;
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan;

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 dapat dilihat dari (tabel 2.1)

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan (Indikator Tahun 2023)	-	81,03	90	83,98	93,31	90	255,01	283,34
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 (Indeks)	-	-	-	-	-	82	100%

		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	-			-	-	-	-	-	-	100%	100%		
5.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			100%	100%		100%		100%	233,33%		233%	
5.02.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	100%
5.02.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.001.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%

5.02.001 .1.01.00 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	Dokume n	1	Doku men	1	Dokume n	1	Dokume n	100%	1	Dokume n	3	Dokume n	100%
5.02.001 .1.01.00 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	Dokume n	1	Doku men	1	Dokume n	1	Dokume n	100%	1	Dokume n	3	Dokume n	100%
5.02.001 .1.01.00 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	Lapor an	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	6	Laporan	100%
5.02.001 .1.01.00 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	7	Lapor an	7	Laporan	7	Laporan	100%	7	Laporan	21	Laporan	100%

5.02.001 .1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			100%	100%		100%		100%		233,33%		233%
5.02.001 .1.02.00 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124	Orang/B ulan	12 4	Oran g/Bul an	124	Orang/B ulan	124	Orang/B ulan	100%	124	Orang/B ulan	372	Orang/B ulan	100%
5.02.001 .1.02.00 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400	Dokume n	40 0	Doku men	400	Dokume n	400	Dokume n	100%	400	Dokume n	1.200	Dokume n	100%
5.02.001 .1.02.00 3	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD)	400	Dokume n	40 0	Doku men	400	Dokume n	400	Dokume n	100%	400	Dokume n	1.200	Dokume n	100%
5.02.001 .1.02.00 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokume n	12	Doku men	12	Dokume n	12	Dokume n	100%	12	Dokume n	36	Dokume n	100%

5.02.001 .1.02.00 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Lapor an	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	100%
5.02.001 .1.02.00 6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	Dokume n	3	Doku men	3	Dokume n	3	Dokume n	100%	3	Dokume n	9	Dokume n	100%
5.02.001 .1.02.00 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	3	Laporan	3	Lapor an	3	Laporan	3	Laporan	100%	3	Laporan	9	Laporan	100%
5.02.001 .1.02.00 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokume n	1	Doku men	1	Dokume n	1	Dokume n	100%	1	Dokume n	3	Dokume n	100%
5.02.001 .1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%			100%	100%	100%			100%	233,33%			233%

5.02.001 .1.03.00 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	12	Lapor an	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001 .1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			100%	100%		100%		100%		233,33%		233%
5.02.001 .1.05.00 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	100%
5.02.001 .1.05.00 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokume n	12	Doku men	12	Dokume n	12	Dokume n	100%	12	Dokume n	36	Dokume n	100%
5.02.001 .1.05.00 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140	Orang	14 0	Oran g	140	Orang	140	Orang	100%	140	Orang	420	Orang	100%

5.02.001 .1.05.01 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	140	Orang	14 0	Oran g	140	Orang	140	Orang	100%	140	Orang	420	Orang	100%
5.02.001 .1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			100%	100%		100%		100%		233,33%		233%
5.02.001 .1.06.00 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%
5.02.001 .1.06.00 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%
5.02.001 .1.06.00 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%

5.02.001 .1.06.00 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%
5.02.001 .1.06.00 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	6	Lapor an	6	Laporan	6	Laporan	100%	6	Laporan	18	Laporan	100%
5.02.001 .1.06.00 9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Lapor an	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001 .1.06.01 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	12	Dokume n	12	Doku men	12	Dokume n	12	Dokume n	100%	12	Dokume n	36	Dokume n	100%
5.02.001 .1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tesedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			100%	100%			100%	100%			233,33%	233%

5.02.001 .1.07.00 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	3	Unit	100%
5.02.001 .1.07.00 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	20	Unit	20	Unit	20	Unit	100%	20	Unit	60	Unit	100%
5.02.001 .1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			100%	100%		100%		100%		233,33%		233%
5.02.001 .1.08.00 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Lapor an	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001 .1.08.00 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Lapor an	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%

5.02.001 .1.08.00 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Lapor an	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001 .1.08.00 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Lapor an	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001 .1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	100%			100%	100%		100%		100%		233,33%		233%
5.02.001 .1.09.00 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	100%	6	Unit	18	Unit	100%
5.02.001 .1.09.00 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	25	Unit	25	Unit	25	Unit	100%	25	Unit	75	Unit	100%

	Operasional atau Lapangan															
5.02.001 .1.09.00 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	12	Unit	12	Unit	12	Unit	100%	12	Unit	36	Unit	100%
5.02.001 .1.09.00 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100%	5	Unit	15	Unit	100%
5.02.002	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%			100%	100%			100%			300%		300%
5.02.002 .1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	100%			100%	100%			100%			233,33%		233%

5.02.002 .1.01.00 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Koordinasi Penyusunan KUA PPAS	2	Dokume n	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002 .1.01.00 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	2	Dokume n	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002 .1.01.00 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA SKPD	37	Dokume n	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002 .1.01.00 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD)	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	-	-	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
		Jumlah Perubahan RKA- SKPD Diverifikasi	37	Dokume n	37	Doku men	37	Dokume n	37	Dokume n	100%	37	Dokume n	111	Dokume n	

5.02.002 .1.01.00 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	-	-	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	37	Dokume n	37	Doku men	37	Dokume n	37	Dokume n	100%	37	Dokume n	111	Dokume n	
5.02.002 .1.01.00 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	37	Dokume n	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002 .1.01.00 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perda tentang Penjabaran APBD	2	Dokume n	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002 .1.01.00 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	-	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%

	tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	0		0		0		0%	0		0		
5.02.002 .1.01.00 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3	Dokumen	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002 .1.01.01 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	Dokumen	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002 .1.01.01 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah dan Pemerintah Provinsi	74	Orang	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002 .1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			100%	100%			100%			233,33%		233%

5.02.002 .1.02.00 2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	20	Laporan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002 .1.02.00 3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	-	-	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20	Laporan	0		0		0		0,00	0		0		

5.02.002 .1.02.00 4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100%	10	Laporan	30	Laporan	300%
5.02.002 .1.02.00 6	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	3	Laporan	12	Laporan	12	B,	12	B,	100%	12	Laporan	36	Laporan	300%
5.02.002 .1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%			100%	100%		100%		100%		100		1.929.905.457
5.02.002 .1.03.00 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	300%

5.02.002 .1.03.00 2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	300%
5.02.002 .1.03.00 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460	Dokumen	460	Dokumen	460	Dokumen	460	Dokumen	100%	460	Dokumen	1.380	Dokumen	300%
5.02.002 .1.03.00 4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	300%
5.02.002 .1.03.00 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16	Dokumen	16	Dokumen	16	Dokumen	16	Dokumen	100%	16	Dokumen	48	Dokumen	300%

5.02.002 .1.03.00 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2	Dokume n	2	Doku men	2	Dokume n	2	Dokume n	100%	2	Dokume n	6	Dokume n	300%
5.02.002 .1.03.00 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemo tongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemo tongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemo tongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	Laporan	12	Lapor an	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	300%

5.02.002 .1.03.00 8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	300%
5.02.002 .1.03.00 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12.000	Dokumen	12.000	Dokumen	25.000	Dokumen	35.609	Dokumen	142%	12.000	Dokumen	59.609	Dokumen	497%
5.02.002 .1.03.01 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungja	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	300%

	waban Sub Kegiatan															
5.02.002 .1.03.01 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10	Orang	10	Orang	10	Orang	10	Orang	100%	10	Orang	30	Orang	300%
5.02.002 .1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%			100%	100%		100%		100%		233,33%		233%
5.02.002 .1.04.00 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	12	Laporan	300%
5.02.002 .1.04.00 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84	Dokumen	84	Dokumen	84	Dokumen	84	Dokumen	100%	84	Dokumen	252	Dokumen	300%

5.02.002 .1.04.00 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	Laporan	12	Lapor an	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	300%
5.02.002 .1.04.00 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD , BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD , BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48	Laporan	48	Lapor an	48	Laporan	48	Laporan	100%	48	Laporan	144	Laporan	300%
5.02.002 .1.04.00 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi	106	Dokume n	10 6	Doku men	106	Dokume n	106	Dokume n	100%	106	Dokume n	318	Dokume n	300%
5.02.002 .1.04.00 6	Penyusunan Tanggapan/Tin dak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungja waban	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	6	Dokume n	6	Doku men	6	Dokume n	6	Dokume n	100%	6	Dokume n	18	Dokume n	300%

	Pelaksanaan APBD															
5.02.002 .1.04.00 8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576	Dokumen	576	Dokumen	576	Dokumen	576	Dokumen	100%	576	Dokumen	1.728	Dokumen	300%
5.02.002 .1.04.00 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	300%
5.02.002 .1.04.01 0	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	300%
5.02.002 .1.04.01 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480	orang	480	orang	480	orang	480	orang	100%	480	orang	1.440	orang	300%

5.02.002 .1.04.01 2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6	Lembaga	6	Lemb aga	6	Lembaga	6	Lembaga	100%	6	Lembaga	18	Lembaga	300%
5.02.002 .1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%			100%	100%		100%		100%		233,33%		233%
5.02.002 .1.05.00 2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2	Laporan	2	Lapor an	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	6	Laporan	300%
5.02.002 .1.05.00 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10	Laporan	10	Lapor an	10	Laporan	10	Laporan	100%	10	Laporan	30	Laporan	300%
5.02.002 .1.05.00 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21	Laporan	21	Lapor an	21	Laporan	21	Laporan	100%	21	Laporan	63	Laporan	300%

5.02.002 .1.05.01 0	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16	Laporan	16	Lapor an	16	Laporan	16	Laporan	100%	16	Laporan	48	Laporan	300%
5.02.002 .1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	100%			100%	100%		100%		100%		233,33%		233%
5.02.002 .1.06.00 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3	Dokume n	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.003	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Tetap (Tanah & Bangunan) Daerah yang Diamankan	40%	90%			80%	100%		126%		40%		231,67%		193%
5.02.003 .1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%			100%	100%		100%		100%		233,33%		233%

5.02.003 .1.01.00 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokume n	1	Doku men	1	Dokume n	1	Dokume n	100%	1	Dokume n	3	Dokume n	300%
5.02.003 .1.01.00 2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokume n	1	Doku men	1	Dokume n	1	Dokume n	100%	1	Dokume n	3	Dokume n	100%
5.02.003 .1.01.00 3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokume n	0	0	1	Dokume n	1	Dokume n	100%	1	Dokume n	2	Dokume n	200%
5.02.003 .1.01.00 4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dokume n	0	0	1	Dokume n	1	Dokume n	100%	1	Dokume n	2	Dokume n	200%
5.02.003 .1.01.00 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	0	0	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	2	Laporan	200%

5.02.003 .1.01.00 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan	0	0	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	2	Laporan	200%
5.02.003 .1.01.00 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	Laporan	2	Lapor an	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	6	Laporan	100%
5.02.003 .1.01.00 8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3	Laporan	0	0	15	Laporan	15	Laporan	100%	3	Laporan	18	Laporan	600%
5.02.003 .1.01.00 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	laporan	0	0	1	Laporan	1	laporan	100%	1	laporan	2	laporan	200%
5.02.003 .1.01.01 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga nan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20	Dokume n	20	Doku men	20	Dokume n	20	Dokume n	100%	20	Dokume n	60	Dokume n	300%

5.02.003 .1.01.01 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100%	8	Laporan	24	Laporan	100%
5.02.003 .1.01.01 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	100%
5.02.003 .1.01.01 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	150	Orang	100%

**Realisasi Persentase keuangan tahun 2024 sebesar (sampai tanggal 31 Desember/Triwulan IV 2024) 91,13% Rp. 6.334.397.257.776,92,-
Dari Pagu Anggaran Rp. 6.951.239.958.592,00,-**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RPD) 2024-2026, disajikan pada tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu			100%	100%	100%	100 %	-	-	-
2.	Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPD Sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada Tahun ini (t-0)			40%	60%	47%	100 %	-	-	-
3.	1. Indeks Kualitas layanan Kesekretariatan			82	86	86	92,11	-	-	-
	2. Persentase Keluhan Pengguna			100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-

	Layanan yang ditindaklanjuti									
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai pasal 5 ayat (3) huruf a dan pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, didalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat isu-isu strategis dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Implementasi Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SP2D Online, Seven Days Service dan penggunaan KKPD)
2. Penyelesaian Personil, Pembiayaan, Prasarana dan Sarana (Aset) dan Dokumen P3D
3. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terkait penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
4. Pada sebagian besar aset tetap berupa tanah belum dilengkapinya bukti kepemilikan Barang Milik Daerah.
5. Diperlukan Organisasi Khusus yang menangani Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (UPTD).
6. Pengaturan pembagian tugas dan wewenang antara BMD Pengguna dengan BMD Pengelola.
7. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. SP2D Online merupakan Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Digital, yang memungkinkan proses pencairan dana mulai dari

penerbitan SPM hingga SP2D dilakukan secara realtime, paperless dan terintegrasi antara Pemprov. Kaltim dan Bank Daerah. Program Seven Days Service (SDS) adalah sebuah inovasi yang bertujuan untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel dan efisien dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta dapat mempercepat proses transaksi dan realisasi belanja daerah. KKPD digunakan untuk menunjang belanja daerah, sebagai bentuk percepatan realisasi Belanja yang menggunakan Uang Persediaan (UP) serta untuk meningkatkan UMKM dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

2. Membentuk Tim P3D Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertugas untuk meneliti secara seksama, detail dan menyeluruh baik fisik barang maupun dokumennya.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah dan Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
4. Inventarisasi aset tetap berupa tanah yang kemudian akan dilaksanakan Pengamanan dan Pensertifikatan
5. Upaya pembentukan Lembaga yang nantinya sebagai institusi untuk operasionalisasi/pengelola BMD yang berada dibawah kewenangan pengelola barang.
6. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
7. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset;

2.4 **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2026, telah dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026. Review ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD.

Hasil review menunjukkan bahwa Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 telah menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Prioritas tersebut sangat relevan dengan peran BPKAD dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, serta dalam optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Terkait aspek pengelolaan keuangan daerah, BPKAD akan menindaklanjuti arah kebijakan RKPD melalui program peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penguatan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan kas daerah yang efektif. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan di bidang reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja aparatur.

Dari sisi konsistensi, program dan kegiatan BPKAD yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 telah selaras dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama RPJMD 2025–2029 dan Renstra BPKAD 2025–2029. Meski demikian, masih terdapat beberapa catatan perbaikan, antara lain perlunya penajaman indikator kinerja agar lebih terukur, penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset, serta peningkatan integrasi sistem informasi keuangan daerah dengan sistem perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil review tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 telah memberikan arah yang jelas bagi BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun, beberapa penyempurnaan tetap diperlukan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas data aset daerah, sinkronisasi sistem pengelolaan keuangan lintas perangkat daerah, serta penguatan akuntabilitas kinerja keuangan daerah guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

Berdasarkan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel.2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah	93 %	5.954.582.738,341	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah	93 %	7.262.834.468,067	
a.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.628.403,055	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	6.482.744,599	
b.	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota	100 %	634.509,000	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota	100 %	1.154.351,390	
c.	Koordinasi dan Pengelolaan perbendahara an Daerah	Kaltim/Lu ar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah	100 %	3.831.358,164	Koordinasi dan Pengelolaan perbendahara an Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah	100 %	4.649.946,153	
d.	Koordinasi dan pelaksanaan	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan	100 %	2.817.755,461	Koordinasi dan pelaksanaan akutansi dan	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan akutansi	100 %	3.686.118,567	

	akutansi dan pelaporan keuangan daerah		akutansi dan pelaporan keuangan daerah			pelaporan keuangan daerah		dan pelaporan keuangan daerah			
e.	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	5.941.273.865,418	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	7.246.406.796,078	
f.	Pengelolaan Data dan Implementasi Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	100 %	396.847,243	Pengelolaan Data dan Implementasi Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	100 %	454.511,280	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	8.71 %	7.486.861,592	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Indeks Pengelolaan BMD	2,40 (Indeks)	10.486.851,931	
a.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengelolaan BMD	100 %	7.486.861,592	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengelolaan BMD	100 %	10.486.861,652	-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretaria tan 2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang	92.13 Indeks 100 %	71.837.749,707	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	92.13 Indeks 100 %	65.299.625,733	

			ditindaklanjuti								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.444.796,649	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.444.793,681	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	46.947.297,819	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	37.779.143,305	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	493.200,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	493.176,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	962.975,099	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	963.021,868	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	6.816.102,439	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.354.609,005	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	877.330,718	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	877.330,718	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	9.939.199,211	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10.061.110,816	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilingkungan BPKAD Prov.Kaltim	100 %	4.356.847,772	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilingkungan BPKAD Prov.Kaltim	100 %	6.326.440,340	

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa dari hasil perbandingan antara program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan pagu indikatif RKPd dengan hasil analisis kebutuhan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 telah sesuai dan dapat mengakomodir program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan kebutuhan anggaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang keuangan

Dalam pelaksanaan tugasnya BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD adalah Bantuan Keuangan dimana Bantuan Keuangan adalah belanja transfer dari Pemerintah Daerah diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya. Adapun tujuan dari Bantuan Keuangan adalah mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional, daerah dan kabupaten/ kota serta mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat. Bantuan Keuangan yang telah dilaksanakan akan dilakukan monitoring secara berkala oleh Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan yang terlebih dahulu diberitahukan melalui surat resmi dari Pemerintah Daerah (Provinsi).

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, usulan-usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada tabel 2.5 berikut :

Tabel. 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kaltim/Luar Kaltim	Persentase Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-

2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim/Luar Kaltim	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Kaltim/Luar Kaltim	1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	-	-
			2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program Nasional dan untuk mensinergikan pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, masing-masing pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan program pembangunan daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Renstra Tahun 2025-2029 antara lain,

- a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat/ ASN
- b. Memusatkan tujuan/arah perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) , pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;
- d. Meningkatkan komunikasi dan integrasi data dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembayaran sesuai sumber pendanaan (DAU, DAK).

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra BPKAD Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program, kegiatan dan pengelolaan APBD.
- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipasi, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
- c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No.	Tujuan dan Sasaran	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Cara Perhitungan	Capaian Tahun 2024	Satuan	Target 2026
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Opini BPK atas LKPD	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur oleh BPK RI	WTP	Opini	WTP
		SASARAN 1 Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Perhitungan sesuai Permendagri 19 Tahun 2020	83,45	Indeks	84
			2. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Perhitungan sesuai ketentuan Kemenkeu RI No. 127/KM.6/2022	2,26	Indeks	1.6
		SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat terhdap SAKIP sesuai dengan Pergub No. 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	65.15	POIN	69

Penurunan Indeks dikarenakan ada beberapa faktor penilaian bersumber dari seluruh PD. Apabila PD tidak membuat dan menyampaikan ke BPKAD maka akan mempengaruhi indeks pengelolaan aset (IPA) BPKAD selaku SKPD. Itu yang menyebabkan perhitungan IPA diturunkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Kegiatan adalah merupakan bagian dari program sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan penggerakan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kedudukan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun programnya yang bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi PD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi
- b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Perubahan Kabupaten/Kota
 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
- c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

- Penyusunan Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
- e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Analisis Investasi Pemerintah Daerah
 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
- f. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Standar Harga
 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - Inventarisasi Barang Milik Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Penilaian Barang Milik Daerah
- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu Program Prioritas pada RKPD Kaltim Tahun 2026. Untuk mendukung Program Prioritas tersebut BPKAD memfokuskan kegiatan pada isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Penguatan Pengelolaan BMD: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2) Implementasi Aplikasi SIPBMD: meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMD melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset daerah.
- 3) Pengamanan dan Pemeliharaan BMD:
 - Memastikan keberlangsungan pemanfaatan dan pengamanan BMD dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerugian daerah.
 - Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan BMD untuk memastikan keberlangsungan pemanfaatan BMD.
- 4) Pengembangan Kapasitas SDM: meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai dalam pengelolaan BMD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang lebih baik.
- 5) Inventarisasi dan Verifikasi BMD: Melakukan inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah untuk memastikan keakuratan data aset daerah.

- 6) Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD: Melakukan pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang tidak digunakan lagi atau rusak berat.
- 7) Penilaian dan Penatausahaan BMD: Melakukan penilaian dan penatausahaan BMD untuk memastikan nilai aset daerah yang akurat.
- 8) Kerja Sama dengan Instansi Lain: Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain dalam pengelolaan BMD, antara lain pemanfaatan BMD untuk kegiatan pembangunan.

Dalam penyusunan Renja 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah serta program unggulan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, program prioritas bidang Barang Milik Daerah akan disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program BPKAD Prov.Kaltim Tahun 2026

Dokumen Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (RENJA) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk kegiatan tahun 2026 merupakan implementasi dari Renstra Tahun 2025-2029

Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan tertuang dalam Renja Tahun 2026 sebagaimana pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				7.338.620.945.731				6.644.401.710.379,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.338.620.945.731				6.644.401.710.379,00
5,02	KEUANGAN				7.338.620.945.731				6.644.401.710.379,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		100 92.13	65.299.625.733				73.365.955.000,00
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	1.444.793.681				1.858.000.000,00
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan	2 Dokumen	429.092.571	Pajak Daerah			650.000.000,00

		Perangkat Daerah	an, Semua Kel/Desa						
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, an, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	121.373.972	Pajak Daerah			200.000.000,00
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, an, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	66.121.446	Pajak Daerah			81.000.000,00
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, an, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	159.703.542	Pajak Daerah			198.000.000,00
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, an, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	75.321.800	Pajak Daerah			99.000.000,00
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, an, Semua Kel/Desa	2 Laporan	295.320.810	Pajak Daerah			315.000.000,00

		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	297.859.540	Pajak Daerah			315.000.000,00
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan		100%	37.779.143.305				38.167.000.000,00
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141 Orang/ Bulan	35.005.026.450	Pajak Daerah			35.000.000.000,00
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Dokumen	1.955.760.000	Pajak Daerah			2.000.000.000,00
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Dokumen	467.374.855	Pajak Daerah			504.000.000,00
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	99.936.000	Pajak Daerah			108.000.000,00

5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	97.616.000	Pajak Daerah			135.000.000,00
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	61.350.000	Pajak Daerah			152.000.000,00
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	58.704.000	Pajak Daerah			150.000.000,00
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	33.376.000	Pajak Daerah			118.000.000,00
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD		100%	493.176.000				900.000.000,00
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan	12 Laporan	493.176.000	Pajak Daerah			900.000.000,00

		Daerah pada SKPD	an, Semua Kel/Desa						
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselaran Dokumen Administrasi Kepegawaian		100%	963.021.868				1.890.000.000,00
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	251.325.285	Pajak Daerah			270.000.000,00
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	89.924.800	Pajak Daerah			135.000.000,00
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140 Orang	416.708.392	Pajak Daerah			1.215.000.000,00
5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140 Orang	205.063.391	Pajak Daerah			270.000.000,00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim		100%	7.354.609.005				9.645.000.000,00
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	244.835.851	Pajak Daerah			225.000.000,00

		Kantor yang Disediakan	Semua Kel/Desa						
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	2.916.638.013	Pajak Daerah			1.600.000.000,00
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	521.717.573	Pajak Daerah			2.700.000.000,00
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	479.240.993	Pajak Daerah			450.000.000,00
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	353.776.575	Pajak Daerah			630.000.000,00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	574.160.000	Pajak Daerah			1.800.000.000,00
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2.264.240.000	Pajak Daerah			2.240.000.000,00

5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	877.330.718				1.900.000.000,00
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	95.301.127	Pajak Daerah			1.000.000.000,00
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	782.029.591	Pajak Daerah			900.000.000,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	10.061.110.816				8.578.955.000,00
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	132.299.290	Pajak Daerah			129.000.000,00
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	4.907.855.218	Pajak Daerah			4.000.000.000,00
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	134.594.308	Pajak Daerah			449.955.000,00

		Kantor yang Disediakan	Semua Kel/Desa						
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	4.886.362.000	Pajak Daerah			4.000.000.000,00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Provinsi Kaltim		100%	6.326.440.340				10.427.000.000,00
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	119.589.560	Pajak Daerah			180.000.000,00
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	903.639.442	Pajak Daerah			1.348.000.000,00
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	740.372.320	Pajak Daerah			899.000.000,00
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	4.562.839.018	Pajak Daerah			8.000.000.000,00

			Semua Kel/Desa						
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah		93	7.262.834.468.06 7				6.560.369.255.379,0 0
5.02.02.1. 01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah		100%	6.482.744.599				6.423.254.000,00
5.02.02.1. 01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	212.780.000	Pajak Daerah			179.982.000,00
5.02.02.1. 01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	208.440.000	Pajak Daerah			224.977.000,00
5.02.02.1. 01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	37 Dokumen	808.600.000	Pajak Daerah			1.000.000.000,00
5.02.02.1. 01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	37 Dokumen	667.800.000	Pajak Daerah			900.000.000,00
5.02.02.1. 01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an,	37 Dokumen	380.400.000	Pajak Daerah			143.985.000,00

			Semua Kel/Desa						
5.02.02.1. 01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	37 Dokumen	412.050.000	Pajak Daerah			143.985.000,00
5.02.02.1. 01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	468.118.019	Pajak Daerah			296.970.000,00
5.02.02.1. 01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	217.200.000	Pajak Daerah			197.980.000,00
5.02.02.1. 01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	175.480.000	Pajak Daerah			242.975.000,00
5.02.02.1. 01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.872.816.580	Pajak Daerah			3.000.000.000,00

5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74 Orang	59.060.000	Pajak Daerah			92.400.000,00
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada		100%	1.154.351.390				1.327.894.000,00
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	427.050.000	Pajak Daerah			269.973.000,00
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	427.050.000	Pajak Daerah			269.973.000,00
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	30.671.390	Pajak Daerah			360.000.000,00

	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	269.580.000	Pajak Daerah			427.948.000,00
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah		100%	4.649.946.153				6.060.000.000,00
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	751.428.341	Pajak Daerah			740.000.000,00
5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	72.351.858	Pajak Daerah			53.000.000,00
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460 Dokumen	108.584.874	Pajak Daerah			78.000.000,00
5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan	Semua Kota/Kab , Semua	1 Dokumen	73.420.000	Pajak Daerah			71.000.000,00

		Pembiayaan Daerah	Kecamatan, Semua Kel/Desa						
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Dokumen	208.915.830	Pajak Daerah			1.220.000.000,00
5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	308.305.895	Pajak Daerah			582.000.000,00
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.223.597.860	Pajak Daerah			1.120.000.000,00

		dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
5.02.02.1. 03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	288.110.000	Pajak Daerah			217.000.000,00
5.02.02.1. 03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32000 Dokumen	1.236.350.209	Pajak Daerah			585.000.000,00

5.02.02.1. 03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	101.981.206	Pajak Daerah			719.000.000,00
5.02.02.1. 03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	276.900.080	Pajak Daerah			675.000.000,00
5.02.02.1. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	3.686.118.567				5.881.000.000,00
5.02.02.1. 04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	33.287.360	Pajak Daerah			197.000.000,00
5.02.02.1. 04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138 Dokumen	1.414.242.574	Pajak Daerah			1.790.000.000,00

5.02.02.1. 04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	63.552.000	Pajak Daerah			126.000.000,00
5.02.02.1. 04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51 Laporan	179.955.340	Pajak Daerah			198.000.000,00
5.02.02.1. 04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	314.019.120	Pajak Daerah			899.000.000,00
5.02.02.1. 04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	176.556.000	Pajak Daerah			359.000.000,00
5.02.02.1. 04.0008	Penyusunan Analisis Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan	Semua Kota/Kab , Semua	1 Dokumen	158.672.000	Pajak Daerah			243.000.000,00

	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kecamatan, Semua Kel/Desa						
5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	153.022.000	Pajak Daerah			225.000.000,00
5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	325.021.373	Pajak Daerah			180.000.000,00
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480 Orang	576.686.000	Pajak Daerah			1.169.000.000,00
5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Lembaga	291.104.800	Pajak Daerah			495.000.000,00
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	7.246.406.796.078				6.540.188.000.000,00
5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	96.830.000	Pajak Daerah			188.000.000,00

			Semua Kel/Desa						
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	1.944.294.638.300				2.000.000.000.000,00
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	70.218.949.370				130.000.000.000,00
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Laporan	5.231.796.378.408				4.410.000.000.000,00
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah		100%	454.511.280				489.107.379,00
5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	454.511.280	Pajak Daerah			489.107.379,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks pengelolaan barang milik daerah		2,40	10.486.851.931				10.666.500.000,00

5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD		100%	10.486.851.931				10.666.500.000,00
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	741.453.474	Pajak Daerah			994.000.000,00
5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	61.241.904	Pajak Daerah			153.000.000,00
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	243.042.820	Pajak Daerah			167.000.000,00
5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	175.252.586	Pajak Daerah			165.000.000,00
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	354.649.952	Pajak Daerah			988.000.000,00
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	321.578.662	Pajak Daerah			500.500.000,00

5.02.03.1. 01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	3 Laporan	4.159.823.290	Pajak Daerah			2.332.000.000,00
5.02.03.1. 01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	6 Laporan	1.105.053.000	Pajak Daerah			1.261.000.000,00
5.02.03.1. 01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1 Laporan	282.722.000	Pajak Daerah			187.000.000,00
5.02.03.1. 01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	1.998.995.004	Pajak Daerah			2.146.000.000,00
5.02.03.1. 01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	8 Laporan	519.686.560	Pajak Daerah			1.299.000.000,00
5.02.03.1. 01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an,	28 Laporan	379.732.679	Pajak Daerah			278.000.000,00

			Semua Kel/Desa						
5.02.03.1. 01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	50 Orang	143.620.000	Pajak Daerah			196.000.000,00

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, selain itu Renja Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan untuk :

- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Merumuskan program dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- c. Merencanakan program/ kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
- e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

5.2 Rencana tindak lanjut

Dengan tersusunnya Renja BPKAD Provinsi Kaltim ini, maka rekomendasi untuk pengelola keuangan Tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;

- b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar PD sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan aset daerah;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKAD Provinsi Kaltim yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.

RENJA TAHUN 2026 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, saat ini semakin dituntut untuk menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam organisasi sangat bergantung pada kemampuannya dalam menyampaikan informasi secara transparan, seimbang, dan merata kepada seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, instansi pemerintah berkewajiban untuk mempersiapkan dan menyusun Rencana Kerja serta menyampaikan Informasi Kinerja secara tertulis, berkala, dan melembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban normatif.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen perencanaan tahunan BKD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun melalui partisipasi masyarakat. Rencana Kerja BKD Prov. Kaltim merupakan bentuk perencanaan tahunan di bidang kepegawaian yang bersifat lebih operasional, dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang mendukung pengelolaan manajemen kepegawaian. Perencanaan ini disusun dan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mempercepat terwujudnya aparatur yang profesional, andal, dan religius.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimulai dari tahap persiapan, yaitu pembentukan Tim Penyusun Renja BKD, orientasi penyusunan Renja, penetapan agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi. Selanjutnya dilakukan penyusunan Rancangan Awal Renja BKD, Rancangan Renja BKD, Rancangan Akhir Renja BKD, dan penetapan renja BKD yang mencakup proses perumusan dan penyajiannya. Proses ini ditutup dengan penetapan Renja BKD melalui pengesahan oleh Kepala BKD, yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKD Prov. Kaltim Tahun 2025.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan yang saling terintegrasi, mulai dari kebijakan, rencana kerja, hingga anggaran. Sebagai dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja BKD Prov. Kaltim memiliki peran strategis karena menjadi penghubung antara perencanaan internal BKD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan strategi jangka menengah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) BKD, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Rencana Kerja BKD disusun secara terpadu, partisipatif, dan demokratis, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKD Prov. Kaltim, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pengusulan program/kegiatan yang dibiayai oleh APBD Pemprov. Kaltim.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja BKD Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai acuan dalam memantau realisasi pelaksanaan program/kegiatan yang dijalankan oleh Kasubbag di Sekretariat maupun Kasubbid pada masing-masing bidang di lingkungan BKD Provinsi Kalimantan Timur. Adapun landasan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2025;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
18. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/0052/Bapp-II Tanggal 06 Januari 2025 Tentang Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus sebagai alat pengendali (kontrol) dan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bagian, sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja BKD Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menguraikan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kepegawaian, serta untuk menetapkan prioritas kinerja Perangkat Daerah. Dokumen ini juga berperan penting dalam mendukung proses penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga tercipta konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan, serta keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, maksud dan tujuan, dasar hukum, serta kedudukan Renja dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini menjelaskan pentingnya Renja sebagai dokumen operasional tahunan dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD dan RKPD;

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, termasuk analisis capaian indikator kinerja, kendala yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut. Selain itu, dijelaskan juga sejauh mana kontribusi capaian tersebut terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Kalimantan Timur

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam tahun perencanaan, serta program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian tersebut. Setiap program dan kegiatan dijabarkan lengkap dengan indikator kinerja, target capaian, kelompok sasaran, serta perkiraan kebutuhan anggaran;

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan rencana kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan BKD Prov. Kaltim, disertai sumber pendanaannya. Penyajian dilakukan secara rinci dan disesuaikan dengan kebijakan umum anggaran serta kemampuan keuangan daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari keseluruhan dokumen, serta harapan dan komitmen untuk pelaksanaan Rencana Kerja yang telah disusun. Pada bagian ini juga ditegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antar unit kerja untuk mencapai target yang ditetapkan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

BKD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD

Evaluasi kinerja merupakan proses umpan balik yang dilakukan terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan program serta kegiatan. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas organisasi. Sebagai proses berkelanjutan, evaluasi kinerja juga berfungsi menyajikan informasi faktual terkait ketercapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

Dalam lingkup kelembagaan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan instansi merupakan bagian esensial dari manajemen kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian kegiatan berdasarkan prioritas dan urgensi manajerial. Kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya aparatur, serta pencapaian sasaran strategis daerah dikategorikan sebagai prioritas utama dalam evaluasi.

Pada tahun 2024, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan dua program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Kepegawaian, baik di tingkat BKD maupun pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Secara akumulatif, BKD menjalankan 11 kegiatan dan 38 sub-kegiatan, sementara UPTD Penilaian Kompetensi ASN mengelola 2 program, 7 kegiatan, dan 12 sub-kegiatan. Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sistem pelaporan kinerja berbasis aplikasi dan revidu internal, serta mengacu pada capaian indikator kinerja perangkat daerah.

Rencana Kerja BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029. Oleh karena itu, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2024 menjadi pondasi penting dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2026 agar lebih terarah, berbasis data, dan selaras dengan visi misi Kepala Daerah serta target kinerja nasional.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV.KALTIM

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari pagu anggaran Rp 413.600.000,00 dan target kinerja sebesar 100,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp 399.078.420,00 dengan realisasi kinerja sebesar 100,00%, sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 100,00%.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp 20.154.378.160,00 dan target kinerja sebesar 97,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp 19.908.731.337,00 dan kinerja sebesar 96,20%, sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 99,18%.
 3. Kegiatan Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp 10.000.000,00 dan target kinerja sebesar 90,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp 9.999.000,00 dan kinerja sebesar 85,46% sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 94,96%.
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp 448.142.886,00 dan target kinerja sebesar 81,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp 444.974.000,00 dan kinerja sebesar 79,00% sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 97,53%.
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp 2.707.636.414,00 dan target kinerja sebesar 100,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp 2.686.369.194,00 dan kinerja sebesar 85,46% sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 85,46%.
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp 2.666.147.400,00 dan target kinerja sebesar 100,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp 2.401.186.670,00 dan kinerja sebesar 100,00% sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 100,00%.
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp 1.708.215.050,00 dan target kinerja sebesar 100,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp 1.681.433.718,00 dan kinerja

sebesar 85,46% sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 94,96%.

➤ Program Kepegawaian

8. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dari pagu anggaran sebesar Rp 6.562.629.500,00 dan target kinerja sebesar 85,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp 6.377.626.637,11 dan kinerja sebesar 59,00% sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 69,41%.
9. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dari pagu anggaran sebesar Rp 1.597.553.200,00 dan target kinerja sebesar 85,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp 1.560.337.691,00 dan kinerja sebesar 95,00% sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 111,76%.
10. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dari pagu anggaran sebesar Rp 7.234.767.125,00 dan target kinerja sebesar 40%, kemudian direalisasikan sebesar Rp 6.432.335.727,00 dan kinerja sebesar 42,00% sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 105,00%
11. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dari pagu anggaran sebesar Rp 11.885.832.000,00 dan target kinerja sebesar 90,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp11.673.345.233,00 dan kinerja sebesar 92,00% sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 102,22%

UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI

12. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp 42,493,700.00 dan target kinerja sebesar 70,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp 40,815,000.00 dan kinerja sebesar 70,00%, sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 100,00%
13. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp 1,769,298,665.00 dan target kinerja sebesar 100,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp1,743,075,576.00 dan kinerja sebesar 100,00%, sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 100,00%.
14. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp 1,769,298,665.00 dan target kinerja sebesar 100,00%,

kemudian direalisasikan sebesar Rp1,743,075,576.00 dan kinerja sebesar 100,00%, sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 100,00%.

15. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp 2,000,000,000.00 dan target kinerja sebesar 100,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp1,650,272,340.00 dan kinerja sebesar 100,00%, sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 100,00%.
16. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp 1,132,165,566.00 dan target kinerja sebesar 100,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp1,068,701,868.00 dan kinerja sebesar 100,00%, sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 100,00%.
17. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp 973,483,835.00 dan target kinerja sebesar 95,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp 890,159,603.00 dan kinerja sebesar 95,00%, sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 100,00%.
18. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dari pagu anggaran sebesar Rp 2,040,000,000.00 dan target kinerja sebesar 9,00%, kemudian direalisasikan sebesar Rp 1,985,044,500.00 dan kinerja sebesar 15,00%, sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase kinerja sebesar 166,67%

Secara keseluruhan dari anggaran Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Murni dan Anggaran Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. **63.346.343.501,00** kemudian direalisasikan sebesar Rp. **60.953.486.511,11** sehingga diperoleh persentase pencapaian rencana tingkat capaian keuangan sebesar **96,22%**. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil dilaksanakan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Timur

PD : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.03.0.00.0.00.0 1.0000	Badan Kepegawaian Daerah									
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	-	91,35	-	0,00	0,00%	0	91,35	0%
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95	0	85,00	98,00	115,29%	71	169,00	177,89%
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100,00	0	100,00	100,00	100,00%	100	100	100,00%
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	0	77	0,00	0,00	0,00%	0	0	0%

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang ditetapkan tepat waktu	100	0	100,00	100,00	100,00%	100	200,00	200%
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	0	1	0,00	0,00	0,00%	0	1,00	0%
		Persentase realisasi anggaran	97	0	97,00	96,20	99,18%	97	193,20	199%
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	90	0	90,00	85,46	94,96%	90	175,46	195%
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	0	100	100,00	0,00	0,00%	0	100,00	0%
		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	81	0	81,00	79,00	97,53%	81	160,00	198%
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0	100	0,00	0,00	0,00%	0	100,00	0%

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	0	100,00	85,46	85,46%	100	185,46	185%
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	0	2	0,00	0,00	0,00%	0	2,00	0%
		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	0	100,00	100,00	100,00%	100	200,00	200%
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang layak pakai	0	99	0,00	0,00	0,00%	0	99,00	0%
		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100	0	90,00	85,46	94,96%	100	185,46	185%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	0	101	0,00	0,00	0,00%	0	101,00	0%
		Indeks NSPK Manajemen ASN	0	0	90,00	90,43	100,48%	90,5	180,93	0%
		Persentase pengembangan karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya	99,17	0	0	0	0	0	0	0%

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	86	0	0	0	0	0	0	0%
		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	42,69	0	0	0	0	0	0	0%
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	91,5	0	0	0	0	0	0	0%
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	0	99	85,00	59,00	69,41%	85	243,00	0%
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	5	0	0	0	0	0	0	0%
		Persentase kualitas pengolahan data dan kualitas informasi	100	0	0	0	0	0	0	0%
		Persentase Perencanaan kebutuhan ASN yang terselesaikan pada masing-masing Perangkat Daerah	100	0	0	0	0	0	0	0%

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Usulan Pensiun Pegawai Yang ditindaklanjuti	100	0	0	0	0	0	0	0%
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	0	90	85,00	95,00	111,76%	86	271,00	0%
		Persentase Penempatan ASN Jabatan Manajerial sesuai dengan kebutuhan	100	0	0	0	0	0	0	0%
		Persentase Penempatan ASN Jabatan Non Manajerial sesuai dengan kebutuhan	100	0	0	0	0	0	0	0%
		Persentase Usulan Kenaikan Pangkat yang terbit Sknya	100	0	0	0	0	0	0	0%
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dikembangkan kompetensinya	0	85	40,00	42,00	105,00%	85	212,00	0%
		Persentase Fasilitasi Pengembangan Karir ASN Dalam Jabatan Fungsional	90	0	0	0	0	0	0	0%

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pelatihan ASN	85	0	0	0	0	0	0	0%
		Persentase penyelenggaraan manajemen ASN melalui peningkatan kompetensi ASN	86	0	0	0	0	0	0	0%
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	91,5	90	90,00	92,00	102,22%	90	272,00	297%
		Persentase Pemberian Penghargaan Bagi ASN yang Berkinerja Baik	99	0	0	0	0	0	0	0%
		Persentase permohonan pembinaan ASN yang Ditindaklanjuti	100	0	0	0	0	0	0	0%
5.03.0.00.0.00.0 1.0002	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai									
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	0	78,77	0,00	0,00	0,00%	0	78,77	100%
		Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	95		85,00	90,00	105,88%	87	177,00	186%

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100		100,00	100,00	100,00%	100	200,00	200%
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	0	100	0,00	0,00	0,00%	0	100,00	0%
		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70	0	70,00	70,00	100,00%	70	140,00	200%
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0	100	0,00	0,00	0,00%	0	100,00	0%
		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	0	100,00	100,00	100,00%	100	200,00	200%
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	0	0	0,00	100,00	0,00%	0	100,00	0%
5.03.01.1.08		Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	0	1	1,00	1,00	100,00%	0	2,00	0%

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	0	100,00	100,00	100,00%	100	200,00	200%
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang layak pakai	0	99	0,00	0,00	0,00%	0	99,00	0%
		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100	0	95,00	95,00	100,00%	100	195,00	195%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	0	101	0,00	0,00	0,00%	0	101,00	0%
		Indeks NSPK Manajemen ASN	0	0	90,00	90,43	100,48%	90,5	180,93	0%
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	0	10	9,00	15,00	166,67%	90,5	115,50	0%
		laporan pengembangan Instrumen Kompetensi Pegawai	1	0	0	0	0	0	0	0%
		Laporan Pengujian dan Penilaian Kompetensi Pegawai	1	0	0	0	0	0	0	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Kalimantan Timur

Analisis kinerja pelayanan BKD Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk menilai capaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sejauh mana kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kajian ini mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik berupa Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), maupun indikator yang bersumber dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada Renstra BKD 2024–2026, indikator kinerja kunci (IKK) lebih banyak difokuskan pada pengukuran rasio pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, status jabatan fungsional, serta kepemilikan sertifikat kompetensi. Indikator tersebut cenderung bersifat kuantitatif sehingga hanya menggambarkan kondisi komposisi ASN secara umum. Namun, seiring dengan ditetapkannya RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025–2045 dan penyusunan Renstra BKD 2025–2029, terjadi penyesuaian indikator agar lebih sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta regulasi nasional terbaru di bidang manajemen ASN.

Karena indikator baru tersebut mulai diterapkan pada tahun 2024, maka capaian pada tahun tersebut ditetapkan sebagai baseline dengan nilai realisasi 100% sebagai titik awal pengukuran. Penetapan baseline ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan kinerja sempurna, melainkan sebagai acuan awal untuk membandingkan capaian tahun-tahun berikutnya.

Gambaran capaian indikator kinerja pelayanan BKD Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan pada periode Renstra 2025–2029 disajikan pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kepegawaian	Manajemen ASN	Persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan	60,87%	89,00%	89,21%	89,42%	100%	*68,40%	-	-	Tidak melakukan Proyeksi
			Persentase pengembangan karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya	87,00%	87,05%	88,13%	88,47%	100%	*99,97%	-	-	Tidak melakukan Proyeksi
			Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	94,23%	94,26%	94,29%	94,32%	100%	*99,41%	-	-	Tidak melakukan Proyeksi
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	97,29%	97,36%	97,43%	97,50%	100%	*99,93%	-	-	Tidak melakukan Proyeksi
			Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	56,01%	69,60%	74,00%	80,00%	100%	*100,76%	-	-	Tidak melakukan Proyeksi

*Angka Sementara

Sumber : Data BKD Diolah

Berdasarkan tabel, capaian indikator BKD tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi, antara lain sebagai berikut :

- Pada indikator persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan, capaian sementara baru 68,40% dari target 89,00%. Angka ini masih rendah, namun perlu digarisbawahi bahwa capaian tersebut belum mencakup pengangkatan PPPK Tahap II dan PPPK Paruh Waktu yang dijadwalkan pada awal Oktober 2025. Dengan adanya tambahan pengangkatan ASN tersebut, capaian indikator ini diproyeksikan akan meningkat signifikan hingga mendekati target pada akhir tahun.
- Pada indikator pengembangan karir ASN sesuai kompetensi, capaian sementara tahun 2025 tercatat 99,97%. Hal ini menunjukkan proses pengembangan karir telah berjalan dengan baik, meskipun kualitas penerapan masih perlu dipastikan agar benar-benar relevan dengan kebutuhan organisasi.
- Indikator ASN yang ditingkatkan kompetensinya juga menunjukkan capaian tinggi sebesar 99,41% pada 2025. Hal ini mengindikasikan komitmen BKD dalam penyelenggaraan pelatihan, walaupun efektivitas dan pemerataan pelatihan masih harus ditingkatkan.
- Indikator pegawai dengan SKP bernilai baik bahkan melampaui target, dengan capaian 99,93% pada 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem penilaian kinerja pegawai telah berjalan dengan konsisten, meskipun perlu penguatan agar hasil penilaian lebih objektif dan benar-benar mencerminkan kinerja individu.
- Sementara itu, indikator ASN yang telah dinilai kompetensinya justru melampaui target dengan capaian 100,76% pada 2025. Capaian yang melebihi 100% ini mencerminkan adanya percepatan dalam implementasi penilaian kompetensi ASN. Meski capaian ini patut diapresiasi, tantangan berikutnya adalah memastikan hasil penilaian kompetensi ditindaklanjuti secara nyata dalam pemetaan talenta, promosi, dan pengembangan karir ASN, sehingga tidak berhenti pada pencatatan administratif semata.

Secara umum, capaian kinerja BKD tahun 2025 menunjukkan tren positif, meskipun masih ada catatan penting. Pertama, capaian indikator pemenuhan ASN sesuai perencanaan belum maksimal, tetapi diperkirakan akan meningkat signifikan setelah pengangkatan PPPK Tahap II dan PPPK Paruh Waktu pada Oktober 2025. Kedua, capaian indikator lain yang sangat tinggi perlu diimbangi dengan penguatan kualitas instrumen dan monitoring berkelanjutan, agar tidak hanya menggambarkan keberhasilan administratif. Ketiga, keberhasilan penilaian kompetensi ASN harus benar-benar diintegrasikan ke dalam sistem merit agar mendukung manajemen ASN yang transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

Kinerja pelayanan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilakukan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Rincian Tugas dan Fungsi Tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah;
3. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Mutasi Pegawai;
4. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Pengembangan;
5. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Pembinaan;
6. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;
7. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

● Koordinasi dan Sinergi Program

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur menjalin sinergi dengan berbagai instansi strategis, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Kerja sama yang erat terjalin dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dalam penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan serta pengembangan kompetensi ASN, guna memastikan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan. BKD juga bersinergi dengan Biro Organisasi dalam hal penataan kelembagaan, penyusunan analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja (ABK), serta perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan struktur organisasi yang efektif dan efisien. Selain itu, koordinasi dengan Inspektorat Daerah dilakukan dalam pengawasan terhadap

pelaksanaan sistem merit, penilaian kinerja, kepatuhan terhadap etika ASN, serta pencegahan pelanggaran disiplin.

Di tingkat nasional, BKD berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai mitra teknik utama dalam pengelolaan administrasi ASN, seperti mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, dan pengembangan sistem informasi kepegawaian. Hubungan kelembagaan juga dibangun dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), terutama dalam implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem meritokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, kolaborasi dilakukan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam memastikan program dan kegiatan BKD terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sinergi antar instansi ini menjadi landasan penting dalam mendukung terciptanya tata kelola kepegawaian yang efektif, adaptif, dan berdaya saing.

- **Hambatan**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen kepegawaian, BKD Provinsi Kalimantan Timur masih dihadapkan pada sejumlah hambatan operasional dan sistemik yang mempengaruhi efektivitas layanan serta pencapaian kinerja organisasi. Salah satu hambatan utama adalah belum optimalnya digitalisasi layanan kepegawaian, khususnya pada proses mutasi, promosi, dan pengelolaan data kepegawaian. Meskipun sistem seperti e-Mutasi dan SIM ASN telah mulai diterapkan, keterbatasan infrastruktur TIK, ketergantungan pada proses manual, serta literasi digital ASN yang belum merata masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pelayanan berbasis less-paper dan real-time.

Hambatan lainnya terletak pada ketersediaan dan akurasi data ASN, di mana pembangunan Sistem E-Personal dan Tata Naskah Elektronik belum sepenuhnya terintegrasi dan masih dalam tahap pengembangan. Hal ini berdampak pada lemahnya perencanaan kebutuhan ASN dan keterlambatan proses pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, pengelolaan manajemen talenta dan pengembangan karier ASN juga belum maksimal akibat belum tersedianya sistem pemetaan kompetensi berbasis data secara menyeluruh, belum adanya rencana suksesi yang sistematis, dan pengembangan kompetensi yang masih bersifat administratif (berdasarkan usulan, bukan analisis kebutuhan jabatan).

Di sisi operasional, keterbatasan SDM pendukung yang memiliki kompetensi teknis di bidang teknologi informasi, perencanaan SDM aparatur, serta kelembagaan masih menjadi kendala utama. Koordinasi antar unit internal dan antar instansi mitra juga belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam penyelarasan kebijakan dan sinergi pelaksanaan program lintas sektor. BKD juga menghadapi tantangan dalam memastikan standar pelayanan kepegawaian berjalan seragam di seluruh perangkat daerah, termasuk UPTD.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan BKD baik dari aspek sistem (digitalisasi, data, dan SOP) maupun operasional (SDM, koordinasi, dan sarana prasarana). Upaya penguatan manajemen berbasis kinerja, integrasi sistem informasi, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas penting untuk menjawab tantangan reformasi birokrasi dan mendukung kesiapan daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

- **Dampak terhadap visi daerah dan target nasional**

Hambatan operasional dan sistem yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 memberikan dampak langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan profesionalisme ASN. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen ASN (SIM ASN), termasuk fitur E-Personal dan E-File, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan data kepegawaian, pemetaan kompetensi, serta proses mutasi dan promosi berbasis sistem merit.

Di samping itu, rendahnya literasi digital di kalangan ASN dan belum meratanya akses terhadap informasi kepegawaian internal turut menjadi faktor penghambat dalam upaya transformasi digital. Hal ini berdampak pada efektivitas pelayanan dan kesiapan ASN dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), di mana ASN Kalimantan Timur diharapkan dapat berperan sebagai tulang punggung pemerintahan penyangga ibu kota baru tersebut.

Respons terhadap pengaduan masyarakat juga belum berjalan secara optimal, ditandai dengan belum terintegrasinya sistem pengelolaan pengaduan dan lambatnya tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Hal ini berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap layanan kepegawaian serta tidak mendukung

prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang ditekankan dalam arah kebijakan reformasi birokrasi.

Selain itu, belum tersedianya sistem umpan balik (feedback) yang representatif dari pemangku kepentingan menyebabkan inovasi pelayanan publik belum berkembang secara maksimal. Ketiadaan saluran formal dan sistematis untuk menampung aspirasi dan evaluasi dari pengguna layanan juga menjadi penghambat dalam pencapaian prinsip good governance dan pelayanan publik yang responsif.

Jika hambatan-hambatan ini tidak segera diatasi secara strategis, maka pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah maupun nasional, termasuk penguatan sistem merit, optimalisasi pelayanan publik, dan peningkatan kualitas SDM aparatur, akan berjalan lambat dan tidak maksimal

- **Tantangan BKD Prov Kaltim**

Tantangan (Threat) bagi organisasi adalah faktor lingkungan (baik internal maupun eksternal) yang tidak menguntungkan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. adapun tantangan BKD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :



1. **Penerapan Prinsip Meritokrasi**

BKD Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan dalam meningkatkan skor sistem merit dari kategori baik ke sangat baik. Dengan skor 271 poin pada tahun 2023, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja ASN menjadi

kunci. Penerapan prinsip merit harus lebih konsisten dan terukur dalam seluruh proses manajemen ASN.

2. Manajemen Talenta ASN

Pengelolaan talenta ASN di Pemprov Kaltim masih berada dalam tahap awal, terutama dalam pemetaan dan rencana suksesi. Pelatihan belum sepenuhnya berbasis kompetensi, sehingga program pengembangan cenderung tidak tepat sasaran. BKD perlu menyusun strategi manajemen talenta yang sistematis dan adaptif terhadap kebutuhan daerah dan IKN.

3. Revolusi Industri 5.0

ASN dituntut siap menghadapi era digital, namun literasi digital di Kalimantan Timur masih tergolong rendah. BKD perlu mempercepat pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan keterampilan ASN dalam menghadapi kolaborasi manusia-mesin. Hal ini penting agar birokrasi tetap relevan dan produktif di tengah disrupsi digital.

4. Kapasitas ASN Penyangga IKN

Kesiapan ASN Kaltim sebagai penyangga IKN masih terbatas, terutama di bidang perencanaan kota dan manajemen proyek. Hanya sekitar 60% ASN yang memiliki kompetensi teknis sesuai jabatan. BKD perlu memperluas pelatihan teknis dan membangun kemitraan dengan pusat untuk memperkuat kapasitas ASN strategis.

5. Keterbukaan Informasi

Kalimantan Timur menempati peringkat ke-15 nasional dalam keterbukaan informasi publik, menunjukkan masih perlunya peningkatan. BKD didorong mengembangkan platform digital dan meningkatkan literasi informasi ASN. Transparansi yang lebih baik akan memperkuat akuntabilitas layanan kepegawaian dan kepercayaan publik.

● Peluang BKD Prov Kaltim

Peluang BKD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 merujuk pada kondisi, situasi, atau faktor eksternal dan internal yang dapat dimanfaatkan oleh BKD Kaltim untuk meningkatkan kinerja, mengembangkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Adapun peluang BKD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029 adalah sebagaimana berikut :



1. Pengembangan Kompetensi ASN

Program pelatihan, upskilling, dan reskilling dari pemerintah pusat membuka peluang besar bagi BKD Kaltim untuk meningkatkan kapasitas ASN. Upaya ini mendukung transformasi digital dan kesiapan menghadapi pembangunan IKN. Pengembangan kompetensi menjadi pondasi penting untuk membentuk ASN adaptif dan profesional.

2. Rekrutmen dan Seleksi Berkualitas

BKD Kaltim telah menerapkan sistem rekrutmen berbasis CAT untuk menjamin proses seleksi yang transparan dan objektif. Sistem ini membuka peluang mendapatkan SDM unggul yang siap mendukung pembangunan daerah. Penerapan teknologi rekrutmen juga memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi.

3. Kalimantan Timur sebagai Lokasi IKN

Penetapan Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN memberi peran strategis bagi BKD dalam menyiapkan ASN berkualitas. Peluang ini mencakup penguatan kapasitas ASN di bidang tata kelola, infrastruktur, dan layanan publik. BKD juga berpotensi menjadi pusat pengembangan SDM nasional di masa depan.

4. Transformasi Digital

Implementasi sistem informasi kepegawaian seperti SIM ASN, e-KGB, dan e-Mutasi memperkuat efisiensi dan transparansi layanan BKD. Transformasi digital menjadi peluang untuk modernisasi birokrasi dan pemenuhan tuntutan

masyarakat atas layanan yang cepat dan akurat. Dukungan program Smart ASN dari pemerintah pusat turut memperkuat arah ini.

5. Mutasi Masuk PNS ke Pemprov Kaltim

Arus mutasi masuk PNS ke Kalimantan Timur memberi peluang untuk memperkaya kapasitas SDM daerah dengan talenta dari berbagai sektor. BKD dapat mengelola potensi ini untuk memperkuat sektor-sektor strategis menjelang pembangunan IKN. Hal ini menjadi momen penting bagi penguatan birokrasi berbasis keahlian.

• Formulasi Isu-Isu Penting, Rekomendasi, dan Catatan Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan, identifikasi permasalahan dominan, serta dinamika kebijakan pembangunan nasional dan daerah, telah dirumuskan sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam periode perencanaan 2025–2029. Isu-isu ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas manajemen ASN dan pencapaian reformasi birokrasi yang efektif. Isu strategis BKD Provinsi Kalimantan Timur: adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Isu Strategis BKD Provinsi Kalimantan Timur

Potensi Daerah (kewenangan BKD)	Permasalahan BKD	Isu KLHS (relevan BKD)	Isu Lingkungan			Isu Strategis BKD
			Global	Nasional	Regional	
Kolektifitas antar BKPSDM kab/kota untuk sinkronisasi kebutuhan ASN Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan (memerlukan ASN profesional & digital-ready)	belum optimalnya pengelolaan ASN untuk menghasilkan aparatur yang profesional, kompeten, dan berkinerja tinggi,	–	Pemerintah global beralih ke pemerintahan berbasis data, digital, responsif, dan agile dalam pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi birokrasi global	<i>RPJMN 2025–2029 dan kebijakan Reformasi Birokrasi menekankan penguatan sistem merit berbasis digital, transformasi layanan ASN, dan akuntabilitas berbasis hasil</i>	Pemindahan IKN ke Kaltim meningkatkan kebutuhan ASN siap dengan kompetensi tinggi;	ASN yang Profesional, Berintegritas, dan Akuntabel

Tabel di atas merupakan hasil sintesis dari berbagai sumber yang relevan dan menggambarkan keterkaitan antara potensi daerah, permasalahan internal, serta dinamika eksternal baik di tingkat global, nasional, maupun regional. Rumusan isu strategis yang disimpulkan menjadi landasan utama dalam perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada periode perencanaan tahun 2025–2029. Dengan mengidentifikasi isu strategis secara tepat, BKD Prov Kaltim diharapkan mampu menjawab tantangan nyata dan mendukung pencapaian reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara perencanaan perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan reviu terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2026. Kegiatan reviu ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan BKD sejalan dengan prioritas serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.

Hasil reviu disajikan dalam tiga komponen utama, yaitu:

1. Rancangan Akhir Renja, yang memuat program dan kegiatan BKD setelah disesuaikan dengan hasil pembahasan dan kesepakatan;
2. Hasil Analisis Kebutuhan, yang menggambarkan tingkat kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan kondisi aktual perangkat daerah;
3. Catatan Penting, yang berisi masukan substantif terkait pelaksanaan program, penyempurnaan, serta penyesuaian kebijakan sesuai arah pembangunan daerah.

Secara umum, substansi program dan kegiatan BKD telah selaras dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026, sedangkan penyesuaian lebih difokuskan pada aspek pendanaan dan pagu indikatif, sebagai bentuk respons terhadap dinamika kebutuhan belanja dan kemampuan fiskal daerah.

Tabel berikut menyajikan hasil lengkap reviu Rancangan Awal Renja BKD Tahun 2026, yang menjadi dasar dalam penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir Renja dan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

PD : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH & UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI					41.962.538.062	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH & UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI					
5.03.0.00.0.0 0.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				38.799.400.722	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				62.661.606.128	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	98,05 Indeks 100%	29.281.814.210	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	95 Indeks 100%	36.189.025.228	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	237.578.492	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	626.395.000	Untuk mendukung kegiatan perencanaan serta kegiatan koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase realisasi anggaran	96,24 %	24.022.360.783	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase realisasi anggaran	97%	22.447.125.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	98,55 %	3.492.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	90%	5.000.000	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	81	598.566.000	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	98,29 %	651.241.952	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	6.890.109.833	Penambahan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.016.077.841	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100%	3.633.288.407	Penyesuaian Jasa Penunjang
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	98,55 %	1.351.063.142	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100%	1.988.540.988	Penambahan Biaya Pemeliharaan Gedung

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase pengembangan karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya; Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya; Persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan; Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik.	94,29 % 88,13 % 89,21 % 97,43 %	9.517.586.512	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase pengembangan karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	99,17 % 86 % 42,69 % 91,5 %	26.472.580.900	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lembaga Profesi ASN; Persentase kualitas pengolahan data dan kualitas informasi; Persentase Perencanaan kebutuhan ASN yang terselesaikan pada masing-masing Perangkat Daerah;	5 Dok 100 % 100 % 100 %	1.446.053.396	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Persentase kualitas pengolahan data dan kualitas informasi Persentase Perencanaan kebutuhan ASN yang terselesaikan pada	5 Dokumen 100 % 100 % 100 %	6.932.374.885	Penambahan anggaran Fasilitasi Profesi ASN dan pelaksanaan kegiatan Pengadaan, pemberhentian, Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase Usulan Pensiun Pegawai Yang ditindaklanjuti.					masing-masing Perangkat Daerah Persentase Usulan Pensiun Pegawai Yang ditindaklanjuti			
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Samarinda	Persentase Penempatan ASN Jabatan Managerial sesuai dengan kebutuhan; Persentase Usulan Kenaikan Pangkat yang terbit SKnya; Persentase Penempatan ASN Jabatan Non Managerial sesuai dengan kebutuhan.	95,89% 94,32% 92,86%	655.988.889	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Samarinda	Persentase Penempatan ASN Jabatan Managerial sesuai dengan kebutuhan Persentase Penempatan ASN Jabatan Non Managerial sesuai dengan kebutuhan Persentase Usulan Kenaikan Pangkat yang terbit Sknya	80% 80% 80%	1.605.831.211	Peningkatan kebutuhan hasil Pengelolaan Promosi ASN

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Samarinda	Persentase penyelenggaraan manajemen ASN melalui peningkatan kompetensi ASN; Persentase Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pelatihan ASN; Persentase Fasilitasi Pengembangan Karir ASN Dalam Jabatan Fungsional.	95,79 % 86,92 % 88,00 %	7.036.944.588	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Samarinda	Persentase Fasilitasi Pengembangan Karir ASN Dalam Jabatan Fungsional Persentase Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pelatihan ASN Persentase penyelenggaraan manajemen ASN melalui peningkatan kompetensi ASN	90 % 85 % 86 %	6.642.399.180	Penambahan Anggaran untuk Pendidikan Lanjutan ASN, Diklat dan Sertifikasi ASN
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Samarinda	Persentase permohonan pembinaan ASN yang Ditindaklanjuti; Persentase Pemberian Penghargaan Bagi ASN yang Berkinerja Baik; Persentase Kepatuhan Penyusunan SKP oleh Pegawai ASN.	100 % 99,08 % 97,57 %	378.599.639	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Samarinda	Persentase ASN yang berkinerja baik (%) Persentase Pemberian Penghargaan Bagi ASN yang Berkinerja Baik Persentase permohonan pembinaan ASN yang Ditindaklanjuti	91,50 % 99,00 % 100 %	11.291.975.624	Pemberian Penghargaan ASN untuk Pensiunan

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.03.0.00.0.0 0.01.0002	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI				3.163.137.340	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI				8.760.716.558	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan; Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	95,55 Indeks 100 %	2.763.137.878	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	95 Indeks 100%	7.742.655.797	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	42.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70%	125.913.300	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	99,20 %	164.096.901	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	4.525.433.459	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)	Kota Samarinda	Persentase Pemenuhan BMD (UPTD)	100%	1.083.513.968	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)	Kota Samarinda	Persentase Pemenuhan BMD (UPTD)	100%	1.083.513.968	Lift

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100%	1.061.892.915	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100%	1.214.806.600	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	99,20%	411.634.094	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100%	792.988.470	Penambahan biaya pemeliharaan Sarpras
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	74,00 %	399.999.462	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	84,00%	1.018.060.761	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Samarinda	laporan pengembangan Instrumen Kompetensi Pegawai Laporan Pengujian dan Penilaian Kompetensi Pegawai	1 laporan 1 laporan	399.999.462	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Samarinda	laporan pengembangan Instrumen Kompetensi Pegawai Laporan Pengujian dan Penilaian Kompetensi Pegawai	1 laporan 1 laporan	1.018.060.761	

2.5 Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat serta memastikan perencanaan pembangunan yang partisipatif, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah membuka ruang untuk menerima usulan program dan kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Namun, berdasarkan hasil penjangkauan dan forum Forum Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan hingga penyusunan Rencana Kerja ini, tidak terdapat usulan program atau kegiatan yang masuk dari pihak luar yang secara langsung terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Dengan demikian, penetapan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sepenuhnya berdasarkan evaluasi internal, analisis kebutuhan kelembagaan, dan arah kebijakan nasional serta daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) BKD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mencakup periode 1 (satu) tahun. Penyusunan dokumen ini merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026, serta diselaraskan dengan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang relevan. Seluruh dokumen tersebut menjadi pijakan utama dalam perumusan Renstra dan Renja BKD Provinsi Kalimantan Timur, dengan memperhatikan kajian terhadap arah kebijakan nasional guna mendukung pengembangan dan pembangunan aparatur sipil negara secara terarah.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disajikan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat yang menjadi rujukan dalam penyelarasan arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur:

1. Kementerian PAN-RB

Visi : “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”

Misi :

- 1) Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy.
- 2) Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global
- 3) Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
- 4) Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas

- 5) Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani
- 6) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Catatan Penting :

Visi dan misi tersebut tercantum dalam dokumen Renstra Kementerian PAN- RB tahun 2020–2024, dan hingga saat ini belum ada pembaruan resmi yang mencantumkan periode 2025–2029.

2. BKN Pusat

Visi : Terwujudnya meritokrasi dan profesionalitas ASN dalam rangka mewujudkan Visi Presiden Indonesia yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Misi :

1. Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, dan pelayanan kepegawaian, dan penjaminan kualitas meritokrasi
2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN

Catatan Penting :

Visi dan misi tersebut tercantum dalam dokumen internal Penyusunan Renstra BKN periode 2025–2029 yang belum secara resmi dicantumkan di web BKN.

3. Kementerian Dalam Negeri

Visi : “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri

Misi :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada

rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan Trantibum Linmas

Catatan Penting :

Visi dan misi tersebut tercantum dalam dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020–2024, dan hingga saat ini belum ada pembaruan resmi yang mencantumkan periode 2025–2029.

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, BKD memiliki Tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian;
- d. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang mutasi ASN;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan ASN;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pembinaan ASN;
- i. Perumusan, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penilaian kompetensi pada Unit Pelaksana Teknis daerah;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- k. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya

Telaah terhadap arah kebijakan nasional menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Provinsi Kalimantan Timur perlu diselaraskan dengan visi dan misi dari Kementerian PAN-RB, BKN, dan Kementerian Dalam Negeri, serta mengacu pada regulasi daerah yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023. Kementerian PAN-RB menekankan pentingnya transformasi birokrasi menuju digitalisasi, profesionalisme aparatur, serta penguatan sistem merit dan akuntabilitas kinerja. Hal ini selaras dengan peran BKD dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan teknis kepegawaian yang mendukung pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan melayani.

Sementara itu, arah kebijakan BKN yang berfokus pada penerapan sistem merit dan peningkatan profesionalitas ASN juga memperkuat urgensi peran BKD sebagai pelaksana teknis pembinaan ASN di daerah, termasuk dalam perencanaan kebutuhan pegawai, seleksi, mutasi, serta pengembangan kompetensi ASN secara terukur dan berbasis kinerja.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri melalui misinya menekankan pada peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan, penguatan reformasi birokrasi, serta sinergi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah, yang mendukung fungsi BKD dalam mewujudkan pelayanan kepegawaian yang efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Keseluruhan arah kebijakan nasional tersebut mempertegas bahwa BKD memiliki posisi strategis dalam mendukung terwujudnya birokrasi daerah yang adaptif dan kompeten. Oleh karena itu, dokumen Rencana Kerja BKD Provinsi Kalimantan Timur harus mampu merefleksikan kebijakan tersebut ke dalam program dan kegiatan yang operasional, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah provinsi, maka dukungan BKD terhadap pencapaian arah kebijakan nasional dan provinsi tahun 2026 diwujudkan melalui optimalisasi penerapan sistem merit, khususnya dalam pengembangan kompetensi ASN yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan serta peningkatan kualitas penilaian dan evaluasi kinerja ASN.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKD

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD dalam pengelolaan manajemen kepegawaian daerah. Isu-isu tersebut antara lain mencakup rendahnya tingkat profesionalitas ASN, belum optimalnya penerapan sistem merit, serta perlunya peningkatan kualitas layanan kepegawaian yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan yang ingin dicapai melalui Renja BKD Tahun 2025 adalah “Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, Dan Profesionalitas ASN”. Capaian tujuan ini diukur melalui indikator Persentase Capaian Skor Merit Sistem, sebagai tolok ukur implementasi sistem merit dalam manajemen ASN di daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran utama, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan, yang diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN; dan
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah, dengan indikator berupa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tujuan dan sasaran ini menjadi kerangka acuan dalam perumusan program dan kegiatan BKD secara terukur, terarah, dan selaras dengan kebijakan reformasi birokrasi serta penguatan tata kelola kepegawaian daerah.

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja BKD Prov.Kaltim
Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, Dan Profesionalitas ASN		Persentase Capaian Skor Merit Sistem	71,50
		Meningkatnya kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan	Indeks Profesionalitas ASN	79,69
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81
			Indeks Kepuasan Masyarakat	91,50

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menyelaraskan rencana kerjanya dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam mendukung Tujuan ke-3, yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, serta Sasaran ke-9, yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan”. Keselarasan ini diwujudkan melalui perumusan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas manajemen kepegawaian dan pelayanan birokrasi secara menyeluruh. Dalam menyusun program dan kegiatan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga mempertimbangkan sejumlah faktor strategis yang mencerminkan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menetapkan visi RPJMD 2025–2029: “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, dengan fokus pada tiga transformasi utama (ekonomi, sosial, tata kelola) serta delapan misi daerah

untuk mendukung arah pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Dari perspektif manajemen ASN, BKD perlu merancang program kepegawaian yang mendukung penguatan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan adaptif. Oleh karena itu, perumusan program seperti Pengembangan Kompetensi ASN, Penilaian Kinerja, dan Mutasi & Promosi ASN harus diarahkan untuk menghasilkan ASN yang siap mengawal transformasi tersebut. Indikator keberhasilan seperti Indeks Profesionalitas ASN akan mencerminkan sejauh mana BKD berhasil mensinergikan visi kepala daerah ke dalam struktur kepegawaian yang mendukung pencapaian RPJMD.

2. Capaian TPB/SDGs

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sebagaimana dievaluasi dalam Forum Koordinasi SDGs tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Kaltim. Dalam forum tersebut, Kaltim menekankan percepatan pada pilar pembangunan manusia dan tata kelola kelembagaan sebagai bagian dari agenda prioritas daerah (bappeda.kaltimprov.go.id).

Dalam konteks ini, peran BKD menjadi sangat penting terutama dalam mendukung pilar ke-16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) dan pilar ke-17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). BKD berperan dalam memastikan tersedianya ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki kapasitas untuk mengawal pencapaian target SDGs lintas sektor. Program seperti Pengembangan Kompetensi ASN diarahkan untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap integrasi prinsip SDGs dalam layanan publik, manajemen berbasis hasil, dan prinsip keadilan sosial.

Selain itu, kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN dan Administrasi Kepegawaian mendukung pelaksanaan monitoring kinerja aparatur yang secara tidak langsung menjadi instrumen untuk mengukur dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan terhadap tujuan-tujuan SDGs. Dengan demikian, melalui pelaksanaan kegiatan berbasis sistem merit, peningkatan kualitas SDM aparatur, serta sistem pengelolaan kinerja yang transparan dan akuntabel, BKD turut memperkuat dimensi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam agenda SDGs.

3. Pengentasan Kemiskinan

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memiliki keterkaitan tidak langsung tetapi strategis dalam mendukung pengentasan kemiskinan, terutama melalui fungsi dan tanggung jawabnya dalam manajemen sumber daya aparatur sipil negara (ASN). Namun beberapa kebijakan BKD dapat mempengaruhi pengentasan kemiskinan seperti:

- a. BKD bertanggung jawab atas pengadaan, mutasi, promosi, dan pengembangan kompetensi ASN. ASN dari berbagai perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan pelaksana langsung program pengentasan kemiskinan.
- b. Penerapan sistem merit yang dikelola BKD mendorong penempatan ASN berdasarkan kompetensi, bukan sekadar senioritas atau kepentingan struktural. Sehingga BKD perlu menempatkan ASN yang tepat sesuai dengan kompetensinya di tempat-tempat yang mendukungnya pengentasan kemiskinan. *The right man in the right place.*

4. Pencapaian Norma Standar Pelayanan Dan Standar Pelayanan Minimal (NSPK Dan SPM).

BKD Kaltim telah menetapkan Standar Pelayanan internal pada Mei 2024, mencakup 20 jenis layanan kepegawaian seperti ujian dinas, mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, cuti, hingga pengusulan jabatan fungsional. Melalui kegiatan administrasi kepegawaian dan umum, BKD berperan penting dalam menjamin kepatuhan terhadap NSPK/SPM. Upaya konkret yang dilakukan antara lain: sosialisasi rutin standar layanan, pelatihan pegawai terkait SOP pelayanan, monitoring pemenuhan waktu layanan maksimal (misalnya proses mutasi dalam 30 hari), dan evaluasi kepuasan melalui survei. Hal ini selaras dengan target nasional untuk meningkatkan kualitas layanan publik berkualitas, cepat, dan akuntabel.

5. Upaya Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai 6,17 % pada 2024 — tertinggi dalam 10 tahun terakhir — yang didorong oleh diversifikasi industri (smelter, pupuk, perkebunan) dan proyek IKN serta RDMP Balikpapan. BKD perlu mengantisipasi kebutuhan ASN sesuai karakter sektor-sektor unggulan ini dengan langkah konkrit, seperti: menyesuaikan formasi PPPK dan CPNS dengan kompetensi teknis industri (misalnya teknik kemin•ian, teknik mesin,

perencanaan pembangunan); mempercepat pelantikan 3.745 PPPK hingga Mei 2025; serta mengembangkan kompetensi jabatan fungsional bidang ekonomi, teknis industri, infrastruktur, dan lingkungan. Kegiatan semacam itu mendukung strategi daerah dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi dan memastikan ASN siap mengawal perubahan struktur ekonomi lokal.

Berdasarkan faktor strategis yang telah diuraikan di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merumuskan rencana program dan kegiatan tahun 2025 yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penguatan manajemen kepegawaian yang profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2026 dan Perkiraan maju Tahun 2025**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Kepegawaian Daerah			38.799.400.722,00							52.549.103.987
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			38.799.400.722,00							52.549.103.987
5 03	KEPEGAWAIAN			38.799.400.722,00							52.549.103.987
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemertase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan	100 Persen 99,95 Indeks	29.281.914.210,00						-	29.064.735.653
5 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	237.578.462,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN Pengpro. Kalimantan & Kab/Kota	-	643.058.717
5 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran	99,24 Persentase	24.022.392.783,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1. Pajak Daerah, 2. Dana Bagi Hasil (DBH), 3. Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN Pengpro. Kalimantan & Kab/Kota	-	21.002.932.086
5 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik (%)	98,55 %	3.492.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN BMD Prov. Kalimantan	-	10.000.000
5 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	98,25 %	661.241.892,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN Pengpro. Kalimantan & Kab/Kota	-	1.560.354.021
5 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Penunjang tepat waktu	100 %	1.016.077.841,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1. Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN Pengpro. Kalimantan & Kab/Kota	-	3.851.671.846
5 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	98,55 %	1.351.053.142,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN Pengpro. Kalimantan & Kab/Kota	-	996.091.373
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pegawai dengan SKP Bersifat Baik Persentase ASN yang Dilengkapi Kompetensi Persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan	97,43 Persen 99,13 Persen 99,21 Persen 94,29 Persen	8.517.586.512,00						-	24.484.308.124
5 03 02 1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kualitas pengolahan data dan kualitas informasi Jumlah Dokumen Fasilitas Lembaga Profesi ASN Persentase Pemenuhan kebutuhan ASN yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah Persentase Usulan Pensiun Pegawai	100 Persen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen	1.446.093.396,00		Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN Pengpro. Kalimantan & Kab/Kota	-	8.290.938.029

Kode	Unsur / Bidang Unsur / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting		Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN Jabatan Manajerial sesuai dengan kebutuhan Persentase Penempatan ASN Jabatan Non Manajerial sesuai dengan kebutuhan Persentase Usulan Kenaikan Pangkat Persentase penyelenggaraan manajemen ASN melalui peningkatan kompetensi ASN Persentase Fasilitas Pengembangan Kompetensi Pelatihan ASN	25,89 Persen 92,88 Persen 94,32 Persen 25,79 Persen 86,92 Persen 86,09 Persen	695.988.899,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN Pemprov. Kalimantan & Kab/Kota	-	1.456.982.023
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Usulan Kenaikan Pangkat Persentase penyelenggaraan manajemen ASN melalui peningkatan kompetensi ASN Persentase Fasilitas Pengembangan Kompetensi Pelatihan ASN	25,79 Persen 86,92 Persen 86,09 Persen	7.036.944.588,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN Pemprov. Kalimantan & Kab/Kota	-	6.875.688.624
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pemantauan pembinaan ASN yang diindaklanjuti Persentase Pembinaan Penghargaan Bagi ASN yang Berkinerja Baik Persentase Kiprah Penyusunan SKP oleh Pegawai ASN	100 Persen 99,68 Persen 97,57 Persen	378.599.639,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN Pemprov. Kalimantan & Kab/Kota	-	10.951.161.482
	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai			3.163.137.346,00							4.955.966.073
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			3.163.137.346,00							4.955.966.073
5.03	KEPEGAWAIAN			3.163.137.346,00							4.955.966.073
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kualitas Pengguna Layanan Yang Dilakukan UPTD Indeks Kualitas Layanan Kepegawaian (UPTD)	100 Persen 95,55 Indeks	2.703.137.878,00						-	3.124.368.973
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	100 Persen	42.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN Pemprov. Kalimantan	-	116.649.200
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	99,29 Persen	184.096.901,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1. Pajak Daerah 2. Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN Pemprov. Kalimantan & Kab/Kota	-	1.161.067.893
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 %	1.083.513.968,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	-	-	0
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang tepat waktu	100 %	1.081.892.915,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1. Pajak Daerah 2. Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN Pemprov. Kalimantan & Kab/Kota	-	1.213.164.100
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (%)	99,29 Persen	411.634.694,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Pajak Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN Pemprov. Kalimantan	-	634.686.070
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang telah dilatih kompetensi	74,66 %	399.999.462,00						-	1.831.599.190
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Laporan Pengujian dan Penilaian Kompetensi Pegawai Laporan pengembangan Instrumen Kompetensi Pegawai	1 laporan 1 laporan	399.999.462,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN Pemprov. Kalimantan & Kab/Kota	-	1.831.599.190
	J U M L A H			41.562.530.662,60							57.505.070.090

BAB IV
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN BKD PROV.KALTIM
TAHUN 2026

No	Rancangan Akhir RKPD				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH & UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI					41.962.538.062
5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				38.799.400.722
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	98,05 Indeks	29.281.814.210
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	35.180.446
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	237.578.492
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	35.244.446
5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Samarinda	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	30.420.516
5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	33.757.042
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	97.452.244
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	40.704.244
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	96,24%	24.022.360.783
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/ Bulan	23.601.786.024
5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	390.120.000

No	Rancangan Akhir RKPD				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	30.454.759
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	98,55 %	3.492.000
5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Samarinda	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	3.492.000
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	98,29%	651.241.952
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	79.244.577
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	17.147.585
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	554.849.790
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100%	3.016.077.841
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	14.952.000
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	1.010.166.117
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.990.959.724
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	98,55%	1.351.063.142
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	289.738.500

No	Rancangan Akhir RKPD				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.061.324.642
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase pengembangan karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya; Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya; Persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan; Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik.	94,29 % 88,13 % 89,21 % 97,43 %	9.517.586.512
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Dokumen Fasilitas Lembaga Profesi ASN; Persentase kualitas pengolahan data dan kualitas informasi; Persentase Perencanaan kebutuhan ASN yang terselesaikan pada masing-masing Perangkat Daerah; Persentase Usulan Pensiun Pegawai Yang ditindaklanjuti.	5 Dok 100 % 100 % 100 %	1.446.053.396
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	95.392.000
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	62.100.000
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	124.973.796
5.03.02.1.01.0008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Semua Kab/Kota	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1.028.600.000
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	44.297.600
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	90.690.000

No	Rancangan Akhir RKPD				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Penempatan ASN Jabatan Managerial sesuai dengan kebutuhan; Persentase Usulan Kenaikan Pangkat yang terbit SKnya; Persentase Penempatan ASN Jabatan Non Managerial sesuai dengan kebutuhan.	95,89% 94,32% 92,86%	655.988.889
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	3 Dokumen	104.025.611
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Semua Kab/Kota	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3 Laporan	118.212.778
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	433.750.500
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase penyelenggaraan manajemen ASN melalui peningkatan kompetensi ASN; Persentase Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pelatihan ASN; Persentase Fasilitasi Pengembangan Karir ASN Dalam Jabatan Fungsional.	95,79 % 86,92 % 88,00 %	7.036.944.588
5.03.02.1.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4 Dokumen	137.678.364
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4 Dokumen	6.621.469.300
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Laporan	109.162.964
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	3 Dokumen	168.633.960
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase permohonan pembinaan ASN yang Ditindaklanjuti;	100 % 99,08 % 97,57 %	378.599.639

No	Rancangan Akhir RKPD				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			Persentase Pemberian Penghargaan Bagi ASN yang Berkinerja Baik; Persentase Kepatuhan Penyusunan SKP oleh Pegawai ASN.		
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	54.982.000
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Semua Kab/Kota	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3500 Orang	58.255.759
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Semua Kab/Kota	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	570 Orang	55.060.000
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Semua Kab/Kota	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	136.315.880
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Semua Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	35.398.000
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	38.588.000
5.03.0.00.0.00.01.0002	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI				3.163.137.340
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	95,55 Indeks 100 %	2.763.137.878
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	42.000.000
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	42.000.000
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	99,20%	164.096.901
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	28.435.919
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	31.380.982
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	104.280.000

No	Rancangan Akhir RKPD				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)		Persentase Pemenuhan BMD (UPTD)	100%	1.083.513.968
5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD)	Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.083.513.968
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100%	1.061.892.915
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.672.000
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	397.340.915
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	659.880.000
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	99,20%	411.634.094
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	67.751.000
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	343.883.094
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	74,00%	399.999.462
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN		laporan pengembangan Instrumen Kompetensi Pegawai Laporan Pengujian dan Penilaian Kompetensi Pegawai	1 laporan 1 laporan	399.999.462
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	8 Dokumen	399.999.462

BAB V PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 21 ayat (3) disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan amanat tersebut, maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026.

Salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan adalah tersedianya pendanaan yang memadai. Besaran anggaran yang dialokasikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan manajemen kepegawaian, terutama dalam hal pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang selanjutnya menjadi dasar penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**RENJA TAHUN 2026
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur berperan sebagai lembaga utama dalam pengembangan kapasitas aparatur berbasis kompetensi. Lembaga ini memiliki mandat utama untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang pengembangan SDM, termasuk pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, serta peningkatan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Seiring dengan dinamika perubahan zaman dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan maupun pelatihan sebelumnya mungkin sudah tidak lagi relevan untuk menjawab tantangan saat ini. Oleh karena itu, upaya pembaruan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan menjadi semakin penting agar ASN tetap mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan adaptif.

Dalam konteks tersebut, Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang berisi arah kebijakan, program, kegiatan, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, serta indikator kinerja yang akan dicapai. Dokumen ini menjadi panduan dalam mengarahkan langkah operasional lembaga guna mencapai tujuan strategis, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja ini berlandaskan pada serangkaian proses evaluasi, baik terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPSDM, pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, capaian Rencana Kerja tahun berjalan, maupun keselarasan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Melalui proses ini, diharapkan rencana kerja yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan aktual serta mendukung arah pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur.

1.2 **LANDASAN HUKUM**

Adapun yang menjadi Landasan Hukum atau Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
18. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/14291/Bapp-II Tanggal 28 Mei 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan peninjauan atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh BPSDM. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan strategis

untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan SDM dilakukan secara terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk merinci rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sekaligus menetapkan sasaran kinerja dan capaian yang ingin diraih. Dokumen ini juga dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam:

1. Menilai keberhasilan program dan kegiatan tahun sebelumnya, guna menentukan apakah kegiatan tersebut akan dilanjutkan, disesuaikan, atau dihentikan pada tahun mendatang;
2. Menjaring usulan program dan kegiatan dari masing-masing subbidang dalam lingkungan kerja BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari proses penyusunan perencanaan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan internal;
3. Melakukan seleksi dan analisis terhadap seluruh usulan program dan kegiatan, dengan pendekatan berbasis skala prioritas, agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BPSDM PROV. KALTIM

Evaluasi kinerja adalah proses pemberian umpan balik terhadap hasil kerja di masa lalu, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas di masa mendatang. Sebagai bagian dari proses yang terus berlanjut, evaluasi ini memberikan informasi penting mengenai sejauh mana kinerja suatu organisasi sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah, serta menjadi cerminan dari pelaksanaan rencana program atau kegiatan yang dilakukan setiap tahun, sesuai dengan target yang telah ditentukan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab dari program, kegiatan atau sub kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan maupun yang melampaui target kinerja yang direncanakan. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja BPSDM dalam Pencapaian Renstra BPSDM Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur adalah berisi 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Perhitungan indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan hasil kinerja aktual (nyata) dengan target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, perbandingan juga dilakukan antara kinerja aktual saat ini dengan hasil kinerja pada tahun sebelumnya. Melalui perbandingan ini, dapat diketahui sejauh mana pencapaian kinerja suatu program atau kegiatan, apakah sesuai dengan target yang ditetapkan, lebih rendah, atau bahkan melebihi target. Berdasarkan laporan yang disusun, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja program dan kegiatan pada tahun 2024 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp41.829.274.015,00 dengan realiasi sebesar Rp40.553.553.676,00, sehingga diperoleh capaian program dengan presentase 98,88% dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp934.652.700,00 dengan realisasi sebesar Rp924.686.962,00 sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase 98,93% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp557.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp548.061.900,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 98,40%.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp112.652.700,00 dengan realisasi sebesar Rp112.564.012,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 99,92%.
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp265.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp264.061.050,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 99,65%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp17.033.016.570,00 dengan realisasi sebesar Rp16.726.314.268,00 sehingga diperoleh capaian kegiatan dengan persentase 98,20% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp16.589.357.020,00 dengan realisasi sebesar Rp16.292.761.421,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 98,21%.
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp403.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp393.810.000,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 97,55%.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwiulan/ Semesteran dengan pagu anggaran sebesar Rp39.979.550,00 dengan realisasi sebesar Rp39.742.847,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 99,41%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp6.310.350,00 dengan realisasi sebesar Rp6.300.000,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 99,84%.
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp45.209.590,00 dengan realisasi sebesar Rp45.095.100,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 99,75%.
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp508.019.000,00 dengan realisasi sebesar Rp489.892.952,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 96,43% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran sebesar Rp166.769.000,00 dengan realisasi sebesar Rp149.225.000,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 89,48%.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi dengan pagu anggaran sebesar Rp341.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp340.667.952,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 99,83%.
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp2.225.269.955,00 dengan realisasi sebesar Rp2.228.159.172,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 100,13% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp64.349.000,00 dengan realisasi

sebesar Rp62.480.000,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 97,10%.

- b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 76.759.900,00 dengan realisasi sebesar Rp77.984.412,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 101,60%.
 - c. Penyediaan Bahan/Material dengan pagu anggaran sebesar Rp480.538.855,00 dengan realisasi sebesar Rp502.106.440,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 104,49%.
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp34.785.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.598.300,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 99,46%.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp1.389.828.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.372.740.647,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 98,77%.
 - f. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp29.153.200,00 dengan realisasi sebesar Rp29.125.500,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 99,90%.
 - g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp149.856.000,00 dengan realisasi sebesar Rp149.123.873,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 99,51%.
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp3.428.541.600 dan realisasi sebesar Rp3.279.740.000 sehingga diperoleh capaian dengan persentase 95,66% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- a. sub kegiatan pengadaan mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp1.401.733.900,00 dengan realisasi sebesar Rp1.297.080,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 92,53%.
 - b. sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp2.026.807.700,00 dengan realisasi sebesar

Rp1.982.660,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 97,82%.

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp4.172.030.250,00 dengan realisasi sebesar Rp4.057.861.470,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 97,26% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran Rp6.771.600,00 dengan realisasi sebesar Rp6.696.000,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 81,89%.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp1.812.108.800,00 dengan realisasi sebesar Rp1.072.856,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 97,12%.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran Rp2.353.249.850,00 dengan realisasi sebesar Rp2.348.308.942,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 99,79%.
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp13.476.224,000 dengan realisasi sebesar Rp12.795.503.752,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 94,95% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan dengan pagu anggaran sebesar Rp59.780.000,00 dengan realisasi sebesar Rp55.428.236,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 92,72%.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp168.842.000,00 dengan realisasi sebesar Rp160.061.225,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase 94,80%.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp741.913.000,00 dengan realisasi sebesar Rp736.552.510,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 99,28%.

- d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dari dengan pagu anggaran sebesar Rp2.083.335.600,00 dengan realisasi sebesar Rp1.862.450.000,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 89,40%.
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp10.422.353.400,00 dengan realisasi sebesar Rp9.981.011.781,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase 95,77%.

➤ **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pagu anggaran sebesar Rp21.211.438.300,00 dengan realiasi sebesar Rp18.951.631.911,00, sehingga diperoleh capaian program dengan presentase 89,35% dengan rincian sebagai berikut :

- 10. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp6.529.540.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.249.024.637,00 dengan capaian persentase sebesar 96,95%.
- 11. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan pagu anggaran sebesar Rp14.681.898.300,00 dengan realisasi sebesar Rp13.702.607.274,00 dengan capaian persentase sebesar 93.33% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Komptensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp10.904.298.800,00 dengan realisasi sebesar Rp10.184.121.483,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 93,40%.
 - b. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Komptensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,

Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional dengan pagu anggaran sebesar Rp 258.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp223.086.610,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 86,47%.

- c. Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintah Dalam Negeri Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp222.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp207.985.642,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 86,47%.
- d. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp508.103.600,00 dengan realisasi sebesar Rp424.827.687,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 83,61%.
- e. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar dengan pagu anggaran sebesar Rp2.655.495.900,00 dengan realisasi sebesar Rp2,538.254.426,00 sehingga diperoleh capaian dengan persentase sebesar 95,58%.
- f. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dari pagu anggaran Rp134.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp124.331.426,00 dengan capaian persentase sebesar 92,78%.

Secara keseluruhan total dari Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebesar **Rp63.040.712.315,00** dengan realisasi sebesar **Rp59.505.185.587,00** sehingga diperoleh persentase capaian keuangan sebesar **94,39%**. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil dilakukan.

Tabel 2.1
Capaian Program dan Kegiatan BPSDM Prov. Kaltim Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024		Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88	Persen	93,60	106,36%
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	86	Persen	83,60	97,09%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	82	Persen	82	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	5	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80	Persen	91	113,75%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024		Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	Orang / Bulan	54	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4	Laporan	4	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	80	Persen	84	105%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	100%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	65	Persen	121	186,15%
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Laporan	1	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki	60	Persen	90	150%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024		Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Daerah	Sertifikat Kompetensi				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	89	Paket	89	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	30	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80	Persen	79	98,75%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	100%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6	Paket	6	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	1	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	3	Laporan	3	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024		Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	1	100%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	2	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	80	Persen	85	106,25%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120	Paket	120	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55	Unit	55	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	80	Persen	85	106,25%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	Laporan	1	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024		Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	85	Persen	85	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit	23	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	Unit	45	100%
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	45	Unit	45	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	49	Unit	49	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024		Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86	Persen	120,3	139,92%
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	87	Persen	119	136,78%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemeritahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1.490	Orang	1.771	118,86
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	86	Persen	79	91,86%
		Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti perkembangan kompetensi	86	Persen	163	189,53

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024		Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kepemimpinan/Pemerintahan, Daerah, Manajerial dan Fungsional				
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi. Pengelolaan Kelembagaan. dan Pengembangan Kompetensi.	5	Dokumen	5	100%
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3	Dokumen	4	133,33%
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	130	Orang	103	79,23%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024		Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi. dan Sumber Belajar	53	Laporan	42	79,25%
	Pelaksanaan Kerjasama Antar lembaga	Jumlah kerjasama bangkom Sumber Daya Manusia Kab/Kota se Kalimantan Timur	20	Dokumen	24	120%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7.153	Orang	11.691	163,44%

➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Tabel 2.1 Capaian Program dan Kegiatan BPSDM Prov. Kaltim Tahun 2024 capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan tingkat capaian kinerja 106,36%, Faktor Penyebab Melebihi Target karena peningkatan kualitas pelayanan administrasi, penerapan standar layanan minimal yang konsisten, didukung dengan penguatan sistem administrasi yang modern, menjadi faktor utama meningkatnya kualitas layanan. Hal ini berdampak langsung pada kepuasan pengguna dan pencapaian kinerja organisasi.

➤ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Capaian kinerja pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tingkat capaian kinerja 139,92%, Faktor Penyebab Melebihi Target karena :

- Tingginya minat ASN dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (teknis, manajerial dan fungsional), sehingga jumlah peserta jauh melebihi target yang ditetapkan.
- Efektivitas Kerjasama antar lembaga (Provinsi dan Kabupaten/Kota meupun dengan instansi lain), menghasilkan kerjasama lebih banyak dari target.
- Dukungan pimpinan daerah dan perangkat daerah yang mendorong ASN untuk mengikuti program pengembangan kompetensi.

Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja pelaksanaan sertifikasi kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota karena terbatasnya kuota dan fasilitas uji sertifikasi, kendala administrasi (dokumen/registrasi peserta tidak lengkap).

Pengeolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi dan sumber belajar juga belum memenuhi target, disebabkan oleh belum lengkapnya data dari Kabupaten/Kota dan data OPD yang belum mengusulkan pengembangan kompetensi.

➤ Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2024 BPSDM Provinsi Kalimantan Timur memberikan implikasi positif terhadap target capaian Renstra karena mayoritas indikator melampaui target. Implikasi terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah, antara lain :

- Mempercepat pencapaian sasaran Renstra pada aspek efisiensi keuangan, peningkatan kualitas layanan, dan tata kelola aset.
- Tingkat capaian sangat tinggi (139,92%) karena minat ASN mengikuti pengembangan kompetensi melampaui target. Ini mempercepat pencapaian Renstra dalam sasaran peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional.

- Kerjasama antar lembaga dan jumlah ASN yang mengikuti pelatihan memperkuat jejaring kolaborasi serta mendukung pencapaian indikator strategis Renstra.
- Berdasarkan data capaian program dan kegiatan BPSDM Prov. Kaltim tahun 2024, berikut kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang dapat diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab capaian melebihi target, antara lain :
 - Penyesuaian penetapan target lebih realistis pada perencanaan Renja membuat perencanaan lebih objektif dan kredibel.
 - Mengintegrasikan capaian (melebihi target) ke dalam strategi efisiensi anggaran membuat perencanaan kedepan lebih efektif, adaptif dan berkelanjutan.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Timur

PD : BPSDM Prov. Kaltim (Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.04.001	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPSDM	85%	88,93%						
		Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan			88%	83,60	97,09%	90		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti			86%	82%	100%	88		
5.04.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Dokumen Perencanaan dan	100%	100%	82%	82%	100%	85%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu								
5.04.001.1.01.0 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen		
5.04.001.1.01.0 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
5.04.001.1.01.0 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perangkat Daerah								
5.04.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100%	96%	80%	91%	113,75%	80%		
5.04.001.1.02.0 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang / Bulan	52 orang / Bulan	54 Orang / Bulan	54 Orang / Bulan	100%	77 Orang		
5.04.001.1.02.0 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
5.04.001.1.02.0 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	TIDAK ADA DI 2024	TIDAK ADA DI 2024	TIDAK ADA DI 2024	TIDAK ADA DI 2025		
5.04.001.1.02.0 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Dokumen		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Triwulan/ Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD								
5.04.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100%	100%	80%	84%	105%	80%		
5.04.001.1.03.0 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
5.04.001.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	100%	100%	65%	121%	186,15%	70%		
5.04.001.1.04.0 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.04.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	100%	100%	60%	90%	150%	60%		
5.04.001.1.05.0 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	302 Paket	302 Paket	89 Paket	89 Paket	100%	50 Paket		
5.04.001.1.05.0 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	15 orang	30 Orang	30 Orang	100%	20 Orang		
5.04.001.1.05.0 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	15 orang	15 orang	TIDAK ADA DI 2024	TIDAK ADA DI 2024	TIDAK ADA DI 2024	TIDAK ADA DI 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Undangan								
5.04.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95%	100%	80%	79%	98,75%	90%		
5.04.001.1.06.0 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket		
5.04.001.1.06.0 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket		
5.04.001.1.06.0 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	5 Paket		
5.04.001.1.06.0	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
08	Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
5.04.001.1.06.0 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan		
5.04.001.1.06.0 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
5.04.001.1.06.0 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
5.04.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100%	98%	80%	2 Dokumen	100%	90%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.04.01.1.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	TIDAK AFA DI 2023	TIDAK AFA DI 2023	TIDAK AFA DI 2024	TIDAK AFA DI 2024	TIDAK AFA DI 2024	3 Unit		
5.04.01.1.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	120 Paket	85%	106,25%	6 Paket		
5.04.001.1.07.0 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	276 Unit	272 Unit	55 Unit	120 Paket	100%	565 Unit		
5.04.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100%	100%	80%	85%	106,25%	82%		
5.04.001.1.08.0 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.04.001.1.08.0 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan		
5.04.001.1.08.0 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
5.04.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100%	98%	85%	85%	100%	90%		
5.04.001.1.09.0 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya								
5.04.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	23 Unit	23 Unit	100%	23 Unit		
5.04.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	448 Unit	448 Unit	45 Unit	45 Unit	100%	796 Unit		
5.04.001.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	45 Unit	45 Unit	100%	2 Unit		
5.04.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	8 Unit	8 Unit	49 Unit	49 Unit	100%	45 Unit		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i								
5.04.002	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	85%	251%	86%	120,3%	139,92%	87%		
5.04.002.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang MengikutiPengembang an Kompetensi Teknis	85%	94%	87%	119%	136,78%	88%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.04.002.1.01.003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	150 orang	630 orang	1.490 Orang	1.771 Orang	118,86	1800 Orang		
5.04.002.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kelembagaan, Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan	80%	80%	TIDAK ADA DI 2024	TIDAK ADA DI 2024	TIDAK ADA DI 2024	TIDAK ADA DI 2025		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kompetensi Manajerial dan Fungsional								
		Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	TIDAK ADA DI 2023	TIDAK ADA DI 2023	86%	79%	91,86%	86%		
		Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti perkembangan kompetensi Kepemimpinan/Pemeri ntahan, Daerah, Manajerial dan Fungsional			86%	163%	189,53	86%		
5.04.002.1.02.0 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi,	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,								
5.04.002.1.02.0 02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	133,33%	3 Dokumen		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.04.002.1.02.0 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	139 orang	108 orang	130 Orang	103 Orang	79,23%	130 Orang		
5.04.002.1.02.0 04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	5 Laporan	5 Laporan	53 Laporan	42 Laporan	79,25%	54 Laporan		
5.04.002.1.02.0 05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	10 Dokumen	10 Dokumen	20 Dokumen	24 Dokumen	120%	20 Dokumen		
5.04.002.1.02.0 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi	190 orang	190 orang	7.153 Orang	11.691 Orang	163,44%	6954 Orang		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								
5.04.002.1.02.0 08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja	1 Dokumen	3 Dokumen	TIDAK ADA DI TAHUN 2024	TIDAK ADA DI TAHUN 2024	TIDAK ADA DI TAHUN 2024	TIDAK ADA DI TAHUN 2025		-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Taget Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabata	Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan								

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis atas capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan tugas dengan baik. Untuk menguji hasil perkembangan pengembangan kompetensi dari 2022 sampai 2024, maka dapat dilihat perkembangan dari Survey Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2022 – 2024 sebagai berikut :

1. Diketahui secara keseluruhan dalam Tahun 2022, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan responden sebanyak 943 orang responden terhadap pelayanan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebesar **88,16** dengan kriteria mutu pelayanan “Baik”. Untuk rekomendasi unsur pelayanan yang dapat saat ini dapat ditingkatkan disarankan yaitu Unsur Waktu Pelayanan dan Unsur Sarana Prasarana.

Survey Kepuasan Masyarakat BPSDM Tahun 2022

NO	Unsur Pelayanan	NRRPU	IPK	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3,51	87,75	Baik
U2	Prosedur	3,52	87,94	Baik
U3	Waktu Pelayanan	3,44	86,08	Baik
U4	Biaya/Tarif	3,60	89,90	Sangat Baik
U5	Produk Layanan	3,49	87,22	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,63	90,64	Sangat Baik
U7	Prilaku Pelaksana	3,65	91,22	Sangat Baik
U8	Sarana Prasarana	3,46	86,61	Baik
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,48	86,88	Baik

2. Diketahui secara keseluruhan dalam Tahun 2023, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan responden sebanyak 1476 orang responden terhadap pelayanan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebesar **88,93** dengan kriteria mutu pelayanan “Baik”. Untuk rekomendasi unsur pelayanan yang dapat saat ini dapat ditingkatkan disarankan yaitu Unsur Waktu Pelayanan dan Unsur Sarana Prasarana.

Survey Kepuasan Masyarakat BPSDM Tahun 2023

NO	Unsur Pelayanan	NRRPU	IPK	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3,54	88,62	Sangat Baik
U2	Prosedur	3,55	88,82	Sangat Baik
U3	Waktu Pelayanan	3,49	87,28	Baik

NO	Unsur Pelayanan	NRRPU	IPK	Mutu Pelayanan
U4	Biaya/Tarif	3,61	90,24	Sangat Baik
U5	Produk Layanan	3,52	87,99	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,59	89,68	Sangat Baik
U7	Prilaku Pelaksana	3,64	91,11	Sangat Baik
U8	Sarana Prasarana	3,57	89,35	Sangat Baik
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,52	88,04	Baik

3. Diketahui secara keseluruhan dalam Tahun 2024, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan responden sebanyak 882 orang responden terhadap pelayanan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebesar **86,87** dengan kriteria mutu pelayanan “Baik”. Untuk rekomendasi unsur pelayanan yang dapat saat ini dapat ditingkatkan disarankan yaitu Unsur Waktu Pelayanan dan Unsur Sarana Prasarana.

Survey Kepuasan Masyarakat BPSDM Tahun 2024

NO	Unsur Pelayanan	NRRPU	IPK	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3,37	84,27	Baik
U2	Prosedur	3,41	85,29	Baik
U3	Waktu Pelayanan	3,32	82,91	Baik
U4	Biaya/Tarif	3,77	94,36	Sangat Baik
U5	Produk Layanan	3,36	83,93	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,44	86,08	Baik
U7	Prilaku Pelaksana	3,46	86,56	Baik
U8	Sarana Prasarana	3,39	84,67	Baik
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,81	95,24	Sangat Baik
U10	Transparansi Pelayanan yang diberikan	3,51	87,67	Baik
U11	Integritas Petugas Pelayanan (terkait Suap, Pngutan Liar, gratifikasi dsb)	3,39	84,69	Baik

Berdasarkan Evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, capaian BPSDM sangat meningkat di setiap tahunnya karena banyak faktor yang dihasilkan oleh BPSDM di Tahun 2024 yaitu:

1. Terbitnya Kalimantan Timur Corporate University
2. Terkelolanya Community Of Practices BPSDM melalui Whatsapp yang diikuti ASN Aktif ± 1900 orang
3. Jenis pengembangan kompetensi yang lebih beragam
4. Narasumber / Pembicara BPSDM pengembangan kompetensi non klasikal yang

lebih menarik dan interaktif

- 5. Meningkatnya minat pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- 6. BPSDM menjalin Kerjasama dengan banyak rekan penyelenggara pelatihan baik di dalam Provinsi Kalimantan Timur maupun di Luar Provinsi Kalimantan Timu
- 7. BPSDM memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan didapatkannya penghargaan dari ACT International Consulting (Pimpinan Bapak Ary Ginanjar)
- 8. Internal BPSDM yang terkelola dengan baik dan solid melalui Community Of Practices

Dalam penerapan Kalimantan Timur Corporate University, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur menggunakan konsep metode pembelajaran 10 : 20 : 70 yaitu :

- 1. Metode Pembelajaran 10 % merupakan Pembelajaran yang dilaksanakan secara Formal baik secara Klasikal ataupun Blended Learning;
- 2. Metode Pembelajaran 20 % merupakan Pembelajaran Sosial yang berfokus pada belajar melalui orang lain dalam lingkungan sosialnya;
- 3. Metode Pembelajaran 70 % merupakan Pembelajaran dengan Pengalaman Langsung yang berfokus pada belajar langsung pada tempat kerja sesuai fokus tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ASN tersebut melalui magang di Perangkat Daerah / Pemerintah yang berbeda atau magang di BUMD / BUMN / Swasta lainnya.

Penerapan metode pembelajaran 10 : 20 : 70 tersebut diuraikan dalam Pelayanan BPSDM berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 2.3

Uraian Pelayanan BPSDM berdasarkan Metode Pembelajaran 10 : 20 : 70

No	Metode Pengembangan	Pelaksana	Jenis Pelayanan
1	10 % - Pembelajaran Formal	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II 2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator 3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 4. Pelatihan Dasar CPNS 5. Orientasi PPPK 6. Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama 7. Pelatihan Pranata Humas 8. Orientasi DPRD

No	Metode Pengembangan	Pelaksana	Jenis Pelayanan
			9. Pelatihan Lurah dan Camat 10. Pelatihan Manajerial dan Fungsional Lainnya yang dilaksanakan secara Klasikal
		Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	1. Pelatihan Pelayanan Prima 2. Pelatihan Bendaharan 3. Pelatihan Pelayanan Publik 4. Pelatihan Manajemen Bencana Dasar 5. Pelatihan Pengadaan Barang / Jasa Level 1 6. Pelatihan Okupasi PPK 7. Pelatihan Teknis Lainnya yang dilaksanakan secara Klasikal / Blended Learning
2	20 % - Pembelajaran Sosial	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1. <i>Capacity Building</i> 2. Pembelajaran alam terbuka (<i>outbond</i>) 3. Patok banding (<i>benchmarking</i>) 4. Pelatihan Jarak Jauh 5. <i>e-learning</i> 6. Webinar Pemerintahan Dalam Daerah / Jabatan Pimpinan Tinggi 7. Rapat Koordinasi Manajerial dan Fungsional
		Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	1. <i>Capacity Building</i> 2. Pembelajaran alam terbuka (<i>outbond</i>) 3. Patok banding (<i>benchmarking</i>) 4. Pelatihan Jarak Jauh 5. <i>e-learning</i> ; 6. Uji Kompetensi PBJ Level 1 7. Uji Kompetensi Okupasi PPK – PBJ Level 2
2	20 % - Pembelajaran Sosial	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	1. Uji Kompetensi Administrator 2. Uji Kompetensi Pengawas 3. Uji Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja 4. <i>Capacity Building</i> 5. Coaching 6. <i>Mentoring</i> 7. Komunitas belajar (<i>community of practices</i>) / webinar / berbagi pengetahuan (<i>knowledge sharing</i>) / sesi berbagi (<i>sharing session</i>) 8. Patok banding (<i>benchmarking</i>) 9. Focus Group Discussion 10. Rapat Kerja Teknis

No	Metode Pengembangan	Pelaksana	Jenis Pelayanan
			11. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk non klasikal lainnya.
		Sekretariat	1. Rapat Koordinasi BPSDM 2. Rapat Koordinasi Nasional / Rapat Koordinasi Lainnya 3. Capacity Building untuk Internal BPSDM 4. Sosialisasi / Workshop untuk Internal BPSDM 5. Pembelajaran alam terbuka (<i>outbond</i>) untuk Internal BPSDM 6. Patok banding (<i>benchmarking</i>) untuk Internal BPSDM
3	70 % - Pembelajaran dengan Pengalaman Langsung	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	1. Detasering (<i>secondment</i>) 2. Pertukaran antara ASN dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah 3. Magang/praktik kerja 4. On The Job Training 5. Project

Untuk dapat menjalankan pelayanan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur memiliki struktur sebagai berikut :

1. Pimpinan adalah Kepala Badan yang membawahi 3 orang Kepala Bidang, 1 orang Sekretaris, 2 orang Widyaiswara Ahli Utama dan 7 orang Widyaiswara Ahli Madya;
2. Sekretaris membawahi 2 orang Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dan Sub Bagian Umum, 1 orang Pranata Komputer, 1 Orang Arsiparis dan 52 Orang Pelaksana;
3. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan membawahi 7 orang pelaksana dan dibantu 2 orang Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda dan 1 orang Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama.
4. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis membawahi 7 orang pelaksana dan dibantu 1 orang Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda.

5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional membawahi 8 orang pelaksana dan 5 orang Widyaiswara Ahli Muda, 5 orang Widyaiswara Ahli Pertama serta dibantu 2 orang Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda.

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur

No	IKU (indikator kinerja utama)	Satuan	Target 2024	Target 2025	Realisasi 2024	Proyeksi 2026	Catatan Analisis
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Presentase SDM/ASN yang telah memiliki Sertifikasi dan atau STTP	Persen	85%	87%	134%		
2	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Indeks		30,4		30,6	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	85	86,07	86	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	70,1	73	72,7	73,2	

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Timur terlihat bahwa beberapa indikator mengalami peningkatan realisasi diatas target. Adapun penyebab peningkatan realisasi, antara lain :

1. Kebijakan dan program yang tepat sasaran

- Adanya perluasan akses ASN terhadap program sertifikasi, pelatihan, maupun pengembangan kompetensi.

2. Peningkatan minat dan Partisipasi ASN

- Tingginya kesadaran ASN untuk memenuhi kewajiban 20 JP/tahun pengembangan kompetensi.
- Dorongan regulasi nasional (PermenPANRB, BKN) yang mensyaratkan sertifikasi/kompetensi tertentu.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital

- Implementasi sistem e-learning dan portal KISS yang memperluas jangkauan peserta.
- Digitalisasi layanan administrasi dan pelatihan yang membuat proses lebih cepat, mudah, dan transparan.

4. Kolaborasi dan Kerja Sama antar Lembaga

- Adanya dukungan dari Kementerian/Lembaga maupun mitra eksternal dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi.
- Efektivitas kerjasama BPSDM dengan OPD lain untuk mengikutsertakan pegawainya

5. Peningkatan Kualitas Layanan

- Adanya standar layanan minimal yang diterapkan pada administrasi pelatihan
- Meningkatnya kepuasan pengguna (peserta diklat, stakeholder) karena pelayanan lebih responsif, transparan, dan akuntabel

Tabel 2.4

Tolak Ukur Kinerja Dan Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
T.1	Tujuan : Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Di Kalimantan Timur	Indikator: Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	Definisi Operasional : Persentase ASN yang dinyatakan kompeten berdasarkan hasil uji kompetensi, keikutsertaan dalam diklat teknis/manajerial, dan pemenuhan persyaratan kompetensi jabatan. Rumus /Formulasi Perhitungan : Indeks = (Jumlah ASN yang kompeten / Jumlah ASN yang dinilai) × 100% Keterangan: • Sumber Data : Aplikasi SIMASN • Tipe Indikator : -Positif / Negatif

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
S.1	Sasaran : Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	Definisi Operasional : Persentase ASN yang dinyatakan telah memiliki STTPP/Sertifikat pengembangan Kompetensi Teknis dan dinyatakan kompeten berdasarkan hasil uji kompetensi, sertifikasi dan keikutsertaan dalam diklat teknis. - Rumus /Formulasi Perhitungan : Jumlah ASN yang memiliki STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan)/ Sertifikat Pengembangan Kompetensi Teknis DIBAGI Jumlah target ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Keterangan: - Sumber Data : Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis - Tipe Indikator : -Positif / Negatif

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
S.2	Sasaran : Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persen	- Definisi Operasional : Persentase ASN yang dinyatakan kompeten dengan telah memiliki STTPP/Sertifikat pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional - Rumus /Formulasi Perhitungan : Jumlah ASN yang memiliki STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan)/ Sertifikat Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional DIBAGI Jumlah target ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional - Sumber Data : Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - Tipe Indikator : -Positif / Negatif

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
S3	Sasaran : Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	Persen	- Definisi Operasional : Persentase target realisasi kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada tahun berjalan dilihat dari rencana kegiatan pelatihan/pengembangan kompetensi. - Rumus /Formulasi Perhitungan : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan DIBAGI Jumlah terget kegiatan yang akan dilaksanakan - Sumber Data : Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan - Tipe Indikator : -Positif / Negatif

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
S4	Sasaran : Meningkatnya layanan penjaminan mutu dan sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi	Persen	- Definisi Operasional : Persentase ASN yang telah memiliki sertifikasi dan dinyatakan kompeten/ lulus dalam uji kompetensi - Rumus /Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi Kompetensi}}{\text{Jumlah target ASN yang mengikuti Uji Kompetensi}}$ - Sumber Data : Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan - Tipe Indikator : -Positif / Negatif

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Permasalahan utama yang dihadapi dan harus segera dipecahkan oleh BPSDM Prov. Kalimantan Timur adalah rendahnya profesionalisme sumber daya manusia aparatur pada lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun penyebab permasalahan utama atau pokok tersebut berasal dari dua faktor penyebabnya, yakni:

1. Belum optimalnya upaya pengembangan kompetensi SDM aparatur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas guna mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.
2. Masih rendahnya aparatur yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi yang meliputi kompetensi manajerial, teknis, sosio-kultural, fungsional dan termasuk juga kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jika ditinjau secara luas dari permasalahan tersebut, isu strategis BPSDM dapat diuraikan dalam 2 isu, yakni:

1. Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan Sumber Daya Manusia atau Aparatur yang kompeten menuju Indonesia Emas tahun 2045.
2. Pemantapan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia atau Aparatur Pemerintah Daerah sebagai mitra IKN.

Dari 2 isu strategis tersebut ditemukan akar permasalahan pada BPSDM Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Kurangnya komitmen dari pimpinan dalam Peningkatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia atau Aparatur.
2. Kurangnya minat dan kesadaran dari pada Sumber Daya Manusia atau Aparatur dalam hal pengembangan kompetensi diri.

Untuk mendapatkan rencana strategis dalam penyelesaian permasalahan strategis diatas, maka dilakukan pengukuran kondisi dan situasi organisasi dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Oportunities dan Threats), sebagai berikut :

➤ **Analisis SWOT - Faktor Internal**

1. Strength (Kekuatan)

- 1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 menetapkan Tugas dari BPSDM Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Telah tersedia beberapa Aplikasi pelatihan seperti SIMPEL, LMS BPSDM, dll yang memiliki fungsi masing masing;
- 3) BPSDM Prov. Kaltim memiliki SDM Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan beraneka ragam keahlian dan kompetensi;
- 4) BPSDM Prov. Kaltim telah menjalin kerjasama dengan beberapa Narasumber diluar BPSDM Prov.Kaltim;
- 5) BPSDM Prov. Kaltim telah menjalin kerjasama yang baik dengan Instansi Pembina Pengembangan dan Kompetensi SDM Aparatur (LAN RI, BPSDM Kemendagri, dll);
- 6) BPSDM Prov.Kaltim telah menjalin kerjasama pelatihan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 7) BPSDM Prov. Kaltim telah menjalin kerjasama pelatihan dengan Seluruh BKPSDM pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- 8) BPSDM Prov. Kaltim telah menjalin kerjasama pelatihan dengan beberapa instansi vertikal antara lain PPSDM Ketenagakerjaan dan PPSDM Kominfo;
- 9) BPSDM Prov. Kaltim telah menjalin kerjasama pelatihan dengan Swasta yaitu PPM Manajemen dalam perancangan pelatihan dan pengelolaan Corporate University.
- 10) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2023 menetapkan BPSDM Prov. Kaltim sebagai ketua Kalimantan Timur Corporate University dan mendukung pengelolaan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

2. Weaknesses (Kelemahan)

- 1) Semua aplikasi pelatihan yang berada di BPSDM Prov.Kaltim masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi satu sama lain;

- 2) Terbatasnya sumber daya manusia ASN yang kompeten untuk membangun, mengelola dan mengembangkan Desain Pembelajaran dalam Pengembangan Kompetensi di BPSDM Provinsi Kaltim;
- 3) Proses pembelajaran yang masih mengarah ke training, sehingga belum terdapat pelatihan yang bisa diakses kapan saja sesuai kebutuhan ASN;
- 4) Belum terdapat pengelolaan pengetahuan dari setiap ASN yang dapat diakses oleh ASN lainnya;
- 5) BPSDM Prov.Kaltim baru dapat menjangkau 10-30 % dari populasi ASN Pemprov Kaltim dalam peningkatan kompetensi setiap tahunnya;
- 6) BPSDM Prov.Kaltim belum memiliki sistem yang lengkap yang mampu mengintegrasikan komponen, stakeholder dan sumber daya pendukung lainnya yang dapat membantu peningkatan Kompetensi ASN Aparatur di Provinsi Kaltim melalui pengelolaan pengetahuan yang terintegrasi yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja;
- 7) BPSDM Prov.Kaltim belum pernah melakukan survey terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait kebutuhan kompetensi pegawainya yang sejalan dengan kebutuhan organisasi;
- 8) BPSDM Prov.Kaltim belum memiliki data keseluruhan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya untuk melaksanakan peningkatan kompetensi Aparatur;
- 9) BPSDM Prov.Kaltim masih memiliki pengetahuan yang minimal untuk membuat kerangka pengelolaan pengetahuan yang terintegrasi;
- 10) BPSDM Prov.Kaltim belum memiliki kerjasama dengan penyedia fasilitas pelatihan diluar pemerintahan yang dapat turut serta membantu peningkatan kompetensi ASN di Kalimantan Timur.

Analisis SWOT - Faktor Eksternal

1. Opportunities (Peluang)

- 1) BPSDM Provinsi Kalimantan Timur merupakan penanggung jawab untuk peningkatan kompetensi ASN di seluruh Provinsi Kalimantan Timur, sehingga pelanggannya jelas seluruh ASN di Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Mandatori perundang-undangan kewajiban peningkatan kompetensi minimal 20 JP bagi PNS dan maksimal 24 JP bagi PPPK;
- 3) Mendapat dukungan penuh dari Perangkat Daerah di seluruh Provinsi

Kalimantan Timur;

- 4) Lembaga pelatihan di luar pemerintahan memberikan peluang untuk bekerjasama peningkatan kompetensi Aparatur dengan BPSDM Prov.Kaltim;
- 5) K/L dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia membuka pintu untuk studi tiru bagi BPSDM Prov. Kaltim.

2. Threats (Ancaman)

- 1) Pencapaian Mandatori perundang undangan peningkatan kompetensi minimal 20 JP bagi PNS dan maksimal 24 JP bagi PPPK belum tercapai di semua ASN maupun Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Peningkatan kompetensi SDM Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur yang belum sejalan dengan rencana strategis organisasi;
- 3) Pengetahuan di Organisasi banyak dan beragam, namun tersebar dan melekat pada satu orang, sehingga terjadi ketergantungan terhadap individu dan berdampak pada kinerja Perangkat Daerah yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) Belum tercipta Organisasi pembelajar yang berfokus pada "learning" yang mendorong pembelajaran adaptif maupun generative agar bukan hanya dapat melakukan penyesuaian terhadap lingkungan, tetapi juga untuk "belajar" secara berkesinambungan demi penciptaan inovasi agar terjadi peningkatan kinerja;
- 5) Peran BPSDM Prov.Kaltim sebagai lembaga penyelenggara pelatihan bagi Aparatur lambat laun akan tertinggal dan diambil alih pihak lain;
- 6) Belum tercipta budaya (Habitiasi) pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui proses pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan secara terus menerus di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pada kinerja Aparatur.

Mengacu kepada pengukuran kondisi dan situasi organisasi dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Oportunities dan Threats) tersebut diatas, BPSDM telah membuat terobosan Inovasi yang mengintegrasikan sistem pengelolaan pengetahuan yang mampu mengintegrasikan semua komponen, stakeholders, sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan peningkatan kompetensi ASN Provinsi Kalimantan Timur dan menciptakan Proses pengembangan

SDM Aparatur yang aplikatif, relevan/ adaptif, mudah diakses dan berdampak, untuk menyesuaikan dengan era Globalisasi saat ini yaitu **Knowledge Integrated Solution System (KISS) dan Kalimantan Timur Corporate University (Kaltim CorpU)**. Harapan besar dari 2 Inovasi BPSDM Prov Kaltim tersebut agar setiap permasalahan dan setiap isu strategis kedepannya dapat segera terjawab dan terselesaikan dengan optimal serta dapat mengembangkan teknologi pembelajaran yang mudah diakses kapan saja, dimana saja dan mampu menjangkau target secara menyeluruh dan yang terpenting mampu menciptakan kerangka pembelajaran yang mampu mencetak agen perubahan karena perkembangan jaman saat ini menuntut kompetensi yang lebih dari seorang individu.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Berdasarkan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas program kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Samarinda			71.230.000.000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Samarinda			65.931.306.362	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Samarinda			71.230.000.000	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Samarinda			65.931.306.362	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kota Samarinda			71.230.000.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kota Samarinda			65.931.306.362	
5.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kota Samarinda	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 indeks	46.077.234.729	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kota Samarinda	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 indeks	42.966.902.840	
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	88%				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	88%		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.0 1.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	85%	607.234.839	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	85%	482.226.695	
5.04.0 1.1.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	428.105.753	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	303.349.609	
5.04.0 1.1.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1 laporan	19.153.086	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 laporan	19.153.086	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
5.04.0 1.1.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	159.976.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	159.724.000	
5.04.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase Realisasi Anggaran	80%	17.597.373.166	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Terlaksananya Fungsi Penatausahaan Keuangan	80%	17.118.895.047	
5.04.0 1.1.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/ Bulan	17.211.911.866	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/ Bulan	16.717.473.747	
5.04.0 1.1.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	1 Dokumen	379.440.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	395.400.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tugas ASN								
5.04.0 1.1.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD	Kota Samarind a	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD	4 Laporan	6.021.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD	Kota Samarind a	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD	4 Laporan	6.021.300	
5.04.0 1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Samarind a	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	80%	6.310.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Samarind a	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	80%	6.310.000	
5.04.0 1.1.03 .0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Samarind a	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	6.310.000	Penatausahaan Barang Milik	Kota Samarind a	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	6.310.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah pada SKPD			Daerah Pada SKPD		Daerah pada SKPD			
5.04.0 1.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase Capaian Retribusi Daerah	70%	28.136.250	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Capaian Target Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah	70%	28.136.250	
5.04.0 1.1.04 .0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	28.136.250	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	28.136.250	
5.04.0 1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	60%	385.136.483	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Terlaksananya Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	60%	497.360.043	
5.04.0 1.1.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	251.933.454	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	251.933.454	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.0 1.1.05 .0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	133.203.029	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	245.426.589	
5.04.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90%	6.537.468.978	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	90%	4.052.473.729	
5.04.0 1.1.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	173.944.090	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	173.944.090	
5.04.0 1.1.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	74.173.964	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	74.173.964	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Disediakan					yang Disediakan			
5.04.0 1.1.06 .0007	Penyediaan Bahan/Material	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	985.484.554	Penyediaan Bahan/Material	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	758.417.100	
5.04.0 1.1.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	33.737.520	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	33.737.520	
5.04.0 1.1.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	4.983.598.550	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	2.755.010.755	
5.04.0 1.1.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	30.394.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	30.394.500	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.0 1.1.06 .0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	256.135.800	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	226.795.800	
5.04.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	90%	8.511.205.663	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	90%	6.818.213.622	
5.04.0 1.1.07 .0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	1.437.868.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	669.048.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.0 1.1.07 .0005	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	3.079.812.242	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	2.089.480.793	
5.04.0 1.1.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	565 Unit	3.993.525.421	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	565 Unit	4.059.684.829	
5.04.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	82%	5.547.650.450	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Tersedianya Layanan Penunjang Perangkat Daerah	82%	7.001.792.554	
5.04.0 1.1.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.093.600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.093.600	
5.04.0 1.1.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	1.726.664.550	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	1.812.914.050	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Disediakan					Disediakan			
5.04.0 1.1.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.813.892.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.181.784.904	
5.04.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90%	6.856.718.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	90%	6.961.494.900	
5.04.0 1.1.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	56.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	56.800.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.0 1.1.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	136.300.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	136.300.500	
5.04.0 1.1.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	796 Unit	650.370.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	796 Unit	650.370.400	
5.04.0 1.1.09 .0007	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	40.720.000	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	40.720.000	
5.04.0 1.1.09 .0010	Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh	45 Unit	5.972.528.000	Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha	45 Unit	6.077.304.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	atau Bangunan Lainnya		abilitas			atau Bangunan Lainnya		bilitasi			
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kota Samarinda	Persentase Sumber Daya Manusia yang Profesional dalam Pelayanan Publik	87%	25.152.765.271	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kota Samarinda	Persentase Sumber Daya Manusia yang Profesional dalam Pelayanan Publik	87%	22.964.403.522	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Samarinda	Meningkatnya Pemenuhan Hak SDM/ASN untuk Memperoleh Bangkom Teknis minimal 20 Jam Pelajaran/Tahun	88%	7.034.808.055	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Samarinda	Meningkatnya Pemenuhan Hak SDM/ASN untuk Memperoleh Bangkom Teknis minimal 20 Jam Pelajaran/Tahun	88%	9.273.701.467	
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi	Kota Samarinda	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1.800 orang	7.034.808.055	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi	Kota Samarinda	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1.800 orang	9.273.701.467	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					
5.04.0 2.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Samarinda	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti perkembangan kompetensi K epemimpinan/P emerintahan, Daerah, Manajerial dan Fungsional	86%	13.364.525.9 02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Samarinda	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti perkembangan kompetensi K epemimpinan/Pe merintahan, Daerah, Manajerial dan Fungsional	86%	13.690.702.05 5	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	86%	4.753.431.314			Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	86%	4.146.874.423	
5.04.0 2.1.02 .0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan	Kota Samarinda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	91.303.800	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,	Kota Samarinda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	91.303.800	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Prajabatan, serta jabatan fungsional					serta jabatan fungsional					
5.04.0 2.1.02 .0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3 Dokumen	127.078.098	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3 Dokumen	127.078.098	
5.04.0 2.1.02 .0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	130 Orang	518.331.690	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	130 Orang	518.331.690	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.0 2.1.02 .0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	54 Laporan	3.994.028.976	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	54 Laporan	3.387.472.085	
5.04.0 2.1.02 .0005	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20 Dokumen	22.688.750	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20 Dokumen	22.688.750	
5.04.0 2.1.02 .0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kota Samarinda	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6954 Orang	13.364.525.902	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kota Samarinda	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6954 Orang	13.690.702.055	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Prajabatan					dan Prajabatan			
	J U M L A H				71.230.000.000	J U M L A H				65.931.306.362	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan hasil analisis sesuai kebutuhan. Rumusan berdasarkan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

Program dan kegiatan merupakan analisis dan penelaahan usulan pemangku kepentingan maupun hasil pengumpulan informasi dan pengamatan hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada suatu anggaran berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Corporate University

Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BPSDM Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan Kalimantan Timur Corporate University dan disaksikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Pemerintah Kabupaten / Kota dan BUMD/BUMN terkait. Kalimantan Timur Corporate University (Kaltim CorpU) merupakan entitas pendidikan strategis untuk membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mencapai visi misinya dalam bentuk aktivitas yang membudidayakan pembelajaran, pengetahuan dan kebijaksanaan individu dan organisasi. Implementasi *Corporate University* berfokus pada pembentukan Framework berupa peletakan Pondasi dan Sosialisasi Menuju Kalimantan Timur *Corporate University*. Penerapan Kalimantan Timur *Corporate University* diharapkan mampu memenuhi harapan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta dapat membantu organisasi untuk bergerak lincah (*agile*), mampu beradaptasi, responsif, dan siap menghadapi perubahan yang terus terjadi di masa yang penuh dengan ketidakpastian atau dikenal dengan istilah VUCA.

2. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

AKPK merupakan salah satu indikator kegiatan yang ada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur. AKPK adalah singkatan dari Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, yaitu sebuah proses yang dilakukan secara terstruktur untuk mengetahui dan menggambarkan kebutuhan peningkatan kompetensi, baik secara kelembagaan maupun perorangan, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan utama dari Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi adalah :

- Mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki ASN saat ini dengan yang dibutuhkan, sehingga langkah pengembangan SDM bisa dilakukan secara tepat dan terarah.
- Menyusun data dan informasi mengenai kebutuhan pengembangan kompetensi masing-masing unit kerja dan individu ASN sebagai dasar perencanaan yang akurat.
- Menjadi pijakan dalam merancang program peningkatan kapasitas ASN seperti pelatihan, workshop, seminar, atau bentuk pengembangan lainnya.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pendampingan kegiatan AKPK sebanyak 3 tahapan. Tahap pertama difokuskan pada analisis kebutuhan di tingkat organisasi, tahap kedua menysasar pada pemetaan kebutuhan di tingkat individu, sedangkan tahap ketiga yaitu merupakan proses finalisasi atas seluruh kebutuhan yang telah berhasil diidentifikasi pada tahap-tahap sebelumnya

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis disusun secara khusus untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adanya keterpaduan antara program dan kegiatan ini menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, pelaksanaan Rencana Kerja BPSDM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 tetap mengacu pada aturan, norma, dan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pembina aparatur sipil negara, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, Rencana Kerja BPSDM Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana strategis dari kementerian atau lembaga di tingkat nasional. Dengan demikian, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2026 tersebut harus diselaraskan dengan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program strategis dari kementerian dan lembaga terkait. Adapun Telaahan terhadap Rencana Strategis kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

➤ **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.**

Visi

"Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong".

Misi:

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik - *digital bureaucracy*.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.

3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Dalam hal ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Pengembangan SDM Aparatur, yaitu:

1. Program pengembangan Kompetensi Teknis,
2. Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

➤ **Lembaga Administrasi Negara RI (LAN-RI)**

Visi :

“Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam visi tersebut, terkandung 4 (empat) elemen utama, yaitu:

1. Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia
2. Yang Mampu Menjadi Penggerak Utama
3. World Class Government
4. Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Misi:

Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

1. Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional.
2. Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analisis kebijakan yang kompeten.
3. Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi.
4. Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan peningkatan program pendidikan kedinasan Aparatur Sipil Negara dan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis BPSDM Provinsi Kalimantan Timur mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

➤ **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

Visi :

“Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang Kompeten dan Profesional”

Misi :

1. Meningkatkan Standar kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Menyelenggarakan Sertifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.
3. Mengembangkan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.

Berdasarkan telaahan kementrian/lembaga, Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat atau nasional yang terkait dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur adalah:

- a. Mengembangkan Kompetensi Teknis;
- b. Mengembangkan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
- c. Mengembangkan Kompetensi Pemerintahan.
- d. Mengembangkan sistem pendaftaran peserta Pelatihan
- e. Optimalisasi sistem Pelatihan berbasis informasi teknologi
- f. Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi di tingkat pusat dan daerah secara bertahap;
- g. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana BPSDM, Pelatihan Daerah Provinsi Kaltim untuk meningkatkan status Akreditasi;
- h. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, melalui identifikasi kebutuhan Pelatihan dan penyusunan standart pelayanan;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029 diarahkan pada penanganan isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Proses perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra 2025–2029 bukan hanya formalitas administratif, melainkan berbasis pada isu-isu penting tupoksi BPSDM yang ditransformasikan menjadi sasaran kinerja terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dalam mencapai target pembangunan SDM aparatur daerah yang unggul, profesional, dan kompeten. Beberapa isu penting yang menjadi dasar perumusan antara lain:

- a. Tuntutan peningkatan profesionalisme ASN yang semakin mendesak di era digitalisasi dan transformasi birokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tentang ASN serta harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
- b. Masih rendahnya tingkat pemenuhan pengembangan kompetensi ASN (20 JP per tahun), sehingga diperlukan strategi komprehensif untuk memperluas akses dan kesempatan pendidikan serta pelatihan bagi seluruh ASN.
- c. Adanya kesenjangan kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional di antara ASN yang dapat memengaruhi efektivitas kinerja birokrasi, sehingga perlu difokuskan pada peningkatan pemerataan kompetensi.
- d. Kebutuhan penguatan penjaminan mutu dan sertifikasi kompetensi agar ASN memiliki standar profesional yang jelas dan diakui secara nasional, sekaligus mendukung penerapan sistem merit.

Berdasarkan isu-isu penting tersebut, kemudian dirumuskan :

➤ Tujuan Strategis :

- Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi Terintegrasi di Kalimantan Timur.

➤ Sasaran Strategis :

- Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis
- Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional
- Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, dan

evaluasi

- Meningkatnya layanan penjaminan mutu dan sertifikasi kompetensi

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
T.1	Tujuan : Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Di Kalimantan Timur	Indikator: Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	30,4	30,6	30,8	31	31,2
S.1	Sasaran : Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	88	90	91	92	93

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
S.2	Sasaran : Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persen	87	88	92	94	96
S3	Sasaran : Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	Persen	90	91	92	93	94
S4	Sasaran : Meningkatnya layanan penjaminan	Persentase ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi	Persen	88	89	90	91	92

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	mutu dan sertifikasi kompetensi							

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan BPSPDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 terdiri dari 2 Program, 11 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan, antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Terdiri dari 9 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
- b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
- c. Sub Kegiatan Penyediaan bahan/material dengan indikator Jumlah paket Bahan/material yang disediakan
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- g. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- d. Pemeliharaan Aset tetap lainnya
- e. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

terdiri 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengembangan Kompetensi Teknis

Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Teknis Umum, imti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum

2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber

Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta jabatan fungsional

- b. Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri
- c. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- d. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar
- e. Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga
- f. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	15	16	17
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			35.518.436.770,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			35.518.436.770,00	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			35.518.436.770,00	
1,	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1.983.887.946,00	
		[Meningkatkan kinerja layanan kesekretariatan]	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	-	1.983.887.946,00	-
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	-	417.491.946,00	BADAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		404.547.946,00	BADAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12.944.000,00	BADAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				

			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		0,00	BADAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Realisasi Anggaran</i>	-	0,00	BADAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		0,00	BADAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>		0,00	BADAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD</i>		0,00	BADAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	-	0,00	BADAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				

			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Retribusi Daerah</i>	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi</i>	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i>	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				

			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	-	-	1.983.887.946,00	-
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase pemenuhan BMD</i>	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatkan kinerja layanan kesekretariatan]	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	-	1.983.887.946,00	-
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	-	1.566.396.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		1.566.396.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2,	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			33.534.548.824,00	
		[Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis]	persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	-	33.534.548.824,00	-
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	<i>Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis</i>	-	10.934.548.824,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				
			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>		10.934.548.824,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

		[Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi]	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	-	33.534.548.824,00	-
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, Jabatan Fungsional dan Pemerintahan Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi di LPPBJ Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi di LSP-PDN Provinsi Persentase dokumen hasil penyusunan AKPK organisasi dan individu dari masing-masing perangkat daerah pemprov kaltim	-	22.600.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional				
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,		140.560.720,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya layanan penjaminan mutu dan sertifikasi kompetensi]	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi	-	33.534.548.824,00	-
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				

			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi		117.290.516,00	BADAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi		2.668.398.940,00	BADAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi]	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	-	33.534.548.824,00	-
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				

			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar</i>		3.950.318.704,00	BADAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga</i>		23.431.120,00	BADAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional]	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	-	33.534.548.824,00	-
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				

			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>		15.700.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
--	--	--	--	--	-------------------	--

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BPSDM PROV. KALTIM

TAHUN 2026

Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis BPSDM Prov. Kalimantan Timur untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Kode	Rancangan Akhirl RKPD				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Samarinda			70.100.466.469
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Samarinda			70.100.466.469
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kota Samarinda			70.100.466.469
5.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kota Samarinda	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan;	86	36.565.917.645
			Persenatse Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindaklanjuti	89	
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	87%	580.166.946

Kode	Rancangan Akhir RKPD				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	404.547.946
5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.944.000
5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	162.675.000
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase Realisasi Anggaran	88%	18.508.069.317
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	18.100.000.986
5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	401.340.000
5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6.728.589
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	90%	6.427.120
5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.427.120
5.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase Capaian Retribusi Daerah	80%	17.771.582

Kode	Rancangan Akhir RKPD				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
5.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	17.771.582
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	72%	619.708.606
5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	298.143.706
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	321.564.900
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	6.147.377.775
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	405.330.845
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	92.773.334
5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	1.158.124.020
5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	47.736.600
5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.225.659.120
5.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	22.037.056
5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	195.716.800

Kode	Rancangan Akhirl RKPD				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Persentase pemenuhan BMD	100%	1.191.733.645
5.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0
5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	571.697.066
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	620.036.579
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	85%	6.937.615.596
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.743.200
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.812.180.100
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.119.692.296
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95%	2.557.046.800
5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	59.753.200
5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	16 Unit	187.426.500

Kode	Rancangan Akhir RKPD				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	281 Unit	702.751.100
5.04.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	40.720.000
5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	1.566.396.000
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kota Samarinda	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis;	90%	33.534.548.824
			Persentase ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi;	89%	
			Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	91%	
			Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional;	88%	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Samarinda	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	90%	10.934.548.824
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagia Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2.160 orang	10.934.548.824

Kode	Rancangan Akhir RKPD				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Samarinda	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi di LPPBJ	85%	22.600.000.000
			Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi di LSP-PDN Provinsi	85%	
			Persentase dokumen hasil penyusunan AKPK organisasi dan individu dari masing-masing perangkat daerah pemprov kaltim	91%	
			Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, Jabatan Fungsional dan Pemerintahan	88%	
5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan fungsional	Kota Samarinda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	140.560.720
5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	5 Dokumen	117.290.516

Kode	Rancangan Akhir RKPD				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Dalam Negeri				
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	140 Orang	2.668.398.940
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	58 Laporan	3.950.318.704
5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	15 Dokumen	23.431.120
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kota Samarinda	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7.003 Orang	15.700.000.000
	J U M L A H				70.100.466.469

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional dan strategis. Dokumen ini berperan sebagai penghubung antara perencanaan di tingkat perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renja ini juga menjadi wujud pelaksanaan dari rencana strategis jangka menengah daerah serta Renstra perangkat daerah, yang secara keseluruhan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Agar pelaksanaan seluruh kegiatan berjalan optimal dan terjalin kerja sama yang sinergis antar pihak terkait, maka setiap aparatur di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Renja Tahun 2026.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 ini juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian penyampaian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN I
HASIL PENCERMATAN TERHADAP KETERISIAN INDIKATOR, TARGET KINERJA, KELOMPOK SASARAN, LOKASI, TAGGING DUKUNGAN PRIORITAS NASIONAL, PRIORITAS DAERAH (PROGUL) PADA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	SESUAI/ TIDAK SESUAI
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
								NASIONAL	DAERAH	PROGRAM UNGGULAN		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				70.100.466.469,00						
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			70.100.466.469,00							
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			70.100.466.469,00							
1,	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		86 Persen 89 Persen	36.565.917.645,00							
		[Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan]	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	86 89	36.565.917.645,00	-	-	-	-	-		

[illegible]

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	404.547.946,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN dan Akdemisi Provinsi Kalimantan Timur	
	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.944.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN dan Akademisi Provinsi Kalimantan Timur	
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	162.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN dan Akdemisi Provinsi Kalimantan Timur	
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	88 Persen	18.508.069.575,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN	
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	18.100.000.986,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN	
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	401.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN	
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	2 Laporan	6.728.589,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN	
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	90 Persen	6.427.120,00			-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN Provinsi Kalimantan Timur	
	5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	6.427.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN Provinsi Kalimantan Timur	
	5.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Retribusi Daerah</i>	80 Persen	17.771.582,00			-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
	5.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	1 Laporan	17.771.582,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	

	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	72 Porsi	619.708.606,00			-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN	
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	298.143.706,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN	
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	321.564.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN	
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Porsi	6.147.377.775,00			-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	405.330.845,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	92.773.334,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
	5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.812.180.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	5.119.692.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik</i>	95 Persen	2.557.046.800,00			-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	59.753.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	16 Unit	187.426.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	281 Unit	702.751.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
	5.04.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									

			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>	2 Unit	40.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	20 Unit	1.566.396.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
2,	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		88 Persen 89 Persen 90 Persen 91 Persen	33.534.548.824,00						
		[Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis]	persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	90	33.534.548.824,00	-	-	-	-	-	

	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	<i>Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis</i>	90 Persen	10.934.548.824,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Memban- gun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									

			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>	2160 Orang	10.934.548.824,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
		[Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi]	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	91	33.534.548.824,00	-	-	-	-	-	

	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, Jabatan Fungsional dan Pemerintahan Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi di LPPBJ Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi di LSP-PDN Provinsi Persentase dokumen hasil penyusunan AKPK organisasi dan individu dari masing-masing perangkat daerah pemprov kaltim	88 Persen 85 Persen 85 Persen 91 Persen	22.600.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Memban- gun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional									

[illegible]

			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	5 Dokumen	117.290.516,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota									

			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	140 Orang	2.668.398.940,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangga disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
		[Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi]	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	91	33.534.548.824,00	-	-	-	-	-	
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar									

			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	58 Laporan	3.950.318.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	1. Memban gun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga									

[illegible]

			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>	15000 Orang	15.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan	ASN dan Masyarakat	
--	--	--	--	-------------	-------------------	---	-----------------------	--	--------------------------------	--------------------	--

LAMPIRAN II

KESELARASAN BELANJA DALAM UPAYA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Sesuai/ Tidak Sesuai
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			70.100.466.469,00	
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			70.100.466.469,00	
			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			70.100.466.469,00	
Tujuan : Mewujudkan Profesionalisme SDM Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Di Kalimantan Timur	Indikator: Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	30,60					
Sasaran : Mengembangkan SDM Aparatur Guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indikator : Nilai SAKIP; Indeks Kepuasan Masyarakat	73,2 86	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan; Persenatse Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindaklanjuti	86 Persen; 89 Persen	36.565.917.645,00	

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	87 Persen	580.166.946,00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	404.547.946,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.944.000,00	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	162.675.000,00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	88 Persen	18.508.069.575,00	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan	18.100.000.986,00	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	401.340.000,00	

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6.728.589,00	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	90 Persen	6.427.120,00	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.427.120,00	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	80 Persen	17.771.582,00	
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				
				Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	17.771.582,00	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	72 Persen	619.708.606,00	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				

			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	298.143.706,00	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	321.564.900,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	6.147.377.775,00	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	405.330.845,00	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	92.773.334,00	
			Penyediaan Bahan/Material			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	1.158.124.020,00	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	47.736.600,00	

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.225.659.120,00	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	22.037.056,00	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	195.716.800,00	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	1.191.733.645,00	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	
			Pengadaan Mebel				
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	571.697.066,00	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	620.036.579,00	

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	85 Persen	6.937.615.596,00	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.743.200,00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.812.180.100,00	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.119.692.296,00	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.557.046.800,00	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	59.753.200,00	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	187.426.500,00	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	281 Unit	702.751.100,00	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	40.720.000,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	1.566.396.000,00	
Sasaran : Meningkatnya Kompetensi Dasar, Manajerial, Teknis, dan Fungsional dalam Mendukung Profesionalisme ASN	Indikator : Presentase Pemenuhan Kewajiban Pengembangan ASN	Target : 40%	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional; Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi; Persentase SDM/ Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis; Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	88 Persen; 89 Persen; 90 Persen; 91 Persen	33.534.548.824,00	
			Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	90 Persen	10.934.548.824,00	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				
				Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2160 Orang	10.934.548.824,00	

			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, Jabatan Fungsional dan Pemerintahan; Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi di LPPBJ; Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi di LSP-PDN Provinsi; Persentase dokumen hasil penyusunan AKPK organisasi dan individu dari masing-masing perangkat daerah pemprov kaltim	88 Persen; 85 Persen; 85 Persen; 91 Persen	22.600.000.000,00	
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional				
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	140.560.720,00	
			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				
				Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	5 Dokumen	117.290.516,00	
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				
				Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	140 Orang	2.668.398.940,00	
			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				

			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	58 Laporan	3.950.318.704,00	
			Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga			
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	15 Dokumen	23.431.120,00	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	15000 Orang	15.700.000.000,00	
						70.100.466.469,00

**RENJA TAHUN 2026
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan segala potensi, permasalahan dan tantangan yang ada. Peran strategis perencanaan ini diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Lebih lanjut secara lebih terperinci, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja dan kebutuhan pendanaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Renja telah melalui proses sinkronisasi atau penyelarasan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai bentuk implementasi Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi satu kesatuan. Renja Perangkat Daerah merupakan instrumen dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah.

Renja Perangkat Daerah memuat kondisi ideal yang seharusnya diciptakan dengan disertai penjabaran mengenai cara pencapaiannya, substansinya serta memberikan gambaran konkret terkait pengukuran target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Kesenambungan dan keselarasan antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, menjadi tolok ukur dan tantangan pelaksanaan pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah memiliki peran dalam ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
9. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3046 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan menyusun RKA dan DPA Tahun 2026, mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025- 2029, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan Renstra Tahun 2025- 2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2026 tersebut adalah tersusunnya dokumen rencana program dan kegiatan terkait kegiatan yang difokuskan pada pengembangan riset dan inovasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, yakni :

BAB I PENDAHULUAN :

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN dan SASARAN :

Memuat tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah, Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan Tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN :

Memuat tentang rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif pendanaan.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu proses peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah dengan melakukan penilaian terhadap hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Evaluasi dilakukan guna mengetahui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (2024-2026)

Evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan berdasarkan pada pelaksanaan Renja Tahun 2024 yang meliputi realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra
Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Peran g kat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah										
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	85	N/A	83	103,61	124,83	84		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	N/A	100	100	100,00	100		
5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan Yang Konsisten Dengan Target Yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	%	90	N/A	80	100	125,00	85	60,33	70,98
5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	10	11	11	100,00	10	6	60,00
5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	0	21	21	100,00	21	5	23,81
5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	0	5	5	100,00	5	2	40,00
5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	%	0	N/A	0,18	0,04	22,22	0.08	0,08	100,00
5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	69	46	41	41	100,00	50	0	0,00
5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	36	0	12	12	100,00	12	3	25,00
5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	90	0	30	30	100,00	30	6	20,00
5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	%	10	N/A	20	0	0,00	15	0	0,00
5.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00
5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	0	4	4	100,00	12	3	25,00
5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36	0	12	12	100,00	12	3	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	%	70	N/A	40	33,00	82,50	50	13	26,66
5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	0	2	2	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	1	100,00
5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	90	25	25	17	68,00	30	4	13,33
5.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	90	0	30	1	3,33	30	0	0,00
5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	%	95	N/A	75	100,00	133,33	85	29	0,00
5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	1	1	1	100,00	1		0,00
5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	1	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	3	25,00
5.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	6	0	2	2	100,00	2	0	0,00
5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	%	100	N/A	30	51,35	171,17	70	0	0,00
5.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	0	1	1	100,00	0	0	0,00
5.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	2	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	27	0	5	14	280,00	10	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	1	0	0,00	1	0	0,00
5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	30	1	1	100,00	0	0	0,00
5.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	40	1	1	100,00	0	0	0,00
5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	%	100	N/A	100	100	100,00	100	21	21,25
5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	3	0,00
5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	3	0,00
5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	36	0	12	12	100,00	12	3	0,00
5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	83	12	13	13	100,00	36	9	0,00
5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	%	80	N/A	60	50,73	84,55	70	4,18	5,97

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	14	0	2	2	100,00	6	0	0,00
5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	6	6	6	100,00	6	0	0,00
5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	240	61	70	57	81,43	80	0	0,00
5.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	2	2	2	100,00	4	0	0,00
5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	1	1	1	100,00	3	0	0,00
5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	100,00	2	0	0,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	%	75	N/A	70	60	85,71	72		
		Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	%	67	N/A	65	50	76,92	66		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	5	N/A	5	5	100,00	4		
5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	3	0	2	1	50,00	1	0	0,00
5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	5	4	1	1	100,00	2	0	0,00
5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	3	1	1	1	100,00	0	0	0
5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	3	2	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	4	3	2	1	50,00	1	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.02.1.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.01.0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.01.0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	3	0	0	0	0	1	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	3	1	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	10		4	4	100,00	5	0	0,00
5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.01.0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Rekomendasi	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	5	N/A	2	2	100,00	4		
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	3	0	0	0	0	1	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	3	4	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	5	2	1	100	0	2	0	0
5.05.02.1.02.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	3	0	0	0	0	1	0	0
5.05.02.1.02.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.02.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	3	0	0	0	0	1	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.02.1.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	3	0	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.02.0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen	3	0	1	100	0	0	0	0
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	5	N/A	5	5	100,00	4		
5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	2	0	0	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	3	2	1	200	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	3	0	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	3	1	1	100	0	1	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	3	0	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	3	7	6	16,67	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	3	0	2	50	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	3	0	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	3	0	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	3	2	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	3	0	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	3	3	1	100	0	1	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.02.1.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	3	0	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	12	N/A	11	9	81,82	11		
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	3	5	3	100	0	3	0	0
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	2	2	2	100	0	1	0	0
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	9	4	3	100	0	3	0	0
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	9	3	2	100	0	3	0	0
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	3	1	1	100	0	1	0	0

Dalam pencapaian target-target tersebut, Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran.

Berdasarkan tabel 2.1 tersebut, dalam pelaksanaan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur terdapat 2 (dua) program yang mendukung terlaksananya Renja 2024 yaitu (1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan (2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah rangkaian kegiatan dan anggaran yang berfungsi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintahan daerah. Indikator-indikator yang menunjang keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

a). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan

Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan diperoleh dari Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dari bulan Januari-Desember 2024, dari target nilai 83 point tercapai 86 point, sehingga tingkat capaian kinerja **melebihi target** yang ditetapkan yakni 103,61%. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Balitbangda merupakan Gambaran kinerja pelayanan Balitbangda dalam mendengarkan aspirasi Masyarakat terkait penyelenggaraan riset dan inovasi tahun 2024. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan didukung oleh kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diukur melalui kinerja “Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik” dengan target 75 % terealisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerjanya **melebihi target** (133,33%).

b). Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti

Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti diperoleh melalui perhitungan akumulasi persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu, persentase realisasi anggaran, persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik, dengan nilai realisasi 100%, teridentifikasi target **terpenuhi** 100%.

Tabel 2.2 Perhitungan Indikator Kinerja Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti

Komponen Perhitungan	Bobot
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	40%
persentase realiasi anggaran	30%
Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25%
Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	5%

Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Capaian Program Kegiatan Yang Konsisten Dengan Target Yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dari target 80% terealisasi 100%, tingkat capaian kinerja 125%.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan, dari target 0,18% terealisasi 0,04%, target tercapai dengan menurunnya persentase temuan laporan keuangan pada tahun 2024.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah dari target 20% terealisasi 0%, target tercapai dengan menurunnya persentase temuan audit barang milik daerah tahun 2024.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan, dari target 40% terealisasi 33%, tingkat capaian kinerja 82,50%.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi, dari target 30% terealisasi 51,35%, tingkat capaian kinerja 171,17% capaian kinerja melebihi target.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi, dari target 100% terealisasi 100%, capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik,

dari target kinerja 60% terealisasi 50,73%, tingkat capaian kinerja 84,55% capaian kinerja belum mencapai target.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda

Peningkatan/penurunan capaian kinerja : Pada tahun 2023 terjadi penurunan Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur, disebabkan realisasi kinerja belum mencapai target yang ditetapkan atau hanya tercapai 67%, namun Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024 ditargetkan mencapai nilai yang ditetapkan yaitu 75 (BB). Pencapaian target tersebut didukung oleh perencanaan yang selaras dengan penganggaran, penetapan sasaran dan target kinerja yang tepat pada Perjanjian Kinerja dan optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi pada aplikasi IRIS.

Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim

Peningkatan/penurunan capaian kinerja : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan yang didukung oleh adanya perbaikan, monitoring-evaluasi dan pengendalian terhadap unsur-unsur pelayanan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim. Sebagai bentuk evaluasi terhadap pelayanan Balitbangda Kaltim metode survei diperlukan untuk melihat seberapa puas publik menilai pelayanan yang telah dilakukan. Meskipun nilai tersebut melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih perlu dilakukan perbaikan, monitoring-evaluasi dan pengendalian terhadap unsur-unsur pelayanan.

B. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan riset dan inovasi di Provinsi Kalimantan Timur. Tercapainya kinerja program tersebut diukur dengan tolok ukur sebagai berikut :

1. Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran, diukur melalui jumlah hasil riset yang masuk dalam dokumen Renja PD yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran, dari target 2 (dua) riset terealisasi 2 (dua) riset, tingkat capaian kinerja 100%. Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan dengan indikator kinerja Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota, dari target kinerja 2% terealisasi 2%, tingkat capaian kinerja 100%.
- 2) Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan dengan indikator kinerja Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota, dari target kinerja 2% terealisasi 2%, tingkat capaian kinerja 100%.
- 3) Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan dengan indikator kinerja Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota, dari target kinerja 2% terealisasi 2%, tingkat capaian kinerja 100%.

Hasil Inovasi yang Dimanfaatkan dalam Dokumen Renja dan DPA PD :

- a) Renja dan DPA Dinas Pariwisata Prov. Kaltim Tahun 2024, Riset Identifikasi Potensi Unggulan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir pada laporan ini.
 - b) Renja dan DPA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Prov. Kaltim Tahun 2024, Riset Sumber Daya Manusia Perindustrian Kalimantan Timur Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 sebagaimana terlampir pada laporan ini.
2. Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran, diukur melalui jumlah hasil inovasi yang masuk dalam dokumen Renja PD yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran, dari target 2 (dua) inovasi terealisasi 2 (dua) inovasi, tingkat capaian kinerja 100%. Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran didukung oleh kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi dengan indikator kinerja “Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam

dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota”, dari target kinerja 11% terealisasi 9%, tingkat capaian kinerja 81,82%.

Hasil Inovasi yang Dimanfaatkan dalam Dokumen Renja dan DPA PD:

- a) Dokumen Renja dan DPA Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 pada sub kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
- b) Dokumen Renja dan DPA Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2024 Lomba Kreasi Inovasi (KRESNOVA) pada sub kegiatan Uji Coba Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.

Faktor Eksternal Pendorong Penerapan Hasil Riset dan Inovasi :

- a) Kebijakan yang mengatur tentang riset dan inovasi, antara lain : Peraturan Presiden RI nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja PD.
- b) Kerjasama Riset dan Inovasi multipihak melalui kolaborasi dan sinkronisasi riset dan inovasi secara nasional dan internasional
- c) Adanya fasilitasi dan penjangkaran inovasi

Faktor Internal Pendorong Penerapan Hasil Riset dan Inovasi :

- a) IKU dari sasaran strategis yang menjadi komitmen pimpinan untuk meningkatkan Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat.
- b) Peningkatan kualitas riset dan inovasi yang berbasis Teknologi Informasi aplikasi IRIS (Innovation and Research Information System).
- d) Jurnal Riset Pembangunan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim sebagai wadah bagi periset di lingkungan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim dan BRIN untuk menyampaikan karya tulis ilmiah hasil riset.
- e) Adanya sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil riset dan inovasi
- f) Kepatuhan ASN terhadap kebijakan yang berlaku.

Faktor Eksternal Penghambat Penerapan Hasil Riset dan Inovasi

- a) Belum optimalnya hasil riset dan inovasi yang diterapkan oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat.
- b) Belum ada regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
- c) Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pemangku kepentingan dari pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
- d) Keterbatasan jumlah periset dan bidang kepakaran di Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor Internal Penghambat Penerapan Hasil Riset dan Inovasi :

Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan hasil riset dan inovasi oleh Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim. Masalah terbesar yang hampir dialami seluruh lembaga riset adalah belum dimanfaatkannya hasil riset dan inovasi oleh pemangku kepentingan, disebabkan hasil riset dan inovasi yang dihasilkan tidak bersifat aplikatif sehingga tidak dapat diterapkan ke masyarakat dan pembangunan daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah adalah kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya di dalam dokumen Renstra 2024-2026 dan Renja Tahun 2024.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Balitbangda Prov. Kaltim

No.	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Prangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat Indikator :										
1.1	Jumlah hasil Riset yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah			2	5	10	2		5	10	100% (2024)
1.2	Jumlah hasil Inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah			2	5	10	2		5	10	100% (2024)
2.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Balitbangda Indikator :										
2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda			75 (BB)	77,50 (BB)	78,10 (BB)	75,25 (BB)		77,50 (BB)	78,10 (BB)	100,33% (2024)
2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda			83	84	85	86		90	90	103,61% (2024)

Sumber Data : Realisasi Indikator Kinerja Utama Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2024

Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nriai Pancasila. Pasal 68, Badan Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan

pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023, disebutkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invenisi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian menjadi latarbelakang atau pedoman Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur dalam mengukur keberhasilan kinerja organisasi melalui pemanfaatan dan penerapan hasil **“Riset” dan “Inovasi”** yang menjadi Indikator Kinerja Utama Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

1. Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat, dengan indikator kinerja :
 - a) Jumlah hasil Riset yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah, target tercapai 100% (target 2 riset terpenuhi 100%).
 - b) Jumlah hasil Inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah, target tercapai 100% (target 2 inivasi terpenuhi 100%).

Hasil riset dan inovasi yang diterapkan tersebut meliputi :

- a) Riset Identifikasi Potensi Unggulan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, dengan Hasil Rekomendasi riset yaitu : Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dengan membangun creative hub di Gedung ex temindung pada tahun 2024 untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, fesyen, dan kriya.

b) Riset Sumber Daya Manusia Perindustrian Kalimantan Timur Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 Tahun 2023, dengan hasil rekomendasi hasil riset yaitu : Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan melaksanakan kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri pada tahun 2024 untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, fesyen, dan kriya.

c) Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 diinisiasi oleh Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual pada perencanaan dan penganggaran tahun 2024, sebagai data dukung dokumen Renja dan DPA Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

d) Kegiatan Kreasi Inovasi (KRESNOVA) Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2024.

Kegiatan Kreasi Inovasi yang dilaksanakan oleh Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 diinisiasi oleh Bappedalitbang Kota Balikpapan menjadi kegiatan KRESNOVA pada perencanaan dan penganggaran tahun 2024, sebagai data dukung dokumen Renja dan DPA Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2024. Meskipun teridentifikasi dalam kategori "Sangat Tinggi" masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, evaluasi, dan perbaikan kinerja kedepan mengingat tantangan untuk peningkatan kualitas riset dan inovasi yang efektif guna mendukung prioritas nasional dan provinsi

2. Sasaran Strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Balitbangda", merupakan amanat dari Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0007.2.2/5373/Bapp- II, tanggal 3 April 2023 perihal penambahan tujuan dan sasaran Renstra PD 2024-2026. Dimana pada lampiran surat tersebut disebutkan bahwa Perangkat Daerah yang core business tidak memberikan pelayanan publik secara langsung agar mempedomani cascading kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Balitbangda”diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- a) Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda, dari target nilai SAKIP 75 (BB) tercapai 75,25 (BB) dengan tingkat capaian 100,33%.

Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024 terlaksana dengan perolehan nilai 75,25 (BB), nilai tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Tahun 2023 dengan nilai 70 (B).

- b) Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda, dari target nilai SKM yang ditetapkan senilai 83 telah mencapai target 86 sehingga tingkat capaian kinerja $\geq 100\%$ (103,61%).

Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda Tahun 2024 berkinerja $\geq 100\%$ didukung oleh optimalisasi pelayanan publik baik dalam rangkaian kegiatan riset dan inovasi ataupun kesekretariatan Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim telah memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat. Meskipun capaian kinerja masuk kategori sangat tinggi, masih dibutuhkan strategi peningkatan pelayanan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim untuk melihat seberapa puas publik menilai pelayanan yang telah dilakukan.

Untuk periode tahun 2025 merupakan masa transisi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2025-2029, sehingga capaian kinerja akan mempedomani Renstra Balitbangda/BRIDA provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu Strategis Balitbangda Provinsi Kaltim

Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 43 tahun 2023, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur telah berubah nomenklaturnya menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan nomenklatur tersebut juga telah mengubah lingkup tugas dan fungsinya, semula hanya di lingkup penelitian dan pengembangan (Litbang), menjadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, dan Evaluasi Kebijakan (Litbangjirap-Inovek).

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)/ Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala sub bagian Umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)/ Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Membantu Gubernur Melaksanakan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penelitian, Pengembangan dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi Di Daerah Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan.
2. Melaksanakan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah Sebagai Landasan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Segala Bidang Kehidupan yang Berpedoman pada Nilai Pancasila. Sedangkan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)/Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur adalah :
1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Riset dan Inovasi Daerah Sesuai Dengan Rencana Strategis yang Ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Perumusan dan Penetapan Bahan/Materi dan Penyusunan Kebijakan Strategis dan Teknis Penelitian.
3. Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan Sesuai Bidang Tugasnya.
4. Perumusan Program dan Kegiatan Di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan Sesuai Bidang Tugasnya.
5. Pelaksanaan Kebijakan, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Inovasi Serta Evaluasi Kebijakan Di Daerah yang Memperkuat Fungsi dan Kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah Sebagai Landasan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Segala Bidang Kehidupan yang Berpedoman Pada Nilai Pancasila.
6. Penyusunan Kelembagaan, Perencanaan, dan Sumber Program, Daya Anggaran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi Di Daerah yang Berpedoman Pada Nilai Pancasila.

7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Riset dan Inovasi, Kerja Sama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi Di Daerah.
8. Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi Di Bidang Riset Dan Inovasi, Kerja Sama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi Di Daerah.
9. Pemantauan dan Evaluasi Penelitian, Pengembangan, Penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi Di Daerah.
10. Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah.
11. Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Dihasilkan oleh Lembaga/Pusat/Organisasi Penelitian Lainnya Di Daerah.
12. Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah.
13. Penyelenggaraan Pengkoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan Perbantuan Sesuai Bidang Tugasnya.
14. Melaksanakan Tugas Dukungan Teknis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Melaksanakan tugas Dekonsentrasi dan Perbantuan Sesuai Bidang Tugasnya.
15. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan Sesuai Bidang Tugasnya.
16. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan.
17. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
18. Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Gubernur yang Berkaitan Dengan Tugasnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2026, dapat dijelaskan pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100	24,364,569,500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Balitbangda	78,10	24,364,569,500
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	76				Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	85	
5.05.01.1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	90 %	499,268,080	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	90 %	499,268,080
5.05.01.1.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	263,800,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	263,800,000
5.05.01.1.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	44,547,020	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	44,547,020
5.05.01.1.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,067,020	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,067,020

5.05.01.1.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,107,020	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,107,020
5.05.01.1.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,107,020	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,107,020
5.05.01.1.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	184,720,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	184,720,000
5.05.01.1.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,920,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,920,000
5.05.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0 %	17,069,009,907	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0 %	17,069,009,907
5.05.01.1.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	16,677,967,099	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	16,677,967,099
5.05.01.1.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	322,680,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	322,680,000
5.05.01.1.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	16,800,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	16,800,000

5.05.01.1.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	16,800,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	16,800,000
5.05.01.1.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	720,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	720,000
5.05.01.1.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	34,042,808	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	34,042,808
5.05.01.1.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	10 %	44,165,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	10 %	44,165,000
5.05.01.1.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480,000
5.05.01.1.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480,000
5.05.01.1.0 3.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000
5.05.01.1.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	42,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	42,000,000
5.05.01.1.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1,200,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1,200,000

5.05.01.1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	70 %	217,440,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	70 %	217,440,000
5.05.01.1.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	72,720,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	72,720,000
5.05.01.1.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6,720,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6,720,000
5.05.01.1.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	90,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	90,000,000
5.05.01.1.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	48,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	48,000,000
5.05.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan umum berbasis elektronik	95 %	2,561,784,413	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan umum berbasis elektronik	95 %	2,561,784,413
5.05.01.1.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41,528,741	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41,528,741
5.05.01.1.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	92,037,796	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	92,037,796
5.05.01.1.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,122,822	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,122,822
5.05.01.1.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	68,089,456	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	68,089,456

5.05.01.1.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	59,941,598	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	59,941,598
5.05.01.1.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	48,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	48,000,000
5.05.01.1.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2,175,264,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2,175,264,000
5.05.01.1.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	49,800,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	49,800,000
5.05.01.1.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	17,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	17,000,000
5.05.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	100 %	753,563,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	100 %	753,563,000
X.XX.01.1.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	100,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	100,000
5.05.01.1.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	718,732,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	718,732,000
5.05.01.1.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	34,431,000	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	34,431,000

5.05.01.1.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	100,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	100,000
5.05.01.1.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000
5.05.01.1.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000
5.05.01.1.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000
5.05.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	2,602,511,100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	2,602,511,100
5.05.01.1.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000
5.05.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	543,777,100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	543,777,100
5.05.01.1.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	368,670,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	368,670,000
5.05.01.1.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	1,685,064,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	1,685,064,000
5.05.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	80 %	616,828,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	80 %	616,828,000

5.05.01.1.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	81,120,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	81,120,000
5.05.01.1.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	147,260,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	147,260,000
5.05.01.1.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	51,084,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	51,084,000
5.05.01.1.0 9.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	44,400,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	44,400,000
5.05.01.1.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	227,964,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	227,964,000
X.XX.01.1.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	9,750,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	9,750,000
5.05.01.1.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	65,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	65,000,000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil riset dan inovasi yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/ internasional/buku/naskah akademis rancangan perda/pergub	75,76%	11,144,330,500	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil riset dan inovasi yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/ internasional/buku/naskah akademis rancangan perda/pergub	75,76%	11,144,330,500

			Persentase hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dalam daftar Kekayaan Intelektual (KI)	75,76%				Persentase hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dalam daftar Kekayaan Intelektual (KI)	75,76%	
			Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategs/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah	75,76%				Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategs/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah	75,76%	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	5 %	2,249,830,500	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	5 %	2,249,830,500
5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	314,300,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	314,300,000
5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	762,642,500	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	762,642,500
5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	100,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	100,000

5.05.02.1.0 1.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	264,300,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	264,300,000
5.05.02.1.0 1.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	264,300,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	264,300,000
5.05.02.1.0 1.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Laporan	100,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Laporan	100,000
5.05.02.1.0 1.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 Laporan	100,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 Laporan	100,000
5.05.02.1.0 1.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Laporan	100,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Laporan	100,000
5.05.02.1.0 1.0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1 Laporan	100,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1 Laporan	100,000

5.05.02.1.0 1.0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1 Laporan	100,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1 Laporan	100,000
5.05.02.1.0 1.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	264,300,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	264,300,000
5.05.02.1.0 1.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	114,888,000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	114,888,000
5.05.02.1.0 1.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	264,300,000	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	264,300,000
5.05.02.1.0 1.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	100,000	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	100,000
5.05.02.1.0 1.0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	100,000	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	100,000
5.05.02.1.0 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	5 %	1,574,300,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	5 %	1,574,300,000

5.05.02.1.0 2.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	216,300,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	216,300,000
5.05.02.1.0 2.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	264,300,000	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	264,300,000
5.05.02.1.0 2.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	264,300,000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	264,300,000
5.05.02.1.0 2.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	100,000	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	100,000
5.05.02.1.0 2.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	100,000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	100,000
5.05.02.1.0 2.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	264,300,000	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	264,300,000
5.05.02.1.0 2.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	100,000	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	100,000
5.05.02.1.0 2.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	100,000	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	100,000

5.05.02.1.0 2.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	264,300,000	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	264,300,000
5.05.02.1.0 2.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	300,300,000	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	300,300,000
5.05.02.1.0 2.0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	1 Dokumen	100,000	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	1 Dokumen	100,000
5.05.02.1.0 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	5 %	3,021,400,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	5 %	3,021,400,000
5.05.02.1.0 3.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	250,000,000
5.05.02.1.0 3.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	250,000,000
5.05.02.1.0 3.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	45,000,000	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	45,000,000
5.05.02.1.0 3.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	325,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	325,000,000

5.05.02.1.0 3.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	271,400,000	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	271,400,000
5.05.02.1.0 3.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	325,000,000	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	325,000,000
5.05.02.1.0 3.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	250,000,000
5.05.02.1.0 3.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	250,000,000
5.05.02.1.0 3.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	250,000,000
5.05.02.1.0 3.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	260,000,000	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	260,000,000
5.05.02.1.0 3.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	250,000,000
5.05.02.1.0 3.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	250,000,000

5.05.02.1.0 3.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	45,000,000	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	45,000,000
5.05.02.1.0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	12 %	4,298,800,000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	12 %	4,298,800,000
5.05.02.1.0 4.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	1,200,000,000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	1,200,000,000
5.05.02.1.0 4.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	1,048,800,000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	1,048,800,000
5.05.02.1.0 4.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	1,450,000,000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	1,450,000,000
5.05.02.1.0 4.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	400,000,000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	400,000,000
5.05.02.1.0 4.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	200,000,000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	200,000,000
35,518,750,000						35,518,750,000				

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim memiliki 3 (tiga) nomenklatur urusan program yakni Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program Riset dan Inovasi Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Namun dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2026 Program Riset dan Inovasi Daerah belum dapat diakomodir karena terbatasnya anggaran.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Innovation and Research Information System (IRIS) merupakan pusat layanan riset dan inovasi terpadu yang dikembangkan dan dikelola oleh BRIDA KALTIM. IRIS BRIDA KALTIM bertujuan untuk mendukung terciptanya ekosistem riset dan inovasi, baik dilingkup Daerah Kalimantan Timur, Nasional maupun Global. Beberapa fitur yang dimiliki IRIS adalah penjangkauan inovasi dan riset untuk mengumpulkan hasil-hasil inovasi & riset, usulan kebutuhan riset untuk membantu instansi atau kelompok yang membutuhkan riset, pengajuan pelayanan KI (Kekayaan Intelektual) untuk membantu pendaftaran kekayaan intelektual bagi instansi atau pribadi.

Usulan-usulan riset dan inovasi tersebut kemudian menjadi bahan atau tema-tema riset dan inovasi dalam program dan kegiatan riset dan inovasi yang kemudian akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.5
Usulan Riset-Riset dari Para Pemangku Kepentingan
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
	2022			
1	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda	Lembaga	Stunting adalah kasus yang saat ini menjadi perhatian dunia khususnya di Indonesia. Kekurangan asupan gizi jangka panjang ditambah kasus penyakit yang sering terjadi pada masyarakat menyebabkan kasus stunting menjadi meningkat . Presentasi kasus stunting di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 28,09 persen dan tahun 2021 sebesar 22,8 persen. Sementara di Kaltim terdapat 4 Kabupaten dan Kota yang memiliki angka stunting paling rendah presentase rerata Provinsi yakni Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Mahakam Ulu dan Samarinda. Sedangkan untuk 6 Kabupaten/kota lainnya Kutai Timur, PPU, Kukar, Bontang, Berau dan Paser, yang memiliki persentase stuntingnya masih berada di atas rerata Provinsi [3]. Hal ini terkait dengan dampak jangka panjang yang signifikan di masa dewasa, berupa penurunan perkembangan kognitif dan fisik serta risiko penyakit metabolik yang lebih tinggi. Berdasarkan data survei kesehatan nasional yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan Indonesia, kasus stunting terjadi sekitar 37% dari jumlah penduduk Indonesia lebih tinggi dari Malaysia dengan jumlah kasus 20,7%. Kondisi ini memerlukan pemecahan masalah agar kasus stunting tidak menjadi berkembang dan semakin meningkat.	Samarinda, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
2	Dr. Enos Paselle., M.A.P	Perorangan	"Respon dan adaptasi masyarakat terhadap tekanan dan peluang yang ditimbulkan oleh pertambangan batubara dan perkebunan sawit korporasi di Kalimantan Timur" Dalam tekanan manusia selalu mencari jalan keluar (respon, adaptasi), termasuk dalam menghadapi tekanan (dan peluang) yang ditimbulkan oleh korporasi tambang batubara dan perkebunan sawit. Jalan keluar atau respon ekonomi dan sosio-kultural apa yang diambil oleh warga? Identifikasi model-model respon/adaptasi yang ditemukan oleh riset dapat menjadi landasan penyusunan program berbasis budaya dan sumberdaya lokal, yang menunjang ekonomi hijau dan berkelanjutan.	Wilayah pertambangan batubara dan perkebunan sawit korporasi di Kalimantan Timur
3	Prof. Dr. H. Abd. Rachim AF., S.E., M.Si. dan Tim Peneliti	Perorangan	"Analisa Potensi Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan Timur" Kalimantan Timur sebagai Provinsi yang menjadi hinterland wilayah Badan Otorita IKN Nusantara memerlukan analisa potensi program ketahanan pangan pada seluruh wilayah Kabupaten / Kota yang memerlukan distribusi pasokan pangan secara berkelanjutan. Upaya optimalisasi perwujudan ketahanan pangan tetap harus memperhatikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai upaya implementasi pelestarian kebudayaan nasional dengan jaminan kualitas yang terjaga sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), serta terjamin secara kuantitas terutama keamanan ketersediaan pangan pada musim-musim tertentu, baik karena momen penting seperti keterpenuhan saat hari-hari besar nasional, dan saat terjadi kondisi iklim yang tidak stabil. Potensi ketahanan pangan sangat di pengaruhi berbagai faktor produksi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, modal, dan kelembagaan, maka di perlukan analisa potensi Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal	Wilayah Kalimantan Timur

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
	2023			
1	Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman	Lembaga	Riset kali ini merupakan bagian dari bidang prioritas berdasarkan Rencana Induk Riset Nasional yakni Fokus Riset Kesehatan dan Obat dengan tema Kemandirian Bahan baku obat dengan dengan topik pengembangan fitofarmaka berbasis sumber daya lokal. Kebaharuan dan terobosan teknologi yang akan dicapai dalam kegiatan riset kali ini adalah diperolehnya data informasi Tumbuhan Endemik Kalimantan timur, Koleksi/Database Simplisia, ekstrak, fraksi dan Isolat /Simplicia, Extract, Isolat From Natural Products Borneo (SEINAPRO), Data aktifitas sebagai Bahan Baku Farmasi Baik sebagai Active Pharmaceutical Ingredients (APIs), Exipient, Kosmetik, dan Nutrasetikal, data toksisitas, dan Profil Struktur Kimia hasil isolasi.	Laboratorium Farmaka Tropis fakultas Farmasi Universitas Mulawarman
2	Kelompok Riset Waste to Energy- PRKKE- BRIN	Lembaga	Penanganan sampah adalah hal yang belum selesai di Indonesia dikarenakan penanganan sampah yang masih rendah berkisar 50% dan yang sudah dilakukan pengelolaan kurang dari itu. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang meningkat hampir 3 kali lipat dari tahun 1950 an tidak sebandig dengan peningkatan volume sampah yang mencapai hingga 200 kali lipat. Hal ini menunjukkan pengelolaaan sampah adalah hal mutlak yang segera dilakukan. Dengan pengelolaan menggunakan manajemen yang tepat permasalahan sampah yakin bisa diatasi dalam jangka beberapa tahun kedepan khususnya di provinsi Kalimantan Timur.	KST-BJ Habibie, Gedung 480, Serpong-Banten (https://maps.app.goo.gl/MicKgnqjjomGDJKx7)
3	Sugeng	Perorangan	Organisasi Perangkat Daerah tidak bisa menentukan persentase realisasi fisik dari suatu kegiatan, sehingga kolom persentase realisasi fisik pada pelaporan diisi dengan angka persen yang tidak ada dasar pengisian. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rumus untuk	Samarinda

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
4	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur	Lembaga	mendapatkan persen harus ada Angka Pembilang dibagi Angka Penyebut dikali seratus. Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur sangat berpengaruh di segala aspek. Posisi Kalimantan di kawasan timur tengah Indonesia diharapkan menjadi Pusat Gravitasi bagi pembangunan dan perekonomian yang sustainable dengan harapan pemanfaatan potensi dapat dilakukan secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, Kalimantan khususnya Kalimantan Timur harus siap dalam segala hal menerima keberadaan IKN. Kondisi ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Timur karena banyaknya pendatang dan pesaing. Hal ini menjadi tugas dan tuntutan bagi peneliti dan masyarakat setempat untuk tetap berkarya dan berkreaitivitas agar tidak tersingkir. Beberapa isu/ permasalahan yang diketahui: 1. Penanggulangan banjir masih perlu ditingkatkan 2. Penanggulangan macet lalu lintas 3. Pemanfaatan IT yang kurang 4. Perlunya peningkatan fasilitas pengembangan karya masyarakat 5. Pemanfaatan sumber daya manusia yang kurang maksimal 6. Peluang kerja sama dalam penelitian dengan Peneliti dari Universitas Kaltim yang masih kurang 7. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan pasca tambang yang kurang maksimal 8. Pengetahuan yang minim dalam mengolah sampah dan limbah khususnya limbah rumah tangga 9. Persiapan masyarakat yang masih minim dalam menghadapi IKN Usulan kolaborasi riset ini diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional khususnya di Kalimantan Timur dalam menghadapi isu-isu atau permasalahan yang ada khususnya dalam menghadapi IKN.	Lokasi yang dipilih dalam Riset ini mencakup daerah Kota Samarinda, daerah IKN (sepaku dan sekitarnya) dan beberapa daerah di Kalimantan Timur lainnya seperti Berau, Tenggarong, Kutai Lama, dan lainnya)

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
5	Bapelitbang Berau	Lembaga	Melihat besarnya potensi sumberdaya alam berupa lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh Kabupaten Berau khususnya Desa Melati Jaya Kecamatan Gunung Tabur, sehingga sangat penting dilaksanakan kegiatan inventarisasi data Pertanian, Perkebunan dan Pangan Kabupaten Berau untuk mendukung pelaksanaan penelitian di bidang tersebut	Kampung Melati Jaya Kec. Gunung Tabur
6	Bappedalitbang Kota samarinda	Lembaga	1. Potensi Sumber Daya Alam Kota Samarinda 2. Mitigasi Dampak Geologis kota Samarinda (peta rawan bencana) kota Samarinda.	Kota Samarinda.
7	Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN dan BRIDA Kaltim	Lembaga	Trend penjualan bioproduk herbal meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan pemasaran secara online dengan jangkauan yang hingga mencapai antar pulau. Proses pengiriman produk tersebut yang paling lama dilalui saat melalui jalan darat dengan mobil, khususnya mobil kargo/box, dengan suhu atap mobil box dapat mencapai 1000C dan 900C pada bagian container mobil kargo/box. Suhu panas ini diprediksi dapat mempengaruhi kualitas bioproduk herbal yang bersifat termolabil. Sebagai contoh herbal termolabil diantaranya adalah oleoresin, jenis akar dan jamur, teh herbal, sediaan cair seperti sirup, kelompok minyak dan lemak, seperti misalnya lemak tengkawang. Seringkali secara fisik tidak banyak terjadi perubahan, akan tetapi suhu panas dan waktu pengiriman bioherbal dalam kemasan diprediksi akan mempengaruhi kualitas kimia, atau bahkan efikasi dari produk bioherbal dimaksud.	Samarinda, Balikpapan

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
8	Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk, BRIN dan BRIDA Kaltim	Lembaga	Perkembangan transportasi darat yang pesat menyebabkan meningkatnya jumlah mobil, sebagai salah satu alat transportasi darat yang vital. Hal ini membuat tuntutan akan kinerja mobil saat dioperasikan menjadi sangatlah penting. Kinerja mobil dimaksud, salah satunya dipengaruhi oleh sistem radiator sebagai pendingin mobil. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam sistem radiator mobil, diantaranya : cairan pendingin radiator harus mudah mengalir dalam sistem pendingin, memiliki titik didih tinggi, lambat panas dan menghambat proses korosi. Lebih lanjut, Oleoresin keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>) merupakan salah satu jenis pohon yang menyusun ekosistem hutan Dipterokarpa dan tersedia dalam jumlah besar sebagai kekayaan alam bumi Kalimantan. Peneliti terbaru menyatakan bahwa Oleoresin keruing merupakan salah satu inhibitor korosi pada logam. Pemanfaatannya dalam skala luas masih perlu dikembangkan dalam rangka mencari alternatif bahan alam yang lebih ramah lingkungan.	Samarinda
9	Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN dan BRIDA Kaltim	Lembaga	Perkembangan transportasi darat yang pesat menyebabkan meningkatnya jumlah mobil, sebagai salah satu alat transportasi darat yang vital. Hal ini membuat tuntutan akan kinerja mobil saat dioperasikan menjadi sangatlah penting. Kinerja mobil dimaksud, salah satunya dipengaruhi oleh sistem radiator sebagai pendingin mobil. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam sistem radiator mobil, diantaranya : cairan pendingin radiator harus mudah mengalir dalam sistem pendingin, memiliki titik didih tinggi, lambat panas dan menghambat proses korosi. Lebih lanjut, Oleoresin keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>) merupakan salah satu jenis pohon yang menyusun ekosistem hutan Dipterokarpa dan tersedia dalam jumlah	Samarinda

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
			besar sebagai kekayaan alam bumi Kalimantan. Peneliti terbaru menyatakan bahwa Oleoresin keruing merupakan salah satu inhibitor korosi pada logam. Pemanfaatannya dalam skala luas masih perlu dikembangkan dalam rangka mencari alternatif bahan alam yang lebih ramah lingkungan.	
10	Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Lembaga	Pada Wilayah UPTD KPHL Balikpapan Unit XXX Sungai Wain - Manggar terdapat izin pemanfaatan hutan berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No. SK.129/Menhut-II/2011, ditetapkan areal kerja HKm seluas 1.400 ha. Setelah penyesuaian batas berdasarkan SK.718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 maka luasnya menjadi 1.417 ha. Areal ini digunakan sebagai dasar pemberian IUPHKm oleh Walikota Balikpapan kepada kelompok masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan HL Sungai Wain Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, dengan ketentuan maksimal 15 ha per Kepala Keluarga (KK). Pemberian IUPHKm diterbitkan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.	KPHL Balikpapan
11	Eddy Mangopo Angi	Lembaga	Bahwa pada dasarnya kawasan HLSM merupakan areal transmigrasi tahun 1970–1980 yang telah berkembang sebelum ditetapkan HLSM tahun 1996, dimana merupakan wilayah pemukiman sub-urban yang telah berkembang menjadi sentra pertanian bagi kota Balikpapan. Disisi lain sebagian warga telah menetap dan memiliki sertipikat penguasaan/pemilikan tanah serta investasi lainnya. Hal yang terpenting adalah wilayah HLSM ini menjadi sumber air utama Kota Balikpapan. Adanya beda kepentingan di HLSM ini menimbulkan konflik secara tidak langsung terkait kepentingan akibat distribusi	Lokasi kegiatan di wilayah HLSM dan DAS Manggar secara umum dalam wilayah kerja UPTD KPHL Balikpapan Unit XXX Sungai Wain–Manggar Provinsi Kaltim

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
			hak/kewenangan yang berbeda. Masyarakat setempat dalam hal ini warga sekitar HLSM telah menguasai tanah/lahan garapan, Sementara Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini PDAM Balikpapan berkepentingan dalam pengelolaan kawasan Waduk Manggar dan pihak Kementerian Kehutanan dan jajarannya di bawahnya melakukan pemanfaatan tegakan dan fungsi HL. Permasalahan di wilayah HLSM ditambah lagi dengan pembukaan jalan bebas hambatan (Tol) yang membelah kawasan HLSM dari Kota Balikpapan menuju Samarinda dan ditetapkannya wilayah Penajam Paser Utara (PPU) – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) oleh pemerintah pusat yang sebagian wilayahnya menjadi Ibukota Nusantara (IKN) bahkan sebagian wilayah DAS HLSM masuk dalam wilayah IKN.	
12	Eddy Mangopo Angi	Perorangan	Paska dikeluarkannya izin dengan jumlah 123 izin tersebut di atas, banyak masalah yang muncul terkait dengan keberlanjutan program untuk jangka 35 tahun ke depan. Dari ke-5 skema izin yang dikeluarkan masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri, mulai dari masalah tingkat kemajuan kelembagaan, penyusunan Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), pendampingan/penyuluh, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), pengembangan potensi lokal, akses ke lokasi Hutsos, kegiatan pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), ketersediaan dana sampai dengan keterlibatan pihak lain paska izin dikeluarkan. Hal-hal ini yang menjadi catatan tersendiri bagi kajian ini dalam mengevaluasi perkembangan kemajuan pelaksanaan Hutsos di Kaltim.	Di 6 kabupaten/kota yaitu: 1). Kabupaten Berau; 2). Kabupaten Kutai Barat; 3). Kabupaten Kutai Kartanegara; 4). Kabupaten Kutai Timur; 5). Kabupaten Paser; 6). Kota Balikpapan

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
13	DR. IR. HABIR. MT	Perorangan	Manajemen Banjir Pada DAS Sungai Karanga Asam Besar Kota Samarinda	DAS Sungai Karang Asam Besar Kota Samarinda
14	ardiyanto wahyu nugroho	Perorangan	Pengembangan destinasi ekowisata di kawasan IKN dapat dilakukan dengan cara mempromosikan makanan lokal sebagai daya tarik utama atau pelengkap. Hal tersebut dapat meningkatkan kunjungan maupun potensi pengunjung untuk datang kembali. Mayoritas pelaku wisata menganggap daya tarik wisata terkait makanan lokal (gastronomy) merupakan elemen penting yang menentukan identitas suatu destinasi wisata. Kawasan sekitar IKN banyak dihuni oleh suku Dayak Kalimantan yang memanfaatkan tumbuhan hutan secara tradisional. Suku Dayak itu sendiri sangat beragam karena suku tersebut terdiri dari sejumlah sub-suku yang tersebar berbagai daerah di Pulau Kalimantan. Setiap sub-suku dayak mempunyai informasi mengenai kuliner lokal yang dapat dipromosikan dalam ekowisata. Melalui studi etnobotani, penggunaan tumbuhan hutan untuk berbagai keperluan dapat diungkap.	Kabupaten Kukar dan PPU
2024				
1	Julian Witjakono	Lembaga	Pertumbuhan populasi penduduk di IKN, Konversi lahan, kebutuhan dan ketersediaan lahan untuk intensifikasi peningkatan produksi padi, konversi lahan sawah ke non sawah, faktor eksternal dalam kelas kesesuaian lahan.	Provinsi Kalimantan Timur
2	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Lembaga	Pertumbuhan populasi penduduk di Ibu Kota Negara akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya Pusat pemerintahan dan pusat bisnis di IKN, oleh sebab itu untuk memenuhi konsumsi beras di IKN maka perlu dilakukan riset untuk memproyeksikan ketersediaan dan kebutuhan beras berdasarkan beberapa parameter yang mempengaruhi produktivitas padi di Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten penghasil beras di Provinsi Kalimantan Timur

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
3	Kelompok Usaha Penangkaran Anggrek Spesies (KUPAS) Kaltim "Zwageri Orchid Garden"	Lembaga	Ancaman kepunahan jenis-jenis anggrek spesies Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah pusat persebaran anggrek dunia	Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang
4	Dr. Nuril Farizah, S.Pi, M.Si	Lembaga	Kepiting Bakau merupakan komoditas penting perikanan di Indonesia sejak tahun 1980-an. Kepiting menjadi primadona di provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini. Pada tahun 2021, produksi kepiting bakau Kalimantan Timur sebesar 1800 ton, sedangkan untuk ekspor kepiting baru mencapai diangka 895 ton pada tahun 2022 (Januari – Agustus), yang sebagian besar permintaan pasar dipenuhi dari hasil tangkapan Kecamatan Anggana serta sekitar perairan Delta Mahakam. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan over-fishing adalah melakukan inventarisasi keragaman genetik pada kepiting bakau. Kegiatan inventarisasi keragaman genetik ini sangat diperlukan dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya kepiting bakau di wilayah perairan Indonesia serta keberlanjutan populasi spesies ini. Kepiting bakau memiliki siklus hidup yang kompleks dimulai dengan fase larva, benthik/zooplankton, crablet dan dewasa yang sangat tergantung dengan kondisi lingkungannya untuk bertahan hidup, proses ini sudah terjadi sejak lama (masa evolusi), yaitu sejak periode miosen, pleistosen dan holosen yang berlangsung dari puluhan jutaan sampai ribuan tahun yang. Secara fisiologis kepiting bakau mampu beradaptasi terhadap perubahan suhu dan salinitas yang biasanya terjadi di ekosistem mangrove.	Lokasi di daerah estuari perairan Mahakam, Kalimantan Timur (Anggana, Muara Tambora, Muara Pantuan, Tani Baru, Tanjung Pemenang)

Sumber Data : Aplikasi Inovation Innovation and Research Information System (IRIS).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 Tentang RPJM Nasional Tahun 2025-2029, terdapat 3 (tiga) strategis utama pembangunan atau Trisula Pembangunan Daerah yang dirumuskan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas serta kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang daerah.

Penahapan pembangunan merupakan salah satu bagian dari strategi yang menggambarkan arah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025- 2029. Adapun penahapan pembangunan RPJMD secara indikatif direpresentasikan melalui tema pembangunan tahunan. Penahapan pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 terbagi menjadi 5 (lima) tahap pembangunan, yang tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 1 (Tahun 2026) penahapan pembangunan daerah tahap 1 adalah “Pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, serta ekonomi produktif dan inklusif sebagai fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”.

Untuk mendukung terlaksananya Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim turut berperan serta dengan melaksanakan riset/kajian serta inovasi sesuai dengan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu membantu Gubernur melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemaparan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang

kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Adapun telaahan kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Telaahan kebijakan dari RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD 2025- 2045, RPJMD 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026

ASTA CITA	RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJMD 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN RUDI-SENO	RKPD PROVINSI KALTIM 2026
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);					
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Prioritas Nasional 2 (Tranformasi Ekonomi, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan indonesia dan ketahanan sosial budaya dan ekologi)	P1 : Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan air			
	Prioritas Nasional 3 (Transformasi ekonomi)	P2 : Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara			
	Prioritas Nasional 1 (supremaasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan indonesia)	P9 : Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif			
	Prioritas Nasional 6 (Transformasi ekonomi)	P12 : Menjamin Ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani			
	Prioritas Nasional 3 (Transformasi ekonomi)	P17 : Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif			
Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;	Prioritas Nasional 2 (Transformasi ekonomi)	P14 : Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.	Pemenuhan infrastruktur dasar permukiman berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan dan inklusifitas sosial		

ASTA CITA	RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJMD 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN RUDI-SENO	RKPD PROVINSI KALTIM 2026
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas Nasional 4 (Transformasi ekonomi)	P7 : Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia ; Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan (BPJS)	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
				Gratis Makanan Bergizi	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
	Prioritas Nasional 4 (Transformasi ekonomi)	P8 : Penguatan Pendidikan, Sains dan Teknologi serta Digitalisasi		Gratis Bersekolah SMA/SMK hingga S-3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
				Gratis Seragam Sekolah	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
	Prioritas Nasional 4 (Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi)	P10 : Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas			
	Prioritas Nasional 8 (Ketahanan Sosial Buda dan Ekologi)	P17 : Peningkatan Prestasi Olahraga			
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Prioritas Nasional 2 (Transformasi Ekonomi)	P15 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumberdaya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Peningkatan hilirisasi dan pemantapan kawasan-kawasan industri berbasis komoditas unggulan daerah		
			Penguatan perekonomian sektor komoditas unggulan dan penyiapan kompetensi tenaga kerja		
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Nasional 4 (Transformasi Sosial)	P5 : Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan pemenuhan perlindungan sosial bagi masyarakat	Gratis WIFI Internet di Seluruh Desa	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi;

ASTA CITA	RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJMD 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN RUDI-SENO	RKPD PROVINSI KALTIM 2026
	Prioritas Nasional 4)Transformasi ekonomi)	P13 : Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan		Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan;
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas Nasional 7 (supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia)	P3 : Reformasi Politik, Hukum dan Brokrasi	Pemantapan sistem merit ASN, Kelem- bagaan efektif dan kolaboratif, digi- talisasi pelayanan publik, penegakan regulasi, dan pengu- atan pemberdayaan masyarakat		
			Peningkatan kapasi- tas antar pemangku dan pihak pelaksa- na pembangunan berdasarkan prin- sip-prinsip pemba- ngunan berkelanjut- an dan inklusi tas sosial		
			Penguatan keaman- an daerah dan pe- ningkatan partisipasi politik masyarakat		
			Penguatan kerja sama daerah dan memperkuat infra- struktur ekonomi lokal secara inklusif		
	Prioritas Nasional 7 (transformasi Tata kelola)	P4 : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
	Prioritas Nasional 8 (Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi)	P6 : Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba			

ASTA CITA	RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJMD 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN RUDI-SENO	RKPD PROVINSI KALTIM 2026
Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas Nasional 2 (Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi)	P11 : Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Optimalisasi penge- lolaan potensi SDA dalam meningkat- kan kualitas ling- kungan hidup		
			Peningkatan ketang- guhan dan tanggap bencana alam		
			Penguatan Sarana dan prasarana pendukung praktik kearifan tradisional dan Sosial Budaya		
	Prioritas Nasional 8 (Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi)	P16 : Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah		Gratis Haji dan Umrah untuk Marbot	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama serta penguatan budaya dan kearifan lokal

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim Tahun 2026

Berdasarkan Renstra Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2029, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi yaitu :

- Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi.
- Peningkatan Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
- Peningkatan kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi.

Berdasarkan isu strategis tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur adalah **“Optimalisasi Pemanfatan Hasil Riset dan Inovasi”**. Terwujudnya tujuan tersebut diukur

dengan terpenuhinya target pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai bahan/referensi perumusan kebijakan pembangunan, pengembangan dunia usaha, industrialisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis IPTEK dan Indeks Inovasi Daerah. Tujuan tersebut akan tercapai jika didukung oleh sasaran spesifik, terukur, jelas kriterianya dan memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien. Adapun sasaran strategis Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TUJUAN : Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai bahan/referensi perumusan kebijakan pembangunan, pengembangan dunia usaha, industrialisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis IPTEK	%	69.70	72.73	75.76	81.82	87.88
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	62.87	64.00	65.13	66.26	67.39
SASARAN 1 yang mendukung tujuan : Meningkatkan Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan permasalahan daerah secara berkelanjutan	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	%	60.61	66.67	72.73	78.79	84.85
	Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	%	51.85	55.56	59.26	62.96	66.67
SASARAN 2 yang mendukung tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan riset dan inovasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	Indeks	86.89	87.11	87.78	88.41	89.23
	Nilai SAKIP Balitbangda	Nilai/Predikat	75,87/BB	76,65/BB	77,13/BB	77,89/BB	78,32/BB

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Program dan kegiatan tahun 2026 disusun dengan memperhatikan :

- 1) Penyelarasan tematik riset dan inovasi dengan sasaran prioritas pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026.
- 2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja RKPD Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024-2026.
- 3) Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat daerah Tahun 2026.
- 4) Isu-isu strategis yang berkembang.
- 5) Strategi dan Arah kebijakan riset dan inovasi.
- 6) Regulasi yang berlaku.

Penyelarasan tematik riset dan inovasi telah diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yang kemudian disinergikan dengan isu-isu strategis riset dan inovasi yang sedang berkembang seperti pemberdayaan potensi ekonomi, pengentasan kemiskinan, pencapaian SDGs dan pengembangan IPTEK. Hasil riset dan inovasi diharapkan dapat mendukung arah kebijakan riset dan inovasi, sesuai dengan peraturan atau kebijakan riset dan inovasi yang dipedomani. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 telah disesuaikan dengan efisiensi anggaran untuk mendukung Program GASPOL dan JOSPOL serta Hasil evaluasi capaian indikator kinerja RKPD Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024-2026 pada Bab 2.

Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat daerah Tahun 2026 telah dilaksanakan Balitbangda/BRIDA provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan output utama dalam sektor penelitian dan pengembangan dalam mendukung Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan hasil forum tersebut agar usulan kegiatan kabupaten/kota diperhatikan dan dipertimbangkan untuk menjalin sinkronisasi dan koordinasi riset dan inovasi.

Isu strategis ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan riset dan inovasi, baik internal maupun eksternal sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi
2. Peningkatan Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan
3. Peningkatan kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi.

Strategi riset dan inovasi adalah pendekatan terencana untuk mencapai tujuan dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara arah kebijakan adalah panduan atau pedoman umum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan strategi tersebut.

Strategi berfokus pada "bagaimana" mencapai tujuan, seperti membangun ekosistem riset yang kolaboratif dan kompetitif, sedangkan arah kebijakan menjelaskan "apa" yang ingin dicapai, seperti peningkatan daya saing nasional dan penciptaan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel 3.3 Strategis dan Arah kebijakan riset dan inovasi Tahun 2025-2029

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan efektifitas penerapan regulasi terkait pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan	Percepatan pengukuhan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)
	Penguatan Komitmen Stakeholders untuk memanfaatkan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan
	Peningkatan desiminasi dan pemahaman tentang manfaat hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan, secara intensif
Peningkatan upaya Hilirisasi Hasil Riset dan inovasi sebagai produk/layanan yang bermanfaat bagi masyarakat	Pengembangan skema kolaborasi pendanaan Hilirisasi Hasil Riset dan inovasi bersumber dari APBN, swasta dan Luar Negeri
	Pengembangan komersialisasi Hilirisasi Hasil Riset dan inovasi melalui kerjasama dengan dunia usaha
	Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi melalui penguatan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha
	Peningkatan Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas hilirisasi hasil Riset dan Inovasi
Peningkatan Kemampuan produksi Riset dan inovasi berkualitas untuk memenuhi kebutuhan peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah, secara berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas (kuantitas dan kualitas) Peneliti, Perekayasa dan inovator di daerah
	Peningkatan penyelenggaraan riset dan inovasi antar wilayah dan antar sektor yang sinergi dan terpadu
	Peningkatan pendanaan riset dan inovasi melalui kolaborasi pendanaan di luar APBD
Peningkatan efektifitas Tata kelola pelayanan administrasi penyelenggaraan riset dan inovasi	Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan
	Pembangunan pusat pengolahan data dan informasi (Big Data) sesuai kebutuhan riset dan inovasi berbasis teknologi informasi
	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan penunjang penyelenggaraan riset dan inovasi

Regulasi utama yang berlaku untuk riset dan inovasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang diikuti oleh berbagai peraturan turunan seperti Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur pedoman pembentukan dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Program-program tersebut turut didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sesuai tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2026

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		100 % 76	19.085.497.408			100 % 78	24.162.832.860
5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		85%	264,921,600			90%	401.583.312
5.05.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	160,600,000	Dana Bagi hasil (DBH)		10 Dokumen	324.100.000
5.05.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,400,400	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	4.799.828
5.05.01.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,400,400	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	4.799.828

5.05.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,400,400	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	3.941.828
5.05.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,400,400	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	3.941.828
5.05.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Laporan	92,800,000	Dana Bagi hasil (DBH)		21 Laporan	53.192.000
5.05.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	1,920,000	Dana Bagi hasil (DBH)		5 Laporan	6.808.000
5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya pergeseran anggaran belanja		3,80 %	15,037,605,556			0.07 %	16.558.804.994
5.05.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang/ Bulan	14,826,117,176	Dana Bagi hasil (DBH)		50 Orang/ Bulan	16.308.728.894
5.05.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	209,400,000	Dana Bagi hasil (DBH)		12 Dokumen	242.040.000
5.05.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	536,100	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	1.000.000
5.05.01.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	536,100	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	1.000.000
5.05.01.1.02.006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	536,100	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	536.100

5.05.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	480,080	Dana Bagi hasil (DBH)		30 Laporan	5.500.000
5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian keberadaan Barang Milik Daerah terhadap catatan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		85,08%	2,568,300			88 %	2.568.300
5.05.01.1.03.001	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	480,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	480.000
5.05.01.1.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	536,100	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	536.100
5.05.01.1.03.004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	536,100	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	536.100
5.05.01.1.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	536,100	Dana Bagi hasil (DBH)		12 Laporan	536.100
5.05.01.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	480,000	Dana Bagi hasil (DBH)		12 Laporan	480.000
5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan		60 %	7,200,000			60 %	256.560.000
5.05.01.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	0	Dana Bagi hasil (DBH)		2 Paket	107.380.000
5.05.01.1.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7,200,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	11.180.000

5.05.01.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	0	Dana Bagi hasil (DBH)		35 Orang	90.000.000
5.05.01.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	0	Dana Bagi hasil (DBH)		30 Orang	48.000.000
5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan umum berbasis elektronik		80 %	1,277,539,083			80 %	2.136.958.961
5.05.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Paket	16,348,018	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Paket	41.528.741
5.05.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Paket	18,060,745	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Paket	475.354.194
5.05.01.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Paket	56,100	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Paket	58.024.876
5.05.01.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Paket	42,402,700	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Paket	123.344.050
5.05.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Paket	17,871,520	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Paket	118.707.100
5.05.01.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	48,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	121.000.000
5.05.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Timur	12 Laporan	1,068,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		12 Laporan	1.150.000.000
5.05.01.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	49,800,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	32.000.000
5.05.01.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi Kalimantan Timur	2 Dokumen	17,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		2 Dokumen	17.000.000
5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi		0	0			5,59%	1.426.429.420
5.05.01.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 unit	600.000.000

5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 unit	156.431.520
5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		10 unit	50.000.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 unit	115.382.400
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 unit	354.615.500
X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		-	-
5.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Unit	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 unit	50.000.000
5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Unit	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 unit	50.000.000
5.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Unit	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 unit	50.000.000
5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Penunjang tugas BRIDA		85,98%	2,157,844,869			86,18%	2.601.489.876
5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Timur	12 Laporan	3,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		12 Laporan	15.000.000
5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	12 Laporan	555,504,869	Dana Bagi hasil (DBH)		12 Laporan	616.265.876
5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	12 Laporan	35,500,000	Dana Bagi hasil (DBH)		12 Laporan	250.000.000
5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	35 Laporan	1,563,840,000	Dana Bagi hasil (DBH)		35 Laporan	1.720.224.000
5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		11,26%	337,818,000			12,01 %	778.437.998,00

5.05.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Kalimantan Timur	6 Unit	81,120,000	Dana Bagi hasil (DBH)		6 Unit	152.087.998
5.05.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Kalimantan Timur	6 Unit	199,456,000	Dana Bagi hasil (DBH)		6 Unit	199.456.000
5.05.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Kalimantan Timur	90 Unit	46,090,000	Dana Bagi hasil (DBH)		90 Unit	49.302.000
5.05.01.1.09.008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Provinsi Kalimantan Timur	1 Unit	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Unit	44.400.000
5.05.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Kalimantan Timur	2 Unit	242,000	Dana Bagi hasil (DBH)		2 Unit	233.772.000
X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Kalimantan Timur	3 Unit	10.780.000	0.00		0	10.780.000
5.05.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Kalimantan Timur	2 Unit	130,000	Dana Bagi hasil (DBH)		2 Unit	88.640.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran		18 %	5,078,554,592	Dana Bagi hasil (DBH)		18 %	9.652.875.405
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dari hasil fasilitasi dan riset bidang pemerintahan dan peraturan/regulasi		64,29%	603,560,000	Dana Bagi hasil (DBH)		68,57%	2.077.315.966
5.05.02.1.01.001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	317.966.442

5.05.02.1.01.002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	2 Laporan	252,920,000	Dana Bagi hasil (DBH)		2 Laporan	471.500.442
5.05.02.1.01.003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0
5.05.02.1.01.004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	297.043.462
5.05.02.1.01.005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	100,120,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	288.110.442
5.05.02.1.01.006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0
5.05.02.1.01.007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0
5.05.02.1.01.008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0

5.05.02.1.01.009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0
5.05.02.1.01.010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0
5.05.02.1.01.011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	250,520,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	250.520.000
5.05.02.1.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	231.119.716
5.05.02.1.01.013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Rekomendasi	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Rekomendasi	221.055.462
5.05.02.1.01.014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0
5.05.02.1.01.015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Rekomendasi	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0

5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan potensi pengembangan unggulan daerah dari hasil riset bidang sosial dan kependudukan		58,33%	1,041,282,000			63,33%%	1.869.058.596
5.05.02.1.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	251,240,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	276.364.000
5.05.02.1.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	185,360,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	203.896.000
5.05.02.1.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	302,651,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	332.916.100
5.05.02.1.02.004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	53.089.020
5.05.02.1.02.005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	229.101.648
5.05.02.1.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	302,031,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	332.234.100
5.05.02.1.02.007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	53.089.020
5.05.02.1.02.008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	53.089.020
5.05.02.1.02.009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	229.101.648
5.05.02.1.02.010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	53.089.020
5.05.02.1.02.011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	53.089.020

5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah dari hasil riset bidang ekonomi dan Pembangunan		60,00%	1,641,396,744			66,92%	3.033.817.118
5.05.02.1.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	140,466,850	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	268.560.220
5.05.02.1.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	140,466,850	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	268.560.220
5.05.02.1.03.003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	169.085.628
5.05.02.1.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	140,118,040	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	194.111.417
5.05.02.1.03.005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	140,904,690	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	169.085.628
5.05.02.1.03.006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	152,563,774	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	183.076.529
5.05.02.1.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	147,763,090	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	477.315.708
5.05.02.1.03.008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	145,693,090	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	274.831.708
5.05.02.1.03.009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	196,121,090	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	235.345.308
5.05.02.1.03.010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	144,353,090	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	173.223.708
5.05.02.1.03.011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	146,480,090	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	275.776.108

5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	146,466,090	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	175.759.308
5.05.02.1.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	169.085.628
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan hak paten		60,00 %	1,792,315,848			67,00 %	2.672.683.725
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	168,075,932	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	306.151.864
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	23,000,756	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	311.932.088
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	3 Laporan	1,194,996,200	Dana Bagi hasil (DBH)		3 Laporan	1.333.995.440
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	2 Laporan	188,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		2 Laporan	395.356.040
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	218,242,960	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	325.248.293
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam naskah kebijakan (Policy Brief) Persentase pengembangan hasil inovasi dan inovasi		52,94% 45,71%	200,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		64,71% 51,43%	650.000.000
5.05.03.1.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase sinergi program kegiatan antar sektor dan antar wilayah sesuai Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK		41,18%	200,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		52,94%	450.000.000

5.05.03.1.01.003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	5 Naskah	200,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		6 Naskah	300.000.000
	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 dokumen	150.000.000
	Invensi dan Inovasi	Persentase realisasi kerjasama/kolaborasi/ke mitraan riset, invensi dan inovasi	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		47,06%	200.000.000
	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 laporan	100.000.000
	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 laporan	100.000.000
24.364.052.000							34.465.708.265		

Berdasarkan tabel tersebut teridentifikasi bertambahnya 1 (satu) program yaitu Program Riset dan Inovasi Daerah, program tersebut dibentuk melalui pendirian Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, yang bertujuan mendukung pengambilan kebijakan berbasis riset, penguatan ekosistem inovasi, dan peningkatan daya saing daerah melalui integrasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pembentukan BRIDA merupakan tindak lanjut dari kebijakan pusat dan diatur melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang kemudian akan disinkronkan dengan visi pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Lebih lanjut program riset dan inovasi daerah tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan dan sasaran strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung penyelenggaraan urusan penunjang pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2026 telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub kegiatan.

Total pendanaan sebesar Rp. 24.364.052.000,- terdiri dari program penunjang urusan pemerintahan daerah Rp. 19.085.497.408,-, program penelitian dan pengembangan daerah Rp. 5.078.554.592,- dan program riset dan inovasi daerah Rp. 200.000.000,-.

Rencana program/kegiatan/sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tersebut terlampir pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				24.364.052.000				22.833.521.000
1	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		100	19.085.497.408			100	20.364.257.610
							Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		76%				78%	
	5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	97,50%	85%	264.921.600			90%	966.756.918
	5	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 dokumen	10 dokumen	160.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	10	331.870.702
	5	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi	5 dokumen	1 dokumen	2.400.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Dokumen	4.799.828
	5	05	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi	5 dokumen	2 dokumen	2.400.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	47.998.280
	5	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi	5 dokumen	3 dokumen	2.400.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	3.941.828
	5	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi	5 dokumen	4 dokumen	2.400.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	39.418.280
	5	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi	105 laporan	21 laporan	92.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	21 Laporan	531.920.000
	5	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 laporan	5 Laporan	1.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	5 Laporan	6.808.000
	5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya pergeseran anggaran belanja	1,10%	3,80%	15.037.605.556			0.07 %	13.071.312.122

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	-4650- Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	366 orang	68 orang/bulan	14.826.117.176	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	50 Orang/ Bulan	12.819.078.698
	5	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 dokumen	12 dokumen	209.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 dokumen	242.040.000
	5	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	1 dokumen	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	723.000
	5	05	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen	1 dokumen	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	579.500
	5	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	1 dokumen	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	3.894.000
	5	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	150 dokumen	30 Laporan	480.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	30 Laporan	4.996.924
	5	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian keberadaan Barang Milik Daerah terhadap catatan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	86,74%	85,08%	2.568.300			88 %	9.246.100
	5	05	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	1 dokumen	480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	2.600.000
	5	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	1 dokumen	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	2.600.000
	5	05	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	1 laporan	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	536.100
	5	05	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 laporan	12 Laporan	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Laporan	910.000
	5	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 laporan	12 Laporan	480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Laporan	2.600.000
	5	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi Pegawai	88,23%	76,47%	7.200.000			60%	149.180.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	-4651- Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	Paket			DANA BAGI HASIL (DBH)	2 Paket	0
	5	05	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokumen	1 Dokumen	7.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	11.180.000
	5	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 pegawai	35 Orang			DANA BAGI HASIL (DBH)	35 Orang	90.000.000
	5	05	01	1.05	00011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	151 pegawai	30 Orang			DANA BAGI HASIL (DBH)	30 Orang	48.000.000
	5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pemenuhan kebutuhan bahan pelayanan umum kantor	96%	80%	1.277.539.083			80 %	2.028.517.153
	5	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 paket	1 Paket	16.348.018	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Paket	41.528.741
	5	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 paket	2 Paket	18.060.745	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Paket	646.128.495
	5	05	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 paket	3 Paket	56.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Paket	58.024.876
	5	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	4 Paket	42.402.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Paket	81.080.750
	5	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	5 Paket	17.871.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Paket	118.707.100
	5	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 laporan	1 laporan	48.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	100.000.000
	5	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	12 Laporan	1.068.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Laporan	934.647.191
	5	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	49.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	31.400.000
	5	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	2 Dokumen	17.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2 Dokumen	17.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	-4652- Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	7,19%					5,59%	54.749.714
	5	05	01	1.06	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 unit	0
	5	05	01	1.06	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 unit	52.143.840
	5	05	01	1.06	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	10 unit	5.874
	5	05	01	1.06	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	2 unit	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 unit	0
	5	05	01	1.06	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak Berwujud yang disediakan		0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 unit	0
	5	05	01	1.06	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 unit	2.600.000
	5	05	01	1.06	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 unit	0
	5	05	01	1.06	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 unit	0
	5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas BRIDA	88,58%	3,99%	2.157.844.869			86,18%	3.865.697.609
	5	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	12 Laporan	3.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Laporan	15.000.000
	5	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	60 laporan	12 Laporan	555.504.869	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Laporan	560.241.705
	5	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 laporan	12 Laporan	35.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Laporan	390.412.800

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	-4653- Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	142 laporan	35 Laporan	1.563.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	35 Laporan	2.900.043.104
	5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Penunjang tugas BRIDA	13,51%	85,98%	337.818.000			12,01%	218.797.994
	5	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 unit	6 unit	81.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6 Unit	152.087.998
	5	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 unit	6 unit	199.456.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6 Unit	0
	5	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	440 unit	90 unit	46.090.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	90 Unit	49.302.000
	5	05	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	0		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Unit	0
	5	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	242.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2 Unit	0
	5	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	2 unit	10.780.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	10.150.000
	5	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 Unit	130.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2 Unit	7.257.996
2	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras dengan isustrategis/ permasalahan dan potensi unggulan daerah	84,85%	75,76%	5.078.554.592			78,79%	1.469.263.390
							Persentase hasil riset dan inovasi yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/ internasional/buku/naskah akademis rancangan perda/pergub	84,85%	75,76%				78,79%	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	-4654- Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Persentase hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dalam daftar Kekayaan Intelektual (KI)	84,85%	75,76%				78,79%	
	5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dari hasil fasilitasi dan riset bidang pemerintahan dan peraturan/regulasi	78.57%	64.29 %	603.560.000			68,57%	359.263.390
	5	05	02	1.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 laporan	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	40.000.000
	5	05	02	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	10 laporan	2 Laporan	252.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2 Laporan	40.000.000
	5	05	02	1.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	5 laporan	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	47.263.390
	5	05	02	1.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	5 laporan	1 Laporan	100.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	122.000.000
	5	05	02	1.01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.01	0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	-4655- Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	02	1.01	0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.01	0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.01	0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.01	0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Badan Usaha Milik Desa	0	1 Laporan	250.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	30.000.000
	5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Rekomendasi	40.000.000
	5	05	02	1.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.01	0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan potensi pengembangan unggulan daerah dari hasil riset bidang sosial dan kependudukan	75%	58.33 %	1.041.282.000			63,33%%	170.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	-4656- Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	5 dokumen	1 Dokumen	251.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	30.000.000
	5	05	02	1.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7 dokumen	1 Dokumen	185.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	8 dokumen	1 Dokumen	302.651.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.02	0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	3 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	3 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan kesehatan	5 dokumen	1 Dokumen	302.031.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.02	0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.02	0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	4 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	20.000.000
	5	05	02	1.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	4 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.02	0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	3 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	-4657- Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan pembangunan dan potensi pengembangan unggulan daerah bidang ekonomi dan pembangunan dari hasil riset	80%	60 %	1.641.396.744			66,92%	450.000.000
	5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5 dokumen	1 Dokumen	140.466.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	50.000.000
	5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5 dokumen	1 Dokumen	140.466.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	30.000.000
	5	05	02	1.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	4 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	0
	5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5 dokumen	1 Dokumen	140.118.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	5 dokumen	1 Dokumen	140.904.690	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	5 dokumen	1 Dokumen	152.563.774	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	5 dokumen	1 Dokumen	147.763.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	50.000.000
	5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	5 dokumen	1 Dokumen	145.693.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	30.000.000
	5	05	02	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5 dokumen	1 Dokumen	196.121.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	5 dokumen	1 Dokumen	144.353.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	5 dokumen	1 Dokumen	146.480.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	30.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	-4658- Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	02	1.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan penataan ruang dan pertanahan	5 dokumen	1 Dokumen	146.466.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	30.000.000
	5	05	02	1.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	4 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	30.000.000
	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi inovasi baru berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan hak paten	80%	60 %	1.792.315.848			67,00%	490.000.000
	5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	13 laporan	1 Dokumen	168.075.932	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	100.000.000
	5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	13 laporan	1 Laporan	23.000.756	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	100.000.000
	5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	15 laporan	3 Laporan	1.194.996.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	3 Laporan	100.000.000
	5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	14 laporan	2 Laporan	188.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2 Laporan	90.000.000
	5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5 laporan	1 Laporan	218.242.960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	100.000.000
3	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam naskah kebijakan (Policy Brief)	88,24%	52,94%	200.000.000			64,71%	1.000.000.000
							Persentase pengembangan hasil inovasi dan inovasi	62,86%	45,71%				51,43%	
	5	05	03	1.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase sinergi program kegiatan antar sektor dan antar wilayah sesuai Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK	76,47%	41,18%	200.000.000			52,94	650.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	-4659- Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	03	1.01	0001	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	3 laporan	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	650.000.000
	5	05	03	1.01	0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	28 naskah	5 Naskah	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	03	1.02		Invensi dan Inovasi	Persentase realisasi kerjasama/ kolaborasi/kemitraan riset, invensi dan inovasi	70,59%					47,06%	350.000.000
	5	05	03	1.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	4 laporan	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	175.000.000
	5	05	03	1.02	0013	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan)	4 laporan	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	175.000.000

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2026. Rencana Kerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dibuat dengan mempedomani peraturan perundangan dan isu-isu aktual serta telah mengakomodir tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam.

Melalui Rencana Kerja Tahun 2026 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pencapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur serta mendukung terlaksananya program strategis Gubernur Kalimantan Timur.

RENJA TAHUN 2026 BADAN PENGHUBUNG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam perjalanannya terus disempurnakan, terakhir dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah provinsi yang meliputi, pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah, termasuk didalamnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mengamanatkan Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Rencana Strategis (Renstra) menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun. Gubernur bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, selanjutnya setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan (Renja) berpedoman pada RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang masih dalam bentuk Rancangan RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Pembentukan Badan Penghubung adalah untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan koordinasi

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
2. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pembangunan;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum urusan pemerintahan dan pembangunan;
4. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan antar lembaga, promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan anjungan Kalimantan Timur serta mess;
6. penyiapan bahan koordinasi perencanaan progam pengembangan antar lembaga, promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan anjungan Kalimantan Timur serta mess;
7. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian promosi dan informasi serta pengelolaan anjungan Kalimantan Timur;
8. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian pelayanan dan pengelolaan mess;
9. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
10. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
11. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini disusun dengan memperhatikan Peraturan dan Kebijakan penyusunan dokumen perencanaan seperti:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penghubung Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2026 serta dijadikan panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan juga memasukkan program/kegiatan/subkegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
- 2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB 5 PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2024-2026. Terdapat 2 (dua) Program Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan kelancaran Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan pemerintah pusat di Jakarta, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur 2024-2025, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pelayanan Penghubung

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, yaitu :

A. Capaian Kinerja Sasaran Renstra

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Penghubung Provinsi	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Mess	Poin	91,80	97,19	105,87
		Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga	Poin	87,00	91,12	104,74
		Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Fasilitas Promosi Dan Informasi	Poin	95,00	97,56	102,69

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi	Poin	72,47	71,10	98,11
---	--	---	------	-------	-------	-------

B. Capaian Realisasi Pelaksanaan Program per Sasaran RENSTRA

Tabel 2.2

**Capaian Realisasi Pelaksanaan Program per Sasaran RENSTRA
Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Penghubung Provinsi	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Mess	91,80	97,19	105,87	4.883.131.238	4.796.416.739	98,22
		Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga)	87,00	91,12	104,74			
		Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Fasilitas Promosi Dan Informasi	95,00	97,56	102,69			
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi (Poin)	72,47	71,10	98,11	18.842.265.062	18.126.062.181	96,20
JUMLAH						23.725.396.300	22.922.478.920	96,62

Pada APBD tahun 2024 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur mendapat pagu anggaran sebesar Rp 23.725.396.300,-. Realisasi belanja Badan Penghubung tahun anggaran 2024 mencapai 96,62% atau sebesar Rp 22.922.478.920,-. Berdasarkan pagu anggaran dan realisasi, maka secara umum capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja dapat dikatakan sangat baik.

Sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dijelaskan tentang capaian pelaksanaan Renja pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Capaian Program Kegiatan pada Renja Tahun 2024

NAMA PROGRAM	INDIKATOR	Dana 1 Tahun	REALISASI KEUANGAN	
			Rp.	%
Penunjang Urusan-Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	18.842.265.062	18.126.062.181	96,20
Pelayanan Penghubung	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess yang Ditindaklanjuti	4.883.131.238	4.796.416.739	98,22
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga yang Ditindaklanjuti			
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi yang Ditindaklanjuti			

Sumber data : Laporan Keuangan Tahun 2024

Tabel 2.4
Rekapitulasi Capaian Renja Tahun 2022-2024

Kode	Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2024 APBD		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%) 2024	
							Triwulan IV			
			K	Rp			K	Rp	K	Rp
05.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi			91,56%	95,45%				
		Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	82,50	18.842.265.062			104,72	18.126.062.181	126,93%	96,20
05.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16 Dokumen	16 Dokumen				
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	473.060.700			96,55%	461.056.530	96,55%	97,46
05.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	135.587.400	9 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	134.003.500	88,89%	98,83
05.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	64.220.000	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	63.372.490	100%	98,68
05.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	64.220.000	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	64.120.800	100%	99,85
05.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	55.220.000	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	55.167.000	100%	99,90

05.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	55.220.000	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	55.148.080	100%	99,87
05.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	58.192.050			8 Laporan	54.505.000	100%	93,66
05.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	40.401.250	3 Laporan	3 Laporan	8 Laporan	34.739.660	100%	85,99
05.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 Bulan	12 Bulan				
		Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100%	3.445.499.700			100%	3.312.957.705	100%	96,15
05.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ Bulan	2.925.945.000	24 Orang/ Bulan	19 Orang/ Bulan	19 Orang/ Bulan	2.801.625.000	100%	95,75
05.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	173.599.700	61 Dokumen	61 Dokumen	24 Dokumen	169.987.855	100%	97,92
05.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149 Dokumen	179.955.000			179 Dokumen	177.755.110	120,13%	98,78
05.07.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.000.000			2 Dokumen	220.000	100%	11,00
05.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Dokumen	92.000.000			13 Dokumen	91.601.814	100%	99,57

05.07.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	72.000.000			4 Dokumen	71.767.926	100%	99,68
05.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	50.468.500			100%	49.381.930	100%	97,85
05.07.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.520.000			2 Dokumen	9.882.600	100%	93,94
05.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000			1 Dokumen	1.992.000	100%	99,60
05.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	37.948.500			8 Laporan	37.507.330	100%	98,84
05.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi			77%	-				
		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74,04%	742.070.100			96,15%	710.529.980	100%	95,75
05.07.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	316.480.500	2 Paket	2 Paket	2 Paket	302.569.008	100%	95,60
05.07.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen	50.280.000			27 Dokumen	49.288.225	81,82%	98,03
05.07.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	27.000.000			19 Dokumen	23.995.840	76%	88,87
05.07.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	348.309.600	63 Orang	77 Orang	100 Orang	334.676.907	129,87%	96,09
05.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Bulan	12 Bulan				
		Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100%	1.628.551.038			100%	1.613.839.017	100%	99,10

05.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	103.686.975	1 Paket	2 Paket	2 Paket	103.636.350	100%	99,95
05.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	523.735.963	8 Paket	17 Paket	16 Paket	518.473.514	100%	99,00
05.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	88.200.000	1 Paket	1 Paket	2 Paket	88.005.000	100%	99,95
05.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	87.841.300	3 Paket	2 Paket	2 Paket	87.030.522	100%	99,08
05.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	623.081.000	80 Laporan	112 Laporan	57 Laporan	620.549.181	101,79%	99,59
05.07.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	202.005.800			1 Dokumen	196.144.450	100%	97,10
05.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			79 Unit	181 Unit				
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	100%	1.341.036.779			100%	1.300.076.874	100%	96,95
05.07.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	33.995.000			1 Unit	31.452.518	100%	92,52
05.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	674.513.836	79 Unit	181 Unit	37 Unit	647.910.000	100%	96,06
05.07.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	118 Unit	632.527.943			118 Unit	620.714.356	100%	98,13
05.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan				
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	100%	6.768.102.590			100%	6.537.162.339	100%	96,59

05.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.560.000	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6.275.000	100%	54,28
05.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62 Laporan	1.538.842.578	48 Laporan	60 Laporan	62 Laporan	1.381.407.419	100%	89,77
05.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	5.217.700.012			37 Laporan	5.149.479.920	100%	98,69
05.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan				
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik	90%	4.393.475.655			92,93%	4.141.057.806	103,26%	94,25
05.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	400.702.635			4 Unit	374.801.990	100%	93,54
05.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	806.186.600	40 Unit	40 Unit	43 Unit	758.904.133	100%	94,14
05.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	426 Unit	117.051.000	367 Unit	552 Unit	426 Unit	116.747.577	100%	99,74
05.07.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	86.854.120			5 Unit	84.735.624	100%	97,56
05.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	11 Unit	2.496.475.300	4 Unit	5 Unit	11 Unit	2.333.645.585	100%	93,48
05.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	307 Unit	486.206.000			307 Unit	472.222.897	100%	97,12

05.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks Kepuasan Mitra Kerja terhadap Pelayanan Badan Penghubung			91,64%	93,84%				
		Persentase Keluhan Penggunaan Layanan Mess yang Ditindaklanjuti	100%	4.883.131.238			100%	4.796.416.739	100%	98,22
		Persentase Keluhan Penggunaan Layanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga yang Ditindaklanjuti	100%				100%		100%	
		Persentase Keluhan Penggunaan Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi yang Ditindaklanjuti	100%				100%		100%	
05.07.02.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan			3 Kegiatan	3 Kegiatan				
		Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	100%	4.883.131.238			100%	4.796.416.739	100%	98,22
05.07.02.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	1.103.307.404	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.102.421.695	100%	99,92
05.07.02.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	832.574.410	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	826.611.558	100%	99,28
05.07.02.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2 Laporan	1.154.627.789	16 Laporan	19 Laporan	2 Laporan	1.135.029.435	100%	98,30
05.07.02.01.04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	3 Laporan	1.297.781.539	6 Laporan	7 Laporan	3 Laporan	1.243.109.101	100%	95,79
05.07.02.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2 Laporan	494.840.096	4 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	489.244.950	100%	98,87

Secara garis besar pencapaian kinerja keuangan Badan Penghubung ada pada kategori Sangat Baik dengan persentase capaian 96,62%, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Intensitas Fasilitasi yang cukup tinggi sebagai salah satu tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi dan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai waktu perencanaan dalam pelaksanaannya dikarenakan beban kerja yang ada tidak diimbangi dengan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas.
- Adanya perubahan waktu pelaksanaan dan teknis kegiatan sehingga mempengaruhi realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
- Adanya petunjuk teknis yang berubah.

Pada tataran sistem pengukuran kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian sasaran lebih tinggi dari pada pencapaian program dan kegiatan, karena program merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja APBD digunakan pengukuran kinerja pencapaian sasaran, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian dengan target atau rencana yang telah ditetapkan.

Pencapaian target kinerja APBD tahun anggaran 2024 pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan melalui retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp650.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp1.141.460.165,- atau sebesar 175,61%. Sedangkan belanja operasi dan belanja modal dianggarkan sebesar Rp23.725.396.300,- dan realisasinya sebesar Rp22.922.478.920,- atau sekitar 96,62%. Anggaran dan realisasi target kinerja APBD pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi APBD TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Prosentase (%)
I.	PENDAPATAN	687.971.200,-	1.165.931.365,-	169,47
	1. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	650.000.000,-	1.141.460.165,-	175,61
	2. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempa Kegiatan Usaha Lainnya	15.000.000,-	0,-	0,00
	3. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	22.971.200,-	24.471.200,-	106,53
II.	BELANJA	23.725.396.300,-	22.922.478.880,-	96,62
	1. Belanja Operasi	20.167.576.022,-	19.572.527.547,-	97,05
	a. Belanja Pegawai	3.097.895.000,-	2.969.975.000,-	95,87
	b. Belanja Barang dan Jasa	17.069.681.022,-	16.602.552.547,-	97,26
	2. Belanja Modal	3.557.820.278,-	3.349.951.333,-	94,16
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.812.395.753,-	1.754.190.624,-	96,79
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.534.656.525,-	1.386.069.209,-	90,32
	c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	210.768.000,-	209.691.500,-	99,49
SURPLUS/(DEFISIT)		(23.037.425.100)	(21.756.547.515)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			802.917.420	

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja keuangan Badan Penghubung pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) obyek pendapatan melalui retribusi di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa yaitu retribusi terhadap sewa kamar mess dan rumah dinas.
- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempa Kegiatan Usaha Lainnya yaitu retribusi terhadap sewa Rumah Dahor Anjungan Kaltim yang disewakan untuk dimanfaatkan sebagai kantin.
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yaitu retribusi terhadap ruang rapat dan lahan kantor yang difungsikan sebagai ATM Bankaltimtara.

Dari Tabel 2.5 dapat terlihat realiasi pada masing-masing objek retribusi. Terkait realisasi tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.

- a. Pendapatan Retribusi Mess dengan target sebesar Rp650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.141.460.165,00 atau sebesar 175,61%. Hal ini terjadi karena meningkatnya minat ASN dan Masyarakat Kaltim untuk menginap di mess seiring dengan adanya peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dengan target sebesar Rp15.000.000,00 tidak terealisasi dikarenakan Rumah Dahor pada Anjungan Kaltim di TMII yang semula akan difungsikan sebagai kantin dan dijadikan salah satu obyek retribusi dialihfungsikan menjadi ruang rapat sehingga tidak dapat disewakan.
- c. Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dengan target sebesar Rp22.971.200,00 terealisasi sebesar Rp24.471.200,00 atau sebesar 106,53%.

2. Belanja

Belanja terdiri dari Belanja Operasi adalah belanja yang digunakan untuk operasional selama 1 tahun anggaran berupa belanja pegawai dan belanja barang/jasa dan Belanja Modal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun anggaran. Analisis terhadap realisasi belanja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

➤ Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja yang dianggarkan untuk memberikan kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar Rp2.969.975.000,00 atau sebesar 95,87%. Oleh karena

adanya posisi struktural yang kosong sehingga anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNS berupa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja PNS tidak dapat terserap maksimal.

➤ Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2024 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp17.069.681.022,00 dan terealisasi sebesar Rp16.602.552.547,00 atau sebesar 97,26%. Belanja dimaksud digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung selama 1 tahun sehingga kinerja Badan Penghubung dapat tercapai.

b. Belanja Modal

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp3.557.820.278,00 untuk menambah aset tetap berupa sarana penunjang pelayanan mess, hubungan antar lembaga, promosi dan informasi serta kegiatan administrasi perkantoran agar pelayanan yang diberikan oleh Badan Penghubung menjadi lebih optimal. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp3.349.951.333,00 atau sebesar 94,16%. Secara keseluruhan belanja modal yang dianggarkan dapat dilaksanakan dengan baik, adanya sisa lebih penggunaan anggaran merupakan efisiensi anggaran dari pelaksanaan pengadaan.

Belanja Modal yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pada Pelayanan Penghubung:

- ✓ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua
- ✓ Belanja Modal Alat Bantu : Pompa air, mesin bor (peralatan penunjang operasional mess)
- ✓ Belanja Modal Alat Kantor : CCTV Anjungan, alat pemotong kertas, mesin jet cleaner, filling cabinet, lemari arsip, tempat sampah anjungan, exhaust hood cooking, smart lock door, troli barang anjungan (peralatan penunjang operasional administrasi perkantoran dan anjungan)

- ✓ Belanja Modal Alat Rumah Tangga : mesin cuci, mesin potong rumput, kulkas anjungan, AC standing anjungan, vacum cleaner, TV, meja kerja partisi, meubelair ruang bendahara, meja dan kursi rapat anjungan, kursi tunggu anjungan, kursi tunggu supir, sofa dan interior ruang laktasi, sofa ruang kerja sekda, sofa ruang kerja gub dan wagub, sofa anjungan, mesin polisher anjungan, termos air panas listrik, food warmer (peralatan penunjang operasional mess dan anjungan)
- ✓ Belanja Modal Alat Studio : sound paging dan microphone wireless meeting Anjungan
- ✓ Belanja Modal Komputer Unit : Personal Computer
- ✓ Belanja Modal Peralatan Komputer : printer, routerboard, switchhub, wireless Access Point
- ✓ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor : troli kebersihan

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja berupa pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor, mess dan Anjungan Kaltim TMII yang dilakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

- ✓ Belanja Jasa Konsultansi Perencana Gedung Kantor dan Mess
- ✓ Belanja Modal Pembuatan Pintu Lipat dan Jendela pada Kanopi Rooftop Gedung Kantor dan Mess Jl. Kramat II No.42 Jakarta
- ✓ Belanja Modal Rehabilitasi Gedung Kantor dan Mess Jl. Kramat II No. 42 Jakarta
- ✓ Belanja Modal Rehabilitasi Gedung Mess Jl. Kramat II no.34 Jakarta
- ✓ Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Mess Jl. Kramat II No.42 Jakarta
- ✓ Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Mess Jl. Kramat II No.34 Jakarta
- ✓ Belanja Modal Interior Rumah Lamin Anjungan Kaltim

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian yang dilakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

- ✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya (Mandau Besar Pelengkap Hudoq Lamin)
- ✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Anjungan Kaltim

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud yang dilakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

- ✓ Aplikasi reservasi kamar mess
- ✓ Hologram virtual Anjungan Kaltim

Adapun kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penghubung pada Tahun 2024 antara lain:

1. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
 - a. Bappeda Prov. Kaltim :
 - 1) Asistensi RKA/DPA APBD Murni Tahun 2025
 - 2) Verifikasi RENJA 2025
 - 3) Forum SKPD dan Musrenbang Prov. Kaltim
 - b. Inspektorat Prov. Kaltim :
 - 1) Asistensi dan previu LKjIP Tahun 2023
 - 2) Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan pengadaan dan penatausahaan keuangan.
 - c. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim, koordinasi dan konsultasi masalah kepegawaian.
 - d. Sekretariat DPRD Prov. Kaltim :
 - 1) Kunjungan Kerja DPRD Prov. Kaltim.
 - 2) Fasilitasi anggota DPRD Kaltim di Jakarta.
 - e. Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim, koordinasi dan konsultasi masalah retribusi sewa kamar Mess, ruang rapat dan obyek lain-lain beserta pelaporannya.
 - f. Dinas Pariwisata Prov. Kaltim dan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Kaltim, koordinasi dan konsultasi masalah promosi kebudayaan dan pariwisata daerah Kaltim di Jakarta.

- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim, koordinasi dan konsultasi masalah pemeliharaan gedung mess dan anjungan Kaltim terkait revitalisasi yang telah dilakukan.
- h. BPKAD Prov. Kaltim ;
 - 1) Pergeseran Anggaran APBD Tahun 2024
 - 2) Asistensi RKA/DPA APBD Murni Tahun 2025.
 - 3) Mengurus usulan APBD pada bagian anggaran.
 - 4) Mengurus pencairan SP2D pada bagian perbendaharaan.
 - 5) Mengurus usulan SK PPKD-SKPD pada bagian BAKD.
 - 6) Menyampaikan Laporan Keuangan pada bagian akuntansi.
 - 7) Entry data dan pelaporan barang milik daerah (BMD).
- i. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim :
 - 1) Asistensi RKA/DPA APBD Murni 2025.
 - 2) Mengurus usulan program dan kegiatan pada APBD.
 - 3) Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok).
 - 4) Pelaporan realisasi anggaran dan fisik setiap bulan melalui aplikasi SIRA.
- j. Biro Pengadaan Barang Jasa :
 - 1) Penyusunan RUP.
 - 2) Kaji ulang dokumen pemilihan tender.
 - 3) Konsultasi dan koordinasi mengenai pengadaan barang dan jasa.
- k. Biro Umum Setda Prov. Kaltim, koordinasi dan konsultasi masalah tugas pokok dan fungsi.
- l. Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim :
 - 1) Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja PNS.
 - 2) Penyusunan Laporan Penerapan Budaya Kerja Aparatur.
 - 3) Penyusunan SOP.
 - 4) Penyusunan LKjIP.
 - 5) Penyusunan rencana kerja (RENJA).
 - 6) Koordinasi dan konsultasi masalah tugas pokok dan fungsi.
- m. Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim, koordinasi dan konsultasi masalah kehumasan dan keprotokolan.
- n. Biro Hukum Setda Prov. Kaltim, mengurus usulan Perda Retribusi Penerimaan Sewa Kamar Mess.

- o. Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltim, koordinasi dan konsultasi masalah keamanan pengamanan aset pada Badan Penghubung, Mess, Rumah Jabatan dan Anjungan Kaltim TMII.
- p. Seluruh SKPD di lingkungan Pemprov. Kaltim, koordinasi dan konsultasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kebijakan-kebijakan Gubernur Kalimantan Timur.

2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

a. Seksi Promosi dan Informasi

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur khususnya Seksi Promosi dan Informasi bertugas memfasilitasi kegiatan Promosi Potensi Kaltim baik produk unggulan, pelestarian seni budaya Kaltim, pariwisata dan potensi investasi Kaltim, dan juga sebagai show window seni budaya Kalimantan Timur di Jakarta.

Anjungan Kaltim juga berfungsi sebagai sarana untuk promosi bagi kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan guna memperkenalkan produk unggulan dan pelestarian seni budaya, pariwisata, serta potensi investasi Kaltim pada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya.

Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian promosi dan informasi, mempromosikan dan menginformasikan kepada masyarakat dan para calon investor untuk lebih mengenal Kalimantan Timur dan potensi-potensi yang ada di Kalimantan Timur baik dari segi investasi, pariwisata, seni dan budaya, produk unggulan, dan potensi-potensi lainnya serta pengelolaan Anjungan Kaltim TMII di Jakarta.

Seksi Promosi dan Informasi juga memfasilitasi Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Pusat dalam hal menginformasikan terkait potensi yang ada di Kalimantan Timur, namun dalam hal teknis akan dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah terkait.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Seksi Promosi dan Informasi terdiri dari:

- 1) Gelar pentas kesenian di Anjungan Kaltim
- 2) Festival Kuliner Kaltim
- 3) Workshop Budaya Kaltim
- 4) Roadshow Budaya Kaltim ke sekolah/kampus
- 5) Festival Bebaya/Kaltim Exhibition
- 6) Festival Budaya di Bandara Soekarno Hatta
- 7) Kegiatan Soul of Youth TMII
- 8) Festival Lebaran TMII
- 9) Kegiatan HUT TMII
- 10) Festival Liburan TMII
- 11) Festival Budaya bersama Forkappsi
- 12) Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Kaltim di Jabodetabek
- 13) Festival Borneo
- 14) Pekan Agustus
- 15) Pekan Natal dan Tahun Baru (Nataru)
- 16) Koordinasi dengan Dinas Pariwisata Prov. Kaltim serta Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dalam rangka kolaborasi kegiatan di Anjungan Kaltim TMII dan di Jabodetabek;
- 17) Koordinasi dengan DPMPSTSP Prov. Kaltim dalam rangka informasi dan promosi investasi Kaltim;
- 18) Koordinasi dengan Disperindagkop Prov. Kaltim dalam rangka gelar produk guna promosi UMKM di Anjungan Kaltim dan Jabodetabek;
- 19) Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim termasuk dengan UPTD Taman Budaya dalam kolaborasi kegiatan;
- 20) Koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam rangka kolaborasi kegiatan promosi potensi Kaltim.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada seksi Promosi dan Informasi tahun 2024 telah terlaksana dengan baik meskipun masih ada kendala-kendala pada kegiatan yang ada di TMII seperti adanya perubahan manajemen pada TMII sehingga terdapat perubahan regulasi serta adanya jadwal kegiatan yang bersamaan

di Kaltim sehingga ada beberapa Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang tidak dapat mengikuti kegiatan. Meskipun ada kendala-kendala, kegiatan tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

Berikut ini disajikan data pengunjung pada Anjungan Kaltim TMII Jakarta selama tahun 2020–2024.

Tabel 2.6
Data Pengunjung pada Anjungan Kaltim TMII Tahun 2020 – 2024

No.	Data Kunjungan	2020	2021	2022	2023	2024
PENGUNJUNG						
1.	Wisatawan Domestik	744	606	1649	1967	2307
2.	Wisatawan Asing	30	10	60	37	268
3.	Tamu Khusus	-	60	5	34	26
JUMLAH		774	676	1714	2038	2601

Sumber data : Data Pengunjung di Anjungan Kaltim TMII

Tabel 2.7
Program Kegiatan pada Anjungan Kaltim TMII Tahun 2024

NO	KEGIATAN	WAKTU/ PELAKSANAAN	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (03)				
1	Kegiatan dalam Anjungan Kaltim Gelar pentas kesenian kaltim	Januari s/d Desember	Anjungan Kaltim TMII	1X /bulan (10 X)
2	Kegiatan TMII			
	1 Soul of Youth	27 Januari 2024	Plaza Qori	1X
	2 Soul of Youth	24 Februari 2024	Plaza Qori	1X
	3 Rangkaian HUT TMII	20 Apr 2024	TMII & Anjungan Kaltim	1X
	4 Pekan Lebaran	10 - 15 April 2024	TMII & Anjungan Kaltim	1X
	5 Pekan Liburan	29 Jun 2024	TMII	1X
	6 Plaza Qori Soul of Youth	24 Aug 2024	TMII	1X
	7 Plaza Qori Soul of Youth	16 Nov 2024	TMII	1X
	8 Pekan nataru	Desember 2024	TMII	1X
3	Workshop Budaya			3X
	1 Jakarta Intercultural School (JIS) & SD Kupu Kupu	29 Feb 2024	Anjungan Kaltim TMII	
	2 SMAN 8	1 Juni 2024	Anjungan Kaltim TMII	

	3 SDS Gaya Remaja	13 nop 2024	Anjungan Kaltim TMII	
4	Culinary Festival	22-Jun-24	Anjungan Kaltim TMII	1X
5	Festival Borneo	27-Jul-24	Anjungan Kaltim TMII	1X
Kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya (04)				
1	Kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya di Jabodetabek (04)			
	a Duta besar Rusia	26-Jan-24	Dubes Rusia	1X
	b Festival Bandara	7-Jun-24	Bandara Soeta	1X
	c Gelar Seni Budaya di Bogor	27-Jul-24	Mall Botani	1X
	d JARF (Jakarta Amateur Radio Fair)	10 nop 24	Point Square	1X
2	Kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya di luar daerah			
	Festival Bebaya	27 -28 Sept 24	Beachwalk Bali	1X
3	Kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya di jabodetabek dan luar daerah			
	Roadshow Budaya			
	a SMK Jaya Wisata 1	26 Mei 2024	Hotel Manhattan Jaksel	1X
	b Carnival of Culture (Forkappsi)	11 Juni 2024	Malioboro, Yogyakarta	1X
	c SD Madania School	24 oktober 24	kemang, Bogor	1X
	d Madania Secondary School	24 oktober 24	kemang, Bogor	1X

Untuk meningkatkan peran Anjungan Kaltim TMII sebagai sarana edukasi dan pengenalan budaya Kaltim maka diperlukan pembenahan bangunan-bangunan yang ada. Setelah dilakukan revitalisasi Anjungan Kaltim pada tahun 2023, maka pada tahun 2024 dilaksanakan rehabilitasi bangunan rumah Lamin yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Pera Prov Kaltim untuk mengembalikan ke bentuk asli lamin. Setelah rehabilitasi dilaksanakan dibutuhkan penataan ulang atau *redesign* interior lamin secara keseluruhan. Tentunya hal tersebut membutuhkan penambahan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Pekerjaan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah pengadaan replika ornamen khas suku Dayak seperti patung Hudoq, alat tenun tradisional ulap doyo', alat musik tradisional dan lesung kayu ulin.

b. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan koordinasi, pembinaan pelayanan dan pengelolaan Mess.

Berkenaan dengan tugas pokok tersebut Seksi Pelayanan mengelola Mess sebagai salah satu sarana akomodasi dan fasilitasi para aparatur yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta serta masyarakat yang ingin menginap di mess. Pengelolaan mess pada Badan Penghubung Prov. Kaltim merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur. Dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada aparatur dan masyarakat maka diharapkan ada peningkatan kualitas kamar mess dan fasilitas mess dari tahun ke tahun sehingga dapat mencapai target Survei Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung (Pelayanan Mess). Survei Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung (Pelayanan Mess) Tahun 2024 sebesar 97,19% .

Seksi Pelayanan memfasilitasi Pejabat yang berkegiatan di Mess dan memfasilitasi Perangkat Daerah jika ada yang melaksanakan rapat di Mess Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pembinaan untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, maka seksi Pelayanan melakukan Kegiatan Bimtek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan.

Berikut ini disajikan data instansi dan jumlah tamu yang menginap serta hasil retribusi Mess berdasarkan tarif Mess yang disetor ke Kas daerah selama tahun anggaran 2024.

Tabel 2.8

Data Instansi dan Jumlah Tamu Mess Tahun 2024

No.	Asal Tamu	Jumlah (Orang)
1.	Prov. Kalimantan Timur	646
2.	Samarinda	1221
3.	Balikpapan	75
4.	Bontang	9
5.	Tarakan	0
6.	Kutai Kartanegara	10
7.	Kutai Barat	15
8.	Kutai Timur	0

9.	Paser	11
10.	Penajam Paser Utara	5
11.	Berau	54
12.	Bulungan	39
13.	Malinau	7
14.	Nunukan	24
15.	Tana Tidung	3
16.	Kaltara	226
	Jumlah	2412

Sumber data : Daftar Tamu Pemerintah Provinsi, Kotamadya/ Kabupaten Januari s.d. Desember 2024

Tabel 2.9

Hasil Retribusi Mess

berdasarkan Tarif Kamar Sesuai Perda No 4 Tahun 2024

TIPE KAMAR	JUMLAH HARI	TARIF KAMAR	TOTAL
EXECUTIVE	1943	Rp 350.000	Rp 680.050.000
VIP I	149	Rp 275.000	Rp 40.975.000
VIP II	320	Rp 250.000	Rp 80.250.000
STANDART I	1178	Rp 230.000	Rp 270.710.000
STANDART II	536	Rp 100.000	Rp 53.600.000
EXTRABED	153	Rp 75.000	Rp 11.475.000
RUANG RAPAT	8	Rp 1.500.000	Rp 12.000.000
SEWA RUMAH DINAS	11 bulan	Rp 400.000	Rp 4.400.000
Sewa Mesin ATM	1 tahun	Rp 12.471.200	Rp 12.471.200
(Kelebihan Pembayaran Kamar Mess Melalui Qris)		Rp 165	Rp 165
TOTAL		Rp	1.165.931.365

Sumber data : Daftar Tamu Pemerintah Provinsi, Kotamadya/ Kabupaten Januari s.d. Desember 2024

Pendapatan retribusi tarif Mess tahun 2024 yang disetor ke kas daerah terealisasi sebesar Rp. 1.165.931.365,- atau sebesar 169,47% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 687.971.200,-.

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur juga telah menerapkan kuisioner untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan Mess Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Mess Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.

Tingkatan pemeliharaan pada kamar mess seperti shower yang kurang deras, pemeliharaan AC yang kurang dingin, jangkauan jaringan WIFI yang kurang luas, perbaikan dan pemeliharaan lift,

pemeliharaan saluran pembuangan kamar mandi menimbulkan aroma yang kurang sedap, blower di kamar tidak berfungsi.

Peningkatan fasilitas pada kamar mess seperti adanya dispenser di tiap lorong kamar dan didalam kamar pada kamar VIP dan adanya sajian teh, kopi, gula dan creamer yang bisa diseduh dan dinikmati tamu di Gedung Mess Jln. Kramat II No. 34 Jakarta.

c. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan koordinasi, pembinaan, dan menjalin kerja sama serta koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, lembaga negara, kedutaan besar, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan tugas di atas direalisasikan dalam program Pelayanan Penghubung dengan 2 sub. Kegiatan, yaitu Pelayanan Kelembagaan Aparatur & Masyarakat dan Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan penghubung dengan uraian sebagai berikut.

1. Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Fasilitasi pelayanan untuk pejabat dan Kepala Daerah;
 - b. Fasilitasi pelayanan kelembagaan untuk Aparatur atau Pejabat Daerah.
 - c. Fasilitasi hubungan kelembagaan bagi Aparatur dan perangkat daerah provinsi/ kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
 - d. Fasilitasi pelayanan kelembagaan dalam rangka kunjungan kerja ke daerah Kaltim.
 - e. Fasilitasi Kelembagaan dengan stakeholder terkait.
 - f. Fasilitasi Mitra Kerja dan Swasta dengan Aparatur/Pejabat Daerah dan Perangkat Daerah
 - g. Kegiatan sosial kemasyarakatan.
 - h. Memfasilitasi kegiatan masyarakat/mahasiswa Kaltim.
 - i. Memfasilitasi pemulangan mahasiswa/masyarakat Kaltim yang terdampak dalam konflik

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung, meliputi :
 - a. Koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat.
 - b. Koordinasi dengan Mitra Kerja Strategis yaitu Lembaga, Kedutaan Besar dan Swasta..
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah di lingkungan Pemprov. Kaltim.
 - d. Koordinasi dan bekerjasama dengan Badan Penghubung se-Indonesia di Jakarta melalui Forum Komunikasi Kantor Penghubung Seluruh Indonesia (Forkappsi).

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2024	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun berjalan	
											Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(5+7)	9=(8/4*100)
05	07				Badan Penghubung							
05	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83.5 Poin	104,72 Poin	83 Poin	32,31 Poin	32.31 Poin	38.69
05	07	01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	96,55 %	100%	48,28 %	46.46 %	46.46
05	07	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	44.44
05	07	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	50.00

05	07	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	33.33
05	07	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	50.00
05	07	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	33.33
05	07	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	12 Dokumen	50.00
05	07	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	12 Dokumen	50.00
05	07	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100.00
05	07	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	19 Orang/Bulan	61 Orang/Bulan	61 Orang/Bulan	61 Orang/Bulan	244.00
05	07	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen	50.00

05	07	01	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	447 Dokumen	179 Dokumen	149 Dokumen	61 Dokumen	240 Dokumen	53.69
05	07	01	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	33.33
05	07	01	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 Dokumen	13 Laporan	13 Laporan	2 Laporan	15 Laporan	38.46
05	07	01	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	50.00
05	07	01	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	100%	18,18 %	39.39 %	39.39
05	07	01	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	33.33
05	07	01	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	33.33
05	07	01	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	10 Laporan	41.67
05	07	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74.04 %	96,15 %	74,04%	5,88 %	43.72 %	59.05

05	07	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	2 Paket	1 Paket		2 Paket	33.33
05	07	01	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	93 Paket	27 Dokumen	29 Dokumen	22 Dokumen	49 Dokumen	52.69
05	07	01	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	38 Dokumen	50.67
05	07	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	231 Orang	100 Orang	11 Orang	1 Orang	101 Orang	43.72
05	07	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	100%	37,10 %	42.86 %	42.86
05	07	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	33.33
05	07	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	16 Paket	16 Paket	8 Paket	24 Paket	50.00
05	07	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	4 Paket	66.67
05	07	01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	3 Paket	50.00
05	07	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	57 Laporan	40 Laporan	10 Laporan	67 Paket	39.41

05	07	01	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100.00
05	07	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	100%	19,51 %	66.67 %	66.67
05	07	01	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	100.00
05	07	01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	61 Unit	37 Unit	63 Unit	16 Unit	53 Unit	86.89
05	07	01	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	196 Unit	118 Unit	19 Unit		118 Unit	60.20
05	07	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	100%	44,00 %	43.89 %	43.89
05	07	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	66.67
05	07	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	186 Laporan	61 Laporan	61 Laporan	24 Laporan	85 Laporan	45.70
05	07	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	111 Laporan	37 Laporan	12 Laporan	7 Laporan	44 Laporan	39.64

05	07	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	93 %	92,93 %	90%	71,94 %	71.94 %	77.35
05	07	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	9 Unit	180.00
05	07	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	43 Unit	44 Unit	22 Unit	65 Unit	147.73
05	07	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	738 Unit	426 Unit	62 Unit	4 Unit	430 Unit	58.27
05	07	01	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	7 Unit	5 Unit	1 Unit		5 Unit	71.43
05	07	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	22 Unit	200
05	07	01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	307 Unit	154 Unit	141 Unit	448 Unit	2240
05	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100

						Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100
05	07	02	01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%	53,85%	44.90 %	44.90
05	07	02	01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	50.00
05	07	02	01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	9 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	33.33
05	07	02	01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	50.00
05	07	02	01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	44.44
05	07	02	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	19 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	9 Laporan	47.37

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Survei Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung (Pelayanan Mess)

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Mess Pada tahun 2024 mendapat nilai 97,19 dengan mutu pelayanan “Sangat Baik”. Dari hasil pengolahan data kuesioner yang telah terisi tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.10.

Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 11 Unsur Pelayanan

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Mess

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Persyaratan pelayanan	3,846	96,14
2.	Prosedur	3,856	96,40
3.	Waktu Pelayanan	3,852	96,30
4.	Biaya atau Tarif	3,883	97,08
5.	Produk Layanan	3,961	99,04
6.	Kompetensi Pelayanan	3,963	99,07
7.	Perilaku Pelaksanaan	3,964	99,10
8.	Penanganan Saran dan Masukan	3,973	99,33
9.	Sarana dan Prasarana	3,973	99,33
10.	Transparasi Pelayanan	3,959	98,97
11.	Integritas Petugas Pelayanan	3,967	99,16
	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	3,888	97,19

Tabel 2.10. menunjukkan hasil penghitungan kuesioner unsur pelayanan dengan jumlah responden keseluruhan sebanyak 1.076 orang pada periode Januari – Desember 2024. Pada pengolahan data hasil kuisoner semester II yang dijadikan sebagai basis data capaian salah satu indikator sasaran 1 yaitu “Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Mess” tahun 2024 dengan jumlah responden 778 orang pada periode Juli –

Desember 2024 didapatkan hasil IKM 97,19 dengan mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik. Artinya, pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur khususnya pelayanan Mess telah memenuhi standar pelayanan secara keseluruhan. Meskipun demikian, unsur-unsur pelayanan tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Dilihat dari realisasi indikator kinerja diatas dengan hasil melebihi target yang ditentukan dengan persentase capaian sebesar 105,87%. Berikut ini disampaikan analisis penyebab keberhasilan sebagai berikut :

- 1) Adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan BIMTEK Peningkatan Kualitas SDM Dalam Pelayanan Publik “EXCELLENT SERVIS” dan studi tiru ke Sekolah Tinggi Pariwisata yang dipraktekkan langsung pada pelayanan di Mess Kaltim.
- 2) Terdapat tambahan sarana berupa Water Heater, juga adanya peningkatan pelayanan berupa sarapan yang sangat variatif, kebersihan kamar yang terjaga, perlengkapan mandi yang lengkap dan seprei yang bersih.
- 3) Adanya promosi dalam bentuk flyer dan sosial media sehingga memperluas jangkauan masyarakat Kaltim dan masyarakat umum untuk mengetahui Mess Kaltim yang ada di Jakarta.

2.2.2 Survei Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung (Pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga)

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat khususnya mitra kerja ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap pelayanan Hubungan Antar Lembaga sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Survei menggunakan 11 (sebelas) unsur pelayanan sebagai dasar penilaian, sehingga hasil survei yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sesuai data dukung yang diolah, sebagai berikut:

Tabel 2.11.

Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 11 Unsur Pelayanan

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Hubungan Antar Lembaga

No	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1	Persyaratan pelayanan	3,63	90,91
2	Prosedur	3,59	89,92
3	Waktu Pelayanan	3,60	90,22
4	Biaya atau Tarif	3,87	96,94
5	Produk Layanan	3,65	91,40
6	Kompetensi Pelayanan	3,61	90,42
7	Perilaku Pelaksanaan	3,67	91,80
8	Penanganan Saran dan Masukan	3,69	92,39
9	Sarana dan Prasarana	3,67	91,80
10	Transparasi Pelayanan	3,69	92,39
11	Integritas Petugas Pelayanan	3,77	94,27
	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	3,64	91,12

Tabel 2.11. menunjukkan hasil penghitungan kuesioner unsur Pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga dengan jumlah responden keseluruhan sebanyak 363 orang pada periode Januari – Desember 2024. Pada pengolahan data hasil kuisoner semester II yang dijadikan sebagai basis data capaian salah satu indikator sasaran 1 yaitu “Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga” tahun 2024 dengan jumlah responden 253 orang pada periode Juli – Desember 2024 didapatkan hasil IKM 91,12 dengan mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik. Artinya, Pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga sudah memenuhi standar pelayanan secara keseluruhan. Meskipun demikian,

unsur-unsur pelayanan tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Dalam pelaksanaan tugas, monitoring dan evaluasi merupakan hal penting agar kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai perencanaan dan analisis perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam rangka peningkatan kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur. Dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada sasaran 1 dengan hasil melebihi target yang ditentukan dengan persentase capaian sebesar 104,74%. Berikut ini disampaikan analisis penyebab keberhasilan sebagai berikut :

1. Dukungan pimpinan, kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait dalam memberikan pelayanan merupakan hal penting dalam pelaksanaan tugas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.
2. Adanya koordinasi yang baik dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga Kepala Daerah dan Pejabat yang dilayani merasa puas terhadap fasilitasi yang diberikan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.
3. Melakukan kerjasama dan bersinergi dengan Protokol Provinsi Kalimantan Timur guna meningkatkan pelayanan terhadap Kepala Daerah, Pejabat dan OPD terkait, sehingga kinerja dari Hubungan Antar Lembaga meningkat.
4. Tanggap dan sigap dalam memberikan layanan fasilitasi kelembagaan serta cepat mencari solusi jika terjadi masalah dan kendala yang terjadi di lapangan.
5. Melakukan kolaborasi pelaksanaan kegiatan bersama mahasiswa Kaltim dan selalu memberikan motivasi serta dukungan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.
6. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan antar Lembaga baik Lembaga Nasional maupun Lembaga Internasional.
7. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara dan Kementrian Dalam Negeri untuk mendukung kelancaran

proses administrasi permohonan ijin perjalanan dinas luar negeri (PDLN)

8. Membantu permohonan serta pengiriman blanko e-KTP dari Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur ke Kementerian Dalam Negeri.
9. Melakukan Kerjasama dengan Kementerian, Kedutaan Besar, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Swasta.
10. Pelaksanaan kegiatan bersama Masyarakat Kaltim.
11. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.

2.2.3 Survei Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung (Pelayanan Fasilitas Promosi dan Informasi)

Survei kepuasan Pelayanan Fasilitas Promosi dan Informasi dimaksudkan untuk mengukur kepuasan mitra kerja dan wisatawan terhadap informasi mengenai pembangunan, potensi, dan peluang investasi yang ada di Kalimantan Timur maupun kegiatan-kegiatan fasilitas promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya yang dilaksanakan seksi Promosi dan Informasi.

Tabel 2.12.

Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 11 Unsur Pelayanan

Survei Kepuasan Wisatawan terhadap Informasi yang didapatkan

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Persyaratan pelayanan	3,922	98,04
2.	Prosedur	3,919	97,98
3.	Waktu Pelayanan	3,936	98,41
4.	Biaya atau Tarif	3,972	99,30
5.	Produk Layanan	3,952	98,81
6.	Kompetensi Pelayanan	3,952	98,81

7.	Perilaku Pelaksanaan	3,955	98,87
8.	Penanganan Saran dan Masukan	3,971	99,27
9.	Sarana dan Prasarana	3,948	98,71
10.	Transparasi Pelayanan	3,889	97,21
11.	Integritas Petugas Pelayanan	3,943	98,57
	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	3,902	97,56

Tabel 2.12. menunjukkan hasil penilaian unsur pelayanan dengan jumlah responden keseluruhan sebanyak 1.345 orang pada periode Januari – Desember 2024. Pada pengolahan data hasil kuisioner semester II yang dijadikan sebagai basis data capaian salah satu indikator sasaran 1 yaitu “Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitas Promosi dan Informasi” tahun 2024 dengan jumlah responden 754 orang pada periode Juli – Desember 2024 didapatkan hasil IKM 97,56 dengan mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur khususnya pelayanan fasilitas promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya Kalimantan Timur kepada mitra kerja dan pelayanan informasi pengunjung Anjungan Kaltim di TMII telah memenuhi standar pelayanan secara keseluruhan. Meskipun demikian, unsur-unsur pelayanan tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada sasaran 1 dengan hasil melebihi target yang ditentukan dengan persentase capaian sebesar 102,69%. Berikut ini disampaikan analisis penyebab keberhasilan sebagai berikut :

1. Fasilitas promosi yang diberikan kepada peserta kegiatan promosi di Anjungan Kaltim maupun di Jabodetabek/Luar Daerah seperti booth pameran yang atraktif dan bebas biaya, tampilan seni tari dan musik/lagu daerah serta lokasi promosi yang representatif.

2. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai di Anjungan Kaltim antara lain fasilitas kendaraan golf cart yang memadai (4 seat, 8 seat, dan 16 seat) untuk menjemput tamu ke lokasi acara di TMII, panggung dengan fasilitas sound system dan lighting, baju-baju adat daerah yang dapat digunakan oleh pengunjung, videotron dengan kapasitas 45.000 watt sebagai sarana promosi, bangunan-bangunan baru sebagai perwakilan rumah-rumah adat khas Kalimantan Timur hasil revitalisasi.
3. Tersedianya media informasi berupa media digital dan virtual reality (VR), informasi media cetak, serta informasi budaya Dayak di Lamin berupa replika patung dan topeng Hudoq, alat tenun ulap doyo', alat musik tradisional Sape' dan lesung yang dapat menjadi bahan informasi bagi pengunjung Anjungan Kaltim.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) di Anjungan Kaltim yang sigap dan siap melayani.

Secara garis besar dapat dilihat dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penghubung di Jakarta di bawah ini:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(12)	(13)
1.	Indeks kepuasan terhadap pelayanan Mess			91,80	92,00	92,30	97,19	92,00	
2.	Indeks kepuasan terhadap pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga			87,00	88,00	90,00	91,12	88,00	
3.	Indeks kepuasan terhadap pelayanan Fasilitas Promosi dan Informasi			95,00	96,00	96,50	97,56	96,00	

Dari penjabaran analisis kinerja Badan Penghubung diatas dan beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses pencapaian kinerja, berikut alternatif solusi yang diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan dimaksud antara lain:

- Mengevaluasi indikator yaitu pada dasar perhitungan yang capaian kinerjanya rendah atau menurun sehingga berpengaruh pada capaian kinerja indikator secara keseluruhan.
- Mengevaluasi kembali survei yang digunakan terkait unsur penilaian pelayanan agar tujuan pengukuran tingkat kepuasan dapat terukur dengan baik dan tujuan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik dapat terwujud.
- Menindaklanjuti keluhan/saran yang disampaikan pengguna layanan melalui survei kepuasan pelayanan Badan Penghubung. Apabila keluhan/saran yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti segera dikarenakan alasan teknis atau memerlukan biaya yang cukup besar maka akan dijadikan dasar untuk menyusun program/kegiatan tahun berikutnya.
- Menambah SDM yang dapat membantu kelancaran fasilitasi pelayanan mess, fasilitasi promosi dan informasi dan fasilitasi hubungan antar Lembaga agar pelayanan yang diberikan bisa lebih baik lagi mengingat masih terbatasnya jumlah SDM khususnya PNS.
- Berusahalebih meningkatkan lagi baik dari segi pelayanan, kebersihan, keramahan, responsif/kesigapan pegawai mess, kejelasan dan ketepatan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, makanan dan minuman yang disediakan, kenyamanan, kebersihan kamar, ruangan penunjang (mushalla, ruang makan, MCK) dan performa pelayanan mess secara keseluruhan selama menginap
- Berkoordinasi dengan Bapenda Prov. Kaltim terkait peningkatan PAD melalui retribusi Mess.
- Menjalankan program/kegiatan yang telah dianggarkan semaksimal mungkin untuk lebih menarik perhatian wisatawan baik nusantara maupun mancanegara agar tidak hanya sekedar “singgah” di Anjungan Kaltim, tetapi menaruh minat untuk berkunjung ke Kaltim, khususnya berwisata dan/atau berinvestasi.

- Aktif berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Prov. Kaltim, DPMPSTSP Prov. Kaltim, Disperindagkop dan UMKM Prov. Kaltim dan perangkat daerah lainnya serta Kabupaten/kota dalam hal Promosi Potensi Kalimantan Timur melalui pameran produk unggulan dan kolaborasi kegiatan promosi seni budaya daerah di Jabodetabek.
- Sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat daerah dan membuat himbauan atau surat edaran kepala daerah untuk menandatangani pakta integritas kepada seluruh perangkat daerah yang bertugas ke Jakarta memanfaatkan aset daerah yaitu mess kaltim di Jakarta.

Capaian kinerja tentu berkaitan erat dengan program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan pada pencapaiannya. Adapun Analisis terhadap Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan pada pencapaian target kinerja pelayanan Badan Penghubung antara lain

1. Program Pelayanan Penghubung

1.1. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

1.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang seksi Pelayanan dalam memberikan fasilitas akomodasi kepada ASN/Masyarakat Kalimantan Timur yang bertugas atau dinas ke Jakarta. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Seksi Pelayanan dengan melakukan kegiatan Bimtek Peningkatan Kualitas SDM Dalam Pelayanan Publik dan studi tiru ke sekolah tinggi pariwisata dengan tujuan dapat dipraktekkan langsung pada pelayanan di Mess Badan Penghubung Prov. Kaltim. Sosialisasi mengenai mess juga dilakukan dengan membagikan brosur dan promosi di sosial media agar masyarakat dan perangkat daerah dapat memanfaatkan aset daerah di Jakarta yaitu Mess Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.

1.1.2. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

Kegiatan ini merupakan memfasilitasi Kerjasama antar Lembaga yang diperuntukkan untuk seluruh perangkat

daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga Kab/Kota dengan Kementerian, Lembaga Nasional, Lembaga Internasional, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Swasta, juga dalam melayani Aparatur atau Pimpinan Daerah dan masyarakat/mahasiswa Kaltim.

Pada tahun 2024 seksi Hubungan Antar Lembaga telah melaksanakan Kegiatan Knowledge Exchange dan Workshop Public Speaking.

Kegiatan-kegiatan tersebut di maksudkan untuk memperkuat Kerjasama antar Lembaga dan memfasilitasi dalam melayani Aparatur dan Masyarakat Kaltim

1.1.3. Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

Pada tahun 2024, Seksi Promosi dan Informasi telah melaksanakan kegiatan berupa kegiatan rutin/Gelar Seni Budaya di Anjungan Kaltim, Festival Kuliner, Rangkaian HUT TMII, Pekan Lebaran, Pekan Liburan, Pekan Agustus, Pekan Natal Tahun Baru, Soul of Youth (aktivasi sanggar tari Anjungan), Workshop Tari, Workshop Musik dan Workshop Kerajinan, serta kegiatan untuk mendukung event TMII lainnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mempromosikan dan menginformasikan potensi-potensi produk unggulan dan seni budaya Kalimantan Timur kepada pengunjung di Anjungan Kaltim dan memfasilitasi Dinas/Badan yang membidangi seni budaya di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur untuk mempromosikan produk unggulan dan mempertunjukkan seni budaya, olahraga dan permainan tradisional.

1.1.4. Kegiatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan dilaksanakan beberapa kali oleh Seksi Promosi dan Informasi yaitu Festival Bebaya/Kaltim Exhibition di Mall Beachwalk Bali, Promosi Budaya di Bandara Soekarno Hatta, Promosi Seni Budaya

Daerah bersama Forkappsi di Yogyakarta, dan Roadshow Budaya ke Sekolah.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi mitra kerja dan membantu mempromosikan produk unggulan dan menampilkan seni budaya Kaltim di Jabodetabek maupun di luar daerah direspon sangat baik oleh mitra kerja sesuai feedback yang dihimpun. Sehingga mitra kerja mengharapkan untuk dapat dilaksanakan kegiatan promosi serupa di kota-kota lain.

1.1.5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Kegiatan ini merupakan koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemerintah Daerah dengan Lembaga sebagai penunjang Pelayanan Penghubung.

Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2024 yaitu kegiatan Rapat Koordinasi Forkappsi se-Indonesia di Kalimantan Timur

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan yang dituangkan dalam RENSTRA dan diturunkan ke RENJA untuk satu tahun kedepan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029.

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksanaan tugas pemerintah provinsi yang berkedudukan di Jakarta, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum maksimalnya pelayanan mess akibat kondisi gedung mess yang mengalami kebocoran sehingga mempengaruhi tingkat hunian mess di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu tugas Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah pengelolaan mess. Kondisi Gedung saat ini yang mengalami kebocoran yang menyebabkan kondisi dinding dan interior menjadi lembab dan beberapa kamar terdapat rayap yang merusak meubelair yang terbuat dari kayu sehingga kamar tersebut tidak dapat disewakan yang berakibat mempengaruhi tingkat hunian kamar mess. Oleh karena itu, diperlukan peremajaan sarana dan prasarana pada bangunan gedung Mess di Jl. Kramat II No. 34 dan 42 Jakarta agar menambah kenyamanan aparaturnya dan masyarakat Kalimantan Timur sehingga kamar yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal serta diharapkan dapat meningkatkan PAD.

2. Belum Maksimalnya Pelayanan Informasi secara digital tentang Promosi Seni Budaya, Pariwisata dan Peluang Investasi Daerah Kalimantan Timur

Fungsi penting lainnya yang diemban Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah dalam pelayanan informasi daerah dan fasilitasi penyelenggaraan promosi daerah yang ditujukan untuk meningkatkan dukungan dan penyebaran informasi daerah bagi pihak eksternal di Jakarta dan sekitarnya, maupun sebaliknya pengumpulan informasi dari pihak eksternal yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan Provinsi Kalimantan Timur yang dapat ditindaklanjuti atau didayagunakan oleh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur selain memiliki ragam budaya dan destinasi wisata yang menarik juga mempunyai peluang investasi yang beragam dan menguntungkan. Terutama setelah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) sehingga menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal di Kalimantan Timur.

Tugas Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur salah satunya adalah mengenalkan keanekaragaman budaya dan pariwisata di Kalimantan Timur serta memfasilitasi kegiatan promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya di wilayah Jabodetabek. Sarana dan prasarana promosi mengenai Kalimantan Timur terutama di Anjungan Kaltim dirasa masih kurang maksimal, sehingga perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi dalam rangka menunjang promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya serta peluang investasi agar Kalimantan Timur bisa sejajar dengan provinsi lain terutama dalam penggunaan teknologi yang lebih maju (*digital technology*).

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyampaian promosi dan informasi mengenai potensi pariwisata dan peluang investasi di Kalimantan Timur serta pelayanan fasilitasi promosi potensi daerah dibutuhkan masukan (*feedback*) dari mitra kerja dan masyarakat umum, salah satunya melalui survei kepuasan atas pelayanan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya di Jabodetabek serta pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Kaltim di TMII.

3. Belum optimalnya Anjungan Kaltim sebagai wadah promosi produk UMKM Kaltim

Pada revitalisasi tahun 2023, sudah disiapkan ruang pameran UMKM yang bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan produk-produk unggulan UMKM khas Kalimantan Timur, yang berupa produk kerajinan/kriya dan kain batik atau tenun/wastra. Pengunjung Anjungan Kaltim dapat melihat dan membeli secara langsung tanpa harus ke produsen asal. Selain itu, dengan adanya Ruang Pamer UMKM ini dapat membuka peluang

investasi bagi pelaku usaha sehingga produk unggulan Kaltim dapat dikenal lebih luas lagi.

4. Belum maksimalnya pemanfaatan fasilitasi kelembagaan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Prov. Kaltim

Badan Penghubung mempunyai kedudukan yang strategis sebagai duta/perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal fasilitasi kelembagaan antara Daerah dengan pusat dan lembaga, tetapi hal tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh Perangkat Daerah dan Lembaga di Kalimantan Timur. Sehingga mulai tahun 2022 pelayanan fasilitasi kelembagaan telah ditingkatkan dengan menginformasikan hal tersebut melalui website, media sosial Badan Penghubung dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Lembaga di Kalimantan Timur, dengan demikian tugas dan fungsi Badan Penghubung khususnya pada fasilitas kelembagaan dapat lebih maksimal.

5. Belum Maksimalnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat memenuhi kebutuhan Badan Penghubung Provinsi

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan serta keterampilan SDM aparatur pemerintah. Pelaksanaan pembangunan mengikutsertakan aparatur pemerintah bersama rakyat memegang peranan penting yaitu sebagai pelaksana dalam menjalankan pembangunan dan sebagai penggerak laju pembangunan. Aparatur pemerintah dituntut dalam menjalankan tugas dibidang masing-masing untuk lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi dan menuju kepada suatu efisiensi untuk dapat mencapai tujuan nasional. Untuk itu, pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah di segala bidang merupakan keharusan mutlak.

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah pegawai sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan 74 (tujuh puluh

empat) Non PNS, sedangkan sesuai Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja jumlah PNS yang ideal adalah 33 (tiga puluh tiga) orang sehingga jumlah PNS yang ada saat ini belum memadai untuk memberikan pelayanan yang maksimal ditambah adanya PNS yang memasuki masa purna tugas. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan kualitas dan kuantitas SDM adalah sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia (SDM) pada Anjungan Kaltim di TMII

Pada tahun 2023 Anjungan Kaltim di TMII mulai direvitalisasi dan didukung dengan sarana dan prasarana yang lebih meningkat dan berkembang ke arah digitalisasi layanan sehingga perlu ditunjang oleh SDM yang kompeten dan berkualitas agar sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya dapat berfungsi maksimal.

Selain itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyampaian promosi dan informasi mengenai potensi pariwisata dan peluang investasi di Kalimantan Timur dibutuhkan pula Sumber Daya Manusia yang kompeten dan mampu menjelaskan mengenai peluang promosi dan informasi Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui perangkat Teknologi Informasi.

Pengetahuan mengenai teknologi informasi, kondisi terkini Provinsi Kalimantan Timur, isu-isu terbaru tentang Ibu Kota Negara (IKN), peluang investasi, destinasi wisata unggulan serta seni budaya Kalimantan Timur perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, baik dari BPSDM Prov. Kaltim, Dinas Pariwisata Prov. Kaltim maupun Lembaga swasta.

b) Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kegiatan Fasilitasi Pejabat Pusat/Daerah

Salah satu tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah pelayanan fasilitasi antar Lembaga dan Aparatur. Sehingga perlu SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan serta keterampilan agar dapat menjalankan tugas

dengan efektif dan efisien serta dapat menghadapi tantangan dan dinamika yang ada. Juga diperlukan SDM yang mampu berkomunikasi dengan baik untuk dapat berkoordinasi dengan berbagai Lembaga baik ditingkat pusat maupun daerah, kemampuan negosiasi dan diplomasi untuk berinteraksi dengan banyak pihak yang memiliki kepentingan berbeda, memiliki pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dan regulasi, pemahaman tentang isu sosial, politik dan ekonomi, keterampilan teknologi informasi serta kemampuan kolaboratif yang kuat.

c) Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kegiatan Pelayanan Mess

Kondisi sarana dan prasarana mess Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini sudah mulai meningkat sehingga perlu ditunjang SDM yang kompeten dan berkualitas. SDM yang ada saat ini baik PNS dan Non PNS masih perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan baik dari BPSDM Prov. Kaltim maupun Lembaga swasta.

b. Isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis penyelenggaraan Badan Penghubung Prov. Kaltim satu tahun ke depan, meliputi:

1. Perlu Pengembangan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM

Salah satu tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah melakukan pembinaan kepada SDM Kaltim melalui pelatihan kemampuan kognitif dan kemampuan spiritual guna meningkatkan kualitas SDM Kaltim. Melalui pelatihan kemampuan kognitif dan spiritual diharapkan menghasilkan SDM yang memiliki tingkat keahlian yang lebih berkualitas secara optimal.

Selain itu upaya untuk meningkatkan jumlah SDM, Badan Penghubung mengajukan usulan penambahan pegawai (SDM)

melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk mengisi formasi sesuai Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

2. Diperlukan Peningkatan Kegiatan Promosi dan Fasilitasi dalam rangka Penyampaian Informasi

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur merupakan etalase daerah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta. Keberadaan dan perannya turut memberikan pengaruh terhadap pencitraan Provinsi Kalimantan Timur oleh pihak-pihak eksternal di Jakarta dan sekitarnya. Provinsi Kalimantan Timur dengan segenap potensi dan permasalahan yang dihadapi masih sangat membutuhkan pihak luar dalam pengelolaan pengembangan maupun penanganannya. Oleh karena itu, kegiatan promosi melalui Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu menstimulir timbulnya persepsi positif serta daya tarik, kemauan, kepercayaan pihak luar untuk berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

3. Diperlukan Sarana dan Prasarana yang Baik untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor

Peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang baik. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur memerlukan gedung dan interior gedung serta sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan pelayanan sehingga muncul rasa nyaman sebagai daya tarik bagi aparatur yang bertugas ke Jakarta dan masyarakat luas.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Idikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Luar Prov. Kaltim	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Kesekretariatan yang Ditindaklanjuti	100%	18,861,579,291	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Luar Prov. Kaltim	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Kesekretariatan yang Ditindaklanjuti	100%	17,273,496,000	
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	74.34				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	74.34		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	537,391,512	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	244,974,965	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	208,229,470	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	97,972,433	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	64,220,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	37,105,000	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	64,220,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	37,105,000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	55,220,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	19,105,000	

1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	55,220,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	19,105,000	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	49,881,042	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	12,642,088	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	40,401,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	21,940,444	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	7,778,814,332	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	8,912,401,954	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	7,212,453,560	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	8,545,730,845	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	193,329,399	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	161,880,000	
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149 Dokumen	180,031,873	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140 Dokumen	112,831,740	
1.2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2,000,000						
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	92,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	91,959,369	
1.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	98,999,500						

1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	41,636,626						
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1,526,920						
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,999,326						
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	38,110,380						
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74,04%	577,047,417	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	19.67%	54,240,000	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Pake	95,106,609						
1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	31 Dokumen	89,520,000						
1.4.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19 Dokumen	9,000,000						
1.4.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	383,420,808	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	54,240,000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	1,756,619,638	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100%	735,127,479	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	86,425,378	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52,895,269	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	775,242,651	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	242,616,573	
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	88,902,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	51,451,794	

1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	88,658,809	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	61,518,396	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 Laporan	631,304,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	300,960,000	
1.5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	86,086,300	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25,685,447	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	810,861,466	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	100%	105,922,002	
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	480,099,326	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	85,514,740	
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39 Unit	330,762,140	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20,407,262	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	4,156,122,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	100%	4,156,162,600	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11,560,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11,600,000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62 Laporan	1,829,162,600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1,829,162,600	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,315,400,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,315,400,000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	93%	3,203,085,700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	93%	3,064,667,000	

1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	531,330,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	589,806,111	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	798,207,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	876,735,909	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	426 Unit	117,051,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	116,860,000	
1.7.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	60,756,800	
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	1,417,196,700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	1,086,329,000	
1.7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	307 Unit	339,300,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	154 Unit	334,179,180	
2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Luar Prov. Kaltim	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitasi Promosi dan Informasi yang Ditindaklanjuti	100%	4,638,420,709	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Luar Prov. Kaltim	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat	0.26%	500,000,000	
								Persentase kerjasama antar lembaga yang difasilitasi	100%	350,000,000	
								Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam pameran produk unggulan, seni budaya dan media digital	100%	270,000,000	
2.1	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Luar Prov. Kaltim	Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	100%	4,638,420,709	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Luar Prov. Kaltim	Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	100%	1,120,000,000	
2.1.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	1,053,213,130	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	500,000,000	
2.1.2	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	972,697,066	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	319,029,640	

2.1.3	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2 Laporan	956,209,789	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	3 Laporan	197,883,027	
2.1.4	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	3 Laporan	1,319,070,762	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2 Laporan	72,116,973	
2.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	7 Laporan	337,229,962	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2 Laporan	30,970,360	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun oleh Badan Penghubung merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Timur yang tergabung dalam Kerukunan Masyarakat Kalimantan Timur (KMKT) dan Kerukunan Pelajar dan Mahasiswa Kalimantan Timur (KPMKT). Kegiatan bersama KMKT dan KPMKT ini menjadi bagian dari tugas dan fungsi Badan Penghubung sebagai penghubung untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan, menampung serta menggali aspirasi, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dan mahasiswa Kalimantan Timur di perantauan. Selain itu, kegiatan ini juga berperan sebagai sarana mempererat silaturahmi, memperkuat identitas daerah, serta meningkatkan dukungan diaspora Kalimantan Timur dalam promosi potensi, investasi, dan pengembangan daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Tabel 2.13.

Penelaahan Program/Kegiatan/Subkegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian Kegiatan	Target
1	Program Pelayanan Penghubung Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Kegiatan Bersama Masyarakat/Mahasiswa Kaltim	2 Kegiatan

Tabel 2.14.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGHUBUNG PROV. KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
T.1	Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan Profesionalisme Badan Penghubung Provinsi	Indeks kepuasan aparatur dan masyarakat terhadap Pelayanan Penghubung	Indeks	Definisi Operasional : Menggambarkan kepuasan terhadap pelayanan Badan Penghubung Prov. Kaltim terkait fasilitasi mess, fasilitasi hubungan antar Lembaga, dan fasilitasi promosi dan informasi yang didapatkan dari Rata-rata 3 survey kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh Badan Penghubung Prov. Kaltim. Rumus /Formulasi Perhitungan : IKM Pelayanan Banhub = average (3 Survey kepuasan Pelayanan Badan Penghubung) Sumber Data : Hasil dari Tabel Pengolahan IKM per Responden per Unsur Pelayanan pada 3 jenis Pelayanan Badan Penghubung yang diberikan Tipe Indikator : -Positif / Negatif
S.1.1	Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penghubung yang profesional dan berintegritas	1. Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Mess	Indeks	Definisi Operasional : menggambarkan kepuasan terhadap pelayanan Badan Penghubung Prov. Kaltim khususnya pada pelayanan mess. Rumus /Formulasi Perhitungan : IKM Pelayanan Mess = NRR Tertimbang per Unsur * 25

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
				Ket : ➤ IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat ➤ NRR : Nilai Rata-rata ➤ NRR per Unsur = $\Sigma \text{Nilai per Unsur} \div \Sigma \text{Kuisisioner terisi}$ ➤ NRR Tertimbang per Unsur = $\text{NRR per Unsur} \times 0,11$ Sumber Data : Hasil dari Tabel Pengolahan IKM per Responden per Unsur Pelayanan Mess Tipe Indikator : -Positif / Negatif
		2. Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga	Indeks	Definisi Operasional : menggambarkan kepuasan terhadap pelayanan Badan Penghubung Prov. Kaltim khususnya pada pelayanan fasilitasi Hubungan Antar Lembaga Rumus /Formulasi Perhitungan : IKM Pelayanan Fasilitasi Hubungan antar Lembaga= $\text{NRR Tertimbang per Unsur} \times 25$ Ket : ➤ IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat ➤ NRR : Nilai Rata-rata ➤ NRR per Unsur = $\Sigma \text{Nilai per Unsur} \div \Sigma \text{Kuisisioner terisi}$ ➤ NRR Tertimbang per Unsur = $\text{NRR per Unsur} \times 0,11$

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
				Sumber Data : Hasil dari Tabel Pengolahan IKM per Responden per Unsur Pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga Tipe Indikator : -Positif / Negatif
		3. Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Fasilitas Promosi dan Informasi	Indeks	Definisi Operasional : menggambarkan kepuasan terhadap pelayanan Badan Penghubung Prov. Kaltim khususnya pada pelayanan fasilitas Promosi dan Informasi. Rumus /Formulasi Perhitungan : IKM Pelayanan Fasilitas Promosi dan Informasi = NRR Tertimbang per Unsur * 25 Ket : ➤ IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat ➤ NRR : Nilai Rata-rata ➤ NRR per Unsur = Σ Nilai per Unsur $\div \Sigma$ Kuisioner terisi ➤ NRR Tertimbang per Unsur = NRR per Unsur $\times 0,11$ Sumber Data : Hasil dari Tabel Pengolahan IKM per Responden per Unsur Pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga Tipe Indikator : -Positif / Negatif

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
S.1.2	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi	Nilai	Definisi Operasional : menggambarkan sejauh mana Badan Penghubung Prov. Kaltim mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Badan Penghubung Prov. Kaltim secara terbuka dan pertanggungjawaban setiap kebijakan kepada publik yang tergambar melalui Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Badan Penghubung Prov. Kaltim. Rumus /Formulasi Perhitungan : Kertas Kerja LHE SAKIP Sumber Data : LHE SAKIP Tipe Indikator : -Positif / Negatif

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung Provinsi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Luar Prov. Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	74,34	
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Kesekretariatan yang Ditindaklanjuti	100%	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100%	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/Bulan	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140 Dokumen	
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Dokumen	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19,67%	
1.4.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100%	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	

1.5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	100%	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	100%	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Luar Prov. Kaltim	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	93%	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	
1.7.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	

1.7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	154 Unit	
2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Luar Prov. Kaltim	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat	0,26%	
			Persentase kerjasama antar lembaga yang difasilitasi	100%	
			Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam pameran produk unggulan, seni budaya dan media digital	100%	
2.1	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Luar Prov. Kaltim	Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	100%	
2.1.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	
2.1.2	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	
2.1.3	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	3 Laporan	
2.1.4	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2 Laporan	
2.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Luar Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2 Laporan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan Daerah merupakan upaya mengurangi kesenjangan antara perencanaan daerah dengan kinerja pembangunan untuk mewujudkan tujuan di masa yang akan datang. Suatu permasalahan daerah dianggap mempunyai nilai prioritas apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi.

Kebijakan nasional yang berkaitan dengan peran Badan Penghubung Provinsi memiliki implikasi strategis terhadap efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Badan Penghubung Provinsi dibentuk sebagai representasi resmi perwakilan pemerintah provinsi di Daerah Khusus Jakarta yang sekarang menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia, dengan tugas utama memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan pelayanan.

Pada dasarnya Badan Penghubung merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi terkait fasilitasi pimpinan, hubungan antar lembaga, promosi dan informasi yang mendukung program prioritas provinsi dalam mendukung program prioritas nasional. Akan tetapi, peran Badan Penghubung tidak hanya secara administratif tetapi dapat menjadi instrumen strategis bagi pemerintah provinsi yaitu dalam hal sinkronisasi hubungan antar lembaga pusat dan daerah, menjembatani komunikasi pemerintah pusat dan daerah, mendukung upaya pemerintah daerah dengan membuka ruang kerjasama daerah dengan mitra strategis (kedutaan, lembaga asing maupun sektor swasta), mempromosikan potensi daerah melalui kegiatan-kegiatan promosi dan pengelolaan mess sebagai fasilitas pendukung bagi kegiatan pemerintah maupun tamu daerah di Jakarta.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra PD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada gilirannya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.

A. Tujuan

Adapun tujuan Renstra Badan Penghubung Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan Profesionalisme Badan Penghubung Provinsi.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penghubung yang profesional dan berintegritas
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi

B. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penghubung yang profesional dan berintegritas.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini tujuan dan sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Penghubung

Program ini merupakan program teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Pelayanan Penghubung dan 5 sub kegiatan antara lain :

a) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat

Sub kegiatan ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pelayanan dan pengelolaan mess. Pada sub kegiatan ini Badan Penghubung memfasilitasi tamu/pejabat yang berkegiatan di mess dan juga berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah melalui pengelolaan Mess Kaltim yang ada di Jakarta. Badan Penghubung memberikan pelayanan yaitu belanja makanan dan minuman yang disiapkan untuk sarapan tamu yang menginap di mess dan untuk pelayanan fasilitasi pejabat yang berkegiatan di mess.

b) Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

Pada sub kegiatan ini Badan Penghubung berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pelayanan Hubungan antar Kelembagaan yaitu antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pusat dan Mitra strategis (Kedutaan Besar, Lembaga dan swasta) dalam kegiatan :

- 1) Fasilitasi Kelembagaan Aparatur (Public Lecture) merupakan forum akademik yang bertujuan memberikan wawasan langsung kepada mahasiswa dan dosen mengenai isu-isu internasional, sosial, ekonomi maupun peluang kerjasama strategis. Diharapkan terjadi transfer pengetahuan, serta terjalin jejaring antara perguruan tinggi dengan perwakilan negara maupun mitra swasta, selain memperkaya pemahaman akademik, kegiatan ini juga diharapkan membuka peluang kolaborasi penelitian,

pertukaran pelajar dan pengembangan kapasitas SDM.

- 2) Fasilitasi Hubungan Kerjasama Kelembagaan (International Relation) untuk memperkuat komunikasi dan Kerjasama yang saling menguntungkan. Melalui pertemuan ini dapat membuka peluang Kerjasama pemerintah daerah untuk mempromosikan potensi ekonomi, investasi, pariwisata, budaya serta sumber daya manusia, diharapkan dengan kegiatan ini mampu menghasilkan Kerjasama nyata di bidang Pendidikan, lingkungan, maupun perdagangan

- c) Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

Pada sub kegiatan ini Badan Penghubung berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam pengisian kegiatan di Anjungan Kaltim dan TMII sesuai dengan calendar of event seperti HUT TMII, Soul of Youth, Pekan Lebaran, Pekan Liburan, Pekan HUT RI dan Pekan Nataru serta pengadaan perlengkapan seni budaya seperti alat musik dan pakaian daerah di Anjungan Kaltim. Rencana program kegiatan dimaksud merupakan hasil koordinasi dan masukan/feedback dengan beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim dan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota se Kaltim.

- d) Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

Pada sub kegiatan ini Badan Penghubung berkolaborasi dengan FORKAPPSI (Forum Komunikasi Penghubung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) dalam pengisian kegiatan di bidang seni budaya dan promosi produk UMKM Daerah, terutama kegiatan Color of Culture di Kota Tua Jakarta dan Roadshow Budaya di beberapa Universitas di wilayah Jabodetabek. Kolaborasi yang diadakan merupakan hasil kesepakatan pada Rakernas

Forkappsi yang diadakan setiap tahun secara bergantian di beberapa Provinsi untuk meningkatkan kolaborasi di bidang seni budaya dan promosi produk unggulan/UMKM.

e) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Pada sub kegiatan ini Badan Penghubung berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperkuat sinergi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat lebih terarah, dan program daerah dapat terakomodasi dalam rencana nasional. Koordinasi dengan Lembaga, Swasta dan Kedutaan dalam hal investasi dan inovasi pembangunan, agar dapat membuka peluang Kerjasama pemerintah daerah dengan mitra strategis (Kedutaan, Lembaga, Swasta), dan koordinasi dengan masyarakat/diaspora Kaltim untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan program-program prioritas Gubernur dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi

Program ini merupakan program yang dapat digunakan oleh setiap perangkat daerah baik secara teknis maupun manajerial, antara lain :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan atau Lapangan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 3.1

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan Profesionalisme Pemerintahan	1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan penghubung yang profesional dan berintegritas	Program Pelayanan Penghubung Pelaksanaan Pelayanan Penghubung - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat - Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya - Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
	2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

		Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan atau Lapangan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
--	--	---

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Uraian Garis Besar Tentang Pertimbangan Rumusan, dan Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Serta Penjelasan Pendanaan dan Kesesuaian dengan RKPD

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra PD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada dasarnya adalah untuk mencapai sasaran.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam satu tahun mendatang.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan pada satu tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategi pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan sampai dengan sub kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Pagu indikatif Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur untuk Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebesar Rp18.393.496.000,- yang akan digunakan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas dan fungsinya, antara lain pelayanan fasilitasi baik pejabat daerah/pusat maupun perangkat daerah yang bertugas ke Jakarta, fasilitasi promosi dan informasi di Anjungan Kaltim di TMII sebagai Etalase Seni Budaya

Kalimantan Timur, melalui kegiatan peningkatan fasilitasi promosi/pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya yang dilaksanakan baik di Anjungan Kaltim maupun Jabodetabek dan peningkatan sarana prasarana Mess Kaltim di Jakarta agar dapat memberikan pelayanan prima dan memadai serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Retribusi Mess dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung Provinsi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Kesekretariatan yang Ditindaklanjuti	Luar Prov. Kaltim	100%	17.273.496.000	APBD		100%	17.840.657.054
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		74,34				74,34	
05.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	Luar Prov. Kaltim	100%	244.974.965	APBD		100%	521.660.700
05.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	11 Dokumen	97.972.433	APBD		11 Dokumen	166.187.400
05.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	2 Dokumen	37.105.000	APBD		2 Dokumen	64.220.000
05.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	2 Dokumen	37.105.000	APBD		2 Dokumen	64.220.000
05.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	2 Dokumen	19.105.000	APBD		2 Dokumen	55.220.000
05.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Luar Prov. Kaltim	2 Dokumen	19.105.000	APBD		2 Dokumen	55.220.000

05.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Luar Prov. Kaltim	8 Laporan	12.642.088	APBD		8 Laporan	76.192.050
05.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Prov. Kaltim	8 Laporan	21.940.444	APBD		8 Laporan	40.401.250
05.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Luar Prov. Kaltim	100%	8.912.401.954	APBD		100%	3.475.097.700
05.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Luar Prov. Kaltim	61 Orang/Bulan	8.545.730.845	APBD		61 Orang/Bulan	2.965.137.700
05.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Luar Prov. Kaltim	24 Dokumen	161.880.000	APBD		24 Dokumen	237.960.000
05.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Luar Prov. Kaltim	140 Dokumen	112.831.740	APBD		140 Dokumen	180.000.000
05.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Luar Prov. Kaltim	5 Dokumen	91.959.369	APBD		5 Dokumen	92.000.000
05.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar Prov. Kaltim	19,67%	54.240.000	APBD		19,67%	234.982.400
05.07.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar Prov. Kaltim	11 Orang	54.240.000	APBD		11 Orang	234.982.400
05.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Luar Prov. Kaltim	100%	735.127.479	APBD		100%	1.507.269.975
05.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Luar Prov. Kaltim	1 Paket	52.895.269	APBD		1 Paket	103.686.975
05.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Luar Prov. Kaltim	11 Paket	242.616.573	APBD		11 Paket	504.873.100
05.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Luar Prov. Kaltim	2 Paket	51.451.794	APBD		2 Paket	88.200.000
05.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Luar Prov. Kaltim	2 Paket	61.518.396	APBD		2 Paket	103.622.900
05.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Prov. Kaltim	33 Laporan	300.960.000	APBD		79 Laporan	706.887.000

05.07.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Luar Prov. Kaltim	1 Dokumen	25.685.447	APBD		0 Dokumen	-
05.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Luar Prov. Kaltim	100%	105.922.002	APBD		100%	1.611.401.436
05.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Luar Prov. Kaltim	4 Unit	85.514.740	APBD		24 Unit	564.691.936
05.07.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Luar Prov. Kaltim	5 Unit	20.407.262	APBD		50 Unit	1.046.709.500
05.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	Luar Prov. Kaltim	100%	4.156.162.600	APBD		100%	5.897.723.600
05.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Luar Prov. Kaltim	2 Laporan	11.600.000	APBD		2 Laporan	11.560.000
05.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Luar Prov. Kaltim	60 Laporan	1.829.162.600	APBD		48 Laporan	1.834.512.800
05.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Luar Prov. Kaltim	12 Laporan	2.315.400.000	APBD		12 Laporan	4.051.650.800
05.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	Luar Prov. Kaltim	93%	3.064.667.000	APBD		93%	4.592.521.243
05.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Luar Prov. Kaltim	5 Unit	589.806.111	APBD		5 Unit	461.047.635
05.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Luar Prov. Kaltim	33 Unit	876.735.909	APBD		33 Unit	744.804.478
05.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Luar Prov. Kaltim	62 unit	116.860.000	APBD		62 Unit	445.815.050
05.07.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Luar Prov. Kaltim	2 Unit	60.756.800	APBD		3 Unit	143.831.703
05.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Luar Prov. Kaltim	11 Unit	1.086.329.000	APBD		11 Unit	2.719.022.377
05.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Luar Prov. Kaltim	154 Unit	334.179.180	APBD		154 Unit	78.000.000

05.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat	Luar Prov. Kaltim	0,26%	1.120.000.000	APBD		0,31%	5.027.383.399
		Persentase kerjasama antar lembaga yang difasilitasi		100%				100%	
		Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam pameran produk unggulan, seni budaya dan media digital		100%				100%	
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	Luar Prov. Kaltim	100%	1.120.000.000	APBD		100%	5.027.383.399
05.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Luar Prov. Kaltim	2 Laporan	500.000.000	APBD		2 Laporan	1.033.216.200
05.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Luar Prov. Kaltim	3 Laporan	319.029.640	APBD		3 Laporan	824.844.410
05.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Luar Prov. Kaltim	3 Laporan	197.883.027	APBD		4 Laporan	956.209.789
05.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Luar Prov. Kaltim	2 Laporan	72.116.973	APBD		2 Laporan	1.728.024.000
05.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Luar Prov. Kaltim	2 Laporan	30.970.360	APBD		2 Laporan	485.089.000

BAB V

PENUTUP

Secara umum pelaksanaan program kegiatan pada Renja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 dapat dikategorikan sangat baik. Akan tetapi, masih perlu adanya komitmen dan konsistensi dari pimpinan agar keputusan/kebijakan yang ditetapkan dapat mendukung pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing PD sehingga mendukung kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta untuk mendukung program Pemerintah Daerah yang akan datang yaitu periode 2025-2029, sehingga nantinya akan terwujud sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, sasaran dan target kinerja/hasil keluaran yang semakin baik yang dapat dipertanggungjawabkan dari tahun ke tahun.

Dengan adanya Renja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun perangkat daerah yang membidangi fungsi lainnya.

RENJA TAHUN 2026 INSPEKTORAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. Pengertian Rencana Kerja

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Kepemimpinan yang baik (good governance) saat ini merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan itu merupakan hak yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menghadapi hal tersebut, organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan transparan, sehingga dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun salah satu bentuk perwujudan sikap tersebut adalah dengan menyusun Rencana Strategik (*Strategic plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta laporan pertanggung jawaban kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan azas keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas kinerja.

Rencana Kinerja Ini merupakan suatu dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan uraian lebih mendetail dari rencana-rencana strategis, penetapan kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai langkah untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan,

sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan pesat.

Pada akhir tahun Rencana Kinerja tersebut diukur capaian kinerjanya (*performance result*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi./ OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

b. Proses Penyusunan Renja

Proses Penyusunan Rencana Kerja Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan kinerjanya di tahun 2025 yang menjadi acuan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah : 1) Tahap Persiapan Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dimulai Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2025 disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir, penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Provinsi, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda Provinsi

Kalimantan Timur. 3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi dokumen Rancangan Akhir RKPD dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD kemudian menjadi acuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Keterkaitan Renja dengan RKPD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. RKPD Provinsi Kalimantan Timur yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026.

d. Keterkaitan Renja dengan Renstra

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan khususnya pada bidang pengawasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh PD dan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

e. Keterkaitan Renja dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dan kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK-RI, BPKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui berbagai proses pembahasan dengan baik, yang bersifat internal maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Provinsi Kalimantan dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang nanti diharapkan sebagai tindak lanjutnya dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan konstitusional Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Timur adalah Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
4. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6987);

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6987);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4890);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6041);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6323);
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 11);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 89 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 46);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 893.3/K.699/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

1.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka penyusunan Rencana Kerja ini telah memperhitungkan besaran organisasi dan sekurang-kurangnya telah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

- a. Kemampuan keuangan daerah.
- b. Kebutuhan daerah.
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus dicapai.
- d. Jenis dan banyaknya tugas
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis
- f. Jumlah dan kepadatan penduduk
- g. Potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani.
- h. Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan.

i. Sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Rencana Kerja ini antara lain adalah :

- (1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.
- (2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2026.
- (2) Sebagai satu acuan resmi bagi seluruh PNS Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan baik antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan dalam pelaksanaan tugas – tugas pengawasan.
- (4) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 .
- (5) Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Good Governance.
- (6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.

1.4. Sistematikan Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

Dalam penulisan Rencana Kerja ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sesuai dengan program dan kegiatan baik yang telah dicapai sesuai target, tidak memenuhi target maupun yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Kategori keberhasilan capaian indikator kinerja dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian **>95% kategori Sangat Berhasil**, **80-95% kategori Berhasil**, **50 s/d <80% kategori Cukup Berhasil** dan capaian **<50% kategori Kurang Berhasil**.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar **97,57 % (Sangat Berhasil)** sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Skor	3,50	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3,50	3,20	91,43

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	Meningkatkan Pengendalian Pencegahan KKN	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persen	75,00	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	75,00	73,22	97,63	
3.	Menigkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah	Level	3	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	3	3	100,00	
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah			Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	80	80	100	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	-	-	-	
		Indek/Skor Kepuasan Masyarakat	Indeks/ Skor	85	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	85	83,98	98,80	

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024, yaitu terdapat 3 sasaran dengan 5 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan yang didukung program, kegiatan dan sub kegiatan, ketersediaan anggaran dan SDM serta waktu pelaksanaan, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 3 sasaran dan 5 indikator sasaran telah dicapai sebesar **97,57 %**.

Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun ini :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Skor	3,50	3,20	91,43

Pencapaian atas Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 dari target 3,50 skor telah dicapai 3,20 skor dengan capaian 91,43 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaiannya belum 100%, dari hasil pendampingan dan

evaluasi yang sudah dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah bahwa Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP belum memberikan keyakinan yang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan. Meskipun dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi namun pengendalian yang dibangun dan dikembangkan belum dapat sepenuhnya efektif dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketercapaian tujuannya. Penilaian atas beberapa komponen antara lain terhadap :

- a. Komponen Penetapan Tujuan, masih terdapat sasaran dan indikator sasaran strategis pemda, perangkat daerah, program dan kegiatan belum berorientasi *outcome* dan target yang tidak SMART dan tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya, beberapa OPD tidak tercapai realisasinya, adanya permasalahan meskipun tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan asset, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko terjadinya korupsi berdasarkan hasil pengawasan eksternal.
- b. Komponen Struktur dan Proses, terhadap pengelolaan kebijakan risiko pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemda Prov. Kaltim belum sepenuhnya dikelola dan belum dilakukan reuiu, meskipun seluruh aktivitas pengendalian dan seluruh program dan kegiatan dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten dan dengan metodologi yang tepat, namun hasil evaluasi terpisah belum ditindaklanjuti seluruhnya.

Dari target capaian Maturitas SPIP pada Level 3 skor 3,50 dicapai pada level 3 skor 3,20, hal ini disebabkan antara lain dari hasil evaluasi ada beberapa komponen yang belum mencapai skor 3, yaitu :

- a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika.
- b. Kepemimpinan yang kondusif.
- c. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- d. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM
- e. Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
- f. Analisis Risiko
- g. Reuiu atas Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Pengendalian Fisik atas Aset.

- i. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi kejadian
- j. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
- k. Informasi yang relevan
- l. Komunikasi yang efektif
- m. Pemantauan yang berkelanjutan
- n. Evaluasi terpisah
- o. Efektivitas dan Efisiensi Capaian Outcome dan Output.

Dari hasil pendampingan dan evaluasi yang dilakukan terhadap Penyelenggaraan Maturitas SPIP pada perangkat daerah disimpulkan pula ada beberapa faktor pendorong dan faktor yang menghambat, yaitu :

a. Faktor Pendorong :

- 1. Dukungan Organisasi/Perangkat Daerah.
- 2. Dukungan Peraturan dan Kebijakan yang mendukung implementasi SPIP.
- 3. Dukungan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi dari Aparatur Pengawasan
- 4. Dukungan Teknologi / Aplikasi Penilaian Maturitas SPIP dari BPKP
- 5. Adanya Keterlibatan Stakeholder
- 6. Pengembangan Kapasitas melalui Diklat/Bimtek/Sosialisasi/FGD Maturitas SPIP.
- 7. Pengelolaan Risiko / Manajemen Risiko Maturitas SPIP.
- 8. Tim Penjamin Kualitas SPIP Perangkat Daerah

b. Faktor Penghambat :

- 1. Kurangnya Komitmen Pimpinan terhadap Penyelenggaraan Maturitas SPIP.
- 2. Belum semua Perangkat Daerah paham apa itu Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi.
- 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Anggaran penyelenggaraan Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah.
- 4. Kurangnya Komitmen Manajemen.
- 5. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.
- 6. Perubahan Teknologi dan Perubahan Regulasi terkait Penyelenggaraan Maturitas SPIP
- 7. Ketergantungan pada salah satu ASN dalam pengembangan dan implementasi SPIP.
- 8. Kurangnya Komunikasi

9. Kurangnya Pelatihan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP.\

10. Data dukung yang disampaikan belum semua sesuai.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian penyelenggaraan Maturitas SPIP di perangkat daerah akan dilakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Meningkatkan Komitmen Manajemen terhadap dukungan dan komitmen penuh untuk pengembangan dan implementasi SPIP.
- b. Mengalokasikan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Anggaran yang memadai pada Perangkat Daerah.
- c. Meningkatkan Komunikasi diantara Pelaksana dan Tim Penyelenggaraan Maturitas SPIP
- d. Meningkatkan Peran Organisasi dan Perangkat Daerah dalam mengembangkan budaya organisasi yang mendukung peningkatan maturitas SPIP.
- e. Mengembangkan Sistem Penghargaan untuk meningkatkan motivasi dalam penyelenggaraan Maturitas SPIP.
- f. Meningkatkan Pelaksanaan Sosialisasi/Diklat/Bimtek dan FGD Penyelenggaraan Maturitas SPIP.
- g. Mengembangkan Sistem Pemantauan dan Evaluasi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja SPIP secara terus-menerus.
- h. Melakukan Pembinaan dan Pemantauan atas Pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada Tingkat Strategis Pemprov. Kaltim dan Organisasi Perangkat Daerah.
- i. Mendorong Kepala Perangkat Daerah agar Penerapan Manajemen Risiko sebagai Indikator Penilaian Kinerja,
- j. Melakukan penyelesaian tindak lanjut atas hasil rekomendasi yang disampaikan pada Laporan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP.
- k. Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- l. Melakukan Kegiatan Penjamin Kualitas Maturitas SPIP dan Fasilitasi serta Asistensi Maturitas SPIP.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pengendalian Pencegahan KKN

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persen	75,00	73,22	97,63

Pencapaian atas Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada tahun 2024 dari target 75,00 % telah dicapai 73,22% dengan capaian 97,63%. Hal ini menunjukkan bahwa capaiannya belum 100%, dari hasil pemantauan dan evaluasi yang sudah dilaksanakan pada pelaksanaan Survey Penilaian Integritas dan Korsupgah MCP KPK Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dari beberapa komponen yang menjadi penilaian yaitu pada pelaksanaan SPI, yaitu pada komponen :

- a. Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas dicapai : 75,25%
- b. Pengelolaan Anggaran dicapai : 71,53%
- c. Pengelolaan PBJ dicapai : 61,57%
- d. Pengelolaan SDM dicapai : 63,27
- e. Perdagangan Pengaruh (Trading in influence) dicapai : 78,03%
- f. Sosialisasi Antikorupsi dicapai : 68,13%
- g. Transparansi dicapai : 83,55%

Sedangkan pada Korsupgah MCP KPK tahun 2024, yaitu pada 8 area :

- a. Perencanaan Pembangunan Daerah dicapai :100%
- b. Penganggaran APBD dicapai : 95,02%
- c. Pengadaan Barang dan Jasa dicapai : 47,45%
- d. Pelayanan Publik dicapai : 74,71%
- e. Kapabilitas APIP dicapai : 77,51%
- f. Manajemen ASN dicapai : 77,41%
- g. Pengelolaan BMD dicapai : 39,41%
- h. Optimalisasi Pajak dicapai : 77,98%

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi menunjukan bahwa pencapaiannya berada pada rata-rata : 39,41 % sd 100%.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme disimpulkan pula ada beberapa faktor pendorong dan faktor yang menghambat, yaitu :

a. Faktor Pendorong :

1. Dukungan Organisasi/Perangkat Daerah.
2. Dukungan Peraturan dan Kebijakan yang mendukung pelaksanaan SPI dan MCP KPK
3. Tersedianya data Responden baik Internal, Pengguna Layanan dan Ekspert.
4. Adanya Keterlibatan Stakeholder
5. Dukungan Aplikasi baik SPI dan MCP KPK.
6. Adanya PIC SPI dan MCP KPK

b. Faktor Penghambat :

1. Kurangnya Respon atas Kuesioner SPI dan Data Dukung atas area MCP KPK pada beberapa perangkat daerah pengampu.
2. Kurangnya komitmen atas pemenuhan data dukung baik data responden SPI dan data dukung MCP KPK dari beberapa Perangkat Daerah pengampu.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sosialisasi baik pelaksanaan SPI dan MCP KPK.
4. Setiap tahun penilaian atas SPI dan MCP KPK yang selalu berubah-ubah.
5. Masih ditemukan KKN pada Pengadaan Barang/Jasa, praktek gratifikasi, penyelewengan anggaran pada perjalanan dinas, penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) akan dilakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Meningkatkan Komitmen Manajemen terhadap dukungan dan komitmen penuh untuk pemenuhan kuesioner SPI dan data dukung MCP KPK.
- b. Meningkatkan Komunikasi diantara PIC dengan Perangkat Daerah Pengampu baik pelaksanaan SPI dan MCP KPK
- c. Meningkatkan Pelaksanaan Sosialisasi baik Pelaksanaan SPI dan MCP KPK.
- d. Mengembangkan Sistem Pemantauan dan Evaluasi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPI dan MCP KPK secara terus-menerus.
- e. Melakukan Pembinaan dan Pemantauan atas Pelaksanaan SPI dan MCP KPK bagi Perangkat Daerah.
- f. Melakukan penyelesaian tindak lanjut atas hasil rekomendasi yang disampaikan pada Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan SPI dan MCP KPK.

- g. Membentuk Tim Pendampingan dan Pemantauan Pelaksanaan SPI dan MCP KPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah	Level	3	3	100

Pencapaian atas Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah pada tahun 2024 dari target Level 3 telah dicapai Level 3 dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaiannya telah tercapai 100%, dari hasil pemantauan dan evaluasi yang sudah dilaksanakan pada pelaksanaan Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berada di level 3 dengan skor 3,000 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP. Namun pada pencapaian Level 3 tersebut, masih terdapat beberapa perbaikan/rekomendasi yang harus dilaksanakan pada tahun berikutnya, yaitu :

1. Mendokumentasikan proses rekrutmen (jalur CPNS/jalur pindahan) agar dapat diuji kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.
2. Menyusun peta kompetensi yang mencakup standar kompetensi dan Gap kompetensi sesuai dengan SKJ Menpan No. 18/2022 dan Permenpan 1/2023 dan Perka BKN 3/2023 dan Perban BPKP 5/2023, sehingga peta kompetensi seluruh ASN tersusun dalam satu dokumen.
3. Menyusun laporan realisasi pelaksanaan pengembangan kompetensi atau sejenisnya yang mencakup kegiatan dan realisasi jam by name.
4. Mengimplementasikan Surat Keputusan Inspektur Prov. Kaltim Nomor 700/1702/Itprov/XII/2022 tentang Pedoman Reward dan Punishment ASN.
5. Menyusun kertas kerja penyusunan PKPT sesuai dengan Perdep PKD BPKP Nomor 8 Tahun 2020 yang menginventarisasi area pengawasan secara keseluruhan dalam *Audit Universe* serta menjalankan pemrioritasan berdasarkan factor risiko.
6. Melaksanakan pembahasan PKPT dengan pihak pimpinan daerah (Gubernur/Sekda/Asisten) sebelum PKPT disahkan dan terdokumentasi dalam Notulen Rapat.

7. Berkoordinasi dengan Tim Telaah Sejawat DPN AAIPI terkait penyelenggaraan telaah sejawat oleh Inspektorat Daerah Provinsi lain.
8. Mendokumentasikan SPT, Laporan, Matrik Tindak Lanjut hasil Telaah Sejawat dan bukti pengiriman hasil tindak lanjut ke Inspektorat Daerah yang menerbitkan Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern.
9. Menyusun laporan realisasi PKPT yang membandingkan antara rencana dan realisasi dan disampaikan kepada Kepala Daerah.
10. Membuat Ikhtisar Hasil Pengawasan Semesteran (IHPS) dengan melengkapi temuan sesuai dengan format pada Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2011 dan Penyampaian IHPS berikutnya dilaksanakan tepat waktu yaitu tanggal 1 September untuk IHPS Semester I dan tanggal 1 Maret untuk IHPS Semester II.
11. Tim Audit Ketaatan agar mendokumentasikan *entry meeting* dengan Berita Acara/Notula yang mencantumkan kesepakatan kriteria pada setiap penugasan.
12. Tim Audit Ketaatan untuk menyusun kertas kerja penilaian SPI dan kertas kerja survey pendahuluan (dapat menggunakan referensi Peraturan Deputi Bidwas PKD BPKP Nomor 7 Tahun 2020) pada setiap penugasan.
13. Tim Audit pada saat *entry meeting* untuk mencantumkan kesepakatan parameter penilaian yang digunakan dalam audit kinerja dan mendokumentasikannya dalam Berita Acara / Notula pada setiap penugasan.
14. Tim Audit untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama dan efektivitas pengendalian, termasuk risiko yang teridentifikasi dalam *Audit Universe* di penyusunan PKPT pada setiap penugasan.
15. Tim Audit untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan kinerja dalam KKA pada setiap penugasan.
16. Memantau/memonitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit kinerja secara berkala.
17. Mendokumentasikan kegiatan *entry meeting* dan pemaparan hasil penjamin kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dalam Berita Acara/Natula kegiatan yang menjelaskan substansi hasil kegiatan.
18. *Mengupdate*/memperbaharui pemantauan renaksi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dengan informasi tindak lanjut yang telah dilaksanakan.
19. Melengkapi Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan bimbingan Teknis/Narasumber dengan pernyataan tanggung jawab dari mitra kerja yang mencakup klausul bahwa mitra kerja bertanggung jawab atas akibat dari pelaksanaan sarana jasa

Advisory sehingga APIP tidak mengambil alih tanggung jawab mitra kerja dalam pengambilan keputusan.

20. Mengidentifikasi risiko/permasalahan signifikan yang dihadapi perangkat daerah serta menyampaikannya dalam bentuk etensi kepada Sekretaris Daerah/Kepala Daerah.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah disimpulkan pula ada beberapa faktor pendorong dan faktor yang menghambat, yaitu :

a. Faktor Pendorong :

1. Dukungan dan Komitmen Inspektur Dearah.
2. Dukungan Peraturan dan Kebijakan yang mendukung pelaksanaan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Kaltim
3. Dukungan Anggaran dan SDM Pengawasan yang tersedia.
4. Adanya dukungan keterlibatan dalam hal ini BPKP Perwakilan dalam pelaksanaan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Prov. Kaltim.
5. Dukungan aplikasi Kapabilitas APIP dari BPKP
6. Pembentukan Tim Kapabilitas APIP Inspektorat Daeah Prov. Kaltim.

b. Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek Kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim.
2. Kurang terdokumentasikannya data dukung terkait pemenuhan data Kapabilitas APIP pada setiap elemen penilaian.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah akan dilakukan upaya-upaya antara lain :

1. Memaksimalkan peranan dan fungsi Tim Kapabilitas APIP Inspektorat Daeah Prov. Kaltim.
2. Mengoptimalnya pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek Kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim.
3. Melaksanakan dokumentasi yang baik atas data dukung terkait pemenuhan data Kapabilitas APIP pada setiap elemen penilaian.

4. Melakukan penyelesaian tindak lanjut atas hasil rekomendasi yang disampaikan pada Laporan hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah.

Sasaran 3 : Menigkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2	Nilai SAKIP Inspektorat Dearah	Nilai	80	80	100

Pencapaian atas Nilai SAKIP Inspektorat Daereah pada tahun 2024 dari target nilai 80 telah dicapai nilai 80 dengan predikat A (Memuaskan) dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaiannya telah tercapai 100%, dari hasil pemantauan dan evaluasi yang sudah dilaksanakan pada Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2024 telah menunjukan bahwa nilai SAKIP Inspekrorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada predikat A dengan nilai 80. Namun pada pencapaian predikat A nilai 80 ini, masih terdapat beberapa perbaikan/rekomendasi yang harus dilaksanakan pada tahun berikutnya terutama pada pencapaian komponen/sub komponen/kritreria dimana nilainya harus sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu :

No.	Kompoenen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2022	Nilai 2023	Tambah /Kurang /Tetap
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,20	22,20	0,00
2.	Pengukuran Kinerja	25	16,00	18,00	2,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,00	9,00	0,00
4.	Evaluasi Kinerja	10	14,00	20,00	6,00
5.	Capaian Kinerja	20	13,60	11,20	-2,40
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,80	80,40	5,60
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	

Dari tabel diatas, dapat disampaikan dari hasil evaluasi ada beberapa komponen/ sub komponen/kriteria dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi yang masih dibawah bobot yang dipersyaratkan, bahkan untuk Capaian Kinerja masih jauh dari bobot yang dipersyaratkan. Terhadap kondisi permasalahan yang telag dikemukakan di atas, maka drekomendasikan kepada seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim agar melakukan perbaikan terhadap capaian kinerja sasaran dan capaian kinerja lainnya agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap Nilai SAKIP Inspektorat Daerah disimpulkan pula ada beberapa faktor pendorong dan faktor yang menghambat, yaitu :

a. Faktor Pendorong :

1. Dukungan dan Komitmen Inspektur Dearah.
2. Dukungan Peraturan dan Kebijakan yang mendukung pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
3. Adanya Renstra, Renja, dan DPA Inspektorat Daerah Prov. Kaltim
4. Dukungan Anggaran dan SDM Pengawasan yang tersedia.
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Prov. Kaltim
6. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP perangkat daerah di lingkungan Pemprov. Kaltim
7. Adanya dukungan keterlibatan Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah.
8. Dukungan aplikasi e sakip kaltim yang dikembangkan oleh Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim
9. Pembentukan Tim Penyusun SAKIP Inspektorat Daeah Prov. Kaltim.

b. Faktor Penghambat :

1. Adanya perbedaan persepsi atas data dukung penilaian SAKIP pada Perangkat Daerah oleh Tim Evaluator dan Perangkat Daerah.
2. Data dukung atas Penilaian SAKIP belum dibuat baku sesuai dengan pedoman penilaian SAKIP yang dibuat.
3. Pedoman atas Penilaian SAKIP sering berubah-ubah dan perlu dilakukan pembaharuan dan sosialisasi kepada perangkat daerah dan Tim Evaluator.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian nilai SAKIP Inspektorat Daerah akan dilakukan upaya-upaya antara lain :

1. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut atas hasil rekomendasi yang disampaikan pada Laporan hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah.
2. Melakukan koordinasi dengan Tim Evaluator SAKIP.
3. Diperluklan persepsi atas data dukung penilaian SAKIP pada Perangkat Daerah oleh Tim Evaluator dan Perangkat Daerah.

4. Diperlukan adanya data dukung yang baku atas Penilaian SAKIP sesuai dengan pedoman penilaian SAKIP yang dibuat.

Sasaran 3 : Menigkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3	Indeks/Skor Kepuasan Masyarakat	Indeks/Skor	85	83,98	98,80

Pencapaian atas Indeks/Skor Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 dari target 85 indeks/skor telah dicapai nilai 83,98 indeks/skor dengan capaian 98,80%. Hal ini menunjukkan bahwa capaiannya belum mencapai 100%, dari hasil pemantauan dan evaluasi yang sudah dilaksanakan pada indeks/skor kepuasan masyarakat Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimana pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) paling sedikit 1 tahun sekali sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan adanya hasil survei ini diharapkan dapat dilihat sejauh mana tingkat kepuasan yang diperoleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan berdasarkan data data yang ada. Dengan demikian kami dapat melakukan evaluasi ke depan, guna meningkatkan kualitas pelayanan. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu badan pengawasan intern pemerintah daerah. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dapat menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam melaksanakan pelayanan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk mencari terobosan maupun inovasi-inovasi baru yang berorientasi pada bidang pengawasan agar terselenggaranya roda pemerintahan yang optimal untuk menghindari peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.

Dari hasil pengumpulan Kuesioner (23 kuesioner) di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,304
U2	Prosedur	3,304
U3	Waktu Pelayanan	3,217
U4	Biaya/Tarif	3,783
U5	Produk Layanan	3,304
U6	Kompetensi Pelaksana	3,826
U7	Perilaku Pelaksana	3,130
U8	Sarana dan Prasarana	3,261
U9	Penanganan Pengaduan	3,348
U10	Transparansi Pelayanan	3,217
U11	Integritas Petugas Pelayanan	3,217

Dari hasil pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat pada Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, maka diperoleh sebagai berikut :

- a. Nilai SKM = 83,977
- b. Mutu Pelayanan = B
- c. Kinerja Unit Pelayanan = Baik
- d. Penilaian tertinggi pada unsur pelayanan Kompetensi Pelaksana dan Biaya/Tarif dengan nilai rata rata 3,827 dan 3,783 (Sangat Baik)
- e. Penilaian terendah pada unsur Perilaku Pelaksana dengan nilai rata-rata 3,130 (Baik)

Dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap Indeks/Skor Pelayanan Masyarakat pada Inspektorat Daerah disimpulkan pula ada beberapa faktor pendorong dan faktor yang menghambat, yaitu :

- a. Faktor Pendorong :
 1. Dukungan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
 2. Dukungan Peraturan dan Kebijakan yang mendukung pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah.
 3. Adanya Renstra, Renja, dan DPA Inspektorat Daerah Prov. Kaltim
 4. Dukungan Anggaran dan SDM Pengawasan yang tersedia.
 5. Adanya Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat.
 6. Adanya Responden Survey Kepuasan Masyarakat.

b. Faktor Penghambat :

1. Masih ditemukan pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik belum sesuai antara harapan dan kebutuhan.
2. Hasil Survey IKM belum seluruhnya digunakan untuk meningkatkan kinerja unit pelayanan secara berkala dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.
3. Respon pelanggan/responden dalam melakukan pengisian atau memberikan jawaban atas survey yang disampaikan masih kurang.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian indeks/skor Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah akan dilakukan upaya-upaya antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan.
2. Menjadikan hasil survey IKM sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan bahan evaluasi lebih lanjut.
3. Melakukan tindak lanjut atas beberapa saran dan masukan yang diberikan oleh responden terhadap 11 unsur pelayanan yaitu :

No	Unsur Pelayanan	Tindak Lanjut
U1	Persyaratan	• Mempersiapkan dan memberikan informasi sesederhana mungkin agar dapat mudah dipahami.
U2	Prosedur	• Membuat jadwal bergilir bagi petugas di Desk Pelayanan • Menempelkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Layanan • Meningkatkan kualitas dan kenyamanan Unit Layanan Administrasi
U3	Waktu Pelayanan	• Menampilkan informasi tentang waktu pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Tindak Lanjut
		• Mempersingkat birokrasi layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
U4	Biaya/Tarif	• Menyampaikan kepada penerima layanan bahwa setiap pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya sama sekali • Menempelkan banner seperti spanduk atau slogan bertuliskan <i>“Segala Bentuk Pelayanan Tidak Dipungut Biaya Apapun”</i> di ruangan yang berhubungan dengan pelayanan
U5	Produk Layanan	• Memberikan pelayanan dan tampilan informasi yang simpel serta mudah dipahami
U6	Kompetensi Pelaksana	• Menempatkan petugas yang berkompetensi dalam memberikan pelayanan yang tepat • Melakukan evaluasi setidaknya 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali
U7	Perilaku Pelaksana	• Memberikan pelayanan yang berkompetensi dan professional • Memberikan pelatihan untuk petugas dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan tentang pelayanan yang baik dan profesional
U8	Sarana dan Prasarana	• Melengkapi Sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam melakukan pelayanan • Memberikan pelayanan khusus untuk penerima layanan yang

No	Unsur Pelayanan	Tindak Lanjut
		berkebutuhan khusus seperti disabilitas dan ibu hamil/menyusui
U9	Penanganan Pengaduan	• Memproses setiap pengaduan yang diterima dengan cepat agar ditindaklanjuti dengan segera
U10	Transparansi Pelayanan	• Menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.
U11	Integritas Petugas Pelayanan	• Memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat/ stakeholder

Tabel 2.2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023, 2024 dan Target Tahun 2025

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024				Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Prog/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Ket.
					Target	Satuan	Realisasi	Tingkat Persentase Capaian (%)		Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Inspektorat											
6.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah	97	95	97	%	97	100	98	49	50	
6.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	12	12	12	dokumen	12	100	82	41	50	
6.01.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerahdibuat	12	12	12	Dokumen	12	100	9	5	50	
6.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	12	26	Laporan	26	100	95	48	50	

6.01.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	14	Laporan	14	100	87	44	50	
6.01.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan PD	12	12	12	Laporan	12	100	12	6	50	
6.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah	86	86	122	orang	122	100	95	48	50	
6.01.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	122	122	122	stel	122	100	118	59	50	
6.01.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pelatihan dan Pendidikan	12	12	12	Laporan	12	100	122	61	50	
6.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12	12	12	Laporan	12	100	12	6	50	
6.01.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20	20	25	unit	25	100	25	13	50	
6.01.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan ATK dan Benda Pos	12	12	12	Laporan	12	100	12	6	50	
6.01.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan bahan cetakan dan penggandaan	12	12	12	Laporan	12	100	12	6	50	
6.01.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	36	36	36	Laporan	36	100	36	18	50	
6.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemda	12	12	12	Laporan	12	100	12	6	50	
6.01.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	12	12	12	Laporan	12	100	12	6	50	
6.01.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	12	Laporan	12	100	12	6	50	
6.01.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	13	13	13	Laporan	13	100	13	7	50	

6.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipelihara	30	30	30	unit	30	100	30	15	50	
6.01.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	18	18	18	unit	18	100	18	9	50	
6.01.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	12	12	12	unit	12	100	12	6	50	
6.01.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan gedung dan taman	2	2	2	Laporan	2	100	1	1	50	
6.01.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95	95	90	%	90	100	95	48	50	
6.01.002.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan pengawasan internal	50	50	69	kegiatan	69	100	3	2	50	
6.01.002.1.01.001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemda	10	10	10	Laporan	10	100	10	5	50	
6.01.002.1.01.004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda dan OPD	15	15	25	Laporan	25	100	30	15	50	
6.01.002.1.01.005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Umum dan Teknis Pemda Kab/Kota	20	20	30	Laporan	30	100	30	15	50	
6.01.002.1.01.007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK-RI dan APIP	4	4	4	Laporan	4	100	4	2	50	

6.01.002.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	45	45	50	Laporan	50	100	100	50	50	
6.01.002.1.02.001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12	12	12	Laporan	12	100	12	6	50	
6.01.002.1.02.002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	35	35	38	Laporan	38	100	38	19	50	
6.01.003	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	85	85	90	%	90	100	95	48	50	
6.01.003.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan/Asistensi Pelaksanaan RB dan Pencegahan KKN	15	15	38	Laporan	38	100	95	48	50	
6.01.003.1.02.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan/Asistensi dan Reformasi Birokrasi	25	25	25	Laporan	25	100	25	13	50	
6.01.003.1.02.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Monev dan Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	14	14	14	Laporan	14	100	14	7	50	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar capai kinerja pelayanan SKPD pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur belum mempunyai indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Prima (SPM) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 telah disajikan pada 2.3 yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah seperti pada tabel 2.3.

Kajian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terkait indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam hal ini berkenaan dengan tugas-tugas pengawasan yaitu telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 000.8.3.2/1922/ltprov-I/2024 tentang Standar Pelayanan, antara lain meliputi :

1. Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat
2. Pelayanan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
3. Pelayanan Pengelolaan LHKPN
4. Pelayanan Konsultasi / Pemberian Advisory
5. Pelayanan Penyediaan Narasumber
6. Pelayanan Data, Laporan dan Informasi
7. Pelayanan Surat Keterangan Bebas Temuan

Sedangkan untuk penentuan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan dengan Penetapan Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai AKIP (nilai)	Persen	78,50-79,19	79,19-79,78	79,78-80,36	80,36-80,95	80,95-81,54	100%	Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
2	Indeks Birokrasi	Point/Indeks	68,00 (B)	68,50 (B)	69,00 (B)	79,50 (B)	80,00 (B)	80,00 (B)	Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
3	Persentase Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Hasil Pengawasan Internal yang dilaksanakan baik di Pemda Provinsi dan Kab/Kota
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1	Persen	75%	85%	90%	95%	100%	100%	Laporan Hasil Monev TLHP BPK-RI dan APIP
5	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persen	75%	80%	82%	85%	90%	90%	Laporan Hasil Mitigasi MCP dan Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas oleh KPK-RI
6	Level/Skor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level	Level 3/ Skor 3,550	Level 3/ Skor 3,750	Level 3/ Skor 3,800	Level 3/ Skor 3,850	Level 3/ Skor 3,850	Level 4/ Skor 4,000	Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Prov. Kaltim
7	Level/Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3 (3,200)	Level 3 (3,550)	Level 3 (3,700)	Level 3 (3,850)	Level 3 (4,000)	Level 3 (4,000)	Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Prov. Kaltim
8	Skor Kepuasan Masyarakat	Skor	84	85	86	87	88	88	Laporan Hasil Kepuasan Masyarakat oleh Inspektorat Daerah
9	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	80	81	82	83	85	85	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Inspektorat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan atas standar pelayanan yang ditetapkan sebagai penetapan kinerja telah dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 s.d. 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN TAHUNAN									KET
			2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			T	R	%	T	T	T	T	T	T	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Hasil Pengawasan Internal yang dilaksanakan baik di Pemda Provinsi dan Kab/Kota
2	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1	Persen	75%	72%	96%	75%	85%	90%	95%	100%	100%	Laporan Hasil Monev TLHP BPK-RI dan APIP
3	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persen	75%	73,22%	97,62%	75%	80%	82%	85%	90%	90%	Laporan Hasil Mitigasi MCP dan Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas oleh KPK-RI
4	Level/Skor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level	Level 3/ Skor 3,550	Level 3/ Skor 3,200	90,14%	Level 3/ Skor 3,550	Level 3/ Skor 3,750	Level 3/ Skor 3,800	Level 3/ Skor 3,850	Level 3/ Skor 3,850	Level 4/ Skor 4,000	Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Prov. Kaltim
5	Level/Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,000)	100%	Level 3 (3,200)	Level 3 (3,550)	Level 3 (3,700)	Level 3 (3,850)	Level 3 (4,000)	Level 3 (4,000)	Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Prov. Kaltim
6	Skor Kepuasan Masyarakat	Skor	84	83,98	99,97%	84	85	86	87	88	88	Laporan Hasil Kepuasan Masyarakat oleh Inspektorat Daerah
7	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	80	80	100	80	81	82	83	85	85	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Inspektorat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis sesuai Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 – 2029, maka dapat disikapi beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengawasan hal ini berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan hambatan-hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), dimana didalam terdapat SPIP Terintegrasi, manajemen risiko dan indeks efektivitas Pencegahan Korupsi.
- b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas/obrik.
- c. Prioritas tahun 2025 – 2029 lingkup Pengawasan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

- a. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
- b. Meningkatkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI
- c. Mensinergitaskan program pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal melalui peningkatan koordinasi dibidang pengawasan serta meningkatkan peranan pengawasan dan pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk asistensi yang bertujuan untuk menjamin mutu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan meningkatkan cakupan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2025 s.d. 2029 yang sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 s.d. 2029, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas KKN yaitu ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan berintegritas berbasis teknologi informasi***.

Terhadap capaian RPJMD Tahun 2026 yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu berkenaan :

1. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1
2. Level/Skor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3. Persentase Pencegahan KKN
4. Level/Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun N-1 baru 72%, Maturitas SPIP capaian dengan Level 3, Kapabilitas APIP capaian dengan Level 3 dan Survey Penilaian Integritas capaian dengan 72,71 skor. Hal tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Aparatur Pengawasan. Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaan/pencapaian misi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat.

Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. belum semua aparaturnya memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. perlu adanya perubahan paradigma pengawasan dengan mengedepankan pembinaan dan perbaikan kerja;
- c. sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan yang belum memadai dan mencukupi; dan
- d. belum berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap Perangkat Daerah sehingga menyebabkan terjadinya temuan dan penyimpangan.

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan pada Perangkat Daerah sesuai dengan analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dibagi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan

kelemahan (faktor intern) lebih mudah dibanding mengidentifikasi faktor ekstern terutama merumuskan ancaman. Lingkungan internal terdiri dari kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi.

1. Tantangan

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme supaya tetap dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- 2) Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
- 3) Peningkatan tingkat maturitas SPIP masih berada pada level 3;
- 4) Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP masih berada pada level 3;
- 5) Adanya amanah pelaksanaan kegiatan *Early Warning System* (EWS), Benturan Kepentingan, dan *Consulting Center*;
- 6) Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang belum sesuai dengan waktu pelaksanaannya.
- 7) Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
- 8). Masih kurangnya dukungan SDM pada Inspektorat

2. Peluang

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1) Adanya mandat penguatan peran Inspektorat

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan

perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) mempertahankan perairan opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

3) Sumber Daya Manusia yang berintegritas.

Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan, berintegritas dan terus meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2026 adalah : (1). Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun N-1, (2). Pencapaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada level 3, dimana diperlukan perhatian khususnya pada SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi, (3). Ketersediaan data dan kelengkapan pemeriksaan sangat diperlukan dan dipertahankan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Level 3 (menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome, APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi/advis pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern). 2. Penambahan ASN khususnya pada

Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD untuk memenuhi kekurangan personel pemeriksa, penambahan peserta dan pelaksanaan Diklat dan SDM Aparatur Pengawasan penunjang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program dan kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil revidi, semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD Tahun 2026. Penjabaran program kegiatan berdasarkan revidi terhadap RKPD Tahun 2026 tertuang pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Page Indikator (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kinerja Pendanaan				Kelompok Sasaran				
						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
								Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Inspektorat			85.279.258.000,00									
		UNDUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			84.545.978.000,00									
		INSPEKTORAT DAERAH			84.545.978.000,00									
1	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kantor/Kantor/Kantor Pelayanan Publik Yang Didistribusikan	100 Indeks 100 %	70.290.977.700,00						
	6	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.112.509.500,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	463.509.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	6	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SEPD	Jumlah Dokumen RKA-SEPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SEPD	2 Dokumen	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	6	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SEPD	Jumlah Dokumen DFA-SEPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SEPD	2 Dokumen	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	6	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SEPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SEPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SEPD	4 Laporan	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	6	01	01	1.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	38.108.705.548,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	6	01	01	1.01	0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147 Orang/ Bulan	37.150.003.548,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas AGH	12 Dokumen	555.680.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6	01	01	1.02	0001	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pameriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	12 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadeministrasikan dengan Baki Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadeministrasikan dengan Baki Perangkat Daerah	100 %	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6	01	01	1.03	0001	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

6	01	03	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	561.942.025,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Data	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	01	03	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	51.934.515,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Data	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	01	04	1.04	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	14.032.890,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Data	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	01	04	1.04	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	64.838.790,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Data	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	01	03	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPOD	16 Laporan	1.400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Data Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Data	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	01	04	1.04	0014	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPOD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPOD	4 Dokumen	130.999.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Data Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Data	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	01	04	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah	Persentase Penyerahan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100%	5.138.960.436,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah

6	01	01	1.07	0007	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	66.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tersedianya Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	01	1.07	0008	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tersedianya Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	01	1.07	0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	9.960.726,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tersedianya Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	63.333.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tersedianya Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah	100 %	5.376.464.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	12 Laporan	13.833.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.999.946.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Fasilitas dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57.465.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAKI HASIL (DBH)	Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penciptaan dan pemberdayaan koraga, narakaba, juri, dan penyuluhan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tersedianya Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah
5	01	01	1.05	2004	Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.165.320.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAKI HASIL (DBH)	Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penciptaan dan pemberdayaan koraga, narakaba, juri, dan penyuluhan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tersedianya Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	
8	01	01	1.05		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	4.553.142.900,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah di Lingkungan Inspektorat Daerah
5	01	01	1.05	2003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	79.716.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAKI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah di Lingkungan Inspektorat Daerah	
5	01	01	1.05	2003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perbaikannya	30 Unit	235.350.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAKI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah di Lingkungan Inspektorat Daerah	
5	01	01	1.05	2006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	726.014.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAKI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah di Lingkungan Inspektorat Daerah	
5	01	01	1.05	2009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 Unit	3.500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAKI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah di Lingkungan Inspektorat Daerah	
2	4	01	01		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tidak lanjut rekonsidasi BPK Tahun Anggaran M-1	85 %	10.240.000.200,00					
8	01	02	1.01		Pengawasan Pengawasan Internal	Pemertuaan Identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Pemertuaan Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Pemertuaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APSP	100 % 100 % 85 %	5.500.000.250,00			Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penciptaan dan pemberdayaan koraga, narakaba, juri, dan penyuluhan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Pengawasan Internal

6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	84 Laporan	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Pengawasan Internal
6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	550.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Pengawasan Internal
6	01	02	1.01	0004	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	2 Laporan	600.000.150,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Pengawasan Internal
6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	32 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajene Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Pengawasan Internal

6	01	02	3.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	8 Dokumen	1.200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Pengawasan Internal
6	01	02	3.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	6.540.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
6	01	02	3.02	0001	Pengawasan Penyelesaian Kerugian	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	14 Laporan	540.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
6	01	02	3.02	0003	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	85 Laporan	6.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
5	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI)	3/ 3,750 Lembar/ Skar	3.615.000.000,00					
6	01	03	1.01		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Alokasi PPK yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang ditindaklanjuti Persentase Laporan Penawaran/Penolakan Gratifikasi yang ditangani Persentase Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat Persentase Perangkat Daerah yang Diadopsi sebagai 2i Menuju WBK/WBBM Persentase Tingkat Kepuasan Penyempalan Laporan LHKPN dan UHCSM	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	3.615.000.000,00			-	-	Pendampingan dan Asistensi
6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5 Perangkat Daerah	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pendampingan dan Asistensi
6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21 Perangkat Daerah	950.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pendampingan dan Asistensi

6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	21 Kegiatan	1.955.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pendampingan dan Asistensi
6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pemsepatan Integrasi	2 Perangkat Daerah	500.000.000,00	Sumus Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pendampingan dan Asistensi
X					RON URUSAN			733.280.000,00					
X	XI				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XI			733.280.000,00					
4	X	XI	01		PROGRAM PENUKARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keakratanatan Persentase Seluruh Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 Indeks 100 %	733.280.000,00					
X	XI	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	680.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-
X	XI	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	680.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-
X	XI	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	63.280.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-
X	XI	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	63.280.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-
					J U M L A H			85.279.258.000,00					

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam mencari usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengikuti forum PD yang melibatkan stakeholder guna melaksanakan pembangunan yang lebih baik pada tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 sasarannya tidak melibatkan kelompok masyarakat sesuai dengan isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program Pendampingan dan Asistensi				
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Samarinda dan Balikpapan	Skor / Nilai Hasil Reformasi Birokrasi	552.491.000,00 22 Laporan	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pemda Kab/Kota se Kaltim dan Luar Kaltim	Monev Aksi Pencegahan Korupsi	Rp. 135.440.000,00 4 Laporan	
			Jumlah Laporan Gratifikasi	Rp. 134.500.000,00 25 Laporan	
			Evaluasi WBS dan Benturan Kepentingan	Rp. 134.500.000,00 2 Laporan	
			Kegiatan Operasional Saberpungli	Rp. 1.171.000.000,00 4 Laporan	
			Hasil Survey Penilaian Integritas	Rp. 134.000.000,00 Hasil Survey 70	
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda dan Balikpapan serta Luar Provinsi	Maturitas SPIP	Rp. 390.000.000,00 Level 3	
		Samarinda dan Balikpapan serta Luar Provinsi	Kapabilitas APIP Inspektorat	Rp. 390.000.000,00 Level 3	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Instansi Pengawasan, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka menunjang program Nasional khususnya dalam bidang pengawasan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan dalam rangka percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menindaklanjuti hal tersebut telah dibentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 yang juga dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Timur dan kegiatan lainnya seperti Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Sedangkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi , Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan inputing berkaitan dengan aplikasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntabel, efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran pada Renja 2026 Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku instansi pengawasan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 s.d. 2029, yaitu :

1. Tujuan, Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 9: Meningkatkan Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan					Indeks Integritas Nasional (Indeks)	
	Terwujudnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan				Indeks Integritas Nasional (Indeks)	
					Nilai AKIP (Nilai)	
		Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan			Persentase Pencegahan KKN	
					Level / Skor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					<i>Level / Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</i>	
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi		Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
				Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	Pendampingan dan Asistensi
				<i>Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>
				<i>Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah</i>
				<i>Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi</i>	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi</i>	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi</i>
				<i>Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>
		Sasaran 2: Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah			Persentase Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	
					Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	
					Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran N-1	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Menurunnya Persentase rekomendasi BPK RI yang belum diimplementasikan	PROGRAM PENYELENGGAAN PENGAWASAN
				Terselenggaranya Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda dan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Internal

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	
					Persentase Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah	
					Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Umum dan Teknis pada Pemda Kab/Kota	
					Persentase Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya Pengawasan atas Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Pengawasan atas Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Reviu atas Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan
				Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis pada Pemda Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota	Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota
				Terlaksananya Monev TLHP BPK dan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
				Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu
				Terselenggaranya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
				Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas, tata kelola, dan layanan publik perangkat daerah			Skor Kepuasan Masyarakat	
					Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	
			Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Kualitas Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
				Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Teradministrasikannya Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Teradministrasikannya Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
				Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Teradministrasikannya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diadministrasikan dengan baik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Terjaminnya Keamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Tertatausahakannya Barang Milik Daerah perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
				Teradministrasikannya dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Tersedianya data dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Mebel Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terpeliharanya Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Terpeliharanya dan Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.3. Program dan Kegiatan

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran dari visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025 s.d. 2029 terutama pada misi nomor 4 yaitu ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan berintegritas berbasis teknologi informasi*** dan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 s.d. 2029. Pemilihan Program dan Kegiatan ini juga didasarkan pada Standar Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perannya selaku aparat pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar selalu mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yang akan bermuara pada penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watch dog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga harus

bisa memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha menemukan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan utama dari kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, profesional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi lebih berkualitas.

Dari berbagai alasan pemilihan program dan kegiatan tersebut, maka agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan pada tahun 2025 ada 3 program dengan 11 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan sebagaimana yang telah disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2030, yaitu :

6.01 INSPEKTORAT DAERAH

6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan

6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota

6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi

6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

6.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

6.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

6.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

6.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

6.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

6.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

6.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

6.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

6.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

6.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel

6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sedangkan Lokasi Penyebaran Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sesuai dengan rancangan rencana kerja tahun 2026, lokasi pelaksanaan dan

penyebaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut terfokus pada Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi kepala daerah, prioritas pembangunan, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Plafon Anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2026 sejumlah Rp.85.279.258.000,00 yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat	85.279.258.000,00
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	353,429,385.00

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	556,657,000.00
6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	673,580,200.00
6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	990,649,000.00
6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1,209,743,300.00
6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	504,953,626.00
6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10,730,903,867.00
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	
6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	506,903,599.00
6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	164,112,283.00
6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1,650,570,217.00
6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	506,926,600.00
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	438,374,000.00
6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	151,205,200.00
6.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	83,492,800.00
6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	345,213,920.00
6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	694,327,920.00
6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37,150,023,098.00
6.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	792,795,408.00
6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50,210,700.00
6.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100,000,000.00
6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	32,835,600.00
6.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	72,413,550.00
6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
6.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100,897,680.00
6.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,897,680.00
6.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,897,680.00
6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	909,304,956.00
6.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	255,630,760.00
6.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	122,170,384.00
6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11,854,984,920.00
6.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	626,357,722.00
6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	204,000,356.00
6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,153,224,147.00
6.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52,414,480.00
6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,332,000.00

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	145,871,590.00
6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,573,370,960.00
6.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74,240,453.00
6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
6.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	1,019,000,400.00
6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,562,015.00
6.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,508,106.00
6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,833,000.00
6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,275,733,920.00
6.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97,465,000.00
6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,305,468,320.00
6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41,296,000.00

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220,950,000.00
6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	787,859,000.00
6.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	53,280,000.00
6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,373,384,750.00

Dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 Dan Perkiraan Tahun 2027

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REVISI OPD	REALISASI CAPAIAN REVISI OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN NILAI RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENDANGKANG JARIB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	151.205.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Mempertahankan kelembagaan politik, hukum dan tata kelola, serta mempertahankan pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Pemerintahan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah		150.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	81.492.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Mempertahankan kelembagaan politik, hukum dan tata kelola, serta mempertahankan pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Pemerintahan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah		150.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	345.213.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Mempertahankan kelembagaan politik, hukum dan tata kelola, serta mempertahankan pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Pemerintahan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah		350.000.000,00	INSPEKTORAT

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKSTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN REKSTRASI OPD TAHUN 2024	PRAKRAHA CAPAIAN TARGET REKSTRASI OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKRAHA MAJU RENCANA TAHUN 2027		POLANGKAT DAERAH PENANAGSUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penelusuran dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	10.210.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KalDesa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KalDesa	DANA, BMD, HABIS (DSH)	Mempertu tindakan politik, tindakan dan birokrasi, serta meng ekstasi penc egahan dan pemberian aan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyakitapen	T. Peningk taraksi kelela pers omahan da erah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi i pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Penangkat Daerah		100.000.000,00	INSPEKTORAT
0.01.01.1.02.0005		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Penelusuran					4 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KalDesa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KalDesa	DANA, BMD, HABIS (DSH)	Mempertu tindakan politik, tindakan dan birokrasi, serta meng ekstasi penc egahan dan pemberian dan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyakitapen	T. Peningk taraksi kelela pers omahan da erah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi i pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Penangkat Daerah		100.000.000,00	INSPEKTORAT
0.01.01.1.02.0007		Kendala dan Penyajian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KalDesa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KalDesa	DANA, BMD, HABIS (DSH)	Mempertu tindakan politik, tindakan dan birokrasi, serta meng ekstasi penc egahan dan pemberian aan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyakitapen	T. Peningk taraksi kelela pers omahan da erah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi i pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Penangkat Daerah		100.000.000,00	INSPEKTORAT
0.01.01.1.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program/Realisasi Anggaran					12 Laporan	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KalDesa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KalDesa	DANA, BMD, HABIS (DSH)	Mempertu tindakan politik, tindakan dan birokrasi, serta meng ekstasi penc egahan dan pemberian aan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyakitapen	T. Peningk taraksi kelela pers omahan da erah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi i pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Penangkat Daerah		100.000.000,00	INSPEKTORAT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN REMA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REMA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH/ PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Model yang Disediakan				5 Paket	1.010.000.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perjudian lainnya	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.07.0006		Pengalihan Poslasi dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Poslasi dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	14.502.015,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perjudian lainnya	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		300.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.07.0010		Pengalihan Sisa dan Poslasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sisa dan Poslasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20.500.100,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perjudian lainnya	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.000.000.000,00	INSPEKTORAT

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BELANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REVISI OPD	REALISASI CAPAIAN REVISI OPD TAHUN 2024	PRAKARSA CAPAIAN TARGET REVISI OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDAMPAW						KELOMPOK SASARAN	PRAKARSA MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DASAR PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2028	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6 01 02 1 02	Penyediaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Kasus Negara/daerah yang dimaksudkan	-			100 % 100 %	11.235.857.493,00			Menyediakan informasi publik, hukum dan kebijakan, serta meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat nasional, regional, publ, dan per negara/asian	7. Peningka tan laba berikut pers entifikan dianak yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tanahragan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	8.584.000.000,00	RUSPEKTRAT
	6 01 02 1 02 8000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Negara/daerah														
			Jumlah Laporan Pengawasan Kasus Negara/daerah yang Disiapkan				14 Laporan	584.000.000,00	Kota Samarinda, Sumut Kalimantan, Sumut Kalimantan	DANA (DAS) HASIL (DRH)	Menyediakan informasi publik, hukum dan kebijakan, serta meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat nasional, regional, publ, dan per negara/asian	7. Peningka tan laba berikut pers entifikan dianak yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tanahragan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		584.000.000,00	RUSPEKTRAT
	6 01 02 1 02 8000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				88 Laporan	10.720.000.000,00	Kota Samarinda, Sumut Kalimantan, Sumut Kalimantan, Kota Balikpapan, Sumut Kalimantan, Sumut Kalimantan, Kota Samarinda, Sumut Kalimantan, Sumut Kalimantan	DANA (DAS) HASIL (DRH)	Menyediakan informasi publik, hukum dan kebijakan, serta meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat nasional, regional, publ, dan per negara/asian	7. Peningka tan laba berikut pers entifikan dianak yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Tanahragan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		8.080.000.000,00	RUSPEKTRAT
1	6 01 02	PROGRAM PERUBAHAN KEDUAJARAN, PENGAMBILAN DAN ASISTENSI						2.328.612.696,00						-	8.126.000.000,00	
		[Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan dan Asistensi]	Kapabilitas Aparat Pengawasan dalam Pemerintah (APPP) Mekanisme Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Diklat (Manager) Terkait dan Terukur	Terdapat Terintegrasi (Integrated)	Terdapat Terintegrasi (Integrated)	Terdapat Terintegrasi (Integrated)	2.328.612.696,00	-	-	-	-	-	-	8.126.000.000,00	-

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Prosedural Daerah				4 Laporan	894.327.920,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAK HASIL (DBH)	Mempertahankan kelestarian politik, keadilan dan kepercayaan, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat publik dan pemangku kepercayaan publik	7. Peningkatan kelembagaan kelembagaan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		500.800.000,00	INSPEKTORAT	
X.XX.01.1.00	Peningkatan Bauran Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Bauran Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan dengan baik					100 %	53.280.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAK HASIL (DBH)		7. Peningkatan kelembagaan kelembagaan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		500.800.000,00	INSPEKTORAT	
X.XX.01.1.09.0000	Peningkatan Asas Tak Berwujud															
			Jumlah Asas Tak Berwujud yang Diperoleh				2 Unit	53.280.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAK HASIL (DBH)		7. Peningkatan kelembagaan kelembagaan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		500.800.000,00	INSPEKTORAT	
			Jumlah Asas Tak Berwujud yang Diperoleh				2 Unit	53.280.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAK HASIL (DBH)		7. Peningkatan kelembagaan kelembagaan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		50.744.800.800,00		

**PROGRAM PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026**

1. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah terhadap Perangkat Daerah dengan ruang lingkup :
 - a. Pembinaan dan Pengawasan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RPJMD/RKPD tahun 2026 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, seperti :
 - Pengendalian Inflasi Daerah.
 - Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.
 - Tingkat Pengangguran Terbuka.
 - Investasi dan Pelayanan Publik dan/atau
 - Penanganan Stunting.
 - b. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk :
 - Pemeriksaan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan.
 - Pemeriksaan Kinerja.
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari APBD, yaitu :
 - a. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah, dengan sasaran :
 - Meningkatnya kaulitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 - Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
 - Menigkatnya kualitas KUA-PPAS
 - Meningkatnya kualitas RKA-SKPD
 - Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sasaran :
 - Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
 - Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
 - Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pembiayaan daerah.
 - Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan.
 - Meninmgkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.
 -
 - c. Reviu Laporan Keuangan Daerah, dengan sasaran :
 - Tersedianya Laporan Keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan sasaran :

- Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang dan Jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
- Tersedianya Laporan Kinerja yang memadai dan berkualitas.
- Tersediannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memadai dan berkualitas.
- Tersedianya Layanan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah
- Tersedianya Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis Gender/ responsive gender.
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- Terselenggaranya Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

e. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas, dengan sasaran :

- Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN/SPT Tahunan.
- Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Bebas Gratifikasi.
- Capaian Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)
- Capaian Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Optimalisasi Pembangunan Reformasi Birokrasi.
- Capaian Aksi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh Stranas PK.
- Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi / MCP KPK yang dikoordinasikan oleh KPK-RI
- Terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang bebas dari Pungutan Liar.
- Meningkatnya kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Meningkatkan kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi Korupsi.
- Capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut APIP.

f. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dengan sasaran :

- Kapabilitas APIP pada Level 3.
- Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP
- Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko.
- Terselenggaranya Pendidikan Profesional Berkelanjutan Minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.
- Terpenuhinya Sarana dan Prasarana APIP.

g. Pengawasan Tematik sesuai arahan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah dan Inspektur / sesuai dengan mandatory.

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat.

5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Inspektorat sebagai pemilik fungsi pengendalian intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi resiko pada perangkat daerah dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan - kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan dan rekomendasi.
- b. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan/ audit kinerja dan pemeriksaan operasional serta manajemen risiko terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Melaksanakan asistensi dan pembinaan terhadap 45 perangkat daerah termasuk UPTD serta Pembinaan terhadap 10 Inspektorat Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dimana Gubernur Sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat.
- d. Membuka layanan klinik konsultasi dan pemberian advisory
- e. Bekerjasama dengan KPK-RI dan Badan Statistik dalam Rangka Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI)
- f. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan, Sarana dan Prasarana dalam rangka mendukung tugas-tugas di bidang pengawasan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang disesuaikan dengan RKPD Tahun 2025.

Diharapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah disusun dapat diimplementasikan dalam kegiatan pengawasan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan

rencana kerja dan pendanaan yang telah dalam penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2025 dan diharapkan dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan secara konsisten.

RENJA TAHUN 2026
BADAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun dan memiliki Rencana Kerja (Renja) sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pencapaian target pembangunan tahunan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 sebagai rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran operasional dari dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029.

Dalam perencanaan pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi daerah, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Dinamika terkini pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, perkembangan demokratisasi, meningkatnya kompleksitas konflik sosial, serta arus informasi digital yang berimplikasi pada munculnya disinformasi dan polarisasi sosial, menjadi faktor penting yang perlu diantisipasi dalam perencanaan program dan kegiatan tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Tahun 2026 didasarkan pada dokumen Renstra 2025–2029 serta memperhatikan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Dengan demikian, Renja ini tidak hanya memuat prioritas program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tetapi juga mengedepankan keterpaduan, konsistensi, dan sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja SKPD memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah, karena beberapa hal sebagai berikut:

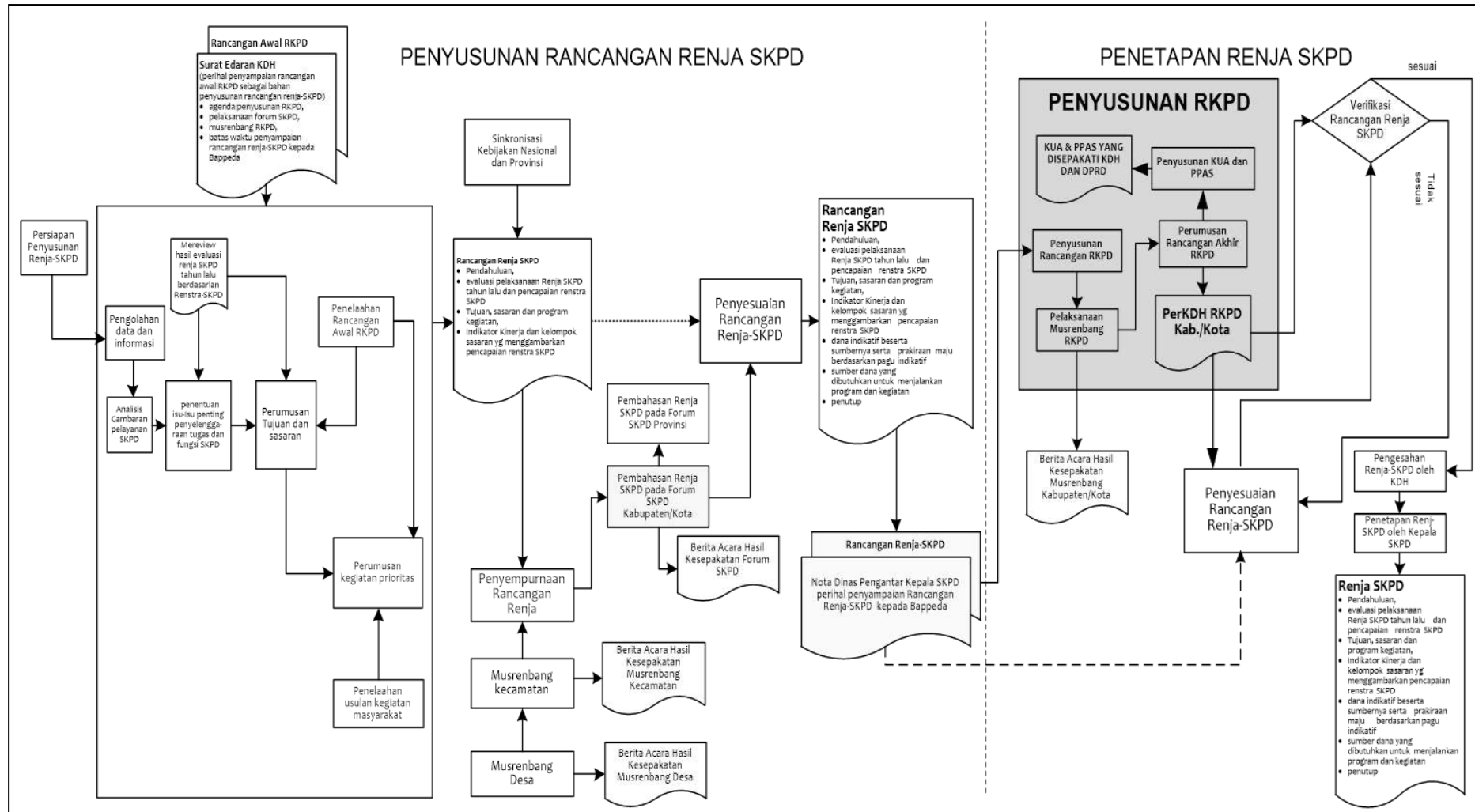
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran perangkat daerah dalam Renstra, serta mengacu pada arah kebijakan operasional dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
2. Renja SKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan RKA-PD Tahun 2026, sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan kebijakan fiskal daerah.
3. Renja SKPD merupakan instrumen penting untuk monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja, sehingga capaian pembangunan dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai target Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat arti strategis tersebut, penyusunan hingga penetapan Rancangan Akhir Renja 2026 wajib mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renja Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas, terukur, dan akuntabel bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan, sekaligus mendukung terwujudnya Kalimantan Timur yang aman, tertib, harmonis, dan demokratis.

Adapun bagan alur tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA



1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran SKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
8. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
12. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
13. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
14. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

15. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
16. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
25. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
26. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
28. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
29. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
30. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama;

31. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
32. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - nilai Pancasila;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
52. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
53. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi;
54. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika;
55. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

- Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
56. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren;
 57. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 58. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur;
 59. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 60. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 61. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman operasional dalam penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap struktur subkegiatan, indikator kinerja, dan pagu anggaran agar selaras dengan arah kebijakan RKPD 2026, kebijakan fiskal daerah, serta dinamika kebutuhan layanan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, target indikator kinerja, dan pagu anggaran Tahun 2026 pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025.

2. Menjamin keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Kesbangpol, serta konsisten dengan Renstra 2025–2029 dan RKPD 2026.
3. Menyediakan instrumen monitoring dan evaluasi yang terukur untuk menilai capaian kinerja Tahun 2026, sebagai dasar pengendalian, perbaikan berkelanjutan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan (Triwulan II)

Pada Tahun 2024 ada 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan yang menjadi garapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya bersifat non fisik, yaitu berupa sosialisasi dan penyuluhan baik itu yang dilaksanakan di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kalimantan Timur.

Adapun evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (KINERJA)
Tahun Anggaran 2025 Triwulan II
Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Total	Realisasi Total	Realisasi Keuangan	Fisik Total
8.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	97.309.793.444	23.575.451.361	24,23	71,85
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.313.460.672	1.155.078.256	13,89	27,39
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.313.460.672	1.155.078.256	13,89	27,39
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	781.538.250	92.380.465	11,82	26,78
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	66.045.616	36.170.500	54,77	57,23
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	126.842.602	0	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	127.082.106	20.290.000	15,97	16,52
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1.932.627.842	9.520.000	0,49	1,14
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	4.282.421.632	375.393.800	8,77	27,05

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Total	Realisasi Total	Realisasi Keuangan	Fisik Total
8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	37.877.000	0	0,00	25,00
8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	140.242.602	0	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	818.783.022	621.323.491	75,88	100,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	64.765.802.131	15.572.339.785	24,04	84,64
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	64.765.802.131	15.572.339.785	24,04	84,64
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	64.465.470.403	15.431.818.000	23,94	84,75
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300.331.728	140.521.785	46,79	61,73
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.102.075.314	200.046.887	18,15	52,53

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Total	Realisasi Total	Realisasi Keuangan	Fisik Total
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.102.075.314	200.046.887	18,15	52,53
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.010.155.728	171.925.102	17,02	53,99
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	91.919.586	28.121.785	30,59	36,44
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	685.996.119	44.906.907	6,55	9,40
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	685.996.119	44.906.907	6,55	9,40
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	611.069.937	15.603.322	2,55	4,61
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	74.926.182	29.303.585	39,11	48,48
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.968.356.425	506.036.564	17,05	23,95

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Total	Realisasi Total	Realisasi Keuangan	Fisik Total
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.968.356.425	506.036.564	17,05	23,95
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.097.419.885	208.957.360	19,04	29,67
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	129.600.000	59.301.800	45,76	37,22
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.741.336.540	237.777.404	13,65	19,37
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.474.102.783	6.097.042.962	31,31	58,88
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.519.192	3.816.000	1,44	24,31
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.892.808	0	0,00	46,79
8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.521.404	0	0,00	0,00
8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.001.404	0	0,00	0,00
8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.001.404	600.000	59,92	100,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Total	Realisasi Total	Realisasi Keuangan	Fisik Total
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.194.768	3.216.000	1,50	28,05
8.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.907.404	0	0,00	0,00
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.387.146.530	5.142.682.995	41,52	56,86
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.903.126.874	4.933.862.995	41,45	57,15
8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	476.760.000	208.820.000	43,80	50,00
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.888.424	0	0,00	0,00
8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	741.404	0	0,00	52,60
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.368.424	0	0,00	50,00
8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.261.404	0	0,00	49,12
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	183.817.722	0	0,00	98,57
8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	481.404	0	0,00	0,00
8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	180.370.702	0	0,00	99,98
8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.482.808	0	0,00	7,47
8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.482.808	0	0,00	50,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Total	Realisasi Total	Realisasi Keuangan	Fisik Total
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.422.712	0	0,00	0,00
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	238.500	0	0,00	0,00
8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481.404	0	0,00	0,00
8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	481.404	0	0,00	0,00
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	221.404	0	0,00	0,00
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.431.096.178	487.712.506	20,06	49,81
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.386.618	0	0,00	95,36
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	720.367.398	114.954.815	15,96	47,48
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.635.120	1.945.400	1,48	28,78
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.339.889.294	370.812.291	27,67	61,84
8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.521.404	0	0,00	0,00
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	235.296.344	0	0,00	0,00
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.046.988.254	0	0,00	78,37
8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.881.793.386	0	0,00	80,00
8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	165.194.868	0	0,00	49,93

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Total	Realisasi Total	Realisasi Keuangan	Fisik Total
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	812.181.196	404.716.926	49,83	55,58
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.034.000	0	0,00	99,83
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.247.120	43.297.815	26,85	56,55
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	630.900.076	361.419.111	57,29	53,92
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.930.999	58.114.535	16,75	36,62
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.741.999	19.419.757	26,70	50,69
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.939.000	33.819.778	21,83	50,00
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.400.000	4.875.000	19,19	50,00
8.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	93.850.000	0	0,00	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis		Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	Indeks	81.15	0	0.00
	Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	78.1	0	0.00
	Sasaran 2: Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Potensi Konflik	90	30	156.67
Tujuan 2: Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	85	0	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	78,5	0	
	Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	75.5	85.74	113.56
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Poin	68.5	72.95	106.50

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	33,58	33,04	98,39
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100	71,43	71,43
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	33,33	33,33
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100	100	100
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,32	0,03	2,27
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78,68	47,09	59,85
	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100	100	100

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi yang berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Partisipasi politik masyarakat yang belum merata, terutama pada kelompok rentan, generasi muda, serta wilayah dengan akses informasi yang terbatas.
3. Masih rendahnya literasi kebangsaan terkait empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) khususnya di kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa.
4. Menurunnya apresiasi terhadap nilai-nilai seni, budaya, dan kearifan lokal, yang berdampak pada melemahnya kohesi sosial dan identitas kebangsaan.
5. Peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan yang belum optimal, baik dalam pembinaan demokrasi, partisipasi masyarakat, maupun kontribusi pada pembangunan daerah.
6. Meningkatnya potensi konflik sosial yang dipicu oleh isu politik pasca-Pemilu/Pilkada 2024, kesenjangan sosial-ekonomi, permasalahan sumber daya alam, serta pengaruh disinformasi dan ujaran kebencian di ruang digital.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Hasil review terhadap Ranhir RKPD dan hasil Analisa kebutuhan pelaksanaan tahun 2026, dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.4.1.
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Hasil Analisis Kebutuhan		
			Satuan	Target	Pagu	Satuan	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				155,160,386,000			158,074,886,000
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	78.72	13,699,998,754	Indeks	78.72	13,699,998,754
		Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	%	100.00	1,439,317,768	%	100.00	1,439,317,768
8.0.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	100.00	250,860,740	%	100.00	250,860,740
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6.00	24,973,200.00	Dokumen	6.00	24,973,200.00
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4.00	141,333,160.00	Laporan	4.00	141,333,160.00
8.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1.00	84,554,380.00	Berita Acara	1.00	84,554,380.00
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	97.00	12,634,477,964	%	97.00	12,634,477,964
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	49.00	12,206,950,364.00	Orang / Bulan	49.00	12,206,950,364.00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Hasil Analisis Kebutuhan		
			Satuan	Target	Pagu	Satuan	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100.00	426,386,400.00	Dokumen	100.00	426,386,400.00
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12.00	1,141,200.00	Laporan	12.00	1,141,200.00
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	40.00	733,076,600	%	40.00	733,076,600
8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4.00	1,264,400.00	Laporan	4.00	1,264,400.00
8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2.00	731,812,200.00	Laporan	2.00	731,812,200.00
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	%	35.00	81,583,450	%	35.00	81,583,450
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50.00	54,196,850.00	Paket	1.00	54,196,850.00
8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1.00	2,074,400.00	Dokumen	1.00	2,074,400.00
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5.00	25,312,200.00	Orang	5.00	25,312,200.00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Hasil Analisis Kebutuhan		
			Satuan	Target	Pagu	Satuan	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	%	97.00	1,060,996,468	%	97.00	1,060,996,468
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9.00	85,992,065.00	Paket	9.00	85,992,065.00
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.00	56,990,630.00	Paket	1.00	56,990,630.00
8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1.00	11,880,000.00	Dokumen	1.00	11,880,000.00
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6.00	871,196,238.00	Laporan	6.00	871,196,238.00
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1.00	34,937,535.00	Dokumen	1.00	34,937,535.00
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	%	100.00	27,397,200	%	100.00	27,397,200
8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1.00	56,100.00	Unit	1.00	56,100.00
8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1.00	27,341,100.00	Paket	1.00	27,341,100.00
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100.00	135,152,000	%	100.00	135,152,000
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.00	20,000,000.00	Laporan	1.00	20,000,000.00
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	114,030,000.00	Laporan	12.00	114,030,000.00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Hasil Analisis Kebutuhan		
			Satuan	Target	Pagu	Satuan	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.01.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1.00	1,122,000.00	Laporan	1.00	1,122,000.00
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	100.0 0	215,772,100	%	100.0 0	215,772,100
8.01.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1.00	41,726,000.00	Unit	1.00	41,726,000.00
8.01.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10.00	136,090,000.00	Unit	10.00	136,090,000.00
8.01.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60.00	25,400,000.00	Unit	60.00	25,400,000.00
8.01.01.1.09.000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2.00	12,556,100.00	Unit	2.00	12,556,100.00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100.0 0	4,292,461,704	%	100.0 0	5,291,461,704
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokume n	2.00	4,292,461,704	Dokume n	2.00	5,291,461,704

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Hasil Analisis Kebutuhan		
			Satuan	Target	Pagu	Satuan	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							
8.01.02.1.01.000 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	500.00	1,274,623,794.00	Orang	800.00	1,607,623,794.00
8.01.02.1.01.000 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4.00	280,048,800.00	Laporan	4.00	280,048,800.00
8.01.02.1.01.000 6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	1.00	37,579,310.00	Dokumen	1.00	37,579,310.00
8.01.02.1.01.000 8	Pembinaan terhadap aktivitas	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan	Dokumen	1.00	601,236,600.00	Dokumen	1.00	934,236,600.00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Hasil Analisis Kebutuhan		
			Satuan	Target	Pagu	Satuan	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Hasil Pembinaan Purnapaskibraka						
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	1.00	1,684,736,600.00	Dokumen	1.00	1,684,736,600.00
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	40.00	414,236,600.00	Orang	40.00	747,236,600.00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	1.00	122,842,148,590	%	1.00	123,341,648,590
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	Dokumen	2.00	122,842,148,590	Dokumen	2.00	123,341,648,590
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Orang	500.00	122,561,705,340.00	Orang	500.00	123,061,205,340.00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Hasil Analisis Kebutuhan		
			Satuan	Target	Pagu	Satuan	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	4.00	280,443,250.00	Laporan	4.00	280,443,250.00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	%	79.00	3,600,889,923	%	79.00	3,933,889,923
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Dokumen	3.00	3,600,889,923	Dokumen	3.00	3,933,889,923

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Hasil Analisis Kebutuhan		
			Satuan	Target	Pagu	Satuan	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	300.00	3,505,698,423.00	Orang	300.00	3,838,698,423.00
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4.00	95,191,500.00	Laporan	4.00	95,191,500.00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	%	100.00	1,224,576,613	%	100.00	1,974,576,613
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	1.00	1,224,576,613	Dokumen	1.00	1,974,576,613
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Orang	3.00	1,163,265,613.00	Orang	3.00	1,913,265,613.00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Hasil Analisis Kebutuhan		
			Satuan	Target	Pagu	Satuan	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4.00	61,311,000.00	Laporan	4.00	61,311,000.00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100.00	8,060,992,648	%	100.00	8,393,992,648
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	3.00	8,060,992,648	Dokumen	3.00	8,393,992,648

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Hasil Analisis Kebutuhan		
			Satuan	Target	Pagu	Satuan	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan Penanganan Konflik Sosial							
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	500.00	1,135,872,648.00	Orang	500.00	1,468,872,648.00
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	4.00	180,220,000.00	Laporan	4.00	180,220,000.00
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	1.00	6,744,900,000.00	Dokumen	1.00	6,744,900,000.00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan

Penelaahan usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan dapat dijelaskan dari tabel berikut

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan
Provinsi Kalimantan Timur

NO	NAMA PEMOHON	MAKSUD USULAN	JUMLAH USULAN SETELAH VERIFIKASI
1	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur	Pengadaan ETLE	50.000.000.000
2	Kodam VI/Mulawarman	Pengadaan Almatsus Penanggulangan Bencana Alam	40.000.000.000
3	Komando Resor Militer 091 / ASN	Peningkatan Jalan dan Drainase, serta Renovasi Berat Asrama Type-K	7.000.000.000
4	Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Dhomber	Renovasi Berat Markas Komando Lanud Dhomber dan Overlay Jalan Komplek Lanud Dhomber	10.000.000.000
5	Korps Brimob Polri Pasukan Brimob II	Pengadaan Sarpras	5.000.000.000
6	Yayasan Kutim Action Center	Program dan Kegiatan Organisasi	150.000.000
7	Yayasan Inovasi Membangun Bontang	Pentingnya meningkatkan partisipasi dan pemahaman generasi muda dalam politik dan demokrasi , Jl. A. Yani (Panahan) RT. 11 No. 45, Provinsi Kalimantan Timur	190.000.000
8	IMASKAB TA 2026	Pengajuan bantuan Hibah Dana Kegiatan Operasional Organisasi	100.000.000
9	Hibah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia	Program dan Kegiatan Organisasi	190.000.000
10	Wanita Ikatan Toraja Balikpapan	Program dan Kegiatan Organisasi (Seminar)	150.000.000
11	Lembaga Mitra Pemuda Kutai	Program dan Kegiatan Organisasi	240.000.000

NO	NAMA PEMOHON	MAKSUD USULAN	JUMLAH USULAN SETELAH VERIFIKASI
12	PAGUYUBAN KELUARGA BOJONEGORO BONTANG (PAKUGORO)	Program dan Kegiatan Organisasi	190.000.000
13	PAGUYUBAN WAROK PONOROGO PERANTAUAN CABANG KUTAI TIMUR	Program dan Kegiatan Organisasi	100.000.000
14	BANK SAMPAH KANAL TIGA	Program dan Kegiatan Organisasi	90.000.000
15	PW MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN TIMUR	Program dan Kegiatan Organisasi	190.000.000
16	IKATAN JAM'IYYAH TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT (IJ'TAMA)	Program dan Kegiatan Organisasi	50.000.000
17	Komunitas Peduli Kemanusiaan dan Sosial Indonesia	Program dan Kegiatan Organisasi	100.000.000
18	Paguyuban Keluarga Besar Banyuwangi (PKBB)	Program dan Kegiatan Organisasi	150.000.000
19	IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH	Program dan Kegiatan Organisasi	200.000.000
20	Mitra Iswara	Perlunya Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Masyarakat Kalimantan Timur	100.000.000
21	PC MUSLIMAT NU KUTAI KARTANEGARA	Pengadaan Kendaraan (Mobil)	250.000.000
22	Persatuan Tuna Netra Indonesia	Program dan Kegiatan Organisasi	83.000.000
23	DPP IKAPAKARTI KALTIM	Program dan Kegiatan Organisasi	500.000.000

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta pencapaian sasaran pembangunan nasional, pemerintah periode 2025–2029 telah menetapkan arah pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

PJMN 2025–2029 merupakan tahapan awal implementasi RPJPN 2025–2045 yang menitikberatkan pada pembangunan fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Visi pembangunan lima tahunan tersebut adalah:

Visi: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

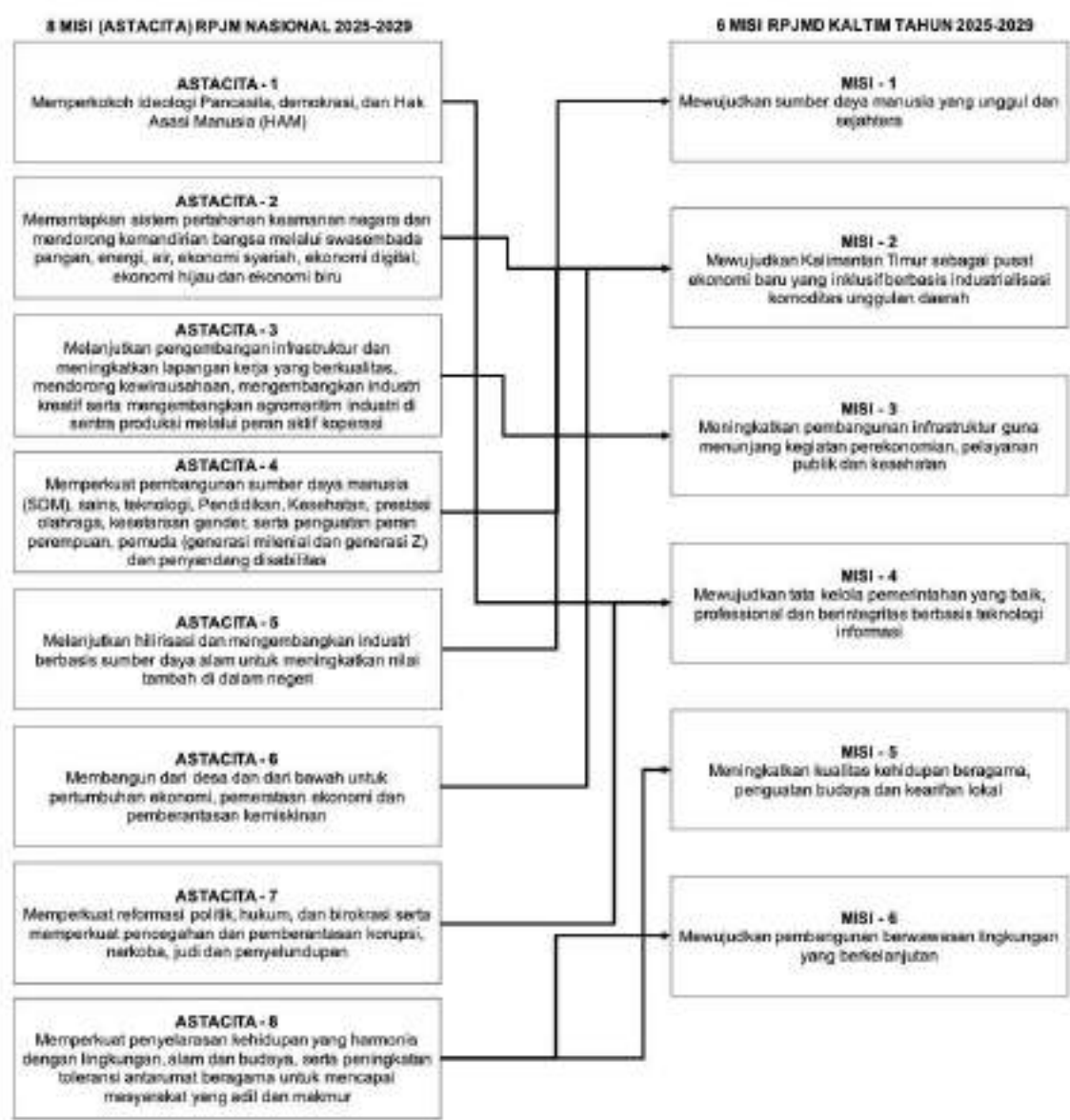
Misi / Arah Kebijakan Nasional (“Asta Cita”):

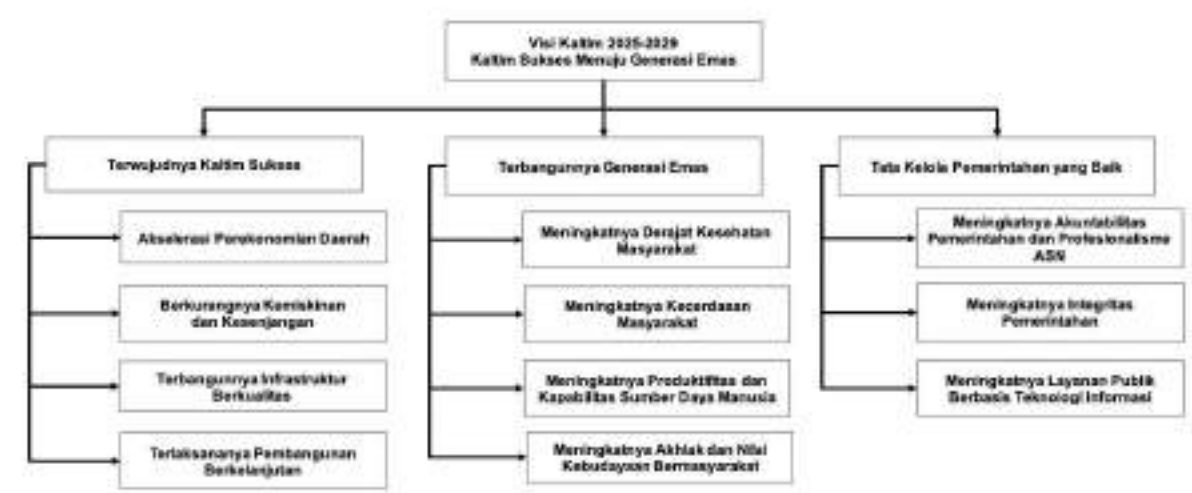
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
2. Memantapkan pertahanan, keamanan, dan kemandirian nasional, termasuk swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas lapangan kerja, kewirausahaan, serta pembangunan infrastruktur strategis.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, produktif, serta berdaya saing global.
6. Memajukan kebudayaan nasional, memperkuat identitas bangsa, dan melestarikan nilai-nilai luhur serta kearifan lokal.
7. Menegakkan sistem hukum yang profesional, independen, dan terpercaya serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
8. Memperkuat diplomasi dan kerja sama internasional untuk mendukung kepentingan nasional dan stabilitas kawasan.

Arah kebijakan nasional tersebut menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan diturunkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, guna memastikan konsistensi, keterpaduan, dan sinergi antara pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional jangka menengah maupun jangka panjang.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Sesuai Rencana Strategis 2025-2029 telah tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu kepada Rancangan Awal RPJMD 2025-2029, maka tujuan yang hendak dicapai, yaitu Tujuan 2: Terbangunnya Generasi Emas dan Tujuan 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik





Tabel 3.2.1.
Tujuan RPD 2024-2026 yang menjadi acuan

TUJUAN	
Uraian	Indikator
Terbangunnya Generasi Emas	Indeks Modal Manusia
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan tujuan 1 RPJMD 2025-2029 yang telah ditentukan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada sasaran **Sasaran 8: Meningkatnya Akhlak dan Nilai Kebudayaan Masyarakat** dan **Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN**

Tabel 3.2.2.
Sasaran RPD 2024 - 2026 yang menjadi acuan

Sasaran	
Uraian	Indikator
Meningkatnya Akhlak dan Nilai Kebudayaan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama
	Indeks Pembangunan Kebudayaan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN	Nilai AKIP
	Indeks Inovasi Daerah
	Sistem Merit
	Indeks Pengelolaan Aset

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 yang menjadi acuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat terlihat pada Tabel 3.2.3. berikut:

Tabel 3.2.3.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	Tujuan 1 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	82,30	82,32	82,34	82,36	82,38	82,40	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,30	78,40	78,50	78,60	78,70	78,80	
		Sasaran 1 Terjaganya harmonisasi di masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia di Kalimantan Timur	6,87	6,89	6,91	6,93	6,95	6,97	
		Sasaran 2 Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Masyarakat	Indeks Kinerja Ormas	67	68	69	70	71	72	
		Sasaran 3 Meningkatnya kesadaran dalam penerapan etika dan budaya politik dalam kehidupan sehari-hari	Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Lembaga Demokrasi	83,02	83,04	83,06	83,08	83,10	83,12	

3.3 Program dan Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka pada Tahun Anggaran 2026 terdapat 6 Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp 155.160.386.000,00.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
 - 2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

- 3) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
 - 4) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
 - 5) Pelaksanaan tugas Paskibraka
 - 6) Pembentukan Paskibraka
3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 2) Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- 3) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Provinsi

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Perkiraan 2027	
			Satuan	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	10	11
8	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				155.160.386.000		43.051.886.000
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	78,72	13.699.998.754	78,72	13.699.998.754
		Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	%	100,00	1.439.317.768	100,00	1.439.317.768
8.0.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	100,00	250.860.740	100,00	250.860.740
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	24.973.200,00	6,00	24.973.200,00
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	141.333.160,00	4,00	141.333.160,00
8.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1,00	84.554.380,00	1,00	84.554.380,00
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	97,00	12.634.477.964	97,00	12.634.477.964
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	49,00	12.206.950.364,00	49,00	12.206.950.364,00
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100,00	426.386.400,00	100,00	426.386.400,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Perkiraan 2027	
			Satuan	Target	Pagu	Target	Pagu
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	1.141.200,00	12,00	1.141.200,00
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	40,00	733.076.600	40,00	733.076.600
8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	1.264.400,00	4,00	1.264.400,00
8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2,00	731.812.200,00	2,00	731.812.200,00
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	%	35,00	81.583.450	35,00	81.583.450
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50,00	54.196.850,00	1,00	54.196.850,00
8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	2.074.400,00	1,00	2.074.400,00
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5,00	25.312.200,00	5,00	25.312.200,00
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	%	97,00	1.060.996.468	97,00	1.060.996.468
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9,00	85.992.065,00	9,00	85.992.065,00
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	56.990.630,00	1,00	56.990.630,00
8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	11.880.000,00	1,00	11.880.000,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Perkiraan 2027	
			Satuan	Target	Pagu	Target	Pagu
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6,00	871.196.238,00	6,00	871.196.238,00
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	34.937.535,00	1,00	34.937.535,00
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	%	100,00	27.397.200	100,00	27.397.200
8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	56.100,00	1,00	56.100,00
8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	27.341.100,00	1,00	27.341.100,00
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	135.152.000	100,00	135.152.000
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	114.030.000,00	12,00	114.030.000,00
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1.122.000,00	1,00	1.122.000,00
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	100,00	215.772.100	100,00	215.772.100
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	41.726.000,00	1,00	41.726.000,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Perkiraan 2027	
			Satuan	Target	Pagu	Target	Pagu
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10,00	136.090.000,00	10,00	136.090.000,00
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60,00	25.400.000,00	60,00	25.400.000,00
8.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2,00	12.556.100,00	2,00	12.556.100,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100,00	4.292.461.704	100,00	5.291.461.704
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	2,00	4.292.461.704	2,00	5.291.461.704
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	500,00	1.274.623.794,00	800,00	1.607.623.794,00
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4,00	280.048.800,00	4,00	280.048.800,00
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya	Dokumen	1,00	37.579.310,00	1,00	37.579.310,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Perkiraan 2027	
			Satuan	Target	Pagu	Target	Pagu
	Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	1,00	601.236.600,00	1,00	934.236.600,00
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	1,00	1.684.736.600,00	1,00	1.684.736.600,00
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	40,00	414.236.600,00	40,00	747.236.600,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	1,00	122.842.148.590	1,00	11.341.648.590
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	Dokumen	2,00	122.842.148.590	2,00	11.341.648.590
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Orang	500,00	122.561.705.340,00	500,00	11.061.205.340,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Perkiraan 2027	
			Satuan	Target	Pagu	Target	Pagu
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	4,00	280.443.250,00	4,00	280.443.250,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	%	79,00	3.600.889.923	79,00	910.889.923
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Dokumen	3,00	3.600.889.923	3,00	910.889.923
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	300,00	3.505.698.423,00	300,00	815.698.423,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Perkiraan 2027	
			Satuan	Target	Pagu	Target	Pagu
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4,00	95.191.500,00	4,00	95.191.500,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	%	100,00	1.224.576.613	100,00	1.974.576.613
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	1,00	1.224.576.613	1,00	1.974.576.613
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	3,00	1.163.265.613,00	3,00	1.913.265.613,00
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4,00	61.311.000,00	4,00	61.311.000,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100,00	8.060.992.648	100,00	8.393.992.648

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKPD 2026			Perkiraan 2027	
			Satuan	Target	Pagu	Target	Pagu
	KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	3,00	8.060.992.648	3,00	8.393.992.648
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	500,00	1.135.872.648,00	500,00	1.468.872.648,00
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	4,00	180.220.000,00	4,00	180.220.000,00
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	1,00	6.744.900.000,00	1,00	6.744.900.000,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah, prioritas, serta program dan kegiatan strategis untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra 2025–2029, serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Renja ini juga menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terukur capaian kinerjanya serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 ini merupakan wujud komitmen kuat dalam mewujudkan visi dan misi daerah, melalui serangkaian program dan kegiatan strategis yang terukur. Keberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen RENJA ini sangat bergantung pada sinergi, koordinasi, dan kerja keras seluruh elemen perangkat daerah serta dukungan penuh dari berbagai pihak terkait.

Dokumen ini dapat menjadi panduan utama yang efektif dan efisien, serta mampu mendorong capaian kinerja yang optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas dan terarah dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah, khususnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, serta memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya Kalimantan Timur yang aman, tertib, harmonis, demokratis, dan berdaya saing.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009